No.58 Jan-Feb 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS 611 .M48

PAJAK SEBAGAI NASIONALISME BARU

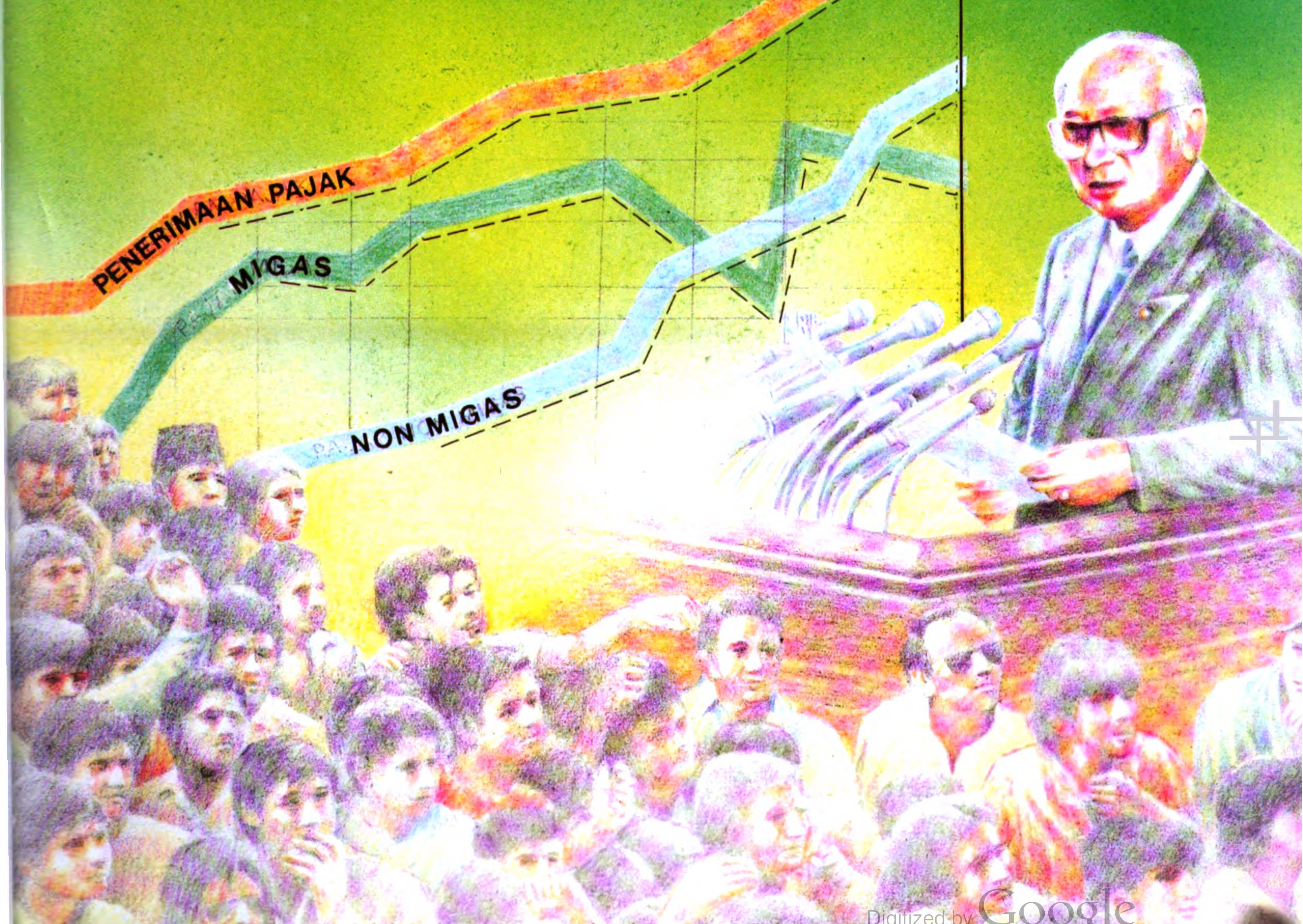

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab :
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/ Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir. Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs. Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny. T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi :
Anang Adenansi
Dr. Alfian
H. Kafrawi MA
Drs. Slamet Efendi Yusuf
Drs. Irsyad Sudiro
Drs. Thomas Suyatno
Ny. Maria Sugiharto
Drs. Wijanarko Puspoyo MA
Drs. Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs. T.A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H.M. Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana :
Drs. Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD. PAND. DV. Noerijathy

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas nakah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI
Menata Hari Ini Meraih Hari Esok

FOKUS
Selama Dua Dasawarsa Pembangunan Telah Mencapai Sasaran; RAPBN 1989/1990 di mata FKP.

LAPORAN UTAMA
Pajak Sebagai Nasionalisme Baru; Habis-habisan Menuju Kemandirian; Presiden Soeharto Serahkan SPT.

LAPORAN KHUSUS
Pengembangan Pers Menjadi Tanggungjawab Semua Pihak; Interaksi Positif Antara Masyarakat, Pers dan Pemerintah Daerah.

NASIONAL
Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dituntut Kejujuran dan Kerja Keras; Istri Dapat Menciptakan Suasana Damai; Kesetiakawanan Sosial Perlu Ditanamkan dan Dikembangkan; Kenyamanan Kerja Perlu Diciptakan.

KOMENTAR
Kedamaian Itu Masih Jauh

ORGANISASI
Memantapkan Gerak Perjuangan Golkar Dalam Kehidupan Politik Kenegaraan; Angin Segar dari Wahono; Iuran Anggota Digalakkan Untuk Menuju Kemandirian Organisasi; GUPPI Tempati Posisi Penting Dalam Proses Pembangunan Bangsa; Pergantian Antar Waktu Ketua Departemen Tani dan Nelayan; Tatap Muka di Timtim dan NTT; FKP Mampu Menciptakan Iklim Demokrasi Pancasila di Lembaga Legislatif; Kesan Baik Parlemen Australia; Meningkatkan Pelayanan Kesehatan; Kualitas Ideologi Kader Golongan Karya.

INTERNASIONAL
JIM II belum berhasil tuntaskan krisis Kamboja; Hun Sen Intelektual, politisi dan Idiolog.

SPEKTRUM
Dialog Pemuda RI & Malaysia; Pemuda, Masa Depan serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

SENI & BUDAYA
Bersama Tjalie Robinson, Pathescope, Voedbal, dan Penjahit Tanah Abang.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

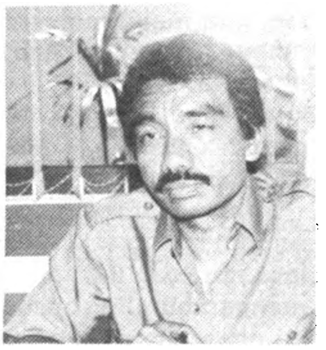

Ir Usman Hasan

Digitized by Google

Menata Hari Ini Meraih Hari Esok

KIAN HARI, terasa berat beban pembangunan ini. Sejak pertengahan Pelita III, tekanan pembangunan mulai terasa berat. Setelah lebih satu Pelita (Pelita II hingga pertengahan Pelita III) kita menikmati pertumbuhan ekonomi di atas 8% setahun, maka pada pertengahan Pelita III kita mulai dihantui beban pembiayaan pembangunan yang berat.

Selama dasawarsa 1970-an, kita masih sepenuhnya mengandalkan pembiayaan pembangunan pada hasil minyak bumi dan gas alam. Pada dasawarsa itu, kita benar-benar menikmati kekayaan alam serta kekayaan yang terkandung di hati bumi Nusantara tercinta ini. Minyak bumi dan gas alam, hasil hutan (kayu), ketika itu merupakan primadona ekspor (penghasil devisa) Indonesia. Lebih 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak tahun 1970 hingga 1979, berasal dari sektor minyak bumi, gas alam dan hasil hutan.

Awal dasawarsa 1980-an, harga minyak mulai merosot, harga kayu juga merosot di pasar internasional, akibatnya penerimaan negara ikut berkurang. Mulailah sektor non minyak dan gas alam menjadi sasaran ekspor. Muncul komoditas ekspor lain sebagai primadona pemasukan devisa, yaitu tekstil. Cukup lama komoditas ini mengambil alih sebagian beban yang dipikul sektor minyak dan gas alam dalam pembiayaan pembangunan nasional. Tetapi ternyata tekanan beban pembangunan semakin tahun semakin bertambah berat, sehingga tak terpikul lagi oleh komoditas yang satu ini. Akibat gencarnya politik proteksionisme yang dilancarkan negara-negara pengimpor, utamanya Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat.

Pertengahan dasawarsa 1980-an, keresahan tentang gencarnya politik proteksionisme, sementara perekonomian dunia yang pada tahun-tahun awal dasawarsa ini sudah mengalami resesi, memuat beban pembangunan bertambah berat lagi. Belum lagi kita mulai melaksanakan kewajiban mencicil hutang luar negeri yang sudah membengkak menjadi sekitar US $ 4 miliar lebih itu. Beberapa jenis komoditas mulai didorong untuk muncul mendampingi tekstil yang sudah mulai tertekan oleh proteksionisme itu.

Muncul komoditas hasil laut, udang, ikan tuna, rumput laut, mutiara dan berbagai komoditas hasil laut lainnya. Ini pun nampaknya belum mampu mengambil alih sepenuhnya beban yang sebelum ini ditanggung oleh minyak bumi dan gas alam.

Persoalan kita sekarang, apapun yang terjadi pembangunan harus terus berlangsung. Pembangunan tak boleh berhenti, karena dampaknya akan sangat merugikan kepentingan nasional. Karenanya segala upaya dilakukan pemerintah untuk menghimpun dana bagi kelangsungan pembangunan. Maka muncullah sektor baru yaitu pajak. Sejak tahun 1984, sesungguhnya upaya menggalakkan pemasukan pajak sudah dilaksanakan. Bahkan telah dikeluarkan Undang-Undang Perpajakan baru yang menyederhanakan sistem perpajakan nasional serta memperkecil jumlah jenis pajak yang ada.

Nampaknya, dari sektor inilah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan dana untuk pembangunan. Memang cukup banyak sumber pajak yang potensial belum tergarap secara baik. Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak dari Rp. 9,1 trilyun menjadi Rp. 11,9 trilyun bukan hal yang mustahil. Tetapi suatu target yang memang bisa dicapai melihat potensi sektor perpajakan masih cukup besar dan belum tergarap dengan baik.

Pernyataan pemerintah bahwa peningkatan merupakan upaya habis-habisan, sebetulnya untuk menyadarkan semua kita sebagai wajib pajak sekaligus sebagai warga negara yang bertanggungjawab, untuk melaksanakan kewajiban nasional kita terhadap kelangsungan pembangunan. Jadi bukan dimaksudkan bahwa dengan upaya habis-habisan ini pemerintah akan memeras rakyat, tetapi justru mengingatkan kita para wajib pajak, bahwa beban pembangunan yang dinikmati sekarang itu, semakin berat. Dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara.

Makna yang paling dalam dari tekad pemerintah itu sesungguhnya adalah untuk menata kehidupan hari ini, agar bisa meraih hari esok yang lebih cerah. Pemerintah hendak menata perekonomian nasional yang sedang berlangsung ini, agar dapat mendorong terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat bangsa ini di hari esok. Singkatnya, upaya pemerintah yang dilaksanakan melalui peningkatan penerimaan sektor pajak, sesungguhnya adalah untuk mempersiapkan serta memperkokoh kerangka landasan pembangunan nasional. Sehingga pada saatnya kita dapat lepas landas dalam pembangunan menuju masyarakat Pancasila yang adil, makmur dan sejahtera. Semoga....!☐

Digitized by Google

Selama Dua Dasawarsa Pembangunan Telah Mencapai Sasaran

Pokok masalah yang selama ini menjadi pembicaraan telah terjawab. Tak lain, naiknya gaji pegawai negeri sipil dan ABRI, seperti yang diutarakan Presiden Soeharto dalam mengantarkan RAPBN 1989/1990 di dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 7 Januari lalu. Pidato Presiden selengkapnya sebagai berikut.

Pidato Presiden di depan anggota DPR

Tahun lalu dalam suasana kehangatan kekeluargaan, kita bersama telah berhasil menyelenggarakan Sidang Umum MPR dengan lancar, sukses dan selamat. Hal itu merupakan wujud dari kukuhnya semangat persatuan dan tebalnya tekad mengembangkan tradisi konstitusional kita. Keputusan Majelis sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat telah menyalurkan aspirasi dan dinamika masyarakat kita, secara terpadu dan terarah dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila. GBHN 1988 yang penuh kesegaran serta wawasan luas, mendasar dan mendalam itu merupakan dokumen konstitusional yang sangat penting untuk penyusunan dan pelaksanaan Repelita V pada umumnya dan APBN tahun anggaran 1989/90 pada khususnya.

Dengan diliputi rasa syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan rasa tanggung jawab sebesar-besarnya, maka pada hari ini, sesuai dengan kewajiban konstitusional Presiden Republik Indonesia dan tradisi yang selalu kita pegang teguh sejak era Orde Baru, saya akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1989/90 sebagai piranti anggaran dalam melaksanakan tahun pertama Repelita V.

Sebelum saya mulai menguraikannya untuk pertimbangan Dewan yang terhormat, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal pokok mengenai Repelita V.

Ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus tahun yang lalu, saya telah memberi penjelasan dalam garis-garis besar mengenai Repelita V. Sekarang izinkan saya menyampaikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai Repelita V itu.

Tahap Penting

Dalam perjalanan perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Repelita V mengandung makna tersendiri.

Repelita V merupakan tahap penutup perampungan tugas dan perjuangan bangsa secara berkesinambungan dalam Pembangunan Jakarta Panjang 25 tahun pertama. Sekaligus merupakan ancang-ancang persiapan memasuki proses tinggal landas, yang akan kita mulai sejak Repelita VI sebagai tahap awal Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua. Karena itu, Repelita V bukan sekedar kelanjutan dan peningkatan segala hasil pembangunan yang telah kita capai selama dua dasawarsa, melainkan juga merupakan tahap penting dan menentukan dalam menutup perjalanan pembangunan nasional di segala bidang, sambil menjembatani awal babak baru tinggal landas. Repelita V adalah babak kritis, yang akan menentukan berhasil tidaknya kita melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Sesuai dengan GBHN 1988, hasil-hasil Repelita V harus berupa pemantapan landasan pembangunan yang kerangkanya telah kita letakkan sampai akhir Repelita IV. Landasan pembangunan itu meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan; yang masing-masing tidak berdiri sendiri melainkan saling memperkuat dalam memantapkan stabiltas nasional dan ketahanan nasional. Untuk itu kita akan melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang diamanatkan oleh GBHN 1988. Karena itu landasan pembangunan yang mantap tadi bukan sekedar untuk memungkinkan berlangsungnya tinggal landas. Akan tetapi, sekaligus harus makin dapat mengembangkan dan memantapkan ciri-ciri suatu negara dan masyarakat Pancasila yang maju, adil, makmur dan lestari.

Pemerintah telah selesai menyusun Rancangan Repelita V yang hari ini juga saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat. Rancangan Repelita V itu disusun secara realistis, dengan melihat secara jernih perspektif perjalanan sejarah bangsa kita dan dengan menimba semua pelajaran berharga dari pengalaman pembanguan selama ini. Keseluruhannya itu tetap kita tempatkan dalam perspektif pandang jauh ke depan, sebagai pencerminan harapan, semangat juang dan wawasan sejarah kita bersama da-

Digitized by Google

lam menuju cita-cita dan arah pembangunan jangka panjang.

Dalam perspektif perjalanan sejarah bangsa, jalan yang telah kita tempuh bersama memang panjang, berat dan penuh pengorbanan. Tidak sedikit rintangan dan hambatan yang telah kita hadapi. Menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang masih ada, kita sebagai bangsa berbesar hati karena dalam keseluruhannya telah dapat mencapai keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Keberhasilan ini menjadi lebih bermakna lagi bila diingat bahwa kemerosotan kehidupan bangsa di segala bidang pernah mencapai titik terendah pada awal lahirnya Orde Baru, Orde Pembangunan. Tidak banyak bangsa yang berhasil keluar dari kemelut besar seperti yang pernah kita hadapi.

Kita bersyukur karena menjelang memasuki Repelita V, pembangunan yang kita laksanakan selama dua dasawarsa telah mencapai berbagai sasaran tiap tahap Repelita. Beberapa di antaranya malahan melampaui sasaran semula, di samping ada pula yang belum tercapai sepenuhnya. Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam alam kehidupan Demokrasi Pancasila telah menjadi bagian integral dan mantap dalam tatanan kehidupan politik dan kehidupan konstitusional kita.

Peletakan kerangka landasan ini sangat dalam maknanya dan jauh jangkauannya untuk kebaikan kehidupan kita semua serta bagi kesinambungan, kemantapan dan kekukuhan perkembangan bangsa. Kita telah berhasil memadukan semua lapisan, golongan, kekuatan dan generasi bangsa dengan dasar, ideologi dan cita-cita bangsa dan negara. Kita telah menyederhanakan kehidupan dan struktur politik. Kita telah memperkaya tradisi konstitusional berkat meningkatnya kesadaran bernegara. Sistem politik yang kita bangun telah memantapkan stabilitas nasional yang penuh dinamika dalam kurun waktu yang panjang. Ini merupakan hasil besar pembangunan politik selama ini.

Kita juga telah berhasil meletakkan kerangka landasan bidang pertahanan dan keamanan yang kita kembangkan dalam rangka ketahanan nasional. ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator pengembangan kehidupan demokrasi pada khususnya dan kehidupan bangsa pada umumnya, telah melaksanakan dwifungsi dengan sebaik-baiknya. Keamanan yang kita tegakkan tetap memberi peluang bagi dinamika dan kreativitas rakyat.

Selanjutnya kita juga menyadari bahwa pergolakan sosial mudah pecah sebagai akibat pertentangan-pertentangan di dalam kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan dan keagamaan. Kerangka landasan bidang sosial budaya yang telah kita bangun, telah mengantar dengan selamat bermacam perubahan, pergeseran dan pembaharuan yang kita perlukan guna mendukung kemajuan bangsa. Kita terhindar dari kegagalan dalam melangsungkan modernisasi yang diperlukan dalam pembangunan, seperti yang dialami oleh sejumlah negara yang sedang dalam tahap awal pembangunannya. Bangsa kita tidak tercabut dari nilai budayanya sendiri; malahan berhasil memperkaya nilai-nilai itu dengan keperluan masyarakat modern, seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar '45. Keanekaragaman kehidupan sosial dan budaya terus mekar, tanpa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga mampu menangkal kekosongan etik, moral dan spiritual yang merupakan kerawanan proses modernisasi.

Kemajuan pembangunan telah membawa perubahan-perubahan cepat dalam masyarakat. Tata nilai berubah, masalah baru timbul dan berbagai kepentingan bermunculan yang tidak selamanya sejalan dan bahkan dapat saling bertentangan. Negara dan masyarakat yang makin maju mutlak memerlukan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hubungan ini kita juga telah meletakkan kerangka landasan bidang hukum melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan kemajuan pembangunan, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Berbarengan dengan peletakan kerangka landasan bidang-bidang ideologi, politik, pertahanan keamanan, sosial budaya dan hukum tadi, kita juga bekerja keras untuk meletakkan kerangka landasan bidang ekonomi. Kerangka landasan ini mutlak kita perlukan dalam rangka mencapai sasaran utama pembangunan jangka panjang, juga merupakan konsekuensi logis dari penetapan bidang ekonomi sebagai titik berat pembangunan jangka panjang.

Sebagai bagian perekonomian dunia, perkembangan ekonomi kita dipengaruhi perkembangan ekonomi dunia. Upaya kita untuk meletakkan kerangka landasan bidang ekonomi tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita kehendaki. Kita dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang timbul dari situasi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kerawanan dan kecenderungan-kecenderungan yang kurang menguntungkan pembangunan kita.

Sukses awal Repelita-Repelita sebelumnya telah dihadapkan pada tantangan dan ujian berat sejak kita

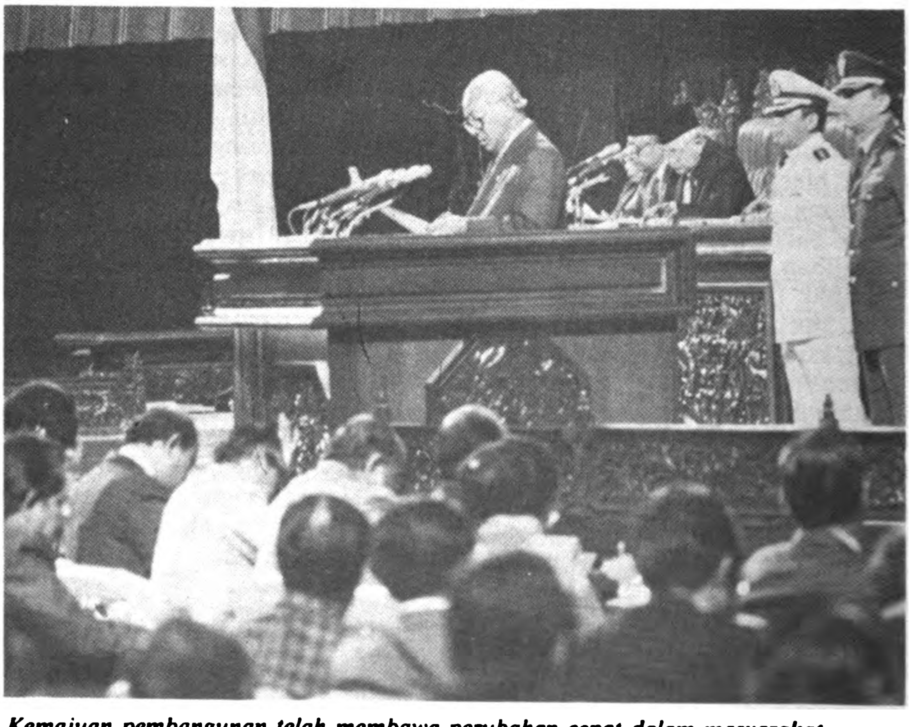

Kemajuan pembangunan telah membawa perubahan cepat dalam masyarakat.

Digitized by Google

Dalam Repelita V agar ditingkatkan kesejahteraan rakyat.

memasuki Repelita IV. Perkembangan dan kecenderungan ekonomi dunia makin membangkitkan semangat kita untuk menggali sumber-sumber baru penerimaan negara dan sumber-sumber baru devisa di luar minyak bumi. Upaya tadi disertai langkah-langkah penghematan, penyesuaian dan pembaharuan di berbagai bidang. Melalui berbagai perubahan struktural, kita telah meletakkan kerangka landasan bidang ekonomi yang makin tangguh dalam meredam goncangan-goncangan ekonomi yang datang dari luar dan berhasil tetap mendorong pembangunan nasional.

Menjelang akhir Repelita IV ini struktur ekonomi kita makin berimbang pada tingkat yang lebih tinggi. Peranan minyak bumi dalam penerimaan negara dan ekspor telah makin berkurang. Peranan swasta dan koperasi dalam kegiatan ekonomi telah bertambah besar. Dunia usaha khususnya dan masyarakat umumnya telah menyesuaikan diri untuk memasuki era pasca minyak dan tahap pemantapan kerangka landasan bidang ekonomi.

Demikianlah perkembangan dan kemajuan yang dapat kita capai menjelang akhir Repelita IV sekarang, yang merupakan kondisi awal bangsa kita memasuki Repelita V.

Tujuan Kembar

Seperti saya kemukakan tadi, lima tahun mendatang merupakan kurun waktu yang penting dan menentukan dalam sejarah perkembangan, pertumbuhan dan pembangunan bangsa kita.

Sebagai tahap persiapan akhir menjelang dimulainya proses tinggal landas, maka Repelita V mengemban tugas yang cukup berat. Berbagai langkah pemantapan, konsolidasi, reorientasi dan pembenahan yang bersifat mendasar di berbagai bidang — terutama di bidang ekonomi — perlu kita rampungkan dalam 5 tahun ini.

Sementara itu kita menyadari, bahwa situasi ekonomi dunia dan situasi moneter dunia tidak begitu menunjang pembangunan kita. Prospeknya tidak secerah kita inginkan. Perkembangannya sulit diterka. Semuanya itu membuat perencanaan dan pelaksanaan Repelita V lebih berat daripada Repelita-Repelita sebelumnya.

Sesuai petunjuk GBHN 1988, ada dua tujuan kembar Repelita V yang harus kita capai, yaitu: pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil; kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Prioritasnya diletakkan pada pembangunan ekonomi, dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Pembangunan sektor industri diarahkan pada industri yang menghasilkan barang untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Semuanya tadi kita bangun dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dari segi peranannya dalam produksi nasional maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Seperti yang saya kemukakan tadi, tugas utama dalam Repelita V adalah menyiapkan lebih lanjut bangsa Indonesia untuk mulai memasuki awal dari tinggal landas. Bersamaan dengan itu, kita harus memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendesak, khususnya masalah kesempatan kerja. Pemantapan landasan mencakup upaya memantapkan sendi-sendi utama pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, keagamaan dan pertahanan keamanan untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan dalam Repelita mendatang.

Untuk itu berbagai sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, sumber-sumber manusia yang diperlukan dipersiapkan, unsur-unsur kelembagaan yang mendukung makin difungsikan dan dikembangkan. Semuanya itu menghendaki kegiatan-kegiatan pembangunan yang makin luas. Dengan masih terbatasnya dana yang dapat kita kerahkan dalam 5 tahun mendatang, hal itu mengharuskan kita menggunakan dana yang ada seefektif mungkin dan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat yang makin luas dalam kegiatan pembangunan.

Tadi saya katakan bahwa GBHN 1988 mengamanatkan, agar dalam Repelita V ditingkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Semuanya itu akan terwujud apabila makin banyak lapisan masyarakat yang melakukan kegiatan yang produktif. Ini berarti harus diciptakan lapangan kerja yang produktif dan kegiatan usaha.

Masalah penyediaan lapangan kerja dewasa ini, dan lebih-lebih dalam 5 tahun mendatang, merupakan salah satu masalah nasional yang mendesak dan harus kita tangani secara mendasar. Angkatan kerja Indonesia selama 5 tahun mendatang diperkirakan meningkat dari 74,5 juta orang menjadi 86,4 juta orang, atau peningkatan sebesar 11,9 juta pencari kerja baru. Berjuta-juta pencari kerja baru ini untuk sebagian adalah anak-anak muda, terdidik dan berada di daerah-

Digitized by Google

daerah perkotaan. Masalah ini sangat jelas memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh karena dapat mempunyai dampak yang luas di bidang sosial ekonomi, sosial politik dan keamanan. Sebab itu dalam Repelita V masalah kesempatan kerja mendapat perhatian khusus.

Dimensi masalah kesempatan kerja besar dan berat. Namun dengan kebijaksanaan yang terpadu dan penanganan yang sungguh-sungguh masalah ini secara bertahap akan dapat di atasi.

Pada tahap pertama, masalah ini perlu ditanggulangi pada tingkat sumber awalnya, yaitu dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Di bidang ini, program keluarga berencana diharapkan dapat menurunkan lebih lanjut laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Berkat pelaksanaan program keluarga berencana yang kita lakukan terus-menerus, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah menurun dari 2,3% pada tahun terakhir Repelita II menjadi 2,2% pada tahun terakhir Repelita III, dan kemudian menurun lagi menjadi 2,1% dalam tahun terakhir Repelita IV. Pada tahun terakhir Repelita V laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun lebih lanjut menjadi 1,8%, sehingga laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun yang akan datang adalah 1,9% per tahun.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk merupakan langkah yang sangat penting untuk memecahkan masalah kependudukan dan tenaga kerja.

Namun langkah itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas manusia dan kualitas hidup yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan sumber daya manusia, yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam era tinggal landas nanti. Langkah-langkah ke arah ini harus kita mulai sejak dini. Untuk itu, tingkat kematian bayi dan anak balita harus diturunkan. Jika pada akhir Repelita IV di antara 1.000 kelahiran hidup ada 58 bayi yang meninggal, maka pada akhir Repelita V nanti kematian itu kita kurangi sehingga di antara 1.000 kelahiran hidup ada 50 bayi yang meninggal. Dalam waktu 5 tahun mendatang, tingkat kematian anak balita juga turun, dari 10 menjadi sekitar 6 anak balita yang meninggal di antara 1.000 orang anak balita. Usia rata-rata orang Indonesia diharapkan meningkat dari 63 tahun menjadi 65 tahun.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa maka mutu pendidikan dan latihan ketrampilan akan ditingkatkan. Dalam 5 tahun mendatang akan makin banyak anak-anak dan remaja-remaja kita yang tertampung pada sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas dan pendidikan tinggi.

Langkah-langkah tadi perlu dibarengi dengan langkah yang sifatnya sangat mendasar ditinjau dari segi peningkatan penyerapan tenaga kerja, yaitu memacu kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja dan sekaligus memantapkan landasan untuk tinggal landas, dalam Repelita V kita harus mampu mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai disertai dengan pemerataan yang makin meluas dan stabilitas yang mantap.

Laju Pertumbuhan

Seperti yang saya kemukakan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun yang lalu, dalam Repelita V ini kita mengambil sasaran laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 5% per tahun. Laju pertumbuhan ekonomi ini saling mendukung dengan laju pertumbuhan di berbagai sektor.

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar rata-rata 3,6% per tahun, dengan laju kenaikan produksi beras rata-rata 3,2% per tahun dalam rangka memantapkan swasembada pangan. Sektor industri diperkirakan tumbuh dengan 8,5% per tahun, dengan subsektor industri nonmigas diharapkan tumbuh dengan rata-rata sekitar 10% per tahun. Pertumbuhan industri nonmigas ini penting untuk mendukung 3 hal yaitu, (1) perubahan ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri; 2) peningkatan ekspor nonmigas dan (3) penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah yang memadai.

Dalam 5 tahun mendatang, peranan sektor industri dalam produksi nasional diperkirakan meningkat dari 14,4% menjadi 16,9%, dan peranan sektor pertanian turun dari 23,2% menjadi 21,6%. Proses ke arah keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri itu juga diikuti oleh proses menuju keseimbangan antara sektor migas dan sektor nonmigas. Apabila dalam tahun 1988 peranan sektor migas dalam produksi nasional adalah 19,8%, maka dalam tahun 1993 menurun menjadi 16,3%. Dengan laju pertumbuhan di berbagai sektor tadi, dibarengi dengan langkah-langkah kebijaksanaan khusus seperti program padat karya dan transmigrasi, diharapkan dapat diserap sebagian besar dari tambahan angkatan kerja yang akan ada.

Dalam suasana keterbatasan dana, penting sekali upaya-upaya untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru dengan biaya yang rendah.

Jawabannya terletak pada pengembangan usaha kecil, usaha tradisional, usaha informal dan koperasi. Sebagian dari penyediaan lapangan kerja seperti yang saya uraikan tadi, justru diciptakan oleh usaha-usaha ini. Usaha-usaha ini memiliki kemandirian dan daya hidup yang tinggi, sangat padat karya dan mampu menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh golongan berpenghasilan rendah dengan biaya yang murah dan terjangkau. Karena peranannya yang sangat penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja, dan kekuatan penyangga terhadap pukulan-pukulan ekonomi dari luar, maka perlu diciptakan iklim yang mendukung prakarsa mereka. Pembinaan oleh aparatur negara terhadap usaha-usaha ini, terutama usaha informal dan usaha tradisional, harus dilakukan dengan sangat bijaksana dan hati-hati agar supaya jangan sampai justru mematikan mereka. Sebaliknya, justru harus membangkitkan prakarsa, swadaya dan perkembangan mereka.

Pembangunan ekonomi sekaligus kita arahkan agar makin menampilkan wujud Demokrasi Ekonomi dan Wawasan Nusantara.

Dalam menyongsong peningkatan pembangunan ekonomi yang makin luas dan berat tetapi penuh harapan, kita harus terus memperluas kesempatan dan tanggung jawab bersama. Kemampuan dan peranan dunia usaha nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi harus terus dikembangkan dengan semangat kebangsaan, kebersamaan dan kekeluargaan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan terus didorong agar menjadi kekuatan ekonomi nasional dan lembaga ekonomi rakyat yang mandiri serta dapat tumbuh dan berkembang dengan akar kuat di masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan struktural tadi jelas diperlukan biaya yang cukup besar. Bagaimanapun mem-

Digitized by Google

bajanya tekad kita untuk meningkatkan pembangunan, namun kita tetap harus bersikap realistis. Bayang-bayang harus tetap sepanjang badan! Dari sekarang kita harus tetap sadar bahwa selama 5 tahun mendatang penerimaan negara dan dana-dana yang dapat kita kerahkan tetap terbatas.

Karena itu kita harus memadukan dua upaya utama secara serentak. Yang pertama adalah mengembangkan sebesar-besarnya sumber-sumber dana pembangunan, terutama yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua adalah meningkatkan setinggi mungkin efisiensi penggunaan dana investasi yang tersedia, baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Juga harus dicegah keborosan dan kemubaziran. Inilah sebabnya mengapa beberapa tahun yang lalu saya mengajak bangsa ini untuk menjadikan efisiensi dan produktivitas sebagai gerakan nasional.

Pemupukan sumber dana untuk membiayai pembangunan akan kita pusatkan pada 3 sasaran pokok yang erat kaitannya satu dengan yang lain. Ketiga sasaran pokok itu adalah: pertama, peningkatan ekspor nonmigas sebagai salah satu sumber penting tabungan masyarakat dalam bentuk devisa; kedua, peningkatan penerimaan dalam negeri Pemerintah, khususnya penerimaan dari pajak; dan ketiga, peningkatan investasi oleh dunia usaha. Ketiga sasaran ini jelas hanya bisa dicapai jika persatuan dan kesatuan nasional kita dayagunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Mengenai peningkatan ekspor nonmigas, maka pada akhir Repelita V nanti penerimaan devisa dari ekspor nonmigas kita usahakan mencapai lebih dari dua kali lipat dari penerimaan ekspor nonmigas pada akhir Repelita IV. Ini berarti kenaikan rata-rata lebih dari 15% setiap tahun. Peningkatan ekspor ini terutama berasal dari peningkatan ekspor hasil-hasil industri.

Dengan peningkatan ekspor kita berusaha mempertahankan neraca pembayaran dalam keadaan yang aman dan makin mantap. Cadangan devisa akan dapat dipertahankan pada tingkat yang aman, yaitu sekitar 6 bulan impor selama Repelita V. Dengan peningkatan ekspor nonmigas dan dengan melanjutkan kebijaksanaan pinjaman luar negeri yang menitikberatkan pemanfaatan pinjaman yang bersyarat lunak dan diperuntukkan hanya untuk proyek-proyek yang memperoleh prioritas tinggi dalam Repelita V, maka Debt Service Ratio (DSR) akan diusahakan turun dari sekitar 35% saat ini menjadi di bawah 25% pada tahun terakhir Repelita V.

Sementara itu, penerimaan dalam negeri nonmigas perlu dinaikkan 3 kali lipat selama 5 tahun, atau peningkatan rata-rata sebesar 23,5% per tahun. Peningkatan penerimaan dalam negeri ini berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, serta penerimaan bukan pajak.

Jika pada tahun terakhir Repelita IV penerimaan nonmigas merupakan hampir 60% dari seluruh penerimaan dalam negeri, maka pada tahun terakhir Repelita V akan menjadi sekitar 76%. Sebaliknya dalam kurun waktu yang sama penerimaan dalam negeri dari migas menurun dari sekitar 40% menjadi 24% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Perkembangan ini merupakan perubahan yang mendasar dalam struktur penerimaan negara menuju ke arah yang lebih mantap.

Tabungan Pemerintah

Dalam pada itu, perhitungan menunjukkan bahwa untuk 2 tahun pertama Repelita V, Tabungan Pemerintah masih akan sangat terbatas. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya jumlah tersebut dapat meningkat dengan cepat, sehingga kebutuhan pembiayaan rupiah bagi pembangunan makin dapat terpenuhi. Apabila pada tahun 1988/89 Tabungan Pemerintah membiayai kira-kira 19% dari kebutuhan dana pembangunan, maka pada tahun 1993/94 Tabungan Pemerintah dapat membiayai kurang lebih 60% dari seluruh kebutuhan dana pembangunan.

Peningkatan peranan Tabungan Pemerintah sebagai sumber dana pembangunan ini merupakan arah baru dalam pembiayaan pembangunan, karena peningkatan peranan tadi terutama disebabkan oleh peningkatan yang pesat dari sumber-sumber penerimaan negara di luar migas.

Dengan terbatasnya dana Pemerintah, maka investasi oleh dunia usaha dan masyarakat pada umumnya harus berperan lebih penting lagi. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 5% per tahun diperlukan investasi sekitar Rp. 239 trilyun selama 5 tahun yang akan datang. Dari jumlah ini sekitar Rp. 107 trilyun atau 45% berasal dari anggaran pembangunan negara, sedang hampir Rp. 132 trilyun atau 55% diharapkan berasal dari dunia usaha dan masyarakat sendiri.

Mencapai sasaran investasi swasta sebesar itu memang merupakan tugas yang cukup berat dan menentukan.

Yang tidak kalah penting adalah peningkatan efisiensi penggunaan dana tersebut. Inti permasalahannya di sini lebih luas, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara menyeluruh di segala bidang.

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara mendasar, mutlak diadakan penyegaran dan penyempurnaan yang terus-menerus dari kelembagaan yang ada, termasuk dilanjutkannya deregulasi dan debirokratisasi. Bersamaan dengan itu mutlak pula peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya insani, karena manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan.

Karena terbatasnya dana yang dapat dihimpun, maka tidak bisa lain, penggunaan dana negara terutama diarahkan pada bidang-bidang yang mendorong dan menggairahkan kemandirian serta partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan. Peranan Pemerintah adalah sebagai pemberi arah, pendukung dan penunjang berkembangnya potensi pembangunan masyarakat; dan bukan sebagai pelaksana utama pembangunan. Dukungan tersebut dilaksanakan antara lain melalui penciptaan iklim yang menggairahkan partisipasi dan swadaya masyarakat umumnya, dunia usaha khususnya. Penciptaan iklim tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi serta melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat.

Itulah yang diamanatkan oleh bagian penutup dari GBHN 1988, yang mengingatkan kita semua bahwa berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat.

Dengan sumber daya manusia yang trampil, kreatif dan bermotivasi tinggi masalah keterbatasan dana seharusnya tidak lagi merupakan kendala laju pembangunan. Karena itu dalam Repelita V, pengembangan sumber daya manusia akan memperoleh perhatian khusus. Upaya ini akan dilaksanakan secara terpadu dan mencakup berbagai bidang, baik aspek jasmaniah maupun aspek ketrampilan dan moral. Upaya-upaya ini mencakup kegiatan yang

Digitized by Google

sangat luas; seperti kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan latihan, sosial budaya dan agama. Program-program di bidang ini akan ditingkatkan keserasian dan keterpaduannya untuk mencapai sasaran bersama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pendayagunaannya melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan merata. Hal ini merupakan salah satu kebijaksanaan pokok dalam Repelita V.

Kerangka kebijaksanaan pembangunan seperti yang saya bentangkan tadi merupakan upaya untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan pemerataan pembangunan, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja produktif yang makin meluas dan merata.

Keseluruhannya merupakan pelaksanaan yang makin meningkat, meluas dan mendalam dari Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Karena itu, pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tersebut akan didukung oleh program-program yang secara langsung menunjang tercapainya pemerataan pembangunan di berbagai bidang seperti penyediaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha. Program-program pemerataan yang telah dilaksanakan dalam Repelita IV akan dilanjutkan dan disempurnakan pelaksanaannya.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan tadi akan dilaksanakan sejalan dan serasi dengan pembangunan di berbagai bidang lain.

Pembangunan hukum diarahkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan; sehingga hukum benar-benar menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong kegairahan, kreativitas dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional. Pertahanan keamanan negara dibangun di atas landasan semangat dan kemampuan perlawanan rakyat semesta dan diwujudkan dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah nasional dan kemerdekaan negara yang berdasarkan Pancasila. Pembangunan pertahanan keamanan yang demikian tadi adalah mutlak. Sebab, pembelaan negara dan kedaulatannya adalah kehormatan tertinggi kita sebagai bangsa; yang juga merupakan hak, kewajiban dan kehormatan setiap warga negara. Tidak mungkin dan tidak boleh kita meminta bantuan orang lain.

Pengalaman bangsa-bangsa lain menunjukkan, bahwa kemajuan besar yang mereka capai terutama berkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu dalam pemantapan landasan pembangunan menuju tahap tinggal landas kitapun harus meningkatkan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penguasaannya kita arahkan untuk memajukan kecerdasan kemampuan bangsa serta kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Peningkatan kualitas kehidupan memerlukan landasan moral, etik dan spiritual; yang akan kita timba tidak habis-habisnya dari agama yang kita peluk masing-masing. Dalam rangka itu kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin kita kembangkan. Dengan demikian, bukan saja terwujud kehidupan rohaniah yang luhur; tetapi juga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila diarahkan agar memberi wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa, sehingga pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan beradab; bukan sekedar pembangunan ekonomi yang dapat bersifat amat materialistis.

Dalam pada itu, menyadari pentingnya peranan wanita dalam kehidupan bangsa, maka kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan akan terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita. Kita menempatkan kaum wanita sebagai Ibu yang akan membentuk watak generasi muda anak-anak bangsa, dan sebagai pejuang pembangunan yang ikut berkiprah dalam berbagai bidang.

Demikian pula, generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional akan ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya serta diarahkan sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.

Selanjutnya, semua upaya pembangunan akan senantiasa dilaksanakan dalam kerangka tercapainya pembangunan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup akan diarahkan agar segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya. Dengan demikian, di samping memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sumber daya alam tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.

Arah Anggaran

Selama 5 tahun mendatang, pengeluaran pembangunan di sub sektor pertanian direncanakan berjumlah sekitar Rp. 11 trilyun. Jumlah ini digunakan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan. Sub sektor pengairan direncanakan memperoleh biaya sekitar Rp. 6 trilyun yang akan digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pengairan, pembangunan jaringan irigasi baru, pengembangan daerah rawa dan pengendalian banjir. Sub sektor energi disediakan biaya sekitar Rp. 10 trilyun, yang akan digunakan untuk pengembangan pusat tenaga listrik, jaringan transmisi, gardu induk serta jaringan induk menengah, gardu distribusi dan jaringan transmisi tegangan rendah, listrik pedesaan.

Bagi sub sektor prasarana Jalan, biaya yang direncanakan adalah sebesar hampir Rp. 12 trilyun. Jumlah ini digunakan untuk peningkatan ribuan kilometer jalan, untuk biaya operasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan jalan baru, pembangunan jembatan baru dan sebagainya.

Sub sektor transmigrasi disediakan dana lebih dari Rp. 2,6 trilyun, yang akan digunakan untuk pemindahan dan penempatan transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan pembinaan transmigrasi.

Dalam pada itu, sub sektor pembangunan daerah, desa dan kota diperkirakan akan menyerap Rp. 10,7 trilyun yang akan dipergunakan untuk membiayai Inpres Dati I, Inpres Dati

Digitized by Google

II, Inpres Desa serta program penataan ruang daerah dan penataan agraria. Sebagian besar dana Inpres ini digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jalan propinsi, jalan kabupaten serta jaringan irigasi.

Untuk sub sektor pendidikan umum dan generasi muda tersedia biaya sebesar Rp. 15,7 trilyun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung SD dan penambahan ruang SD, rehabilitasi gedung SD, pembangunan gedung SMP, pembangunan gedung SMA, pembangunan SMTA Kejuruan, Perguruan Tinggi penambahan ruang kelas serta biaya operasi dan pemeliharaan SD, SMP, SMA dan SMTA Kejuruan dan Perguruan Tinggi, penyediaan buku pelajaran, buku-buku bacaan penataran guru dan peralatan pendidikan. Selanjutnya sub sektor kesehatan disediakan dana sebesar Rp. 2,7 trilyun, yang akan digunakan antara lain untuk peningkatan sarana kesehatan seperti pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi, imunisasi, peningkatan jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan sebagainya.

Sub sektor perumahan rakyat dan permukiman disediakan dana hampir Rp. 6,6 trilyun, yang akan digunakan untuk mendukung sasaran pembangunan rumah sederhana, penyediaan rumah sewa, pemugaran perumahan desa, perbaikan dan peremajaan kota, peningkatan kapasitas air bersih dan sebagainya.

Demikianlah garis-garis besar secara menyeluruh mengenai apa yang kita pikirkan dan apa yang ingin kita kerjakan dalam Repelita V yang akan datang. Seperti pesan GBHN 1988, saya akan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyempurnakan Repelita V itu.

Pada bagian-bagian terdahulu dari pidato ini, saya telah mengemukakan pula kekuatan-kekuatan yang telah berhasil kita himpun dan kelemahan-kelemahan yang masih harus kita perbaiki, sebagai hasil perjuangan pembangunan kita bersama selama 4 Repelita. Saya juga telah mengajak kita semua melihat peluang yang terbuka di hadapan kita dan rintangan-rintangan yang akan menghadang.

Dengan kata lain, seperti tahun-tahun sebelum ini, saya ajak seluruh bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan sikap realistis yang berpengharapan.

Sikap realistis yang berpengharapan itulah yang menjadi pedoman utama Pemerintah dalam menyusun Rancangan APBN 1989/90, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama Repelita V.

Dalam melaksanakan tahun pertama Repelita V, kita perkirakan bahwa kita masih akan menghadapi berbagai rintangan. Untuk menghadapi rintangan-rintangan itu kita memang telah menyiapkan diri. Langkah-langkah penyesuaian sudah dilakukan jauh hari sebelumnya dan hasilnya mulai tampak. Basis struktur ekonomi kita makin luas dan makin dalam, dengan topangan kekuatan dasar perekonomian kita sendiri dalam kesatuan ekonomi nasional. Itulah sebabnya mengapa kita memiliki ketangguhan dalam meredam goncangan-goncangan ekonomi dari luar. Namun jika nanti masih ada pukulan ekonomi dunia, maka akibatnya masih akan terasa berat dan dapat memberikan dampak berarti. Lagi-lagi, sikap kita janganlah menyerah pasrah, tetapi menghadapinya sebagai tantangan.

Kita telah menganekaragamkan sumber-sumber penerimaan negara dan devisa dalam era pasca minyak. Hasilnya cukup membesarkan hati. Namun, peranan migas masih tetap penting, baik terhadap penerimaan negara maupun penerimaan devisa. Bagi kita, tingkat harga minyak bumi yang wajar dan stabil tetap kita perlukan dalam perkembangan perekonomian.

Bersama-sama anggota OPEC lainnya, kita telah berusaha sekuat tenaga agar tercapai tingkat harga minyak bumi yang wajar dan stabil. Baru-baru ini kita merasa lega karena OPEC telah mencapai kesepakatan mengenai tingkat harga dan produksi. Walaupun demikian, dalam merancang APBN 1989/90, dengan sikap kewaspadaan yang tinggi Pemerintah menggunakan perhitungan harga minyak bumi rata-rata sebesar 14 dolar Amerika Serikat setiap barel. Ini sama sekali tidak berarti bahwa kita memelopori harga minyak yang lebih rendah dari sasaran OPEC. Justru sebaliknya, kita berkepentingan agar harga minyak itu tinggi dan stabil. Jika nanti ternyata harga minyak lebih tinggi dari yang kita perkirakan sekarang, tentu akan kita gunakan sebaik-baiknya bagi kelancaran pembagunan.

Di samping harga minyak bumi, menurunnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang kuat di dunia juga memberikan dampak negatif. Susunan hutang luar negeri kita untuk bagian yang cukup besar adalah dalam mata uang asing yang menguat terhadap dolar Amerika itu. Karenanya, melemahnya nilai dolar telah meningkatkan beban pembayaran cicilan hutang beserta bunga, baik dari segi anggaran belanja negara maupun neraca pembayaran.

Perkiraan mengenai perkembangan harga minyak bumi dan nilai tukar dolar mengharuskan kita untuk siap menanggulangi secara bersungguh-sungguh dua masalah berat yang masih akan kita hadapi selama tahun pertama Repelita V, yaitu masalah penerimaan negara dan masalah neraca pembayaran.

Gambaran yang ada menunjukkan bahwa kita akan dapat menanggulanginya, sebagaimana tercermin dalam Rancangan APBN dan perkiraan neraca pembayaran untuk tahun 1989/90 serta dasar-dasar perhitungannya. Gambaran itu memberi pertanda bahwa stabilitas moneter dan neraca pembayaran dapat kita pelihara, dan nilai tukar rupiah akan kita kelola secara realistis dalam rangka sistem mengambang terkendali.

Jerih payah kita semua selama ini untuk meningkatkan penerimaan negara di luar migas telah membawa hasil yang menggembirakan. Penerimaan negara dari sektor nonmigas telah melampaui sektor migas. Perkembangan yang juga membesarkan hati terjadi pada ekspor nonmigas.

Demikian pula, usaha kita selama ini untuk menggali sumber-sumber baru penerimaan devisa telah membawa hasil. Dengan melanjutkan dan terus memperbaiki langkah-langkah itu, kita percaya bahwa dalam tahun anggaran yang akan datang keadaan neraca pembayaran akan tetap dapat kita kendalikan dengan mantap.

Dengan bekerja keras dan berusaha sungguh-sungguh, ekspor nonmigas dan penerimaan devisa dari pariwisata berhasil kita tingkatkan dengan mengesankan. Dan masih dapat kita tingkatkan lagi di masa datang.

Manfaatkan Peluang

Kita memang prihatin atas lambannya gerak pertumbuhan ekonomi dunia. Akan tetapi, dengan pasaran dunia yang sekarang pun sebetulnya masih banyak yang dapat kita garap untuk melipatgandakan ekspor. Kita sangat merisaukan menjamurnya gejala proteksionisme. Namun, hal ini janganlah mengalihkan perhatian kita sendiri dari upaya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada guna

Digitized by Google

meningkatkan nilai ekspor. Kita perlu, misalnya, memanfaatkan sebesar-besarnya fasilitas GSP, karena kita masih cukup ketinggalan dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lain. Pengalaman akhir-akhir ini membuktikan bahwa beberapa negara berkembang, termasuk kita sendiri, dapat mencapai laju pertumbuhan nilai ekspor yang tinggi walaupun dihadapkan pada situasi dunia yang kurang menguntungkan.

Singkatnya, dalam menghadapi tantangan dan rintangan dari luar yang mungkin bermunculan, kita tidak boleh menyerah kalah sebelum berjuang. Kita harus terus giat berusaha untuk meningkatkan daya saing pada setiap mata rantai ekspor, dari produksi, pengemasan, angkutan dan bongkar muat sampai pada pengapalan dan pemasaran ke negara tujuan. Kita harus mengenal, menerobos dan merebut pasar ekspor. Aparatur pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, harus mengembangkan prakarsa dan kegesitan, agar kemampuan kita dikenal dunia. Dunia usaha perlu lebih memahami kebutuhan dan liku-liku pasaran dunia, dan agar gairah ekspor terus meningkat.

Sementara itu secara keseluruhan perkembangan ekonomi kita dalam tahun terakhir Repelita IV menunjukkan tanda-tanda membaik. Tahun 1988 kita lewati dengan perasaan lega, karena mengandung tanda-tanda kebangkitan ekonomi Indonesia. Perkembangan positif ini, Insya Allah, akan dapat kita pertahankan.

Peningkatan produksi dapat berlangsung dengan laju inflasi yang tetap terkendali. Kita memiliki cadangan devisa yang memadai untuk memenuhi 6 bulan kebutuhan impor, jumlah yang cukup aman untuk mengatasi hal-hal tak terduga. Dalam pada itu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terus meningkat. Secara keseluruhan, peningkatan produksi dan investasi berlangsung dalam keadaan ekonomi yang relatif stabil.

Semua perkembangan yang membesarkan hati tadi antara lain adalah berkat kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah di berbagai bidang dan akan tetap terus dilanjutkan. Tujuannya adalah untuk lebih mendorong kegiatan ekonomi, untuk menciptakan iklim yang sehat dan dinamis yang dapat lebih mendorong dan memperlancar kegiatan usaha masyarakat.

Singkatnya, memasuki tahun pertama Repelita V nanti kondisi ekonomi nasional kita cukup mapan, meskipun masih ada unsur-unsur ketidakpastian.

Dengan latar belakang tadi, sekarang perkenankan saya untuk menjelaskan pokok-pokok Rancangan APBN 1989/90.

Dengan mengerahkan segala daya upaya dan memperkirakan secara wajar semua dana yang dapat digali dari dalam maupun luar negeri, Pemerintah mengajukan kepada Dewan yang terhormat penerimaan negara sebesar Rp. 36,5 trilyun lebih dalam Rancangan APBN 1989/90. Ini berarti kenaikan sekitar 26% dari APBN 1988/89. Sesuai dengan prinsip anggaran berimbang yang tetap kita anut, maka pengeluaran negara juga sama besarnya.

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelum ini, penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri.

Penerimaan dalam negeri akan mencapai Rp. 25 trilyun lebih atau naik hampir 16%. Sedangkan penerimaan pembangunan diperkirakan lebih dari Rp. 11 trilyun atau bertambah sekitar 58%. Penerimaan dalam negeri tadi merupakan sekitar 70% dari penerimaan negara, sedangkan penerimaan pembangunan merupakan 30% dari penerimaan negara.

Seperti juga tahun-tahun sebelum ini, pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp. 23 trilyun lebih atau meningkat sekitar 17%. Dengan meningkatnya penerimaan dalam negeri, maka Tabungan Pemerintah akan mencapai Rp. 1,8 trilyun.

Pengeluaran pembangunan akan mencapai sekitar Rp. 13 trilyun atau naik sekitar 47%. Pengeluaran rutin merupakan kurang lebih 64% dari pengeluaran negara, sedangkan pengeluaran pembangunan meliputi 36% dari pengeluaran negara.

Selanjutnya saya akan memberi penjelasan mengenai garis-garis besar penerimaan negara, yang terdiri atas penerimaan migas dan penerimaan nonmigas.

Penerimaan migas diperkirakan sebesar hampir Rp. 8 trilyun atau turun hampir 11% dari APBN yang sekarang. Sedangkan penerimaan non migas akan mencapai Rp. 17 trilyun lebih, yang berarti ada kenaikan 34%. Penerimaan nonmigas tadi akan merupakan hampir 69% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Gambaran tadi menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati; sebab penurunan penerimaan migas sebesar Rp. 1 trilyun diimbangi oleh peningkatan penerimaan non migas sebesar Rp. 4 trilyun.

Angka-angka tadi, di satu pihak, menunjukkan pengaruh harga minyak bumi di pasaran dunia terhadap penerimaan negara. Sedangkan di lain pihak, memberikan pertanda keberhasilan kita dalam memperluas sumber-sumber penerimaan dalam negeri di luar sektor migas.

Mengenai penerimaan negara dari sektor nonmigas, maka sejalan dengan bertambah-baiknya kesadaran membayar pajak dan intensifikasi pemungutannya serta peningkatan kegiatan ekonomi, penerimaan pajak penghasilan diperkirakan akan naik 31% sehingga mencapai hampir Rp. 5 trilyun. Demikian pula, dengan makin dikuasainya cara-cara pembayaran pajak pertambahan nilai maka penerimaan ini akan meningkat sekitar 22% sehingga mencapai hampir Rp. 6 trilyun. Sumber penerimaan lain yang relatif besar adalah cukai, yang mencapai hampir Rp. 1,5 trilyun atau meningkat sekitar 12%; bea masuk sebesar Rp. 1,4 trilyun atau meningkat 33%; dan penerimaan bukan pajak — yang terutama bersumber dari penerimaan dari badan-badan usaha milik negara — berjumlah Rp. 2 trilyun atau naik 62%. Selanjutnya pajak bumi dan bangunan diperkirakan mencapai Rp. 638 milyar atau naik dengan 98%; pajak ekspor Rp. 160 milyar atau meningkat 10%; pajak-pajak lain Rp. 424 milyar yang bertambah dengan 56%; dan laba bersih minyak sebesar Rp. 393 milyar.

Kenaikan-kenaikan itu cukup besar. Akan tetapi telah diperhitungkan secara realistis.

Angka-angka tadi mengungkapkan tekad kita yang sungguh-sungguh untuk memperkuat struktur penerimaan negara. Andalan yang makin besar kita letakkan pada penerimaan nonmigas umumnya dan pajak khususnya. Ini merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan landasan pembangunan yang mantap dalam Repelita V nanti, sebagai ancang-ancang memasuki proses tinggal landas.

Habis-habisan

Pembangunan memang menjanji-

Digitized by Google

kan harapan untuk hidup lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera bagi kita semua. Tekad kita untuk hidup lebih baik harus didukung oleh kesediaan kita memikul tanggung jawab. Di antara tanggung jawab sebagai warga negara yang melekat pada diri kita masing-masing, adalah kewajiban membayar pajak. Kita bergembira bahwa kesadaran membayar pajak telah meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah mereka yang membayar pajak juga bertambah besar.

Namun penerimaan pajak kita masih kecil. Dalam tahun terakhir Repelita IV, penerimaan pajak kita baru sekitar 9% dari produk domestik bruto. Angka tadi masih lebih rendah jika dibanding dengan negara-negara tetangga kita di lingkungan ASEAN yang mencapai antara 13-16%. Pada tahun terakhir Repelita V nanti penerimaan pajak akan kita tingkatkan menjadi 15% dari produk domestik bruto.

Kerena itulah, demi kemajuan dan kesejahteraan kita bersama, marilah kita tingkatkan penerimaan pajak itu sebagai perjuangan habis-habisan!

Keberhasilan kita dalam meningkatkan penerimaan pajak itu merupakan salah satu petunjuk mengenai kesadaran kita bernegara, yang terus menerus kita pupuk selama ini.

Yang perlu dilakukan adalah memperluas wajib pajak, ialah mereka yang memang seharusnya membayar pajak. Sedangkan mereka yang telah menunjukkan kesadaran membayar pajak perlu mendapat suasana berusaha yang menentramkan.

Kita senantiasa waspada, agar upaya memperbesar penerimaan negara tidak mengendorkan semangat masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonominya. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara harus dilakukan secara adil dan wajar, sehingga timbul rasa kesetiakawanan dan kerelaan memikul beban bersama sesuai dengan tanggung jawab warga dalam negara merdeka.

Demikian gambaran umum mengenai penerimaan dalam negeri. Selanjutnya mengenai penerimaan pembangunan, yang berasal dari bantuan luar negeri.

Penerimaan pembangunan ini terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Dalam tahun anggaran 1989/90 nanti direncanakan bantuan program akan lebih dari Rp. 1,7 trilyun, sedangkan bantuan proyek lebih dari Rp. 9,5 trilyun.

Sebagian dari penerimaan pembangunan itu berupa bantuan dalam bentuk devisa yang dapat segera digunakan untuk keperluan impor dan yang menghasilkan dana rupiah, yang penggunaannya khusus untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian kita memperoleh dua manfaat. Yang pertama adalah bertambahnya jumlah devisa kita, yang dapat menambah kuatnya neraca pembayaran. Yang kedua adalah tersedianya dana-dana rupiah yang lebih besar, sehingga pembangunan dapat terus berjalan.

Pada kesempatan ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kita kepada negara-negara dan badan-badan internasional yang telah memberi bantuan yang sifatnya demikian tadi. Seperti telah saya kemukakan pada berbagai kesempatan, bantuan dari luar yang terus kita terima tidak datang begitu saja. Bantuan itu diberikan karena dunia luar melihat kita mengelola dengan baik pinjaman luar negeri, terutama untuk membangun proyek-proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sehingga taraf hidup dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Seterusnya, Saudara Ketua yang terhormat, izinkan saya memberikan penjelasan mengenai pengeluaran negara yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Seperti halnya tahun anggaran sekarang, dalam keadaan keuangan negara yang sangat terbatas, pengeluaran rutin dibatasi dengan mempertajam prioritas dan memperketat langkah penghematan. Prioritas diletakkan pada kegiatan yang mutlak diperlukan guna kelancaran roda pemerintahan dan pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Belanja pegawai akan mendekati Rp. 6 trilyun atau naik sekitar 24% dari anggaran yang sekarang, belanja barang sebesar Rp 1,4 trilyun atau bertambah 10% dan subsidi daerah otonom hampir Rp. 3,6 trilyun atau meningkat 24%.

Seperti telah saya sampaikan ketika mengantarkan Rancangan APBN pada tanggal 7 Januari 1986, sejak tahun 1986 dan untuk tahun-tahun berikutnya pengeluaran rutin yang besar perlu kita gunakan untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri. Hal ini disebabkan karena memang sudah jatuh temponya untuk membayar kembali sebagian besar hutang luar negeri kita; dan juga bagian yang besar pinjaman luar negeri berasal dari negara-negara yang mata uangnya terus menguat. Untuk tahun anggaran 1989/90 kenaikannya mencapai hampir 15%, sehingga pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri akan melebihi Rp. 12 trilyun.

Belanja pegawai meliputi tunjangan beras, gaji, upah, pensiun, biaya makan dan lauk pauk dan lain-lain belanja pegawai di dalam dan luar negeri. Bagian terbesar digunakan untuk gaji, upah dan pensiun. Demikian pula sumbangan untuk daerah otonom sebagian terbesar digunakan untuk gaji, upah dan pensiun pegawai daerah.

Karena kemampuan keuangan negara yang terbatas, gaji pegawai dan anggota ABRI sudah beberapa tahun tidak dinaikkan; walaupun Pemerintah menyadari bahwa harga-harga kebutuhan hidup telah naik sebagaimana tercermin dalam laju inflasi. Tanpa kenaikan gaji serta dalam keadaan ekonomi yang sulit dan keterbatasan kemampuan Pemerintah, dengan penuh kesadaran pegawai negeri tetap tabah. Bahkan tetap berusaha meningkatkan disiplin dan prestasi kerja. Tidak dapat disangkal, berkat pengabdian pegawai negeri itu pula maka kita tetap dapat meraih kemajuan walaupun kita menghadapi ujian dan tantangan berat. Untuk itu, dari mimbar ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang tinggi dan terima kasih saya yang sangat dalam kepada semua pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.

Dewasa ini pun kemampuan keuangan negara masih terbatas. Namun, Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk selalu memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI beserta keluarganya. Kesejahteraan pegawai negeri yang lebih baik akan membuat mereka lebih memusatkan perhatiannya kepada pelaksanaan tugas, yang akan merupakan unsur penting bagi terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.

Gaji Pegawai Negeri

Dalam rangka itu Pemerintah bermaksud menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan anggota ABRI, termasuk pegawai daerah.

Kenaikan gaji itu sebesar 15% dari yang diterima untuk bulan Desember 1988. Kenaikannya mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1989 yang akan datang.

Setahun yang lalu, pada waktu me-

Digitized by Google

nyampaikan Rancangan APBN 1988/89 kepada Dewan yang terhormat, telah saya nyatakan bahwa : "Pemerintah akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh perbaikan atau tambahan gaji dan kesejahteraan pegawai negeri pada umumnya apabila peluang untuk itu benar-benar terbuka sepanjang pelaksanaan tahun anggaran 1988/89 yang akan datang". Kini dapatlah saya sampaikan, dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Pemurah, bahwa berkat usaha keras untuk meningkatkan penerimaan negara maka mulai 1 Januari 1989 gaji pegawai negeri sipil dan anggota ABRI telah mulai dapat dinaikkan dengan 10% dari yang diterima sebelum ini.

Sebagai penghormatan kepada mereka yang telah pensiun dan para purnawirawan ABRI serta jandanya, maka mereka pun akan mendapat kenaikan penerimaan yang sama.

Dengan kenaikan gaji itu kita semua berharap, agar meningkatkan pula pengabdian dan ketekunan kerja setiap pegawai negeri serta prestasi aparatur negara.

Demikianlah, penjelasan saya mengenai pokok-pokok pengeluaran rutin. Selanjutnya saya menyampaikan garis-garis besar pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pembangunan yang berjumlah Rp. 13 trilyun terdiri dari pembiayaan rupiah Rp. 3,6 trilyun, dan bantuan proyek Rp. 9,5 trilyun. Jika dibandingkan dengan APBN yang sekarang, jumlah pengeluaran pembangunan naik dengan lebih dari Rp. 4 trilyun atau sekitar 47%. Suatu kenaikan pengeluaran pembangunan yang cukup besar.

Tekad kita untuk memelihara momentum pembangunan, yang sekaligus memeratakan dan memperluas lapangan kerja dan kegiatan usaha, tercermin dalam penyediaan anggaran pembangunan untuk masing-masing sektor. Karena tidak semua kegiatan pembangunan dilakukan negara, maka sektor-sektor yang mendapatkan anggaran relatif kecil tidak berarti prioritasnya rendah. Sebagai contoh, pembangunan industri yang mendapatkan prioritas tinggi dalam Repelita V, memperoleh anggaran pembangunannya sebesar Rp. 342 milyar dalam tahun anggaran 1989/90, suatu jumlah relatif rendah. Pembangunan industri dilakukan oleh dunia usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi, sedangkan Pemerintah memberikan arah, bimbingan dan pembinaan agar kekuatan industri nasional terus berkembang dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat.

Demikianlah, untuk tahun pertama Repelita V nanti, ada 5 sektor yang mendapatkan anggaran pembangunan masing-masing lebih dari Rp. 1 trilyun. Kelima sektor itu adalah: sektor perhubungan dan pariwisata yang mendapat anggaran pembangunan sebesar Rp. 2,5 trilyun; sektor pertanian dan pengairan sebesar hampir Rp. 2 trilyun; sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebesar Rp 1,6 trilyun lebih; sektor pertambangan dan energi sebesar Rp. 1,6 trilyun; serta sektor pembangunan daerah, desa dan kota sebesar R. 1,5 trilyun lebih.

Pembiayaan pembangunan daerah, desa dan kota digunakan untuk Inpres Dati I, Inpres Kabupaten, Inpres Desa serta program penataan ruang daerah dan penataan agraria. Sebagian besar dana Inpres digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jalan propinsi dan jalan kabupaten serta jaringan irigasi.

Pembiayaan pendidikan umum dan generasi muda digunakan untuk pembangunan gedung SD terutama di daerah transmigrasi dan daerah terpencil, gedung SMP, gedung SMA, gedung SMTA Kejuruan. Juga untuk biaya operasi dan pemeliharaan gedung-gedung SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kegiatan lain yang penting adalah penyelesaian pemindahan dan perluasan kampus beberapa perguruan tinggi.

Pengeluaran untuk pembangunan energi digunakan bagi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang tersebar di berbagai daerah. Juga akan dilanjutkan pembangunan listrik pedesaan, yang meliputi lebih dari 1.800 desa. Kegiatan lainnya antara lain adalah membangun ratusan kilometer jaringan transmisi, pembangunan gardu induk dan gardu distribusi. Pembiayaan sub sektor pertanian digunakan untuk meningkatkan mutu dan usaha intensifikasi, dengan meningkatkan penyuluhan pertanian. Kegiatan lainnya antara lain adalah pencetakan sawah, pengadaan benih, ekstensifikasi tanaman perkebunan dan tambak serta paket pengembangan aneka ikan. Sedangkan kegiatan di sub sektor pengairan antara lain berupa perbaikan jaringan pengairan yang meliputi puluhan ribu hektar sawah, biaya operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan, pembangunan irigasi baru, pematangan rawa, pembangunan dan peningkatan tambak, pemeliharaan sungai, pengamanan wilayah pertanian, perkotaan dan pantai. Pembiayaan pembangunan untuk sub sektor prasarana jalan terutama digunakan bagi keperluan operasi dan pemeliharaan puluhan ribu kilometer jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten, peningkatan mutu jalan dan jembatan, peningkatan mutu ribuan kilometer jalan kabupaten.

Pengeluaran pembangunan sub sektor perumahan rakyat dan pemukiman digunakan untuk pembangunan 70.000 unit rumah sederhana; penyediaan 2.500 rumah sewa; pemugaran 54.000 rumah desa; perbaikan kampung dan peremajaan kota; dan peningkatan penyediaan air bersih. Pembiayaan sub sektor kesehatan digunakan untuk penyediaan air bersih pedesaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi dan pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pambantu dan Puskesmas Keliling. Di sub sektor kependudukan dan keluarga berencana kegiatannya antara lain meliputi peningkatan 4,4 juta peserta KB baru dan hampir 19 juta peserta KB aktif serta peningkatan pendidikan keluarga berencana. Sedangkan di sub sektor transmigrasi akan dilakukan pemindahan dan penempatan 5.000 kk transmigrasi umum, 22.000 kk transmigrasi swakarsa dan pembinaan transmigrasi.

Tahun pertama Repelita V kita masuki dengan tantangan dan ujian berat di hadapan kita. Namun cukup beralasan kiranya untuk mempunyai harapan bahwa kita akan dapat menanggulanginya. Marilah kita bulatkan tekad untuk bekerja keras bahu membahu. Marilah kita pusatkan pikiran, perhatian dan kegiatan kita pada pelaksanaan tahun pertama dan seluruh Repelita V dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Dengan itu kita percaya, bahwa kita akan dapat mencapai tujuan kembar Repelita V beserta rangkaian sasaran-sasaran yang telah saya uraikan tadi.

Dari mimbar ini saya mengajak semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, semua lapisan masyarakat dan semua generasi serta seluruh jajaran aparatur negara untuk bersama-sama memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya demi suksesnya pelaksanaan Repelita V. Juga sekaligus menjaga kesinambungannya dengan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua dalam era tinggal landas. □

Digitized by Google

RAPBN 1989/1990 di Mata FKP

Memperhatikan evaluasi hasil-hasil yang telah dicapai sejak Pelita I sampai dengan pembangunan pada Pelita IV, maka jelas tampak adanya kecenderungan bergesernya peranan industri migas ke industri di luar migas. Hal tersebut makin tampak apabila kita memperhatikan struktur penerimaan negara di dalam RAPBN sejak beberapa tahun terakhir dan semakin dimantapkan pada RAPBN Tahun Anggaran 1989/1990. Ini berarti bahwa pembangunan di bidang industri perlu mendapat perhatian, sejalan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Repelita V. Demikian pandangan FKP yang disampaikan oleh Drs. H. Bambang Wahyudi.

Dalam Repelita V ini prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada: a) Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; b) Sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri hasil pertanian, serta industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Ketimpangan Antar Wilayah

Dalam RAPBN 1989/1990 pembangunan daerah, desa dan kota tergolong pada 5 sektor yang mendapatkan anggaran pembangunan masing-masing lebih dari Rp. 1 trilyun. Ini berarti momentum pembangunan di daerah yang secara keseluruhan merupakan kesatuan pembangunan nasional sebagai perwujudan wawasan nusantara, tetap terpelihara.

Bertitik tolak dari kondisi dan potensi masing-masing wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan serasi serta seimbang sering dihadapkan pada berbagai kendala yang berakibat adanya ketimpangan laju pertumbuhan antar wilayah. Selama ini telah ditempuh berbagai upaya untuk menggerakkan dan meratakan pembangunan. GBHN secara khusus memberikan perhatian kepada daerah yang relatif tertinggal, daerah dan kepulauan terpencil dan daerah perbatasan. Di samping itu perhatian perlu diberikan kepada daerah minus dan daerah padat penduduk. Fraksi Karya Pembangunan menilai bahwa perhatian khusus itu harus secara nyata diberikan pada desa-desa pantai, desa terpencil, terisolasi/desa di daerah perbatasan yang pada umumnya kritis kondisinya sehingga perlu memperoleh penanganan dan pembinaan yang lebih intensif.

Dalam kaitan ini kiranya Pemerintah dapat menjelaskan berbagai kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan. Tidaklah sudah tiba saatnya dikembangkan pola khusus melalui proyek-proyek khusus untuk mempercepat laju pertumbuhan desa-desa, daerah-daerah, wilayah-wilayah yang dimaksud di atas terutama pengembangan Indonesia bagian timur.

Sementara itu di dalam rangka pembangunan daerah, desa dan kota, kiranya pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan untuk mendorong makin berkembangnya kerjasama antara kota dan daerah pedesaan, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam satu wilayah agar mampu tumbuh dan berkembang secara seimbang dan serasi.

Dari masukan yang diperoleh sebagai hasil pemantauan ke daerah, ternyata masalah pemekaran wilayah banyak dibicarakan. Banyak pemekaran wilayah desa, kecamatan dan peningkatan status Kota Administratif yang telah diusulkan ternyata belum ada penyelesaiannya. Demikian pula halnya dengan penyelesaian Rencana Induk Kota.

Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan penjelasan Pemerintah tentang hambatan yang dialami dalam penyelesaiannya serta kebijaksanaan yang ditempuh dalam masalah ini.

Sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pembangunan agar Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah lebih ditingkatkan fungsi dan peranannya dalam mengolah usul-usul yang diajukan oleh daerah-daerah, sehingga dalam Repelita V masalah pemekaran

Dalam rangka pembangunan daerah, partisipasi masyarakat perlu didorong.

Digitized by Google

wilayah dan khususnya peningkatan status Kota Administratif, telah dapat diselesaikan.?

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah perlu terus didorong dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat serta peranan pemerintah daerah dalam pembangunan. Untuk itu, masih perlu ditingkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari seluruh aparatur pemerintah di daerah sekaligus dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun, antara lain dengan menghimpun dana secara tertib termasuk penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Pembangunan daerah pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan sumberdaya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Pembenahan dan peningkatan peranan dan fungsi LKMD perlu ditingkatkan dalam menggerakkan dan memotivasi pembangunan di daerah-daerah.

Fraksi Karya Pembangunan menemukan kenyataan masih terdapat kecenderungan pelaksanaan pembangunan secara terpusat yang disebabkan oleh pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana beberapa sektor masih sepenuhnya ditentukan oleh pusat dan adanya ketentuan yang membatasi keleluasaan daerah dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijaksanaan pembangunan daerahnya serta kemampuan aparatur perencanaan daerah (Bappeda) dan aparat pemerintah lainnya di daerah yang secara kuantitatif dan kualitatif belum memadai.

Masalah terakhir dalam sub sektor pembangunan daerah, kota dan desa yang ingin kami ungkapkan adalah pembangunan daerah Timor Timur.

Sejak dimulainya pembangunan di Daerah Timor Timur, telah banyak usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan pembangunan selama ini telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. Keadaannya sudah memungkinkan untuk diperlakukan seperti daerah-daerah lain.

Fraksi Karya Pembangunan menyambut dengan gembira adanya Keputusan Presiden R.I. No. 62 tahun 1988 yang menyatakan terhitung mulai tanggal 29 Desember 1988 penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Timor Timur diperlakukan sama dengan Propinsi lainnya di Indonesia sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1974. Dalam kaitan ini Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan langkah lebih lanjut yang akan ditempuh oleh Pemerintah agar otonomi daerah di Timor Timur dapat berjalan seperti Propinsi lainnya.

Bagi Bangsa dan Negara Indonesia tanah mempunyai arti yang strategis, karena setiap kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan tanah. Dalam setiap Repelita, masalah tanah selalu memperoleh perhatian serta penanganan sungguh-sungguh. Berbagai program yang menyangkut tanah telah dapat diselesaikan dengan baik, namun dengan luasnya kegiatan pembangunan, banyak masalah menyangkut pertanian yang belum dapat diatasi sepenuhnya.

Sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa sasaran strategis di bidang pertanahan ini adalah terwujudnya tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tepat dan tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup yang harus secara terus menerus diupayakan secara mendasar, antara lain melalui segera diwujudkan Undang Undang tentang Tata Guna Tanah dan Undang Undang tentang Tata Ruang.?

Oleh karena itu dengan terbentuknya Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keppres Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 yang menggantikan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, sangat diharapkan usaha peningkatan penyelesaian masalah pertanahan yang dirasakan semakin rumit dan penumpukan masalahnya dapat ditangani secara tuntas. Fraksi Karya Pembangunan berharap agar selama masa transisi berlangsung selalu diupayakan agar tidak terjadi kekosongan pelayanan penyelesaian pertanahan yang dapat merugikan masyarakat.

Fraksi Karya Pembangunan ingin mempertanyakan sejauhmana upaya Pemerintah dalam usaha penyelesaian struktur BPN dan mekanisme penanganan masalah pertanahan di daerah serta pengoperasiannya agar tidak terjadi kekosongan ataupun tumpang tindih dalam penanganan pertanahan.

Masalah terakhir di bidang Polkam yang akan kami ketengahkan adalah masalah di Sektor Hukum. Kalau selama ini kedudukan hukum sangat sentral dan strategis, maka pembangunan hukum di negara hukum kita ini, tidak lagi hanya sekedar memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, tetapi lebih dari itu menurut petunjuk yang kita peroleh dari hukum dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

Otonomi daerah di Timtim dapat berjalan seperti propinsi lainnya.

Digitized by Google

hukum dasar berisi instruksi untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa hukum adalah alat untuk ketertiban kehidupan negara serta sekaligus alat untuk mendapat kesejahteraan sosial. Jadi bukan semata-mata untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan juga untuk mengukuhkan dan merekayasa kesejahteraan sosial.

Hukum adalah alat untuk tertib dan adil sejahtera atau dengan ungkapan lama "toto tentrem karto raharjo". Tata tentrem merupakan syarat mutlak untuk membangun, mewujudkan tujuan nasional yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, dan tata tentram dijamin oleh hukum.

Fungsi hukum yang dicita-citakan Bangsa Indonesia, ialah bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan yang dapat dirangkum dalam satu kata: pengayoman. Nilai-nilai yang dianut oleh hukum harus merupakan cita-cita hukum bangsa yang bersumber dari Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan hukum seperti diuraikan di atas, memerlukan penyerasian hukum sehubungan dengan perubahan-perubahan mendasar yang dialami bangsa kita dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu penyerasian hukum ini pada hakekatnya berarti, bahwa bangsa kita harus melakukan pembaharuan dalam kehidupan hukumnya dengan antara lain, membentuk suatu tata hukum nasional. Masalah ini mempunyai arti yang sangat penting dan mempunyai nilai yang strategis, karena tata hukum rasional yang diciptakan itu serentak pula merupakan kerangka landasan hukum yang menentukan bagaimana kita hidup dalam negara hukum ini.

Dalam usaha pembaharuan hukum, paling sedikit ada 3 (tiga) hal penting yang perlu mendapat perhatian kita karena merupakan hal-hal yang sangat essensial bagi kehidupan hukum suatu bangsa. Ketiga hal tersebut ialah hukumnya itu sendiri, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat dalam keseluruhannya. Ketiga hal ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta merupakan pilar-pilar yang menopang kehidupan hukum dalam suatu masyarakat, yang dapat diumpamakan dengan ungkapan "tigo tungku sejarangan". Tiga tungku itulah yang menjaga agar periuk tidak miring dan terguling.

Mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional yang diamanatkan oleh GBHN 1988 merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Meskipun Pemerintah dan DPR telah menghasilkan 243 Undang-Undang selama order baru ini, memang belum menunjukkan bahwa bangsa kita telah mempunyai tata hukum nasional sendiri yang lengkap. Seperti diketahui, bahwa suatu tata hukum khususnya yang menyangkut perangkat hukumnya, pada umumnya terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu perangkat hukum pokok dan perangkat hukum sektoral.

Perangkat hukum pokok ini merupakan komponen utama dari suatu tata hukum, karena ia menetapkan dan mengatur prinsip perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara serta menjamin pembinaan sistem tata hukum nasional yang konsisten dan utuh. Perangkat hukum pokok ini termuat dalam Kitab Undang-Undang yang bersifat kodifikatif (Kodifikasi Hukum). Kita memerlukan paling tidak 6 (enam) perangkat hukum pokok, yang terdiri dari hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional, hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dari keenam perangkat hukum pokok ini, kita baru memiliki 1 (satu) perangkat hukum pokok nasional, yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan di kelima bidang hukum lainnya kita masih menggunakan atau sebagai pedoman, perangkat hukum pokok yang berlaku pada masa penjajahan Belanda dulu.

Sejalan, dengan amanat GBHN, maka pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sebagai salah satu "tungku" dalam menegakkan kehidupan hukum ialah pembinaan sikap sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayom, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Berdasarkan pengamatan Fraksi Karya Pembangunan maupun pandangan masyarakat luas, masih dirasakan kelemahan dalam mengemban tugas penegakan hukum yaitu masih adanya sikap tidak taat hukum terutama disebabkan integritas moral dari para penegak hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dalam rangka usaha mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa yang sekaligus merupakan persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, maka diperlukan perhatian dan langkah-langkah konkrit dalam pembentukan lembaga peradilannya agar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara efektif dapat dilaksanakan selambat-lambatnya akhir tahun 1991. Fraksi kami menyadari akan keterbatasan anggaran dewasa ini, namun upaya pembangunan, pembaharuan dan pembinaan hukum harus terus ditingkatkan.

Dalam hubungan ini dan sejalan dengan uraian yang dikemukakan di atas, Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan dari Pemerintah tentang dana yang disediakan dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam tahun anggaran 1989/1990, terutama mengenai: a) Pembentukan kelima perangkat hukum pokok yang merupakan kerangka landasan dalam bidang hukum; b) Pemantapan kedudukan dan peran badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta peningkatan kemampuan dan kewibawaan, pembinaan sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil; c) Persiapan untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyangkut kesiapan badan peradilannya, baik berupa fisik maupun personalianya. Apakah ada pemikiran dan usaha Pemerintah mempercepat saat berlakunya tanpa menunggu tanggal 29 Desember 1991 yang akan datang?

Fraksi Karya Pembangunan menyadari bahwa ketahanan nasional perlu dipupuk terus menerus sehingga secara efektif pelbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan terhadap pembangunan nasional dapat diatasi. Ketahanan nasional yang mantap akan mendorong lajunya pembangunan nasional dan sebaliknya, suksesnya pembangunan nasional berarti meningkatnya ketahanan nasional. Kendati ketahanan nasional kita cukup tangguh serta stabilitas nasional cukup mantap dan terkendali, namun kita harus tetap waspada terhadap pelbagai ancaman dan gangguan yang mungkin akan timbul sebagai akibat keterbatasan kemampuan ekonomi saat sekarang ini.

Digitized by Google

Beberapa bentuk gangguan yang bisa timbul setiap saat dan dapat membahayakan keamanan dan memperlemah ketahanan nasional tersebut antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, ancaman dari ekstrim kiri G 30 S/PKI, ekstrim kanan dan golongan radikal lainnya, gangguan kejahatan dengan kekerasan sebagai akibat dari kesenjangan sosial dan sebagainya. Usaha-usaha pencegahan dan penangkalan baik oleh ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara bersama-sama dengan masyarakat melalui pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa sangat penting.

Atas dasar uraian tersebut di atas dan mengingat perkembangan akhir-akhir ini, Fraksi Karya Pembangunan juga mengharap penjelasan dari Pemerintah tentang kesiap-siagaan dalam rangka penangkalan kejahatan dengan kekerasan dalam masyarakat yang mungkin akan timbul setiap saat sebagai akibat kesulitan ekonomi. Juga tentang kesiap siagaan guna menangkal usaha sabotase yang mungkin dilancarkan terhadap obyek vital strategik dan kemungkinan pembajakan pesawat udara.

Sebagaimana kita ketahui, televisi merupakan salah satu media penerangan yang mampu berfungsi sebagai sarana pembangunan bangsa yang harus dapat membudayakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran seluruh rakyat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai mana yang diamanatkan dalam GBHN 1988.

Sejak beberapa tahun yang lalu TVRI telah menghapuskan penayangan iklan komersial di dalam program siarannya. Sementara itu Pemerintah telah memberikan izin adanya Televisi Saluran Siaran Terbatas guna menayangkan iklan-iklan komersial.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapatkan penjelasan Pemerintah, apakah kebijaksanaan ini akan diperluas pada masa yang akan datang.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 1989/1990, dijelaskan bahwa kenaikan produksi beras rata-rata selama Pelita IV hanya mencapai 3,36% per tahun di bawah target rata-rata sebesar 4% setahun. Walaupun kenaikan produksi tidak mencapai sasaran, namun FKP mencatat bahwa selama 4 tahun terakhir ini kita merasa tak pernah kekurangan pangan khususnya beras.

Kesiap-siagaan dalam rangka penangkalan kejahatan dengan kekerasan dipertanyakan FKP.

Sekalipun demikian masalah yang menarik dan memerlukan perhatian kita semua adalah bahwa prosentase kenaikan produksi beras itu dari tahun ke tahun semakin menurun. Sehubungan dengan hal tersebut di atas FKP menghendaki penjelasan Pemerintah dasar-dasar apakah yang dipakai oleh Pemerintah dalam menetapkan tingkat pertumbuhan produksi beras pada Repelita V mendatang hanya sebesar 3,2% per tahun?

Sependapatkah Pemerintah dengan FKP bahwa dalam rangka pemantapan swasembada pangan perlu pola deversifikasi disesuaikan dengan kecocokan daerah? Selanjutnya adakah perencanaan dan pengarahan dari Pemerintah dalam hal ini?

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 1989/1990, nampak peningkatan produksi dari berbagai jenis produk hasil hutan selama Pelita IV ini. Nilai ekspor produk kayu pada tahun 1987/1988 mencapai US $ 2,6 milyar. Namun dibalik hal yang menggembirakan tersebut FKP merasa prihatin akan terjadinya kerusakan-kerusakan hutan yang makin besar akibat ulah sebagian besar pemegang HPH yang tidak menerapkan Tebang Pilih Indonesia secara konsekuen dan konsisten, masih banyaknya peladang yang berpindah-pindah, seringnya terjadi kebakaran hutan yang cukup luas, pencurian-pencurian kayu, penebangan-penebangan hutan lindung yang serampangan.

Sehubungan dengan itu Fraksi kami ingin penjelasan Pemerintah menyangkut kebijaksanaan dan upaya untuk mengatasi berbagai faktor kerusakan hutan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu Fraksi kami menginginkan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan reboisasi dan penghijauan.

Pada subsektor perikanan FKP mengamati bahwa nelayan masih merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin dan terbelakang. Berbagai upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah melalui KIK/KMKP, Pola PIR, Sistem Rumpon dan sebagainya, masih belum membawa kelompok ini sepadan dengan masyarakat yang lain. Sehubungan dengan itu Fraksi kami ingin mendapatkan penjelasan Pemerintah mengenai pola pembangunan Desa Pantai, yang sekaligus akan dapat meningkatkan kehidupan nelayan.

Sub Sektor Transmigrasi dalam RAPBN 1989/1990 mendapat anggaran yang masih cukup tinggi yakni Rp 261,480 milyar. Sementara ini Fraksi kami mengamati bahwa pelaksanaan program Transmigrasi secara kualitatif masih belum seperti yang diharapkan. Di berbagai daerah Transmigrasi, kondisi tingkat kehidupan dan kesejahteraan Transmigrasi masih memprihatinkan. Sehubungan dengan itu FKP ingin penjelasan dari Pemerintah mengenai strategi, kebijaksanaan serta upaya-upaya yang akan dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu pelaksanaan maupun kualitas kehidupan Transmigran pada tahun-tahun yang akan

Digitized by Google

datang, baik untuk transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa, khususnya berkaitan dengan penempatannya dan tersedianya dana yang terbatas.

Sub sektor Perhubungan dan Pariwisata pada Tahun Anggaran 1989/1990 ini mendapat posisi yang paling tinggi yaitu sekitar 19,2% dari seluruh anggaran pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya tekad yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk menangani prasarana baik darat, laut maupun udara yang antara lain ditujukan untuk mendukung usaha peningkatan jumlah wisatawan. Dengan tersedianya prasarana akan terbuka segala kemungkinan komunikasi, transportasi, terbuka isolasi-isolasi daerah-daerah potensial terpencil, dan gairah investasi akan lebih meningkat lagi. Sementara itu Fraksi kami melihat banyaknya jalan-jalan poros yang rusak berat dan memerlukan perbaikan-perbaikan.

Karena itu sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi kami perlunya pemeliharaan jalan yang terencana dan berjadwal teratur sehingga masa effektif jalan dapat dipertahankan dengan baik? Demikian pula hendaknya pembangunan jalan/jembatan baru disinkronkan dengan pengembangan daerah-daerah wisata.

Deregulasi

Langkah deregulasi bulan November yang baru dicanangkan oleh Pemerintah merupakan gebrakan konkrit di sub sektor perhubungan laut. Armada-armada angkutan pelayaran diberikan kebebasan menjalani/menelusuri trayek-trayek sesuai pilihan mereka, sehingga banyak perusahaan pelayaran yang meninggalkan trayek-trayek mereka semula yang dirasakan tidak menguntungkan, (diharapkan perusahaan pelayaran tidak akan merugi). Dalam kaitan itu FKP menghendaki penjelasan dari Pemerintah kebijakan yang akan diambil untuk mengisi kekosongan perhubungan daerah-daerah yang kemungkinan ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran yang sudah ada. Kiranya dapat dijelaskan pula kebijakan-kebijakan mengenai perhubungan/trayek perintis.

Dalam rangka pelaksanaan strategi pembangunan kita, untuk menciptakan kerangka landasan yang seimbang industri dan pertanian, maka kebijaksanaan industri perlu ditekankan untuk lebih mengembangkan pembinaan pada pendalaman struktur, pengembangan industri kecil dan penguasaan teknologi rancang bangun, rekayasa dan sumber daya manusia. Demikian juga pengembangan industri kecil agar tetap diprioritaskan.

Sementara itu dalam RAPBN tahun 1989/1990 sektor industri direncanakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 341,8 milyar, atau 2,6% dari jumlah anggaran pembangunan. Menurut Fraksi Karya Pembangunan, dana sektor industri tersebut terlalu kecil dibandingkan jangkauan sasaran yang akan dicapai pada akhir Repelita V.

Pengelolaan dana pada sektor pertambangan dan energi khususnya pada sub sektor energi adalah sebesar Rp. 1,4 trilyun. Hal ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah dalam hal penyediaan energi sebagai salah satu pemacu dinamisasi gerak pembangunan dalam berbagai sektor kegiatan maupun kehidupan masyarakat, namun kenyataan yang nampak dalam kehidupan masyarakat masih ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan tingkat keandalan, harga serta kemampuan penyediaan energi itu sendiri termasuk pelayanan yang seyogyanya dinikmati oleh masyarakat. Untuk hal ini Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapatkan penjelasan Pemerintah sejauhmana pemanfaatan anggaran tersebut, agar keluhan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah energi dapat ditanggulangi.

Khusus energi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan Fraksi Karya Pembangunan ingin mengetahui langkah pembinaan yang akan ditempuh terhadap Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) agar mampu mengimbangi kemampuan pengadaan distribusi dan transmisi tenaga listrik serta kemampuan pengelolaan administrasi secara terpadu.

Pertumbuhan Angkatan Kerja yang semula diperkirakan sebesar 3,3% pertahun, ternyata mencapai 4% pertahun. Suatu pertumbuhan yang cukup mengkhawatirkan dan benar-benar harus ditangani secara konsepsional, terutama apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja yang hanya mencapai 3,5% per tahun. Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan dari Pemerintah tentang langkah-langkah penanganan secara terencana dan terpadu yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut, termasuk penanganan terhadap tingkat kesejahteraan dan perlindungannya.

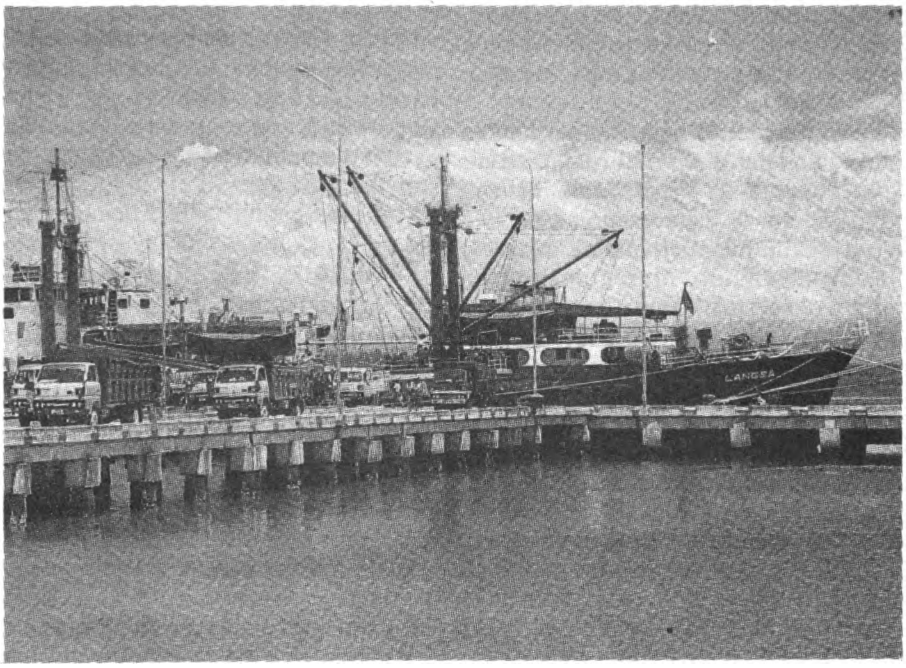

Gebrakan konkrit di subsektor perhubungan laut.

Masih di bidang inbang, perkembangan sub sektor perdagangan, khususnya ekspor dan lebih khusus lagi ekspor nonmigas selama tahun 1988 telah memperlihatkan hasil yang sangat membesarkan hati. Perbandingan angka-angka nilai ekspor pada tahun-tahun 1987/1988 dan 1988/1989 antara migas dan nonmigas, masing-masing US $ 8.841 juta dengan US $ 9.502 juta dan US $ 7.478 juta dengan US$ 11.225 juta, memberikan gambaran bahwa sejak tahun 1973/1974 yang lalu baru pada tahun 1987/1988

Digitized by Google

dan 1988/1989 angka non migas berada di atas migas. Suatu hasil pencapaian yang memang sangat kita harapkan dan usahakan sejak ekspor migas kita mengalami penurunan yang cukup tajam.

Dengan menerbitkan dan memberlakukan Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 di bidang produksi, ekspor, impor, pariwisata dan penanaman modal dan menyusul Keppres 27 tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan, kemudian Paket 27 Oktober 1988 di bidang Keuangan, moneter dan perbankan, serta Paket 21 Nopember 1988, tentang penyempurnaan tata niaga impor dan deregulasi di bidang perdagangan, industri dan pertanian, jelas Pemerintah ingin lebih memantapkan, bahkan lebih meningkatkan lagi keberhasilan ini. Fraksi Karya Pembangunan sepenuhnya sependapat bahwa keikutsertaan, serta kerja keras semua pihak yang terkait, tekad dan harapan itu akan dapat direalisir.

Sehubungan dengan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi tersebut, sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa kita perlu memperhatikan agar: 1) Kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi tetap menangkal praktek ekonomi liberalistis yang bersifat merugikan ketiga pelaku/pilar ekonomi Indonesia yaitu Koperasi, BUMN dan Swasta serta merugikan kepentingan rakyat banyak; 2) Kebijaksanaan tersebut tetap dalam rangka mengembangkan perekonomian Indonesia dan memperkuat pelaksanaan demokrasi ekonomi sesuai dengan jiwa/semangat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; 3) Lebih meningkatkan lagi koordinasi antar instansi terkait baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tercapai keterpaduan antara bidang produksi, perdagangan dan konsumsi demi tercapainya tujuan deregulasi dan debirokratisasi tersebut.

Dalam hubungan ini Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapatkan penjelasan: Apakah langkah-langkah untuk menetapkan dan memberlakukan Paket-paket Kebijaksanaan ini, yang pada dasarnya merupakan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi, akan diteruskan lagi bahkan terpolakan, sehingga akan dapat memberikan jaminan terhadap konsistensinya. Untuk kepentingan yang terakhir ini, sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa sudah waktunya untuk menuangkan berbagai kebijaksanaan itu dalam bentuk Undang-undang, sehingga lebih mengikat, lebih langgeng dan menjamin kepastian hukum serta kepastian berusaha bagi semua pihak.

Potensi Pariwisata.

Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal baik Dalam Negeri (PMDN) maupun Luar Negeri (PMA) sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV menunjukkan angka yang menggembirakan. Namun demikian Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa hal tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat semakin besarnya kebutuhan dana pembangunan yang dibutuhkan.

Dalam kaitan ini, Fraksi Karya Pembangunan masih melihat bahwa kegiatan promisi investasi untuk menarik investor, terutama investor Luar Negeri masih sangat kurang, khususnya negara-negara industri maju Eropa dan Skandinavia serta Negara-negara Timur Tengah, sedangkan potensi modal yang tersedia di Negara-negara tersebut cukup besar. Dapatkah Pemerintah menjelaskan peningkatan usaha-usaha yang telah dilakukan dengan dukungan anggaran yang diperlukan?

Di samping itu, menyangkut kegiatan penanaman modal masih terlihat adanya produk-produk peraturan antar Departemen/Lembaga yang tidak sinkron, seperti SK Menteri Parpostel No. KM.108/PMMT 1988 tanggal 17 September 1988 dengan Keppres No. 55 Tahun 1977 tanggal 3 Oktober 1977 dan SK Ketua BKPM No. 10/SK/1985 tanggal 6 Mei 1986. Hal tersebut menimbulkan in efisiensi bahkan pada gilirannya akan menjadi penghambat.

Komitmen ideologis kita menyebut bahwa usaha nasional terdiri dari usaha negara, usaha swasta dan koperasi. Selanjutnya melihat perkembangan perkoperasian kita, dari segi peningkatan jumlah koperasi dari tahun ke tahun memberikan kesan yang cukup menggembirakan. Namun jika dilihat dari kemampuan dalam mengikuti tuntutan pasar dan konsumen, perkembangan ini masih belum seperti yang diharapkan. Kita semua menyadari bahwa koperasi belum mampu mengimbangi kemampuan dari kedua pelaku ekonomi lainnya.

Dalam kaitan ini Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan antara lain bahwa hingga kini, kita terlalu banyak berbicara koperasi sebagai Badan Usaha saja, bukan pada pelaksanaan koperasi sebagai sistem ekonomi. Di samping itu beberapa ketentuan tentang perkoperasian kita dirasakan sudah tidak mampu lagi mengikuti gerak laju pertumbuhan dunia usaha. Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan dari Pemerintah apakah Undang-undang Perkoperasian kita saat ini masih dianggap relevan dalam memenuhi tuntutan tersebut.

Pada beberapa kesempatan, Pre-

Digitized by Google

siden Soeharto menganjurkan agar koperasi diberi kesempatan untuk ikut memiliki saham di Perusahaan Swasta yang besar. Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa hal tersebut dimaksudkan agar lambat laun jiwa koperasi itu mewarnai tumbuh perusahaan-perusahaan swasta, sehingga akhirnya pelaku-pelaku ekonomi kita memiliki jiwa koperasi sesuai dengan makna Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Dalam kaitan ini Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan, belumkah Pemerintah menganggap perlu menelorkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan supaya perusahaan-perusahaan swasta memberi kesempatan pemilikan sebagian sahamnya kepada koperasi.

Dalam upaya membantu usaha kerajinan rakyat dan industri kecil dilakukan dengan meningkatkan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya, juga dalam upaya memberi kesempatan koperasi untuk berperan lebih besar dalam kegiatan perekonomian nasional, koperasi diberi peluang untuk bekerjasama dengan swasta baik itu dengan swasta dalam negeri dalam bentuk PMDN dan dengan swasta asing dalam bentuk PMA. Dalam kaitan ini Fraksi Karya Pembangunan ingin mengetahui, sejauhmana kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mencegah adanya kerjasama yang semata-mata didasarkan atas keinginan untuk memanfaatkan fasilitas kemudahan yang diberikan kepada koperasi yang menyebabkan kerjasama tersebut akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui muara dari semua usaha pembangunan kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam bidang sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan.

Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah, yang walaupun dalam situasi keuangan negara yang terbatas masi secara konsisten menempatkan Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada skala prioritas yang tinggi.

Pendidikan

Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran pendidikan adalah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, sebagai modal utama pembangunan yang kreatif dan berkepribadian kuat disertai penguasaan pengetahuan dan teknologi, agar mampu meneruskan pembangunan dimasa yang akan datang. Kiranya Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa pendidikan pada hakekatnya tidak hanya untuk menimba ilmu pengetahuan saja, tetapi dalam arti luas adalah mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas agar mampu menyelesaikan problema masa datang, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sasaran konsepsional telah tertuang dalam GBHN, namun secara operasional tampaknya keterpaduan itu masih belum terwujud.

Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan segera dapat tersusunnya perencanaan pendidikan yang dikaitkan dengan perencanaan tenaga kerja di masa datang.

Selanjutnya Fraksi Karya Pembangunan berpendapat agar mulai sekarang Pemerintah mempersiapkan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan usul, saran dan kondisi pembahasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, sehingga Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang akan datang dapat segera dilaksanakan.

Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa perencanaan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang dipusatkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, serta perluasan sekolah menengah dalam rangka perluasan wajib bejalar sampai dengan sekolah menengah tingkat pertama. Dalam kaitan ini Fraksi Karya Pembangunan ingin mempertanyakan kepada Pemerintah sampai sejauhmana kesiapan untuk merealisir rencana tersebut. Apa sasaran yang ingin dicapai dalam tahun anggaran ini dan tahun-tahun anggaran berikutnya selama Repelita V. Sudahkah proyek-proyek tersebut mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan.

Fraksi Karya Pembangunan menyadari sepenuhnya bahwa menggerakkan pembangunan di sektor pendidikan memang sarat dengan permasalahan yang rumit, apalagi kalau harus dilakukan dalam keadaan anggaran yang serba terbatas dewasa ini. Namun kami yakin bahwa dengan ketepatan alokasi anggaran yang tersedia pada titik strategis, tentu akan mampu menjawab tantangan yang dihadapi itu. Dalam hal ini Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa program-program di sektor pendidikan tersebut hendaknya sudah harus mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjangnya, sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Kiranya Pemerintah sependapat dengan Fraksi kami, bahwa keberhasilan mutu pendidikan tidak mungkin dilepaskan dan bahkan sangat dipengaruhi oleh kondisi para tenaga pendidik/Guru, sehingga peningkatan mutu dan kondisi sosial ekonomi para Guru perlu mendapat prioritas dalam peningkatannya. Masalah-masalah yang belum terpecahkan secara tuntas dalam Repelita IV dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu antara lain masalah kekurangan Guru Sekolah Dasar di daerah-daerah transmigrasi dan daerah terpencil dan belum diangkatnya ratusan ribu lulusan SPG DAN SGO. Pada tingkat pendidikan menengah, yang masih menjadi masalah adalah masih adanya kekurangan Guru Ilmu-ilmu matematika, fisika, kimia, biologi di satu pihak dan kelebihan guru ilmu-ilmu sosial dan kependidikan di lain pihak.

Pengembangan pendidikan tinggi selama Repelita IV ditujukan pada peningkatan mutu, perluasan kesempatan belajar dan pengembangan sistem serta peningkatan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya Pancasila. Upaya-upaya tersebut perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, khususnya dalam peningkatan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang menjamin kebebasan akademik bagi sivitas akademikanya, termasuk mahasiswa.

Sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pembangunan dalam hal ini? Selanjutnya apa upaya-upaya yang akan dilakukan guna mencapai sasaran di atas.

Dalam hal perubahan sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi yang kini dibagi menjadi tiga rayon, Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan apakah yang diharapkan Pemerintah dengan adanya pembagian di atas. Dihapuskannya PMDK dan Sipenmaru, yang baru saja diputuskan oleh Pemerintah, menimbulkan bermacam-macam reaksi di dalam masyarakat luas. Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan bagaimana cara yang akan ditempuh untuk dapat menjaring calon-calon mahasiswa

Digitized by Google

yang pandai dan berbakat.

Kiranya Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa dalam pemantapan kerangka landasan untuk proses tinggal landas memerlukan tenaga kerja di bidang IPTEK yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan berapa jumlah sarjana yang siap pakai yang kita miliki sekarang, berapa di antara mereka yang masih menganggur, berapa banyak target yang direncanakan pada akhir Tahun Anggaran 1989/1990, dan berapa target yang direncanakan pada akhir Repelita V? Bagaimana pula perbandingannya dengan negara-negara ASEAN lainnya?

Penelitian merupakan bidang yang penting untuk memacu lebih cepatnya laju pembangunan khususnya di bidang industri. Bagaimana pendapat Pemerintah dalam hal ini, khususnya tentang konsepsi penahapan penyiapan tenaga peneliti yang profesional pada tiap-tiap Tahun Anggaran selama Repelita V. Sampai sejauh mana usaha-usaha pengembangan IPTEK dan sarana penunjang serta prioritasnya sesuai dengan tahap pembangunan pada Pelita V.

Kita patut bersyukur, bahwa kesadaran masyarakat untuk turut mengambil bagian yang besar dalam mengembangkan kebudayaan nasional dan kesenian telah semakin berkembang.

Berbagai penampilan budaya dan seni daerah ternyata telah mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Fraksi Karya Pembangunan sependapat dengan Pemerintah bahwa kebudayaan kita yang mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut perlu terus dipelihara, dibina dan dikembangkan. Telah banyak kita temukan berbagai peninggalan budaya dan seni dari bumi dan lingkungan masyarakat kita, namun masih lebih banyak lagi kekayaan budaya dan seni yang masih tersimpan di dalamnya. Berbagai peninggalan masa lalu masih merupakan tantangan untuk digali dan diolah bagi pengembangan budaya di masa yang akan datang. Dalam rangka melestarikan kebudayaan khususnya yang menyangkut pelestarian berbagai peninggalan kuno, masih diperlukan upaya peningkatan pengamanan dan perawatannya.

Dalam kaitan di atas Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapat penjelasan dari Pemerintah tentang berbagai upaya dan langkah-langkah yang akan ditempuh pada tahun 1989/1990 dan tahun-tahun berikutnya selama Repelita V dikaitkan dengan terbatasnya anggaran Pemerintah.

Pemuda & Olahraga

Pembinaan Generasi Muda diarahkan untuk mendorong hadirnya Pemuda-Pemuda Indonesia yang memahami tanggungjawabnya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, lahirnya kader-kader bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang mantap, bermoral tinggi, memiliki disiplin nasional, kreatif, memiliki rasa tanggung jawab, sifat kemandirian, memiliki semangat patriotisme dan idealisme yang tinggi, mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mendukung peningkatan kualitas partisipasi Generasi Muda dalam pembangunan bangsa.

Dalam kaitan ini Fraksi Karya pembangunan ingin mempertanyakan kepada Pemerintah sejauhmana efektivitas pembinaan Generasi Muda dalam pembentukan kepribadian tersebut, baik ditingkat pusat maupun daerah dengan pola anggaran sektoral.

Berbicara mengenai olahraga, bagaimana konsep Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara terpadu dan terinci mulai dari pembibitan, pemupukan dan peningkatan prestasi, termasuk pengangkatan tenaga guru dan tenaga pelatih, serta sarana dan prasarananya.

Sebagaimana kita sepakati bersama salah satu aspek dasar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pembangunan kesehatan masyarakat. Meskipun keadaan kesehatan dan sosial dari rakyat kita setelah berlangsungnya Pelita I sampai dengan Pelita IV selalu meningkat, namun Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta banyak ditemukannya penyakit-penyakit menular yang meluas dan mengganggu kesehatan rakyat, yang mengakibatkan terganggunya pula peningkatan produktivitas masyarakat yang justru tengah dibutuhkan dalam menyongsong kondisi tinggal landas, maka Fraksi Karya Pembangunan berpendapat pelayanan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Diharapkan di dalam Repelita V ini penanggulangan secara mendasar melalui perletakan kerangka landasan pelaksanaan program di bidang kesehatan secara menyeluruh dan terpadu dapat lebih ditingkatkan.

Sejauhmana efektivitas generasi muda dalam membentuk kepribadian.

Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa selama Pelita I sampai Pelita V tampaknya program-program kesehatan dilaksanakan berdasarkan dana yang tersedia dan bukan berdasarkan kebutuhan yang ada. Mengingat dana Pemerintah yang terbatas, Fraksi Karya Pembangunan ingin penjelasan upaya-upaya yang di-

Digitized by Google

tempuh Pemerintah kaitannya dengan dana yang terbatas dalam rangka mempercepat terwujudnya kesehatan masyarakat tersebut.

Sejalan dengan rencana Pemerintah untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan pemerataan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Upaya pemerataan pelayanan kesehatan melalui berbagai prasarana dan sarana, dalam pelaksanaannya masih perlu didukung dengan koordinasi secara lintas sektoral serta pengembangan partisipasi masyarakat yang semakin luas, khususnya partisipasi dari kaum wanita. Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan melalui Posyandu merupakan wadah yang cocok, sehingga sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya pembangunan apabila perhatian khusus harus diutamakan pada penegakkan mutu pelayanan Posyandu, jumlah dan frekuensi pelayanan serta pemerataannya.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan dalam kaitannya dengan penambahan jumlah dokter spesialis yang dirasa masih sangat kurang dan pengadaan dokter-dokter spesialis di pelosok-pelosok pedesaan, Fraksi Karya Pembangunan ingin menanyakan perencanaan Pemerintah dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis serta pemerataan penempatan dokter-dokter spesialis tersebut ke daerah.

Ketrampilan tenaga paramedis perlu lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam kaitan ini, Fraksi Karya Pembangunan dapat memahami langkah pengiriman tenaga paramedis keluar negeri, yang ditempuh oleh Pemerintah, namun hendaknya hal tersebut jangan sampai mengganggu/mengurangi jumlah tenaga paramedis terampil yang bekerja di dalam negeri. Selanjutnya Fraksi Karya Pembangunan ingin mempertanyakan kepada Pemerintah kesiapan secara konsepsional dan terpadu mengenai rencana pengiriman paramedis tersebut?

Pelayanan kesehatan masyarakat juga mengandung makna terjaminnya pengadaan dan pengendalian obat dengan mutu dan harga yang terjangkau masyarakat luas yang membutuhkannya. Kebijaksanaan Pemerintah akan memberikan harga banderol pada obat-obat yang dijual sangat

Upaya pemerataan pelayanan kesehatan melalui berbagai sarana.

melegakan masyarakat karena dengan demikian masyarakat akan lebih tahu dan tidak merasa ditipu mengenai harga obat tersebut. Kecuali itu kebijaksanaan Pemerintah tentang obat essensial perlu lebih dipertegas pelaksanaannya, sehingga masyarakat akan lebih mudah memperoleh obat-obat yang murah sesuai kemampuannya.

Di samping itu sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa pengobatan secara tradisional dan obat-obatan tradisional perlu mendapat perhatian dan digali mengingat hal tersebut tetap berkembang dalam masyarakat dan dirasakan manfaatnya di masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Pelayanan kesehatan masyarakat akan menjadi lebih berarti lagi apabila pengawasan terhadap makanan dan minuman lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat benar-benar terlindung dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Kasus lemak babi telah memberikan pelajaran bagi kita semua akan pentingnya pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman tersebut yang dilakukan dengan tertib dan teliti serta secara terus menerus oleh lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk.

Dalam kaitan ini, Fraksi Karya Pembangunan ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah tentang langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan serta pengawasannya.

Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana sebagai usaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang diharapkan mampu menghindarkan terjadinya ledakan pertumbuhan penduduk yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan kita, perlu didukung oleh kesadaran masyarakat sendiri tentang Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, serta kesadaran dan penghayatan masyarakat akan manfaat dari program KB itu, baik bagi diri dan keluarga juga untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan, sehingga masyarakat dalam melaksanakan program tersebut tidak lagi menggantungkan hanya atas pembiayaan Pemerintah tetapi atas inisiatif dan kemampuan sendiri, sehingga tekad kita untuk menjadikan KB sebagai gerakan dapat terwujud.

Dalam kaitan ini Fraksi Karya Pembangunan ingin mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah untuk meningkatkan usaha ini, mengingat bahwa hasil yang kita capai dalam Pelita IV belum mencapai target yang diharapkan.

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tidak dapat terlepas dari peran kaum wanita. Wanita sebagai sumber daya manusia mempunyai peran ganda. Di satu pihak wanita diharapkan sebagai penopang tata nilai dalam pelestarian nilai-nilai luhur bangsa, pembina kehidupan dan kesejahteraan ke-

Digitized by Google

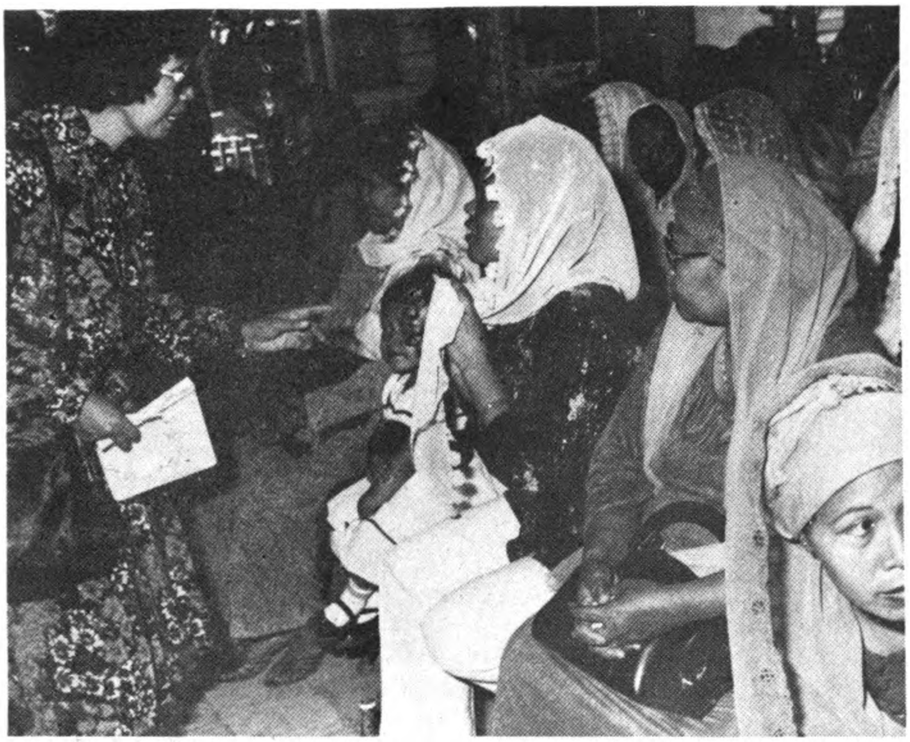

Tanggungjawab wanita dalam pembangunan perlu ditumbuhkembangkan.

luarga. Wanita berperan sebagai pendidik, pembentuk watak dan pembina bakat anak menuju terwujudnya generasi penerus yang berkualitas. Dipihak lain, wanita dalam kedudukannya sebagai insan pembangunan adalah juga pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan kedua peran tersebut harus mampu dilakukan secara seimbang dan serasi tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya. Peningkatan peran dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan perlu terus ditumbuhkembangkan, khususnya dalam peningkatan kualitas peran wanita dalam pembangunan.

Sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa untuk mencapai peningkatan peranan itu, pendidikan dan ketrampilan wanita secara konsepsional harus terus ditingkatkan, yang dilaksanakan secara konsisten.

Fraksi Karya pembangunan melihat kesungguhan Pemerintah dalam meningkatkan peranan wanita itu, tampak dari semakin meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan peranan wanita, yang diharapkan akan terus ditingkatkan untuk masa-masa mendatang.

Sebagaimana diamanatkan dalam GBHN, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya mengandung arti bahwa pembangunan yang kita laksanakan harus berjalan secara seimbang antara pembangunan dibidang material dan pembangunan dibidang mental spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan disektor agama menjadi penting untuk ditingkatkan.

Pada hakekatnya peranan Pemerintah dalam pembangunan sektor agama adalah memberikan pelayanan serta pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat bagi seluruh penduduk, yang dijamin haknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Wujud nyata dari hasil pelayanan dan pengaturan itu ialah terciptanya rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara disertai kerukunan yang mendalam sebagai satu bangsa. Sikap hidup yang penuh toleransi itu telah mencipta dan menjadi satu landasan bagi ketahanan nasional kita. Sementara itu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada gilirannya diharapkan mampu mendorong setiap insan untuk meningkatkan moral, mengendalikan diri, dan selalu berbuat baik serta menjauhi perbuatan yang tidak terpuji.

Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat hendaknya semua pihak berusaha menghindarkan diri dari langkah-langkah/kebijaksanaan yang tidak searah dengan upaya pembentukan moral tersebut di atas.

Keberhasilan pembangunan di sektor agama tersebut perlu terus dikembangkan. Sehubungan dengan hal itu, kiranya Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa alokasi anggaran pembangunan di sektor ini harus dimanfaatkan secara effisien guna meningkatkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, terutama diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan.

Masalah berikutnya adalah sub sektor kesejahteraan sosial. Masalah yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah mengenai bencana alam, dengan mulai tibanya musim hujan diakhir tahun 1988. Semakin sering dan banyaknya daerah yang terkena bencana alam/banjir yang memakan korban tidak sedikit, menuntut kesiapsiagaan kita untuk secara tepat dan cepat dapat menanggulangi dan menyantuni para korban yang ditimbulkannya. Untuk kepentingan itu maka jumlah dan ketrampilan SATGAS bagi daerah rawan bencana alam perlu ditingkatkan.

Usaha penanggulangan akibat bencana alam memang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, namun Fraksi Karya Pembangunan menilai bahwa upaya pencegahan timbulnya bencana alam harus lebih diutamakan. Banyak bencana alam yang terjadi sebagai akibat perbuatan manusia sendiri yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, mendayagunakan sumber daya alam secara tidak seimbang, seperti penggundulan hutan, penggalian pasir, ladang berpindah dan sebagainya.

Oleh karena itu kiranya Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa Pemerintah perlu meningkatkan perhatian dan upayanya untuk mencegah terjadinya bencana alam tersebut, di samping usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan lebih dimasyarakatkan lagi. Sehingga dengan itu, kerusakan lingkungan oleh pengusaha-pengusaha yang hanya ingin mengejar keuntungan, dan penanganan terhadap suku terasing yang ditujukan untuk mengarahkan potensi mereka dalam pembangunan akan mampu sekaligus memecahkan masalah kerusakan hutan yang lebih luas sebagai akibat perladangan yang berpindah-pindah yang mereka lakukan. Terhadap hal ini, apakah Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa dalam penanganan masalah ini perlu lebih terencana dan terkoordinasi serta dianggarkan melalui RAPBN. □

Digitized by Google

Pajak Sebagai Nasionalisme Baru

Era bulan madu migas dan pembangunan telah usai. Tapi pembangunan tetap membutuhkan pembiayaan yang dari waktu ke waktu terus membengkak. Migas, sang kekasih pembangunan, karena berbagai faktor ekstern tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sang kekasih. Dengan kata-kata penuh kearifan orang mengatakan, "Era bulan madu migas dan pembangunan telah selesai."

Pemerintah rupanya jauh-jauh hari sudah memperkirakan akhir dari bulan madu tersebut. Sang kekasih baru untuk pembangunan dipersiapkan sejak tahun 1985 dengan 5 RUU perpajakan yang kemudian dikenal sebagai reformasi perpajakan nasional.

Pembangunan sebagai konsensus nasional, apapun kendalanya, harus tetap dilanjutkan. Dia membutuhkan dana, semangat dan tekad. Pembangunan menurut ketentuan GBHN, harus dibiayai oleh kekuatan sendiri, sedangkan pinjaman luar negeri, berapapun besarnya, hanyalah sebagai kekuatan penunjang.

Di tengah kondisi obyektif dewasa ini, maka pilihan kita sebenarnya cuma dua, yaitu, memperbesar pinjaman luar negeri yang berimplikasi mewaris utang kepada anak cucu, atau mendayagunakan potensi dana di dalam negeri sebesar-besarnya. Berpegang pada GBHN bahwa utang luar negeri hanyalah pelengkap, maka pilihan kita tidak lain adalah menggalakkan penerimaan dari dalam negeri. Peluang yang tersedia di dalam negeri tidak lain adalah pajak. Dan agaknya tidak berlebihan kalau orang seperti Bomer Pasaribu, anggota DPR dari FKP, menyerukan agar pajak dijadikan sebagai nasionalisme baru.

Mungkin seruan seperti ini kedengaran aneh. Tapi menurut Bomer pembangunan yang tidak dibiayai oleh kekuatan sendiri akan rapuh. Pilihan kita tentu mau mandiri atau tidak. Bila ingin mandiri, "jadikan pajak sebagai nasionalisme baru," katanya. Ini mungkin definisi Bomer terhadap seruan Pak Harto yang ingin meningkatkan konsekresi pajak dalam pembangunan lewat perjuangan habis-habisan.

Diperlukan Suatu Sistem Pranata Perpajakan

Sementara Direktur Jenderal Pajak, Drs. Mar'ie Muhammad, yang dalam tahun anggaran 1989-90 ditugasi untuk menghimpun dana senilai Rp 11,8 triliun, mengatakan siap menjadi orang yang tidak populer, tapi tetap dihormati.

Mar'ie dan jajaran di lingkungannya boleh jadi bakal menjadi orang yang tidak populer. Karena dengan sasaran yang hampir Rp 12 triliun, atau yang naik 29,6 persen dibanding APBN sebelumnya yang baru Rp 9,1 triliun, jelas merupakan isyarat bahwa pencarian wajib pajak baru akan semakin digalakkan. Siapa suka bayar pajak?

Ya, persoalan bukan suka atau tidak suka. Tapi adalah kenapa harus naik sekian besar. Tidakkah itu proyeksi yang terlalu besar? Dengan cara bagaimana target itu dicapai? Apakah dengan kenaikkan itu, tidak justeru mematahkan kegiatan ekonomi?

"Targetnya memang agak ambisius, tapi saya yakin akan terjangkau kalau semua daya kita kerahkan," tandas Mar'ie kepada pers.

Seperti diketahui, sasaran itu akan "dibebankan" kepada PPN yang pada 1989-90 ini ditargetkan Rp 5.830,9 miliar. Atau naik 21,8% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk pajak langsung seperti PPh dan PBB, masing-masing ditargetkan Rp 4.947,6 miliar (naik 31,5%) dan Rp 638,5%). Dipihak lain dari pajak lainnya (materai dan bea lelang) diperkirakan mencapai Rp 424,6 miliar atau naik 56,1%.

Prospek

Bagaimana prospek penerimaan pemerintah dari berbagai jenis pajak itu?

Satu staf pengajar UGM, Guritno Mangkoesoebroto, M.Ec., Ph.D mengemukakan, penerimaan dari PPh dapat dilaksanakan dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Untuk Indonesia, kedua tindakan itu harus dilaksanakan bersama-sama karena potensi PPh di sini belum sepenuhnya digali. Sehingga usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari PPh masih sangat memungkinkan." Tetapi usaha itu bukanlah suatu tugas yang ringan," tuturnya.

Apa yang disebutnya tidak ringan, al berbentuk penyelundupan pajak. Di USA saja, usaha penghindaran pajak secara illegal meningkat pada akhir-akhir ini.

Berbagai cara mereka lakukan seperti dengan membuat dua jenis pembukuan atas transaksi bisnis yang

Digitized by Google

dilakukan, membeli barang secara tunai, melakukan barter barang sampai pada tidak melaporkan penghasilan dari tips oleh pekerja restauran, hotel dan sebagainya.

"Cara penyelundupan ini, merupakan faktor penghambat serius bagi keberhasilan pelaksanaan sistem pajak yang efektif dan efisien karena praktek transaksi itu merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia.

Upaya meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak dalam anggaran mendatang hendaknya dilakukan secara konsisten dan konsekuen, tanpa pandang bulu. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan yang melekat dalam "tubuh" sektor ini harus dikenakan pada setiap WP (wajib pajak) yang sudah masuk dalam kategori penjaringan. Semua ini mengandung arti, pengecualian-pengecualian atau penangguhan pembayaran pajak tidak boleh ada lagi.

Namun demikian harus bisa dipahami bahwa mencapai target pajak sebesar Rp 11,8 triliun dalam anggaran mendatang, bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Untuk itu Kepala Negara dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 1989/90 telah menegaskan bahwa pencapaian target sebesar itu harus merupakan perjuangan "habis-habisan".

Statemen itu telah memberi isyarat bahwa perjuangan "habis-habisan" harus merupakan konsensus nasional. Ia bukan hanya pekerjaan Departemen Keuangan atau Ditjen Pajak, tapi seluruh aparat pemerintah dan masyarakat.

Seluruh aparat pemerintah mesti mendukung upaya tersebut dalam bentuk nyata berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus sadar bahwa gaji yang mereka terima maupun peralatan kerja yang mereka pakai menggunakan uang pajak yang dipungut dari masyarakat.

Di sisi lain, birokrasi pemerintah harus semakin efisien, supaya dana yang dikumpulkan dari pajak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan secara optimal.

Sebab pajak yang ditarik dari masyarakat itu tidak memberikan imbalan langsung kepada masyarakat. Maka imbalan itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat yang membayar gaji mereka dalam bentuk pelayanan yang baik dari para aparatur pemerintah.

Perjuangan "habis-habisan" memang sudah mulai tercermin dengan melakukan, misalnya, perluasan yang menyangkut objek dan subjek PPN (pajak pertambahan nilai), perluasan pemungut, dan berbagai kebijakan yang menyangkut PBB.

Namun satu pengamat dari Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, Drs. Soemarso, mengingatkan bahwa dalam melaksanakan pemungutan PPN terhadap aneka macam jasa yang jumlah objek maupun subjeknya sangat banyak, diperlukan kehati-hatian dan persiapan administrasi yang lumayan berat dari Dirjen Pajak.

Pendapat ini didukung oleh pengamat perpajakan yang lain Drs. H. Bomer Pasaribu SH. "Kemampuan administrasi perpajakan selama ini masih sering menimbulkan masalah," katanya.

Ia mengatakan, dalam usaha "habis-habisan" di bidang perpajakan berbagai kendala memang masih menghadang. Ia memberi contoh masih banyak wajib pajak yang lolos dari jangkauan perpajakan, wajib pajak yang belum secara benar membayar pajaknya, sistem administrasi perpajakan yang belum memadai, masih kurangnya koordinasi antarinstansi, faktor kemampuan dan integritas aparatur perpajakan, serta sederet persoalan lain yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Ia, misalnya, pernah mengusulkan tentang kelanjutan reformasi sistem perpajakan yang meliputi lingkup pengertian yang luas, seperti reformasi mental, pola pikir, pola hidup, lembaga, aturan, orientasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

"Reformasi pendukung yang lebih luas lagi adalah menyangkut iklim dan kehidupan ekonomi yang lebih sehat dan kesempatan berusaha yang lebih luas," ujarnya.

Demikian pula dengan iklim kehidupan demokrasi politik yang lebih memberikan kesempatan luas kepada para pembayar pajak untuk menyuarakan dan menyalurkan kepentingan dan aspirasinya ke atas permukaan.

Karena itu, sudah tiba saatnya untuk lebih mengembangkan, memantapkan dan memelihara pranata-pranata di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dalam menerapkan tata nilai Pancasila, termasuk dalam sistem perpajakan.

Ia menilai bahwa pranata-pranata sistem perpajakan akan lebih menumbuhkan jati diri, akar, pohon, ranting, daun dan buah, sebagai bagian penting dalam kehidupan sistem perpajakan.

Banyak pendapat para ahli mengenai makna pranata. Misalnya ia mengambil contoh apa yang dikemukakan oleh *Horton* dan *Hunt*. Kedua ahli ini menjelaskan bahwa pranata berkaitan dengan suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir yang menunjukkan adanya tata nilai dan prosedur bersama untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari masyarakat.

Sedangkan menurut *Koentjaraningrat*, pranata sosial adalah suatu sistem tata laksana dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam masyarakat.

Dari uraian para ahli itu, Bomer masuk pada satu kesimpulan bahwa pranata sosial merupakan rangkuman keseluruhan pola, hubungan proses, instrumen yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam bidang kebutuhan tertentu, misalnya ekonomi.

Pranata suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh falsafah dan ideologi yang dianut dan diyakini, yang melahirkan motivasi dan kesadaran yang kuat.

Karena itu, pranata pada hakekatnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan falsafah, ideologi, tata nial, tradisi, adat-istiadat, hukum, aturan, dan konvensi. Dengan demikian pranata adalah bagian subtansial dari kebudayaan.

"Jelaslah bahwa pranata sosial di bidang perpajakan adalah menjadi akar dan pohon kehidupan sistem pajak yang sangat menentukan berkembangnya dan berfungsinya sistem pajak," tutur Bomer.

Tegasnya dengan semakin dikembangkan, dimantapkan dan dipeliharanya pranata-pranata sosial perpajakan, akan semakin menjamin berhasilnya pelaksanaan sistem perpajakan nasional secara berkesinambungan.

Pengembangan pranata-pranata sistem perpajakan, menurutnya, merupakan tahap yang lebih kualitatif dalam kelanjutan reformasi sistem perpajakan. Pengembangan pranata-pranata sistem perpajakan berarti menanamkan akar terdalam dari budaya *sadar pajak*, dan tidak sekadar di permukaan, tapi jauh ke bumi kesadaran seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.

"Sekaligus membongkar sampai ke akar-akarnya citra pajak yang historis traumatik dari jaman kolonial, maupun segala praktek pajak yang tidak terpuji," katanya.□ H/LH

Digitized by Google

Habis-habisan Menuju Kemandirian

Presiden Soeharto menggunakan kata "perjuangan habis-habisan" hanya untuk 3 sektor ; ekspor non migas, pariwisata dan sektor pajak. Perjuangan habis-habisan untuk ketiga sektor ini sangat tepat untuk menggantikan era migas yang "bulan madunya " telah berakhir. Demikian kata Bomer Pasaribu SH, dalam wawancara dengan *Media Karyà.*

"Perjuangan habis-habisan" untuk menyukseskan perpajakan nasional dikumandangkan Presiden Soeharto 7 Januari 1989 yang lalu semakin tepat karena pilihan tinggal dua: pajak atau hutang luar negeri. Jika memilih habis-habisan memperbesar hutang luar negeri artinya kita mengorbankan kemandirian, memperbesar ketergantungan pada pembayar pajak di luar negeri.

"Ini tentu tidak sejalan dengan tujuan kemandirian dan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap," kata wakil ketua Central for Fiscal and Monetary Study.

Menuju tinggal landas, kemandirian harus semakin ditegakkan terutama dengan mengembangkan era pajak sebagai basis kekuatan keuangan negara. Untuk itu perjuangan habis-habisan perpajakan nasional seyogianya diisi dengan dua jurus besar meliputi peningkatan dan perluasan sekaligus; yaitu 1). Pembangunan sistem dan pranata perpajakan nasional dan 2). Perlipatgandaan upaya operasional untuk memenuhi target pajak.

Suatu langkah besar di bidang keuangan negara telah dimulai pada tahun 1983 dan 1985 dengan dikeluarkannya 5 RUU tentang perpajakan nasional yang baru, yang dikenal sebagai Reformasi Perpajakan Nasional. Untuk menjamin dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai perlu diadakan kajian ulang terus-menerus terhadap segala kebijaksanaan dan pelaksanaan seraya menyusun rumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan kelanjutan reformasi perpajakan sekaligus mengembangkan sistem, pendukung dan pranata sistem perpajakan, sebagai pengembangan jati diri perpajakan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan sistem perpajakan Nasional baru yang cukup dramatis, telah luas dipaparkan baik di forum resmi, seminar maupun melalui masmedia. Selain keberhasilan dan kemajuan, juga ditemukan kelemahan, dan kendala antara lain, 1) Banyak wajib pajak yang lolos, 2) Banyaknya wajib pajak yang membayar lebih kecil atau terjadinya penyelundupan dan manipulasi pajak. 3) Masih kurangnya kesadaran pajak masyarakat yang berarti belum tumbuhnya budaya sadar pajak secara memadai, 4) Belum membudayanya administrasi modern di lingkungan semua wajib pajak baik perusahaan, rumah tangga maupun perorangan sehingga menyulitkan penyelesaian proses pajak, 5) Beberapa kelemahan lingkungan peraturan perundangan dan 6) Masih dirasakannya kelemahan atau keterbatasan pada aparatur perpajakan maupun aparatur penunjang lainnya.

Sarat Misi

Reformasi perpajakan yang telah dimulai pada Pelita IV mampu menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih besar untuk menuju kemandirian dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian substansial dari kerangka landasan keuangan negara. Untuk menjamin peranan perpajakan dalam menggerakkan proses memasuki lepas landas pembangunan, maka Reformasi Perpajakan Nasional perlu lebih dimantapkan, dilanjutkan, diperluas dalam Pelita V dan seterusnya, sebagaimana tertuang dalam Rancangan GBHN 1988 sumbangan pemikiran Presiden/Mandataris MPR.

Dalam Naskah GBHN 1983, tentang pajak tercantum rumusan strategi pajak yang sarat missi sebagai berikut; "Untuk pelaksanaan Pelita IV diperlukan pembiayaan yang memadai, yang terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luar negeri merupakan sumber pelengkap. Dalam hubungan ini pengelolaan APBN terus disempurnakan agar penerimaan negara makin meningkat, sedangkan pengeluaran negara makin terkendali dan terarah sehingga peranan tabungan Pemerintah di dalam anggaran pembangunan negara dapat makin meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sumber di luar minyak dan gas bumi, sistem perpajakan terus disempurnakan pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan juga harus makin mampu dan bersih. Semuanya itu diarahkan agar kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri makin meningkat, pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah makin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana, yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial. Di samping itu sistem perpajakan harus memungkinkan pemanfaatan sumber-sumber alam optimal, mendorong eskpor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya. Segala pajak harus didasarkan peraturan perundang-undangan."

Bila dibandingkan dengan isi Rancangan GBHN 1988 akan terlihat kesinambungan, perluasan, penajaman rumusan tetap dengan missi pajak yang sarat: "Pengelolaan APBN perlu terus disempurnakan agar penerimaan negara makin meningkat, sedangkan pengeluaran negara makin terkendali, terarah dan efisien. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber, terutama diluar minyak dan gas bumi maka pelaksanaan sistem perpajakan terus disempurnakan dengan memperhatikan asas keadilan, kemampuan dan manfaat. Dalam hubungan itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus ditingkatkan, prosedur perpajakan terus disempurnakan dan aparatur perpajakan harus makin mampu dan bersih. Kebijaksanaan perpajakan

Digitized by Google

perlu diarahkan agar makin mendorong pendayagunaan dan pembangunan sumber daya manusia dan sumber alam, merangsang kegiatan ekspor dan perekonomian pada umumnya, serta membantu terlaksanaannya pola hidup sederhana. Semua jenis pungutan dan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan". (Garis bawah dari Penulis).

Mendahului Arah Dan Kebijaksanaan pembangunan, pada bagian Pendahuluan Pola Umum Pelita V Rancangan GBHN 1988, terdapat substansi yang sama sekali baru yaitu penegasan makna dan penajaman arti pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yaitu; Bab IV, A, 5: "Keseluruhan semangat sebagai upaya pengamalan dari semua sila dalam Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi: Senafas dengan itu dalam butir 4 Bab dan huruf yang sama ditegaskan pula tentang perlunya dikembangkan "pranata-pranata" yang juga sama sekali baru, belum pernah dituangkan dalam GBHN sebelumnya: "Untuk menunjang upaya-upaya tersebut perlu dikembangkan, dipelihara dan dimantapkan pranata-pranata dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam menerapkan tatanilai Pancasila."

Berdasarkan rangkaian uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan semangat, arah, motivasi, gerak dan proses pembangunan dalam semua mata rantainya semakin mebukan saja nilai-nilai kuantitatif operasional tapi terlebih-lebih nilai-nilai kualitatif substansial yang sangat mendasar, seperti antara lain tercermin dalam perlunya pembangunan pranata-pranata yang melekati seluruh proses, mata rantai dan instrumen pembangunan, termasuk di bidang perpajakan. Untuk itu perlu dikaji sejumlah permasalahan tentang reformasi perpajakan dan seterusnya ditelaah kelanjutan reformasi tersebut, serta tahap selanjutnya bagaimana membangun pranata-pranata perpajakan.

Sejumlah Pertanyaan

Jika kutipan uraian dari naskah GBHN 1983 tersebut di muka ditelaah lebih mendalam patut dikaji sejumlah pertanyaan tentang sistem dan strategi pajak yang sarat missi seperti: 1) Seberapa jauh "Sistem perpajakan terus disempurnakan harus diperluas dan dilanjutkan?, 2) Dengan sistem perpajakan yang terus disempurnakan itu seberapa jauh: a. "pungutan pajak diintensifkan"?, b. "aparat perpajakan juga harus makin mampu dan bersih", telah berhasil dicapai?, c. "pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah makin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat"?, d. "mendorong pemerataan pembangunan"?, e. "membantu terlaksananya pola hidup sederhana"?, f. "pemanfaatan sumber-sumber alam secara optimal"?, g. "mendorong ekspor"?, h. "mengembangkan kegiatan ekonomi"?, i. "segala pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan" telah terpenuhi dengan baik?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara objektif sangat penting. Singkatnya secara jujur harus diakui telah dicapai tingkat kemajuan yang memadai, bahkan disana-sini keberhasilan yang dramatis. Namun secara jujur pula perlu diakui dalam rangka reformasi perpajakan masih banyak pekerjaan yang masih harus diteruskan, bahkan makin mendasar dan meluas.

Bila sejumlah pertanyaan yang bersumber dari GBHN 1983 tersebut dirangkaikan pula dengan sejumlah substansi baru yang tercantum dalam Rancangan GBHN 1988 yang belum pernah tercantum dalam GBHN sebelumnya, maka pekerjaan besar selanjutnya justru akan semakin banyak dan semakin menuntut kesungguhan dan kerja keras.

Substansi-substansi baru tersebut selalu menyangkut pembangunan pranata-pranata secara umum, maka secara khusus dalam bidang perpajakan adalah seperti tertuang dalam butir 15 Bab IV, antara lain: 1) "Sistem perpajakan terus disempurnakan", 2) Asas-asas perpajakan: "asas keadilan, kemampuan dan manfaat", 3) "kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus ditingkatkan", 4) "prosedur perpajakan terus disempurnakan", 5) "makin mendorong pendayagunaan dan pengembangan sumber dan pajak".

Kelanjutan reformasi sistem perpajakan meliputi lingkup pengertian yang luas seperti reformasi mental, pola pikir, pola hidup, lembaga, aturan, orientasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain.

Kelanjutan reformasi peraturan perundangan antara lain: Menyinkronkan peraturan-peraturan pelaksanaan, Menerbitkan RUU baru yang menyangkut perpajakan seperti; - RUU Perbendaharaan Negara, - RUU Pabean - ordonansi, - RUU Pajak Daerah, - RUU Pajak Perjalanan Luar Negeri, - RUU Pajak Warisan. Menerbitkan RUU lain yang mendukung pengembangan dan penyehatan fiskal dan moneter dalam arti lebih luas seperti; - RUU Dana Pensiun, - RUU Asuransi, - RUU Jaminan Sosial, - RUU Bursa, dan lain-lain. Kelanjutan reformasi Manajemen dan Administrasi perpajakan termasuk pusat pendataan dan perluasan komputerisasi. Kelanjutan reformasi Aparatur Perpajakan, termasuk kemungkinan mengadakan Dinas Intelijen Pajak yang mengikuti secara berhati-hati kemungkinan penyelundupan dan manipulasi pajak oleh oknum wajib pajak dengan kemungkinan keterlibatan oknum petugas pajak.

Jika pada masa lalu pernah terdapat adanya Departemen Iuran Negara, apakah dapat dipertimbangkan kemungkinan semacam itu atau kemungkinan adanya semacam badan perpajakan dan iuran negara yang berada langsung di bawah Pres pada Pelita V mendatang, sebagai peningkatan dan Ditjen Pajak. Kelanjutan reformasi lingkungan masyarakat wajib pajak, termasuk membudayakan sadar pajak dan Kelanjutan reformasi yang berkaitan dengan Penggunaan Hasil Pajak.

Selain kelanjutan reformasi tersebut di atas masih lebih dibutuhkan reformasi pendukung misalnya; Agar seluruh aparatur negara tanpa kecuali sampai tingkat terendah bergerak secara penuh turut menyukseskan pembudayaan dan ketaatan pajak. Pembudayaan administrasi modern pada seluruh perusahaan, rumah tangga dan perorangan. Melalui Pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Agar seluruh tokoh dan pemuka masyarakat baik di kota maupun di desa seperti pemuka agama, adat, pers, cendekiawan, usahawan, pendidik, politisi, tokoh ormas, budayawan, tokoh wanita pemuda, seniman sampai bintang film dan lain-lain, mulai dari kota sampai desa juga dapat digerakkan dalam pembudayaan dan ketaatan pajak.

Reformasi pendukung yang lebih luas lagi adalah menyangkut iklim dan kehidupan ekonomi yang lebih sehat, kesempatan berusaha yang lebih luas, demikian pula iklim kehidupan demokrasi politik yang lebih memberikan kesempatan luas kepada para

Digitized by Google

pembayar pajak untuk menyuarakan dan menyalurkan kepentingan dan aspirasinya ke atas permukaan, bahkan sampai tingkat supra struktur politik tertinggi sekalipun. Kesemuanya harus mengacu dan dapat diuji dengan tolok ukur seperti tersebut dalam Bab IV butir 1 dan 4 di muka.

Pranata Perpajakan

Untuk lebih menjamin dan menunjang keberhasilan kelanjutan reformasi seperti diuraikan dalam Bab IV, maka sejalan dengan isyarat-isyarat yang tertuang dalam rancangan GBHN 1988, seperti tercantum dalam Bab III butir 5 tulisan ini, telah tiba saatnya untuk lebih mengembangkan, memantapkan dan memelihara pranata-pranata dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya dalam menerapkan tata nilai Pancasila termasuk dalam sistem perpajakan.

Pranata-pranata sistem perpajakan dan dalam rangka membudayakan pajak akan lebih menumbuhkan jati diri, akar, pohon, ranting, daun dan buah, sebagai bagian-bagian penting dalam kehidupan sistem perpajakan.

Banyak pendapat para ahli mengenai makna pranata (institution). Misalnya Horton dan Hunt menjelaskan bahwa pranata adalah berkaitan dengan "suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir yang menunjukkan adanya tatanilai dan prosedur bersama untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari masyarakat". Menurut Koentjaraningrat pranata sosial adalah "suatu sistem tatalaksana dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam masyarakat".

Pranata sosial merupakan rangkuman keseluruhan pola, hubungan proses, Instrumen yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam bidang kebutuhan tertentu misalnya ekonomi. Pranata suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh falsafah dan idiologi yang dianut dan diyakini, yang melahirkan motivasi dan kesadaran kuat. Karena pranata pada hakekatnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan falsafah, ideologi, tatanilai, tradisi, adat-istiadat, hukum, aturan, konvensi dan lain-lain. Dengan demikian pranata adalah merupakan bagian substansial dari kebudayaan.

Jelaslah bahwa pranata sosial di bidang perpajakan adalah menjadi akar dan pohon kehidupan sistem pajak yang sangat menentukan berkembangnya dan berfungsinya sistem pajak. Tegasnya dengan semakin dikembangkan, dimantapkan dan dipeliharanya pranata-pranata sosial perpajakan, akan semakin menjamin berhasilnya pelaksanaan sistem perpajakan nasional secara berkesinambungan.

Pengembangan pranata-pranata sistem perpajakan adalah merupakan tahap yang lebih kualitatif dalam kelanjutan reformasi sistem perpajakan. Pengembangan pranata-pranata sistem perpajakan, berarti menanamkan akar-akar terdalam dari budaya sadar pajak, tidak sekedar dipermukaan tapi jauh menghunjan ke bumi kesadaran seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Sekaligus membongkar sampai ke akar-akarnya citra pajak yang historis tramatik dari zaman kolonial, maupun segala praktek pajak yang tidak terpuji.

Proses perkembangannya pranata-pranata sistem perpajakan akan saling menentukan kesinambungan berupa hal seperti tersebut berikut ini, dan perkembangan itu selanjutnya secara siklikal akan meningkatkan proses pengembangan pranata-pranata sistem perpajakan.

Berkembangnya perpajakan menuju tingkat yang lebih ideal yaitu perpajakan yang dapat mengarahkan pemanfaatan surplus ekonomi yang efektif maupun potensial, untuk mencapai penggunaan sebagai sumber-sumber daya ekonomi secara optimal dan dinamis.

Berkembangnya peningkatan fungsi pajak: Fungsi budgeter: sumber anggaran negara yang berkembang dan berkesinambungan secara sehat. - Fungsi regulasi: menyangkut alokasi, stabilisasi dan distribusi sumber-sumber yang lebih berkeadilan. - Fungsi demokrasi: menyangkut pengembangan hak dan kewajiban demokrasi rakyat, khususnya masyarakat membayar pajak dan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan.

Berkembangnya asas-asas perpajakan seperti dicantumkan pada GBHN dalam seluruh proses perpajakan antara lain: - "asas keadilan, kemampuan dan manfaat", - "pembagian beban pembangunan yang makin sesuai dengan rasa keadilan", - "pemerataan pembangunan", - "pemanfaatan sumber-sumber secara optimal dan sebagainya".

Asas-asas perpajakan yang lebih luas dan komplit secara lebih mendasar adalah identik 7 asas pembangunan nasional yaitu; "asas manfaat, asas usaha bersama, dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil merata, asas peri kehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri".

Ketujuh asas itu adalah akar pranata sistem perpajakan yang harus ditumbuhkan secara konsekuen dan konsisten. Ketujuh asas itu menjadi tolok ukur dari seluruh proses perpajakan mulai dari perencanaan, pengaturan, pemungutan sampai penggunaan hasil pajak, dan sebagainya.

Jika asas keadilan dalam sistem perpajakan misalnya diperluas diuraikan secara lebih menyeluruh akan meliputi setidaknya jenis keadilan yaitu: 1) Keadilan komutatif, yang menyangkut keadilan hubungan prestasi dan kontraprestasi, lebih terletak dalam lapangan hukum perdata. 2) Keadilan distributif, keadilan dalam hubungan distribusi wewenang dan kekuasaan, lebih terletak dalam lapangan hukum publik. 3) Keadilan vindikatif, keadilan dalam pembalasan/ganjaran yang seimbang lebih terletak dalam lapangan hukum pidana. 4) Keadilan kreatif, keadilan dalam kebebasan berkreasi, berinisiatif dan mencipta secara sehat dalam segala lapangan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. 5) Keadilan protektif, keadilan dalam perlindungan dan pengayoman yang sama bagi setiap orang. 6) Keadilan legalis, keadilan yang menyangkut ketaatan setiap orang pada hukum tertulis dan tidak tertulis. 7) Keadilan egalitaris, keadilan yang menyangkut kesepadanan dalam hak dan kewajiban yang sama, keadilan kebersamaan.

Dalam rangka mengembangkan pranata-pratana sistem perpajakan, UUD 1945 telah cukup memuat dasar yaitu amanat konstitusional khususnya Bab VIII HAL KEUANGAN, Pasal 23 dan Penjelasannya, yang mencantumkan antara lain tentang penetapan APBN, kedaulatan rakyat dalam hal anggaran, dalam perpajakan dan lain-lain.

Dengan demikian proses reformasi sistem perpajakan nasional akan sejalan dengan pemantapan kerangka landasan pembangunan pada Pelita V dan memasuki era lepas landas pada Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, yaitu berupa kelanjutan proses reformasi sistem perpajakan disertai dengan tahap pengembangan pranata-pranata sistem perpajakan nasional yang semakin berkeadilan sehat, maju dan dinamis.☐ LT

Digitized by Google

Presiden Soeharto Serahkan SPT

Presiden Soeharto, dalam kedudukan selaku warga negara baru-baru ini, tepatnya 30 Januari 1989 lalu menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 1988. Tindakan Presiden itu tidak saja merupakan kepatuhannya terhadap hukum perpajakan, tetapi sekaligus dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kesadaran akan membayar pajak.

Penyerahan SPT itu dilakukan Presiden di kantor Inspeksi Pajak Jakarta Pusat IV, dan langsung diserahkan kepada Kepala Kantor Ny Dra Sri Subiyati, dan disaksikan oleh Dirjen Pajak Drs Mar'ie Muhammad. Acara penyerahan SPT Presiden Soeharto itu berlangsung hanya dalam tempo 5 menit. Setelah menerima formulir SPT Sri Subiyati menyerahkan tanda terima kepada Presiden dan stiker tentang pemasyarakatan pajak. Berdasarkan tanda terima itu, Kepala Negara selanjutnya harus membayar pajak penghasilan ke Kas Negara, dan kemudian melaporkannya kembali ke Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Pusat IV setelah pembayaran lunas. "Terima kasih saya sudah merasa lega bahwa saya telah memenuhi kewajiban saya. Artinya saya telah membayar utang, dan setidak-tidaknya bisa tidur tenteram," katanya setelah mendapat pelayanan dari petugas pajak.

Dalam penjelasannya, Presiden minta agar masyarakat terus diberikan penjelasan-penjelasan mengenai ketentuan pembayaran pajak, mengingat masih banyak warga masyarakat yang seperti ketakutan, seolah-olah dikejar-kejar oleh petugas pajak. Padahal kewajiban membayar pajak itu didasarkan oleh ketentuan perundang-undangan. Mereka yang pendapatannya tidak melebihi batas tertentu tidak terkena pajak penghasilan. "Jadi tidak semua pegawai negeri, karyawan atau buruh harus membayar pajak. Pengusaha yang membayar pajak juga yang memperoleh untung," kata Presiden.

Presiden menilai, adanya warga masyarakat yang merasa dikejar-kejar pajak dikarenakan penjelasan selama ini masih kurang. Padahal pemerintah telah memikirkan untuk selalu memberikan keringanan-keringanan. Perusahaan-perusahaan, misalnya, hanya yang memperoleh keuntungan saja yang harus membayar pajak, sedang yang rugi tidak. Tetapi, katanya untuk mengingatkan, kalau perusahaan itu memang memperoleh untung, jangan melaporkan rugi. Ini selain tidak melakukan kewajiban membayar pajak, berarti pula memberikan keterangan palsu, menipu pemerintah.

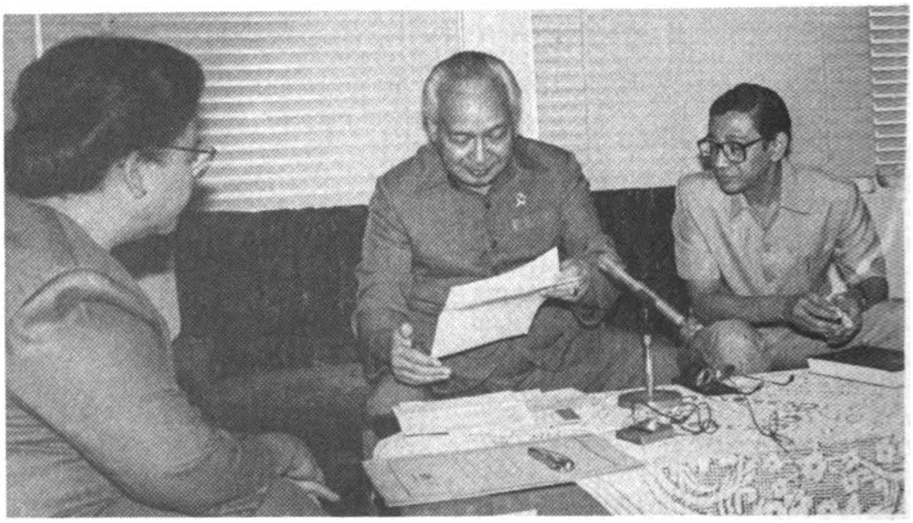

Merasa lega, telah memenuhi kewajiban membayar pajak.

Tidak Sama

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pajak yang harus dibayar oleh pengusaha tidak sama, tergantung pada besar kecilnya keuntungan. Bagi yang memperoleh keuntungan Rp 1C juta diwajibkan membayar pajak 15%, yang untung Rp 50 juta membayar pajak 25%, dan yang untung lebih dari Rp 50 juta membayar pajak 35%. Bagi anggota masyarakat, hanya mereka yang berpenghasilan di atas Rp 80 ribu per bulan atau Rp 960 ribu per tahun yang wajib membayar pajak, bila orang itu belum kawin. Bila telah kawin, hanya mereka yang berpenghasilan di atas Rp 120 ribu per bulan atau Rp 1,44 juta per tahun yang wajib membayar pajak.

Menurut ketentuan, kata Presiden, masyarakat yang harus membayar pajak tidak perlu dikejar-kejar oleh petugas pajak, dan sebaliknya, petugas perpajakan juga tidak perlu mengejar-ngejar wajib pajak. Masyarakat diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dipenuhinya, dan untuk itu pemerintah menyediakan formulir SPT pajak yang diisi langsung oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya. "Kalau kita ingin maju, ingin ada pembangunan, ya kewajiban pajak itu harus dipenuhi," kata Presiden.

Presiden juga menghimbau masyarakat agar tidak merasa kesulitan dalam mengisi SPT karena formulirnya telah disederhanakan. Jika dulu SPT terdiri atas 14 halaman, kini disederhanakan hingga tinggal 5 halaman. Penyerahan SPT diharapkan pula dilaksanakan secepatnya, tidak perlu menunggu sampai batas hari terakhir, yang menurut ketentuan 31 Maret tiap tahun.

Atas teladan dalam penyerahan SPT itu Dirjen Pajak Mar'ie Muhammad menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Apalagi penyerahan SPT itu dilakukan jauh hari sebelum 31 Maret 1989. Sehubungan dengan itu, ia juga menghimbau masyarakat yang terkena wajib menyerahkan SPT agar segera menyerahkan formulir selekas mungkin agar tidak menumpuk. Ia juga mengingatkan, mereka yang terlambat menyerahkan SPT akan terkena denda Rp 10 ribu.

Dari contoh yang diberikan oleh Presiden itu tergambar, bahwa betapapun besar target yang harus dicapai oleh negara dari penerimaan pajak, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan kekerasan atau tekanan, tetapi lebih didasarkan atas kesadaran para wajib pajak. Untuk itu kepatuhan para wajib pajak perlu didorong terus, dan di lain pihak aparat perpajakan juga diharapkan terus meningkatkan pelayanannya di bidang perpajakan ini.□ (SGT)

Digitized by Google

Pengembangan Pers Menjadi Tanggungjawab Semua Pihak

Pada 9 Februari 1989 lalu, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pers memperingati hari ulang tahun ke 43 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang sejak tahun 1985 ditetapkan menjadi Hari Pers Nasional (HPN) atas keputusan Presiden. Peringatan HPN tahun ini dipusatkan di Surabaya dengan berbagai acara antara lain resepsi, seminar, pameran pers, dan kegiatan sosial, pementasan seni, dan tidak ketinggalan, pertandingan ataupun lomba berbagai cabang olah raga.

Meninjau stand dalam pameran pers.

Kedudukan dunia pers di Indonesia bukan menjadi kepentingan masyarakat pengelola pers, tetapi menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betapa pentingnya kedudukan pers di Indonesia, terungkap dalam sambutan Presiden Soeharto untuk menyongsong hari pers itu. Melalui pidato yang dibacakan oleh Menteri Peneragan Harmoko, di Surabaya Presiden mengemukakan bahwa pers nasional mempunyai kedudukan penting. Keberhasilan atau kegagalan pers nasional dalam menjalankan perannya, akan mempunyai dampak luas, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankamnas. Keberhasilan pers akan ikut mendorong maju lebih cepat sasaran yang ingin dicapai bersama sedangkan kegagalan akan menunda, bahkan mengundurkan pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh bangsa.

Betapapun penting peranannya pers perlu memahami perkembangan yang hidup dalam masyarakat. Dikatakan oleh Kepala Negara, masyarakat Indonesia memiliki kepekaan-kepekaan dalam bidang dan politik yang harus dihormati, jika tidak diinginkan meluasnya keresahan atau gejolak. Bahkan hal-hal demikian bukan hanya ada di Indonesia. Dalam kaitan dengan itu, dikatakan oleh Presiden bahwa beriringan dengan kebebasan pers ada tanggungjawab pers, yang mengharuskan pers sendiri mengetahui batas-batas. Batas-batas itu tumbuh dinamis sesuai dengan kemajuan masyarakat. Makin maju pendidikan dan wawasan masyarakat, makin besar toleransi terhadap hal-hal yang peka.

Pada bagian lain sambutannya Presiden mengatakan bahwa pembangunan yang berlangsung hingga sekarang telah menjadikan pers nasional menjadi bagian dari kiprah pembangunan nasional. Pers nasional telah memiliki kearifan dalam memilah-milah berita yang patut maupun yang tak layak dipublikasikan.

Wahana Penting

Pada awal sambutannya, Presiden mengatakan, pers nasional merupakan bagian menyeluruh dari kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pers nasional merupakan wahana penting dalam pengelolaan bangsa yang majemuk dengan membawakan berita, pendapat, gagasan, keluhan serta harapan kepada seluruh bangsa. ''Tanpa pers nasional kita akan hidup dalam lingkungan-lingkungan kecil yang hanya tahu mengenai diri,'' demikian dikemukakan Presiden. Pers nasionallah yang ikut membangun, memelihara dan mendayagunakan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

Akar kehadiran pers nasional harus ditelusuri jauh sejak bangsa menyadari mutlaknya persatuan dan kesatuan hidup berbangsa dan betapa lemahnya kita jika hidup sendiri-sendiri. Karena itu pers nasional adalah salah satu lembaga nasional yang penting, sejak saat yang paling awal dalam pergerakan kemerdekaan.

Kesadaran ini pula yang mendorong

Digitized by Google

semua pihak untuk menegaskan semboyan kerja dalam GBHN tentang suatu interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Pers diharapkan mengembangkan pers yang berdasarkan Pancasila, pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Ditetaskannya pula, untuk menghadapi proses tinggal landas pembangunan nasional nanti, diperlukan kualitas bangsa yang terbuka, kreatif, berani mengambil prakarsa memanfaatkan peluang dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Sebagian bangsa kita memang sudah memiliki, tetapi sebagian lagi, dan mungkin sebagian besar, kualitas itu masih harus ditumbuhkan, demikian Presiden.

Bertekad Maju

Pada bagian lain sambutannya, Presiden juga mengemukakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertekad menjadi bangsa yang makin maju di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Bangsa Indonesia bertekad untuk memperkecil jarak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain, baik yang sudah maju maupun sesama negara berkembang.

Pengalaman modernisasi pada bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa pembangunan yang berwujud dalam demikian banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi serta ekonomi hampir selalu didahului oleh kemajuan cara berpikir masyarakatnya. Cara berpikir yang lebih maju merupakan prasarana yang amat penting untuk bergeraknya ilmu pengetahuan, teknologi, serta bagian ekonomi yang menyusulnya. Kemajuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah kemajuan yang sekaligus memelihara nilai-nilai luhur kebersamaan yang kita warisi, serta mendorong untuk kemandirian mempersiapkan hari depan. Dalam kaitan ini pula, menurut Presiden, pers nasional dapat menjadi salah satu dinamisator untuk mencapai tujuan itu. Semangat kebersamaan diharapkan tetap mewarnai kemajuan dan dinamika masyarakat.

Penghubung

Untuk menyongsong HPN pula, Menteri Penerangan Harmoko dalam sambutannya yang disiarkan melalui TVRI dan RRI mengemukakan, kedudukan pers nasional dihadapkan pada dua tugas, yaitu membangun dan mengembangkan dirinya serta sekaligus berperan aktif menggairahkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Menurut Menpen, pers pembangunan berperan menjadi salah satu penghubung yang kreatif antara pemerintah dan masyarakat. Pers menyampaikan dan menerangkan rencana, program, dan kebijakan pembangunan sehingga seluruh masyarakat dapat memahami seluruh proses pembangunan. Di sisi lain, pers senantiasa mengetahui dan sekaligus menyalurkan secara jujur segala sesuatu yang menjadi aspirasi dan permasalahan masyarakat untuk memperbaharui kehidupan di segala bidang. Interaksi positif bagi pers adalah bertugas ikut menumbuhkan motivasi dalam pembangunan.

GBHN

Tentang betapa peran pers nasional bagi bangsa Indonesia, tidak saja tercermin dari pidato Presiden, tetapi lebih dari itu. MPR, pemegang kedaulatan rakyat juga merumuskan dalam GBHN. Masalah pers nasional ini tercakup dalam Ketetapan Nomor II/TAP/MPR/1988 bagian Penerangan dan Media Massa. Dikatakan dalam amanat GBHN itu antara lain: a. Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan bangsa harus dapat membudayakan Pancasila dan UUD 1945 dalam segala segi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran seluruh rakyat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, memperkokoh ketahanan nasional dan memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. b. Pembangunan penerangan dan media massa nasional harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila agar penerangan dan media massa mampu menunjang pembangunan masyarakat Pancasila. Peranan penerangan dan media massa dalam memasyarakatkan P4 perlu lebih ditingkatkan. c. Pembangunan penerangan dan media massa ditujukan untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya peranan, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan nasional. d. Pembangunan penerangan dan media massa sebagai wahana informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah, diarahkan untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warganegara, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, memantapkan nilai-nilai budaya bangsa untuk mempertebal kepribadian Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan komunikasi sosial serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu penerangan dan media massa harus meningkatkan pengabdian, tanggungjawab profesional, kemampuan dan kualitas sumberdaya manusianya serta meningkatkan dan makin mendayagunakan prasarana dan sarananya. e. Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang berdasarkan Pancasila, pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu terus dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. f. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan di seluruh pelosok tanah air, perlu ditingkatkan pemanfaatan media penerangan seperti pers, radio, televisi, film, kantor berita, video, media tradisional, dan forum komunikasi pedesaan dengan mengindahkan kondisi dan kebhinnekaan masyarakat serta kepribadian bangsa. Demikian pula perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kegiatan serta jangkauan koran masuk desa. g. Agar kegiatan komunikasi sosial dan peranan media massa dapat makin efektif, perlu ditingkatkan jumlah dan mutu tenaga terdidik sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi komunikasi.

Dari amanat GBHN itu terlihat bahwa jangkauan dan ruang lingkup tugas dan kewajiban pers cukup berat dan kompleks. Karenanya pengembangan pers nasional tidak dapat dibebankan pada pundak masyarakat pers sendiri, tetapi pada seluruh masyarakat luas, terutama dari pemerintah.☐ (Sgt)

Digitized by Google

Oleh : Alfian

Interaksi Positif Antara Masyarakat, Pers dan Pemerintah Daerah

Dalam kehidupan kenegaraan kita yang normal dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD'45, kedaulatan atau kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat itu diwujudkan melalui MPR yang merumuskan dan menetapkan GBHN serta ketetapan dan keputusan lainnya tiap lima tahun sekali. MPR juga memilih dan mengangkat presiden sebagai mandatarisnya dan wakil presiden. Presiden sebagai mandataris MPR berkewajiban melaksanakan semua ketetapan dan keputusan MPR yang ditugaskan kepadanya serta bertanggungjawab kepada lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat itu. Sejalan dengan itu presiden sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan nasional melayani kepentingan rakyat yang garis-garis besarnya dirumuskan dan ditetapkan tiap lima tahun itu.

Ditinjau dari sini dapatlah dipahami logika atau makna dari ungkapan bahwa pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Tetapi perlu pula diketahui bahwa presiden bukanlah hanya sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), melainkan juga sebagai kepala negara. Sungguhpun begitu, karena kita berbicara dalam konteks pemerintahan, maka makna pemerintah sebagai pelayan atau abdi masyarakat barangkali dapat kita pahami dalam kaitannya dengan konsep kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pancasila dan UUD'45 kita. Sedangkan dalam kaitan kenegaraan, pemerintah berfungsi sebagai pelayan atau abdi negara. Jadi, tepatlah ungkapan yang menyatakan bahwa pegawai negeri sebagai aparat pemerintah dan negara adalah sesungguhnya sekaligus abdi masyarakat dan abdi negara. Hal yang sama dapat pula dikatakan terhadap ABRI kita.

Di satu pihak pemerintah daerah (PEMDA) merupakan bagian atau kelanjutan dari pemerintahan nasional kita. Oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan dan menyukseskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah nasional

(pusat) di daerahnya. Dalam hal ini ia sesungguhnya melayani kepentingan-kepentingan masyarakatnya yang telah dirumuskan dan ditetapkan di tingkat nasional, menyatu dengan kepentingan-kepentingan masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lain.

Di pihak lain, dalam rangka melayani masyarakat daerah dengan sebaik-baiknya PEMDA tentu perlu pula memperhatikan aspirasi dan kepentingan mereka yang relevan yang barangkali belum sepenuhnya tercakup atau belum secara jelas terperinci dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional yang ada dan berlaku. Untuk mengetahui relevansi dari berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara mengukur sejauh hal itu tidak bertentangan atau menyimpang dari kepentingan atau kebijaksanaan nasional yang telah disepakati bersama.

Melalui para anggota DPRD, media massa atau saluran lainnya PEMDA dapat mengetahui berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat daerahnya. Melalui aturan permainan serta mekanisme yang ada dan berlaku berbagai aspirasi dan kepentingan yang relevan itu dirumuskan dan ditetapkan menjadi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kemudian dilaksanakan. Dari situ tersimpul salah satu dimensi tentang bagaimana PEMDA melayani masyarakat daerahnya dalam memenuhi aspirasi dan kepentingan mereka yang relevan, baik bagi pembangunan diri mereka, bagi pembangunan daerahnya, maupun bagi pembangunan nasional.

Ditinjau dari segi teori sistim, aspirasi dan kepentingan masyarakat yang berhasil diserap dan dicerna oleh PEMDA disebut masukan *(input)* yang kemudian diolah atau diproses melalui mekanisme yang ada dan berlaku, dan selanjutnya melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan *(output)* yang dilaksanakan. Pada waktu kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diketahui masyarakat, termasuk pada waktu pelaksanaan, terjadilah proses *feedback* (umpan balik) yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi atau menilainya. Kebijaksanaan yang dianggap baik akan mereka dukung, sedangkan yang kurang baik atau yang menyimpang dari aspirasi dan kepentingan mereka akan dikritik atau ditentang. Berbagai tanggapan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan itu akan menjadi masukan (input) baru bersama-sama dengan aspirasi dan kepentingan baru yang berkembang dalam masyarakat, yang kemudian diolah menjadi output baru dan seterusnya melalui feedback di evaluasi lagi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan politik yang normal dan demokratis proses *input - output - feedback - evaluasi* lalu kembali lagi kepada input dan seterusnya biasanya bersirkulasi secara relatif mulus dalam sistim politiknya. Bilamana sudah begitu, sistim politik yang demokratis itu dapat dikatakan telah memiliki kualitas kemandirian yang tinggi, dan oleh itu dapat diandalkan untuk bekerja dengan baik dalam membangun masyarakatnya.

Dalam sistim politik demokratis yang berkualitas tinggi seperti itu, biasanya masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan juga dalam melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan (oleh PEMDA).

Digitized by Google

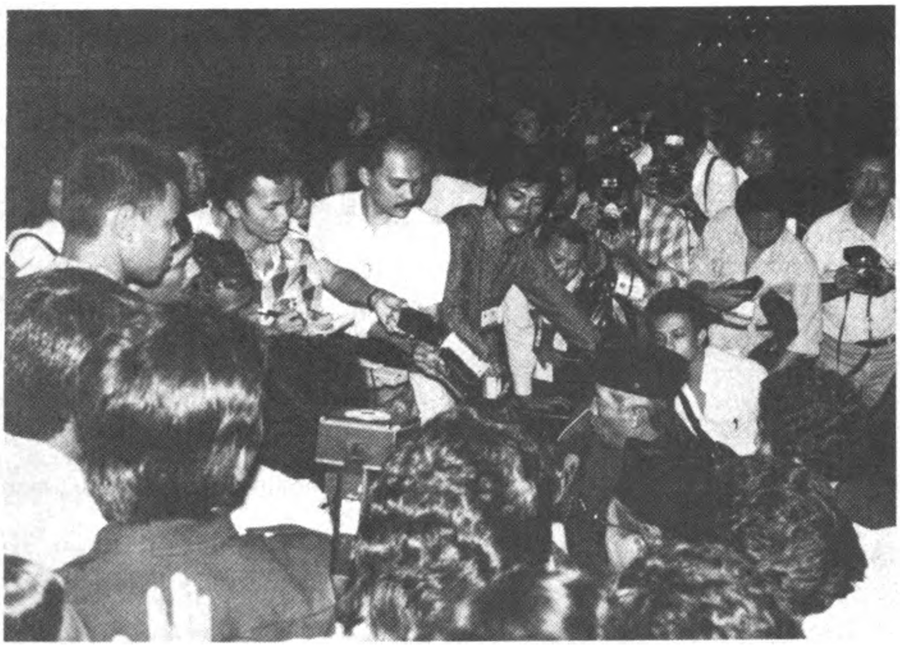

Proses interaksi positip.

Melalui evaluasi itu masyarakat melakukan sebagian dari apa yang disebut fungsi sosial kontrol (pengawasan) terhadap sistim politiknya. Melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkannya PEMDA memperlihatkan sifat responsifnya terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan yang hidup dalam masyarakatnya dari waktu ke waktu. Dari itu semua dapat dilihat suasana interaksi positif antara masyarakat daerah dengan PEMDAnya.

Kelancaran dari pengembangan proses interaksi positif antara masyarakat daerah dengan PEMDAnya. antara lain ditentukan oleh kehadiran dan kualitas komunikasi timbal-balik antara keduanya. Dalam hal ini komunikasi timbal-balik itu dianalogikan dengan daerah yang menyebabkan terjadinya proses sirkulasi dalam sistim politik yang ada dan berlaku. Sejalan dengan itu komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan sifat, bentuk dan kualitas suatu sistim politik. Bilamana ia berhasil mengembangkan kelancaran interaksi positif antara masyarakat daerah dan PEMDAnya, maka komunikasi itu berperan positif dalam proses pembangunan sistim politik demokratis yang berkualitas kemandirian tinggi.

Memang ada berbagai macam alat, cara atau saluran untuk mengembangkan komunikasi timbal-balik antara masyarakat daerah dan PEMDAnya. Salah satu daripadanya adalah pers, baik media cetak maupun media elektronik, yang peranannya sebagai media massa dalam masyarakat daerah-daerah kita yang tengah berkembang maju makin besar dan penting. Fungsi pers dalam meningkatkan kualitas kemandirian suatu sistim politik yang demokratis terletak pada kemampuannya memainkan peranan aktif dalam mengembangkan proses sirkulasi *input-output-feedback-evaluasi* yang terkandung dalam sistim politik tersebut. Dalam hal ini, di satu pihak ia perlu memilki kemampuan untuk menyerap, merumuskan dan mengemukakan berbagai aspirasi dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat *(input)* secara benar dan tepat, sehingga informasi yang dikemukakannya itu betul-betul mencerminkan apa-apa yang sesungguhnya terkandung dalam hati nurani rakyat. Di pihak lain, pers juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami secara benar dan tepat kebijaksanaan-kebijaksanaan PEMDA *(output)*, sehingga informasi yang dikomunikasikannya tentang itu *(feedback)* tidak mengandung kelemahan apalagi kekeliruan yang dapat melahirkan makna atau pengertian yang menyesatkan dalam masyarakat.

Jadi, di satu pihak pers harus berinteraksi positif dengan rakyat agar supaya dapat menyelami dan memahami betul apa-apa yang terkandung dalam hati nurani mereka, sedangkan di pihak lain ia juga perlu berinteraksi positif dengan PEMDA agar supaya dapat menyelami dan memahami makna yang sesungguhnya dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil atau dikeluarkannya. Dari situ tersimpullah kepada kita salah satu dimensi dari makna ungkapan yang terkandung dalam alinea keempat konsep Pers Pancasila yang dirumuskan oleh Sidang Pleno XXV Dewan Pers di Solo pada tanggal 6 - 8 Desember 1985 tentang mekanisme interaksi positif antara Masyarakat, Pers dan Pemerintah.

Demikianlah, melalui teori/pendekatan/analisa sistim kita mencoba melukiskan secara sketsa tentang esensi dan makna interaksi positif antara masyarakat, pers dan PEMDA dalam kaitannya dengan pembangunan suatu sistim politik yang demokratis, berkualitas kemandirian yang tinggi, dan dapat diandalkan, yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Apa yang dilukiskan itu memang masih bersifat teoritis dan ideal. Sebagaimana lazimnya sesuatu yang teoritis dan ideal itu tidak mungkin terjelma secara sempurna dan mutlak. Yang dapat diusahakan adalah untuk mencapainya sedekat mungkin.

Salah satu kegunaan dari suatu kerangka teori yang ideal ialah sebagai pegangan atau pedoman untuk menunjukkan ke arah mana bangsa kita hendak membangun dirinya, termasuk membangun sistim politiknya. Sejalan dengan itu, kerangka teori yang ideal itu dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana realita kehidupan yang sedang berkembang telah berjalan ke arah apa yang dicita-citakan itu. Problematik-problematik apa saja yang terkandung dalam realita kehidupan masyarakat yang perlu dipecahkan agar proses pembangunan dirinya, termasuk pembangunan sistim politiknya, dapat lebih ditingkatkan dan diperlancar.

Memang pengetahuan yang amat terbatas, kalaulah ada, tentang suatu masyarakat daerah dengan pers dan PEMDAnya, seperti Kalimantan Timur ini, tidak memungkinkan seseorang untuk betul-betul dapat memahami berbagai problematik yang terkandung di dalamnya. Paling-paling yang dapat dilakukan, dan itulah yang akan dicoba secara sepintas di sini, adalah mengemukakan beberapa problematik yang bersifat umum yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan diskusi dalam seminar ini.

Ada berbagai hal yang dapat mengganggu interaksi positif antara masyarakat, pers dan PEMDA. Salah satu daripadanya adalah orientasi, sikap dan tingkah laku berbagai kelompok atau golongan yang ada dalam

Digitized by Google

masyarakat. Bilamana masing-masing kelompok atau golongan sangat dipengaruhi oleh rasa ikatan primordialisme, maka mereka memiliki kecenderungan yang kuat sekali untuk terlalu mengutamakan aspirasi dan kepentingan golongan masing-masing, tanpa menghiraukan atau kurang bersedia menenggang rasa aspirasi dan kepentingan golongan-golongan lain. Bahkan hal itu mungkin berkembang ke arah yang lebih buruk lagi, yaitu selalu mencurigai aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok lain itu sebagai ancaman yang merugikan. Suasana seperti itu kalau terus berkembang dapat menjurus ke arah munculnya apa yang disebut anarki aspirasi dan kepentingan. Bilamana sampai begitu halnya maka sulitlah bagi mekanisme yang ada dan berlaku untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat diterima dan memuaskan masing-masing golongan. Obsesi dengan aspirasi dan kepentingan golongan masing-masing, akan amat menyulitkan permusyawaratan yang menuju kesepakatan tentang aspirasi dan kepentingan bersama bagi seluruh masyarakat di daerah itu.

Rasa ikatan primordial yang kuat itu bukan saja menyulitkan dimusyawarahkan dan disepakatinya kepentingan bersama masyarakat daerah, tetapi juga lebih mempersulit berkembangnya pemahaman masing-masing golongan terhadap aspirasi dan kepentingan nasional. Padahal apa yang disebut aspirasi dan kepentingan daerah perlu pula diserasikan, atau paling kurang tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan nasional yang telah dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan nasional.

Ditinjau dari sini, kelancaran interaksi positif antara lain menghendaki agar masing-masing kelompok atau golongan melonggarkan, kalaulah tidak mungkin samasekali menghilangkan, rasa ikatan primordial mereka dengan jalan mengembangkan rasa toleran terhadap aspirasi dan kepentingan golongan-golongan lain. Melalui itu akan muncul dan berkembang rasa solidaritas atau kesetiakawanan yang wajar dan sehat dari berbagai golongan yang ada. Hal itu akan mengembangkan wawasan bersama mereka sebagai masyarakat daerah. Bilamana pengembangan wawasan itu dapat pula dikaitkan dengan pemahaman mereka tentang keperluan untuk mempertemukan dan menyerasikan aspirasi dan kepentingan daerah mereka dengan yang nasional, maka dari situ mereka akan berhasil mengembangkan wawasan kebangsaan.

Memang betul, apa yang sesungguhnya dituntut dari masyarakat daerah untuk mengembangkan kelancaran interaksi positif antara mereka dengan pers dan PEMDAnya antara lain adalah pembaruan budaya politik. Pembaruan itu bersifat transformasi dari budaya politik lama yang didominir oleh rasa ikatan primordial yang amat kuat menuju budaya politik baru yang mengembangkan rasa kebersamaan yang berwawasan kebangsaan.

Sebagaimana diketahui pers adalah salah satu lembaga masyarakat, dan oleh karena itu ia biasanya merupakan salah satu cermin dari masyarakatnya. Sungguhpun begitu, pers, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, diharapkan memiliki fungsi ganda. Di satu pihak ia berfungsi sebagai pelayan masyarakat, yaitu sebagai tempat penyalur aspirasi dan kepentingan mereka. Di pihak lain ia diharapkan pula berfungsi sebagai pembimbing masyarakat, yaitu mendorong dan mengarahkan mereka menuju kehidupan bersama yang lebih baik.

Bilamana pers sampai terjerumus pula ke dalam apa yang disebut anarki aspirasi dan kepentingan berbagai golongan dalam masyarakat, yaitu kalau suratkabar-suratkabar dan majalah memihak dan memperkuat rasa ikatan primordial masing-masing golongan (yaitu masing-masing koran atau majalah menjadi organ golongan tertentu), maka ia tak mungkin diharapkan untuk berfungsi secara wajar dan sehat dalam melayani dan membimbing masyarakat secara keseluruhan. Suasana seperti itu tidak memungkinkan berkembangnya interaksi positif antara pers dengan seluruh masyarakat, tidak lain tidak bukan karena ia telah menjadi bagian integral dari anarki aspirasi dan kepentingan golongan.

Sejalan dengan itu pers juga perlu memperbaharui budaya politiknya, yaitu mentransformasikan budaya politik yang didominir oleh rasa ikatan primordial yang tinggi menjadi budaya politik yang mengutamakan aspirasi dan kepentingan bersama seluruh masyarakat. Bagi pers nasional yang terbit di daerah itu sekaligus juga berarti mempertemukan, menyesuaikan dan menyerasikan aspirasi dan kepentingan bersama masyarakat daerahnya dengan aspirasi dan kepentingan bersama bangsanya sebagaimana tersimpul dalam wawasan kebangsaan kita. Oleh karena pers bukan saja diharapkan sebagai pelayan masyarakat, tetapi juga sekaligus sekaligus sebagai pembimbing mereka, maka seyogyanyalah kalau pers berada selangkah lebih dahulu atau lebih maju dalam proses pembaharuan budaya politik yang dimaksudkan di atas.

Bilamana PEMDA dihadapkan pada situasi anarki dan kepentingan berbagai golongan dalam masyarakat-

Melakukan kontrol sosial yang sehat.

Digitized by Google

nya, dapat dibayangkan betapa sulitnya posisinya. Mungkin ia dihantui oleh kekhawatiran bahwa kebijaksanaan apapun yang akan diambilnya tetap saja tidak dapat diterima atau memuaskan sebagian kalaulah tidak semua golongan yang ada. Seandainya kekhawatiran itu begitu menghantuinya, maka PEMDA mungkin sekali tidak berani mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang bermakna dan sesungguhnya diperlukan. Bila sampai demikian halnya, maka sistim yang ada dan berlaku menjadi lumpuh, tidak berdaya mengatasi anarki aspirasi dan kepentingan berbagai golongan yang bersumber pada rasa ikatan primordial yang amat dominan. Pada akhirnya seluruh masyarakat jualah yang akan merugi. Interaksi positif antara masyarakat, pers dan PEMDA boleh dikatakan terhenti, kalaulah tidak dirusak oleh interaksi negatif yang diwarnai oleh iklim saling curiga yang mencekam.

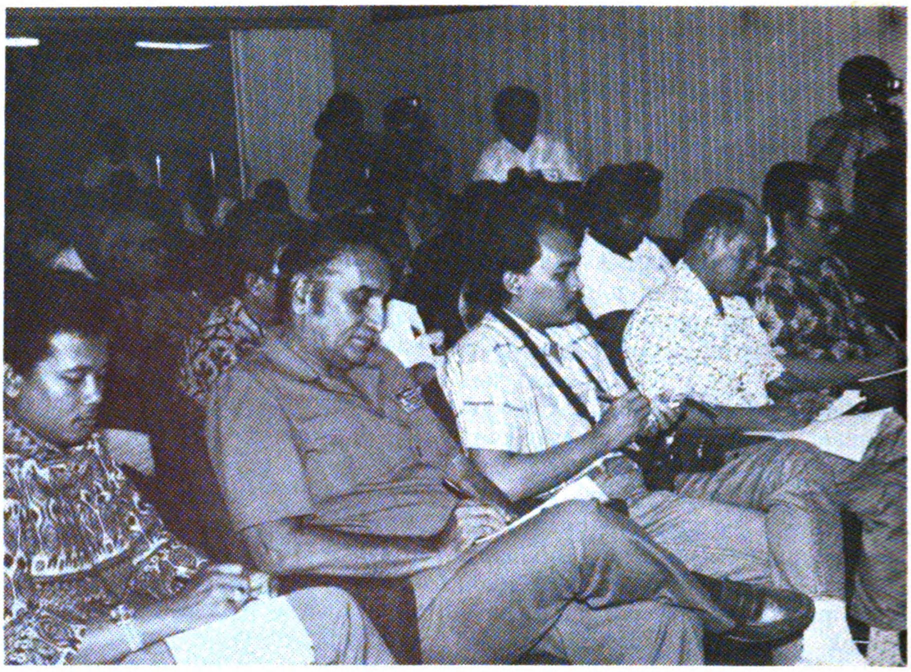

Mengembangkan rasa kebersamaan yang berwawasan kebangsaan.

Apa yang dikemukakan di atas adalah contoh ekstrim dari suasana anarki aspirasi dan kepentingan golongan yang sudah tidak ketolongan lagi sehingga melumpuhkan suatu sistim demokrasi yang ada dan berlaku. Interaksi positif bukan saja menjadi macet, tapi telah digantikan oleh interaksi negatif yang mengembangkan iklim saling curiga dan saling memusuhi yang membahayakan kelangsungan hidup sistim demokrasi tersebut.

Tetapi bahaya terhadap suatu sistim politik yang demokratis yang antara lain bercirikan kehadiran interaksi positif antara masyarakat, pers dan pemerintah, tidak hanya bersumber pada anarki aspirasi dan kepentingan. Adakalanya ia bersumber pada orientasi, sikap dan tingkah laku kekuasaan yang angkuh yang dapat menjurus ke arah otoriterisme/totaliterisme. Dalam hal ini si pemegang atau si pengendali kekuasaan, umpamanya PEMDA di suatu daerah, memiliki kecenderungan yang kuat sekali untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan yang wajar dan murni dari masyarakat daerahnya. Meskipun ada kebijaksanaannya yang sudah berulangkali oleh masyarakat dikeritik atau ditentang, si pemegang kekuasaan tetap saja meneruskannya. Dalam hal ini kekuasaan yang ada dan berlaku dapat dikatakan sudah tidak responsif lagi terhadap hati nurani rakyatnya. Lebih dari itu, masyarakat biasanya merasa diperlakukan secara sewenang-wenang dan hidup dalam suasana tertekan di bawah kekuasaan yang angkuh dan cenderung otoriter.

Dalam suasana seperti itu pers juga tertekan, antara lain karena tidak berdaya untuk menyuarakan isi hati nurani masyarakatnya. Ia juga tak mungkin melakukan kontrol sosial yang sehat terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang angkuh dan cenderung otoriter itu biasanya membungkam segala macam bentuk kritik, dan berupaya keras agar pers menjadi corongnya. Bilamana sampai demikian, maka pers telah menjadi organ atau bagian integral dari kekuasaan tersebut.

Sebagaimana dapat dilihat dari contoh di atas, kemacetan interaksi positif antara masyarakat, pers dan pemerintah, dapat bersumber pada orientasi, sikap dan tingkah laku kekuasaan yang angkuh dan otoriter. Untuk memperbaiki itu terutama diperlukan pembaharuan budaya politik si pemegang dan pengendali kekuasaan, yaitu dengan jalan mentransformasikan dirinya dari kecenderungan otoriterisme/totaliterisme menuju pengembangan nilai-nilai kebersamaan yang demokratis.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu kunci bagi kelancaran interaksi positif antara masyarakat daerah, pers dan PEMDA terletak pada keberhasilan mengembangkan budaya politik baru yang mengutamakan aspirasi dan kepentingan kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Itulah budaya politik Demokrasi Pancasila kita.

Salah satu esensi dari budaya politik Demokrasi Pancasila itu adalah persenyawaan antara keterbukaan atau kebebasan dan disiplin sosial. Keterbukaan/kebebasan diperlukan agar masyarakat dapat mengemukakan aspirasi dan kepentingan mereka yang murni, sehat dan wajar. Tetapi keterbukaan yang tanpa batas atau tanpa kendali membuka peluang bagi lahir dan berkembangnya apa yang disebut anarki aspirasi dan kepentingan yang didasarkan pada rasa ikatan emosional primordialisme yang tinggi. Untuk mengendalikan kebebasan itu diperlukan rasa disiplin sosial yang tinggi (yang dalam lingkup kebangsaan disebut disiplin nasional) yang pada dasarnya bersumber dari rasa kebersamaan dan solidaritas sosial yang selanjutnya mengembangkan rasa tanggungjawab sosial dan akhirnya bermuara pada disiplin sosial.

Di pihak lain, kalau disiplin sosial (disiplin nasional) memang diperlukan dalam suatu kehidupan yang demokratis, obsesi terhadap itu, apalagi kalau sampai melupakan persenyawaannya dengan keterbukaan/kebebasan, dapat menjurus ke arah otoriterisme/totaliterisme. Demikianlah keduanya, keterbukaan dan disiplin sosial, merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan dalam membangun suatu kehidupan politik yang demokratis. Kedua nilai tersebut perlu dikembangkan dan disosialisasikan (dibudayakan) secara bersama-sama

Digitized by Google

dalam membangun budaya politik Demokrasi Pancasila kita. Melalui itu interaksi positif antara masyarakat daerah, pers dan PEMDA bukan saja akan lancar dan berkembang dengan baik, tetapi sekaligus juga akan dilandasi oleh wawasan kebangsaan kita.

Ditinjau dari segi pers, hakekat persenyawaan nilai keterbukaan/kebebasan dengan nilai disiplin sosial yang terkandung dalam budaya politik Demokrasi Pancasila kita itu, tercantum dengan jelas pada alinea ketiga dari rumusan Pers Pancasila yang berbunyi:

"Hakekat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat yakni Pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu Pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggungjawab."

Salah satu hal yang dapat kita ambil dari alinea ini ialah bahwa hakekat pers Pancasila yang sehat adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Di sini kebebasan atau keterbukaan pers memang diakui, tetapi bukan kebebasan atau keterbukaan yang tanpa batas atau tanpa kendali. Kebebasan itu dibatasi dengan atau dikendalikan oleh rasa tanggungjawabnya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Makna rasa tanggungjawab itu sesungguhnya terkandung dalam apa yang kita sebut di atas disiplin sosial atau disiplin nasional. Jadi, Kebebasan atau keterbukaan pers juga bersenyawa dengan disiplin sosial atau rasa tanggungjawabnya. Dengan lain perkataan pers kita juga perlu membudayakan dalam dirinya budaya politik Demokrasi Pancasila kita.

Bilamana ia berhasil membudayakan nilai kebebasan/keterbukaan bersama-sama dengan nilai disiplin sosial, yang keduanya adalah bagian yang amat esensi dalam budaya politik Demokrasi Pancasila kita, maka pers dengan sendirinya akan dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui itu ia akan mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggungjawab.

Suasana saling percaya memang merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan bekerjasama suatu sistim politik yang demokratis. Suasana atau rasa saling percaya itu biasanya bersumber dari rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan atau rasa setiakawan (solidaritas sosial) yang tinggi yang, sebagaimana telah dikemukakan di atas, selanjutnya mengembangkan rasa tanggungjawab sosial atau disiplin sosial. Sejalan dengan itu ungkapan "masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggungjawab" mengandung makna masyarakat yang telah berhasil membudayakan nilai-nilai keterbukaan/kebebasan dan disiplin sosial secara bersama-sama yang terkandung dalam hakekat budaya politik Demokrasi Pancasila kita.

Memang betul bahwa rasa tanggungjawab atau disiplin sosial itu adalah konsep abstrak yang memerlukan konkretisasi yang lebih jelas dan mantap. Makna ungkapan "pers yang bebas dan bertanggungjawab" atau "keterbukaan yang berdisiplin sosial" memerlukan penjabaran yang lebih jauh. Selama ini dunia pers dan masyarakat kita barangkali dapat meraba-raba apa makna dari kedua ungkapan itu, tetapi belum dapat memastikannya.

Salah satu cara untuk lebih memastikannya ialah dengan jalan menjabarkannya melalui legislasi atau pembuatan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih jelas dan lebih terperinci. Upaya ke arah itu antara lain dapat dilakukan melalui interaksi positif antara masyarakat, pers dan pemerintah. Upaya untuk mengkongretasikan penjabaran konsep "pers yang bebas dan bertanggungjawab" dan konsep "keterbukaan/kebebasan yang berdisiplin sosial" melalui legislasi adalah sejalan dengan pemikiran dan pemahaman kita bahwa Negara Kesatuan yang demokratis yang sedang kita bangun ini adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45.

Tetapi, memang betul pula selama aturan permainan baru yang lebih jelas ada lebih terperinci belum ada, siapakah yang menentukan kandungan makna dari kedua konsep tersebut? Dalam hal ini jawabannya adalah mereka yang dipercayakan memegang dan mengendalikan kekuasaan. Senang ataukah tidak senang itulah kenyataannya. Dan itu lazimnya berlaku dalam sistim politik maupun, di mana aturan permainan yang ada dan berlaku masih kabur, kurang jelas dan belum terperinci.□

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PENGURUS SUB. UNIT PLN SEKTOR PRIANGAN
Jalan Supratman No. 58, Tilp. 73741 (4 saluran)
BANDUNG

KORPRI PLN PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN JAWA BAGIAN BARAT SEKTOR PRIANGAN SELALU SIAP MENYUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG KELISTRIKAN

Digitized by Google

Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dituntut Kejujuran dan Kerja Keras

Kunjungan Wapres ke Jawa Barat.

Wakil-wakil rakyat dalam Sidang Umum Maret tahun lalu mempercayakan Sudharmono menjadi Wakil Presiden. Tentu, tugas yang diemban sekarang ini tidak ringan. Dan Presiden Soeharto sendiri memberi beban tugas yang lebih menitik beratkan kepada bidang pengawasan.

Dalam mengemban tugas ini, langkah-langkah telah diambil dan dilaksanakan. Misalnya, mengadakan penataran pengawasan, yang dilakukan dalam bentuk rapat-rapat dinas. Hal ini tidak saja dilakukan di Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah. Diantaranya, Jawa Timur, Aceh, Jombang, Pasuruan, dan Bengkulu. Kemudian, tanggal 13 sampai 14 Februari lalu giliran Bandung, Jawa Barat.

Dialog dengan masyarakat.

Langkah kunjungan dinas Wapres ke daerah-daerah tentu berkaitan erat dengan tugas yang diemban sekarang ini, yaitu tentang pengawasan. Dan manfaat yang diperoleh dari kunjungannya di daerah juga besar. Sebab, di daerah-daerah tersebut, Wapres Sudharmono selain memberi pengarahan dan petunjuk juga melakukan temu wicara dengan pimpinan daerah seperti Camat dan Lurah. Sehingga informasi langsung tentang berbagai hal, khususnya yang menyangkut delapan sukses dapat diterima dari tangan pertama.

Medio Februari lalu, Wapres melakukan kunjungan kerja di Soreang, ibukota Kabupaten Bandung. Dalam rapat dinas, Wapres telah menerima laporan tentang pembangunan daerah dari Bupati, khususnya yang menyangkut delapan sukses. Sebagian diantaranya, sukses tentang Keluarga Berencana (KB), sukses tentang kependudukan, sukses tentang pemasyarakatan P4, sukses tentang ekspor nonmigas dan sebagainya. Dalam laporan itu, Wapres tidak mendengar adanya kendala. "Yang dilaporkan baik-baik

Digitized by Google

semua,'' ujarnya, sambil tertawa. Namun, secara umum laporan yang diberikan Bupati itu, dinilai sudah cukup baik. Kalau tidak, kata Wapres, pembanguaan tidak akan mengalami peningkatan seperti pembangunan di Soreang ini.

Kemudian Wapres menguraikan masalah pembangunan yang dilakukan tidak mungkin semua berjalan mulus. Pembangunan yang dilaksanakan, pasti ada hambatan-hambatan. Baik hambatan yang terdapat dalam instansi yang bersangkutan maupun diluar instansi.

Untuk mengatasi hal ini kata Wapres, pemerintah bertekad untuk meningkatkan dan memantapkan lagi tentang pengawasan dan perencanaan. Dengan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus, maka pembangunan akan lebih baik.

Dalam rangka ini, kata Wapres, Presiden Soeharto telah memberi perintah agar pengawasan ditingkatkan. Bukan saja pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, (pengawasan fungsional), tapi juga peningkatan pengawasan terhadap setiap pimpinan proyek dan setiap pimpinan terhadap organisasinya. Dalam hal terakhir ini dikenal dengan istilah Pengawasan Melekat (Waskat).

Dan Presiden, lanjut Wapres juga mengharapkan, agar rakyat juga ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berjalan lebih lancar lagi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan itu dapat tercapai. Selain itu, tujuan pengawasan yang dilakukan juga untuk membangun aparatur yang bersih dan berwibawa.

Menyinggung tentang adanya pemerintah yang bersih dan berwibawa ini, menurut Wapres, dapat diwujudkan apabila aparatur dapat bekerja keras, jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kesan tentang pemerintah tidak bersih, tidak boros dan tidak disiplin tidak akan terjadi. Dalam rangka ini, Wapres sendiri berharap agar para pejabat yang berada di jajaran daerah tingkat II untuk terus mengupayakan pengawasan yang melekat pada dirinya itu dilaksanakan dengan baik.

Temu Wicara

Sebelum mengawali temu wicara, Wapres Sudharmono juga mengungkapkan tentang dibukanya Tromolpos 5000 pada bulan April tahun lalu. Hingga kini, surat-surat yang masuk sudah mencapai 15 ribu lebih. Sebagaimana diketahui, bahwa surat-surat yang masuk melalui Tromolpos 5000 ini, DKI menempati urutan teratas, kemudian disusul Jawa Timur dan ketiga adalah Jawa Barat.

Dijelaskan, bahwa dari 15 ribu surat-surat yang masuk itu, dari Jawa Barat terdapat 2 ribu lebih. Di dalamnya juga ada yang dari Soreang. Namun, Wapres tidak menyebut, isi surat yang berasal dari Soreang ini.

Dengan surat-surat yang terus masuk di Tromolpos 5000 ini, akan diproses lebih lanjut. Dan, apabila suratsurat itu benar, maka Wakil Presiden akan meneruskan kepada instansi yang bersangkutan untuk memprosesnya dan mengambil langkah-langkah yang sebaiknya.

Usai memberi pengarahan dan petunjuk, Wapres kemudian mengadakan temu wicara dengan unsur pimpinan daerah tingkat II, diantaranya termasuk Camat dan Lurah. Sebelumnya, Wapres menerima laporan dari Bupati tentang pelaksanaan pembangunan yang menyangkut delapan sukses. Setelah mendengar laporan itu, kemudian Wapres mengecek kebenarannya melalui dialog dengan lurah dan camat.

Dalam dialog tersebut, Wapres menaruh perhatian yang besar pada berbagai masalah terutama pembangunan desa, pendidikan, koperasi, kependudukan, ekspor nonmigas dan lainnya. Juga terungkap informasi-informasi yang menarik. Misalnya tentang ekspor nonmigas yang cukup menonjol di daerah itu.

Dalam dialog di sentra industri sepatu Cibaduyut, juga terungkap adanya keluhan tentang sulitnya memperoleh bahan baku kulit yang berkualitas nomor satu. Selama ini, produksi sepatu Cibaduyut, menurut pelapornya adalah menggunakan jenis kulit yang berkualitas nomor tiga dan empat. Sehingga dalam forum temu wicara ini Wapres menangkap keinginan dan aspirasi warga setempat untuk meningkatkan kualitasnya. ''Mengenai keinginan untuk mendapatkan jenis kulit nomor satu, pemerintah akan memperhatikan,'' kata Wapres.

Oleh karenanya, lanjut Wapres, hal ini sudah menjadi keinginan pemerintah untuk meningkatkan ekspor nonmigas dengan sebanyak-banyaknya dan dengan harga yang setinggi-tingginya. Dalam arti wujud barang yang mempunyai nilai tambah.

Cibaduyut

Mengawali kunjungan dinasnya selama dua hari di Jawa Barat, Wakil Presiden Sudharmono SH didampingi Ibu Sudharmono, Menteri Koperasi, Bustanil Arifin dan Dirjen Aneka Industri, Trisura di Cibaduyut. Di tempat tersebut, Wakil Presiden meresmikan penataan sentra industri sepatu Cibaduyut dan sekaligus ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Dalam sambutannya, Wapres Sudharmono menyinggung berbagai masalah. Misalnya tentang pembangunan, sumber daya manusia, dan koperasi. Mengenai masalah pembangunan, Wapres Sudharmono mengungkapkan, semenjak pembangunan yang dilaksanakan dari Pelita ke Pelita telah banyak kemajuan yang telah dicapai. ''Pembangunan ini merupakan kebijaksanaan nasional dalam rangka untuk melaksanakan Trilogi Pembangunan. Terutama dalam hal peningkatan kemampuan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional,'' tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kata Wapres, waktu Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kita tidak punya apa-apa. Tapi dengan kemerdekaan itu, yang tujuannya adalah bagaimana dapat membangun diri kita. Sehingga Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara yang telah maju, termasuk negara yang pernah menjajah kita.

Sedangkan untuk mengejar ketinggalan dengan negara tersebut tidak mudah. Tentu perlu dilakukan dengan perjuangan, karena masyarakat kita yang kebanyakan masih tergolong ekonomi lemah itu, maka program Trilogi Pembangunan perlu dilaksanakan dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai sasaran tersebut, kata Wapres perlu memperhatikan rakyat kecil. Di dalamnya, termasuk pengrajin, petani dan yang lainnya.

Diakhir kunjungan dinasnya di Jawa Barat, Wapres Sudharmono, atas nama Sekretaris Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila meresmikan penggunaan mesjid Bahrul Ulum di kompleks pusat pengembangan guru teknologi, Cimahi, dan sebuah lagi di kabupaten Kuningan yang dilakukan secara simbolis yang sekaligus juga penandatanganan prasasti.

Mengingat, waktu dalam peresmian mesjid ini sudah siang, maka Wapres Sudharmono setelah mengadakan peninjauan keliling, kemudian melakukan sembahyang berjamaah di mesjid yang baru dibukanya itu. □ BM

Digitized by Google

Istri Dapat Menciptakan Suasana Damai

Tugas kaum wanita sifatnya ganda

Setelah Wapres Sudharmono meresmikan sentra industri sepatu Cibaduyut, dalam kunjungan kerjanya di Bandung, dilanjutkan dengan rapat dinas propinsi daerah tingkat I. Sedangkan Ibu Sudharmono, yang mendampingi Wapres dalam kunjungan kerjanya itu mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi wanita sekabupaten Bandung.

Perjalanan kerja selama dua hari yang dilakukan Ibu Sudharmono cukup padat. Beberapa produksi, baik yang berorientasi ekspor seperti garment, kerajinan tradisional, misalnya batik Cirebon dan yang lainnya juga menjadi perhatiannya. Selain itu, tidak ketinggalan pula tempat pembibitan bunga yang terletak di desa Cihideung, Kecamatan Cisarua, Lembang, dan Sekolah Luar Biasa (SLB), di jalan Cicendo no 2 Bandung ini.

Dalam kunjungannya di tempat-tempat tersebut, Ibu Sudharmono melihat dari dekat dan penuh perhatian. Misalnya, saat mengunjungi Panti Penyantun Pendidikan Anak Tuna Rungu. Selain Ibu Sudharmono mendengarkan keterangan-keterangan yang diberikan Ketua Yayasan, juga mengadakan peninjauan ke lapangan. Hampir setiap ruangan yang ada di tempat anak-anak tersebut dibina, dikunjungi satu persatu.

Begitu pula di Pabrik Pakaian Jadi yang berlokasi di jalan Moh Toha, Bandung. Pabrik yang sudah mengekspor produksinya ke mancanegara ini, juga tidak lepas dari perhatiannya. Barangkali, yang mengesankan dalam kunjungan dua hari itu, dilakukan di lokasi pembibitan bunga. Di mana bunga-bunga anggrek dari berbagai macam jenis, tersusun dengan rapi di halaman luas yang memang telah dipersiapkan. Ibu Sudharmono yang didampingi Ibu E. Yogie SM kemudian meninjau kebun pembibitan yang memang tampak indah.

Kaum wanita

Mengawali kegiatan kunjungan kerjanya, Ibu Sudharmono mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi wanita, yang berlangsung di gedung Sate, Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Sudharmono menguraikan secara panjang lebar ten-

Menaruh perhatian pada pembibitan bunga

Digitized by Google

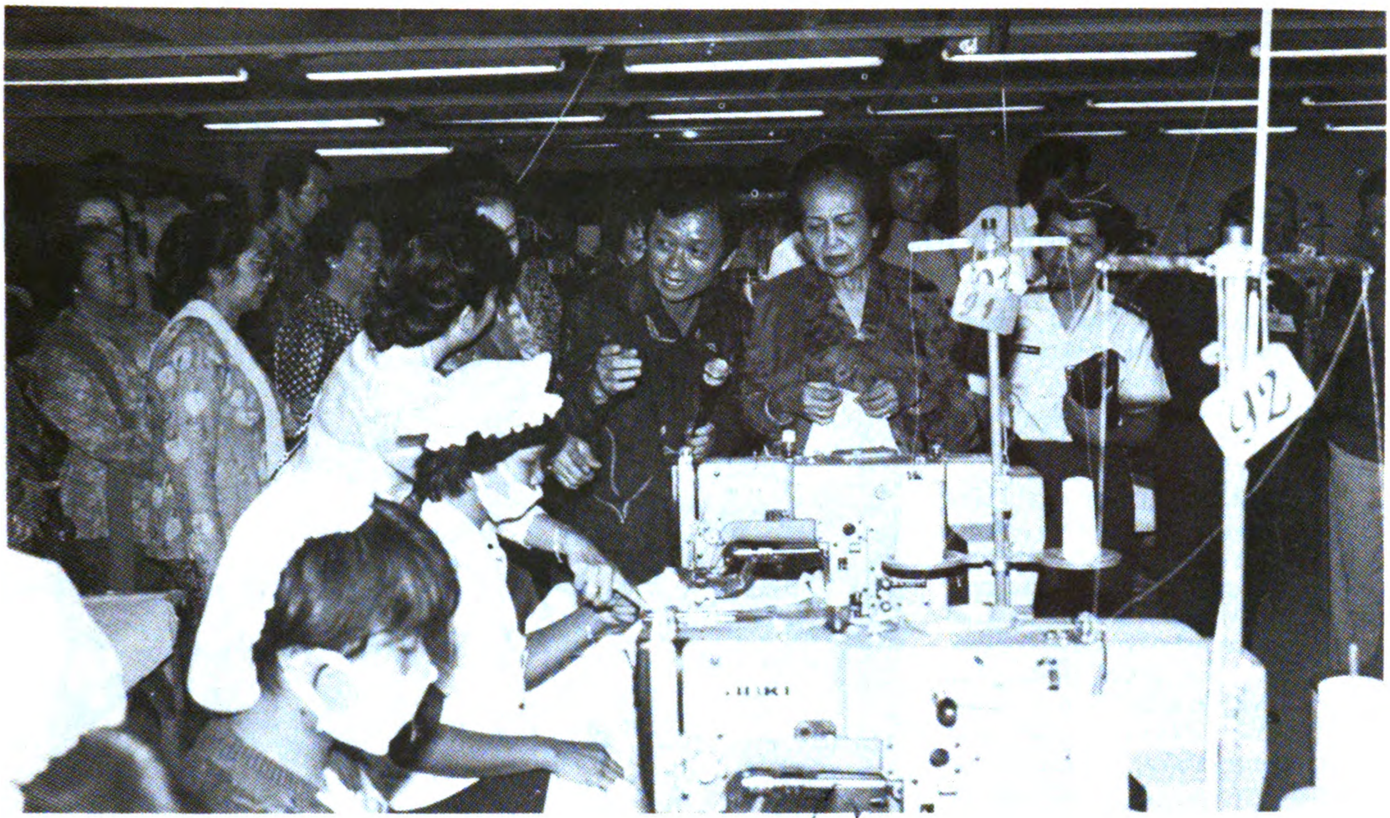

Mengunjungi produksi pakaian jadi

tang hakekat kaum wanita. Seperti dikatakan, tugas kaum wanita adalah berat, karena sifatnya ganda. Di satu pihak, kaum wanita diharapkan ikut memberi sumbangan yang besar bagi suksesnya pembangunan nasional, di lain pihak secara kodrati kaum wanita menunaikan tugas sebagai ibu yang sebaik-baiknya dan dengan cara tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Peranan dan kesibukan kaum wanita dalam pembangunan sama sekali tidak boleh mengakibatkan kaum wanita meninggalkan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga. Peranan dan kemampuan kaum ibu sebagai pembina keluarga sejahtera sama sekali tidak boleh diabaikan.

Menyinggung tentang wanita dalam era pembangunan, Ibu Sudharmono mengungkapkan, sekarang ini kesempatan untuk bergerak di luar rumah tangga bagi para wanita tidak banyak berbeda dengan kesempatan bagi kaum pria. Malahan, kaum pria dan kaum wanita wajar bergerak bahu membahu dalam perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara. Namun demikian, lanjut Ibu Sudharmono, betapapun terkemuka kedudukan seorang wanita dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kewajiban yang luhur terhadap suami dan anak di dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dipisahkan daripadanya. Dengan kehalusan budi yang sejalan kodratnya, wanita sebagai istri dapat menciptakan suasana tenang dan damai. Dengan demikian, kehidupan rumah tangganya menjadi sumber kekuatan jasmani dan rohani bagi suami, anak-anaknya serta bagi dirinya sendiri, untuk menghadapi segala tantangan dan kesukaran dalam kegiatan maupun kesibukan di luar rumah tangga.

Kemudian dalam bagian sambutannya yang lain di depan organisasi-organisasi wanita Soreang, Ibukota Kabupaten Bandung, hari kedua yang juga merupakan hari terakhir kunjungan kerjanya, disinggung pula tentang peranan wanita. Dalam sambutannya di depan ibu-ibu dari organisasi wanita itu, Ibu Sudharmono mengatakan, di tengah-tengah kesibukan rakyat yang sedang membangun, kita semua mengharapkan peranan wanita yang lebih besar di masa depan. Peranan itu akan makin rumit dan berat karena kita akan memasuki zaman pembangunan masyarakat yang lebih maju, meningkat dan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang makin cepat. Baik dari segi fisik material maupun segi nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Sepanjang zaman sejarah, kata Ibu Sudharmono, peranan kaum ibu sama sekali tidak pernah surut dan berkurang. Malahan makin meningkat. Karena hal ini merupakan kodrat yang tidak dirubah dalam keadaan apapun. Mengabaikan peranan kaum wanita dalam kehidupan masyarakat dan gerak pembangunan bangsa, akan sama halnya dengan membiarkan masyarakat dan kemanusiaan terpaku berhenti dalam keterbelakangan dan kemiskinan.

"Pembangunan yang kita laksanakan menyangkut kehidupan lahir batin seluruh bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, daerah, asal-usul dan peradaban lainnya. Pembangunan kita bersifat nasional, karena watak kerakyatannya memerlukan tanggung jawab semua pihak, golongan, semua lapisan generasi bangsa kita. Ini berarti kaum wanita ikut serta memikul tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pembangunan," ujarnya.

Dalam kaitan peranan dan peran serta kaum wanita dalam pembangunan, Ibu Sudharmono kemudian mengutip amanat GBHN 1988-1993 yang menyatakan, bahwa kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan dalam rangka meningkatkan peranan serta tanggung jawabnya dalam pembangunan, melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan terutama untuk dapat lebih memanfaatkan kesempatan kerja di berbagai bidang. □ BM

Digitized by Google

Oleh Ir Tati Sunarti Soemiarno

Kesetiakawanan Sosial Perlu Ditanamkan dan Dikembangkan

Kesetiakawanan Sosial sebagai sistem sosial yang bersifat menyeluruh, merupakan kekuatan masyarakat dalam pembangunan dan erat kaitannya dengan kegiatan menyongsong Pelita V.

Tahun 1989 merupakan awal Pelita V yang sekaligus sebagai awal pemantapan kerangka landasan menuju tinggal landas pembangunan di masa mendatang. Berkaitan dengan sasaran pembangunan itu maka kesetiakawanan sosial benar-benar diharapkan dapat mewarnai kehidupan masyarakat dan diwujudkan dalam kekuatan swadaya masyarakat di pelbagai kehidupan masyarakat sesuai dengan profesi, minat, hobi dan kemampuan masing-masing. Kalau kesetiakawanan sosial seperti tersebut di atas dapat mantap dan menjiwai setiap insan Indonesia, maka ia akan dapat menjadi kekuatan bangsa yang dilandasi oleh sifat kegotongroyongan, saling membantu, saling mengisi, saling menunjang, saling menopang, yang sudah barang tentu sesuai dengan budaya Pancasila.

Dalam GBHN dinyatakan bahwa setelah Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas, maka pembangunan dalam Pelita V dan seterusnya diarahkan pada pengalaman Pancasila sesuai dengan uraian dari kelima sila dan dapat diwujudkan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam Pola Umum Pelita V disebutkan bahwa pengamalan Sila Persatuan Indonesia mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara sehingga makin kuat rasa kesetiakawanan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesetiakawanan sosial dan gotong royong memiliki jiwa dan sifat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial sejak dulu sudah dilaksanakan oleh rakyat Indonesia, antara lain mampu mengantar bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan dan mengusir penjajah dan dilanjutkan

Kegiatan sosial dapat dilakukan dalam berbagai sektor.

kemudian mengisi kemerdekaan dengan membangun di segala bidang.

Perlu disegarkan

Di alam pembangunan yang ditandai berbagai tantangan berat, jiwa kesetiakawanan sosial perlu terus disegarkan dan ditanamkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa pembangunan yang juga berkualitas sebagai bangsa pejuang.

Salah satu tujuan kita membangun adalah meningkatkan kualitas hidup. Tetapi untuk dapat membangun juga diperlukan manusia berkualitas. Salah satu cara menciptakan manusia menjadi manusia berkualitas adalah melalui pendidikan.

Di dalam salah satu Ketetapan SU MPR tahun 1988 disebutkan bahwa pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Rakyat Indonesia kini sedang menunggu penuh harap Rancangan Undang-Undang Pendidikan yang sedang diramu dan digodog oleh para wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR. Mengingat rasa kesetiakawanan sosial dapat menjadi modal dalam perjuangan dan pembangunan, diharapkan Undang-Undang Pendidikan nanti akan mencantumkan pentingnya arti kesetiakawanan sosial dalam bidang pendidikan. Dengan demikian kesetiakawanan sosial yang merupakan masalah mendasar dalam menuju pembangunan manusia seutuhnya akan semakin mantap guna menuju tinggal landas bangsa Indonesia khususnya menyongsong sasaran jangka panjang kedua.

Pendidikan yang merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, selain dapat menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas, taqwa, berbudi dan berkualitas juga harus mempunyai jiwa kesetiakawanan yang tinggi.

Pembangunan nasional yang sedang dan terus kita laksanakan dengan giat, bertujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang kemudian dilanjutkan berbagai usaha untuk memberi kesempatan yang luas dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat yang kurang beruntung termasuk mereka yang hidupnya terasing dan terbelakang.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial, perlu terus dikembangkan kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial serta diciptakan iklim yang dapat mendorong kegairah-

Digitized by Google

an dan kesetiakawanan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

Untuk menuju tercapainya kesejahteraan sosial, kita perlu menggalang rasa kesetiakawanan sosial di berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh antara lain pertahanan dan keamanan yang merupakan syarat lancarnya pembangunan nasional diperlukan partisipasi seluruh masyarakat untuk menjalin kesetiakawanan sosial pula. Untuk itu semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilandasi rasa kesetiakawanan yang tebal. Pendeknya semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan perlu menyusun program menurut bidang dan kemampuan serta profesi masing-masing dalam rangka melaksanakan GBHN.

Pelita V yang tinggal beberapa minggu kita mulai, mempunyai warna atau ciri yaitu kemandirian, keswadayaan, kesederhanaan, peningkatan, keterkaitan dan keterpaduan. Untuk dapat mewujudkan keenam ciri itu, kesetiakawanan sosial memegang peranan besar. Kita bisa mandiri membangun dengan tidak terlalu tergantung pada pihak lain memerlukan kesetiakawanan dari seluruh aparat negara, seluruh organisasi sosial politik serta rakyat Indonesia dari berbagai lapisan. Menciptakan usaha yang bersifat swadaya juga harus dilandasi kesetiakawanan sosial yang kuat. Sedangkan untuk melaksanakan hidup sederhana juga perlu mempunyai jiwa kesetiakawanan sosial yang tinggi agar tidak terjadi perbedaan menyolok antara yang mampu dan yang berlebihan dengan yang tidak punya.

Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai profesi dan bidangnya dalam Pelita V, kita perlu bertekad dan berusaha meningkatkan segala upaya agar mendapat hasil yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Guna meningkatkan berbagai kegiatan, sudah barang tentu, kita tingkatkan pula rasa kesetiakawanan sosial. Selain itu berbagai bidang yang berkaitan dan berbagai pihak yang terkait mengokohkan keterkaitannya dengan didasari jalinan kesetiakawanan sosial pula. Dengan semangat kesetiakawanan kita akan mudah memadukan semua program kegiatan dalam pembangunan.

Timbal balik

Kesetiakawanan sosial berlaku timbal balik untuk semua pihak, tidak hanya dari yang mampu kepada yang kurang mampu, yang pintar kepada yang bodoh, yang kaya kepada yang miskin, dari atasan kepada bawahan atau yang tua kepada yang muda. Sebagai contoh kalau kesetiakawanan sosial bersifat timbal balik antara lain, seorang bawahan dengan rela menyumbangkan darahnya untuk atasannya yang memerlukan karena sedang menjalani operasi pembedahan dari bagian tubuhnya. Sumbangan darah ini sulit dinilai dengan uang. Begitu pula ada orang yang tinggal di gubug kumuh pada waktu tertentu secara sukarela menyumbangkan darahnya kepada PMI. Darah tersebut sangat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan termasuk orang yang jauh lebih mampu. Di sini kelihatan sekali bahwa darah sumbangan tersebut tidak dapat diukur dengan materi.

Ciri Pelita V sudah jelas. Sekarang tinggal bagaimana kita menggairahkan kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan dan masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok dan sebagainya, untuk dapat merintis dan memelopori kegiatan tersebut secara langsung dalam bentuk kegiatan karya bakti sosial yang diperlukan oleh pihak lain sesuai dengan kemampuannya.

Bukan sedekah

Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan kesetiakawanan sosial bukan terpaku pada materi saja, tetapi dapat berbentuk jasa, ilmu pengetahuan, hobi, profesi, tulisan, pikiran dan tenaga. Dan kita harus menghindari cara berpikir dan anggapan bahwa kegiatan sosial hanya berupa pemberian dari yang kaya kepada yang tidak mampu. Kegiatan kesetiakawanan sosial bukan sedekah yang diiringi belas kasihan kepada seseorang atau pihak lain. Kesetiakawanan sosial merupakan kegiatan yang dapat dilakukan secara timbal balik sebab kekuatan sosial milik setiap pribadi rakyat Indonesia yang selama ini telah dibuktikan oleh rakyat Indonesia yang berfalsafah Pancasila seperti dalam perjuangan dan pembangunan. Sekarang tinggal membudayakan ke seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda mulai dari anak-anak. Jiwa kesetiakawanan sosial perlu ditanamkan dari individu dan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Di masa perjuangan fisik dengan senjata apa saja kita mampu mengusir dan melawan musuh yang persenjataannya jauh lebih banyak dan maju. Sekarang dengan pendapatan yang terbatas, masih memiliki dedikasi, disiplin dan loyalitas. Mengapa demikian? Karena kesetiakawanan sosial yang merupakan sifat dasar, masih kita miliki.

Untuk menumbuhkan kesetiakawanan sosial yang lebih tinggi, pemerintah terus berusaha mendorong dan menciptakan iklim ke arah terwujudnya kekuatan sosial masyarakat yang berakar dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan demikian bila hal ini terwujud akan dapat membantu mengatasi apa saja termasuk masalah ekonomi yang kompleks yang diwarnai oleh suasana kehidupan dari luar negeri. Masalah sosial dapat membantu mengatasi ekonomi, namun masalah ekonomi belum tentu dapat memecahkan masalah sosial. Karena kekuatan sosial merupakan kekuatan bangsa guna dapat diangkat sebagai kekuatan nasional untuk mensukseskan pembangunan dan pertahanan keamanan nasional.

Suasana demikian akan menumbuhkan rasa percaya diri dan menempatkan harga diri yang tidak dapat diukur dengan materi atau uang. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, santunan sosial, perbaikan daerah kumuh, meningkatkan kesejahteraan pedagang asongan dan kaki lima seperti penjual rokok, pengamen, tukang becak, pemulung dan sebagainya. Kegiatan sosial lainnya yang penting artinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup adalah penyuluhan dan penerapan oleh para cendekiawan, mahasiswa, pemuda, dan alim ulama yang dituangkan dalam bentuk penghijauan, khitanan massal, pengobatan cuma-cuma dan penyuluhan hukum.

Kegiatan kesetiakawanan sosial hendaknya menjadi budaya bangsa yang dilaksanakan secara sukarela dan terus-menerus, bukan sekedar formalitas mencari popularitas, bukan simbolis dan tidak pula sekedar hura-hura. Kesetiakawanan sosial tumbuh dari hati sanubari setiap orang, ditanamkan mulai dari keluarga sejak anak-anak, berkembang di masyarakat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila ini semua terwujud, niscaya pembangunan lancar, cita-cita adil makmur cepat tercapai dan dengan penuh gairah menghadapi pembangunan di masa mendatang.

Demikianlah sedikit tentang kesetiakawanan sosial yang perlu kita segarkan dan tanamkan terus demi suksesnya pembangunan nasional. □

Digitized by Google

Kenyamanan Kerja Perlu Diciptakan

Ada kecenderungan minat bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Terutama bagi kalangan angkatan kerja yang berada di pedesaan beralih ke sektor lain, sedangkan keterlibatan pemuda relatif rendah. Sehingga berdasarkan data sensus pertanian 1983 terdapat 25,8% petani yang berumur di bawah 35 tahun, 30,5% berumur antara 35-45 tahun dan 43,5% petani yang berumur di atas 45 tahun. Menurunnya angkatan kerja kalangan pemuda di sektor ini disebabkan pertanian tidak mampu memberikan penghasilan yang cukup bagi petani maupun buruh tani, daya tarik kota sangat mempengaruhi pemuda baik dari segi ekonomis, budaya, fasilitas atau psikologis dan pendidikan formal di pedesaan kurang berorientasi pada sektor pertanian serta pengembangan ekonomi pedesaan.

Untuk menyongsong Pelita V dan menjelang lepas landas dalam rangka mempertahankan swasembada pangan, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) memandang perlu mengupayakan terwujudnya pertanian yang tangguh di masa mendatang melalui Pendidikan dan Latihan Keterampilan Pemuda Tani AMPI se-Jawa Tengah di Semarang, belum lama ini.

Menyadari persoalan yang sedemikian rupa ini di sektor pertanian, Menteri Pertanian Ir. Wardoyo memberi pengarahan kepada peserta diklat lebih menekankan arti pertanian sebagai sistem agrobisnis daripada pertanian sebagai kegiatan produksi pertanian. Karena, sebabai sistem agrobisnis pertanian masih dapat menjanjikan kesempatan kerja cukup besar antara lain mencakup produksi pertanian, industri pertanian dan jasa penunjang yang meliputi perdagangan, pengepakan, pengemasan, perbankan, perbengkelan alat-alat pertanian serta transportasi hasil-hasil pertanian.

Ini berarti perubahan-perubahan mendasar dalam menangani pertanian secara agrobisnis menempatkan struktur ekonomi yang berimbang. Sedangkan hasil produksi pertanian diusahakan agar dapat lebih tinggi nilainya dengan berbagai rekayasa penanganan dan pengelolaan, sehingga sektor ini akan mampu mendukung sektor industri sebagai penyedia bahan baku. Sebaliknya, kegiatan produksi pertanian memerlukan dukungan sektor industri seperti barang-barang agrokimia, obat-obatan, alat dan mesin pertanian. Atau seperti digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai industri yang 'agrobased'. Oleh karena itu, kegiatan pertanian secara terpadu dengan menerapkan sistem agrobisnis dan agroindustri perlu dikembangkan di masyarakat pedesaan agar angkatan kerja yang ada dapat dimanfaatkan sekaligus menarik minat pemuda untuk bekerja di pedesaan.

Daya tarik kota mempengaruhi pemuda

"Untuk menarik dan merangsang pemuda pedesaan terlibat dalam kegiatan itu, maka perlu diciptakan produktivitas dan kenyamanan kerja. Citra dan kualitas hidup keluarga bagi yang terlibat di sektor ini dapat ditingkatkan. Dengan demikian perlu dikembangkan penggunaan teknologi tepat guna di sektor ini bagi kalangan masyarakat pedesaan supaya tingkat efisiensi dan profitabilitasnya makin meningkat," katanya.

Di samping itu berbagai upaya kongkrit yang terstruktur perlu dikembangkan untuk memasyarakatkan pandangan, bahwa petani dalam rekayasa sosial adalah mendudukkan petani-nelayan sebagai subyek pembangunan dan bukan menjadi obyek pembangunan. Baik di kalangan petani-nelayan maupun di kalangan aparat pertanian. Sehingga perlu langkah pembinaan kepemimpinan di pedesaan terhadap kalangan kontak tani-nelayan serta pemuda pedesaan itu sendiri secara sistematis menuju ke arah petani terdidik, tangguh dan mandiri. Sebab pertanian yang tangguh merupakan wahana untuk mencapai peningkatan produksi pertanian sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.

Program Prioritas

Ketua Departemen Pendidikan dan Latihan DPP AMPI, Drs. M. Mangisara Lubis mengakui bahwa penyelenggaraan diklat ini merupakan perwujudan dari pada isi GBHN dimana semua Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan kemampuannya melalui program-program kerja. Sedangkan AMPI sendiri menyadari persoalan pertanian ini merupakan persoalan nasional, sehingga dalam program umum AMPI yang dijabarkan menjadi program prioritas berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) II AMPI yang lalu diklat semacam ini perlu diwujudkan dalam bentuk program kerja AMPI. Apalagi Indonesia adalah negara yang agraria sekaligus mampu menuju ke arah swasembada pangan khususnya beras.

Adapun tujuan diklat antara lain menciptakan dan mengembangkan kemampuan kader-kader pemuda tani, memberikan motivasi kepada pemuda pedesaan agar mencintai pekerjaan di bidang pertanian serta menciptakan lapangan kerja baru melalui bidang pertanian itu. Bahkan, diharapkan hasil diklat ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian, mengurangi tingkat urbanisasi, meningkatkan citra dan harkat masyarakat yang bersangkutan.

Sementara pembicara dalam diklat ini selain Menteri Pertanian Ir. Wardoyo, juga menampilkan tenaga-tenaga pembicara dan pengajar yang profesional dalam pertanian. Baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, tokoh-tokoh organisasi politik, kemasyarakatan dan pejabat pemerintah.☐ DT

Digitized by Google

Kedamaian Itu Masih Jauh

Tentara Uni Sovyet, sudah harus meninggalkan Afganistan tanggal 15 Februari 1989. Sedikitnya 150.000 orang tentara Sovyet mencengkeram Kerajaan Islam di Asia Selatan itu, sejak bulan Desember 1979 lalu. Selama sembilan tahun, paling tidak telah meningkat sekitar 50.000 orang baik dari pihak Uni Sovyet maupun dari pihak gerilyawan Mujahidin. Lebih dari dua juta penduduk Afganistan meninggalkan tumpah darahnya mengungsi ke Pakistan. Mereka membangun perkemahan disepanjang perbatasan dengan Pakistan.

Keluarnya tentara Sovyet dari Afganistan, harusnya mendorong terciptanya perdamaian. Karena perlawanan yang dilakukan gerilyawan Mujahidin justru untuk mengurus tentara Sovyet dari Afganistan. Logikanya, jika tentara Sovyet ditarik pulang kampung, tentu Afganistan akan damai.

Ternyata, tuntutan kaum Mujahidin tidak hanya itu; mereka menuntut agar Presiden Najibullah juga mengundurkan diri dan akan menghidupkan kembali Kerajaan Afganistan seperti sebelum diperintah oleh kaum Marxis. Jadi di Afganistan hingga sekarang belum juga datang KEDAMAIAN.

Konflik antar bangsa Afganistan sendiri, kini membuat negeri itu seakan negeri tak bertuan, yang menjadi rebutan di antara sesama orang Afganistan sendiri. Jika dikaji lebih jauh, sesungguhnya yang terjadi sekarang di Afganistan adalah pertarungan kepentingan kedua negara adikuasa. Di atas penderitaan jutaan rakyat miskin, para pemimpin saling berebut kekuasaan. Afganistan justru menjadi semakin gersang tanpa kedamaian.

Dalam bulan Februari juga (tanggal 19 - 21) di Jakarta berlangsung Pertemuan JIM (Jakarta Informal Meetting) II. Pertemuan pertama, bulan Oktober 1988 lalu. Masalah yang dibahas dalam pertemuan itu adalah bagaimana mengakhiri konflik di Kamboja. Yang menjadi permasalahan, hampir sama dengan apa yang dialami Afganistan. Bagaimana mengakhiri dan penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja.

25 Desember 1978, pasukan Vietnam menyerbu Kamboja dan menggulingkan Pol Pot dan mengangkat Heng Samrin sebagai pengganti Pol Pot. Sejak itu, Pol Pot masuk hutan lalu melancarkan perang terhadap tentara Vietnam. Bersama dua kekuatan perlawanan Kamboja lainnya di bawah pimpinan son San dan Pangeran Shihanouk, mereka terus melakukan perlawanan terhadap tentara Vietnam. Heng Samrin kemudian diganti dengan PM. Hun Sen yang sekarang berkuasa. Perang masih terus berlangsung, kendati dalam intensitas yang lebih rendah dibanding pada tahun 1986/1987.

Upaya ASEAN untuk mengadakan JIM ini, sesungguhnya untuk mencari penyelesaian damai antara sesama kekuatan yang ada di Kamboja. Sudah sekian lama, sedikitnya lima tahun lalu upaya perdamaian Kamboja dilancarkan. Berulang kali ASEAN mengadakan pertemuan dengan pihak Vietnam untuk mencari penyelesaian. Tapi belum juga berhasil. JIM II juga belum banyak diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian damai secara tuntas di Kamboja.

Awal Februari 1989, sebuah tragedi mengerikan terjadi di Talangsari, sebuah desa di Lampung bagian Tengah. Sedikitnya 27 orang terbunuh dalam konflik antara pihak keamanan setempat dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Anwar. Yang paling mengerikan, Komandan Kodim dibunuh secara keji dan tak mau menyerahkan jenazahnya kepada pihak keamanan untuk dimakamkan.

GKP - ANWAR ini, sengaja mencatut istilah Islam untuk menarik perhatian yaitu nama Mujahidin Fisabillillah. Sebuah istilah yang menunjukkan kepahlawanan umat dalam suatu perang. Tetapi justru nama itu digunakan untuk melakukan pengkhianatan terhadap Islam dan Pancasila secara melawan hukum. Pengkhianatan itu secara langsung memojokkan umat yang sama sekali tak tahu apa-apa.

Peristiwa Talangsari sebenarnya merupakan bukti bahwa P-4 masih harus lebih dimantapkan lagi. Tindakan GPK Anwar muncul karena kurangnya penghayatan terhadap P-4, lemahnya iman dan kurangnya rasa kebangsaan. Itu berarti, Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila masih harus lebih dimasyarakatkan sampai ke pelosok desa. Agar masyarakat desa tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab semua kita untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Jika semua orang sudah memahami dan menghayati Pancasila secara sungguh-sungguh dan melaksanakannya secara konsekuen, maka kasus Talangsari pasti tak akan terjadi.□

Digitized by Google

Memantapkan Gerak Perjuangan Golkar Dalam Kehidupan Politik Kenegaraan

Seluruh kader Golkar yang berada di lembaga legislatif atau di mana pun bertugas diharapkan lebih giat bekerja, menghilangkan rasa takut dan berani menyatakan apa yang benar adalah benar, dan apa yang salah adalah salah. Seluruh jajaran kepemimpinan Golkar diharapkannya memberikan iklim dan suasana serta dorongan agar budaya ini berkembang demi sukses pembangunan bangsa. Segenap kader Golkar yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif juga disarankan agar melaksanakan misinya, menyukseskan Panca Krida Kabinet Pembangunan V, yang pada dasarnya mengayomi kepentingan rakyat banyak.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Golkar, Wahono pada konperensi pers, seusai penutupan Rapat Kerja Golkar di Jakarta, Rabu, 15 Februari lalu. Penjelasan Wahono kepada pers itu sekaligus dimaksudkan untuk mengungkapkan hasil-hasil yang dicapai dalam Raker yang berlangsung pada 13 - 14 Februari.

Segenap kader Golkar dituntut untuk melaksanakan semangat yang tertuang dalam ikrar Golkar yaitu "Panca Bhakti". Dengan berpegang pada semangat itu diharapkan keberadaan Golkar sungguh-sungguh mengakar di tengah-tengah rakyat, berperan aktif dalam menampung, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkembang secara dinamis serta mampu mengembangkan inspirasi dan kreativitas rakyat dalam pembangunan.

Tentang raker yang diikuti oleh segenap unsur pimpinan Golkar baik dari tingkat pusat maupun daerah, Wahono, yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Sugeng Widjaja (Ketua), Rachmat Witoelar (Sekjen), dan Anton Priyatno (Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi) mengatakan, kegiatan organisasi itu dimaksudkan untuk membahas program umum Golkar sebagaimana diamanatkan oleh Munas IV yang berlangsung 20 - 25 Oktober 1988 lalu. Munas Golkar itu menegaskan tekad untuk memantapkan perwujudan Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang dalam segala kegiatan dan penampilannya senantiasa berada pada posisi pelopor pembaruan dan pembangunan.

Sejalan dengan kedewasaannya, Golkar seyogyanya makin mandiri, berkualitas dan demokratis. Kader-kadernya pun diharapkan makin tangguh, trampil, loyal, berprestasi, dan berdedikasi sebagai kader bangsa yang pada dasarnya kader pembangunan dan kader Pancasila. Apabila kondisi itu terwujud, Golkar selain sebagai wadah dan wahana rakyat, juga sekaligus akan berperan sebagai alat perjuangan rakyat. Dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintah, Golkar pada dasarnya juga institusi pembangunan dan sarana untuk menggerakkan rakyat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Kepeloporan Golkar makin dituntut secara khusus dalam rangka pembangunan politik, di samping berbagai aspek pembangunan lainnya. Dalam hubungan ini, kata Wahono, Golkar harus mempunyai misi, kemampuan dan keberanian untuk selain menjadi teladan dan panutan juga memanfaatkan iklim dan suasana makro yang ada, dengan mengupayakan makin mantapnya perwujudan kehidupan yang konstitusional, demokratis, dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peningkatan Peran FKP

Atas pertanyaan tentang iklim keterbukaan serta keberanian untuk mengatakan benar dan salah yang dikaitkan dengan sikap Golkar di lembaga legislatif, Ketua DPP Golkar, Sugeng Widjaja mengatakan bahwa anggota FKP di DPR akan diminta untuk lebih vokal atau lebih bersuara dalam mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Pengertian vokal tidak hanya bicara asal keras, tetapi tidak lepas dari apa yang harus dipermasalahkan. Para anggota didorong untuk berani mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya dengan dasar pemahaman dan pendalaman

GOLKAR mengakar di tengah rakyat.

Digitized by Google

Indonesia tidak mengenal partai pemerintah dan oposisi

atas permasalahan.

Dikatakan lebih lanjut, FKP akan menempuh mekanisme kerja baru yang akan menetapkan bahwa penghimpunan data permasalahan tidak harus menunggu masa reses. Apabila pimpinan fraksi menganggap perlu ada masalah yang perlu ditinjau dan diteliti, dapat saja menugaskan sejumlah anggota FKP untuk segera melacak permasalahan tanpa menunggu masa reses.

Tentang masalah ini, Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar yang juga menjabat Sekretaris FKP DPR mengatakan, bahwa anggota FKP tidak perlu takut untuk di "recall", atau ditarik dari keanggotaannya hanya karena keberaniannya berbicara di forum legislatif itu. Golkar akan mencoba meningkatkan keterbukaan dan keberanian anggota FKP dengan menghilangkan ketakutan akan di "recall". "Recalling" tidak sembarangan dilakukan, sepanjang anggota DPR itu berpegang teguh pada ketentuan organisasi sebagaimana digariskan oleh Munas Golkar. Salah satu perwujudan iklim keterbukaan yang akan diterapkan oleh DPP Golkar kepada Fraksi ialah tata kerja FKP ditentukan oleh pimpinan fraksi itu sendiri, bukan oleh DPP.

Tanggung Jawab

Menteri Dalam Negeri, Rudini, yang tampil untuk memberikan pengarahan kepada peserta Raker mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Golkar sebagaimana tercermin dari kemenangan Pemilu yang lalu merupakan beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh organisasi kekuatan sospol ini. Sebagai perwujudan dalam memikul tanggung jawab atas kepercayaan rakyat itu, seluruh warga dan perangkat kepengurusan Golkar harus menempatkan diri sebagai panutan, khususnya dalam melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan.

Tentang hubungan dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lain, Rudini mengatakan, Golkar tidak mempunyi "onderbouw" berupa organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian Golkar tetap dibenarkan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai hubungan historis dengannya. Di lain pihak Golkar sebagai kekuatan sosial politik terbesar di Tanah Air dituntut untuk memberikan teladan dalam melaksanakan kehidupan politik dengan mewujudkan disiplin nasional dalam segala kegiatannya.

Diingatkan pula bahwa sasaran pembinaan politik dalam Pelita V nanti diarahkan untuk memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila, memperkuat kehidupan konstitusional demokratis dan tegaknya hukum, serta meningkatkan kualitas dan kemandirian serta kemampuan organsiasi kekuatan sosial politik. Pencapaian sasaran itu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pembina politik, tetapi juga tanggung jawab Golkar bersama organisasi kekuatan sosial politik lain. Kesemuanya dituntut untuk bersikap dan berperilaku politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi.

Tentang hubungan antara pemerintah dengan kekuatan sospol, Menteri mengatakan bahwa di Indonesia tidak dikenal partai pemerintah dan partai oposisi. Pemerintah akan selalu bersikap "fair" terhadap ketiga kekuatan sosial politik dengan memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama, dan sederajat. Dalam kaitan ini pula tiap kekuatan sosial politik juga dituntut untuk memenuhi aturan permainan demokrasi yang berlaku.

Selaras dengan pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 1975 yang diperbaruhi dengan UU Nomor 3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar, Rudini mengingatkan bahwa tiap kekuatan sosial politik harus melaporkan daftar anggotanya kepada Mendagri, dan memelihara daftar itu untuk kepentingan organisasi. Sehubungan dengan itu, diharapkan Golkar segera menyampaikan daftar yang telah disusunnya. "Ini memang pekerjaan rumah bagi pengurus organisasi kekuatan sosial politik, tetapi harus diselesaikan karena merupakan masalah mendasar sebagai upaya mewujudkan kehidupan infrastruktur politik yang sehat," kata Mendagri.

Digitized by Google

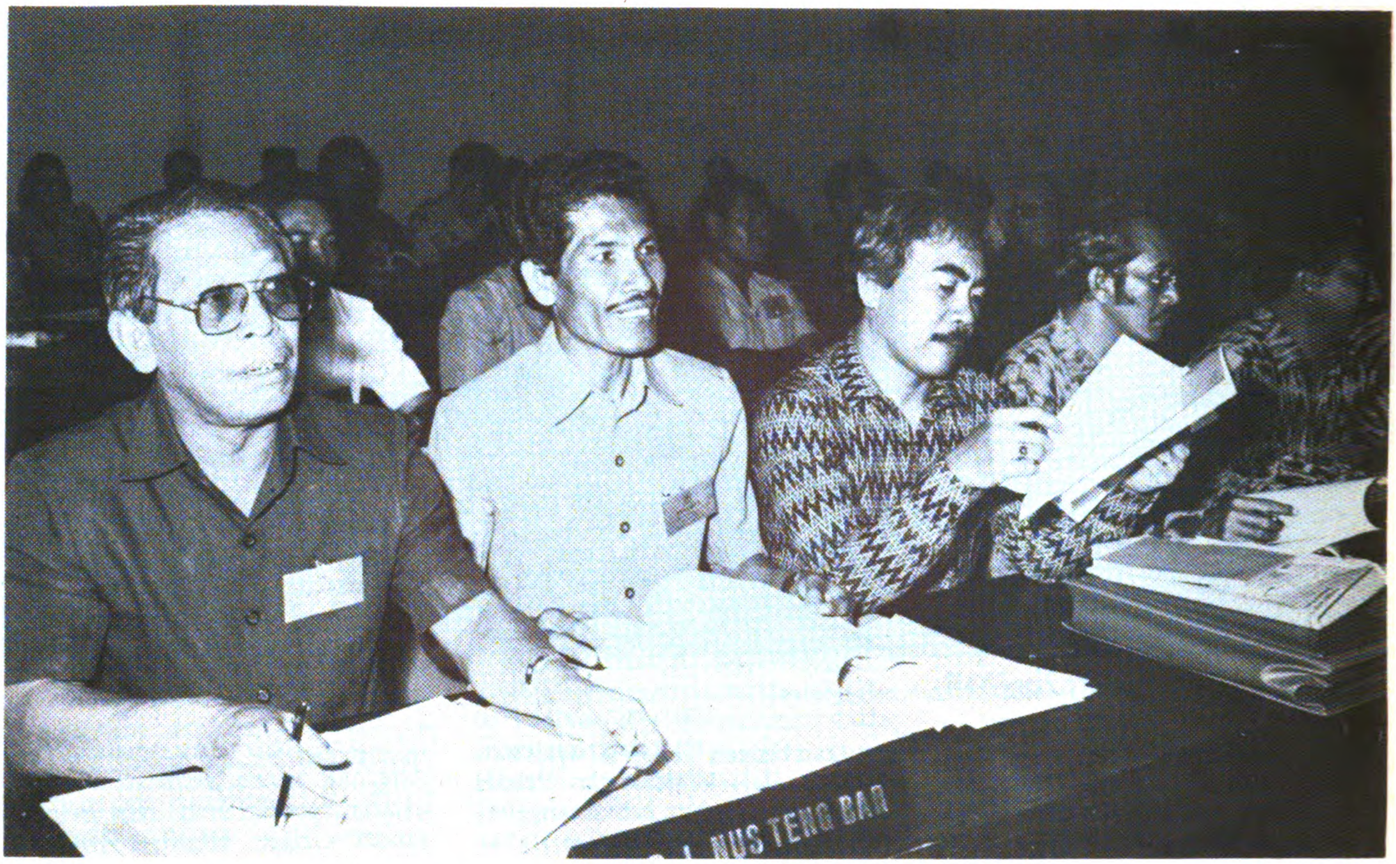

GOLKAR diharapkan menjaga keutuhan.

Ancaman Ideologis

Sementara itu Panglima ABRI Try Sutrisno dalam pengarahannya meningkatkan pula bahwa upaya-upaya pihak tertentu yang akan mengganti atau menghancurkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sampai saat ini bahkan sampai kapanpun akan tetap ada dan tetap merupakan ancaman yang bersifat laten dan potensial. Sebagai misal, peristiwa lokal yang terjadi akhir-akhir ini (Lampung), meskipun dalam skala kecil serta terbatas namun merupakan suatu peringatan bagi semua. Dalam kondisi stabilitas nasional yang semantap apapun, faktor kewaspadaan nasional tetap merupakan suatu keharusan yang mendasar. Karenanya tiap warganegara yang Pancasilais wajib berpartisipasi dalam menegakkan stabilitas nasional, khususnya dalam mewaspadai upaya-upaya yang akan menghancurkan Pancasila. Ditegaskan, kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara stabilitas nasional berada pada diri tiap warga negara.

Dalam kaitan dengan penegakan stabilitas nasional, ABRI bersikap tegas, tidak akan ragu-ragu menindak segala bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Tentang Golkar, Panglima ABRI mengingatkan agar para pimpinan organisasi menyadari bahwa Golkar sebagai organisasi kekuatan sospol terbesar perlu dikelola sebaik-baiknya. Para pimpinan Golkar diharapkan memiliki kemampuan tinggi dalam mengelola organisasi secara profesional, penuh semangat pengabdian dan semangat juang yang mendalam untuk mendarmabaktikan dirinya bagi kepentingan organisasi, bangsa dan negara, dengan memegang prinsip kesatuan dan persatuan, kebersamaan dan kekeluargaan, serta sikap disiplin. Segenap unsur Golkar diharapkan menjaga keutuhan dengan tetap setia kepada kesepakatan yang sudah diputuskan sejak pendiriannya.

Pangab juga menggarisbawahi bahwa konsep Golkar dalam mengembangkan wawasan kebangsaan sungguh relevan, mengingat saat ini penanaman wawasan kebangsaan bagi segenap warga negara merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan konsep itu, diharapkan para fungsionaris Golkar dapat menunjukkan sikap dan wawasan kebangsaan secara utuh, tidak terkotak-kotak dan tidak terbuai pengaruh pandangan sempit yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran primordial.

Untuk menghadapi Pemilu 1992 mendatang, Panglima ABRI berpesan agar Golkar segera menyiapkan konsep strategi untuk menghadapinya. Diingatkan, periode pemilu merupakan siklus yang membawa kerawanan karena suhu politik beranjak naik. Atas dasar pertimbangan itu diharapkan, dengan persiapan yang matang Golkar dapat menjadikan Pemilu berikut persiapannya berupa kampanye sebagai sarana pendidikan politik yang positif, tanpa warna kekacauan dan gangguan kamtibmas.

Tentang ABRI, Try menjelaskan bahwa perannya sebagai sospol merupakan pelaksanaan dari prinsip Dwi Fungsi. Dalam Dwi Fungsi itu dirumuskan bahwa peran ABRI sebagai kekuatan Sospol adalah konsep politik yang bersifat tetap dan merupakan tata nilai yang berlanjut serta melekat pada ABRI pada generasi mana pun. Dalam melaksanakan peran sospol itu, ABRI senantiasa mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan menolak paham politik adu kekuatan yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perpecahan yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran sospol ABRI tidak akan pernah menjurus kepada militerisme ataupun totaliterisme serta menolak paham-paham lain yang tidak sesuai dengan sistem nilai fundamental Pancasila. □

SGT

Digitized by Google

Angin Segar Dari Wahono

Sambut baik himbauan Wahono

Setidaknya ada dua himbauan menarik yang disampaikan Ketua Umum Golkar, Wahono. Dalam keterangan pers untuk menjelaskan hasil Rakernas, Wahono menyebut dua lembaga, yaitu legislatip dan eksekutip.

Himbauan yang disampaikan Wahono, Ketua Umum GOLKAR ini ditujukan kepada kader-kader GOLKAR yang berada di legislatip, agar lebih keras bekerja, menghilangkan rasa takut dan berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Sedangkan himbauan berikutnya yang ditujukan kepada kader GOLKAR yang berada di eksekutip, Wahono meminta agar betul-betul dan sungguh-sungguh melaksanakan misinya untuk menyukseskan Panca Krida Pembangunan V, yang pada dasarnya adalah sebagai pengayom kepentingan rakyat banyak.

Namun, apa kata anggota DPR mengenai ucapan yang disampaikan Ketua Umum Golkar ini. Tiga anggota DPR Palar Batubara dari FKP, Yahya Nasution dari PDI dan Tahir Hamsyah dari F-PDI mengemukakan pandangannya. Ketiga anggota DPR yang ditemui secara terpisah ini menyambut baik himbauan yang disampaikan Ketua Umum GOLKAR, Wahono. "Ini merupakan angin segar" kata Yahya Nasution, Wakil Ketua Fraksi PDI dan juga Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Yahya mengemukakan, Anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan merupakan yang paling banyak di antara fraksi-fraksi yang ada. Bila, himbauan Ketua Umum Golkar ini dapat dilaksanakan, maka gaung dari anggota ini akan makin vokal. Tetapi, kata Yahya, keterbukaan yang disampaikan dewan ini harus tetap berpegang pada budaya dan tata krama. Senada dengan Yahya, Tahir Hamsyah, ketua Fraksi dari FPP menambahkan, keterbukaan anggota dewan harus berpegang pada Pancasila, UUD 45 dan Agama.

Untuk memberikan citra anggota dewan agar tidak dianggap sebagai stempel yang tidak enak didengar masyarakat, Yahya mengharapkan agar anggota dewan pada saat-saat tertentu perlu menyuarakan yang agak keras. Kemudian dia mengambil contoh cara-cara yang disampaikan oleh Mendagri Rudini.

Sementara itu, Palar Batubara, anggota DPR dari F-KP ini menilai himbauan yang disampaikan Ketua Umum GOLKAR ini merupakan hal yang sangat baik. Dan, kata Palar himbauan ini merupakan suatu cara untuk menumbuhkan motivasi positip di kalangan anggota DPR. Dengan demikian, anggota dewan sebagai pelaksana dapat melakukan tugasnya dan dapat menampung aspirasi rakyat.

Untuk mewujudkan himbauan yang disampaikan Wahono ini, anggota dewan harus secara terus menerus meningkatkan kualitas dan dapat mengantisipasi kondisi dan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pembangunan.

Keterbukaan.

Menyinggung lebih jauh tentang keterbukaan seperti yang dihimbau oleh Ketua Umum Golkar yang ditujukan kepada kader GOLKAR di legislatip, Palar mengemukakan pandangannya, DPR sebagai lembaga pengawasan (controling) memang harus menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat, juga kepada pemerintah. Dengan demikian seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan akan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Dan dengan adanya kontrol yang dilakukan secara terbuka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Serta hal-hal yang digariskan oleh Garis Besar Haluan Negara akan dapat berjalan sesuai mustinya.

Dengan adanya keterbukaan yang dilakukan anggota dewan, khususnya F-KP ini diharapkan kiprahnya dapat dilihat oleh masyarakat pendukung GOLKAR. Dengan demikian masyarakat tidak kecewa memilih wakil-wakilnya, serta menjadikan masyarakat menaruh simpati kepada F-KP, khususnya kepada Golkar.

Peranan Pers

Dari tiga anggota DPR itu juga mengemukakan tentang keterbukaan anggota dewan yang ada selama ini. Dikemukakan, anggota dewan dalam mengemukakan aspirasinya sudah dilakukan secara terbuka dan bahkan vokal. Namun, ketiga anggota DPR ini membuat catatan, suara-suara yang vokal yang dibawakan anggota dewan ini sering kali tidak turun dalam media.

Menurut pengamatan Tahir Hamsyah, pers selama ini dalam meliput kegiatan-kegiatan di DPR, khususnya waktu mengadakan dengar pendapat, lebih sering memberitakan dari partner kerjanya. Padahal, kata Tahir anggota-anggota dewan dalam rapat-rapat komisi suaranya banyak yang vokal. Hal senada juga dikatakan oleh Yahya Nasution. "Pers kalau memberitakan yang vokal itu sering hanya dilakukan waktu wawancara saja. Namun, kata Palar, akhir-akhir ini pers juga sudah mulai memberitakan suara-suara vokal yang disampaikan anggota DPR.☐BM

Digitized by Google

Iuran Anggota Digalakkan Untuk Menuju Kemandirian Organisasi

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Sukses program GOLKAR, khususnya dalam bidang konsolidasi organisasi dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang iuran anggota GOLKAR, yang sudah menjadi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR Nomor 006/DPP/GOLKAR/11/1983. Kemudian keputusan ini disinggung kembali oleh Ketua DPP GOLKAR AE Manihuruk di depan peserta Munas IV GOLKAR, bahwa penghimpunan dana dari iuran anggota ini mempunyai arti penting bagi GOLKAR menuju dan mengarah kepada kemandirian organisasi. Bahkan, dari iuran anggota yang ditentukan sebesar Rp 100 nantinya bisa dijadikan sumber pemasukan dana operasional organisasi.

Terkait masalah penghimpunan iuran ini ternyata dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GOLKAR baru-baru ini, peserta rakernas dari unsur DPD GOLKAR tingkat I menyampaikan pandangannya kepada pimpinan DPP GOLKAR tentang pelaksanaan penghimpunan iuran anggota itu di samping membahas persoalan bobot kualitas kader-kader GOLKAR yang perlu ditingkatkan lagi.

Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Sumatera Utara Mudyono mengakui, bahwa pengurus GOLKAR yang dipimpinnya mengusulkan supaya iuran anggota ini digalakkan karena ini sudah menjadi konsensus kita dan tertulis dalam keputusan DPP GOLKAR tahun 1983 serta Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga GOLKAR. Jadi, kalau penjabaran daripada AD/ART ini tidak jalan, malu kita sebagai organisasi terbesar dan seharusnya kita mampu memberi contoh kepada organisasi yang lain supaya mampu melakukan hal sedemikian rupa. Pelaksanaan ini juga mengandung pendidikan politik bangsa. Artinya, warga GOLKAR yang sadar akan kewajibannya untuk membayar iuran tersebut otomatis akan merangsang masyarakat luas untuk sadar membayar kewajiban pajak, di samping itu secara idiil wawasan kita akan merasa ada kebersamaan. Ini yang dikehendaki Pancasila yaitu kegotong-

AE Manihuruk

royongan yang selama ini kita lupa, karena iuran anggota meskipun sebesar Rp 100 - itu suatu kegotongroyongan bersama.

"Atas dasar pemikiran dan ide dasar itu, Sumatera Utara menggebu-gebu untuk menegakkan, mensponsori dan menggalakkan iuran anggota ini cepat atau lambat dilaksanakan," kata Mudyono sembari menyebut DPD GOLKAR tingkat I Jawa Tengah yang sudah matang persiapannya untuk melaksanakan penghimpunan iuran anggota tersebut.

Mudyono

Sedangkan menyebut daerahnya sendiri, Mudyono mengatakan, dalam tingkat persiapan. Kendati demikian tentunya ada kendala-kendala, karena ini merupakan suatu kegiatan seolah-olah baru otomatis masyarakat GOLKAR akan menilai, bahwa pengurus baru ini tidak populer dan biasanya orang meski iuran itu sebesar Rp 100 bila ditarik tentu merasa kaget. Menghadapi problematik seperti ini Mudyono percaya bila kita bisa memanfaatkan uang itu dan mempertanggungjawabkan sebaik-baiknya, masyarakat akan setuju. Apalagi masalah itu sifatnya temporer dan secara tidak langsung akan menghapus kendala-kendala yang ada.

Dalam hal ini bila mendata kembali jumlah kader GOLKAR, sambungnya, penghimpunan iuran nantinya besar sekali karena memang kader GOLKAR dalam jumlah yang besar pula. Tapi persoalannya bukan hanya di situ saja, melainkan juga kita perlu menyempurnakan bobot kualitas kader sebagaimana tuntutan jaman yang makin berkembang. Baik penyempurnaan dalam bidang idiil, wawasan maupun cara berorganisasi. Ini harus kita mulai dengan gerak langkah yang mampu memberikan contoh tauladan. "Ketika saya dilantik menjadi Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Sumatera Utara, ada pesan khusus yang saya tekankan kepada pengurus bahwa jangan mentang-mentang menjadi pengurus minta dilayani. Tapi sebaliknya, kita harus bersikap melayani dan bersifat pamong kepada masyarakat luas. Misalnya, sebelum menjadi pengurus GOLKAR bila mobil kita ketabrak kendaraan orang lain tentu kita akan marah. Tapi, sekarang kita sebagai pengurus GOLKAR menghadapi persoalan seperti ini harus bisa menempatkan diri sebagai kader dan tidak perlu marah. Jadi kita mampu memberikan sikap yang tidak emosional," tuturnya.

Sementara untuk meningkatkan kualitas kader itu materi yang harus diutamakan, adalah penataran P4, kewaspadaan nasional, disiplin nasional, program GOLKAR dan memperkenalkan kembali apa itu GOLKAR. Untuk

Digitized by Google

itu, tambah Mudyono, Sumatera Utara dalam rakernas yang lalu mengusulkan supaya DPP GOLKAR menyusun sejarah GOLKAR. Karena dengan sejarah GOLKAR yang disusun baik dan objektif, maka terjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat dari sekaigus sebagai bahan Pemilu 1992 mendatang. Di samping itu Sumatera Utara menghendaki pula adanya peningkatan kehidupan demokrasi Pancasila, agar menumbuhkan jiwa persatuan, merasa memiliki dan terlibat dalam perjuangan GOLKAR. Sehingga akan memudahkan untuk diajak musyawarah.

Menghimpun Kekuatan

Pemungutan iuran bagi anggota ini oleh Ketua DPD GOLKAR Tingkat I DKI M. Basofi Sudirman dinilai sebagai persoalan kecil dan mudah dipecahkan. Apalagi GOLKAR, katanya, suatu organisasi yang besar dan memiliki kader besar pula. Bahkan, semua kader GOLKAR itu hebat — dari unsur aparat pemerintah sampai ke bawah adalah banyak kader GOLKAR. Namun orang bicara proses kader masih mempunyai pikiran pada tingkat bawah. Padahal yang 'gede-gede' itupun kader.

"Saya terlepas dari wakil gubernur dan Ketua DPD GOLKAR Tingkat I DKI, adalah kader. Sehingga jangan hanya memikirkan persoalan pemungutan iuran anggota, karena ini merupakan persoalan kecil dan mudah dicari jalan keluarnya. Apalagi banyak pengusaha yang menjadi kader GOLKAR, asalkan jangan secara parsial satu-satu bagaimana satu pengusaha dikejar-kejar untuk membantu, ya tidak bisa. Semua harus diprogramkan dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa," tegas M. Basofi Sudirman.

Adapun yang penting bagi Ketua DPD GOLKAR ini, adalah menghimpun kekuatan yang masih belum diikat. Kalau itu selesai semuanya akan selesai. Kar ena itu, jangan lupa bahwa GOLKAR kuat. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana menghimpun kader itu dengan bobot kualitas yang tidak bisa diragukan lagi.

Kemudian untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut Ketua DPD Tingkat I KGPH Mangkubumi, pemungutan iuran anggota ini sudah dilaksanakan di tingkat II dengan cara pemotongan terhadap gaji mereka (kader) yang khusus mempunyai KAG. Sedangkan bagi kader yang tidak mempunyai KAG, mereka tidak dipungut iuran.

M Basofi Sudirman

Penyampaian KGPH Mangkubumi ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam Keputusan DPP GOLKAR Nomor 006/DPP/GOLKAR/11/1983 tentang iuran anggota, dimana pada pasal I ayat 1 sampai 3 berbunyi bahwa setiap anggota GOLKAR wajib membayar iuran, besarnya iuran adalah sekurang-kurangnya Rp 100 untuk setiap bulan dan calon anggota GOLKAR dapat membayar iuran secara sukarela. Pasal II ayat 1 berbunyi, bahwa peruntukan iuran anggota/calon anggota GOLKAR ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut; a. 75% bagi DPD GOLKAR Tingkat II yang bersangkutan, b. 20% bagi DPD GOLKAR Tingkat I yang bersangkutan dan c. 5% bagi DPP GOLKAR.

Pasal II ayat 2 berbunyi penyetoran dari iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut; a. DPD GOLKAR Tingkat II wajib menyetorkan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada DPD GOLKAR Tingkat I dan DPP GOLKAR secara langsung menurut bagiannya masing-masing, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dan b. DPD GOLKAR Tingkat II berkewajiban mengirimkan tembusan tanda bukti setiap penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada DPP GOLKAR dan kepada DPD GOLKAR Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal III ayat 1 sampai 4 berbunyi bahwa pemungutan iuran anggota/calon anggota GOLKAR dapat dilakukan secara kolektif pada suatu unit kerja, pemungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan anggota GOLKAR yang ditunjuk di unit kerja yang bersangkutan, penunjukan anggota GOLKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh DPD GOLKAR Tingkat II yang bersangkutan dan iuran yang terkumpul disetorkan oleh anggota GOLKAR yang ditunjuk tersebut kepada DPD GOLKAR Tingkat II yang bersangkutan setiap bulan.

Dialog

Di samping itu Ketua DPD Tingkat I DIY yang akan memangku gelar Hamengkubuwono X menyinggung bobot kualitas kader, dimana katanya, persoalan ini sangat mendasar dan perlu sekali. Sehingga yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendorong mereka, membina dan di satu pihak memberi peluang kepada mereka yang berada di pedesaan, agar mempunyai inisiatif dan aktif di lingkungan wilayahnya. Paling sedikit dia sudah punya aktivitas, buah pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ikut aktif dalam menggerakkan gotong royong dan sebagainya. Namun demikian, satu faktor yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan pamong desa. Untuk itu sekarang persoalannya adalah bagaimana supaya mereka mempunyai peluang untuk melakukan dialog-dialog secara baik dan tidak mengundang 'kuping panas'.

KGPH Mangkubumi

"Yang penting, seorang kader bisa diarahkan dengan memberi penugasan dan karier kader. Dan ini diperlukan suatu motivasi pada diri kader itu untuk maju dengan segala pengetahuan yang dia serap dan bagaimana dia bisa dipacu untuk mempunyai spesialisasi tertentu di pedesaan, agar dia mempunyai kemungkinan-kemungkinan terlibat dan paling sedikit untuk di lingkungan wilayahnya," sambungnya.☐ DT

Digitized by Google

GUPPI Tempati Posisi Penting Dalam Proses Pembangunan Bangsa

Pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan

Pembangunan diri manusia secara pribadi maupun berkelompok sangat menentukan keberadaan bangsa di masa depan. Sedangkan pendidikan sebagai proses budaya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) menempati posisi yang penting serta strategis di dalam keseluruhan usaha pembangunan bangsa kita.

Ungkapan itu disampaikan Wakil Presiden Sudharmono, SH ketika meresmikan pembukaan Rakernas GUPPI di Jakarta, bulan lalu. Selanjutnya, Wapres mengakui bahwa tanpa pendidikan yang baik tidak mungkin kita membangun bangsa yang baik. Karena kegiatan pendidikan tidak lain, adalah proses pembentukan watak, peningkatan kecerdasan dan pembekalan ketrampilan kepada anak didik agar nanti menjadi manusia-manusia yang mampu menguasai masa depan.

Persiapan untuk itu sangat diperlukan dikarenakan masa depan yang kita hadapi akan penuh tantangan, perubahan yang serba cepat sekaligus perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Sehingga tanpa persiapan yang sedemikian rupa itu, tidak mustahil kita tidak mampu menguasai dan membangun masa depan bangsa seperti yang telah dicita-citakan. Malah sebaliknya, mungkin kita akan hancur dilanda perubahan-perubahan dan tuntutan masa depan itu sendiri. Dalam kaitan ini tentunya sangat tepat amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan demikian penting arti pendidikan dalam pembangunan nasional kita sehingga GBHN lebih menegaskan, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Atas dasar ini maka pemerintah selalu menyambut baik terhadap setiap usaha masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan termasuk apa yang telah dirintis serta diupayakan oleh GUPPI selama ini.

Sudharmono menilai tema rakernas 'Konsolidasi Organisasi dan Peningkatan Peranserta GUPPI Dalam Pelita V' merupakan tema yang mengandung harapan-harapan dan sesuai dengan situasi yang kita hadapi bersama, yaitu situasi seluruh bangsa Indonesia sedang membulatkan penyelesaian akhir pelaksanaan Pelita IV dan bersiap-siap memasuki tahun pertama pelaksanaan Pelita V. Adapun penyelenggaraan rakernas tepat sekali sebagai suatu forum evaluasi, untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pelaksanaan dari program GUPPI yang telah diamanatkan oleh Muktamar GUPPI tahun 1986 lalu.

Pergaulan Masyarakat

Sedangkan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam acara yang sama berpendapat, pendidikan merupakan upaya yang bukan saja ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, intelektualitas dan menambahkan ketrampilan. Juga pendidikan sebagai bagian yang sangat penting dari usaha besar kaderisasi bangsa. Sehingga pendidikan harus merupakan upaya terpadu untuk membentuk manusia pengamal Pancasila yang berkualitas. Yaitu, manusia yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian dan berdisiplin. Di sini GUPPI memiliki peranan yang besar dan menentukan dalam rangka menciptakan tahap tinggal landas, dimana sebagai tolok ukur dari tahap ini adalah kesiapan dan kemantapan sumber daya manusia pembangunan. Oleh karenanya, sampai sejauh mana bobot kesiapan dan kemantapan umat Islam dapat berfungsi dan berperan sebagai manusia pembangunan tersebut, sangat tergantung kepada ikhtiar pendidikan — termasuk pendidikan agama. Apalagi permasalahan pokok dewasa ini yang sedang dihadapi bangsa dalam menderapkan ikhtiar pendidikan, di samping menghadirkan Undang-Undang Pendidikan Nasional untuk menentukan sistem pendidikan nasional yang jernih dan jelas sebagai pengamalan Pancasila. Bahkan mengupayakan untuk meningkatkan mutu dan memperluas jangkauannya guna menyerasikan bobot pendidikan di sekolah di dalam keluarga dan lebih penting bagi GUPPI adalah dalam pergaulan masyarakat.

"GOLKAR dalam hal ini menyadari

Digitized by Google

Program GUPPI konsisten dan menunjang sektor-sektor lain

sepenuhnya betapa pentingnya peranan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia maupun sebagai sumber inspirasi, motivasi pembangunan moral dan spiritual masyarakat bangsa," tegas Wahono.

Berdasarkan jalannya perkembangan sejarah yang ditampilkan GUPPI terhadap konsepsi perjuangan Orde Baru, Ketua Umum DPP GOLKAR ini percaya atas kemampuan para fungsionaris dan pengasuh GUPPI dalam mengaktualisasikan penghayatan terhadap keberadaan GUPPI dan sesuai dengan sejarah keberadaannya. Sedangkan GOLKAR mengharapkan semuanya dapat sejalan. Dalam rumusan hasil Lokakarya GUPPI tahun 1986, katanya, menyebutkan masalah pendidikan dan pembinaan umat Islam yang mengarah pada peningkatan Ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan umat Islam dalam pembangunan nasional, melestarikan dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pembangunan di bidang pendidikan nasional dan sebagainya.

Apalagi pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sehingga pembangunan pendidikan direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten dengan pembangunan sektor-sektor lainnya, yang dalam Repelita V tetap tertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sejajar dengan hal itu, lanjut Wahono, prakarsa dan peranserta sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkat, baik dalam mutu kualitas pendidikan maupun kuantitas kelembagaannya.

Dalam kaitan ini tentunya penyelenggaraan rakernas ini momentumnya tepat sekali, dimana DPR sendiri sedang giat-giatnya membahas RUU pendidikan dan RUU APBN tahun 1989-1990. Sedangkan GOLKAR mengharapkan, agar rakernas ini menghasilkan rumusan pemikiran yang mampu menjabarkan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan amanat GBHN 1988. Sehingga program GUPPI sendiri konsisten dan dapat menunjang pembangunan sektor-sektor lain dengan memperhatikan pula prinsip kebutuhan pembangunan, pemerataan dan keterjangkauan dalam mengembangkan serta memanfaatkan jasa pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat.☐ DT

YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSIL (UNEF)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA "STIESIA"

D/H STIPAK SURABAYA

STATUS : DIAKUI S.K. Mendikbud no. 071/0/1985, untuk program studi : S_1 & D_{III}

Jurusan : Manajemen Keuangan, Perpajakan, Bea Cukai, dan Akuntansi

Dewan Manajemen Yayasan Pendidikan Universil & Dewan Pendidikan & Pengajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Mengucapkan Selamat Tahun Baru 1989

UNIVERSAL EDUCATION FOUNDATION UNEF

Badan Hukum Pembina : Yayasan Pendidikan Universil (UNEF) Akte Notaris Goesti Djohan no. 30 tgl. 20 - 8 - 1971

Kantor Pusat : Jalan Pemuda 17, Tromol Pos 39, Telepon (031) 472118 Surabaya

Kampus : Jalan Menur Pumpungan no. 30, Telepon (031) 597505 - 597840 Surabaya

Digitized by Google

Pergantian Antar Waktu Ketua Departemen Tani dan Nelayan

Teka-teki siapa yang menduduki posisi Ir. Sartoyo di Departemen Tani dan Nelayan DPP GOLKAR 1988-1993, setelah dia mengundurkan diri, terjawab sudah dengan kehadiran Widjanarko Puspoyo M.A, Sekjen DPP AMPI. Dan jawaban itu langsung dikemukakan oleh Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono kepada wartawan ketika memberikan keterangan pers sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional GOLKAR di Jakarta.

Pergantian antarwaktu Ketua Departemen Tani dan Nelayan ini dinilai Wahono sangat tepat untuk menunjuk diri Widjanarko Puspoyo, karena ia adalah figur generasi muda yang punya dedikasi, loyalitas dan potensi dalam bidang Tani dan Nelayan. Bahkan Wahono sendiri mengakui memilih Widjanarko Puspoyo bukan untuk menenangkan 'hati' sebuah organisasi kepemudaan yang pernah mengggugat DPP GOLKAR atas kehadiran Drs. Slamet Effendi Yusuf sebagai Ketua Departemen Kepemudaan. Namun, kini semua itu pupus sudah dan semua pihak merasa puas terhadap keputusan tersebut.

"Ia masih muda, dinamis, potensial dan memiliki PDLT yang baik," tegas Wahono. Sementara itu figur Widjanarko Puspoyo adalah figur yang sudah tidak asing lagi bagi lingkungan atau jajaran keluarga besar GOLKAR. Karena, ia aktivis yang cukup mampu untuk mengembangkan program kerja dan pemikiran-pemikiran yang konsepsional. Apalagi dalam bidang pertanian, ia mempunyai pengalaman yang tidak perlu disangsikan. Begitupun dalam dunia organisasi ia selama menjadi Sekjen DPP AMPI senantiasa terlibat kegiatan, baik yang bersifat politik maupun bersifat pengabdian masyarakat. Sehingga pemilihan Wahono terhadap Widjanarko Puspoyo ini tidak salah pengamatan, sebagai langkah DPP GOLKAR dalam melakukan pembinaan generasi muda dan sekaligus sebagai penerus cita-cita perjuangan GOLKAR.

Tokoh pemuda yang lebih akrab dengan panggilan Mas Widjan ini

Widjanarko Puspoyo MA

dengan wawasan berpikir yang luas mengakui, bahwa dirinya siap menerima penugasan dari DPP GOLKAR sebagaimana kader-kader GOLKAR yang lain. Karenanya, ia tidak begitu kaget atau menganggap luar biasa dengan adanya pengangkatan dirinya sebagai Ketua Departemen Tani dan Nelayan DPP GOLKAR itu. Bahkan pengisian komposisi itu, dinilainya, sebagai hal yang wajar dan bukan suatu hal yang perlu disambut dengan perasaan berlebihan. "Saya adalah kader GOLKAR kendatipun saya bukan salah satu ketua departemen. Kini, apalagi sebagai salah seorang pengurus sudah barang tentu tidak mengurangi arti daripada penunjukkan itu. Saya siap melakukan penugasan DPP GOLKAR dan melaksanakan program-program kerja yang menyangkut bidang Pertanian dan Nelayan," sambungnya.

Widjanarko yang sudah lama berkecimpung dalam KUD (Koperasi Unit Desa) mengatakan, bahwa dalam dunia koperasi dan pertanian banyak waktu yang terbuang. Karena pengelolaan organisasi di tingkat pedesaan sangat lemah. Kelemahan itu disebabkan oleh sulitnya usaha memodernisir cara bertani dan pengelolaan organisasi di pedesaan dan belum koordinatifnya pemerintah dalam memproses peningkatan kehidupan di pedesaan, sehingga hal ini menjadi kendala. Sedangkan Bulog dan Departemen Pertanian sering berbenturan dalam menerapkan kebijaksanaan yang berkait dengan pertanian di pedesaan.

Menghadapi problematik di bidang pertanian ini, Widjanarko sebagai Ketua Departemen Tani dan Nelayan telah mempersiapkan program kerja bersifat strategis dan teknis. Untuk itu, apa yang bisa dilakukan GOLKAR dalam melakukan terobosan-terobosan dengan mengambil keuntungan sebagai organisasi kekuatan sosial politik terbesar yang mempunyai kader dimana-mana, seharusnya dia bisa berbuat mulai dari masalah penggarapan peraturan-peraturan melalui UU dan melalui pendekatannya kalangan eksekutif yang melaksanakan aktivitas sehari-hari di bidang peraturan itu sampai kepada kader-kader pengusahanya yang memang bergerak di bidang Tani dan Nelayan tersebut. Ini harus dilakukan GOLKAR dan sekarang apakah GOLKAR sudah melakukan inventarisasikan jumlah kader-kader GOLKAR yang bergerak di bidang pertanian atau nelayan. Kalau itu sudah diinventarisasikan, langsung deretkan inventarisasi masalah dengan satu prioritas masalah yaitu masalah teknis dan strategis. "Saya sudah mulai menginventarisasikan masalah dengan menguraikan satu persatu permasalahan," tegasnya.

Tapi, Widjanarko menilai, dalam hal ini pada akhirnya politik diperlukan sebagai kekuatan untuk mendukung konsep. Sehingga suatu kewajaran bila orang berpaling pada kekuatan politik tertentu untuk merealisasikan konsepnya. Karena tanpa kekuatan politik yang besar tidak mungkin konsep itu bisa berhasil.

"Perkembangan koperasi di pedesaan masih banyak kendala yang dikarenakan adanya campur tangan pemerintah. Misalnya, hal-hal yang bersifat sepele atau kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat tertentu, agar bisa cair. Itu namanya over birokrasi," tambahnya sembari menerima utusan nelayan dari Muara Bungo. □ DT

Digitized by Google

Tatap Muka di Timtim dan NTT

Ketua Umum DPP GOLKAR, Wahono, dan rombongan, akhir Januari lalu mengadakan kunjungan kerja ke dua propinsi bertetangga di wilayah timur yaitu Timor Timur (TIMTIM) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di kedua propinsi ini Wahono yang disertai Nyonya Mientarsih Wahono bertatap muka dengan keluarga besar GOLKAR.

Sederhana

Di bandar udara Comoro, Dili, rombongan disambut tarian oleh sekelompok gadis Timtim dengan alunan gitar dan lagu yang didengungkan oleh murid-murid SPG yang kemudian diselingi oleh pekik "hidup.....GOLKAR." Dari sini Wahono beserta rombongan diantar Ketua DPD I GOLKAR Timtim, Raimundo Sarmento serta Ketua Dewan Pertimbangan Mario Viegas Carrascalao, menuju hotel Turisimo yang menghadap pelabuhan Dili untuk beristirahat dan makan siang, sebelum melanjutkan pertemuan tatap muka dengan kader-kader GOLKAR di kantor DPD I Timtim.

Pada pertemuan dengan kader-kader GOLKAR di kantor DPD I, Wahono memuji perjuangan kader-kader disana yang telah membawa rakyat Timtim menyalurkan kepercayaan mereka 100 persen kepada GOLKAR seperti yang terlihat dalam hasil pemilu selama ini. Untuk itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali berusaha mati-matian mempertahankan kebesaran GOLKAR yang telah diperlihatkan dalam kurun kehadirannya 24 tahun sekarang ini.

Acara yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan keliling kota Dili, membawa rombongan melalui jalan-jalan utama disana. Pembangunan memang terasa bergelora di propinsi termuda ini. Dili yang bersih dan teratur adalah kesan yang paling kentara. Wahono dan rombongan tidak lupa mampir melihat Katedral Dili, bangunan megah yang cukup mewah. Katedral ini diresmikan oleh Presiden Soeharto beberapa waktu yang lalu.

Wahono dalam kunjungan di NTT

Wahono pada keempatan itu menyerahkan bantuan untuk menyempurnakan beberapa bagian bangunan tersebut yang belum rampung.

Puncak acara berlangsung malam hari di Gedung Matahari Terbit dalam tatap muka dengan keluarga besar GOLKAR Timtim. Wahono dalam kesempatan ini menekankan akan arti kebesaran GOLKAR yang harus dipertahankan agar semakin mantap dan mendalam. Kebesaran GOLKAR, katanya, terletak pada jiwa, cita-cita, sikap politik dan konsistensi perjuangannya. "Besarnya jumlah pemilih dan pendukung GOLKAR di setiap Pemilu, pada hakekatnya hanyalah merupakan akibat logis dari penampilan politik GOLKAR tersebut," tegas Wahono.

Nilai dasar kejuangan GOLKAR tidak lain terletak pada cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasar pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, melalui fungsinya sebagai organisasi kekuatan sosial politik. Nilai dasar itu mengamanatkan bahwa GOLKAR tidak boleh hanya membawakan aspirasi kelompok atau golongan tertentu, melainkan harus tetap mampu memperjuangkan kepentingan umum, yaitu kepentingan seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. "Inilah sikap dasar GOLKAR yang harus disadari dan selalu disadarkan pada setiap warga GOLKAR," kata Wahono.

Kesan yang paling kentara dalam rangkaian kunjungan disana, adalah kesederhanaan, baik dari perjalanan sejak di Bandara Soekarno-Hatta, dimana rombongan berbaur dengan penumpang umum dalam commercial flight, maupun penyambutan. Kesederhanaan adalah nilai yang memiliki daya pikat tersendiri. GOLKAR menyadari itu!

Ekspor Tuna

Dili yang bersih dan tertib ditinggalkan rombongan keesokan harinya. Pesawat Merpati yang membawa rombongan dari bandar udara Comoro selama 50 menit, mendarat mulus di bandara El Tari, Kupang, NTT. Di pintu masuk ke ruangan VIP, terpampang spanduk, "Selamat Datang Wahono." Tarian adat Natoni oleh gadis-gadis Timor ikut menyambut rombongan di pintu ruang tunggu VIP. Namun sebelum memasuki ruang tunggu, Wahono "dipaksa" oleh serombongan tokoh masyarakat setempat yang berikrar mendukung dan terus berjuang dalam panji-panji GOLKAR.

Kepada pemuka-pemuka masyarakat itu Wahono mengatakan sangat berterimakasih atas tekad dan dukungan itu. NTT, khususnya Kupang yang terakhir kali disinggahi Wahono 20 tahun silam dalam operasi Mandala di Irian Barat, ternyata tetap saja memikat. Inti dari penegasan Wahono ini ialah di mana pun letak sebuah propinsi di nusantara ini, dia adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Di luar bandara El Tari, kader-kader GOLKAR ternyata telah menunggu. Sebuah mike terpasang di ujung jalan, dan Ketua DPD I GOLKAR NTT, Yan Yos Botha membimbing Wahono ke sana. Massa ikut memekik, begitu Wahono meneriakkan "hidup.....GOLKAR."

Rombongan yang juga dijemput oleh Ketua Dewan Pertimbangan H Fernandez itu, berangkat menuju kantor DPD I GOLKAR NTT, untuk

Digitized by Google

bertatap muka. Dalam laporannya, Yan Yos Botha mengatakan bahwa GOLKAR di NTT bertambah mantap dari tahun ke tahun. Perubahan suara pemilih dari pemilu ke pemilu walaupun turun naik, tetap mencerminkan bahwa GOLKAR merupakan pilihan yang terbaik bagi masyarakat NTT dewasa ini. Sejumlah data tentang kader dan prestasi diungkapkannya dalam pertemuan tersebut.

Sebagaimana di Dili, Wahono dalam kesempatan di Kupang mengingatkan para kader bahwa perjuangan GOLKAR ke depan tidaklah enteng. Kemenangan besar GOLKAR secara nasional dalam pemilu yang lalu di satu sisi menunjukkan militansi para kader yang luar biasa, tetapi sekaligus menantang. Artinya perjuangan GOLKAR di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan kemenangan besar tersebut.

Masyarakat pemilih yang kian maju dan kritis menyebabkan mereka tidak dengan sendirinya mempercayai program dan slogan yang tidak aplikatif. Untuk itu, kata Wahono, sangat penting kader-kader GOLKAR setempat memahami dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang hidup di tengah-tengah masyarakat NTT.

Apa yang diingatkan Wahono ini rupanya cukup menggugah Ketua Dewan Pertimbangan H Fernandez. Dalam sambutannya, Fernandez yang gubernur NTT ini mengatakan, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan apa yang ia selalu ingatkan kepada pengurus GOLKAR di NTT bahwa tantangan terbesar masyarakat disana adalah bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat yang tergolong paling rendah di Indonesia. Untuk ini cara yang paling ampuh ialah meningkatkan nilai jual potensi-potensi produksi tradisional masyarakat NTT seperti hasil ternak dan beberapa komoditi yang ada.

Fernandez memberi perhatian khusus terhadap potensi ekspor tuna NTT. Kepada Wahono ia ungkapkan bahwa tuna di NTT mempunyai nilai ekspor tersendiri. Tetapi yang menjadi hambatan sekarang adalah mata rantai ekspor yang terlalu panjang, yaitu harus melalui Jakarta atau Surabaya. Karena itu ia menghimbau agar pelabuhan udara di Maumere NTT ditingkatkan mutunya sehingga bisa didarati oleh pesawat besar untuk mengangkut ikan tuna itu ke Kupang untuk dilanjutkan ke Sydney atau Canberra di Australia. Dari sana bisa diterbangkan ke Tokyo dan kota-kota lain di Jepang yang selama ini menjadi sasaran ekspor tuna Indonesia. Mata rantai ini lebih singkat bila dibanding harus melalui Jakarta, sebab dari Sydney atau Canberra ada penerbangan tiap hari ke Tokyo.

Pemikiran yang baik ini menurut Wahono akan diperjuangkan di Jakarta agar kalau mungkin direalisasi.

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu diakhiri, ketika rombongan berangkat menuju rumah kediaman ketua Wantim untuk makan siang sambil menunggu penerbangan Kupang-Jakarta. Rombongan akhirnya meninggalkan Kupang dengan pesawat Garuda. Beberapa anggota rombongan sempat menyeletuk "my heart stay in Kupang."

Dalam perjalanan tatap muka di Timtim dan NTT itu, Wahono disertai anggota dari DPP seperti Sekjen Rachmat Witoelar, Ny Tati S Darsoyo (Wakil Bendahara), Imam Soedarwo (Ketua), Djoko Soedjatmiko, Umar Mansoer, Jacob Tobing, Freddy Latumahina, Thomas Suyatno dan para fungsionaris non-DPP lainnya.☐(LT)

JAYA RAYA

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUSAHAAN AIR MINUM JAYA

Jalan Penjernihan II — Pejompongan
Telp. : 581943 - 582652 - 582938 - 582334 - 582256 - 587019
Telex : 44216 PAMJAYA

- **GUNAKAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN POKOK SAJA**
- **MENCUCI KENDARAAN DENGAN AIR BERSIH PERBUATAN YANG TIDAK MANUSIAWI**
- **MENUNGGAK REKENING AIR MENANGGUNG BEBAN MALU DAN MENGHAMBAT PEMBANGUNAN**
- **MENYEDOT AIR SEBELUM METER DIANCAM PIDANA KURUNGAN**

Digitized by Google

FKP Mampu Menciptakan Iklim Demokrasi Pancasila di Lembaga Legislatif

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Wahono mengharapkan Fraksi Karya Pembangunan (FKP) untuk dapat lebih mengkonsolidasikan diri dan meningkatkan kualitas serta dedikasinya untuk dapat mengemban tugas-tugas konstitusional dan memenuhi harapan rakyat. Harapan itu dikemukakan Ketua Umum DPP GOLKAR pada peringatan HUT ke XXI FKP di Gedung MPR/DPR, 13 Pebruari baru-baru ini.

Lebih lanjut Ketua Umum DPP GOLKAR menyatakan, anggota-anggota Fraksi Karya Pembangunan yang merupakan kader-kader GOLKAR yang berkualitas tinggi, mempunyai wawasan kebangsaan yang tebal dan wawasan kenegaraan yang menjangkau jauh kedepan serta rela berkorban tanpa pamrih dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat, mampu menciptakan iklim demokrasi Pancasila di lembaga legislatif dan mampu memelihara kekeluargaan, saling pengertian di antara semua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai kader GOLKAR yang tangguh, perilaku para anggota Fraksi Karya Pembangunan dalam mengembangkan dan meningkatkan diri dalam berkiprah sebagai wakil rakyat yang telah dipercaya lewat PEMILU untuk mewakili GOLKAR dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat, hendaknya selalu berpedoman hasil MUNAS IV GOLKAR yang merupakan penjabaran secara konkrit dari ideologi Nasional, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, tegas Ketua Umum.

Sadar akan hal itu, Fraksi Karya Pembangunan sebagai instrumen politik agar mampu mengembangkan sikap disiplin organisasi, disiplin nasional dan panggilan hati nurani berdasarkan keyakinan kebenaran Pancasila dan Garis Politik Organisasi.

Disini perlu dikembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik bagi setiap anggota Fraksi Karya Pembangunan diperlukan kebulatan tekad, keteguhan semangat, komitmen yang tinggi terhadap perjuangan serta kejelasan missi perjuangan. Itu semua adalah bekal yang sangat bermanfaat untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa mendatang, mengingat tantangan yang akan dihadapi Bangsa dan Masyarakat kita semakin besar dan kompleks.

HUT ke XXI Fraksi Karya Pembangunan.

Menurut Wahono, tahap pembangunan Repelita V adalah periode yang sangat kritis, karena pada saat itulah kita harus menyelesaikan pemantapan kerangka landasan di bidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan hankam guna menghadapi proses tinggal landas. Keberhasilan atau kegagalan kita dalam menyongsong proses tinggal landas sangat ditentukan dalam Repelita V. Namun hal ini, jangan sampai membuat hati kita menjadi kecut. Wahono merasa yakin bahwa, GOLKAR yang kader-kadernya tersebar di Lembaga Eksekutif dan Legislatif, akan dapat menghadapi dan menanggulangi tantangan-tantangan itu, asalkan kita bersatu padu dalam satu gerak langkah dalam memusatkan perjuangan kita untuk kepentingan rakyat.

Namun Wahono juga mengingatkan, walau GOLKAR adalah kekuatan sosial politik terbesar dan Fraksi Karya Pembangunan sangat dominan di lembaga legislatif janganlah berpretensi bahwa GOLKAR atau Fraksi Karya Pembangunan mampu menyelesaikan sendiri semua persoalan dan permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Dan perlu kita ingat bahwa dalam sejarah Republik ini tidak pernah ada satu kekuatan pun yang mampu membangun bangsa ini secara sendiri. Tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang mampu menangani permasalahan bangsa ini secara sendirian, sekalipun kelompok itu adalah kelompok terbesar.

Karena itu, sebagai bangsa yang

Digitized by Google

bhinneka kita harus tetap bergandengan tangan satu dengan yang lain di atas landasan ideologi Nasional Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Karenanya Wahono menyerukan, pereratlah kerjasama dan adakan senantiasa musyawarah dengan seluruh kekuatan sosial politik dan semua kekuatan organisasi kemasyarakatan untuk mencapai titik temu bersama, yang berupa konsensus-konsensus Nasional.

Sikap dan pendirian itu harus melekat di dada setiap kader-kader GOLKAR di lembaga legislatif, karena di lembaga inilah dibahas, dimusyawarahkan dan diputuskan undang-undang yang bersifat nasional, dalam rangka pembangunan hukum nasional, prinsip bahwa semua warga negara tanpa kecuali adalah sama di depan hukum hendaknya dapat dipertahankan oleh anggota Fraksi Karya Pembangunan jangan sampai dari lembaga terhormat ini mengalir suatu produk perundangan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, ujarnya.

Sejalan dengan seruan Ketua Umum GOLKAR, Ketua FKP Suharto dalam kesempatan itu menyatakan, FKP sebagai Fraksi terbesar bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh menyaring suara dan aspirasi rakyat itu, yang kemudian menyalurkan secara konstruktif untuk memberi corak kerakyatan pada keputusan-keputusan politik nasional.

Fraksi Karya Pembangunan yang merupakan badan pelaksana kebijaksanaan GOLKAR di lembaga legislatif adalah mitra kerja Pemerintah di dalam membahas berbagai kebijaksanaan nasional pada forum DPR. Dan karena DPR adalah sistim ketatanegaraan kita juga mempunyai tugas mengawasi Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang dan GBHN, maka dalam melaksanakan tugas itu Fraksi Karya Pembangunan bersikap kritis, konstruktif dan positif. Sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab, Fraksi Karya Pembangunan akan memberikan dukungan kepada Pemerintah dengan sikap yang kritis dan kreatif, kata pimpinan FKP Suharto.

Di lain fihak, lanjut, Suharto, FKP akan memperjuangkan dengan gigih aspirasi masyarakat sebagai tuntutan yang disalurkan secara tertib dan penuh rasa tanggung jawab sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Untuk meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada rakyat, Suharto selaku Ketua FKP menyerukan kepada segenap anggota Fraksi Karya Pembangunan agar secara sungguh-sungguh mendengarkan dan menyerap suara hati rakyat serta menyuarakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. "Suarakanlah apa yang dirasakan oleh rakyat, katakanlah dengan jujur dan obyektif kenyataan-kenyataan kehidupan yang dialami rakyat banyak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang setepat-tepatnya", ujarnya.

Menyinggung Repelita V Ketua FKP Suharto mengungkapkan, sebagai tahap persiapan akhir menjelang dimulainya proses tinggal landas, maka Repelita V mengemban tugas cukup berat. Berbagai langkah pemantapan, konsolidasi, reorientasi dan pembenahan yang bersifat mendasar perlu kita rampungkan dalam lima tahun ini. Pemantapan landasan tersebut mencakup sendi-sendi utama pembangunan dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, keagamaan dan pertahanan keamanan untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan dimasa mendatang.

Dalam Repelita V prioritas pembangunan yang tetap diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat sektor pertanian dan sektor industri, menurut Suharto, tantangan pembangunan nasional pada lima tahun mendatang adalah menuntaskan pemantapan kerangka landasan bidang Ekonomi. Untuk itu perlu dirumuskan langkah-langkah untuk menciptakan suatu mekanisme fungsional yang mengatur peranan dan kaitan serta koordinasi dari badan-badan usaha ekonomi dalam menghasilkan dan mendistribusikan barang-barang serta jasa-jasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mekanisme fungsional itu perlu diberi dasar hukum yang melandasi sistim perekonomian nasional sebagai pengamalan Pancasila. Hal ini berarti dalam Repelita V perangkat hukum dibidang ekonomi seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum perbankan, hukum asuransi dan lain-lainnya hendaknya dapat diwujudkan.

Dalam kesempatan itu Ketua FKP juga menyinggung berbagai hal yang menyangkut pembangunan dibidang politik dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang mencakup pembudayaan ideologi Pancasila, meningkatkan berfungsinya kelembagaan-kelembagaan politik dan meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Juga disinggung pembangunan bidang hubungan luar negeri, yang merupakan amanat konstitusi kita. Karena itulah Fraksi Karya Pembangunan akan memperjuangkan agar dalam Repelita V masalah hubungan luar negeri mendapat perhatian yang semestinya.

Sementara itu, Kharis Suhud, dalam sambutannya mengharapkan Fraksi Karya Pembangunan sebagai fraksi terbesar agar lebih peka menangkap bisikan suara hati dan tuntutan rakyat guna diperjuangkan dalam kerangka demokrasi Pancasila yang sebagaimana dibuktikan selama ini.

Sebagai konsekuensi logis, kata Kharis Suhud, FKP sebagai Fraksi yang terbesar di dalam Dewan dan terbesar di dalam Majelis, maka akan selalu menjadi pusat perhatian, pusat tumpuan harapan. Bukan saja dari warga pendukungnya, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Sebab, walaupun mengelompok di dalam FKP, namun pengelompokan tersebut tidak berarti pengabdian dan perjuangan FKP di dalam Dewan maupun di dalam Majelis hanya untuk kepentingan golongan atau fraksi saja. Tapi hendaknya juga merupakan pengejawantahan aspirasi dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, lanjut Kharis Suhud, FKP sebagai fraksi yang terbesar harus menjadi contoh kerja keras dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi pancasila, khususnya dalam pembahasan Undang-Undang yang akan dihasilkan. Dengan demikian, FKP dapat memberikan suasana yang lebih mantap akan kepastian hukum masyarakat dan dapat memberikan arah yang tepat bagi jalannya pembangunan nasional.

Beranjak dari hal tersebut di atas, maka FKP harus tetap menyuarakan hati dan menjawab keinginan-keinginan rakyat. Selain itu harus menyadari bahwa menjadi pimpinan kekuatan sosial politik adalah karena rakyat. "Ini merupakan konsekuensi karena negara Indonesia adalah negara demokrasi". Untuk itu, kata Kharis Suhud lebih lanjut, perjuangan Fraksi Karya harus benar-benar bermanfaat bagi rakyat, menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat sebagaimana sumpah jabatan yang pernah diikrarkan. Untuk itu, FKP agar menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dan menambah kekecewaan rakyat.☐ sa/wt

Kesan Baik Parlemen Australia

Indonesia dan Australia mempunyai kesamaan kepentingan.

Kita ketahui hubungan Indonesia-Australia sempat terganggu akibat sikap pemberitaan pers Australia yang cenderung menyampaikan isu-isu negatif tentang Indonesia. "Sebagai puncaknya terjadi tahun 1986, akibat sebuah artikel yang ditulis David Jenkins" yang terus merembet sampai saat ini. Hingga mengaburkan hubungan baik antara "Indonesia dan Australia yang mempunyai banyak kepentingan bersama, terutama kepentingan ekonomi yang akan merupakan dasar bagi perkembangan hubungan bersahabat antara kedua negara".

Dalam rangka mengatasi kesenjangan itu berbagai upaya kedua pemerintah telah dilakukan, termasuk hubungan wakil-wakil rakyatnya. Seperti baru-baru ini delegasi parlemen Australia mengadakan kunjungan ke Indonesia atas undangan DPR-RI. Mereka mendapat kesempatan melihat keadaan di Indonesia yang sebenarnya, di samping juga mendapat kesempatan bertemu dengan para pejabat-pejabat tinggi di Indonesia.

Selain diterima Presiden Soeharto, juga mengadakan pertemuan dengan Menlu Ali Alatas, menteri Transmigrasi Sugiharto, panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dan Pimpinan orsospol terbesar Indonesia di DPP GOLKAR.

Di Kantor DPP GOLKAR, delegasi Parlemen Australia yang terdiri Keith Wrighat sebagai Pimpinan, yang berasal dari Partai Buruh Australia, Jemes Donald dari Partai Liberal, Senator Ckris Schact Partai Liberal, Peter John dari Partai Nasional Australia dan D Elder anggota Parlemen termuda Australia, yang diterima Drs. Jacob Tobing, MPA mewakili Ketua Umum, didampingi Dr. Suhadi Wakil Sekjen, Tati Darsoyo Wakil Bendahara dan Aulia Rachman, SH Dept. Cendekiawan dan Hubungan Luar Negeri.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam di DPP GOLKAR itu membicarakan berbagai hal kedua Negara termasuk sistim pemerintahan dalam hubungannya dengan wakil-wakil rakyatnya yang duduk di DPR atau Parlemen.

Gencar dipertanyakan Parlemen Australia dalam pertemuan itu di antaranya yang menyangkut masalah Idiologi, bersih lingkungan yang akhir-akhir ini agak menghangat dan tata kerja hubungan DPR dan Pemerintah.

Dalam kesempatan itu Jacob Tobing menguraikan sejarah perkembangan Golongan Karya yang sejak kelahirannya telah berasaskan Pancasila atau beridiologi Pancasila. Dan atas perjuangannya pula sehingga Pancasila menjadi satu-satunya asas berbangsa dan bernegara bagi kehidupan organisasi sosial politik dan organisasi sosial kemasyarakatan. Dan telah disepakati pula bagi rakyat Indonesia untuk menolak faham Komunis. Dikatakan pula bahwa DPR merupakan patner Pemerintah dalam mengemban amanat penderitaan rakyat. Oleh karenanya dalam hubungan tatakerjanya dengan pemerintah ada istilah Dengar Pendapat, "hubungan setengah kamar, sebelum permasalahannya diangkat ke permukaan", kata Jacob Tobing yang juga anggota DPR sejak tahun 71.

Selama di Indonesia anggota Parlemen Australia itu berkesempatan juga mengunjungi wilayah Propinsi Timor-Timur, Irian, NTB dan daerah lainnya di Indonesia.

Setelah mereka dengan mata kepala sendiri melihat perkembangan pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan di Timor-Timur, mereka mengemukakan kesannya yang begitu baik. "Posisi Indonesia di Timor-Timur sangat baik dan kami mendukung sekali keberadaan Timor-Timur di Indonesia. Dan dukungan ini diberikan tentunya setelah kita melihat sendiri medannya," perkembangan di Timor-Timur saat ini memang begitu mengesankan dan begitu maju dibandingkan waktu-waktu yang lalu. "Untuk itulah, kita cukup terkesan dan kalau saja lebih banyak lagi orang Australia yang bisa melihat kenyataan yang sebenarnya di Timtim, mereka pasti akan berkesan sama," ujar Ketua delegasi Parlemen Australia Keith Webb Wright dalam jumpa pers sebelum meninggalkan Indonesia. Seraya mengalunkan syair Indonesia Indah, yang digubahnya sendiri, ... beautiful island. Indonesia is a magic island. Paradise culture ... memberikan kesan selama 8 hari di Indonesia.□ (wt)

Digitized by Google

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Pembangunan nasional tidak terlepas dari persoalan kesehatan masyarakat. Faktor ini sangat menunjang maju mundurnya atau perwujudan gerak pembangunan yang menjadi program pemerintah dalam menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak mengherankan kehadiran Rumah Sakit Karya Bhakti mempunyai arti penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Baru-baru ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (DPP GOLKAR) Wahono melakukan peletakan batu pertama, sebagai tanda perluasan pembangunan Rumah Sakit Karya Bhakti Unit IV di Jalan dr. Semeru, Kodya Bogor, Jawa Barat.

Perluasan pembangunan gedung rumah sakit ini bagi Wahono merupakan suatu fasilitas yang menunjukkan adanya peningkatan terhadap pembangunan pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai ujung tombak kesehatan di tengah masyarakat perlu ditopang dan ditunjang oleh unit-unit atau rumah sakit yang lain. Sedangkan bagi GOLKAR perluasan pembangunan gedung rumah sakit ini mempunyai arti tersendiri, bahwa kader-kader GOLKAR telah mampu mewujudkan karya nyata melalui pengabdian kepada masyarakat tanpa pamrih dibidang kesehatan. Apalagi fungsi rumah sakit adalah sosial, sehingga sudah menjadi kewajiban para tenaga medis dan pengurus Rumah Sakit Karya Bhakti untuk lebih mementingkan melayani masyarakat yang akan berobat.

Peningkatan pembangunan pelayanan masyarakat.

"Kader GOLKAR yang mengelola rumah sakit ini harus menomorsatukan perawatan dan pelayanan kesehatan calon pasien daripada memikirkan biaya perawatan. Lebih-lebih terhadap masyarakat yang kurang mampu mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan. Ini penting sekali bagi pengelola rumah sakit dalam mengemban misi perjuangan GOLKAR," tegas Wahono.

Menomorsatukan perawatan dan pelayanan.

Tarif Tinggi

Sementara itu Menteri Kesehatan Adhyatma MPH dalam kesempatan meresmikan penggunaan gedung perawatan Rumah Sakit Karya Bhakti Unit III dan awal pembangunan Unit IV mengemukakan bahwa, kehadiran rumah ini merupakan wujud amanat GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai peran serta dalam pembangunan. Ini secara tidak langsung menunjukkan pelayanan kesehatan makin tersebar di tingkat kabupaten dan

Digitized by Google

kecamatan. Dengan demikian sejalan dengan keberhasilan pembangunan, taraf hidup masyarakat Indonesia makin meningkat dan umur harapan penduduk Indonesia pun bertambah tinggi. Bila pada akhir Pelita IV umur harapan hidup adalah 62 tahun, maka akhir Pelita V diharapkan mencapai 65 tahun. Berkaitan dengan itu tentu semakin banyak orang tua usia lanjut (manula) dan makin banyak penyakit orang tua, sehingga tuntutan pelayanan kesehatan pun akan makin meningkat. Baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sedang penyakit cenderung berubah dari penyakit infeksi menjadi penyakit yang menahun atau kanker dan sebagainya. Hal ini, kata Menteri Kesehatan, membutuhkan cara pengobatan dan perawatan yang mahal sekaligus memakan waktu lebih lama, akibatnya pelayanan kesehatan kesehatan cenderung menjadi lebih mahal. Karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam bidang kesehatan ini, maka peran serta masyarakat termasuk kalangan swasta pada masa mendatang akan menjadi lebih penting dalam mengambil bagian untuk menyediakan pelayanan kesehatan ini.

Atas dasar ini pemerintah sangat menghargai upaya seperti ini sebagai suatu dukungan positif masyarakat dan swasta dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Lebih-lebih peranan Yayasan Karya Bhakti untuk tidak mengembangkan rumah sakit yang mewah di kota-kota besar dengan memasang tarif tinggi, yang hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat yang mampu. Melainkan mengembangkan rumah sakit yang sederhana di tingkat kotamadya dengan tarif yang wajar dan dapat dinikmati masyarakat banyak termasuk masyarakat yang tidak mampu.

''Sistem rujukan dari Posyandu ke Puskesmas dan selanjutnya ke rumah sakit ini supaya terus ditingkatkan. Untuk itu perlu adanya hubungan kerja yang baik antara pimpinan-pimpinan Puskesmas, Balai Pengobatan dengan Rumah Sakit Karya Bhakti khususnya untuk Bogor, yang belum mempunyai rumah sakit tipe C dari pemerintah daerah setempat,'' kata Menteri Adhyatma sembari mengeluarkan instruksi kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Bogor dan DKI Jakarta agar rumah sakit ini dapat berjalan lancar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sekaligus diingatkan kepada pengelola rumah sakit untuk menata manajemen rumah sakit sedemikian rupa dengan pengaturan jumlah tempat tidur perkelas supaya rumah sakit tidak mengalami kerugian.

Biaya Pengobatan Gratis

Rumah sakit yang berdiri tahun 1989 di atas tanah seluas 5 hektar ini merupakan rumah sakit yang hanya dilengkapi gedung perawatan dan pelayanan kesehatan 'serba guna', dimana awal fasilitas gedung unit I itu seluas 1000 m2 antara lain ruang direksi, administrasi, laboratorium, apotik, medical record, poliklinik, gawat darurat, rotgen, operasi, bersalin dan perawatan operasi. Pembagian ruangan yang sedemikian rupa ini tidak membuat putus asa bagi pengelola serta tenaga medis rumah sakit. Mereka terus berjuang untuk mewujudkan sebuah impian menjadi kenyataan. Dr. Subagio mengakui bahwa kondisi rumah sakit ini tidak menggoyahkan semangat, bahkan menambah daya juang kader-kader GOLKAR guna melanjutkan pembangunan gedung dan fasilitas perawatan dan pelayanan kesehatan masyarakat ini. Kemudian, tahun 1986 mulai dibangun lagi gedung Unit II seluas 800 m2 dengan fasilitas ruang perawatan yang lebih luas, tahun 1989 diresmikan Unit III seluas 840 m2 dan dilanjutkan pula dengan pengembangan rumah sakit memasuki pembangunan gedung Unit IV di atas tanah 1000 m2.

''Pasien yang mendapat rekomendasi dari GOLKAR akan mendapat keringanan biaya perawatan. Karena rumah sakit ini tidak lain mengemban dan menjabarkan nilai-nilai perjuangan GOLKAR,'' kata dr. Subagio.

Dalam peresmian ini ditandai pula dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, Menteri Adhyatma MPH, Menteri Ir. Sarwono Kusumaatmadja dan Menteri Cosmas Batubara.☐ DT

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

Mengucapkan :

Selamat Hari Natal 25 Desember 1988
dan
Tahun Baru 1989

Digitized by Google

Oleh : Rusli Desa

Kualitas Ideologi Kader Golongan Karya

Dalam setiap HUT Golongan Karya yang ke 24, hampir semua pembicara pada HUT tersebut mengatakan pentingnya arti kualitas dari kader Golongan Karya. Siapa yang tidak menghendaki kualitas dalam setiap pekerjaan atau usaha apapun adalah tidak rasional. Malahan kini orang berbicara bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau demikian adalah tuntutan yang mutlak bagaimana, agar kader Golongan Karya berkualitas. Kualitas makin perlu terus ditingkatkan, karena perkembangan zaman atau teknologi yang makin canggih atau maju. Jadi masalah kader, bukan hanya masalah kuantitas, tetapi lebih dari itu adalah kualitas yang akan menentukan kokoh dan kuatnya pertahanan organisasi maupun operasionalnya.

Manakala berbicara masalah kualitas kader Golongan Karya, tentu harus dipertanyakan lebih dahulu, kualitas bagaimana yang dipersoalkan. Apakah kualitas teknis dalam pekerjaan? Apakah hanya kualitas dalam berorganisasi saja? Apakah kualitas kader dalam mengendalikan pemerintah baik bidang eksekutif maupun dibidang legislatif? Apakah kualitas menurut profesinya si kader Golkar? Masih banyak yang perlu dipertanyakan tentang kualitas si kader Golkar?

Golongan Karya semenjak berdirinya tentu telah mempunyai kader. Makin meningkat perjuangan Golongan Karya itu makin ditingkatkan juga jumlah dan kualitas kader. Tentu kader secara pelan akan menyusut karena dimakan usia atau karena sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Namun dilain pihak tentu kader itu akan patah tumbuh hilang berganti. Dengan demikian kehadiran kader itu akan terus-menerus tanpa mengenal akhir dari setiap perjuangan. Apalagi kalau itu disebut perjuangan politik dari suatu kekuatan sosial politik yang terbesar di Indonesia dewasa ini yaitu Golongan Karya.

Pembentukan kader adalah masalah

prinsipil. Kader adalah tulang punggung atau tenaga inti organisasi, penggerak organisasi. Jadi pembentukan kader bukan hanya tatkala akan ada pemilihan umum saja. Lebih jauh dari itu maksud adanya kader. Oleh karena itu dalam pembentukan kader semenjak semula harus sudah dilaksanakan penyeleksian yang ketat sedemikian rupa, agar kader yang dibentuk itu bukan penyusupan atau sengaja disusupkan kedalam batang tubuh Golongan Karya oleh pihak lain. Sebab adalah sangat membahayakan, apabila dalam membentuk kader dari permulaan tidak benar-benar diseleksi akan hanya mempunyai kader yang di dalam dirinya lain dari apa yang dijalankannya. Akibat fatal dari kader yang demikian itu akan melemahkan organisasi dari dalam. Kader yang tidak terseleksi semenjak semula akan merusak batang tubuh Golongan Karya. Biasanya kader yang memang diselinapkan kedalam Golongan Karya akan sangat pandai memainkan peranan dan menghambakan dirinya dengan prinsip, bahwa kader tersebut akan mempergunakan Golongan Karya memperjuangkan pesan organisasinya semula. Dan pada gilirannya orang akan terkicuh. Kader yang menyelinap, kader yang dikatrol ke Golkar itu jiwanyapun retak, karena kesetiaan permanen kepada organisasinya semula tetap ada. Hanya mempergunakan Golkar sebagai batu loncatan sementara ada kelumpuhan organisasinya, yang memang disana ia digembleng atau digodok. Kader seperti ini bumerang bagi Golkar. Itulah sebabnya dalam pembentukan kader bukan hanya berlaku bersih diri tetapi juga berlaku bersih lingkungan. Bersih dari pengaruh ekstrim kiri maupun ekstrim kanan.

Kualitas Ideologi

Semenjak semula telah dinyatakan, bahwa Golongan Karya bukan hanya pengumpul suara belaka demi menangnya dalam pemilihan umum. Golongan Karya adalah benteng Pancasila dan UUD 1945. Golongan Karya adalah benteng ideologi Pancasila. Apabila demikian masalahnya, berarti kader yang sangat urgent bagi Golongan Karya ialah kader yang kualitas ideologinya tinggi. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas ialah bahwa kualitas yang dibicarakan tentang kader ialah kualitas ideologi. Karena apa? Ideologi adalah segala-galanya. Apabila kader yang kualitas ideologinya kurang, maka otomatis ia tidak akan tahu tujuan ideologi dan bagaimana melaksanakan atau merancang program yang sesuai dengan ideologi. Yang dimaksud ideologi disini tentu Pancasila yang telah merupakan dasar negara, pandangan hidup dan falsafah bagi bangsa Indonesia.

Benar bahwa Pancasila telah merupakan satu-satunya asas bagi kekuatan Partai Politik dan Golongan Karya serta Organisasi Kemasyarakatan, tetapi itu baru dalam proses perjalanan. Masalah ideologi tidaklah dalam sehari dua hari atau sekali jadi. Belum suatu jaminan, apabila telah menerima satu-satunya asas Pancasila, bahwa ia akan bertindak sesuai dengan Pancasila atau budaya politik akan sesui dengan Pancasila. Ini bukan prasangka, melainkan karena semenjak

Digitized by Google

Kualitas kader perlu terus dikembangkan.

semula menentang Pancasila atau meyakini ideologi lain cukup dominan. Mungkin juga penerimaan terhadap satu-satunya asas Pancasila itu karena motivasi lain, untuk menyesuaikan diri dengan sikon kalau tidak demikian berarti akan gulung tikar. Disinilah diperlukan selektifitas. Hanya orang atau organisasi yang semenjak semula mempunyai kesetiaan permanen kepada Pancasila yang akan dapat diandalkan. Hanya orang yang tidak pernah ingin menambah atau mengurangi atau menghapuskan Pancasilalah yang akan dapat merupakan sumber kader Golongan Karya yang kualitas ideologinya dapat dipercaya. Kalau demikian perlu yang jelas sumber kader. Sumber yang terpercaya. Kualitas ideologi kader sangat diperlukan, sebab kualitas ideologi kelak akan tercermin, apabila kader menjadi pemimpin dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Kualitas ideologi si kader akan tercermin dalam pembentukan perundang-undangan atau peraturan yang dibuatnya dan bagaimana pula dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa ideologi akan tercermin dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam. Tepatlah apabila dikatakan, bahwa ideologi adalah segala-galanya. Jika dikaitkan dengan ucapan Ketua Umum Golongan Karya Wahono, bahwa peran politik Golongan Karya memiliki tiga dimensi yang tidak dapat terpisah yaitu menjaga ideologi Pancasila dan Wawasan Nasional, mendinamisasi lingkungan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan menjadi tenaga inti organisasi untuk mengakarkan Golongan Karya di masyarakat.

Kader Golongan Karya yang tinggi kualitas ideologinya akan selalu mencatat atas dasar sejarah bahwa Pancasila selalu dalam ancaman atau tantangan. Adanya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Pemberontakan Andi Azis, Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta (PRRI/PERMESTA), Papua Merdeka, Peristiwa Madiun 1948 (PKI), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Gerakan 30 September PKI (G 30-S/PKI) serta kaum ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Semuanya itu tantangan terhadap ideologi Pancasila serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kader Golkar tentu akan mencatat bahwa konflik ideologi dan keyakinan terhadap prinsip perjuangan mengenai kenegaraan dan dasar negara telah pula dialami di dalam Majelis Konstituante hasil Pemilihan Umum tahun 1955.

Majelis Konstituante dibubarkan tahun 1959 dan kembalilah ke Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan mempelajari peristiwa sidang Majelis Konstituante di Bandung itu akan jelas mana yang menerima Pancasila dan mana pula yang tidak setuju Pancasila. Apakah dengan telah kembali ke UUD 1945 itu konflik ideologi telah berakhir. Juga belum. Timbul kemudian polarisasi dengan konsep Nasakom. Berdasarkan hal yang demikian akan bertambah jelas, bahwa faktor ideologi yang menjadi penyebab timbulnya pertikaian dan konflik-konflik. Pertikaian ideologi memuncak lagi dengan timbulnya G-30-S/PKI. Dan sejarah mencatat Pancasila tetap pada posisi yang memenangkan dalam pertarungan atau pertikaian. Dan setiap terjadi konflik ideologi akan selalu menimbulkan korban. Jadi benarlah bahwa dengan adanya satu-satunya asas Pancasila itu konflik ideologi dapat dihindarkan. Namun kadang-kadang sementara orang cepat lupa akan konflik ideologi yang telah terjadi sebagai akibat politik praktis dalam bentuk rangkul-merangkul mencari dukungan untuk kekuasaan. Disinilah diperlukan kewaspadaan terus menerus, walaupun pada prinsipnya Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Dan jangan sampai kulitnya Pancasila tetapi pada hakekatnya lain dari maksud, makna dan hakekat Pancasila murni.

Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnyalah, kalau Golkar yang diharapkan sebagai benteng Pancasila akan mempunyai kader yang kualitas ideologinyalah yang utama. Kader Golkar yang berkualitas memahami dan melaksanakan pula Wawasan Nusantara, berwawasan nasional dan tidak primordial. Kader Golkar yang berkualitas yang mengerti makna, hakekat dan melaksanakan Doktrin Golongan Karya. Sudah saatnya Golongan Karya menangani secara tuntas dalam batang tubuh sendiri akan peningkatan kualitas dalam bidang ideologi dan Doktrin Golkar.

Patut diingatkan apa yang dikatakan oleh Dr. Cheppy Hari Cahyono bahwa ideologi boleh jadi merupakan salah satu istilah yang paling kontroversial dalam perkembangan pemikiran "politik" di negara kita. Betapa tidak. Masyarakat luas pada umumnya enggan untuk berbicara soal ideologi. Mereka umumnya menghindarkan diri untuk berdebat soal ideologi. Tetapi bersamaan dengan itu kehidupan mereka sehari-hari tidak lepas dari pengaruh ideologi.

Kiranya tiga dimensi yang dimiliki oleh kader Golkar seperti yang dikatakan Ketua Umum Golkar Wahono, membuka peluang untuk tidak seperti apa yang dikatakan oleh Drs. Cheppy Hari Cahyono.□

Digitized by Google

JIM II Belum Berhasil Tuntaskan Krisis Kamboja

Indonesia telah memainkan peranan diplomatik.

Hanya sebuah kesepakatan umum yang bisa dihasilkan Jakarta Informal Meeting Kedua (JIM II) yang menyangkut semua aspek konflik Kamboja. Para pihak yang bertikai belum bersepakat tentang langkah-langkah konkrit perdamaian di Kamboja. Mereka masih harus mengkaji lebih lanjut rumusan tentang perdamaian itu baik yang menyangkut kondisi internal maupun kaitan eksternalnya dengan dunia luar.

Memang para peserta sepakat untuk beberapa hal penting seperti: penarikan mundur pasukan Vietnam, pencegahan kembalinya rejim Pol Pot, penghentian bantuan dan campur tangan asing, mekanisme kontrol Internasional, aspek internal Kamboja, perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara serta upaya penyelenggaraan sebuah konferensi Internasional untuk mencari penyelesaian damai secara menyeluruh di Kamboja.

Pertemuan 4 faksi

Dalam kesepakatan umum yang terdiri dari 19 pasal itu, ada bagian (pasal 12 dan 13) yang menyebutkan bahwa peserta JIM II setuju agar keempat faksi Kamboja (PRK, kelompok Son San, Norodom Sihanouk dan Khien Samphan) perlu bertemu untuk membahas masalah-masalah internal di antara mereka. Khususnya setelah penarikan mundur pasukan Vietnam. Keempat faksi diberi waktu empat bulan jika mungkin lebih awal, untuk melaporkan hasil pertemuan mereka itu kepada peserta JIM (tidak disebutkan dimana pertemuan untuk melaporkan hasil tersebut).

Masalah-masalah intern yang harus dibicarakan keempat faksi itu adalah masalah pemilihan umum di bawah pengawasan internasional dan pembentukan pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, yang mewakili keempat faksi yaitu: Funcinpec (Norodom Sihanouk), KPNFL (Son San), Khmer Merah (Khien Samphan) dan PRK (Hun Sen). Dalam kesepakatan umum itu pula para pihak yang konflik di Kamboja setuju menunjuk Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Pemimpin Sementara Pemerintah Rekonsiliasi Nasional sampai pelaksanaan pemilihan umum.

Sesuai kebutuhan

Pasal 11 dari kesepakatan umum itu menyebutkan bahwa komponen dari ICM (International Control Mekanisme = Mekanisme Pengawasan Internasional) disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga badan tersebut dapat bekerja lebih efektif. Badan itu perlu juga dipersenjatai untuk membela diri.

ICM bertugas memantau, mengawasi dan membuktikan penarikan mundur pasukan Vietnam, mencegah kembalinya kekerasan bersenjata serta mengawasi pelaksanaan pemilihan umum.

Tentang penghentian bantuan senjata dan campur tangan asing, disebutkan, masih harus didiskusikan rinciannya untuk menentukan langkah-langkah nyata. Dalam pasal 10 dikatakan bahwa dalam kaitan penyelesaian

Digitized by Google

menyeluruh dan batas waktu penghentian campur tangan asing disetujui agar disinkronkan (tentang hal ini masih perlu dibahas lagi). Pada pasal 8 dikatakan bahwa perlu dibahas langkah konkrit pencegahan kembalinya kebijaksanaan dan praktek rejim Pol Pot. Ini masih perlu dibahas dan dirinci lebih jauh.

Menarik untuk dikaji pernyataan Menlu Vietnam Nguyen Co Thach bahwa ia sangat bahagia dengan hasil JIM II dan berharap pembahasan lebih lanjut tentang kesepakatan umum paling lambat sudah terlaksana bulan Juli mendatang.

Sebelum ke Jakarta, di Hanoi Co Thach mengatakan bahwa ia optimis 50 persen JIM II akan berhasil. Di Bandara Soekarno-Hatta dia mengatakan sudah 90 persen. Tetapi tiba-tiba pada hari kedua (Senin, 20/2) Co Thach berbalik jadi pesimistis; karena ia melihat pertikaian makin tajam antara keempat faksi Kamboja dan Vietnam sendiri tidak bisa menerima sikap tiga faksi perlawanan (pimpinan Sihanouk).

Lalu mengapa dia bahagia dengan hasil JIM II yang tidak tuntas itu. Mengapa dia sangat bahagia, padahal tak ada jaminan baginya bahwa praktek kekerasan rejim Pol Pot tidak akan terulang setelah Vietnam mundur dari Kamboja. Juga selama sidang-sidang JIM II tak ada tanda-tanda bahwa pemerintahan sementara rekonsiliasi nasional akan merupakan awal dari penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja.

Nguyen Co Thach ternyata bahagia karena tekanan bertubi-tubi dari kelompok CGDK terhadap Pemerintah Hun Sen berhasil diredam oleh Ketua JIM II Menlu Ali Alatas melalui serangkaian lobby secara marathon menjelang penutupan. Dia bahagia karena kesepakatan umum 19 pasal yang dihasilkan JIM II, setidak-tidaknya menghindarkan JIM II dari kegagalan total seperti diramalkan para pengamat politik internasional sebelumnya. Tetapi penyataan kebahagiaan Co Thach masih perlu diuji setelah keempat faksi mulai membahas ketentuan 19 pasal kesepakatan umum itu.

Stabilitas

Dalam kesepakatan umum JIM II juga dicantumkan soal stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pasal 14 yang mencantumkan soal stabilitas Asia Tenggara, mengatakan bahwa penyelesaian menyeluruh masalah Kamboja harus memberi sumbangan bagi terciptanya perdamaian, stabilitas dan kerjasama di Asia Tenggara.

Dalam rangka stabilitas itu, maka peserta JIM II juga sepakat bahwa *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara) terbuka bagi semua negara di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi anggota. Menurut para peserta JIM II, penyelesaian masalah Kamboja akan mempercepat terwujudnya Zona Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara.

Kendati telah dicapai kesepakatan umum, tetapi belum diketahui pembicaraan keempat faksi akan dimulai dan kapan berakhir. Dari hasil pembahasan keempat faksi itu akan diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang penyelesaian menyeluruh masalah Kamboja.

Melihat pasal-pasal dalam kesepakatan umum JIM II itu, beberapa pengamat berpendapat akan ada JIM berikutnya. Entah JIM III atau apapun namanya, itu perlu. Mereka melihat bahwa apa yang dihasilkan JIM II belum bisa menjamin terlaksananya suatu penyelesaian menyeluruh masalah Kamboja. Bahkan disangsikan keadaan politik di Kamboja setelah tentara Vietnam ditarik mundur. Dipertanyakan pula seberapa jauh pemerintah sementara rekonsiliasi dapat dijadikan patokan bagi suatu kerukunan nasional.

Peranan Indonesia

Orang boleh bicara dan berpendapat apa saja tentang JIM II. Termasuk pendapat mereka tentang kesepakatan umum yang 19 pasal itu. Bahwa hasil yang dicapai JIM II sesungguhnya merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai. Itupun melalui suatu proses diplomasi tingkat tinggi yang cukup lama.

Sejak sore hari Senin (20/2), Menlu Indonesia sebagai Ketua JIM II melakukan serentetan pembicaraan diplomatik dengan para peserta dari keempat faksi yang bertentangan. Menlu Indonesia berupaya mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan tajam yang muncul. Peranan Indonesia yang dijalankan Menlu Alatas, merupakan suatu sukses tersendiri.

Indonesia telah memainkan suatu peranan diplomatik yang cukup penting dalam upayanya menerobos kebekuan di antara keempat faksi Kamboja itu. Akhirnya JIM II dapat ditutup dengan mencatat beberapa kemajuan dibanding JIM I. Sedikitnya dapat memperkecil perbedaan untuk menyusun kesepakatan umum tadi.

"Tetapi kami ini adalah orang-orang yang realistis. Kami tahu aspek-aspek yang telah kami setujui dan isu-isu apa yang masih memerlukan penyelesaian", kata Ali Alatas mengomentari hasil JIM II, dalam pertemuan persnya usai sidang terakhir, Selesai (21/2) sore.

Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Co Thach, ketika diminta komentarnya tentang penyelesaian masalah internal sebelum penyelesaian masalah eksternal. Nguyen Co Thach mengatakan: "kedua masalah itu bagai telur dan ayam".

Menurut Co Thach, penarikan mundur tentara Vietnam dari Kamboja merupakan masalah eksternal yang akan dilaksanakan setelah masalah internal antara keempat faksi itu selesai. Co Thach menambahkan apabila keempat faksi dapat menyelesaikan masalah-masalah internal mereka dalam beberapa bulan mendatang, maka tentara Vietnam akan ditarik dari Kamboja pada bulan September 1989. Apabila penyelesaian politik (menyeluruh maupun sebagian) tidak tercapai dalam waktu dekat ini, maka penarikan semua pasukan Vietnam baru akan dilaksanakan akhir Desember 1989.

Kemajuan-kemajuan yang dapat dicatat dari JIM II, menurut Menlu Alatas adalah tentang penarikan mundur pasukan Vietnam yang dikaitkan dengan pencegahan kembalinya kebijakan dan praktek pembantaian massal oleh rejim Pol Pot dengan Khmer Merahnya. Juga kesepakatan tentang adanya ICM (Mekanisme Pengawasan Internasional), konferensi internasional dan kaitan penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja dengan perdamaian serta stabilitas di Asia Tenggara.

Ia menambahkan bahwa untuk pertama kalinya sejak JIM I tahun 1988, peserta JIM membahas apa yang diperlukan oleh ICM agar lembaga itu bisa berhasil dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, JIM II memang mencapai kemajuan yang cukup berarti di banding JIM I. kendati belum berhasil merumuskan suatu bentuk penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja.

Yang pasti, apapun hasilnya, JIM II membuka lebih lebar kemungkinan penyelesaian masalah Kamboja dan beralasanlah kebahagiaan Menlu Nguyen Co Thach yang seratus persen itu. □

Digitized by Google

Hun Sen Intelektual, Politisi dan Idiolog

Orang masih muda, usia sekitar 43 tahun. Seorang cendekiawan dengan kadar intelektualitas cukup tinggi, seorang politisi bahkan juga seorang idiolog yang punya wibawa di antara para pemimpin Kampuchea. Dia tidak banyak bicara, tapi cukup tegas dalam bersikap.

Dialah Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri People Republic of Kampuchea (PRK = Republik Rakyat Kampuchea), Hun Sen. Sejak JIM I bulan September 1988 di Bogor, Hun Sen menjadi pusat perhatian wartawan. Karena dia tak obral cerita kepada wartawan. Dia baru mau bicara jika memang dianggap perlu dan sudah saatnya untuk bicara.

Setiap kali dia bicara, ada yang tersentak; baik kawan apalagi lawan. Pada JIM I di Bogor, dia menentang keras usul penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kampuchea. Dia juga membela invasi yang dilakukan tentara Vietnam jauh kedalam wilayah Thailand. Menurutnya apa yang dilakukan adalah untuk mengejar gerilyawan perlawanan Kampuchea. Terutama musuh bebuyutannya, Khmer Merah pimpinan Pol Pot.

Hun Sen mulai muncul sebagai politisi awal tahun 1983. Dia tampil sebagai tokoh kalangan muda yang punya wawasan tentang sosialisme nasional yang cukup luas. Ternyata Hun Sen adalah salah seorang penganut sosialisme nasional aliran Ho Chie Mien, pemimpin Vietnam almarhum.

Hun Sen memulai karir politiknya sebagai pemimpin kelompok pemuda sosialis Kampuchea. Kemudian menjadi salah satu anggota Partai Sosialis Kampuchea (yang berkuasa sekarang) pada tahun 1983.

Idiolog

Tahun 1984, dia mulai ikut dalam Kabinet Heng Samrin. Sebagai seorang muda, dia menunjukkan kebolehannya menterjemahkan idiologi sosialisme yang diimpor dari Vietnam. Ia mengartikan sosialisme bukan sebagai komunisme tetapi adalah nasionalisme kerakyatan. Jadi sosialisme menurut Hun Sen adalah nasionalisme kerakyatan.

Tiga tahun kemudian, tahun 1987, terjadi perubahan dalam pemerintahan Kampuchea dukungan Vietnam. Heng Samrin tersingkir, lalu tampil Hun Sen sebagai Perdana Menteri merangkap sebagai Menteri Luar Negeri yang memang telah dijabatnya sebelum itu.

Hun Sen

Penampilan Hun Sen sebagai Perdana Menteri memberi peluang baginya untuk berusaha menerapkan idiologi sosialisme nasionalnya. Perubahan mendasar dalam sistem politik mulai terjadi. Jika di zaman Heng Samrin sosialisme Kampuchea adalah terjemahan dari sosialisme kerakyatan seperti yang dianut Beijing, maka Hun Sen mencoba untuk menerapkan sosialisme baru yaitu sosialisme nasional ala Vietnam.

Jadi adalah tidak benar jika Hun Sen dikatakan sebagai seorang kader komunis didikan Heng Samrin. Ia adalah seorang nasionalis yang sosialistik dan sebaliknya seorang sosialis yang nasionalistis.

Hun Sen ingin memberi gambaran baru tentang Kampuchea. Ia ingin menghapus anggapan bahwa pemerintahannya tak ubah dengan kekuasaan Heng Samrin. Dan dia berhasil membangun pendapat umum tentang idiologi sosialisme nasional itu.

Tidak banyak orang tahu tentang Perdana Menteri Kampuchea ini. Ia hanya dikenal sebagai seorang cendekiawan muda yang berhasil dalam karir politiknya. Bahkan dianggap seorang tokoh muda yang berhasil melakukan lompatan-lompatan jauh.

Dalam JIM II kembali Hun Sen muncul sebagai tokoh yang menarik perhatian. Dia jadi pusat perhatian wartawan, setelah sidang hari kedua mulai berjalan alot. Hun Sen keluar dengan pernyataannya yang cukup keras terhadap ketiga faksi perlawanan Kampuchea.

"Kalau di medan pertempuran mereka (CGDK - red.) tidak berhasil mengalahkan kami (PRK - red), maka jangan di kira mereka dapat mengalahkan kami melalui perundingan", kata Hun Sen menanggapi tuntutan pihak CGDK.

Hun Sen memang pribadi yang menarik untuk diperbincangkan. Sosok orang muda yang berwawasan luas, intelegensianya pun cukup tinggi dan seorang politisi kawakan di antara politisi-politisi kawakan yang sudah uzur.

Barangkali di antara anggota delegasi keempat faksi yang mengikuti JIM II, Hun Sen adalah orang yang paling beruntung. Karena hampir semua keinginan rezimnya tertampung dalam kesepakatan Umum 19 pasal itu. Dia bisa pulang dengan sekeranjang kepuasan, tetapi berbagai masalah politik masih menunggu di hari esok.

Keberhasilan pertemuan keempat faksi seperti disepakati peserta JIM II, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Hun Sen. Nampaknya kesepakatan JIM II, kendati memuaskan bagi Hun Sen dan Nguyen Co Thach, tetapi Hun Sen justru dibebani tugas yang cukup berat. Bagaimana dia harus berupaya agar pertemuan keempat faksi dalam menyelesaikan masalah internal mereka bisa berhasil, itu sebuah pekerjaan rumah yang dibawa pulang dari Jakarta.

Hun Sen, memang menarik untuk dibincangkan. Seorang muda yang punya dedikasi terhadap bangsanya cukup tinggi. Wawasannya tentang hari esok Kampuchea, sesudah pengunduran diri Vietnam sudah jelas. Yaitu bagaimana memantapkan faham sosialisme nasional sebagai idiologi negara. Karena dia bukan seorang yang pada mulanya adalah sosialis. Dia adalah seorang nasionalis yang sosialistis, ketika melihat kondisi rakyatnya yang terus tertindas itu.

Itulah Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kampuchea, Hun Sen, pembuat berita dalam dua kali Pertemuan Informal Jakarta.□

Digitized by Google

Oleh : Faizal Motik, SH.

Dialog Pemuda R.I. & Malaysia

15-18 Desember 1988 yang lalu di kota Malaka (Malaysia) untuk pertamakalinya berlangsung dialog antara Pemuda Malaysia dan Indonesia. Hadir dan memberikan ceramah/sambutan dalam kesempatan tersebut beberapa tokoh/pejabat kedua negara antara lain Dari Malaysia: P.M. Mahathir Mohamad, Wakil P.M. Ghafar Baba, Mentri Belia & Sukan Dato' Najib Mohamad bin Tun Razak, serta mantan Menlu Malaysia T. Ahmad Ritahuddeen. Dari Indonesia antara lain: Menhankam L.B. Moerdani, Menlu Ali Alatas, Menpora Akbar Tanjung serta rombongan. Berikut ini catatan singkat oleh salah seorang delegasi Indonesia, Faizal Motik, S.H.

Obsesi Rumpun Bambu & Politik Perkauman

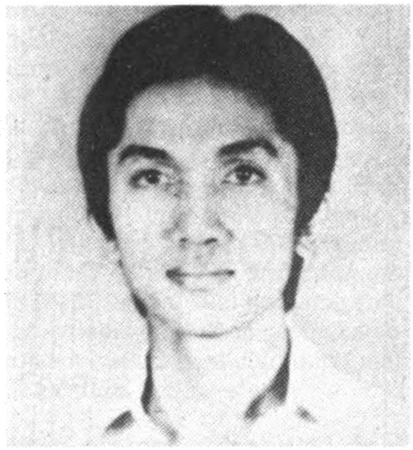

"Rumpun Melayu"... Rasanya tidak ada kata yang paling sering didengungkan dalam dialog Pemuda Malaysia — Indonesia selain dari pada dua patah kata ini.

Kata rumpun yang berasal dari rumpun bambu, diambil sebagai padanan untuk menggambarkan kecenderungan ras melayu yang hidup dan berkembang secara berkelompok dan tidak individual seperti halnya rumpun bambu. Demikian antara lain keterangan yang diberikan oleh T. Ahmad Ritahuddeen, mantan Menlu Malaysia diawal ceramahnya. Ironisnya dari awal hingga berakhirnya dialog yang berlangsung selama tiga hari ini, praktis merupakan proses pendekatan pandangan dari kedua belah pihak mengenai isyu rumpun melayu ini.

Dari berbagai uraian yang disampaikan khususnya oleh pembicara dari Malaysia, dapat dimengerti mengapa isyu rumpun melayu menjadi OBSESI. Sebagaimana kita ketahui masalah ras memang merupakan unsur yang paling dominan dalam pengelompokan politik di Malaysia.

Dalam Barisan Nasional yang merupakan partai politik terbesar di Malaysia bergabung tiga unsur utama yaitu : UMNO *(United Malay National Organization)* : MCA *(Malay Chinese Association)* dan M.I.C. *(Malay Indian Community)* yang praktis ketiga-tiganya merupakan perwakilan dari unsur ras Melayu, Cina dan India.

Memang beberapa partai menyatakan dirinya bukan berdasarkan politik ras dalam perkauman, tapi sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang pembicara dalam dialog di atas, ras tetaplah yang menjadi dasar persatuan dari partai-partai tersebut. Pertimbangan ras ini akan sangat tampak bila menyangkut khususnya masalah rekrutmen kepengurusan dan kaderisasi.

Misalnya saja PSRM (Partai Sosialis Rakyat Malaysia) yang menyatakan diri berdasarkan Ideologi sosialisme. Dalam kenyataannya tetap pertimbangan dasar perjuangan ras melayu yang dominan disana dan bukan ideologi. Memang ada beberapa gelintir pengurus yang bukan melayu (Cina dan India), tetapi sulit dihindarkan adanya kesan persatuan Ideologi antar ras yang "artifisial".

Komposisi penduduk Malaysia terdiri atas lebih kurang 55% Melayu, 34% Cina, 10% India dan lain-lain sisanya. Dilihat dari komposisi penduduk yang tidak jauh berbeda antara jumlah pribumi Melayu dibandingkan dengan jumlah penduduk Cina ditambah India, maka dapat dipahami timbulnya OBSESI rumpun tersebut.

Peserta dialog pemuda RI & Malaysia.

Digitized by Google

Terlebih lagi bila kita tengok sejarah perkembangan politik Malaysia. Yang antara lain dapat dilihat dari tulisan DR. Mahathir Mohamad dalam bukunya Dilema Melayu ***(Malay Dilemma)*** yang ditulis beliau pada tahun 1970. Dari buku tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada medio tahun 1950-an sempat terjadi "Bulan Madu" antara ras dengan terbentuknya Partai Barisan Nasional, yang kemudian menghasilkan kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957.

Tetapi ternyata permasalahan dasar hubungan antar ras yang sering dikaitkan terutama dengan masalah dominasi ekonomi keturunan Cina tidaklah selesai dengan tercapainya kemerdekaan tersebut. Kita ketahui bersama bahwa pertikaian antar ras ini mencapai puncaknya dengan terjadinya kerusuhan rasial yang besar antara Cina dan Melayu pada tanggal 19 Mei 1969.

Dalam perkembangan menunjukkan pada kita bahwa dalam kelompok melayupun terjadi konflik antar mereka. Bila pada tahun 1960-an kaum ulama dalam UMNO memisahkan diri dengan mendirikan partai PAS, maka pada pertengahan dekade 1980-an ini terjadi pula pemisahan 2 kubu dalam UMNO, antara kubu PM Mahathir Mohamad disatu pihak dengan Dato' Musa Hitam dan T. Razaleigh dilain pihak, yang berbuntut dengan terbentuknya UMNO baru.

Kembali kepada dialog di atas, sementara itu delegasi Indonesia berbicara dalam obsesi persatuan Pancasila, yang mana masalah SARA (Suku, Agama, Ras, antar golongan) justru menjadi sesuatu yang diharamkan. Wajarlah sebagaimana yang penulis nyatakan diawal tulisan ini, praktis pernyataan penyatuan persepsi kedua pihak mengenai pendekatan rumpun, sangat mewarnai pertemuan selama 3 hari ini.

Meskipun topik pembicaraan yang direncanakan cukup beragam dari masalah sosial, politik dan budaya dengan pembicara yang berbobot, tetapi akhirnya kembali masalah rumpun menjadi pembicaraan disetiap topik tersebut.

Faktor Konvergensi & Divergensi

Dalam konteks inilah menarik untuk menyimak uraian Bapak Ali Alatas yang berbicara dihari terakhir. Menurut beliau dalam berbicara mengenai hubungan Indonesia dan Malaysia, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah faktor-faktor konvergensi dan divergensi antar kedua negara.

Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) faktor konvergensi (pengikat - pen) antara Indonesia dan Malaysia. *Pertama* adalah faktor geo strategis dan geo politik — Jelas letak kedua negara yang bertetangga mempunyai nilai geo politik yang strategis bagi kepentingan kedua negara.

Kedua adalah Indonesia dan Malaysia sama-sama sebagai peserta aktif dalam berbagai kelompok dengan faktor pengikat dan tujuan masing-masing seperti antara lain : ASEAN, Gerakan NON BLOK, OKI, Kelompok 77 dan lain-lain.

Ketiga adalah Kenyataan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama negara berkembang. Dalam banyak hal kedua negara mempunyai kesamaan kepentingan dalam menghadapi perkembangan ekonomi internasional yang masih didominasi oleh negara-negara maju.

Sebaliknya paling kurang ada 2 faktor divergensi yang menonjol. *Per-*

PERSERO

PT VIRAMA KARYA

CONSULTING ENGINEERS

— SURVEYING AND PLANNING
— DESIGNING
— CIVIL ENGINEERING
— ARCHITECTURE
— SUPERVISING
— CONSTRUCTION MANAGEMENT

VK

JL. BIRU LAUT X KAV. 10A. TELP. 8196481
CAWANG — JAKARTA TIMUR

Digitized by Google

tama adalah faktor historis — Pengalaman kolonial yang berbeda yang mana Malaysia dibawah Inggris dan Indonesia dibawah Belanda, menyebabkan pula antara lain perbedaan dalam sistim hukum dan pemerintahannya. Sejarah pergerakan kemerdekaan yang berbeda terproyeksikan pula dalam perbedaan sistim sosial politiknya.

Dalam kaitan ini, sempat disinggung pula dihari kedua dimana Menhankam RI L.B. Moerdani menguraikan perbedaan peranan militer dalam sistim sosial politik kedua negara yang merupakan proyeksi dari perbedaan sejarah pergerakan kemerdekaan.

Kedua adalah — Demikian pula perkembangan politik setelah kemerdekaan tumbuh berbeda. Dan ini ada kaitannya pula dengan pengaruh luar yang berbeda juga, misalnya: Malaysia sebagai anggota Persemakmuran praktis tidak mengalami situasi hubungan panas - dingin" dengan kelompok negara barat, seperti pernah terjadi dalam sejarah politik luar negeri Indonesia.

Di samping kedua perbedaan tersebut, perlu diingat pula faktor-faktor konvergensi justru dapat menjadi faktor divergensi, misalnya saja kesamaan struktur negara ekonomi berkembang yang masih bergantung pada penerimaan dari faktor ekspor hasil bumi, justru dapat menyebabkan persaingan pasar dunia/internasional bagi kedua negara. Untuk hal ini, contoh yang paling jelas adalah persaingan dalam perebutan pasar hasil tambang seperti Timah dan hasil perkebunan seperti Karet & Kopra yang mana kedua negara sama-sama penghasil utama di dunia bagi ketiga komoditi tersebut.

Juga faktor geografis, meskipun tidak menonjol, dapat menyebabkan timbulnya nilai-nilai divergensi, khususnya yang menyangkut wilayah-wilayah di daerah perbatasan kedua negara.

Baik buruknya hubungan Indonesia dan Malaysia akan sangat berpengaruh pada keamanan regional Asia Tenggara, bahkan dapat dikatakan sangat menentukan. Sejarah konfrontasi dimasa lalu dan rujuknya kedua negara serta terbentuknya ASEAN dapat dilihat dari konteks pengaruh baik buruknya hubungan bilateral kedua negara pada kerukunan regional kawasan ASEAN.

Itulah sebabnya Menlu RI Ali Alatas menekankan bahwa dalam berbicara mengenai peningkatan hubungan kedua negara harus selalu dikaitkan dalam konteks ASEAN. Ditandaskan pula bahwa tidak ada satu negara pun di dunia termasuk negara-negara ASEAN yang berdiri semata-mata berdasarkan politik RAS.

Dengan berpijak pada uraian Bapak Ali Alatas yang Menlu RI ini, dapat disimpulkan bahwa pada dialog-dialog selanjutnya sepatutnyalah tidak lagi pendekatan rumpun melayu menjadi dasar kebijakan. Memang benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahathir Mohamad dalam sambutan pada acara pembukaan dialog, bahwa pendekatan bilateral Indonesia — Malaysia tidaklah akan memberi kerugian bagi siapapun. Tetapi dalam kaitan dengan konteks kerukunan ASEAN, tidaklah tepat bila pendekatan bilateral ini didasarkan pada isyu rumpun melayu. Pendekatan yang tepat haruslah berdasarkan geo strategik yang rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor konvergensi dan divergensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal ini memang dapat kita lihat dari resolusi kedua belah pihak dalam dialog ini, dimana diharapkan pada dialog-dialog berikutnya dapat dihasilkan peningkatan hubungan institusional dan fungsional antar pemuda kedua negara.

Dialog-dialog "kecil" dari Dialog Besar

Tercapai tidaknya harapan dari resolusi tersebut menurut hemat penulis akan sangat bergantung setidak-tidaknya pada dua faktor utama, Pertama — Representasi dari delegasi yang mewakili kedua negara. Dalam dialog terlihat adanya kepincangan representasi ini, dari pihak Indonesia dengan persiapan waktu yang relatif singkat, tampak adanya usaha untuk menampilkan komposisi delegasi yang diharapkan cukup memadai sebagai perwakilan tokoh-tokoh pemuda Indonesia, meskipun kehadiran mereka tidak mewakili nama organisasi tapi terlihat adanya keberagaman latar belakang masing-masing.

Misalnya dari Husein Naro yang Ketua Generasi Muda Pembangunan, Indra Bambang Utoyo yang Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri ABRI (FKPPI), sampai Edward William Suryajaya yang pengusaha putra "mahkota" raja mobil Indonesia. Dari Pengusaha pengiriman tenaga kerja ke Malaysia seperti: Saleh Alwaini (yang konon keturunan Arab), Alex Paat yang Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Habib Chirzin yang Ketua Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) sampai James Lululima yang wartawan Kompas, disamping Didit Haryadi sendiri yang Ketua Umum DPP-KNPI.

Dilain pihak dari pihak Malaysia praktis hanya diwakili oleh tokoh-tokoh pemuda UMNO. Memang ada utusan dari MBM (Majelis Belia Malaysia — semacam KNPI-nya Malaysia), tetapi itupun juga dari unsur UMNO sendiri di dalam MBM. Dengan adanya ketidakseimbangan ini tidaklah mengherankan bila dalam dialog, terjadi "debat" yang cukup seru mengenai isyu pendekatan rumpun sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Faktor Kedua — Masih berkaitan dengan representasi, meskipun dari pihak Indonesia sudah menggambarkan keberagaman tetapi, tampaknya masih cenderung lebih diwakili oleh toktoh-tokoh politik muda. Bila memang diharapkan kerjasama institusional dan fungsional dalam arti yang menyangkut bidang-bidang garapan tertentu, maka rasanya patut untuk dipertimbangkan keterlibatan tokoh-tokoh muda dari kelompok fungsional/profesi tertentu. Misalnya dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Gerakan Remaja Untuk Kependudukan, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum (ISMAHI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) dan lain sebagainya.

Hal ini akan sangat berkaitan pada bidang-bidang garapan/profesi apa yang menjadi skala prioritas yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain dari "dialog besar" yang diadakan setahun sekali secara bergantian antar kedua belah pihak, maka dapat diharapkan akan terjadinya lalu lintas bilateral dialog-dialog kecil yang ramai dan mesra sesama institusi fungsional/profesi tertentu dari kedua negara yang note bene berawal dari "dialog besar" tersebut.

Dari proyeksi yang sederhana ini harapan Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad akan tetap terjalinnya hubungan yang mesra antar pemimpin kedua negara dimasa depan, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Konon harapan kedua pemimpin negara yang dicanangkan pada pertemuan bulan Juni 1987 yang lalu di Jogjayakarta itu, merupakan dasar terjadinya dialog ini.□

Digitized by Google

Oleh: Didiet Haryadi

Pemuda, Masa Depan Serta Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemuda senantiasa dikaitkan dengan statusnya sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Di lain pihak, pemuda juga sering disebut sebagai sumber insani pembangunan bangsa. Ungkapan-ungkapan tersebut itu, terumuskan pula dalam pokok bahasan proposal seminar, khususnya dalam topik Pemuda dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sebutan-sebutan itu, bukan berarti tidak beralasan akan tetapi disebabkan ciri-ciri yang khas, yang senantiasa melekat pada diri pemuda itu sendiri. Disebut sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, oleh karena dipandang dari segi usia, pemuda relatif dapat hidup lebih lama dari orang tua, dilihat dari perjalanan tahun demi tahun, dan bukan dalam arti perbandingan jumlah usia. Selain itu, tongak-tonggak sejarah kita, juga pernah diciptakan oleh pemuda-pemuda bangsa kita, dan antara satu tonggak dengan tonggak lainnya terlihat garis konsistensinya.

Misalnya saja tahun 1908 pemuda kita ketika itu mendirikan Budi Utomo; tahun 1928 pemuda kita meneruskan cita-cita generasi sebelumnya dengan mencetuskan Sumpah Pemuda; tahun 1945 pemuda kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan tahun 1966 pemuda kita ikut melahirkan Orde Baru. Keseluruhan peristiwa di atas menunjukkan bahwa bagi sebuah cita-cita perjuangan bangsa, maka komitmen kaum muda memang senantiasa melekat untuk itu.

Jika saja pemuda-pemdua masa lalu telah menunjukkan ciri kaum mudanya, maka semua kita akan bertanya bagaimana dengan pemuda sekarang. Pada segi manakah pemuda harus menunjukkan cirinya sebagai generasi penerus itu? Pada pertanyaan terakhir ini, kemudian seringnya kita mendengar istilah pemuda sebagai sumber insani pembangunan bangsa. Ungkapan ini, sedikit banyak disebabkan pada potensi yang dimiliki kaum muda. Betapapun pemuda memiliki sejumlah potensi, akan tetapi sebagai layaknya sesuatu yang masih bersifat potensi, maka ia belum merupakan sesuatu yang dapat bermanfaat secara langsung. Potensi tersebut membutuhkan proses, agar yang bersifat potensial itu dapat menjadi kekuatan/kemampuan yang riil.

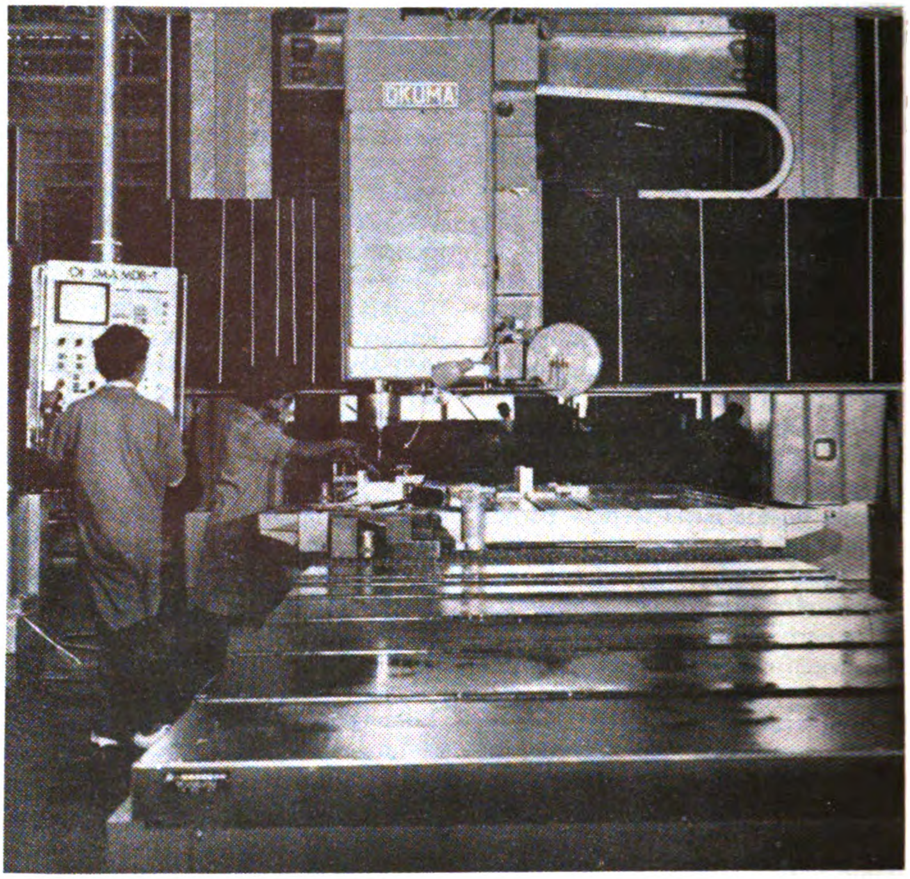

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dari uraian di atas, maka penyebutan terhadap pemuda, baik sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa maupun sumber insani pembangunan bangsa, kedua-duanya berorientasi ke depan. Dan orientasi ke depan itu, juga merupakan ciri yang sering ada pada pemuda itu sendiri.

Jika hal itu, kemudian dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat dikatakan bahwa gambaran kehidupan masa depan ditandai dengan kemampuan suatu bangsa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar suatu bangsa dapat bersaing dengan bangsa lain, maka mau tidak mau ia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peranan IPTEK

Bukan lagi merupakan rahasia, bahwa gambaran kehidupan masa depan adalah masa yang ditandai dengan besarnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan telah menghantarkan kita pada bentuk penemuan-penemuan baru, terutama dalam aspek ilmu pengetahuan alam dan biologi. Berbagai jenis material baru diciptakan yang tidak ditemukan dalam alam. Walaupun alam dan kekayaan tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan manusia namun penemuan-penemuan baru itu pasti akan besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Juga akan besar pengaruhnya terhadap pembangunan negara-negara yang hanya mengandalkan dirinya pada kekayaan sumber alam semata-mata.

Di sisi lain teknologi juga berkembang pesat, memanfaatkan penge-

Digitized by Google

Komputer sebagai sarana komunikasi modern

tahuan itu demi kemaslahatan manusia. Mesin-mesin dan robot-robot baru ditemukan, yang di satu pihak dapat menghasilkan barang-barang yang lebih banyak, lebih baik dan lebih murah tapi di pihak lain mengurangi tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Contoh lain dari kemajuan teknologi, adalah dewasa ini penggunaan komputer sebagai sarana komunikasi modern, telah banyak memperbaiki taraf hidup masyarakat, akan tetapi terkadang dengan komputer pula kita dapat menyaksikan timbulnya "kejahatan".

Dari kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi itu, komunikasi dan informasi semakin cepat, yang dengan sendirinya menambah lajunya tingkat mobilitas manusia.

Apabila gambaran masa depan, adalah demikian, maka tidak ada pilihan lain dari suatu bangsa yang ingin maju, kecuali harus berlomba dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti, bagi bangsa Indonesía, betapapun tahapan itu telah kita tuju, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi, apabila dibandingkan dengan kemajuan negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Betapapun kehidupan masa depan didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi peranan unsur manusianya semakin penting. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bergerak dengan sendirinya, untuk memenuhi kemajuan-kemajuan seperti yang kita lihat. Sebaliknya kemajuan-kemajuan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, disebabkan oleh peranan manusia. Manusia yang merencanakan, menggerakkan dan mengendalikan. Dengan demikian, maka bagi masyarakat Indonesia, akan muncul persoalan baru, yakni manusia model apa yang dibutuhkan pada kehidupan masa depan itu.

Jawaban pasti, adalah manusia yang memiliki kualitas tertentu. Dengan kualitas-kualitas tertentu itu, kemudian akan diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pemuda Dan Masa Depan

Hakekat pembangunan kita, sesungguhnya bermakna strategis dilihat dari perspektif kehidupan bangsa kita, yang akan memasuki tahapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Hakekat pembangunan itu, tiada lain adalah pembangunan kualitas manusia dan pembangunan kualitas mayarakat Indonesia. Pemuda sebagai bagian dari tahapan kehidupan seorang manusia, sekaligus merupakan kelompok masyarakat dengan sifat dan cirinya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan untuk meningkatkan kualitas-kualitas di atas.

Dalam menghadapi masa depan dengan gambaran seperti diuraikan di atas, maka tuntutan kualitas yang perlu dipersiapkan adalah profesionalisme. Tuntutan kehidupan masa depan yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah mengharuskan seseorang lebih tekun dan menguasai profesi tersebut. Dan profesi itu, ada dalam berbagai aspek pembangunan (politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam). Profesionalisme akan menghantarkan seseorang lebih dapat dan mampu menguasai Bidang pekerjaan atau keahlian secara mendalam. Dengan demikian maka, perlu ditumbuhkan semangat bagi kaum muda untuk lebih menekuni pilihan pekerjaan atau keahliannya secara sungguh-sungguh. Dalam kaitan itu, maka kemauan untuk peningkatan kualitas pemuda, haruslah tumbuh dari kaum muda itu sendiri.

Pemuda mempunyai potensi dan waktu untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Sikap demikian sesungguhnya menumbuhkan komitmen moral untuk dapat memimpin dan mengarahkan dirinya sendiri. Orang lain, sesungguhnya hanya membantu perkembangan-perkembangan yang ada pada diri pemuda. Tanpa kemauan yang tumbuh dari dalam diri sendiri, maka upaya untuk meningkatkan kualitas diri dalam kebutuhan masa depan tadi, tidak akan terlihat.

Jika saja peningkatan kualitas diri itu telah tercapai, maka tahap berikutnya adalah terbukanya kesempatan di masa datang, itu agar manusia yang telah memiliki kualitas ini, dapat berkiprah dalam pembangunan nasional kita yang dengan demikian, akan memberikan hasil yang cukup produktif, dan terus memberikan nilai tambah terhadap produ ktivitas bangsa.

Dari gambaran di atas, maka dapat dikaitkan bahwa kebutuhan manusia masa depan, adalah manusia yang harus mampu meningkatkan kualitas diri dan pada bagian berikutnya dengan kualitas itu, ia mampu berkiprah dalam pembangunan demi kesejahteraan diri, masyarakat dan bangsanya. Hal itu tidak berarti bahwa mereka yang tidak berkualitas akan tidak dapat terpakai sama sekali, akan tetapi sudah hampir pasti bahwa tipe manusia yang terakhir ini akan jauh tertinggal dalam arus persaingan yang demikian tinggi. Dengan begitu, maka sebutan pemuda sebagai pewaris perjuangan bangsa maupun sumber insani pembangunan, senantiasa relevan dalam konteks persiapan diri yang lebih matang atau peningkatan kualitas diri tadi. □

Digitized by Google

Bersama Tjalie Robinson
Pathescope, Voedbal, dan Penjahit Tanah Abang

Pohon asam di Indonesia, seperti memiliki legenda tersendiri. Pohon asam yang batangnya tinggi dan daunnya kecil-kecil bila lebat menjadi rindang, dengan buahnya yang banyak gunanya (apalagi menjadi terkenal karena memberikan nama khusus bagi sayur khas Betawi, ialah *sayur asam*) menjadi pohon yang banyak disebut, karena banyak hal terjadi di bawah pohon yang terkenal ini. Barbier, atau barbershop atau lebih terkenal dengan nama tukang cukur, lebih suka membuka dagangannya atau buka toko dengan peralatan yang *portable* di bawah pohon asam. Dengan bangku duduk dan sebuah kaca serta peralatan cukur yang biasanya mempergunakan alat cukur model kuno *tondeuse*, maka pohon legendaris tersebut berfungsi menjadi dinding cantelan kaca.

Demikian juga pohon asam di Betawi, sangat terkenal peranannya. Tjalie menyaksikan hal ini, ketika dia kanak-kanak, karena sebuah tontonan anak-anak Betawi yang sangat menyenangkan, ialah *pathescope* yang beroperasi di bawah pohon asam. Biasanya tukang *pathescope* ini beroperasi di sebuah sudut di dekat jalan tram, dan yang terkenal adalah yang beroperasi di Tanah Abang Bukit. Orang Betawi memang kreatif. Pathescope yang terdiri dari sebuah kotak dengan roda serta peralatan yang sangat sederhana, seperti pedal, untuk memutar serta asesori lainnya yang menghiasi kotak tersebut, dijadikan sebagai sebuah tontonan ataupun hiburan bagi anak-anak Betawi yang suka kluyuran di jalanan *(straatslijpers).* Ini adalah sebuah bioskop atau gambar hidup yang sangat sederhana, menyuguhkan gambar-gambar film yang up-to-date, — pada jaman itu tentu saja, — tidak kalah peranannya dengan bioskop-bioskop gedongan yang hanya ditonton oleh tuan-tuan dan nyonya-nyonya dengan pakaian resmi. Tontonan kreatif ini mempergunakan lubang kecil untuk pengintip (persis seperti peep show di Pigalle, Paris), dan dengan membayar satu sen atau kurang dari itu, anak-anak Betawi boleh menyaksikan film-film dengan bintang-bintang film terkenal seperti Eddi Polo, Charlie Chaplin, Elmo Lincoln, Billie Rithcie, dan para cowboy Amerika.

Anak-anakpun senang, satu persatu menyaksikan tontonan tersebut, yang kadang kala si pemilik menyuguhkan film-film yang disebut agak "porno" pada jaman itu, seperti misalnya skandal di Aljazair (dan saya yakin itu sama sekali tidak porno), tetapi memang begitulah naluri pedagang tontonan, selalu akan menyuguhkan hal-hal yang dirasa menarik, tetapi merusak. Tidak banyak beda dengan mereka yang semacam pada jaman sekarang, meskipun bentuknya kini jauh lebih canggih. Dan bila demikian, polisi pun turun tangan.

Kreativitas penduduk Betawi tidak hanya sampai di situ. Di samping tontonan yang disuguhkan tersebut, bila anak-anak menjadi bosan karena tontonan yang itu-itu saja, maka kereta pathescope dilengkapi gerobak tambahan dengan roda bekas. Di situ dia menjual kue-kue sederhana, serta jasa sebagai reparator berko (lampu sepeda), dinamo, atau lampu-lampu lainnya. Dan, tempat itu memang menarik sekali, karena tertera di sana tulisan besar COMEDI GAMBAR ANAK MERK PATHESCOPE.

Kreativitas orang Betawi, memberikan gambaran serta corak yang khas bagi penduduk Betawi, yang secara budaya memiliki subkultur tersendiri sebagai hasil heterogenitas penduduknya (sampai kini), serta menjadikan mereka ini kreatif karena tantangan yang selalu ditemui, sebagai orang-orang yang hidup di ibukota, yang

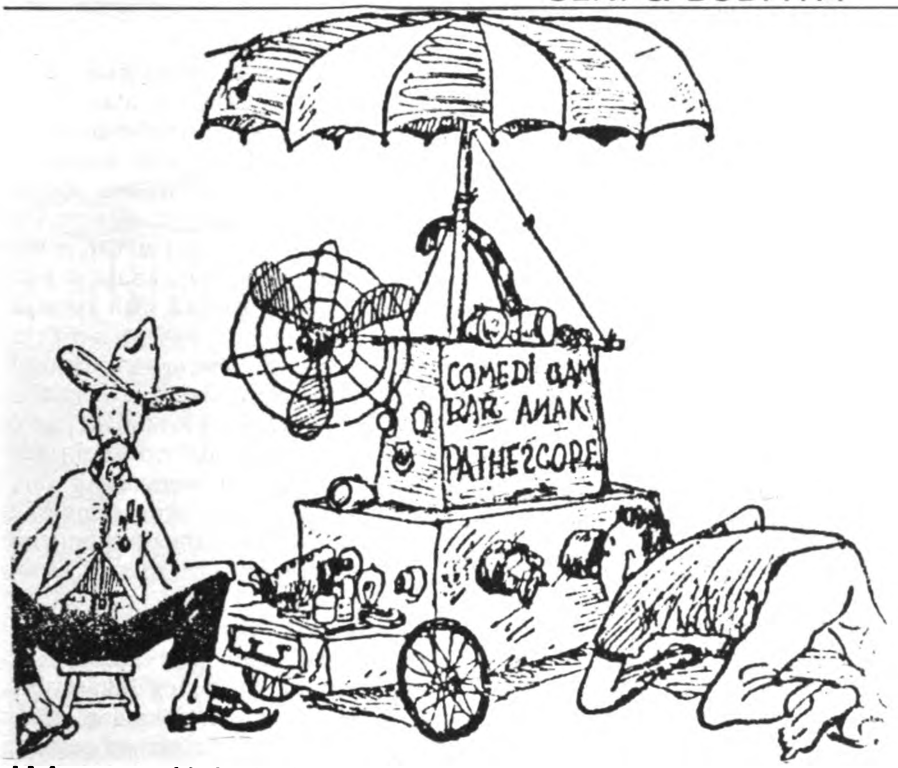

tidak mengenal belas kasihan, karena orang harus hidup.

Saville row & Bond Strect

De kleren maken de man, demikian kata orang, yang artinya, Baju membuat orang tampan. Tjalie Robinson tidak percaya penuh kepada kiasan ini, karena bila berbicara tentang baju, maka akan menyangkut siapa pembuat baju itu: *kleermaker* atau penjahit.

Betawi, dengan segala dinamikanya, menciptakan satu budaya khas, termasuk di dalam hal jahit-menjahit ini. Kebanyakan orang yang bermukim di Betawi, memiliki cara kerapihan di dalam berbusana. Ini adalah suatu seni yang jarang dicatat di dalam sejarah kultur orang-orang Betawi. Maka, tidak mengherankan kalau sejak jaman dahulu di Betawi, cara jahit-menjahit pakaian ini memiliki seni tersendiri, karena orang selalu ingin kelihatan tampan, tetapi kalu dapat harganya tidak mahal. (Ini khas Betawi). Nah, Tjalie menceritakan bahwa bila mencari busana tampan, bisa mendapatkan alamat para penjahit yang jitu, di Tanah Abang. Tanah Abang rupanya memiliki endapan sejarah budaya Betawi tersendiri. Untuk busana yang indah, seindah para *gentlemen,* tidak usah pergi ke tailor (penjahit) dengan nama besar seperti yang beroperasi di jalan-jalan *Noordwijk* (Nusantara) atau *Molenvliet* (Majapahit), tetapi Tanah Abang menjanjikan harapan baik bagi para busanawan, bahkan seandainya pada waktu itu sudah ada pemilihan *the best dressed,* tanpa memperhitungkan penjahit, maka Tanah Abang bisa diandalkan. Demikian kata Tjalie.

Tanah Abang bisa menjadi *Saville Row* dan *Bond Street,* dua nama terkenal untuk busana tinggi (haute counture) di kota metropolitan London. Hasil yang hampir sama dengan apa yang dibuat oleh para tailor dari kawasan elite, tetapi harga berunding. Demikianlah yang terjadi disana, dan tentang berunding ini, telah menjadi ciri khas Betawi pula. Resep bagi calon busanawan Tanah Abang itu ialah sabar menunggu. Karena *kleermaker* atau penjahit instan (cepat) itu, membuat baju sedemikian rupa tanpa pola, dan setiap kali diukurkan pada pemesannya, sehingga bisa didapat ukuran yang paling pas bagi si pemesan. Dan semuanya seperti bisa diatur. Apakah leher kurang baik, ataukah pipa celana kedodoran, ataupun saku yang harus dipasang begini, begitu. Semuanya bisa dilaksanakan di sana. Dan ini memang khas Betawi Tanah Abang.

Para penjahit menghadapi mesin jahit dengan merek-merek dagang khas bagi mesin-mesin jahit yang beroperasi di Betawi, bahkan di Indonesia sampai saat ini, mereka duduk bersila di hadapan mesin yang masih bersifat tradisional tersebut (tanpa motor), karena sifatnya masih manual. Bahan-bahan berkualitas bagus buatan luar negeri, mengalir di sana untuk dimetamorfosekan menjadi busana tingkat tinggi, serta memetamorfosekan penyandangnya sekaligus. Sebab orang yang beberapa jam yang lalu datang dengan busana kuli (overall), nanti keluar sudah dengan busana ala anggota DPR. (Bukan baju *safari* yang menjadi ciri khas anggota dewan tersebut, karena pada waktu itu potongan demikian belum ada).

Para penjahit itu tidak mempergunakan pola, dan para calon busanawan cukup datang dengan membawa gambar dari majalah serta mengatakan kepada penjahit ahli yang biasanya pribumi itu, misalnya "Sastro, atau Noor, *ik wil er uit zien*" (saya ingin tampak seperti ini). Cukup, dan Sastro atau Noor segera mengamati, kemudian sedikit berkomentar yang sebenarnya menanyakan bagaimana caranya

Digitized by Google

membuat persis seperti itu, sedikit saran-saran yang berbau psikologis, agak memuji, dan akhirnya jadilah transaksi itu, sedangkan sang pemesan cukup duduk di sana, berkongkow dengan teman-teman lain. Persahabatan di kawasan pasar Tanah Abang pun terjalin sudah.

Pertukaran cerutu *Van Nelle* dari si tuan yang sedang memesan baju dengan rokok kawung Sastro, membuat keintiman di sana terjadi, sehingga untuk selanjutnya hubungan yang demikian tidak usah dirasa profesional. Untuk selanjutnya, lain kali bila ingin membenahi sedikit baju-baju yang dirasa kurang enak — meskipun itu bukan buatan si Noor, — cukup mengatakan "tolong benahin ini", dan selama si Noor membenahi, si pemesan (bila perlu) menunggu di sana sambil hanya mengenakan pakaian dalam saja.

Busana mirip *Harry S. Truman* (Presiden AS) dengan dasi kupu polka dot, bisa dilaksanakan di sana dalam sehari. Atau, jas mirip *Hertog van Windsor*, di Tanah Abang bisa dilaksanakan. Celana loreng ala *Dana Andrews* (bintang film Hollywood terkenal waktu itu), tidak ada masalah. Baju ala Hawaii persis kepunyaan *Frank Sinatra* (penyanyi Hollywood terkenal), silahkan minta. Bahkan, celana pendek sport persis milik *Fanny Blankeskoen* (atlit lari terkenal berkebangsaan Belanda pada beberapa olimpiade), bukan hal yang sulit dikerjakan oleh para penjahit seperti Sastro ataupun Noor.

Demikianlah Tanah Abang dengan pasar dan penjahitnya, menjadi aspek spesifik budaya Betawi, yang kini saya rasa sudah tidak nampak lagi, karena desakan teknologi canggih serta pembangunan yang menuntut kepraktisan budaya moderen. Dan menurut Tjalie Robinson, kiasan yang mengatakan *de kleren maken de man* kadang kurang tepat, karena bahkan baju yang dibuat oleh tukang jahit bukan kualitas gedonganpun, bisa membuat busana yang indah serta menentukan pemakainya. Dan *last but not least* adalah si pemakai itu sendiri menentukan hasil busana seluruhnya. maka dia katakan bahwa *de kleren maken deman niet*, baju toh tidak menentukan tampannya seseorang, karena sesungguhnya semua tergantung dari gantungannya atau pemakainya. Dan demikianlah Tanah Abang, bisa benar-benar menjadi *Saville Row* dan *Bond Street*, yang di masa kini lebih kelihatan semrawut karena perkembangan jaman.

Voedbal... di Jakarta

Bola, Sepak Bola, dan Jakarta, rupanya memiliki kekhususan, tidak hanya kini, tetapi telah terjadi dari jaman dahulu. Sepak bola yang selalu menjadi kegemaran orang di mana-mana di Indonesia kini, dahulu ternyata telah menjadi suatu hobi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Betawi, sehingga dari kalangan atas, bawah, menengah, semua ada klubnya. Ada Klub yang dibiayai oleh para pedagang, klub para elite yang dikenal dengan nama *Jannencompie*, bahkan juga para buaya bola klub Petojo belakang, juga di daerah Pecinan.

Dikatakan oleh Tjalie, bahwa pada jaman itu di Betawi atau Djakarta, adalah jamannya dimana sepak bola merupakan suatu permainan yang sangat disenangi dan terpilih, dengan klub-klub yang ada, bahkan klub-klub tersebut sedemikian terbagi, di antara klub elite dan klub *gol-kac* atau golongan kacung (maksudnya: anak-anak pribumi dari kampung), juga golongan ethnis tertentu tetapi juga pada jaman itu tatacara permainan yang sportif dihormati betul. Bila itu sebuah goal, ya goal betul. Bila itu kesalahan, ya kesalahan betul, tidak perduli siapa yang berbuat. Karena demikianlah sportivitas sepak bola.

Itulah masa-masa dimana tidak ada sogok-menyogok dan tidak ada kriminalitas persepakbolaan. Benar-benar sportivitas dijunjung tinggi. Ada para dermawan yang mendirikan klub serta membiayai, dengan uang yang didapat dengan cara-cara yang sangat profesional. Bila ada turnamen, karcis yang dijual di tribun dimana duduk para elite serta golongan kaya, dan dari sinilah uang-uang itu benar dipergunakan untuk kepentingan persepakbolaan. Pertandingan-pertandingan antarkota, atau pertandingan nasional, merupakan suatu pesta olah raga yang benar-benar mengasyikkan, bahkan para pemenang menjadi bintang yang dielu-elukan bak pemimpin atau bak para bintang film yang diarak pada festival-festival film nasional.

Pemenang nasional diarak dengan barisan obor dan korps musik, dan gubernur serta walikota menyalami para pemenang. Setiap Sabtu dan Minggu, merupakan hari-hari olah raga, tepatnya hari-hari pertandingan sepakbola, dimana tempat-tempat pertandingan seperti *VIOS*, sebuah lapangan bola di dekat Raden Saleh menjadi ajang *"amusement center"* masyarakat Betawi.

VIOS adalah akronim dari *Voorwaarts Is Ons Streven* atau Maju adalah Tujuan Kami, semboyan mana berlaku bagi seluruh klub kampung yang bermain tanpa sepatu. Tetapi *Vios* kadang-kadang diselewengkan sedikit artinya, hal mana adalah jamak terjadi pada jaman kapan saja, seperti penyelewengan bahasa oleh remaja, yang kini disebut bahasa prokem, maka Vios diselewengkan menjadi *Vuil Is Ons Spel* atau Kotor adalah Permainan Kami. Vios tidak hanya menjadi nama klub sepakbola terkenal, tetapi juga menunggak semi (memberikan nama yang sama) kepada nama tempat yang berhubungan, seperti *Viosplein* (taman Vios), *Vioslaan* (jalan Vios).

Anak-anak Betawi, atau orang-orang Betawi, sama juga dengan anak-anak Jakarta atau orang Jakarta bila nonton bola. Dulu, sekarang, tidak ada perbedaan di dalam antusiasme. Dulu lapangan sepakbola benar-benar merupakan lapangan yang khas untuk pertandingan sepakbola, tidak seperti lapangan sepakbola kini di *Main Stadium* yang indah. Tetapi, ciri yang juga khas, di dekat lapangan sepakbola di Jakarta adalah di sekeliling lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang bila ada pertandingan pohon-pohon tadi sudah *habis terjual*" bagi para penonton yang prodeo atau gratis. Kadang-kadang begitu banyaknya kalong sepakbola (mereka yang nonton memanjat pohon), sehingga cabang dan ranting menjadi lemah, dan kreek, patah.

Tetapi si kalong (penonton) tetap tidak merasakan itu, karena asyiknya, dan bahkan bila klub yang dia jagoi mencetak goal, tidak segan-segan dia bertandak di atas cabang yang hampir putus tersebut, dan akhirnya bumm... jatuh, menimpa beberapa penonton yang ada di bawahnya, yang mengintip melalui lubang di dinding. Nah, ini merupakan pemandangan tersendiri. Untung saja letak *Vios plein* dekat Rumah Sakit Cikini.

Begitulah penonton sepakbola di Betawi dan Jakarta dari jaman ke jaman. Memang sepakbola menjadi sebuah tontonan yang merasuk hampir semua orang, meskipun tanpa totalisator. Tetapi pada jaman Tjalie masih berkeliaran sebagai *straatsijper* (pengukur jalan), toto (judi) atau totalisator masih ada, dan secara *fair* diadakan bagi para pecandu petaruh klub siapa menang dan siapa kalah, secara murni.☐ (Maria Sugiharto).

Digitized by Google

Sumber Informasi Dunia Olahraga Dunia Gengsi Baru Masyarakat Modern

SPORTIF, pilar hidup para SATRIA

Digitized by Google

Digitized by Google

No. 59 Maret 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

INDUSTRI CAPAI PRESTASI MENGESANKAN

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Bila Anda Termasuk Kelompok Pengiklan, Apakah Anda Tidak Ingin Membagi Berita Untuk Pembaca Kami ?

Halaman

Kolom

Judul Berita

Bisnis Indonesia
Dari swasta oleh swasta untuk pembangunan

No.

Lembar Naskah

7,5 pt

0

3 cm

6 cm

9cm

12 cm

15 cm

Sepulang reportase, wartawan kami akan menuang hasilnya dalam formulir khusus - seperti terpampang diatas - sebelum naik cetak dan menghidangkannya kepada Anda.

Sejak dari penyeleksian materi, reportase hingga penulisannya, mereka sadar bahwa visi korannya berbeda dengan koran biasa.

Di Bisnis Indonesia, sesuai namanya, berita bisnis adalah primadona. Bila kami menulis, kami akan menulis dengan aksentuasi bisnis. Bila humor, humor bisnis. Bila sport, sportnya kaum bisnis.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda, sebagai pengiklan, tidak ingin membagi berita bagi pembaca kami ?

Iklan, dalam banyak hal, adalah berita. Berita bisnis. Berita mengenai pengenalan sebuah produk baru. Berita mengenai inovasi produk, mengenai cita-rasa baru, kemasan baru; cara-cara penggunaan baru. Berita mengenai harga jual, mengenai tempat-tempat penjualan. Dan ada kalanya, berita mengenai nama besar dibelakang sebuah produk.

Bila Anda memiliki produk yang ingin Anda komunikasikan kepada para pengambil keputusan - seperti Anda - tidakkah lebih baik Anda memilih harian bisnis paling berpengaruh di Indonesia saat ini, untuk menyampaikan "berita bisnis" Anda ?

PEMBACA
Bisnis Indonesia
100% INSAN BISNIS

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab :
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/ Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir. Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs. Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny. T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi :
Anang Adenansi
Dr. Alfian
H. Kafrawi MA
Drs. Slamet Efendi Yusuf
Drs. Irsyad Sudiro
Drs. Thomas Suyatno
Ny. Maria Sugiharto
Drs. Wijanarko Puspoyo MA
Drs. Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs. T.A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H.M. Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana :
Drs. Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD PAND. DV. Noerjathy

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas nakah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI
Makna Sebuah Surat Perintah

FOKUS
Langkah dan Tekad Orde Baru Membuahkan Banyak Hasil; Supersemar Merupakan Tonggak Perjuangan Orde Baru.

LAPORAN UTAMA
Perkembangan Industri Capai Prestasi Mengesankan; Kita Sering Terbenam pada Permasalahan Hari Ini; Tugas Itu Terasa Makin Berat; Ekonomi dan Politik Lebih Menonjol.

LAPORAN KHUSUS
Koperasi, Menuju Kemandirian; Jumlah KUD Memang Banyak.

NASIONAL
Undang-undang Sistem Pendidikan Langkah Dasar Menata Pendidikan Nasional; Menuju Pengembangan Energi Nuklir; Perlu Bimbingan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Orang-orang Kecil; Menggugah Hati Para Hartawan; Tunggal Putri dan Ganda Putra Nomor Yang Selalu Dianaktirikan; Keselamatan, Upaya Meningkatkan Kualitas Manusia.

IN MEMORIUM
Tokoh Pejuang Telah Pergi.

ORGANISASI
Kader Golkar di DPR Jangan Rikuh Mengungkap Suatu Persoalan; DPP Golkar Tidak Akan Melakukan Recalling; Ketahanan Ekonomi Merupakan Kondisi Dinamis Bangsa; Golkar Ingin Fair dalam Berpolitik; Safari Bhakti Sosial AMPI Se-Jabotabek; Peranan Wanita Punya Sumbangsih Besar pada Perjuangan Bangsa.

KOMENTAR
Pembangunan Adalah Sebuah Pengorbanan.

INTERNASIONAL
Afghanistan Yang Kian Bergolak; Cheney Boss Baru Pentagon.

SPEKTRUM
Hikmah Isra' Mi'raj Bagi Keberadaan Manusia di Muka Bumi.

SENI & BUDAYA
Seni Budaya dan Golkar; Jumenengan Mas Mangkubumi.

Digitized by Google

Makna Sebuah Surat Perintah

Apalah artinya sebuah surat? Pertanyaan yang sering muncul dalam perbincangan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat. Seperti juga orang bertanya: Apalah arti sebuah nama? Nampak sederhana sekali, tidak sulit untuk mencari jawabannya. Tetapi pertanyaan itu menjadi penting, jika ia diberi bobot tersendiri.

Dalam keseharian kehidupan ini, orang pasti pernah mengirim dan menerima surat kepada dan dari orang lain. Entah keluarganya, kerabatnya, teman atau pacar, anak, entah siapa lagi. Tapi pasti orang pernah mengirim dan menerima surat.

Dan pasti diantara sekian surat yang diterima ada yang punya arti serta makna tersendiri bagi penerimanya. Apakah itu surat cinta, surat wasiat, surat warisan, semua surat penting lainnya. Itu bagi orang seorang, lain lagi dengan organisasi (ormas, orpol dan pemerintah).

Bagi yang disebut belakangan ini, semua surat memiliki arti dan makna tersendiri sesuai peruntukkannya. Kadar serta bobot arti surat itu terletak pada situasi dan kondisi saat ia dikeluarkan, disamping peristiwa yang memaksa surat tersebut dikeluarkan.

Dengan begitu, situasi dan kondisi serta peristiwa yang melahirkan surat itu sangat menentukan maknanya. Katakan bahwa itu sebuah SURAT PERINTAH. Surat itu selalu dikeluarkan oleh pemegang otoritas tertinggi dalam sebuah jajaran. Seperti : Surat Perintah PANGAB, Surat Perintah Presiden, Surat Perintah Panglima dan sejenisnya.

Tanggal 30 September 1965, terjadi sebuah tragedi nasional. Sejumlah putra terbaik bangsa ini dibunuh secara keji oleh Partai Komunis Indonesia. Sebuah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Dia merupakan lembaran paling hitam dalam catatan sejarah bangsa Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak hanya merupakan pengkhianatan, tetapi membawa hikmah yang paling dalam bagi perjalanan sejarah bangsa selanjutnya. Pengkhianatan itu pulalah yang telah menjadi awal bagi upaya menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama duapuluh tahun mengalami berbagai penyimpangan.

Enam bulan setelah pengkhianatan Partai Komunis Indonesia itu, lahir sebuah Surat Perintah. Presiden Soekarno (waktu itu) mengeluarkan sebuah surat perintah yang diberikan kepada Mayor Jenderal Soeharto (waktu itu) sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkokamtib).

Berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 1966 itulah, maka pada tanggal 12 Maret 1966 Pangkokamtib mengeluarkan Surat Perintah untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia serta mantel organisasinya.

Sejak itu pula upaya menumpas G.30.S/PKI terus ditingkatkan. Berangsur-angsur gembong-gembong G.30.S/PKI ditangkap dan diadili.

Tidak hanya pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta seluruh mantel organisasinya, tetapi SP 11 Maret 1966 memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk menata kembali kehidupan negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Juga sebagai kekuatan hukum untuk melakukan tindakan merehabiliter keadaan ekonomi Indonesia yang sudah morat-marit itu.

Singkatnya, SP 11 Maret 1966 merupakan titik balik dari perjalanan sejarah bangsa, dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional. SP 11 Maret 1966 jika hendak jujur bicara, harus diakui bahwa surat tersebut adalah awal tekad bangsa Indonesia untuk membangun kembali kehidupan nasionalnya secara keseluruhan, melalui pembangunan berencana.

Disini makna dari Surat Perintah 11 Maret 1966 yang paling dalam. Sebuah surat yang telah mengantar bangsa ini pada tingkat cukup terpandang. Dari negara miskin menjadi negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai diantara negara-negara dunia ketiga lainnya.

Patut diakui, SP 11 Maret 1966 telah mengantar bangsa Indonesia keluar dari gumpalan kabut kehancuran ekonomi, kemerosotan sosial, kesewenang-wenangan politik serta perang saudara. Diakui atau tidak, sesungguhnya SP 11 Maret 1966 punya andil yang sangat besar dalam rangka pemantapan pembangunan nasional disegala bidang. Yang paling menyolok adalah keberhasilan pembangunan ekonomi dan berhasilnya memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya setiap kali memperingati SUPERSEMAR kita seolah diingatkan untuk memahami dan menghayati Surat itu.□

Digitized by Google

Langkah dan Tekad Orde Baru Membuahkan Banyak Hasil

11 Maret 1966, bagaimanapun telah terukir dalam sejarah perjuangan bangsa. Hari itu, Jum'at, 23 tahun yang lalu, Soekarno (Presiden pertama) memberikan mandat yang dibawa oleh tiga perwira tinggi, Basuki Rachmat (alm) Menteri Veteran waktu itu, M. Yusuf, (Menteri Perindustrian waktu itu dan sekarang Ketua Bapeka), dan Amirmachmud (Mantan Ketua DPR/MPR) kepada Letnan Jenderal Soeharto (Presiden RI sekarang). Dan pada hari dan tanggal itu pula juga merupakan tonggak dari sejarah lahirnya Orde Baru.

Sebagaimana diketahui, Surat Perintah Sebelas Maret isinya antara lain, memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto, atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi.

Kemudian satu hari setelah peristiwa bersejarah itu, (12 Maret 1966) Letnan Jenderal Soeharto mengambil langkah-langkah penting, yaitu membubarkan PKI, beserta mantel-mantelnya.

Langkah yang diambil Letnan Jenderal Soeharto, ternyata mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Memang, keputusan itulah yang dinanti-nantikan. Dengan dibubarkannya PKI beserta mantel-mantelnya, maka salah satu tuntutan dari rakyat telah terpenuhi. Sebagaimana diketahui, tuntutan rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tri Tura itu antara lain, bubarkan PKI, bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G.30.S/PKI dan turunkan harga.

Memang, langkah ini setidaknya membuat kaget Presiden Soekarno sendiri. Seperti dipaparkan Amirmachmud, salah satu dari tiga perwira yang mengikuti peristiwa tersebut; Bung Karno langsung mengutus Leimena (Waperdam) ke jalan Agus Salim untuk menemui Pak Harto. Pesan yang dibawa adalah menyampaikan teguran dari Bung Karno, karena Pak Harto telah mengumumkan pembubaran PKI. Selain itu Bung Karno menyampaikan instruksi agar Pak Harto menghadapkan tiga perwira tinggi itu di Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, Bung Karno marah-marah. Sebab, kata Amirmachmud, instruksi yang diberikan itu (Supersemar) tidak mencantumkan tentang pembubaran PKI. Namun, dalam dialog tersebut, ketiga perwira itu membenarkan langkah yang diambil Letnan Jenderal Soeharto. Sebab, kata Amirmachmud memberi alasan, selama PKI masih bereksistensi, maka keutuhan bangsa dan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 tidak akan terwujud.

Bagaimanapun, peristiwa itu telah tercatat sebagai sejarah bangsa Indonesia. Dan peristiwa Sebelas Maret telah menciptakan babakan baru. Bangsa Indonesia secara perlahan namun pasti mulai meninggalkan masalah-masalah yang merawankan keutuhan nasional. Misalnya menyederhanakan sistim kepartaian, dari yang sebelumnya jumlah partai hanya cukup banyak difusikan menjadi dua Parpol, satu Golkar dan ABRI. Namun, dalam kurun perjalanannya, selama 23 tahun ini pembangunan yang paling mengesankan di bidang politik adalah, diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi segenap kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan.

Selain itu, dalam era pemerintahan Orde Baru, langkah-langkah dan tekad untuk membangun disegala bidang mulai direncanakan dan telah membuahkan banyak hasil. Di antaranya bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Dibidang politik misalnya, pemerintah Orde Baru telah berhasil melaksanakan Pemilu secara berkala setiap lima tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982 dan 1987. Dan perlu dicatat, dalam pelaksanaan Pemilu ini semakin lama semakin baik.

Kemajuan lain adalah secara teratur bangsa Indonesia telah melaksanakan Sidang Umum MPR secara berkala sekali 5 tahun, yaitu tahun 1973, 1978, 1983 dan 1988. Dan dalam Sidang-sidang Umum MPR itu juga telah berhasil menetapkan Garis-garis Besar

Perayaan Supersemar di Krida Bhakti

Digitized by Google

Kader-kader Golkar pada perayaan lahirnya Supersemar

Haluan Negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar '45 dan telah berhasil pula memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris serta mengangkat Wakil Presiden.

Selain itu dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, lembaga-lembaga Tinggi Negara, seperti Presiden, DPA, DPR, Bapeka dan MA, telah didudukkannya kembali pada kedudukannya yang terhormat dan masing-masing telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberhasilan lain selama 23 tahun ini adalah pembangunan dapat dilakukan secara terencana yang diwujudkan dalam pembangunan lima tahunan dan yang lebih dikenal dengan sebutan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Sebagaimana diketahui, program pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, yang sebentar lagi akan memasuki Pelita lima yang juga merupakan persiapan bangsa Indonesia dalam memasuki persiapan tinggal landas.

Keberhasilan di bidang ekonomi juga telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Di bidang sosial budaya, juga demikian. Misalnya sarana pendidikan telah berlipat ganda jumlahnya. Begitu pula dengan tenaga pendidik juga menunjukkan pertambahan cukup pesat. Sehingga, sekarang ini kita dapat mengumumkan wajib belajar bagi semua anak usia belajar pada tingkat sekolah dasar.

Di bidang kesehatan juga tidak kalah ketinggalan. Sekarang ini, setiap kecamatan sudah ada Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan bahkan di hampir setiap kelurahan dan sebagian besar desa juga telah berdiri Posyandu.

Kemajuan di sektor kehidupan beragama juga sangat membesarkan hati. Masjid, gereja, dan tempat ibadah yang lain juga telah tersebar di berbagai pelosok tanah air. Namun, yang paling mengesankan di sektor tersebut, adanya toleransi antara umat beragama.

Kemudian di bidang Hankam, kita telah berhasil memantapkan pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang bukan saja menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan, juga telah menjadi kekuatan sosial politik.

Memang, sederetan kemajuan yang dicapai selama era perjalanan Orde Baru, ke depan tantangannya tidak sedikit. Seperti dikatakan Ketua Umum GOLKAR, Wahono dalam peringatan 23 tahun lahirnya Supersemar yang juga merupakan tonggak sejarah lahirnya Orde Baru misalnya di bidang ekonomi dan yang lain. Sebagaimana dikatakan, kita dalam melaksanakan pembangunan masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sasaran pembangunan, kata Wahono masih belum tercapai sepenuhnya. Kekurangan pada unsur pelaksanaan pembangunan, usaha pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang belum begitu mantap, masih ada korupsi yang sangat merugikan rakyat dan yang lainnya. "Semua ini menjadi tugas kita untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut."

Kiranya perlu disadari, kata Wahono, keberhasilan dari pembangunan, akan dapat menimbulkan harapan baru. Antara lain, timbulnya perubahan nilai dan norma yang terus berkembang. Apabila hal tersebut tidak dapat disalurkan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan kekecewaan dan keresahan di dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, maka Wahono mengharapkan kepada seluruh jajaran keluarga besar GOLKAR, untuk terus ikut mawas dan terus berusaha memperbaiki diri. Yaitu, dengan tetap berpegang teguh pada landasan perjuangan Orde Baru, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan demokrasi, konstitusi dan hukum, ujar Wahono.

Hendaknya disadari, kata Wahono, bahwa pertumbuhan ekomomi yang cukup tinggi, bila tidak dibarengi dengan pemerataan akan dapat menimbulkan jurang pemisah antara golongan yang punya dan golongan yang tidak punya. Bila tidak diambil langkah-langkah secara dini, tegas Wahono, maka hal-hal yang pada gilirannya nanti akan dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak sosial yang dapat menimbulkan ancaman.

Dihadapkan kita, terbentang tugas-tugas yang berat, seperti peningkatan perwujudan demokrasi Pancasila, perjuangan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan bobot lembaga perwakilan, membantu pemerintah memberantas korupsi, melakukan pendidikan politik rakyat dan yang lainnya.

"Semua itu adalah usaha besar yang memerlukan pemusatan segala perhatian dan pengerahan segala tenaga dari segenap kader-kader GOLKAR di seluruh penjuru tanah air".

Untuk menjawab segala tantangan yang dibentangkan itu, Wahono meminta agar merapatkan seluruh barisan untuk menggalang kekuatan yang disemangati oleh hakekat Supersemar, yang menjadi pangkal tolak dari lahirnya Orde Baru. "Kita tidak boleh ingkar, dituntut semangat yang tinggi dalam menegakkan kehidupan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum, serta mempunyai sikap mental dan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen." ujar Wahono.
BM

Digitized by Google

Supersemar Merupakan Tonggak Perjuangan Orde Baru

Membicarakan Supersemar, kembali ingatan kita pada 23 tahun lalu. Kilas balik ini tak akan pernah kehilangan relevansi, meski tiap tahun peristiwa tersebut selalu diperingati.

Tonggak sejarah perjuangan Orde Baru dalam pembangunan nasional berencana erat kaitannya dengan Supersemar. Untuk mengungkap kembali peristiwa bersejarah — lahirnya Supersemar —, Jenderal (Purn) Amirmachmud menuturkan kembali detik-detik ditandatanganinya naskah Surat Perintah Sebelas Maret kepada *Media Karya.*

Hari Jum'at, 11 Maret 1966 akan berlangsung Sidang Kabinet 100 Menteri di Istana. Amirmachmud selaku Pangdam V/Jayakarta waktu itu, mempunyai tugas keamanan, datang ke Istana. Ketika melaksanakan tugas, Brigjen Sabur (Ajudan Presiden) menanyakan Sidang Kabinet dapat diteruskan atau tidak, dan jawaban yang diberikan adalah sidang bisa diteruskan.

Sesudah Presiden dan para Waperdam (Subandrio Leimena dan Chaerul Saleh) datang, beliau pun menanyakan situasi, dan dijawab oleh Amirmachmud bahwa situasi aman dan tidak ada apa-apa. Tidak lama kemudian, protokol Istana melaporkan kepada Bung Karno bahwa sidang kabinet bisa dimulai dan Amirmachmud pun minta izin untuk ke luar ruangan teras karena akan melaksanakan tugas pengamanan di luar, tetapi Bung Karno menginginkan agar ikut bersmanya menghadiri Sidang Kabinet di Istana Negara.

Ketika Sidang Kabinet berlangsung, 2 kali Brigjen Sabur mengirim nota kepada Amirmachmud yang isinya memberitahukan bahwa di luar ada pasukan liar. Saat itu Bung Karno sedang memberikan petunjuk/pengarahan. Rasanya kurang mengenal kesopanan bila saya meninggalkan sidang, ujar Amirmachmud sembari menggoyang-goyangkan tangan memberi isyarat, yang artinya tidak akan terjadi apa-apa. Rupanya Brigjen Sabur tidak puas dengan jawaban itu, dan akhirnya dia pun menulis nota kepada Bung Karno, yang isinya sama seperti nota-nota sebelumnya.

Setelah Bung Karno membaca nota tersebut, terlihat tangan Bung Karno gemetar, lalu nota diberikan kepada Subandrio. Melalui pembicaraan satu sama lain, akhirnya Bung Karno menskors sidang dan pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam Dr. Leimena. Selanjutnya Bung Karno berdiri

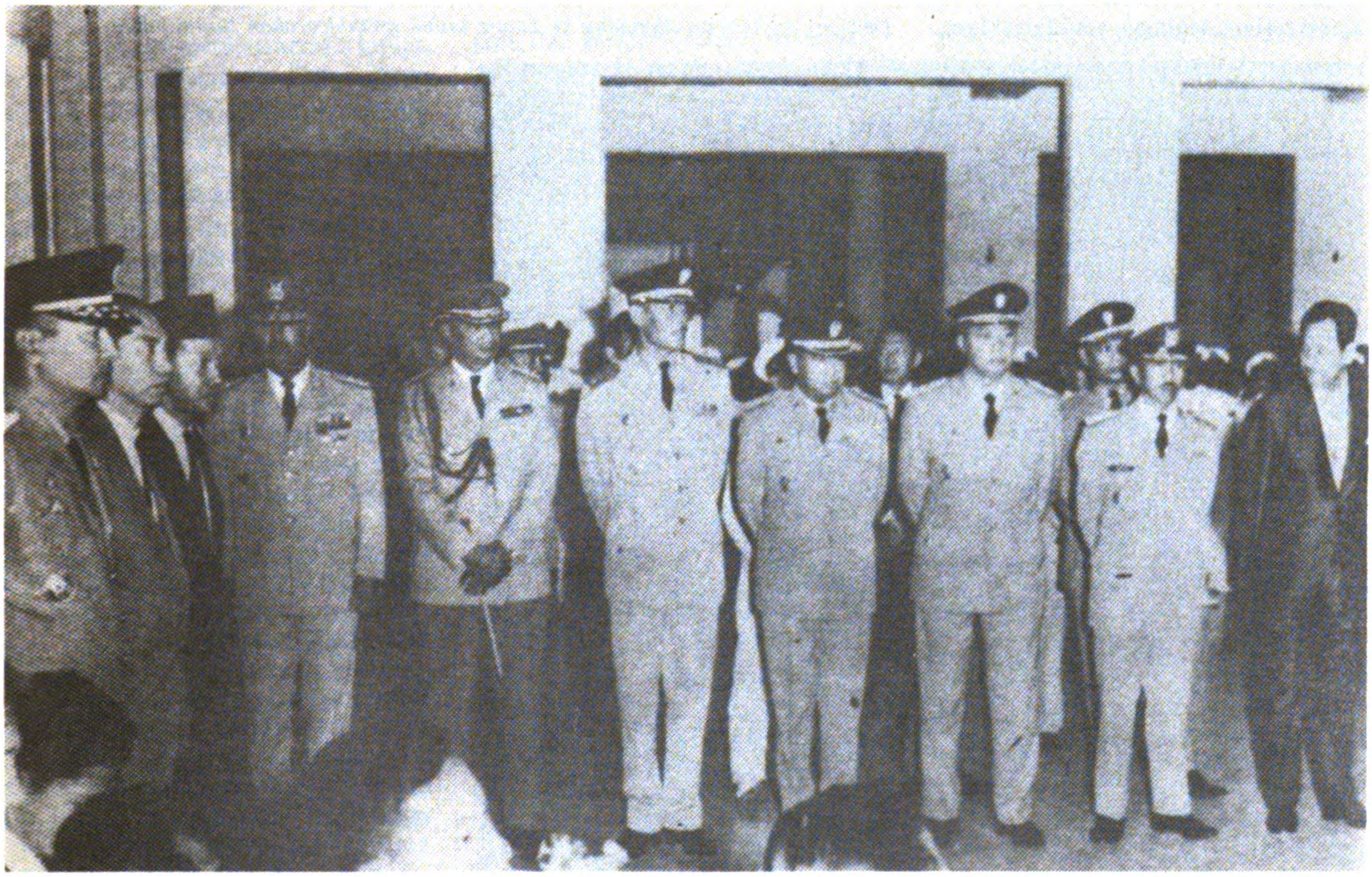

Pelantikan anggota Kabinet Ampera

Digitized by Google

meninggalkan ruang sidang.

Karena bertanggungjawab mengenai keamanan, Amirmachmud pun ke luar ruang sidang dan mengejar Bung Karno. Di tangga Istana Negara, Bung Karno bertanya:

"Mir, ke mana Bapak harus jalan?"

Mendapat pertanyaan demikian, Amirmachmud menjawab:

"Bapak tidak usah bingung, tidak usah takut, karena ada perintah tegas dari Pak Harto untuk menjaga keselamatan Bapak dan tidak boleh ada satu peluru pun mengenai Bapak. Jadi Bapak harus tenang, karena tidak akan terjadi apa-apa".

Setelah itu, Amirmachmud mengantar Bung Karno ke helikopter yang berada di halaman Istana Merdeka, dan take-off menuju Bogor disertai Subandrio dan Chaerul Saleh. Setelah kepergian Bung Karno ke Bogor, Amirmachmud pun kembali ke Istana Negara untuk mengikuti sidang lanjutan yang dipimpin oleh Pak Leimena. Rupanya Pak Leimena tidak mau ambil resiko, sehingga sesudah sidang kabinet lanjutan dibuka kembali, kemudian ditutup lagi dan selanjutnya para peserta sidang kabinet bubar dan ke luar dari Istana Negara.

Delegasi mahasiswa diundang ke Istana untuk membicarakan tuntutannya

Aksi pelajar dan mahasiswa di Bogor

Selesai sidang, Amirmachmud berjalan bersama-sama Basuki Rachmat (Menteri Veteran) dan M Yusuf (Menteri Perindustrian). Waktu itu Pak Yusuf mengajak pergi ke Bogor menemui Bung Karno untuk berbincang-bincang agar beliau tidak merasa telah ditinggal oleh Angkatan Darat. Ajakan itu disetujui bersama. Waktu itu Amirmachmud menganjurkan agar bertiga melapor Pak Harto lebih dahulu. Ajakan itupun disetujui. Maksud pergi ke Bogor untuk menentramkan Bung Karno disampaikan kepada Pak Harto, bahkan Pak Harto memberi pesan:

"Pertama, sampaikan salam kepada Bung Karno dan kedua, Bung Karno tidak usah khawatir. Kita sanggup menyelamatkan Pancasila, UUD 1945, menyelamatkan revolusi Indonesia dan memelihara keamanan, asal kita diberi kepercayaan untuk itu".

"Jadi, oleh Pak Harto pun tidak pernah dibicarakan mengenai apa yang dinamakan Surat Perintah Sebelas Maret itu," ujar Amirmachmud.

Mengingat harus cepat berangkat ke Bogor, ketiga perwira tinggi itu selanjutnya kembali lagi ke Istana Merdeka. Dengan helikopter mereka menuju Bogor.

Bercelana kolor putih dengan kaos

Digitized by Google

Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI ke-II

oblong, Bung Karno menerima ketiga perwira di paviliyun, selanjutnya Bung Karno menanyakan maksud menemui beliau. Waktu itu Basuki Rachmat menjawab bahwa kedatangan mereka untuk mendampingi, supaya beliau tidak dipengaruhi oleh situasi atau kejadian pada waktu sidang, sehingga tenang dan sanggup mengatasi persoalan. Lalu Bung Karno pun menanyakan situasi yang sebenarnya, Amirmachmud menjawab keadaannya aman. Dan waktu itu pun beliau membentak, "Kau bilang aman, aman, tetapi demonstrasi berjalan terus".

Sesudah berdiskusi, berdialog serta bertukar pikiran, akhirnya Bung Karno melemparkan pertanyaan bagaimana mengatasi semua itu. Suasana hening sejenak. Pak Basuki Rachmat dan Pak Yusuf belum memberikan tanggapan. Di tengah suasana yang demikian, secara spontan dan polos Amirmachmud menjawab:

"Bapak perintahkan saja Pak Harto, semua menjadi beres. Pancasila diamankan, Undang-Undang Dasar 1945 diamankan, Revolusi dilanjutkan, pembangunan dilanjutkan, keluarga Bapak dijamin keselamatannya".

Mendapat saran tersebut Bung Karno kembali bertanya:

"Bentuk bagaimana?"

Kemudian Amirmachmud menjawab, "Bentuk saja tim. Pak Basuki Rachmat ketua tim, Pak Yusuf anggota dan Brigjen sebagai sekretaris".

Ternyata saran itu disetujui Bung Karno. Sekalipun Amirmachmud tidak duduk dalam tim, namun dalam perumusan diikutsertakan dalam pembicaraan. Setelah rumusan diselesaikan oleh tim — masih konsep yang ditulis dengan vulpen — Bung Karno memanggil anggota Presidium yang juga hadir di Bogor. Setelah dibaca Bung Karno selanjutnya dibaca oleh Leimena dan yang lainnya.

Waktu giliran Subandrio membacanya, dia mengusulkan beberapa koreksi yang sifatnya tidak prinsipil, tapi hanya redaksionalnya saja. Sesudah konsep dikembalikan kepada Bung Karno, Brigjen Sabur diperintahkan untuk mengetiknya.

Setelah konsep di-tik, Brigjen Sabur menyerahkannya kepada Bung Karno. Waktu itu Sabur membertahukan kepada Bung Karno bahwa secara administratif Surat Perintah semacam itu kurang dapat dipertanggungjawabkan karena dari lembar ke satu ke lembar ke dua tidak ada kata penyambung dibawahnya. "Pendapat tersebut memang benar, namun dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru," ujar Amirmachmud.

Karena khawatir, kemudian Amirmachmud berucap:

"Lho, dalam revolusi masa masih memikirkan mengenai administratif. Sudahlah, serahkan saja kepada Bung Karno".

Kemudian naskah tersebut dibaca oleh Bung Karno secara tekun dan tenang dan beliau bertanya:

"Bagaimana ya. Saya tanda tangan atau tidak?"

Melihat ada keragu-raguan dari Bung Karno, masalahnya bisa buyar atau mentah kembali. Saat kebimbangan itulah Amirmachmud berucap:

"Sudahlah Pak, Bismillahirrahmannirrahiim saja". Ucapan itu diikuti oleh semua anggota presidium yang hadir. Dan denganucapan itu pulalah Bung Karno tergerak untuk menandatangani naskah tersebut. Setelah ditandatangani, naskah tersebut langsung diserahkan kepada Pak Basuki Rachmat untuk kemudian diteruskan kepada Pak Harto. Karena naskah itu ditandatangani pada tanggal 11 Maret, maka naskah Surat Perintah tersebut dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR.

Kini, Supersemar sudah berusia 23 tahun. Tonggak sejarah Orde Baru berangkat dari sini. Oleh karena itu jiwa dan semangat Supersemar ini wajib dan perlu diwariskan kepada generasi penerus, karena justru hanya dengan jiwa dan semangat itulah Bangsa dan Negara Indonesia akan mampu melanjutkan perjuangan dalam rangka mewujudkan aspirasi nasionalnya. Dengan semangat perjuangan yang dikobarkan oleh semangat Supersemar, perjuangan untuk mencapai kejayaan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa akan dapat mencapai sukses.☐

BM/SS/DT

Digitized by Google

Perkembangan Industri Capai Prestasi Mengesankan

Pengantar

Laporan Utama dalam terbitan ini mencakup permasalahan yang cukup luas, yaitu Pelita IV, Proyeksi Pelita V dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ke-II, yang dimulai pada Pelita VI.

Karenanya diturunkan dalam empat tulisan berikut: **Perkembangan Industri Capai Prestasi Mengesankan;* * *Kita Sering Terbenam Dalam Permasalahan Hari Ini;* * *Tugas Itu Terasa Makin Berat* dan * *Politik dan Ekonomi Paling Menonjol.*

Keempat tulisan itu tidak berdiri sendiri tetapi saling berkait, karena ketiganya bicara soal Capaian selama Pelita IV, Proyeksi dalam Pelita V dan Langkah-langkah yang dipersiapkan menjelang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (25 tahun) kedua yang dimulai pada Pelita VI mendatang.

Selamat mengikuti.

Redaksi

Pada awalnya banyak kalangan menyangsikan sektor industri bisa segera memainkan peranannya bagi perekonomian Indonesia, setelah anjloknya peranan migas.

Namun, dalam perkembangannya industri nasional ternyata bisa "tampil" mengesankan. Laju pertumbuhan industri nasional dalam Pelita IV mencapai 10,2% rata-rata per tahun. Sedangkan peranan sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang dalam tahun 1984 baru 12%, tapi pada 1987 telah meningkat menjadi 14%.

Prestasi yang mengesankan juga tercermin dari sumbangannya terhadap ekspor non migas. Termasuk dalam memberikan nafkah kepada masyarakat luas, berupa penyerapan tenaga

Pemerintah mendorong terciptanya iklim yang sehat.

Digitized by Google

kerja dalam sektor industri. Lantas, bagaimana pula peranannya dalam Pelita V?

Industrialisasi

Walaupun keadaan ekonomi nasional masih cukup berat, sebagian besar industri nasional dalam Pelita IV dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Menteri Perindustrian, Ir. Hartarto, hal tersebut utamanya disebabkan, karena arah kebijaksanaan ekonomi yang semakin mantap.

Di samping karena makin membaiknya iklim industri serta berkembangnya wiraswasta-wiraswasta nasional, baik dalam jumlah maupun dalam kemampuannya, utamanya dalam melakukan ekspor hasil produksinya.

Ketika memberi penjelasan mengenai hasil-hasil Pelita IV, Hartarto menjelaskan mengenai tahapan pemantapan industrialisasi dalam Pelita IV.

Dalam tahun 1983 hingga 1985, sektor industri melaksanakan proses konsolidasi dalam arti luas mencakup aspek manajemen, keuangannya (utamanya struktur modal), tehnis/teknologis dan pemantapan bidang pemasaran.

Tapi sejak awal 1986 dengan mantapnya kondisi industri nasional, sebagian besar dari sektor industri telah bangkit kembali.

Pemerintah mendorong usaha kebangkitan itu melalui penciptaan iklim yang lebih sehat dan dinamis, antara lain melalui langkah deregulasi dan debirokratisasi sebagai upaya meningkatkan motivasi dan partisipasi para wiraswasta nasional dalam pembangunan industri.

Selain, memberikan pembinaan dan arah pengembangan yang jelas, baik dalam rangka ekspor, pendalaman struktur, yang pada umumnya didukung oleh suatu studi nasional.

Dijelaskannya, dengan dukungan ekspor hasil industri, maka pada tahun 1987 dan 1988 (periode Januari — September 1988) ekspor non migas bahkan sudah melampaui ekspor migas, yang berarti ketergantungan ekonomi Indonesia akan ekspor migas semakin berkurang.

Realisasi ekspor non migas dan hasil industri pada periode Januari — September 1988 masing-masing mencapai US$ 8.243 juta dan US$ 6.723 juta, melebihi ekspor migas sebesar US$ 6.094 juta.

Bahkan dalam bulan Juni, Juli dan

Industri kecil memerlukan penanganan secara intensif.

September 1988 ekspor non migas masing-masing telah mencapai nilai di atas US$ 1 miliar dalam satu. Ini merupakan angka rata-rata terbesar pertama kali sejak pembangunan dilaksanakan selama ini.

Menyinggung tentang perkembangan industri nasional, utamanya dalam tahun 1985, 1986, 1987, dikatakannya telah mampu meningkatkan sumbangan industri dalam PDB.

Sesuai dengan pengamatan UNIDO terhadap proses industrialisasi negara berkembang, apabila sumbangan industri mencapai sekitar 15% dalam PDB pada hakekatnya memberi arti bahwa industrialisasi telah memasuki tahap untuk proses perkembangan yang lebih cepat untuk menuju tahap tinggal landas.

Pendalaman

Dalam kesempatan yang sama, Hartarto juga menjelaskan mengenai masalah pendalaman struktur industri. Utamanya langkah-langkah untuk menghemat devisa melalui pengembangan industri kimia dasar, logam dasar, mesin dan elektronika serta beberapa industri dalam kelompok aneka industri.

Dikatakan, sampai akhir Pelita IV struktur industri nasional telah menjadi semakin mendalam dan mantap.

Ini ditandai dengan sampai periode akhir 1987, telah dibangun 135 proyek

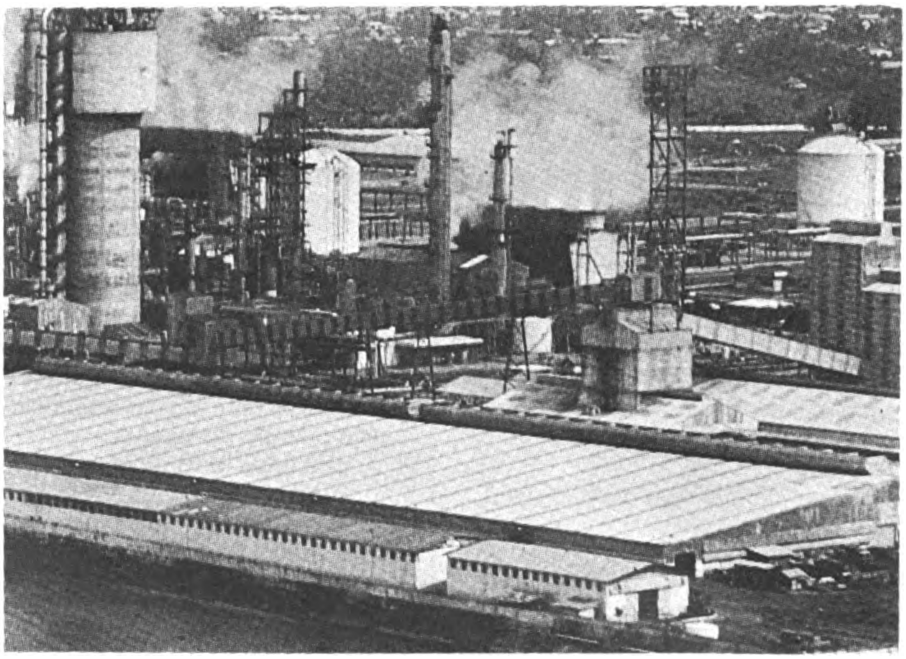

Sampai akhir Pelita IV struktur industri semakin mantap.

Digitized by Google

industri dasar dengan investasi sekitar Rp 6,9 triliun dan secara berturut akan diselesaikan pembangunannya pada tahun 1988, 1989 dan 1990 mendatang.

"Bila keseluruhan proyek itu selesai akan dihemat devisa sekitar 1,2 miliar per tahun. Bahkan kelebihannya akan diekspor dengan nilai US$ 100 juta setahun," tandasnya.

Ketika masalah tinggal landas, Menteri mengatakan, sebetulnya untuk kelompok aneka industri saat ini sudah dikatakan memasuki tahap tinggal landas.

Perkembangan kelompok ini telah mampu berkembang sendiri utamanya karena orientasi ekspor. Umumnya, investasi tidak besar dan setiap tahun tumbuh wiraswasta baru.

"Kelompok ini merupakan andalan ekspor pada 5-15 tahun mendatang" tandasnya.

Untuk lebih meningkatkan perkembangan ini, kata dia lagi, pemerintah perlu membantu untuk memberi arah perkembangan melalui studi nasional serta mengamankan penyediaan bahan baku yang diperlukan baik berupa hasil pertanian, kehutanan, lautan, pertambangan dan hasil industri dasar.

Namun dipihak lain dia mengakui, masih terdapat kelompok industri yang masih memerlukan penanganan secara intensif, seperti industri kecil.

Kelompok ini masih sangat memerlukan uluran tangan Bapak-bapak Angkat untuk membantu aspek pemasaran, bantuan tehnis dalam mengembangkan industri kecil. Peranan balai-balai/pusat penelitian juga sangat diharapkan.

Demikian pula peranan instansi terkait dan dukungan perbankan. Termasuk usaha-usaha untuk pemberian pendidikan secara kontinyu terhadap wiraswata dan pimpinan Kopinkra.

Tehnologi

Dalam bidang penguasaan tehnologi, rancang bangun dan perekayasaan telah menunjukkan hasil yang semakin meningkat, utamanya dalam pembuatan mesin-mesin, peralatan pabrik, pabrik secara utuh dan pembangunan pabrik.

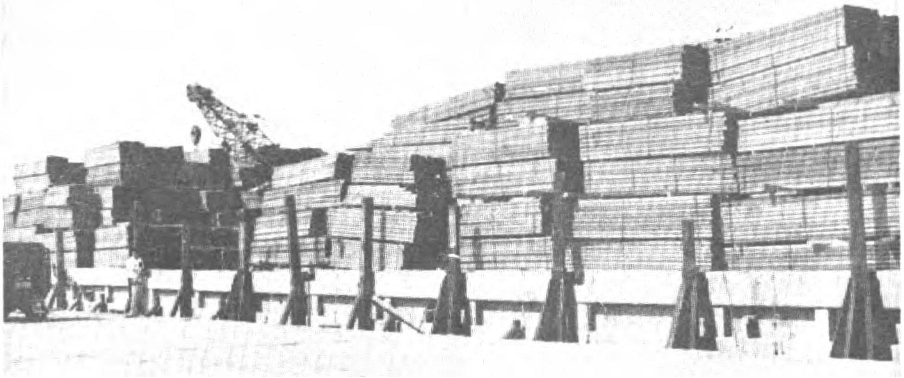

Kayu merupakan salah satu komoditi andalan

Bahkan, kita mampu membangun pabrik-pabrik dengan teknologi canggih secara utuh, antara lain pabrik semen, kertas, pupuk dan besi baja dengan biaya yang jauh lebih rendah apabila dikerjakan oleh kontraktor asing.

Selanjutnya pengembangan penelitian dan pengembangan melalui balai-balai litbang industri telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan sehingga mampu menerapkan tehnologi canggih untuk menunjang peningkatan mutu produk, efisiensi dan produktivitas industri serta penanggulangan masalah pencemaran industri.

Di samping itu mampu pula mengembangkan tehnologi tepat guna dan peralatan sederhana untuk menunjang industri kecil.

Namun secara keseluruhan Hartarto menyimpulkan, "pengembangan penguasaan teknologi dalam rancang bangun dan perekayasaan untuk pembuatan mesin-mesin, mesin-mesin peralatan pabrik dan pembangunan pabrik secara utuh masih lemah dan karenanya perlu terus didorong."

Tenaga Kerja

Dengan diselesaikannya proyek-proyek industri dalam jumlah yang cukup besar, telah tumbuh sejumlah wiraswasta (termasuk pimpinan koperasi) baik yang dari industri besar, menengah dan kecil yang tidak hanya berorientasi pada pasaran dalam negeri, tapi juga pasaran ekspor.

"Hal ini sungguh menggembirakan, karena pertumbuhan wiraswasta itu pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja yang semakin luas," tandasnya.

Lebih lanjut dikemukakan, dalam hal penyerapan tenaga kerja sektor industri merupakan salah satu penggerak utama bagi sektor ekonomi lainnya sehingga mampu memberikan dampak pertambahan lapangan kerja pada sektor-sektor yang terkait.

Selama empat tahun Pelita IV sektor industri telah mampu menyerap lapangan kerja baru sebanyak 1,7 juta orang, berarti telah melampaui sasaran yang ditetapkan sebesar 1,4 juta orang dalam Pelita IV.

Pelita V

Dalam Pelita V prioritas pembangunan-pembangunan masih tetap diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat, antara lain pada sektor industri. Khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolah hasil pertanian serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin.

"Semua dibangun dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari segi nilai tambah dan peranannya dalam produksi nasional maupun dari segi penyerapan tenaga kerja," tuturnya.

Menurut Hartarto, berdasarkan realisasi ekspor hasil industri selama Pelita IV, maka dalam Pelita V mendatang diproyeksikan peningkatan rata-rata 15% per tahun.

Di mana sasaran ekspor hasil industri dalam tahun pertama Pelita V diharapkan mencapai US$ 10,3 miliar dan pada 1993 diproyeksikan men-

Digitized by Google

capai 19 juga dolar AS.

Dengan makin berkembangnya ekspor hasil industri, jenis yang diekspor semakin banyak dan beraneka ragam, mulai produk industri kecil seperti sapu, gula aren, emping melinjo sampai dengan produk-produk industri yang menggunakan teknologi canggih antara lain produk besi baja, bejana beton, reaktor, automotive, komponen dan produk-produk engineering lainnya.

Bila pada 1983, jumlah komoditi ekspor hasil industri baru 181 komoditi, maka pada September 1988 angkanya telah meningkat menjadi 381 komoditi.

"Dalam Pelita V mendatang, jumlah komoditi ekspor hasil industri ditargetkan mencapai 600 jenis," tandas Menteri Hartarto.

Menteri melukiskan berkembangnya ekspor hasil industri itu terutama dilakukan oleh pengusaha swasta yang semakin mandiri dan mampu melakukan terobosan-terobosan pemasaran keluar negeri.

"Hasil usaha tersebut perlu terus ditingkatkan pada masa mendatang, mengingatkan peluang ekspor masih terbuka luas," katanya lebih lanjut.

Pasaran ekspor hasil industri Indonesia masih terbuka luas dan dapat dikembangkan pada masa mendatang, dengan tujuan negara-negara Asia dan Pasifik (Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, RRC, Australia, Papua Nugini dan sebagainya).

Untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tersebut perlu diperhatikan langkah-langkah penurunan bea masuk, pemanfaatan GSP, biaya dan kontinyuitas angkutan (laut dan udara).

Negara tujuan ekspor lainnya, meliputi Timur Tengah dan Masyarakat Ekonomi Eropa.

"Broadspectrum"

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekspor hasil industri melalui pola "Broadspectrum" atau spektrum yang luas dengan sekaligus melaksanakan diversifikasi pasaran ekspor.

Dengan pola Broadspectrum, jenis komoditi hasil industri yang diekspor akan semakin banyak dan beraneka ragam.

Menurut menteri Hartarto, Pemerintah tetap akan mempertahankan pola ini, karena telah terbukti menunjukkan hasil positif.

Dari hasil pemantauan realisasi ekspor hasil industri berdasarkan pola Broadspectrum, dapat ditentukan komoditi andalan ekspor dengan pengertian, antara lain: 1. Mengalami lompatan ekspor dengan mantap, dengan nilai ekspor tinggi. 2. Tidak mengalami hambatan dalam pengadaan bahan baku dan sebagainya utamanya industri-industri yang memanfaatkan sumberdaya alam. 3. Tidak mengalami hambatan dalam pemasaran ekspornya karena memiliki daya saing kuat dan masih dibutuhkan oleh pasaran dunia.

Komoditi andalan yang telah diidentifikasikan tersebut, antara lain:

1. Industri yang memanfaatkan hasil hutan secara luas, seperti: plywood, particle board, sawn timber, komponen meubel, dowels, woodworking product, pulp, rayon dan kertas.
2. Industri yang memanfaatkan hasil pertanian/perkebunan, baik yang merupakan produk perkebunan maupun partanian, seperti: Karet: sepatu, ban, industrial rubber product. Latex: gloves, kondom dan sebagainya.
3. Industri yang memanfaatkan hasil laut, meliputi udang beku, tuna, ikan dalam kaleng serta produk rumput laut.
4. Industri yang memanfaatkan hasil pertambangan non migas, antara lain: produk keramik, table wares, sanitair, gelas botol dan produk-produk petrokimia.
5. Industri engineering dan komponen-komponen termasuk industri alat-alat transport.
6. Industri yang pakat karya, baik dalam kelompok industri kecil, aneka industri maupun dalam industri engineering, seperti: minyak atsiri, perhiasan dari logam/batu mulia, barang-barang kerajinan dan komponen.

Keterkaitan

Menjawab pertanyaan, Hartarto mengemukakan, dalam upaya untuk meningkatkan ekspor/hasil-hasil industri sangat diperlukan lintas sektoral.

Bila dilihat dari mata rantai proses, maka sektor industri pengolahan berada pada titik pertengahan dari suatu proses.

Pada proses awalnya yaitu berupa masukan untuk industri berupa bahan yang dipasok oleh sektor-sektor lain yaitu produk-produk primer hasil pertanian, pertambangan dan kehutanan.

Sedangkan dalam tahap selanjutnya dari hasil industri akan menyangkut kegiatan jasa seperti perdagangan dan perhubungan.

Dalam hal ini maka pengamanan bahan baku termasuk kontinyuitas maupun mutu dan jumlah, berada pada sektor diluar industri.

Guna makin memantapkan ekspor masih tetap diperlukan keterkaitan dan kerjasama yang erat antara departemen dan antara pemerintah dengan dunia usaha.

Pada bagian lain dikemukakan, proses industrialisasi akan berjalan dengan menimbulkan dampak-dampak pertumbuhan, pendalaman struktur, penciptaan lapangan kerja, penghematan dan perolehan devisa, swasembada penyediaan barang, selama kegiatan investasi dan produksi oleh dunia usaha tetap berjalan.

Dijelaskan, penanaman modal untuk menunjang pembangunan ekonomi telah berlangsung sejak UU No. 1/1967 tentang penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.6/1968 tentang PMDN.

"Sejak itu penanaman modal utamanya disektor industri telah berkembang dengan pesat," tandasnya.

Ditinjau dari penyebaran lokasi perusahaannya, maka pulau Jawa mempunyai daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya sesuai dengan jumlah dan luasnya pasar, jumlah penduduk serta tenaga kerja yang tersedia.

Sejak awal Pelita IV penyebaran lokasi perusahaan sudah mulai mengarah kebeberapa daerah ke luar pulau Jawa.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam merancang penyebaran lokasi perusahaan melalui penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang lebih memadai, pembukaan lokasi baru yang dikaitkan dengan transmigrasi serta kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perusahaan yang didirikan diluar Pulau Jawa.

Dalam Pelita V mendatang usaha penyebaran lokasi ke luar Jawa akan terus ditingkatkan dengan cara :

*Pembangunan industri dasar dan aneka industri yang memanfaatkan sumber daya alam serta pertanian dalam arti luas, sektor kehutanan, pertambangan baik migas/non migas, telah memasuki Indonesia bagian timur.

*Penyusunan daftar negatif dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) bagi industri-industri yang sudah tidak dimungkinkan lagi dikembangkan di Pulau Jawa, sehingga dapat diijinkan pengembangannya dengan syarat lokasinya diluar Pulau Jawa.□

Digitized by Google

Kita Sering Terbenam pada Permasalahan Hari Ini

Repelita V yang akan dimulai pada April 1989 ini merupakan suatu tahap persiapan akhir sebelum kita memasuki awal dari proses tinggal landas. Ia begitu menjadi penting, karena merupakan suatu periode perampungan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama bangsa ini.

Namun permasalahan pokok yang dihadapi Repelita V adalah bagaimana kita melakukan pemantapan, konsolidasi dan peningkatan pembangunan di setiap bidang kehidupan bangsa, agar bangsa ini siap memasuki awal tahap tinggal landas dalam Repelita VI nanti.

Tapi berbarengan dengan itu muncul permasalahan yang mendesak, khususnya di bidang ekonomi. Permasalahan itu antara lain makin bertambahnya jumlah penduduk dan penyediaan lapangan kerja produktif yang terus meningkat, yang akan membawa pada perubahan struktur ekonomi dan strategi pembangunan kita.

Di tengah permasalahan-permasalahan seperti itu, Media Karya mencoba meminta pandangan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), Prof. Dr. Emil Salim. Emil, yang selama ini dikenal sebagai ekonom senior menerima Media Karya pekan lalu di ruang kerjanya selama kurang lebih dua jam untuk berbincang-bincang mengenai masalah tersebut.

Masalah kependudukan di Indonesia akan tetap menghantui perjalanan panjang bangsa ini. "Senang atau tidak senang, dia pasti akan muncul," kata Emil Salim.

Meski program Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan pemerintah akan berhasil, namun pertambahan penduduk sampai tahun 2040 nanti akan terus berlanjut. Emil memperkirakan bahwa pada tahun itu jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 336 juta orang.

"Masalah kependudukan akan berhenti pada pertengahan abad ke depan, pada saat jumlah penduduk mencapai 336 juta jiwa," tuturnya.

Perkiraan-perkiraan itu didasarkan pada beberapa periode sebelumnya. Pada tahun depan nanti (1990) penduduk Indonesia akan menjadi 183 juta jiwa. Pada lima tahun kemudian angka ini terus berlanjut mencapai jumlah 203 juta jiwa, dan tahun 2000 telah menjadi 223 juta orang.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa penduduk terus bertambah, padahal program KB berhasil? Emil melihat bahwa tingkat kematian turun lebih cepat 34%, sedang tingkat kelahiran turun 21%.

Emil Salim

Karena kematian turun lebih cepat, maka lebih banyak yang survive, maka pertumbuhan penduduk bertambah.

Di sisi lain, tingkat kematian bayi di Indonesia tetap tinggi yaitu sebesar 52,0% per seribu kelahiran. Bandingkan dengan Swedia yang pada tahun 1988 tingkat kematian bayi per seribu kelahiran hanya 5,9%, kemudian Sri Lanka 30,5%, dan yang paling terburuk adalah Afghanistan sebesar 183,0%.

Secara medis, ini berarti bahwa jumlah kematian bayi itu bisa turun lebih besar ke level Sri Lanka, bahkan ke level Swedia. "Tapi, kalau dia turun lebih besar, maka penduduk akan bertambah terus," kata Emil Salim.

Dalam buku Rancangan Repelita V disebutkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun terakhir Repelita II hanya 2,3%. Kemudian angka ini mengalami penurunan pada akhir Repelita III, yaitu menjadi 2,2% dan pada akhir Repelita IV diperkirakan 2,1%. Bahkan pada tahun terakhir Repelita V laju pertumbuhan penduduk akan menjadi, 1,8%, sehingga rata-rata dalam lima tahun tersebut hanya 1,9%.

Meski laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan, namun pertambahannya secara absolut masih sangat besar, karena jumlah penduduk yang besar. Dalam Repelita V, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 175,6 juta pada 1988 menjadi 192,9 juta pada tahun 1993. Ini berarti suatu pertambahan sebesar 17,3 juta orang selama lima tahun atau rata-rata hampir 3,5 juta orang setiap tahun.

Dalam kaitan ini, Emil melihat bahwa sebesar 58% dari jumlah penduduk Indonesia adalah mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Dan kebanyakan mereka hidup di daerah perkotaan.

Kalau pada 1985 sebanyak 43 juta orang atau 26% tinggal di kota, maka pada tahun 2000 nanti diperkirakan akan naik menjadi 30% atau 66 juta orang yang tinggal di perkotaan.

"Penduduk kota ini akan terus naik. Dan pada tahun 2040 nanti akan mencapai 100 juta jiwa," ujarnya.

Makin gemarnya orang tinggal di daerah perkotaan, karena tersedia fasilitas pendidikan yang ditawarkan. Mereka yang tinggal di desa, mau tidak mau harus melangkah kakinya ke sana. Ini terjadi lantaran desa hanya menyediakan fasilitas pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) saja.

Mereka yang selesai mengenyam pendidikannya di desa sampai tingkat SD, akan mendatangi kabupaten yang menawarkan tingkat SLTP dan SLTA. Jika dua jenjang ini sudah mereka lewati, maka selanjutnya mereka bergerombol masuk ke ibu kota provinsi yang menawarkan tingkat akademi atau perguruan tinggi.

Dorongan semangat untuk mencari

Digitized by Google

Desa hanya menyediakan pendidikan pada tingkat SD

pendidikan di kota-kota itu dilakukan anak-anak di bawah usia 25 tahun, yang akan membuat perkembangan kota meningkat dan penduduk bertambah.

"Jadi, kita tidak bisa berkata, mereka tidak boleh masuk ke kota. Ini tidak bisa, karena adanya fasilitas pendidikan yang menuntut mereka untuk pergi ke kota," tambah Emil.

Namun di balik itu ada hal lain yang memang membuat mereka harus datang ke kota-kota. Tersedianya lapangan kerja di kota merupakan pilihan lain yang dicari anak-anak ini.

Berdasarkan perhitungan pada 1971-1980, elastisitas kerja di sektor pertanian berjumlah 0,18%. Tapi berdasarkan perkiraan tahun 1980-1990, tingkat pertumbuhan nilai tambah di sektor ini naik menjadi 3,5%, sehingga tingkat lapangan kerja menjadi 0,6%. Ini telah membuat bahwa kesempatan kerja berjumlah 29,7 juta jiwa pada 1985 dan 1990 diperkirakan akan mencapai 30,6 juta orang.

Kalau pada 1990 kesempatan kerja di sektor pertanian diperkirakan mencapai 30,6 juta, maka sektor industri pada periode yang sama akan menjadi 10,36 juta, sedang jasa 26,5 juta orang.

Pendeknya, untuk semua sektor pada tahun itu akan mencapai 67,7 juta orang. Jumlah tenaga kerja menjadi 73,2 juta orang, sedang tingkat pengangguran naik menjadi 7,5 juta orang.

Namun demikian bukan berarti hal itu tidak ada perubahan pada GNP kita. Dalam perkembangan seperti tadi, terlihat adanya suatu perubahan struktur yang tampak pada komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) kita.

Pada 1983-1984 sektor pertanian 29,2%, tapi menurut perkiraan 1988-1989 jumlahnya akan mencapai 26,4%. Begitu pula halnya dengan sektor pertambangan yang tadinya 7,4% akan menjadi 6,6%.

Sektor industri yang di Pelita V diharapkan akan mengimbangi sektor pertanian, pada 1988-1989 diperkirakan akan 19,4% dari 15,8%. Sedang Konstruksi bangunan tidak mengalami perubahan dengan jumlah tetap 6,3%. Ini juga diikuti oleh sektor transportasi dan komunikasi yang tetap 6,0%. Begitu pula halnya sektor lain-lain yang tak bergerak dari 35,3%.

Pendapatan per jiwa penduduk diperkirakan di tahun 1985 sebesar US$ 650 dalam nilai tahun 1983.

Melihat dari angka-angka itu, maka dalam Repelita V ini peran sektor industri harus lebih ditingkatkan agar ia bisa menimbulkan ekonomi nasional yang berimbang dengan sektor pertanian.

Emil menilai, sektor pertanian dan pertambangan mempunyai satu ciri yang sama, di mana kedua sektor ini mengolah sumber daya alam menjadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada hari Senin, tgl. 27-02-1989 telah berpulang ke rakhmatullah dengan tenang suami/ayah/kakek kami tercinta :

Alm. Bapak SAJOETI MELIK

maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian dan bantuan baik moril maupun materiel pada saat meninggalnya hingga saat pemakaman di TMP Kalibata kepada

1. Bp. Presiden RI beserta Ibu Soeharto
2. Bp. Wk. Presiden RI beserta Ibu Sudharmono
3. Para Pejabat Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara
4. DPP Golkar beserta Keluarga Besar Golkar
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan V RI
6. Bapak Gubernur KDKI Jakarta
7. Sekretaris Militer Presiden dan staf
8. Komandan Garnisun Ibukota dan staf
9. Kapolda Metro Jaya
10. DHD Angkatan 45 DKI Jakarta
11. Keluarga Besar H.U. Suara Karya dan Mass Media Lainnya
12. Direktur dan Staf serta Persit Kartika Chandra Kirana DITPALAD
13. Pimpinan dan Staf serta Dharma Wanita PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
14. Pimpinan dan Staf serta Dharma Wanita HUFFCO
15. Dr. Sumadi dan Dr. Gata Ahudana
16. Segenap aparat Pemda Jakarta Barat terutama RT dan RW serta warga di Kompleks Taman Aries
17. Seluruh sahabat, kerabat, handai taulan, sanak keluarga dll. yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan YME akan membalasnya dengan limpahan rakhmat dan hidayahNya. Amien.

Kami yang berduka :
Keluarga Besar SAJOETI MELIK

Digitized by Google

bahan mentah. Sedang sektor industri itu sendiri mengolah bahan menjadi barang jadi.

Komposisi seperti yang digambarkan pada PDB tadi memang mencerminkan ketergantungan kita pada prosessing di luar negeri. Sebab, jika PDB pertanian dan pertambangan bila digabungkan menjadi satu adalah 36,6%. Ini berarti sepertiga lebih ekonomi kita tergantung pada pengolahan sumber alam menjadi bahan mentah.

"Bahan mentah hanya bisa diproses di luar negeri. Ini berarti ekspor," katanya. Sementara pasaran luar negeri itu sendiri tidak berada di bawah kekuasaan kita. "Kalau timpang seperti ini, maka jangan dulu lepas landas," tambahnya.

Karena itu, menurut Emil, sektor industri harus menopangnya dengan kenaikkan menjadi 19,4%. "Kalau perlu PDB-nya melebihi angka itu," lanjutnya.

Selain kedua masalah yang nanti akan dihadapi oleh bangsa ini, masalah lain yang akan muncul adalah persebaran penduduk.

Penduduk Indonesia terlihat penyebarannya tidak merata. Masalah kependudukan, pemukiman, lapangan kerja, pendidikan dan semacamnya akan sangat terasa di Pulau Jawa. Ini terjadi karena komposisi kepadatan penduduk berbeda.

Tidak meratanya persebaran penduduk jelas terlihat. Pada 1980 kepadatan penduduk di Pulau Jawa hanya 690 orang per km, maka 1985 sudah mencapai 755 orang per km. Ini juga terjadi di Bali/NTB/NTT dari 96 orang per km menjadi 106 orang per km.

Bandingkan saja dengan Sumatera dari 59 orang menjadi 69 orang per km, Sulawesi dari 55 orang menjadi 61 orang per km, Kalimantan dari 12 orang menjadi 14 orang per km, serta Maluku dan Irian Jaya dari 5 orang menjadi 6 orang per km.

Melihat ketimpangan komposisi penduduk semacam itu, maka persebaran penduduk ke luar Pulau Jawa adalah menjadi sangat penting. "Karena itu, mengapa penduduk sebaiknya diusahakan juga berkembang ke luar Jawa, agar ketimpangan tidak timbul," kata Emil.

Padahal kalau di luar Jawa kekurangan penduduk, maka mereka pun akan kekurangan tenaga beli. Keadaan ini akan membuat pasar menjadi kecil. Karenanya, kalau pasar menjadi kecil, maka daerah itu juga tidak akan berkembang.

Dari berbagai uraian seperti itu, Emil masuk pada satu kesimpulan bahwa sedikitnya kita akan menghadapi lima tantangan pembangunan di masa mendatang.

Pertama, tingkat pertambahan penduduk yang tinggi disertai persebaran yang tidak merata, serta meningkatnya mobilitas penduduk dan urbanisasi.

Kedua, tenaga kerja akan tumbuh lebih cepat dari pertambahan tingkat pertumbuhan, terutama terkonsentrasi di Jawa dan Bali.

Ketiga, sebanyak 80% dari tenaga kerja diserap sektor pertanian dengan tingkat pendapatan dan tingkat produktivitas yang rendah. Struktur ekonomi umumnya berat sebelah yang menekankan pengolahan bahan mentah dan berorientasi pada ekspor bahan mentah.

Keempat, proses pembangunan yang merombak struktur ekonomi ke tingkat yang lebih berimbang memperbesar tekanan pada sumber alam dan lingkungan hidup yang terancam cemar, dan Kelima, perubahan ekonomi akibat pembangunan, juga akan merubah lingkungan sosial, sehingga kualitas hidup terancam rusak.

Karena itu, ada lima point pula yang harus dimainkan bangsa ini untuk menjawab tantangan tersebut. Menurut Emil yang pertama yang harus dimainkan adalah meningkatkan terus usaha keluarga berencana.

Di sisi lain, merangsang pembangunan di daerah untuk menarik persebaran penduduk yang lebih merata. Emil juga melihat perlunya merombak struktur ekonomi Indonesia ke arah yang lebih berimbang dan memuat peningkatan usaha pertanian, memperluas basis industri, serta mengembangkan sektor jasa penunjang pembangunan, seperti infrastruktur jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pendidikan, dan sebagainya.

Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan lingkungan sosial dengan meningkatkan kualitas hidup, seperti pengembangan agama, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Emil, hal ini diperlukan, karena lingkungan sosial menghadapi perkembangan penduduk yang lebih padat.

Pertautan lingkungan ke dalam pembangunan harus juga dilakukan melalui pengelolaan sumber alam dalam tata ruang dengan pengembangan ekosistem.

Masih ada 27 juta ha tanah kritis

Emil setuju dengan pembangunan industri. 'Tapi jangan di sembarang tempat, di mana industri ditempatkan pada lokasi yang tidak baik untuk pertanian," tuturnya.

Kalau lokasi untuk industri itu ternyata tidak baik untuk pertanian,

Digitized by Google

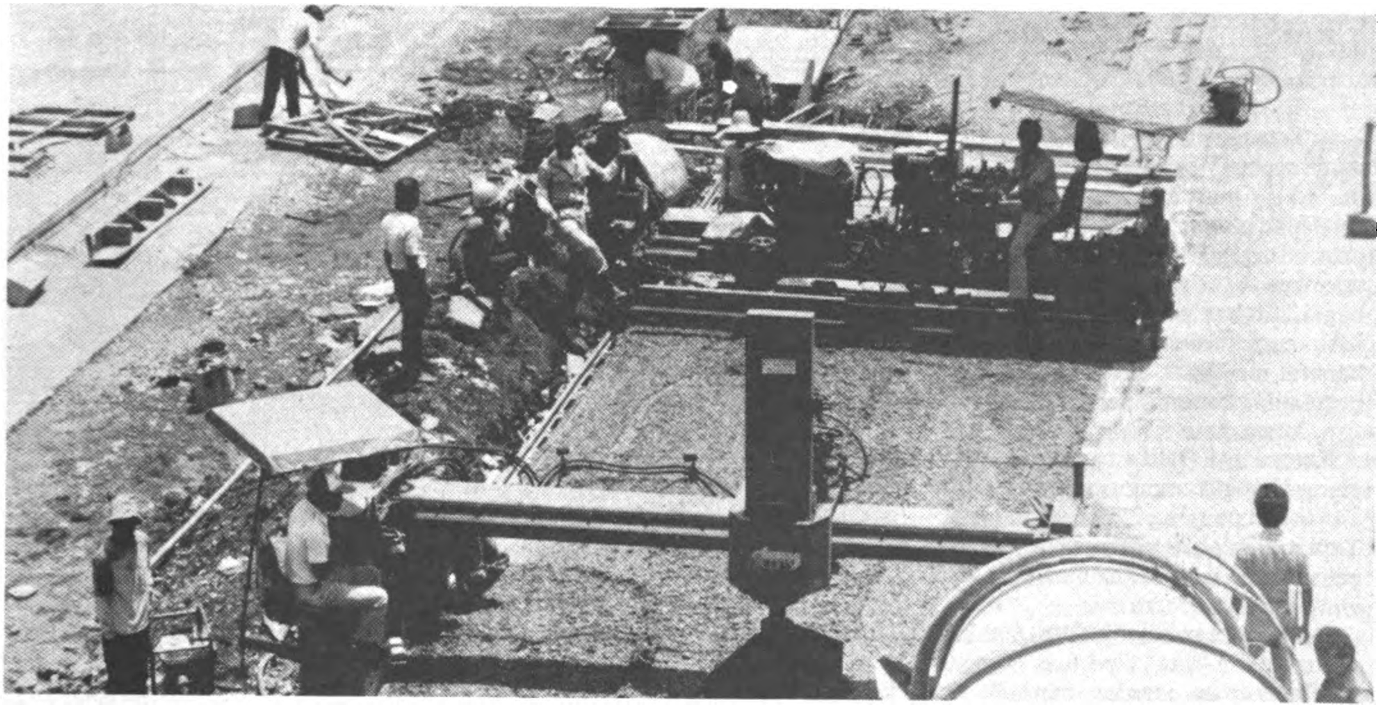

Lapangan kerja merupakan kebutuhan sangat mendesak

maka hendaknya sawah itu jangan diubah." "Jadi, meski penduduk bertambah, tapi kita menatanya, mau diletakkan ke mana penduduk ini," tambahnya.

Masih dalam konteks pertautan lingkungan, Emil memandang perlunya pula kita mengembangkan kehutanan dan keanekaragaman plasma nutfah (genetic resous). Dengan makin bertambahnya penduduk dalam 25 tahun mendatang, maka menjadi penting buat kita untuk menciptakan makanan-makanan dari plasma nutfah.

Menurutnya, kita harus dapat meningkatkan bahan baku protein dengan menyelamatkan plasma nutfah. Sebab genetic resous yang ada di dunia, sebesar 60% terletak di Indonesia.

Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kita membangun, tapi dengan menyelamatkan areal-areal hutan untuk plasma nutfah tersebut.

Saat ini Indonesia mempunyai 144 juta hektar hutan. Dari jumlah ini Emil mengusulkan seluas 48 juta hektar bisa diperuntukkan untuk hutan lindung dan 48 juta hektar lainnya adalah hutan konversi. Sehingga dari jumlah 144 juta hektar itu, hanya sepertiga yang berubah, sementara 96 juta hektar lainnya tetap merupakan fungsi hutan.

Emil juga melihat perlunya kita merehabilitasi tanah kritis dan pengembangan sumber daya mineral dengan wawasan lingkungan. "Kita masih mempunyai 27 juta hektar tanah kritis. Ini kan modal," ucapnya.

Tak kalah penting yang harus diselamatkan adalah daerah aliran sungai, rawa, pantai, dan lautan. Sebab, menurutnya, jika penduduk bertambah, maka permintaan orang akan air bertambah pula; apakah untuk minum, air rekreasi, irigasi, perikanan, dan industri.

"Semuanya akan meminta air. Tapi air yang ada terbatas. Karena itu, semua daerah penampung hujan, aliran sungai, rawa, pantai, dan lautan agar diselamatkan," pintanya.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah penerapan analisis dampak lingkungan dan pengendalian pencemaran. Dalam pembangunan jelas akan muncul berbagai macam industri. "Tapi kita tidak mau industri yang mencemarkan," katanya.

Emil berpendapat, dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, maka kota-kota akan berada di pinggir sungai. Tapi sungai-sungai itu sendiri, menurutnya, masih penting untuk penduduk; apakah untuk minum, mandi, atau mencuci.

Karena itu, jangan hanya demi murahnya, Industri segala limbahnya kemudian dibuang ke sungai. " Dengan ongkos industri yang murah itu, tapi ia memberi ongkos yang lebih mahal kepada penduduk setempat. Ini kan nggak betul," ucap Emil.

Emil mengingatkan, agar kita jangan meniru kekeliruan yang dibuat di negara-negara Barat. Industri yang dibangun di sana dengan ongkos yang murah, tapi telah membuat masyarakatnya menjadi hancur.

"Karena itu, dari semula saya ingin agar dalam industri ada analisa dampak lingkungan, dan pilihlah industri yang bersih," tuturnya.

Permasalahan-permasalahan itulah yang nanti, menurut Emil akan dihadapi oleh Indonesia, baik dalam Repelita V ini maupun 25 tahun ke depan.

Tapi ia melihat ada beberapa hal yang bakal terjepit dalam kita memandang perspektif jangka panjang. "Cara saya melihat persoalan itu agak lebih daripada hari ini. Hari ini persoalannya adalah suku bunga. Tapi dalam memperbincangkan hari ini, kita jangan lupa mengkaitkannya dengan perspektif jangka panjang," tambahnya.

Persoalan yang akan dihadapi itu adalah pertambahan penduduk yang akan mencapai 223 juta jiwa pada tahun 2000 dan akan menjadi 336 juta jiwa pada 2040. "Dalam melihat 25 tahun ke depan, maka perhatian kita hendaknya jangan terlepas dari persoalan ini," katanya lagi.

Sebab, menurutnya, kebanyakan dari kita sering terbenam pada permasalahan hari ini saja. Emil mengakui bahwa hal itu penting. Tapi dalam strategi pembangunan, kita harus memperhitungkan masalah-masalah yang akan muncul.☐ (lats)

Digitized by Google

Tugas Itu Terasa Makin Berat

Repelita V yang sebentar lagi akan kita masuki merupakan tahap persiapan akhir menjelang dimulainya proses tinggal landas. Ia akan mengemban tugas yang cukup berat. Berbagai langkah pemantapan, konsolidasi, reorientasi dan pembenahan yang bersifat mendasar di berbagai bidang (terutama ekonomi) perlu dirampungkan dalam lima tahun itu.

Karena itu, selesainya Repelita V merupakan perampungan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Tapi bukanlah berarti, selesainya Repelita V, tugas pembangunan yang kita emban menjadi terakhir.

Ia akan tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan dan diperluas dengan pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua yang dimulai dengan Repelita VI nanti.

Dalam pembangunan 25 tahun pertama, khususnya di bidang ekonomi, sasaran utama adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang.

Kondisi ini akan menjadi landasan bidang ekonomi dalam Repelita VI, ketika kita mulai memasuki proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Tapi bukanlah dengan demikian kita hanya akan menggenjot bidang ekonomi saja uantuk memasuki proses tinggal landas.

Berbagai bidang lain, seperti bidang agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sosial-budaya, bidang politik dan pertahanan keamanan juga akan menjadi sasaran utama.

Bila sasaran-sasaran tersebut telah tercapai, maka akan tercipta suatu landasan yang mantap bagi bangsa Indonesia untuk memasuki awal dari proses tinggal landas mulai Repelita VI nanti.

Apa sebenarnya proses tinggal landas itu ?

Dalam kalimat sederhana, tinggal landas diartikan sebagai suatu proses panjang yang berkesinambungan yang akhirnya akan membawa bangsa Indonesia pada tujuan pembangunannya.

Dalam masa tinggal landas seperti itu, bangsa Indonesia secara berangsur-angsur dan dengan kecepatan yang meningkat, akan mengembangkan serta memantapkan ciri-ciri dari suatu negara dan masyarakat yang maju, adil, makmu, lestari, tapi tetap berdasarkan Pancasila dan UUD'45.

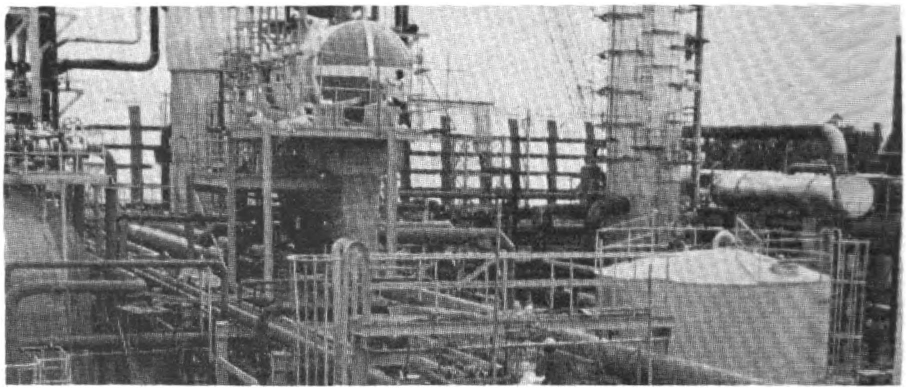

Peranan industri makin meningkat

Ciri-ciri dari proses tersebut, ditinjau dari segi tingkat perkembangan dan struktur ekonomi, mencakup antara lain pendapatan nyata per jiwa yang cukup tinggi disertai dengan pembagian yang makin merata.

Peranan industri makin meningkat sebagai penggerak utama laju pembangunan, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja serta tingkat keterpaduan antarsektor, terutama antara sektor industri dan pertanian. Di sisi lain, tingkat keterpaduan juga akan muncul antarkegiatan dan antarwilayah yang erat dan saling menunjang, sehingga memperkokoh ketahanan perekonomian nasional.

Sementara dari segi pemanfaatan sumber daya bangsa, ciri-ciri tersebut meliputi tingkat kesehatan dan kecerdasan rakyat yang tinggi, partisipasi aktif dan luas oleh rakyat di berbagai bidang pembangunan serta pemanfaatan sumber alam yang rasional, efisien dan berwawasan jangka panjang.

Dari segi kelembagaan, maka lembaga-lembaga di bidang ekonomi, politik hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan akan makin efektif menjalankan fungsinya dan makin peka terhadap tuntutan pembangunan. Dari segi ideologis, mental dan spiritual masyarakat Indonesia yang tinggal landas diwarnai oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang meresap, mendalam, dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari serta kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan kata lain, masa tinggal landas adalah masa berlangsungnya proses kemajuan menuju ke arah negara dan masyarakat yang maju, adil, makmur dan lestari yang ditandai oleh tingkat kesejahteraan rakyat, kelembagaan yang makin berfungsi efisien dalam mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat, di samping oleh adanya peningkatan yang berarti dalam kualitas manusia dan masyarakat.

Dalam tahap ini, pembangunan sekaligus akan makin mengandalkan pada sumber-sumber dinamika pembangunan yang berasal dari dalam negeri, sehingga kurang tergantung dan kurang dipengaruhi oleh perkembangan dan gejolak dari luar.

Awal dari tahap tinggal landas itu akan ditandai oleh munculnya berbagai pertanda yang mengisyaratkan bahwa peningkatan dari ke semua aspek kehidupan bangsa tersebut di atas makin terwujud secara jelas dan nyata berinteraksi satu sama lain untuk selanjutnya menghasilkan percepatan laju pembangunan secara keseluruhan.

Tapi untuk mencapai besar-besaran itu, adalah bagaimana kita dalam Repelita V ini melakukan pemantapan, konsolidasi dan peningkatan pembangunan di setiap bidang kehidupan agar bangsa ini siap memasuki awal dari tahap tinggal landas dalam Repelita VI nanti.

Namun berbarengan dengan itu, muncul beberapa masalah mendesak, seperti penyediaan lapangan kerja produktiv dalam jumlah yang cukup merata bagi angkatan kerja yang terus meningkat.

Tugas ini terasa lebih berat, karena kita sadar bahwa upaya tersebut harus

Digitized by Google

dilaksanakan di dalam lingkungan yang kurang menguntungkan, yaitu di dalam situasi politik, ekonomi dan moneter dunia yang penuh ketidakpastian dan kerawanan dalam lima tahun mendatang ini.

"Pemerintah juga telah menyadari bahwa situasi ekonomi dan moneter dunia tidak begitu menunjang pembangunannya sulit diterka. Semua itu, membuat perencanaan dan pelaksanaan Repelita V lebih berat daripada Repelita-repelita sebelumnya," kata Presiden Soeharto ketika mengantarkan RAPBN 1989/90 di DPR awal Januari lalu.

Tegasnya, dalam Repelita V ini diperlukan kepercayaan diri yang mantap, tekad yang makin bulat, kemampuan yang makin tangguh serta daya cipta yang makin berkembang dari bangsa Indonesia dalam mengerahkan seluruh potensi pembangunannya, terutama potensi dan sumber-sumber pembangunan yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Karena itu, memantapkan landasan untuk tinggal landas mempunyai makna pemantapan sendir-sendi utama dari semua bidang kehidupan bangsa.

Di bidang ekonomi, yang merupakan titik berat dari pembangunan dalam tahap ini, berarti makin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang makin seimbang dan saling mendukung antara sektor industri dan sektor pertanian.

Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menghendaki produksi barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang makin meningkat dan dengan distribusi merata serta terjangkau bagi rakyat banyak.

Sementara itu perbaikan sturktur ekonomi menghendaki adanya pembangunan dan peningkatan sektor industri dan sektor pertanian yang serasi dan terkait satu sama lain dengan sektor industri yang makin berperan dan maju.

Bagaimana tentang masalah kesepakatan kerja ? Sektor inilah yang tampak sangat mendesak. Di sini dibutuhkan suatu penanganan secara bersama dan terpadu di berbagai bidang.

Namun langkah penanggulangan pertama harus dimulai pada sumber awalnya, yaitu pertumbuhan penduduk. Memang berbagai upaya pembangunan selama ini telah mencatat berbagai keberhasilan.

Diluncurkannya program Keluarga Berencana (KB) serta bidang-bidang lain yang terkait, laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun dari 2,3% pada tahun terakhir Repelita II menjadi 2,2% pada tahun terakhir Repelita III. Angka ini kemudian melorot lagi menjadi 2,1% pada tahun terakhir Repelita IV.

Tampaknya pemerintah akan terus melanjutkan program ini. Ini tercermin dari perkiraan laju pertumbuhan penduduk yang ditargetkan 1,8% pada tahun terakhir Repelita V.

Meski laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan, namun pertambahannya secara absolut masih sangat besar, karena jumlah penduduk yang besar. Dalam Repelita V, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 175,6 juta pada 1988 menjadi 192,9 juta pada tahun 1993. Ini berarti pertambahan sebesar 17,3 juta orang selama 5 tahun atau rata-rata hampir 3,5 juta orang setiap tahun.

Berkaitan dengan itu, selama periode yang sama angkatan kerja diperkirakan meningkat dari 74,5 juta menjadi 86,4 juta orang. Ini berarti bertambah sebanyak 11,9 juta pencari kerja baru selama 5 tahun atau rata-rata 2,4 juta orang setiap tahun.

Karena itu, dalam Repelita V masalah kesempatan kerja mendapat perhatian khusus. Di sinilah diperlukan peningkatan koordinasi kebijaksanaan ketenagakerjaan antara sektor serta melalui langkah-langkah khusus di bidang ini.

Untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja tersebut dalam Repelita V ini, maka selama kurun lima tahun mesti diusahakan laju pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Tapi upaya ini harus pula dibarengi dengan pemerataan yang luas, stabilitas yang mantap, pola penyerapan tenaga kerja yang serasi antarsektor, antar kegiatan dan daerah serta perubahan struktur ekonomi yang makin seimbang.

Dalam Repelita V diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% per tahun. Pertumbuhan ini berasal dari peningkatan produksi sektor-sektor di luar minyak dan gas bumi, yang diharapkan akan tumbuh setidak-tidaknya dengan rata-rata 6%.

Selama lima tahun itu sektor pertanian diperkirakan tumbuh dengan rata-rata 3,6% per tahun. Pertumbuhan ini didukung dengan laju kenaikan produksi beras sebesar rata-rata 3,2% per tahun. Kenaikkan produksi beras sebesar itu diperlukan dalam rangka memantapkan swasembad pangan. Sementara sektor industri diperkirakan mencapai laju pertumbuhan rata-rata 8,5% setahun, dengan — sub sektor industri pengolahan non migas, terutama yang berorientasi pada ekspor, sebagai sumber pertumbuhan utamanya.

Sektor bangunan, sektor perdagangan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh dengan rata-rata 6%, 6% dan 6,4% per tahun, sedang sektor lain-lain 6,1%.

Dalam lima tahun mendatang diharapkan terjadi kelanjutan dan peningkatan perubahan struktur ekonomi ke arah keseimbangan. Selama kurun waktu itu, peranan sektor industri dalam produksi nasional diperkirakan meningkat dari 14,4% menjadi 16,9%, sedang peranan sektor pertanian menurunan dari 23,2% menjadi 21,6%.

Perkembangan ke arah keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri ini juga diikuti perbaikan keseimbangan antara sektor migas dan non migas. Bila dalam tahun 1988 peranan sektor migas dalam produksi nasional 19,8%, maka pada 1993 menurun menjadi 16,3%.

Bila sasaran pertumbuhan dan transformasi ekonomi tersebut berhasil, diharapkan bagian terbesar tambahan angkatan kerja dapat diserap.

Selama Repelita V, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menunjang, sektor industri diharapkan mampu menciptakan 2,3 juta lapangan kerja baru, sektor pertanian sekitar 4,0%, dan sektor lain-lain sebesar 5,2% lapangan kerja baru untuk menampung angkatan pertambahan angkatan kerja sebesar 11,9 juta orang. Selebihnya diharapkan dapat ditampung melalui kebijaksanaan khusus, seperti program padat karya dan transmigrasi.

Namun masalah penting yang perlu ditanggulangi dengan seksama dalam Repelita V adalah bagaimana kita mempersiapkan para pencari kerja baru agar memenuhi syarat-syarat untuk dapat diserap secara produktif di berbagai lapangan kerja baru yang diharapkan akan tercipta tersebut.

Masalah penting lainnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari angkatan kerja lama yang belum memperoleh pekerjaan, bekerja tidak penuh atau bekerja dengan upah yang sangat rendah.☐ (LT)

Digitized by Google

Djoko Sudyatmiko :

Ekonomi dan Politik Lebih Menonjol

Tanpa terasa rangkaian pembangunan jangka panjang pertama (25 tahun) April nanti akan memasuki tahapan ke V, tahapan dimana bangsa ini akan memasuki persiapan tinggal landas. Dalam kurun 20 tahun ini, bidang ekonomi dan politik sangat menonjol.

Di bidang ekonomi, dalam kurun waktu itu, banyak hasil yang telah dicapai. Misalnya, terdapatnya pemerataan pembangunan dimana-mana, income per capita juga menunjukkan peningkatan dan barangkali yang paling mengesankan adalah berhasilnya bangsa ini dalam bidang pertanian, yaitu swasembada beras.

Selama 20 tahun berjalan, Djoko Sudjatmiko menilai bahwa bangsa ini masih belum dapat mencapai tahap ofensif *(take of),* melainkan masih pada usaha meletakkan dasar-dasar perekonomian.

Selama 20 tahun perjalanan pembangunan yang direncanakan ini, Djoko menilai terdapat beberapa indikator seperti pergeseran peranan dari yang dulunya serba pemerintah menjadi usaha yang mengandalkan peranan masyarakat. Menurutnya, pergeseran ini akibat adanya krisis di bidang minyak dan gas bumi.

Sebagaimana diketahui, akibat berlimpahnya pendapatan dari sektor tersebut, menjadikan peranan negara dalam pembangunan sangat dominan. "Kalau pun peranan masyarakat ada, maka yang dapat disaksikan adalah munculnya bisnis yang mengandalkan proyek-proyek pemerintah, atau order-order pemerintah.

Kini, keadaan sudah berobah. *Boom* minyak telah berakhir, sehingga mau tidak mau peranan yang dulunya bertumpu pada minyak dan gas bumi, bergeser kepada masyarakat. Dalam situasi yang demikian, bangkitnya sektor masyarakat tentu akan bercorak lain. Yaitu tidak lagi mengandalkan proyek dan order pemerintah, melainkan terdapatnya auto aktivitas masyarakat baik yang berupa pasar-pasar di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Peranan yang makin besar dari masyarakat merupakan pertanda sebuah bangsa yang sudah *take of.* Oleh karenanya usaha-usaha untuk terus mendorongnya, tidak dapat lagi hanya dilihat sebagai peranan dari negara, akan tetapi sudah menjadi tujuan dari pembangunan" ujar Djoko.

Sektor Pajak

Pelita IV yang merupakan persiapan terakhir dari persiapan kerangka tinggal landas ini telah mengetengahkan gejal-gejala tersebut dengan jelas — Bergesernya dari peranan pemerintah ke masyarakat — untuk itu perlu dikembangkan usaha-usaha kreatif, dan diusahakannya untuk menggali

Djoko Sudyatmiko

sumber-sumber dana lain. Bersamaan dengan tumbuhnya sektor masyarakat, maka harapan yang sangat besar dilimpahkan pada sektor pajak.

"Mengandalkan pendapatan negara di sektor pajak adalah kondisi yang seharusnya demikian. Dan ini adalah kondisi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memperoleh salah satu bentuk kongkretnya. "Namun, masalah pajak ini bukan sekedar masalah ekonomi saja, tapi juga termasuk konsep politik" ujar Djoko.

Pajak yang berarti menyerahkan sebagian hak masyarakat secara perorangan atau kelompok kepada negara, kemudian dikelola dan dipergunakan, dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pajak juga merupakan konsep politik, maka segala usaha sebagai konsekuensi perolehan negara di sektor pajak di kedua bidang politik dan ekonomi, harus diciptakan.

Pajak sebagai salah satu sektor ekonomi, adalah merupakan masalah kelancaran, keyakinan wajib pajak, bahwa setoran wajib pajak akan dipergunakan secara benar. Pungutan-pungutan tidak perlu yang dibebaskan kepada wajib pajak, perlu ditiadakan. Dan usaha lain adalah menciptakan iklim yang memberikan kenyamanan bidang usaha.

Sedangkan pajak sebagai konsep politik, erat kaitannya dengan dua hal. Pertama, akan segera dirasakan peningkatan pelayanan umum. Kedua makin dirasakannya usaha-usaha demokratisasi, kelancaran, penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian, akan ada representasi yang memadai dari pembayaran pajak.

Tantangan

Sementara itu, bangsa ini dihadapkan pada tantangan yang tampaknya makin meningkat, sebanding dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Antara lain, peningkatan akan tuntutan dari masyarakat, tuntutan akan hal-hal yang lebih berkembang dan lebih berkwalitas, tuntutan keadilan akan masalah pelaksanaan hukum, juga masih terdapatnya kesenjangan antara meraka yang sempat menikmati hasil pembangunan dan mereka yang masih relatif terbelakang dalam arti pemerataan. Di samping itu, lingkungan internasional juga menjadi tantangan tersendiri.

Sebagaimana diketahui, perkembangan internasional akhir-akhir ini, ditandai dengan hal yang sangat menonjol, yaitu globalisasi — Artinya kegiatan perekonomian itu, makin hari makin menembus batas-batas negara — dan Indonesia harus menyadari bahwa posisinya juga sebagai anggota masyarakat Internasional.

Terlepas dari kondisi-kondisi yang menguntungkan atau merugikan ciri dari globalisasi adalah suasana kompetisi. Untuk itu, kita harus membulatkan pikiran. Untuk menghadapi kurun waktu yang akan datang, dengan kesiapan kompetisi. Suka atau tidak suka ini adalah merupakan hukum dari perekonomian Internasional.

Dengan digalakkannya program

Digitized by Google

ekspor non migas, akibat dari desakan posisi neraca pembayaran kita, maka masalah kompetisi dan persaingan ini adalah sangat penting. Menghadapi masalah yang demikian menurut Djoko, kita harus membiasakan diri, tidak dengan sikap ambivalen atau ragu-ragu. Sebetulnya masalah kompetisi ini sudah kita lakukan. Misalnya di bidang olahraga, Pemilu dan yang lain. Kita sering mendua dalam menghadapi masalah ini dengan sikap yang kurang senang mendengar masalah kompetisi.

"Djoko berpendapat bahwa kita tidak dapat lagi berpikir dengan cara yang demikian. Ternyata dari depan tantangan itu nyata. Kompetisi atau persaingan memang tidak lepas dari ekses-ekses. Yang harus kita cegah, adalah jangan sampai ekses tersebut muncul dan menjadi masalah yang tidak terkendalikan."

Tentang faham gotong royong, kata Djoko kita harus mampu menterjemahkan dalam bentuk yang lebih sakelik. Dan perlu diterjemahkan dalam masyarakat yang modern, yaitu dengan aturan-aturan. Pertama, untuk mencegah akibat ekses-ekses dari persaingan, kedua, adalah untuk mewujudkan kegotongroyongan itu dalam bentuk yang riel dalam situasi yang modern, yang global dan yang kosmopolitan. Di antaranya, membentuk usaha-usaha insurans sehingga kegotongroyongan itu dalam bentuk yang sehari-hari, tidak kehilangan makna. Tapi hanya bentuknya yang berubah.

Agrobisnis menyerap tenaga kerja cukup banyak

Kopi salah satu komoditi ekspor nonmigas

Masalah lain yang menjadi tantangan di masa yang akan datang adalah penyediaan lapangan kerja. Menyinggung masalah ini, maka kita akan masuk dalam pilihan, yaitu industrialisasi. Mengenai masalah ini orang masih punya persepsi masing-masing. Ada yang berpendapat, untuk menanggulangi masalah lapangan kerja ini diperlukan teknologi padat karya saja.

Namun, Djoko tidak sepenuhnya sependapat dengan persepsi ini. "Saya tidak sependapat dengan persepsi tersebut. Dengan menggunakan teknologi yang padat karya, kita akan mendapatkan industri-industri yang teknologinya dari pabrik-ke pabrik itu padat karya. Hal ini, tidak akan dapat menjawab keseluruhan masalah, apalagi untuk merealisasikan program industrialisasi. Karena dalam melakukan program industrialisasi ini sering kita harus menggunakan padat modal, risiko tinggi dan juga tidak segera mendatangkan hasil (quick yielding).

Masalah lapangan kerja ini harus dilihat dari keseluruhan proses industrialisasi. Karena apabila tidak, industrialisasi yang biasanya terdapat di

Digitized by Google

sektor hulu ini, nantinya akan menstimulir lahirnya industri menengah, industri hilir — yang makin ke hilir akan makin padat karya — dan nantinya juga akan dapat melahirkan lingkungan ekonomi tersendiri. Maka dengan adanya mata rantai tersebut, maka akan juga melahirkan pedagang kecil, maupun para distributor dan lain-lain. Dan semua ini, kata Djoko merupakan *multiplaier effect* di dalam usaha untuk menempatkan lapangan kerja.

Selain itu, di dalam menciptakan lapangan kerja, juga terdapat di dalam agro industri. Sebab, di dalam agro industri ini mengandung sifat dari penyerapan tenaga kerja yang banyak. "Kalau kita berbicara masalah yang akan datang, bidang ekonomi, misalnya tidak dapat lain adalah untuk menciptakan masyarakat industri yaitu masyarakat yang gigih, punya ethos kerja dan tidak pernah akan kenal menyerah.

Teknologi padat karya tidak akan menjawab seluruh permasalahan

Politik

Sekalipun dalam prioritas pembangunan jangka panjang pertama adalah masalah ekonomi, namun bidang politik juga tidak kalah subtansialnya. Dalam membangun kerangka di bidang politik, dalam awal Pelita pertama pembangunan di bidang ini masih diliputi dengan diskusi-diskusi besar, yang akhirnya mendapatkan perubahan-perubahan di dalam bidang struktur politik.

Sebagaimana kita ketahui, struktur politik kita dalam Pelita pertama masih diliputi dengan masalah-masalah yang terkotak-kotak. Misalnya, sistim kepartaian masih terbentuk atas dasar persamaan, perbedaan idiologi dan kelompok-kelompok yang bersifat primordial.

Akhirnya dalam kurun waktu yang cukup panjang, dan untuk memecahkan masalah ini, maka Pancasila sebagai idiologi nasional dan sebagai dasar negara ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ini, menurut Djoko diperlukan waktu yang cukup lama, dan kesabaran. Dari penyederhanaan kepartaian, sekarang ini kita hanya kenal dua parpol, satu Golkar ABRI.

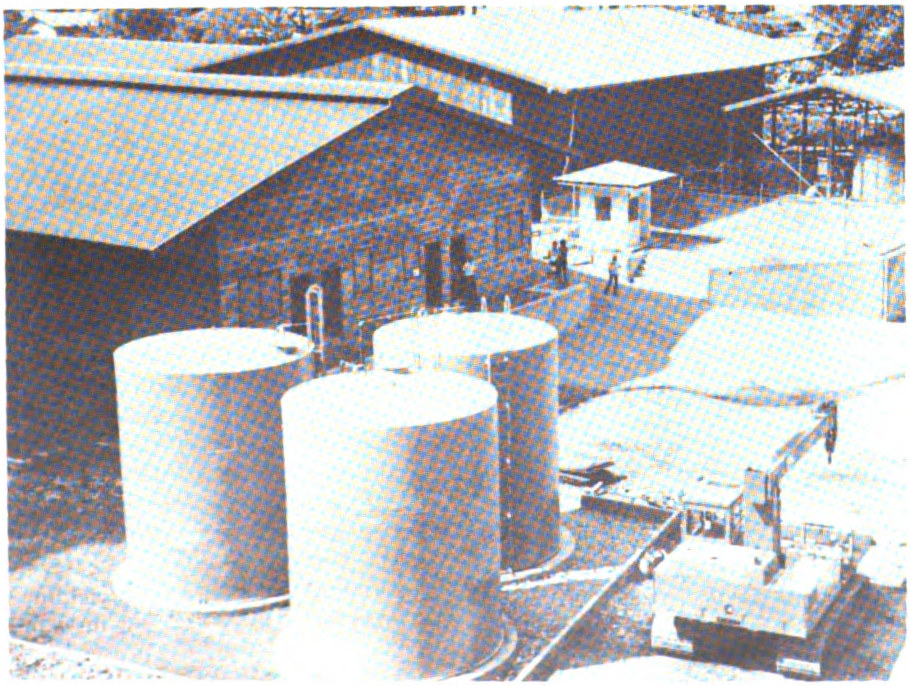

Ekspor nonmigas tampil mengesankan.

Dengan adanya struktur ini diharapkan konflik idiologi formal akan dapat diselesaikan. Dan masing-masing kekuatan sosial politik dapat berpacu atas dasar program. "Saya kira, kita semua sependapat bahwa pembangunan bidang politik ini lebih berhasil. Dan yang lebih berhasil lagi, dengan ditetapkan Pancasila sebagai satu-satu asas dalam berbangsa dan bernegara ini relatif tanpa gejolak. Hal ini, kata Djoko, berkat kesabaran dan pendekatan yang tidak pernah lelah.

Sedangkan problem di masa yang akan datang adalah, bagaimana mengusahakan agar kesepakatan formal yang ada itu diikuti dengan kesepakatan materiel. Kesepakatan baru yang terletak pada masalah-masalah normatif ini, harus diikuti dengan persepsi-persepsi yang sama di bidang operasional.

Untuk memberi gambaran yang lebih kongkret, Djoko memberi contoh. Misalnya, pentingnya akan peningkatan demokratisasi, pentingnya akan lembaga-lembaga perwakilan, serta institusi-institusi yang menggugah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. (BM)

Digitized by Google

Koperasi, Menuju Kemandirian

Persoalan yang melingkari perkoperasian Indonesia memang banyak, harapan menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian belum lagi terwujud. Berbagai kendala membelenggu ruang gerak koperasi sebagai suatu gerakan massal. Lebih-lebih koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi masyarakat yang tumbuh dari bawah.

Tidak heran kalau Presiden Soeharto berkali-kali mempertegas karena peranannya yang penting dalam perekonomian, koperasi harus terus didorong untuk maju menuju ke arah kemandirian sebagai kekuatan ekonomi nasional dan lembaga ekonomi rakyat yang mandiri.

Seperti ditegaskan Presiden dalam penutupan Rapat Kerja Departemen Koperasi belum lama ini, untuk mengembangkan agar koperasi mampu menjalankan peran luhurnya dalam membangun kehidupan ekonomi di tanah air ini, menjadi tanggung jawab kita bersama.

Apa yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945, bahwa ekonomi harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dimana kemakmuran bukan kemakmuran orang seorang, telah menempatkan koperasi sebagai salah satu sokoguru kehidupan ekonomi yang kita cita-citakan, di samping sektor negara dan swasta, dalam mewujudkan kemakmuran yang merata dan keadilan sosial.

Kendala yang membuat koperasi belum setangguh sektor negara (BUMN) maupun swasta terlihat jelas dalam hal manajemen. Memang, koperasi tidak bertujuan semata-mata meraih keuntungan yang besar seperti sektor negara maupun swasta. Tapi, paling tidak keuntungan yang berhasil diraih diharapkan mampu memupuk modal bagi kegiatan lebih luas koperasi bersangkutan. Dan kemampuan memupuk sisa hasil usaha berupa keuntungan itu sangat tergantung kemampuan pengelolaan koperasi itu sendiri, yang notabene adalah kemampuan manajemen.

Ada kesan, seolah-olah koperasi itu bisa kuat karena campur tangan pemerintah atau tetesan dana dari pemerintah. Padahal sebenarnya koperasi bisa kuat, apabila kehadiran koperasi itu seperti yang diinginkan masyarakat. Koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi harus benar-benar mengakar ke dalam masyarakat, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Seperti dikemukakan ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta DPP

Iman Taufik

Golkar, Iman Taufik, dlam suatu percakapan dengan *Media Karya* mengatakan, bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat seharusnya tumbuh dari bawah, dan bukan dari atas. Pembinaan yang terus-menerus datang dari atas menurut dia dapat menumbuhkan apa yang disebut elite-elite desa. Dikutip berbagai laporan dari daerah yang menyebutkan adanya penyelewengan yang dilakukan pengurus koperasi yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Ini bisa mengakibatkan merosotnya atau surutnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi koperasi di tengah-tengah mereka. Padahal sebenarnya bukan koperasinya yang salah, tapi oknum-oknum pengurusnya.

Oleh karenanya Iman Taufik menunjuk berbagai persyaratan bagi pengurus koperasi yang berangkat dari bawah, yaitu perlu dilandasi kejujuran dan punya kemampuan untuk mengelola koperasi sebagai wahana mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat banyak.

Koperasi dengan citra positifnya harus terus ditumbuh-kembangkan di kalangan masyarakat luas, agar apa yang menjadi cita-cita atau harapan para pendiri Republik ini, yaitu menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional benar-benar terwujud. Koperasi mampu menjembatani

Peserta Rakernas Koperasi diterima Presiden

Digitized by Google

masyarakat mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Dan, bersama-sama sektor negara dan swasta, menjadikan koperasi kekuatan utama sistem perekonomian kita.

Berbagai masalah

Menempatkan koperasi sejajar dengan BUMN dan sektor swasta bukanlah hal yang mudah dan cepat tercapai. Kendati dalam UU Kadin, koperasi masuk di dalamnya, namun masih saja terkesan koperasi sebagai sosok bangunan ekonomi yang kecil, belum berkembang, lemah manajemen, lemah permodalan, lemah merebut peluang pasar.

Koperasi yang menonjol masih diseputar sektor pertanian dengan KUD-nya. Ada rangsangan untuk menempatkan koperasi sebagai salah satu bagian dari perusahaan yang telah mapan, dengan cara pemilikan saham perusahaan. Tapi menurut Iman Taufik bukan yang begitu itu yang membuat koperasi tumbuh menjadi kuat. Koperasi harus mampu tumbuh menjadi kekuatan yang bisa mengambil alih kegiatan yang dilakukan sektor BUMN. Sebab, pemerintah menyadari bahwa kemampuannya terbatas dalam kaitan investasi. Bahkan kurang dari separuh investasi keseluruhan. Dengan berkurangnya kegiatan investasi sektor pemerintah (BUMN) maka peranan itu bisa diambil alih oleh sektor swasta dan koperasi.

"Masalahnya koperasi itu masih lemah. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana koperasi itu dapat menjadi gerakan massal. Karena koperasi diharapkan oleh para pendiri bangsa ini menjadi sokoguru perekonomian nasional," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Iman Taufik, untuk mengembang-tumbuhkan koperasi tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral atau kecil-kecilan. Yang paling penting bagaimana membuat koperasi itu sebagai gerakan ekonomi masyarakat. Disini menurutnya kader-kader Golkar harus terjun di tengah-tengah masyarakat guna mengembangkan koperasi. Persoalannya, kalau mereka itu terjun, lalu terjun yang bagaimana?

Apa yang sering ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet untuk terus memperhatikan perkembangan koperasi, bagi Iman Taufik merupakan langkah yang tepat mengingat arti penting koperasi. Mau tidak mau kita harus menggerakkan dan memasyarakatkan koperasi dan menempatkan koperasi sebagai program pemerintah yang dalam skala lebih luas yaitu menjadi program nasional. Kalau Keluarga Berencana (KB) dan lingkungan hidup dapat digerakkan sebagai program nasional, koperasi seharusnya juga dapat digerakkan sebagai program nasional dimana Departemen Koperasi sebagai promotornya.

Ada permasalahan lain dalam gerak langkah koperasi. Dalam UU tentang Koperasi ditegaskan bahwa koperasi berwatak sosial. Sementara kalau dikaitkan dengan UU tentang Kadin, dimana koperasi ditempatkan sebagai salah satu dari tiga kekuatan ekonomi yang bertujuan juga untuk mencari keuntungan. Disini perlu adanya kesadaran pemahaman akan arti koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi. Kalau orang mau berkoperasi itu artinya orang berusaha bersama-sama dimana dalam usaha pembagian keuntungan dibagi sama rata kepada para anggota koperasi. Koperasi menurut Iman Taufik harus dikembangkan menjadi organisasi ekonomi yang bentuknya mencari keuntungan. Dan penggunaan uangnya adalah disesuaikan dengan sifat dan difinisi koperasi, yaitu bentuk sosial yang lebih tinggi dari BUMN.

Agar supaya koperasi secepatnya bisa tumbuh sendiri, artinya tumbuh tidak karena tetesan dana dari pemerintah melainkan tumbuh dari bawah atau anggotanya, maka perlu adanya program latihan bagi kader-kadernya yang nantinya dapat diterjunkan ke masyarakat untuk mendorong tumbuhnya koperasi di daerah-daerah. Selanjutnya pengurus koperasi dipilih sendiri oleh masyarakat anggotanya dengan landasan pertimbangan kejujuran dan kemampuan yang dimiliki calon pengurus. Dengan demikian diharapkan pengelolaan koperasi profesional, kesempatan korupsi dalam koperasi dapat dicegah. Sekali ketahuan ada pengurus korupsi, hal itu berakibat pudarnya kepercayaan rakyat terhadap koperasi.

Ditunjukkan contoh oleh Iman Taufik tentang koperasi karyawan yang jarang terdengar adanya penyelewengan oleh pengurusnya. Karena, menurut dia pengurus dipilih oleh karyawan itu sendiri atau dengan kata lain dari bawah. Dan direktur perusahaan secara langsung ikut mengawasi.

Citra Koperasi

Turunnya interest masyarakat terhadap koperasi menurut Iman Taufik karena adanya image (citra) dari koperasi yang kurang baik atau koperasi itu kecil. Melalui peningkatan image, koperasi dapat tumbuh besar dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Kesan koperasi itu kecil, manajemen jelek, tempat oknum-oknum yang tidak benar, harus dihilangkan.

Untuk mendorong agar image koperasi menjadi besar, maka perlu didorong agar koperasi tidak terbatas pada koperasi tahu-tempe, KUD dan sejenisnya. Apakah koperasi perlu memiliki saham di perusahaan, bagi Iman Taufik yang penting dimantapkan dulu koperasinya. Jangan nantinya koperasi hanya mengemis saham dari perusahaan. Dan yang penting lagi hendaknya koperasi itu bisa berkembang di perusahaan sehingga lama-lama karyawan yang menjadi anggota koperasi itu mampu membeli saham perusahaan.

Koperasi tidak harus diberi konotasi kumpulan orang-orang kecil atau lemah. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang baik dan cocok di alam Indonesia. "Karena koperasi sering dibuat macam-macam maka image atau citra koperasi menjadi kurang baik," tuturnya.

Upaya menghapus image koperasi itu lemah penting pula dalam kaitan menumbuhkan kepercayaan dunia perbankan. Seperti dituturkan Iman Taufik, masih ada bank yang ragu-ragu memberikan kredit kepada koperasi kendati koperasi tersebut kuat. Memang, dalam hal pinjam uang pada bank itu dasarnya adalah kepercayaan. Jadi kalau masih ada image bahwa koperasi itu lemah sangat mempengaruhi nilai kepercayaan bank atas koperasi tersebut. Misalnya, koperasi mau pinjam seratus oleh bank bersangkutan hanya diberikan tujuh puluh.

Bagi kalangan perbankan dihadapkan kesulitan siapa yang bertanggungjawab kalau ada kemacetan, kendati koperasi itu memiliki pengurus. Dengan demikian adalah penting menghilangkan image bahwa koperasi itu lemah. Koperasi harus betul-betul menjadi program nasional yang operasional. Sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Kalau bank sedikit memberikan keringanan kepada koperasi dalam kaitan pinjaman melalui bunga di bawah dua persen, maka dengan pola dan cara demikian orang akan beramai-ramai berebut menggalakkan koperasi. Sehingga pada akhirnya koperasi benar-benar tumbuh dari bawah.☐ **(BM/NS)**

Digitized by Google

Jumlah KUD Memang Banyak

Koperasi belakangan ini menjadi buah bibir. Seminar, diskusi menyorot dalam intensitas yang kadangkala berbeda. Ada yang mempermasalahkan, kenapa koperasi belum dapat berkembang, padahal usianya sudah hampir sama dengan berdirinya republik ini. Dan ada pula yang mengatakan, terlepas dari kendala yang ada, koperasi telah tumbuh dan berkembang dimana-mana.

Pendapat dari dua sudut pandang itu memang sama-sama mengandung kebenaran. Terlepas dari kendala yang ada, koperasi telah tumbuh. Misalnya saja KUD. Dari data di Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1986 menunjukkan, jumlah KUD yang aktip sudah berjumlah 6.373. Dari hasil sensus BPS pada bulan Maret-April 1987 KUD menunjukkan peningkatan sebanyak 291. Sedangkan dari tahun yang sama KUD juga mengalami penurunan yang dikarenakan tutup sebanyak 1.436, sehingga KUD sampai bulan Maret-April 1987 berjumlah 5.228 dengan rincian, 4.599 KUD melakukan kegiatan, 629 tidak melakukan kegiatan. Hal tersebut di atas, merupakan gambaran tentang perkembangan Koperasi Unit Desa saja, sedangkan jenis-jenis dari Koperasi yang lain juga mengalami peningkatan.

Mengenai gambaran tentang neraca KUD, hingga akhir tahun 1986 menunjukkan modal lancar sebesar 245 milyar atau 71 persen dari modal tetap sebesar 90 milyar. Sedangkan, sisa hasil usaha (SHU) sebesar 13 milyar atau 4 persen. Modal sebanyak itu diperoleh dari simpanan anggota 22 milyar, hutang 263 milyar, cadangan 38 milyar dan sisanya merupakan dana-dana, jasa anggota dan sisa hasil usaha.

Apabila diperhatikan hal tersebut di atas, maka perklasifikasi menunjukkan semakin rendahnya rata-rata modal KUD. Hal yang sama juga berlaku untuk besarnya SHU yang dimiliki KUD. Sebagaimana diketahui, selama periode 1986 KUD mengalami penambahan modal tetap sebesar 12 milyar, sebaliknya pada tahun yang sama terdapat pengurangan modal tetap sebesar 5 milyar. Di samping itu, KUD juga memperoleh kredit sebesar 208 milyar. Dari kredit tersebut kemudian disalurkan kepada anggota sebesar 178 milyar yang berupa kredit produksi sebesar 116 milyar, simpan pinjam 16 milyar, KCK (Kredit Candak Kulak) 19 milyar dan kredit lainnya 27 milyar. Adapun kredit kepada anggota telah diangsur sebesar 170 milyar. Tunggakan terbesar terdapat pada kredit produksi sebesar 37 milyar. Sedangkan tunggakan terkecil terdapat pada simpan pinjam sebesar 4 milyar.

Menyinggung tentang kredit macet yang berkaitan dengan Koperasi Unit Desa, Sri-Edi Swasono, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) dalam sebuah simposium di Jakarta, belum lama ini tidak membantah. "Saya yakin, kalau kita terus berusaha keras kredit yang macet tersebut dapat kembali. Dan hendaknya kita ketahui bahwa kebanyakan kredit tersebut tidak jatuh pada petaninya dan kemacetan itu juga tidak pada petaninya. Kemacetan itu disebabkan oleh para pengurus KUD, yang bukan petani.

KUD-KUD pernah tidak berfungsi lagi. Ini suatu setback, kemunduran dengan koperasi di desa-desa. Tapi, kata Sri-Edi Swasono lebih lanjut, pengalaman ini tidak boleh menyebabkan kita berhenti dengan mengusahakan koperasi bagi para petani. Kita bangkitkan kembali KUD-KUD itu. KUD adalah yang bakal menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi kita. "Sekarang jumlah KUD memang banyak. Tapi isinya masih belum seperti yangkita harapkan," ujarnya.

Menteri yang mengurusi soal ini dan Dekopin sudah berusaha dengan segala macam cara untuk membenahi koperasi-koperasi itu. Tapi kalau tidak ada bantuan dari pejabat dan instansi, tentu tidak akan ada kemajuan. Sebab, kata Sri-Edi Swasono berpesan, kepada eselon satu, dua dan tiga agar serempak mengadakan perubahan dan penyempurnaan dalam hal ini. Kita secara keseluruhan harus membenahi hal ini.

"Saya tidak mencari kesalahan pada siapa dengan mundurnya KUD itu. Tidak menyalahkan Menteri. Saya tahu dia sudah berusaha keras, tapi saya tahu pula tanpa dukungan dari semua pihak koperasi tidak akan maju. Karena itulah kita memerlukan dukungan dari semua pihak. Minimal moral untuk melaksanakan gagasan tersebut. Jangan malahan mengambil langkah-langkah yang mempersulit jalannya koperasi-koperasi itu".

Kalau mau melimpahkan kesalahan, timpakanlah kepada saya. Saya sendiri harus bertanggung-jawab. Mungkin pula karena keterbatasan kemampuan, sehingga saya masih belum bisa mendapatkan pengertian dari yang lain. Saya bersyukur, kalau dengan ini yang lain akhirnya paham, jelas sudah melaksanakan amanat UUD '45, ujar Sri-Edi Swasono lebih lanjut.

Memang, perhatian untuk memajukan koperasi tidak hanya datang dari Menteri Koperasi atau Ketua Dekopin saja. Bahkan Presiden Soeharto sendiri menaruh perhatian yang cukup besar. Misalnya, dalam berbagai acara kunjungan kerjanya masalah koperasi sering kali disinggung. Bahkan di dalam pidato kenegaraan juga tidak ketinggalan.

Sepertinya, Presiden Soeharto tidak henti-hentinya berbicara tentang kemajuan akan perkoperasian yang merupakan sokoguru perekonomian nasional dan juga merupakan amanat dari UUD '45 itu. Belum lama ini misalnya, menjelang Kamar Dagang dan Industri akan menyelenggarakan Munasnya ke IV juga menyinggung mengenai koperasi. Sebagaimana dikatakan Presiden seperti yang dikutip oleh Sri-Edi Swasono setelah menghadap, siapapun yang menjadi Ketua Umum Kadin, harus dapat mengembangkan koperasi.□ (BM)

Digitized by Google

Undang-Undang Sistem Pendidikan Langkah Dasar Menata Pendidikan Nasional

Dalam sidang paripurna yang dihadiri Menteri Pendidikan Fuad Hassan pada tanggal 6 Maret lalu, DPR menyetujui penetapan UU Sistem Pendidikan Nasional. Melalui jurubicaranya masing-masing keempat fraksi di DPR menyatakan persetujuannya, meskipun fraksi PDI menyatakan catatan keberatan atas berlakunya penjelasan pasal 28 ayat 2.

Juru bicara FKP DPR, Drs HM Hoesni Thamrin Assaat SH dalam memberikan pendapat akhir bahwa RUU SPN dimaksudkan untuk menjabarkan amanat UUD 1945 yang menyatakan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang". Sistem pendidikan yang tertuang dalam RUU mengatur semua satuan pendidikan yang terdiri atas kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Dengan penetapan UU SPN itu, FKP berharap bahwa tujuan pendidikan sebagai diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana.

Selaras pula dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran", RUU ini telah menetapkan bahwa tiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Sesuai pula dengan RUU Pendidikan, sistem pendidikan nasional bersifat terbuka, artinya memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik selaras dengan bakat, kemampuan dan minatnya. Sistem pendidikan nasional juga menetapkan bahwa peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Hal ini wajar, mengingat pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Prinsip pendidikan berlaku seumur hidup. Artinya, peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing-masing.

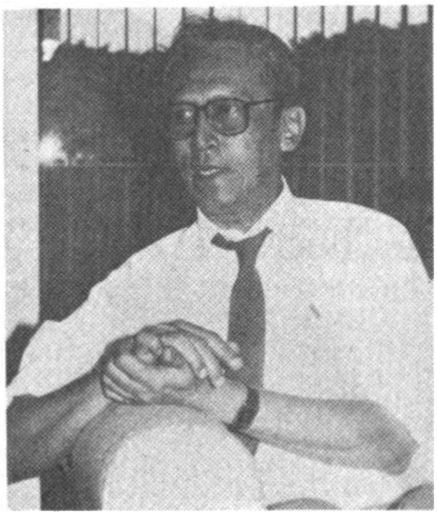

Mendikbud Fuad Hassan

Masalah gelar yang juga diatur dalam RUU, FKP menyatakan penghargaan atas pengaturan itu berikut sanksi pidana bagi pelanggarnya. Selain itu, FKP juga berpendapat, bahwa pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan perlu diartikan sebagai bimbingan, binaan, dorongan dan pengayoman bagi satuan pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanannya. Pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab menteri sebagai pengelola tunggal, sehingga dualisme pengelolaan dapat dihindarkan. Kalaupun hanya mengatur materi pokoknya saja, hal itu mengandung arti bahwa RUU SPN memberikan keluwesan kepada pemerintah untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

Strategi Pendidikan

FPP melalui jurubicaranya Drs H Zarkasih Nur menyatakan, bahwa RUU SPN menghasilkan strategi pendidikan yang tepat, yakni membentuk manusia yang beriman, berilmu dan mandiri. Tujuan pendidikan yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, ingin membentuk manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, secara jelas tercantum dalam RUU. Dengan adanya kewajiban mengajarkan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila, para peserta didik diharapkan akan menjadi manusia Pancasila yang beriman dan bertaqwa, dan dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan mereka akan menjadi patriot tanah air yang tangguh, yang akan menjadi benteng dan pembela agama, bangsa dan negara.

FPP memberikan perhatian khusus pada pendidikan keagamaan, yang dikenal dengan Perguruan Agama. Ketentuan tentang Perguruan Agama dinilai FPP sebagai hal yang wajar, karena jenis pendidikan keagamaan ini secara nyata ada dan bahkan kehadirannya demikian akrab, menyatu dengan masyarakat, serta banyak sumbangannya dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa sejak berabad-abad lalu. Bahkan usia pendidikan keagamaan bangsa Indonesia sudah hampir sama dengan usia bangsa Indonesia sendiri.

FPP juga mengingatkan agar penentuan hari libur, khususnya libur yang berkaitan dengan keagamaan mendapatkan perhatian, sehingga dalam waktu mendatang, masalah libur ini tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut.

Ketentuan wajib belajar untuk tingkat dasar disambut baik oleh FPP. Sehubungan dengan ketentuan wajib belajar itu, fraksi mengharapkan agar

Digitized by Google

pemerintah menjamin tersedianya sarana dan prasarana, tanpa membebani peserta didik. Kepada masyarakat, FPP menghimbau agar wajib belajar ini dimanfaatkan sebaik-baiknya serta memberikan bantuan secara positif demi keberhasilannya. Sedangkan untuk pelaksanaan pendidikan tinggi yang menyangkut kebebasan mimbar akademik, dan otonomi, pemerintah diharapkan segera menetapkan peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya pedoman itu diharapkan perguruan tinggi dapat memacu kemajuan bidang teknologi.

Pencantuman tentang pengakuan atas pendidikan swasta serta persamaan kedudukan antara pendidikan swasta dan pemerintah, FPP juga menyatakan penghargaannya, mengingat peran swasta telah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Penyelenggaraan pendidikan itu banyak dilaksanakan atas dasar dan landasan ajaran agama. Dengan tidak menutup mata terhadap banyaknya kelemahan, pendidikan swasta ternyata lebih cepat tanggap dan luwes terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, serta banyak memberikan sumbangan bagi upaya mencerdaskan bangsa.

Pendidikan Agama

Fraksi ABRI melalui jurubicaranya Basas Suyono mengatakan, pendidikan agama pada dasarnya diajarkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pemberian pendidikan agama itu dinilainya penting karena akan memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Ketentuan wajib belajar juga dinilai tepat oleh FABRI karena ditetapkan pendidikan dasar diberikan selama 9 tahun. Dengan ketentuan itu, lulusan pendidikan dasar sudah mencapai usia kerja. Namun diingatkannya, konsekuensi pelaksanaan wajib belajar akan menjadi beban bagi pemerintah, karena berarti akan membebaskan SPP mulai tingkat SD sampai tingkat SMP.

FABRI juga menilai, ketentuan sanksi pidana tepat sebab merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menegakkan tertib disiplin penyelenggaraan pendidikan untuk melindungi masyarakat dan peserta didik dari tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demikian, FABRI mengharapkan, sanksi pidana itu hendaknya diterapkan secara edukatif sehingga memberikan dampak positif bagi penertiban penyelenggaraan pendidikan.

Tentang pelaksanaan UU SPN kelak, FABRI mengingatkan, tidak dengan sendirinya masalah pendidikan dapat diatasi dalam waktu singkat meskipun telah ada UU SPN. Banyak tantangan dan hambatan yang masih perlu di atasi.

Pendidikan Agama dianjurkan mulai dari SD

Kehendak Politik

Jurubicara Fraksi PDI Drs Subagyo dalam kata akhirnya mengemukakan kehendak politiknya yang mencakup 5 hal. Pertama, pendidikan harus ditujukan untuk membina pribadi manusia Pancasila. Kedua, penyelenggara pendidikan diarahkan agar menjunjung tinggi dan mengamalkan filosofi pendidikan nasional yang terumus dalam sesanti "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani". Ketiga, pemerintah perlu lebih memperhatikan pendidikan kejuruan. Keempat, dunia perguruan tinggi perlu mendapat jaminan atas pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan, dan kelima, pembinaan generasi muda perlu mendapat perhatian oleh semua pihak.

Selaras dengan kehendak politiknya itu, FPDI berharap agar UU SPN kelak benar benar menjadi milik seluruh lapisan masyarakat, dan sekaligus mampu menjawab segala bentuk kekurangan dan kelemahan pengaturan dasar mengenai penyelenggaraan pendidikan dari masa lalu. Menurut PDI alokasi dana untuk pembangunan sektor pendidikan perlu mencapai 25% dari APBN sehingga keseluruhan prasyarat penunjang sektor pendidikan dapat terpenuhi. Dengan demikian, pendidikan bukan lagi merupakan barang mewah, tetapi merupakan keajaiban yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

PDI menghargai ketentuan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di bidang pendidikan. Jaminan itu merupakan perwujudan dari penegasan sikap bahwa tanggung jawab pendidikan ada di tangan keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keikutsertaan swasta ini nampak dengan lahirnya MPS (Musyawarah Perguruan Swasta) yang antara lain meliputi Taman Siswa, Muhammadiyah, Katolik, Kristen, dan perguruan swasta lain seperti Persit Kartika Chandra Kirana. Perwari, dan PGRI.

Penjelasan Pasal 28 ayat 2

Meskipun menyetujui penetapan RUU SPN sebagai Undang-Undang, FPDI menolak pencantuman penjelasan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi "Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan". Penolakan FPDI itu tertuang dalam "minderheids nota", atau catatan berkeberatan. Menurut FPDI, pasal 28 ayat 2 sudah cukup jelas, dan tidak lagi memerlukan penjelasan yang justru menimbulkan kerancuan tafsir. Penjelasan itu tidak sesuai dengan penghormatan atas hak warga negara, dalam memilih

Digitized by Google

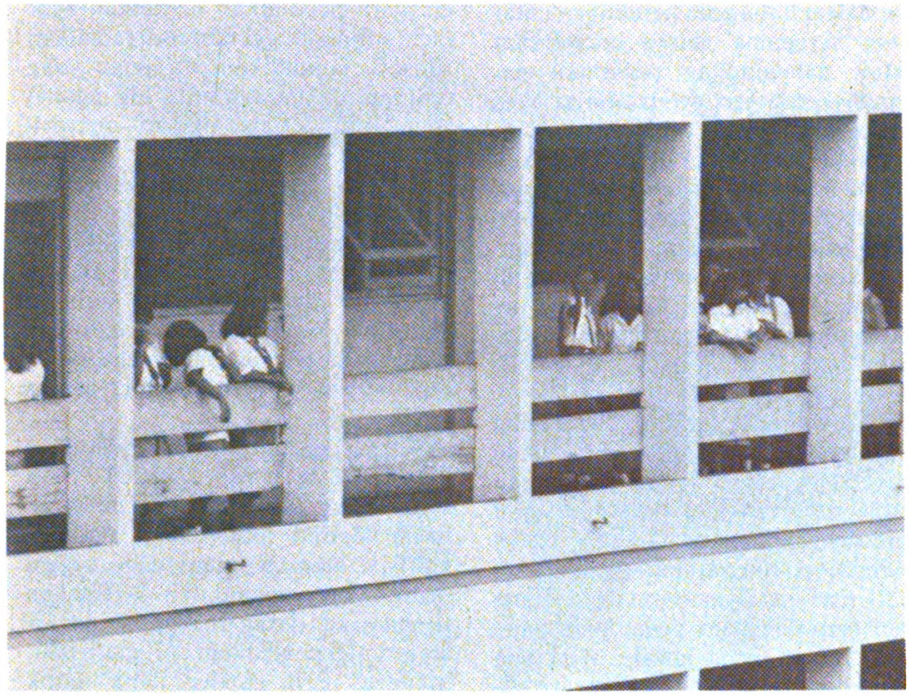

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu kerja keras

pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan keinginan orang tua selama peserta didik masih berada dalam tanggung jawab orang tua.

Untuk menunjukkan sikapnya yang konsisten, anggota FPDI itu sempat mengajukan interupsi ketika RUU akan diputuskan dalam sidang pleno yang dipimpin Sukardi.

Fraksi Karya juga menaruh perhatian atas penjelasan pasal 28 ayat 2 itu. FKP mengingatkan bahwa pasal itu tidak berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain yaitu pasal 39, pasal 38, pasal 47 dan pasal 7 berikut penjelasannya secara utuh. Dalam hal pendidikan agama, FKP sadar bahwa UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kebebasan agama menurut FKP adalah salah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia. Negara tidak memaksa agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan pada keyakinan seseorang yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Penjelasan pasal 28 ayat 2 bila dikaitkan dengan pasal 39 akan lebih jelas maknanya. Penjelasan pasal 39 ayat 2 antara lain menyebutkan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dipeluk peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati pemeluk agama lainnya dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional. Selain itu, menurut FKP, penjelasan pasal 38 memberikan jaminan kepada peserta didik yang karena situasi dan kondisi tertentu belum atau tidak dapat disebut sebagai pemeluk agama tertentu.

Bila dikaitkan dengan pasal 47, penjelasan pasal 28 itu memberikan pula jaminan kepada penyelenggara pendidikan yang mempunyai ciri khas yang berlatar belakang keagamaan dapat menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan ciri khasnya.

Menyangkut kasus penjelasan pasal 28 ayat 2, Ketua Umum DPP Golkar ketika ditanya wartawan tentang tanggapannya menyatakan, apabila dirasakan kurang "sreg" (sesuai - red), akan diamankan dengan peraturan pemerintah.

Sementara Menteri Pendidikan menegaskan, keberadaan ciri khas berdasarkan keagamaan suatu lembaga pendidikan tetap akan dijamin. Kekhususan sekolah yang diselenggarakan berdasarkan agama tetap akan dijamin keberadaannya. Tidak benar kalau sebuah sekolah yang berciri khas agama A harus menyediakan guru agama B. Itu tidak benar, katanya.

Terhadap kekhawatiran atas tuntutan penyediaan guru agama sesuai yang dianut murid sekolah swasta yang bercirikan agama, Fuad Hassan mengatakan, masalah itu nantinya akan diatur. Dikatakannya, penjelasan tidak ditafsirkan sebagai pasal.

Padmo Wahjono, Deputi Ketua BP-7 yang juga pakar ilmu hukum menegaskan bahwa penjelasan pasal 28 ayat 2 tidak mengikat, sebab bila demikian, pemerintah berarti ikut campur tangan dalam urusan kebebasan beragama masing-masing warga negara. Sesuai ketentuan UUD 1945, pemerintah menjamin, tetapi tidak berarti bercampur tangan. Untuk mengamankan penjelasan pasal 28 ayat 2 agar tidak menyimpang dari UUD 1945 pasal 29, menurut Padmo, pemerintah perlu membuat peraturan pelaksanaan.

Tentang lahirnya rumusan itu, Padmo mempertanyakan, kalau para pendiri negara dalam pembukaan UUD 1945 menghapuskan 7 kata dari Piagam Jakarta, berisi "mewajibkan", mengapa justru dalam UU SPN malah dijelaskan dengan kata "harus". Dari segi rumusan itu ia melihat dalam UU SPN terdapat kemunduran.

BPPN

Dalam pendapat akhir ketika mengambil keputusan atas RUU SPN, keempat fraksi DPR menyambut kehadiran Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang segera akan dibentuk setelah pengesahan UU. Mereka menilai BPPN ini akan menjadi wadah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, khususnya pendidikan keluarga. Wadah ini pula merupakan keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Badan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat umum serta kepentingan bangsa dan negara berkenaan dengan masalah-masalah pendidikan kepada pengelola sistem pendidikan nasional.

Tentang RUU SPN itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan mengatakan, kehadirannya tidak dengan sendirinya akan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi baru merupakan langkah untuk meletakkan dasar dalam menata penyelenggaraan pendidikan nasional. "Kita masih harus bekerja keras demi meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya", kata Menteri. □ (MK/SGT)

Digitized by Google

Presiden Soeharto Resmikan Tiga PLTA

Menuju Pengembangan Energi Nuklir

Ditandai penekanan tombol dan raungan sirine serta ditimpali alunan koor lagu 'Padamu Negeri' tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA) diresmikan Presiden Soeharto, Kamis siang di PLTA Mrica, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ketiga PLTA tersebut, disamping Mrica, juga PLTA Sengguruh di Jawa Timur dan PLTA Cirata di Jawa Barat.

Selangkah lagi bangsa Indonesia maju memenuhi kebutuhan tenaga listrik dengan memanfaatkan kekayaan air yang ada di bumi pertiwi tercinta ini. Sebelumnya di beberapa tempat lainnya juga telah dibangun berbagai PLTA seperti PLTA Juanda, Saguling dan Jatiluhur yang memanfaatkan aliran sungai Citarum (Jawa Barat).

Dalam kesempatan itu Presiden Soeharto mengingatkan bangsa Indonesia harus siap-siap jika tiba saatnya nanti harus mengembangkan energi nuklir, karena tidak semua energi yang kita miliki dapat diperbarui. Memang, Indonesia masih memiliki sumber daya yang besar yang sampai sekarang belum dimanfaatkan. Antara lain cadangan gas bumi, serta batubara yang belum dikembangkan secara maksimal. Cadangan sumber energi tersebut cukup besar dan nantinya menjadi tumpuan harapan untuk memenuhi kebutuhan energi yang makin pesat. "Kita juga memiliki cadangan energi lainnya seperti gambut, energi surya, angin, biomasa dan sebagainya. Tapi suatu saat harus siap juga mengembangkan energi nuklir," tandas Presiden.

Listrik yang Memadai

Diakui pula oleh Kepala Negara bahwa menyediakan energi terutama listrik yang memadai untuk rakyat jelas tidak mudah. Upaya itu memerlukan investasi besar, peralatan canggih dan organisasi yang baik. "Karenanya penggunaan energi harus dihemat. Pemborosan dan kebocoran harus dihindari," tegas Kepala Negara.

Disiplin pemakaian energi, kata Presiden, harus merupakan bagian dari disiplin nasional. PLN harus terus menerus memperbaiki mutu pelayanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan usahanya. Sebab, PLN sebagai perusahaan negara harus bisa mandiri, meskipun tetap memperhatikan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di PLTA Mrica yang kemudian dikukuhkan nama Panglima Besar Soedirman, Presiden menegaskan kembali bahwa kemajuan pesat di bidang penyediaan listrik selama ini. Sejak Pelita I hingga IV kemajuan penyediaan listrik mengalami lonjakan lebih dari 16 kali. Listrik kini mengalir ke lebih dari sembilan juta pelanggan, memasuki lebih dari 18.000 desa, menggerakkan kegiatan ekonomi dan industri pedesaan. Dan pada Pelita V nanti, diusahakan agar hampir setengah dari penduduk Indonesia dapat menikmati tenaga listrik, termasuk yang tinggal di 30.000 desa.

Manfaat bagi masyarakat

Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita dalam kesempatan yang sama mengemukakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan telah berfungsinya PLTA itu. Pembangunan PLTA itu sendiri merupakan pekerjaan besar yang melibatkan ribuan tenaga kerja dan melampaui tahap-tahap pekerjaan yang panjang dan rumit, dan seringkali diperlukan pengorbanan rakyat yang harus meninggalkan rumah dan ladangnya yang mungkin telah turun-temurun didiami keluarganya. "Namun semua pekerjaan dan pengorbanan itu tidak sia-sia dan hasilnya membawa manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat," ujarnya.

Sebagai contoh Menteri Pertambangan dan Energi menunjuk pembangunan ketiga PLTA ini yang menghasilkan 714 MW tenaga listrik yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan. Selain itu PLTA ini juga bermanfaat bagi pengendalian banjir dan bendungannya dapat mengairi sawah meliputi ribuan hektar.

Temu wicara

Dalam kesempatan temu wicara, Presiden Soeharto menyinggung masalah Kedungombo dimana sebagian penduduk wilayah yang digenangi air masih bertahan. Menurut Presiden mungkin disebabkan masih adanya sisa-sisa PKI yang memberi penerangan tidak benar kepada mereka sehingga akibatnya rakyat yang menjadi korban.

"Saya tahu daerah Kedungombo ini, karena saya dulu pernah menjadi panglima divisi di Jawa Tengah, komandan resimen di Solo, sehingga mengetahui daerah tersebut merupakan basisnya PKI dulu," ucap Presiden.

Presiden menandaskan bahwa pembangunan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak, memang membutuhkan suatu pengorbanan masyarakat. Demikian pula dalam pembangunan suatu bendungan PLTA dimana pembangunannya hanya bisa terwujud dengan partisipasi dan pengorbanan masyarakat.

Seperti pepatah "jer basuki mawa bea" kata Kepala Negara, yang artinya tidak ada cita-cita yang dapat dicapai tanpa ada pengorbanan. "Segala perencanaan pembangunan ditujukan bagi kepentingan seluruh masyarakat dan bangsa. Tidak ada yang ditujukan bagi satu golongan atau pemerintah saja. Lagi pula, tidak ada pembangunan yang bertujuan menyengsarakan rakyat. Demi Allah tidak ada sama sekali," ucap Presiden.

Jadi, lanjut Presiden, kalau ada orang mau menolong meringankan pengorbanan memang kita terima. Namun janganlah kemudian menjadi penghalang bagi apa yang dilaksanakan pemerintah. Kalau maksudnya memang mau menolong rakyat yang memberikan pengorbanan bagi pembangunan, maksud baik itu hendaknya betul-betul dilaksanakan dengan benar. Bukannya maksudnya menolong tapi kenyataan malah menderitakan rakyat bersangkutan. Ada pepatah, welas tanpa asih, artinya kelihatannya mau menolong tapi nyatanya menjerumuskan rakyat dan menyengsarakan rakyat. Demikian Presiden Soeharto.☐ (NS)

Digitized by Google

Wapres Sudharmono SH :

Perlu Bimbingan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Orang-orang Kecil

Wapres Sudharmono pada peringatan Isra Mi'raj

Wakil Presiden Sudharmono, SH dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal Jakarta, 5 Maret yang lalu, Menyitir salah satu sabda Nabi, bahwa kefakiran nyaris membawa kekufuran. Karena itu, Sudharmono memandang perlu agar lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan ikut membimbing, membantu serta memperhatikan kehidupan orang-orang kecil dari segala kesulitan dan persoalan yang mereka hadapi. Sehingga lembaga dan organisasi keagamaan dapat berbuat banyak melalui atau bersama gerakan koperasi. Apalagi sebagian besar masyarakat kita ini adalah orang-orang kecil yang meliputi pedagang, petani, buruh dan pegawai kecil. Ini tentunya tidak cukup didakwahi dengan khotbah dan ceramah belaka, tapi mereka perlu dibimbing dan dibantu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, gerakan koperasi ini sangat besar manfaatnya untuk membantu mereka dalam mengatasi kesulitan hidup sehari-hari.

"Dengan lebih mengarahkan kegiatan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi keagamaan pada pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sesungguhnya adalah sebagai usaha menyelamatkan mereka dari bahaya kekufuran," lanjut Sudharmono.

Sementara itu, menurutnya, usaha dan kegiatan meningkatkan taraf hidup bangsa sudah merupakan keharusan yang menuntut tanggung jawab semua untuk mengurangi setahap demi setahap adanya kesenjangan sosial. Ini pun mutlak harus dilakukan bersama kalau tidak ingin masyarakat ini terjerumus ke dalam keresahan dan sekaligus mungkin kerusuhan sosial. Oleh karenanya, melalui mimbar atau peringatan isra Mi'raj Wapres mengajak para pemimpin agama supaya lebih memberikan perhatian pada usaha-usaha peningkatan kehidupan sosial ekonomi umat dan bangsa kita.

Bukan Sikap Mandeg

Peringatan keagamaan ini sudah membudaya bagi umat Islam seperti halnya peristiwa keagamaan lainnya, yang selalu diperingati setiap tahun. Atas dasar peringatan seperti ini, maka Sudharmono mengharapkan kita semua umat Islam seyogyanya berusaha menyegarkan kembali kehidupan keberagamaan kita dan berusaha meningkatkan kesadaran beragama. Bahkan, keberagamaan itu bukan suatu sikap yang 'mandeg' dan melainkan suatu proses dalam hidup yang harus dihayati dan ditingkatkan terus menerus sekaligus tidak boleh merasa puas dengan adanya keberagamaan

Digitized by Google

Dengan Pancasila bangsa Indonesia terhindar dari konflik idiologis

itu. Dan kita harus selalu mengadakan mujahadah serta riyadh melalui pengamalan dan penghayatan agama kita secara tulus maupun sungguh-sungguh.

Ada baiknya dalam peringatan keagamaan ini bila kita menyimak kembali makna ibadah sholat yang dilaksanakan umat Islam setiap hari. Titah kewajiban sholat itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. "Sholat adalah mi'rajnya setiap muslim," sambung Sudharmono dalam menyitir ucapan Nabi Muhammad SAW.

Disebutkan pula, bahwa pesan sholat itu antara lain tersimbolkan salam ketika mengakhiri sholat seperti dilakukan setiap kali menutup sholat — Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh seraya menghadapkan muka ke kanan dan ke kiri. Sebab, sesunguhnya pesan Islam adalah pesan perdamaian. Agama kita sebagaimana disyaratkan oleh namanya; Islam adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan perdamaian. Sehingga untuk mewujudkan kehidupan damai yang diliputi oleh rakhmat dan berkah Tuhan Yang Maha Esa, katanya, agama Islam sangat menekankan agar menjauhi serta menyingkirkan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Dalam kerangka inilah, Sudharmono menilai, kita sebagai bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai muslim patut bersyukur, bahwa peran pendahulu kita telah merumuskan dan mewariskan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Dengan ideologi Pancasila itu, pertama-tama bangsa Indonesia terhindar dari konflik ideologis antarsesama kita, yang mempunyai latar belakang agama berbeda-beda.

Sedangkan Prof. Dr. Suyudi Rektor Universitas Indonesia selaku pembicara dalam peringatan Isra Mi'raj ini dengan tema "Dengan Hikmah Isra Mi'raj Kita Tingkatkan Kualitas Manusia Melalui Pengamalan Ibadah Sholat Menuju Kesatuan dan Persatuan mengemukakan, sholat yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi' raj itu mempunyai berbagai manfaat bagi manusia, karena dengan melakukan sholat secara tertib dan teratur menurut syarat dan hukumnya, manusia akan mendapat manfaat dari padanya yaitu melaksanakan kewajiban secara teratur, tertib dan berdisiplin sekaligus mematuhi perintah Allah dengan penuh rasa tanggung jawab seperti kepatuhan seorang prajurit sehari-hari melaksanakan perintah atasannya — malu dan takut berbuat salah.

Lebih lanjut diuraikan pula, orang yang melakukan sholat secara ikhsan, baik dan benar yakin bahwa Allah selalu melihat dirinya, memperhatikan tingkah laku dan apa saja yang dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari itu akan mencegah manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar, melanggar larangan-larangan Allah serta melanggar perundang-undangan yang dibuat manusia untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedang keyakinan yang tumbuh karena mendirikan sholat yang demikian, maka manusia akan bersih dan mampu menjaga diri, malu dan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar batas-batas haram yang ditetapkan oleh Allah dan Undang-Undang. Karenanya, sholat yang didirikan secara baik dan benar akan menjadi pengawasan melekat (waskat) yang built in di dalam diri manusia.

Sementara itu Menteri Agama Munawir Sjadzali pada kesempatan yang sama mengatakan, betapa eratnya hubungan sholat dengan pembentukan pribadi muslim yang berkualitas, di mana sholat dapat dan harus dipergunakan sebagai landasan untuk pembinaan kualitas setiap muslim. Sehingga hendaknya seluruh umat Islam selalu sadar akan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Sikap kesadaran tersebut tentunya dalam kehidupan seseorang merupakan alas yang sangat kuat bagi pembinaan kejujuran. "Ini merupakan salah satu kualitas pribadi yang sangat penting dan akhir-akhir ini merupakan satu komoditi yang berangsur langka, dengan demikian keamanan dan keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada cukupnya pelaksana-pelaksana yang jujur," tegasnya.

Peringatan keagamaan yang selalu dirayakan umat Islam ini selain dihadiri Wakil Presiden Sudharmono, Ny. E.N. Sudharmono, Menteri Agama Munawir Sjadzali dan Prof. Dr. Suyudi, juga dihadiri sejumlah menteri, pejabat tinggi/tertinggi negara, kepala perwakilan negara sahabat dan umat Islam Jakarta. ☐ DT

Digitized by Google

Peresmian Gedung Perpustakaan Nasional :

Menggugah Hati Para Hartawan

Sebuah peristiwa bersejarah telah dipatok bersamaan dengan peringatan 23 tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Sabtu 11 Maret 1989, Presiden Soeharto secara resmi membuka dan meresmikan Gedung Perpustakaan Nasional yang megah di bilangan Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat sederet dengan kompleks sekolah dan kampus Universitas Indonesia.

Karya besar bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, lewat bangunan Perpustakaan Nasional yang dirintis Yayasan Harapan Kita dibawah Ibu Tien Soeharto, memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang cinta buku dan gemar membaca.

"Kehadiran perpustakaan adalah suatu keharusan kalau kita ingin maju. Bagi kita bangsa Indonesia, perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencapai salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Presiden Soeharto dalam bagian sambutannya.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa lewat penyediaan sarana perpustakaan nasional sangat relevan dengan GBHN 1988, dimana ditegaskan tahap-tahap pembangunan selanjutnya perhatian diarahkan kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Ini berarti usaha dan kegiatan pendidikan menjadi sangat penting yang harus mendapat perhatian yang lebih besar. "Dan perpustakaan inilah merupakan bagian dari usaha dan kegiatan pendidikan bangsa kita dalam arti luas," ujar presiden lagi.

Proses belajar, cinta buku dan gemar membaca merupakan proses yang panjang yang harus dilalui bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya untuk mengejar ketinggalan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dituntut kemauan keras mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar membaca serta menyerap setiap informasi. Seperti ditegaskan Presiden bahwa dewasa ini umat manusia hidup dalam era informasi. Dari sekarang kita telah melihat tanda-tanda yang sangat jelas, bahwa masa depan adalah masa yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan masa itu sendiri tidaklah jauh dari saat sekarang ini.

Oleh karenanya, kata Presiden, kalau dari sekarang kita tidak membekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan mereka kelak akan tertinggal jauh dari kemajuan. Dan sarana penting untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu adalah melalui buku.

Lebih Lengkap

Kehadiran Gedung Perpustakaan Nasional dengan luas bangunan hampir 12.500 meter persegi telah menempatkan bangsa Indonesia sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dulu mengenyam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dilukiskan oleh kepala perpustakaan nasional, Ny Mastini Hardjoprakoso, dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya, kita memiliki perpustakaan yang lebih lengkap.

Bangunan perpustakaan yang meliputi empat blok, dua di antaranya mempunyai tujuh dan sembilan lantai, menampung koleksi sebanyak 750.000 eksemplar, meliputi buku, majalah, koran, mikrofilm. Sekitar 500.000 di antaranya pindahan dari perpustakaan nasional di Museum Pusat Jl. Merdeka Barat.

Di samping ruang pameran, ruang baca, peta langka dan lain-lain, juga dilengkapi dengan ruang penerangan, sejarah nasional, ruang fumigasi, bibliotik, komputer dan sebagainya. Seluruh bangunan itu menelan biaya sekitar Rp 12 milyar, dibangun sejak Oktober 1985.

Mengisahkan awal dari gagasan pembangunan Gedung Perpustakaan Nasional, Ibu Tien Soeharto menuturkan bahwa ketika mengunjungi suatu pameran surat kabar langka yang diselenggarakan di perpustakaan Museum Nasional, timbul keinginan Ibu Tien untuk melihat keadaan gudang koleksi perpustakaan. Dan setelah menyaksikan tergugah hatinya untuk membangun sebuah perpustakaan yang lebih memadai.

Apa kesannya setelah menyaksikan tumpukan dokumen berharga mengenai sejarah bangsa Indonesia yang hanya ditumpuk di ruangan yang pengap, "Dokumen itu sangat penting dan sangat besar artinya untuk pembangunan di masa depan. Sekali dokumen itu hilang atau rusak maka kita kehilangan sumber yang tidak ternilai harganya, dan tidak pernah tergantikan untuk selama-lamanya," ujar Ibu Tien Soeharto.

Mengetuk hati

Di bagian lain Presiden Soeharto menegaskan pula apa yang telah dilakukan dalam penyediaan perpustakaan masih belum memadai. Kemampuan kita masih terbatas. Karena itu, ujar Presiden, apa yang dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita membangun gedung perpustakaan hendaknya menggugah pula para hartawan untuk mengikutinya.

"Saya yakin kalau para hartawan tergerak hatinya untuk mengikuti usaha yang mulia Yayasan Harapan Kita ini, banyak gedung perpustakaan yang dapat kita bangun," ujar Presiden, sambil menambahkan keinginan mengetuk hati para pengusaha penerbitan menyumbangkan buku terbitannya kepada perpustakaan-perpustakaan di Tanah Air kita.

Secara khusus Presiden Soeharto juga mengetuk hati orang-orang yang memiliki perpustakaan pribadi, agar bersedia berwasiat untuk kelak menyumbangkan koleksi bukunya kepada perpustakaan. Sebab, kata Presiden, tidak sedikit buku-buku yang sangat berharga pada akhirnya mubazir karena tak digunakan lagi sepeninggal pemiliknya.

Kalau saja buku-buku itu diserahkan kepada perpustakaan maka buku-buku tersebut akan memberi manfaat yang tidak kecil dalam upaya besar kita meningkatkan kecerdasan bangsa.

Seperti biasa selesai peresmian dilanjutkan peninjauan keliling seputar perpustakaan oleh Presiden dan Ibu Tien Soeharto, Wapres dan Ibu EN Sudharmono, sejumlah menteri kabinet pembangunan V dan undangan lainnya. ☐ (NS)

Digitized by Google

Tunggal Putri dan Ganda Putra Nomor Yang Selalu Dianaktirikan

Nomor tunggal putri dan ganda putra selama ini hampir selalu menjadi anak tiri, dalam pembinaan selalu dinomorduakan jika dibandingkan dengan nomor tunggal putra.

Ini terlihat dari sanjungan-sanjungan serta hadiah yang diberikan kepada mereka, dibanding ketika pemain-pemain tunggal putra Indonesia berjaya di even-even internasional khususnya All England.

All England, adalah turnamen bulutangkis tidak resmi yang selama ini menjadi barometer bagi perbulutangkisan tingkat dunia, sama seperti Wimbledon di cabang olahraga tenis.

Sebersit harapan muncul ketika Susi Susanti dan pasangan Eddy Hartono/ Rudy Gunawan tampil di final setelah pemain-pemain tunggal putra seperti Ardy BW, Eddy Kurniawan gagal di semifinal, bahkan andalan utama Icuk Sugiarto sudah kandas di perempat final.

Tapi harapan itu tinggal harapan, ketika Susi Susanti belum mampu menembus kehebatan pemain Cina Li Lingwei dan Eddy Hartono/Rudy Gunawan tak berkutik di tangan pasangan Korea Park Joo Bong/Lee Sang Bok, keduanya kalah dalam dua set.

Susi yang sudah unggul 7-1 di set pertama, harus menyerah 8-11, dan set kedua dibabat 4-11. Sedangkan Eddy Hartono/Rudy Gunawan dikalahkan 8-15, 7-15.

Hampir lima belas tahun terakhir ini, arena All England bagi pemain Indonesia merupakan arena yang sulit dicapai apabila yang dituju adalah gelar juara, jika dibanding sebelum era tahun 1980 dimana pemain-pemain Indonesia tampil dominan.

Di bagian putra, selalu berjaya sejak era Tan Yoe Hok, Ferry Soneville, Rudy Hartono, Liem Swie King dan pasangan Indra`Gunawan/Mulyadi, Tjun Tjun/Johan Wahyudi, Christian/Ade Chandra dan terakhir Kartono/Heryanto.

Perbulutangkisan Indonesia sekarang mundur? Bagi masyarakat penggemar bulutangkis maupun masyarakat awam di tanah air tentu akan mengatakan, ya!

Susi Susanti, kalah pengalaman

Berbeda dengan para pembina bulutangkis terutama yang duduk di kepengurusan PB.PBSI akan mengatakan; "Kita tidak mengalami kemunduran, hanya negara-negara lain kemajuannya cukup pesat".

Kita harus mengakui, dominasi bulutangkis Indonesia mulai terancam setelah munculnya RRC menjadi anggota Federasi Bulutangkis Indonesia (IBF), menyusul bubarnya Federasi Bulutangkis Dunia (WBF).

Permasalahan yang dihadapi Indonesia, setelah Liem Swie King kita memang tidak memiliki pemain dengan kaliber juara sejati. Icuk Sugiarto yang diharapkan dapat menggantikan King, mempunyai sifat yang labil. Suatu saat bermain bagus, tapi dalam kesempatan lain dengan pemain yang tidak terkenalpun bisa dikalahkan.

Try Sutrisno, ada titik terang.

Sementara Cina, begitu Hao Chia Chang dan Tong Shinfu (yang kini melatih pemain-pemain Indonesia dengan nama Anwar Nurhadi-red), bermunculan pemain tangguh silih berganti, sebut saja Han Jian, Hou Jianhua, Xiang Gobou, Yang Yang.

Dari Asia, kekuatan bulutangkis baru juga muncul dari Korea Selatan baik putra maupun putri. Sementara Jepang, Malaysia, India dan Thailand mengalami nasib yang lebih buruk dari Indonesia. Barangkali Malaysia tertolong oleh keberhasilan mengalahkan Indonesia di semifinal Piala Thomas tahun lalu.

Adanya hadiah-hadiah uang yang cukup menggiurkan, menjadikan pemain Eropa melirik bulutangkis sebagai ladang untuk mengeruk uang. Lihat saja pemain-pemain Denmark seperti Morten Frots Hansen, Ib Frederickson dan lain-lain dengan upaya sendiri meningkatkan prestasi serta berhasil menjuarai All England maupun berbagai turnamen grand prix.

Uni Soviet serta negara-negara sosialis lainnya harus diperhitungkan penampilannya, mengingat bulutangkis mulai dipertandingkan di arena Olimpiade 1992 di Barcelona.

Titik terang

Meskipun gelar juara All England makin sulit diraih, tapi tidak mengurangi

Digitized by Google

semangat Ketua Umum PB.PBSI Try Sutrisno untuk terus membina pemain-pemainnya. Try Sutrisno yang sehari-hari disibukkan dengan kegiatannya sebagai Panglima ABRI menilai bulutangkis Indonesia tidak terlalu mundur, bahkan munculnya pemain-pemain muda seperti Susi Susanti di final All England berarti ada titik-titik terang hasil pembinaan yang dilakukan selama ini.

Menurut Try Sutrisno perbulutangkisan Indonesia sekarang ini sedang dalam masa transisi, yaitu adanya alih generasi dari senior ke junior yang tengah giat-giatnya dilakukan oleh PB.PBSI.

Dikemukakan oleh Ketua Umum PB.PBSI ini, titik-titik terang itu mudah-mudahan terlihat pada Kejuaraan Bulutangkis Piala Sudirman dan Kejuaraan Dunia IV bulan Mei mendatang yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Keberhasilan pasangan Indonesia Eddy Hartono/Rudy Haryanto mengalahkan juara dunia Tian Bingyi/Li Yongbo, keberhasilan Susi Susanti mengalahkan pemain kenamaan dari Korea Selatan Hwang Hye Young serta kemenangan Ferawaty Fajrin/Yanti Kusmiati atas pasangan kuat Cina, merupakan bukti bulutangkis Indonesia masih punya kekuatan.

Hasil All England baru-baru ini juga dianggap oleh Ketua Umum KONI Pusat Surono dan Menpora Ir. Akbar Tanjung cukup menggembirakan. "Saya masih yakin potensi bulutangkis Indonesia masih diperhitungkan dan mampu bicara di arena internasional," kata Surono ketika diminta komentar mengenai hasil All England baru-baru ini.

Menpora Ir. Akbar Tanjung menilai, hasil-hasil All England tidak terlalu mengecewakan, bahkan cukup memberikan angin segar karena Susi Susanti mampu menjadi finalis yang selama ini sulit dicapai pemain-pemain putri Indonesia. "Mudah-mudahan di Piala Sudirman dan Kejuaraan Dunia Perorangan nanti prestasi serupa akan diperlihatkan lagi. Apalagi sebagai tuan rumah tentu kita harapkan hasil yang lebih baik," ujar Menpora.

Mantan Ketua Umum PB.PBSI sebelum Try Sutrisno, Drs. Ferry Soneville juga berpendapat, hasil All England cukup membersitkan harapan bagi perbulutangkisan Indonesia di arena internasional. "Saya berharap Susi Susanti akan membangkitkan semangat pemain-pemain lain untuk tampil lebih baik di masa-masa mendatang," ujar Ferry Soneville yang kini lebih aktif mengurusi organisasi REI (Real Estate Indonesia) dimana ia duduk sebagai Ketua Umumnya.

Tapi Ferry Soneville berpendapat, sebaiknya PB.PBSI segera memikirkan langkah-langkah pembinaan selanjutnya serta mengkaji apakah pembinaan yang ditempuh sekarang ini masih cukup relevan. Ia menyarankan, sebaiknya pelatnas (pemusatan latihan nasional) sekarang ini tidak terlalu banyak menampung pemain. "Saya kira paling banyak enam orang putra dan enam putri," ujar Ferry.

Dengan memperkecil jumlah pemain pelatnas maka akan terjadi kompetisi yang lebih ketat di tingkat daerah atau klub, apabila menginginkan pemainnya bisa masuk dalam squad nasional. "Saya kira jumlah sekarang baik yang di pelatnas utama dan pratama terlalu banyak," tambah Ferry.

Pendapat Ferry Soneville barangkali ada benarnya, dan perlu dikaji para pakar bulutangkis yang kini ada di bagian penelitian dan pengembangan (litbang) PB.PBSI. Bahkan kalau perlu memikirkan apakah sistem pelatnas yang sekarang ditempuh masih layak untuk diterapkan dalam era bulutangkis yang sudah semi profesional sekarang ini.

Pemain-pemain Eropa, khususnya Denmark misalnya, tanpa campur tangan organisasi bulutangkisnya bisa berhasil. Kenapa?

Kuncinya adalah, mereka latihan sungguh-sungguh, karena apabila mampu menjuarai turnamen-turnamen di luar negeri (grand prix) selain uang akan terus mengalir dari hadiah juga datang dari para sponsor.

Sistem pelatnas mungkin tidak dikenal oleh pemain-pemain seperti Morten Frost Hansen (Denmark), Steve Baddeley (Inggris) barangkali tidak pernah mengenal sistem pelatnas. Cina mungkin mengenal sistem pelatnas karena uang hasil jerih payahnya di setiap kejuaraan memang menjadi milik negara.

Seperti dikemukakan Ferry Soneville, dengan memperkecil jumlah pemain di pelatnas maka akan terjadi persaingan ketat di klub maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu perlunya diintensifkan pertandingan-pertandingan baik antar daerah maupun antar klub, tidak seperti sekarang yang hanya sekali dalam setahun.

Kalau perlu di dalam negeri juga dikenal pertandingan grand prix yang memberlakukan sistem peringkat nasional, seperti yang ditempuh oleh PB. Pelti dengan PNP (Peringkat Nasional Pelti). Dengan meningkatkan frekuensi pertandingan di tingkat nasional maka pembinaan pemain akan lebih terjamin.

Sistem pelatnas yang ditempuh sekarang ini nampaknya ibarat PB.PBSI membentuk sebuah super klub, sehingga mematikan kompetisi di tingkat klub/pengda yang menjadi sumber utama pemain-pemain bagi PB. PBSI. □ (AW)

Digitized by Google

Keselamatan Kerja, Upaya Meningkatkan Kualitas Manusia

Mungkin sebagian besar dari kita masih ingat akan peristiwa kerusakan instalasi nuklir di Chernobyl, Rusia, atau peristiwa serupa di pusat industri battery milik Union Carbide di Bhopal, India, beberapa waktu yang lalu. Peristiwa-peristiwa seperti itu tentu merugikan dan membahayakan kehidupan manusia yang terkena, yang lebih lanjut secara nasional merugikan negara yang bersangkutan, bahkan lebih luas lagi dapat merupakan ancaman bagi sesama umat manusia di bumi ini.

Peristiwa-peristiwa kecelakaan kerja yang sifatnya lebih kecil sering kita dengar kejadiannya di negeri kita, yang disebabkan karena berbagai sebab, seperti misalnya kortsluiting listrik, tidak berfungsinya alat pengaman, dan lain sebagainya. Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa penyebab yang utama dari kecelakaan adalah faktor manusianya. Menurutnya penerapan teknologi yang makin maju harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan dalam perusahaan atau industri harus dimulai sejak langkah awal pada waktu tahap disain teknologi yang diikuti dengan penciptaan sarana pencegahan kecelakaan kerja, dan kemudian mendidik pelaksana operasional supaya lebih akhli dan terampil menggunakan peralatan yang tersedia.

Pengamalan Pancasila

Selama sebulan yang diawali sejak awal Januari yang lalu Departemen Tenaga Kerja telah melancarkan kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Salah satu kegiatan dalam rangkaian kampanye itu adalah penyelenggaraan Konvensi K3, yang dibuka resmi oleh Presiden Soeharto di Istana Negara tanggal 6 Februari yang lalu.

Konvensi Nasional K3 merupakan forum komunikasi dan tukar menukar pengalaman antara Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N), Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah (DK3W) dan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (p2K3) di perusahaan-perusahaan atau industri-industri, Lembaga Keselamatan dan Kesehatan kerja non Pemerintah termasuk para produsen alat-alat keselamatan kerja serta para profesional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan konvensi adalah mencapai kesepakatan dalam peningkatan mutu pelaksanaan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Presiden Soeharto dalam sambutannya menyatakan bahwa penyelenggaraan Konvensi saatnya adalah tepat bila dikaitkan dengan persiapan memasuki Repelita V yang merupakan tahap penutup Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, dan sekaligus merupakan ancang-ancang memasuki proses tinggal landas dalam Repelita VI.

GBHN telah memberikan petunjuk bahwa pembangunan bangsa harus makin menekankan usaha peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dalam hubungan ini Kepala Negara mengatakan bahwa usaha kita untuk lebih memperhatikan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja tidaklah terlepas dari usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas manusia tadi. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai makna yang dalam. "Usaha peningkatan jaminan ke-

Peristiwa kecelakaan kerja sering di dengar

Digitized by Google

selamatan dan kesehatan kerja kita hayati sebagai pengamalan Pancasila; paling tidak hal ini berkaitan erat dengan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keadilan sosial," ungkap Kepala Negara.

Dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik dapat dikembangkan rasa aman dan kegairahan kerja. Unsur ini sangat besar artinya bagi peningkatan produktivitas dan peningkatan produksi, yang merupakan kunci penting dari keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Berkaitan dengan masalah produktivitas dan efisiensi yang sudah sejak beberapa tahun lalu dicanangkannya, Kepala Negara mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja akan dapat mencegah kerugian-kerugian yang tidak perlu. Pengalaman menunjukkan bahwa diabaikannya keselamatan kerja dapat menimbulkan akibat-akibat yang sangat luas. Sebuah pabrik besar dapat meledak dan membawa bencana memilukan bagi masyarakat luas; akibat-akibatnya dapat terasa bertahun-tahun. Kecelakaan-kecelakaan besar tidak jarang bermula dari sebab-sebab atau kelalaian yang kecil. Oleh sebab itu Presiden menekankan pentingnya kita semua menaruh perhatian yang besar pada masalah keselamatan kerja ini.

Keselamatan kerja timbulkan kegairahan kerja

Hal baru

Dalam pengarahan di depan para peserta Konvensi Nasional K3 lebih lanjut Kepala Negara mengungkapkan bahwa masalah keselamatan kerja terasa seakan-akan sebagai hal baru bagi kita. Menurut beliau ini merupakan proses kemajuan dalam wawasan dan sikap. Dalam tahap pembangunan yang awal, dalam tahap pembangunan yang belum berukuran besar, dalam tahap pembangunan yang belum rumit kaitannya satu dengan yang lain, dalam tahap pembangunan yang belum menggunakan teknologi tinggi, derajat bahaya yang timbul juga belum besar. Itulah sebabnya maka menurut Bapak Pembangunan Indonesia itu perhatian kita kepada masalah keselamatan dan kesehatan kerja masih kurang. Namun dalam tahap pembangunan yang makin maju lagi masalah keselamatan kerja harus mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi.

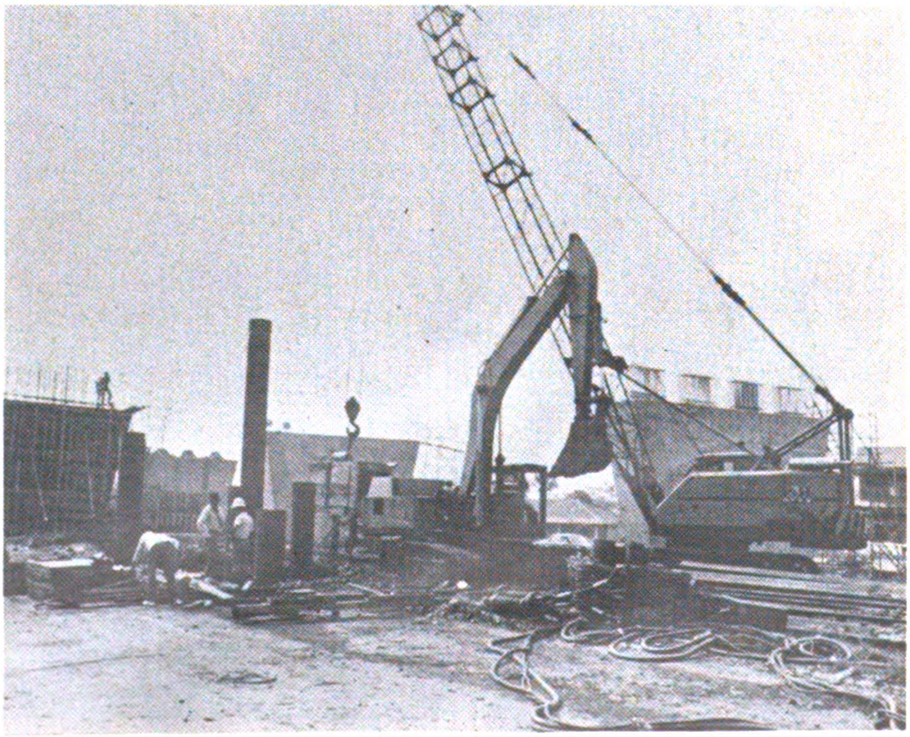

Keselamatan kerja perlu diperhatikan

Keselamatan kerja perlu diperhatikan dalam seluruh proses kegiatan produksi, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga dapat dicegah kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu dalam proses produksi. Dengan demikian di tahun-tahun mendatang kegiatan produksi dapat ditingkatkan, dan sekaligus di lain pihak tingkat kecelakaan kerja dapat diturunkan. Kesadaran akan keselamatan kerja perlu tertanam pada semua tingkat dan lapisan proses produksi, mulai dari pimpinan teratas sampai pada pelaksana-pelaksana terbawah.

Namun demikian Kepala Negara menyatakan pula penilaiannya bahwa dewasa ini keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan besar atau menengah baik pada sektor badan usaha milik negara maupun sektor swasta telah makin baik. Upaya ini perlu ditingkatkan lagi. Demikian Presiden Soeharto. (TAP)

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PANCA WALI KRAMA DI PURA BESAKIH

Ucapan om swasti astu terus menggema dari umat Hindu Bali menyambut kedatangan Presiden Soeharto beserta rombongan menteri, saat menghadiri perayaan Tawur Agung Panca Wali Krama (PWK) di Pura Besakih, Denpasar, 8 Maret lalu.

Perayaan ini diselenggarakan umat Hindu setiap 10 tahun sekali, yaitu pada setiap akhir tahun Caka yang berakhir dengan angka nol. Tahun Caka, adalah tahun Masehi dikurangi 78, misalnya, pada saat bulan mati sasih kesongo tanggal 8 Maret 1989 merupakan akhir tahun Caka 1910 dan kemudian besoknya dimulai dengan tahun baru Caka, yang terkenal dengan Hari Raya Nyepi.

Pada saat inilah, umat Hindu di Bali khususnya dan di Indonesia umumnya merayakannya dengan mengadakan semedi dan tapa brata, dengan tidak melaksanakan kegiatan apapun termasuk makan dan minum. Dan selanjutnya sebelum malam hari 8 Maret (sebelum nyepi) di seluruh Bali diadakan pawai ogoh-ogoh, yaitu suatu bentuk makhluk yang dibuat dari kertas dan dibakar sebagai lambang dimusnahkannya nafsu angkara murka.

Pada kesempatan ini, Presiden Soeharto tidak memberikan pidato sambutan. Setelah selesai umat Hindu melaksanakan persembahyangan, Pak Harto meninggalkan tempat upacara. Sementara menteri-menteri yang turut hadir antara lain Moerdiono, Munawir Sjadzali, Fuad Hassan dan Bustanil Arifin.□

TEPAT DAN EFEKTIF

Wakil Presiden Sudharmono, SH ketika membuka Pekan Penerangan Pedesaan di Desa Paniwen, Malang, Jawa Timur, menilai penerangan yang tepat dan efektif dapat membentuk serta mengembangkan sikap mental yang memadai, memperkokoh tekad, semangat dan mempertinggi ketaatan maupun disiplin masyarakat demi keberhasilan pembangunan. Sehingga timbul kesadaran masyarakat terhadap arti dan tujuan, program-program, kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

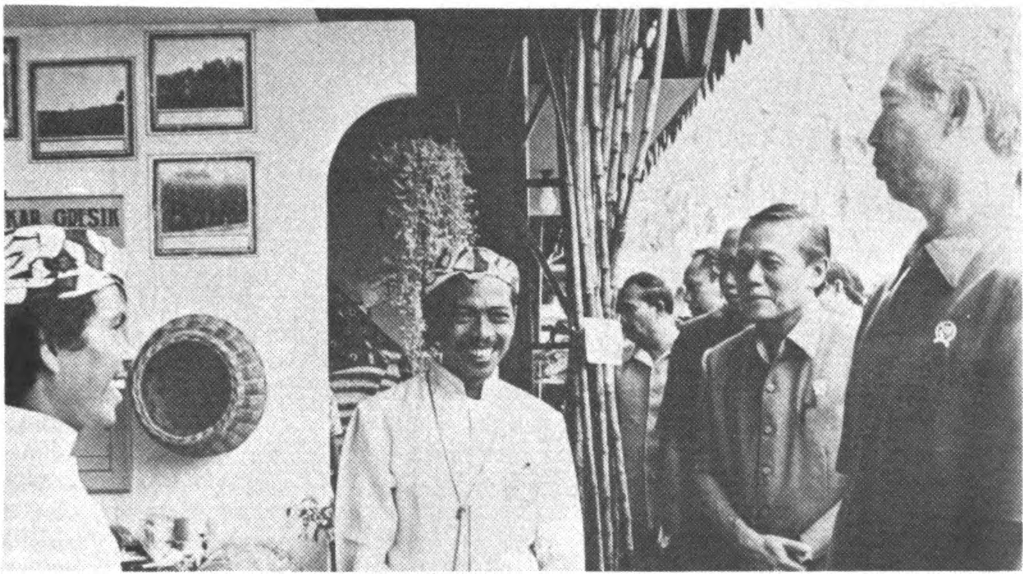

Dari segi sistem dan materi, Pekan Penerangan Pedesaan ini dengan menggerakkan serta meningkatkan kualitas kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (Kelompencapir) sangat penting dan tepat. Karena, sangat bermanfaat dan berhasilguna bagi masyarakat pedesaan. "Banyak manfaat yang dapat dipetik dengan adanya Kelompencapir itu," sambung Sudharmono.

Namun, masih kata Wapres, yang lebih penting lagi adalah mampu mencerna lebih baik dan melalui diskusi-diskusi bersama antara sesama anggota, materi penerangan yang dimuat dan ditayangkan melalui media itu akan dapat diperdalam, dimengerti serta dipraktekkan.

Pembukaan ini selain dihadiri Wapres Sudharmono, juga hadir beberapa menteri, Gubernur Jawa Timur dan pejabat tinggi lainnya.□

Digitized by Google

Tokoh Pejuang Telah Pergi

Kembali Golongan Karya (GOLKAR) dan seluruh bangsa Indonesia kehilangan tokoh pejuang, politisi, wartawan dan pengetik naskah teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu bagi GOLKAR sendiri tokoh yang satu ini merupakan seorang pinisepuh.

Dia adalah Mohammad Ibnu Sayuti, yang lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama bagi kalangan pejuang dengan sebutan Sayuti Melik. Sehingga kepergian Sayuti Melik kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa ini merupakan satu bukti, bahwa satu demi satu para pejuang dan Bapak Bangsa harus meninggalkan kita untuk selama-lamanya.

Sayuti Melik meninggal dunia pada 27 Pebruari yang lalu, karena sakit tua dalam usia yang relatif tua, yaitu 89 tahun. Akan tetapi, semasa hidupnya almarhum memiliki semangat dan daya juang yang tidak bisa diragukan lagi. Dia salah seorang tokoh tiga zaman yang masih mampu menikmati alam kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana waktu itu almarhum juga turut dan mempunyai andil cukup besar bagi kelahiran republik ini. Terbukti, sesaat GOLKAR menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) dia sempat hadir sekaligus mengikuti jalannya Rapim GOLKAR, meskipun saat itu kondisi kesehatan tidak sekuat di zaman pergerakan. Itu gambaran Sayuti Melik yang penuh dengan semangat heroik di era kemerdekaan Indonesia sudah mencapai tahun ke 44.

Sayuti Melik pergi kehadapan Tuhan

Saat-saat terakhir mengikuti Rapim Golkar

Tokoh tua ini memang semenjak usia bocah memiliki sifat nasionalis dan patriotis yang tinggi, bahkan sudah dikenal dengan nama panggilan Sayuti atau Yuti. Sedangkan sebutan Melik adalah nama samarannya yang dipergunakan ketika dia berada di Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 1938 sebagai penjaga pojok Majalah Pesat. Pengakuan ini disampaikan almarhum semasa hidup kepada seorang penanya dalam wawancara dan kemudian hasil wawancara itu dibukukan oleh CSIS yang diterbitkan tahun 1986.

Dalam buku terbitan CSIS itu disebutkan pula, bahwa bocah Sayuti

Digitized by Google

Sayuti Melik tokoh tiga jaman

Melik dilahirkan tanggal 25 November 1908 dari keluarga atau sepasang suami istri Abdul Muin alias Partoprawiro dengan Sumilah, di Desa Kadilogara, Rejondani, Sleman, Yogyakarta. Atau daerah itu lebih dikenal dengan daerah yang terletak di Lereng Gunung Merapi. Kemudian menginjak usia dewasa, almarhum memperistri SK Trimurti dengan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Perkawinan ini tidak berumur panjang, antara Sayuti Melik dengan SK Trimurti cerai secara baik dan almarhum menikah lagi dengan Siti Rantjari.

Seperti tokoh-tokoh pejuang Indonesia yang lain, almarhum dalam menikmati dan menempuh pendidikan di zaman penjajahan tidak lepas dari pengawasan pihak penjajah (Belanda). Ini terbukti ketika ia selesai dari pendidikan dasar di desanya, kemudian melanjutkan belajar di Sekolah Pendidikan Guru di Solo, Jawa Tengah, tapi nasib telah menentukan ke arah lain. Karena, almarhum belum sampai menyelesaikan pendidikan ini telah berurusan dengan pihak Belanda dan ia langsung ditangkap oleh intel Belanda - PID, dengan hukuman ia dipecat dari sekolah.

Bencana pemecatan ini dihadapi pemuda Sayuti Melik dengan hati yang tabah dan tidak menimbulkan perasaan frustrasi. Malahan bencana ini dianggap sebagai cambuk untuk melangkah ke garis perjuangan dan pergerakan bangsa, dalam upaya melepaskan diri dari belenggu tirani penjajah. Oleh karenanya, Sayuti Melik yang sudah beranjak usia 17 tahun (waktu itu) mengambil inisiatif sendiri untuk menunjang karier pendidikannya melalui belajar sendiri dari buku-buku serta senantiasa menghadiri suatu diskusi dengan para tokoh perjuangan. Dengan pengalaman ini menumbuhkan jiwa nasionalis dan patriotik Sayuti Melik menjadi pejuang kemerdekaan yang profesional, dengan konsekuensi logis bahwa ia harus menanggung resiko yang sangat besar yakni ia harus keluar masuk penjara dari zaman penjajahan Belanda, Jepang sampai zaman kemerdekaan diproklamirkan akibat beda pandangan politik.

Menurutnya, HA Zurink adalah guru politiknya yang pertama yang berkebangsaan Belanda dan sekaligus menyuruh Sayuti untuk mempelajari nasionalisme supaya bisa menentang penjajahan. Sedangkan Haji Misbach tokoh Islam merupakan gurunya yang kedua, di mana Sayuti menimba ilmu tentang historis-materialisme guna melawan kaum penjajah. Sehingga hal ini mendorong Sayuti mempelajari marxisme di tahun 1923. Akibatnya, Sayuti tahun 1927 ditangkap penjajah kembali dan disiksa di Banyumas sekaligus dibuang sebagai tahanan politik ke Digul Atas, Irian Jaya pada usia 19 tahun.

Atas dasar semangat dan daya juang yang tinggi dimiliki oleh pemuda Sayuti ini, maka dalam masa pengasingan dia tetap tidak menunjukkan sikap menyerah diri pada pihak penjajah. Sebaliknya, dalam pembuangan itu justru dipergunakan untuk belajar bahasa Inggris dan Perancis, di samping juga mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan, situasi yang sedemikian rupa ini membuat pemuda pejuang ini makin tegar, ia tumbuh menjadi seorang pemikir, anggota DPP PNI, penafsir Marhaenisme, perumus Soekarnoisme dan di zaman Orde Baru pun ia tampil sebagai tokoh GOLKAR sebagai pinisepuh.

Namun, semua pengalaman dan daya juang almarhum Sayuti Melik tinggal kenangan dari dirinya telah menyatu serta kembali pada asalnya ke pelukan Ibu Pertiwi. Jenazah almarhum sebelum diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, lebih dahulu disemayamkan di rumah duka di kompleks DPR Taman Aries Blok F 11 No.37, Jakarta dan disemayamkan pula di Gedung DPR. Sementara figur tokoh pejuang kita ini perlu menjadi tauladan bagi generasi muda, yang mungkin tidak sempat mengenalnya langsung. Semoga. □ DT

Digitized by Google

Kader Golkar di DPR Jangan Rikuh Mengungkap Suatu Persoalan

Himbauan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono kepada kader-kader GOLKAR yang berada di lembaga legislatip dan eksekutip, agar lebih bekerja keras, menghilangkan rasa takut, berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sekaligus mampu menunjukkan dan menciptakan suasana keterbukaan itu, ternyata sambung dengan pemikiran Sekjen DPP GOLKAR Rachmat Witoelar. Dimana Sekjen DPP GOLKAR ini mengharapkan agar para anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) tidak takut pada sikap keterbukaan.

Rachmat Witoelar mengakui, selama ini anggota dan kader-kader GOLKAR yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih banyak mengambil sikap reaktip daripada aktip. Karena, anggota Dewan belum bisa mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi di masyarakat. Untuk itu, kata Rachmat, bagi mereka yang berada di lembaga legislatif harus berani mengatakan apa adanya apabila yang hendak dikatakan itu mempunyai landasan kukuh dengan dasar persoalan yang jelas.

"Para kader GOLKAR yang dipercaya duduk di DPR, agar tidak dan jangan rikuh bila ingin mengungkapkan suatu persoalan. Bila sikap itu terlalu mencerminkan sikap kesopanan-kesopanan, maka saya khawatir inti kebenaran yang akan dikemukakan malah bisa hilang," tegas Rachmat Witoelar kepada wartawan di ruang kerja DPP GOLKAR.

Sikap tegas yang dikemukakan oleh Ketua Umum DPP GOLKAR dan Sekjen DPP GOLKAR ini, tentunya akan menimbulkan suasana yang positip terhadap keberadaan anggota dan kader-kader GOLKAR di tengah masyarakat. Bahkan, bagi yang bersangkutan akan timbul kegairahan dalam menuangkan pemikiran dan rasa takut untuk direcall oleh DPP GOLKAR bagi kadernya yang ada di DPR. Suasana yang demikian ini terbukti telah mendapat dukungan moril maupun politis, terutama seperti yang telah diungkapkan Rachmat Witoelar di depan wartawan ibukota, bahwa DPP GOLKAR tetap memberikan kebebasan penuh kepada kader-kadernya di DPR. Sehingga mereka ini tidak perlu takut direcall, karena DPP GOLKAR tidak pernah mengancam mereka yang berani mengemukakan keterbukaan untuk direcall, karena DPP GOLKAR tidak pernah mengancam mereka yang berani mengemukakan keterbukaan untuk direcall dari keanggotaannya di DPR. Apalagi, sekarang ini GOLKAR tengah memprioritaskan peningkatan kader-kadernya di semua jenjang (level) karier. Baik di eksekutip maupun di legislatip. Sehingga mereka nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

Rachmat Witoelar

"Memang, kepemimpinan di kalangan sipil dibandingkan dengan di kalangan ABRI jauh berbeda dan ketinggalan, terutama kelugasannya dalam menghadapi masalah serta mengambil suatu keputusan," tambahnya.

Sedangkan penyebab kelemahan kepemimpinan kalangan sipil ini disebabkan adanya warna budaya malu, kagok dan sebagainya. Sikap yang demikian memperlambat proses dalam pengambilan suatu keputusan bagi kalangan sipil.

Pada kesempatan ini Rachmat Witoelar mengakui, prosesi untuk menciptakan kader benar-benar berkualitas sebagai seorang pemimpin tidaklah mudah. Karena, prosesi ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan soal waktu ini pula yang dihadapi GOLKAR. Di samping itu, jumlah kader GOLKAR sangat besar dan tentu bila kita hendak mengkader 100-200 orang, barangkali tidak menjadi masalah. Namun, negara ini kan tidak cukup hanya dipimpin 100-200 kader GOLKAR, katanya.

Adapun kader atau anggota GOLKAR yang punya Kartu Anggota GOLKAR (KAG) tercatat 27.614.314 orang, dimana menurut Wahono, perlu ada peningkatan bukan saja dalam hal kuantitas kader. Tapi, peningkatan kualitas kader pun dipandang perlu oleh GOLKAR. Misalnya, pembahasan kualitas kader-kader GOLKAR telah menjadi pembicaraan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GOLKAR di Jakarta beberapa waktu lalu. Karenanya, himbauan Wahono dan seruan Rachmat Witoelar tersebut harus mendapat dukungan positif. Baik dukungan dari setiap kader maupun anggota FKP secara keseluruhan.

Dengan demikian, tanpa adanya dukungan dan keberanian anggota GOLKAR di lembaga eksekutip dan legislatif untuk mengambil sikap yang terbuka, tentu keinginan pimpinan teras DPP GOLKAR ini tidak mustahil akan menemui jalan buntu. Sehingga sikap politik DPP GOLKAR yang telah dikemukakan kedua pimpinan GOLKAR itu merupakan suatu gerak langkah positip, yang sangat mendukung perwujudan kedewasaan kader-kader GOLKAR dalam berpolitik dan mewujudkan pembangunan politik yang berkualitas. Untuk itu, kiranya ajakan Ketua Umum dan Sekjen DPP GOLKAR tersebut perlu disambut sekaligus dilaksanakan. □

DT

Digitized by Google

DPP Golkar Tidak Akan Melakukan Recalling

DPP Golkar secara periodik mengadakan pertemuan rutin dengan kader-kadernya yang bertugas di Lembaga Legislatif, yaitu dengan Fraksi Karya Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat (FKP-DPR). Forum semacam ini dipergunakan selain sebagai forum silaturrahmi, juga sebagai forum penyampaian informasi, petunjuk dan berbagai kebijakan DPP mengenai masalah-masalah strategis.

Seperti halnya pertemuan yang diselenggarakan baru-baru ini di Gedung DPR-MPRRI, Jakarta, menjelang para anggota Dewan itu akan melakukan reses — pulang ke daerah pemilihannya masing-masing — Ketua Umum DPP Golkar Wahono, dalam kesempatan tersebut memberi bekal pada anggota Dean yang akan pergi ke daerah-daerah dengan berbagai masalah baik politis maupun strategis, untuk dimantapkan dalam melanjutkan kegiatan operasional.

Hal-hal yang sifatnya informatif dikemukakan oleh Wahono, misalnya tentang telah diselenggarakannya Raker antara DPP Golkar dengan DPD Golkar Tingkat I seluruh Indonesia yang telah berlangsung baru-baru ini selama dua hari di Jakarta. Raker tersebut, jelas Wahono, telah membahas berbagai masalah yang berkembang, khususnya mengenai situasi, kondisi, perkembangan bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankamnas.

Dikatakan, Raker yang berlangsung selama dua hari itu dilakukan secara terbuka dan penuh kebersamaan. Komunikasi dua arah antara kader-kader Golkar di Pusat dan Daerah lancar. Hal ini merupakan modal untuk melangkah lebih lanjut. Dengan demikian lanjutnya, tidak ada keragu-raguan bagi kita untuk melaksanakan seluruh program kerja Golkar, tandasnya.

Kemandirian

Wahono dihadapan kader-kadernya yang duduk di lembaga terhormat ini juga menyinggung tentang kemandirian. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan rekomendasi Munas IV, DPP Golkar terpilih diminta untuk merumuskan tentang kemandirian ini. Oleh karenanya, Ketua Umum DPP Golkar, di berbagai kesempatan telah mengemukakan tentang istilah kemandirian itu. "Mandiri" kata Wahono, mengandung makna kematangan intern, yang menciptakan kemampuan untuk berkembang sendiri, tanpa menimbulkan beban pada lingkungannya. "Mandiri berarti memperkokoh kedaulatan organisatoris sendiri, tanpa mengurangi hubungan-hubungan strategis dengan kawan-kawan seperjuangannya".

Namun, Wahono menegaskan, pengertian mandiri ini tidak berhenti sampai disini, tetapi justru dari kesamaan pengertian ini, diharapkan dapat dilaksanakan konsolidasi dan koordinasi program-program kerja Golkar pada masa-masa mendatang baik pada tingkat pengambilan keputusan, maupun dalam tingkat pelaksanaan program.

Untuk mewujudkan proses pengambilan keputusan dalam ruang lingkup keluarga besar Golkar, serta memanifestasikan kemandirian Golkar itu, menurut Ketua Umum perlu segera membentuk "dapur bersama", karena ini merupakan kebutuhan yang perlu segera diwujudkan, baik itu ditingkat pusat maupun di daerah-daerah. Penggunaan istilah "dapur", jelas Wahono, sekedar untuk memvisualisasikan adanya informasi dan data yang digodok untuk seterusnya dipergunakan dalam meramu kebijaksanaan organisasi selanjutnya.

Agar hemat

Mengenai istilah "tiga jalur", Ketua Umum dalam kesempatan itu mengingatkan, agar penggunaan istilah tiga jalur dapat secara hemat dipergunakan dalam forum-forum umum. Karena pada hakekatnya istilah tersebut adalah istilah intern Golkar.

Recalling

Menyinggung tentang lembaga infrastruktur politik kata Wahono, Golkar bertugas memberi masukan sebanyak mungkin kepada lembaga-lembaga suprastruktur politik. Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap kader Golkar dapat berfungsi menjadi media, baik sebagai penyalur aspirasi, sekaligus sebagai penjabar dan pengamal kebijaksanaan organisasi. Khusus masalah itu, Ketua Umum menghimbau kader-kadernya di lembaga Legislatif untuk giat bekerja meningkatkan profesionalismenya di segala aspek kegiatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Menghilangkan rasa takut, berani menyatakan apa yang benar adalah benar, dan apa yang salah, adalah salah. Pimpinan Golkar memberikan iklim dan suasana serta mendorong agar budaya ini berkembang demi suksesnya pembangunan bangsa. Dan DPP Golkar "tidak akan melakukan recalling secara sembarangan", sejauh para anggota Dewan dari FKP itu berpegang teguh pada hasil-hasil Munas Golkar, DPP tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk merecall keanggotaan mereka di DPR, tegas Ketua Umum Golkar.

Dengan ini diharapkan anggota FKP dapat mempertahankan dan meningkatkan menggeloranya kebulatan tekad agar sanggup mencanangkan aspirasi rakyat banyak dengan vokal dan lugas. Dengan demikian dapat memberi inspirasi bagi seluruh anggota FKP meningkatkan citra dan bobot dimasa yang akan datang dan semangat itu diharap tetap menyala, tegas Wahono.

Langkah ini dipandang perlu ditegaskan kembali, mengingat adanya berita-berita di media massa bahwa anggota DPR, jadi juga anggota FKP, kurang berbobot, kurang profesinal dan takut direcall. Dalam kesempatan itu Wahono menegaskan bahwa anggota FKP tidak kurang bobot, tidak kurang profesional dan tidak takut direcall.

Namun secara jujur diakui, mungkin masih perlu ditingkatkan profesionalismenya, karena tidak sedikit dari anggota FKP telah mencicipi asam garamnya politik. Dan kita ketahui bahwa seleksi anggota FKP itu telah melewati jenjang yang tidak dapat dilalui secara mudah, dan telah diadakan penelitian yang cukup mendalam pada waktu pencalonan, kata Ketua Umum DPP Golkar Wahono, yang saat itu didampingi seluruh anggota DPP Golkar mengakhiri pertemuan itu.□ (Wt)

Digitized by Google

Ketahanan Ekonomi Merupakan Kondisi Dinamis Bangsa

Pemerintah banyak memberi perhatian besar pada koperasi

Pimpinan pengurus Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) beberapa waktu lalu menghadap DPP GOLKAR, yang diterima langsung oleh Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, di Kantornya, Slipi Jakarta Barat.

Kedatangan pengurus KUKMI di DPP GOLKAR itu dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Yan Mokoginta untuk melaporkan tentang keberadaan, keberhasilan, tantangan dan berbagai kendala yang dihadapi para usahawan kecil dan menengah Indonesia di lapangan. Dalam kesempatan tersebut Yan Mokoginta melaporkan tentang permasalahan yang dihadapi KUKMI, misalnya masalah permodalan dan pemasaran. Terhadap hal ini Pengurus KUKMI tidak dapat berbuat banyak secara teknis pelaksanaannya di lapangan karena pada dasarnya KUKMI hanyalah memperjuangkan nasib dan perkembangan mereka secara Politis saja, ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, dalam pengarahannya mengemukakan, ketahanan nasional dalam bidang ekonomi adalah merupakan kondisi dinamis bangsa, yang berisikan keuletan, ketangguhan dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi, menangkal dan mengatasi setiap bentuk ancaman, tantangan, gangguan, hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung akan dapat membahayakan berlangsungnya kehidupan ekonomi bangsa dan negara.

Sadar akan hal itu, maka yang perlu disadari setiap usahawan dan industriawan dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, apakah ia termasuk pengusaha besar, pengusaha menengah atau keciL, perlu kiranya merasakan bahwa dirinya itu merupakan salah satu mata rantai dari jajaran ketahanan ekonomi negara dan bangsa.

Apabila salah satu mata rantai itu lemah, menurut Wahono, betapapun kuatnya mata rantai yang lain, tentu mata rantai yang lemah ini akan menjadi titik rawan, dan mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh lain.

Sesuai dengan amanat GBHN, Pemerintah sejak awal telah memberikan perhatian dan cukup banyak memberi kemudahan-kemudahan terutama dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil, khususnya ekonomi lemah ini. Wahono antara lain menyebutkan, dilancarkannya program pelaksanaan Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK). Selain itu Pemerintah telah memberikan perhatian dalam bentuk pendidikan, latihan teknik dalam upaya meningkatkan keahlian maupun kemampuan usaha dari saudara-saudara kita dari pengusaha kecil ekonomi lemah. Di samping itu juga pembinaan melalui koperasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan usahanya dengan berorganisasi, yang diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing para pengusah kecil.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Wahono, Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta Drs Iman Taufik yang saat itu mendampingi Ketua Umum GOLKAR itu, mengatakan keterkaitan antara pengusaha besar, menengah, kecil ataupun antar sektor yang selama ini dinilai lebih bersifat slogan dan hanya untuk konsumsi politis, menurut Iman Taufik perlu direncanakan suatu program keterkaitan yang lebih realistis. Namun keterkaitan itu haruslah tumbuh secara alamiah yang saling menguntungkan, tanpa harus dipaksakan, karena dunia usaha itu sendiri bersifat sangat luwes dan pleksibel, kata Iman.

Menyinggung masalah perkoperasian dan investasi, Iman Taufik mengemukakan, seyogyanya Koperasi digalakkan dan dicanangkan sebagai program nasional. Dan program pengembangannya harus bersifat alamiah, mandiri dan tumbuh dari bawah. Karenanya, program jangan

Digitized by Google

Golkar dan Kukmi punya hubungan aspiratip

terlalu bersifat sloganistis, namun lebih persuasif dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pengertian koperasi yang selama ini dinilai terlalu ditonjolkannya fungsi sosialnya (UU Koperasi No. 12), padahal sebagai salah satu pelaku ekonomi sesuai UU No.1/1987 tentang KADIN, maka koperasi haruslah mampu beperan sebagai badan usaha yang salah satu tujuan adalah mencari keuntungan. Karena itu Iman Taufik berpendapat, di dalam pendidikan kader-kader koperasi, hal-hal mengenai manajemen profesional harus ditekankan, dan jangan hanya manajemen administratif dari koperasi itu sendiri.

Menyoroti masalah investasi, Iman Taufik yang dikenal juga sebagai tokoh pengusaha dan pakar ekonomi ini, mengatakan perlunya terus ditingkatkan dan peningkatan citra pengusaha pribumi agar dapat disejajarkan dengan pengusaha-pengusah non pribumi. Terutama dalam hal profesionalisme, kredibilitas terhadap perbankan dan lain-lain, dalam menghadapi investasi PMA maupun PMDN yang jumlahnya semakin meningkat. Di Indonesia peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA ini sangat menonjol, namun yang jadi masalah adalah, kurangnya partner pengusaha nasional, terlebih-lebih di daerah yang dianggap kurang mampu dan kurang bonafide, kata Iman Taufik.

Untuk mengembangkan hal tersebut Iman Taufik mengemukakan, perlu dipikirkannya koordinasi dan pengaturan ruang gerak pengusaha pusat dan daerah, sehingga bidang-bidang usaha tertentu yang ditekuni oleh pengusaha menengah dan kecil selama ini tidak diambil alih oleh pengusaha besar. Iman Taufik melihat adanya gejala-gejala apatisme pengusaha-pengusaha menengah dan kecil. Mereka merasakan bahwa kesempatan berusaha yang ada dipersempit dengan masuknya pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, didukung dengan modal yang besar.

Hal ini sering kali menyebabkan pengusaha daerah yang umumnya menengah, kecil ini merasa terdesak. Seyogyanya pengusaha besar ini bekerjasama dengan pengusaha daerah dalam bidang-bidang tertentu. Dengan demikian akan membina kekuatan pengusaha daerah khususnya pengusaha menengah, kecil. Dengan demikian diharapkan pada gilirannya akan tercipta kekuatan ekonomi Indonesia yang tangguh dan sekaligus akan dapat menangkal gejolak-gejolak sosial. Dan ini juga merupakan unsur pemerataan yang juga merupakan salah satu unsur dari Trilogi Pembangunan, ujar Iman Taufik.

Diakhir pertemuan itu Ketua Umum GOLKAR juga menjelaskan hubungan aspiratif antara KUKMI dan GOLKAR yaitu dengan adanya UU No.3 dan 8 Tahun 85. Oleh karenanya, KUKMI tidak bisa menempatkan diri sebagai onderbow dari GOLKAR. Namun demikian GOLKAR tidak menutup mata terhadap hubungan historis, aspiratif emosional. "Kita merupakan satu perjuangan yang orientasinya sama yaitu kekaryaan dan tujuannya memperjuangkan kepentingan rakyat." Untuk itu Ketua Umum mengharapkan kader-kader KUKMI harus tetap menggelora, dalam rangka kita bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagaimana diketahui, kader GOLKAR berjuang bukan untuk kepentingan GOLKAR saja, tetapi berjuang untuk seluruh rakyat, karena kader GOLKAR itu merupakan kader Pancasila dan kader pembangunan.

Hadir mendampingi ketua Umum dalam kesempatan itu Wakil Sekjen Ir Usman Hasan, Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta Dr. Baramuli (wt)

Digitized by Google

Golkar Ingin Fair Dalam Berpolitik

Pertemuan 90 menit antara Menteri Dalam Negeri Rudini dengan delegasi DPP GOLKAR, yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, memperjelas kedudukan GOLKAR sebagai Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang mampu menampung dan menginventarisir anggotanya sekitar 27.614.314 orang dengan memiliki Kartu Anggota GOLKAR (KAG), di samping itu tercatat pula calon anggota GOLKAR sekitar 5 juta orang, yang kehabisan formulir KAG.

Atas dasar data angka anggota itu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono menegaskan, bahwa GOLKAR berupaya untuk mempertahankan prestasinya setelah berhasil mengumpulkan suara pemilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum) 1987 secara kesatria.

Bahkan GOLKAR tetap menampung pemilih yang menyalurkan aspirasi politiknya melalui GOLKAR. Apalagi pemilih itu nantinya dalam jumlah banyak, maka GOLKAR dengan senang hati menerima mereka. Sedangkan dalam Pemilu 1992 mendatang, GOLKAR akan mempertahankan apa yang telah dicapai pada Pemilu 1987 tersebut yaitu meraih 62.483.680 suara atau 74 persen dari warga yang menggunakan hak pilihnya sebesar 85.809.816 orang.

"GOLKAR ingin 'fair' dalam berpolitik dan menang secara kualitatif dalam Pemilu 1992. Namun, tidak ingin mengubah Undang Undang Nomor 1/1985 tentang Pemilu kecuali perbaikan dalam pelaksanaannya, agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, masalah peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama. Baik dari pihak penyelenggara (pemerintah), OPP maupun masyarakat pemilih," sambung Wahono.

Ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan pelaksanaan UU Pemilu itu, karena keluhan dari pihak partai politik (parpol) mengenai adanya tindakan over acting di kalangan anggota GOLKAR yang notabene merupakan para petugas di daerah. Sementara tindakan over acting dimaksud itu, menurut Wahono, adalah berkaitan dengan penyediaan tempat untuk kampanye supaya petugas sebaiknya secara bijaksana mengatur pemakaiannya. Sehingga tidak terjadi 'perebutan' tempat dan tidak bersikap kaku. Sedangkan di tingkat I, ada forum komunikasi dimana duduk didalamnya ketiga OPP dengan pemerintah dan tentunya masalah itu bisa diatasi.

Golkar tetap menampung aspirasi

"Bila kerja keras nanti mampu mengumpulkan suara yang lebih besar lagi, maka GOLKAR tidak akan menolak kenyataan itu dan sangat bersyukur. Juga, GOLKAR dalam mengumpulkan suara itu tidak ingin menang-menangan atau menang buto (raksasa) yang menakutkan. Tapi ingin menang secara kesatria serta tanpa memandang atau merendahkan orang lain," kata Wahono dengan sikap merakyat.

Kehadiran delegasi DPP GOLKAR ke Departemen Dalam Negeri ini memenuhi undangan Menteri Rudini selaku pembina politik dalam negeri, adalah dalam rangka untuk berkonsultasi tentang Undang Undang Pemilu sekaligus menyerahkan Buku Induk Anggota GOLKAR (BIAG). Dalam hal ini Rudini mengatakan, bahwa keinginan DPP GOLKAR untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilu itu sama dengan apa yang disampaikan oleh dua OPP lainnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebagaimana sikapnya adalah menampung, menginventarisasikan serta langkah selanjutnya akan dirumuskan antara pemerintah dengan ketiga OPP menjadi suatu konsensus bersama. Bahkan, masalah yang disampaikan ketiga OPP tersebut didengar dan akan mendapat pelayanan yang sama sesuai dengan undang-undang.

Dalam menanggapi masalah over acting yang disampaikan Ketua Umum DPP GOLKAR itu, Menteri Rudini menikai bisa saja terjadi di negara manapun karena masalah itu menyangkut masalah manusiawi dan juga tergantung tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan pengendalian emosi seseorang.

Sementara itu data angka atau jumlah anggota GOLKAR yang telah diungkapkan Wahono kepada wartawan seusai diterima Menteri Rudini, menurut data yang ada di Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPP GOLKAR bila dihitung pembagian sesuai dengan jumlah daerah tingkat I (propinsi), maka diperoleh jumlah anggota sebagai berikut; untuk Daerah Istimewa Aceh sebesar 5.392.78 orang anggota, Sumatera Utara 9.766.35 orang anggota, Sumatera Barat 11.336.45 orang anggota, Riau 5.586.20 orang anggota, Jambi 1.572.81, Sumatera Selatan 7.093.66 orang anggota, Bengkulu 1.004.20 orang anggota, Lampung 7.279.17 orang anggota, DKI Jakarta 11.892.14 orang anggota, Jawa Barat 33.578.44 orang anggota, Daerah Istimewa Yogyakarta 1.945.47 orang anggota, Jawa Tengah 29.181.90 orang anggota, Jawa Timur 66.959.50 orang anggota, Kalimantan Barat 8.170.17 orang anggota, Kalimantan Tengah 4.514.06 orang anggota, Kalimantan Selatan 6.299.65 orang anggota, Kalimantan Timur 2.412.20 orang anggota, Sulawesi Utara 4.176.39 orang anggota, Sulawesi Tengah 5.710.90 orang anggota, Sulawesi Selatan 27.908.38 orang anggota, Sulawesi Tenggara 5.449.47 orang anggota, Bali 7.077.64 orang anggota, NTB 5.464.83 orang anggota, NTT 5.859.73 orang anggota, Maluku 1.937.98 orang anggota, Irian Jaya 2.690.39 orang anggota dan Timor Timur 1.275.06 orang anggota.

Sedangkan delegasi DPP GOLKAR yang dipimpin Wahono ini didampingi oleh AE. Manihuruk, dr. Suhadi, Drs. Jacob Tobing selaku Ketua DPP GOLKAR dan Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Anang Adenansi. □ DT

Digitized by Google

Safari Bhakti Sosial AMPI Se-Jabotabek

Safari bhakti sosial AMPI di Suka Mulya

Gong berbunyi sebagai tanda dimulainya Safari Bhakti Sosial AMPI di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan khitanan massal se-Jabotabek. Kali ini penabuh gong, adalah Ketua Umum DPP Golkar Wahono dan sekaligus mencanangkan karya nyata pengabdian masyarakat kader-kader AMPI itu, untuk memperingati hari kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret ke-23.

Mengawali Safari Bhakti Sosial AMPI ini dilaksanakan di daerah kumuh jalan Suka Mulya, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan menampilkan 50 orang tenaga dokter yang tergabung dalam Tim Kesehatan AMPI. Atas potensi kader-kader AMPI ini, Wahono menilai, bahwa kader-kader ini merupakan kader yangmemiliki semangat pengabdian yang tinggi, gagah berani dan selalu memancarkan wajah cerah. Sehingga pelaksanaan Safari Bhakti Sosial ini mengandung arti dan makna positif, terutama dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Oleh karena itu, peringatan ini semata-mata sebagai suatu peringatan tradisi bangsa Indnesia bukan sebagai peringatan yang bersifat pemborosan dana serta tanpa mengandung makna positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, peristiwa sejarah yang terjadi pada 23 tahun lalu itu diperingati guna memahami nilai-nilai peristiwa sejarah tersebut bagi generasi muda, dan sebagai bekal modal perjuangan. "AMPI merupakan kader muda Golkar yang setia dan konsisten untuk berkarya nyata dalam kepentingan rakyat, dalam hal ini di bidang pelayanan dan memberikan pengobatan secara c uma-cuma. Hal ini tentu sangat tepat. Sebab, Golkar pun dalam garis perjuangan organisasi selalu memperjuangkan kepentingan rakyat atau nasional di atas kepentingan individu," tegas Wahono.

Wahono membuka pencanangan aksi sosial

Kemudian kehadiran dan penampilan Ketua Umum DPP Golkar di lokasi ini justru menambah semangat Tim Kesehatan AMPI untuk selalu tanggap

AMPI yang didukung dokter-dokter muda merupakan kebanggaan

Digitized by Google

terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, yang tidak hanya menitikberatkan pada pelayanan bersifat komersil dan sebaliknya, lebih menitikberatkan pada sifat kemanusiaan. Sebab, masyarakat yang sehat akan membantu pertumbuhan bangsa yangsehat pula, kata Wahono.

Sedangkan Ketua Umum DPP AMPI Agung Laksono pada kesempatan yang sama mengatakan, AMPI melaksanakan peringatan hari kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), karena Supersemar merupakan tonggak sejarah lahirnya Orde Baru. Ada tiga hal penting yang harus dicamkan, khususnya kalangan generasi muda, terutama bagi mereka yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan pada karya dan kekaryaan yang berkaitan dengan Supersemar. Pertama, Supersemar telah dipergunakan Menteri Pangad Letjen Soeharto (Presiden Soeharto sekarang) untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya sekaligus mantel-mantelnya di seluruh tanah air. Kedua, kita dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Ketiga, adanya peluang untuk mengamalkan Pancasila.

Untuk maksud itu, Agung Laksono menilai, peringatan yang dilakukan setiap tahun ini bukan sekedar sebagai peringatan saja. Tapi, dengan pernyataan ini kita harus selalu mengevaluasi dan introspeksi diri untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ketahanan nasional di bidang politik maupun bidang lainnya. Sehingga, kata Agung, semua ini dapat membuka peluang bagi kita untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia, menuntut partisipasi serta tanggungjawab bukan saja dari pemerintah, tapi juga seluruh rakyat dan kalangan generasi muda. Ini merupakan panggilan bagi AMPI untuk mengisi peluang-peluang di bidang pembangunan sebagai perwujudan daripada tanggungjawab generasi muda terhadap kepentingan nasional. Untuk menjawab tantangan itu, AMPI mendharmabhaktikan diri di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk pemberian pengobatan cuma-cuma, khitanan massal dan penyuluhan tentang kesehatan. Karena masalah itu, AMPI memandang bahwa kesehatan masyarakat ini punya arti penting bagi kelangsungan pembangunan nasional. Tanpa masyarakat yang sehat, tidak mustahil pembangunan nasional itu berjalan sukses sebagaimana adanya. Itu sebabnya, AMPI selalu hadir dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam persoalan kesehatan dan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berobat.

"Kegiatan Tim Kesehatan AMPI ini tentunya melahirkan sikap kesetiakawanan dan solidaritas sosial kader-kader AMPI yang menyandang nama pembaharuan dan pembangunan," sambung Agung Laksono.

Sementara itu Wakil Sekjen DPP Golkar Dr. Suhadi yang mewakili Ketua Umum DPP Golkar ketika membuka kegiatan AMPI di Kotamadya Bogor mengakui, Golkar sebagai salah satu komponen Orde Baru terpanggil untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 setelah tragedi nasional 23 tahun lalu. Dan kemudian mengisi pembangunan — cita-cita yang telah dicanangkan oleh The Found Father Republik Indonesia dan sudah lama ditunggu-tunggu, lalu diselewengkan yang disusul kelahiran Supersemar berati juga kelahiran Orde Baru —. Saat itu kita berketetapan hati untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, sebagai pengamalan Pancasila. Dalam momentum seperti ini, tambah Dr. Suhadi, Golkar merasa bangga melihat kader-kadernya yang berada di AMPI dalam mengisi kegiatan HUT Supersemar dengan kegiatan yang didambakan rakyat banyak, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa masalah kesehatan, kemiskinan dan kebodohan itu merupakan penyakit yang harus terus menerus kita tanggulangi. Karena, generasi demi generasi perlu tetap disadarkan sekaligus ditingkatkan terhadap persoalan semacam ini.

Khitanan, salah satu bhakti sosial

Dengan demikian, kehadiran AMPI bersama Tim Kesehatan AMPI yang didukung tenaga dokter muda tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Golkar. Apalagi AMPI adalah pengemban kepentingan rakyat dan harus mengabdi. Kita tidak sendirian malah beribu-ribu tergantung tindakan kita, yang kita sendiri tidak tahu dengan melihat anak-anak di masa depan nanti. Namun, kita harus mengembangkan dan membina anak-anak itu sebagai generasi muda yang sadar akan keberadaannya sebagai bangsa Indonesia. Sehingga sangat tepat kiranya apa yang telah dikerjakan oleh AMPI. Artinya, kader Golkar yang berada di AMPI dalam mengambil keputusan tidak berpikir di awang-awang tapi langsung menyatu dengan rakyat.

Pada kesempatan lain dalam acara kegiatan yang sama Ketua Umum DPP AMPI Agung Laksono tetap menitikberatkan pada keterkaitan dan keterlibatan unsur generasi muda (AMPI) terhadap masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, AMPI sebagai wadah pemuda sangat tertarik untuk memperhatikan hal ini dan terus menerus akan meningkatkan diri dalam memberi penyuluhan tentang kesehatan.

Tim Kesehatan AMPI yang diketuai Dr. Alex Hutagaol dan koordinator Dr. Tunggul Simanjuntak dalam rangkaian kegiatan bhakti sosial ini telah melayani pasien se-Jabotabek. Sekitar 8 ribu orang dan 200 orang anak dikhitan massal. Sedangkan jenis penyakit pasien yang ditangani rata-rata meliputi penyakit kulit, muntaber dan sesak pernapasan. Kemudian disusul donor darah dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan itu sendiri dimulai dari tanggal 19 Maret sampai 2 April 1989 dengan lokasi Jakarta Pusat, Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi, Cakung dan Jakarta Barat. □ (DT)

Digitized by Google

Peranan Wanita Punya Sumbangsih Besar Pada Perjuangan Bangsa

Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan HWK (Himpunan Wanita Karya) punya arti penting bagi kaum wanita. Terutama dalam ikut serta memberi sumbangan pemikiran terhadap proses perjalanan pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, Ibu Tien Soeharto ketika membuka puncak acara Peringatan Sewindu HWK di Jakarta mengharapkan, agar HWK di tahun mendatang sukses dalam meningkatkan peranan kaum wanita untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Cita-cita perjuangan bangsa itu, adalah kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna Mewujudkan cita-cita itu harus diupayakan melalui penjabaran pembangunan yang terus-menerus dilaksanakan. Tapi, kata Ibu Tien, kita semua harus sadar bahwa perjalanan pembangunan nasional kita itu masih panjang. Untuk itu, bila kita menengok ke belakang atau masa lampau, maka kaum wanita telah ikut memberi sumbangsih yang besar terhadap perjuangan bangsa dan mencapai kemerdekaan dan bahkan di masa pembangunan ini. Dengan demikian, pengalaman masa lampau yang sedemikian rupa itu secara tidak langsung memberi dan menimbulkan kepercayaan kaum wanita di zaman pembangunan seperti sekarang ini untuk melibatkan diri guna memberi sumbangan di dalam gerak pembangunan nasional, yang mengarah pada keberhasilan di bidang pembangunan seperti yang sudah menjadi cita-cita bangsa secara kongkrit dan nyata.

Puncak acara peringatan sewindu HWK

"Yang penting bagi kaum wanita, adalah menempatkan diri sebaik-baiknya dan secara terus-menerus menampilkan diri dengan mengambil peranan aktif serta konsepsional, sehingga pandangan kaum wanita dapat diarahkan ke depan. Apalagi masa depan itu, adalah masa yang penuh dengan tantangan-tantangan baru yang belum pernah ada di masa lampau. Untuk itu, kaum wanita perlu menyiapkan diri sedini mungkin. Baik sebagai ibu masa depan maupun sebagai potensi masa depan. Sementara salah satu segi penting yang harus dipersiapkan oleh kaum wanita ini, adalah penambahan ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan sebagai persiapan diri untuk menyongsong dan menghadapi tantangan-tantangan baru dimasa depan tersebut," tegas Ibu Tien.

Dengan menyadari kondisi dan situasi seperti itu, sudah menjadi tugas penting bagi organisasi wanita kita umumnya dan HWK khususnya sebagai salah satu organisasi wanita terbesar, tentu dapat berbuat banyak dan padahal kemampuan wanita kita belum menyeluruh menangani berbagai bidang pembangunan masyarakat. Kendati demikian, lanjutnya, sudah tampak ada upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum wanita. Ini suatu bukti adanya perkembangan peranan wanita dan biasanya peningkatan perkembangan itu dapat dilihat di lapisan masyarakat pedesaan. Sedang langkah berikutnya, adalah meningkatkan kemampuan-kemampuan awal yang telah berkembang dan menghimpun. Sehingga hal itu merupakan kekuatan besar secara nasional.

Dalam acara puncak HUT HWK sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional HWK, Ibu Tien menekankan agar kaum wanita Indonesia dapat memberi sumbangan bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Karena, pada era pembangunan nasional sekarang ini seluruh lapisan dan kalangan masyarakat turut memikul tanggung jawab terhadap proses perjalanan pembangunan nasional. Sementara itu, dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sendiri telah mengamanatkan kepada kita semua, bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, HWK yang sudah menyadari akan amanat GBHN itu secara langsung telah menjabarkan program

Digitized by Google

Pengurus HWK diterima Ketua Umum Golkar

kerjanya selaras dengan isi amanat itu dan juga dapat tercermin pada tema HUT kali ini, yaitu melalui Repelita V HWK menyongsong era tinggal landas dengan kader yang berkualitas. Dengan demikian, HWK hendaknya dapat mengambil suatu kebijaksanaan dalam menentukan program kerja, agar sesuai dengan GBHN yang akan menjadi program seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sudah ditentukan melalui Sidang Umum MPR yang lalu.

Gerakan Kaderisasi

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum DPP HWK Nani Sudarsono, SH, menilai dalam Rakernas ini HWK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sejak berakhirnya Munas II HWK tahun 1986. Di sini, bahkan HWK menegaskan rencana kerja selanjutnya yakni rencana kerja dalam jangka pendek dengan perincian kegiatan yang lebih kongkrit, nyata dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sehingga kehadiran dan keberadaan HWK di tengah masyarakat akan ditentukan oleh karya pengabdiannya, yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat - karya pengabdian para anggota organisasi meskipun kecil, tapi memiliki arti banyak bagi kemanusiaan.

Sehubungan dengan Hari Ulang Tahun ke VIII, HWK telah menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Kaderisasi (Diklat Kaderisasi), dimana penyelenggaraan diklat ini sebagai langkah awal daripada gerakan kaderisasi yang akan diselenggarakan pula di seluruh Indonesia. Gerakan ini diadakan agar menjelang era tinggal landas, HWK telah memiliki kader serba guna di dalam jumlah dan mutu yang dapat diandalkan serta berkarya dalam proses perjalanan pembangunan nasional yang akan datang. Untuk itu, kata Ketua Umum DPP HWK, organisasi wanita ini tidak akan mengejar jumlah kader yang besar. Namun, lebih menitikberatkan pada kualitas kader. Dan HWK sendiri berpegang teguh pada motto; 'Bukan yang banyak itu baik, tapi yang baik itu adalah banyak artinya' sehingga HWK berupaya keras untuk melahirkan kader-kader yang tanggap, tangguh, terampil, pintar, benar dan siap pakai dalam karya pengabdiannya.

Kemudian seusai puncak acara HUT Sewindu HWK ini, Ibu Tien Soeharto menyematkan lencana kader secara simbolis kepada peserta Diklat Kaderisasi sekaligus membuka resmi Rakernas HWK, kader secara simbolis kepada peserta Diklat Kaderisasi sekaligus membuka resmi Rakernas HWK, yang diikuti seluruh DPD Tingkat I HWK seluruh Indonesia minus daerah Timor Timur. Di samping itu, Ibu Tien Soeharto membuka pameran tekstil Indonesia dan membagikan piala Lomba Design Tekstil Indonesia.

Kemudian seusai puncak acara HUT Sewindu HWK ini, Ibu Tien Soeharto menyematkan lencana kader secara simbolis kepada peserta Diklat Kaderisasi sekaligus membuka resmi Rakernas HWK, yang diikuti seluruh DPD Tingkat I HWK seluruh Indonesia minus daerah Timor Timur. Di samping itu, Ibu Tien Soeharto membuka pameran tekstil Indonesia dan membagikan piala Lomba Design Tekstil Indonesia.

"Lomba ini suatu upaya untuk memelihara momentum pertekstilan Indonesia yang telah dicapai selama ini. Kita ingin melestarikan nilai-nilai budayanya dan mengembangkan motif tradisional dalam nilai modern hingga tetap diupayakan supaya nilai-nilai identitas dan ciri khas ke-Indonesia-annya," tegas Ibu Nani Sudarsono, SH.

Hadir dalam acara ini selain Ibu Tien Soeharto, adalah Ny. EN Sudharmono, Menteri Sosial Ny, Haryati Subadio, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, Mbak Tutut, peserta Rakernas HWK dan kader HWK.□

DT

Digitized by Google

Pembangunan Adalah Sebuah Pengorbanan

PEMBANGUNAN memang banyak menuntut. Tidak hanya dana dan daya, juga materiel dan spiritual. Tuntutan materiel, biasanya bisa diupayakan. Secara materiel, kebutuhan pembangunan diperoleh melalui berbagai cara. Dana yang dihimpun sendiri di dalam negeri, juga melalui pinjaman luar negeri. Tetapi tuntutan spiritual tidak bisa melalui pinjaman. Dia menyangkut soal keyakinan seseorang. Disini pengorbanan itu diminta.

Untuk pembangunan yang dimulai sejak tahun 1969 memang banyak sudah pengorbanan yang diberikan. Tidak sedikit pengorbanan itu. Untuk kepentingan pembangunan, ratusan keluarga di Wonogiri harus merelakan tanahnya untuk keperluan pembuatan waduk. Mereka mau mengerti, lalu pindah ke daerah transmigrasi yang memang lebih memberi kemungkinan untuk hidup layak. Ratusan rakyat di desa Mrica juga mengorbankan tanah dan tegalannya untuk pembangunan Bendungan Panglima Besar Soedirman. Dan banyak lagi yang sudah merelakan sebagian miliknya untuk kepentingan pembangunan.

Hari Kamis, 23 Maret 1989 didepan para petani di Mrica, Banjarnegara, Jawa Tengah, Presiden mengatakan "Demi Allah, Pemerintah tak akan Sengsarakan Rakyat". Suatu ungkapan yang cukup dalam artinya. Sesungguhnya, dari ungkapan tersebut Presiden hendak mengingatkan bahwa pengorbanan yang diberikan rakyat adalah juga demi hari depan mereka. Hari depan bersama, seluruh rakyat Indonesia.

DUA PULUH TIGA tahun lalu, almarhum Presiden pertama RI Ir Soekarno memberi Surat Perintah kepada Jenderal Soeharto (waktu itu Mayor Jenderal) untuk memulihkan keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional. Situasi waktu itu memang cukup tegang. Terjadi perang antara rakyat dan ABRI pendukung setia Pancasila melawan Partai Komunis Indonesia yang sengaja merobek-robek Pancasila.

Surat Perintah yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 1966 itu punya makna paling dalam. Selain untuk membubarkan PKI, juga merupakan kekuatan hukum untuk mengembalikan tata kehidupan bernegara pada ketentuan UUD 1945. Hal yang paling bermakna dari SP 11 Maret 1966 itu adalah sejak itu mulainya suatu kehidupan bernegara yang baru yaitu ORDE BARU.

Pembangunan ekonomi mulai ditata kembali, pembangunan sosial budaya, pembangunan politik dan pemantapan idiologi Pancasila menjadi titik sentral kegiatan kenegaraan.

Duapuluh tiga tahun setelah itu, banyak sudah yang dicapai baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan Hankamnas. Sebuah karya besar dari Orde Baru adalah diterimanya Pancasila oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dibidang ekonomi taraf hidup rakyat sudah jauh lebih baik dari di masa Orde Lama. Pendapatan per kapita yang pada tahun 1965 hanya US$ 112, sekarang telah naik menjadi US$ 850 hampir delapan kali lipat. Itulah makna yang paling otentik dari Surat Perintah 11 Maret 1966.

AWAL Maret, ramai dibicarakan soal Kedungombo. Warga masyarakat Kedungombo yang sering terlanda banjir, oleh pemerintah di transmigrasikan ke luar Jawa. Jika dilihat keadaan nyata mereka sebenarnya tidak lagi memungkinkan untuk hidup wajar sebagaimana mestinya. Lahan tak punya — kalau ada juga sedikit —, sering dilanda banjir dan cukup memprihatinkan.

Kalaulah mereka menyadari keadaan nyata keseharian mereka yang demikian memprihatinkan, tentu mereka akan rela dan dengan ikhlas meninggalkan tempat tumpah darahnya itu untuk membangun masa depan yang lebih baik di daerah baru (transmigrasi). Bisa dimengerti, secara psikologis, kecintaan terhadap tumpah darah tempat kelahirannya itu, membuat mereka berat hati meninggalkannya. Tetapi demi masa depan anak cucu, harusnya mereka lebih rasional melihat persoalan.

Faktor psikologis inilah yang sengaja dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk berusaha tampil sebagai pahlawan yang membela kepentingan rakyat. Padahal justru sebaliknya, mereka sengaja dipengaruhi untuk tetap dalam penderitaan yang telah berlangsung puluhan tahun itu. Anehnya, warga masyarakat tidak menyadari hal ini. Mereka terpengaruh karena diberi bayangan seolah-olah akan menerima ganti rugi yang lebih besar. Sementara bencana banjir terus saja mengancam tanpa ampun. Mereka lupa bahwa pengorbanan mereka ini adalah untuk meraih hari esok yang lebih cerah bagi anak cucunya. □

Digitized by Google

Afghanistan Yang Kian Bergolak

Perkembangan Afghanistan sekarang ini sangat menarik untuk diamati, bukan saja karena perang yang menghebat di antara pasukan pemerintah Najibullah melawan gerilyawan Mujahidin, tetapi kemungkinan eskalasi konflik di negara Asia Barat ini pun sangat kuat. Eskalasi konflik Afghanistan bisa terjadi antara Kabul melawan Islamabad, antara Kabul dengan Iran dan akhirnya antara AS dengan Uni Soviet.

Desember 1979, Pasukan Uni Soviet menyerbu masuk ke Afghanistan atas "permintaan" rakyat Afghanistan sendiri yang dijurubicarai Babrak Karmal yang kemudian dinobatkan menjadi presiden, menggusur resim terdahulu. Sejak itu pergolakan di Afghanistan memasuki tahap berdarah hingga sekarang. Negeri itu memang dikenal sebagai negeri yang penuh pergolakan dalam sejarah eksistensinya.

Tetapi serbuan pasukan Uni Soviet, ternyata tidak membawa negeri itu ke alam perdamaian dan kebebasan seperti yang dikumandangkan dalam pelbagai retorika diplomasi. Masuknya pasukan Soviet yang tadinya diminta untuk menyelesaikan kemelut di dalam negeri Afghanistan, malah menciptakan kemelut baru berkepanjangan yang akhirnya menggusur tentara Soviet sendiri untuk pulang kandang pada tanggal 15 Februari lalu sesuai dengan kesepakatan Jenewa April 1988.

Pergolakan berdarah berkecamuk sejak tahun 1979 sampai sekarang dan kita tidak dapat meramal secara pasti, kapan pertumpahan darah itu akan berakhir.

Mujahidin

Setelah pasukan Soviet menyerbu Afghanistan 1979, kelompok-kelompok dalam negeri yang tidak menghendaki pasukan asing hadir dan berkuasa di negara mereka melakukan perlawanan sengit. Kelompok perlawanan ini kemudian dikenal sebagai gerilyawan Mujahidin.

Mereka memang tergusur dari tanah airnya sendiri. Tetapi cinta dan semangat kepahlawanan menyebabkan mereka melakukan perang gerilya dari perbatasan Pakistan. Peshawar, sebuah kota Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan dijadikan pangkalan perjuangan mereka. Dari sinilah perlawanan terhadap pasukan Soviet dilancarkan dalam perang gerilya yang sudah berlangsung selama 10 tahun ini.

Pejuang Mujahidin terus bergerak maju

Soviet yang tidak sabar dengan pertempuran yang terlalu lama, kemudian mencopot Presiden Babrak Karmal dari kursi presiden, diganti oleh Najibullah. Karmal yang konon kini berada di Moskow, dianggap gagal memenangkan pertempuran untuk menciptakan perdamaian. Karmal dengan demikian dianggap gagal memobilisasi kepercayaan masyarakat Afghanistan kepada Soviet sebagai "pembawa perdamaian."

Dan dalam era Najibullah, pertempuran pun tak kunjung henti. Arus pengungsi yang mengalir deras keluar dari Afghanistan, direkrut oleh Mujahidin menjadi gerilyawan. Menurut catatan, sekarang ini sekitar 4 juta pengungsi Afghanistan berada di luar negeri. Tiga juta di Pakistan dan satu juta lagi berpangkal di Iran.

Intensitas perang Afghanistan mulai memasuki babak baru ketika Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Kremlin. Tenaga dan biaya yang harus dituangkan ke Afghanistan oleh rakyat Soviet sendiri dianggap sebagai pemborosan yang tidak perlu. Arus pemikiran seperti ini mendapat dukungan begitu kuat di dalam negeri Uni Soviet bersamaan dengan gebrakan perubahan dan restrukturisasi atau yang dikenal dengan glasnost dan perestroika yang menjadi platform kepemimpinan Gorbachev.

Atas dasar itu, maka Soviet mulai melepaskan sedikit demi sedikit komitment politiknya di Afghanistan, baik melalui meja perundingan maupun pengerahan pasukan ke medan tempur. Dan pada April 1987, dalam konferensi di Jenewa Soviet secara mengejutkan berjanji akan menarik tuntas pasukannya dari Afghanistan pada tanggal 15 Februari lalu. Dan janji itu ditepati.

Penarikan pasukan Uni Soviet dilakukan pada saat Najibullah belum sukses menggalang kekuatan di dalam negeri, baik secara militer maupun secara politik. Maka Mujahidin melihat ini sebagai momentum. Sehari setelah pasukan Soviet meninggalkan Afghanistan, faksi-faksi Mujahidin yang fundamentalis di Iran dan yang

Digitized by Google

moderat di Pakistan, berkumpul di ibukota Pakistan, Islamabad, membentuk sebuah dewan pemerintahan, Shura, (semacam parlemen).

Sidang Shura yang sebelumnya bentrok karena masalah pembagian kursi antara kaum fundamentalis dan moderat, akhirnya berhasil membentuk Pemerintahan Mujahidin di pengasingan. Beda pendapat kedua kelompok ini diakomodir secara memuaskan lewat pembagian jatah jabatan. Presiden Mujahidin dipegang oleh kelompok moderat, sedangkan perdana menteri jatuh ke tangan fundamentalis.

Sehari setelah pembentukan pemerintahan Mujahidin itu, maka negara pertama yang mengakuinya adalah Saudi Arabia, kemudian menyusul Bahrain lalu Sudan. Pengakuan ini merupakan kemenangan politik penting bagi Mujahidin. Dan momentum bagi perjuangan politik Mujahidin diperkuat lagi, ketika Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang bersidang di Riyadh pertengahan bulan lalu menghadiahkan kursi OKI kepada Mujahidin, bukan kepada pemerintah Kabul.

Ini dianggap kemenangan penting bagi Mujahidin karena secara de facto mereka lah yang menjadi wakil resmi bagi bangsa Afghanistan dalam organisasi beranggota 46 negara itu.

Kemenangan Mujahidin dalam OKI rasanya begitu mudah, berlainan dengan Iran yang gagal memenangkan secara total perjuangannya untuk memperoleh dukungan sidang bagi konfliknya dengan dunia Barat, terutama Inggeris, atas kasus buku *The Satanic Verses* (Ayat-ayat Setan), karangan novelis berdarah India, Salman Rushdie. OKI hanya mengabulkan tuntutan mengutuk Rushdie sebagai orang murtad dan memboikot penerbitnya, Viking Penguin. Sedangkan seruan Khomeini untuk membunuh Rushdie yang kini bersembunyi di Inggeris, tidak digubris oleh para menlu OKI.

Kursi Kabul dalam OKI memang selama 10 tahun terakhir dibiarkan kosong. Organisasi ini mencabut keanggotaan Afghanistan, segera setelah Babrak Karmal mengundang pasukan Uni Soviet memasuki negerinya untuk membelanya dalam pergolakan politik dalam negeri.

Perang Saudara

Mundurnya pasukan Uni Soviet dari Afghanistan, menyebabkan Najibullah kelabakan, karena pasukannya sendiri dianggap belum mampu untuk bertempur terus menerus melawanMujahidin. Belum lagi moral tempur pasukan pemerintah yang mulai merosot, sehingga banyak yang membelot ke kubu Mujahidin. Soviet memang berjanji akan membantu "suplai makanan" ke Kabul yang dilanda krisis pangan akibat blokade Mujahidin terhadap jalan-jalan utama distribusi, tetapi janji itu agaknya belum cukup menjamin ketenangan Najibullah.

Melakukan perlawanan sengit

Belum sampai sebulan, Mujahidin berhasil memindahkan medan perang yang dulunya di perbatasan Pakistan ke dalam wilayah Afghanistan. Jalalabad, kota ketiga terbesar di Afghanistan, sudah menjadi ajang pertempuran. Kota ini oleh Mujahidin ditargetkan menjadi ibukota sementara mereka, sebelum memasuki Kabul. Tentang situasi pertempuran di kota ini, belum ada kepastian yang bisa dipegang, karena masing-masing pihak mengklaim kemenangan. Tetapi yang bisa dipercaya bahwa pertempuran di sini cukup seru dan menimbulkan korban cukup banyak bagi kedua pihak.

Pertempuran di Jalalabad itu menunjukkan bahwa Mujahidin memang semakin memperoleh kepercayaan diri untuk memenangkan perang, sedangkan Najibullah semakin terpojok. Soviet yang berjanji akan mengirimkan "bantuan pangan" dinanti oleh Kabul dengan rasa cemas. Sementara Najibullah yang kebingungan menulis surat kepada pemimpin Soviet Gorbachev dan AS George Bush meminta agar semua pihak menahan diri dalam pertempuran di Afghanistan itu.

Seruan Najibullah ini terutama mengingatkan dunia bahwa Pakistan secara konsisten berada di balik perjuangan Mujahidin untuk menumbangkan pemerintahan di Kabul. Najibullah bahkan mengancam bila Pakistan tidak menghentikan keterlibatannya dalam mensuplai bantuan kepada Mujahidin, maka kemungkinan perang antara Afghanistan dan Pakistan tidak bisa terhindarkan lagi. Amerika pun dituding berada di balik perjuangan Mujahidin itu. Suplai makanan dan senjata dari AS dan Cina disalurkan lewat perbatasan Pakistan untuk menunjang Mujahidin.

Melihat gelagat perang yang semakin seru di Afghanistan sekarang ini, masalah yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, "mungkinkah negara itu terjebak dalam perang saudara yang berkepanjangan?". Dalam banyak hal, jawaban itu terletak pada kemampuan Najibullah, entah memenangkan perang secara total dengan Mujahidin sehingga mengakhiri pertempuran, atau menyerah dengan membiarkan masyarakat Afghanistan menemukan rekonsiliasi diri kembali. Masyarakat Afghanistan harus dibiarkan memilih Mujahidin atau mengikuti pemerintah yang sekarang ada.

Alternatif seperti ini kelihatan moderat, tetapi agaknya sulit terlaksana, karena "siapa yang telah mengalah

Digitized by Google

Afghanistan memasuki tahapan berdarah

begitu saja?". Mujahidin yang mulai meraih kemajuan-kemajuan penting di medan perang, tentu tidak akan membiarkan diri dilumat oleh Najibullah. Sedangkan Najibullah sendiri, tentu saja akan bertahan mati-matian dengan dukungan dan kekuatan militer yang kini tersisa padanya. Andaikata Mujahidin begitu sukses dan berhasil merebut Kabul dan Najibullah meninggalkan negeri itu ke Soviet, maka Mujahidin akan meraih apa yang menjadi cita-cita perjuangan mereka selama ini.

Babak Kedua

Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, campurtangan kekuatan asing yang berada di pihak Mujahidin, seperti Pakistan, Amerika dan beberapa negara Arab seperti Iran dan Arab Saudi, akan mengundang kemelut baru. Karena Soviet mungkin tidak akan tinggal diam begitu saja. Glasnost dan perestroika memang semakin kuat dianut di Kremlin. Tetapi Moskow pun tidak mengabaikan begitu saja posisi Afghanistan yang mempunyai arti tersendiri dalam geopolitik maupun geostrategi. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa ketika Mujahidin mulai mendekati Kabul untuk merebut ibukota negara itu, tentara Soviet akan menghadang lagi. Ini berarti babak kedua kehadiran Uni Soviet di Afghanistan akan berlangsung. Dan Mujahidin mungkin akan kembali tergusur ke hutan-hutan Afghanistan melanjutkan perang gerilya yang kita semua tidak tahu sampai berapa lama akan berlangsung.

Jika itu yang terjadi, maka Kabul mungkin akan menyeret negara-negara adikuasa ke dalam kancah peperangan terbuka di Asia Barat. Karena Pakistan dan AS yang selama ini diam-diam membantu Mujahidin, tentu tidak mau kehilangan muka bila kemenangan yang sudah di ambang pintu dimusnahkan kembali oleh kehadiran Soviet babak kedua.

Ini adalah analisa yang mungkin terlalu pesimistik. Tetapi peperangan adalah teka-teki, karena pertarungan politik dan militer yang menyertainya bisa berubah setiap saat.

Yang paling kita harapkan tentu saja rakyat Afghanistan dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa terlalu banyak dan lama mengumbar darah dan air mata. Tetapi bagaimana mencapai itu? Tidak ada jawaban yang paling menjamin bahwa perdamaian yang dicapai di sebuah kawasan yang berperang, tidak mengorbankan darah lagi. Sebab bagaimanapun juga suatu rejim yang tampil dengan mengandalkan perjuangan militer, tidak dapat diselesaikan lewat jalur perundingan semata.

Kemenangan militer bagi Mujahidin hanya akan menjamin perdamaian dan kelestarian di Afghanistan, bila kemenangan itu tidak terlalu lama atau dicapai dalam suasana stagnasi. Hal yang sama berlaku untuk Najibullah.

Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh Mujahidin di medan perang dan stamina perang gerilya yang begitu terjaga selama 10 tahun, mungkin akan menciptakan arogansi di dalam manuver diplomatik mereka untuk memperjuangkan kemenangan politik. OKI memang telah menghibahkan kursi Afghanistan kepada Mujahidin, tetapi sukses itu belum cukup. Bagaimana pun juga pemerintah Mujahidin itu baru diakui oleh sebanyak mungkin negara di dunia dan PBB untuk pada suatu ketika menjadi administrasi yang legal di Kabul.

Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah sikap Pakistan dan Amerika. Dua negara yang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, membantu secara konsisten perjuangan Mujahidin, bersikap ambivalen ketika pemerintahan sementara Mujahidin terbentuk pertengahan Februari. Pakistan lewat Perdana Menteri Benazir Bhutto mengatakan pengakuan yang terburu-buru kepada Mujahidin akan merupakan kesalahan politik luar negeri. Sedangkan Amerika bersikap menunggu sebelum mengaku. Karena menurut Gedung Putih sebuah negara tidak otomatis ada begitu diumumkan. Beberapa persyaratan legal seperti teritorial, rakyat dan pengakuan internasional harus dipenuhi terlebih dahulu.

Sikap ragu-ragu Islamabad dan Washington ini mungkin berkaitan erat dengan perubahan pemimpin di negeri itu. Pakistan di bawah Benazir Bhutto yang dinilai lebih menginginkan demokrasi, mungkin tidak akan terlalu mati-matian membela Mujahidin seperti pendahulunya mendiang Zia Ul Haq. Sedangkan presiden Bush

Digitized by Google

Para pejuang mulai meraih kemajuan

yang dinilai lebih *low profile*, mungkin saja tidak melihat keuntungan apa-apa membantu Mujahidin selama Soviet tetap setia dengan penarikan mundur pasukannya dari Afghanistan.

Sewaan

Di atas telah disinggung tentang penarikan tuntas sekitar 100.000 pasukan soviet dari Afghanistan setelah selama 10 tahun menduduki wilayah itu. Orang mungkin percaya bahwa desakan perestroika dan glasnost telah menyebabkan Gorbachev mau mengalah terhadap gempuran diplomasi terutama dari negara-negara barat. Keyakinan dan kesadaran dalam negeri Soviet bahwa selama ini terlalu banyak memberi kontribusi yang tidak bermanfaat kepada Afghanistan, menyebabkan Moskow rela meninggalkan Kabul tanpa kondisi apa-apa.

Bila ini benar, — dan menurut perjanjian Jenewa demikian — maka Afghanistan merupakan satu-satunya negara di dunia yang mampu memaksa Soviet mundur tanpa konsekuensi apa-apa. Pengalaman menunjukkan bahwa sebuah negara yang telah diduduki Soviet, seperti beberapa negara di Eropa Timur, tidak akan dikembalikan begitu saja.

Tetapi mengapa Afghanistan bisa? Kalau jawabannya adalah karena semangat glasnost dan perestroika semata, mungkin bisa diperdebatkan. Sebab bila berhitung tentang untung rugi dan efisiensi, maka sejumlah negara yang termasuk dalam Blok Timur di bawah payung Soviet juga mengundang konsekuensi biaya. Soviet adalah produsen minyak terbesar di dunia. Tetapi ekspor minyak Soviet tidak menyumbang terlalu banyak di pasar internasional, karena habis diberikan kepada negara-negara sekutunya sebagai biaya politik. Dengan demikian devisa minyak tidak terlalu menyumbang bagi pembangunan di dalam negeri Soviet sendiri.

Padahal masalah impor gandum untuk mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri kini diperdebatkan di dalam Politbiro bersamaan dengan gagasan reformasi pertanian yang diinginkan Gorbachev. Gagasan ini kendati ramai dibicarakan tetapi masih menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri sendiri.

Dengan demikian, penarikan mundur pasukan Soviet dari Afghanistan boleh jadi tidak disebabkan semata-mata oleh kemenangan glasnost dan perestroika. Sebab bila demikian, mengapa Soviet tidak berbuat serupa dengan negara-negara di Eropa Timur? Dan juga mengapa Soviet belum menghentikan bantuan kepada Vietnam yang diperkirakan mencapai 3 juta dolar setiap tahun? Juga terhadap Kuba dan Angola?

Jadi penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, mungkin karena di mata Soviet Afghanistan tidak lagi penting secara geostrategi maupun geopolitik. Namun demikian, penarikan itu telah melambungkan citra Gorbachev sebagai satu-satunya pemimpin di Kremlin yang lebih *concern* terhadap perdamaian global. Penarikan mundur itu mungkin disatu sisi mengurangi bobot sebuah negara adi daya, tetapi disisi lain adalah kemenangan besar bagi citra perestroika dan glasnost sendiri.

Penarikan mundur itu menyebabkan kepercayaan terhadap Gorbachev semakin tinggi di Eropa, termasuk panglima NATO yang mengatakan bahwa dia lah (Gorbachev) orang yang paling cocok untuk memimpin Kremlin sekarang ini.

Namun yang menjadi persoalan adalah Soviet yang masuk ke Afghanistan 10 tahun lalu dengan bendera "sebagai sahabat yang ingin menciptakan perdamaian" ternyata telah meninggalkan Kabul dalam suasana stagnasi. Kepergiannya telah dimanfaatkan oleh Mujahidin sebagai momentum untuk menggalakkan perang, bukan damai. Dengan demikian, kehadiran Soviet selama 10 tahun di Afghanistan sebenarnya lebih banyak berfungsi sebagai tentara sewaan perang, ketimbang kekuatan yang mengupayakan penyelesaian konflik. Dalam politik sangat sering fakta kalah terhadap argumentasi. Dan retorika diplomasi, sering kontroversial dengan keadaan yang sebenarnya. □ ss

Digitized by Google

Cheney Boss Baru Pentagon

Setelah kosong selama delapan minggu, Presiden Amerika Serikat George Bush akhirnya berhasil menggolkan calonnya untuk mengisi kursi pimpinan tertinggi di Pentagon, departemen vital dalam pemerintahan Amerika, dengan seorang nama yang jarang dikenal yaitu Dick Cheney, 48, anggota Kongres asal Wyoming.

Pertengahan bulan lalu, setelah heboh dan dikalahkan oleh Senat terhadap calon Bush sebelumnya, yaitu John Tower, 63, wibawa Bush yang baru bertengger dua bulan di Gedung Putih terasa goncang. Bulan madu dengan Senat yang sebelumnya terbina baik, tiba-tiba renggang. Sejumlah pengamat mengatakan, kekalahan John Tower, calon Bush untuk menjadi menteri pertahanan, sebagai bukti kelemahan Bush dalam memerintah. Tetapi terhadap analisa seperti ini, ada juga yang membantah. Mereka yang menolak mengatakan kekalahan Tower bukan karena Bush lemah dalam pemerintahan, tetapi Senat yang terlalu ngotot sehingga tidak bisa membedakan lagi antara masalah pribadi dan kepentingan negara.

Pengalaman Cheney dalam bidang militer belum terdengar

John Tower, senator asal Texas yang telah selama 24 tahun mengabdi pada lembaga Senat maupun Kongres, dan dalam empat tahun terakhir sampai dengan 1985 duduk bahkan mengetuai Komite Militer Senat, ditolak pencalonannya untuk memimpin Pentagon karena dianggap tidak bersih. Tower, menurut laporan FBI, mempunyai karakter tidak terpuji. Dia sering mabuk-mabukan dan bergaul terlalu bebas dengan banyak wanita. Dia pun dituduh tidak bersih karena menerima "sumbangan" dari beberapa perusahaan swasta yang menjadi rekanan proyek-proyek departemen pertahanan AS.

Senat yang didominasi oleh Demokrat akhirnya menolak dia dengan perbandingan suara 57-43. Sebelum meninggalkan Pentagon, Tower sempat mengeluh bahwa Senat memperlihatkan sikap permusuhan pribadi dengannya sehingga tidak melihat lagi kapasitas obyektif dia untuk menduduki kursi tertinggi di Pentagon. "Saya harap pengganti saya akan menjadi melekat dan mampu berbicara dalam bahasa dewa di Pentagon," ujarnya usai menerima kepastian penolakan Senat.

Tower yang sempat berkantor di Pentagon selama empat hari, akhirnya kembali ke Texas, menempuh hidup sebagai orang biasa, diiringi ucapan penyesalan sahabat kentalnya George Bush yang juga memohon maaf kepada Tower dan segenap keluarganya. Cacat Tower yang dikemukakan secara gamblang oleh pers Amerika, telah menjadi duri dalam keluarga Tower. Tapi dia mengakui bahwa mabuk, doyan bergaul dengan banyak wanita adalah aib masa lalu yang tidak akan terulangi lagi. Pengakuan dan tekad seperti itu rupanya belum cukup bagi Senat untuk menerimanya duduk di Pentagon.

Ketua Komite Militer Senat, Sam Nunn, seorang Demokrat yang sangat berperanan dalam pendongkelan To-

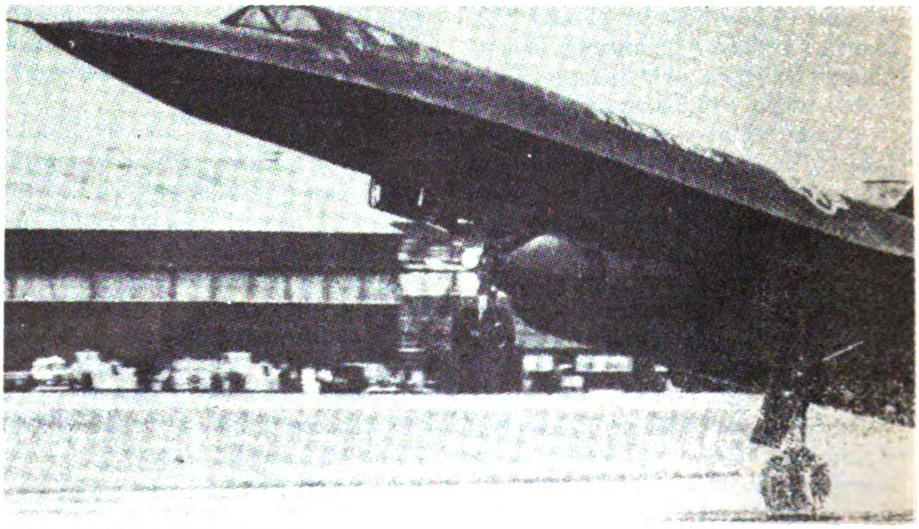

Pesawat kebanggaan AS

Digitized by Google

wer mengatakan, penolakan mereka terhadap Tower bukan karena alasan pribadi, tetapi demi kepentingan nasional. "Bagaimana mungkin seorang menteri pertahanan yang tidak melepas kebiasaan mabuk, mampu memerintahkan operasi pemboman dan penembakan rudal-rudal dengan presisi tinggi di malam hari?, tanya Nunn. Dia melanjutkan bahwa untuk jabatan menteri pertahanan, tidak saja dituntut kapasitas obyektif, tetapi juga integritas menyeluruh dari sang tokoh. Persyaratan ini mungkin terlalu mulia bagi Tower," kata Nunn.

Bagaimana pun juga kursi boss Pentagon tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Suara yang menuduh Bush lemah dalam pemerintahan pun bertolak dari kenyataan bahwa Bush adalah satu-satunya Presiden AS yang tidak mampu menentukan seorang Menteri Pertahanan walaupun sudah dua bulan bertahta di Gedung Putih.

Untuk menjawab keraguan dan tudingan itu semua, maka segera setelah Tower terjungkal, Bush menyebut sebuah nama yang ia calonkan untuk menjadi Menteri Pertahanan.

Nama Richard B Cheney, mungkin asing bagi telinga orang bukan Amerika. Tetapi di kalangan Senat dan Kongres dia sebenarnya orang lama. Dia duduk dalam Komite Keamanan Senat. Dan dalam Kongres dia adalah orang nomor dua dari Partai Republik.

Pengalamannya dalam bidang militer, apalagi tentang strategi militer global memang belum terdengar. Tetapi Bush yakin, Cheney mempunyai kapasitas untuk menjadi mahir dalam teknologi maupun diplomasi militer.

Namun nama Cheney mungkin saja dilontarkan oleh Bush atas dasar pertimbangan lain. Menghadapi Senat yang dikuasai mayoritas Demokrat, Bush harus memilih tokoh yang diterima oleh kalangan Demokrat maupun Republik. Dan Cheney memenuhi persyaratan itu. Dia adalah senator Republik yang diterima baik di lingkungan Demokrat juga. Pemikirannya jernih dan pandai bergaul. Lebih-lebih lagi, dia tidak mempunyai aib seperti Tower.

Tokoh yang dijagokan Bush itu ternyata mendapat dukungan penuh Senat. Dalam sidang pleno Senat, 92 anggota yang hadir mendukungnya. Ini modal besar bagi Cheney dalam menjalankan kepemimpinan empat tahun mendatang atas Pentagon. Dukungan Senat sangat penting karena Cheney menghadapi sejumlah persoalan dalam departemen pertahanan AS yang menderita pengurangan anggaran sebesar 3 milyar dolar untuk tahun ini sebagai upaya Gedung Putih menekan belanja militer serta mengurangi defisit anggaran negara.

Dengan demikian sejumlah proyek militer di lingkungan Pentagon yang dalam masa pemerintahan Reagan mendapat alokasi biaya tinggi - oleh sementara pihak dianggap berlebihan - mungkin ditunda atau bahkan dibatalkan karena pengurangan anggaran itu. Tetapi dengan sikap persahabatan yang diperlihatkan Senat, Cheney mungkin akan memperoleh dukungan Senat dengan mudah dalam memenangkan sejumlah rancangan pertahanan di masa yang akan datang.

Di dalam negeri, Cheney akan menghadapi masalah personil militer AS yang sudah lama tidak ada peremajaan. Sedangkan di luar negeri, dia bakal berhadapan dengan sejumlah masalah lain seperti status pangkalan militer AS di Filipina, Clark dan Subic yang semakin didesak oleh rakyat Filipina untuk dibongkar. Presiden Filipina Corazon Aquino memang masih mampu meredam suara dalam negeri dengan argumen bahwa pangkalan itu penting bagi keamanan di Filipina dan Asia pada umumnya, serta merupakan sumber pendapatan yang tidak sedikit bagi kas negara.

Dengan Jepang Cheney harus bekerja keras untuk memaksa Tokyo meningkatkan anggaran pertahanan di atas 1% GNP, untuk mengurangi beban Amerika di Timur Jauh. Sementara itu, pembuatan kapal tempur sendiri oleh Jepang, FSX, yang merupakan modifikasi dari pesawat tempur F-16 buatan McDonald Douglas. Kesepakatan antara Jepang dengan perusahaan militer AS ini menimbulkan kontraversi hebat, karena banyak yang melihat tidak ada gunanya secara ekonomi pembuatan FSX oleh Jepang sendiri.

Jepang, menurut pandangan Amerika sebaiknya membeli saja F-16 yang sekarang tersedia dengan biaya jauh lebih murah. Apalagi pembuatan F-16 sekarang ini tidak makan waktu terlalu lama seperti dulu. Amerika sebenarnya khawatir kesepakatan diam-diam McDonald dengan pihak Jepang ini, akan membuat Jepang terjun dalam industri pesawat tempur militer yang menyalahi kesepakatan yang kini masih berlaku bahwa Jepang tidak diperbolehkan memiliki angkatan bersenjata dan membangun industri militer. Tetapi pihak Jepang berkilah bahwa FSX dimodifisir untuk kepentingan penerbangan sipil. Kendati demikian para analis di Amerika beranggapan, pengalaman di bidang industri pesawat sipil adalah akses yang baik untuk membuat pesawat tempur.

Dengan Korea Selatan, Amerika pun menghadapi kesulitan karena semakin banyak kaum muda Korea yang tidak menginginkan lagi kehadiran militer AS di kawasan itu. Amerika sekarang ini menempatkan personil militernya di daerah demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan untuk menjaga perdamaian di kawasan itu, setelah Korsel dan Korut terlibat peperangan tahun 1959.

Di Eropa Cheney harus berpikir keras untuk memenangkan sebanyak mungkin kepentingan NATO dalam perundingan baik mengenai senjata jarak sedang maupun kekuatan konvensional serta senjata strategis dengan pihak Pakta Warsawa. Amerika menempatkan personil militernya di Eropa dalam pakta NATO. Belum lagi dia harus berjuang memenangkan rencana besar mantan Presiden Reagan tentang Star Wars yang bakal menelan biaya sangat besar.

Cheney diharap mampu menghadapi ini semua. Persahabatannya yang kental dengan Bush dan Menteri Luar Negeri James Baker, tiga tokoh paling penting dalam politik Amerika, memberi peluang baginya untuk memenangkan apa saja yang menjadi kepentingan Amerika di bidang bargaining militer baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri.

Persahabatannya dengan Senat pun merupakan modal yang baik untuk melambungkan citranya dalam diplomasi militer domestik maupun global. Tetapi Cheney harus menyadari bahwa persahabatan dengan Senat saja tidak boleh terlalu diandalkan, karena Senat Amerika terkenal garang dalam menilai para eksekutif, apalagi terhadap menteri pertahanan.

Bekas kepala staf Gedung Putih pada masa Gerald Ford ini, agaknya menyadari hal itu. Pengalaman bagaimana Senat mendongkel John Tower dari Pentagon merupakan pelajaran bahwa kepribadian dan integritas serta keahlian dalam bidang yang ditugaskan harus dipelihara secara proporsional. Senat Amerika terkadang sangat rasional, tetapi juga kadang-kadang irasional. Itulah manusia. □

Digitized by Google

Oleh: Ki Reso Kirotoprodjo

Hikmah Isra' Mi'raj Bagi Keberadaan Manusia Di Muka Bumi

Peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W. adalah dua peristiwa mukjizat keagamaan dalam satu kesatuan paket keimanan yang tak terpisahkan. Mukjizat sesungguhnya dalam konteks peristiwa sejarah agama, melibatkan di dalamnya laku dan lakon besar dalam pagelaran sejarah Islam.

Isra' adalah perjalanan Nabi Besar Muhammad S.A.W. pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsho di Baitul Makdis, Palestina. Perjalanan dari Masjid ke Masjid, dari kota Mekah ke kota Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan langit yang tinuntun oleh Allah SWT. atas hambanya: Nabi Besar Muhammad S.A.W. Hamba dan Allah-Nya, pemberi perintah embanan dan pengemban tugas terlibat dalam peristiwa besar ini. Mi'raj Nabi Besar Muhammad S.A.W. adalah perjalanan langit yang tinuntun dari Masjidil Aqsho ke Sidratul Munthaha yang berlangsung pada suatu malam tanggal 27 Rajab tahun ke-Sebelas Kenabian Muhammad S.A.W. atau diperhitungkan terjadi pada tahun 621 Masehi.

Dalam peristiwa besar ini Allah S.W.T. dan HambaNya (Nabi Besar Muhammad S.A.W) terlibat langsung didalamnya. Allah sebagai subyek kejadian. Nabi Besar Muhammad S.A.W. sebagai pelaku. Lakonnya ialah pagelaran hidup keagamaan yang didasarkan atas iman, spiritual, rohani dan sekaligus kejiwaan, moral dan etik sosial di sekitarnya.

Berita besar dari Al Qur'an

Berita besar dari Al Qur'an ini mengguncang keberadaan manusia dimuka bumi dari dahulu sampai sekarang. Guncangan berita besar itu tersebar dan terjadi dalam sejarah Islam. Perjumpaan dengan para Nabi dan Rasul sebelumnyapun terjadi dalam pagelaran besar ini. Perjalanan darat, udara dan langit yang diberkahi atau tinuntun Ilahi ini tersebut dalam ayat-ayat suci Al Qur'an, bukan ayat-ayat setan yang semilir dari hati kecewa.

Perjalanan Isra' diuraikan dalam Al Qur'an suci, Surat Isra' ayat 1, dalam kalam ilahi artinya sebagai berikut:

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil-Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Adapun mengenai kejadian Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW. diceriterakan dalam Al-Qur'an Suci, Surat An Najm, ayat 1 sampai dengan ayat 18, dalam kalam Ilahi sebagai berikut: Demi bintang ketika terbenam; Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru; Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya; Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya); Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat; Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.

Sedang dia berada diufuk yang tinggi; Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi; Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi); Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan; Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya?

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain; (yaitu) di Sidratil Muntaha; Didekatnya ada surga tempat tinggal; (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi; Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya; Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

Situasional dan kontekstual sejarah

Surat Perintah Allah SWT untuk melaksanakan Isra' dan Mi'raj diterima oleh Nabi Besar Muhammad SAW pada saat beliau mengalami goncangan batin yang memprihatinkan. Situasional yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam situasi krisis batin yang sangat berat.

Karena kematian istri dan pamannya, serta gencarnya perlawanan kaum Quraiys secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, slingkuh, main nilap dan fitnah. Dalam keadaan batin yang sangat ringkih, jiwa yang rapuh; sandaran perjuangan telah hilang (wafat), bagaikan pagar telah rebah, ibarat tanah tempat berpijak pun telah bergoyang, bahkan telah terbang, tali tempat berpegangpun telah putus. Hanya satu yang masih tegar dalam diri Nabi Besar Muhammad SAW, ialah: iman, keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri, dengan penuh keyakinan, disertai rasa "eling, percaya dan mituhu" kepada kehendak Allah yang Maha Wisesa, Maha Kuasa atas segala hamba-Nya; Apapun perintah-Nya dilaksanakannya tanpa bimbang dan ragu. Sikap seorang yang beriman tidak pantas miyar-miyur dalam tugas ke Nabian dan Kerasulan untuk melanjutkan lakon dalam perjuangan sejarah yang belum selesai.

Misi ke-Nabian dan ke-Rasulan yang dilimpahkan kepadanya, yaitu menyampaikan berita besar berita mukjizat Isra' Mi'raj dengan misi embanannya untuk mengerjakan sholat lima waktu bagi dirinya dan

Digitized by Google

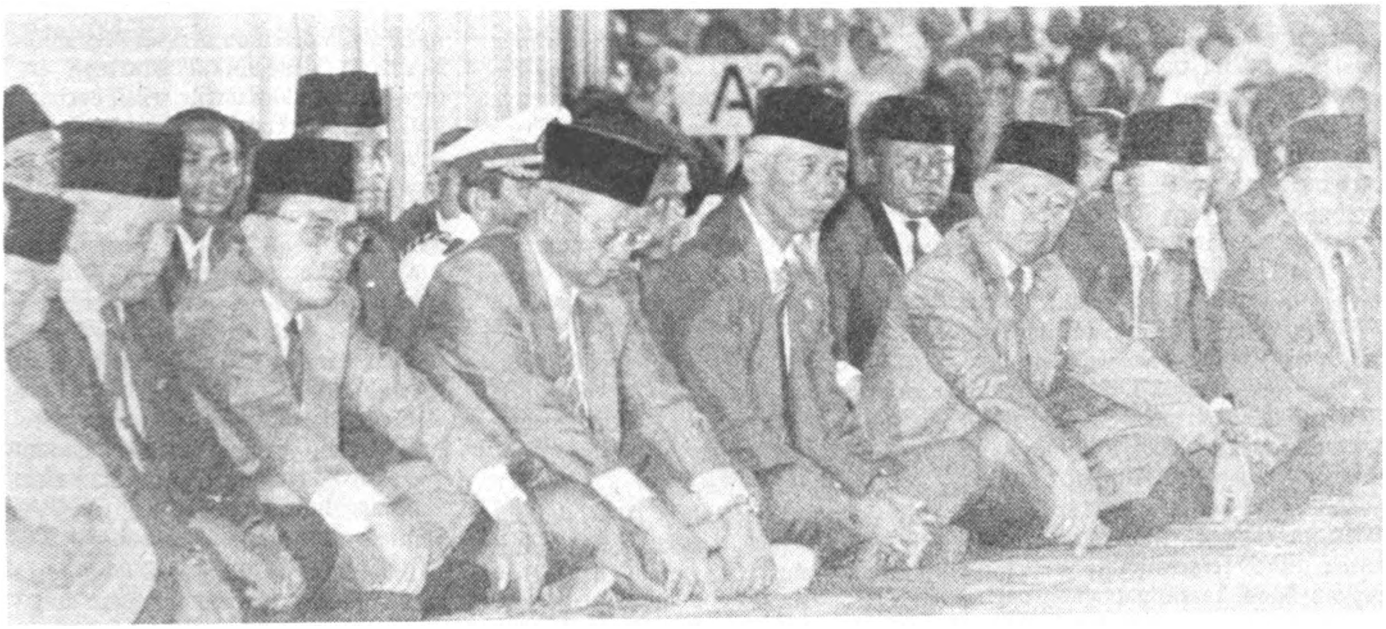

Manusia dalam ajaran Islam

bakti kepada Tuhan.

4. Sembah RASA, adalah penyesuaian rasa sendiri dengan rasa Ketuhanan (arti rasa disini bukanlah rasa pahit kalau minum obat atau rasa sakit kalau kena duri dan sebagainya) melainkan rasa yang mendalam (terhalus).

Sembah raga puniku, pakartine wong amagang laku; susucine asarana saking warih, kang wus lumrah limang wektu, wantu wataking wawaton. (pupuh 49)

Artinya: Sembah raga tersebut, ibaratnya orang yang masih menjadi calon pegawai, atau juga dikatakan "langkah pertama/permulaan". Pokok tujuan ialah guna memaksa dan membiasakan diri untuk "berdiamhening" bersamadi. Bagi orang Islam ialah menurut ketentuan bersembahyang lima waktu itu.

Keberadaan manusia dimuka bumi dengan keberadaan kebudayaannya sangat menentukan pembentukan citra manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang diberikan kemampuan untuk mengembangkan suatu epistemologi yang pada puncaknya tampil sebagai kemampuan membentuk konsep jalan kebudayaannya. Dengan kata lain: persepsi manusia tentang segala yang ditemuinya bisa dihimpun dan diramu sebagai konsepsi.

Gatra manusia dalam ajaran Islam sangat tinggi dan dimuliakan Allah tersebut dalam Al-Qur'an ayat 30 Surat Al-Baqarah yang artinya sebagai berikut :

"Aku hendak jadikan khalifah di bumi".

Dengan sambungan pada ayat berikutnya (ayat 31 surat yang sama) Al-Qur'an menyatakan; artinya sebagai berikut:

"Dan kepada Adam diajarkannya nama-nama segalanya"

Lebih daripada itu kemuliaan atau keunggulan manusia dimuka bumi itu disebutkan juga dalam Surat Al Isra' ayat 70, artinya sebagai berikut:

"Dan telah kami muliakan Bani Adam serta Kami angkat mereka didaratan dan di lautan".

Dalam pada itu terkandung suatu peringatan bagi manusia dalam hidup dengan kebudayaannya bisa terperosok sampai pada derajat yang serendah-rendahnya, dalam aktualisasi dirinya ia mengabaikan segala petunjuk (hidayah) yang sudah disampaikan kepadanya melalui firman Allah Surat Attin ayat 4,5, dan 6 yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan sebagai "akhsani taqwim" namun dalam pada itu iapun bisa tergelincir pada suatu kerendahan yang serendah-rendahnya tingkat "asfala safilin", artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

"Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya" (neraka).

"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."

Dari rangkaian ketiga ayat Surat At Tiin itu menunjukkan bahwa "akhsani taqwim" sebagai yang disebutkan dalam bahasa Inggris dalam terjemahan M. Pickthall sebagai "The best Stature" adalah keadaan yang tergantung dipenuhinya persyaratan (Condisional), syarat mana jelas dari ayat berikutnya.

Tugas manusialah untuk memenuhi persyaratan itu, dan hanya dengan aktualisasi diri yang diusahakan memenuhi persyaratan itu dengan mengerjakan sholat selain ia akan menerima ganjaran juga dengan shalatnya itu pula akan tercapai tingkat *"the best stature"*. Oleh karena itu di dalam surat An Kabut ayat 45 Al Qur'an menggariskan "kerjakanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan yang jahat (keji) dan yang mungkar." Begitu pula al Quran surat Al Baqarah ayat 43 menyebutkan, artinya sebagai berikut:

"Dan dirikanlah shalat, dan keluarkanlah zakat, tunduklah ruku'lah bersama-sama orang-orang yang pada ruku".

Dengan konsekwensi logis makna wardi shalat sebagai hikmah dari peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW. bagi keberadaan manusia dimuka bumi dengan predikat citra manusia dalam ajaran Islam ditempatkan sebagai makhluk yang potensial baik (pinilih) dan aktualisasi diri yang baik dengan patuh mituhu pada pedoman-pedomannya.

Itulah sebabnya maka sangat sentral sekali dalam pemikiran Islam tentang manusia dengan pengertian ijtihat dengan ikhtiar sebagaimana Allah firmankan melalui surat Ankabut ayat 6 "Dan barang siapa berupaya, maka sesungguhnya ia berupaya untuk dirinya".□

Digitized by Google

pengikutnya, seluruh ikutannya terkena perintah ini, dan disampaikannya keseluruh penjuru dunia "sholatlah sebagaimana aku sholat". Ini suatu ajaran kebenaran sejati yang dipetik dari peristiwa Isra' Mi'raj tigabelas setengah abad yang lalu.

Keteguhan dan ketegaran jiwa, pribadi Nabi Besar Muhammad SAW untuk menyampaikan ajakan sholat yang diterima langsung perintah ini dari Allah SWT, mencerminkan sikap laku dan rohani terpuji, tidak slingkuh menyembunyikan atau mengabaikan perintah suci kang ginayuh-luhur kang kahesti dalam kandungan makna wardi sholat-berdasarkan keyakinan dan kepercayaan penuh (suatu act of faith), tidak tergoyahkan oleh goncangan badai tantangan yang bagaimanapun besar kecil ujudnya. Inilah suatu sikap dan perilaku seorang hamba yang berhamba kepada Allah SWT seorang yang percaya sepenuhnya dan sumarah kepada-Nya (true believer).

Pemahaman sholat

Sebagaimana perintah mengerjakan sholat diterima langsung oleh Nabi Besar Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj setelah bermunajat berserah diri kepada-Nya. Ini suatu hal yang sangat khusus dalam syariat agama Islam. Perintah sholat bukan perintah politik. Bukan perintah Negara juga bukan perintah Piagam Jakarta, dan sebagainya. Perintah sholat sangat khusus dan pribadi. Keberadaan manusia dimuka bumi terkait dengan perintah mengerjakan sholat secara khusu', khusus dan sangat pribadi; maka pemahamannyapun sangat luas dimensinya. Satu di antaranya, pemahaman sholat dan syariat tidak menutup kemungkinan dilakukan secara pemahaman kebudayaan, seperti yang dikandung dalam ajaran "WEDHATAMA", sebagai berikut ini:

Lire saringat iku keno ugo ing aranan laku; dhingin ajeg kapindone ataberi; pakolehe putraningsun nyenyeger badan mrih kaot. (pupuh 54).

Artinya: Yang dimaksud sarengat itu ialah cara lakunya serba teratur tertip dan tekun. Dengan demikian hasilnya akan membuat sehat wal afiat dan memiliki kebiasaan hidup bersikap teguh dan tenang.

Wong seger badanipun, otot daging kulit balung sungsum, tumrah ing rah memarah antenging ati nunungku, angruwat ruweding batos. (pupuh 55)

Artinya: Orang yang badaniyahnya sehat, yakni otot, daging, tulang belulang, sungsum, otak dan sebagainya tidak sakit, demikian pula mengalirnya darah teratur, maka semua itu akan mempengaruhi hati dan fikiran menjadi teguh-tenang dan sebagainya. Yang seterusnya membuat pula tenangnya Panca-indera sebagai batu loncatan untuk melakukan sembah cipta.)

Samengko sembah kalbu, yen lumintu ugo dadi laku, laku agung kang kagungan Narapati, patitis tetesing kawruh, meruhi marangkang momong. (pupuh 58).

Artinya: SEMBAH CIPTA (kalbu) itu sembahnya angan-angan luhur (manas luhur) kepada Tuhan. Pertama: Ulah nalar (pikiran) agar mengerti akan peraturan Kasunyatan. Kedua : Harus menguasai manas rendah, agar menuruti peraturan, juga harus menguasai (mangreh) nafsu 4 perkara mutmainah, supiah, luamah, amarah). Rasa hati (badan astral) termasuk nafsu tadi, adalah daerah kekuasaan (CIPTA, sedang Cipta Luhur itu, ratunya diri yang patuh kepada Tuhan. (Menerima perintah Tuhan yang terasa dalam Pokoknya Rasa ROSING RASA).

Karena tujuan Sembah Cipta itu adalah membuat sucinya kalbu, maka cara membersihkannya tidaklah dengan air, melainkan dengan perbuatan KARSA (Kehendak/Hasrat)nya antara lain: berlaku tertib, teliti, berhati-hati, tetap, tekun, terbiasa, betapaun sulit dan beratnya, hingga akhirnya menjadi watak (kebiasaan). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah senantiasa "Ingat" dan "Waspada".

Semengko insun tutur, sembah catur: supaya lumuntur. Dhihin: raga, cipta, jiwa, rasa, kaki; ing kono lamun tinemu, tandha nugrahaning Manon. (pupuh 48).

Artinya: Sekarang saya akan bertutur kata, perihal empat macam "sembah", agar supaya dianut, Yaitu: Sembah RAGA; Sembah CIPTA; Sembah JIWA, dan Sembah RASA.

Bilamana hal itu bisa dikuasai serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka itulah pertanda telah memperoleh Rakhmat Tuhan. Adapun pengertian akan Empat macam Sembah tersebut antara lain:

1. Sembah RAGA, Pada lahiriah, orang itu harus berusaha mencari ilmu pengetahuan yang wajar dan masuk akal (Rasio dan Logika).
2. Sembah CIPTA, adalah paduan/Konsentrasi antara mental dan astral yang harus menuruti Hukum-Hukum/Azas-azas ilmu pengetahuan yang hendak dikajinya (Kasunyatan).
3. Sembah JIWA, adalah lahir batin tunduk taat serta tawakal dalam ber-

Perintah sholat sangat khusus dan pribadi

Digitized by Google

Oleh: Drs HM Irsyad Sudiro, Ketua Dep. Seni Budaya DPP GOLKAR

SENI BUDAYA DAN GOLKAR

Jika kita sebut kata Seni Budaya, maka yang tergambar dalam pikiran kita adalah sejumlah bentuk atau hasil kesenian, misalnya musik, tarian, lukisan, patung, drama, sastera, film dan sebagainya. Selain itu tergambar pula para seniman dengan citra yang bermacam-macam, ada yang glamour dan ada pula yang eksentrik.

Kemudian jika kita sebut GOLKAR, maka yang tergambar adalah sebuah organisasi politik yang sibuk dengan rapat-rapat untuk membicarakan berbagai permasalahan yang serius dan kadang-kadang tegang dan dan penuh rahasia. Selain itu tergambar pula orang-orang yang berbaju safari membawa tas penuh dengan berkas-berkas dokumen.

Lalu sekarang bagaimana gambaran yang timbul jika disebut Seni Budaya GOLKAR atau Departemen Seni Budaya GOLKAR. Mungkin di antaranya ada yang ingat sebuah acara di TV-RI yaitu Aneka Ria Safari. Bahkan barangkali cukup banyak orang yang berasosiasi bahwa Seni Budaya GOLKAR identik dengan Artis Safari.

Memang tidak bisa disalahkan apabila ada orang yang untuk sementara mempunyai kesan hanya Artis Safari itu kegiatan/milik GOLKAR, karena sesungguhnya segenap pengasuh dan seniman/seniwati Artis Safari adalah anggota GOLKAR bahkan kader GOLKAR. Walaupun gambaran yang sesungguhnya tentang Seni Budaya GOLKAR tidaklah sepenuhnya diwakili hanya oleh Artis Safari. Masih banyak lagi bidang dan bentuk kegiatan yang berada dalam lingkup Seni Budaya GOLKAR selain Artis Safari. Gambaran yang utuh tentang ruang lingkup Seni Budaya GOLKAR memang masih perlu ditumbuhkan serta dikembangkan, baik di kalangan intern GOLKAR sendiri maupun di kalangan masyarakat luas. Bagaimana caranya dan untuk apa, marilah kita bersama-sama mencari dan menemukan jawabannya.

Seni Budaya dan GOLKAR mempunyai subyek dan obyek yang sama yaitu manusia, baik perorangan maupun kelompok. Bedanya kalau Seni

HM Irsyad Sudiro

Budaya menyentuh pada cita rasa manusia, sedangkan GOLKAR menyentuh pada cita, karsa dan karya yang lebih kompleks. Lalu apakah keduanya dapat dipadukan, baik bentuk maupun kepentingannya? Tentu saja dapat, mengapa tidak? Nah, di sinilah perlunya ada Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR yakni memadukan kepentingan kedua hal yang pada dasarnya memang memiliki berbagai kesamaan baik subyek, obyek, tujuan dan kepentingannya.

Jika kita sejenak mengingat kembali tujuan nasional kita sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain disebutkan *"... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."* kemudian dikaitkan dengan sila ke-2 dari Pancasila yaitu *Kemanusiaan yang adil dan beradab* yang seterusnya pada Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 32 Alinea-1 berbunyi, *"Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya."* Maka jelaslah semuanya itu bahwa baik Seni Budaya maupun GOLKAR mempunyai kerangka acuan yang sama dan oleh karena itu keduanya dapat berada pada satu titik temu.

Hakikat Seni Budaya adalah manifestasi manusia dan kemanusiaan dalam kualitasnya sebagai insan makhluk Tuhan yang dimuliakan serta diberi kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan Seni

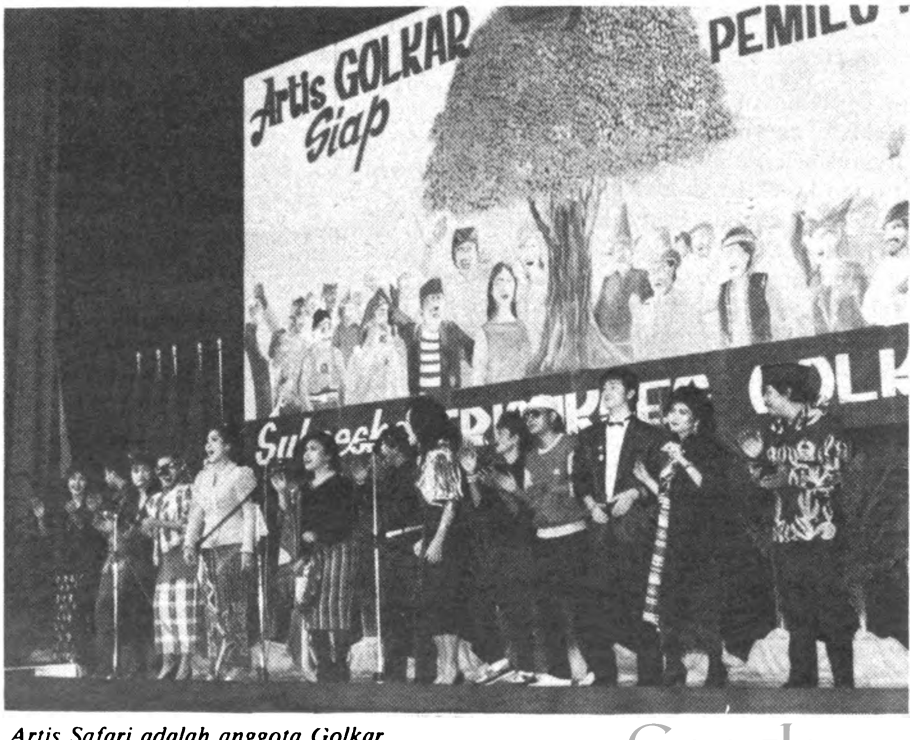

Artis Safari adalah anggota Golkar

Digitized by Google

Seni budaya adalah potensi batiniyah

Budaya ini manusia dibedakan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati lain bahkan dengan malaikat serta setan. Penggerak Seni Budaya adalah potensi batiniah yang mampu mendorong gejala manusia untuk mengenali, menggambarkan dan memanifestasikan hal-hal yang indah dan luhur yang tidak terlalu berlebihan bahwa itu juga mengandung sifat Ilahiah.

Di lain fihak hakikat GOLKAR adalah gerakan manusia dan kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan kolektifnya mewujudkan cita-cita luhur yang muaranya kebahagiaan dengan segala kompleksitasnya yang kerangkanya ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dan itu tidak lain juga dalam lingkup nilai dan cita-cita luhur yang terkait erat dengan posisi insan hamba Tuhan.

Dari penggambaran di atas maka dapat kita temukan adanya tiga titik temu antara Seni Budaya dengan GOLKAR yaitu *pertama* pada cita-cita bangsa, *kedua* pada manusia dan kemanusiaan dan *ketiga* pada Ketuhanan. Dalam pengembangannya bisa dipertemukan hanya pada satu titik, dua titik atau tiga titik sekaligus, tergantung konteks kepentingan masing-masing. Namun yang pasti dalam konteks kepentingan yang manapun ruang lingkupnya tetap berada dalam batas pengamalan Pancasila.

Dalam operasionalisasinya Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR akan senantiasa mengembangkan semua aspek yang sejauh mungkin mendorong ke arah tercapainya keserasian antara naluri yang dibawa oleh Seni Budaya dan GOLKAR. Atau dengan kata lain Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR akan selalu mengupayakan kesemarakan Seni Budaya dan GOLKAR melalui program-program yang sesuai dengan naluri masing-masing dengan sejauh mungkin menghindari terjadinya berbagai bentuk konflik, saling mencurigai dan saling menyalahkan. Penegasan yang demikian penting dikemukakan oleh Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR agar tidak timbul keraguan dari semua fihak dalam memacu diri untuk berprestasi di bidang masing-masing.

Tentang bentuk-bentuk program yang lebih konkret untuk sementara ini masih berupa kegiatan melakukan inventarisasi, orientasi lapangan dan mengadakan pendekatan dengan berbagai kalangan yang terkait. Dikandung maksud dalam pertengahan tahun 1989 ini akan diselenggarakan forum nasional yang mengikutsertakan Biro Seni Budaya dari seluruh Indonesia. Untuk persiapan Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR sedang menyusun Tim Kerja dan konsep operasional pelaksanaan Program Umum GOLKAR dengan mengindahkan semua hasil keputusan Munas IV GOLKAR bulan oktober 1988 yang lalu.

Dengan menggambarkan luasnya ruang lingkup tugas Seni Budaya GOLKAR tersebut, maka untuk sementara terjawablah bahwa Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR tidaklah sekedar mengurus Artis Safari meskipun itu merupakan bagian penting dan telah menunjukkan hasil yang konkret dan positif. Namun di samping itu berbagai bentuk kegiatan lain yang meliputi sejumlah cabang Seni Budaya yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat dari semua lapisan diupayakan untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan daya dukung yang ada, di samping kemungkinan adanya faktor hambatan-hambatan yang harus dihadapi. Prinsip memelihara yang telah ada dan mengembangkan yang baru merupakan sikap yang mendasari setiap langkah Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR. Semoga berhasil dengan mendapat dukungan dan partisipasi dari semua fihak.□

Digitized by Google

Maria Sugiharto

JUMENENGAN MAS MANGKUBUMI

Jumenengan, atau Pemahkotaan atau Coronation Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwono X telah usai, dan telah banyak uraian yang menyertainya, disamping cerita-cerita dibaliknya yang mengasyikkan, karena Mangkubumi memiliki figur yang gagah serta berwajah ganteng, apalagi beristerikan seorang wanita yang cantik serta sarjana, memang pantas menjadi kembang lambe atau pembicaraan umum, dalam konotasi baik dan positif. Secara bergurau banyak yang mengatakan bahwa seandainya ada produser film yang ingin membuat film tentang Pangeran Mangkubumi ini, yang penampilannya mulai menonjol semenjak ayahandanya wafat, tidak usah khawatir memilih seorang bintang film untuk memegang peranannya, karena bintang film *Deddy Mizwar*, pemegang piala Citra 1987, memiliki wajah yang sangat mirip dengan Sang Pangeran.

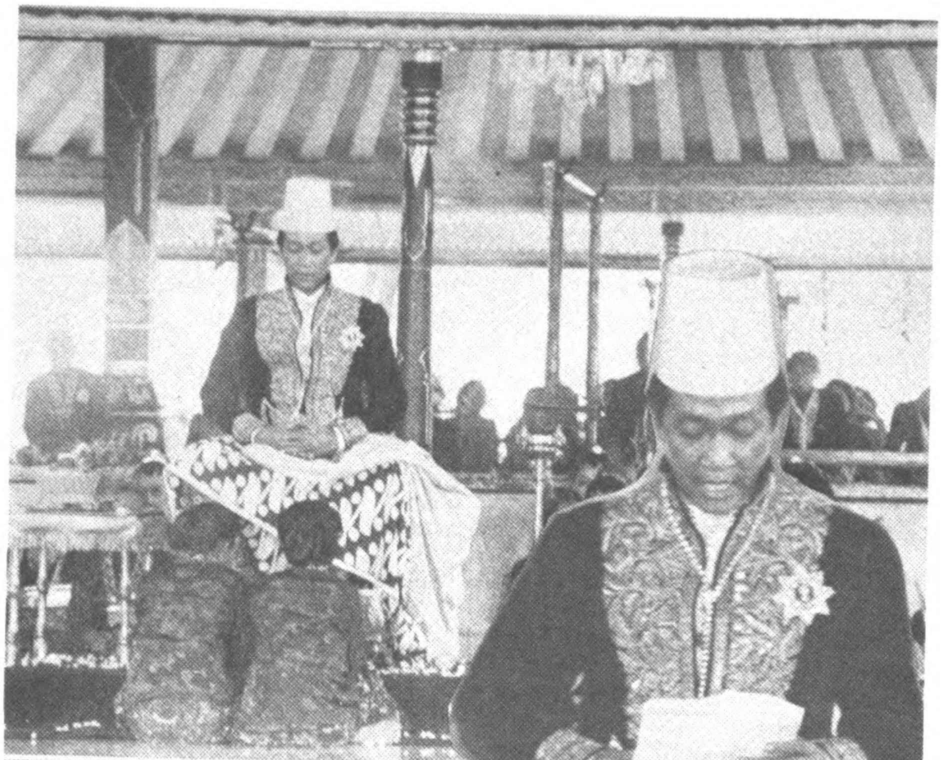

Pemahkotaan Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwono X

Digitized by Google

Para abdi dalem ikut memeriahkan kirap Sultan Hamengkubuwono X

Pangeran Mangkubumi, yang nama kecilnya Herjuno Darpito, serta mendapat panggilan akrab dari teman-temannya dengan Mas Herjun atau Mas Jun saja, memang sangat merakyat, dan hidup dengan *low profile,* tidak menonjolkan tentang ke Pangeranannya. Mengungkapkan tentang siapa Mangkubumi, dan tentang beberapa segi *gaibnya* mengenai Keraton Yogya, akan lebih menarik untuk dikemukakan di dalam karangan ini, karena penulisan-penulisan tentang *Jumenengannya* telah banyak diungkapkan secara menarik oleh banyak fihak.

Siapa Mangkubumi, yang dulunya akrab dipanggil Mas Herjun.

Berbicara tentang calon Raja, kelahirannya, serta tanda-tanda atas datangnya di dunia ini yang disertai hal-hal diluar jangkauan logika, tergantung yang menerimanya. Kecenderungan untuk menempatkan diri kepada pendapat Believe it nor Not atau Percaya atau Tidak, akan lebih baik, karena hal-hal yang diluar logika manusia nyatanya telah terjadi, dan diakui oleh, justru yang telah menge-

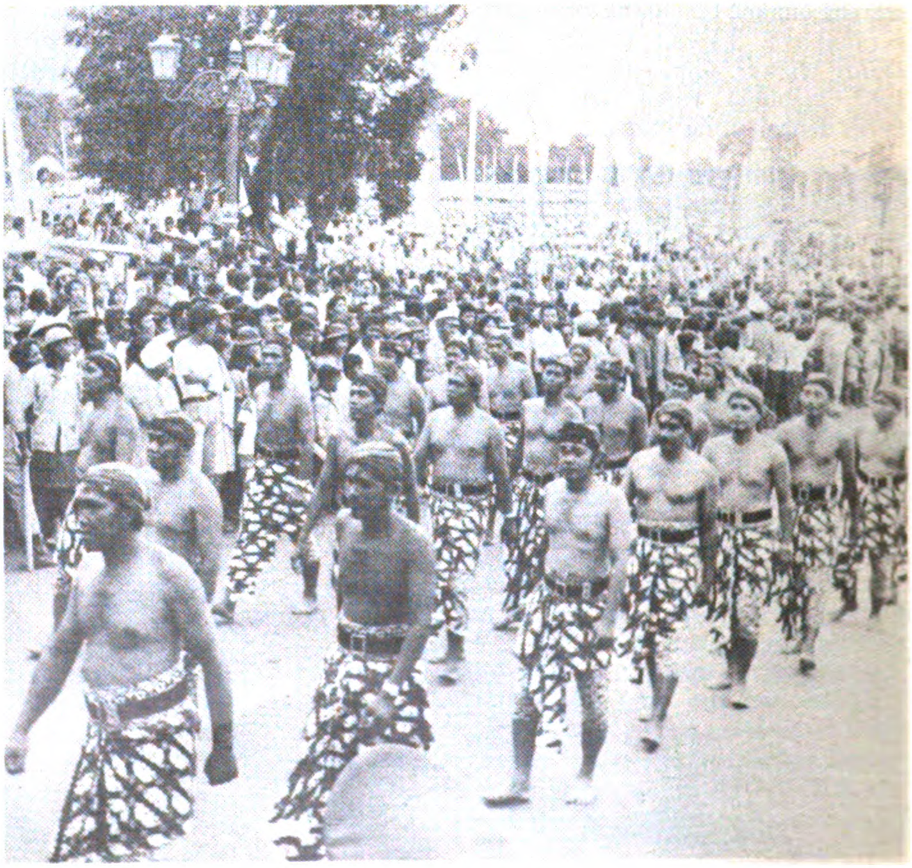

Abdi dalem dan masyarakat Yogya yang membanjir

Digitized by Google

nyam pendidikan Barat, antara lain ayahandanya sendiri, almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Maka bijaklah untuk dapat menerimanya.

Dimana-mana saja di dunia ini, seorang calon Raja, kelahirannya memiliki tanda-tanda yang pantas dicatat, bahkan sudah diramalkan. Hal ini pernah dituturkan sendiri oleh almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Waktunya, awal kemerdekaan RI. Perang masih berkecamuk, dan dapat dimengerti bahwa banyak orang dan fihak memerlukan "*pegangan*" untuk ketentraman hati, serta ketenangan. Banyak orang pergi kedukun, Kyai, atau yang dinamakan orang pinter lainnya. Seorang komandan tentara meminta kepada Sri Sultan untuk memberikan sebuah tempat untuk bersemedi para kyai. Maka diberikan tempat di bilangan Ambarukma (tempat berdirinya Ambarukma Palace Hotel kini) dan berkumpullah sekitar tigapuluh orang pinter itu.

Seorang di antara Kyai tersebut memberitahu Sultan, bahwa dia mendapat *wisik* yang memerlukan pengorbanan yang harus dilaksanakan oleh Sultan sebanyak dua kali, demi keselamatan Republik. Pengorbanan

Maria Sugiharto

pertama, menurut Kyai tersebut, adalah *tumbal* yang berupa dua ekor ayam jago kembar *berjalu* (susuh) kuning, yang harus ditempatkan di sebelah Barat Daya Keraton. Secara spontan dan seperti tidak sadar Sultan menjawab: "O, itu sudah diberikan". Jawaban ini diberikan, karena Sultan mengetahui bahwa *jalu kuning* sebagai tanda keluarga Keraton. Seperti baru saja terjadi, dua orang kerabat Sultan yang sangat bersahabat (dilambangkan seperti kembar) baru saja meninggal, pada saat yang sama, dan dimakamkan pada hari yang sama pula. Yang seorang tinggal di sebelah Selatan Keraton, sedang satunya lagi disebelah Barat Keraton. Klop. Bila terjemahan wisik itu benar, maka dua ekor jago itu harus segera ditemukan di dalam bentuk nyata di dalam waktu 24 jam. Demikian Sultan.

Pengorbanan kedua, menurut Kyai tersebut ialah seekor ayam jantan hitam mulus (seluruhnya hitam) dan seekor jago putih mulus (seluruhnya putih), yang harus dicari di kaki gunung Wilis. Kepada Kyai, Sultan menanyakan, siapa yang memberikan wisik tersebut. Kyai mengatakan bahwa dia melihat seorang bertubuh tinggi, berjubah hijau memakai *ubel-ubel cindé* - sorban dari tenunan asli Jawa berwarna merah dan putih. Orang yang berpenampilan demikian, menurut kepercayaan Keraton Yogya adalah *Eyang Sultan Agung,* pendiri dinasti Mataram. Kepada Kyai dianjurkan oleh Sultan agar berusaha mendapatkan keterangan yang lebih mendalam. Untuk itu diusulkan agar Kyai pergi kepasanggrahan *Ambarbinangun,* di antar oleh adik Sultan,

Sebagian prajurit Kraton Yogya

Digitized by Google

Pangeran Bintoro. Waktu itu pukul 15.00, dan selang setengah jam kemudian keduanya sudah kembali dengan membawa dua ekor jago kembar berjalu kuning. Ketika ditanyakan dari mana jago-jago itu, dijawab bahwa ketika Kyai dan Pangeran Bintoro mau memasuki gerbang Ambarbinangun, terlihatlah dua ekor jago. Klakson telah dibunyikan berkali-kali, tetapi kedua jago itu tidak mau menyisih. Ketika didekati, keduanya adalah jago kembar serta berjalu kuning. Atas persetujuan pemiliknya, kedua ayam jago itu dibeli untuk Keraton. Setelah diketemukan dua ekor ayam jago kembar, Kyai dan Pangeran Bintoro disuruh pergi ke makam Imogiri.

Sementara itu, keesokan harinya, ketika Sultan sedang berada di kantor, kedatangan dua orang tamu. Seorang mengaku pengawas kehutanan, sedang lainnya seorang petani. Keduanya, menurut penuturannya secara kebetulan bertemu di stasiun Kediri. Tujuan mereka sama, ialah Keraton Yogya. Kepada pengawas kehutanan, ketika ditanyakan maksudnya, katanya dia harus memberikan sebuah bungkusan kepada Ngarsa Dalem (Sultan).

"Anda ikhlas memberikan ini"? tanya Sultan. Dijawab ya sampai tiga kali. Maka dibukalah bungkusan kecil itu, yang ternyata berisi *pucuk tombak* berwarna putih seperti terbuat dari campuran timah dan logam.

Ketika kepada Petani ditanyakan, petani menjawab bahwa dia mempunyai tujuan sama seperti pengawas hutan, tetapi hanya ingin *"memperlihatkan"* sesuatu kepada Sultan. Ketika sesuatu itu dibuka, ternyata sebuah *pucuk tombak* berwarna hitam kelam, berbentuk figur Semar, serta bentuknya indah sekali. Karena hanya ingin mempertunjukkan, maka Sultan mengamati, yang mengaku sangat terkesan karena keindahannya.

Tetapi, tiba-tiba saja terjadi suatu peristiwa aneh. Petani, yang duduk di kantor Sultan membelakangi pintu masuk, tampak kaget, dan menoleh ke belakang. Lalu, kejang-kejang seperti dicekik orang dan nafasnya sesak. Seperti kena penyakit ayan, tetapi mulut tidak berbusa. Beberapa orang diperintahkan menolong, tetapi enam orang tidak kuat mengangkatnya. Sungguh diluar logika. Sultan memungut bungkusan pucuk tombak yang terselip di dada petani, barulah orang-orang kuat mengangkatnya.

Pada saat itu, sedang terjadi pemboman atas RRI Yogya oleh Belanda, dan Sultan harus segera kesana memeriksa keadaan. Beliau meninggalkan kantor hanya selama duapuluh menit, dan ketika kembali lagi, petani sudah siuman. Ketika ditanya kejadian apa yang menimpa, dia jawab bahwa dia melihat seorang yang berbadan besar berjubah hijau dan berubel-ubel cinde. Orang besar itu memegang petani seperti mencekik, sehingga petani sulit bernafas. Akhirnya petani dengan ikhlas menyerahkan bungkusan pucuk tombak berbentuk semar.

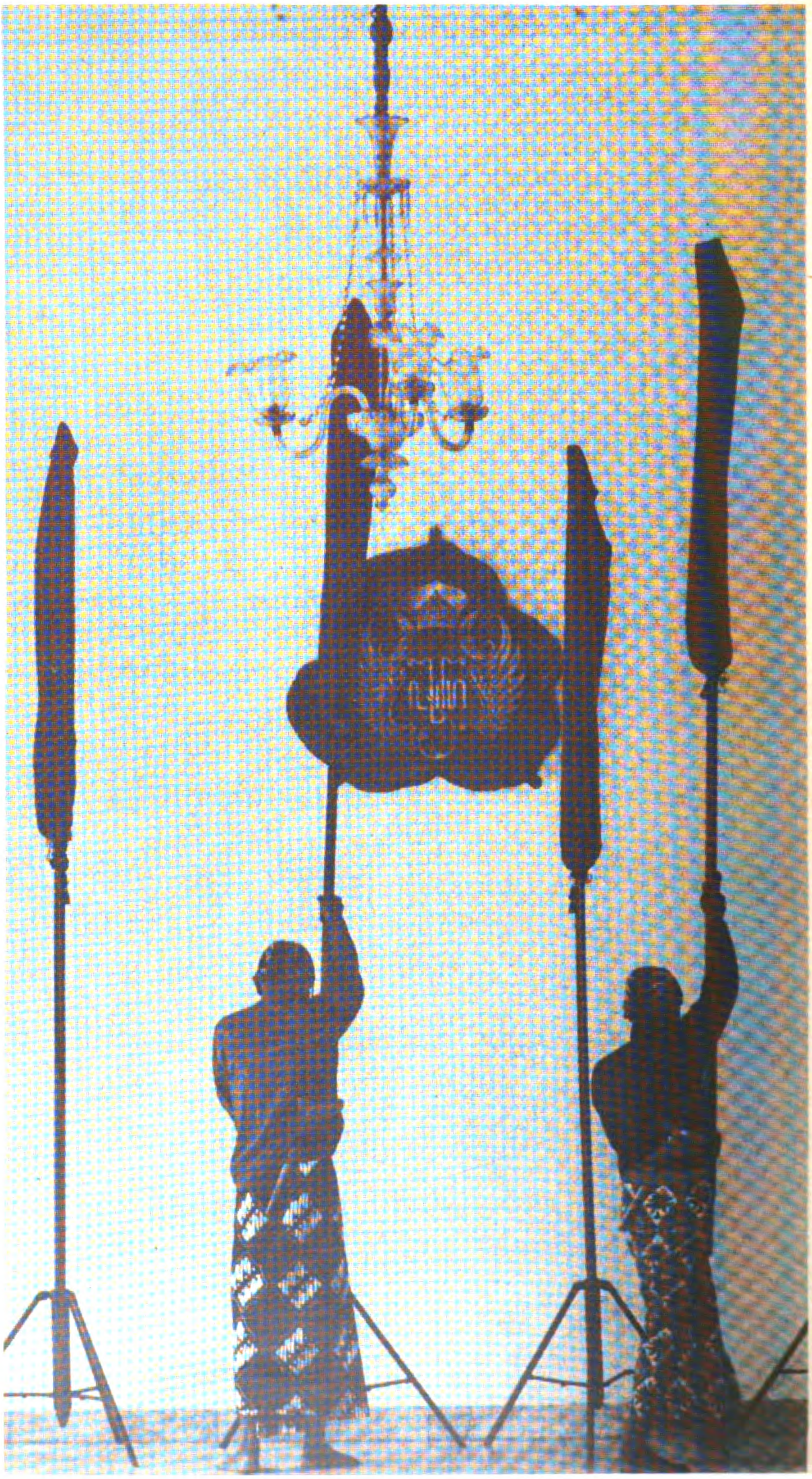

Beberapa pusaka dari kraton Yogya

Digitized by Google

Kedua orang itu pengawas kehutanan dan petani dianjurkan berziarah ke makam Sultan Agung untuk meminta maaf.

Kejadian tersebut ditanyakan kepada Kyai, dan Kyai menarik kesimpulan bahwa itulah yang dicari. Bila hal ini benar, maka dalam waktu 24 jam harus dapat ditemukan dua ekor ayam jantan hitam dan putih dikaki gunung Wilis.

Memang benar. Kyai di antar oleh Pangeran Bintoro berangkat ke kaki gunung Wilis, dan dengan sangat mudah diketemukan dua ekor ayam jantan hitam dan putih mulus.

Kini, mau diapakan ayam-ayam tersebut?

Sultan membagikan dua ekor jago kembar kepada kerabatnya yang baru saja mendapatkan musibah, agar ayam dapat untuk selamatan. Sedangkan jago putih mulus dipotong dan ditanam di suatu tempat di Keraton, sedangkan yang hitam mulus dipelihara.

Pada waktu itu, Sultan masih berputrakan puteri-puteri saja, belum memiliki putra laki-laki. Ketika putra sulung lelaki dilahirkan, Herjuna Darpito itu, ayam jago hitam mulus mati, seakan-akan jiwanya berpindah ke putra sulung Raja.

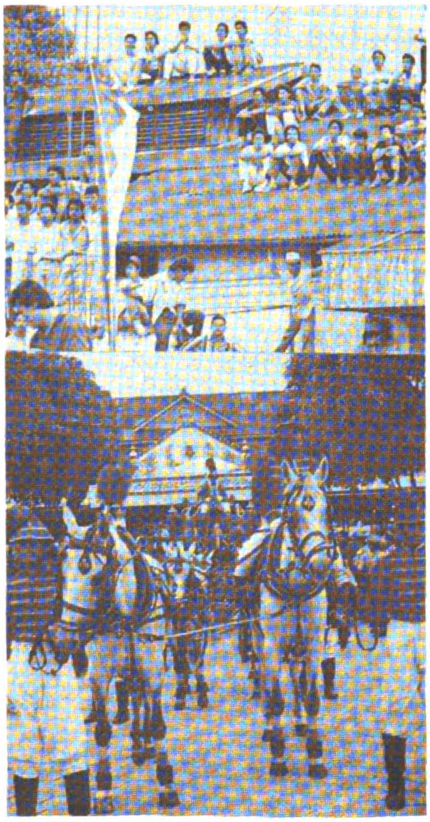

Herjuno

Tentang nama Herjuno, memiliki cerita tersendiri, sehubungan dengan dunia gaib-gaib, yang mau tidak mau mewarnai kehidupan kerajaan.

Pada jaman Sultan Hamengkubuwono I, telah dibuat lima figur wayang dari kulit yang kemudian menjadi pusaka Keraton. Ada di antaranya yang merupakan hasil karya Hamengkubuwono I sendiri. Pada waktu itu, beliau meramalkan bahwa wayang pusaka ini akan hilang pada pemerintahan Hamengkubuwono III, dan akan kembali pada jaman Hamengkubuwono VIII dan IX. Apabila kelak kelima wayang itu semua kembali ke Keraton, maka baru waktu itu negara akan makmur sejahtera. Demikian bunyi ramalan tersebut. Benar-benar terjadi. Ketika pemerintahan Hamengkubuwono III pusaka wayang

Hamengkubuwono dalam kereta Kencana Garuda Yaksa

Digitized by Google

itu hilang. Raib begitu saja. Ketika Hamengkubuwono VIII berkuasa, kakek Pangeran Mangkubumi ini berusaha mencari kembali. Ada kepercayaan di Keraton bahwa pusaka itu dapat hilang sendiri, serta kembali dengan sendirinya pula. Diceritakan, yang dua sudah kembali pada pemerintahan HB VII.

Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono sudah kembali dari studi di Holland, ada seorang Tionghoa datang dari Cirebon, menyatakan membawa wayang pusaka, dan ingin mengembalikannya. Karena Sultan tidak demikian yakin hal tersebut, dicarilah dari primbon tentang pusaka itu. Benar, wayang yang dibawa oleh Tionghoa dari Cirebon yang berbentuk Arjuna dengan sangat indah buatannya, memang pusaka yang hilang. Si Tionghoa tidak mau dibayar atas harga wayang tersebut, bahkan untuk jasanya dia tidak mau dibayar, hanya diberi uang ongkos kembali ke Cirebon saja.

Sebelum Pangeran Mangkubumi lahir tahun 1946, Sultan kedatangan seseorang dari Ambarawa, yang akan menyerahkan sesuatu untuk Keraton, yang ternyata sebuah wayang berfigur Srikandi dengan tatahan yang sangat indah dan sangat cantik. Orang Ambarawa ini mengatakan bahwa di daerahnya telah dibumi hangus oleh Belanda. Seluruh rumah di sekitarnya hangus terbakar habis, kecuali rumah yang dia huni, dimana wayang pusaka ini berada. Sultan kurang percaya kepada cerita tersebut, sehingga berkenan untuk datang sendiri ke Ambawara. Menyaksikan sendiri bumi hangus yang terjadi dan hanya rumah berupa gubug kecil si pembawa pusaka, yang masih lestari sedangkan sekitarnya punah dimakan api, Sultan percaya. Pesan yang dibawa orang itu adalah agar bayi yang akan lahir nanti diberi nama *Arjunawiwaha*.

Sultan berpendapat kurang enak bagi si bayi bila besar nanti, dengan nama Arjunawiwaha, maka dicarikan nama yang menyerempet dengan nama tersebut, jadilah *Herjuna Darpito*. Konon menurut cerita dari lalangan Yogyakarta, Darpito semula ditulis Dalpito, karena kelahiran pada tahun DAL. Demikian nama Sultan Hamengkubuwono X diberi nama pada mulanya. Dengan demikian, sampai kini sudah ada empat pusaka wayang yang kembali. Tentang kesejahteraan bila diketemukan yang kelima, ayahanda Sultan Hamengkubuwono X sendiri menyatakan belum tahu akan berujud apa yang kelima itu.

Kini, Mas Herjuno, ya Mas Mangkubumi, ya Ngarsa Dalem Hamengkubuwono X memang merupakan kebuktian sejarah yang telah tertulis baginya semenjak sebelum dilahirkan, serta dengan segala tanda-tanda yang mengikuti kelahirannya. Sebelum khalayak tahu benar bahwa dia akan menduduki tahta, dia yang bergelar Pangeran sebelumnya mengakui bahwa studinya berjalan lambat, sedangkan "adik-adik saya ada yang sudah sarjana". Kelambatan ini diakibatkan karena keinginannya untuk mencari pengalaman kerja selama studinya berlangsung. Sebenarnya dia paling suka memulai sesuatu dari nol.

"Memanfaatkan fasilitas orang tua tidak enak dan kedudukan katrolan tak memberi kepuasan", pendapatnya ini telah dikemukakan jauh sebelum dia sendiri ditunjuk menjadi pengganti Sultan Hamengkubuwono IX.

Jumenengan

Seorang Pangeran telah dinobatkan menjadi Sultan. Jumenengannya berlangsung dalam suasana kebesaran dan kesakralan. Masalah suksesi, pada masa lampau sering menimbulkan perpecahan sehingga memberikan peluang bagi penjajah, dalam hal ini Belanda, yang menggunakan celah-celah persaingan antar Pangeran.

Dalam pidatonya, Sultan Hamengkubuwono X memperkenalkan dirinya dengan merendah tetapi juga sebagai raja yang penuh wibawa. Dia memaparkan filsafatnya mengenai makna kedudukan sebagai Sultan untuk melanjutkan perjuangan ayahandanya yang mengabdikan tahta kepada kesejahteraan rakyat. Meskipun tanpa wilayah kekuasaan, Hamengkubuwono X tampaknya mempunyai wibawa yang cukup luas di Yogyakarta.

Jumenengan dan *Kirab*, dua kata yang kini telah menjadi sangat populer, bahkan dapat menambahkan khasanah perbendaharaan kata di dalam bahasa Indonesia tidak sekedar verbal. Apakah sekedar bermakna kebudayaan serta mungkin kewisataan? Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan sambutan yang sangat positif terhadap penampilan dan filsafat yang dipaparkannya, bahkan rakyat Yogyakarta tampak masih tetap memperlihatkan sikap sebagai *kawula* yang setia kepada Sultan yang baru.

Namun dari semuanya ini, Sultan Hamengkubuwono X tetap dan harus berperan mewujudkan cita-cita sebagaimana diamanatkan Panembahan Senapati, pendiri dinasti Mataram yang dalam pertemuannya dengan Sunan Kalijaga pernah bersepakat bahwa raja-raja Mataram harus mengabdi dan bekerja untuk *Nusantara* - yang didalam hal ini adalah Republik Indonesia.

Hubungan Sakral Sultan dan Nyai Loro Kidul

Setiap Raja Jawa, adalah *suami* Nyai Loro Kidul, demikian semacam opini yang diakui serta secara tradisional dibenarkan. Untuk hal ini, ayahanda Hamengkubuwono X, Sri Sultan Hamengkubuwono IX almarhum pernah mengatakan dalam bukunya bahwa memang demikianlah kepercayaan lama di Jawa. Beliau menyebut sang Ratu dengan *Eyang Rara Kidul*. Beliaupun mengakui pernah melihatnya, setelah menjalani berpuasa dan tirakat. Sebagai seseorang yang berpendidikan Barat dan moderen, beliau mengakui kepercayaan ini, bahkan dalam beberapa kesempatan tetap menganggap Ratu sebagai leluhurnya. Wartawan United Press, *Arnold C Brackman* pernah dekat dengan Sultan Hamengkubuwono IX, serta pernah menyaksikan tanda-tanda yang diberikan oleh Ratu Kidul, yang diakui oleh HB IX.

Pada waktu itu, Sultan sebagai Menteri Pertahanan sedang menyaksikan latihan kapal perusak ALRI, RI Gajah Mada. Ketika kapal mengarungi Laut Jawa, Brackman melihat Sultan sedang termenung menatap ke depan, kecakrawala, seakan mengadakan hubungan dengan Eyang Ratu. Ketika dia menoleh, angin kencang menerpanya, mengibaskan kerah bajunya, Sultan berkata: "Saat-saat yang penuh bahaya dan kesukaran berada di depan kita". Tidak lama kemudian terjadi persekutuan Soekarno-PKI, hal itu merupakan pertanda bencana bagi Indonesia, demikian pendapatnya.

Desas-desuspun terjadi pada waktu kirab Hamengkubuwono X. Percaya atau tidak, tergantung siapa yang menerima. Ketika kuda Pangeran Yudhaningrat berulah dan menyebabkan sang Pangeran yang memimpin prosesi kirab terjatuh, insiden kecil ini diterjemahkan bahwa sang kuda kaget, menyaksikan sebuah pemandangan *menggabungnya* kanjeng Eyang Ratu Kidul dengan Sultan yang baru, di dalam kereta kencana Garuda Yaksa.□

Digitized by Google

HARIAN
Pelita
MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

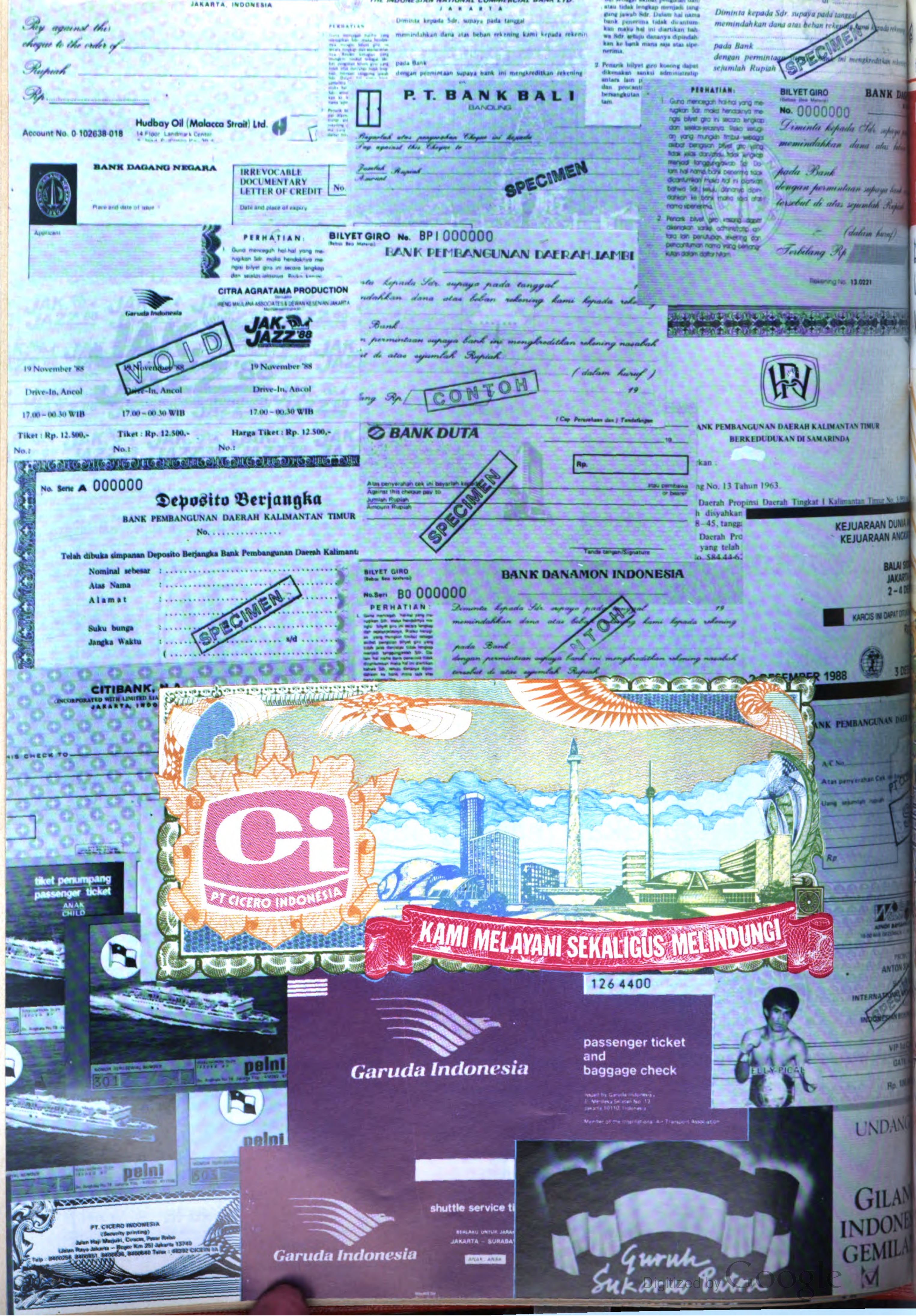

Digitized by Google

GOLONGAN KARYA

No.60 April 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
M48

KERUKUNAN BERAGAMA REALITA DI INDONESIA

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Pimpinan beserta karyawan PT. Enka Parahiyangan

Mengucapkan :

Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1409 H

Mohon Maaf Lahir Bathin

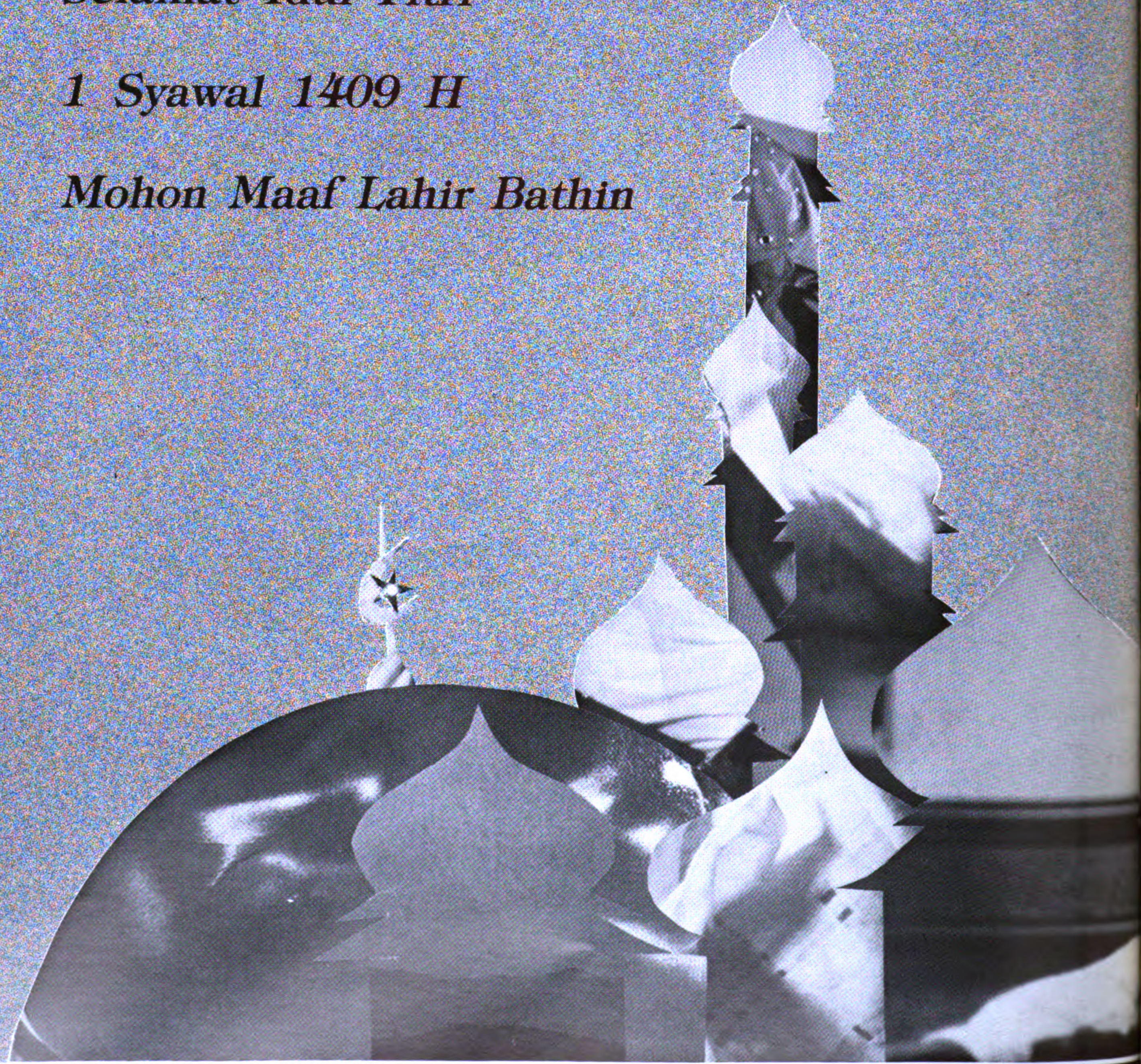

PT Enka Parahiyangan
offset printing & publishing

Jl. Raya Cibubur No. 1 Telp. 870142 – 870985 Jakarta 13720

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/
Penanggung Jawab :
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/
Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir. Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs. Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny. T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi :
Anang Adenansi
Dr. Alfian
H. Kafrawi MA
Drs. Slamet Efendi Yusuf
Drs. Irsyad Sudiro
Drs. Thomas Suyatno
Ny. Maria Sugiharto
Drs. Wijanarko Puspoyo MA
Drs. Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs. T.A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H.M. Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana :
Drs. Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD. PAND. DV. Noerijathy

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas nakah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI
Manusia, Kemanusiaan dan Iman

FOKUS
Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan bagian penting bagi perwujudan stabilitas nasional. Persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan akan terancam kalau masalah yang sensitif itu tidak tertangani secara baik. Untuk jelasnya, ikuti wawancara Media Karya dengan Menteri Agama Munawir Sjadzali, Fridolin Ukur dan Yunus Yahya, dalam Kerukunan Beragama Realita di Indonesia; dan juga Kerukunan Umat Beragama di Mata Lukman Harun; Menegakkan Prinsip Kemerdekaan Beragama.

LAPORAN UTAMA
Mengkaji Ulang Masalah Desentralisasi; Pelayanan Masyarakat, masalah utama bagi pelaksanaan desentralisasi; Desentralisasi dan Kesatuan Bangsa.

LAPORAN KHUSUS
Kartini Penarik Pelatuk Kebangkitan Wanita; Perjuangan Kartini, Sebuah Gerakan Moral; Bukan Lagi Emansipasi, Tapi Partisipasi; Mempersiapkan Generasi Muda Secara Berkesinambungan.

NASIONAL
DPR Tumpuan Harapan Rakyat; Terbuka Sudah Pembicaraan Mengenai Calon Presiden; Gerakan Mahasiswa, Ada yang Perlu Diluruskan; Kenaikan Tarif Listrik, Menjadi Bahan Dialog Nasional; Dituntut Adanya Kesamaan Langkah; Peranan Wanita dan Pembinaan Generai Muda; Bayi Tabung Kembar Tiga; Agama Punya Peranan Besar Dalam Membina Moral Manusia; Bingkisan Lebaran dari ITRIA.

ORGANISASI
Lomba Gerak Jalan HWK; Mengintip Pelaksanaan Rakerda.

KOMENTAR
Kemanusiaan Semakin Tak Punya Harga

INTERNASIONAL
Prospek di Balik Pertemuan Hun Sen - Sihanouk; Takeshita, Skandal dan ASEAN; Perlu Hidup Rukun; Kerjasama Regional Negara Berkembang.

SPEKTRUM
Persatuan dan Kesatuan Atas Landasan Pancasila; Puasa Ramadhan dan Tujuannya Dalam Ajaran Islam.

SENI & BUDAYA
Memacu Pariwisata Dengan Model Wok With Yan oleh Maria Sugiharto.

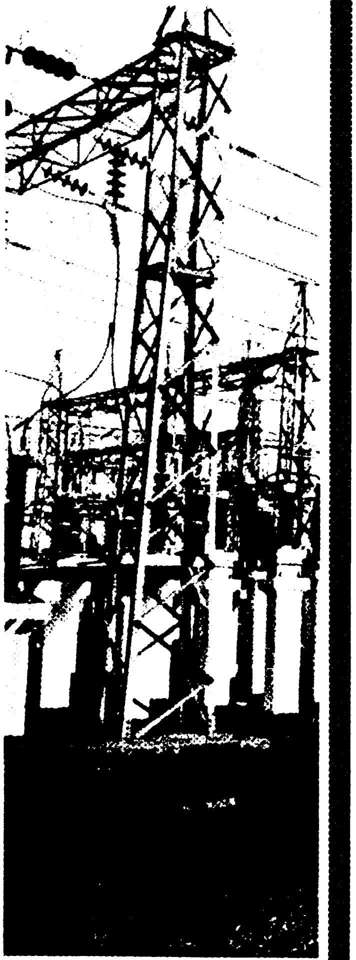

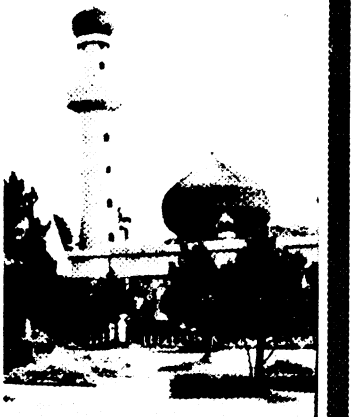

Digitized by Google

Manusia, Kemanusiaan dan Iman

Hidup dan kehidupan kadangkala saling berhadapan, ketika keseharian ini minta perhatian. Sosok kehidupan menjadi begitu natural, ketika manusia bermenung tentang kemanusiaannya. Kemanusiaan yang oleh *Epicurius* disebut sebagai kesia-siaan, terkadang tak punya arti ketika dihadapkan pada keseharian yang meminta terlalu banyak. Tak kuasa manusia dan kemanusiaannya memenuhi, karena memang berada diluar kekuasaannya.

Orang lalu mencari jawaban atas tantangan keseharian hidup itu, dengan keyakinan bahwa ada jawaban untuknya. Sebuah harapan yang hadir seperti biasanya, tanpa kepastian. Dia sekedar sebuah harapan yang selalu dinanti, tetapi tak pernah ada kepastian tentang wujud harapan itu.

Jadilah kehidupan itu sebuah harapan tanpa wujud. Ia hadir di sela-sela keseharian manusia, lalu menjanjikan sederet kecerahan. Itu saja, tidak lebih. Begitu indah dan memekarkan hati, seolah tak ada lagi yang lebih indah daripada harapan yang dijanjikan itu.

Begitulah realitas kehidupan manusia dengan kemanusiaannya. Manusia yang berkemanusiaan, berangkat dengan harapan menjemput hari esok penuh keyakinan, tanpa perlu minta kepastian lagi. Karena ia yakin harapan itu akan datang jika terus ditekuni.

Itulah manusia, dengan segala kesia-siaannya berupaya menjemput harapan yang dijanjikan kehidupan baginya. Ada secerca keyakinan, pada sosok manusia yang sadar akan kesia-siaannya. Keyakinan yang diberikan kepada manusia, sebagai sebuah janji dari sang pencipta.

Keyakinan itu adalah iman, yang diberikan sang pencipta kepada manusia sebagai perisai dalam menghadapi keseharian kemanusiaan yang sia-sia ini. Iman memang tak berwujud, tak bisa dilihat, tak pula bisa dipegang juga tak dapat dirasakan. Iman hanya bisa diyakini, karena ia adalah sesuatu yang berada jauh didasar kemanusiaan dan kehidupan ini.

Iman itulah yang menjadikan kesia-siaan manusia punya makna bagi kehidupan. Dia pulalah yang memberi arti dan makna bagi kemanusiaan yang hidup. Lebih dari itu, iman memang sebuah titian yang menghubungkan manusia dengan penciptanya. Tanpa iman, kemanusiaan jadi sungguh sia-sia; Kehidupan menjadi teramat kerdil dan "aku" menjadi sangat dominan. Sang Pencipta dilupakan, karena "aku" terus meng"aku"kan kehidupan.

Sebulan lamanya kita menunaikan ibadah puasa. Selama itu, kita berupaya meniadakan "aku" dan "keakuan" manusia, untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Kita meniadakan ke "manusiaan" yang sia-sia — kendati berat rasanya — untuk membangun komunikasi imaniah dengan Tuhan Sang Pencipta.

Terkadang, kemanusiaan itu terlalu kuat menarik manusia. Keseharian manusia menawarkan segala macam keindahan, kemewahan serta kekayaan. Hanya untuk memutuskan komunikasi imaniah antara manusia yang sudah bermakna karena iman, dengan Tuhan Sang Pencipta. Kita lalu berhadapan dengan kemanusiaan yang sia-sia dan keyakinan iman kepada Tuhan. Pilihan yang cukup dilematis, antara kemanusiaan dan keimanan. Sulit memang, tetapi harus ada pilihan. Tak mungkin bersikap abstein, tidak memilih.

Disini ibadah puasa kita diuji; seberapa jauh kita mampu meniadakan kemanusiaan yang sia-sia itu dan sejauh mana jarak antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Apakah ibadah puasa dijalankan dengan penuh kesungguhan atau sekedar sebuah kebiasaan saja? Apabila puasa hanya sekedar memenuhi kebiasaan, karena berberat hati untuk meniadakan "keakuan" dan "kemanusiaan", maka sebenarnya kita tak ingin mendekatkan diri pada Tuhan Sang Pencipta.

Kita dengan begitu menjauhkan diri dari Tuhan, yang memberi hidup dan kehidupan serta memberi makna bagi manusia dan kemanusiaan kita. Berarti puasa tak punya arti apa-apa, ia hanya sebuah tradisi yang hampa tak bermakna.

Tetapi kita yakin, di antara seratus lima puluh juta orang muslim Indonesia tak ada yang melihat ibadah puasa hanya sekedar sebuah kebiasaan saja. Kita yakin, semua umat Islam Indonesia menjalankan ibadah puasa sebagai suatu kewajiban imaniah dalam upaya mendekatkan diri dengan Tuhan Sang Pencipta.

Seandainya majalah ini tiba ditangan pembaca pada saat tugas menunaikan ibadah puasa telah usai, kita yakin anda telah menunaikannya dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya ibadah puasa yang berhasil dijalankan penuh sampai hari terakhir itu, dapat memberi makna yang penuh arti bagi kehidupan dan kemanusiaan kita.

Melalui lembaran ini pula seluruh pengasuh Majalah MEDIA KARYA, ingin menyampaikan ucapan SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.**

Digitized by Google

Kerukunan Beragama Realitas di Indonesia

Dua puluh tahun lalu, tepatnya tahun 1967, gong tentang kerukunan umat beragama telah bergema. Tidak lain, Presiden Soeharto sendiri yang menabuhnya. Kala itu, himbauan Presiden Soeharto tentang kerukunan umat beragama lebih kurang demikian. "Jangan sebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Sebab kerukunan umat beragama di Indonesia tergantung dari soal-soal peuyebaran tersebut".

Himbauan dan peringatan ini, seperti gayung bersambut. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1969, dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan bersama no 01/BER/ MDN-AG/1969 mengatur tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya dan tata cara pelaksanaan penyiaran agama serta bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.

Memang perjalanan kerukunan umat beragama dalam rentang waktu sejak dikeluarkannya SKB dan himbauan Presiden Soeharto itu telah membuahkan banyak hasil. Namun, disana-sini masih saja ada juga yang mengganjal dan masih perlu terus mendapat perhatian. Meskipun demikian, harus kita akui bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia boleh dikatakan cukup meyakinkan.

Berbicara tentang agama, memang merupakan yang sangat sensitip dan rawan. Menyinggung tentang kepercayaan yang dianut seseorang seringkali menjadi masalah yang terkadang nantinya sulit dikendalikan. Dan tidak sedikit pula, perasaan tentang keyakinan agamanya disinggung, dapat menjadi bencana, perpecahan dan pembunuhan. Sudah cukup banyak dipermukaan bumi ini masalah-

Munawir Sjadzali

masalah yang berkaitan dengan agama menjadi perpecahan nasional.

Contoh kongkrit adalah India. Negara yang terletak di kawasan Asia ini, pernah mengalami perpecahan yang agama menjadi pangkal tolaknya. Kemudian negara tersebut pecah menjadi dua. Yang satu menjadi Pakistan dan India sendiri. Negara tersebut sepertinya tidak henti-hentinya diguncang dengan permasalahan agama. Belum lama ini misalnya, bentrokan antar pemeluk kepercayaan sikh dengan Hindu. Dan tidak sedikit pula korban yang berjatuhan. Dan bahkan sempat menggoncangkan stabilitas nasional di negara tersebut.

Contoh lain juga terdapat di Republik Irlandia. Di negara tersebut terjadi bentrok yang berkepanjangan serta telah memakan banyak korban manusia itu juga diakibatkan oleh agama. Yaitu sama-sama penganut Kristus. Yang satu menganut Kristen Protestan dan yang satu lagi penganut Kristen Katolik. Di negara-negara Arab juga demikian. Mereka sama-sama pemeluk agama Islam juga terjadi konflik.

Kalau melihat contoh kasus di atas, maka masalah-masalah agama itu merupakan masalah yang sangat rawan dan kompleks. Konflik masalah agama bukan saja dari agama yang berlainan, tapi dari penganut kepercayaan yang samapun juga dapat terjadi.

Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Pandangan tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia dinilai banyak orang merupakan suatu yang sangat menguntungkan, karena, lima agama yang diakui, tidak pernah menjadikan sumber konflik. "Kerukunan antar umat beragama di Indonesia merupakan realita", ujar Menteri Agama Munawir Sjadzali.

Apa yang dikemukakan Menteri Agama itu memang beralasan. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, benturan-benturan yang bermuara dari soal agama sepertinya tidak pernah kita dengar. Kalaupun toh ada, itu merupakan riak-riak kecil yang tidak berarti.

Kemudian, toleransi antar pemeluk agama juga terlihat semakin nyata. Seperti yang dikemukakan Menteri Agama dalam pengalamannya melihat keadaan di lapangan. Misalnya di daerah Irian Jaya. Ada, kata Menteri, satu keluarga yang menganut agama yang berbeda. Namun mereka tetap rukun dan bersatu. Mereka saling menghormati dan saling tolong menolong. Misalnya, ada salah satu keluarga yang akan mengadakan pesta. Dari keluarga yang menganut agama Kristen memberitahu kepada keluarga yang memeluk agama Islam untuk tidak memakan makanan yang menjadi pantangannya. Dan tidak jarang pula, keluarga yang beragama Kristen itu mengumpulkan dana yang kemudian diberikan kepada keluarga yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji.

Contoh lain terdapat di salah satu daerah di Maluku. Dimana daerah tersebut masyarakatnya memeluk sebagian Islam dan sebagian Kristen. Mereka cukup kuat dalam toleransi hidup beragamanya. Misalnya bila orang Islam mendirikan tempat ibadah yang berupa mesjid, maka orang

Digitized by Google

Kristen yang memasang kubahnya. Demikian pula sebaliknya. Bila umat Kristen mendirikan gereja, maka orang Islam yang memasang lantainya.

Memang, kerukunan antar umat beragama ini juga dirasakan oleh Yunus Yahya, ketua Ukhuwah Islamiyah. Dikatakan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini kerukunan antar umat beragama semakin baik. Yunus Yahya dari etnis Cina yang kini menjadi mubalig itu telah merasakan hal tersebut. Sebagaimana dikatakan, dulu katanya, kalau ada orang Cina yang beragama Islam selalu saja ada segolongannya yang mencurigai. Kini, masalah-masalah tersebut sudah tidak lagi dirasakan. Barangkali, kata Yunus, mereka sekarang sudah menyadari akan arti pentingnya kerukunan umat beragama dan mereka juga telah sadar bahwa memeluk agama itu merupakan hak asasi.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Yunus mengharapkan agar tetap berpegang kepada Surat Bersama (SK) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, kata Yunus dalam melakukan dakwah jangan sampai mengiming-imingi sesuatu yang menarik umat yang sudah beragama, jangan dakwah door to door, dan agar para pemimpin agama harus bijaksana serta tidak over acting dalam dakwah sehingga membakar umatnya. Bila hal-hal tersebut dipenuhi, "Insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi" ujarnya.

Temperamen dan Sejarah

Toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia memang tidak dapat dibantah. Kemudian yang men-

Fridolin Ukur

jadi pertanyaan, kenapa penduduk Indonesia yang berjumlah 170 juta jiwa dengan 13 ribu pulau ini, umatnya dapat hidup rukun serta berdampingan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Munawir mengemukakan dua pokok masalah. Pertama karena temperamen budaya bangsa dan yang kedua didukung dengan latar belakang sejarah.

Sebagaimana dikatakan, kalau kita mau melihat sejarah, bahwa masuknya agama-agama yang diakui di Indonesia itu mempunyai kesamaan yang sangat penting, yaitu tidak melalui perang dan juga tidak melalui panglima.

Masuknya agama-agama di Indonesia itu pertama-tama melalui pedagang. Dan pedagang itu sendiri yang menyebarkan kepada masyarakat. Jadi, masuknya agama-agama di Indonesia itu adalah melalui jalan damai.

Bila masuknya agama-agama di suatu negara melalui jalan perang, maka akan timbul situasi konflik. Satu contoh misalnya, golongan yang merasa menang dan yang satu golongan merasa dikalahkan, bila masuknya agama-agama itu dengan jalan demikian, maka nantinya akan timbul suatu masalah. Mereka yang dulunya pernah merasakan dikalahkan akan berusaha untuk ganti mengalahkan, ujar Munawir.

Sementara, Fridolin Ukur, menilai terdapatnya kerukunan umat beragama di Indonesia ini menggembirakan, sejak adanya Badan Musyawarah antar Umat Beragama. Dengan adanya badan tersebut, kata Fridolin, kita dapat bergaul, berkenalan secara pribadi dengan

Yunus Yahya

tokoh-tokoh agama tersebut. Dengan demikian keterbukaan di antara kami lebih banyak. Dulu, katanya, kami tidak berani bicara mengenai masalah-masalah yang peka sifatnya. Namun, dengan adanya Badan tersebut, kami dapat memahami masalah-masalah yang sebelumnya kami tidak mengerti. Misalnya masalah kodok, yang belum lama ini menjadi bahan pembicaraan.

Fridolin mengakui, kerukunan dan keakraban antara umat beragama ini masih dirasakan di tingkat kota-kota besar. Namun, kerukunan yang berada di desa-desa masih perlu terus ditingkatkan, ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan dalam kerukunan beragama yang disebabkan kemajuan jaman, yaitu berupa teknologi, Ukur mengharapkan agar agama itu tetap berada di antara perkembangan dan kemajuan tersebut. Dan ini sejalan dengan cita-cita bangsa yang berlandaskan Pancasila. □ BM/SS

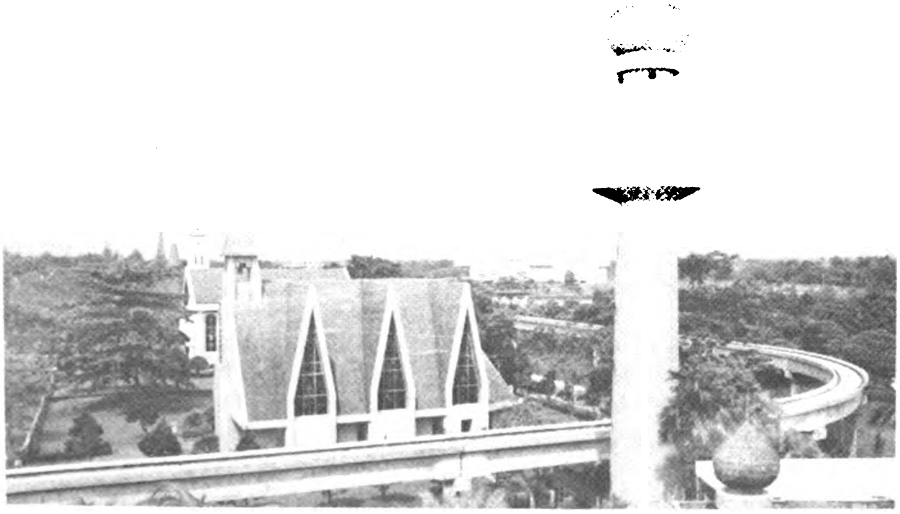

Kerukunan umat beragama sudah dirasakan

Digitized by Google

Kerukunan Umat Beragama di Mata Lukman Harun

Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan bagian penting bagi perwujudan stabilitas nasional bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan akan terancam kalau masalah yang sensitif itu tidak tertangani secara baik. Apa yang menjadi himbauan Presiden Soeharto tentang pentingnya suatu tata kehidupan umat beragama diantara para pemeluk agama yang ada di Indonesia ini bukan tanpa alasan dalam kaitan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan bagian penting bagi perwujudan stabilitas nasional bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan akan terancam kalau masalah yang sensitif itu tidak tertangani secara baik. Apa yang menjadi himbauan Presiden Soeharto tentang pentingnya suatu tata kehidupan umat beragama diantara para pemeluk agama yang ada di Indonesia ini bukan tanpa alasan dalam kaitan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Ada satu ungkapan yang patut dicatat dari himbauan tentang perlunya kerukunan kehidupan beragama di bumi Indonesia ini, bahwa jangan menyebarkan agama kepada orang yang telah memeluk agama lain. Sebab kerukunan antar umat beragama bisa rusak oleh ulah pihak-pihak lain yang ingin memaksakan agamanya.

Disini pemerintah memandang perlu mengatur kehidupan umat beragama agar kemungkinan timbulnya gesekan yang berakibat negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa bisa terhindar. Ada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang pelaksanaan aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan ibadat agama oleh pemeluknya.

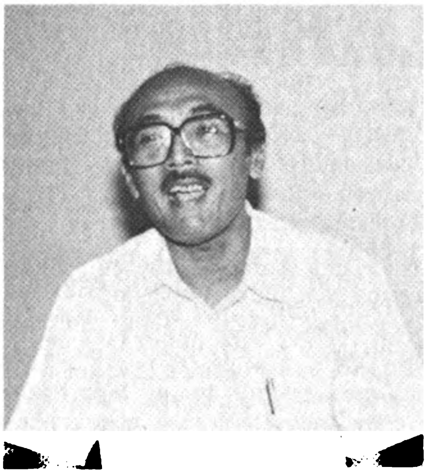

Lukman Harun

Kalau dilihat secara cermat, kerukunan antar umat beragama sudah menuju kepada suatu proses dimana masing-masing pihak sudah menunjukkan saling pengertian. Lebih-lebih dengan adanya surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama tentang penyiaran lembaga agama di Indonesia. Kalau semua pihak mentaati dan melaksanakan keputusan tersebut secara sungguh-sungguh, Insya Allah kerukunan kehidupan umat beragama di Indonesia berjalan lebih baik. Artinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karenanya masalah tersebut perlu mendapat perhatian secara serius.

Sebagai contoh semangat toleransi umat beragama dapat dilihat dari sejauh mana masing-masing mematuhi ketentuan pemerintah tentang tatacara pendirian tempat-tempat ibadat. Dimana harus dipenuhi syarat-syarat kalau tidak ada pemeluk agama tertentu hendaknya pendirian tempat ibadat itu ditinjau kembali. Begitu pula tentang cara-cara penyiaran agama di tengah-tengah masyarakat. "Yang penting harus diingat apa yang menjadi himbauan Presiden Soeharto agar jangan menyiarkan agama kepada orang yang telah memeluk agama lain," ujar Lukman Harun yang berbicara dalam kapasitas sebagai wakil ketua PP Muhammadiyah.

Lukman Harun sendiri melihat arti penting gagasan kerukunan beragama sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Gagasan itu sendiri, baik oleh umat Islam khususnya warga Muhammadiyah, mendapat dukungan sepenuhnya. Sebab kerukunan ini sangat bergantung kepada pengendalian diri untuk tidak menyebarkan agama di tengah-tengah warga masyarakat yang sudah memeluk agama tertentu. Soal penyebaran agama itu kadang-kadang dipandang orang lain tidak wajar. Oleh karenanya kalau tidak ditangani secara baik bisa timbul permasalahan di belakang hari.

Bagi Lukman Harun masalah menumbuhkan kerukunan hidup beragama ini penting. Kita tidak ingin mengalami nasib seperti negara-negara lain yang disibukkan dengan pertentangan antar umat beragama. Seperti di Libanon. Sebagai bangsa yang sedang membangun dibutuhkan adanya kerukunan diantara anggota masyarakat. Tidak boleh terpecah-pecah karena masalah perbedaan agama yang dianut.

Kewajiban semua pihak untuk terus mengikuti dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan pihak pemerintah demi terwujudnya kerukunan umat beragama. Peraturan sudah ada tinggal bagaimana kita melaksanakan dan mematuhinya. Sementara pemerintah sendiri, khususnya Mendagri dan Menteri Agama mengawasi sejauhmana peraturan tersebut dipatuhi.

Ada satu masalah yang sangat mendasar. Bahwa hendaknya pengertian orang bebas menjalankan agamanya jangan diartikan orang bebas pula untuk berpindah agama. Ini berbahaya. Toleransi sesama umat beragama tidak harus diartikan toleransi terhadap mereka yang begitu saja pindah agama. Permasalahan ini sampai sekarang belum lagi selesai.

Golkar sebagai rulling party di Indonesia diharapkan mampu mengambil peranan dalam rangka membina kerukunan umat beragama sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Presiden Soeharto serta peraturan-peraturan yang ada yang mengatur tata kehidupan beragama di Indonesia. □ (NS)

Digitized by Google

Menegakkan Prinsip
KEMERDEKAAN BERAGAMA

Ketetapan MPR mengenai P4 menegaskan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila tidak berarti bahwa negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Soeharto dalam pengarahannya pada pembukaan Raker Departemen Agama di Bina Graha tanggal 28 Maret yang lalu.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tak dapat dipaksakan. Ditegaskan lebih lanjut oleh Kepala Negara bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. "Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan," ungkap Presiden.

Untuk menegakkan prinsip kemerdekaan beragama kita harus menghindari segala bentuk pemaksaan dalam keberagamaan, secara kentara maupun tersembunyi. "Keberagamaan didasarkan atas keinsafan batin dan ketulusan," tutur Kepala Negara di hadapan jajaran aparat Departemen Agama yang mengikuti Raker hari itu.

Bukan Negara Agama

Negara Indonesia bukan negara agama. "Kita tidak mengenal apa yang disebut sebagai negara agama. Kita tidak memilah-milah agama-agama yang ada menjadi agama-agama resmi dan agama-agama tidak resmi, agama-agama yang diakui dan agama-agama yang tidak diakui," tandas Presiden Soeharto.

Kepada seluruh aparat Departemen Agama Kepala Negara menyerukan agar Departemen Agama dengan segala jajarannya mengemban tugas pemerintahan untuk melayani sebaik-baiknya kehidupan keagamaan bangsa kita tanpa kecuali dan tanpa pilih kasih. "Fungsi pelayanan ini perlu kita camkan dan resapi berulang kali dalam rangka meningkatkan kualitas aparat Departemen Agama untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan namun juga penuh berbagai harapan."

Menurut Kepala Negara, pengembangan kehidupan beragama dalam kehidupan bangsa kita merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional sejalan dengan falsafah negara Pancasila. Pembangunan kehidupan beragama tidak boleh dilepaskan dari sifat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dalam rangka pengamalan Pancasila itu Pemerintah harus mengayomi semua agama dan aliran yang hidup dan berkembang secara wajar di negeri kita.

Pendidikan dan Penyiaran

Kita semua sangat berkepentingan untuk mengembangkan iklim yang sehat dalam kehidupan beragama bangsa kita. Pemerintah berusaha melayani hajat keagamaan bangsa secara adil, sebatas kemampuan dan wewenang yang ada. Kita menginginkan agar setiap agama dan semua agama yang hidup dan berkembang di negeri kita mengalami kemajuan dalam suasana rukun dan saling menghormati. Oleh karena itu aspek kualitas lah yang perlu mendapat perhatian sebesar-besarnya. Untuk ini penting sekali peningkatan mutu pendidikan agama, tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut Presiden Soeharto mengatakan bahwa melalui pendidikan agama diinginkan timbulnya generasi baru yang memiliki ketahanan mental yang tangguh dalam menghadapi kemajuan zaman dan perubahan masyarakat dengan segala tantangannya. Pendidikan agama hendaknya tidak membuat anak-anak mengalami kepribadian yang pecah. Pendidikan agama hendaknya merupakan usaha luhur untuk memperkuat kepribadian anak-anak kita.

Mengenai dakwah dan penyiaran agama, Kepala Negara mengemukakan bahwa dakwah dan penyiaran agama memang merupakan tugas luhur dari semua penganut agama. Ditegaskannya bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara sehat, bertanggung-jawab dan menyejukkan hati. Kita akan berhasil mengembangkan kehidupan beragama yang sehat kalau masing-masing umat beragama mampu melaksanakan pendidikan dan dakwah agama secara sehat dan bertanggung jawab, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab kepada bangsa.

Departemen Agama dengan seluruh jajarannya diharapkan agar berusaha meningkatkan mutunya sehingga dapat menunaikan tugas sebagai aparat Pemerintah yang adil dalam melayani hajat keagamaan masyarakat.

Segenap pejabat Departemen Agama harus berusaha memperluas wawasannya dan meningkatkan kemampuannya sehingga mampu secara arif menangani masalah-masalah sosial keagamaan yang terjadi dalam masyarakat kita yang majemuk ini. Demikian Presiden Soeharto. ☐ (TAP)

Digitized by Google

Mengkaji Ulang Masalah Desentralisasi

Kata desentralisasi tiba-tiba saja kembali mencuat ke permukaan, ketika seorang peserta dalam suatu diskusi baru-baru ini berkata: Sebenarnya otonomi daerah itu merupakan sesuatu yang wajar dalam bernegara.

Penekanan kata wajar setidaknya telah memberi asumsi bahwa pemberian suatu kewenangan mengurus sendiri hidup berkelompok kepada daerah merupakan konsekuensi logis dari asas kedaulatan rakyat.

Prinsip mengatur daerah dapat didasarkan pada prinsip Negara Kesatuan, di mana bagian dari negara (daerah) hanya bagian dari Pemerintah Pusat. Inilah yang lazim kita kenal dengan prinsip dekonsentrasi.

"Namun sebagai usaha demokratisasi, pemberian kewenangan daerah ialah dengan otonomi yang dianggap berdasarkan prinsip desentralisasi, karena tetap diinginkan prinsip Negara Kesatuan," kata ahli Tata Negara, Prof. Padmo Wahjono SH.

Padmo melihat bahwa kedua prinsip itu telah diakui oleh UUD 1945 dengan rumusan, "Oleh karena Indonesia itu suatu negara kesatuan, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalamnya yang bersifat negara juga."

Dengan demikian daerah Indonesia akan dibagi dalam provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang bersifat lebih kecil. Sementara di sisi lain, di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

"Baik daerah yang bersifat otonom atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang," katanya.

Dengan demikian, menurutnya, UUD 1945 di dalam pengaturannya mengenai daerah, khususnya otonomi, di samping mengakomodir prinsip moderen tentang desentralisasi sebagai suatu pola yang demokratis, juga ingin mengakomodir desentralisasi sebagai sarana untuk mempertahankan dan menghormati susunan keaslian daerah yang dianggap memiliki sifat istimewa.

Dalam sejarah ketatanegaraan kita memang pernah terlihat bahwa prinsip Negara Kesatuan ingin tetap dipertahankan, sekalipun kita pernah memaksakan diri dalam bentuk Negara Serikat. Bahkan keinginan-keinginan daerah untuk memisahkan diri tetap dianggap kurang sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang membentuk konsensus tentang persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Bila ingin dipertahankan prinsip Negara Kesatuan, maka daerah lazim dimulai dengan pemberian pengaturan dengan dekonsentrasi, di mana semua yang ada di daerah adalah aparat Pemerintah Pusat. Baru kemudian setelah dimilikinya kemampuan mengurus rumah tangga sendiri diberikan otonomi sesuai prinsip desentralisasi, tapi tetap dalam prinsip Negara Kesatuan.

Di dalam praktek pengaturan, prinsip demokratisasi pengaturan daerah sampai pada tingkat satu pengaturan yang menuju ke otonomi daerah telah sampai pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Padmo Wahyono

Sementara prinsip menghormati susunan asli daerah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, yang ada pada masa lampau dipertahankan dan tidak disentuh dengan pengaturan administrasi yang moderen dari pemerintahan kolonial, dituangkan ke dalam pengaturan tentang desa.

Dengan demikian sebenarnya ada dua model otonomi daerah yang didasarkan pada dua cara pengaturannya. Pertama, pola yang diatur dalam UUD No. 5 Tahun 1974; tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Tingkat I dan II). Kedua, pola yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979; tentang pemerintahan desa.

"Keduanya belum sepenuhnya merupakan satu sistem. Seyogyanya merupakan satu rangkaian, mengingat tingkatan perwilayahan yang harus kita pegang sebagai prinsip Negara Kesatuan," tutur Padmo.

Kemudian bila disimak lebih dalam lagi terhadap dua aturan itu, maka pengaturan pertama (UU No. 5 Tahun 1974), maka pengaturan tentang dekonsentrasi, desentralisasi, dan kewenangan daerah untuk mengatur soal kenegaraan disatukan, sehingga menumbuhkan konsep Gubernur (dekonsentrasi), Kepala Daerah (desentralisasi) sebagai penguasa tunggal.

Rumusan ini, menurut Padmo, dapat menumbuhkan konotasi yang salah karena berdasarkan UUD 1945, pemerintahan daerah harus didasarkan pada asas permusyawaratan antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah, "Sebagaimana juga menjadi prinsip di pemerintahan pusat, sedang negara RI merupakan suatu Negara Kesatuan."

Bahkan dengan analisa seperti itu dapat pula tumbuh suatu kerancuan tentang rumusan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seyogyanya, kata Padmo, penyelenggara negara di daerah ialah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan

Digitized by Google

dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur perwakilan.

"Ini mengingat ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senafas dengan ketentuan tentang lembaga perwakilan di pusat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya.

Di sini tampak dalam hal pengaturan sudah dianggap sampai derajat otonomi dalam pemerintahan, namun dalam hal perwakilan ternyata belum.

"Secara materiil kita menampakkan suatu keadaan koordinasi atau asas permusyawaratan, dan bukan nada subordinasi," ujar Padmo.

Masalah kedua yang menonjol dalam hal pelaksanaan prinsip desentralisasi yang sekaligus prinsip dekonsentrasi secara berdampingan ialah hubungan aparatur di daerah, baik yang merupakan aparatur pemerintah pusat maupun aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam hal koordinasi.

Bila desentralisasi diberikan sepenuhnya — kecuali hal-hal yang menurut sifat Negara Kesatuan harus tetap berada di Pusat — maka tidak diperlukan lagi adanya aparatur pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi berdampingan dengan instansi daerah dalam rangka desentralisasi.

Selain itu, di dalam pengaturan desa juga sudah pada tahap yang meningkat ketimbang prinsip yang diatur di dalam UUD 1945, bahwa keasliannya dihormati sebagai suatu yang istimewa. Peraturan administrasi daerah tingkat desa sudah prinsip "lebih moderen" ketimbang pola asli lama.

Memang bila mau dikaji lebih dalam lagi UU No. 5 Tahun 1974 dari segi prinsip-prinsip kewenangan daerah, maka akan tampak bahwa prinsip-prinsip yang ada semenjak jaman kolonial ingin diakomodir semua di dalam peraturan tersebut.

Juga dikenal beberapa prinsip, seperti prinsip dekonsentrasi dengan wilayah administratif, prinsip desentralisasi dengan wilayah Tingkat I dan II, serta adanya tugas pembantuan yang merupakan penugasan melakukan kegiatan yang sebenarnya tugas pemerintah pusat.

Ketiga prinsip tersebut seolah-olah ingin dilaksanakan sekaligus dengan segala interelasinya, sehingga menampilkan kesan "over regulated" yang mengundang deregulasi untuk menghindari kesemrawutan. Sebenarnya ketiga prinsip tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap berkesinambungan sesuai dengan kemampuan.

Dari sini Padmo berpendapat bahwa ada daerah-daerah yang sudah selayaknya menikmati dekonsentrasi yang kemudian secara bertahap dikembangkan ke prinsip desentralisasi setelah menjalani pembinaan kemampuan di segala bidang yang memungkinkannya menjadi daerah otonom.

"Ini dapat diterapkan, baik untuk Daerah Tingkat I maupun Tingkat II, dengan segala argumentasi yang wajar sehingga tidak menumbuhkan kesan ketertinggalan yang tidak demokratis," tutur Padmo.

Namun, katanya, sebenarnya kita tidak dapat mengembalikan "jarum-jam-perkembangan", karena kedua prinsip tersebut telah dinikmati oleh daerah-daerah.

Karena itu mau tidak mau pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Dengan tetap mendasarkan pada prinsip Negara Kesatuan yang di dalam kegiatan pembangunan tercermin dalam Wawasan Nusantara, maka seluruh pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan pembangunan nasional, yaitu terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dalam kaitan dengan pembangunan nasional, maka pemberian otonomi kepada daerah seyogyanya tidak didasarkan pada pertimbangan demokrasi politik belaka atau pemberian hak secara hukum dalam arti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Di dalam melaksanakan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari seluruh aparatur pemerintah di daerah sekaligus dalam rangka mewujudkan otonomi yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Karena itu tidak boleh dilupakan kenyataan adanya daerah yang relatif tertinggal, daerah kepulauan yang terpencil, daerah perbatasan, daerah minus dan daerah padat penduduk. Kesemuanya menunjukkan keragaman yang menurut Padmo, memerlukan kewenangan mengatur daerah secara berbeda, bertahap dan meningkat dengan kesejahteraan sebagai tolok ukur, dan bukan semata-mata demikian adanya menurut hukum yang berlaku.

"Pemberian tugas-tugas pembangunan kepada daerah dengan prinsip kewenangan apapun, harus disertai pembinaan daerah," jelas Padmo.

Dengan demikian, katanya, ia tidak sekadar mampu menyelesaikan tugas yang dilimpahkan tersebut, namun harus dapat memelihara dan mengamankan hasil pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan.

Secara kongkrit daerah bisa menarik tenaga-tenaga terampil dalam arti menjadi lapangan kerja yang nyata dan berkesinambungan. Atau dengan kacamata lain, daerah harus menjadi daerah yang menarik bagi tenaga-tenaga terampil agar tugas-tugas pembangunan dapat terlaksana dengan baik secara berkesinambungan. Sementara pembinaan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam rangka memberikan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Karena itu, dalam rangka lebih memperlancar pembangunan yang menurut Padmo harus dijadikan tujuan utama dalam pemberian otonomi daerah, dan bukan karena sulitnya pelaksanaan pembangunan bila ditangani pemerintah pusat sendiri, maka perlu ditingkatkan koordinasi, kerjasama, dan kemampuan aparatur pemerintah yang ada di daerah, baik aparatur pemerintah pusat (di daerah) maupun aparatur daerah sendiri.

Di sini tampak makin jelas bahwa otonomi daerah sekaligus juga dimaksudkan untuk dapat mengurus sendiri rumah tangga daerah.

Namun diingatkan, dalam rangka memperlancar pembangunan yang merata dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, hubungan kerja yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan.

Pada intinya Padmo melihat bahwa otonomi daerah hanya sarana, dan bukan tujuan bernegara. Tujuan bernegara, menurutnya, tetap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menyelenggarakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, apapun sistem dan ragam kewenangan daerah.

"Dengan demikian janganlah otonomi hanya menjadi tuntutan agar demokratis atau sekadar pemberian hak atas dasar kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tanpa memperhatikan kemampuan yang nyata atau tanpa didukung pembinaan kemampuan untuk mendukung

Digitized by Google

pelaksanaan otonomi tersebut," tuturnya.

Budaya berotonomi masih memerlukan dukungan yang nyata, baik dari unsur suprastruktur maupun infrastruktur. "Tidak berlebihan rasanya perlunya dukungan pemikiran akademik untuk pengembangan otonomi daerah di Indonesia," ucapnya.

Dukungan pemikiran akademik tidak saja terhadap konsep otonomi daerah yang harus diterapkan secara demokratis, melainkan juga dukungan pemikiran akademik terhadap sumber daya kemampuan melaksanakan otonomi tersebut dari segala segi aspek kehidupan.

Di sini dapat dikembangkan studi-studi wilayah yang apabila perlu dibakukan menjadi tanggung jawab satu lembaga ilmiah menangani satu atau beberapa wilayah tertentu, sehingga ada pengembangan yang berkesinambungan.

"Ini pun dapat dianggap sebagai pelaksanaan desentralisasi dalam hal obyek pembahasan akademik suatu ilmu terpadu antara disiplin ilmu lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu amaliah," ujar Padmo.

Dalam Repelita V ini pembangunan daerah merupakan kelanjutan dari kebijakan Repelita-Repelita sebelumnya. Ini juga semua dilaksanakan atas dasar pemikiran-pemikiran pokok sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan GBHN.

Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran nasional di daerah sesuai masalah, potensi, aspirasi dan prioritas masyarakat daerah.

Sasaran nasional di daerah dan sasaran daerah harus diusahakan sebaik-baiknya. Karena diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dalam gerak pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, dibutuhkan pula prakarsa dan partisipasi masyarakat daerah agar potensi pembangunan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pemecahan masalah-masalah daerah.

Seorang pengamat mengingatkan, agar kebijakan nasional juga melihat dan mengantisipasi adanya perbedaan kemajuan pembangunan antara daerah Provinsi Tingkat I dan antara Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan adanya antisipasi ini, menurutnya, dapat dicapai standar minimum kemajuan ekonomi di daerah dan dapat pula memberikan kontribusi yang wajar pada PDB daerah dan PDB nasional.

Ia juga mengusulkan pengaturan pemerataan uang secara wajar, seimbang dan serasi antara daerah menurut kebutuhan pembangunan dan perekonomian di daerah.

Di sisi lain perlu adanya saling pengertian dan kerjasama antara wilayah dan daerah yang saling menguntungkan dalam hal pemasaran hasil-hasil produksi satu daerah ke daerah lain.

Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan pusat dan daerah semakin harus dilaksanakan dan dimantapkan dengan koordinasi Bappenas, Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II dengan mitra kerja di kecamatan dan kelurahan secara lebih mekanis dan dinamis.

Sementara staf pengajar IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, P.J. Suwarno menilai bahwa keterangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Prof. Saleh Affif tentang niat pemerintah akan memberikan wewenang lebih banyak lagi kepada daerah merupakan angin segar.

"Ini menyangkut kelancaran pelaksanaan desentralisasi yang selama ini selalu terkalahkan oleh pelaksanaan dekonsentrasi," katanya.

Dominannya pelaksanaan asas dekonsentrasi akan mengecilkan peranan pemerintah daerah, karena semua diatur oleh Bappenas. Akibatnya, menurutnya, menimbulkan problem di daerah, sehingga menghambat Pelita itu sendiri.

"Hal itu bisa dipahami, kalau diingat bahwa biaya pembangunan sebagian besar berasal dari pusat," katanya.

Dalam melaksanakan asas dekonsentrasi, urusan-urusan dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah dan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.

Unsur pelaksanaannya terutama instansi vertikal yang dikordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya dua asas itu, di daerah terdapat dua pemerintahan yaitu pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi daerah dan instansi vertikal yang merupakan kepanjangan pemerintah pusat di daerah.

Kalau kedua asas itu dilaksanakan secara seimbang dan terkoordinasi secara mantap, memang cita-cita desentralisasi, yaitu mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat tercapai.

Tapi seperti diketahui sejak pemerintah mendapat rejeki nomplok dari BBM, banyak dana yang dibagikan pemerintah seolah-olah rakyat daerah itu hanya menerima bantuan dari pemerintah pusat secara gratis.

Maka kalaupun sekarang harga BBM di pasaran luar negeri tidak menentu, pajak dari rakyat mau diupayakan secara habis-habisan, lalu Ketua Bappenas mengumumkan akan memberikan wewenang lebih banyak lagi kepada daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Repelita V, itu sebenarnya wajar.

Sebaiknya niat itu diikuti pemikiran lebih sungguh-sungguh dan tindakan nyata dalam kaitannya dengan aparat pemerintah yang sekarang sudah berkembang di daerah.

Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD harus disadarkan bahwa dalam Repelita V mereka harus sungguh-sungguh mewakili rakyatnya dalam merencanakan APBD. Dalam hal ini pemerintah pusat harus menahan diri dalam memberi pedoman dan instruksi yang sifatnya mengikat. Dengan demikian DPRD dan kepala daerah diharapkan berdialog dengan bermusyawarah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi rakyat di daerahnya, dan kemudian mufakat untuk memasukkan pemikirannya itu ke dalam APBD.

Apa yang dituangkan dalam APBD oleh kepala daerah dalam SK-nya hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh dinas-dinas daerah.

Semua itu akan berjalan lancar kalau mekanisme hubungan rakyat dan DPRD lancar, serta pemerintah daerah diberi wewenang lebih luas untuk mengelola pemungutan pajak di daerahnya. Dengan demikian akan berkembang *men, money,* dan *management* yang sehat di daerah, sehingga desentralisasi dapat dilaksanakan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh Ketua Bappenas.

"Kalau itu menjadi kenyataan, pemerintah daerah dapat menggunakan seluruh waktunya untuk mengurus rumah tangga daerah guna kesejahteraan rakyat daerahnya," tutur Suwarno.□ (LT)

Digitized by Google

PELAYANAN MASYARAKAT
Masalah Utama Bagi Pelaksanaan Desentralisasi

Pemerintah dalam masa mendatang akan memberikan wewenang yang lebih banyak lagi kepada daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Repelita V.

Niat baik yang disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Prof. DR. Saleh Affif ini langsung mendapat sambutan hangat dari sementara pengamat, termasuk kalangan DPR.

Mengapa? "Karena ini menyangkut kelancaran pelaksanaan desentralisasi, yang selama ini selalu dikalahkan oleh pelaksanaan dekonsentrasi," tutur P.J. Suwarno, satu pengamat yang berasal dari lingkungan IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Arah kebijaksanaan seperti itu bisa dinilai wajar-wajar saja, apalagi mengingat harga migas yang masih tidak menentu dipasar internasional dan usaha nasional dalam melipatgandakan penghimpunan dana pajak dari rakyat.

Dalam kaitan ini, jika Pemerintah bermaksud meningkatkan terus penerimaannya, maka sudah seyogyanya, tidak hanya kepada kalangan dunia usaha saja diberikan peran besar. Namun juga kepada Pemerintah Daerah.

Ini berarti, Pemerintah Pusat harus rela untuk memberikan beberapa urusan penting kepada daerah agar bisa berkiprah dengan makin baik, tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Apalagi pemungutan pajak sekarang sangat diintensifkan.

Bila birokrasi Indonesia belum juga berkembang secara efisien, sementara rakyat digenjot terus membayar pajak, maka akan tiba waktunya timbul ketegangan.

Tugas melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, basisnya ada di pemerintahan daerah tingkat I. Kalau mau lebih kecil lagi adalah desa.

Oleh karena itu sebaiknya kebijaksanaan pemerintah tidak melulu kepada dunia usaha, tetapi harus mengarah juga kepada aspek non ekonomis lain.

"Birokrasi di sini memainkan peran yang vital karena lewat pelayanan bi-

Dengan demikian akan tercipta keserasian pertumbuhan antar daerah, dan menghindari kesenjangan yang mungkin akan bertambah jauh jaraknya.

Pada sisi lain, pembangunan daerah dalam Repelita V merupakan kelanjutan serta peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah dalam repelita-repelita sebelumnya dan dilaksanakan atas dasar pemikiran-pemikiran pokok sebagaimana dikemukakan dalam UUD 1945 dan GBHN.

Pembangunan daerah, yang dilaksanakan adalah bagian tak terpisahkan dari sistim pembangunan nasional secara menyeluruh. Karena itu ia mengemban dua missi yang harus diserasikan yaitu Program Pembangunan Nasional dengan sasaran nasional di daerah serta program pembangunan daerah dengan sasarannya sendiri.

Kedua program ini harus berjalan seiring sejak perencanaan, penentuan arah dan kebijaksanaan serta pelaksanaannya yang searah dengan pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang serasi.

Karenanya dibutuhkan tingkat rokrasinyalah masyarakat menilai kesungguhan Pemerintah untuk melayani mereka," tutur Bayu Wijayanto dkk. dari FE-UKSW, Salatiga dalam Seminar Nasional yang membahas masalah Repelita V di Jakarta, beberapa waktu lalu. Seminar ini sendiri diorganisir oleh FE-Universitas Indonesia.

Lebih Kuat

Pelita V sebagaimana diamanatkan oleh GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil, yang selanjutnya akan meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan selanjutnya.

Tekanan makin merata dan adil di sini sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa orientasi pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang dicapai selama ini perlu diarahkan pada daerah-daerah yang masih rendah tingkat pertumbuhannya.

koordinasi dan sinkronisasi yang akurat serta memperhatikan masalah, potensi, aspirasi dan prioritas daerah.

Sinkronisasi sasaran nasional dan sasaran daerah akan melahirkan efisiensi, sedang perencanaan yang memperhatikan masalah, potensi, aspirasi dan prioritas daerah akan membangkitkan dukungan kemampuan dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Dalam kaitan ini mekanisme perencanaan timbal balik perlu dimantapkan, termasuk upaya peningkatan perencanaan dari bawah.

Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR-RI berpendapat, dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan yang serasi dan merata antar daerah, perlu diadakan penataan daerah/wilayah administrasi pemerintahan dengan pertimbangan yang cermat atas potensi dan kemampuan yang dimiliki disertai perumusan pola Hubungan Pusat dan Daerah yang mendukung pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah tingkat II yang nyata dan bertanggung jawab.

Dikemukakan, potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan pendayagunaannya untuk mendukung pertumbuhan yang serasi dan terpadu dalam suatu kawasan dibutuhkan adanya pengkajian tata ruang dengan pendekatan wilayah yang bisa menuntun terciptanya jaringan-jaringan ekonomi yang saling mendukung dalam suatu wilayah.

Pada hakekatnya memang, pembangunan daerah (regional development) tidak dapat dilepaskan dari pembangunan nasional yang diselenggarakan secara berencana dan bertahap.

Regional development dalam hal ini berfungsi sebagai komplemen dari sistim perencanaan sektoral.

Bila sistim perencanaan sektoral keluar dengan strategi pembangunan dalam bentuk pemberian prioritas pada sektor-sektor tertentu, misalnya sektor pertanian, maka sistim perencanaan daerah akan melengkapinya dengan menentukan pada daerah-daerah mana kegiatan pertanian tersebut perlu diprioritaskan.

Ini berarti keberhasilan prioritas

Digitized by Google

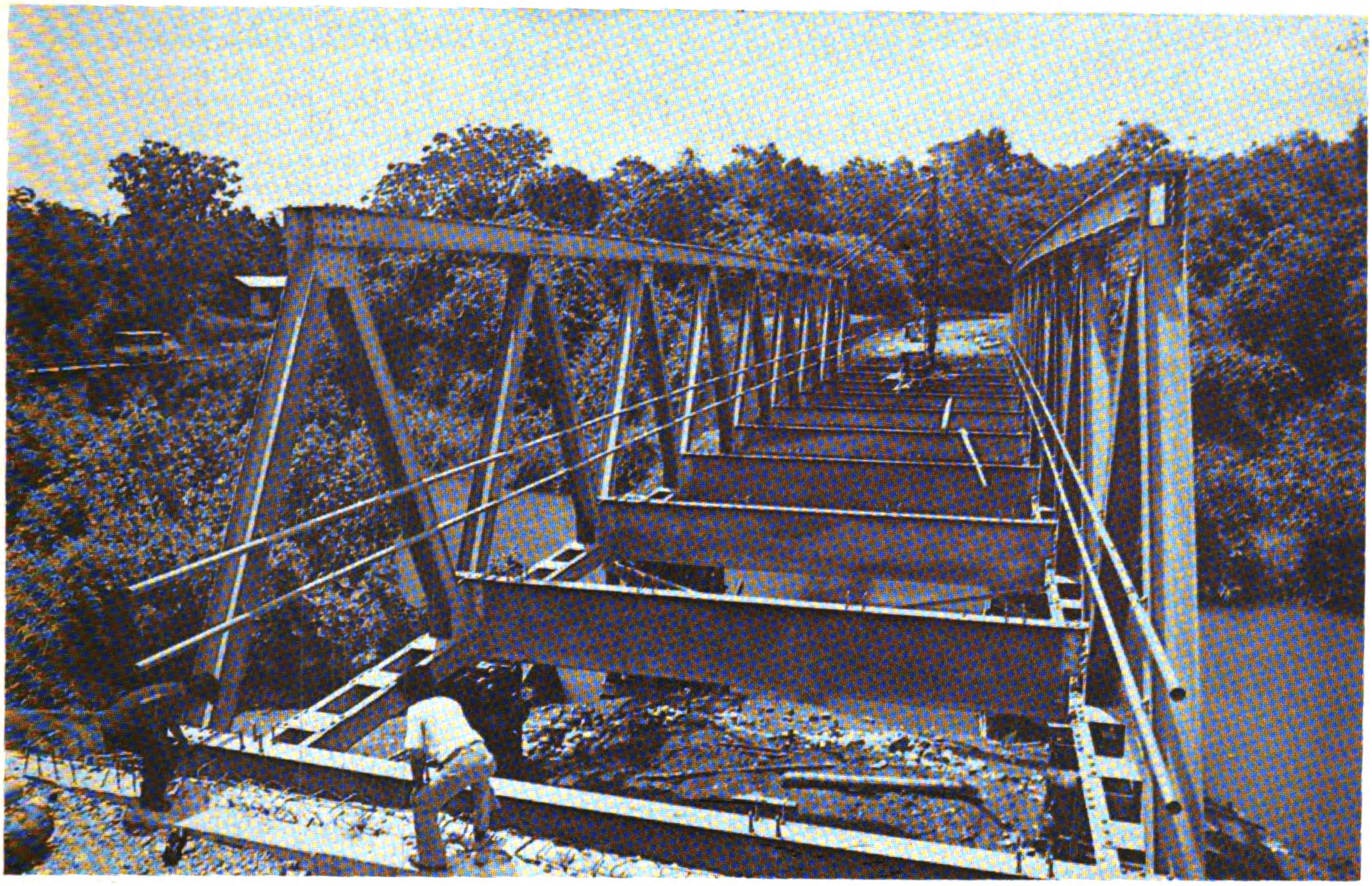

Proyek pembangunan nasional yang ada di daerah

perencanaan sektoral akan didapat oleh sistim perencaana daerah dengan memanfaatkan unsur-unsur keuntungan lokasi dari masing-masing daerah.

Karenanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, perencanaan sektoral pada tingkat nasional perlu didukung dengan sistim perencanaan daerah dalam menentukan pemilihan lokasi kegiatan pembangunan.

"Kedua sistim perencanaan tersebut seharusnya tidak saling bertentangan, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Alfian Lains, ekonom dari Andalas.

Keuangan Daerah

Pembangunan daerah secara definitif, seperti yang dikemukakan ekonom ternama, Prof. Drs. Hendra Esmara adalah semua kegiatan pembangunan yang ada atau dilakukan di daerah, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Pertama, kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan nasional yang ada di daerah itu, dan *Kedua,* kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah itu sendiri,diluar yang sudah direncanakan pemerintah pusat.

Dalam buku mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 1989/1990 dikemukakan, keuangan negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah, bahkan dapat dikatakan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilaksanakan di daerah.

Didalam melangkah maju melaksanakan pembangunan, maka sejak beberapa tahun terakhir ini telah ditempuh berbagai upaya perbaikan dalam sektor keuangan daerah.

Demikian juga terus dilaksanakan pengerahan dan pengelolaan dana pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sejalan dengan pengelolaan keuangan negara.

Berbagai kebijaksanaan yang ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Perkembangan pelaksanaan APBD tk. I, yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan/bantuan Pemerintah Pusat, pengeluaran rutin daerah serta pengeluaran pembangunan daerah sejak tahun 1983/84 hingga 1987/88 umumnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Data menunjukkan, bila pada 1983/84 sumber-sumber penerimaan daerah tk. I seluruh Indonesia baru mencapai Rp 2.177,0 milyar, maka pada 1987/88 telah meningkat menjadi Rp 3.010,5 juta.

Begitu juga dengan pengeluaran daerah tingkat I seluruh Indonesia, yang pada 1983/84 baru Rp 2.080,4 milyar, maka pada 1987/88 telah meningkat menjadi Rp 2.952,6 milyar.

Seperti diketahui, PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan pendapatan lain-lain, merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat dipergunakan oleh masing-masing daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan, sebagian besar daripada PAD tingkat I adalah berasal dari pajak daerah.

APBD

Pada hakekatnya pengelolaan ke-

Digitized by Google

Pembangunan daerah harus menitikberatkan bidang pertanian

uangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam kerangka desentralisasi itu dibentuk daerah-daerah otonom dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam hal pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, maka sumber pendapatan daerah dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu PAD, pendapatan yang berasal dari Pemerintah tingkat yang lebih tinggi dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku serta pendapatan lain yang sah.

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab maka kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya.

Kebijaksanaan mengenai hal ini dimaksudkan untuk mendorong kemampuan daerah sebesar-besarnya di dalam membiayai urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah ditujukan agar Pemerintah daerah mempunyai cukup sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya, meratanya sumber-sumber dana yang potensial antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan kepastian bahwa pelayanan pemda sejalan dengan usaha-usaha pembangunan yang berlandaskan Trilogi Pembangunan.

Untuk itu antara lain ditempuh kebijaksanaan agar penggalian pajak daerah tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha peningkatan ekspor.

Di sisi lain, kebijaksanaan di bidang pengeluaran daerah meliputi pengeluaran rutin dan pembangunan.

Kebijaksanaan di bidang pengeluaran daerah diarahkan agar dapat menciptakan pengaruh yang besar kepada perekonomian, mendorong sektor swasta, memperluas lapangan kerja, memperluas usaha pemerataan, membantu pengusaha ekonomi lemah, menggunakan produksi dalam negeri serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata.

Bicara soal kebijaksanaan keuangan daerah, maka kebijaksanaan diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah.

PAD tingkat I seluruh Indonesia dalam 1983/84 mencapai Rp 405,9 milyar, yang meningkat menjadi Rp 705,9 milyar pada 1987/88, atau naik 73,9% selama periode itu.

Tentang pajak daerah, jumlah penerimaan pajak daerah tingkat I seluruh Indonesia pada 1983/84 mencapai Rp 305,4 milyar dan jumlah ini meningkat menjadi Rp 564,6 milyar pada 1987/88. Dengan demikian berarti peningkatan PAD dalam periode banyak ditentukan oleh pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Hingga kini terdapat enam jenis pajak yang dipungut oleh daerah tingkat I. Berdasarkan data 1987/88, dua jenis pajak yaitu bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) masing-masing merupakan 51,6% dan 41,1% dari total penerimaan pajak daerah tingkat I.

Disamping itu, pada daerah tingkat II terdapat 37 jenis pajak, tapi hanya tujuh jenis pajak yang potensial dan memberikan sumbangan penerimaan yang berarti.

Berbagai penelitian yang dilakukan menyimpulkan, sistim perpajakan daerah masih perlu ditingkatkan efisiensinya dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah.

Demikian pula halnya dengan retribusi daerah, di mana terdapat 191 jenis retribusi daerah, yang meliputi 57 jenis di daerah tingkat I dan 134 jenis di daerah tingkat II.

Meskipun demikian, hanya beberapa jenis retribusi saja yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Menyadari akan permasalahan tersebut, Pemerintah sedang merintis langkah-langkah penyederhanaan perpajakan dan retribusi daerah, dimulai dengan upaya penyusunan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menggantikan UU No. 11 dan 12 Drt. tahun 1957.

Dengan menyadari bahwa keterbatasan sumber PAD sebagai salah satu komponen anggaran pembangunan daerah yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai umumnya belum optimal, maka upaya penggalian PAD perlu terus dilakukan, termasuk didalamnya, lebih mengintensifkan proyek-proyek pembangunan daerah yang ada. Tentunya, kegiatan ini tetap memperhatikan bahwa ia tak akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian. Tapi malah sebaliknya. □ (HS)

Digitized by Google

Desentralisasi dan Kesatuan Bangsa

Jika mengikuti sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara seksama, sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang, maka akan jelas bagi kita tonggak-tonggak sejarah nasional Indonesia itu. Para pakar ilmu politik membagi sejarah kemerdekaan itu ke atas empat tonggak sejarah. Tonggak pertama, katanya dari tahun 1945 sampai tahun 1950, tonggak kedua 1950 - 1955; tonggak ketiga, 1955 - 1959 dan tonggak keempat, 1959-1965. Belakangan periode 1966 hingga sekarang (Orde Baru) menjadi tonggak kelima, dari sejarah kemerdekaan Indonesia.

Pada periode pertama, bangsa ini berjuang keras untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima tahun yang penuh perjuangan, puluhan ribu tetes darah mengalir, puluhan ribu sosok manusia tergeletak tanpa nyawa, menghiasi puluhan Taman Makam Pahlawan. Tetapi ada pula para pahlawan tak dikenal yang gugur dalam membela negaranya. Pada periode ini benar-benar perjuangan phisik yang sungguh menegangkan dan melelahkan.

Periode kedua, bangsa ini masih juga dirongrong oleh pemberontakan-pemberontakan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih terus tergoncang oleh pemberontakan DI/TII, Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Pemberontakan R.M.S. (Republik Maluku Selatan) di Maluku. Semua ini merupakan sisa-sisa perjuangan phisik pada periode pertama yang masih belum selesai. Pada periode ini, perjuangan beralih dari perjuangan phisik kepada perjuangan konstitusi.

Yang menjadi persoalan adalah tata cara dan ketentuan tentang penyelenggaraan tata kehidupan bernegara bangsa. Malah diberlakukannya UUD Sementara (1950) yang menempatkan Presiden bukan sebagai Kepala Pemerintahan tetapi hanya sebagai Kepala negara yang serimonial belaka. Sistem pemerintahan adalah sistem Parlementer, dimana Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, bertanggung jawab pada Parlemen. Akibatnya, Kabinet jatuh bangun; tak ada yang bisa bertahan lama. Paling lama sebuah kabinet hanya bertahan lima bulan, sudah itu dijatuhkan oleh mosis tidak percaya dari Parlemen.

Salah satu hasil yang paling menonjol dari periode ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1955. Ini merupakan program utama Kabinet Burhanudin Harahap SH. Kendati kabinet itu sendiri hanya seumur jagung. Pemilihan Umum itu diikuti tidak kurang dari 28 partai politik, dan berhasil membentuk Parlemen dan Dewan Konstituante pada tahun 1956. Dewan Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun UUD baru sebagai pengganti UUD Sementara tahun 1950, ternyata gagal melaksanakan tugasnya. Hingga tahun 1959 Dewan tersebut tidak berhasil, malahan perdebatan tentang dasar negara tambah hangat.

Untuk mengatasi perdebatan panjang tentang Dasar Negara dalam Dewan Konstituante Presiden Soekarno (waktu itu) dengan segala keberanian politik yang ada padanya mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945, pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dekrit ini mengakhiri periode ketiga (1955 - 1959).

Periode keempat, Indonesia telah kembali ke UUD 1945. Menjelang akhir periode ketiga, muncul berbagai pergolakan daerah. Tahun 1957 timbul pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera. Yang ditandai dengan lahirnya Dewan Gajah (Teritorium I/ Sumatera Utara), Dewan Banteng (di Sumatera Tengah) dan Dewan Garuda (Teritorium II/Sumatera Selatan). Para tokohnya adalah Kolonel Simbolon (Dewan Gajah), Letkol. Achmad Husein (Dewan Banteng) dan Letkol Berlian (Dewan Garuda).

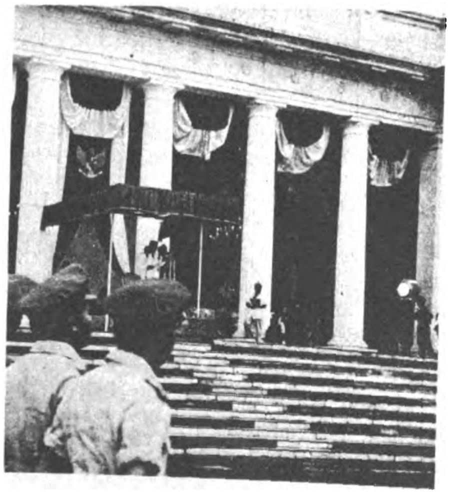

Dekrit Presiden '59

Di daerah Indonesia Timur (Teritorium VII), muncil apa yang disebut PERMESTA (Perjuangan Semesta) dengan tokoh-tokohnya: Letkol. Vence Sumual, Mayor Somba, Kolonel Warouw. Semua ini adalah gerakan yang menuntut otonomi penuh. Tetapi dalam situasi politik yang demikian, dimana Negara Ke satuan Republik Indonesia yang muda itu belum cukup kuat, maka tuntutan otonomi penuh oleh daerah-daerah itu belum dapat dipenuhi.

Jawaban atas pemberontakan menuntut otonomi itu justru menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Perang saudara antara pasukan pemerintah pusat melawan pasukan yang ada di daerah. Sama-sama anggota TNI/ABRI yang sama-sama merebut kemerdekaan melalui perang gerilya. Sama-sama melawan tentara Belanda, tapi kemudian harus saling berhadapan satu dengan lainnya, selama pergolakan daerah pada pertengahan dasawarsa 1950-an.

Sementara pemberontakan kedaerahan belum selesai, dibidang politik keadaan semakin rumit, karena keputusan Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat (sekarang Irian Jaya) ke tangan Republik Indonesia. Bulan Desember tahun 1960 dicetuskan TRI KOMANDO RAKYAT, untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tanggal 15 Januari 1961 KRI Macan Tutul yang menjadi Komandan Armada Angkatan Laut Indonesia ketika menyerang Irian Barat, tenggelam. Di atasnya terdapat Komodor YOS SOEDARSO, Deputi KSAL.

Sejak itulah sentralisasi kekuasaan mulai dijalankan secara lebih ketat dan dalam laju perkembangan yang lebih intensif. Partai-partai politik dibubarkan (dari 28 partai yang ikut pemilu 1955 diciutkan menjadi hanya 9 partai). Kesembilan partai yang tinggal adalah: PNI, NU, PKI, PARKINDO, PSII , Partai Katolik, IPKI, MURBA dan PERTI.

Partai-partai inilah yang berupaya untuk mewarnai kehidupan politik nasional waktu itu. Semuanya oleh Bung Karno disebut sebagai kekuatan-kekuatan Revolusi Indonesia.

Jadi jika belakangan ini, masalah desentralisasi sebagai upaya men-

Digitized by Google

dorong pertumbuhan daerah kembali muncul, maka tidak berarti bahwa hal itu adalah masalah baru. Tetapi telah timbul pada pertengahan kedua dasawarsa 1950-an. Perbincangan desentralisasi sekarang ini, sesungguhnya hanya penegasan ulang saja.

Tiga prinsip kewenangan

UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah jika dikaji lebih dalam, sesungguhnya mengandung beberapa prinsip; antaranya: dekonsentrasi dengan wilayah administratif, desentralisasi dengan wilayah Tingkat I dan II serta perbantuan yaitu tugas pemerintah pusat yang dilakukan daerah.

Dimuka dikatakan bahwa tidak semua daerah punya kemampuan untuk menerima otonomi itu. Jika memperhatikan ketiga prinsip di atas, maka sebenarnya secara bertahap pelaksanaan otonomi daerah itu dapat diberikan. Tentu memperhatikan kemampuan daerah dalam menerima desentralisasi. Apabila prinsip-prinsip di atas dilaksanakan sekaligus dengan segala kaitannya, dikhawatirkan akan terjadi regulasi berkelebihan. Sehingga terpaksa harus dilakukan deregulasi untuk menghindari situasi kacau, tatalaksana pemerintahan yang tak beraturan (semrawut).

Barangkali untuk menghindari kesemrawutan ini, kepada daerah-daerah yang sudah selayaknya menikmati dekonsentrasi kepadanya dapat diberikan hak itu. Untuk kemudian melihat perkembangannya, sehingga kepadanya dapat pula diberikan desentralisasi setelah dilakukan pembinaan kemampuan daerah tersebut. Sehingga pada gilirannya kepada daerah dimaksud dapat diberikan otonomi penuh. Ini semua tergantung pada tingkat kemampuan (disegala bidang) daerah itu.

Pendekatan-pendekatan struktural ini memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daerah sebelum diberi otonomi penuh. UU No.5 Tahun 1974 secara politis memberi kewenangan bagi daerah untuk menata sendiri daerahnya. Tetapi pelaksanaannya hingga sekarang masih belum dapat sepenuhnya. Masalahnya tergantung juga pada kesiapan daerah untuk menerima tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah sepenuhnya.

Sejak lahirnya UU No.5 Tahun 1974 hingga sekarang telah beberapa daerah diberi dekonsentrasi. Banyak sudah kota administratif yang lahir sesudah adanya UU No.5 Tahun 1974 itu.

Disadari bahwa pemberian otonomi bagi daerah Tingkat I dan II, membutuhkan suatu persiapan yang matang agar tidak terjadi kesemrawutan pemerintahan. Disamping tidak sebaliknya menambah beban bagi daerah tersebut. Masalah paling pokok dalam memberikan otonomi untuk daerah adalah: *Pertama,* kemampuan dan potensi daerah secara ekonomis. Maksudnya, apakah secara ekonomis daerah tersebut mampu mengurus diri sendiri; tak lagi tergantung pada pemerintah pusat. *Kedua,* kemampuan aparat pelaksana pemerintahan harus siap menerima penyerahan tanggung jawab yang sebelumnya ada pada pemerintah pusat. *Ketiga,* realitas sosiologis serta kultur masyarakat daerah setempat.

Ketiga masalah ini merupakan hal pokok yang harus dimiliki daerah jika hendak menjadi daerah otonomi penuh. Tanpa ketiga hal ini, otonomi hanya akan menjadi beban yang lebih berat lagi. Sesungguhnya otonomi daerah juga merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan, sehingga tidak hanya terpusat pada satu wilayah saja.

Terkadang orang berpikir, apakah otonomi daerah itu tidak akan menimbulkan perbedaan tingkat perkembangan dan pertumbuhan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial seperti yang pernah terjadi diawal kemerdekaan dulu.

Itulah situasi yang ada sekarang apabila kembali orang memperbincangkan masalah desentralisasi. Banyak hal yang masih perlu ditata sebelum desentralisasi dilaksanakan. Kesiapan aparat, kesiapan daerah itu menerima tanggungan jawab pengurusan diri sendiri, baik secara ekonomis maupun sosial budaya. Jika tidak maka desentralisasi yang kemudian diikuti oleh pemberian otonomi justru akan menimbulkan masalah bagi daerah tersebut.

Barangkali pengalaman sejarah kemerdekaan bangsa ini perlu dijadikan catatan dalam melaksanakan UU No.5 Tahun 1974 itu. Pengalaman sejarah bangsa ini membuktikan bahwa proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu mengalami gangguan. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang lahir pada tahun 1949, sebenarnya adalah salah satu bentuk dari otonomi.

Melihat kenyataan sejarah itu, barangkali perlu dipikir bagaimana bentuk otonomi yang akan diberikan kepada daerah. Paling tidak otonomi yang hendak diberikan kepada daerah harus benar-benar dapat dijamin tidak akan menimbulkan masalah baru lagi bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masih banyak hal yang perlu dikaji, sebelum otonomi diserahkan penuh kepada daerah. Pikiran untuk memberikan otonomi secara bertahap, barangkali cara yang paling baik. Artinya, melihat kemampuan daerah serta kultur daerah yang dapat menjamin tidak akan terjadi pemisahan diri absolut yang hasilnya justru membahayakan keutuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.** (tbr)

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR
Jl. Basuki Rakhmat 98 104, Surabaya
Tlp. 910090-99 Tlx. 32376-9

Direksi, Staf dan segenap Karyawan
mengucapkan
Selamat Idul Fitri
1 syawal 1409 h
mohon maaf lahir & bathin

Kantor Cabang :
Banyuwangi, Jember, Malang, Madiun, Kediri, Pamekasan, Bojonegoro, Lumajang, Ngawi, Jombang, Probolinggo, Kraksaan, Blitar, Tulungagung.

Digitized by Google

Kartini Penarik Pelatuk Kebangkitan Wanita

Belajar dari sejarah. Ini suatu pernyataan kearifan lama yang masih sering diulang-ulang.

Dalam situasi yang serba cepat, serba praktis, dan serba mendadak masih adakah tersisa waktu untuk merenung, menengok ke masa lampau?

''Kodrat hakiki wanita jangan sampai lupa dan harus tahu diri. Karena bagaimana pun juga, wanita adalah pendamping suami dan ibu dari anak-anak,'' kata Ketua Umum IWAPI Dra. Dewi Motik Pramono.

Meski impian ibu Kartini 90 tahun lalu sudah terbukti, bahwa kini kedudukan wanita sudah sejajar dengan pria, namun kaum wanita juga harus menyadari tanggung jawab yang diterimanya sejalan dengan statusnya.

Apa hakekatnya hari Ibu Kita Kartini? Memajukan harkat kaum wanita secara harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan maupun industri serta kebudayaan. Karena, inilah manifestasi pertama dari kesadaran kaum wanita bahwa ia harus bangkit menyertai kemajuan dunia.

Kalau kesadaran itu tumbuh sebagai kesadaran berkebangsaan dengan tumbuhnya semangat kesatuan nasional, maka itu disebabkan adanya cita-cita R.A. Kartini.

Coba kita simak, faktor yang berpengaruh terhadap cita-cita Kartini. Pertama faktor kelebihan dalam tingkat pendidikan. Para pelopor itu relatif telah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik.

Kaum wanita itu mempunyai kemampuan otak, dan akibatnya memiliki kemampuan menganalisa kondisi masyarakat, dan menentukan arah perjuangan.

Faktor ini memang penting. Tapi ada faktor yang lain yang justru memotivasi kemampuan penalaran kaum wanita. Faktor itu adalah kepekaan yang tinggi terhadap suara hati nuraninya sendiri.

Desakan keras hati nuraninya membuat kaum wanita itu pada saat-saat tertentu mampu membendung perasaan takutnya. Mereka lalu bergerak dan berbuat.

Faktor kedua, yaitu faktor penghayatan terhadap keterbelakangan kaum wanita, keadaan kesehatan yang jelek dan ketidakadilan, telah mendorong mereka untuk muncul menjadi wakil dan juru bicara rakyat.

Faktor lainnya, yaitu spontanitas. Di mana kaum wanita mampu mengambil prakarsa sendiri. Spontanitas itu tidak jatuh dari langit, tapi ia muncul setelah melewati proses yang panjang dan makan waktu lama.

Spontanitas itu muncul dalam keadaan mereka sendiri khususnya, dan rakyat umumnya berada dalam situasi terjepit pada 90 tahun lalu. Memang benar, kreatifitas sering muncul dalam kondisi orang merasa terjepit.

Spontanitas itu dengan sendirinya terbuka karena kaum wanita sekarang digiring oleh kaum yang lebih tua. Ia muncul dari serangkaian usaha yang panjang, yang sering diiringi perasaan frustasi.

Saat bersejarah, tanggal, bulan dan tahun kejadian yang diabadikan yaitu 21 April 1989 ini, hanyalah merupakan pelatuk senjata yang telah dirakit cukup lama.

Dewi Motik Pramono

Perbuatan nyata kaum wanita tersebut, menjadi faktor pengilham dan perangsang pada masa mendatang. Satu bunga yang bersemi dari satu benih, merangsang tumbuhnya seribu bunga yang lain. Yang penting, R.A. Kartini yang memulai, lalu jejak itu diikuti oleh Kartini-Kartini generasi penerusnya.

Kartini-Kartini sekarang banyak bergerak dalam berbagai sektor kehidupan. Bahkan mereka makin terspesialisasi. Mereka tahu, masih banyak kaum wanita yang miskin, terbelakang, tertinggal dalam kebodohan dan keterpencilan dan mengalami tindakan ketidakadilan.

Dra.Dewi Motik Pramono menekankan, meski wanita sekarang kedudukannya sudah sejajar dengan pria karena hal itu berkat perjuangan R.A.Kartini di mana emansipasi wanita bisa terangkat ke permukaan, namun kodrati wanita jangan sampai ditinggalkan. Sehingga apa yang dijalankan kaum wanita, tidak terlepas dari tanggung jawabnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Partisipasi wanita dalam pembangunan nyata semakin luas. Terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah wanita bersekolah dan jadi pekerja berpenghasilan.

Namun demikian, harapan akan tercapainya hubungan yang simetri dengan pria masih begitu jauh. Hal itu dikarenakan perlakuan terhadap wanita bekerja masih berbeda dengan pria.

Menurut data Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dari 15.322 jabatan pimpinan eselon I sampai eselon III ternyata hanya 846 jabatan atau 5,5 persen yang dijabat oleh wanita.

Padahal jumlah pegawai negeri wanita naik jumlahnya dari 302.589 orang atau 18,1 persen pada 1974 menjadi 764.137 orang atau 27,4 persen pada 1984.

Dalam pendapatan pun ternyata

Digitized by Google

Kemajuan yang dicapai wanita Indonesia cukup nyata

pria lebih banyak daripada wanita, meski mereka memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang sama.

Sementara pada mereka yang berpendidikan akademi/universitas, misalnya, pendapatan wanita hanya 70,49 persen dari pendapatan pria. Yang berpendidikan SMTA pendapatan wanita 68,99 persen dari pendapatan pria. Dan yang berpendidikan SMTP 61,39 persen dari pria, serta berpendidikan SD hanya 50,79 persen dari pendapatan pria.

Catatan yang tidak begitu menggembirakan juga masih ditambah, misalnya data yang menunjukkan bidang kerja yang dimasuki wanita masih sangat tradisional.

Jumlah terbesar pegawai negeri wanita, terdapat di Departemen Kesehatan yaitu 46,7 persen dan menyusul Departemen Pendidikan 40,6 persen serta BKKBN yaitu 34,6 persen.

Angka-angka itu menunjukkan seolah-olah pekerjaan yang sesuai untuk wanita adalah yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan saja. Apalagi kalau dilihat pada angka pegawai wanita di Departemen Perhubungan dengan jumlah hanya 5,1 persen, di Departemen Pekerjaan Umum (PU) hanya 8,2 persen dan Departemen Pertambangan dan Energi 9,3 persen.

Tingkat partisipasi kerja wanita Indonesia menunjukkan angka 32,2 persen. Ini berarti bahwa hampir sepertiga seluruh wanita Indonesia berumur 10 tahun lebih, ikut aktif dalam kegiatan ekonomi dengan partisipasi yang tertinggi sebesar 50 persen di DI. Yogyakarta dan yang terendah 19 persen di Sulawesi.

Apabila dibandingkan antara daerah kota dan pedesaan, terlihat bahwa tenaga kerja wanita daerah kota amat rendah partisipasinya yaitu 24,0 persen.

Dalam hal ini, D.I.Yogyakarta juga memperlihatkan angka tertinggi yaitu 34,6 persen, sedang terendah Kalimantan yaitu 12,4 persen. Sedangkan daerah pedesaan mencapai 34,6 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunjukkan angka tertinggi 55,4 persen, sedangkan terendah terdapat di DKI Jakarta yaitu 14,0 persen.

Perbedaan terbesar partisipasi angkatan kerja wanita kota dan pedesaan tersebut disebabkan karena sifat ekonomi yang berbeda. Daerah pedesaan karena sektor pertanian (dan industri rumah tangga) yang bersifat tradisional, informal dan kekeluargaan, orang akan mudah mendapatkan pekerjaan. Sedangkan daerah perkotaan, perekonomiannya lebih bersifat formal dan kaku, di mana orang lebih sulit memperoleh pekerjaan.

Keistimewaan angka D.I.Yogyakarta yang lebih tinggi dari daerah lain tersebut, kemungkinan disebabkan karena daerah tersebut serba lain dari daerah lainnya. Baik itu struktur umur maupun pendidikan, komposisi penduduk, sejarah dan lain sebagainya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita relatif rendah pada mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun SMTP. Tingkat partisipasi tinggi pada mereka yang tidak berpendidikan, disebabkan karena cukup banyaknya jenis pekerjaan yang tersedia dan dapat dilakukan.

Umumnya, pekerjaan-pekerjaan itu mudah dilakukan, karena tidak memerlukan pendidikan/ketrampilan khusus dan mendapat imbalan upah yang relatif rendah, misalnya pekerjaan kasar di sektor pertanian atau perdagangan dan usaha sektor informal dan usaha rumah tangga.

Selama 10 tahun terakhir, persentase angkatan kerja wanita menunjukkan adanya penurunan sebesar 33,2 persen. Tetapi sebaliknya persentase yang bekerja menunjukkan kenaikan sebesar 29,3 persen menjadi 31,5 persen.

Yang sangat menarik, persentase orang bersekolah meningkat dari 11,6 persen menjadi 16 persen. Ini akibat dari usaha pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan pada tahun-tahun belakangan ini.

Sedangkan perubahan drastis adalah turunnya persentase penduduk wanita yang kegiatannya mengurus rumah tangga dari 44,8 persen menjadi

Digitized by Google

41,2 persen.

Dr.Pratiwi Soedarmono mengatakan, kemajuan yang dicapai oleh wanita Indonesia tampak begitu nyata. Banyak wanita menduduki posisi penting di segala bidang. Baik di lingkungan pemerintah maupun di swasta.

Diberikan contoh, sarjana, karyawati, seniwati, wiraswasti, penerbang, ABRI, antariksawati dan pakar-pakar di berbagai bidang, kesemuanya wanita, tak dapat disangkal. Mereka memberi sumbangsih yang besar dalam pembangunan.

Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah wanita, katanya. Ditilik dari jumlahnya yang besar, tampaklah potensi besar yang terdapat di dalamnya dalam menunjang pembangunan bangsa Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, wanita mempunyai berbagai sifat lemah dibandingkan pria. Terutama dalam bentuk fisiknya. Di samping itu, terdapat pula hal-hal yang berbeda dari pria, seperti kelemahlembutannya, kadar emosional yang lebih tinggi, lebih perasa, lebih kurang berani dan lainnya.

Namun perlu dikaji juga lebih mendalam. Benarkah kelemahan tersebut merupakan suatu kelemahan yang mutlak? Apakah itu justru bukan merupakan suatu titik kuat dalam kehidupan manusia?

Perbedaan yang terdapat pada sifat pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan YME bukan tanpa makna tertentu. Secara bergurau, bila ditanyakan apakah wanita melahirkan pembangunan? Jawabnya, adalah 'wanita melahirkan pembangunan'. Betapa tidak. Semua manusia dilahirkan oleh wanita. Dan pembangunan dilakukan oleh manusia. Dan diperuntukkan manusia, apapun sektor yang dibangun.

Betapapun modernnya suatu bangsa, betapapun majunya suatu bangsa, namun mereka tak dapat menghindarkan dari kenyataan ini. Dalam hal inilah, para wanita Indonesia dituntut berperan dalam pembangunan watak bangsa.

Sejalan dengan hal itu, pembangunan dewasa ini terutama dibidang pembangunan ekonomi, ditujukan terwujudnya struktur perekonomian yang seimbang dengan titik berat kekuatan industri yang didukung sektor pertanian tangguh.

Konsekuensi dari langkah tersebut, adalah akan lahirnya suatu masyarakat yang modern dengan dampak positif dan negatifnya yang tak dapat dihindarkan.

Untuk itu, apabila pembangunan ekonomi itu tidak diikuti oleh suatu pembangunan watak bangsa maka pengaruh negatif dari masyarakat modern akan mengurangi nilai sejahtera yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut.

Dalam Repelita III telah digariskan asas pemerataan yang menuju pada terciptanya keadilan sosial dan dituangkan dalam delapan jalur pemerataan.

Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi kaum wanita yaitu peningkatan pendidikan dan ketrampilan wanita terutama di daerah-daerah pedesaan berupa pendidikan formal, ketrampilan dan kewiraswastaan.

Selain itu, partisipasi wanita juga diarahkan kepada keterlibatan dalam penanggulangan masalah gizi, pemeliharaan kesehatan, pertumbuhan anak, KB, industri serta kepemimpinan.

Dalam Repelita III itu juga partisipasi wanita diarahkan dengan dikembangkannya peraturan perundangan yang mendorong turut sertanya tenaga wanita dalam kegiatan pembangunan dan sekaligus untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita.

Sedangkan dalam Pelita IV tujuannya memperbaiki standar hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan adil. Di samping itu, tentu saja memberikan landasan bagi pembangunan berikutnya. Sebab pembangunan merupakan mata rantai yang tak dapat diputuskan.

Meski pembangunan dalam Repelita

Wanita mempunyai sifat lemah dibanding pria

Digitized by Google

IV adalah pembangunan ekonomis dengan titik berat pada sektor pertanian, agar terpenuhi kebutuhan pangan dan melangkah ke industri. Maka manusia haruslah mendapat perhatian khusus, terutama dalam pendidikannya. Apabila kita ingin membangun manusia seutuhnya.

Tantangan dalam Pelita V ini memang berat. Utamanya pengadaan kesempatan kerja. Tapi diperkirakan sektor pertanian akan menyerap 4 juta tenaga kerja baru dan sektor industri 2,3 juta lapangan kerja baru. Peningkatan tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas di sektor-sektor tersebut.

Menurut Ny. Corry Bintal Jemur, pengumpul batu akik dan batu permata baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tenaga kerja yang terserap di bidang industri kecil batu akik selain pria juga banyak dilakukan oleh wanita.

"Selama ini, pengumpul dan penggosok batu akik banyak terdapat di Sukabumi Jawa Barat. Penggosoknya juga kaum wanita yang dengan tekunnya melakukan penggosokan untuk kemudian dijual ke Jakarta," kata insinyur geologi lulusan Jerman Barat itu.

Hal itu menunjukkan keberadaan kaum wanita sebenarnya sangat potensial dalam membantu suami mencari nafkah tanpa meninggalkan kodratnya sebagai wanita.

Batu-batu yang dibeli dari pengrajin Sukabumi itu diakui tidak bagus. Tapi, Ny. Corry menghargai kerja keras dari pengrajin batu akik yang sudah dengan susah payah mencari, mengumpulkan untuk kemudian digosok dengan cara tradisional hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja.

Batu-batu yang bagus di Indonesia hanya intan, untuk batu permata dan kecubung untuk batu akik. Sedangkan batu akik, menurut Ny.Corry Bintal Jemur, itu bermacam-macam dari Sulaeman Daud, Tapak Jalak, Badar Besi sampai Zamrud.

Memenuhi kebutuhan hidup

Batu zamrud yang terbaik berwarna hijau rumput yang sedang segar-segarnya. Dan batu safir warna terbaik biru kembang gandum. Untuk Jade giok warna terbaik sama dengan zamrud, di Cina dikenal sebagai lambang keberuntungan.

Di Indonesia sendiri, konsumen batu-batuan permata umumnya kaum wanita. Dan batu-batu itu tidak ada standar harganya. Sementara kalau di luar negeri ada standar karatnya.

"Harga-harga batu permata itu bagi saya tidak penting. Yang penting yaitu penyerapan tenaga kerja dan utamanya kaum wanita pekerja pencari batuan tersebut," ujarnya sembari tersenyum bangga, karena Kartini yang ada di desa memang tampak mulai bergerak.

Lapis yang lebih atas menarik lapis yang di bawahnya. Prosesnya nyata-nyata suatu proses pendidikan. Tinggal harus menjaga benar, agar proses itu tidak semu.

Semua itu memang atas dorongan motivasi untuk ingin maju seperti apa yang dimaui Kartini. Bukan sekedar ingin desanya menjadi juara yang semu.

Wanita di desa mempunyai tradisi bekerja, mulai pagi buta dan akan berakhir kalau mau tidur. Orientasinya sangat sederhana yaitu membantu menyediakan pangan yang cukup untuk keluarganya.

Kalau orientasi itu hendak ditingkatkan, sesuai dengan tuntutan zaman, tidak ada jalan lain kecuali seperti yang telah dirintis oleh Kartini melalui pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah.

Perjuangan emansipasi wanita memang perjuangan yang makan waktu, menuntut kesabaran dan keberanian karena menyangkut hal-hal yang telah mendarahdaging.

Tapi, bila cakrawala baru telah tiba, tidak hanya wanita yang terbebas. Pria dan seluruh masyarakat pun akan ikut bebas dari ketidakadilan dan norma hidup yang timpang.

Perjuangan yang demikian tentu saja membutuhkan kerjasama pria dan masyarakat, berupa kesadaran untuk memberikan hak wanita sebagai manusia yang sama.

Wanita sendirilah yang harus memulai. Sebab wanita harus menyadari bahwa aturan-aturan tak adil yang kini berlaku untuknya bukanlah kodrat. Bukan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memaksakan kehendakNya dan tidak pernah menginginkan kesengsaraan hidup mahlukNya, beban berat yang harus ditanggung wanita adalah buatan manusia.

Dan dalam era pembangunan ekonomi sekarang ini, menurut Titi Said, peranan wanita sangat bagus. Karena wanita telah menyadari bahwa dirinya sudah sejajar dengan kaum pria.

"Namun meskipun wanita kedudukannya telah sejajar, jangan ingin melebihi kaum pria. Namanya saja sejajar, jadi jalannya pun harus sama-sama," jelasnya.

Meski demikian wanita juga harus tetap mempertahankan kodratnya sebagai wanita, sehingga kehidupan dalam rumah tangga tetap terbina, katanya.☐ (Hera)

Digitized by Google

Perjuangan Kartini, Sebuah Gerakan Moral

Wanita dijajah pria sejak dulu. Dijadikan perhiasan sangkar madu.... Tapi kini semuanya telah berganti. Tekuk lutut disudut kerling wanita.

Lagu yang pernah populer di tahun -60 an itu, menggambarkan status wanita masih dianggap rendah. Tapi waktu terus berjalan. Setapak demi setapak, gambaran itu sudah terhapus.

''Berkat perjuangan R.A.Kartini maka emansipasi wanita dapat terangkat ke permukaan. Dan kedudukan wanita, kini sudah sejajar dengan pria,'' kata Ny.Mooryati Soedibyo.

Pernyataan seperti itu, selalu diberikan oleh setiap wanita pada saat ini. Selain pernyataan klise, bahwa wanita biar bagaimana pun tidak boleh melupakan kodratnya.

Kedudukan wanita sejajar dengan pria

Pandangan R.A. Kartini yaitu betapa wanita Indonesia tanpa cukup pengetahuan untuk dapat berdiri sendiri, maka akan sangat bergantung kepada pria. Hingga tidak berdaya pula jika harus berhadapan dengan tindakan sewenang-wenangnya pihak suami atau pria.

Sedangkan data-data mengenai wanita Indonesia sudah ada sejak dulu kala. Pada relief candi, prasasti, legenda rakyat, dan mitos-mitos, banyak diungkapkan mengenai wanita dengan seluk beluknya.

Dalam cerita-cerita rakyat misalnya, dapat ditafsirkan bahwa wanita merupakan sumber kehidupan. Karena dari badannya tumbuh jenis makanan pokok. Seperti dalam cerita Sri Pohaji (Sunda), dewi Sri (Jawa), cerita isteri Dewi Utama (Timur).

Sejarah juga mencatat nama-nama wanita yang pernah dikenal dalam sejarah Indonesia memerintah sebagai raja misalnya Ratu Sima dari negeri Kalingga, Jawa Barat pada abad VI sebelum masehi. Dan sejarah juga mencatat bangkitnya gerakan wanita Indonesia melawan penjajahan sejak tahun 1817.

Nama-nama seperti Tjut Nyak Dien, Dewi Sartika, Rasuna Said, Martha Christina Tiahahu, merupakan nama-nama yang tak asing lagi dalam sejarah pergerakan wanita di Indonesia.

Cita-cita Kartini pada pokoknya adalah pendidikan untuk anak wanita, pendidikan bagi kaum wanita agar dapat berdiri sendiri, memajukan bangsa Indonesia dengan mengikutsertakan wanita serta emansipasi wanita. Karenanya perjuangan Kartini disebut juga Gerakan Moral.

Untuk menghormati cita-cita Kartini sendiri, dengan biaya dan kerjasama dengan Food Kartini Den Haag maka didirikan sekolah-sekolah Kartini. Mula-mula di Semarang kemudian di Bogor, Jakarta, Madiun, Malang dan lainnya.

Pelajarannya sama dengan Hollands Inlandse School (HIS) ditambah pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan rumah tangga. Sementara W.R.Soepratman pun tidak ketinggalan, dan diciptanyalah lagu Ibu Kita Kartini untuk menghargai jasa-jasa pendekar wanita tersebut.

Setelah R.A.Kartini meninggal pada usia 25 tahun, tepatnya pada 21 September 1904; perjuangannya diteruskan oleh R.Dewi Sartika yang lahir pada 4 Desember 1884 dan meninggal pada 1947.

Dengan tersebar luasnya cita-cita Kartini dan Dewi Sartika, maka wanita Indonesia mulai bergerak dengan tujuan yang sama. Di mana-mana didirikan Perkumpulan Wanita.

Dibantu Budi Utomo di Jakarta pada tahun 1912 maka didirikan Putri Wanita di Yogyakarta 1920 dan di Surabaya Putri Sejati.

Dengan bekal pendidikan sebagai hasil nyata perjuangan Kartini, maka wanita Indonesia tidak lagi bertopang dagu menyaksikan dengan apatis perjuangan kaum pria.

Kalau pun wanita Indonesia tidak secara pisik terjun ke masyarakat, tapi pada umumnya cakap sebagai ibu rumah tangga. Pergerakan-pergerakan wanita yang semula hanya bertujuan memperbaiki kedudukan sebagai wanita, lambat laun juga bergerak aktif di bidang politik.

Dalam ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 kaum wanita juga diikutsertakan. Dimana setiap kalimat disertai dengan Setiap Putra Putri Indonesia ....

Wanita Indonesia, kini matanya terbuka lebar. Ia menyadari segala problema yang dihadapi sehari-hari. Baik yang menyangkut kelangsungan hidup keluarganya maupun yang menyangkut harga diri serta masa depan bangsanya.

Menurut Ny. Mooryati Soedibyo,

Digitized by Google

yang telah menggeluti pembuatan jamu tradisional dan kosmetika, untuk menyongsong tahap tinggal landas pada Pelita VI mendatang, maka perlu dipersiapkan pendidikan bagi wanita agar dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

Tanpa pendidikan yang memadai, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kendala yang selalu dihadapi wanita, dalam sistem penerimaan pegawai masih diutamakan pria.

Hal itu menyebabkan untuk sampai ke jenjang pimpinan atau ketenaran, wanita harus menempuh perjalanan sangat panjang dan berat. Jawaban yang tepat dalam menghadapi kondisi seperti ini yaitu profesionalisme.

Profesionalisme, tidak hanya menyangkut kemampuan kerja dalam suatu bidang tertentu. Tapi juga kemampuan bersikap dalam melaksanakan profesi.

Wanita, karena kodratnya yang harus hamil dan melahirkan kadang dirasa merepotkan kantor/perusahaan. Harus ada cuti hamil dan melahirkan.

Sementara wanita sendiri harus dapat menerima alasan tersebut. Tapi jika dalam GBHN telah menyebutkan adanya kesempatan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sebagai mitra sejajar, maka salah satu konsekuensinya adalah harus menciptakan iklim yang mendukungnya.

Ny. Mooryati Soedibyo sendiri mengimbau agar dalam Pelita V lebih banyak dibuka lapangan kerja dibidang industri, pemasaran, penjualan, promosi, pertanian dan lain sebagainya.

Sampai sekarang, kaum wanita ternyata mendominasi kehidupan pasar, baik sebagai pedagang keliling setempat maupun sebagai pedagang menetap yang memiliki kios.

Di seluruh nusantara, beribu-ribu kaum hawa mengandalkan kegiatan berjualan di pasar sebagai penopang hidup keluarga atau penambah penghasilan suami.

Keterlibatan kaum wanita dalam kegiatan berjualan di pasar, tidaklah seragam di seluruh Indonesia. Di pasar-pasar desa, jumlah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan berjualan jauh lebih banyak ketimbang di pasar-pasar besar di daerah perkotaan.

Salah satu kegiatan wanita

Pasar menyediakan berbagai kesempatan kerja untuk mencari dan memperoleh pendapatan. Peranannya sangat penting, terutama untuk daerah pedesaan di mana lapangan kerja di sektor pertanian makin langka dan kesempatan kerja di luar pertanian khususnya bagi mereka yang tidak bersekolah atau menikmati pendidikan sangat terbatas.

Kebijaksanaan ketenagakerjaan bagi wanita, bukanlah soal jam kerja saja. Tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan yang dapat menjamin taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Komitmen politik negara terhadap masalah tenaga kerja harus didasarkan pada pasal 27 UUD'45 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Komitmen politik negara terhadap masalah tenaga kerja harus didasarkan pada pasal 27 UUD'45 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dengan demikian, pekerjaan yang disiapkan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi era tinggal landas nantinya, bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang meningkatkan taraf hidup agar hidup lebih layak.

Oleh sebab itu, kata Ny.Mooryati Soedibyo lagi, perlu tiap tahun Pelita V ini ada target yang jelas dari pemerintah berapa jumlah kesempatan kerja yang harus disiapkan. Sehingga target pertumbuhan yang dikejar dalam pembangunan dapat seimbang dan berdampak bagi kepentingan rakyat banyak.

Bagi wanita sendiri, emansipasi bukan berarti meninggalkan kodratnya sebagai wanita, pendidik, dan isteri sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Lepas dari dorongan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam memajukan pendidikan, maka mereka sebenarnya sudah lebih menghargai pendidikan formal.

Hal itu berdasarkan kesadaran bahwa masa depan terletak pada pekerjaan yang ada di perusahaan atau di lingkungan pegawai negeri dan pendidikan di atas sekolah dasar dianggap sebagai investasi.

Kaum wanita telah didefinisikan oleh kaum pria dengan sebagai 'yang lain', yang bukan pria, dan karena itu dianggap lebih rendah.

Sebab itu, wanita yang tidak menyesuaikan diri dengan sifat-sifat kebudayaan pria, akan dikenakan diskriminasi secara sangat sistematis.

Semakin jelas 'penyelewengan' dari norma-norma yang didefinisikan kaum pria, semakin besar pula kemungkinannya kaum wanita dirugikan dalam kebudayaan mereka-yaitu tak diizinkan untuk menikmati manfaat yang tersedia bagi anggota-anggota yang tidak menyimpang.

Berada pada posisi yang merugikan, berarti berada dalam risiko-fisik dan psikologis- dalam komunitas wanita. (hera)

Digitized by Google

Bukan Lagi Emansipasi, Tapi Partisipasi

SEJARAH banyak mengajar kita untuk melihat hari kemarin, menggumuli hari ini dan menatap hari esok tanpa harus tenggelam dalam keseharian.

Sementara waktu terus mendesak, hingar bingar keseharian makin memusingkan, sepertinya tak sudi memberi kesempatan untuk menoleh kebelakang, berlama ditempat dan merenung hari esok. Semua berjalan seperti ada yang mengaturnya. Keseharian hidup ini begitu rumit sehingga tak ada kesempatan untuk melakukan semua itu. Bicara saja nampaknya orang lagi punya waktu, kalaupun ada, sudah ditentukan sehingga percakapan menjadi terbatas, seperlunya saja.

Tetapi barangkali disitu ada yang perlu dipelajari. Belajar dari sejarah hari kemarin, untuk melihat realitas hari ini dan sebagai bahan untuk mempersiapkan hari esok. Ini makna paling penting dari pada sejarah.

Hampir seabad lalu, seorang tokoh wanita Indonesia, RA Kartini, mulai sebuah gerakan. Gerakan moral untuk minta agar hak kaum wanita mau diperhatikan. Dia tidak melakukan "machts forming" (pembentukan kader) seperti lazimnya dilakukan pada organisasi modern seperti sekarang. Dia tak pula membentuk organisasi penuntut hak-hak azasi seperti yang berpusat di London sana. Tidak pula melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi seperti yang sedang hangat sekarang di Jakarta.

Kartini melakukan aksi sendiri, tanpa kekerasan, tanpa penekanan terhadap penguasa melalui cara yang hanya bisa dilakukan seorang saja. Seperti mogok makan, menunggu didepan pintu penguasa, dan sejenisnya itu. Kartini benar-benar melakukan aksi gerakan moral, yang lebih simpatik sehingga orang tergugah untuk memperhatikannya. Dia memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Dia hanya minta agar perlakuan terhadap wanita tidak terlalu ditindas, hak-hak asasinya agar tidak diperkosa dan agar kaum perempuan juga diberi kesempatan untuk maju.

Itu saja tuntutan RA Kartini, tidak lebih. Kalau ada yang lain, maka itu menyangkut fungsi dan peranan wanita dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kartini sadar sekali, bahwa pada zamannya kaum wanita masih terkebelakang. Tingkat pendidikannya, status sosialnya serta fungsi-fungsinya dalam tatanan kehidupan masyarakat masih sangat rendah.

Dia ingin meningkatkan derajat wanita melalui upaya meningkatkan pendidikannya, agar mereka mengerti dan mengetahui dengan jelas hak-hak serta kewajiban-kewajibannya baik dalam keluarga maupun ditengah masyarakat.

Bukan emansipasi tetapi partisipasi

Pada zamannya, memang diskriminasi masih sangat menonjol. Wanita ditempatkan sebagai pelengkap kehidupan keluarga. Dia tidak punya kekuasaan untuk menentukan, tak pula memiliki kewenangan untuk memutuskan. Wanita pada zaman Kartini hanya boleh melaksanakan kewajibannya tanpa hak untuk berpendapat. Dari padanya dituntut segala macam pengabdian; pengabdian terhadap suami, pengabdian kepada orang tua bahkan kepada anak pun ia harus mengabdi. Tak ada hak untuk membantah, mempertanyakan atau menolak setiap tugas.

Melihat keadaan itu, Kartini lalu tergerak untuk membangkitkan semangat kaum wanita. Semangat untuk memperjuangkan hak-haknya, tak hanya melaksanakan kewajiban semata. Untuk itu dia mulai dengan mendidik kaum wanita agar bisa membaca dan menulis. Sebab bagaimana bisa merubah nasib, jika faktor paling dominan untuk perbaikan itu tidak dimiliki. Paling tidak dengan tingkat pendidikan yang minimal, orang bisa

Wujud partisipasi wanita

Digitized by Google

diberi pengertian tentang apa dan bagaimana harusnya. Orang lalu bisa mengerti apa hak dan apa pula kewajibannya sebagai manusia.

Melalui gerakan moral yang memilih bidang pendidikan sebagai awal perjuangan itu, Kartini rasanya bisa menerobos tabir adat kebudayaan yang mengekang itu. Barangkali surat-suratnya kepada rekannya di negeri Belanda merupakan salah satu upaya paling mendasar dan paling menyentuh nurani serta pirasa para pemegang kuasa. Baik dalam keluarga, maupun di masyarakat.

Emansipasi wanita merupakan pokok perjuangan Kartini. Ia berupaya membebaskan kaumnya dari tirani kebudayaan yang sangat ketat. Ia berupaya memulihkan hak-hak asasi kaum wanita, kendati tidak sama dengan hak seorang pria. Yang paling penting adalah agar wanita juga diberi kesempatan untuk berkembang maju dalam segala bidang kehidupan.

Perjuangan Kartini seabad lalu itu, mulai menggema di awal abad ke-XX ini. Wanita Indonesia tak lagi menjadi patung emas dalam kuil, tetapi ia telah diberi tempat yang wajar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Bahkan dalam banyak hal kaum wanita Indonesia diberi tempat yang cukup terhormat, tak lagi seperti pada zamannya Kartini.

Emansipasi wanita buat Indonesia telah lama berlalu. Kaum wanita Indonesia justru sedang berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam proses kehidupan bangsa. Mereka berupaya untuk menempatkan diri sebagai partisipan pembangunan bangsa, tentu saja tanpa mengurangi fungsi dan peranannya sebagaimana harusnya seorang wanita Indonesia.

Bukan lagi emansipasi, tetapi partisipasi yang menjadi tujuan wanita Indonesia sekarang. Barangkali dibelahan bumi lainnya, kaum wanita masih terus memperjuangkan emansipasi. Seperti halnya di Eropa dan Amerika maupun negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Semacam "Woman Liberation", sampai sekarang masih terus menjadi gerakan wanita di negara-negara tersebut.

Peran Ganda Tidak Harus Menghambat Karier

Dewasa ini wanita Indonesia sudah banyak yang bergerak dalam berbagai macam sektor pembangunan nasional. Mereka menjadi pekerja-pekerja yang ulet dan tekun dalam menjalankan tugasnya. Mereka adalah para pekerja profesional yang menekuni karirnya dengan penuh wibawa. Hampir disemua lapangan, wanita Indonesia memainkan peranan penting.

Dari sekretaris eksekutif sampai pada jabatan-jabatan eksekutif, wanita Indonesia hadir dan menunjukkan prestasi yang cukup tinggi. Mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang sama bahkan terkadang lebih dari kemampuan seorang pria. Tidak sedikit fungsi-fungsi yang dulunya dilakukan hanya oleh kaum pria, sekarang sudah bisa dilakukan oleh seorang wanita, malah dengan hasil yang lebih dari pada seorang pria.

Soalnya, wanita punya kepekaan yang cukup tinggi. Naluri wanita terkadang membuat dia jauh lebih peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat dari pada seorang pria. Itulah sebabnya apabila wanita dipercayakan untuk suatu tugas, dia selalu berusaha agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi wanita kepercayaan yang diberikan kepadanya selalu dijaga agar tidak mengecewakan yang memberi kepercayaan itu. Itulah sebabnya wanita selalu tampil sebagai sosok yang berperan ganda, sebagai wanita karier sekaligus sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anak.

Dalam melaksanakan tugas kesehariannya, wanita dihadapkan pada situasi yang sungguh ambivalen. Antara karier dan peran utamanya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ambivalensi ini, terkadang membuat orang meragukan kemampuan wanita untuk menjalankan kedua peranan tersebut sekaligus. Tetapi ternyata mereka mampu melaksanakan kedua tugasnya itu dengan baik.

Gustirini, seorang Direktris Perusahaan Bahan Bangunan berkomentar, "Peran ganda wanita tidak harus menghambat karirnya. Karena kedua peranan itu tidak berada pada tempat dan waktu yang sama. Ketika ia berada di kantor, maka ia harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di kantor itu. Begitu dia kembali kerumah maka tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga harus pula dikerjakannya. Soalnya. Bagaimana ia mengatur waktunya itu".

Rasanya terlalu berlebihan, jika seorang wanita minta "privilege" hanya karena peran gandanya itu. Ia minta diberikan semacam keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya, hanya karena beban peran ganda itu, kata Gustirini.

"Saya tidak melihat pentingnya privilege semacam itu diberikan kepada wanita. Jika benar ia seorang wanita yang punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas-tugasnya, pasti dia akan berusaha untuk melaksanakannya tanpa minta diistimewakan", katanya.

Menurut Gustirini, apabila seorang wanita memperalat kodrat kewanitaannya untuk minta privilege maka sesungguhnya ia telah menghina martabatnya sendiri. Kodrat kewanitaan jangan dijadikan alasan untuk minta dikasihani. Jangan memperalat kewanitaan itu untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan wanita sendiri.

Menurut wanita pengusaha yang sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Muhamadyah ini, peran ganda wanita sebenarnya tidak menghambat kemajuan karier. Soalnya, setelah sehari penuh menekuni pekerjaan di kantor, kerinduan untuk segera menemui keluarga terasa begitu besar. Sehingga ingin segera tiba di rumah untuk berkumpul dengan mereka.

"Sebenarnya dalam masa orde baru ini, kita sudah tak lagi mempersoalkan emansipasi wanita, menuntut hak yang sama dengan pria. Tetapi tanyalah pada diri sendiri apa yang telah disumbangkan oleh wanita bagi suksesnya pembangunan nasional. Jangan tanya apa yang diberikan negara ini kepada saudara, tapi tanya pada diri sendiri apa yang telah diberikan kepada negara", kata Gustirini.

Apabila kita dapat mengatur waktu, maka kedua tugas itu dapat berjalan tanpa gangguan. Tapi apabila kita tak mau membagi waktu dan bertindak disiplin terhadap waktu, maka jelas salah satu harus dikorbankan. Sebenarnya bukan tidak ada waktu untuk keluarga, tapi kita sendiri yang tidak bersedia menyediakan waktu itu, katanya lagi.

Jadi terpulang pada wanita itu sendiri, apakah mau menyediakan waktu untuk menunaikan tugas serta mengurusi rumah tangganya atau tidak. Bukan tidak ada waktu, tapi bagaimana mengaturnya itu persoalan.

Menyambut hari Kartini kali ini, rasanya kita tak perlu lagi bicara soal emansipasi karena tak ada lagi persoalan emansipasi. Yang patut diperbincangkan adalah partisipasi wanita dalam pembangunan nasional. Karena pembangunan kita sekarang telah sampai pada tahap pengerahan seluruh daya dan dana yang ada untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi generasi mendatang.☐ (tbr)

Digitized by Google

Mempersiapkan Generasi Muda Secara Berkesinambungan

Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya RA Kartini. Sejumlah wanita; besar, kecil tua dan muda, pada hari-hari tanggal tersebut, dengan menggunakan pakaian nasional mendatangi tempat-tempat tertentu untuk merayakan hari yang penuh makna bagi bangsa Indonesia ini.

Tanpa mengurangi arti dari kegiatan seremonial tersebut, memang merayakan tokoh yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dari keterbelakangan adalah suatu kewajaran. Dimana, RA Kartini telah membangkitkan kaum wanita dari belenggu kodratnya. Dan kini, apa yang diperjuangkan Kartini se-abad lalu, setidaknya telah dapat dibanggakan.

Wanita dalam perjalanannya sekarang ini, sudah tidak lagi terpaku dengan pekerjaannya yang rutin dan monoton. Wanita tidak lagi sebagai pelengkap dalam kehidupan. Namun, Kartini-Kartini sekarang ini telah mampu dan berpacu seiring dengan lajunya perkembangan jaman.

Dan juga wanita tidak hanya bertumpu untuk melayani suami, mengurus anak, memasak dan yang lainnya. Namun, Kartini-Kartini sekarang ini telah dapat dan mampu mengikuti selera jaman. Bahkan, dalam hal-hal tertentu Kartini-Kartini sekarang ini telah mensejajarkan dirinya dengan kaum pria dan sekaligus dalam posisi tertentu wanita dapat melebihi kaum pria.

Apa yang diharapkan dan diperjuangkan Kartini se-abad lalu, kini, telah banyak membuahkan hasil. Wanita sekarang telah dapat mendudukkan dirinya menjadi terhormat dan dapat dihormati. Misalnya, ada wanita yang menjadi menteri, seperti Ny. Sulasikin Moerpratomo (Menteri Urusan Peranan Wanita), Haryati Soebadio (Menteri Sosial). Kemudian dalam bidang ilmu dan teknologi wanita juga tidak kalah ketinggalan, seperti Ny. Pratiwi Sudarmono salah satu calon astronaut wanita dari Indonesia. Dan sejumlah wanita-wanita lain yang menduduki posisi penting dan kunci dalam suatu perusahaan. Misalnya, menjadi direktur utama dan duta besar.

Memang, sederetan wanita yang duduk diberbagai jenjang terhormat

Ny. Mien Sugandhi

itu merupakan upaya dan perjuangan RA Kartini. Tentu saja merupakan niat dan kemampuan dari wanita itu sendiri. Sedang Kartini pada masa lalu hanya menciptakan iklim dan menggebrak wanita agar lepas dari kungkungan dan keterbelakangan.

Sejumlah keberhasilan yang telah dicapai Kartini-Kartini sekarang ini, masih merupakan sebagian kecil saja. Di balik itu, sejumlah masalah yang menyangkut wanita masih perlu mendapat perhatian. Misalnya, wanita-wanita yang hidup di pedesaan sekitar 70 persen masih belum banyak mengenyam pendidikan yang layak. "Inilah tantangan yang harus dipikirkan lebih lanjut, ujar Mien Sugandhi, salah satu Ketua DPP Golkar dan Ketua Umum Kowani itu.

Tantangan lain bagi wanita yang berada di pedesaan, adalah adanya tradisi berupa batasan-batasan yang diberikan kaum pria terhadap wanita. Hal tersebut disebabkan, pria masih belum merasa rela kalau dikejar oleh kaum wanita. Selain itu, batasan-batasan yang diberikan oleh Kartini-Kartini yang ada di pedesaan itu adalah, terdapatnya rasa harga diri bagi kaum pria yang notabenenya sebagai kepala keluarga.

"Jadi disinilah letak hambatan yang harus kita kejar dalam masa-masa sekarang dan yang akan datang. Selain itu tantangan berikutnya, adalah bagaimana agar wanita dapat ikut memberi rumusan dalam kebijaksanaan dan perumusan konsep. Atau sebagai pengambil keputusan. Ini yang masih belum dapat dilakukan untuk wanita pedesaan," ujar Mien Sugandhi.

Kemudian, Ny. Mien Sugandhi mengambil contoh kongkrit mengenai cara pengambilan keputusan terhadap kehidupan keluarga. Misalnya, wanita dalam mengelola rumahtangga belum sepenuhnya dapat menentukan. Diantaranya menentukan pakaian anaknya sekolah, kesehatan dan yang lainnya.

Wanita pedesaan khususnya dalam menentukan hal-hal tersebut di atas masih belum utuh sepenuhnya. Masalah-masalah yang berakhir dengan suatu pengambilan keputusan, wanita masih harus tunduk dengan apa yang menjadi kehendak suami.

Kini, Kartini dalam mengupayakan kehidupan yang cukup layak bagi kaum wanita, telah banyak membuahkan hasil. Wanita dalam era sekarang ini sudah bukan lagi menjadi obyek dari pembangunan, malahan telah menjadi subyek dari pembangunan. Wanita sekarang ini telah berperan dan bahkan telah banyak yang memegang peranan.

Dan kini, wanita telah mengukir babakan baru dalam pembangunan bangsa ini. Peranannya telah tertuang dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) seperti yang tercantum dalam Bab II MPR tahun 1978 dan tahun 1983.

"Dan inilah suatu pengakuan dari pada seluruh masyarakat luas, bahwa wanita sudah dapat menjadi andalan bagi bangsa dan negara. Wanita sudah bukan lagi menjadi obyek, tapi telah menjadi subyek dalam pembangunan. Karena wanita sekarang ini telah ikut berperan di dalamnya sama dengan pria, namun tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya," ujar Mien Sugandhi.

Untuk meneruskan cita-cita Kartini, kata Mien Sugandhi, kita harus mempersiapkan generasi muda itu secara berkesinambungan. Baik dalam meneruskan generasi mudanya dari masalah-masalah agraris, bahkan sampai industri sekalipun. Untuk menuju arah dan cita-cita bangsa, kita harus idialis, sehingga apa yang diinginkan Kartini untuk mewujudkan masyarakat (kaum wanita) menjadi sejajar dengan pria dapat diwujudkan.□ (WT/BM)

Digitized by Google

DPR
Tumpuan Harapan Rakyat

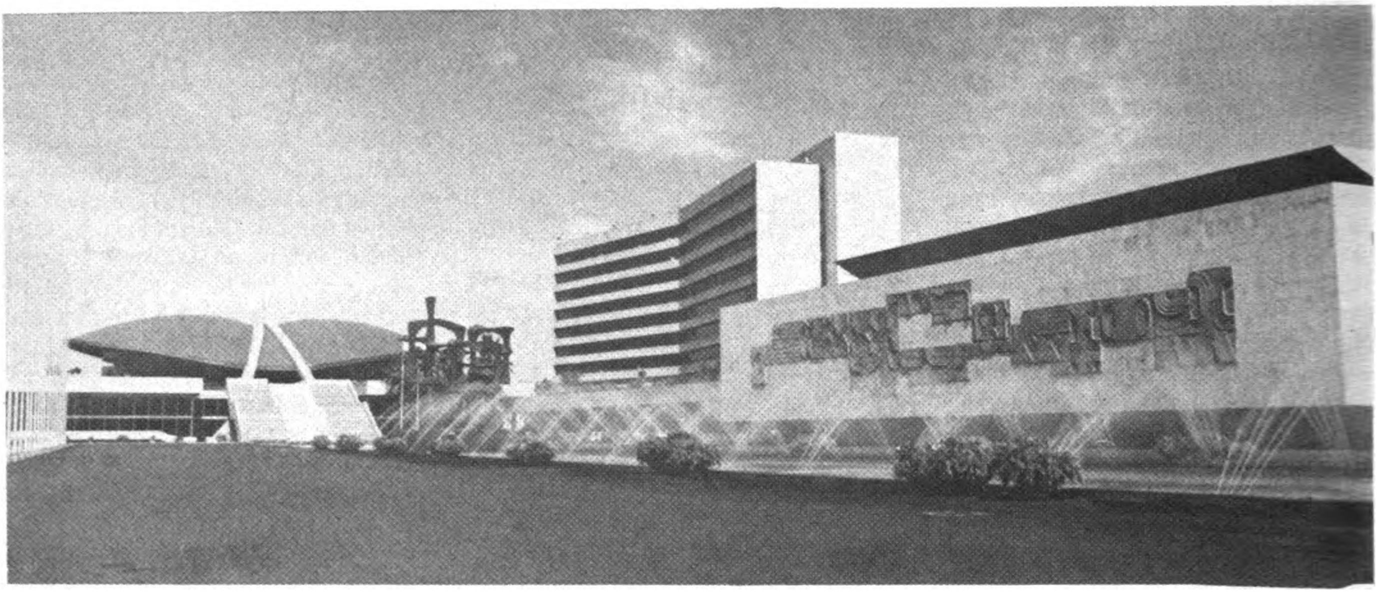

Gedung DPR/MPR

Sukses yang diraih pemerintah Orde Baru dapat diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun secara kesinambungan dan sekaligus membawa keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran rakyat terhadap hak dan kewajibannya. Apalagi kondisi rakyat Indonesia makin hari semakin kritis pemikirannya terhadap perbuatan dan tingkah laku aparatur negara, sehingga tidak ada sesuatu hal yang bisa disembunyikan tanpa diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain, semakin banyak masyarakat yang dilanda kegelisahan semakin besar pula harapan-harapan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu, kepada anggota DPR supaya dapat membawakan angin segar yang bisa memenuhi harapan-harapan rakyat sebagaimana mestinya.

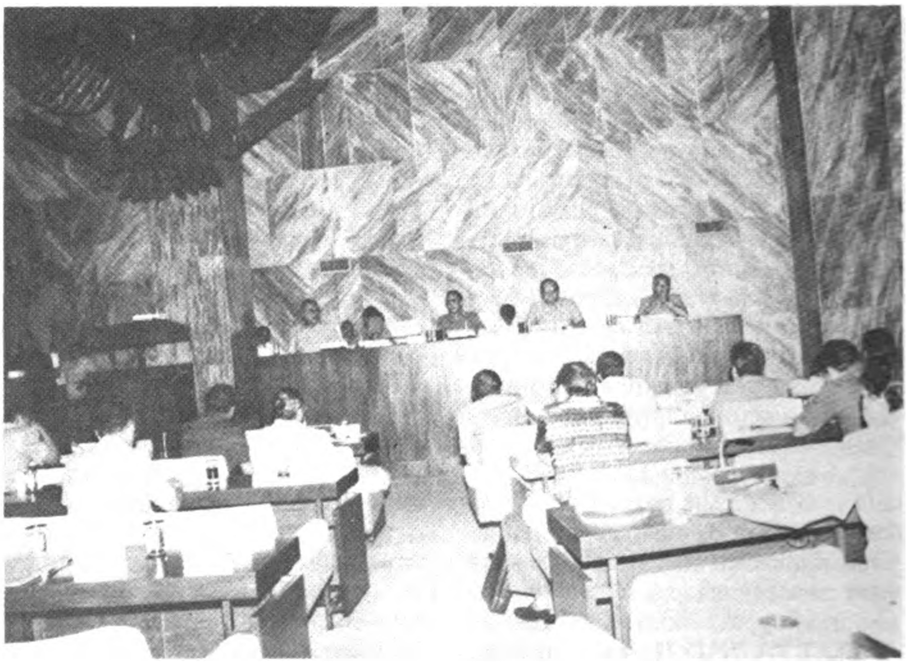

Anggota DPR agar dapat membawa harapan rakyat

Demikian ungkapan Ketua DPR/MPR-RI M. Kharis Suhud ketika melantik dan mengambil sumpah kepada empat anggota antar waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan dua anggota antar waktu DPR di Gedung DPR beberapa waktu yang lalu. Kemudian, kata M. Kharis Suhud, adanya ketajaman daya kritis rakyat ini dilukiskan seakan-akan kita hidup dalam sebuah rumah yang berdinding kaca. Untuk itu, pengabdian dan perjuangan anggota dewan serta majelis yang baru dilantik ini kehadirannya tidak hanya untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Tetapi, harus menyatu dalam gerak karya juangnya sebagai pengejawantahan seluruh rakyat Indonesia dan senantiasa harus berorientasi pada amanat penderitaan rakyat.

"Sebagai alat politik demokrasi Pancasila, DPR/MPR sudah barang tentu dalam gerak karya juangnya harus membawakan secara lengkap watak Pancasila, memiliki sikap mental, tata nilai, tingkah laku dan etika politik demokrasi Pancasila.

Digitized by Google

FKP usulkan Wahono menjadi anggota MPR

Karena, demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pengorganisasian kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat telah memberikan kekuatan bagi bangsa dan negara kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Bahkan, memberikan rasa kepastian pada diri sendiri dalam menjalankan roda pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Di samping itu, demokrasi Pancasila telah memberikan isi kepada hakekat Orde Baru dengan tata laksana yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum sekaligus telah membuktikan peranannya yang mantap sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan nasional," sambung M. Kharis Suhud di depan anggota dewan dan majelis yang telah dilantik.

Adapun empat anggota antar waktu MPR tersebut terdiri dari Barnabas Suebu, SH (utusan daerah) menggantikan Izaac Hindom, Kol Inf. TMF Tampubolon (utusan daerah) menggantikan Kol Inf. C.P. Masengi, Brigjen TNI Warsito (utusan daerah) mengggantikan H. Gatot Suherman dan Kol. Art. Syamsoedin (utusan daerah) mengggantikan Kol Inf. Umar Mochammad Said. Sedangkan dua anggota antar waktu DPR masing-masing Mayjen TNI Sutahan Mangunsentono dan Kol Inf. Drs. Udju S. Dinata, keduanya menggantikan Brigjen TNI M Soegeng Wijaya dan Brigjen TNI Dr R Suhadi.

Wahono Tetap Anggota MPR

Dalam sidang paripurna IX 1988-1989 DPRD Jawa Timur Wahono ditetapkan kembali untuk menjadi anggota MPR utusan daerah. Sementara dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur 1987, Wahono semasa memangku jabatan Gubernur Jawa Timur memang ditetapkan menjadi anggota MPR utusan daerah setempat secara otomatis (ex officio) karena kedudukannya tersebut. Namun, sejak 26 Agustus 1988 Wahono tidak menjabat sebagai gubernur dan digantikan oleh Soelarso. Sedangkan pada 9 September 1988, Blegoh Soemarto, salah seorang dari delapan anggota MPR utusan daerah asal Jatim meninggal dunia sehingga mengharuskan adanya perubahan keanggotaan MPR utusan daerah tersebut.

Ketua DPRD Jatim Ny. Asri Soebarjati Soenardi, SH dalam kaitan ini menilai bahwa yang paling berhak mengusulkan agar Wahono (Ketua Umum DPP GOLKAR) ditetapkan kembali menjadi anggota MPR utusan daerah asal Jatim adalah FKP. Ini mengingat, katanya, kursi utusan yang kosong itu memang jatah untuk GOLKAR. Dan FKP sendiri memang mengusulkan Wahono supaya ditetapkan kembali menjadi anggota majelis.

Proses penetapan kembali Wahono ini seperti digambarkan oleh sumber Jawa Pos di FKP DPRD Jatim, memang memakan waktu cukup lama karena digunakan untuk memperoleh pernyataan kesediaan Wahono dan FKP sendiri tidak berani mengusulkan beliau ditetapkan kembali bila belum memperoleh kepastian kesediaan dari yang bersangkutan secara langsung. Namun, ternyata Wahono sudah menyatakan kesanggupan dan bersedia untuk ditetapkan kembali. Juga usulan FKP ini sudah dipastikan dapat diterima ketiga fraksi lainnya, yaitu FABRI, FPP dan FPDI di DPRD Jatim. Kemudian dalam sidang lanjutan, Soelarso yang semula akan ditetapkan oleh DPRD sebagai anggota MPR utusan daerah asal Jatim secara ex officio karena kedudukannya sebagai gubernur menggantikan Wahono. Padahal, dalam sidang paripurna sebelumnya Wahono sudah ditetapkan kembali menjadi anggota MPR menggantikan Blegoh Soemarto. Akan tetapi, dalam sidang lanjutan itu nama Wahono justru tidak disebut-sebut. Bahkan, dalam sidang paripurna pimpinan dewan mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi. "Dalam rapat pimpinan fraksi itu telah disepakati, bahwa yang akan dimintai persetujutan dalam sidang hanya nama Soelarso sebagai pengganti almarhum Blegoh Soemarto dan Wahono tidak perlu dimintakan persetujuan, karena tidak ada perubahan," tambahnya.

Menurut Ny.Asri Soebarjati Soenardi,SH, usulan agar Soelarso ditetapkan menjadi anggota MPR utusan daerah asal Jatim tersebut datangnya dari FKP. Fraksi ini mengirimkan surat pengajuan itu kepada pimpinan dewan pada 27 Maret 1989 dan pimpinan dewan meneruskan surat FKP kepada ketiga fraksi lainnya untuk dimintakan dukungan. Kemudian, surat FKP itu mendapat dukungan dari FABRI dan FPP dengan surat pernyataan yang isinya menyetujui usulan FKP, sedangkan FPDI menyampaikan dukungan terhadap usul itu agak terlambat. Kendati demikian, adanya surat dukungan dari ketiga fraksi itu dapat disimpulkan bahwa semua fraksi menunjukkan kesepakatan secara bulat guna menetapkan Soelarso menjadi anggota MPR.

Dengan hasil sidang paripurna DPRD Jatim itu, maka anggota MPR utusan daerah Jatim itu terdiri dari Gubernur Soelarso, Ketua DPRD Jatim Ny. Asri Soebarjati Soenardi, SH, Kaditsospol Jatim Hasril Harun, Firman Henry Soerodjo, Kol CZI Praktinyo, KH. Imron Hamzah, H. Amru Al Mu'tasim, SH dan Wahono.☐ DT

Digitized by Google

Terbuka Sudah Pembicaraan Mengenai Calon Presiden

Konsensus diperlukan, tapi bukan dengan pemaksaan

Dalam perkembangan politik, akhir-akhir ini terjadi perkembangan yang berarti. Pembicaraan mengenai calon Presiden mendatang ataupun masalah pergantian kepemimpinan nasional yang biasa disebut "suksesi" kepemimpinan dalam sistem kenegaraan kita tidak lagi ditabukan. Upaya untuk mencapai konsensus dalam proses suksesi kepemimpinan nasional mulai di"gelindingkan" di masyarakat, terutama menghadapi masalah, yaitu seandainya calon presiden lebih dari satu orang, bisa dua orang, bisa 5 orang. Terjadi suatu terobosan, dan terobosan itu dilahirkan oleh pimpinan nasional sendiri, yaitu ketika Presiden Soeharto menerima Menku Polkam Sudomo di Bina Graha, pertengahan April lalu.

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai pertemuan, Sudomo mengatakan pendapat Presiden bahwa calon presiden di masa datang tidak mutlak harus calon tunggal. Terbuka kemungkinan tampil dua bahkan lima calon, tergantung pada pencalonan fraksi-fraksi dalam sidang MPR yang akan datang.

Tentang calon presiden itu, Sudomo memang pernah mengungkapkannya, yaitu ketika menerima Tim P-7 (Tim Penasehat Presiden tentang Pelaksanaan P-4) beberapa waktu sebelumnya. Menurut Sudomo diperlukan konsensus nasional bila calon presiden kelak lebih dari satu orang. Ketika oleh Sudomo masalah itu dikonfirmasikan, Presiden dapat memahaminya. "Maaf Pak, barangkali saya marahkan (membuat marah) Bapak", kata Sudomo kepada Presiden. "Oh ndak", jawab Presiden sebagaimana dituturkan oleh Sudomo kepada wartawan.

Konsensus dan Voting

Lebih definitif, pencalonan Presiden untuk tahun 1993 mendatang menurut Sudomo terbuka kemungkinan bagi tiap fraksi MPR mengajukan calon masing-masing, sehingga terdapat kemungkinan adanya 5 calon. Untuk menetapkan siapa yang terpilih, menurut Sudomo diperlukan konsensus yang merupakan hasil musyawarah. Tentang siapa yang akan menyusun konsensus, menurut Sudomo Golkar dan partai-partai politik yang akan diteruskan kepada MPR. Ia berpendapat, konsensus itu penting artinya bagi masa depan, khususnya dalam menegakkan Demokrasi Pancasila. Sebab tanpa konsensus akan timbul persoalan yang mengarah pada pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak atau voting di MPR. "Padahal voting itu tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila", katanya.

Sudomo

Dikatakannya pula melalui konsensus dapat diperoleh suatu pemahaman yang sama sehingga diperoleh suatu mufakat bulat, bukannya bulat tetapi lonjong. Ia juga yakin jika konsensus nasional itu sudah dipahami tidak bakal ada masalah bila di masa datang akan ada dua atau lebih calon presiden dan wapres. "Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi keguncangan karena justru inilah yang menjadi tumpuan dan titik tolak Orde Baru dalam mekanisme penggantian kepemimpinan nasional", katanya.

"Jangan dikira Presiden mempunyai pikiran untuk menjadi Presiden seumur hidup. Tidak ada dalam pikiran Pak Harto. Saya tahu benar. Beliau itu seorang demokrat konstitusional. Jadi terserah MPR," katanya.

Tolak "Lembaga" Konsensus

Konsensus nasional dalam pencalonan presiden dan wakil presiden diakui memang diperlukan oleh berbagai pihak. Padmo Wahyono, pakar ilmu hukum berpendapat, konsensus memang diperlukan karena kita memang belum berpengalaman dalam menetapkan Presiden, khususnya apabila calon lebih dari satu. Sedangkan konstitusi ataupun perundang-undangan yang berlaku baru menetapkan pokok-pokoknya saja. Sedangkan pelaksanaannya masih memerlukan konsensus oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini mereka-mereka yang duduk di lembaga MPR. Menurut Padmo ada tiga alternatif dalam menetapkan presiden bila calon lebih dari satu. Pertama, presiden sebelumnya memberikan rekomendasi. Kedua, diupayakan dengan musyawarah agar calon yang muncul akhirnya satu, dan ketiga dipilih dengan suara terbanyak. Ketiga-tiganya ini suatu konsensus. Pemilihan dengan suara terbanyak tetap merupakan konsensus dan itu konstitusional, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Tentang konsensus itu Ketua DPP Golkar Wahono mengisyaratkan agar tidak diadakan lembaga di luar lembaga yang secara konstitusional berhak untuk mengadakan konsensus. Konsensus itu merupakan hal yang terjadi dengan ikhlas, bukan pemaksaan kehendak oleh lembaga tertentu yang menyatakan diri berwenang menyelenggarakan konsensus.

Wahono juga mengingatkan, hendaknya penetapan presiden di masa mendatang tetap berpegang pada amanat UUD 1945, yang dijabarkan dalam Tap II/MPR/1973 yang menya-

Digitized by Google

takan bahwa calon-calon presiden diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR. "Jadi tidak ada masalah. Kalau calonnya tunggal tinggal disahkan, tidak perlu dipilih melalui pemungutan suara, sebagaimana sudah dipraktekkan berulang kali," katanya. Sebaliknya, bila calonnya lebih dari satu, Tap II MPR/1973 juta menyediakan mekanisme, yaitu melalui pemungutan suara secara rahasia. "Saya kira mekanismenya sudah jelas", katanya.

Ketika ditanya pendapatnya mengenai keputusan dengan suara terbanyak, atau pemungutan suara, Wahono menegaskan bahwa hal itu konstitusional. Pemungutan suara bukan mekanisme liberal. Ia bahkan menegaskan, kalau ada penilaian bahwa pemungutan suara itu liberal, orang yang mengatakan itu sama dengan mengatakan bahwa UUD 1945 itu liberal, karena UUD itu menyebutkan ketentuan tentang voting. Voting tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila, karena UUD 1945 adalah perangkat demokrasi Pancasila, kata Wahono.

Wahono mengakui bahwa peran dan beban tanggung jawab seorang Presiden/Mandataris MPR memang sangat besar sehingga memerlukan dukungan penuh. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa dukungan penuh itu harus didasarkan keikhlasan. Jadi kalau calonnya tunggal, tunggalnya itu harus didasari keikhlasan, tetapi kalau melalui musyawarah berkali-kali calon tunggal terpaksa harus melalui pemungutan suara, itu pun harus didasari keikhlasan. "Yang menang melalui pemungutan suara sesungguhnya juga mendapat dukungan penuh dari rakyat, karena itulah keputusan yang diambil oleh MPR," kata Wahono. Atas dasar itu, ia berpendapat, konsensus nasional tidak perlu ditumbuhkan melalui pembentukan lembaga di luar lembaga-lembaga konstitusional yang sudah ada.

Prof Padmo Wahjono mengatakan bahwa konsensus nasional merupakan hasil dari suatu proses yang bisa terjadi di dalam, bisa di luar, bahkan bisa mendahului MPR. Sebelum keputusan formal diambil, bisa saja ada konsensus, dan itu konstitusional. Tetapi konsensus itu tidak boleh diambil oleh suatu lembaga yang merasa hanya dirinya berwenang atau mempunyai privilese untuk membuat konsensus nasional. Kehidupan kenegaraan memang didasarkan pada kesempatan. Tetapi kesempatan itu tidak boleh terjadi karena pemaksaan. "Kalau kesepakatan itu terjadi karena disuruh begini dan begitu, itu namanya diktator", katanya.

Menurut Padmo, yang membuat konsensus semestinya kekuatan sosial politik. Mereka secara "bebas" berusaha membuat konsensus. Konsensus mereka bukanlah persekongkolan, karena dipertanggungjawabkan dalam majelis, dan mendapat legalitas dari perundang-undangan. "Kalau kekuatan sospol sekarang tidak mau mempersiapkan diri, kan lucu. Nanti kalau diperintahkan oleh Presiden katanya nggak demokratis", katanya.

Ia berpendapat, sebaiknya justru sedini mungkin parpol dan Golkar selaku kekuatan sospol memikirkan dan mempersiapkan diri untuk menciptakan konsensus nasional. "Saya setuju hal itu dipikirkan sedini mungkin. Yahg, sedia payung sebelum hujan, karena jika nanti ada yang kurang sreg, masih bisa diperbaiki", katanya. Sekaligus, pembicaraan konsensus nasional secara dini akan menghindari kesalahan-kesalahan sebelumnya, serta dapat dipakai untuk mengukur kematangan iklim politik, misalnya sudah bisa atau belum diadakan voting untuk penetapan calon presiden. Sebaliknya, bila konsensus baru dipermasalahkan dalam sidang MPR nanti, akan terlambat karena waktunya terlalu sempit.

Sementara itu Ketua Umum DPP PPP Dr HJ Naro berpendapat bisa saja fraksi-fraksi MPR kelak menampilkan calon Presiden lebih dari satu. Dan ia tidak berkeberatan bila keputusan diambil melalui pemungutan suara, karena hal itu dijamin dalam UUD 1945. Ketua Umum DPP PDI juga berpendapat bahwa dalam pemungutan suara tidak mutlak bahwa calon dari fraksi terbesar akan menang. Bisa saja calon dari fraksi kecil mendapat dukungan besar, karena pemilihan dilakukan secara rahasia.

Angin Segar

Di kalangan para pengamat, pembicaraan tentang calon presiden yang diawali oleh Presiden Soeharto bersama Menko Polkam Sudomo membawa angin segar dalam kehidupan politik, dan demokrasi. Keterbukaan itu membawa arah kehidupan bangsa menjadi makin matang dan dewasa dalam kehidupan politik. Karenanya, momentum yang telah tercipta perlu diisi dengan pemikiran-pemikiran serius untuk membangun suatu sistem yang handal dalam setiap suksesi kepemimpinan nasional di masa mendatang.

Dalam hal ini, pimpinan FKP Djoko Sudyatmiko mengingatkan, hendaknya pemikiran lebih ditujukan untuk membangun sistem dan mekanisme, serta lebih melihat presiden sebagai kelembagaannya bukan figur orang per orang. Diakuinya, bahwa keterbukaan mengenai calon presiden itu merupakan angin segar dalam kehidupan demokrasi. Kecanggungan-kecanggungan untuk bicara masalah-masalah suksesi perlahan-lahan makin terkikis. Tetapi diharapkannya, jangan sampai kecanggungan yang sirna itu diganti dengan "politiking" yang didasarkan pada pemikiran yang terpusat pada suatu figur atau perorangan. Sekalipun akhirnya masalah calon presiden itu menyangkut orang, tetapi seyogyanya pembicaraannya dituntaskan pada lembaga kepresidenan, yaitu bagian dari sistem yang sedang dibangun.

Tetapi Marzuki Darusman melihat keterbukaan itu dari sisi lain. Ia mempunyai kesan bahwa demokrasi sedang ditumbuhkan. Dalam hal pencalonan presiden kelak, terlihat tidak ada kesan pengarahan atau penggiringan, yang dengan kata lain tidak ada yang disebut "putra mahkota". Kesemuanya terbuka untuk dibahas dan terbuka untuk pengajuan alternatif. "Ini kemajuan", katanya.

Sementara tokoh PDI Sabam Sirait, yang kini duduk di DPA berpendapat, bahwa keterbukaan itu memang perlu disambut terbuka. Keterbukaan itu menurut hematnya perlu diantisipasi dalam perundang-undangan. "Sudah saatnya pemerintah sekarang mengajukan RUU tentang Lembaga Kepresidenan seperti halnya lembaga MPR, DPR serta Mahkamah Agung sebagai penjabaran UUD 1945", katanya. Bahkan menurut Sabam, RUU yang diajukan dapat merinci masalah calon presiden dan wakil Presiden, termasuk bila perlu lebih dari itu, misalnya periodisasi jabatan Presiden. "Selama ini UUD 1945 memang tidak mengaturnya, tetapi juga tidak melarang untuk pengaturan lebih lanjut", katanya.

Dari dialog yang terjadi di antara tokoh-tokoh politik dan pengamat di atas, tersimpul bahwa pembicaraan mengenai calon presiden, serta konsensus untuk menetapkan presiden telah terbuka. Masalah tentu berpulang kepada rakyat Indonesia.□ (MK/SGT)

Digitized by Google

Gerakan Mahasiswa, Ada Yang Perlu diluruskan

Gerakan mahasiswa yang bermunculan secara sporadis belakangan ini, menarik perhatian berbagai kalangan baik eksekutif, legislatif maupun para pengamat politik di tanah air. Ini artinya setiap sepak terjang maupun perilaku mahasiswa selalu menjadi sorotan kalangan baik di dalam maupun di luar kampus.

Apa yang terungkap di permukaan dan kemudian santer diberitakan berbagai mass media belakangan ini, memberi indikasi adanya darah segar mengalir dalam semangat mahasiswa. Sebutan gerakan mahasiswa sebagai "parlemen jalanan" cukup membuat orang mengingatkan kembali aksi-aksi mahasiswa tahun 1966, 1974, 1978. Tidak jelas apakah mereka yang sekarang ini melakukan berbagai aksi turun ke jalan dan gedung-gedung pemerintahan masih bersedia menyandang sebutan "parlemen jalanan" seperti pendahulu-pendahulunya.

Yang jelas mereka itu tidak berangkat dari suatu organisasi baik intra maupun ekstra universiter. Mereka ini berangkat dari berbagai kelompok studi yang belakangan ini menjamur di berbagai daerah. Sebagai suatu gerakan kelompok, memang mereka tidak membutuhkan barisan massa yang menyemut. Namun itu tidak berarti mereka mampunya hanya menghimpun puluhan atau ratusan mahasiswa saja. Mereka sanggup menyulut semangat meliputi ribuan mahasiswa seperti yang terjadi di Bandung baru-baru ini.

Apakah mereka itu bergerak dalam batas-batas yang wajar dan tidak membahayakan stabilitas keamanan dan kehidupan politik di dalam negeri? Jawaban yang muncul macam-macam. Ada yang menyebut gerakan mahasiswa itu masih dalam batas wajar. Tapi ada pula yang mengingatkan agar gerakan mahasiswa patut diwaspadai dari kemungkinan penunggangan atau pemboncengan pihak ketiga yang selalu ingin memaksakan kehendaknya lewat berbagai cara dan situasi yang timbul.

Apa yang ditegaskan Menko Polkam Sudomo bahwa pemerintah tidak melarang para mahasiswa menyampaikan pendapatnya senada dengan apa yang ditegaskan Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno bahwa aksi protes atau unjuk rasa mahasiswa tidak dilarang. Namun kedua pejabat itu mengingatkan agar dalam melakukan aksinya mahasiswa selalu memperhatikan sopan santun dan tidak memaksa-maksa. Sebagai bangsa yang besar, kata Try Sutrisno, mahasiswa hendaknya menunjukkan kedewasaannya dan tidak bertindak semrawut.

Menyusul tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Fuad Hassan mengatakan bahwa apa yang dilakukan mahasiswa belakangan ini, gejala yang dapat dimengerti. Dan menurut pengamatannya sejauh ini tidak ada hal yang istimewa dengan aksi-aksi mahasiswa tersebut. Lebih-lebih dia tidak melihat adanya bukti bahwa gerakan mahasiswa itu ada yang mendalangi.

Muncul kemudian komentar sekretaris FKP, Ir Rachmat Witoelar yang mengatakan, aksi-aksi mahasiswa belakangan bersumber dari rasa ketidakpercayaan mereka kepada DPR. Sebagai salah seorang anggota Dewan, dia merasa berdosa kalau dinilai kurang berfungsi. Sehingga menjadi tantangan baginya untuk selalu mengupayakan meningkatkan citra serta fungsi lembaga perwakilan rakyat itu bagi kepentingan masyarakat banyak.

Sempat Rachmat Witoelar mengeluarkan bantahan seolah-olah ada semacam 'rem tangan' yang mengendalikan kiprah anggota Dewan menyuarakan aspirasi rakyat di DPR. Sekarang ini saatnya bagi wakil-wakil rakyat, menunjukkan peranannya yang benar-benar demi kepentingan rakyat, karena perangkat-perangkat formal dan institusinya sudah tersedia.

Namun, kepada anggota Dewan khususnya FKP diingatkan agar tidak mendiamkan aksi-aksi mahasiswa itu berkepanjangan. Bisa-bisa mereka itu kembali menjadi 'parlemen jalanan' seperti yang pernah dilakukan tahun 1966 dimana Witoelar salah satu aktivis gerakan mahasiswa pada waktu itu. Sebagai motor organisasi kekuatan politik terbesar di Indonesia, Rachmat Witoelar tidak mau kehilangan momentum untuk memulihkan kembali citra DPR. Dia punya alasan yang

Dialog dengan mahasiswa

Digitized by Google

kuat untuk ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan memulihkan kepercayaan rakyat kepada DPR.

Bagaimana pula pandangan yang diberikan Mendagri Rudini selaku pembina politik dalam negeri terhadap berbagai aksi mahasiswa. Disini Menteri Rudini lebih melihatnya dari sudut kurangnya informasi yang diperoleh kalangan mahasiswa. Apakah aksi-aksi mahasiswa yang menjurus kepada bentuk-bentuk demonstrasi itu bisa diterima? Bagi Rudini demonstrasi itu sudah kuno. Dulu ketika negeri ini masih berusia muda demonstrasi biasa. Tapi sekarang ini sudah dewasa. Kalau mempunyai suatu pendapat, dibahas, ditulis dan kirim ke departemen yang berwenang. Atau manfaatkan pers sebagai sarana demokrasi dengan mengirim tulisan itu ke koran. Sebagai golongan terpelajar diingatkan agar mahasiswa menjauhkan diri dari sikap emosional.

Yang paling baik menurut Rudini mengajak mahasiswa untuk mengembangkan daya penalaran dalam setiap ada masalah. Lewat dialog misalnya. Tanpa poster segala. Dalam dialog itu diberi kesempatan sebebas dan seluas mungkin menyatakan pikiran dan pendapat. Lalu bagaimana dengan aksi mahasiswa itu sendiri, bagi Rudini sampai batas yang ada masih belum membahayakan stabilitas keamanan. Bahkan terbesit rasa senangnya bahwa mahasiswa sekarang sudah berani mengutarakan pendapat. Tinggal sekarang bagaimana membimbing mereka itu.

Tentang kekurangan informasi yang benar dari kalangan mahasiswa juga dibenarkan oleh Menko Polkam Sudomo. Sering mahasiswa kurang informasi ataupun salah informasi. Disini persoalannya bagaimana para rektor dalam memberikan bimbingan. Kalau mahasiswa tidak dibawakan ke pembangunan nasional sekarang dengan segala problematiknya, dengan sendirinya timbul aksi-aksi. Lebih-lebih memasuki Pelita V yang sangat menentukan dalam menyelesaikan pembangunan 25 tahun pertama. Tidak boleh terjadi apa-apa. Kalau ada situasi dan kondisi yang menimbulkan masalah, ini bisa mengganggu pembangunan. Kalau stabilitas tidak dapat ditegakkan dengan baik, mantap dan dinamis, tidak menarik untuk investasi. "Ini persoalan-persoalan yang terjadi. Kita tidak melihat adanya suatu krisis. Lebih baik preventif daripada nantinya sampai berkembang ke situasi yang tidak kita kehendaki," ujar Menko Polkam Sudomo.

Dari serangkaian peristiwa aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, dapat ditarik suatu hikmah. Bahwa situasi yang tidak baik selalu akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk menunggangi-nya, yaitu orang-orang yang tidak puas. Kalau mahasiswa tidak dewasa dalam menyampaikan kritiknya, itu akan bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Sementara kalangan pengamat dari kampus perguruan tinggi melihat kegiatan mahasiswa itu patut diawasi, tetapi jangan sampai membunuh kreativitas berpikir mereka. Tidak perlu terlalu gampang curiga terhadap kegiatan-kegiatan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Masalahnya bagaimana supaya aparat dapat melihat aksi mereka itu sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang sehat dan bahkan berguna bagi perjalanan pembangunan bangsa ini. Soal tunggang-menunggangi, sebenarnya merupakan permainan politik.☐ (NS)

GOLONGAN KARYA

DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA

mengucapkan

Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1409 H

Mohon maaf lahir dan bathin

Semoga Tuhan YME memberkahi kita sekalian

Digitized by Google

Kenaikan Tarif Listrik, Menjadi Bahan Dialog Nasional

Kali ini, kebijakan pemerintah mendapat reaksi yang hangat dari masyarakat, tidak terkecuali dari kalangan DPR, termasuk Fraksi Karya Pembangunan. Kebijakan itu adalah keputusan untuk menaikkan tarif listrik sebesar rata-rata 25 persen, yang mulai berlaku per 1 April, atau untuk tagihan mulai bulan Mei 1989.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita yang didampingi oleh Sekjen Departemen, TB Silalahi, Dirjen Listrik dan Energi Arismunandar, serta Dirut PLN Ir Ermansyah Yamin mengumumkan kenaikan tarif listrik itu pada tanggal 27 Maret lalu di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Menteri mengatakan, kenaikan tarif listrik itu ditempuh oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghindari defisit keuangan pada perusahaan pemerintah pengelola kelistrikan, PLN, atau juga untuk menghindari keharusan pemerintah mensubsidi perusahaan, mengingat pembangunan di sektor kelistrikan pada Pelita V harus tetap dilanjutkan. "Sebagai Menteri Pertambangan sebetulnya, tidak enak harus mengumumkan kenaikan tarif listrik. Kalau bisa pengumuman kenaikan ini harus dihindari," kata Menteri bernada apologi.

Sebagai gambaran, Menteri mengungkapkan, apabila tarif tidak dinaikkan, pada tahun anggaran 1989/1990 ini PLN akan mengalami defisit atau pemerintah harus memberikan subsidi sebesar Rp 65 Milyar apabila PLN akan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Defisit itu akan membengkak pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp 468 milyar (1989/1991), atau sebesar Rp 900 milyar (1992/1993) atau sebesar Rp 1,8 trilyun pada akhir Pelita V. Dalam tahun anggaran 1989/1990 ini PLN menganggarkan dana Rp 2,7 trilyun, di antaranya Rp 1,04 trilyun berupa valuta asing. Apabila pemerintah memberikan subsidi, sebenarnya bukan hanya masyarakat yang telah menikmati listrik yang terkena, tetapi masyarakat

Ginandjar Kartasasmita

yang belum menikmati pun sebenarnya ikut memberikan subsidi. Saat ini baru 26 persen warga masyarakat Indonesia yang telah menikmati listrik, dan artinya sebagian besar belum.

Pertimbangan lain yang dikemukakan, selama 5 tahun terakhir, sejak 1984, PLN tidak pernah mengadakan perubahan tarif. Bahkan pada tahun 1986 terjadi penurunan TDL (Tarif Dasar Listrik) untuk industri sebesar rata-rata 6 persen.

Tentang kenaikan tarif listrik itu, sebenarnya jauh-jauh hari telah disyaratkan oleh Dirut PLN Ermansyah Yamin dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR 22 Februari lalu. Dalam keterangannya atas pertanyaan anggota DPR saat itu, Ermansyah menyatakan bahwa kenaikan tarif listrik diperlukan mengingat sebagian besar dana pembangunan kelistrikan berasal dari pinjaman antara lain dari ADB (Bank Pembangunan Asia), dan IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). Anggaran pembangunan pembangkit listrik selama Pelita IV sebesar Rp 4,7 trilyun. Dari jumlah itu sekitar Rp 3,5 trilyun (74,5 persen) berasal dari pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri sekitar Rp 392 milyar, anggaran PLN sebesar Rp 305 milyar dan DIP sebesar Rp 489,9 milyar.

Mengingat posisi pendanaan itu, muncul keinginan untuk meningkatkan kemampuan pembayaran pinjamana, antara lain dengan menaikkan tarif listrik. Jika kemampuan pembayaran pinjaman tidak ada, dapat menurunkan kepercayaan peminjam kepada PLN untuk memberikan pinjaman lagi. Dalam hal ini ADB merupakan sumber dana yang dapat menjadi barometer. Apabila bank itu ragu-ragu memberikan kredit, menurut Dirut PLN, lembaga-lembaga keuangan lainnya ikut ragu pula. Jika itu terjadi PLN akan mengalami kesulitan.

Reaksi

Beberapa saat setelah keputusan pemerintah itu diumumkan, segera reaksi dari kalangan masyarakat luas menghiasi halaman-halaman pertama berbagai surat kabar. Reaksi itu pada dasarnya menyatakan keberatan atas kenaikan sebesar rata-rata 25 persen. Kenaikan yang dirasakan berat terutama untuk masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah, yaitu untuk tarif kategori R, yang berkapasitas maksimal 900 KVA ke bawah, serta tarif untuk industri. Bahkan Ketua Umum BPP PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Sani Sumakno mengatakan, kenaikan tarif untuk industri perhotelan dikhawatirkan akan mengurangi daya saing hotel-hotel Indonesia dalam menyerap turis-turis asing, karena mau tidak mau kenaikan tarif listrik itu akan dibebankan pula sebagian bagi pengguna jasa hotel. Industri-industri yang menggunakan daya listrik secara ekstensif juga menyatakan keluhannya. Dirut PT Goodyear, Syafiri Alim, misalnya, menyatakan bahwa harga ban yang diproduksi di Indonesia akan terpengaruh. "Pada hal, produk ban Indonesia telah menembus pasaran di AS, karena pasaran di dalam negeri kini sedang lesu," kata Syafiri, yang juga Ketua Asosiasi Produsen Ban Indonesia. Tetapi ia mengaku belum menghitung pengaruhnya terhadap harga ban. Kalangan industri pipa besi

Digitized by Google

pun berkata senada. Sekretaris Asosiasi Industri Sambungan Pipa Besi) Adi Taruli menyatakan, kenaikan tarif listrik bisa mempengaruhi industri pengecoran logam, apalagi untuk kontrak penyerahan barang pada bulan Mei.

Rangkaian reaksi terhadap kenaikan tarif listrik ini bisa makin panjang apabila tiap-tiap warga masyarakat diminta pendapatnya, baik yang setuju maupun yang bersifat moderat. Bahkan sebagaimana disebut di berbagai media massa di ibu kota, banyak warga masyarakat yang menyatakan "pasrah" terhadap keputusan pemerintah. Sedangkan yang moderat terlihat dari seorang pengusaha, anggota pengurus Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia Ir Fadel Muhammad. Menurut pengusaha muda ini, dampak kenaikan tarif listrik bagi industri permesinan sangat kecil. Terhadap "total cost" produksi paling banyak hanya 0,3 persen saja.

Sesuatu hal yang menarik justru reaksi dari kalangan pemerintah sendiri. Dirut Perum Otorita Jatiluhur Ir Sufrani menilai penetapan tarif listrik itu sepihak. Menurut hematnya penetapan tarif perlu melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum, dan tidak oleh Menteri Pertambangan dan Energi sendiri. Dari ketentuan tarif itu, ia melihat bahwa pembelian pihak PLN dari produsen listrik seperti POJ terlalu rendah, yaitu hanya Rp 13,51 per kwh, pada hal PLN menjual listrik kepada konsumen dalam tingkat harga Rp 57 sampai Rp 400 per kwh. POJ mengharapkan harga listrik yang layak, karena perum itu memerlukan dana yang cukup besar, dan sumber dana dari hasil penjualan listrik memberikan kontribusi sebesar 80% dari keseluruhan penerimaannya.

Kalangan mahasiswa juga ada yang memberikan perhatian terhadap kenaikan tarif itu. Ada yang memberikan semacam pernyataan pendapat kepada DPR agar pemerintah bersedia meninjau kembali keputusannya, dan ada yang mengirim delegasi, menemui pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertambangan untuk berdialog.

Sedangkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Ir Sotion Ardjanggi berpendapat, kalaupun kebijakan itu tidak dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR, sebaiknya pemerintah mengadakan "sounding" dulu mengenai rencana itu. Berbeda dengan kebijakan bidang moneter yang harus sangat dirahasiakan, kebijakan kenaikan tarif listrik perlu kaji dahulu dengan mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat.

Kenaikan listrik berlaku 1 April

Keandalan

Selain reaksi atas kenaikan tarif, kritik terhadap keandalan PLN dalam memberikan pelayanan kepada konsumen juga dipertanyakan. Misalnya saja, beberapa pengusaha industri kecil dan menengah di Pekalongan pernah menyampaikan keluhan kepada Komisi VI beberapa waktu lalu bahwa pelayanan listrik dari PLN tidak dapat diandalkan. Pemadaman listrik yang terjadi sebanyak 30 kali selama sebulan merupakan hal yang tidak masuk akal bagi mereka, karena sangat merugikan kegiatan mereka.

Dalam hal keluhan, tidak terkecuali, Direktur PT National Gobel Bambang Pertana juga mengadukan ketidakpuasannya terhadap pelayanan PLN kepada tim Komisi VI DPR yang mengunjungi pabriknya. Menurut Bambang, kerugian yang ditanggungnya setiap tahun akibat gangguan listrik mencapai 2 persen dari laba yang seharusnya diperoleh. Bahkan pada tahun 1987 perusahaan itu pernah menanggung rugi sebesar Rp 1 milyar akibat kerusakan mesin yang disebabkan oleh putusnya aliran listrik PLN secara tiba-tiba. National Gobel yang menggunakan energi listrik sebesar 4.500 kwh itu juga menyatakan bahwa banyak proses produksi yang terganggu karena ketidak arus listrik yang sering mati.

Dirut PT Sarana Gatra Utama (produsen bohlam Tungsram) Frans P Ramaun yang mengaku terpukul dengan kenaikan tarif listrik mengatakan, merasa sering dirugikan oleh gangguan tegangan listrik. Tegangan yang tidak stabil sering menimbulkan kerusakan pada komponen elektronik dan perangkat halus di perusahaannya. Bahkan produknya berupa bohlam juga sering mendapat keluhan dari masyarakat konsumen yang merasa bohlam yang diproduksinya tidak awet. Setelah diteliti, ternyata penyebab putusnya lampu disebabkan tegangan yang tidak distabil. Produk Tungsram yang diteliti di Australia ternyata sangat awet karena tegangan arus listrik di negara itu stabil.

Ketua Umum Apkabel (Asosiasi Produsen Kabel) Kusudiarso Hadinoto dalam suatu diskusi menyatakan pelanggan industri dan komersial bersedia memikul kenaikan tarif, tetapi menuntut keandalan dan mutu energi listrik yang disediakan oleh PLN. Kalangan industri komersial umumya mengeluh karena seringnya terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan proses produksi terhenti. Juga ketidakstabilan tegangan dapat menyebabkan kerusakan peralatan.

Akibat pelayanan yang tidak terjamin kesinambungannya, banyak perusahaan yang menyisihkan dana

Digitized by Google

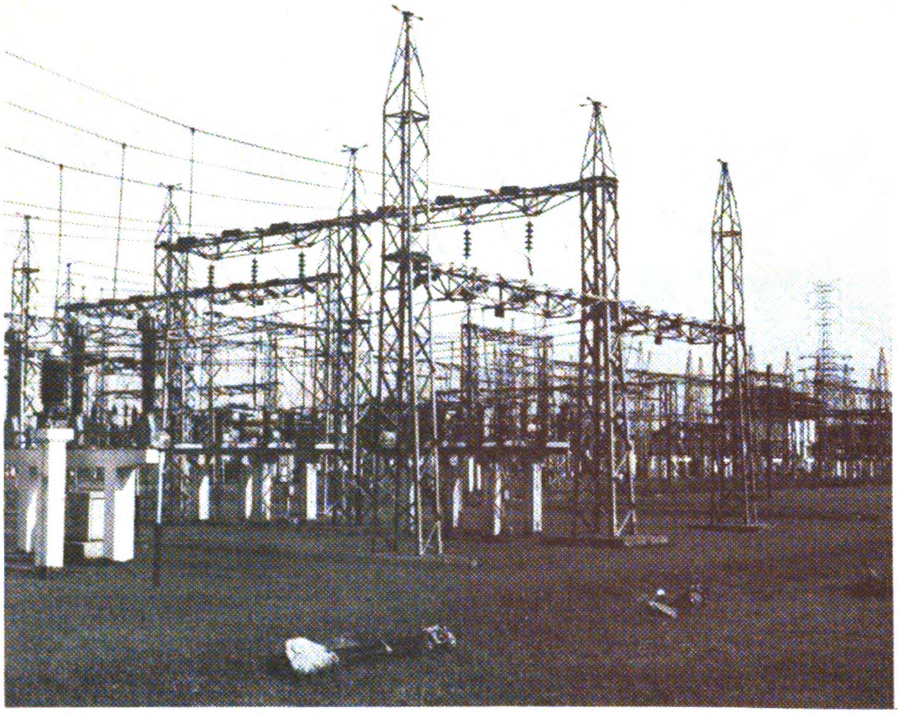

Kenaikan tarip perlu diimbangi pelayanan

untuk menyediakan "standby generators", atau generator cadangan. Tetapi dalam prakteknya, generator cadangan itu justru yang menjadi andalan, dan sebaliknya, PLN-lah yang menjadi cadangan.

Ketidak efisienan pengelolaan listrik oleh PLN juga menjadi sorotan. Kehilangan atau kebocoran listrik di Indonesia tercatat mencapai 19 persen, bahkan menurut data yang dimiliki Apkabel mencapai 22,2 persen susut jaringan, dan 8,2 persen susut karena pencurian. Angka kehilangan atau susut itu dinilai sangat besar dan merupakan petunjuk bahwa PLN belum efisien dalam mengelola listrik. Sebagai gambaran, angka susut di Muangthai sebesar 10 persen, dan di Singapura lebih kecil lagi, 4 persen, sedangkan di negara-negara maju, rata-rata 6 persen.

Ketua YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Ir Ny Erna Witoelar mengatakan, kenaikan tarif itu perlu diimbangi oleh PLN dengan peningkatan pelayanan serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan. Apabila pemerintah hendak membagi beban pembangunan dengan rakyat, hendaknya pemerintah juga memberi hak kepada konsumen untuk mengajukan klaim atas pelayanan yang kurang baik. "Jangan sampai rakyat hanya dituntut untuk menanggung beban saja, tetapi hak-hak mereka tidak ditingkatkan," katanya. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR, Ir Tadjuddin Noor Said. Ia mengingatkan pemerintah agar segera menjabarkan pasal-pasal UU nomor 15/1985 tentang kelistrikan khususnya yang menyangkut hak-hak konsumen.

Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia, Ir Sotion Ardjanggi berpendapat bahwa PLN perlu menata urusan internnya lebih dahulu, kemudian mengadakan evaluasi apakah yang diperlukan peningkatan efisiensi, menaikkan tarif ataukah menempuh pinjaman baru apabila berkaitan dengan investasi. Dengan pengkajian itu, akan dapat diambil terapi yang sesuai dengan sasaran. Selain itu, penaikan tarif bukan saja berpengaruh buruk bagi daya saing industri tetapi juga mengganggu momentum ekspor nonmigas yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Reaksi DPR

Apabila warga masyarakat memberikan reaksi lebih karena subyektivitas kepentingannya, lain halnya DPR. Para anggota DPR secara konseptual dan secara politis memberikan reaksi yang mendasar atas kenaikan tarif listrik itu.

Secara tegas, FKP DPR melalui unsur pimpinannya Marzuki Darusman SH dan Lukas Nanlohy minta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan tarif sebesar 25 persen. Anggota FKP itu merasa keberatan atas keputusan yang dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Anggota FKP lainnya Ir Tadjuddin Noor Said berpedapat, bahwa kenaikan tarif itu hendaknya dibicarakan dengan para wakil rakyat, mengingat kelistrikan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Listrik bukanlah melulu komoditi dagang tetapi lebih merupakan pelayanan atas hajat hidup orang banyak. "Kami sebenarnya lebih mengharapkan keluarnya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 15/1985 yang sudah 4 tahun berjalan, mengingat PP itu sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tetapi yang keluar kok malah kenaikan tarif," katanya.

Menurut Tajuddin, kenaikan tarif itu bisa ditekan apabila PLN dapat meningkatkan efisiensi yaitu menekan kebocoran atau susut jaringan yang mencapai angka 19 persen. Menurut data yang dimilikinya, penurunan setiap 1 persen "losses" atau susut jaringan berarti penghematan Rp 23,6 milyar, dan kalau losses itu dapat ditekan 10 persen saja dapat dihemat dana Rp 236 milyar.

Fraksi PDI pun merasa berkeberatan akan kenaikan tarif sebesar 25 persen. Aberson M Sihaloho juga menyebutkan, kenaikan tarif sebesar itu tidak terjadi apabila PLN mampu mengurangi losses atau kebocorannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Persatuan. Sedangkan reaksi dari Fraksi ABRI tidak secara terbuka disampaikan kepada wartawan. Fraksi itu lebih menekankan pentingnya pelayanan PLN terhadap masyarakat.

Reaksi bahkan keluar dari Ketua DPR/MPR M Kharis Suhud. Ketua lembaga tertinggi/tinggi negara itu berpendapat DPR perlu membicarakan masalah kenaikan tarif itu dengan pemerintah. "Kalau bolak balik masyarakat dikageti, nanti bisa "jondil-jondilan", katanya. Ketua Dewan itu merasa kasihan terhadap masyarakat atas kenaikan tarif yang mendadak. Namun menurut Kharis Suhud, masyarakat sebenarnya dapat memahami kenaikan listrik itu, karena untuk membayar hutang luar negeri. Untuk itu DPR akan mengundang pihak pemerintah untuk minta penjelasan terhadap kebijakannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR/MPR dari FPDI Drs Soerjadi menilai bahwa kenaikan tarif saat ini tidak

Digitized by Google

tepat, karena dirasakan akan memberatkan rakyat banyak. Saat ini masyarakat sedang prihatin menghadapi kenaikan harga sebagai dampak psikologis kenaikan gaji pegawai negeri sebesar 15 persen. Selain itu, kenaikan tarif juga berdekatan dengan saat hari raya Lebaran, dan tahun ajaran baru, suatu periode dalam siklus tahunan yang menuntut biaya ekstra pada tiap-tiap keluarga warga masyarakat.

Terjadi Dialog

Reaksi dari DPR dan masyarakat itu ternyata bukan hanya "angin lalu" tetapi mendapat sambutan dari pemerintah. Pejabat-pejabat teras Departemen Pertambangan dan Energi merasa perlu mengadakan pertemuan khusus tertutup dengan DPP Golkar bersama FKP DPR. Seusai pertemuan itu, pimpinan FKP Marzuki Darusman berpendapat bahwa fraksinya tetapi berkeyakinan, pemerintah perlu meninjau kembali keputusannya, bahkan kalau perlu mencabutnya. Dari hasil pertemuan itu FKP belum melihat perlunya tarif dinaikkan. Menurut tokoh FKP, penjelasan yang diberikan pemerintah belum rinci. Ir Tadjuddin Noer Said, juga dari FKP mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan yang diperolehnya, problem yang dihadapi PLN lebih merupakan problem investasi, bukan problem operasional. Problem investasi perlu diatasi dengan pinjaman atau dengan penambahan modal, dan tidak layak dibebankan kepada masyarakat konsumen yang notabene bukanlah pemegang saham. "Pemerintah bisa melakukan pinjaman dari bank dan membebankan pelunasannya pada PUMN yang bergerak di bidang kelistrikan," kata Tajuddin.

Dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan akan perlunya komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan FKP khususnya dan DPR umumnya. Kesemuanya itu diperlukan bagi suatu kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak.

Sedangkan mengenai sikap FKP, Marzuki Darusman menyatakan, sepenuhnya didasarkan upaya memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. "Masalah listrik ini perlu dipelajari secara lebih mendasar", katanya.

Mensesneg Moerdiono dalam penjelasannya kepada wartawan pada suatu kesempatan menegaskan bahwa kebijakan untuk menaikkan tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah sepenuhnya, sehingga tidak perlu dikonsultasikan kepada DPR. Ia merasa perlu memberikan penjelasan mengenai hal ini agar segala sesuatu dilihat sesuai dengan proporsinya. Menurut Menteri kebijakan pemerintah tentang tarif listrik ini tidak bertentangan dengan konstitusi maupun kehidupan demokrasi Pancasila. "Ini perlu jelas, sebab bisa-bisa sejumlah permasalahan kenegaraan akan mengalami banyak hambatan apabila setiap kali perlu konsultasi dengan DPR", katanya.

Meskipun kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintah, Moerdiono juga menyatakan penghargaan atas kontrol sosial yang disampaikan tidak saja oleh DPR tetapi juga dari kalangan masyarakat luas. Ia berpendapat, memang sepantasnya DPR minta penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah itu. Diakuinya, bahkan di jajaran kabinet pun tidak semua menteri telah mengetahui sepenuhnya latar belakang kebijakan baru itu. Sebagai contoh, kebijakan moneter tidak selalu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan seluruh jajaran kabinet.

Tidak saja Mensesneg, Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita pun memberikan tanggapan positif terhadap reaksi-reaksi. Ia segera mengadakan pertemuan dengan fraksi-fraksi di DPR, bahkan dengan Ketua DPR/MPR. Namun terhadap suara-suara tentang perlunya konsultasi, ia mengatakan bahwa kebijakannya itu telah dibahas bersama instansi lain yang terkait dengan masalah kelistrikan. Menurut hematnya, keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang dan mantap, telah dibahas secara lintas sektoral, dan melalui proses yang panjang. Karenanya ia minta berbagai pihak untuk dapat memahaminya.

Mengomentari pertemuan konsultasi yang dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Kharis Suhud berpendapat bahwa pemerintah memang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan. Namun bagaimanapun kewenangan itu, sesuai dengan falsafah negara, setiap kebijakan perlu ditempuh dengan semangat kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan itu mengandung makna kerjasama, tanpa pemisahan mutlak antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagaimana tergambar dalam UUD 1945, bagaimana negara menetapkan anggarannya.

Sementara itu Marzuki Darusman juga mengakui bahwa kebijakan kenaikan tarif listrik memang menjadi kewenangan pemerintah atau eksekutif. Namun ia berpendapat, masalahnya bukan sekedar yuridis formal tetapi menyangkut etika politik. Kebijakan pemerintah tentang tarif ini menunjukkan kesan bahwa hanya ada satu alternatif yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan sebaliknya sepertinya masyarakat tidak berkesempatan untuk memberikan alternatif lainnya kepada pemerintah. Padahal pembangunan memerlukan partisipasi, dan salah satu bentuk partisipasi adalah penyampaian saran alternatif.

Hamzah Haz dari FPP berpendapat bahwa kebijakan menaikkan tarip listrik perlu dikonsultasikan dengan DPR, mengingat PLN itu dibiayai dengan APBN. Memang pemerintahlah yang menetapkan tarif listrik, tetapi masalah itu seharusnya didahului dengan pembicaraan khusus pada waktu membahas RAPBN.

Terhadap saran dari mahasiswa pun pemerintah bertindak responsif. Ketika sekumpulan mahasiswa yang menamakan diri Komite Mahasiswa Penurunan Tarif Listrik (KMPTL) diterima oleh jurubicara Departemen Pertambangan Energi Hardjoko Seputro menyampaikan saran agar kenaikan tarif listrik khusus bagi konsumen yang berpenghasilan rendah ditinjau kembali. Atas saran mahasiswa itu, pihak pemerintah menyatakan akan menampungnya, dan menganggapnya sebagai masukan untuk dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan selanjutnya.

Sementara itu sebagai tindak lanjut, fraksi-fraksi di DPR membentuk tim yang khusus mengkaji kenaikan tarif. Fraksi-fraksi yang menyatakan membentuk tim khusus adalah FKP, FPDI dan FABRI. Drs BP Messakh selaku ketua Tim FKP menyatakan optimis pihaknya dapat mengajukan pemikiran alternatif kepada pemerintah, dan ia mempunyai kesan pemerintah tidak bersikap kaku terhadap saran asalkan mendasar. "Kami masih melihat celah-celah yang dapat disampaikan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat," kata Messakh dengan nada optimis.

Bagaimana kelanjutan tentang tarif listrik itu, secara formal keputusan pemerintah sudah sah dan mantap berlaku, tetapi hasil dari pengkajian DPR tetap perlu ditunggu sejauh mana dapat menjadi masukan bagi pemerintah.☐ MK/sgt

Digitized by Google

Dituntut Adanya Kesamaan Langkah

Kunjungan Wapres di Sumatera Selatan

Wakil Presiden Sudharmono, awal April lalu melakukan kunjungan kerja di Sumatera Selatan. Kunjungan selama dua hari di daerah tersebut untuk mengadakan rapat dinas dengan pemerintah daerah provinsi tingkat I di Palembang, mengadakan rapat dinas dengan pemerintah daerah tingkat II Muara Enim, melihat dari dekat transmigrasi di Ogan Komiring Ilir (OKI) dan PT Bukit Asam — sebuah perusahaan pertambangan batubara —.

Kunjungan kerja Wapres Sudharmono ke daerah-daerah selama beberapa bulan belakangan ini cukup banyak. Kunjungan pertama setelah Sudharmono dipilih oleh MPR menjadi Wakil Presiden dilakukan di Jawa Timur. Kunjungan dinas berikutnya adalah Aceh, kemudian menyusul Jawa Tengah, Jawa Barat dan tanggal 2 sampai 5 April lalu, Sumatera Selatan mendapat kehormatan.

Yang menarik dalam kunjungan Wakil Presiden di daerah-daerah tersebut adalah, dimana seorang Wakil Presiden di dalam rapat dinas yang dihadiri oleh Bupati, Lurah dan Camat tersebut langsung dipimpin sendiri. Tentu, rapat dinas dipimpin oleh seorang Wapres di daerah tingkat II khususnya mempunyai arti yang penting bagi tugas-tugas yang diemban Wapres Sudharmono. Sebab, Wakil Presiden Sudharmono dalam kesempatan itu selain memberi pengarahan dan petunjuk, juga mendengar secara langsung dari sumber informasi pertama tentang jalannya pembangunan di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Wapres Sudharmono untuk mengetahui lebih jauh jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut dengan mengadakan dialog baik camat, ataupun lurah.

Tentu, seorang Wakil Presiden memimpin rapat dinas yang diikuti oleh Bupati, Camat dan Lurah ini merupakan kesempatan yang langka. Namun, bagi warga atau tokoh-tokoh masyarakat hal tersebut dianggap bukan asing lagi. Sebab, Sudharmono sewaktu menjadi Ketua Umum Golkar, mengadakan dialog waktu menjelang atau saat kampanye sering juga dilakukan.

Melihat Kenyataan

Acara kedua dari hari pertamanya kunjungan kerja di Sumatera Selatan, yaitu di Unit Pemukiman Transmigrasi (UTP), Sriguna, Komiring Ulu (OKU), Wapres Sudharmono mendengar secara langsung masalah-masalah yang terdapat dilapangan.

Tatkala Wapres mengadakan temu wicara dengan Keluarga Berencana (KB) Lestari, sebuah masalah telah terungkap, yaitu salah seorang transmigran asal Yogyakarta yang sudah 13 tahun ikut transmigrasi dan menetap di daerah tersebut belum mendapatkan sertifikat tanah.

Hal tersebut diutarakan Tanumerta, ketika mengadakan temu wicara dengan Wapres. Lebih lanjut Tanumerta melaporkan, transmigran asal Yogya yang bermukim di daerah tersebut sudah mendapatkan sertifikat tanah, kecuali Darmodriyo, salah satu transmigran yang hingga saat ini sertifikat tanahnya belum dapat diperoleh.

Dengan rasa solidaritas sesama transmigran, Tanumerta berusaha untuk menguruskan agar sertifikat tanah Darmodriyo itu dapat keluar. Namun, nasib dari Darmodriyo belum mujur. Harapan dan usaha yang diperjuangkan belum nampak datang.

Memang, laporan tentang salah seorang transmigran yang sudah 13 tahun belum mendapatkan sertifikat tanah ini telah menarik perhatian. Tidak hanya menteri Transmigrasi Sugiarto yang mengikuti kunjungan kerja Wapres tapi juga Kepala Kanwil Deptrans ikut menjadi kaget. Mendengar laporan yang disampaikan Tanumerta, Wapres Sudharmono langsung memanggil Kakanwil tersebut dan meminta masalah ini diperhatikan. Dan bahkan Wapres meminta, kepada Kepala Kanwil untuk mengurus sertifikat tanah milik Darmodriyo tersebut.

Tampaknya, masyarakat transmigrasi di daerah tersebut mengetahui betul tugas-tugas yang diemban Wapres. Yaitu tugas untuk mengadakan pengawasan. Atau istilah populernya adalah Waskat. Sebagaimana diketahui, untuk menunjang tugas yang diemban ini, kantor Wapres telah dibuka Tromol Pos (TP) 5000. TP 5000 ini adalah untuk menerima pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai masalah.

Sebagaimana dikemukakan Wapres belum lama ini, bahwa surat-surat yang masuk melalui TP 5000 sudah mencapai 17 ribu lebih. Dan sebagian dari surat-surat yang masuk itu mengandung kebenaran. Kemudian dari surat-surat tersebut diteruskan kepada yang berwewenang untuk pemrosesan

Digitized by Google

lebih lanjut.

Mengetahui akan tugas-tugas yang diemban oleh Wapres ini, masyarakat Sumatera Selatan yang dikunjungi itu mendapat kesempatan untuk melaporkan segala permasalahan yang selama ini menjadi unek-unek mereka. Unek-unek itu mulai dari masalah sertifikat tanah, honor guru sampai pada masalah koperasi.

Dilanjutkan

Acara pertama dari dua kunjungannya dan merupakan hari terakhir dari safari di Sumatera Selatan ini, Wapres Sudharmono mengadakan rapat dinas dengan Pemerintah daerah tingkat II, Kabupaten Muara Enim. Dalam rapat tersebut selain diikuti oleh Bupati, camat dan lurah se kabupaten tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wapres Sudharmono memberi pengarahan panjang lebar mengenai pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan, dalam Pelita IV, sasaran dari pembangunan itu telah disebutkan. Yaitu untuk mencapai kerangka landasan yang nantinya akan bermuara menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dan, kata Wapres, apa yang telah ditetapkan ini hasil dari Pelita IV telah dipertanggungjawabkan Presiden sebagai mandataris dan telah disetujui oleh rakyat. Untuk itu, lanjut Wapres, hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pelita IV ini harus lebih dimantapkan lagi.

Dalam pembangunan selama Pelita IV ini, secara nasional telah banyak yang sudah dicapai. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Menurut penilaian Wapres, apa yang telah dicapai dalam Pelita sebelumnya, yaitu Pelita IV, masih terdapatnya hasil-hasil yang sudah kuat dan ada pula yang masih rawan. Maka dalam Pelita V yang sedang berjalan ini diharapkan akan dapat lebih mantap lagi.

Menurut Wapres, apa yang dihasilkan dari Pelita IV secara nasional ini tidak terlepas dari sumbangan yang dihasilkan secara regional. Baik dari tingkat I maupun di tingkat II. Sebagaimana diketahui, setiap daerah itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembangunan. Ada daerah yang mempunyai potensi besar dan ada pula yang kecil. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Pelita V ini masih tetap perlu adanya kesamaan dalam derap langkah.

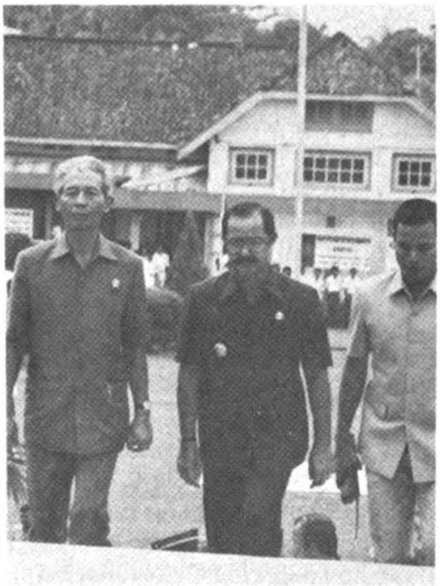

Lebih lanjut, Wapres Sudharmono mengatakan, pembangunan yang sedang dilaksanakan itu tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Trilogi itu dilandasi oleh stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Jadi, kata Wapres, Trilogi itu harus dipegang teguh. Baik ditingkat pusat, daerah dan bahkan di tingkat kelurahan sekalipun. Dengan berlandaskan pada Trilogi tersebut, pembangunan di bidang ekonomi akan dapat lebih ditingkatkan. Dan dengan demikian, pembangunan dibidang ekonomi yang sasarannya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ini diharapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, diperlukannya aparatur untuk lebih keras lagi dalam bekerja. Dan dengan jalan itu diharapkan kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan dengan sebaik-baiknya pula.

Menyinggung tentang pengawasan ini, menurut Wapres, Presiden Soeharto menaruh perhatian besar. Dan, juga telah meminta agar dalam melaksanakan Pelita V ini masalah pengawasan perlu lebih ditingkatkan.

Lebih lanjut dikatakan, pengawasan itu berarti mengikuti secara seksama dan secara terus menerus pelaksanaan, program, dan mengikuti secara terus menerus pelaksanaan yang ada di lapangan. Dengan demikian, penyimpangan, penyelewengan dapat diketahui.

Apabila pengawasan itu berjalan dengan baik, maka aparatur yang bersih dan berwibawa akan dapat diwujudkan, dan akan dapat menjadikan motor (penggerak) yang paling ampuh di dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemudian, untuk menilai sampai sejauh manakah suksesnya tugas-tugas pengawasan itu. Pertama, apabila sudah tidak ada lagi pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan milik negara dan polisi juga tidak banyak kerjanya. Bila masalah-masalah tersebut sudah tidak ada lagi keluhan, maka hal ini sebagai pertanda bahwa pengawasan itu berjalan, ujar Wapres.□ (BM)

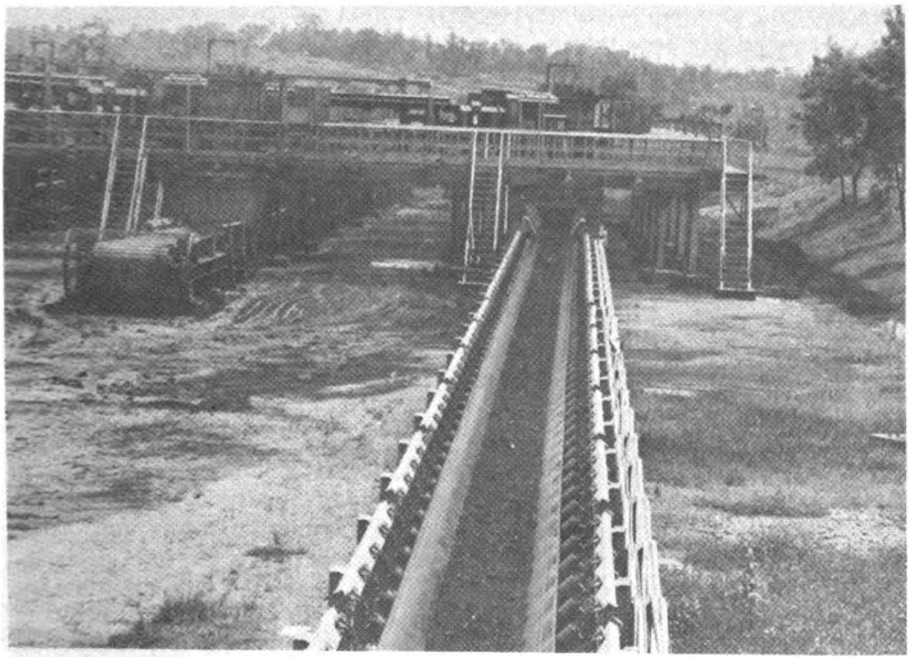

Pertambangan batubara yang dikunjungi Wapres

Digitized by Google

Peranan Wanita dan Pembinaan Generasi Muda

Proses pembangunan yang sedang berlangsung dewasa ini, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sejahtera material dan spiritual, menempatkan manusia-manusia Indonesia sebagai subyek dan sumber daya pembangunan, yaitu pelaku-pelaku pembangunan yang bertanggung jawab bagi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan. Sebagai pelaku pembangunan, manusia Indonesia dituntut untuk memiliki kesadaran serta tanggung jawab akan tugas dan perannya dalam pembangunan. Hal ini akan tumbuh apabila kita memiliki semangat kebangsaan yang tinggi serta pandangan hidup yang akan memberi arah serta tujuan hidup bagi bangsa dan negara.

Pandangan hidup yang kita miliki dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu falsafah negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, telah memberikan tempat terhormat bagi agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi pembangunan, yang sekaligus memberikan kaidah-kaidah moralitas bagi tindakan manusia Indonesia. Dengan demikian di dalam negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa telah meluruskan jalannya pembangunan sekaligus memberikan ukuran-ukuran moral dalam pelaksanaan pembangunan.

Kaum wanita Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih separuh jumlah penduduk Indonesia jelas merupakan sumber daya serta potensi yang tidak kecil artinya, yang dapat didayagunakan bagi pencapaian tujuan pembangunan. Mengingat besarnya potensi wanita Indonesia, maka di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sendiri dibuat rumusan kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan peranan wanita bagi pembangunan, yaitu:

Pembangunan yang menyeluruh, mensyaratkan ikut sertanya pria dan wanita secara maksimal di segala bidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta di dalam segala kegiatan pembangunan.

Peranan wanita di dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab serta peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan makin dimantapkan melalui peningkatan pengetahuan serta ketrampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan, perlu makin dikembangkan kegiatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, antara lain melalui organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan rumusan GBHN di atas, terlihat adanya prinsip yang dianut bangsa Indonesia bagi peningkatan peranan wanita untuk menyukseskan program pembangunan, yaitu persamaan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan kaum pria. Namun, peranan wanita tetap lebih diarahkan bagi terwujudnya keluarga sehat-sejahtera, serta pembinaan generasi muda, anak-anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan tidak menghilangkan harkat dan kodrat kewanitaannya.

Peranan wanita bagi pembinaan generasi muda

Persamaan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama diberikan kepada wanita Indonesia dalam rangka menyukseskan program pembangunan, pada dasarnya mendorong kaum wanita untuk memiliki tanggung jawab serta peranan yang sama dengan pria dalam menyukseskan pembangunan. Karenanya kaum wanita tidak boleh tinggal diam berpangku tangan hanya sebagai penonton dari pelaksanaan gerak pembangunan. Mereka bisa memberikan andil yang tidak kecil artinya, meskipun peranan yang mereka lakukan lebih diarahkan bagi pembinaan keluarga sehat-sejahtera, dan dapat pula dibina masyarakat bangsa yang sehat dan sejahtera. Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi fondament masyarakat bangsa.

Tugas pembinaan anak-anak, remaja dan generasi muda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi pembinaan lahir dan bathin. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah yang akan menjadi generasi penerus bangsa.Karena itu pemeliharaan anak dapat dipandang sebagai bagian dari amal saleh yang akan mendapat nilai tiada tara di sisi Allah SWT. Pemeliharaan anak secara lahiriah mencakup tugas pemeliharaan anak sejak bayi, bahkan sejak janin masih dikandung ibunya, dengan mencukupi kebutuhan makan, pakaian, kesehatan, gizi dan kesejahteraannya. Dari pemenuhan kebutuhan lahiriah ini akan tumbuh rasa aman dalam diri anak yang sangat diperlukan bagi pembentukan kepribadian anak.

Pemenuhan kebutuhan anak, lahir dan batin pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari kedua orangtuanya, tetapi karena secara biologis sejak bayi dalam kandungan, ia lebih dekat dan sangat tergantung kepada ibunya, maka dalam pemeliharaan anak mau tak mau lebih menuntut peranan besar seorang ibu.

Ketika bayi lahir, ibu perlu memenuhi kebutuhan anak akan ASI (air susu ibu), karena hal itu sejalan dengan anjuran Al-Qor'an yang sudah dibuktikan manfaatnya secara medis, di samping untuk mengikatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak yang diperlukan untuk menumbuhkan rasa aman tadi. Secara psikologis sudah dibuktikan melalui berbagai eksperimen, bahwa anak yang memperoleh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan yang dibutuhkan, dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki kepercayaan diri dan mental yang kokoh. Dua kriteria ini harus ada

Digitized by Google

pada masyarakat Indonesia seutuhnya.

Karena dalam praktek selama ini, ibu yang lebih banyak berhadapan dengan pengaturan menu makanan dan gizi keluarga, maka merupakan tanggung-jawab ibu pula untuk memperhatikan persyaratan-persyaratan makanan yang sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Artinya, ibu wajib pula menjaga agar makanan yang diberikan kepada anaknya jangan sampai berasal dari hasil pendapatan yang tidak diridhoi oleh Allah, atau memakan sesuatu yang merupakan hak orang lain.

Lebih penting dari sekedar pemeliharaan lahiriah ialah pemeliharaan batiniah dan rohaniah anak melalui pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses bagi pembentukan kepribadian anak sampai menjadi manusia yang mampu berdiri sendiri, yang memiliki bekal kematangan jiwa rohani sekaligus kemampuan intelektualitas.

Dengan bekal itulah anak kelak akan mampu berperan melaksanakan tanggung-jawab, baik dirinya maupun kepentingan masyarakat dan bangsa. Sudah barang tentu kematangan jiwa dan rohani memerlukan bekal agama dan landasan moralitas yang akan menjadi pedoman, arah dan kendali dalam hidupnya.

Pendidikan agama bagi anak sangat perlu dilakukan sejak dini, yaitu sejak usia balita dan bahkan banyak pendapat yang mendukung pentingnya pendidikan agama, dimulai sejak bayi masih berada dalam kandungan ibunya melalui sikap dan kebiasaan orang tuanya. Sebab "ritme" kehidupan yang dialami orang tuanya akan ikut mempengaruhi pembentukan janin dalam proses menjadi seorang manusia. Bila pendidikan agama dan moral anak tidak dimulai pada usia dini, maka ketika anak mencapai tahap perkembangan psikologis yang merupakan masa "labil" (strumund drang), anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak jarang menyebabkan mereka terjerumus dalam kenakalan remaja. Hal itu disebabkan karena arah, pedoman serta kendali moral yang bersumber dari ajaran agama itu belum tertanam secara kokoh dalam diri anak, sehingga anak tidak mampu "menyaring" pengaruh-pengaruh jelek yang dihadapinya.

Tugas pendidikan dalam rangka menanamkan landasan moral agama yang dijiwai oleh iman, jelas merupakan tugas yang berat, tetapi merupakan tugas mulia karena hal itu berarti mempersiapkan generasi penerus yang tangguh bagi pencapaian cita-cita bangsa, sekaligus menghindarkan munculnya generasi masa depan yang "kropos", dan mengakibatkan lemah dan rusaknya bangsa.

Peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat

Membicarakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, terlebih dahulu perlu dilihat kriteria-kriteria yang menjadi ukuran kesejahteraan itu. Sesuai dengan rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara ada dua aspek kesejahteraan yang menjadi ukuran dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pertama, kesejahteraan material dan lahiriah; dan kedua, kesejahteraan spiritual atau batiniah. Aspek pertama meliputi terbebasnya manusia Indonesia dari penderitaan fisik akibat penyakit, kelaparan dan kekurangan gizi, serta dari lingkungan hidup yang tidak sehat dan tidak terpelihara. Untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang ini tentunya perlu ditingkatkan pembinaan kesehatan keluarga dan masyarakat dengan jalan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi, serta pemeliharaan kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup sebagai usaha-usaha preventip, dan menyediakan pelayanan kesehatan sebagai usaha kuratif.

Sementara aspek kesejahteraan spiritual dengan sendirinya menyangkut terjaminnya kesehatan untuk memperoleh pendidikan yang layak; kehidupan yang aman dan sentosa, terbebas dari ancaman dan tekanan-tekanan batin; memiliki kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, serta kesempatan mengembangkan dan merefleksikan spiritual yang dipegangi.

Secara mikro, perwujudan kedua aspek kesejahteraan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, mesti dilakukan melalui pembinaan keluarga-keluarga sejahtera yang merupakan unit-unit terkecil suatu masyarakat.

Sebab, masyarakat tidak akan sejahtera apabila keluarga yang menjadi anggota masyarakat tidak sejahtera. Dengan sendirinya dalam melakukan pembinaan keluarga sejahtera ini peranan wanita sebagai istri dan ibu tidak dapat dipandang kecil. Kaum wanitalah yang sehari-harinya lebih banyak mengatur dan menjadi pengayom dari berbagai kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, seorang wanita yang berperan sebagai ibu rumah tangga mesti memiliki kesadaran yang tinggi akan arti peranannya dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Dengan kesadaran itu ia akan dapat melaksanakan perannya tanpa terlepas dari konteks pembinaan keluarga sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lahiriah keluarga, sangat perlu diperhatikan pemeliharaan kesehatan dan gizi keluarga dengan jalan mengatur menu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keluarga. Demikian pula, perlu diperhatikan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan tempat tinggal, serta lingkungan sekitarnya. Untuk itu wanita juga dituntut untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan praktis akan arti kesehatan dan bagaimana cara pemeliharaannya.

Selanjutnya untuk mewujudkan kesejahteraan rohaniah, walaupun upaya ini juga terkait dengan upaya yang bersifat makro, namun bagi keluarga-keluarga juga perlu menyediakan kemungkinan bagi anggota keluarganya untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Tentunya kesempatan memperoleh pendidikan ini akan bisa dilakukan apabila ada imbangan antara kebutuhan dan kemampuan untuk menyediakan kesempatan tersebut, baik dilihat secara mikro ataupun secara makro. Untuk terciptanya keseimbangan itulah kiranya penting pengaturan pertumbuhan penduduk ataupun anggota keluarga melalui program keluarga berencana. Dengan demikian, seorang ibu yang telah memiliki kesadaran untuk mengikuti program keluarga berencana, sekaligus telah ikut andil menciptakan pola keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kemampuan menyediakan sarana dan fasilitas, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di samping itu seorang ibu rumah tangga juga harus mampu berperan untuk mendorong terwujudnya suasana keluarga yang harmonis, aman dan tenteram yang akan membebaskan anggota keluarganya dari ancaman, tekanan dan keresahan batin; serta suasana yang mendorong berkembangnya nilai-nilai spiritual yang akan memperkokoh pengembangan pribadi anggota keluarganya. Dengan cara demikianlah kiranya akan bisa diwujudkan pribadi-pribadi manusia Indonesia yang memiliki kualitas watak spiritual dan kualitas lahiriah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kesinambungan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. □ (PP MDI)

Digitized by Google

BAYI TABUNG KEMBAR TIGA:

Bangsa Indonesia Mampu Mengejar Ketinggalan

Adalah dr. Patrick Steptoe dan dr. Robert Edwards mempunyai jasa besar dalam mengembangkan prosedur teknik proses kelahiran bayi tabung. Melalui kedua dokter ini seusai Perang Dunia II maka dibangun laboratorium riset untuk kepentingan ilmu kedokteran dibidang proses kelahiran bayi di Oldham, Inggris Utara. Ide dan konsep pemikiran mereka ini mendapat tantangan langsung dari pejabat kesehatan pemerintah Inggris. Namun, kendala ini mereka hadapi sebagai hal yang wajar. Bahwa setiap perjuangan itu selalu akan mendapat rintangan. Apalagi, dalam hal ini menyangkut soal penemuan baru dalam bidang ilmu kedokteran, khususnya untuk mewujudkan sebuah impian tentang kelahiran bayi tabung. Dengan kesadaran tinggi dan semangat kerja yang kuat dari dua dokter tsb. sekitar tahun 1978 telah berhasil lahir bayi tabung untuk pertama kali di dunia. Bayi tersebut kemudian diberi nama Louise Brown. Itu suatu bukti, bahwa dr. Patrick Steptoe dan dr. Robert Edwards mampu mencatat puncak prestasi bagi dunia ilmu kedokteran.

Puncak prestasi ini kemudian diikuti oleh beberapa dokter di Indonesia kendati mungkin hanya bersifat meneruskan dan lebih mengembangkan hasil kerja dua dokter tersebut. Yang pasti, dokter bangsa Indonesia pun dalam dunia ilmu kedokteran telah mampu menunjukkan sukses diri dalam menangani permasalahan kedokteran, bayi tabung misalnya atau yang lainnya.

Kemudian bila dibuka kembali catatan prestasi tim dokter Indonesia, maka tidak mengherankan mereka telah berhasil menangani kelahiran bayi tabung kembar tiga di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita sebagai hasil program Melati (Melahirkan Anak Tabung Indonesia) produk ketiga. Bahkan, Ketua Yayasan Harapan Kita Ny. Tien Soeharto menyetujui rumah sakit ini dijadikan pusat perinatologi dan persetujuan itu disampaikan kepada tim dokter rumah sakit yang bersangkutan ketika Ny. Tien Soeharto selesai menengok bayi tabung tersebut.

Persetujuan Ny. Tien Soeharto itu, kata Wakil Direktur Bidang Medik RS Harapan Kita Prof. dr. Sudradji Sumadipradja, merupakan angin segar bagi para dokter yang tergabung dalam rumah sakit Yayasan Harapan Kita. Karena, cita-cita mereka sejak awal rumah sakit ini didirikan telah tercapai yaitu menjadi pusat perinatologi. Baik perinatologi ibu maupun anak.

Kendati demikian, lanjutnya, sekarang yang menjadi persoalan adalah biaya membuat bayi tabung kemudian menjadi hamil sangat mahal. Sebab, obat-obat yang dipakai untuk disuntikan dan alat-alatnya pun hanya sekali pakai. Sehingga alat-alat dan obat-obat yang membuat prosedur bayi tabung menjadi mahal dan sekarang pun belum bisa diturunkan sampai seharga mencabut kutil. Sedangkan biaya itu tergantung obat apa yang digunakan. Tahun lalu tarifnya sebesar Rp 2 sampai 2½ juta. Sedang terhitung Januari 1989 tarifnya menjadi Rp 3 sampai Rp 4 juta. "Yang menaikkan bukan Program Melati, melainkan yang punya obat. Dan obat itu yang membuat tarif menjadi mahal", sambung Prof. dr. Sudradji Sumadipradja.

Bayi tabung kembar tiga yang semuanya wanita itu lahir secara prematur dengan operasi sexio-cecarea pada 27 Maret lalu dan 1 April. Bayi tersebut diberi nama Melati, Suci dan Lestari. Sementara ibu ketiga bayi tersebut, Ny. T. Ali Wijaya (32 tahun) mengakui bahwa dirinya mendambakan kehadiran seorang anak sejak lima tahun lalu ketika hasil pemeriksaan menunjukkan kelainan kemudian Ny. T. Ali Wijaya memperoleh perhatian secara khusus dari perinatologi ibu, yang langsung dipimpin oleh dr. Sri Hartini Sumantri serta tim perinatologi anak dibawah pengawasan dr. Titut Pusponegoro. Sebagaimana diketahui perinatologi ibu merupakan suatu seni dan ilmu dalam mengelola serta melaksanakan peralatan semua ibu hamil bersama janinnya, yang dimulai dari masa kehamilan berusia 20 minggu sampai bayi lahir 28 hari. Sedangkan perinatologi anak, adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan janin sejak masih dalam kandungan dari berusia nol sampai satu bulan. Dulunya, perinatologi anak hanya mencakup tujuh hari setelah lahir dan kemudian berkembang menjadi 28 hari lalu oleh tim dokter ahli anak disepakati untuk dibulatkan menjadi 30 hari.

Ketiga bayi tabung ini sewaktu lahir berat badannya masing-masing 2.100 gram, 1.700 gram dan 1.850 gram. "Berat badan bayi seperti ini termasuk rawan, sehingga harus diawasi secara baik," tegas dr. Titut Pusponegoro ahli penyakit anak.

Sukses Dokter Indonesia

Bila disimak kembali catatan puncak prestasi tim dokter Indonesia ini, ternyata bukan hanya berhasil dalam menangani kelahiran bayi tabung saja. Baik yang lahir secara kembar siam atau tiga maupun lahir sendirian. Belum lama ini misalnya, perjalanan sukses dokter Indonesia benar-benar terbukti seperti mampu memisahkan bayi kembar siam bertempelan di kepala asal Tanjung Pinang, bayi kembar siam dempet asal Kisaran, menyambung tangan yang putus karena tebasan seperti semula dan penanganan problematik kedokteran yang lain.

Sementara bangsa Indonesia sudah mempunyai bayi tabung sebelum kelahiran ketiga bayi tabung kembar itu, yaitu bayi tabung yang lahir di Australia 22 Juli 1982 dengan nama Yuki Fithriyah Prawiranegara dari keluarga Ny. Kadarsih Sarudji dan bayi tabung keluarga Markus yang proses kelahirannya ditangani oleh tim dokter Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita. "Bangsa Indonesia pasti mampu mengejar ketinggalannya dalam dunia kedokteran asalkan diberi kesempatan dan kebebasan sepenuhnya sekaligus ditunjang dengan peralatan medis yang memadai," kata dr. A. Daurie Mochran dalam jumpa pers.☐ DT

Digitized by Google

Agama Punya Peranan Besar Dalam Membina Moral Manusia

Ibu Sudharmono dalam kesempatan mengikuti perjalanan Wapres Sudharmono selama dua hari di Sumatera Selatan menyempatkan diri untuk melihat dari dekat hasil kerajinan rakyat setempat dan mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi wanita se Sumatera Selatan.

Dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh dari organisasi tersebut di kabupaten Muara Enim, Ibu Sudharmono menguraikan panjang lebar tentang anak. Dalam uraiannya Ibu Sudharmono mengatakan, kalau kita hendak membentuk manusia yang kuat jasmaninya, maka kita berikan anak makanan yang sehat dan cukup tinggi gizinya. Apabila kita ingin membentuk manusia yang cerdas pikirannya, berilah anak kita pendidikan yang sepantasnya. Kalau kita hendak memiliki manusia yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita berikan anak kita ajaran agama dan apabila kita ingin membentuk manusia yang cinta kepada tanah air, setia kepada bangsa dan negara, maka kita berikan anak kita ajaran-ajaran Pancasila serta pedoman mengenai penghayatan dan pengamalannya. Dan apabila kita inginkan terbentuknya manusia yang menghormati orang tua, maka wajarlah kita berikan anak kita kasih sayang yang bersumber dari kasih sayang yang ada dalam lubuk hati kita yang dalam.

Sebagai orangtua, sebagai Ibu, kata Ibu Sudharmono lebih lanjut, kita wajib memberikan anak-anak segala sesuatu yang menjadi haknya sebagai bekal yang tidak ternilai harganya untuk perjalanan kehidupan selanjutnya. Mengingat betapa penting dan mendasarnya kedudukan ibu dalam kehidupan keluarga, maka kita semua perlu menyadari bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan kita mendidik anak-anak.

Di dalam usaha meningkatkan jenjang pengalaman anak menjadi ke tingkat kedewasaan yang mantap dan mapan, ia sangat memerlukan orangtua. Anak sangat memerlukan bimbingan. Apalagi bila anak sedang menginjak masa remaja, maka orangtua terutama ibu perlu memberikan perhatian yang penuh kepadanya.

Memerlukan bimbingan

Kesibukan ibu-ibu dalam kegiatan kepentingan organisasi ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, kata Ibu Sudharmono, tidak boleh mengakibatkan ibu-ibu meninggalkan tugas pokok sebagai ibu rumahtangga. Kedudukan dan peranan kaum ibu sebagai pembina keluarga sejahtera sama sekali tidak boleh diabaikan.

Untuk itu, kata Ibu Sudharmono, agama mempunyai peranan yang amat besar dalam usaha pembinaan watak dan moral manusia. Itulah sebabnya agama yang mengajarkan Keesaan dan Kuasa Tuhan merupakan sumber yang tidak akan ada habis-habisnya ditimba bagi perwujudan cita-cita untuk membentuk manusia-manusia yang memiliki akhlak dan moral yang tinggi.

Usaha-usaha pendidikan agama dapat menanamkan jiwa keagamaan seperti iman, taqwa, jujur, adil, persaudaraan, tenggang rasa dan lainnya yang kesemuanya itu menunjukkan betapa penting dan indahnya nilai-nilai agama bagi kehidupan manusia.

Sedangkan pada hari sebelumnya, Ibu Wakil Kepala Negara ini dalam pengarahannya di depan organisasi-organisasi wanita Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, juga menyinggung tentang pengayoman hukum yang diberikan pemerintah kepada istri pegawai negeri dalam membina keluarganya. Pengayoman itu berupa peraturan pemerintah No. 10/1983 yang sangat memperketat kemungkinan pegawai negeri sipil beristri lebih dari satu. Keuntungan bagi kaum wanita istri pegawai negeri ini, pada hari Kartini ini PP No. 10/1983 genap berusia 6 tahun.

"Saya mengharapkan organisasi-organisasi wanita dalam memperingati ulang tahun 'PP No. 10' tersebut berbarengan dengan peringatan hari Kartini", pinta Ibu Sudharmono.

Mengenai PP No. 10 itu, Ibu Sudharmono lebih lanjut mengatakan, mesti ketentuan yang diatur dalam PP No 10/1983 ini hanya berlaku bagi pegawai negeri dan sipil, maka semangatnya menjangkau lebih luas bagi para istri pada umumnya.

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Ibu Sudharmono.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Sudharmono selain memberikan pengarahan di dua tempat, yaitu kepada organisasi-organisasi wanita Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan pengurus organisasi-organisasi wanita Kabupaten Muara Enim, juga menyempatkan diri untuk melihat dari dekat hasil kerajinan rakyat daerah tersebut.

Memang, dalam melihat hasil-hasil kerajinan produksi daerah tersebut, Ibu Sudharmono merasa terkesan. Sebab, produk-produk yang dihasilkan memang cukup bagus. Bahkan yang paling mengesankan dalam kunjungan itu adalah tatkala Ibu Sudharmono melihat secara langsung bagaimana anak-anak cacat tubuh dapat membuat kain khas daerah Sumsel (Palembang) dengan rapi dan apik.□ (BM)

Digitized by Google

Bingkisan Lebaran Dari ITRIA

Upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan tingkat ekonomi kuat, adalah suatu langkah positip dalam kehidupan antara sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Agar kalangan masyarakat yang berada dalam katagori ini tidak segan-segan turun tangan membantu dan membagi rasa kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan tersebut. Sehingga harmonisasi kehidupan suatu masyarakat itu dapat menjadi cerminan dalam menjabarkan kaidah-kaidah kesadaran sosial sebagaimana telah menjadi kewajiban umat beragama.

Pencerminan kehidupan yang terungkap diatas itu tampak telah dirintis oleh para ibu anggota ITRIA DPA-RI (Ikatan Isteri Anggota Dewan Pertimbangan Agung), yang diwujudkan dalam bentuk karya nyata kegiatan bakti sosial dengan memberi santunan atau sumbangan terhadap panti asuhan. Misalnya, 25 April yang lalu, para anggota ITRIA ini yang dipimpin Ketua ITRIA Ny. M. Panggabean mengadakan kunjungan ke panti-panti asuhan yatim piatu di wilayah Jakarta. Diantaranya, Yayasan Kesejahteraan Yatim Piatu "Permata" di Jalan Batu Raja Gg. Muara Inim, Jakarta Pusat, Yayasan Yatim Piatu Murni Jaya di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Utara dan salah satu yayasan yatim piatu di daerah Cengkareng.

Kegiatan sosial ini sudah menjadi tradisi para ibu anggota ITRIA DPA. Setiap tahun kegiatan semacam ini diselenggarakan bertepatan dengan hari besar agama Islam dan Kristen, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal. Pada momentum seperti itu, para anggota ITRIA DPA tidak segan-segan lagi turun tangan untuk membantu dan meringankan beban mereka yang berada dalam lingkungan panti asuhan supaya sama-sama dapat menikmati serta memahami arti peringatan hari yang bersangkutan tersebut.

"Kami sadar bahwa usaha pimpinan panti asuhan untuk menghidupi panti asuhan sangat mengharapkan adanya uluran tangan dari pihak luar. Apalagi usaha yayasan ini sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila, sehingga kami pun berupaya untuk membantu dengan memberikan sumbangan berupa

Bingkisan dari ITRIA

makanan. Bahkan, kami tahu bahwa makanan yang kami sumbangkan itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan nilai mata uang atau benda lainnya. Namun, itu merupakan sumbangan yang tulus dari kami untuk anak-anak di panti asuhan dan langkah ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Karena, kegiatan bakti sosial ITRIA telah menjadi program kerja sepanjang tahun dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," kata Ketua ITRIA DPA-RI Ny. M. Panggabean.

Apa yang dikatakan Ny. M. Panggabean ini memang sangat mendasar dan sangat dirasakan oleh setiap pimpinan yayasan panti asuhan yang bersangkutan. Ketua Panti Asuhan Yatim Piatu Amal Wanita Cengkareng Ny. Rodjiah misalnya, mengakui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai anak-anak asuhannya sangat besar. Dalam keadaan seperti ini, tentu ia sangat mengharapkan uluran tangan dari masyarakat yang mampu untuk meringankan beban pihak yayasan. Sedangkan sumbangan dari ITRIA DPA-RI ini sangat besar kegunaannya bagi penghuni dan pengasuh Panti Asuhan Yatim Piatu Amal Wanita. Sehingga pemberian ini merupakan suatu sikap suci dari ibu-ibu anggota ITRIA DPA-RI untuk membagi rasa kebahagiaan kepada anak-anak yatim piatu. Oleh karena itu, sumbangan ini sekaligus sebagai bingkisan Lebaran bagi anak-anak di panti asuhan dan juga sebagai obat bagi mereka dalam menikmati suasana Lebaran.

Di Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Yatim Piatu "Permata" Jakarta Pusat, Ny. Hartono mengharapkan pada pimpinan panti asuhan ini, Mi Anwar, supaya memberi pendidikan teknik selain pendidikan ketrampilan. Sebab, lewat pendidikan ini kemungkinan besar akan menciptakan anak didik yang mampu mandiri dan siap pakai. Kemudian mereka ini akan mampu pula untuk mengembangkan bekal yang diperolehnya itu di tengah masyarakat. Apalagi dalam panti ini terdapat 131 orang penghuni sehingga dalam hal ini perlu adanya pembentukan diri anak-anak itu melalui pendidikan tersebut.

Toleransi kepentingan Agama

Kiranya, dalam kegiatan sosial ITRIA DPA-RI ini yang perlu digarisbawahi adalah keterlibatan anggota-anggotanya cukup besar toleransinya terhadap kepentingan agama. Bila datang peringatan hari besar umat Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, maka mereka yang bukan orang beragama Islam turut bekerja untuk menyukseskan sebuah program kegiatan sebagaimana adanya dan sebaliknya, bila Hari Natal mereka secara bersama-sama saling menyelesaikan kegiatan seperti yang dilakukan di Hari Raya Idul Fitri tersebut. Di sini secara tidak langsung kegiatan itu sendiri melahirkan sikap-sikap positip terutama yang berkaitan dengan kerukunan kehidupan umat beragama di Indonesia.

"Ya, memang demikian ITRIA itu. Di samping melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, juga mengandung pengertian positip bagi semua anggotanya. Adapun dana untuk bingkisan Lebaran itu sebagai kegiatan sosial diperoleh dari usaha para ibu anggota ITRIA. Dengan demikian, semenjak ITRIA ini dibentuk tahun 1983 maka para anggotanya telah banyak melakukan kegiatan sosial sebagai penjabaran pengabdian masyarakat dalam mengemban kepentingan nasional," kata salah seorang anggota ITRIA lainnya. □ DT

Digitized by Google

Lomba Gerak Jalan HWK

Minggu pagi 2 April 1989 yang lalu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Haryono Suyono secara bersamaan melepaskan balon untuk memberangkatkan peserta Lomba Gerak Jalan HWK (Himpunan Wanita Karya) di Silang Monas Jakarta.

Kehadiran HWK sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan untuk melibatkan diri dalam aktivitas keolahragaan yang dilombakan itu, tentu mempunyai nilai tambah bagi HWK sendiri untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat banyak. Ternyata pendekatan itu terbukti, dimana peserta Lomba Gerak Jalan HWK itu lebih dari cukup dan sangat memuaskan pihak panitia lomba yang bersangkutan. Karena, masyarakat tidak hanya terpaku pada hadiah atau piala yang telah disediakan bagi sang Juara. Tapi, mungkin peserta lomba itu hanya sekedar ingin mensukseskan program kerja HWK disamping juga mereka memang sangat gemar terhadap kegiatan olahraga gerak jalan.

Untuk itu, adalah benar bila HWK dalam hal ini ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat jiwanya — mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Sehingga sangat menunjang kelangsungan proses pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal itu, Ibu Tien Soeharto dalam puncak HUT HWK ke VIII pernah mengharapkan agar kaum wanita Indonesia dapat memberi sumbangan bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Sebab, pada era pembangunan nasional sekarang ini seluruh lapisan dan kalangan masyarakat turut memikul tanggung jawab terhadap proses perjalanan pembangunan nasional. Sedang dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sendiri telah mengamanatkan kepada kita semua, bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kaitan pesan Ibu Tien Soeharto dan amanat GBHN itu, maka HWK sendiri sangat menyadari terhadap peranannya di tengah masyarakat dan sebagai organisasi kemasyarakatan wanita, HWK tetap mempunyai komitmen moral atas suksesnya pembangunan nasional sebagaimana telah menjadi program nasional. Adapun keterlibatan HWK di bidang olahraga itu merupakan salah satu wujud tanggungjawab HWK (wanita) dalam menjabarkan amanat GBHN sebagai pengamalan Pancasila, karena olahraga pun merupakan bagian dari program pembangunan nasional.

Monas - Sudirman

Kemudian, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono yang mendapat kesempatan pertama untuk memberangkatkan peserta gerak jalan untuk kelompok regu putra, tampil dengan wajah segar dan ceria tanpa membacakan pidato sambutan. Namun, penampilan Wahono ini tidak mengurangi arti bagi HWK dan masyarakat peserta lomba gerak jalan. Apalagi Ketua Umum DPP GOLKAR ini senantiasa tampil dengan gaya yang merakyat, seperti halnya pada penampilannya di hari Minggu pagi itu. Beliau hadir dengan mengenakan pakaian olahraga yang sederhana. Bahkan, suasananya pun diwarnai oleh kesederhanaan dan pancaran semangat dari seluruh peserta dan panitia yaitu kader-kader HWK.

Wahono tampil merakyat

Peserta Lomba Gerak Jalan HWK itu dibagi dalam lima kelompok, yaitu kelompok regu putra, regu putri, perorangan putra, perorangan putri dan kelompok keluarga. Sedangkan route yang dilalui oleh peserta dari Silang Monas memutar jalan Sudirman dan memasuki finish di Silang Monas kembali.

Hadir dalam lomba ini selain Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, Kepala BKKBN Haryono Suyono adalah Ketua Umum DPP HWK Ibu Nani Soedarsono, Sekjen DPP GOLKAR Ir. Rachmat Witoelar beserta istri, DR. Pratiwi Sudharmono dan kader-kader HWK.☐ DT

Digitized by Google

Mengintip Pelaksanaan Rakerda

"Dalam mempersamakan persepsi kebijakan organisasi"

Sudah menjadi kebiasaan rutin bagi GOLKAR, bahwa tiap tahun dapat dipastikan menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bagi Dewan pimpinan Daerah (DPD) GOLKAR Tingkat II dan Tingkat I secara berurutan, mendahului penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) Tingkat Nasional yang biasanya diselenggarakan pada bulan Oktober.

Tradisi ini merupakan tradisi lama, namun boleh dikatakan baru. Pasalnya, menjelang akhir kepemimpinan GOLKAR masa bhakti 1983-1988, Sudharmono SH, yang kini menjabat Wakil Presiden, waktu itu menerapkan pola kepemimpinan yang diharapkan lebih demokratis, yaitu sistim bottom up (dari bawah ke atas), untuk menggantikan sistim top down (dari atas ke bawah).

Pola baru itu mulai dicoba ketika menyelenggarakan Munas IV GOLKAR bulan Oktober tahun 1988. Waktu itu Munas IV didahului Musda Tingkat II disusul Musda Tingkat I, baru Munas.

Dan baru kali ini, setelah diberlakukannya sistim bottom up, DPD GOLKAR Tingkat II di seluruh Indonesia telah menyelesaikan Rakerdanya. Dan kini DPD GOLKAR Tingkat I tengah melaksanakan Rakerdanya. Diharapkan Rakerda ini selesai sebelum diselenggarakannya Rapim.

Forum-forum semacam ini memang telah disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) GOLKAR, dan telah mentradisi sejak Munas I GOLKAR, dengan tanpa ada masalah. Memang GOLKAR telah menunjukkan cermin kedewasaannya dalam berorganisasi, dan disinilah salah satu letak kemandirian GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik terbesar dan handal di Indonesia. Memang ini harus mendapat pengakuan seluruh warga Indonesia, betapa tidak, "kekuatan sosial politik yang lain" belum mampu dan mapan melaksanakan mekanisme kepemimpinan yang begitu rapi seperti GOLKAR.

Rakerda yang lebih merupakan konsolidasi ke dalam organisasi GOLKAR, sudah barang tentu memutuskan tentang Program Kerja Daerah yang memiliki kekuatan hukum organisasi yang mengikat kepada seluruh Anggota dan Kader Golongan Karya di daerahnya, untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Untuk itu perlu adanya kesiapan pengetahuan, pengertian dan pemahaman yang sama di antara Anggota dan Kader GOLKAR di daerah terhadap arah, sasaran, tujuan dan langkah-langkah perjuangan yang akan ditempuh untuk kurun waktu tertentu. Perlu adanya perangkat organisasi yang sama di semua tingkatan kepengurusan organisasi, sebagai pendukung pelaksanaan Program Kerja Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pelaksanaan Program Umum dan Program Kerja Daerah itu sendiri, dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

Pelaksanaan Rakerda DPD GOLKAR Tingkat I Jawa Barat, baru-baru ini di Lembang, Bandung, bertujuan untuk mempersamakan persepsi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan organisasi, sehingga seluruh anggota, Kader DPD GOLKAR Tingkat I dan DPD GOLKAR Tingkat II memiliki pengetahuan, pengertian dan pemahaman serta sikap dan tindak yang sama terhadap arah, sasaran, tujuan dan langkah-langkah perjuangan yang akan ditempuh untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Jawa Barat Yogie SM berpendapat, Rakerda ini digunakan untuk lebih menciptakan landasan, mengembangkan niat dan semangat dalam memenuhi aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan program. Secara keseluruhan Rakerda ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Namun, tidak semua aspek kehidupan

P.T. (Persero) Asuransi Kerugian JASA RAHARJA

Cabang Surabaya

mengucapkan :

Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1409 H

Mohon Maaf Lahir & Bathin

Digitized by Google

masyarakat dapat dengan lancar direalisasikan secara konsisten. Karena banyak situasi yang terlalu cepat berubah atau terlalu lambat dibanding dengan prakiraan kita. Jika demikian halnya, maka yang lebih penting adalah, kita harus secara lentur atau flexible melakukan berbagai modifikasi rencana maupun pelaksanaan kegiatan, dengan tanpa harus keluar dari landasan konsistensi, yaitu kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyinggung tentang kemandirian, Yogie SM berpendapat, kemandirian itu mengandung arti kebebasan melakukan segala upaya melaksanakan tugas dan fungsinya, sepanjang masih dalam prinsip perjuangan yang mengandung prasarat esensial yang tidak mudah, katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan kemandirian, dapat dibangun kerjasama yang lebih efektif, efisien serta beriklim menyenangkan. Mengingat dalam kehidupan politik saat ini, kita perlu memelihara iklim yang baik, agar citra politik di mata masyarakat tetap baik. Dan kekuatan politik seperti GOLKAR sebagai wujud aspirasi rakyat, mampu mengobarkan semangat kerjasama, karena masalah yang kita hadapi saat ini sudah bukan lagi masalah yang dapat dihadapi oleh kemampuan masing-masing. Karena aspirasi masyarakat telah berkembang jauh, tidak saja berlandaskan pada kebutuhan sandang pangan, melainkan sudah sampai pada pengembangan gagasan-gagasan. Ini tidak berwujud, namun menggambarkan keutuhan manusia atau masyarakat sebagai suatu kesatuan bangsa, karenanya hanya dapat dipahami dan direalisasikan kalau ditinjau dari berbagai sudut pandang dan pada berbagai aspek, kata Yogie SM.

Terlebih dalam Pelita V. Pada masa itu kesejahteraan tidak lagi bertitik berat pada kebutuhan dasar, melainkan pada kebutuhan aktualisasi diri yang lebih tinggi, pendekatan keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity approach), mungkin harus sudah diganti dengan pendekatan hidup bermotivasi, tegasnya.

Sedang Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam kesempatan itu selain menyoroti berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menyinggung juga secara mendalam tentang masalah-masalah konsolidasi organisasi, seperti tentang mekanisme organisasi, dapur pengolahan data, kemandirian GOLKAR, dan menyinggung masalah budaya terus terang bagi kader-kader GOLKAR di lembaga legislatif dan dimana pun ia ditugaskan.

Namun yang lebih penting dari pengarahan Ketua Umum DPP GOLKAR untuk diperhatikan bagi pimpinan di jajaran DPD adalah, perlu adanya perkiraan keadaan berikut peta politik secara nasional maupun per daerah, yang berisikan kenyataan-kenyataan dan kondisi aktual, baik berkenaan dengan GOLKAR maupun kedua parpol dan kondisi sosial politik (suasana politik makro) pada umumnya, dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, yang perlu ditelusuri secara lebih teliti, rinci, luas serta lebih mengkait satu dengan lainnya. Lebih komprehensip.

Untuk keperluan itu, menurut Wahono, sejak saat ini perlu diikuti secara cermat berbagai gejala yang muncul dan berkecenderungan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hubungan berbangsa dan bernegara yang mempunyai dimensi dan bobot politis, psikologis, seperti peningkatan dan perobahan kemauan/tuntutan (rising demands), kebosanan, kecenderungan kepada sesuatu/mode baru dan rasa kasian kepada yang kalah. Dan yang paling menonjol adalah munculnya calon pemilih atau pemilih baru dari kalangan generasi muda yang saat ini berusia 14 tahun dengan berbagai persepsi mereka terhadap dunia politik pada umumnya dan terhadap pemerintah saat ini serta terlebih khusus lagi terhadap GOLKAR.

Untuk itu perlu adanya program khusus dalam mengantisipasi kelompok calon pemilih baru ini. Yaitu dengan meningkatkan upaya konsolidasi intern organisasi GOLKAR dan lingkungan Keluarga Besar GOLKAR, dengan belajar dari pengalaman masa lalu. Salah satu intinya adalah, daerah yang mempunyai koordinasi Keluarga Besar-nya bagus, perlu adanya kemantapan mekanisme pelaksanaan program, ujar Wahono.

Masalah tersebut, lanjut Wahono, adalah menjadi kepentingan dan tanggung jawab kita bersama dalam memelihara semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang terintegrasi serta meningkatkan mutu mekanisme permusyawaratan dalam forum tersebut menuju sasaran yakni salah satunya adalah menangnya GOLKAR dalam Pemilu 1992.

Lain dari pada itu, Ketua Umum mengharapkan peningkatan mekanisme hubungan dan dukungan kader-kader GOLKAR yang ada di lembaga Perwakilan Rakyat, di organisasi kemasyarakatan dan di lembaga kemasyarakatan lainnya maupun kader GOLKAR perorangan, untuk lebih memelihara rasa kebersamaan dan keterpanggilan untuk memenangkan GOLKAR dalam Pemilu yang akan datang, harap Wahono dihadapan peserta Rapat Kerja GOLKAR Daerah Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 260 peserta kader GOLKAR, termasuk diantaranya Pimpinan Koordinator Wilayah DPP GOLKAR antara lain Rachmat Witoelar, Ny. Mien Sugandhi dan Fungsionaris GOLKAR Pusat yang duduk di DPR yang saat itu ditugaskan untuk menghadiri dan sekaligus memberikan sambutannya pada peringatan Supersemar di daerah Jawa Barat. □ (WT)

TUNJUNGAN PLAZA

Pusat Perbelanjaan terlengkap di kota Surabaya

Tunjungan Plaza

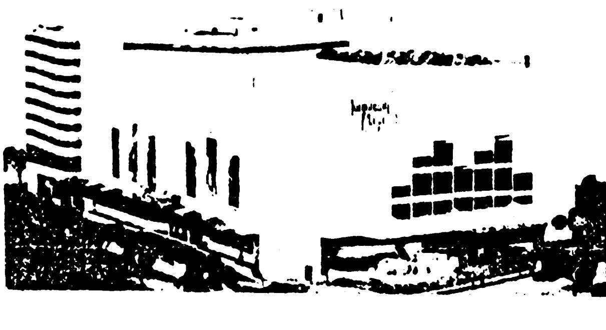

MANAGEMENT OFFICE
PT PAKUWON JATI
Jl. Basuki Rachmat 8–12
Surabaya
Telp. (031)511088,
510568, 510569
510572–3, 510576

Digitized by Google

Kemanusiaan Semakin Tak Punya Harga

Sesudah Perang Dunia II, kemajuan ilmu dan teknologi makin pesat. Cerita-cerita Flash Gordon yang mengkhayalkan manusia angkasa, kehidupan di angkasa, sejak pertengahan dasawarsa 1960-an sudah menjadi kenyataan. Yuri Gagarin dari Unit Sovyet dengan pesawat angkasa pertama di dunia SPUTNIK berhasil memasuki angkasa diluar atmosfer bumi.

Menyusul antariksawan Amerika Serikat, dengan pesawat Appolonya pada tahun 1969 jauh lebih maju lagi, mendarat di bulan dan tinggal di bulan untuk beberapa hari, baru kembali ke bumi dengan pesawat ulang alik Appolo itu.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah merangsang negara negara industri maju terutama negara negara adikuasa untuk memproduksi senjata senjata pemusnah yang mampu memusnahkan kawasan tertentu dalam waktu sekejap. Perlombaan senjata terus memuncak sejak awal dasawarsa 1960-an.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah membuka cakrawala yang lebih luas bagi hidup dan kehidupan manusia. Tetapi sayangnya kemajuan ilmu dan teknologi itu lalu disalahgunakan. Tak lagi semata demi kesejahteraan dan untuk tujuan-tujuan damai, tetapi justru dimanfaatkan untuk memusnahkan manusia dan kemanusiaan. Senjata kuman misalnya, sejak perang Vietnam tahun 1960 digunakan untuk memusnahkan puluhan ribu umat manusia; perang Iran — Irak juga ternyata digunakan senjata kuman untuk melumpuhkan gerak maju lawan. Seakan manusia tak lagi berharga bagi sesamanya. Harga seorang manusia mungkin lebih murah dari harga seekor kuda balap atau seekor anjing pelacak.

Tidak hanya dibidang persenjataan kemajuan teknologi membawa akibat paling buruk terhadap kehidupan manusia. Tetapi telah pula mendorong munculnya berbagai kejahatan yang canggih. Motivasi untuk berbuat kejahatan tambah canggih. Bahkan sarana teknologi dimanfaatkan untuk keberhasilan sebuah kejahatan. Kejahatan komputer misalnya, bisa dilakukan untuk melakukan manipulasi angka di Bank. Juga bisa digunakan memprogramkan suatu tindak kejahatan seperti merampok, membunuh dan sebagainya.

Awal bulan April 1989, warga ibukota Jakarta, dikagetkan oleh kasus ditemukannya mayat wanita yang telah dipotong menjadi 7 bagian, tanpa telapak tangan dan badan. Hanya kepala, tangan tanpa telapak tangan serta kaki yang terpotong sebatas lutut. Potongan mayat itu dimasukkan kedalam karung plastik lalu dibuang di tempat sampah.

Pembunuh berusaha menghilangkan jejak dengan cara meniadakan bagian-bagian tubuh yang bisa menjadi petunjuk bagi pengungkapan kasus tersebut, sehingga bisa ditemukan si pembunuh. Cukup profesional cara-cara melakukan pembunuhan itu. Bagian tubuh yang bisa menguak tabir pembunuhan itu sengaja dihilangkan.

Sungguh keji perbuatan itu. Manusia disamakan dengan hewan di rumah jagal, penggal dan dibungkus seperti tetelan daging. Bahkan lebih kejam lagi dari pemotongan hewan ditempat pejagalan. Memang bukan untuk pertama kalinya kasus pembantaian manusia sekeji ini terjadi. Pernah ada mayat terpotong 13 yang ditemukan di Jl. Sudirman. Lalu ada lagi pembantaian wanita cantik di Hotel Sahid. Sedikitnya sejak tahun 1979 hingga sekarang telah terjadi kasus pembunuhan keji serupa ini empat kali. Tapi semuanya hingga sekarang belum satupun terungkap. Semuanya begitu misterius tak terungkap.

Tetapi tidak seharusnya ilmu pengetahuan dan teknologi lalu dijadikan kambing hitam dari semua kejahatan ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi pengantar manusia untuk mengetahui rahasia alam yang dihuninya. Ia pula telah memberikan kepada manusia berbagai kemungkinan pilihan, dalam mengatasi keseharian manusia yang kompleks. Persoalannya, bagaimana manusia memanfaatkannya bagi kepentingan kemanusiaan.

Ternyata ada manusia yang dengan sengaja memanfaatkan penemuan ilmu pengetahuan itu untuk melakukan kejahatan. Disini yang perlu dipersoalkan adalah moral manusia itu. Nampaknya "kanibalisme" abad pertengahan kembali menghinggapi kehidupan abad modern ini.

Nilai budaya dan peradaban nampak mulai bergeser ke arah pemuasan personal. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin merosot nilai dan kaidah-kaidah kehidupan. Orang dengan sengaja menggunakan ilmu pengetahuan untuk memenuhi keinginan-keinginan individual, tana memperdulikan kepentingan orang lain. Bahkan tak lagi mengindahkan kaidah dan dogma agama.

Kasus mayat potong tujuh di Rawamangun, awal April ini memberi petunjuk bagi kita tentang kemerosotan dan kebobrokan akhlak manusia. Sehingga tak lagi menghargai nyawa orang lain. Harga manusia tak lebih dari sekilogram daging di pasar.

Digitized by Google

Prospek Di Balik Pertemuan Hun Sen - Sihanouk

Bila tidak ada kejadian luar biasa, maka Jakarta akan menjadi tuan rumah bagi KTT antara pemimpin koalisi Kampuchea, Pangeran Norodom Sihanouk dengan Perdana Menteri Pemerintahan Kampuchea dukungan Vietnam, Hun Sen. Pertemuan yang sangat penting itu berlangsung 30 April sampai 5 Mei.

Ini tentu kehormatan luar biasa bagi Jakarta, karena untuk ketiga kalinya dipercaya menjadi tempat pihak-pihak yang bersengketa selama 10 tahun di Kampuchea itu melakukan perundingan untuk menemukan cara terbaik penyelesaian konflik di antara mereka sendiri. Jakarta menjadi sorotan internasional ketika Juli tahun lalu menjadi tuan rumah JIM I (Jakarta Informal Meeting) maupun JIM II awal Februari tahun ini. Dan kini menjadi tuan rumah lagi bagi KTT Sihanouk dan Hun Sen.

KTT itu sendiri sebenarnya merupakan kejutan banyak pihak, karena dia diumumkan begitu mendadak. Dan peristiwa penting di balik rencana KTT itu adalah pengumuman pemerintah Vietnam yang telah menduduki Kampuchea sejak 1978 bahwa semua pasukannya yang kini berjumlah 50.000 di Kampuchea akan ditarik tuntas sebelum 30 September tahun ini. Tentu saja pengumuman Hanoi yang mengejutkan itulah yang merupakan penyebab mengapa Sihanouk dan Hun Sen secara mendadak ingin ber-KTT.

Pengumuman Vietnam bukan saja menyebabkan banyak sorotan internasional tertuju ke Hanoi, terutama menyangkut kesungguhan janjinya, tetapi mengacaukan semua jadwal pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Kampuchea. Menyusul pengumuman Vietnam itu, pertemuan kelompok kerja antara empat faksi Kampuchea yang sedianya diadakan di Paris pertengahan April, mendadak dibatalkan. Pertemuan mereka itu menurut jadwal akan diadakan di

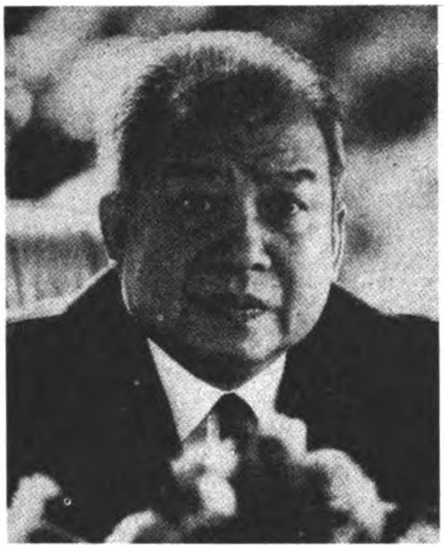

Sihanouk

Jakarta juga sesudah KTT Sihanouk-Hun Sen.

Tentang pertemuan kedua pemimpin Kampuchea ini pun tak kurang simpang siurnya. Perdana Menteri Thailand Chatichai Choonhavan tiba-tiba membuat pernyataan bahwa KTT Sihanouk-Hun Sen tidak jadi di Jakarta tetapi dipindahkan ke Paris. Sihanouk yang kaget dengan pengumuman itu segera memberitahu puteranya Pangeran Rannaridh yang memimpin pasukannya di lapangan bahwa pertemuan dia dengan Hun Sen tetap diadakan di Jakarta. Bahkan dalam siaran radio itu Sihanouk khusus meminta Jakarta agar berupaya sekuat tenaga dalam proses perdamaian yang semakin menunujukkan titik terang itu.

Dan akhirnya Menlu Ali Alatas dalam konferensi pers mingguannya di Deplu Pejambon, Jakarta, pertengahan Februari, menghapus semua kecemasan tentang simpang siur itu dengan mengatakan bahwa pertemuan jadi dilangsungkan di Jakarta. Kepastian itu langsung diterima dari dubes Indonesia di Hanoi.

Walaupun pertemuan Jakarta itu dilangsungkan dalam atmosfir yang semakin konstruktif, namun tidak berarti Sihanouk dan Hun Sen akan menghasilkan keputusan besar terhadap semua masalah yang mengganjal di antara mereka dalam pertemuan tersebut. Sihanouk datang dengan sejumlah beban dan tuntutan, demikian pula Hun Sen. Masing-masing memegang bargaining position yang tidak mungkin diterima 100 persen oleh pihak lain. Tetapi kemauan Sihanouk bertemu lagi dengan Hun Sen untuk berunding merupakan cerminan itikad bahwa mereka bersungguh-sungguh ingin mengakhiri pertumpahan darah di kalangan rakyat Kampuchea sendiri yang telah berlangsung selama 10 tahun lebih.

Posisi Sihanouk

Sihanouk yang kini menjadi pemimpin Koalisi Perlawanan Kampuchea yang diakui oleh PBB itu adalah bekas pangeran yang menguasai Kampuchea selama 30 tahun lebih. Dia digulingkan oleh rejim Pol Pot tahun 1975 yang sekaligus mengakhiri sistim monarki di negeri itu. Ketika Pol Pot memerintah, Sihanouk dipenjara.

Tetapi sepak terjang Pol Pot dengan pasukan Khmer Merah menyebabkn Vietnam merasa perlu melakukan tindakan penyelamatan. Soalnya selama pemerintahan yang 1000 hari, Pol Pot membantai sekitar 1 juta penduduk Kampuchea.

Ketika pasukan Vietnam menyerbu Phnom Penh pada akhir tahun 1978, Pol Pot bertahan tidak lebih dari seminggu sehingga terguling dan harus mengungsi ke hutan, bersama Sihanouk. Anehnya, Sihanouk yang tadinya dipenjara oleh Pol Pot, malah bersekutu membentuk kekuatan koalisi. Pertimbangan Sihanouk mungkin memanfaatkan kekuatan personil militer Pol Pot yang didukung sangat fanatik oleh RRC. Dan Cina yang berang terhadap tindakan Vietnam menyerbu Kampuchea melakukan perbatasan seru di tahun 1979 yang oleh Beijing disebut sebagai "pelajaran buat Hanoi."

Jadi sejak tahun 1975, Sihanouk nyaris tidak pernah hadir di tanah airnya. Dia memang mantan raja. Tetapi selama 24 tahun tidak pernah hadir di

Digitized by Google

negerinya, yang menjadi persoalan ialah apakah dia masih mempunyai kharisma untuk diterima oleh rakyat Kampuchea sendiri. Vietnam dengan gerakan Vietnamisasi di Kampuchea sebenarnya telah menciptakan generasi baru yang mungkin tidak lagi mengenal siapa sebenarnya Sihanouk itu.

Persekutuannya dengan Pol Pot itulah yang menjadi titik lemah dalam upaya perdamaian di Kampuchea. Vietnam tetap ngotot pada posisinya bahwa selama pemerintahan koalisi tidak mengeluarkan Khmer Merah dari unsur persekutuan, maka Vietnam tidak akan melepaskan pemerintahan dukungannya di Phnom Penh itu. Sedangkan Cina yang tidak ingin kehilangan muka tetap mendukung bantuan senjata kepada Khmer Merah untuk suatu saat menggulingkan rejim Phnom Penh yang sekarang ada. Dan celakanya lagi, Sihanouk menjadikan Beijing sebagai markas pemerintahan di pengasingan.

Kelemahan Sihanouk yang lain adalah pertikaian antara dia dengan Son Sann, yang diangkat sebagai PM pemerintahan koalisi tersebut. Sonn San yang merasa masih memegang posisi resmi PM konon marah karena Sihanouk terlalu cepat memutuskan KTT dengan Hun Sen, sebelum mempelajari dengan matang isyarat dan kesungguhan Vietnam menarik mundur pasukannya seperti yang dijanjikan itu. Sedangkan dengan Khmer Merah yang kini dipimpin Khieu Samphan, Sihanouk berada pada posisi

Hun Sen

lemah baik secara militer maupun dukungan yang diharapkan dari Beijing.

Sihanouk sendiri pernah mengancam mengundurkan diri beberapa kali (tetapi tidak pernah terlaksana) karena melihat pembantaian pasukan yang setia kepadanya oleh kelompok Khmer Merah. Jadi posisi Sihanouk dalam koalisi sebenarnya semakin lama semakin lemah.

Mungkin untuk tidak terlindas oleh Son Sann dan Khieu Samphan, maka Sihanouk cepat-cepat ingin berunding dengan Hun Sen, karena dari Hun Senn inilah dia berharap memperoleh keuntungan moril secara politik. Tetapi Hun Senn yang tidak ingin kehilangan bargaining position terhadap pemerintahan koalisi, memang lebih senang berunding dengan Sihanouk yang mulai lemah posisinya itu secara intern dalam koalisi, sehingga dia bisa memenangkan beberapa tuntutan dasarnya.

Salah satu keuntungan Sihanouk yang bisa dijadikan modal dalam perundingan adalah pengakuan dan dukungan internasional. Pertikaian dia dengan Sonn San terlihat ketika Sihanouk mengumumkan perundingan dengan Hun Senn, Son Sann terbang ke Washington meminta bantuan senjata untuk memperkuat gerilyawannya. Terlihat benar, betapa rivalitas dalam koalisi mulai muncul sangat kuat belakangan ini. Sedangkan Khmer Merah dalam hari peringatan tergulingnya mereka dari Phnom Penh baru-baru ini, bersumpah akan kembali ke Kampuchea dan mengusir tentara Vietnam serta mendirikan kembali rejim yang dulu pernah mereka miliki.

Bagi Hun Senn, berunding dengan Sihanouk akan banyak menguntungkan bargaining position-nya. Dengan Son Sann yang makin tua tapi terkenal keras dan ultra nasionalis, agaknya sulit bagi Hun Senn. Dengan Khieu Samphan apalagi. Hun Senn dengan demikian mengharap banyak konsesi yang ia menangkan dalam berhadapan dengan Sihanouk.

Vietnam yang telah membuang biaya dan manusia serta telah meletakkan dasar pemerintahan di Phnom Penh tentu tidak ingin menjadi agresor

Empat faksi dengan Ali Alatas

Digitized by Google

yang kalah begitu saja. Hun Senn diduga banyak memperjuangkan posisi Vietnam dalam perundingannya dengan Sihanouk itu. Walaupun dia adalah bekas perwira Khmer Merah yang melarikan diri ke Hanoi, namun posisi berundingnya tentu akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan Vietnam, ketimbang bekas induk pasukannya.

Sejumlah Masalah

Usai JIM II di Jakarta Februari lalu, pihak-pihak yang berkepentingan di Kampuchea seperti tenggelam dalam kepentingan posisi berunding mereka yang gagal disepakati. Satu-satunya kesepakatan yang bisa dihasilkan JIM II adalah kesediaan untuk melanjutkan dan memperluas proses perundingan itu sendiri.

Namun ada beberapa hal pokok yang mengganjal selama ini. Pertama, bentuk pemerintahan yang bagaimana yang akan didirikan di Phnom Penh bila Vietnam mengundurkan diri. Kedua, mekanisme apa yang harus ditempuh dalam masa transisi dari rejim Vietnam kepada pemerintahan Kampuchea sendiri. Dan ketiga, bagaimana memenuhi kepentingan semua unsur secara berimbang dan memuaskan.

Mengenai yang pertama, memang ada usul untuk menamakan pemerintahan baru nanti Pemerintahan Republik Kampuchea, tanpa embel-embel rakyat di belakang kata republik. Usul ini konon ditolak Hun Senn yang hanya memberi konsesi pada perubahan lagu kebangsaan dan warna bendera saja. Menghilangkan kata rakyat, berarti menghapus ciri komunisme yang selama ini dibangun oleh Vietnam. Prestise Vietnam sebagai agressor dan Vietnamisasi agaknya harus terjaga dalam hal yang satu ini. Hun Senn agaknya bersedia memberi Sihanouk posisi presiden, sementara dia tetap menjadi perdana menteri dengan wewenang yang tidak boleh kalah penting dari Sihanouk sendiri.

Bila demikian, dimana tempat Son Sann dan Khieu Samphan? Jatah Sonn San ini cukup rumit, mengingat tokoh ini selalu menolak berunding untuk berkompromi dengan Hun Senn, sementara dia sendiri tidak pernah mengutarakan jabatan yang ia inginkan. Sedangkan Khieu Samphan sudah jelas ditolak berunding oleh Hun Senn, tetapi memiliki tekad besar untuk berperanan dalam pemerintahan baru nanti. Masalah sekarang, apakah Sihanouk dan Son Sann mampu melikuidasi Khmer Merah atau tidak? Selama keduanya tidak mampu, maka proses perdamaian di Kampuchea agaknya masih amat jauh.

Menghilangkan Khmer Merah dari unsur koalisasi agaknya tidak ada instrumen lain kecuali peperangan. Tetapi persoalannya, mampukah kelompok Sihanouk dan Son Sann mengalahkan Khmer Merah yang memiliki logistik dan personil lebih baik? Bila RRC tahu niat Son Sann Sihanouk menyingkirkan Khieu Samphan, maka Beijing akan berusaha mati-matian tidak kehilangan muka untuk kedua kalinya.

Masyarakat di Kamboja

Lalu tentang mekanisme. Sebuah rancangan yang agaknya disetujui adalah melakukan pemilihan umum yang diikuti oleh kelompok yang berkepentingan disana. Tetapi dalam hal ini pun muncul kerumitan. Sihanouk menginginkan sebuah badan internasional yang cukup kuat yang mengawasi proses pemilihan umum itu, sementara dia sendiri menjadi presiden dalam masa transisi. Untuk menentukan sebuah badan pengawas, maka diperlukan konferensi internasional dengan anggota dari banyak negara seperti AS, Soviet, Cina, India, Jepang, Perancis, Vietnam, Polandia dan negara-negara anggota ASEAN. Sihanouk tidak setuju kehadiran Polandia yang diusulkan oleh Vietnam.

Dalam kerangka konferensi internasional ini, ada perbedaan mendasar antara rancangan Sihanouk dan Vietnam. Sihanouk menginginkan konferensi internasional diadakan sebelum pemilu di Kampuchea dilakukan, sementara Vietnam sebaliknya. Konferensi internasional baru diadakan setelah pemilu dilaksanakan, sehingga badan pengawas hanya bertugas mengawasi pengalihan kekuasaan yang telah sah menurut hasil pemilu.

Melihat konstelasi problema yang begitu rumit, maka banyak pihak yang beranggapan pertemuan antara Sihanouk dengan Hun Senn di Jakarta nanti, tidak menghasilkan terobosan besar. Pertemuan itu hanya positif dari sudut perundingan, tetapi tidak dari sisi keputusan.

Masalahnya, kemelut Kampuchea telah berkembang menjadi kepentingan banyak pihak. Di sana ada kepentingan RRC yang terwakili dalam Khmer Merah. Di sana juga ada kepentingan Uni Soviet terwakili lewat Vietnam yang mendirikan negara boneka di Phnom Penh. Dan di sana juga berkecamuk kepentingan faksi-faksi yang kini tergabung dalam koalisi.

ASEAN sejak jauh-jauh hari melihat konstelasi yang demikian rumit itu. Oleh karena itu Uni Soviet dan Cina terus diimbau agar membantu proses penyelesaian Kampuchea. Political will dari dua raksasa komunis yang terlibat perang dingin itu sangat diharapkan dalam kemelut ini. Soviet agaknya ingin memenangkan sesuatu dalam KTT dengan Cina bulan Mei ini di Beijing. Pengunduran diri pasukan Vietnam yang diumumkan sangat mendadak, dianggap sebagai hasil desakan Soviet untuk memenuhi tuntutan Cina bahwa bila Moskow ingin berbaik dengan Beijing, maka salah satu syaratnya ialah memaksa Vietnam segera keluar dari Phnom Penh.

Perkembangan terakhir memang menunjukkan ada titik terang dalam penyelesaian Kampuchea, terutama political Will dari Cina dan Soviet. Tetapi peranikan pasukan Vietnam yang dilakukan begitu mendadak, bisa berakibat fatal bagi faksi-faksi yang bertikai. Sebab, bila pada saat penarikan yang tinggal lima bulan lagi itu, pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan persoalan di antara mereka sendiri, maka nasib Kampuchea akan sama dengan Afghanistan yang terus dilanda perang saudara, kendati Uni Soviet telah menarik mundur semua pasukannya bulan Februari. □ TG

Digitized by Google

Takeshita; Skandal dan ASEAN

Perdana Menteri Jepang Noboru Takeshita yang mengundurkan diri dari jabatannya itu tetap melanjutkan kunjungan kehormatan ke negara-negara di Asia Tenggara. PM yang diguncang sangat hebat oleh skandal keuangan dan saham perusahaan Recruit itu, memulai lawatannya 29 April dan berakhir 7 Mei. Kunjungannya berawal dari Bangkok dan berakhir di Manila. Jakarta kebagian tanggal 4 sampai 6 Mei.

Bagi ASEAN kunjungan itu menjadi pusat perhatian karena beberapa masalah yang amat mendasar. Pertama, Jepang adalah negara yang merupakan investor asing terbesar hampir di semua negara anggota organisasi regional ini. Kedua, gelagat Jepang di bidang pertahanan dengan anggaran yang sudah di atas 1 persen APBN, mencemaskan ASEAN jangan-jangan militerisme negara matahari terbit itu akan kambuh. Kekhawatiran ini beralasan mengingat hampir semua negara ASEAN merasakan bagaimana sepak terjang Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II.

Yang paling keras mengingatkan Jepang akan hal ini adalah Filipina. Dalam sebuah sidang tentang perkembangan pertahanan di Asia Timur baru-baru ini yang dihadiri sekitar 30 negara, delegasi Filipina meminta Jepang tidak terjerumus lagi ke dalam mania di masa Perang Dunia itu. Kunjungan Takeshita, selain membahas masalah-masalah bilateral, juga diharap menjelaskan kepada ASEAN konsep pertahanannya di masa depan secara jujur dan masuk akal.

Kekhawatiran ASEAN bukan hanya didasarkan pada pengalaman buruk di masa Perang Dunia II, tetapi juga pada kondisi obyektif Jepang sendiri dewasa ini. Jepang selama dua dasawarsa terakhir telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang begitu perkasa di dunia. Kondisi ini memungkinkan Jepang mampu membayar dan mengupayakan arsenal persenjataan yang tangguh baik untuk pertahanan diri maupun untuk menyerang pihak lain. Ditambah dengan teknologi canggih yang dikuasai bangsa ini, maka hampir tidak ada jenis persenjataan mutakhir apapun yang tidak bisa dihasilkan Jepang.

Di bidang ekonomi Takeshita akan

Noburu Takeshita

menjelaskan kepada ASEAN sebuah sikap baru Jepang dalam memandang kelompok ini, atau yang lebih dikenal dengan Doktrin Takeshita. Banyak hal yang terkandung dalam doktrin tersebut, tetapi yang paling penting adalah kesadaran atau political will Jepang yang tidak menganggap ASEAN sekedar pasar bagi produknya. ASEAN semakin lama semakin penting sebagai partner.

Pergeseran acuan seperti ini mengharuskan Jepang untuk lebih menekankan kebijakan ekonominya di kawasan ini pada bobot etis partnership. Artinya, layaknya dalam sebuah hubungan kemitraan, untung rugi di bidang investasi harus ditanggung secara berimbang. Dan karena Jepang telah menjadi kekuatan ekonomi mondial, maka harus ada nilai moral dalam arus dan arah investasinya di ASEAN.

Ini tentu tidak berarti investasi Jepang di ASEAN harus dianggap sebagai dana-dana yang dipakai untuk membayar tujuan sosial saja. Prinsip ekonomi dalam investasi harus ditempatkan pada proposisinya, sedangkan akibat dan kewajiban sosial sebagai keharusan moral daripada sebuah investasi, pun harus ditempatkan cukup proporsional.

Negara-negara ASEAN, terutama kalangan mudanya, semakin sadar akan hubungan yang timpang di bidang ekonomi antara ASEAN dengan Jepang. ASEAN oleh kalangan muda dianggap hanya sebagai tempat pelemparan produk industri Jepang yang melanda dunia. Kesadaran ini menyebabkan terjadinya peristiwa Malari di Jakarta tahun 1974 dimana mahasiswa melampiaskan kejengkelan mereka dengan membakar mobil-mobil merek Jepang.

Pengalaman dan sentimen di beberapa negara ASEAN seperti inilah yang menyebabkan Takeshita muncul dengan Doktrin yang menggunakan namanya sebagai pemrakarsa. Doktrin ini memang harus ditunggu pelaksanaannya, walaupun ada perubahan bobot dalam arah dan misi investasi Jepang di masa mendatang.

Doktrin Takeshita menunjukkan bahwa Jepang menyadari akan prinsip saling ketergantungan dalam perekonomian yang kian menjurus ke globalisasi pasar. Betapapun negeri Sakura itu memiliki semua unsur keperkasaan ekonomi, tetapi kecenderungan global sekarang mengajarkan bahwa tidak ada lagi negara yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

Hubungan ekonomi Jepang dan ASEAN yang dulu berkembang monoton kini diusahakan agar bervariasi. Hubungan kedua pihak tidak lagi berpola produsen-konsumen semata. Bila dulu ASEAN adalah pemasok *raw materials* bagi kepentingan industri Jepang, maka kini Jepang pun harus mulai menyerap produk industri ASEAN.

Tetapi dalam hubungan-hubungan yang demikian, ASEAN pun harus menyadari, mereka tidak bisa hanya menjadi kekuatan yang terlalu banyak menuntut. Untuk memiliki akses ke pasar Jepang, maka bargaining utama adalah prinsip-prinsip pasar yang penuh dengan kompetisi, walaupun Jepang yang menyuarakan sangat nyaring prinsip pasar bebas ternyata melakukan proteksionisme terselubung dalam bentuk hambatan tarif maupun nontarif.

Persaingan pasar global antara Jepang-AS dan Eropa Barat menyebabkan dalam beberapa hal ASEAN terjepit. Permainan instrumen moneter antara AS dan Jepang yang menyebabkan nilai yen mengalami apresiasi nilai begitu tinggi, memaksa negara-negara ASEAN yang memiliki utang dalam yen menderita kenaikan jumlah utang secara otomatis tanpa harus melakukan pinjaman baru. Indonesia adalah salah satu yang sangat dirugikan oleh apresiasi yen itu.

Digitized by Google

Agaknya, masalah-masalah inilah yang dibicarakan dengan Takeshita oleh para pemimpin ASEAN dalam pembicaraan-pembicaraan mereka dalam konteks bilateral. Dan tidak lupa, sebagaimana kunjungan-kunjungan Jepang selama ini, kehadiran Takeshita di ASEAN membawa sejumlah paket bantuan, baik itu bantuan proyek maupun bantuan teknik.

Skandal Recruit

Walaupun PM Jepang datang dengan sebuah doktrin baru, namun Takeshita yang kali ini berkunjung beda dengan pemimpin-pemimpin Jepang terdahulu. Takeshita yang sekarang adalah PM yang paling banyak disorot baik oleh oposisi maupun partainya sendiri, LDP, karena skandal Recruit yang digambarkan sebagai yang terbesar dalam sejarah Jepang. Skandal tersebut tentu saja telah menyebabkan Takeshita tidak bisa terlalu leluasa memenangkan doktrinnya sendiri. Skandal Recruit lebih parah dibanding skandal Lockheed yang menyeret mantan PM Tanaka masuk penjara.

Recruit, perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan komunikasi, dalam memenangkan kontrak-kontrak bisnisnya telah memberi hadiah jutaan dolar kepada para pemimpin LDP dan ratusan tokoh masyarakat lainnya di Jepang. Mantan PM Yashuhiro Nakasone pun mengaku menerima uang dari Recruit, walaupun tetap menolak dianggap penyogokan. Sedangkan Takeshita di depan komisi anggaran Diet (parlemen) mengaku telah menerima "dana politik" dari Recruit lebih dari 1 juta dolar. Sebagaimana Nakasone, Takeshita pun menganggap dana itu bukan suap.

Tentu saja skandal yang telah menyebabkan tiga menteri kabinet Takeshita mengundurkan diri dan beberapa pengusaha ditangkap itu, menjadi perdebatan seru di Jepang sendiri. Oposisi memaksa Takeshita mengundurkan diri saja dan mengadakan pemilu serta membubarkan parlemen. Sedangkan tokoh-tokoh dalam LDP sendiri, demi menyelamatkan partai, juga menghendaki Takeshita mundur.

Tetapi Takeshita tetap tegar. Masalahnya bukan karena dia membandel, tetapi oposisi yang dipimpin Partai Sosialis Jepang, tidak mampu membentuk koalisi dengan tiga kekuatan oposisi lainnya untuk mendongkel Takeshita secara konstitusional.

Pukulan bagi Takeshita tidak hanya itu. Sekjen LDP, Shintaro Abe, yang mantan Menteri Luar Negeri pada masa Nakasone, ternyata juga terlibat skandal itu. Isterinya, tanpa sepengetahuan dia, menerima iuran dari Recruit secara reguler.

Takeshita lolos dari keharusan mengundurkan diri, selain karena oposisi yang gagal membentuk koalisi di antara sesama mereka, juga karena skandal yang telah begitu meluas dalam eselon pimpinan LDP menyebabkan ada semacam kesepakatan dari partai ini untuk mempertahankan kabinet sekarang sampai akhir masa pemerintahannya tiga tahun lagi. Selain itu, menurut para pengamat, dalam tubuh LDP sendiri belum ada tokoh yang saat ini paling siap menggantikan Takeshita.

Namun popularitas Takeshita terus merosot karena skandal tersebut. Oleh mereka yang pesimistik, LDP diduga akan kalah dalam pemilihan tingkat perfektur bulan Agustus mendatang. Dan bila itu terjadi, berarti untuk pertama kali sejak 1955, LDP tersingkir dari singgasana kepemimpinan Jepang. Tetapi para pengamat berpendapat, bagaimana pun gawatnya skandal Recruit, oposisi tidak bakal memenangkan pemilu, karena beberapa partai kecil enggan bersatu dengan Partai Sosialis Jepang yang terlalu ekstrim dalam beberapa masalah bangsa itu.

Inilah beban psikologis yang mendera Takeshita dalam rangkaian lawatannya ke ASEAN. Paket bantuan yang disepakati sebagai buah tangan dalam kunjungan ini pun tidak semulus yang diduga, karena skandal Recruit telah menyebabkan APBN Jepang untuk tahun anggaran 1989/1990 tertunda pengesahannya dalam parlemen selama sebulan.

Konsep Pertahanan

Satu hal penting yang harus dijelaskan Takeshita kepada ASEAN adalah konsep dan arah pertahanan Jepang. Anggaran militer yang telah melanggar tradisi anggaran, dianggap oleh kebanyakan negara di Asia dan Pasifik sebagai permulaan dari langkah militerisme Jepang. Kejelasan konsep pertahanan itu adalah, Jepang tidak bakal menjadi kekuatan agresor di masa mendatang karena memiliki arsenal persenjataan yang lebih kuat dan mutakhir.

Penegasan seperti ini memang telah seringkali didengar. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa militerisme Jepang tidak bakal kambuh? Siapa tahu untuk mempertahankan ekspansi ekonominya yang begitu meluas ke seluruh dunia, Jepang terpaksa menggunakan instrumen militer untuk membela kepentingan ekonominya?

Ini adalah perkiraan-perkiraan yang menghantui. Jepang sendiri sebenarnya terus-menerus ditekan oleh Amerika untuk mengambil bagian lebih besar dalam pertahankan diri dan kawasan Pasifik, untuk bahu membahu dengan AS dalam menghadapi ancaman Soviet .di Pasifik dan Samudera Hindia. Amerika merasa tidak adil lagi, karena Jepang yang begitu perkasa di bidang ekonomi, tidak berbuat banyak dalam pertahanan regional di Pasifik. Amerika sudah tidak bisa terus-menerus dijadikan payung pertahanan Jepang lagi. Beberapa komitmen pertahanan AS di Asia Pasifik, sebaiknya diambilalih atau dibagi bebannya dengan Jepang.

Jepang yang kuat secara militer, dalam konsep Amerika, akan merupakan benteng ampuh yang mampu meredam ekspansi militer Soviet di Pasifik. Sejalan dengan konsep itu, maka AS sejak pemerintahan Ronald Reagan menyetujui pembuatan pesawat FSX yang merupakan modifikasi dari F-16, oleh pihak Jepang. Walaupun persetujuan itu adalah untuk keperluan armada penerbangan sipil, namun oleh banyak pengamat, FSX dianggap sebagai batu loncatan yang memungkinkan Jepang mengembangkan pesawat tempur sendiri.

Amerika nampaknya mempersiapkan Jepang untuk menjadi kekuatan yang diandalkan di Pasifik. Dua pangkalan militer AS di Filipina, Subic dan Clark, akan habis masa sewanya, September 1991. Presiden Filipina, Corazon Aquino, mendapat tekanan yang semakin keras dari oposisi untuk tidak memperpanjang lagi sewa Subic dan Clark yang merupakan pangkalan militer AS terbesar yang ada di luar negeri.

Dalam konstitusi baru Filipina, secara eksplisit dinyatakan bahwa pangkalan militer asing tidak boleh ada di negeri itu. Tetapi Corazon Aquino diberi wewenang untuk memperpanjang sewa itu atau tidak. Jepang dan Singapura, termasuk yang menginginkan agar Subic dan Clark sebaiknya tetap dipertahankan, karena dia adalah pangkalan yang vital untuk operasi pengamanan wilayah Pasifik dan Samudera Hindia di masa depan.☐ TG

Digitized by Google

ASEAN dan Bangsa-bangsa Pasifik Selatan:

PERLU HIDUP RUKUN

Selama ini minat negara anggota ASEAN akan tetangga-tetangganya di kepulauan Pasifik Selatan kian besar. Perkembangan pertalian ekonomi ASEAN dengan Pasifik Selatan yang dipelopori oleh Singapura menjadi satu-satunya negara ASEAN yang sudah mempunyai suatu program rinci kegiatannya di bidang ini. Sebagaimana dilaporkan *The Straits Times*, pada Juli 1986 bahwa Dewan promosi perdagangan Singapura sudah menyediakan kepada Asosiasi Kontraktor negeri itu dana sebesar 170 ribu dollar Singapura guna mengkaji kemungkinan partisipasi usahawan nasional dalam pelaksanaan berbagai proyek di negara-negara Oceania (jumlah sebesar itu telah disediakan oleh Asosiasi sendiri juga). Dewasa ini pelaksanaan program yang telah disusun Singapura untuk mengembangkan pertalian ekonomi dengan Pasifik Selatan terus dilanjutkan.

Sudah terjadi pula pergeseran-pergeseran positif cukup besar dalam perkembangan kontak-kontak politik antara ASEAN dan Forum Pasifik Selatan beserta para anggotanya atas dasar bilateral. Misalnya, menurut Topik, sesudah Menlu RI pada tahun 1986 di muka sidang Majelis Umum PBB angkat suara mendukung gerakan pembebasan bangsa Kanak di Kaledonia Baru maka hubungan Indonesia dengan Vanuatu bertambah baik. Dalam wawancara kepada *The New York Times* awal 1987 mantan Menlu RI Mochtar Kusumaatmadja telah menerangkan bahwa negara anggota ASEAN memulai pelaksanaan sejumlah program bantuan kepada bangsa-bangsa Pasifik antara lain Indonesia menjamin latihan teknis para warga Samoa. Sudah dimaklumi pula bahwa wakil-wakil PNG ikut menghadiri berbagai forum ASEAN sebagai peninjau, sedangkan masyarakat PNG sendiri sedang asyik memperdebatkan perlu/tidaknya masuk ASEAN sebagai anggota penuh.

Namun segala perubahan ini, biar bersifat positif sekalipun, sama sekali belum cukup, bila kita perhitungkan aktivitas gila-gilaan yang dilancarkan di Pasifik Selatan oleh Jepang. Ketika membentangkan program politik luar negerinya di depan sidang ke-144 Parlemen Jepang tanggal 10 Pebruari yang lalu Menlu Jepang Sosuke Uno dengan gamblang menegaskan : "Kita berniat di kemudian hari pun memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama Jepang dengan Republik Kepulauan Marshall dan Federasi Mikro-

Terjadi pergeseran positip dalam perkembangan politik ASEAN

Digitized by Google

ASEAN mempunyai tujuan bersama

nesia, dengan negara mana pada akhir tahun lalu kita jalin hubungan diplomatik, serta juga dengan negara-negara Pasifik lainnya". Dalam kasus ini diplomasi sekedar memperkokoh pengaruh yang sudah diraih Jepang di kawasan ini akibat perembesan ekonominya. Pada tahun 1986 pun Kemlu Jepang sudah membentuk suatu markas khusus untuk menggodok dan mengkoordinir tindak-tanduk guna mempengaruhi secara intensif bangsa-bangsa Oceania, apalagi kemudian jumlah personil diplomatik dan niaga di kawasan itu bertambah beberapa kali lipat. Pada tahun itu juga bantuan Jepang kepada kawasan tersebut mencapai 3,8 milyar dollar.

Pada bulan Januari 1987 Tadashi Kuranari yang waktu itu menjadi Menlu Jepang, dalam lawatannya ke Australia dan Zelandia Baru, telah mengunjungi Fiji, Vanuatu dan PNG. Dalam pidatonya di Suwa Tadashi tega mencanangkan niat Jepang mengambil alih peranan "penjamin kestabilan politik" di kawasan itu sembari menjanjikan bantuan keuangan cukup besar bagi negara-negara yang terletak disana. "Jepang sedang mengambil tindakan untuk memperluas skala bantuan ekonomi serta pengaruhnya di Pasifik Selatan", demikian tulis koran London *"The Times"* yang dipromosikan PM Jepang dan kalangan bisnisnya bertujuan membuka lebih luas lagi kawasan tersebut bagi barang dagangan Jepang sambil menyedot kekayaan alam dari negara-negara yang terletak di sana.

Kian menggalaknya kegiatan Jepang di Pasifik Selatan lebih berbahaya. Karena di sana, Jepang tidak hanya mengejar sasaran-sasarannya sendiri saja, melainkan bersama Australia dan Zelandia Baru tampil selaku salah satu penyalur pengaruh AS juga. Menurut *The Far Eastern Economic Review,* pada Juni 1986 George Schultz yang waktu itu menjadi Menlu AS dalam pertemuannya dengan pejabat-pejabat tinggi Jepang di Manila telah menuntut agar Jepang memperluas secara drastis penterapan cara apa yang disebut "bantuan finansial" sehingga dapat mempertahankan kawasan ini "di dalam lingkungan pengaruh Barat". "AS berperan sebagai pembimbing dalam paduan suara negara-negara yang mendesak agar Jepang memainkan peranan lebih penting di Pasifik Selatan", demikian *The Japan Times* pada Januari 1987.

Peranan yang mulai dimainkan Jepang di kawasan bertetangga dengan RI itu sudah menjadi sedemikian besar sehingga mengancam perimbangan kekuatan yang terdapat di sana. Hal ini lebih-lebih menyolok mata karena negara-negara Barat sepanjang puluhan tahun dominasinya disana sudah kehilangan sebagian besar kepercayaan penghuni kawasan tersebut.

40 tahun sudah lewat sejak dibentuknya pada akhir perang dunia II Mikronesia di bawah perwalian AS. Namun, sebagaimana dikatakan dalam wawancara kepada majalah *Newsweek* oleh seorang anggota parlemen Kepulauan Marshal Carl Hyne, pelaksanaan ikrar AS membantu kemajuan penduduk ke arah swatantra "sudah lama digantikan dengan suatu kebijakan yang bermaksud menjerumuskan kami dalam ketergantungan pada AS sedemikian rupa, sehingga kami jera berurusan dengan sesuatu negara lain". Hutang luar negeri Kepulauan Marshal sudah melampaui angka 75 juta dollar yaitu 2,5 ribu dollar per kepala.

AS telah menanamkan satu milyar dollar di Mikronesia, tetapi, menurut terbitan kalangan bisnis AS, *Wall Street Journal,* dananya dihabiskan untuk membangun beberapa jalan raya dan untuk mengorganisir sejumlah besar kantor. Selebihnya tidak ada yang dibuat. Ekonomi nasional merosot, penduduk kekurangan air minum dan listrik, kebudayaan tradisional terganti dengan radio set. Menurut data PBB, pengangguran di

Digitized by Google

kalangan penduduk kota sekarang melampaui 30%, keseluruhan volume impor 10 kali melebihi ekspor. Sebagaimana dilaporkan *Wall Street Journal*, sejak 1963 s/d 1973 impor telah meningkat 5 kali lipat, sedangkan ekspor, terutama kopra dan hasil laut, sangat menyusut. Areal segala macam tanaman pun berkurang, khususnya tanaman kelapa dari 63 ribu ha tahun 1963 sampai 30 ribu ha sepuluh tahun kemudian, tanaman sayur-mayur dari 870 ha sampai 250 ha.

Sama saja keadaannya di American Samoa yaitu suatu negara unik yang selama setengah abad telah diperintah bahkan bukan oleh Kementerian DalamNegeri AS (sebagaimana halnya sekarang) melainkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat! Menurut mingguan Perancis *Evénement du Jeudi*, penghuninya secara formal bukanlah warganegara AS melainkan sekedar "kawula"nya yakni disyahkan sebagai warga "kelas kambing". "Mereka kehilangan segala sesuatunya: bukan orang Polinesia lagi tapi tidaklah menjadi Yangkee juga", demikian majalah tersebut.

Karena itulah AS yang rusak namanya kini memerlukan penyalur pengaruhnya tidak hanya pada Jepang tetapi juga Australia. Karena, sebagaimana pernah dicatat oleh Mond Diplomatique, perusahaan-perusahaan terbesar seperti Unilever-Australia dan IBM-Australia "adalah tidak lain daripada sekedar cabang perusahaan Amerika." Menurut majalah tersebut suatu fakta yang penuh makna adalah bahwa "Australia belum pernah mengutuk militerisme nuklir Amerika Di Mikronesia".

Padahal kawasan itu rasanya telah menderita lebih banyak ketimbang kawasan lain mana pun akibat ledakan senjata nuklir: AS, Britania Raya dan Perancis telah meledakkan lebih dari 250 buah mesiu nuklir disana, sehingga memberikan dampak dahsyat terhadap alam bukan hanya di Pasifik Selatan sendiri melainkan juga di seantero bola bumi. Sebagaimana ditandaskan di depan Forum internasional demi perdamaian yang telah diselenggarakan atas prakarsa UNESCO di Tokio oleh seorang eksponen Republik Belau Damaris Kosiba, uji coba nuklir sudah menelan jiwa 150 ribu penghuni Pasifik Selatan (!) yang meninggal dunia atau pun tertakdir mati kelak akibat radiasi....

Tambahan pula, jika uji coba (tapi bukanlah kehadiran militer) AS di kawasan itu sudah berlalu menjadi masa silam, tokh ledakan-ledakan mesiu nuklir Perancis terus dilakukan di atol Mururoa sampai sekarang. Konsekuensinya, sebagaimana juga di Mikronesia, membawa malapetaka. Sampai-sampai penguasa negara penjajah melarang penduduk Polinesia Perancis makan beberapa jenis ikan yang ditangkap disana. Menurut koran Jepang Asahi, di Taiti yakni pulau terbesar "daerah seberang" Perancis itu "tersebar luas penyakit kanker serta tercatat sejumlah penyakit lain yang dulunya belum dikenal ilmu". Menurut data Front Pembebasan Polinesia, disana bahkan didirikan beberapa rumah sakit spesial bagi anak-anak berumur satu tahun lebih yang menderita penyakit gawat yang pada umumnya tak tersembuhkan akibat radiasi tinggi disebabkan uji coba nuklir. Lebih dari 500 orang Polinesia sudah meninggal dunia akibat penyakit tersebut.

Semuanya ini memungkinkan kita menarik kesimpulan bahwa ASEAN setiak-tidaknya mempunyai satu tujuan bersama dengan Forum Asia Pasifik untuk mengubah wilayah masing-masing menjadi zona bebas senjata nuklir. Beberapa tahun lalu pun Mochtar Kusumaatmadja pernah menegaskan bahwa "bukanlah kebetulan saja negara anggota ASEAN mendukung diubahnya Pasifik Selatan menjadi zona bebas nuklir. Hal ini akan memungkinkan mendirikan jembatan bebas nuklir ke Asia Selatan dan ke kawasan dunia lainnya". Patut diingatkan, dalam KTT III ASEAN di Manila pada akhir 1987 Presiden RI Soeharto telah menghimbau mempercepat langkah menuju penciptaan zona bebas nuklir di Asia Tenggara. Dan Deklarasi Manila pun menegaskan secara gamblang bahwa "ASEAN harus menggalakkan upayanya demi menciptakan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara selekas mungkin".

Namun demikian, satu hari lagi seusai KTT tersebut jurubicara Kemlu AS menyatakan, "Dari segi tanggung jawab kami atas dijaminnya keamanan global maupun regional maka kami beranggapan bahwa penciptaan zona bebas nuklir di Asia Tenggara akan merongrong kebijakan deterence (penggertakan)". Sejak waktu itu sikap demikian telah berkali-kali dikukuhkan. Bukanlah kebetulan saja Januari yang lalu Menlu RI Ali Alatas menamakan sikap negatif AS terhadap penciptaan zona bebas nuklir di Asteng sebagai salah satu kendala utama dalam perkembangan hubungan antara RI dan Amerika. Padahal kerjasama ASEAN dalam penciptaan zona bebas nuklir di Asia Tenggara dengan Forum Asia Pasifik yang sudah sangat maju ke arah ini akan memberi kemungkinan lebih efektif menghadapi sikap obstruksionis AS.

Namun, persoalannya tidak terbatas pada kegiatan bersama dalam urusan ini. Bukanlah kebetulan saja Singapura yang peka akan segala sesuatu, yang bisa membawa untung itu mencurahkan perhatian begitu besar justru pada kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan di bidang pembangunan. Memang banyak negara kawasan itu mempergunakan jasa perusahaan-perusahaan konstruksi Korsel dan Jepang. Mungkin ada baiknya negara anggota ASEAN lain pun mencoba menyebarluaskan usaha ke bidang ini pula. Banyak tetangga sebelah Selatan membutuhkan pangan. Sewajarnyalah Muangthai sebagai pengekspor beras yang utama beserta Indonesia yang mulai juga menghasilkan surplus beras menaruh perhatian akan kebutuhan tetangga tersebut. Pasifik Selatan menderita langkanya tenaga kerja, padahal ASEAN menderita pengangguran. Negara mungil Nauru (nomor tiga di dunia dari segi kemungilannya) yang terkupas habis empat perlima lahannya oleh perusahaan Barat dan Australia waktu menggali fosfat, bahkan membutuhkan tanah! Akhirnya kini, ketika proteksionisme Barat kian ketat, tentu tidak boleh kita abaikan pasaran potensial sebesar ini bagi hasil industri ASEAN, yang cukup dekat letaknya.

Empat anggota ASEAN yakni Indonesia, Pilipina, Singapura dan Brunei adalah negara pulau seperti juga negara-negara Pasifik Selatan. Tidak bisa dibantah juga adanya afinitas etnis, budaya maupun historis sejumlah bangsa di kedua kawasan tersebut. ASEAN, seperti juga Forum Pasifik Selatan, merupakan kelompok regional yang berwibawa. Kedua perhimpunan mengalami perembesan ekonomi dan kulturil serta juga tekanan politik dari Barat dan Jepang yang membahayai kepribadian dan kemandiriannya. Semuanya ini mendiktekan mutlak perlunya kerjasama dan interaksi mereka di gelanggang internasional dan di bidang ekonomi yang masih belum cukup laju perkembangannya. Kesimpulannya satu saja: hubungan kerjasama antara ASEAN dan Forum Pasifik Selatan harus dinaikkan ke tingkat kwalitatif baru. □ Bambang S

Digitized by Google

KERJASAMA REGIONAL NEGARA BEBKEMBANG

Sebagai Balasan Terhadap Proteksionisme Barat

Di antara serentetan soal yang ditangani para pemimpin negara anggota ASEAN ada satu yang lebih-lebih mengetuk hatinya yaitu soal kecenderungan perdagangan dunia. Apalagi iklim dalam perdagangan ini kian tahun kian memburuk. Maka upaya memperkuat posisi dagang negara anggota ASEAN naik ke peringkat teratas dalam persyaratan kelangsungan hidup serta pertumbuhan ekonominya dalam situasi dewasa ini.

Perundingan multilateral di Montreal dalam rangka GATT pada Desember 1988 telah mengalami kegagalan akibat sikap AS dan MEE yang tidak dapat dipertemukan mengenai soal pengurangan subsidi negara bagi pertanian. Sedangkan masalah dan keluhan negara-negara berkembang pada hakekatnya tetap tidak diselesaikan.

Di Amerika Serikat Presiden Reagan (waktu itu) telah memberlakukan lebih banyak tindakan proteksionis ketimbang semua presiden Amerika lainnya sepanjang masa seusai perang dunia kedua. Dalam jumpa pers Desember 1988 di San Diego, California, yang disertai para wakil AS dan negara anggota ASEAN maka dubes Malaysia Albert Talalla menuduh Amerika Serikat bersikap kurang bertanggung jawab dengan merongrong keamanan bangsa-bangsa bersahabat demi merenggut pangsanya di pasaran dunia. Berkuasanya pemerintahan baru di Washington rasanya tidak akan mengakibatkan perubahan kebijakan Amerika yang bisa menguntungkan Asia. Banyak pakar ekonomi berkeyakinan, pemerintahan baru itu jauh lebih berprihatin akan keadaan di pasaran finansial ketimbang akan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perdagangan bebas. Mereka meramalkan, sebagai gantinya konsesi Kongres kepada pemerintah dalam soal keuangan maka Bush akan terpaksa nrimo saja suatu UU Perdagangan baru yang amat agresif dan mencakup seperangkat tindak-tanduk proteksionis serba ketat terhadap para mitra dagang AS. Bagi Asia hal ini akan berarti penyusutan selanjutnya preferensi dagang dan handtwisting (pemelintiran tangan) demi mencapai liberalisasi lebih lanjut pasaran-pasaran nasional. Dalam pada itu orang Asia sendiri pun akan dituduh praktekkan nasionalisme ekonomi dan sovinisme komersial, tuduhan ini memperlihatkan sikap membuta terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa-bangsa Asia atau pun daya-upaya hendak membenarkan proteksionismenya sendiri.

Penyatuan pasaran Eropa yang dijadwalkan untuk 1992 bisa saja membatasi perdagangan negara-negara Eropa dengan negara anggota ASEAN serta mengendorkan keinginannya menanamkan modal dalam ekonomi negara-negara berkembang. Sekarang pun ekspor negara anggota ASEAN dirintangi berbagai tembok tarif maupun non-tarif. Kemudian neraca perdagangan bisa bergeser lagi ke arah yang merugikan negara berkembang sehingga persatuan Eropa, menurut ungkapan PM Mahathir Mohammad, dapat berubah menjadi suatu benteng terhadap perdagangan bebas.

Lagi pula Jepang yang menjadi kekuatan ekonomi mendominasi kawasan ini sukar diharapkan bakal rela membuka pasarannya bagi barang dagangan dari negara anggota ASEAN sedemikian rupa, sehingga dapat mengimbali kerugiannya di pasaran Amerika dan Eropa.

Dalam menghadapi prospek yang ini maka, negara anggota ASEAN hendaknya kian aktif mencari bentuk-bentuk baru kerjasama ekonomi dan politik dalam rangka intraregional. Kerjasama yang lebih luas akan dapat membantu mereka memperkuat posisi dalam menjalin transaksi dengan pihak Amerika dan Eropa, serta juga sekedar mengimbali dampak negatif kebijakan negara-negara kapitalis terhadap negara berkembang. Sekarang sudah tiba saatnya bagi bangsa-bangsa ASEAN untuk membuka lembaran baru dalam pengembangan hubungan dagang/ekonomi dengan negara-negara Indocina yang dulunya cukup lama nampak sebagai "citra musuh" bagi ASEAN. Dewasa ini sehubungan dengan kian membaiknya iklim politik di dunia pada umumnya serta dengan harapan akan selesainya sengketa Kampuchea maka sikap bermusuhan antara ASEAN dan Indocina mulai mengalami erosi. Tesmak ideologis lambat laun mulai terlepas dari mata pimpinan bangsa-bangsa ASEAN hingga memungkinkannya memahami keharusan meningkatkan hubungan dengan tetangganya.

Proses ini sudah mulai dan makin lama makin berkembang cepat. Selama ini berlangsunglah secara aktif pertukaran kunjungan antara negarawan-negarawan ASEAN dan Indocina. Menlu Pilipina telah berlawat ke Vietnam, PM Muangthai mengunjungi Laos, sedangkan Menlunya berkunjung ke Vietnam. Kepala pemerintahan Republik Rakyat Kampuchea mengadakan kunjungan ke Muangthai. Diadakan juga pertukaran delegasi yang tidak begitu tinggi tingkatnya.

Hakekat proses ini tercermin dalam perkataan PM Chatichai Choonhavan yang sudah menjadi semacam buah bibir yang mengungkapkan niatnya melaksanakan kebijakan menuju diubahnya Indocina dari medan pertempuran menjadi zona perdagangan. Senada juga bunyinya pernyataan para pemimpin negara-negara ASEAN lainnya, misalnya Menlu Singapura yang menegaskan bahwa pemecahan masalah Kampuchea akan mengundang peningkatan pertalian ekonomi dan

Digitized by Google

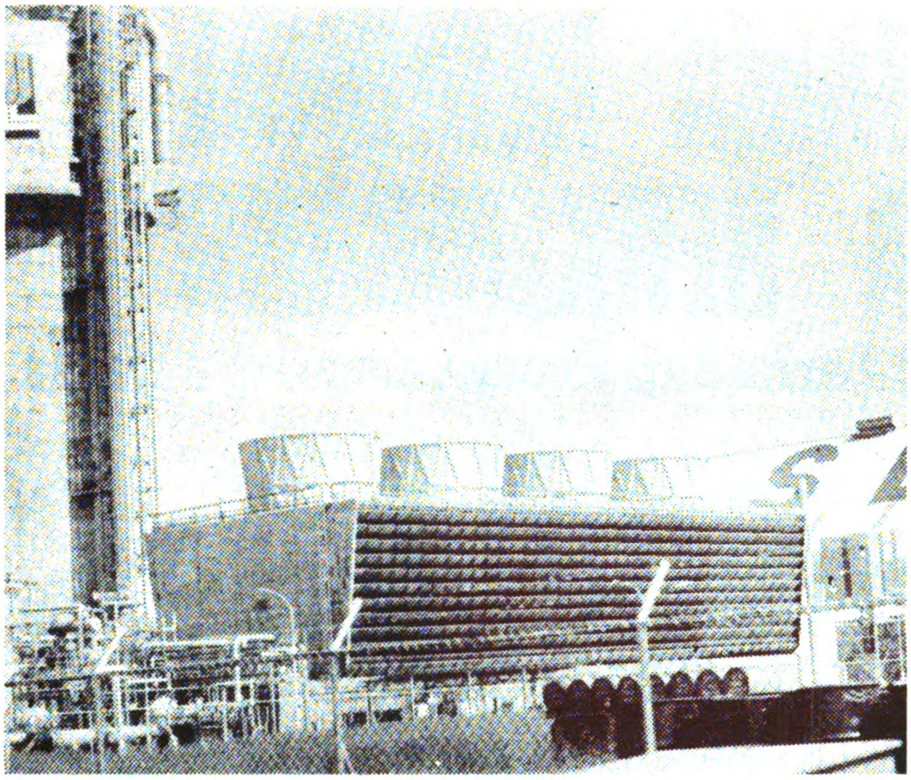

Posisi dagang anggota ASEAN naik di peringkat atas

politik Singapura dengan Vietnam, Laos dan Kampuchea. Menlu Pilipina pun dalam program politik luar negerinya menekankan bahwa Pilipina telah menerobos lingkaran isolasi politiknya dan mengulurkan tangan persahabatan kepada negara-negara yang berlainan ideologinya.

Di samping memberikan dampak baik terhadap seluruh iklim politik di kawasan ini serta menciptakan prakondisi guna dijadikannya zona damai, bebas dan netral maka pengembangan hubungan antara negara anggota ASEAN dan Indocina memadai kebutuhan dan kepentingan ekonominya juga. Sebagai akibat kunjungan-kunjungan tersebut telah dicapai sejumlah persepakatan mengenai persoalan dagang/ekonomi. Pimpinan Thai dan Kampuchea telah bersepakat mengembangkan perdagangan bilateral, membentuk sebuah panitia bersama urusan kerjasama ekonomi Muangthai-Kampuchea. Yang ditentukan sebagai bidang-bidang kerjasama dagang/ekonomi yang paling baik perspektifnya ialah perikanan, pariwisata, penambangan batu permata, proyek-proyek menyangkut sungai Mekong. Selama kunjungan Menlu Muangthai ke Vietnam kedua belah pihak mengungkapkan pendapat tentang mutlak perlunya memperluas kontak-kontak di bidang bisnis dan ilmu pengetahuan. Beberapa perusahaan Thai sudah menjalin persetujuan dengan Vietnam tentang didirikannya usaha patungan untuk mengolah hasil laut. Dengan Laos Muangthai mencapai persepakatan mendirikan jembatan atas Mekong di dekat Vientiane, mengikutsertakan orang Thai dalam pengembangan jaringan komunikasi di Laos, dalam pembangunan proyek-proyek perlistrikan dan pertanian, mengadakan investasi bersama dalam produksi barang ekspor di Laos. Pilipina dan Vietnam menjalin persetujuan tentang kerjasama jangka panjang di bidang ekonomi, perdagangan, iptek dan kebudayaan.

Melonjaknya aktivitas di bidang ekonomi dan bisnis dalam perundingan itu telah didorong oleh politik baru negara-negara Indocina. Ketiga negaranya sedang melaksanakan reform di bidang ekonomi dan keuangan agar menjadikan masing-masing ekonominya lebih terbuka, menyingkirkan kendala birokratis menuju pengembangan perdagangan bebas, penarikan modal asing dan teknologi, pembangunan usaha patungan. Tindakan-tindakan ini adalah benar-benar penting bagi negara-negara Indocina yang tingkat perkembangan ekonominya masih sangat rendah. Hakekat proses yang sedang berjalan pernah diikhtisarkan dalam wawancaranya kepada koran Nhan Dan oleh Menlu Vietnam Nguen Co Thach. Menurut pendapatnya, hanya ada dua jalan saja untuk melestarikan ekonomi yang terkucil dari dunia luar tanpa ambil bagian dalam pembagian kerja secara internasional, atau pun mengubah ekonomi nasional menjadi sebagian ekonomi dunia sembari berupaya agar menjamin bagi kita posisi yang semaksimal mungkin menguntungkan dalam pembagian kerja secara internasional itu. Kita berkebulatan tekad agar kali ini jangan sampai menyia-nyiakan peluangnya'', tambahnya lebih lanjut.

Demikianlah negara anggota ASEAN dan negara-negara Indocina sudah benar-benar mendekati saat agar menguakkan pintu lebar-lebar guna kerjasama sederajat dan saling menguntungkan. Hal utama bagi kedua-duanya ialah bukanlah berhenti di setengah jalan melainkan maju terus ke arah ini secara konsisten, tekun dan aktif.

Kerjasama negara anggota ASEAN dengan Indocina tidak hanya bakal memberi dampak positif pada pembangunan ekonominya masing-masing, tetapi juga akan menjadi jaminan handal perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

Selain itu kerjasama tersebut dapat menjadi semacam batu pengimbang amat penting terhadap dominasi Jepang di pasaran Asia. Tokio sedang mencurahkan perhatian besar akan pasaran Indocina hingga berupaya terlebih dahulu mempersiapkan syarat guna melaksanakan gagasan penciptaan ''Zona ekonomi Asia Timur'', dalam rangka mana Jepang yang menggoda-goda bangsa-bangsa kawasan ini dengan perspektif kerjasama di bidang teknologi tinggi akan dapat ''menertibkan'' para pesertanya demi kepentingan negara sesepuh yaitu Jepang sendiri.

Dan akhirnya pertumbuhan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN dan Indocina akan menyusutkan ketergantungan mereka dari adidaya dengan memperlihatkan makin jelas tidak perlunya kehadiran militer mereka di kawasan ini.

Mengingat fakta bahwa negara-negara industri Barat kian mempolitisir pertalian dagang/ekonominya dengan negara-negara berkembang maka sebaliknyalah hal ini mendorong kita mengambil tindakan balasan dan bertindak dengan cara semacam ini juga demi mempertahankan kepentingan bersama kawasan kita ini. □

BS

Digitized by Google

Persatuan dan Kesatuan Atas Landasan Pancasila

Ada suatu ungkapan klasik yang cukup populer dan sering didengungkan secara bersahaja, yaitu *"Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh"*. Ungkapan semacam itu telah meresap dalam jiwa bangsa kita, yang memang mencintai persatuan dan kesatuan, yang bisa dimanifestasikan dalam bentuk kerja "gotong royong". Ungkapan lain yang juga populer ialah: "dengan hanya sebatang lidi, tidak dapat membersihkan kotoran, tetapi dengan ikatan beberapa batang lidi menjadi sapu, yang dapat membersihkan kotoran". Ungkapan semacam itu dalam bahasa agama sering dikemukakan dengan: *"Al Jama'atu Rahmatun, Wal Furqatu Adzaabun"* yang artinya "Berjama'ah (bersatu) akan mendatangkan rahmat, dan karena terpecah-pecah (tidak bersatu) akan mendatangkan adzab (petaka)" Istilah persatuan, dan kesatuan di dalam ajaran Islam sering dipergunakan *"Ittihad"*, yang mempunyai arti secara sinonim dengan persatuan.

Persatuan dan kesatuan adalah dua kata, yang walaupun berasal dari satu asal kata "satu" tetapi masing-masing mempunyai pengertian khusus. Jika disebut dengan "persatuan", maka kata itu mempunyai kaitan dengan sifat serta watak, yakni sifat dan watak untuk suka bersatu; sedangkan kata "kesatuan" mempunyai pengertian dalam bentuk organisasi. Namun dalam kehidupan sehari-hari kedua kata tersebut telah menyatu dan telah menjadi istilah yang baku.

Dalam kehidupan masyarakat suku Sunda dan Jawa Tengah/Timur, masalah persatuan dan kesatuan diungkapkan dalam falsafah hidup mereka dengan sebutan "rukun". Dengan demikian persatuan dan kesatuan yang harus diupayakan, adalah persatuan dan kesatuan yang menumbuhkan "kerukunan" dan bukan "kerukunan yang semu". Dalam falsafah orang Sunda disebut: *"Kudu Rukun Badan Sakujur, Rukun Jeung Batur Sakasur, Batur Sadapur, Batur Sasumur, Batur Salembur"*. Ungkapan dan falsafah orang Sunda tersebut kini telah dikembangkan dengan *"Akur Jeung Batur Sagubernur Batur Saluluhur"*, yang mempunyai arti *"Rukun Badan Sakujur"* mengandung pengertian seperti yang satu tubuh badan, di mana masing-masing bagian tubuh mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu dengan lainnya tidak "iri" dan berjalan secara harmonis. Keserasian dan keharmonisan itu, kemudian dikembangkan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi terhadap istri dan keluarga lainnya (batur sakasur dan sadapur), dan meluas dalam hidup harmonis, rukun dengan tetangga, dan masyarakat luas (batur sasumur, salembur dan sebagainya).

Dengan mengambil suatu perumpamaan dari falsafah hidup suku sunda tersebut, dapat ditarik manfa'at serta pelajaran, bahwa sesungguhnya "persatuan dan kesatuan" tidak saja merupakan tuntutan untuk dapat tercapainya keserasian dan keharmonisan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan serta membangkitkan semangat untuk saling membantu dan saling tolong-menolong, bahkan sesungguhnya persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan dari "solidaritas sosial" merupakan bagian dari fitrah dan jiwa manusia, dengan lain perkataan persatuan dan kesatuan merupakan kebutuhan manusia dalam mepertahankan eksistensi hidup dan kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Persatuan Menurut Pandangan Islam

Persatuan dan kesatuan seperti diuraikan di atas merupakan salah satu kebutuhan manusia, tetapi sebenarnya persatuan dan kesatuan juga merupakan tugas agama, seperti hal itu dicerminkan dalam firman surat Ali Imran ayat 103.

Yang artinya: *"Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai..."*

Apabila kita renungi salah satu perintah agama. Hal tersebut kita ketahui adanya perkataan *"Wa' tashmu"* yang artinya "berpegang teguhlah kamu sekalian". Perkataan tersebut dalam susunan tata bahasa Arab termasuk *'Fi'ilamr'* artinya: "kata kerja perintah" yang wajib sifatnya, walaupun perkataan "wa' tashimu" itu secara harfiyah tidak mempunyai arti "bersatulah". Lebih amat ditekankan lagi perlunya persatuan dan kesatuan itu, apabila diingat adanya perkataan *"Walaa Tafarraquu"* yang artinya "janganlah kamu bercerai-berai". Tali persatuan yang harus dipegang teguh dalam ayat tadi disebut "bi habillah" (tali Allah). Para ahli tafsir memberi pengertian dan arti dari kata "habillah" ialah "agama" tetapi ada sebagian yang memberi pengertian dan arti dengan *"Tali Persatuan"*.

Kita diwajibkan untuk bersatu dan berpegang teguh kepada ajaran agama ataupun tali persatuan, dalam kalimat berikutnya dalam ayat tersebut Allah menegaskan: "Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu sekalian, tatkala kamu sekalian saling bermusuh-musuhan, maka Kami jinakkan hati-hati kamu, maka menjadilah kamu bersaudara karena nikmat-Nya." (Ali Imran 103).

Dengan mengutip keseluruhan ayat tersebut semakin jelas betapa pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan yang merupakan nikmat Allah. Persatuan dan kesatuan dengan berpegang teguh kepada "tali persatuan" merupakan sikap mental yang secara manusiawi merupakan jiwa ataupun fitrah insaniyah.

Selain dari itu, apabila direnungi dan diresapi secara mendalam dari hakikat risalah Islamiyah yang dikembangkan melalui dakwah Islamiyah, maka ajaran agama Islam adalah ajaran yang membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, yang berarti ajaran Islam terus menghidupkan dan mengembangkan naluri fitrah insaniyah. Naluri itu oleh ahli ilmu jiwa disebut *"instink gregarious"*. Oleh karena itu oleh para ahli Sosiologi, manusia disebut "Homo Sosius" (mahkluk bermasyarakat).

Apabila ditelusuri secara mendalam

Digitized by Google

risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka akan kita jumpai lima utama yang mendasarinya.

Imaanun Billah, artinya: "Percaya kepada Allah SWT". Keimanan dan kepercayaan kepada adanya Allah, beriman dan mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaanNya yang wajib patuh dan ta'at adalah pangkal dan dasar utama dari kehidupan manusia. Pengingkaran terhadap adanya Allah serta kekuasaanNya berarti telah menempatkan manusia tidak saja sebagai makhluk yang rendah seperti makhluk lainnya, tetapi bahkan lebih hina dari binatang sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT.

Artinya: "... mereka (mempunyai) hati tetapi tidak untuk berfikir, mereka mempunyai mata (tetapi) tidak untuk melihat (kebaikan) dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak digunakan untuk mendengar (seruan yang baik-baik). Mereka itulah bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang...." (Al A'raf 179).

Sifat dan jiwa serta rasa Ketuhanan ini sebenarnya telah ada pada setiap jiwa manusia sejak manusia masih berada di alam azali karena sa'at seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an yang artinya:

"Adakah Tuhan selain dari AKU? (Seluruh manusia) menjawab, benar sesungguhnya kami semua bersaksi (tiada Tuhan melainkan Allah)... "

Islam mengajarkan dan mengembangkan persatuan

Dengan demikian, adanya manusia yang tidak mau ta'at kepada-Nya, apalagi mengingkari adanya Allah, adalah pengingkaran atas fitrah yang ada pada dirinya. Oleh karena itu banyak para ahli filsafah memandang manusia sebagai makhluk ber-Ketuhanan (homo religius).

Salamatul Mu'amalah, yang artinya terciptanya keselamatan dalam pergaulan bermasyarkat. Memang setiap orang-siapapun juga mereka itu, selalu mendambakan adanya keselamatan baik untuk dirinya, keluarga dan masyarakatnya, walaupun usaha serta perbuatannya itu berlawanan dengan yang dicapai bukanlah keselamatan untuk diri dan keluarganya maupun keselamatan bagi pergaulan masyarakat. Seorang penyair, Syekh Ibnu Atahiyah merangkum keadaan manusia dalam sebuah sya'ir.

Maksudnya: "Kamu semua mengharapkan keselamatan, tetapi kamu tidak berjalan di atas jalan keselamatan. Sesungguhnya (hal itu bagaikan) kapal yang tidak akan dapat berlayar di atas tanah yang tandus."

Sinyalemen yang demikian itu juga telah Allah ungkapkan dalam Surat al Baqarah ayat 11 dan 12 :

Yang artinya: "Dan tatkala dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi ini, mereka menjawab, "sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari".

Untuk dapat terciptanya masyarakat yang penuh dengan kedamaian, sebagai realisasi dari fitrah insaniyah dan sebagai perwujudan dari mision risalah Islamiyah, maka Islam melarang dikembangkannya faham "ashabiyah" (golongan) dan faham "firqah" (pengkotak-kotakan). Islam mengajarkan dan mengembangkan faham ijtima'iyah (persatuan) dengan sikap tasamuh (toleransi). Sikap "tasamuh (toleransi) inilah yang senantiasa dikembangkan oleh ajaran Islam dan harus dipegang teguh oleh umatnya. Toleransi tidak saja dikembangkan karena adanya perbedaan pendapat dan fikiran, tetapi lebih khusus lagi dikembangkan pada hal-hal yang amat peka, yakni masalah perbedaan agama. Untuk itulah Allah telah menggariskan dalam Surat Al-Mumtahinah ayat 8.

Artinya: "Allah tidak melarang kamu sekalian terhadap orang-orang yang tidak membunuh kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari tanah airmu, hendaklah kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat adil."

Kita mencatat dalam kehidupan Rasullah SAW bahwa beliau telah mampu menyusun masyarakat yang penuh dengan kedamaian; masyarakat yang tinggi toleransi keagamaannya; masyarakat yang beliau bina sewaktu beliau sudah berada di Yastrib (Madinah). Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, tidak saja telah mampu mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Mujahijirn (pendatang dari Mekah) dengan Ansor (penduduk Madinah), tetapi beliau pula, telah mengadakan kesepakatan peraturan dalam masyarakat yang

Digitized by Google

majemuk, yang di dalam sejarah dikenal dengan sebutan "Konstitusi Madinah". Konstitusi Madinah adalah suatu hukum dasar yang mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk, dan konstitusi itu bukanlah alternatif dari risalah yang dibawanya.

Sikap tassamuh (toleransi) tidak saja diberlakukan bagi mereka yang non Muslim, tetapi juga berlaku bagi sesama Muslim karena adanya perbedaan-perbedaan faham yang bersifat furu' iyah dan ijtihadiyah, yang bersumber dari dasar-dasar hukum yang bersifat *"Dhonniyah"*, sehingga beliau menegaskan *Ikhtilafu Ummati Rahmatun"* yang artinya: "Perbedaan faham yang ada pada umatku adalah menjadi rahmat. "Demikian pentingnya masalah toleransi, terutama dikalangan umat Islam sendiri, sehingga dalam hadits yang lain Rasulullah menegaskan, di mana sangat dilarang untuk menuduh sesama Muslim dengan tuduhan: "kafir" ataupun "dikeluarkan dari golongan kaum muslimin" karena perbuatan dosa yang dilakukan. Sikap yang demikian itu ditegaskan oleh Nabi sebagai salah satu daripada sendi Iman yang artinya: "Janganlah mudah (mengatakan) terhadap orang yang mengatakan (mempunyai keyakinan) bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, engkau kafirkan ia karena dosa-dosanya dan tidak engkau keluarkan ia dari Islam karena amal perbuatannya."

Kewajiban jihad (amar mak'ruf dan nahi mungkar) sejak aku diutus sebagai Nabi dan Rasul, hingga akhir dari umatku membunuh dajjal tidak akan gugur (terhenti) kewajjiban tersebut. Walaupun (masih terdapat) pemimpin yang dholim ataupun (sudah terdapat) Pemimpin yang adil-seadilnya.

Perbedaan-perbedaan, baik dalam agama maupun perbedaan faham di antara Umat Islam sendiri seperti diterangkan di atas, telah dimanfaatkan oleh kaum penjajah untuk memecah persatuan bangsa Indonesia, dengan politik divede et impera-nya, yang tidak lain bertujuan untuk mengekalkan penjajahannya terhadap bangsa Indonesia.

Masyarakat yang aman dan damai, masyarakat yang sejahtera yang dituju bukanlah masyarakat yang apatis dan masyarakat yang "nafsi-nafsi" karena walaupun masing-masing anggota masyarakat baik. Untuk dapat terciptanya masyarakat yang penuh dengan kedamaian, sebagai realisasi dari fitrah insaniyah dan sebagai perwujudan dari mision risalah Islamiyah, tetapi manakala tidak ada dinamika hidup bermasyarakat yang dijiwai oleh semangat pengabdian, semangat untuk berbuat kebaikan masyarakat yang demikian akan menjadi statis, masyarakat yang beku dan jumud. Untuk menumbuhkan gairah dan semangat hidup bermasyarakat, maka prinsip ajaran Islam yang ketiga ialah: *"Luzumul Ihsan"* yang artinya: Setiap Perbuatan ihsan ataupun perbuatan baik itu perlu dikembang-luaskan tidak saja hanya yang menyangkut perbuatan yang bersifat "ubudiyah, tetapi juga meliputi pekerjaan dan karya-karya yang bersifat mu'amalah, perbuatan dan karya yang memberi manfa'at dan berdaya guna bagi sesama manusia sebagai manifestasi dari kewajiban agama untuk mengadakan hubungan antara sesamanya, yakni kewajiban "hablumminan-nas" (tali ikatan sesama manusia). Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *Ihsan*, ialah: "setiap usaha ataupun pekerjaan yang mendatangkan manfa'at dan hasil guna untuk diri pribadi, keluarga dan masyarakat yang tuntunannya (langsung ataupun tidak langsung) dari ajaran agama: sebagai realisasi dari *Hablum Minallahi Wa Hablumminannaasi"*. Dengan demikian melaksanakan shalat, zakat dan lain-lain dan dari perbuatan yang sifatnya wajib sampai kepada yang sunnah, memberi kesenangan kepada orang dengan tutur kata dan senyum sampai berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara atas dasar pengabdian adalah termasuk perbuatan Ihsan. Atau dengan lain perkataan, perbuatan ihsan (kebajikan) itu dapat diklasifikasikan pada beberapa klasifikasi, ada yang mudah dan sederhana dan ada yang besar dan kompleks; ada yang bersifat temporer dan ada pula yang mempunyai jangkauan yang luas dan panjang bagi masa depan.

Kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan perbuatan Ihsan secara obyektif dari masing-masing orang pasti akan berbeda, dan perbedaan kemampuan tersebut juga merupakan hal yang kodrati dari setiap manusia, dan bahkan agama sendiri tidak membebankan suatu kewajiban di luar batas kemampuan manusia, seperti ditegaskan oleh Allah *"Laayukallifullahunafsanilla Wus'aha'* yang maksudnya "Tidaklah Allah membebankan (sesuatu kewajiban) kecuali menurut kadar kemampuannya" Seseorang yang memang dalam keadaan miskin tidak mungkin dibebani kewajiban untuk berbuat kebajikan dengan harta, demikian pula orang yang bodoh pasti tidak akan sanggup memikul tugas keihsanan dengan ilmunya. Ada orang mampu berbuat kebajikan oleh dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, misalnya perbuatan memberi sesuap nasi kepada orang yang lapar. Tetapi pekerjaan yang lebih besar dari itu tidak akan mampu, kecuali dengan bantuan fihak-fihak lain.

Untuk mewujudkan perbuatan baik dalam skala besar dan yang mempunyai jangkauan luas yang tidak dilakukan oleh seorang, maka ajaran Islam sangat menekankan kewajiban untuk memelihara pesatuan, sebagai prinsip dan hakekat Islam yang keempat yaitu *Ittihadiyah.*

Dengan persatuan dan kesatuan yang utuh dan bulat paripurna, tidak ada suatu usaha yang tidak akan dapat dirampungkan, tidak ada cita-cita yang tidak akan terealisir.

Kuatnya suatu masyarakat ataupun bangsa harus ditopang dengan persatuan dan kesatuan. Ada empat unsur dalam masyarakat bangsa yang dapat memperkokoh dunia ini sebagaimana ditegaskan oleh Rosulullah SAW dalam sabdanya:

Kuatnya suatu kaum (masyarakat) dengan adanya (persatuan dan kesatuan) empat unsur. Apabila keempat unsur tersebut telah melaksanakan tugas kewajibannya, yang berjalan di atas fungsi dan profesinya, terjaminlah kesejahteraan dan kedamaian masyarakat.

Apabila dianalisa lebih lanjut fungsi dari keempat unsur tadi, dapat dimisalkan seperti fungsinya keempat jari tangan, yaitu:

Kedudukan ulama tidak ubahnya seperti kedudukan dan fungsinya jari telunjuk. Yang dimaksud Ulama tidak saja mereka yang menguasai disiplin ilmu agama, yang dapat memberikan petunjuk tentang halal dan haram, tentang masalah yang wajib, sunnah dan sebagainya, tetapi juga mereka yang menguasai disiplin ilmu lainnya, yang dengan ilmunya itu dapat menunjukkan sesuatu yang berhasil dan tepat guna, usaha-usaha yang konstruktif, dibidang sosial, ekonomi dan budaya.

Pemerintah yang kuat tidak saja harus mampu menegakkan keadilan sehingga dapat diumpamakan jari tengah, tetapi tugas utama lainnya dari Pemerintah sebagaimana diungkapkan

Digitized by Google

oleh Syekh Al Mawardi, ialah mampu membina dan mengembangkan rasa keagamaan dari anggota masyarakat, menyiapkan kebutuhan hidup rakyat dengan sandang pangan, dan papan, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menanamkan cita-cita luhur untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang oleh Al Muwardi disebut: *Addienul Muttaba, Khisbun Daaimun Amnun Aamun, Adlun Syamilun dan Amalun Fasiehun*. Dilihat dari jajaran jari tangan maka Pemerintah itu tidak saja berada di tengah-tengah, tetapi juga merupakan jari tertinggi. Dengan demikian tidak ada kekuasaan lain dalam satu negara yang melebihi kekuasaan pemerintah dalam memimpin pembangunan.

Kedudukan atapun strata masyarakat adalah berbeda-beda, ada yang kaya, dan ada pula yang miskin serta fakir. Apabila golongan yang "the haves" telah dengan sadar dapat memberikan pertolongan dengan harta kekayaannya, maka masyarakat itu akan kuat, dan golongan yang "the haves" itu akan terpuji, baik dalam pandangan agama maupun dalam kehidupan pergaulan manusia. Kalau pemerintah menempati posisi sebagai jari tengah, maka tempat bagi orang-orang kaya lagi dermawan tidak ubahnya bagaikan "jarimanis" sebuah jari yang biasanya ditempatkan barang-barang berharga (cincin permata misalnya).

Persatuan dan kesatuan dari ketiga unsur (Ulama, Umara dan Aghniya) (hartawan) harus mampu menciptakan kesejahteraan, kecerdasan bagi golongan yang awam (kecil) dan golongan yang "the haves nots" yang merupakan golongan yang jumlahnya terbesar. Sebaliknya golongan yang "the haves nots" harus mendukung segala usaha ketiga unsur di atas, baik dukungan itu secara fisik dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan, maupun dukungan dalam bentuk do'a. Kedudukan dari golongan fakir miskin (rakyat awam) tidak ubahnya seperti jari kelingking, sebuah jari lemah. Walaupun bentuk dan wujudnya yang kecil dan lemah itu, tetapi ia merupakan keikutsertaan, karena tanpa keikutsertaan yang kecil, ketiga jari (unsur) itu tidak akan paripurna dan tuntas dalam menghadapi persoalan besar. Apabila keempat unsur (jari tangan) telah menyatu, maka secara otomatis jari yang kelima, yakni jari "jempol" akan ikut serta, dan akan teguhlah apa yang dipegang oleh kelima jari itu. Atau dengan lain perkataan, apabila Ulama sebagai "Jari telunjuk" telah bersatu dengan Pengusaha/Pemerintah yang menempati positi sebagai "jari tengah" ditunjang oleh kaum dermawan, yang berada sebagai "jari manis" dan didukung oleh seluruh rakyat dalam posisi dan kedudukan sebagai "jari kelingking", maka akan terciptalah masyarakat yang aman, damai, sejahtera lahir bathin, atau dapat dikatakan terwujud masyarakat yang baik, yang biasa diisyaratkan dengan "jari jempol".

Nilai-nilai yang menunjang terwujudnya persatuan dan kesatuan

Salah satu ungkapan yang sering didengar dari masyarakat suku Sunda yang menyatakan *"piring gek sok paketrok"* yang artinya: "piring (sebagai benda mati) sering juga berbenturan". Ungkapan tersebut hampir sama/serupa dengan ungkapan umum dalam kalangan masyarakat yang menyebutkan: "Kepala sama berambut, pikiran berlain-lainan". Yang penting bagi kita, bukan melihat perbedaan-perbedaan tadi, tetapi kita harus mampu menemukan kesamaan-kesamaan dalam perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga hilanglah dan lenyaplah perbedaannya, dan muncullah kesamaannya. Atau dengan lain perkataan, dari these akan timbul antithese, dan dari keduanya itulah kita simpulkan dalam sinthese. Patulah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai utama yang merupakan perekat semen persatuan, baik yang bersumber dari ajaran Agama maupun dari budaya serta adat istiadat sebagai warisan dari "leluhur" kita, seperti ajaran "tepo seliro", "tenggang rasa", tasamammuh", nggalah" dan lain-lain. Ungkapan yang bersumber dari ajaran agama ataupun dari leluhur kita, seperti toleransi, tepo seliro, tenggang rasa, ngalah adalah hal-hal yang tidak mudah untuk diwujudkan sebagai syarat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, karena sifat-sifat tadi ada kalanya dipertentangkan dengan kepentingan pribadi dan golongan yang memiliki "harga diri". Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan sifat-sifat yang membawa kepada persatuan dan kesatuan, kunci utamanya terletak pada "pengendalian diri". Dengan pengendalian diri akan dapat diwujudkan persatuan dan kesatuan, karena segala kepentingan nasional harus mengatasi kepentingan diri ataupun golongan serta kelompok. Pengendalian diri bisa terwujud dalam bentuk sifat "suka memberi ma'af" mampu menahan amarah" dan lain-lain. Sifat-sifat seperti itulah merupakan sifat utama yang merupakan ciri dari orang yang takwa, seperti digambarkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133-134.

Yang Artinya: "Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan (dijanjikan) bagi orang-orang yang takwa, (yakni) mereka yang menginfakkan (mengeluarkan hartanya) baik diwaktu lapang maupun diwaktu susah, orang yang mampu menahan amarah dan orang yang suka memberi ma'af terhadap (kesalahan) orang lain. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang yang suka berbuat kebajikan..."

"Pengendalian diri" dengan memberikan ma'af terhadap kesalahan orang merupakan salah satu dari empat macam perbuatan yang oleh Nabi Muhammad dikategorikan "ash'abul a'maal (perbuatan yang sulit). Nabi menegaskan "ada empat macam perbuatan yang sulit dikerjakan, berbuat adil/memberi ma'af dikala sedang dalam keadaan marah, dermawan dikala sedang membutuhkan, mampu tidak berbuat kejahatan walaupun tidak ada orang yang melihatnya (menyendiri), berkata yang hak terhadap orang yang ditakuti ataupun orang yang sedang diharapkan pertolongannya.

Persatuan dan kesatuan yang mantap akan menumbuhkan rasa aman dan tentram, dan dalam suasana yang demikian itu segala persoalan dan masalah dapat dipecahkan secara bersama dalam suasana keterbukaan dan persaudaraan yang merupakan petunjuk untuk keluar dari segala kesulitan. Untuk itulah Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya: "Barang siapa diberi (nikmat) bersyukur, dan diberi cobaan (bala) bersabar, apabila berbuat dosa segera minta ampun, dan apabila didholimi (oleh orang lain), suka memberi ma'af. Itulah mereka orang-orang yang akan memperoleh rasa aman dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk...."

"Keunikan" Indonesia, Bangsa Indonesia memiliki semboyan dan akan terus mengumandangkan semboyan itu sebagai penjelmaan dari kenyataan yang ada dalam kehidupan bangsa, yakni semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika,"* berbeda-beda tetapi

Digitized by Google

tetap satu jua. Memang Indonesia memiliki suatu keunikan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keunikan itu dapat kita lihat dari dua segi yang sangat menonjol:

Geografis: Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, sehingga disebut sebagai *"the biggest achipelago in the world"*. Indonesia bukanlah negara kontinental. Ribuan pulau yang menjadi bagian dari Republik yang terletak digaris khatulistiwa, baik pulau kecil, maupun besar. Pulau-pulau tadi dipisah oleh lautan, teluk dan selat. Dipisahkannya kepulauan tadi dengan laut, teluk dan selat, tidaklah menyebabkan tidak bersatunya penduduk kepulauan itu, tetapi justru dengan semangat Sumpah Pemuda yang bertekad untuk menciptakan satu nation yang kuat bersatu, lautan, teluk dan selat merupakan tali penghubung yang mempersatuan Nusantara.

Indonesia yang terletak antara dua benua (Asia dan Australia), yang berada dalam posisi silang di antara dua samudra (samudra Pasifik dan India), sudah pasti merupakan kawasan lintas antar bangsa, dan Indonesia sebagai negara dalam kehidupan internasional tidak mungkin menutup diri, mengisolir diri dari pengaruh-pengaruh budaya bangsa lain. Apabila Indonesia tidak waspada dan cermat, maka datangnya bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara ini akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang bisa menggoyahkan sendi budaya dan kepribadian bangsa kita. Sebagai bangsa yang telah memiliki budaya yang luhur sebagai warisan dari leluhur, maka masuknya budaya lain yang memang tidak dapat dihindari, kita harus mampu menyerap dan menumbuhkannya ke dalam acuan budaya dan kepribadian bangsa yang lebih mantap sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang teguh kepada kepribadian bangsa.

Keunikan lain dari bangsa kita, ialah adanya beraneka-ragam budaya, adat istiadat, ras, suku, bahasa dan bahkan agama. Namun perbedaan-perbedaan itu telah diikat menjadi kesatuan tekad, dan merupakan semen persatuan dan kesatuan atas prinsip semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika"* itu.

Pancasila sebagai tali ikatan persatuan dan kesatuan

Kerawanan-kerawanan terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan yang bersumber pada faktor geografis maupun etnografis, akan dapat dihindari dengan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan dengan demikian Pancasila menjadi tali pengikat yang utuh dalam membina dan mengembangkan persatuan dan kesatuan yang dinamis dalam menunjang kemantapan pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila itu sendiri. Berdasarkan naluri, kepribadian dan tekad yang kuat, kita tetap ingin dan bertekad untuk tetap hidup bersatu sebagai satu bangsa. Kebulatan tekad untuk hidup bersatu sebagai bangsa disebabkan oleh:

Kita mempunyai pengalaman dan nasib yang sama di bawah penjajahan bangsa lain lebih dari tiga setengah abad dan selama dijajah itu terus tumbuh semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan suatu nation, yang dalam prosesnya mengalami pasang dan surut, dan baru pada abad ke XX menemui bentuk perlawanan atas landasan kebangsaan, dimana kita saksikan berdirinya Budi Utomo, Syarikat Islam, disusul dengan Sumpah Pemuda dan kemudian pergerakan kebangsaan itu menjelma dalam pernyataan/proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Kita mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin, masyarakat adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Kita mempunyai naluri dan kepribadian kebersamaan, toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, tidak bersikap ekstrim ataupun berlebih-lebihan, berusaha untuk tidak memperuncing keadaan, tetapi senantiasa memupuk kebersamaan, tidak bersikap eksklusip sebagai ingin menang sendiri, kita biasa mengembangkan sikap tolong menolong, gotong royong dan bermusyawarah.

Naluri kepribadian serta tekad yang kuat itu semuanya telah dituangkan dalam kebulatan aspirasi, konsepsi Pancasila dan bersumber dari budaya bangsa yang dijiwai oleh rasa kegotong-royongan dan keagamaan oleh karena itu:

Pancasila yang lahir dari kandungan kepribadian bangsa Indonesia di tahun 1945 yang telah diterima sebagai dasar negara dalam Orde Baru ini harus lebih kita tegaskan lagi dan kita mantapkan sebagai pandangan hidup bangsa, idiologi Nasional dan merupakan satu-satunya azas bagi setiap organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan pembangunan yang dilaksanakan tidak lain harus dipandang sebagai pengamalan Pancasila, tidak hanya tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melainkan telah dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka memperlancar pengamalan Pancasila dan pelestarian Pancasila, Kita telah memiliki P-4 yang mengandung 36 butir pedoman tingkah laku yang dalam pelaksanaannya pada hakekatnya bertumpu

Apabila agama telah berakar disetiap jiwa, maka tidak perlu khawatir tentang kebebasan berfikir

Digitized by Google

pada kemampuan untuk "mengendalikan diri", mampu untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Mendahulukan kepentingan umum dalam masyarakat Pancasila berarti telah tercakup dan terjaminnya kepentingan khusus (pribadi) itu.

Dengan landasan konsepsi dasar Pancasila, yang juga berfungsi sebagai tali pengikat persatuan dan kesatuan Nasional yang dinamis, maka makin berhasil dan mampu kita menghayati dan mengamalkan Pancasila itu dalam berbagai segi kehidupan, maka semakin mantap dan kokohlah persatuan dan kesatuan, yang pada gilirannya akan dapat tercapai tujuan Pembangunan Nasional kita dengan mudah.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam melestarikan Pancasila

Dalam melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan Nasional sebagai perwujudan dari pengamalan Pancasila, kita menghadapi berbagai masalah, antara lain:

Usaha-usaha dari golongan ekstrim kiri atau ekstrim kanan, yang secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan mencoba mengaburkan, menyelewengkan, atau menghancurkan Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa, idiologi Nasional, dasar Negara dan sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk dari usaha golongan tertentu dengan berkedok dan mengaku Muslim sejati mereka mencoba mempertentangan antara "agama dan Pancasila", mempertentangkan antara kepentingan Islam dan kepentingan Nasional. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa apabila ajaran agama telah berakar di setiap jiwa, sebenarnya tidak perlu khawatir tentang kebebasan berfikir, bertoleransi dan berprestasi; kita harus mampu berjalan bersama masyarakat yang berubah. Jarak yang makin pendek dalam dunia modern ini bahkan menghendaki (demi keselarasan umat manusia) agar berbagai perbedaan penafsiran tentang ajaran agama dapat disingkirkan.

Sedangkan kekacauan dalam penafsiran terhadap ajaran agama hanya akan membuahkan isolosi, karena isolosi bertentangan dengan fitrah kehidupan yang maju.

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk itu, Umat Islam bukanlah satu-satunya kaum yang hidup di negeri ini. Begitu banyak saudara yang berlainan agama dan bahkan berlainan madzhab, yang harus kita ajak untuk membangun negara ini. Agama adalah milik Allah, sehingga kita tidak mempunyai otorita mutlak untuk membahas ajaran agama itu apalagi dengan mempertentangkannya dengan hasil fikiran manusia.

Atau dengan lain perkataan, agama adalah milik Allah, sedangkan negara dan Pancasila-nya adalah milik kita bersama dan telah menjadi common platform, dimana setiap kelompok masyarakat berhak untuk turut serta mempertahankan serta melestarikan. Ketidak-raguan kita dalam menerima Pancasila, baik sebagai Dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa dan satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan saja tidak bertentangan dengan ajaran Agama, melainkan juga merupakan aktualisasi dari ajaran agama itu sendiri, dimana Allah memberi otorita kepada manusia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama itu sesuai dengan fungsinya sebagai *"Rahmatan lil'alamin"*. Kaitan antara agama dan Pancasila dalam kaidah ilmu mantik dapat disebut sebagai *"umumunwakhususun bil ithlaq."* Yaitu dua perkara yang bisa berkumpul dalam satu maddah (keadaan) dan infirad (berbeda) salah satunya dalam maddah yang lain.

Adanya usaha-usaha pendangkalan dan erosi kepribadian Nasional melalui infiltrasi dan penetrasi nilai budaya asing yang negatip oleh sementara oknum.

Kurangnya kewaspadaan terhadap akibat sampingan dari kemajuan teknologi.

Sikap eksklusip dari sementara kelompok yang mengatas-namakan agama dengan menterlantarkan kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya, dapat mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa. □ (PP.MDI)

Selamat Idul Fitri
1 Syawal 1409 H
Maaf Lahir Bathin

APKINDO
ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA

APHI
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA

ISA
PERHIMPUNAN PENGUSAHA KILANG KAYU TERPADU INDONESIA

ASMINDO
ASOSIASI PERMEBELAN & KERAJINAN INDONESIA

Digitized by Google

Oleh: Ki Reso Kirotobrodjo

Puasa Ramadhan dan Tujuannya Dalam Ajaran Islam

Datangnya bulan Ramadhan tahun ini (1409 H atau 1989 M) seolah-olah seperti tahun yang lalu. Umat Islam diperintahkan Allah SWT melaksanakan ibadah puasa Ramadhan menurut ajaran agamanya (Islam). Bulannya sudah pasti datang setiap tahun satu kali, satu bulan. Perintahnya menjalankan ibadah puasa Ramadhan, dengan segala kejadian di dalamnya sama seperti terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 183-186, sebagai berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

"(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendo'a apabila ia berdo'a kepada-Ku maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".

Kemudian menurut catatan sejarah, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi melakukan puasa 'Asyurah (10 Muharam). Mereka berpuasa pada hari itu sebagai peringatan dan bersyukur atas kejadian terlepasnya Nabi Musa a.s. dan sebagian kaum Bani Israil di jaman dahulu, terlepas dari bahaya kekejaman Raja Fir'un yang terkenal dholim. Puasa inilah yang menurut Maulana Ali dalam kitabnya "Isamologi"m disebut "puasa Yon Kippur". Atas kejadian ini Nabi Muhammad SAW. mengajak kaum muslimin mengerjakan ibadah puasa pada hari Asyurah (10 Muharam) tersebut; sampai turunnya ayat 183 - 185 Surat Al Baqarah, secara jelas mewajibkan ibadah puasa Ramadhan sebagai bagian pokok dari bangunan Islam, termasuk salah satu rukun Islam yang lima; sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari, sebagai berikut :

"Didirikan Islam itu atas lima dasar: mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu utusan Nya, mendirikan sholat lima waktu; mengeluarkan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan; dan menunaikan ibadah Haji ke Baitullah".

Dari ujung ayat 183 Surat Al Baqarah, jelas tujuan mengerjakan ibadah puasa Ramadhan itu ialah untuk meningkatkan ketakwaan. Oleh karena untuk meningkatkan ketakwaan, berarti pelaksanaannya, suasananya, kedalamnya dituntut adanya hal-hal baru, perbaikan, penyempurnaan, peningkatan, dan sebagainya. Jelas Ramadhan tidak rutin! Setiap Ramadhan adalah baru. Dan selalu baru! Itulah letak peningkatan takwa di dalamnya. Takwa adalah tingkat puncak kehidupan rokhaniyah yang paling tinggi dan mulia dalam pandangan ke Tuhanan, dengan sebutan "Muttaqien". Orang yang takwa itu senantiasa dalam bimbingan Tuhan. Tinuntun oleh Tuhan. Orang yang tinuntun hidupnya oleh Tuhan, senantiasa merendah: tunduk tawaddu': sabar, sareh dan shaleh! Tidak merasa besar hati dan tidak akan sombong, bahkan tidak merasa mumpung dituntun. Tidak ada sifat jiwa aji mumpung: mumpung dekat dengan pusat pemberi tuntunan! Tidak akan berlaku sikap: adigang, adigung, adiguno, dan laku hidupnya senantiasa "tepo saliro" terhadap sesamanya: "ojo dumeh". Juga berlaku dalam berpuasa "ojo dumeh puasa"!

Apabila halnya demikian dapat dipetik dalam ibadah puasa Ramadhan, tentu bukan saja perangai perilaku orang-orang yang berpuasa menampakkan tanda-tanda ketakwaan, sekaligus dengan berpuasa Ramadhan yang berhasil meningkatkan ketakwaan bersama itu, jaminan kemenangan dalam hidup ini akan tercapai pula.

Jaminan ini bukan atas pemberian manusia, atau pemberian negara, melainkan jaminan yang diberikan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya; antara lain:

(1) "Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa" (45 : 19); (2) "Sesungguhnya Tuhan cinta kepada

Digitized by Google

orang yang takwa" (3 : 76); (3) "Aku tuliskan rahmat bagi orang-orang yang takwa" (7 : 156); (4) "Sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang takwa" (2 : 194); (5) "Kesudahan yang baik (kemenangan untuk orang-orang yang takwa" (7 : 128); (6) "Barang siapa yang bertakwa, maka Tuhan akan menunjukkan baginya jalan keluar" (65 : 2).

"Takwa, itu dari bahasa Arab yang artinya: memelihara diri, takut untuk melakukan suatu larangan. Takwa, ialah fi'lul wajibat wa tarkul wanhiyyat: melaksanakan perintah-perintah wajib dan meninggalkan larangan.

Afif Abdul Fatah Tabbarah memberikan definisi tentang takwa, sebagai berikut: "Bahwa manusia hendaklah takut (untuk melakukan) hal-hal yang dimurkai Tuhan dan takut kepada hal-hal yang merusakkan kepada dirinya sendiri dan membahayakan (merugikan) terhadap orang lain".

Prof. Dr. Muhmud Syaltut, agak sedemikian jauh melihat ibadah puasa Ramadhan ini sebagaimana dikatakan "Ash Shoimu Malakun Fishurotin Insan" (orang yang puasa itu seperti malaikat dalam bentuk manusia). Almarhum K.H.Z. Muttaqien dalam pengajian "Dharma Ajirasa" (Hidma turridho) di tempat kediaman Menteri Agama H. Munawir Syadzali, MA (1984) menerangkan: Takwa adalah terjemahan penjelasan (interpretasi) dari sikap muslim dan takwa juga adalah terjemah penjelasan dari sikap manusia Indonesia yang Pancasilais. Takwa, adalah nilai. Semua nilai selalu dimulai dengan sifat-sifat umum dan mendasar, tetapi secara pasti dalam proses bahasa Indonesia yang standard lambat laun akan membentuk struktur kata baku bahasa Indonesia, mempunyai kaidah-kaidah yang tertentu dan dipatuhi untuk diamalkan. Dengan penuh berharap pula, takwa ini mendapat tempat tersendiri dalam akan terbitnya "Ensiklopedi Islam Bahasa Indonesia" sebagai pelengkap atau pendamping terbitnya "Kamus Besar Bahasa Indonesia" yang disana sini masih terdapat banyak kekurangannya, terutama dilihat dari sudut bahasa agama! Sekelumit catatan umpan Ramadhan kepada penyusun "Ensiklopedi Islam - Bahasa Indonesia, Departemen Agama.

Orang tua di masyarakat Jawa sering juga menyatakan "Agama ageming aji". Artinya, agama itu pakaian yang aji. Dan itulah dibuatnya sejenis pakaian takwa, dalam wujud baju takwa. Pengungkapan pemahaman agama sebagai pakaian, dan pakaian utama, ialah pakaian takwa; inipun mempunyai konteks pandangan sejarah yang berpangkal pada aspek iman, seperti yang dinyatakan Rasulullah SAW. "Al imanu uryaanun walibaashuttakwa"; dijelaskan sebagai "iman tiada berpakaian, ... kecuali pakaiannya ialah takwa". Oleh sebab itu, DR.H. Mohammad Quraish Shihab, MA, dalam khutbah Idul Fitri tahun 1407 H / 1987 M di Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta, menegaskan dalam khutbahnya "pelaksanaan ibadah puasa demi mencapai takwa, tidak lain ialah bagaikan menenun pakaian rohani demi menghiasi iman. Dengan "Libas Attakwa" - jenis "pakaian takwa" inilah yang hendak kita peroleh sebagai hasil ibadah puasa Ramadhan. Dengan "pakaian takwa" ini pula kita semakin dewasa dan semakin berkwalitas.

Mari, berlomba ketakwaan bersama keluarga

Bertakwa bersama keluarga, artinya tidak takwa sendiri. Tidak ada monopoli takwa dari sudut agama mana pun bagi rakyat Indonesia yang majemuk ini. Tetapi takwa yang dicipta dari ibadah puasa Ramadhan tentu tidak bisa dipisah dari iman dan Islamnya seseorang. Bagi kaum muslimin bangsa Indonesia yang kini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan harapan dapat memperoleh tingkat takwa yang tinggi dan benar, kemudian pengamalannya bersama ketakwaan umat lainnya keluarga bangsa dalam mengisi bagian-bagian pembangunan sebagai pengamalan Pancasila; berarti wujud kerangka perangai moral, etik dan spiritual muslimin Pancasila, bukan suatu hal yang tidak mungkin, tetapi malah sudah pasti bisa dipertumbuhkan lebih semarak dan bergairah lagi diluar bulan Ramadhan.

Puasa diluar bulan Ramadhan, tidak terbatas dilakukan oleh kaum muslimin saja, tetapi juga dilakukan oleh umat-umat lain; seperti yang terdapat puasa dilingkungan orang Yahudi, Nasrani, Katholik, Hindu-Budha, Kelompok Bangsa Purba lainnya.

Ajakan berlomba ketakwaan bersama pada kesempatan melaksanakan ibadah Ramadhan ini, disatu pihak tertuju kepada kaum muslim sendiri, dalam kenyataan memang mulai seteguk air yang diminum waktu berbuka, sesuap nasi atau sepotong kue yang dimakan pada waktu berbuka ataupun pada waktu sahur, pada hakekatnya adalah hasil jerih payah pekerjaan ibu dan keluarga di rumah. Bahkan pekerjaan kaum ibu jauh lebih berlipat besar dalam bulan puasa ini dibanding pada bulan-bulan lainnya. Apalagi tradisi baru sekarang ini dengan mengundang teman-teman dekat untuk berbuka bersama, baik yang berpuasa maupun yang tidak, jelas merupakan tambahan kerja rumah tangga dan tambahan kerja keluarga. Disitulah terkandung hikmah pendidikan ketakwaan bersama keluarga. Dan dalam bulan Ramadhan berkumpul makan bersama, baik makan sahur maupun berbuka; adalah suatu hal yang agak mulai jarang dilakukan oleh keluarga yang penuh kesibukan. Makan bersama keluarga ini suatu kesan yang sangat dalam dan mendidik anak-anak dalam semangat kekeluargaan. Dan ini pula mengandung didikan ketakwaan yang sederhana!

Ajakan berlomba ketakwaan bersama keluarga yang lebih besar dan luas, ialah keluarga bangsa yang sama-sama terikat pada Pancasila satu-satunya asas.

Suatu kenyataan sekarang ini, perakitan keyakinan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah sedemikian luas tersebar dalam berbagai cara.

Seperti dalam "Ikrar GOLKAR - PANCA BHAKTI"; juga secara samar-samar dinyatakan dalam "Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil"; dalam "Sumpah/Janji Jabatan Kenegaraan lainnya"; dalam "Kode Etik Perwira"; dalam "Sapta Prasetya KORPRI"; dalam "Sapta Marga"; dalam "Sebelas Asas Kepemimpinan ABRI"; dalam "Sumpah Prajurit"; dan lain sebagainya.

Juga terdapat "perakitan kata-kata takwa" itu dalam berbagai naskah politik — dokumen kenegaraan, seperti Tap-Tap MPR, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, dengan datangnya bulan Ramadhan ini, berarti perlombaan ketakwaan bersama keluarga bangsa dapat dikatakan terbuka secara umum. Dan dari padanya akan dapat kita renungkan bersama dalam ibadah Ramadhan ini. *Ojo Dumeh Puasa*" dan juga "Ojo Dumeh Tidak Puasa"!□

Digitized by Google

Maria Sugiharto

Memacu Pariwisata Dengan Model:

WOK WITH YAN

Wok dengan Yan, demikian kira-kira terjemahan judul diatas. Siapa WOK dan siapa YAN? Nama binatang ataukah nama orang? Yan adalah nama singkat dari seseorang yang bernama Stephen Yan. Sedangkan Wok, adalah nama pet (binatang kesayangan)-nya, seekor beruk atau sebangsa monyet yang bisa memanjat. Beruk betul? Tidak. Dia adalah boneka beruk, yang selalu digendong Yan, dan bisa berbicara. Benarkah berbicara, atau si Yan yang ventriloquist? (ahli berbicara melalui perut). Bukan, Yan tidak sehebat itu. Kelihatannya si Wok yang beruk itu dilengkapi dengan sebuah mini computer atau mini recorder yang bisa disetel bisa berbicara, pembicaraan mana sudah disetel sedemikian rupa, sehingga si Yan seperti mengadakan dialoog dengan si Wok. Bila di Indonesia, Mas Gatot Sunyoto dengan Tongkinya, itulah gambaran Yan dan Wok. Konon Mas Gatot itu memang seorang ventriloquist.

Siapa WOK dengan YAN ini?

Stephen Yan, seorang Cina berwarganegara Kanada, dan memiliki keahlian masak-memasak. Hubungannya dengan Wok? Tidak ada sama sekali. Si Wok ini hanya dibawa-bawa untuk menarik perhatian saja. promosi yang diadakan oleh Yan, merupakan program Pariwisata, dan adalah salah satu acara yang tercakup didalam paket pariwisata untuk dikunjungi wisatawan-wisatawan baik asing maupun domestik. Si Yan memang pandai berbicara, berparas ramah, bisa melucu, serta tanggap kepada beberapa pertanyaan. Tipe seorang entertainer yang sangat memikat. Dia menggendong si Wok, nama beruk kesayangannya, serta dia ceritakan mengapa dia ini dinamakan WOK. Karena, si Beruk yang berasal dari negeri tropis, bernama WOWO (ini adalah julukan beruk dalam bahasa Jawa). Nah, si Wowo ini selanjutnya mendapatkan *nick nama* atau julukan WOK saja. Diperlihatkan kepada khalayak bahwa si Wok ini di negeri asalnya adalah makhluk yang sangat penolong serta bisa membantu manusia, misalnya memanjat pohon kelapa serta memetik buahnya. Wok adalah makhluk yang berjasa, maka namanya diabadikan untuk usaha si Yan, karena Wok bisa membantu. Demikian keterangan singkat dari Yan tentang Wok. Selanjutnya, Wok menjadi abadi didalam forum yang diselenggarakan Yan, karena Yan yang ahli memasak akan memasak di depan tamu (wisatawan) dengan menu yang sangat variasi serta lezat cita rasanya. Tentu saja masakan Cina.

Yan sudah siap dengan alat-alatnya. Sebuah meja dapur, pisau, talenan, penggorengan dua buah diatas kompor gas, sendok-sendok sayur dan beberapa alat memasak lainnya, serta bahan-bahan untuk masakan, sesuai menu hari itu.

Mulailah dia menanggalkan jasnya, dan mengenakan baju seragam koki. Tidak usah mengenakan topi koki, karena ini akan mengganggu. Cukup dengan celemek memasak. Dan, celemek ini dibuat sangat menarik perhatian, karena pada celemek tertulis promosinya. Setiap hari, vila si Yan berpromosi di depan para wisatawan, celemek selalu berganti dengan tulisan-tulisan yang menarik. Seperti misalnya *WOK Connection.* Para tamupun akan tertawa dan makin tertarik oleh dagelannya si Yan, karena dengan mengenakan celemek Wok, dia berkomentar, mengapa Wok Connection, misalnya. Ini, karena istilah *connection* selalu dihubungkan dengan mafia penyelundupan morfin, seperti *French Connection* atau *Milan Connection,* yang semuanya menunjukkan kota atau tempat untuk basis penyelundupannya.

Dan, Wok Connection memang tidak ada hubungannya dengan ganja mengganja atau penyelundupan morfin. Tetapi orang segera akan tertarik apa yang akan disuguhkan oleh sipemakai celemek Wok Connection tersebut. Lain kali, si Yan mengenakan celemek dengan tulisan *Wok-er Dish,* maksudnya tentu masakan model Wok. *Shake Wok and Roll* — Kocok si Wok dan gulung kemudian — dan, masih banyak Wok-Wok yang lain, yang selalu menarik, kadang-kadang fantastis, persis Sandiwara Srimulat bila membuat judul-judul.

Gaya si Yan

Dan, Yan memulai dengan menu ayam goreng. Tiada yang istimewa, bila si Yan tidak bergaya yang demikian aduhai. Sebab, bumbu ayam goreng tersebut seperti bumbu-bumbu yang disuguhkan didalam pelajaran-pelajaran memasak yang lain, juga didalam rubrik dapur anda misalnya. Tetapi, gaya si Yan ini, yang benar-benar memiliki daya tarik tersendiri. Yan akan mengolesi ayam yang montok dengan kecap dan ramuan lainnya. Dia beri komentar tentang ayam tersebut, yang katanya ayam muda, montok, pasti memiliki daging yang lezat dan gurih. Dan, mulailah dia mengolesi bumbu-bumbu, dengan komentar-komentarnya. Gayanya, seperti orang me-*massage* meskipun tidak dalam panti pijat. Yan juga kan mengatakan bahwa gaya mengoles kecap dengan memijat-mijat ayam, seperti gaya orang memijat. Ini akan memberikan kesemarakan serta meresapnya bumbu-bumbu, sehingga ayam akan terasa lebih sedap. Ketika dia harus mengolesi bumbu ke dalam badan ayam bagian dalam (seperti diketahui ayam tidak dipotong, tetapi dibiarkan utuh), diapun memberitahu bahwa karena harus merogoh badan ayam dibagian dalam, maka dia minta permisi, *"excuse me"* demikian celetuknya, dan para penonton benar-benar

Digitized by Google

seperti dibawa menonton pertunjukan massage. Memoles bumbu dibawah sayap, dia katakan lagi "excuse me"... karena dia seperti meraba-raba ketiak si ayam montok itu.

Dan ayampun sudah siap pakai atau siap digoreng, setelah dimassage oleh Yan. Kini, sayurannya ... dan seterusnya. Dengan tidak henti-hentinya memberikan penjelasan sembari bekerja, waktu tidak terbuang percuma, dan para tamu wisatawan dibawa di dalam suasana yang sedemikian, sehingga mereka terpaku, serta dengan sabar menunggu hasil karya si Yan, yang nantinya akan disantap (dicicipi) bersama. Dia ciptakan misalnya sayur-sayuran yang diukir menjadi sebuah bentuk binatang atau bunga; seperti misalnya ketimun digurat sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk udang. Apel diiris dan diatur sedemikian rupa sehingga berbentuk bebek, dan lain-lainnya. Sayuran ini hanya untuk dekorasi dari hasil masakan yang sementara itu mendapat giliran untuk dimasak.

Suatu saat, Yan memamerkan cara memasak *Shark Fin Soup* atau sup sirip ikan yang ganas itu. Diapun bercerita bahwa keganasannya dilaut, ternyata dia menyimpan sesuatu misteri, yang membuat manusia tergila-gila akan lezatnya siripnya, yang bila dilaut bisa-bisa saja mencelakakan manusia. Tetapi disini, dia takluk. Sirip ini memberikan banyak manfaat disamping kenikmatan cita rasanya. Dia teruskan dengan mengatakan vitamin yang amat kaya yang terkandung didalam sirip ikan yang ganas tersebut, dan lain-lainnya, yang membuat para penonton atau lebih dapat dikatakan para pengunjung terlena serta terbawa kepada dongengannya si Stephen Yan.

Si Yan memang lihai dan lincah. Dia tidak berhenti berbicara serta berkomentar, kerap kali dia kemukakan filsafat-filsafatnya yang menyinggung kehidupan manusia dengan mengatakan bahwa menurut filsafat leluhur saya (Cina, maksudnya) ... dan keterangan-keterangan yang ia berikan sedemikian menarik, orangpun tidak merasa tahu-tahu masakan sudah siap, dan benar-benar *fresh from oven, ready for lunch*.

Dan, ia akan mengundang satu atau dua orang tamu wisatawan untuk diajak bersantap dimeja khusus dengan cara-cara leluhurnya. Dengan antara lain membuka gulungan kertas yang merupakan kertas ramalan tentang nasib kita. Dan si Yan, sambil melayani tamunya, membahas ramalan yang tertera pada gulungan kertas kecil, bahasan mana tidak pernah mengecewakan si tamu. Ada saja cara membeberkan ramalan tersebut, yang membuat orang senang, tidak kecewa, tidak merasa khawatir, pokoknya bahagia.

Paket pertunjukan Yan yang setengah jam lamanya itu akan berakhir, dengan acara Yan membagi-bagikan hasil masakannya kepada para tamu wisatawan yang hadir, dengan himbauan *come again with Wok and Yan* ... pada setiap hari jam sekian, sekian, dengan menu yang lebih hebat, misalnya *Emperor's Dish* masakan para kaisar.

Sebuah paket promosi wisata yang berhasil

Ditengah-tengah gemuruhnya orang berbicara tentang penggalakan pariwisata, dimana seminar, simposium serta rapat kerja diadakan untuk membahas bagaimana cara menarik wisatawan, karena potensi yang sangat cukup, orang lupa kepada hal-hal yang sederhana yang dapat diperhitungkan dan menarik untuk dijadikan paket promosi.

Acara seperti *Wok with Yan* ternyata bisa menjadi suatu paket yang potensial untuk daya tarik pariwisata. "Bila Spanyol bisa menjual matahari, mengapa kita tidak menjual alam kita?", demikian saya ingat Presiden Soeharto pernah memberikan wawancaranya diatas pesawat ke-Presidenan sekembalinya dari lawatannya ke Eropa, antara lain Spanyol. Gagasan untuk menjual sesuatu untuk daya tarik, ternyata sudah dilontarkan. Bagaimana penjabarannya. Disinilah kunci dari keberhasilan rencana-rencana, yang tidak usah muluk-muluk, tetapi yang mengena kepada keinginan orang.

Pariwisata tidak hanya digalakkan melalui hotel mewah, tamasya yang wah, makanan yang selangit harganya. Makanan, memang merupakan salah satu pokok yang dapat digalakkan, karena mau tidak mau orang harus makan, dimanapun mereka berada. Hotel-hotel mewah kini menyuguhkan makanan-makanan yang disebut jajan pasar, ialah makanan sederhana yang bikinannya secara tradisional, tetapi memiliki nostalgia tersendiri, yang orang senang untuk mencicipi serta bagi masa kecilnya diberi makanan tradisional, jajan pasar terasa nostalgik.

Para pedagang jajanan atau makanan tradisionalpun, memiliki gaya tersendiri, gaya mana dimaksudkan untuk membuat dagangannya menarik, dan gaya itu ternyata baik untuk dipertahankan, termasuk seni, seperti cara si Yan bergaya dengan masakannya.

Cendol, misalnya, yang kedudukannya kini naik peringkat hampir sejajar dengan cocktail, bila ditelusuri asal-usulnya, cara penyuguhannya sungguh menarik. Gaya penjual cendol bila melayani pembeli, sedemikian unik. Menyendok cendol dilaksanakan dengan sendok tempurung kecil, dan dengan beberapa kali sendokan, terasa lebih berseni, daripada sekaligus. Cendol yang ditempatkan didalam mangkok, akan terasa lebih pas daripada didalam gelas. Kemudian santannya, disendok dengan sendok dari nyamplung (tempurung buah nyamplung, semacam kenari), serta terakhir kinca atau gulanya disendok dengan sendok tempurung kecil, sekaligus untuk mengaduk didalam mangkok itu. Sedap. Peragaannya, lebih khas dengan gaya yang tertentu, yang memang merupakan ciri khas para pedagang cendol.

Tentu, penyuguhan cendol dengan mangkok, tidak mengurangi estetika serta bukannya kampungan, bila mengingat cara tradisional Cina menyuguhkan minuman teh Cina juga dengan mangkuk kecil-kecil.

Di jaman yang serba elektronik serta sangat canggih, bahkan kueh ada yang setinggi langit, dibuat untuk meraih suatu gelar tersendiri, orang akan mencemooh sebagai kampungan untuk berbicara hal-hal yang tradisional. Tetapi, memang ada hal-hal yang benar-benar tidak dapat diganti kedudukannya dengan kecanggihan teknologi, karena bila itu menyangkut selera, maka teknologi dapat dikalahkan. Orang Itali di Itali, juga masih membuat pizza dengan cara yang tradisional — dengan oven berbahan bakar tradisional — karena citra rasa sebagai hasil bakar arang dan listrik, kadang-kadang lain.

Sate ayam Madura, akan terasa lebih lezat, bahkan memang seharusnya demikian cara penyajiannya — bila membakarnya benar-benar dengan cara tradisional ialah dengan sebentar-sebentar dioleskan kepada bumbu, dibakar diatas bara arang, dioleskan bumbu lagi. Ini baru sate ayam.

Si Yan dengan Woknya, benar-benar menyuguhkan sesuatu yang lain yang merupakan daya tarik yang menyenangkan. Bahkan, dia yang di Kanada, "mencuri" beruk di wowo kita, untuk dijadikan *mascot* pertunjukkannya, yang dapat menghasilkan devisa.□

Digitized by Google

Kantor Pusat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan,
Telepon : 517797 (20 saluran) Telex : 45109 Pool ia
Alamat Kawat : ASTEK, P.O. Box : 575/KBY. Jakarta 12001 In

Direksi, Staf dan Karyawan Perum ASTEK
Mengucapkan
Selamat Idul Fitri
1 Syawal 1409 H
Maaf Lahir Batin

ASTEK
PERUSAHAAN UMUM
ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

Digitized by Google

Ucapan Terimakasih

BANK BNI

Terimakasih atas partisipasi masyarakat sehubungan dengan penggunaan Lambang Baru Bank Negara Indonesia 1946 sejak tanggal 5 Juli 1988.
Kami bangga memiliki nama resmi **BANK NEGARA INDONESIA 1946.**
Karena kami bank yang pertama didirikan di alam Kemerdekaan Indonesia.

Namun untuk menyeragamkan nama sebutan dan mengakrabkannya dengan masyarakat, kami telah memilih nama sebutan **BANK BNI.**
Nama sebutan tersebut telah dirancang dan diciptakan bersamaan dengan dilancarkannya Budaya Kerja Baru Bank BNI.
Budaya Kerja Baru bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan Bank BNI kepada segenap mitra usaha dan masyarakat umumnya dengan pelayanan yang lebih efisien, efektif dan profesional.

Lambang Baru Bank BNI mencerminkan citra baru Bank Negara Indonesia 1946, masa kini dan masa mendatang.

Mencitrakan jiwa dan semangat Kebaharian Nusantara. Siap menerjang gelombang tantangan dan menembus rintangan.

Dengan semangat kebersamaan dan pantang menyerah. Lima komponennya juga mencerminkan lima pilar Budaya Kerja, yang diresapi oleh segenap pegawai BNI.

Nama sebutan yang baru adalah **BANK BNI.**
BNI bukan lagi singkatan. BNI kini adalah nama, yang singkat dan mudah diingat. Di depan nama BNI dicantumkan kata **"BANK"** dengan tujuan untuk menjelaskan bidang jasa BNI, terutama bagi generasi mendatang dan pasar internasional.
Karenanya **Bank BNI** tidak dibaca **"Bank Bank Negara Indonesia"** cukup dibaca **"Bank BNI"** saja.

Nama resmi kami tetap
BANK NEGARA INDONESIA 1946

Nama sebutan kami
BANK BNI

Digitized by Google

No. 61 Mei 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS 611 M48

PENYALURAN ASPIRASI..?

UNJUK RASA_JANGAN

DIALOG_SILAHKAN

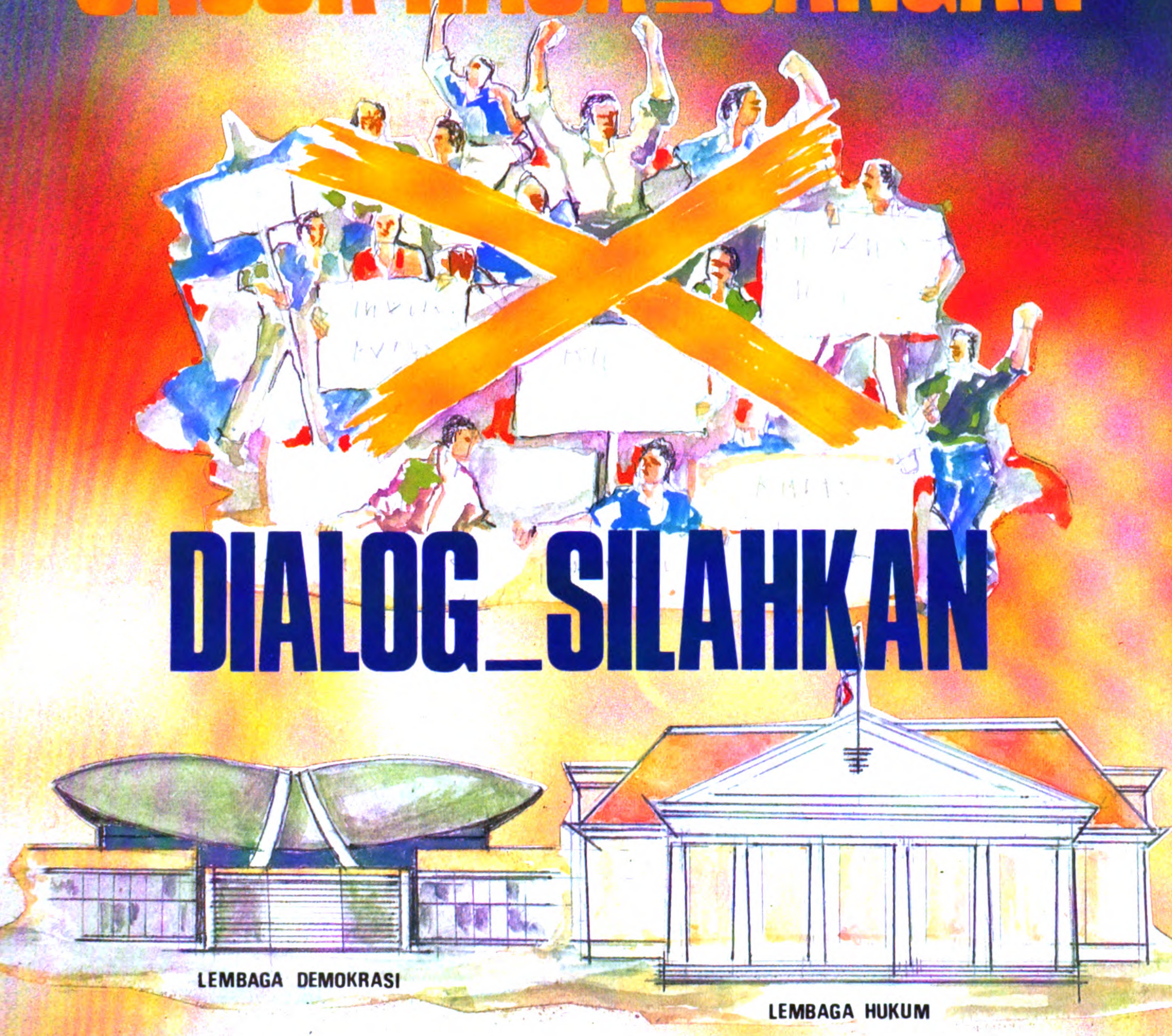

ISSN 0216 - 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

HARIAN
Pelita
MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan **aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.**

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono
Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk
Wakil Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab :
Ir. Rachmat Witoelar
Pemimpin Redaksi/ Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir Rachmat Witoelar
Ir Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr Suhadi
Drs Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi :
Anang Adenansi
Dr Alfian
H Kafrawi MA
Drs Slamet Efendi Yusuf
Drs Irsyad Sudiro
Drs Thomas Suyatno
Ny Maria Sugiharto
Drs Wijanarko Puspoyo MA
Drs Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs T A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H M Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana :
Drs Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD PAND DV Noerjathy

STT NO 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat
Jl Taman Anggrek Slipi
telp 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh PT Enka Parahiyangan

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel tulisan, komentar analisa dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas nakah karangan dan artikel artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Nasionalisme dan Kita

FOKUS

Telah ditemukan 1.100 sertifikat tanah palsu; 500 lembar berasal dari dari wilayah Bekasi dan sekitar 600 lembar beredar di Jakarta. Untuk memperjelas permasalahan ini Media Karya melakukan wawancara dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soni Harsono dan memaparkan berbagai berita tentang persoalan tanah ini dengan gaya tulisan yang singkat, tapi padat seperti Antara Warisan Dengan Hak Barat; Sebuah Land Reform di Tanah Jawa dan Tanah, Antara Kesejahteraan dan Keresahan.

LAPORAN UTAMA

Kita Semuanya Harus Terbuka; DPR, Pemerintah dan Sikap Keterbukaan; Pembangunan Yang Aspiratip; Anggota DPR Dalam Mengemban Aspirasi Rakyat dan Memahami Aspirasi Demokrasi Masyarakat.

NASIONAL

Pembangunan Nasional Harus Berkembang; Tempat Pendidikan Kian Menjamur; In Memoriam 100 Tahun Ki Hajar Dewantoro dan Menyiapkan Kader Unggul

ORGANISASI

Iuran Anggota Golkar; Wahono Ber-Halal Bi Halal ke Daerah Kebanggaan Golkar; DPP Bertekad Menjunjung Tinggi Panji-panji Golongan Karya; Peran MKGR Tidak Dapat Dipisahkan Dari Golkar dan AMPI Bentuk Kepengurusan di Timtim.

KOMENTAR

Demokrasi dan Kebebasan Bertanggung Jawab.

INTERNASIONAL

Normalisasi, Buah KTT Sino-Soviet dan Pergolakan di Negeri Tirai Bambu

SPEKTRUM

Pajak dan Pelayanan Masyarakat; Enambelas tahun yang lalu: Jawaban Presiden Soeharto & Memorandum DPR Tentang Miniatur Indonesia Indah.

SENI & BUDAYA

Bola dan Fanatisme Penggemarnya oleh Maria Sugiharto.

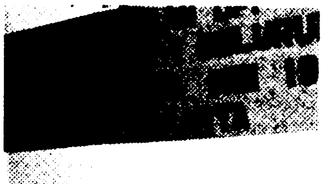

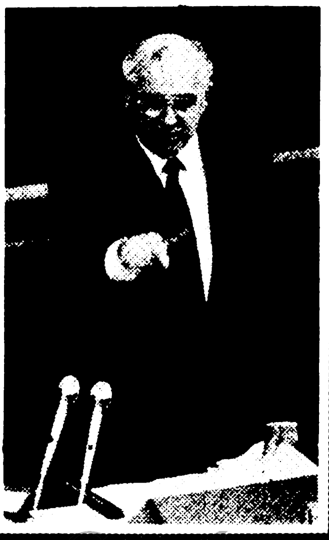

Digitized by Google

Nasionalisme dan Kita

"NASIONALISME", adalah perasaan dan keinginan untuk bernegara bangsa yang timbul dari sekelompok orang yang memiliki kebudayaan yang sama, berasal dari kelompok etnik yang sama, memiliki dan memukimi wilayah yang sama serta merasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi kelompok atau bangsa lain.

Kumpulan persamaan-persamaan itu kian lama kian bertambah secara akumulatif, sehingga menuntut penyaluran secara wajar. Ketika pirasa pirasa itu tidak tersalurkan dengan baik, maka akan muncul konflik. Karena kelompok tadi mengalami penguasaan kelompok lain, yang mengecilkan nilai-nilai kehidupan kelompok asli — katakan itu sebagai pribumi — bahkan sering memusnahkan nilai pribumi itu.

Tindakan demikian, terkenal dengan sebutan penjajahan, yaitu penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Secara modern dikatakan sebagai kolonialisme; bangsa yang dijajah dianggap sebagai bagian — koloni — dari yang menjajah.

Bangsa Indonesia mengalami hal itu, sedikitnya tiga setengah abad oleh Belanda dan tiga setengah tahun oleh Jepang. Malahan provinsi Timor Timur mengalami penjajahan selama hampir lima abad. Ketertindasan itulah yang mendorong bangkitnya nasionalisme. Sesungguhnya nasionalisme adalah sebuah keinginan untuk diakui sebagai bangsa yang berdiri sendiri, oleh bangsa lain. Untuk itu, bangsa tersebut harus punya negara, yaitu negara bangsa yang merdeka dan berdaulat, bebas dari penjajahan.

Setelah berabad-abad perasaan dan keinginan untuk bernegara bangsa mengendap dalam jiwa masyarakat bangsa Indonesia, awal abad ke-XX dia muncul kepermukaan. Sekelompok intelektual muda bersepakat untuk menggelorakan keinginan bernegara bangsa itu dengan menjadikannya suatu gerakan yang terorganisir sehingga tidak dilihat sebagai keinginan kelompok tertentu saja.

Karena itu lahirlah pergerakan-pergerakan nasional yang mewadahi diri dalam organisasi-organisasi pemuda. Lahirlah Tri Koro Darmo yang kemudian berganti nama menjadi Boedi Oetomo, Sarekat Dagang Islam, Perhimpunan Pemuda Islam, dan berbagai organisasi lainnya. Secara resmi, tanggal 20 Mei 1908 dicetuskanlah tekad untuk memperjuangkan satu negara bangsa yang merdeka, berdaulat dan bebas dari penindasan bangsa lain. Itulah yang dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Sesungguhnya tahun 1908 itu merupakan lahirnya gerakan nasionalisme modern di Indonesia. Sebab jauh sebelum itu, telah ada pergerakan-pergerakan regional untuk menuntut kemerdekaan. Kita kenal Pergerakan Rakyat Aceh dibawah Teuku Umar, perjuangan Tuanku Imam Bonjol di Pajang, Perang Diponegoro di Jawa, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Sultan Hasanudin, di Sulawesi Utara ada Maria Walanda, di Maluku ada Thomas Matulessy alias Pattimura dan masih banyak lagi pergerakan regional yang menuntut kemerdekaan wilayah. Begitu banyak pergerakan regional menuntut didirikannya satu negara bangsa.

Tahun 1908 lahir nasionalisme mula-mula. Dia mendorong dan menggelorakan semangat bernegara bangsa tak lagi secara regional tetapi menuntut suatu gerakan nasional untuk kemerdekaan nasional. Dengan menghadirkan negara bangsa (nasional), bukan negara suku (regional).

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, keinginan itu dipatri sebagai cita-cita nasional; memperjuangkan lahirnya negara bangsa yang satu (satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan).

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah puncak dari perjuangan nasional bangsa Indonesia. Lahir *Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Jika nasionalisme mula-mula (1908) telah mendorong lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka apa sesungguhnya yang harus dilakukan kita sekarang ini. Kemerdekaan nasional sudah kita capai, bangunan negara bangsa itu telah ada. Persoalan kita sekarang, bagaimana mempertahankan dan mengisi bangunan itu.

Barangkali jawabannya adalah harus dibangkitkan lagi nasionalisme baru; yaitu rasa tanggung jawab nasional untuk mengisi bangunan negara bangsa yang berhasil didirikan melalui "nasionalisme mula-mula". Dengan nasionalisme baru itu, kita bertekad membangun suatu masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat Pancasilais yang adil makmur dan sejahtera. Ini tugas kita yang mewarisi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berkewajiban membangun masyarakat Indonesia yang tata tentrem karto raharjo demi kepentingan generasi mendatang.

Digitized by Google

Antara Warisan Dengan Hak Barat

Telah ditemukan 1.100 sertifikat tanah palsu; 500 lembar berasal dari wilayah Bekasi dan sekitar 600 beredar di Jakarta.

Itulah angka-angka yang diucapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Soni Harsono, dalam dengar pendapat dengan DPR Februari lalu.

Apa yang disebut sertifikat palsu? Tanahnya tak pernah ada, suratnya pun hanya bikin-bikinan. Inilah yang benar-benar disebut palsu. Tapi ada juga yang lembar sertifikatnya dari pemerintah, tapi data tanahnya omong kosong.

Hanya saja yang paling terbanyak adalah sertifikat asli yang dibuat ganda, dan digunakan buat menjual tanah yang bukan miliknya, atau mengagunkan tanah itu kepada bank.

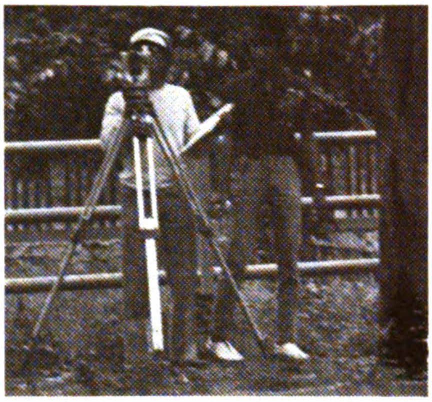

Masalah pertanahan di sini memang tak habis-habisnya dibicarakan. Apalagi dengan digulungnya komplotan pembuat sertifikat tanah palsu oleh kepolisian. Komplotan ini yang diketuai BN, menurut pengungkapan polisi telah menerbitkan tak kurang 51 sertifikat atas tanah kosong seluas 2,8 ha di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka juga menerbitkan sertifikat untuk tanah 4,7 ha di Ulujami, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan sedikitnya 8 akte jual-beli tanah palsu.

Terbongkarnya kasus pemalsuan sertifikat itu memang telah terlihat betapa gawatnya keadaan pengaturan tanah oleh aparat pemerintah.

Dalam tahun-tahun terakhir ini memang banyak ditemukan adanya sertifikat palsu. "Dalam satu tahun terakhir, Badan Pertanahan Jakarta Selatan telah menemukan 360 sertifikat palsu," kata Soelarso, kepala kantor yang dulu dikenal kantor agraria di Jakarta Selatan.

Pengungkapan Soni Harsono dan Soelarso tampaknya memang menambah ngeri juga para pemilik sertifikat. Tak mengherankan, bila sejak terungkap kasus ini, jumlah kunjungan masyarakat ke Kantor Badan Per-

Sebuah Land Reform di Tanah Jawa

Pernahkah Anda membaca buku Jan Bremen (Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial)? Dr. Jan Bremen dari Universitas Rotterdam telah meneliti persoalan perkembangan penguasaan tanah dalam abad XIX dan XX oleh para petani di Cirebon.

Dalam resensi yang ditulis oleh sejarahwan Onghokham disebutkan bahwa di dalam buku ini ada berbagai masalah yang penting dan yang sampai kini masih relevan.

Abad-abad XIX dan XX mencatat terbentuknya negara moderen yang kuat dan terpusat dalam organisasinya. Dengan sendirinya politik kolonial menentukan nasib para petani. Namun pemerintah kolonial sendiri sering merasa tidak bertanggung jawab atas kemerosotan kemakmuran rakyat, dan ia menyalahkan kenaikan jumlah pendudukan, menyalahkan para lintah darat yang meminjamkan uang kepada para petani dengan bunga tinggi, para pedagang Cina, para pejabat setempat (pribumi) yang korup, ataupun para usahawan Eropa (pabrik dan perkebunan) gula. Kenyataan ini menyebabkan para petani terseret dalam keadaan seperti dijelaskan oleh Komisi Kemunduran Kemakmuran Rakyat Jawa dan Madura yang didirikan oleh Hindia Belanda.

Biasanya keadaan di daerah pertanian Jawa dalam abad XIX dilukiskan sebagai perkembangan ekonomi dualistik. Artinya terjadinya penetrasi kapitalisme Barat di pedesaan yang didukung birokrasi yang kuat dan lembaga pribumi yang feodal yang diperkuat.

Ini pun, menurut Bremen, tidak melukiskan proses perubahan dari atas, tetapi hanya sebagian yang dikontrol dari atas. Konsep sistem produksi koniallah yang hanya dapat menjelaskan keadaan dan kondisi pedesaan yang diakibatkan oleh kolonialisme.

Sampai di mana pemerintah kolonial bersikap hipokrit untuk tidak mau bertanggung jawab atas keadaan itu? Bagaimana lalu kalau pemerintah ini seperti dalam abad XX ingin mengadakan perubahan di pedesaan? Apakah pemerintah moderen ini cukup kuat untuk menghadapi kepentingan masyarakat, seperti pengusaha Belanda, pedagang Cina, pejabat pribumi dan lain-lain? Dan sampai di mana pemerintah kolonial sendiri memiliki kehendak politik untuk melancarkan perubahan?

Dari penelitian dan konklusi Jan Bremen, kata Ham, ada satu hal yang menonjol, yakni bahwa dunia pedesaan Jawa sebetulnya dibuat

Digitized by Google

tanahan Nasional Jakarta Selatan meningkat. Umumnya mereka minta kejelasan sertifikat tanah milik mereka.

Soni Harsono yang baru dilantik November tahun lalu mengakui bahwa kasus dan sengketa tanah memang telah merajalela. Kasus-kasus itu, katanya, disebabkan tanah semakin sempit dan harganya makin tinggi, khususnya di kota-kota.

Namun yang jelas persengketaan tanah menjadi-jadi. Mereka yang kebingungan akan hak milik mereka terus berupaya mencari perlindungan.

Menurut catatan F-KP, selama tahun 1982-1987 saja, dari seluruh pengaduan masyarakat yang sampai ke tengah fraksi terbesar di DPR ini, yang paling banyak adalah pelaporan masalah sengketa tanah.

"Jumlahnya mencapai 171 kasus atau hampir 77%," ungkap Damciwar dari F-KP.

Tahun ini memang belum ada catatan yang resmi jumlah masyarakat yang melapor ke wakil-wakil rakyat itu. Tapi ada indikasi bahwa masalah tanah akan tetap menghangat. Sebagai catatan, pada Maret lalu 10 orang delegasi yang mewakili 55 warga Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengadu ke tempat wakil rakyat itu. Masalah yang disampaikan adalah bahwa mereka yang telah mempunyai hak penguasaan tanah, baik sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan, tetap dikejar ancaman keputusan pengadilan. Putusan Pengadilan Jakarta Barat yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa tanah seluas 44 ha itu milik seorang swasta.

"Di atas tanah itu akan dibangun

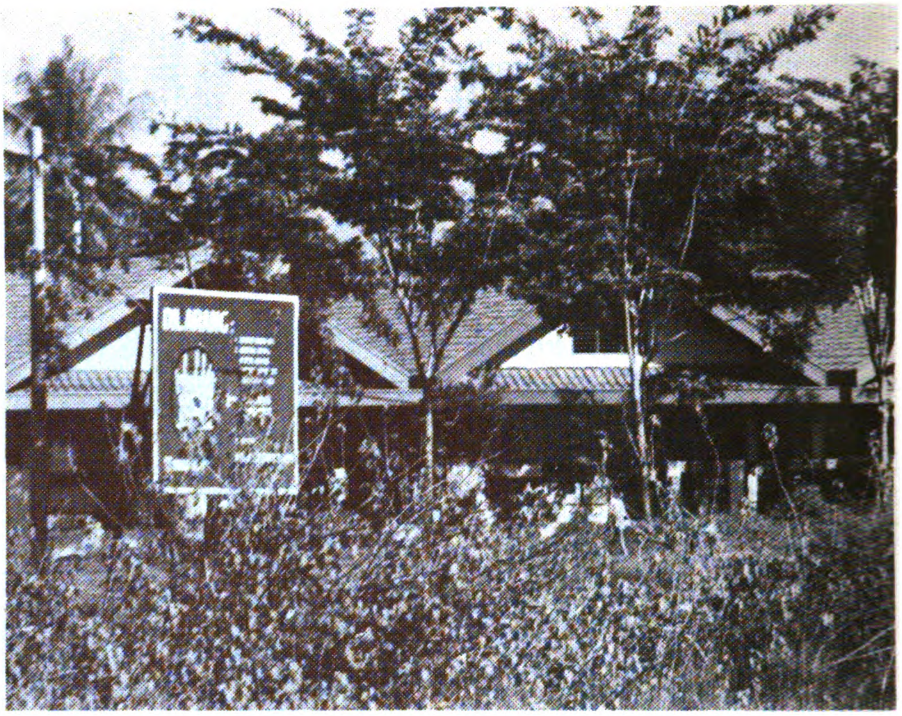

Masalah tanah terus menghangat

oleh situasi kolonial. Menurut van Vollenhoven memang di Jawa tidak ada hukum adat. Pedesaan dibentuk oleh eksploitasi yang dijalankan para raja dan kemudian oleh kolonialisme. Gambaran ini bertentangan dengan pandangan mereka yang mengidealisir desa sebagai lembaga asli yang tidak terpengaruh dunia moderen dan yang masih harmonis, yang mewakili jiwa abadi "Timur". Terhadap gambaran terakhir ini ada banyak keberatan.

Setiap pemerintahan, baik pemerintah raja-raja feodal atau pun pemerintah kolonial dan bentuk-bentuk negara lain dalam suatu masyarakat agraria, memerlukan keadaan agraria sebagai dasar ekonomisnya. Ini berarti bahwa sistem-sistem penguasa tersebut akan membentuk pola pemilikan tanah, lembaga-lembaga pedesaan, sikap dan sifat petani menurut kehendaknya. Para petani merupakan unsur yang terlalu penting sebagai basis ekonomi untuk dibiarkan saja berkembang menjadi lembaga otonom. Artinya, penguasa membentuk lembaga pedesaan demi kepentingannya dan yang asli desa itu tidak ada.

Sistem perpajakan kolonial berjalan berdasarkan Tanam Paksa (perkebunan) dan kerja rodi atau kerja paksa para petani selama tanah belum menjadi barang langka. Politik resmi Hindia Belanda sangat bersifat birokratis. Orientasinya adalah pada teknokrasi dan kegunaan yang tidak memungkinkan adanya kekuatan masyarakat yang mengimbanginya. Dalam keadaan demikian masyarakat dapat dibentuk menurut kepentingan kolonial.

Menurut Jan Bremen, ada indikasi kuat di daerah Cirebon bahwa lembaga desa dibentuk dalam masa pemerintahan kolonial, khususnya selama sistem Tanam Paksa.

Sebelum Tanam Paksa keadaan di pedesaan ditentukan oleh sistem cacah, yakni "keluarga besar" yang terdiri paling sedikit dari 4 lelaki dewasa yang diikat tidak selalu berdasarkan persaudaraan darah, tapi juga berdasarkan ikatan ketergantungan. Kepala cacah yang dapat menguasai lebih dari 4 laki-laki dewasa adalah unsur ekonomis pedesaan yang dapat memiliki tanah-tanah pusaka (warisan) dan *yasa* (dibukanya sendiri dari hutan). Milik pribadi para petani kaya atau kepala cacah ini sebenarnya bertentangan dengan sistem Tanam Paksa dengan perkebunan-perkebunannya, dan mungkin juga bertentangan dengan para penguasa pribumi tradisional. Ini berarti bahwa hubungan asli penguasa pribumi dengan rakyat yang berbentuk patron-client (bapak-anak buah) atau kawula-gusti, sebenarnya bertentangan dengan eksploitasi negara kolonial moderen dan bertentangan dengan birokrasi.

Akibat Tanam Paksa ini adalah

Digitized by Google

Banyak sertifikat asli dibuat ganda

sebuah real estate,'' kata delegasi itu.

Memang tak cuma kasus di Jakarta Barat itu yang terjadi. Kita misalnya masih ingat ucapan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu tahun 1986-1987, Bob Nasution, yang mendapatkan tak kurang 750 sertifikat ternyata tak benar.

Tapi yang menarik adalah soal tanah di Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Madya Bandung, yang mengundang sejumlah aksi mahasiswa. Warga Kacapiring yang telah menghuni rumah selama 37 tahun digusur. Alasan penggusuran; rumah-rumah itu liar dan tidak memiliki IMB, juga penghuni bukan pemilik tanah, dan bangunan di sana tak sesuai dengan rencana induk kota.

Tapi penggusuran itu banyak ditentang oleh mahasiswa. Kepala BPN, Soni Harsono, April lalu telah menghimbau semua pihak untuk menunggu keputusan MA mengenai permasalahan tanah di Kacapiring.

''MA selaku lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tentunya dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh manapun,'' katanya.

Ia juga mengharapkan semua pihak menyadari dan mentaati keputusan MA, apapun hasilnya.

''Tentunya boleh saja orang kurang setuju dengan keputusan peradilan, tapi kita harus mentaatinya,'' katanya.

Dalam suatu proses hukum di pengadilan dan berlanjut sampai tingkat MA, tentu saja ada pihak yang akan kalah dan ada pihak yang bakal menang. ''Ini risiko daripada suatu proses di pengadilan,'' ujarnya.

Mengenai putusan pengadilan sejauh ini, Soni menilai putusan itu ''sudah benar''. ''Setelah kami teliti

bahwa dengan kebutuhan akan tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan kolonial, pajak tanah harus dibayar dalam bentuk tenaga kerja oleh setiap desa dan ini mengakibatkan tanah-tanah desa harus dibagi antara banyak pemilik tanah untuk memperoleh semakin banyak pembayar pajak-tanah yang identik dengan tenaga kerja.

Dengan sendirinya tanah-tanah para petani makin ciut sesuai dengan pembagian tanah dan kewajiban atas tanah terhadap mereka yang mendapatnya. Kewajiban ini adalah kewajiban untuk bekerja pada perkebunan kolonial.

Kalau Hindia Belanda dalam abad XIX, baik dalam zaman Tanam Paksa (1830-1870) maupun sesudahnya, memihak pada usahawan moderen (Barat/Kapitalis), maka pada permulaan abad XX ada suara-suara untuk memperkuat kedudukan petani. Walaupun tidak pernah terlaksana, pemerintah kolonial dimulai dengan Raffles (Inggris 1811-1816), sudah memikirkan bahwa kestabilan masyarakat Jawa serta kemakmurannya terletak pada golongan petani yang mampu.

Dalam permulaan abad XX, dengan politik etis, hal ini dipikirkan kembali. Sistem pemilikan tanah oleh desa dianggap usang dan bertentangan dengan prinsip baru. Pemilikan tanah yang harus secara individual dengan hak turun temurun adalah prinsip-prinsip politik etis.

Namun pemilik tanah pertanian ini adalah petani-petani yang terseleksi oleh pemerintah kolonial sebagai yang terbaik, karena tentu saja tidak semua penghuni desa dapat dijadikan pemilik tanah.

Eksperimen baru ini dilaksanakan di daerah Cirebon Timur di Cileduk, di mana keadaan dianggap paling parah. Dalam arti bahwa, baik penguasa desa maupun pangreh praja pabrik gula dan para pengijon Cina telah mengacaukan keadaan.

Banyak kepentingan lokal merasa dirugikan oleh usaha seperti para calo tanah, calo pinjaman, calo pabrik gula dan seterusnya. Pembaruan keadaan desa ini tentu juga memuat suatu pemilikan minimal dan bukan maksimal seperti biasanya tercantum dalam undang-undang *land reform*. Namun hambatan tersebar bagi pelaksana penciptaan suatu golongan menengah petani ini terbentur pada kepentingan pabrik dan perkebunan gula. Perkebunan gula jauh lebih mudah memperoleh tenaga kerja dan tanah dari tanah milik desa daripada pemilik pribadi.

Dalam penelitian Jan Bremen dengan sangat hati-hati dan samar dia mengatakan bahwa pembaruan keadaan petani ini sebenarnya tidak berhasil karena faktor-faktor kepentingan lain, yakni masyarakat (perkebunan, pabrik, calo, pamong desa, pangreh-praja). Namun dia tidak terlalu jelas mengenai hal ini. (LT)

Digitized by Google

kembali masalahnya, ternyata putusan pengadilan sudah benar. Penerbitan sertifikat itu sudah benar dan sah. Jadi, mau apa lagi," katanya.

Menurut Soni, dari 41 keluarga yang menempati itu sebagian besar sudah menerima ganti rugi yang disediakan, dan sekarang hanya tinggal delapan keluarga yang masih ngotot. Sisanya ini yang masih minta bantuan Bambang Sulistomo untuk tetap mempermasalahkannya sampai ke tingkat MA.

Padahal, ini masih kata Soni, sebagian besar dari keluarga itu sekarang sudah hidup lebih enak dibanding sebelumnya di atas tanah yang luasnya hanya 40-70 m2.

"Menurut laporan walikota, mereka itu di tempat yang baru sudah ada listrik, sudah ada air. Mereka senang pindah," tambahnya.

Masalah tanah Kacapiring bukan merupakan masalah baru, karena sudah ada sengketa semenjak tahun 1951 antara pemilik tanah dengan mereka yang mendudukinya. Pada tahun 1952 ada putusan Pengadilan Negeri Bandung menghukum 14 orang yang dianggap menduduki tanah itu secara tidak sah.

Akhir-akhir ini masalah itu menghangat kembali, di mana dari 43 keluarga yang menduduki tanah, 22 di antaranya memberi kuasa kepada Bambang Sulistomo dan kawan-kawan untuk menggugat pemilik tanah sebagai tergugat I dan instansi Agraria (BPN) sebagai tergugat II.

Dalam proses peradilan, sudah ada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 354/1987/Pdt/GT/HM/PN-Bandung tanggal 23 Juni 1988 yang menolak gugatan para penggugat. Hal ini diperkuat oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Maret 1989. Pihak penggugat selanjutnya mohon kasasi ke MA.

Memang, soal pewarisan tanah dengan hak barat telah menimbulkan sejumlah kasus dan sengketa tanah. Lihat saja seperti yang di Bengkulu tadi. "Meskipun Sertifikat Hak Milik Tanah di sana dikeluarkan resmi oleh kantor agraria, mereka mengandung cacat hukum," kata Kepala Kantor Badan Pertanahan Bengkulu, Bagindo Syarifuddin.

Bengkulu memang boleh disebut satu-satunya wilayah di Indonesia yang terbanyak tanahnya diwariskan menurut hak barat. Menurut Walikota Sulaiman Efendy, 80% dari wilayah kota ini adalah bekas tanah barat. Daerah ini memang berturut-turut pernah dijajah Inggris dan Belanda.

Dari status tanah seperti itulah, hak atas tanah bisa diubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), kemudian ditingkatkan statusnya menjadi tanah dengan hak milik. Tentu saja praktek ini sering menimbulkan sengketa.

Menurut Guru Besar IPB, Sediono Tjondronegoro, sengketa tanah di Indonesia memang tak lepas dari sejarah negara ini. Dulu penjajah Belanda mempunyai aturan sendiri yang dikenal dengan Hukum Agraria 1870. Lewat aturan ini ditetapkan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya menjadi tanah negara. Oleh Pemerintah Belanda, tanah-tanah itu disewakan ke pihak swasta untuk perkebunan.

Tapi datang pendudukan Jepang, tanah itu pun beralih ke penjajah lain. Setelah merdeka, tanah kembali menjadi tak bertuan. Akibat perang dan larinya para penyewa tanah dari pemerintah kolonial, banyak tanah yang terbengkelai, sementara penduduk bertambah setiap tahun. Tanah itu pun lantas dimanfaatkan rakyat tanah merdeka itu, bahkan secara turun temurun. "Tanpa ada pencatatan dan tidak ada yang menegur selama puluhan tahun," kata Sediono.

Tapi apa penyebab munculnya kasus tanah ini? Dari berbagai faktor mungkin penyebab utamanya ketidaktahunan masyarakat tentang hak dan status kepemilikan tanah. Padahal, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 sudah mengatur aneka ragam hak-hak tanah.

Hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia (WNI). Selain hak yang terkuat dan terpenuh, hak ini bersifat turun-temurun.

Hak milik berasal dari tanah adat dan konversi atas tanah-tanah yang dulu beralaskan hak barat *(eigendom).*

Hak-hak lainnya, yang sama dengan hak milik adalah tanah girik dan tanah *verponding*. Tapi kekuatan hukum dari tanah girik tak cukup kuat. Kepemilikannya hanya sekadar bukti bahwa si pemilik telah membayar pajak. Karena itu disarankan agar tanah-tanah semacam ini sebaiknya disertifikatkan.

Hak milik juga bisa berasal dari redistribusi tanah-tanah objek *land reform*. Lewat kebijaksanaan *land reform,* pemerintah memberikan hak milik tanah bagi para petani penggarap.

Tanah-tanah yang dulunya berasal dari hak barat, selain eigendom dan verponding, adalah *erpacht* dan *opstal*. Seperti juga tanah eigendom, setelah berlakunya UUPA tahun 1960 mengalami konversi. Semua jenis hak barat dinyatakan berakhir 20 tahun kemudian.

Setelah konversi, hak tanah erpacht perkebunan dan pertanian menjadi hak guna usaha (HGU). Sedang hak tanah opstal bangunan menjadi hak guna bangunan (HGB). Melalui Keppres 32 Tahun 1970, kepemilikan dan penguasaan tanah-tanah itu ditata kembali.☐ (LT)

Hak tanah hanya boleh dimiliki warga negara

Digitized by Google

Tanah, Antara Kesejahteraan dan Keresahan

PENGGUSURAN becak, lain dengan penggusuran tanah. Sebab becak dianggap menjadi penghambat kelancaran lalu lintas. Sedangkan penggusuran tanah jelas untuk kepentingan umum dan pembangunan.

Penggusuran becak hanya mengundang polemik sedikit, bahkan tidak sama sekali. Dan sampai sekarang belum ada, tukang becak atau pemiliknya yang protes baik ke DPRD maupun DPR.

"Tapi kasus tanah, merupakan masalah yang paling banyak menimbulkan masalah di Jakarta ini. Dan dalam waktu empat hari saja sudah terkumpul sekitar 400 kasus yang perlu ditangani, dan sudah dilaporkan ke Biro Ketertiban Umum DKI Jakarta," jelas Kepala Biro Ketertiban DKI Jakarta, AEP Sumardiana.

Masalah tanah dalam pembangunan merupakan suatu persoalan yang kompleks dan bertalian erat untuk mewujutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dewasa ini, maka kebutuhan akan tanah untuk keperluan berbagai proyek semakin bertambah. Di lain pihak, persediaan tanah untuk itu sangat terbatas.

Menurut Sumardiana, yang mantan Wakil Walikota Jakarta Barat itu, masalah pertanahan membutuhkan suatu koordinasi di antara instansi terkait serta kerjasama yang harmonis untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Kita kembali ke masalah becak. Dana untuk penertiban becak tersedia sekitar Rp 3 miliar. Tapi sudah sekitar lima tahun penertibannya belum juga tuntas.

Dalam mengatasi masalah becak ini, memang tidak serumit mengatasi masalah pertanahan.

Contohnya, masalah tanah yang terjadi di Jelambar Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Aparat pemerintah dihadapkan kepada para spekulan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah dalam melakukan pembebasan tanah, membentuk badan yang dinamakan panitia sembilan. Sehingga para spekulan tidak dapat beroperasi dengan bebas.

Sebaliknya, kini ada aparat pemerintah daerah yang dijadikan alat perpanjangan tangan oleh pihak swasta agar pelaksanaan pembebasan tanah berjalan lancar dengan harga lebih murah.

Dalam kasus demikian, akhirnya masyarakat lagi yang menjadi korban. Karena lemahnya informasi mengenai tanah, mudahnya para pelaksana ikut bermanipulasi dan mudahnya rakyat dibohongi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata. Tapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan, ketertiban, keamanan maupun aspek kemanusiaan.

Itu perlu dipertimbangkan, agar masalah pertanahan tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat. Di mana rakyat sebagai pemilik tanah berhak atas perlindungan asasinya untuk mempunyai hak milik atas tanah.

Menurut data Biro Pusat Statistik, luas penguasaan dan pengusahaan tanah untuk setiap rumah tangga telah dibuat suatu klasifikasi menjadi tiga kelas yaitu milik sendiri, milik orang lain dan campuran milik sendiri dan orang lain.

Sensus tahun 1980 pun menunjukkan, masih banyaknya rumah tangga yang mengusahakan tanah bukan miliknya mencapai 2,6 juta atau sekitar 15 persen dari total seluruh keluarga tani (nontambak).

Umumnya masyarakat petani memiliki/menguasai lahan pertanian sangat sempit. Bahkan tidak sedikit berstatus sebagai penggarap. Artinya, mereka hanya sebagai petani 'gurem', dengan tidak mempunyai tanah/lahan sama sekali.

Sementara, sebagian kecil saja petani yang mempunyai tanah pertanian relatif luas. Sehingga tidak mengherankan, bila di daerah pedesaan banyak dikenal istilah buruh tani, petani miskin, petani sedang dan petani kaya.

Menurut berbagai kalangan, di

Tanah paling banyak membuat masalah

Digitized by Google

daerah yang padat penduduk seperti pulau Jawa, terjadi penciutan lahan pertanian amat drastis. Sejak 1930 sampai 1973 terjadi penciutan dari 63,09 persen menjadi 46,77 persen.

Kecenderungan masyarakat dewasa ini memiliki/menguasai lahan pertanian melebihi batas maksimum adalah sebagai akibat tekanan-tekanan kebutuhan tanah makin dirasakan berat.

Padahal hal ini mengakibatkan terjadinya tanah pertanian yang tidak dapat terolah. Baik itu oleh pemilik/petani, maupun anggota keluarga lainnya. Sehingga timbul implikasi tanah di luar kemampuan mengerjakannya. Sebagai contoh, banyak terjadi akhir-akhir ini dibagihasilkan, disewakan malahan banyak tanah yang ditelantarkan.

Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Khususnya dengan batasan tanah pertanian yang dapat dimiliki seorang petani berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960. Apalagi kalau dikaji perkiraan dari segi kepadatan penduduk.

Di Pulau Jawa, jumlah rumah tangga yang menguasai tanah lebih dari 0,5 hektar meningkat. Dari sebanyak 2,83 juta pada 1980 menjadi sebesar 4,27 juta pada 1983. Sementara di luar pulau Jawa meningkat dari 3,61 juta pada 1980 menjadi 5,71 juta pada 1983.

Sementara di DKI Jakarta sendiri menurut Wagub Bidang Pemerintahan, Moh. Basofi, dalam rangka tertib bangunan dan tertib pertanahan di wilayah DKI Jakarta maka dalam waktu dekat pihak Pemda akan melakukan pendataan bangunan dan tanah, yang pembangunan dan penguasaannya menyimpang dari ketentuan yang ada.

Masalah pertanahan itu sendiri, sebenarnya sudah mendapat sorotan tajam dari DPR-RI Komisi II. Menteri Dalam Negeri pun sudah menginstruksikan kepada para Gubernur untuk tidak memberi izin bagi tanah pertanian dijadikan tanah non pertanian.

Masalah tanah agar tidak mengganggu stabilitas nasional

Namun proses konversi tersebut berjalan terus, tanpa ada hambatan, dengan alasan demi pembangunan dan prioritas apakah itu untuk transmigrasi, industri, perumahan rakyat ataukah PIR dan lain sebagainya.

Karena itu, sekarang masalahnya yaitu belum adanya undang-undang pertanahan, lemahnya pengetahuan aparat agraria, kaderisasi yang lamban dan anggaran yang tidak memadai.

Menghadapi Repelita V ini maka diperlukan pemikiran penggunaan tanah di pulau Jawa bagi industri, dan mengarahkannya ke luar pulau Jawa mengingat tanah di Jawa semakin sempit untuk lahan tersebut.

Lebih dari 40 undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang belum dapat dilaksanakan, sungguhpun sudah diperintahkan oleh UUPA pada 24 September 1960.

Ambil saja beberapa contoh, antara lain tentang ketentuan Hak Tanggungan yang diperintahkan oleh pasal 51 UUPA; ketentuan tentang Hak Pengelolaan, yang secara tidak tegas diperintahkan oleh pasal 2 UUPA; tentang Land Use pasal 14 UUPA yang juga diperintahkan oleh GBHN/1988, terkenal dengan istilah tata guna tanah/tata ruang; ketentuan tentang Tanah Terlantar, apa kriterianya; UU tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa; UU tentang PIR yang sekarang sudah berkembang menjadi PIR-Trans, kemudian salah satu operasional pertanahan yang diperintahkan oleh PP 224/1961 tentang Land-consoludation yang sudah dilaksanakan di beberapa propinsi dengan baik, dan yang kadang kala terbentur bagaimana jika ada satu orang tidak mau ikut serta dalam program tersebut dapat saja menggagalkan seluruh proyek yang disepakati oleh rakyat, sedangkan belum ada peraturan yang mengaturnya.

Demikian juga dengan tidak adanya undang-undang tentang Land Use, maka terjadilah konversi dari tanah pertanian ke pada non pertanian dan sungguhpun sudah ada instruksi dari Gubernur.

Untuk itu, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menanggapi permasalahan pertanahan sebaik-baiknya. Karena tanah menyangkut berbagai aspek yang luas sekali. Tidak saja yang berkaitan dengan sektor pertanian, tapi juga sektor-sektor lainnya seperti industri, perumahan, perkotaan, kehutanan, prasarana, lingkungan hidup dan sebagainya.

Selanjutnya dalam instruksi Presiden No. 9 tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan secara terinci kegiatan pelaksanaan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan pembangunan tersebut menyangkut: Kepentingan bangsa dan negara, dan atau Kepentingan masyarakat luas, dan atau Kepentingan pembangunan.

Digitized by Google

Pencabutan hak atas tanah merupakan upaya terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan, jika telah diupayakan melalui cara musyawarah dengan pemegang haknya tidak berhasil mencapai kata sepakat.

Contohnya, pihak yang memerlukan tanah telah berusaha memperoleh tanah itu melalui cara pembebasan hak, namun pihak pemegang haknya tidak bersedia melepaskan hak atas tanahnya karena ganti ruginya dianggap tidak memadai walau telah diupayakan sedemikian rupa.

Kalau hal-hal demikian tidak dapat dilakukan, dan pihak pemilik tetap bertahan maka akan timbul kerawanan sosial dan adanya warga yang mengadu ke DPRD atau DPR. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Jakarta Timur.

Menurut walikota Jakarta Timur, Mas Sunaryono, warga Rawamangun Jakarta timur yang terkena rencana pembongkaran agar melihat sendiri bukti pembebasan tanah, sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 403/Int/K/BKD/1971.

Selain itu, juga mencuat kasus penyerobotan tanah yang terjadi di beberapa desa dan kecamatan Karawang. Satu di antaranya tanah bantaran Irigasi Proyek Otorita Jatiluhur. Di mana tanah di sekitar kawasan tersebut telah digarap ratusan petani sejak lima tahun lalu.

Persoalan tanah ini sudah sampai ke DPRD Karawang Jawa Barat, karena laporan para petani. Kehadiran mereka di DPRD di sambut Wakil Ketua Komisi A DPRD dan anggota dewan lainnya.

Para petani ini meminta perlindungan terhadap ulah oknum menteri pengairan yang mengambil alih tanah garapan mereka secara paksa.

Menurut para petani, tanah bantaran yang digarap sejak 1984 itu membayar sewa Rp 4,00 per meter persegi setiap tahunnya.

Uniknya, diserobotnya tanah itu oleh oknum menteri pengairan bukan untuk kepentingan umum tapi direncanakan disewakan kepada sebuah perusahaan.

Amo, seorang petani penggarap mengatakan, kalau tanah garapan kami diambil untuk pengairan dan tentunya itu untuk kepentingan umum, maka kami rela. Tapi kalau akan disewakan kepada pihak lain, terus terang kami dan para petani lainnya sangat keberatan dan tidak setuju.

Dengan digarapnya tanah bantaran oleh para petani, maka daerah tersebut kini lebih dikenal sebagai penghasil palawija. Tapi, kalau pihak pengairan akan mengambil begitu saja tanah garapan petani, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan sosial.

Dan kalau pun akan ada penggantian, maka penggantian kerugian juga tidak merugikan para penggarap. Semua itu tergantung dari dua unsur yaitu: Jaminan kebenaran dan ketetapan hasil inventarisasi harta benda penduduk yang akan diberikan ganti rugi; Jaminan kewajaran dan ketetapan besarnya harga satuan ganti kerugian.

Di samping itu, harga satuan ganti kerugian atas tanah selalu didasarkan pada harga dasar yang ditetapkan secara berkala setiap tahunnya oleh Bupati/KDH. Tidak didasarkan oleh harga umum setempat.

Masalah tata guna tanah itu yang sudah dijanjikan sejak Repelita III sampai sekarang belum mampu dibuat. Dan hal ini diulangi lagi dalam GBHN 1988 yaitu selain tata guna tanah juga tata guna ruang.

Masalah tata guna tanah merupakan hal yang rumit sekali memang. Sampai-sampai tidak dapat diketahui dari mana harus mulai membuatnya; apakah harus lebih dahulu mulai dari daerah ataukah dari pemerintah pusat.

Juga apa yang harus dibuat dahulu dan dibuat belakangan. Sesudah ada suatu anggaran, apakah perlu suatu zona tertentu dalam penetapannya? Sementara itu terus berlanjut tanah-tanah pertanian yang makin menciut karena digunakan untuk non pertanian.

Tapi oleh pemerintah dengan Keppres No 26 tahun 1988 ditetapkan tugas dari Direktorat Agraria telah dialihkan kepada suatu lembaga non departemen dan berada langsung di bawah Presiden. Seluruh pegawai dan kekayaan dari Ditjen Agraria beralih kepada badan baru tersebut.

Di bawah seorang kepala, maka akan ada lima deputi yaitu masing-masing deputi bidang umum, bidang pengaturan penguasaan, penatagunaan tanah, hak-hak tanah, bidang pengawasan, dan di samping itu juga bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Masih ada lagi pusat penelitian (litbang), pusat pendidikan dan latihan, staf ahli serta kantor wilayah. Di mana obyektif dari badan tersebut ialah melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan tanah, merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur oleh UUPA.

Fungsi lainnya, yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah, melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan; melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan.

Sebetulnya dengan beralihnya Departemen Agraria menjadi Direktorat Jenderal Agraria beberapa waktu lalu, maka sudah mulai terasa lambannya aktivitas dari kegiatan keagrariaan. Itu terlihat dari ketidakmampuannya menelorkan suatu Undang-Undang pun, sedangkan oleh UUPA maupun GBHN dan Repelita telah diperintahkan, maupun oleh sejumlah kebutuhan yang mendesak yang harus diatur dengan suatu produk hukum. Sedangkan yang paling banyak terlihat adalah produk-produk peraturan ataupun keputusan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan keputusan Menteri Dalam Negeri itu merupakan respon atas sesuatu kasus, sehingga lebih dapat dikatakan casuistic solution. Sedangkan seharusnya sesuatu peraturan itu ingin mengatur sesuatu di masa yang akan datang baik dalam pengendalian maupun pemantapan pelaksanaannya.

Barangkali patut juga badan yang dibentuk baru-baru ini mengkaji seluruh masalah pertanahan di dalam negeri sebagai bahan koreksi. Sehingga pada tahap tinggal landas mendatang, kasus-kasus tanah yang selalu muncul setiap hari dapat diatasi. Dan pada Pelita V ini dapat dijadikan landasan guna memperbaiki keadaan tersebut, sehingga ke agrariaan dapat berjalan dengan lancar. — (Hers)

Digitized by Google

Kita Semuanya Harus Terbuka

Dua bulan yang lalu memang belum bisa disebut bulan yang teramat sibuk buat R. Soekardi. Namun Wakil Ketua MPR/DPR dari F-KP ini harus menyediakan waktunya buat anggota masyarakat yang akan menemuinya. Itu misalnya bisa terlihat dari papan tulis yang ada di ruang kerjanya, yang penuh dengan acara kesediaannya menerima anggota masyarakat.

Menjelang akhir bulan Mei lalu, pria bertubuh sedang yang dikenal akrab dengan pers ini, menerima kedatangan Media Karya untuk suatu wawancara khusus. Berikut petikannya :

- Akhir-akhir ini banyak anggota masyarakat yang menyampaikan keluhannya ke DPR. Tapi di sisi lain fungsi DPR juga disoroti oleh masyarakat. Apa artinya ini?

Kalau melihat banyaknya masyarakat yang datang ke DPR tentunya kita harus gembira. Karena dengan demikian pelaksanaan pendidikan politik rakyat sebagaimana yang diamanatkan GBHN, baik yang diamanatkan kepada pemerintah maupun kekuatan politik itu benar-benar berhasil. Jadi, rakyat telah mengetahui kedudukan konstitusional dari lembaga legislatif ini dan juga mengerti benar fungsi dan hak-hak DPR.

R. Soekardi

Namun kegembiraan itu juga dibarengi adanya penilaian anggota masyarakat yang mengatakan bahwa DPR tidak berbobot. Untuk hal ini memang harus dilihat dari keinginan masyarakat itu sendiri, yang di dalam setiap menyampaikan persoalan ke DPR tentu ingin melihat sesuatu hasil yang nyata. Ini memang sesuatu yang wajar. Tapi ini mengakibatkan penilaian yang terbalik; yang semula bergembira, kemudian menilai DPR tidak berfungsi.

Hal-hal seperti ini harus kita lihat secara konstitusional. DPR memang tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. DPR tugasnya hanyalah menampung permasalahan yang diajukan masyarakat, kemudian menyampaikan masalah-masalah ini kepada pihak yang berwenang. Penyelesaian berikutnya adalah pada tingkat mereka ini.

DPR, Pemerintah dan Sikap Keter

Keluhan tentang aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya tersalurkan dalam lembaga perwakilan rakyat (DPR) belakangan ini kembali terangkat ke permukaan. Penyaluran aspirasi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan banyak orang telah mengundang orang untuk adu pendapat. Dan kini nampaknya telah menjadi persoalan kita bersama untuk mengkajinya, dimana letak ketidakpuasan sementara warga masyarakat terhadap peranan yang selama ini telah dilaksanakan oleh DPR sebagai lembaga wakil-wakil rakyat, khususnya menyangkut kepentingan masyarakat. Benarkah DPR tidak cukup tanggap atau peka kepada setiap gejolak atau ketidakpuasan yang muncul di kalangan masyarakat?

Pertanyaan tersebut perlu dicari jawabnya dengan terlebih dulu melihat permasalahannya secara utuh. Karena hakekatnya penyaluran aspirasi menyangkut kepentingan berbagai pihak, baik legislatif, eksekutif, organisasi sosial politik maupun warga masyarakat itu sendiri. Ini artinya masalah aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan kini merupakan masalah kita bersama.

Rachmat Witoelar

Lebih-lebih secara struktural perangkat dari demokrasi Pancasila itu sudah ada. Tetapi perangkat itu belum sepenuhnya dipakai. Disini diperlukan pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk kemudian dilaksanakan sebagai mestinya.

Dalam kaitan ini Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Ir Rachmat Witoelar dalam percakapan dengan *Media Karya* di ruang kerjanya mengemukakan bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi — yang terpenting antara lain adalah menyangkut realisasi daripada pelaksanaan hak-hak rakyat untuk diwakili. Menurutnya ini akan memberikan keuntungan lebih baik bagi pembangunan bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh, maupun bagi partisipasi masyarakat itu sendiri baik yang menjadi obyek maupun subyek daripada pembangunan itu sendiri.

Untuk itu, kata Rachmat Witoelar,

Digitized by Google

Fungsi DPR banyak disoroti masyarakat

Karena wewenang yang dipunyai berbeda, kemudian masyarakat melihat DPR sebagai lembaga yang tidak mampu. Kalau instansi yang bersangkutan lama menyelesaikan masalah ini, maka DPR memang tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu bukan wewenang dewan untuk menyelesaikan. Karena itu kita perlu mempunyai kejelasan bersama, yaitu baik masyarakat, pemerintah, lembaga legislatif, dan juga mass media.

Di dalam susunan ketatanegaraan yang kita anut, kita tidak menerapkan sistem pemisahan kekuasaan yang ketat. Tapi kita merupakan satu keluarga. Di dalam keluarga itu kita kemudian mengadakan alokasi tugas. Karena itu saya berpendapat, kita tidak boleh secara ketat berbicara mengenai wewenang itu. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana keluarga yang besar itu bisa sering mengadakan hubungan untuk memberikan informasi yang jelas, sehingga komunikasi berjalan dengan baik, dan tidak ada salah paham antara yang satu dengan lain. Satu contoh adalah masalah listrik. Ini merupakan pelajaran baik bagi kita, bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah.

- Tapi bagaimana caranya memberikan penjelasan masyarakat bahwa fungsi DPR seperti yang Bapak uraikan tadi?

+ Kita memang perlu memberikan release kepada pers. Di pihak lain sedang kita pikirkan, apakah tidak perlu ada semacam hari buat rakyat bisa datang, di mana kita bisa cerita. Itu sedang kita pikirkan. Apakah ini perlu? Menurut saya, ini perlu. Dan tidak perlu diartikan apa-apa. Yakin-

perlu adanya suatu peningkatan kredibilitas daripada lembaga yang menampung aspirasi masyarakat tersebut. Dalam hal ini adalah DPR yang menjadi tempat berkumpulnya para wakil-wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Kurangnya kredibilitas bisa jadi karena hasil-hasil yang selama ini telah dicapai masih dianggap kurang. Namun perlu diingat bahwa pengertian kredibilitas disini mempunyai dua sisi. Pertama bahwa lembaga wakil rakyat itu dapat diterima dan dipercaya di mata masyarakat sehingga warga masyarakat mau datang kepadanya. Sisi lain apakah lembaga itu juga credible di mata pemerintah sebagai counterpart atau mitra wicaranya.

Mengenai upaya peningkatan kredibilitas DPR di mata rakyat dapat dilakukan dengan perubahan sikap daripada Dewan maupun anggota-anggotanya, dimana ada keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang kemungkinan akan menyulitkan atau terkesan mendesakkan kepada pemerintah. Sehingga pada akhirnya rakyat yang menitipkan keluhan merasakan bahwa mereka telah menitipkan permasalahan mereka kepada tangan-tangan yang benar yang berani menyuarakan atau menyampaikan keluhan mereka.

Agar kredibilitas Dewan di mata pemerintah itu tinggi, disini dituntut kemampuan anggota Dewan untuk memformulasikan bentuk-bentuk keluhan atau aspirasi itu dalam bentuk formulasi yang berbobot, sehingga tidak rancu dengan kepentingan politik sempit atau dugaan yang bersifat apriori. Sebab pemerintah akan menghargai, apabila Dewan bisa menyodorkan data yang berbobot, yang tidak didasarkan dugaan apriori semata-mata dari warga masyarakat.

Setiap usulan, keluhan atau kritikan yang disampaikan kepada pemerintah lewat lembaga yang mewakilinya diharapkan tidak semata-mata untuk menyusahkan atau mempersulit kedudukan pemerintah. Tapi benar-benar merupakan sumbangan pemikiran agar pelaksanaan pembangunan agar berjalan lebih baik. Dengan demikian maka mekanisme demokrasi Pancasila yang sudah ada itu benar-benar berjalan sebagai mestinya. Dan persoalannya akan menjadi lain kalau ternyata mekanisme itu berjalan, kita harus memeriksa apakah ada pejabat atau oknum-oknum pemerintah yang menjadi sasaran kritik atau keluhan rakyat tidak cukup peka terhadap setiap usul atau aspirasi yang muncul dari masyarakat lewat wakil-wakilnya. "Tapi kalau masih ada yang berpikiran karena prestise, maka hal itu merupakan kegagalan dalam sistem atau mekanisme yang telah ada. Karena persoalan prestise itu bisa menghambat jalannya proses demokrasi," ujar Rachmat Witoelar.

Mengutip penegasan Menpan Ir. Sarwono Kusumaatmadja bahwa pihaknya akan memberantas atau mengikis habis mentalitas pejabat yang mempunyai karakteristik tidak peka terhadap keluhan rakyat dan mudah marah kalau mendapat kritik rakyat, Rachmat Witoelar melihat adanya usaha-usaha pihak pemerintah yang secara sungguh-sungguh memberantas hal-hal semacam itu. Namun kalau direnungkan, sebenarnya kalau kita berbicara soal sikap, semua orang terlibat dalam proses

Digitized by Google

lah bahwa dewan dalam sejarahnya tidak pernah oposisi dengan pemerintah. Saya ini anggota paling lama. Sudah 21 tahun. Dari mulai F-ABRI sampai kini di F-KP. Asal tidak keliru menilai ini, maka perlu secara teratur adanya pertemuan. Ini memang perlu kerjasama dengan mass media, termasuk media elektronik seperti TVRI. Dari situ bisa diumumkan acara-acara yang terbuka.

Jadi, kalau masyarakat lebih banyak yang menghadiri rapat-rapat komisi, maka mereka akan mengetahui, apa yang dibicarakan di dewan itu. Memang suka ada yang menanyakan, kok yang ditanya itu-itu saja. Lha, memang belum selesai. Selama masalah itu belum selesai, akan tetap dipertanyakan oleh dewan.

Akhir-akhir ini saya juga sering mendengar statemen-statemen teman-teman saya di eksekutif, yang kadang-kadang kok kurang sinkron satu dengan yang lain. Kan sebaiknya sinkron. Jadi, kalau yang satu mengatakan A, yang lain juga sebaiknya A, sehingga ada kejelasan. Dan setiap statemen dari menteri maupun pimpinan dan anggota dewan harus yang jelas.

Karena itu agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka jalur komunikasi itu supaya terbuka. Artinya, dimungkinkan untuk mengadakan hubungan kepada para pejabat-pejabat, pimpinan yang membidangi sesuatu tugas yang diharapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kejelasan. Jadi, harus terbuka. Saya berpendapat, setiap waktu harus terbuka.

Alangkah baiknya diadakan waktu khusus yang mengumumkan seorang pimpinan yang membidangi tugas bisa menerima masyarakat. Sebab, masyarakat menyampaikan keluhan ini, biasanya merasakan dirinya dirugikan.

Tapi mereka merasa dirugikan bisa disebabkan karena dia memang dirugikan. Namun juga ada sebab lain, yaitu mereka kurang mengerti. Tapi ada pula yang menyampaikan pendapatnya kepada pejabat sebagai masukan. Dan saya kira masukan itu perlu.

- Bagaimana hubungan dewan dengan Lembaga Eksekutif?

+ Baik. Sampai sekarang ini baik. Tidak ada masalah-masalah prinsipil yang mengganjal. Memang kemarin itu saja (kenaikkan tarif listrik-red). Kalau saya memang bisa mengerti. Tapi seperti saya katakan tadi, kita kan merupakan satu keluarga yang besar. Kita bisa saja berdebat.

- Apakah fungsi DPR sudah berjalan sebagaimana mestinya?

+ Secara jujur saya mengatakan bahwa di dalam rangka konteks kondisi situasi yang kita hadapi sekarang, DPR sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti begini, DPR itu mengapa belum pernah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU). Jawaban kita, untuk membuat RUU ini memerlukan waktu mendalam. dan pada tingkat pembangunan yang kita laksanakan kini, kita berpendapat bahwa pemerintah-lah yang lebih mengetahui undang-undang apa yang diperlukan demi mendukung pembangunan yang sekarang dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk itu kedudukan dewan, dewan itu tidak pernah menerima RUU begitu saja tanpa adanya sesuatu amandemen. Kita selalu dengan amandemen.

Nah, bagaimana supaya masyarakat tahu kalau kita mengadakan amandemen? Memang ada yang ditutup. Tapi kita akan mencari, kapan waktunya tertutup dan kapan waktunya ter-

tersebut. Disini yang terpenting adalah adanya keterbukaan sikap semua pihak dalam menghadapi suatu problema. Dengan sikap ini akan terlihat problema itu dari berbagai sudut. Ibarat orang sakit yang sulit bukan bagaimana mengobatinya, tapi bagaimana mengetahui atau mendiagnosa, kenapa orang itu menjadi sakit. Disini dapat ditarik pengertian kalau setiap masalah selalu ditutupi sehingga menjadi tidak transparan, maka kemelut dari persoalan itu akan berkelanjutan, yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak puas masyarakat bahkan bisa menjadikan sikap frustasi rakyat.

Disini perlu dicatat bahwa kunci keterbukaan adalah dimana setiap orang dapat melihat secara transparan langkah-langkah apa yang dijalankan pemerintah dalam pembangunan ini. Sehingga munculnya kritik atau saran itu dapat diterima oleh pemerintah. Namun hendaknya pengertian keterbukaan itu dapat diartikan secara dewasa. Kendati keterbukaan itu conditio sine qua non atau tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau

Keterbukaan hendaknya diartikan secara dewasa

masih ada masalah-masalah yang ditutup-tutupi, lebih-lebih yang menyangkut harkat hidup orang banyak, maka hal ini akan membuat perangkat atau mekanisme demokrasi Pancasila menjadi kandas.

Bisa jadi penyaluran aspirasi itu menjadi macet. Dan kalau macet perlu dilihat apakah macetnya itu wajar atau tidak. Sebab sudah ada tolok ukur yang harus dipergunakan, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara

Digitized by Google

DPR melakukan kunjungan ke daerah

buka. Tata tertib memang sudah ada. Tapi nampaknya belum kena. Justru pada saat yang penting-penting itu masyarakat tidak bisa mendengar sendiri. Hanya ada release. Karena itu sudah ada pemikiran, apakah perlu suatu waktu dibuka. Kan tata tertib kita yang buat. Kalau ada kesepakatan kan kita bisa melakukan. Wewenang tertinggi itu kan pleno. Kalau pleno mengatakan, besok mengadakan rapat untuk amandemen tata tertib kan bisa.

Dilihat dari sini DPR sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Buktinya, ya tadi itu dalam pembahasan RUU. Kemudian mengadakan peninjauan ke daerah-daerah yang mempunyai dua fungsi, yaitu melakukan pengawasan dan mencari masukan. Satu forum yang tidak banyak dipergunakan mass media dan pasangan kerja kita adalah pemandangan umum yang membahas hasil kunjungan kerja. Kita melakukannya. Coba kalau Anda ikuti, pembahasan yang berjalan itu usulnya tajam-tajam.

Tapi kembali lagi, fungsi kita ya cuma itu. Tapi saya memang sependapat dengan kebanyakan orang bahwa peranan DPR perlu ditingkatkan kembali. Namun kita harus melihat dua faktor, yaitu dukungan logistik dan peningkatan kualitas individu dari masing-masing anggota dewan. Termasuk saya ini kualitasnya harus ditingkatkan. □ (HS)

(GBHN). Masyarakat bisa menuntut kalau GBHN tidak dilaksanakan. Sebaliknya masyarakat juga harus berani melakukan introspeksi atau mawas diri kalau ternyata aspirasi itu tidak sejalan atau sesuai dengan GBHN. Misalnya adanya aspirasi yang ternyata berbau kepentingan pribadi. Sebab dalam pelaksanaan pembangunan itu tegas-tegas harus mencerminkan GBHN. Dalam GBHN prioritas-prioritasnya, yaitu unsur pemerataan. Kalau ada lapisan masyarakat yang ingin mementingkan dirinya sendiri dan mengajukannya kepada Dewan, itu urusan dia sendiri.

Oleh karenanya Dewan dituntut untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap usulan yang datang dari masyarakat, apakah ada yang menyangkut unsur kepentingan pribadinya atau tidak. Sebaliknya terhadap usulan yang benar-benar menyangkut kepentingan masyarakat banyak, tapi mengalami kemacetan, anggota Dewan harus ada keberanian untuk menyuarakan hal itu kepada pemerintah dan menyelusuri seluruh prosedur yang ada. Tapi tidak jarang data yang masuk itu tidak cukup jelas atau tidak seperti yang dirasakan pemerintah. Dan yang muncul kemudian adalah adanya mis-communication pemerintah dan rakyat.

Dalam upaya lebih memfungsionalkan anggota-anggota Dewan khususnya dari Fraksi Karya Pembangunan, Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya sudah menghimbau kepada para anggota Dewan untuk lebih tanggap dan peka menangkap aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Anggota Dewan harus ada keberanian untuk menyuarakan atau mengungkapkan yang benar adalah benar. Sementara DPP sendiri akan mengadakan pendekatan dengan pejabat dan berkonsultasi mengenai masalah yang timbul. Sebab bagaimanapun pejabat tersebut adalah juga kader-kader Golkar, sehingga diharapkan mereka juga mengacu kepada garis perjuangan Golkar. Melalui komunikasi semacam itu diharapkan mampu melerai kemungkinan terjadinya friksi antara pihak eksekutif dan masyarakat.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan citra Dewan melalui mass media, dimana dilandasi semangat perjuangan pers ikut berperan mengangkat Dewan. Sebab dikonstatir adanya keengganan pers untuk melakukan coverage (liputan) yang cukup banyak terhadap anggota-anggota Dewan. Sehingga hal itu menjadikan timbul kesan DPR tidak dapat digunakan menyalurkan aspirasi masyarakat. Diharapkan pers bisa memberikan proporsi yang wajar kepada anggota Dewan. Pers didalam mencari berita tidak sistem langganan. Hanya anggota itu-itu saja yang diwawancarai. Padahal anggota Dewan itu, khususnya anggota FKP, masih cukup banyak yang memiliki bobot dan integritas yang tinggi.

Sering terlihat kursi yang disediakan untuk wartawan meliput kegiatan sidang-sidang DPR kosong atau hanya sedikit terisi. Sehingga memberi kesan kegiatan anggota Dewan itu kurang. Disini perlu adanya penyatuan derap langkah dalam perjuangan antara Pers dan Dewan. "Ini penting," ujar Rachmat Witoelar mengakhiri percakapannya dengan *Media Karya*. □ (BM/NS)

Digitized by Google

Pembangunan Yang Aspiratip

Akhir-akhir ini masalah demokrasi sering dibicarakan banyak orang. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap negara dalam menjalankan sistim tersebut tidak harus selalu sama. Di Amerika Serikat lain halnya di Eropa. Begitu pula di Indonesia. Di Indonesia menyepakati Pancasila sebagai dasar demokrasinya. Karena sistim tersebut dirasakan cocok dengan nilai dan kultur dari bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa nilai-nilai dan kultur yang sudah ada itu telah tertanam di masyarakat kita sejak dulu. Bahwa masyarakat kita dalam merumuskan sesuatu selalu diawali dengan jalan musyawarah dan mendengarkan pemikiran-pemikiran yang datangnya dari bawah, pemandangan tersebut terlihat di desa-desa. ''Kalau bentuk itu dikaitkan dengan demokrasi Pancasila, maka demokrasi tersebut memberikan tempat pada aspirasi yang hidup'' kata Albert Hasibuan kepada *Media Karya*.

Selanjutnya, kalau demokrasi yang dirumuskan dari bawah ke atas ini menjadi pegangan, maka aspirasi itu akan sangat sentral. Dengan demikian, pembangunan yang sekarang ini dilaksanakan dan dikaitkan dengan demokrasi Pancasila, maka pembangunan itu adalah pembangunan yang aspiratip.

Kemudian kalau demokrasi Pancasila itu menjadi suatu rumusan, bahwa pembangunan itu aspiratip, maka institusi-institusi yang berkaitan erat dengan demokrasi itu harus berkaitan erat dengan aspirasi. Dalam kaitan ini, maka komponen yang paling penting adalah lembaga legislatip. Sebab, aparat lembaga legislatip, selain tugasnya untuk membuat Undang-Undang, merumuskan budget juga menyalurkan aspirasi.

Kalau kita lihat dan kita amati perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa penyaluran aspirasi ini tidak hanya dimonopoli oleh lembaga tersebut, dan juga disalurkan melalui lembaga yang formal, melainkan sudah bergerak di luar jalur itu. Misalnya gerakan mahasiswa akhir-akhir ini dalam menyalurkan aspirasi yang hidup di masyarakat. Seperti ketika menyalurkan aspirasi tentang kenaikan tarip listrik, masalah Kedung Ombo dan yang lainnya.

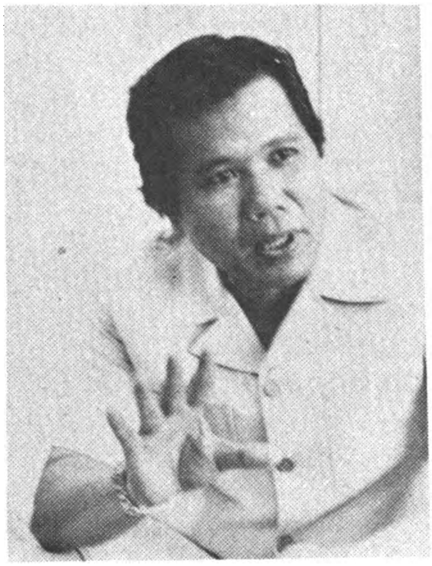

Albert Hasibuan

Namun, kata Albert, kalau masalah tersebut dilihat secara ekstrim, maka gejala non formal institusional dalam penyaluran aspirasi itu akan dapat berkembang lebih jauh. Contoh tentang gerakan mahasiswa di Cina, atau di Indonesia pada tahun 1966.

Terjadinya gelombang dari arus menyalurkan aspirasi yang dilakukan oleh para mahasiswa itu dimungkinkan penyaluran aspirasi yang disampaikan oleh lembaga formal itu kurang begitu jalan. Untuk mendorong, agar aspirasi dari lembaga formal ini dapat berjalan, Albert menyarankan agar DPR membuka diri melebarkan lorong-lorong komunikasinya.

Memang, katanya, dalam suatu sejarah tidak ada satu DPR yang ideal. DPR itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Untuk itu, agar DPR dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut diharapkan dapat bekerja sama dengan pers dalam menyalurkan aspirasi politik ini. Dengan demikian, pers itu dapat dijadikan mitra dan akan sangat membantu DPR dalam menyalurkan aspirasinya. Untuk dapat menjadikan pers sebagai mitra DPR, saratnya lembaga tersebut harus terbuka terhadap kritik baik yang datangnya dari masyarakat maupun pers sendiri sebagai alat sosial kontrol. Selain itu, agar DPR tetap dinamis, maka lembaga tersebut harus dapat mengkritik eksekutip juga mengawasi eksekutip.

Hak Inisiatip

Hak inisiatip yang merupakan hak dari DPR dan juga merupakan suatu refleksi dari lembaga demokrasi, kini

Sudah waktunya hak inisiatip dipergunakan

Digitized by Google

Agar DPR lebih tetap dinamis

sudah waktunya dipergunakan.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada awal era Orde Baru, hak inisiatip memang sengaja dipersulit. Hal ini memang dapat dimengerti. Sebab, pada era itu dikhawatirkan hak inisiatip ini dijadikan move-move politik, yang akhirnya akan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Namun, kini keadaannya sudah berubah. Kemajuan-kemajuan sudah ada di berbagai bidang. Baik di bidang sosial, ekonomi, politik bahkan Hankam. Dan yang menonjol di bidang politik yaitu semua organisasi kemasyarakatan telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara. Melihat dari hal tersebut, Albert menyarankan agar hak inisiatip yang merupakan hak dari DPR ini diperlonggar.

Menurut hematnya, saat ini kemampuan anggota DPR sudah begitu maju. Selain itu, para anggota dewan itu juga dirasakan sudah dapat membedakan mana-mana masalah yang dapat menimbulkan distabilitas dan mana-mana yang konstruktip. Kalaupun toh ada anggota dewan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dalam menggunakan hak inisiatipnya ini, saya kira kita tidak perlu khawatir. Sebab, mayoritas dari pada anggota dewan itu terletak pada kita — FKP menduduki kursi mayoritas di DPR. Dengan demikian, kita mempunyai pengamanan, tutur Albert. Namun, masalahnya bukan demikian. Tapi apakah hak inisiatip itu dipergunakan dengan positip atau tidak. Kalau hak inisiatip ini sudah berkembang jauh, saya kira itu merupakan hal yang baik. Sebab, dengan adanya hak tersebut kita dapat mengusulkan suatu Undang-Undang, rumusan Undang-Undang dalam berbagai bidang yang tidak terlihat oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui, bahwa akhir-akhir ini tuduhan terhadap kemampuan anggota dewan sering terlontar. Untuk mengetahui hal tersebut selama ini memang belum pernah kita test dengan realitas yang sebenarnya.

"Saya percaya, bahwa anggota DPR itu mampu, namun sekarang ini prosedur itulah yang harus dibuka. Selain itu juga saya percaya bahwa hak inisiatip itu tidak akan dipergunakan secara salah dan dapat menimbulkan destabilitas" ujar Albert.

Harus Seimbang

Kalau saya amati perkembangan akhir-akhir ini, pemerintah lebih aktip dalam mengadakan pendekatan terhadap mahasiswa. Ini bagus. Tapi saya heran, kenapa hal tersebut dilakukan pemerintah saja. Seharusnya DPR juga demikian. Artinya, DPR harus dapat menyerap aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Untuk menciptakan hal yang demikian, DPR memerlukan kekuasaan. Sekarang ini saya lihat bahwa tidak adanya keseimbangan kekuasaan antara DPR dan eksekutip. Eksekutip lebih mempunyai kekuasaan ketimbang DPR.

Dari segi teori, agar DPR dapat lebih diperankan secara efektip, maka kekuasaan itu harus seimbang. Memang kelihatan bahwa dalam konstitusi, eksekutip kita lebih kuat. Hal ini tidak berarti bahwa eksekutip itu kuat sesuai dengan konstitusi kita, kemudian DPR itu lemah. Hal ini tidak betul. Karena DPR itu sebagai mitra dari eksekutip, maka kekuasaan antara DPR dan eksekutip itu harus seimbang.

Selama ini kita tidak menganut teori Montesque, dan juga tiak menganut ketentuan kenegaraan bahwa antara eksekutip, legislatip dan yudikatip sesuai dengan trias politika dari Montesque, tapi kita menganut pembagian kekuasaan. Menurut saya pembagian kekuasaan itu saja tidak cukup. Kita harus menganut sharing of power (kekuasaan itu disebar). Dengan demikian, lembaga-lembaga demokrasi yang cukup mempunyai kekuasaan itu (dalam arti positip) supaya mampu menggunakan hak dan kewajibannya dengan tepat. Dengan demikian, kalau DPR mempunyai kekuasaan yang cukup, dia juga akan mampu untuk menyalurkan aspirasi.

Sekarang ini, karena DPR tidak mempunyai kekuasaan yang kuat sehingga apa yang diomongkan itu tidak mempunyai dampak yang efektip. Sehingga, bila anggota DPR mau ngomong apa saja menjadikan orang bosan. ☐ BM

Digitized by Google

Anggota DPR Dalam Mengemban Aspirasi Rakyat

Mahasiswa sebagai anggota masyarakat semakin peka terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Kepekaan itu merupakan perwujudan haknya sebagai warga negara yang berdaulat. Pengertiannya, tiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk mengelola rumah tangga negara seperti yang diatur dalam UUD '45," tandas Wakil Ketua MPR-RI R. Soeprapto kepada Media Karya baru-baru ini.

R. Soeprapto

Terlebih katanya, dalam GBHN 1988, utamanya dalam Bab Penutup ditandaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat. Serta, pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Namun dia mengingatkan kepada para mahasiswa, apakah setiap yang mereka rasakan sebagai masalah itu dalam menyalurkan aspirasinya harus dibicarakan pada tingkat pusat, padahal substansi masalah yang dibawa para mahasiswa itu adalah substansi wilayah/daerah seperti Kedung Ombo atau Kaca Piring?

Jadi, dalam menyampaikan/menyalurkan kepekaan sosial kemasyarakatannya, para mahasiswa harus memperhatikan substansinya serta memperhatikan caranya unjuk rasa itu sendiri.

Bila, misalnya setiap aspirasi dari para mahasiswa harus ditampung langsung pada tingkat menteri, sedangkan substansinya adalah substansi daerah," Lha, ini 'kan repot.... dan itu berarti juga bisa mengundang mahasiswa dari berbagai daerah berbondong-bondong ke Jakarta."

Begitu halnya, bila mereka ke DPR. "DPR tidak bisa secara langsung menanggapi kongkrit masalahnya. Paling-paling menampung untuk meneruskannya kepada instansi terkait, Departemen/Pemda atau paling tidak terlebih dulu harus mencari data yang lebih lengkap. Dus, sifatnya menampung.

Bila mahasiswa ke DPR tingkat pusat dan yang dibawanya itu substansi wilayah, DPR pun tak bisa pada saat itu memberi jawaban kongkrit, katanya sembari menegaskan, "Jadi, kalau dari perkembangan itu, lantas yang disudutkan DPR yang kurang berfungsi, lha...ya...kurang begitu kena."

Jurang komunikasi

Dari apa yang diuraikan itu, Soeprapto mengatakan dalam rangka mawas diri," Saya melihat hal itu disebabkan karena adanya jurang komunikasi antara Pemerintah daerah dengan pihak perguruan tinggi. Padahal adanya perguruan tinggi di suatu daerah dapat merupakan suatu kebanggaan bagi daerah yang bersangkutan dan sekaligus sebagai modal penting bagi pembangunan daerah itu sendiri."

Untuk itu, sebagai langkah pemecahan masalah tersebut, Soeprapto (Wakil Ketua MPR dari utusan daerah) menghimbau agar perangkat Pemerintah Daerah, DPRD meningkatkan komunikasinya dengan pihak perguruan tinggi.

Disamping itu, dia juga mengimbau agar pihak perguruan tinggi secara dini, juga dilibatkan/diikutsertakan didalam memikirkan pembangunan daerah.

Menjawab pertanyaan, Soeprapto

Dituntut peran aktip dalam mengemban aspirasi rakyat

Digitized by Google

Keberhasilan pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat

pada bagian lain mengemukakan, bila ada warga yang berbondong-bondong dari suatu tempat dengan istilah unjuk rasa, kita perlu mewaspadainya, jangan sampai pihak ketiga "memancing di air keruh"

ka kerjasama antara DPR dengan pemerintah dan dalam rangka DPR melaksanakan tugas pengawasan, pada dasarnya sikap DPR sangat dipengaruhi oleh kemauan politik dari induk organisasi masing-masing fraksi.

Jadi, dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi kemasyarakatannya, para mahasiswa harus memperhatikan substansinya serta memperhatikan caranya unjuk rasa itu sendiri.

"Budaya Sungkan"

Ketika menyinggung soal fungsi DPR yang belakangan ini dirasakan sementara kalangan kurang berfungsi, Soeprapto menjelaskan panjang lebar. Dikatakan, DPR terdiri dari 4 fraksi yang masing-masing merupakan perwujudan dari kekuatan sosial politik dalam masyarakat.

Menurut Tata Tertib DPR, fraksi-fraksi itu bukanlah alat kelengkapan DPR, sehingga fraksi-fraksi itu tidak tunduk kepada pimpinan DPR.

Karenanya, fraksi-fraksi itu, alat dari kekuatan sospol dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai induk organisasinya, maka kegiatan fraksi-fraksi itu ditentukan oleh induk organisasinya masing-masing.

Itulah sebabnya, maka dalam rang-

"Di sinilah antara lain sumber kelemahan DPR, baik dalam kerja sama dengan pemerintah maupun pelaksanaan tugas pengawasan terhadap tindakan-tindakan Pemerintah," tandasnya.

Sikap DPR

Saat menyinggung soal tuduhan masyarakat bahwa DPR adalah lembaga stempel terhadap keinginan Pemerintah, menurut Soeprapto, itu disebabkan belum pernah tercetus sikap DPR yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah meskipun masyarakat mengetahui adanya perdebatan yang sengit antara DPR dan Pemerintah dalam berbagai komisi, utamanya dalam hal kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah sebagai pelaksanaan UUD 1945, GBHN atau UU.

Untuk dapat meningkatkan citra DPR dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap tindakan-tindakan Pemerintah, dapat ditempuh upaya-upaya, sebagai berikut:

Melaksanakan "hak mengajukan pernyataan pendapat" yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan tata tertib DPR. Pelaksanaan hak tersebut tidak semata-mata bermuara kepermintaan Persidangan Istimewa MPR, tetapi lebih ditunjukkan kepada maksud mengoreksi Pemerintah sebagai pelaksanaan tugas konstitusional mengawasi tindakan-tindakan pemerintah.

Apabila ternyata terdapat perbedaan pendapat antara komisi-komisi dengan Pemerintah, seyogyanya perbedaan pendapat itu juga dituangkan dalam "pernyataan pendapat" baik oleh komisi bersangkutan maupun DPR agar pemerintah juga merasa adanya sikap tegas komisi maupun DPR, sehingga pemerintah terdorong untuk memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Pernyataan pendapat/sikap DPR ataupun komisi-komisi sebagaimana dimaksud di atas, dapat saja merupakan salah satu dari kemungkinan berikut ini: - Dapat menyetujui/mendukung/sependapat dengan kebijaksanaan yang diambil pemerintah; - Dapat menyetujui/mendukung/sependapat dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, dengan catatan atau saran-saran penyempurnaan dan lain-lain; - Tidak sependapat/menyetujui kebijaksanaan yang akan, sedang, telah ditempuh oleh pemerintah; - merupakan usul-saran kepada Pemerintah untuk melakukan langkah kebijaksanaan tertentu.

"Dengan adanya pernyataan pendapat tersebut, maka akibatnya akan terasa baik oleh pemerintah terlebih lagi oleh rakyat, sehingga walaupun pernyataan pendapat itu yang berisi koreksi itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah, namun secara minimal rakyat akan mengetahui adanya sikap DPR yang kongkrit, jelas dan tegas."

Dalam hal yang demikian itu, maka opini rakyat akan terbentuk dengan sendirinya, dan respek rakyat kepada lembaga perwakilannya akan meningkatkan citra DPR sebagai lembaga konstitusional yang mengemban tugas mulai mengawasi tindakan-tindakan pemerintah dan menyuarakan aspirasi/hati nurani rakyat, demikian pendapat Wakil Ketua MPR, R. Soeprapto.☐ (HS)

Digitized by Google

Oleh: Dr Alfian

Memahami Aspirasi Demokrasi Masyarakat

Keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang seperti ekonomi, transportasi, komunikasi, dan pendidikan antara lain telah menjadikan masyarakat kita makin dinamis. Mobilitas fisik dan mental mereka makin tinggi. Peningkatan kecerdasan dan pengetahuan, terutama di kalangan generasi muda dan cendekiawan, telah mengembangkan cakrawala pemikiran dan sikap kritis meskipun hal itu, oleh karena suasana keterbukaan relatif belum begitu berkembang, masih banyak terpendam atau belum begitu kelihatan di permukaan.

Dinamika dan mobilitas yang tinggi itu berperan positif terhadap integrasi nasional bangsa kita. Mereka makin saling mengenal, saling menghargai, dan saling mengetahui nasib mereka yang sama dan yang berbeda. Bersamaan dengan itu berkembang pula aspirasi dan harapan mereka bersama sebagai satu bangsa. Perasaan senasib, seperasaan dan sepenanggungan meningkat tinggi yang sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Bersamaan dengan itu rasa dan kualitas kebangsaan mereka, terutama di kalangan generasi muda, meningkat pula. Primordialisme memang masih ada, dan itu barangkali memang tidak mungkin dihapuskan sama sekali, tetapi ikatan prochial itu tampaknya makin berada jauh di belakang semangat kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bersama.

Apa yang kita saksikan dalam beberapa tahun belakangan ini adalah proses membesarnya arus dan semangat baru kebangsaan terutama di kalangan generasi muda bangsa kita. Barangkali sebagian generasi tua kurang dapat memahami makna dari arus dan semangat baru kebangsaan yang berkembang dewasa ini sehingga menimbulkan persepsi atau citra yang kurang baik, kurang tepat, kalaulah tidak sama sekali keliru.

Bahwa bangsa kita dewasa ini tengah berada pada tahap terakhir alih generasi menyebabkannya imperatif untuk memahami arus dan semangat baru kebangsaan ini yang semakin hari semakin membesar. Hal itu amat diperlukan agar supaya tidak terjadi gejolak-gejolak yang tak diinginkan, apalagi yang membahayakan kehidupan bersama, menjelang selesainya proses estafet pertukaran generasi ini.

Tersimpul dalam lima nilai

Sesungguhnya isi dari kandungan kebangsaan kita tersimpul dalam lima nilai dasar Pancasila yang kita persepsikan sebagai satu rangkaian kesatuan yang tak terpisah-pisahkan, karena kelima nilai dasar itu bersifat saling berkaitan, saling mengisi dan saling memperkuat. Persepsi seperti itu bersumber dari paham integralistik yang kita anut, yaitu paham integralistik yang dijiwai oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan atau kegotongroyongan yang tidak otoriter/totaliter. Dengan lain perkataan paham integralistik kekeluargaan kita itu bersifat demokratis. Hal itu sejalan dengan pemikiran bangsa kita bahwa Pancasila sebagai ideologi bersama mereka adalah ideologi terbuka.

Tanpa mengurangi sifat dan makna perkaitannya yang erat dengan tiga sila

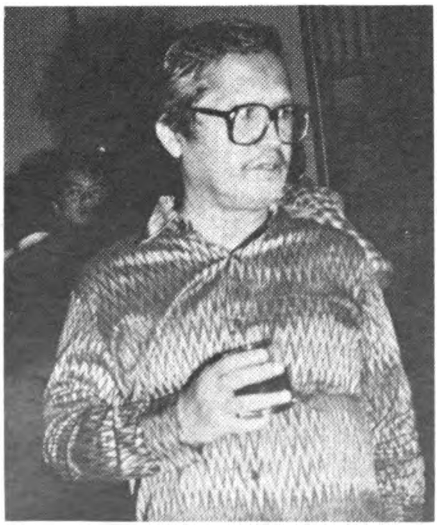

Dr. Alfian

atau nilai dasar yang lain, ditinjau dari segi politik dua nilai dasar Pancasila, yaitu nilai persatuan (sila ketiga) dan nilai kerakyatan atau musyawarah mufakat atau demokrasi (sila keempat) merupakan dua nilai utama yang saling menjiwai dalam membangun sistim politik Demokrasi Pancasila kita. Dalam kaitan itu bangsa kita menyadari, menghayati dan meyakini bahwa persatuan dan kesatuan dirinya akan rapuh, atau dapat menjurus ke arah otoriterisme/totaliterisme, bilamana ia tidak dijiwai dengan nilai-nilai demokrasi (kerakyatan/musyawarah-mufakat). Sebaliknya, demokrasi kita juga akan rapuh, atau dapat menjurus ke arah anarkisme, bilamana ia tidak dijiwai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Demikianlah menurut pandangan kita bahwa sistim politik Demokrasi Pancasila yang tengah kita sempurnakan pembangunannya ini akan berkembang dengan baik bilamana kedua nilai dasar tersebut, persatuan dan demokrasi, selalu hadir dan berkembang secara berimbang dalam satu jaringan yang saling mengisi dan saling memperkuat, sebagaimana juga halnya dengan perkaitan keduanya dengan tiga nilai dasar yang lainnya. Hal itu bukan saja bersesuaian dengan isi kebangsaan yang terkandung dalam nilai-nilai dasar ideologi bersama kita, tetapi sekaligus akan memungkinkan bangsa kita membangun sistim politik Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistim politik yang handal, yaitu sistim politik yang selalu dapat mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya dari masa ke masa. Sistim politik yang handal seperti itu akan selalu berhasil memelihara relevansinya karena ia memiliki sifat responsif yang tinggi terhadap perkembangan kepentingan, aspirasi dan harapan masyarakatnya dari zaman ke zaman.

Bilamana sistim politik Demokrasi Pancasila berhasil sampai ke taraf itu, maka Demokrasi Pancasila kita sudah berhasil membangun sistim dan mekanisme kerja yang baik sehingga

Digitized by Google

memungkinkannya bekerja dengan lancar, mantap dan mulus tanpa goncangan-goncangan yang membahayakan atau merisaukan hati. Pada saat itu sistim politik Demokrasi Pancasila kita itu dapat dikatakan telah memiliki kualitas yang tinggi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan mutunya. Dengan lain perkataan sistim politik Demokrasi Pancasila itu sudah menjadi satu sistim politik yang handal dan tinggal landas.

Bertumpu pada kemampuan bangsa

Sebagaimana telah sering dikemukakan, pengalaman bangsa kita semenjak proklamasi memperlihatkan kesulitannya dalam mengawinkan atau mensenyawakan nilai-nilai persatuan dengan nilai-nilai demokrasi dalam orientasi, sikap dan tingkahlaku politik mereka. Adakalanya, seperti di zaman Demokrasi Liberal, bangsa kita tampak menjadi obsesi dengan nilai-nilai demokrasi sehingga cenderung mengabaikan makna penting nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Hal itu mengakibatkan suasana kehidupan politik yang labil yang diwarnai oleh kecenderungan ke arah anarkisme sebagaimana terlihat dalam iklim mau benar dan mau menang sendiri, saling curiga dan saling bermusuhan. Bangsa kita juga pernah tampak menjadi obsesi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, terutama sebagaimana diperlihatkan oleh mereka yang berkuasa, seperti di zaman Demokrasi Terpimpin sehingga mengabaikan makna penting dari nilai-nilai demokrasi dalam membangun kehidupan bersama. Hal itu mengakibatkan suasana kehidupan politik yang ketat, yang menjurus ke arah otoriterisme/totaliterisme yang akhirnya bermuara pada malapetaka peristiwa G30S/PKI yang nyaris menghancurkan kehidupan bangsa dan negara kita.

Berdasarkan rangkaian pengalaman pahit dan traumatis masa lampau itu Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Dalam bidang politik itu bermakna membangun sistim politik Demokrasi Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan hal itu antara lain bertumpu pada kemampuan bangsa kita mensenyawakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai kerakyatan/musyawarah-mufakat atau nilai-nilai demokrasi kita dalam orientasi, sikap dan tingkahlaku politik mereka.

Kenyataan bahwa Orde Baru mewarisi suasana kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam yang porak poranda telah menyebabkan penyelamatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi amat imperatif sifatnya. Kestabilan politik menjadi satu keharusan untuk menata kembali kehidupan bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara berencana dan bertahap. Di samping itu rangkaian pengalaman pahit dan traumatis masa lampau yang nyaris menghancurkan bangsa dan negara kita membekas begitu dalam pada pemimpin-pemimpin Orde Baru sehingga menyebabkan mereka memiliki semacam kekhawatiran psikologis tentang betapa mudahnya bangsa kita mengembangkan suasana saling curiga yang menjurus kepada iklim saling bermusuhan atau perpecahan.

Suasana saling curiga bukan saja menghambat berkembang dan membudayanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan, tetapi pada waktu yang sama juga menghambat berkembang dan membudayanya nilai-nilai demokrasi, tidak lain tidak bukan karena nilai-nilai demokrasi hanya mungkin hidup subur dalam suasana saling percaya. Idealnya, memang kedua nilai utama itu dikembangkan dan dibudayakan secara bersama-sama, berimbang, dalam satu jalinan persenyawaan yang saling mengisi dan saling memperkuat. Tetapi situasi dan kondisi yang begitu parah yang diwarisi Orde Baru, ditambah lagi dengan kehadiran semacam kekhawatiran psikologis akibat rangkaian kemelut yang nyaris menghancurkan kehidupan bersama, tampak telah mendorong para tokoh Orde Baru yang dipercayakan memegang kendali kekuasaan untuk lebih memusatkan perhatian pada persatuan dan kesatuan, terutama pada tahap-tahap permulaan.

Sungguhpun begitu tekad mereka untuk membangun sistim politik Demokrasi Pancasila tampak pula selalu mengingatkan mereka untuk memperhatikan makna penting dari nilai-nilai demokrasi. Di samping itu dinamika masyarakat yang menyuarakan aspirasi demokrasi mereka, terutama di kalangan generasi muda dan cendekiawan, ikut pula berperan dalam proses pembangunan politik kita. Demikianlah kita saksikan selama Orde Baru ini rangkaian dialog yang menarik, kadang-kadang rasional persuasif dan kadang-kadang emosional konfrontatif, dalam diri bangsa kita, tentang nilai-nilai persatuan-kesatuan dan nilai-nilai demokrasi. Secara berangsur-angsur kita melihat berkembangnya persepsi bahwa kedua nilai utama itu memang perlu disenyawakan dalam proses membangun sistim politik Demokrasi Pancasila kita. Hal itu antara lain tersimpul dalam

Pengalaman pahit dan traumatis masa lampau nyaris menghancurkan negara kita.

Digitized by Google

konsep "stabil-dinamis" yang sudah lama kita sepakati dan budayakan dalam membangun kehidupan politik kita.

Pada waktu yang sama serangkaian konsensus yang melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan ke arah itu telah pula dicapai. Hal itu antara lain terlihat pada penyederhanaan sistim kepartaian, pelaksanaan pemilu secara reguler, dan penyelenggaraan sidang-sidang umum MPR secara teratur tiap lima tahun sekali. Itu semua menunjukkan upaya untuk membangun sistim politik Demokrasi Pancasila kita. Melalui itu secara formal bangunan sistim politik Demokrasi Pancasila kita itu sudah makin terwujud. Itu adalah suatu keberhasilan yang bermakna yang sulit dipungkiri orang, dan keberhasilan itu terutama disebabkan oleh kehadiran suasana kestabilan politik yang dinamis, yang dicapai melalui perhatian yang lebih besar pada persatuan dan kesatuan.

Masyarakat kita tampak menghargai sukses itu. Tetapi mereka, terutama generasi muda dan cendekiawan, menginginkan agar bangunan formal sistim politik Demokrasi Pancasila kita yang masih terus disempurnakan itu segera diisi secara lebih bermakna atau substantif. Hal itu antara lain terlihat pada keluhan mereka tentang penyelenggaraan pemilu yang meskipun tampak semakin baik dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, yang secara substantif belum sepenuhnya demokratis. Mereka juga mengeritik kondisi DPR yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, dan menyampaikan kekhawatiran terhadap lembaga kepresidenan yang tampak makin dominan. Hati mereka juga tampak gundah melihat kehidupan sebahagian orpol dan ormas yang masih belum begitu mandiri, bahkan masih ada yang dirundung perselisihan intern, antara lain karena sistim dan mekanisme demokrasi yang sehat belum hadir atau belum bekerja sebagaimana mestinya. Akibatnya, kadang-kadang terjadi proses pemilihan atau seleksi pemimpin/pengurus yang dianggap kurang demokratis atau tidak wajar seperti melalui katrol, lompat pagar, dropan dan nepotisme. Mereka juga mengeluh melihat masih adanya kasus-kasus yang menunjukkan penyimpangan dan keangkuhan kekuasaan, dan lemahnya kontrol sosial.

Di samping keinginan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan dalam kehidupan politik kita, mereka juga merindukan pengembangan suasana keterbukaan yang telah ada. Bahwa mereka masih mengeluh, mengeritik, berharap, mengemukakan pendapat dan buah pikiran memang menunjukkan kehadiran semacam suasana keterbukaan. Tetapi suasana keterbukaan itu mungkin dirasakan masih belum begitu wajar dan sehat, dan oleh karena itu mereka menginginkan agar lebih dikembangkan dan dipersehat lagi. Dari itu semua tersimpul kepada kita makna keinginan mereka untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi kita secara lebih substantif, sehingga bangunan Demokrasi Pancasila yang telah makin kelihatan wujud kerangka formalnya sekaligus juga mengandung isi yang relevan.

Upaya membangun sistem politik Demokrasi Pancasila

Secara umum barangkali dapat diungkapkan bahwa apa sesungguhnya yang mereka inginkan adalah mempercepat proses demokratisasi atau proses peningkatan kualitas demokrasi kita. Menurut pandangan kita salah satu kunci ke arah itu memang terletak pada peningkatan suasana dan kualitas keterbukaan dalam masyarakat kita. Dari berbagai macam manifestasi aspirasi demokrasi yang hadir dan berkembang dalam masyarakat kita dalam beberapa tahun terakhir ini semuanya tampak bermuara pada keinginan untuk mengembangkan suasana dan kualitas keterbukaan itu.

Budaya terus terang

Rupanya Ketua Umum Golkar, Wahono, memahami betul aspirasi demokrasi yang sedang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda dan cendekiawan, dewasa ini. Hal itu jelas tersimpul dalam konsep "budaya terus terang" yang dikemukakan dan ingin dikembangkannya. Mengapa? Tidak lain tidak bukan adalah karena "budaya terus terang" pada esensinya adalah budaya demokrasi. Budaya terus terang itu tidak mungkin terwujud dalam suasana ketertutupan yang penuh curiga atau suasana keterbukaan semu yang masih banyak diwarnai oleh iklim saling curiga.

Selanjutnya Wahono mengaitkan konsep budaya terus terang itu dengan keberanian mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Hal itu hanya mungkin terjadi dalam suasana keterbukaan yang wajar dan baik, yang tidak dikeruhi atau dihantui oleh iklim saling curiga yang tidak sehat. Ungkapan menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sebelumnya sudah pernah dikatakan oleh Presiden Suharto dalam kaitan membangun budaya politik Demokrasi Pancasila kita. Dari situ tampaknya, seandainya pengamatan kita mengandung unsur-unsur kebenaran, baik Presiden Suharto maupun Ketua Umum Golkar Wahono sama-sama memahami aspirasi demokrasi yang tengah berkembang dalam masyarakat kita dewasa ini.

Sebagaimana telah kita ungkapkan aspirasi demokrasi yang kita maksudkan itu merupakan arus dan semangat

Digitized by Google

Mengembangkan dan membudayakan nilai-nilai persatuan.

baru kebangsaan yang sedang meluas dan berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini, terutama di kalangan generasi muda dan cendekiawan. Arus dan semangat baru kebangsaan ini memang tampak lebih diwarnai oleh keinginan untuk meningkatkan proses demokratisasi atau kualitas demokrasi kita dengan jalan mengembangkan suasana keterbukaan yang lebih wajar, sehat dan berkualitas. Dengan lain perkataan, keinginan untuk lebih menekankan pentingnya makna pengembangan dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi kita yang selama ini dianggap atau dirasakan belum begitu mendapat perhatian.

Kalau selama ini penekanan lebih banyak diberikan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka arus dan semangat baru kebangsaan kita sekarang ini menghendaki agar penekanan itu lebih banyak diberikan kepada nilai-nilai demokrasi. Mengapa sampai demikian halnya?

Menurut pengamatan kita salah satu penyebabnya adalah karena keberhasilan bangsa kita mengembangkan dan membudayakan nilai-nilai persatuan selama Orde Baru ini. Hal itu antara lain disebabkan oleh sukses pembangunan nasional dalam meningkatkan dinamika fisik dan mental bangsa kita sehingga mereka menjadi makin terintegrasi dalam kehidupan bersama mereka. Bagi sebagian generasi tua yang masih memiliki kekhawatiran psikologis akibat rangkaian pengalaman pahit dan traumatis masa lampau yang nyaris menghancurkan bangsa dan negara kita, hal itu mungkin masih agak diragukan. Apalagi karena kadang-kadang bangsa kita masih dibebani oleh kehadiran beberapa kelompok yang berperangai ekstrim antara lain karena masih kuatnya rasa primordialisme atau fanatik sempit terhadap agama atau ideologi lain yang diyakininya. Perangai ekstrim mereka itu kadang-kadang bermuara pula pada tindakan-tindakan pemaksaan atau kekerasan yang membahayakan.

Sungguhpun begitu, bahagian terbesar anggota masyarakat kita dapat dikatakan telah makin menghayati dan membudayakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Hal itu antara lain terlihat dari sikap dan tingkahlaku mereka yang tidak mudah tergoda atau terbawa oleh berbagai arus ekstrim atau radikal yang muncul dalam masyarakat kita selama ini. Itu pulalah antara lain sebabnya mengapa berbagai peristiwa kekerasan atau pemaksaan politik yang dilakukan kalangan-kalangan ekstrim dalam zaman Orde Baru ini mudah ditumpas, di samping faktor kecepatan dan kesigapan aparat keamanan kita dalam mendeteksi dan menanggulanginya.

Semakin bersatu dan meng-Indonesianya bangsa kita, terutama generasi mudanya, dalam beberapa tahun belakangan ini antara lain juga disebabkan oleh semakin membesarnya jumlah dan peranan generasi baru dalam berbagai bidang kehidupan bangsa kita. Sebagian besar dari mereka itu lahir di tahun-tahun menjelang atau di sekitar kemunculan Orde Baru (tahun 1966) 23 tahun yang lalu. Mereka itu masih terlalu kecil atau belum lahir waktu bangsa dan negara kita dilanda rangkaian kemelut yang amat merisaukan hati generasi tua yang sudah makin menipis jumlahnya sekarang ini. Mereka secara pribadi boleh dikatakan tidak mengalami trauma masa lampau itu, dan oleh karena itu relatif tidak memiliki apa yang disebut kekhawatiran psikologis yang telah kita kemukakan.

Dalam pergaulan hidup sesama mereka, generasi baru ini tampaknya mengembangkan persepsi mereka sendiri yang jauh lebih sedikit diwarnai oleh suasana saling curiga atau saling bermusuhan. Dinamika fisik dan mental mereka yang tinggi menyebabkan mereka makin saling mengenal, mudah berkomunikasi secara berterus terang, membina suasana kebersamaan yang lebih akrab dan intim. Itulah sebabnya mengapa lebih mudah mengembangkan dan membudayakan nilai-nilai persatuan di antara mereka. Mereka relatif lebih mudah meng-Indonesia, dan oleh karena hal itu terjadi secara relatif wajar dan sehat, mereka boleh dikatakan tidak mem-

Digitized by Google

persoalkan lagi. Sosialisasi politik mereka selama Orde Baru yang antara lain menekankan pentingnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan berperan positif pula dalam proses peng-Indonesiaan diri mereka. Itu semua telah membawa mereka menghayati dan membudayakan dalam orientasi, sikap dan tingkahlaku mereka sehari-hari, bahwa mereka dalam pengertian politik pertama-tama adalah bangsa Indonesia, sesudah itu baru yang lain-lain.

Sukses Orde Baru dalam menanamkan dan membudayakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam diri mereka selanjutnya mengembangkan aspirasi baru mereka untuk memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan politik yang tengah dibangun. Di samping nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam ideologi dan konstitusi bersama, Pancasila dan UUD 1945, mereka juga menemukan nilai-nilai dasar lain, termasuk nilai-nilai demokrasi. Demikianlah dalam bidang politik, karena dalam realita kehidupan politik sehari-hari mereka melihat dan mengetahui bahwa nilai-nilai demokrasi belum begitu berkembang dan membudaya, maka mereka merasa terundang untuk memperjuangkannya agar mendapat perhatian yang lebih baik dan lebih wajar. Dari situ berkembanglah aspirasi demokrasi mereka yang pada esensinya menghendaki pengembangan suasana keterbukaan yang lebih wajar dan lebih sehat. Ketua Umum Golkar Wahono dengan konsep budaya terus terangnya mengungkapkan dengan tepat sekali apa yang sesungguhnya terkandung di dalam hati nurani mereka. Dengan begitu Wahono tampak memahami betul apa sesungguhnya aspirasi demokrasi yang tengah berkembang dalam masyarakatnya, terutama di kalangan generasi muda dan cendekiawan.

Saling mengisi dan saling memperkuat

Kalau pengamatan kita memang mengundang unsur-unsur kebenaran bahwa selama Orde Baru ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan sudah relatif membudaya dalam masyarakat kita, terutama di kalangan generasi baru, dan cendekiawan, maka aspirasi demokrasi yang tengah berkembang dalam diri mereka seyogyanya adalah wajar dan sehat sejauh hal itu masih dalam batas-batas kerangka budaya politik Demokrasi Pancasila yang tengah kita bangun. Sebagaimana telah dikemukakan, ditinjau dari sini budaya politik Demokrasi Pancasila pada esensinya bertumpu pada persenyawaan antara nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai demokrasi dalam satu jalinan yang saling mengisi dan saling memperkuat.

Kekurang berhasilan bangsa kita membangun budaya politik Demokrasi Pancasila di masa lampau antara lain adalah karena kuatnya kecenderungan untuk menjadi obsesi dengan salah satu dari dua nilai utama tersebut. Adakalanya bangsa kita tampak obsesi dengan nilai-nilai demokrasi seperti di zaman Demokrasi Liberal. Pada waktu yang lain, seperti di masa Demokrasi Terpimpin, bangsa kita, terutama di kalangan penguasa, tampak obsesi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Obsesi dengan nilai-nilai demokrasi biasanya mengembangkan suasana kehidupan politik yang anarkis, sedangkan obsesi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat menjurus kepada kehidupan politik yang otoriter/totaliter. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat dan sehat hanya mungkin berkembang bilamana ia dijiwai oleh nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang kuat dan sehat hanya mungkin tercipta bilamana ia dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi.

Berdasarkan asumsi bahwa sekarang ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan relatif sudah membudaya antara lain karena sukses pembangunan, maka seyogyanyalah pembangunan budaya politik Demokrasi Pancasila yang sedang kita lakukan sekarang ini lebih banyak memperhatikan pengembangan dan pembudayaan dimensi nilai-nilai demokrasi. Dalam kaitan itulah kita memahami aspirasi demokrasi yang sedang berkembang dalam masyarakat kita dewasa ini.

Sungguhpun kita perlu bersikap positif terhadap aspirasi demokrasi masyarakat ini sebagai hal yang wajar dan sehat dalam proses pembangunan budaya politik Demokrasi Pancasila kita, kiranya bangsa kita juga perlu berhati-hati dalam mempersepsikannya. Keinginan untuk mengembangkan suasana keterbukaan atau kebebasan yang lebih wajar dan lebih sehat, sebagaimana tersimpul dalam aspirasi demokrasi itu, adalah lumrah dan perlu mendapat perhatian yang seksama. Tetapi perlu dijaga agar aspirasi demokrasi itu jangan sampai menjadi semacam obsesi baru yang dapat menjurus ke arah suasana keterbukaan atau kebebasan yang tak terbatas yang akhirnya bisa bermuara pada iklim kehidupan politik yang anarkis yang dapat merusak kehidupan bersama bangsa kita.

Sejalan dengan itu pengembangan suasana keterbukaan itu menurut pandangan kita sebaiknya dilaksanakan secara terkendali. Pengendalian yang sehat dari proses pengembangan suasana keterbukaan itu biasanya adalah rasa tanggungjawab, atau disiplin sosial, yang bersumber dari penghayatan yang dalam terhadap pentingnya makna memelihara kehidupan bersama yang tengah dibangun. Dengan demikian aspirasi demokrasi masyarakat yang sedang berkembang ini akan selalu dijiwai oleh nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan itu akan menyebabkannya wajar, sehat dan relevan dengan proses pembangunan budaya politik Demokrasi Pancasila kita. Dengan lain perkataan, sukses aspirasi demokrasi masyarakat yang menghendaki pengembangan suasana keterbukaan yang lebih wajar, lebih sehat dan lebih baik, amatlah tergantung pada kemampuan anggota masyarakat untuk menjiwainya dengan rasa tanggungjawab atau disiplin sosial yang tinggi.

Rasa tanggungjawab atau disiplin sosial yang tinggi itu tidak lain tidak bukan adalah kualitas pengendalian diri yang bermakna.

Logikanya, upaya untuk mengembangkan suasana keterbukaan yang lebih wajar, lebih sehat dan lebih baik akan berhasil bilamana semua pihak mampu dan mau mengendalikan dirinya sesuai dengan tuntutan untuk memelihara dan membangun kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis. Ditinjau dari sini, sukses aspirasi demokrasi masyarakat yang sedang berkembang sekarang ini antara lain tergantung pada kualitas pengendalian diri para anggota masyarakat itu sendiri, termasuk mereka yang dipercayakan untuk memegang kekuasaan. Untuk keperluan itu semua pihak perlu terlebih dahulu memahaminya secara wajar dan sehat serta selanjutnya mengupayakan agar proses perkembangannya seterusnya dapat dirangsang dengan wajar dan sehat pula, sehingga ia betul-betul mempermantap proses pembangunan budaya politik Demokrasi Pancasila yang bertumpu pada persenyawaan antara nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai demokrasi dalam satu jalinan yang saling mengisi, saling memperkuat dan saling menjiwai.□

Digitized by Google

Pembangunan Nasional Harus Berkembang

Pembangunan nasional harus berkembang dengan penuh kemandirian

Jika kebangkitan nasional pertama tahun 1908 bertujuan mendirikan suatu negara kebangsaan yang didasarkan atas persatuan dan kesatuan, maka kebangkitan nasional kedua nanti bertujuan menempatkan negara dan bangsa ini sejajar dengan negara dan bangsa lain yang lebih maju. Untuk itu, proses tinggal landas yang dimulai dalam Repelita VI nanti merupakan momen kebangkitan nasional kedua dan dilaksanakan dalam suasana hidup berkebangsaan yang sudah kukuh serta bersatu padu yang termasuk di dalamnya pembangunan nasional harus berkembang dengan penuh kemandirian. Sehingga kita tidak terus-menerus berada di peringkat bawah dalam jajaran bangsa-bangsa, karena kita harus mengembangkan kemauan dan kemampuan kita yang sebesar-besarnya sekaligus berani membenahi segala kekurangan dan kelemahan kita yang masih terasa. Demikian ungkapan Presiden Soeharto dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-21 di Jakarta.

Lebih lanjut dikatakan, dalam kaitan itu kita harus mengadakan penataan-penataan dalam tahun-tahun mendatang. Penataan-penataan itu berlangsung dalam jajaran pemerintahan maupun dalam jajaran masyarakat sendiri yang sesuai dengan pengarahan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan landasan idiil seluruh upaya itu adalah Pancasila, sedang landasan strukturalnya UUD 1945 dan sementara landasan operasionalnya GBHN yang kemudian dijabarkan dalam sistem nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Semua itu dikembangkan secara demokratis berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, tidak ada kesulitan yang terlalu besar untuk kita atasi dengan musyawarah untuk mufakat tersebut.

Apalagi, sambung Presiden, dewasa ini kita hidup dalam zaman yang bergerak sangat dinamis. Baik pada tingkat nasional maupun internasional sehingga penataan lanjut yang harus dilakukan itu bertujuan agar makin mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dan makin mampu mencegah kerawanan-kerawanannya. Karenanya, dalam kondisi yang sedemikian ini kita tidak boleh sekedar bereaksi terhadap peluang yang terbuka itu dan jika demikian kita akan selalu ke-

Digitized by Google

Napas Kebangkitan Nasional memantapkan suksesnya pembangunan

tinggalan. Sebaliknya, kita harus mampu memperkirakan kecenderungan-kecenderungan perkembangan masa depan dan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan perkembangan yang terjadi bagi kepentingan bangsa.

"Untuk menghadapi kondisi seperti itu, maka tugas setiap pemimpin adalah menciptakan suasana agar mereka yang dipimpinnya itu memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencari, melihat dan menciptakan peluang dalam meningkatkan kesejahteraannya serta mencegah dan menangkal hambatan yang ditemui," pesan Kepala Negara.

Dalam mengembangkan kemampuan mereka, disini tentunya kemahiran sebagai pemimpin tidak akan diukur dari kemahirannya dalam mengendalikan mereka yang dipimpin. Itu sebabnya, dikembangkan kepemimpinan yang lebih bersifat tut wuri handayani. Sedangkan dalam jajaran pemerintah hal ini telah dilaksanakan, antara lain dengan melaksanakan deregulasi dan debirokrasi. Sementara menyambut masa depan, menurutnya, diperlukan cara kerja yang lebih sesuai. Di samping itu setelah masalah-masalah mendasar yang menjamin kekukuhan bangsa telah dibenahi, maka sesuai pengarahan GBHN 1988, bangsa Indonesia harus membuka peluang lebih besar lagi bagi kreativitas, dan prakarsa masyarakat akan berkembang menuju peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kualitas seluruh masyarakat Indonesia, sehingga potensi yang dimilikinya dapat berkembang pesat dalam membangun diri dimana dalam GBHN 1988 hal ini disebut sebagai upaya membangun manusia pembangunan.

Dalam peringatan Harkitnas itu Presiden Soeharto sendiri menyadari, bahwa kita masih menghadapi berbagai hambatan antara lain masih rendahnya pendidikan rata-rata penduduk. Tetapi, kita mempunyai semangat dan bertekad untuk terus menerus meningkatkan pendidikan masyarakat, serta berupaya untuk mengembangkan syarat-syarat yang diperlukan bagi bangsa kita untuk menjadi bangsa modern, yang tetap berkepribadian sendiri.

Pada kesempatan yang sama Menteri Penerangan Harmoko selaku Ketua Umum Peringatan Harkitnas menambahkan, dalam suasana peringatan Harkitnas ini banyak kemajuan yang sangat berarti bagi perjuangan mengisi kemerdekaan. Napas kebangkitan nasional di alam kemerdekaan semakin terasa di dalam memantapkan suksesnya pembangunan yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Gagasan, ide, pemikiran dan perjuangan dr. Wahidin dan dr. Soetomo ternyata tidak saja berkobar di dada masyarakat, melainkan telah merasuk ke tulang sumsum jiwa dan raga bangsa Indonesia yaitu semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme yang kokoh berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya Harmoko mengatakan, Orde Baru telah mewujudkan perjuangan dr. Soetomo yang mengetengahkan motto perjuangan facta non verba (bukti nyata bukan hanya dibicarakan) dan motto ini memang mempunyai relevansi terhadap komitmen Orde Baru, yaitu Orde Baru bukan sekedar bicara tapi bukti-bukti nyata pembangunan yang telah diperbuat dan dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Harkitnas Tingkat Pusat menilai, peringatan ini mempunyai tujuan menanamkan kesadaran pada masyarakat, terutama di kalangan generasi muda tentang luhurnya nilai-nilai perjuangan bangsa.

Dalam acara yang berlangsung meriah dan penuh khidmat dipagelarkan lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa disajikan dalam bentuk musik, gerak dan tari yang diberi nama Gema Krida Putra Nusantara dan pagelaran sendratari ini disaksikan selain oleh Presiden dan Ny. Tien Soeharto, Wakil Presiden dan Ny. E.N. Sudharmono, juga disaksikan para menteri, kepala perwakilan negara sahabat, pejabat tinggi negara dan masyarakat.☐ DT

Digitized by Google

Tempat Pendidikan Kian Menjamur

BULAN MEI tercatat banyak peristiwa. Pada bulan ini tepatnya tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari yang cukup penting dalam menggerakkan roda pendidikan. Pada tanggal dan hari itu, kemudian dikenal dengan "Hardiknas" (Hari Pendidikan Nasional). Dan pada bulan itu pula, bangsa Indonesia memperingati juga hari yang bersejarah, yaitu "Harkitnas" (Hari Kebangkitan Nasional). Memang, pada bulan itu di Jakarta maupun di berbagai daerah, sejumlah peristiwa-peristiwa penting lainnya cukup banyak. Namun, fokus kita kali ini adalah lebih menitik beratkan kepada hari pendidikan Nasional. Sebab, bagaimanapun juga hari yang kita peringati ini dan kemajuan dunia pendidikan yang menjamur seperti sekarang ini serta banyaknya orang menjadi pandai tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang telah tercipta selama ini.

Memang, hari-hari yang diperingati itu, merupakan bagian hari yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagi generasi muda, hari-hari itu mungkin hanya dikenal sebagai batas sejarah saja. Namun, kedalaman dan latar belakang, hingga hari itu diperingati serta makna akan hari nasional itu barang kali masih belum banyak yang mengetahui dan bahkan mendalami.

Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional itu memang tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebab, sebelum hari dan tanggal itu dicetuskan, bangsa Indonesia masih tertinggal dan terbelakang dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka. Maklum, pada hari sebelum itu bangsa kita masih dalam cengkeraman penjajah. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap penjajah tidak menginginkan jajahannya menjadi maju yang pada gilirannya nanti sulit untuk dibodohi.

Menyegarkan kembali nilai-nilai juang bangsa Indonesia

Dalam memperingati hari yang bersejarah, yaitu hari pendidikan nasional ini, menurut Basyuni Suryamihardja, ada tiga hal yang harus dipegang teguh. Pertama, menyegarkan kembali ingatan kita terhadap nilai-nilai juang dari bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebab, dengan belum bersatunya bangsa Indonesia, perjuangannya melawan penjajah yang dilakukan dengan mengangkat senjata belum membuahkan hasil. Melihat dari kenyataan yang ada, maka upaya menuju kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu melalui pendidikan itu merupakan salah satu cara yang ditempuh.

Kedua, dalam memperingati hari pendidikan nasional ini kita menyadari, bahwa kita telah tertinggal dengan bangsa-bangsa lain baik dalam bidang ilmu maupun teknologi dengan

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan

Digitized by Google

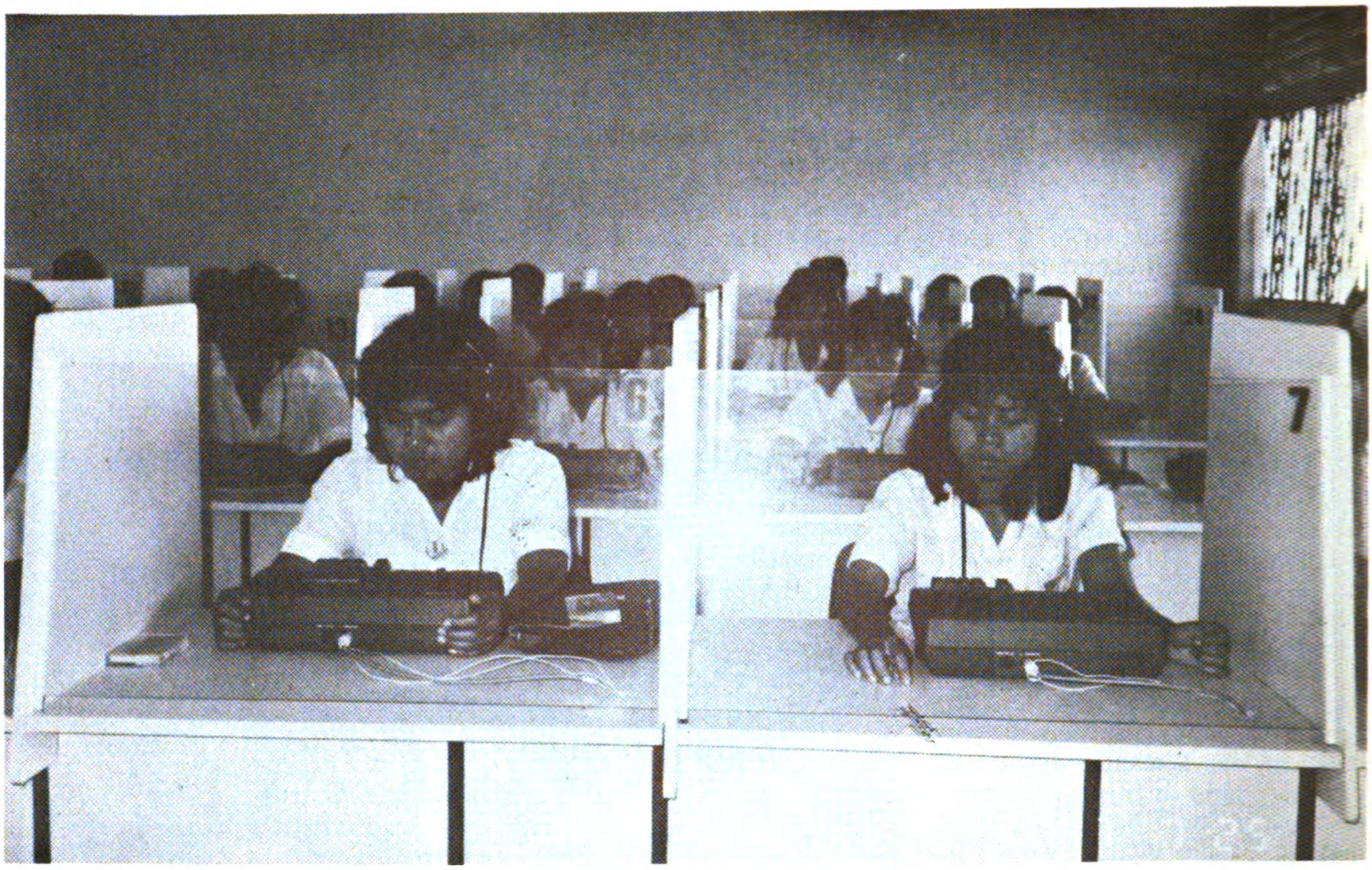

Menciptakan masyarakat wajib belajar

penjajah. Dan ketiga adalah untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali serta memperkokoh akan wawasan kebangsaan kita. Pada waktu — sebelum hari pendidikan nasional ini tercetus — wawasan kebangsaan kita masih belum banyak dirasakan. Sehingga perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita mudah dipecah-pecah. "Dan ini merupakan suatu tantangan bagi kita dalam menghadapi masa depan", ujar Basyuni.

Dari semua kegiatan di atas tidak lain adalah untuk mencapai satu tujuan yaitu Indonesia merdeka. Dan pada tahun 1945, angan-angan dan harapan yang dilakukan dengan perjuangan itu, akhirnya kesampaian juga. Dan hasil yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita dalam mewujudkan kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan akhir. Karena tujuan akhir dari bangsa Indonesia adalah terciptanya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Memang, dalam kurun waktu perjalanannya hingga sekarang ini, perjuangan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan harapan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Namun, kemajuan-kemajuan diberbagai bidang, baik ekonomi, politik dan bahkan pendidikan telah mulai nampak. Di bidang yang terakhir ini, kemajuannya cukup membangggakan. Sekolah-sekolah kini bahkan bagai jamur di musim hujan. Hampir disegala pelosok tanah air sudah ada pendidikan. Dan bahkan, terdapat kecenderungan bahwa sekarang ini bukan murid yang mencari sekolah. Akan tetapi sekolah yang banyak kekurangan murid. "Semua ini tidak terlepas dari political will dari pemerintah", ujar Basyuni.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam masa kemerdekaan jumlah siswa untuk tingkat pendidikan dasar tercatat 2.523.000 orang, kini dalam tahun 1987 telah mencapai 3.089.000 orang. Tingkat SMTP pada masa kemerdekaan berjumlah 90.000, kini menjadi 6.29.000 orang. Tingkat SLTA pada masa kemerdekaan tercatat 18.000 orang, kini mencapai 3.742.000 orang. Dan perguruan tinggi yang dahulunya hanya ada 6 kini telah mencapai 1000 buah.

Dalam era ini, yaitu perkembangan yang mengesankan dalam dunia pendidikan adalah telah dilaksanakannya "Wajah Belajar" untuk tingkat SD (Sekolah Dasar). Dengan dilaksanakan hal tersebut, nantinya diharapkan akan dapat menjadikan terciptanya masyarakat belajar, ujar Basyuni. Seperti diuraikannya, untuk dapat menciptakan kondisi yang demikian (wajib belajar) waktu yang dipersiapkan memang tidak singkat, yaitu telah 10 tahun lamanya. Sedangkan, hingga saat ini wajib belajar ini telah memasuki tahun keempat. Tepatnya, wajib belajar ini dilaksanakn mulai tanggal 2 Mei 1984.

Dan dalam era-era mendatang, wajib belajar ini akan lebih ditingkatkan. Dalam Pelita V, seperti yang sudah dicanangkan dan diamanatkan dalam GBHN, ditingkatkan lagi menjadi tingkat SMTP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama). Hal-hal tersebut di atas adalah merupakan salah satu upaya dari bangsa Indonesia untuk memajukan dunia pendidikan dan memacu kemajuan-kemajuan agar tidak tertinggal dengan negara lainnya.

Kemudian, kata Basyuni, dalam memperingati Hardiknas ini, perlu direnungkan kembali adalah masalah kualitatip. Sebab, seperti dikatakan banyak orang termasuk wakil-wakil kita di DPR, bahwa pendidikan secara kuantitatip telah terpenuhi. Untuk itu, masalah ke depan adalah bagaimana menjadikan manusia yang berkualitas. Dan dunia pendidikan dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat sentral. □ BM

Digitized by Google

Oleh: Drs. Noor Aseli Mansjah

In Memoriam 100 Tahun Ki Hajar Dewantoro

"Man Totet der Geist Nicht." (Orang tidak dapat mematahkan semangat) Freligrath.

Nama Suwardi Suryaningrat yang kemudian kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh Pahlawan Pergerakan Kemerdekaan Nasional yang gigih berjuang menentang politik kolonial Belanda. Di samping itu beliau juga menyandang gelar sebagai tokoh Pendidikan Nasional yang disegani dan ditakuti oleh pemerintah Belanda. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal (wafat) dalam usia 70 tahun, tepatnya pada tanggal 26 Mei 1959 di kota yang sama.

Mula-mula beliau belajar pada School tot Opleiding van Indlandsche Artsen (Stovia) selama 5 tahun. Akan tetapi beliau tidak dapat menamatkan pelajarannya di sekolah tersebut, kemudian menjadi wartawan. Beliau berkenalan dengan Dr. Douwes Dekker dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, bekerja bersama-sama dan kemudian mendirikan Indische Partij, pada tahun 1912 di Bandung. Perkumpulan ini merupakan partai politik yang pertama lahir di Indonesia, bercorak radikal dan nasionalistis, sehingga tidak disenangi oleh pemerintah Belanda. Karena tulisan beliau yang berjudul "Als ik eens Nederlander was", pada tanggal 6 September 1913, beliau ditangkap dan diasingkan ke Nederland. Selama 5 tahun di Negeri Belanda, beliau belajar menjadi guru dan sempat bertemu dengan tokoh-tokoh pendidikan modern yang terkenal pada waktu itu seperti Dr. Maria Montessori dan Jan Lighthart. Di samping itu beliau juga memperdalam pengetahuan dibidang kewartawanan.

Seusai Perang Dunia ke I, pada tanggal 5 September 1918, beliau kembali ke Indonesia dan bergabung dalam Nationale Indische Partij. Ternyata perkumpulan ini sulit menghimpun anggota-anggotanya karena kurang merakyat. Dari segi lain beliau melihat bahwa Pergerakan Kebangsaan yang sedang giat-giatnya menentang pemerintah kolonial Belanda, sulit berkembang karena ketiadaan massa rakyat yang terdidik (terpelajar). Beliau sadar bahwa Pergerakan Nasional memerlukan kaum intelek yang berjiwa kebangsaan (nasionalis). Dengan pendidikan kolonial Belanda yang hanya berorientasi pada kepentingan kaum penjajah semata-mata, hal ini tidak mungkin dapat dicapai. Untuk merintis pendirian lembaga pendidikan yang sesuai dengan jiwa/semangat kebangsaan, mula-mula beliau bekerja sebagai guru pada sekolah swasta Adi Dharma yang didirikan oleh kakaknya bernama Raden Mas Soeryopranoto, salah seorang tokoh Pergerakan Kebangsaan pada waktu itu. Dengan bantuan kakaknya dan rekan-rekan beliau, akhirnya beliau mendirikan "Nationaal Onderwijs Instituut

Ki Hajar Dewantoro

Pergerakan nasional memerlukan kaum intelek yang berjiwa kebangsaan.

Digitized by Google

Taman Siswa" pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Ciri khas Lembaga ini adalah bersifat Nasional. Jadi Perguruan Nasional Taman Siswa ini berstatus bukan hanya sekedar sebagai lembaga pendidikan formal semata-mata, akan tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk mencetak kader-kader Pergerakan Kebangsaan. Sejak itu beliau mulai mendidik calon-calon pahlawan kebangsaan yang diharapkan kelak dapat mengusir dan menghapuskan kaum penjajah di bumi Indonesia ini.

Taman Siswa dalam melakukan kegiatannya bersifat non kooperatif dan konfrontatif, adalah sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda pada waktu itu. Beliau berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat direncanakan dan ditentukan oleh bangsa penjajah. Pendidikan harus berkembang menurut kodrat alam bangsa Indonesia berdasarkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi dan harus merata keseluruh lapisan rakyat banyak, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kegiatan Lembaga Taman Siswa ini adalah Majelis Luhur, yaitu semacam Pengurus Besar. Segala usaha untuk melaksanakan kegiatan ini dibiayai sendiri. Oleh sebab itu Taman Siswa hidup dalam segala kesederhanaan. Pengelolaan organisasinya dititikberatkan pada rasa solidaritas, kekeluargaan dan gotong royong. Oleh sebab itu pula seluruh kegiatan kehidupan dilingkupan Taman Siswa diatur dan diselenggarakan berdasarkan kekeluargaan.

Sejak Lembaga Taman Siswa ini didirikan, mempunyai 7 azas. Salah satu di antaranya ialah ingin membentuk jiwa yang bebas dalam alam kemerdekaan tanpa paksaan, sesuai dengan bakat menurut kodratnya masing-masing. Oleh sebab itu sistem pendidikan yang dilaksanakan di Taman Siswa mempergunakan metode "among," dimana sipendidik (guru) harus "Tut wuri handayani", mengikuti sianak dari belakang sambil membimbing dan mengarahkannya sehingga sianak aktif dan mampu untuk hidup mandiri. Azas ini tetap dipertahankan hingga sekarang.

Pada umumnya ketujuh azas Taman Siswa tersebut dapat diterima, baik oleh masyarakat yang pada waktu itu diwakili oleh Persatuan Partai Politik Kebangsaan Indonesia.

Berdirinya Lembaga ini adalah sebagai hasil usaha rakyat dan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat, berpedoman pada azas Trisentra (Tripusat), yaitu: 1) Alam Keluarga, untuk mendidik budi pekerti dan tingkah laku sosial. 2) Alam Perguruan, sebagai balai wiyata untuk mencari dan memberi ilmu pengetahuan dan 3) Alam Pergerakan Pemuda, sebagai wadah untuk mengendalikan diri dan pembentukan watak. Jadi fungsi Perguruan disini adalah sebagai titik pusat kegiatan untuk mempersatukan ketiga sentra tersebut disamping fungsinya sebagai perantara antara guru, anak didik dan masyarakat.

Azas lainnya kita kenal pula dengan istilah Tricon yaitu: 1) Continue, menjaga keseimbangan dengan alam kebudayaan sendiri. 2) Convergent, bertemunya bermacam-macam aliran dalam satu wadah untuk mencapai tujuan yang sama, akhirnya 3) Concentris, bersatu dalam alam kebudayaan yang universil. Dengan azas Tricon inilah memungkinkan berkembangnya Taman Siswa keseluruh penjuru tanah air.

Tumbuh dan berkembangnya kegiatan Lembaga Pendidikan ini menimbulkan reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang beranggapan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh lembaga tersebut tidak selayaknya diselenggarakan oleh orang-orang Indonesia.

Taman Siswa sebagai Lembaga Pendidikan Nasional dalam jaman kolonial Belanda berkali-kali mendapat tantangan dari pemerintah Belanda. Klimaknya yaitu pada tanggal 1 Oktober 1932, ketika pemerintah Belanda dibawah Gubernur Jenderal de Jonge, mengeluarkan Wildescholen Ordonantie yang bertujuan untuk memberantas sekolah-sekolah liar, namun Taman Siswa tidak mau melepaskan azas-azasnya dan tetap bertahan pada prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian larangan mengajar dijatuhkan kepada sejumlah guru-guru Taman Siswa dengan alasan yang dicari-cari dan tidak rasionil. Alasan yang sebenarnya adalah bahwa pemerintah Belanda takut bertambahnya golongan terpelajar (intelek) yang berjiwa nasional (kebangsaan).

Membentuk jiwa yang bebas dalam alam kemerdekaan

Hal ini jelas merupakan ancaman terhadap keselamatan, integritas dan kelangsungan hidup pemerintah kolonial Belanda. Untuk ini Perguruan Taman Siswa atau pendidikan yang sejenisnya harus dilarang dan jika perlu dibubarkan. Ki Hajar Dewantoro sendiri tampil kedepan untuk membela Taman Siswa. Ordonansi ini jelas perkosaan terhadap hak-hak masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan rakyat dimana pemerintah

Digitized by Google

Belanda sendiri tidak mampu atau tidak berhasrat untuk melaksanakan pendidikan yang merata keseluruh lapisan masyarakat. Ki Hajar Dewantoro mengeluarkan pernyataan yang mengancam pemerintah Belanda dengan gerakan non violence, gerakan tanpa kekerasan yang menjunjung tinggi kebenaran dengan melakukan pembangkangan umum (civil disobedience). Ternyata pernyataan ini didukung oleh segenap lapisan masyarakat, seluruh partai politik dan organisasi massa rakyat. Pada tahun 1933 dalam sidang Volkstraat yang anggota-anggota pro terhadap pernyataan ini menentang dan memprotes serta menuntut agar ordonansi tersebut dicabut. Untuk menghindari meluapnya aksi massa yang lebih hebat lagi, pemerintah Belanda tidak berani mengambil resiko, akhirnya ordonansi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Gubernur Jenderal de Jonge sendiri. Kemudian Taman Siswa diperbolehkan menjalankan kegiatannya kembali. Dengan demikian sendi-sendi dan integritas Taman Siswa tetap dapat dipertahankan sehingga lebih meningkatkan rasa kesadaran perjuangan rakyat Indonesia untuk menuntut kemerdekaannya.

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, strategi perjuangan Taman Siswa telah mengalami perubahan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yaitu bersikap kooperatif, konsultatif dan korektif.

Perhatian luar negeri terhadap Taman Siswa ini cukup besar, terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh pendidikan dari luar negeri mengunjungi Lembaga ini, antara lain seperti; Rabindranath Tagore (India), Prof. Pandia (Amerika Latin), Prof. Bunche (AS), Prof. Gunning (Nederland), Jan Lighthart (Perancis) dan tokoh-tokoh pendidikan dari Australia, Jepang, Swiss serta Palestina. Pandit J.Nehru pernah pula mengunjungi Lembaga ini dan memberikan sumbangan sebesar 5.000 gulden.

Nama Ki Hajar Dewantoro baru dipakai sewaktu beliau berusia 40 tahun, yaitu suatu usia yang mengandung kematangan untuk memikul tanggung jawab moril.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama. Beliaulah yang mula-mula meletakkan dasar sistem Pendidikan Nasional bangsa Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Ini tercermin dalam UUD 1945, pasal 31 yang menetapkan bahwa ayat (1) Setiap warganegara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal ini terkandung maksud adanya kewajiban belajar dan pendidikan yang dilaksanakan harus berwawasan kebangsaan serta segala sesuatunya mengandung nilai kulturil, sehingga pasal 32 UUD 1945 menetapkan dengan singkat bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia" sedangkan dalam pasal 36 menetapkan bahwa "Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia". Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran di negara kita harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bersifat demokratis dan merata bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

Melaksanakan pendidikan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat

Perlu pula pembaca ketahui bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 telah mencantumkan berbagai aspek yang essensiel dari konsep pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantoro.

Oleh karena jasa-jasa beliau, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam bidang pendidikan nasional bangsa kita, berturut-turut beliau telah dianugerahi tanda-tanda jasa sebagai berikut;

Pada tanggal 8 Maret 1955, ditetapkan oleh pemerintah sebagai Perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia.

Tanggal 19 Desember 1956, dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Kebudayaan oleh Universitas Negeri Gajah Mada.

Tanggal 18 Nopember 1959, diangkat oleh Presiden R.I. sebagai Pahlawan Nasional.

Tanggal 16 Desember 1959, Pemerintah memutuskan bahwa hari lahir beliau tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960, dianugerahi oleh Presiden R.I. Bintang Mahaputera Tingkat I dan pada tanggal 20 Mei 1961, menerima tanda kehormatan berupa Satya Lencana Kemerdekaan.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantoro sepanjang perjalanan sejarah perjuangan hidupnya terbukti telah dapat menyumbangkan dharma baktinya kepada Nusa dan Bangsa, baik dalam perjuangan merebut kemerdekaan maupun dalam mengisi kemerdekaan pada era pembangunan negara kita dewasa ini sesuai dengan cita-cita beliau agar bangsa kita kelak menjadi bangsa yang besar, hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya yang telah maju di dunia ini.

Kiranya tidak berlebihan jika keberhasilan reputasi kepemimpinan selama hidup beliau patut dijadikan contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Akhirnya tulisan singkat ini saya sudahi dengan motto; "Gros ist ein Volk, das sein Helden ehren kann", Hanya Bangsa yang besar yang dapat menghargai jasa-jasa pahlawannya.□

Digitized by Google

Menyiapkan Kader Unggul

Ide Menhankam LB Moerdani untuk mendirikan sekolah yang memadukan antara wawasan kebudayaan Ki Hadjar Dewantara dengan wawasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman bukan impian lagi. Kenyataan ini ditandai dengan penandatanganan piagam kerjasama antara Taman Siswa dan ABRI, yang dilakukan oleh Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Ki Suratman dan Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno 20 Mei lalu di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut rencana pembentukan Sekolah Taman Madya Taruna Nusantara yang pernah dicetuskan LB Moerdani saat memberikan ceramah di Pendopo Agung Taman Siswa Tahun lalu. Bentuk sekolah baru ini adalah setingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebagai upaya menyiapkan kader-kader 'unggul' bangsa yang kelak diharapkan dapat menjadi pemimpin bangsa yang bermoral, berjiwa Pancasila dan memiliki kualitas handal sebagai kekuatan penerus sejarah.

Try Sutrisno dalam kesempatan ini menjelaskan, tantangan yang dihadapi pemuda dan generasi penerus masa kini bukan lagi bersifat revolusi, perombakan tata nilai serta pertarungan paham ideologi. Namun, tantangannya adalah mengukuhkan dan memantapkan identitas, tata nilai dan sistem nasional yang telah dimiliki bangsa Indonesia sekaligus mempersiapkan secara matang untuk menghadapi berbagai tantangan di penghujung abad ke-20 dan di awal abad ke-21. Karena revolusi, perombakan tata nilai dan pertarungan paham ideologi itu telah cukup dilakukan dan diberikan bangsa Indonesia. Dengan demikian, dinamisasi pembangunan nasional wajib terus kita upayakan tanpa mengabaikan kepekaan kita terhadap kesenjangan sebagai eksesnya yang dalam keadaan tertentu dapat berkembang menjadi kerawanan sosial.

"Penandatanganan kerjasama ini berarti telah diletakkan sendi-sendi dasar kesinambungan pembangunan, khususnya dalam rangka membangun sumber daya manusia berkualitas sebagai salah satu kekuatan nasional terpenting dalam mewujudkan cita-cita nasional. Bahkan filosofi pendirian sekolah ini bukan filosofi iri atau ingin mengesampingkan orang lain, tetapi karena keinginan untuk mengemban cita-cita untuk bangsa. Sehingga ABRI harus optimis dan pendekatannya pun adalah gotong royong karena masalah pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab orangtua, sekolah dan masyarakat, tapi termasuk ABRI," tegas Try Sutrisno.

Berkeyakinan Tinggi dan Tebal

LB Moerdani pencetus ide sekolah ini mengakui, ABRI dan Taman Siswa benar-benar mempunyai rasa keyakinan tinggi dan tebal bahwa para lulusan dari Sekolah Taman Madya Taruna Nusantara atau lembaga pendidikan ini akan diperlukan dan bukan karena mereka lain dari yang lain. Mereka dididik untuk melakukan dan tidak melakukan hal-hal tertentu sehingga diharapkan dapat dihadirkan menjelang akhir abad dan menjelang permulaan abad mendatang suatu kelompok pemuda dan pemudi dengan idealisme tinggi, rasa cinta tanah air yang besar, kemampuan memadai dan pemikiran jauh ke depan di samping hasil-hasil dari lembaga-lembaga pendidikan lain, yang pasti sudah berusaha untuk menyumbangkan hal-hal yang sama.

Di Balai Persatuan Taman Siswa yang diliputi suasana kegembiraan atas terwujudnya gagasannya, menhankam tampil penuh semangat dalam memberikan sambutan. Dalam sambutannya Menhankam mengatakan kurun waktu yang harus ditunggu adalah sekitar 10 sampai 15 tahun mendatang, sebelum para lulusan ditampilkan secara nyata di masyarakat dan masih diperlukan ketelitian, konsistensi serta pemeliharaan mutu yang tidak menurun tapi justru meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan kriteria keberhasilan Sekolah Taman Madya Taruna Nusantara ini antara lain dapat diukur dari ada tidaknya pendaftar dan bisa tidaknya diperoleh guru-guru bermutu. Juga, pembentukan sekolah ini sama sekali tidak untuk menyaingi dan meniadakan sekolah-sekolah yang sudah ada sekaligus bukan sebagai sekolah yang bersifat eksklusif dan elitis, karena yang masuk itu adalah mereka yang lulus dari ujian. Setelah lulus pun yang bersangkutan seperti lulusan SMA memiliki kebebasan untuk melanjutkan ke universitas, akademi militer atau bekerja — itu terserah mereka. Bila mereka nantinya memilih untuk melanjutkan ke akademi militer, maka tidak berarti akan diistimewakan dan tetap diharuskan mengikuti tes sebagai saringan.

"ABRI dan Taman Siswa memilih jenjang pendidikan setingkat SMA ini karena usia siswa SMA disebutnya formative year, yaitu masa masih bisa dipengaruhi hal-hal yang bersifat baik maupun jelek. Oleh karena itu, siswa sekolah ini disamping menerima pelajaran akademis juga akan diasramakan dengan cara hidup teratur," tutur Benny Moerdani.

Selain itu Benny Moerdani mengharapkan agar lembaga pendidikan ini dapat berkembang dan tumbuh serta menciptakan, menyumbangkan tenaga-tenaga yang berwawasan luas (nasional) dan tidak mengikuti satu wawasan sempit seperti diperkirakan akan dituntut di abad ke-21 mendatang.

Sehubungan dengan penandatanganan ini Ki Suratman berharap agar, kerjasama Taman Siswa dengan ABRI yang merupakan lembaran sejarah baru dalam lingkungan Taman Siswa terutama berkaitan dengan jiwa dan semangat Hari Kebangkitan Nasional serta 100 tahun Ki Hadjar Dewantara, memenuhi sasaran yang dituju dan bisa menemukan pendidikan alternatif yang kelak dapat disumbangkan bagi kemajuan nusa dan bangsa.

Adapun piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno, Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa Ki Suratman, Menhankam LB Moerdani dan sesepuh Taman siswa Ki Sugondo Kartoprodjo, pelaksanaannya akan dimulai dalam tahun ajaran 1990-1991. Dan pada tahun pertama, calon siswa wanita belum diterima. Sedangkan dalam acara ini hadir pula Ketua Lembaga Pengkajian Taman Siswa Ki Dr. AMW Pranarka, Kapolri Jenderal (POL) Drs. M. Sanoesi, Kasospol ABRI Mayjen TNI Harsudiono Hartas dan para undangan yang lain. □ DT

Digitized by Google

Iuran Anggota Golkar

Tidak terasa Munas IV GOLKAR sudah berjalan tujuh bulan. Dalam Munas yang berlangsung di Jakarta itu selain menghasilkan pengurus baru masa bhakti 1988-1993 juga telah menetapkan AD/ART. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam Munas tersebut adalah ditetapkan iuran untuk anggota GOLKAR.

Untuk menjalankan apa yang diamanatkan Munas itu, akhir Mei lalu, DPP GOLKAR mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis). Dalam rapat yang berlangsung selama dua hari di DPP GOLKAR itu dihadiri 60 orang peserta yang terdiri dari bendaharawan GOLKAR dan ketua Panca Bhakti GOLKAR dari seluruh Indonesia. Di dalamnya hadir juga Ketua Umum GOLKAR Wahono, Rachmat Witoelar (Sekjen), dan bendahara antara lain; Eric Samola dan Nyonya Tati Sumiati Darsoyo.

Rapat teknis yang berjalan tertib dan lancar itu selain mendengarkan ceramah dan pengarahan dari Ketua Umum juga mendapat penjelasan-penjelasan secara teknis dari Eric Samola. Setelah itu, peserta rapat kemudian dibagi dalam dua kelompok. Kelompok satu mendiskusikan tentang iuran anggota. Dan kelompok yang satunya lagi mendiskusikan tentang harta kekayaan, pengelolaan dan mendiskusikan tentang Yayasan Panca Bhakti serta kegiatan usahanya.

Dalam mendiskusikan masalah iuran anggota, kelompok tersebut berkesimpulan, bahwa iuran itu sebagai sumber dan organisasi harus dilaksanakan. Karena usaha ini adalah amanat dari Anggaran Dasar. Namun dalam pelaksanaannya ada kebijaksanaan yang memperhatikan kemampuan anggota. Untuk itu, dasar keseimbangan dan azas kekeluargaan yang bergotong royong perlu dipertimbangkan. Anggota yang kuat ekonominya ikut memikul beban anggota yang lemah ekonominya.

Menyinggung tentang iuran anggota ini, seperti yang dikatakan Ketua Umum dalam awal sambutannya mengatakan, menarik iuran anggota yang jumlahnya seratus rupiah ini akan mengeluarkan banyak energi. Namun, katanya kalau hal ini ditilik dari segi kesadaran berorganisasi, iuran sebanyak itu dapat memupuk dan rasa memiliki organisasi dan dapat mengembangkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota GOLKAR.

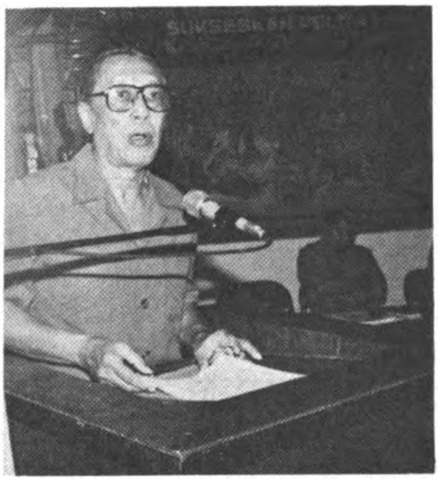

Wahono

Sejalan dengan itu, lanjut Ketua Umum, sukses tidaknya program kegiatan GOLKAR memang harus didukung dengan dana yang cukup memadai. Dan dana tersebut harus dikelola dengan jujur, teliti, tertib dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dana dan sarana organisasi dapat benar-benar berhasil guna dan berdaya guna. Bagaimanapun juga, tegas Wahono, sukses dari pelaksanaan organisasi antara lain akan dipengaruhi oleh dukungan logistik.

Untuk itu, kader-kader yang telah dipercaya untuk mengelola peranan dana dan sarana organisasi GOLKAR, harus jujur, teliti, tertib, bijaksana dan bertanggung jawab. "Kriteria-kriteria tersebut harus dimiliki oleh setiap bendaharawan dan Ketua Yayasan Panca Bhakti", ujar Ketua Umum.

Menyinggung tentang kekayaan organisasi, Wahono menghimbau kepada seluruh jajaran yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat mengelolanya dan bertanggung jawab. Sedangkan mengenai Yayasan Panca Bhakti, yang memperoleh pinjaman dari DPP GOLKAR tanpa bunga diharapkan dapat dikelola oleh DPD dengan sebaik-baiknya, serta dikembangkan yang diharapkan nantinya akan dapat membantu upaya meman-

Eric Samola

Iuran anggota dapat memupuk dan melahirkan rasa memiliki organisasi

Digitized by Google

dirikan GOLKAR daerah dibidang keuangan.

Pengelolaan Keuangan

Anggaran Dasar Golongan Karya menegaskan bahwa keuangan Organisasi diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.

Perolehan dana ini dengan berbagai usaha yang akan dilaksanakan akan bertumpu pada doktrin Golongan Karya dan tetap mencerminkan hakekat karya dan kekaryaan.

Ini berarti bahwa azas keseimbangan, azas kekeluargaan dan gotong royong akan senantiasa mewarnai usaha perolehan dana di lingkungan Golongan Karya dimana yang kuat membantu yang lemah sehingga dapat tercipta keseimbangan.

menunjang konsolidasi organisasi yang kelanjutannya akan ikut pula mewujudkan Sukses Konsolidasi, sebagai salah satu dari Tri Sukses Golkar.

Program Umum menggariskan bahwa Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang penggalian dan pendayagunaan dana adalah: Melakukan pemungutan iuran anggota secara lebih intensif dan tertib; Peningkatan usaha penggalian dana dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; Peningkatan pengadministrasian dan pengelolaan kekayaan organisasi dan pendayagunaan secara tertib serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pengarahan Ketua Umum, telah menggambarkan betapa pentingnya penataan kebendaharaan ini, yang perlu dikonsultasikan untuk memperoleh gerak langkah yang sama diantara semua tingkatan organisasi. Dalam materi penjelasan ini akan diusahakan untuk memperoleh pandangan yang sama tentang usaha-usaha melakukan pemungutan iuran anggota secara lebih intensif dan tertib, yang dalam hal ini kita melihat sebagai sumber dana organisasi.

Penataan dan pengelolaan dana yang rapih menunjang konsolidasi organisasi

Usaha tersebut didasari pada sikap saling memperhatikan dan saling membantu sebagaimana layaknya suatu keluarga besar yang bergotong royong.

Usaha dana tidak dapat dipisahkan dari usaha konsolidasi Organisasi, karena dengan terkonsolidasinya sektor dana yang rapih akan menunjang usaha konsolidasi sektor lainnya dengan lebih mantap. Karena itu MUNAS IV GOLKAR menetapkan Program Umum yang pada bagian kedua Sukses Konsolidasi, diuraikan pula usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang penggalian dan pendayagunaan dana. Ini berarti bahwa penataan dan pengelolaan dana yang rapih akan ikut

Akan dijabarkan bersama pengertian intensif dan tertib menurut situasi dan kondisi daerah masing-masing. Artinya prinsip iuran sebagai sumber dana organisasi harus dilaksanakan karena usaha ini adalah amanat Anggaran Dasar. Namun dalam pelaksanaannya ada kebijakan yang memperhatikan kemampuan anggota. Untuk itu dasar keseimbangan dan azas kekeluargaan yang bergotong royong perlu dipertimbangkan. Anggota yang kuat ekonominya ikut memikul beban anggota yang lemah ekonominya.

Disamping itu direncanakan dan dilaksanakan pula usaha penggalian dana dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat. Pada periode 1983-1988, GOLKAR telah mendirikan Yayasan Panca Bhakti yang telah terbentuk hampir diseluruh DPD Tk. I.

Bagian lain yang harus diatur dalam pengelolaan dana adalah penataan administrasi dan harta milik Organisasi.

Iuran sebagai Sumber Dana Organisasi

Dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya No. Kep-006/DP/Golkar/11/1983 tentang iuran anggota, terkandung pengertian bahwa iuran anggota tidak hanya sebagai kewajiban setiap anggota GOLKAR tetapi juga sebagai Legitimasi bahwa dia adalah kader GOLKAR yang bertanggung jawab.

Karena itu penarikan iuran anggota ini janganlah dilihat semata-mata secara material berupa uang sebesar Rp. 100,- per bulan, tetapi juga dilihat sebagai tanda keterikatan terhadap organisasi.

Memang loyalitas organisasi tidak hanya diukur dari pembayaran iuran ini, namun paling tidak kemampuan menarik iuran anggota dan kesediaan para anggota untuk membayar iuran adalah merupakan pertanda bagi kehidupan organisasi itu sendiri.

Secara teoritis, pada dasarnya suatu organisasi sosial politik apapun namanya dan dimanapun juga, hidup dari dukungan anggotanya, baik iuran maupun sumbangan-sumbangan lainnya.

Itulah sebabnya maka pengenaan dan penarikan iuran anggota ini, sangat penting artinya dan bahkan sangat fundamental untuk menunjukkan bahwa GOLKAR adalah organisasi yang benar-benar hidup dari kemampuan dan dari daya usahanya sendiri.

Mekanisme Pengumpulan Iuran

Mekanisme pengumpulan iuran anggota ini sebagai mana yang diatur oleh pasal 3 keputusan DPP GOLKAR No. Kep-006/DPP/GOLKAR/11/1983 adalah sebagai berikut:

Pemungutan iuran Anggota/Calon

Digitized by Google

Anggota GOLKAR dapat dilakukan secara kolektif pada suatu unit kerja.

Pemungutan iuran dilakukan Anggota GOLKAR yang ditunjuk di unit kerja yang bersangkutan.

Penunjukan Anggota GOLKAR dilakukan oleh DPP GOLKAR Tingkat II yang bersangkutan.

Iuran yang terkumpul disetorkan oleh Anggota GOLKAR yang ditunjuk tersebut kepada DPP GOLKAR Tingkat II yang bersangkutan sekali sebulan.

Keputusan ini berarti, pengumpulan dan pemungutan iuran anggota dapat dilakukan tidak hanya secara orang per orang tetapi juga dapat dilakukan secara kolektip.

Hal ini dikandung maksud agar azas keseimbangan dan kekeluargaan yang bergotong royong itu dapat tercermin didalam pemungutan iuran anggota.

Selanjutnya pemungutan iuran itu dilakukan oleh anggota GOLKAR yang ditunjuk oleh DPD GOLKAR Tk. II untuk memungut pada unit-unit kerja yang bersangkutan. Iuran yang sudah terkumpul tersebut harus disetor kepada Bendahara DPD II yang kemudian mengatur alokasi pembagian dan penggunaan uang tersebut.

Kesemua ini berarti, potensi keuangan kekayaan yang bersumber pada iuran anggota berada pada DPD Tk. II. Potensi inilah yang harus diadakan dan dikelola secara baik.

Perlu kita sadari bahwa sumber keuangan yang berasal dari iuran anggota ini dilegalisasi secara konstitusional didalam Anggaran Dasar GOLKAR dan merupakan sumber dana tetap bagi organisasi. Sedangkan sumber lainnya seperti sumbangan para donateur, bantuan lain-lain adalah pendapatan yang variabel, artinya pendapatan yang jumlahnya tergantung dari kesukarelaan penyumbang.

Praktek pemungutan iuran ini tidak semudah yang kita bayangkan sekarang. Berbagai hambatan yang kita hadapi seperti: Tingkat kemajuan ekonomi anggota yang berbeda-beda; Kesadaran berorganisasi yang tidak merata; Mekanisme kerja yang belum tertata rapih.

Sebagai aktifis/kader/tokoh GOLKAR kita harus secara terus menerus memberikan pengertian dan keyakinan kepada anggota akan arti dan pentingnya iuran bagi kehidupan organisasi.

Anggota GOLKAR yang mampu dapat mengadopsi pembayaran iuran

Kita harus memberikan contoh dan tauladan sebagai pembayar iuran yang setia. Ini harus ditunjukkan dan dimulai dari pengurus tingkat pusat hingga yang di pedesaan, para Gubernur, Bupati dan Kader-kader GOLKAR di DPR Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.

Kebijakan Pemungutan Iuran

Pemungutan iuran anggota oleh DPD Tk. II merupakan tugas konstitusional. Namun disadari bahwa tidak semua anggota GOLKAR dapat melaksanakan pembayaran iuran ini disebabkan tingkat ekonomi mereka yang berbeda-beda. Karena itu harus dikaji kemampuan ekonomi masing-masing anggota secara cermat baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan agar pemungutan iuran tidak menimbulkan dampak psychologis yang merugikan perjuangan GOLKAR.

Diantara anggota-anggota GOLKAR terdapat anggota-anggota yang berpotensi dan dapat membayar iurannya lebih besar dari apa yang ditetapkan. Bagi anggota GOLKAR yang potensial ini diharapkan dapat "menanggung" atau "mengadopsi" pembayaran iuran dari sejumlah anggota lain yang tidak mampu. Misalnya seorang anggota GOLKAR yang berpotensi dapat membayar iuran sebesar Rp. 10.000,- per bulan. Ini berarti telah dapat membayarkan iuran untuk 100 anggota termasuk dirinya sendiri.

Kebijakan ini merupakan wujud dari azas kebersamaan dan kekeluargaan yang bergotong royong. Dapat juga dilaksanakan pendekatan kolektif pada satu unit kerja dimana pada unit kerja tersebut terdapat seorang petugas yang dipercaya untuk memungut iuran. Mekanisme pemungutan iuran ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga pola saling membantu dapat ditumbuhkan dalam unit kerja ini.

Pemungutan iuran perlu diwujudkan secara vertikal berdasarkan jenjang organisasi. Peraturan organisasi ditentukan pula kewajiban-kewajiban pemungutan iuran oleh DPD Tk. I dan DPP.

Secara keseluruhan dana dari iuran anggota GOLKAR ini diatur menurut perimbangan: 75% (tujuhpuluh lima persen) bagi DPD GOLKAR Tingkat II yang bersangkutan; 20% (duapuluh persen) bagi DPD GOLKAR Tingkat I yang bersangkutan; 5% (lima persen) bagi DPP GOLKAR.

Dari hasil pengumpulan iuran inilah minimal kegiatan rutin organisasi diseluruh DPD Tingkat II, Tingkat I dan DPP GOLKAR dapat dipenuhi. Sedangkan biaya program dapat dibiayai dari sumber dana lainnya seperti pembayaran donateur, hasil Yayasan Panca Bhakti, bantuan lain-lainnya. ☐

(wt)

Digitized by Google

Wahono Ber-Halal Bi Halal Ke Daerah Kebanggaan Golkar

Wahono dialog dalam temu wicara dengan anggota GOLKAR

Masih dalam suasana Lebaran, pertengahan bulan Mei lalu Ketua Umum DPP Golkar Wahono, telah berkesempatan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, yaitu daerah yang menjadi kebanggaan Golkar, di daerah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, disana Golkar selalu memperoleh kemenangan dalam setiap pemilu diatas 90 persen dan bahkan di Propinsi Sulawesi Tenggara pemilu 1987 yang lalu mampu memperoleh suara 97 persen lebih.

Selama tiga hari — 14 sampai dengan 16 Mei — Ketua Umum DPP Golkar mengunjungi daerah dimana Golkar hampir memperoleh 100 persen suara dan bahkan memang memperoleh 100 persen suara. Disana Ketua Umum mengadakan temu wicara dan berdialog langsung dengan apa yang dinamakan kelompok diskusi 20 di desa Ranomeeto. Apa resepnya hingga dapat memperoleh suara yang tidak saja mutlak itu?. Keberhasilan Golkar meraih kemenangan di daerah tersebut resepnya adalah, ada hubungannya dengan keberhasilan pembangunan dengan konsep "Gersamata" (Gerakan Desa Makmur Merata). Banyak desa dan Kecamatan yang memilih Golkar di atas angka 90 persen bahkan ada yang 100 persen, ujar Gubernur Sultra Ir. H. Alala yang saat itu mendampingi Ketua Umum Golkar. Dan

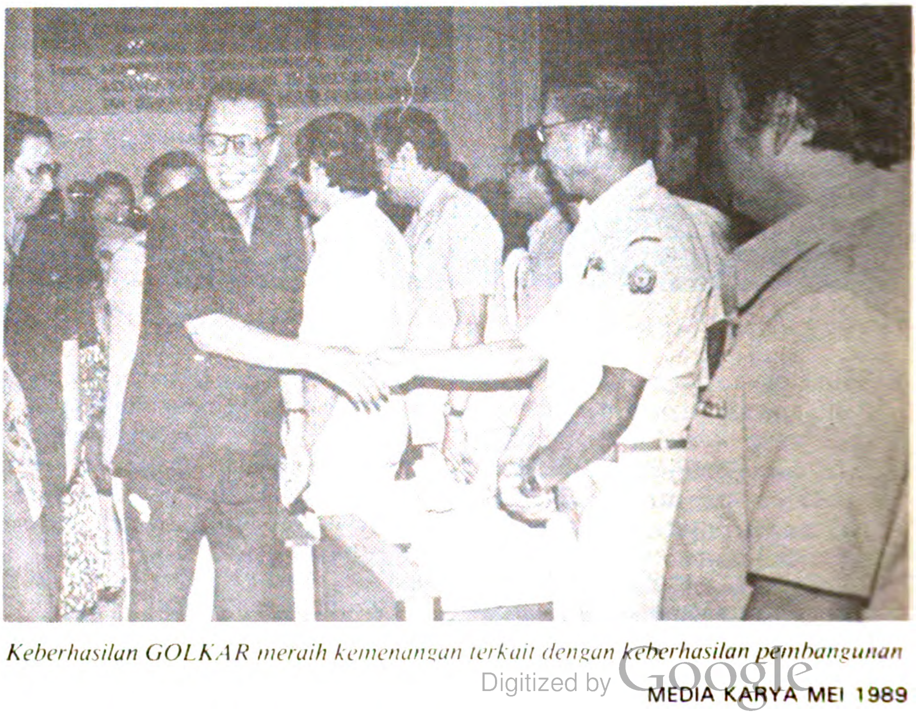

Keberhasilan GOLKAR meraih kemenangan terkait dengan keberhasilan pembangunan

Digitized by Google

pernyataan Gubernur tersebut mendapat dukungan Ketua DPD Golkar Tingkat I A. Nadjib Junus, bahwa kemenangan Golkar di daerah tersebut ada kaitannya dengan keberhasilan pembangunan yang telah dinikmati masyarakat setempat, katanya membenarkan.

Pelaksanaan Gersamata telah dicapai dengan berbagai kesuksesan yang cukup positif, kata Gubernur Alala, ini berkat adanya peranan cukup besar yang disumbangkan oleh Golkar di daerah ini, maka dalam memasuki pelaksanaan Gersamata tahap II yang akan berlangsung hingga lima tahun mendatang, Gubernur mengharapkan partisipasi aktif Golkar yang telah baik tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga segala program daerah yang juga dapat dikatakan adalah programnya Golkar dapat disukseskan bersama-sama.

Partisipasi aktif GOLKAR perlu ditingkatkan lagi

Dalam kesempatan itu dilaporkan pula oleh Gubernur kepada Wahono yang dalam kedudukannya juga sebagai Irjenbang itu, bahwa pertumbuhan ekonomi daerahnya yang semula ditargetkan 5% pada akhir Repelita IV ternyata dapat dicapai 7,4%. Demikian juga dilaporkan tentang peningkatan pencapaian status Desa Swasembada sebesar 12,12% setahun, dimana angka tersebut merupakan prosentase tertinggi dalam kurun waktu Pelita IV yang dicapai Sultra diatas realisasi pencapaian desa-swasembada secara nasional sampai dengan akhir Repelita IV. Ini memberikan indikasi bahwa dalam kurun waktu Pelita V di Sultra dapat diwujudkan desa-desa swasembada, desa-desa yang mandiri dan desa-desa Pancasila dan desa-desa tinggal landas di seluruh wilayah Sultra, mengingat jumlah desa swasembada saat ini di Sultra seluruhnya telah mencapai 75%, ujar Alala penuh optimis.

Mewujudkan cita-cita GOLKAR tetap konsekuen

Dalam acara itu, Wahono dalam pengarahannya menekankan kepada para kader Golkar agar dalam mewujudkan cita-cita Golkar tetap konsekwen. Yaitu memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil makmur, menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Kunjungan kerja Ketua Umum DPP Golkar Wahono ke daerah tersebut didampingi Ny. Wahono, Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar beserta ny Erna Witoelar, dan fungsionaris DPP Golkar lainnya yang terhitung baru pertama kalinya semenjak ia memperoleh kepercayaan Munas IV Golkar delapan bulan yang lalu untuk memimpin organisasi terbesar di tanah air ini.

Pada kesempatan acara pertemuan dan silaturrahmi dengan Keluarga Besar Golkar di kedua daerah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang sekaligus dipergunakan sebagai halal bi halal itu, Ketua Umum Golkar Wahono menyampaikan sejumlah

Digitized by Google

penggarisan penting mengenai pelaksanaan program Tri Sukses Golkar kedua, serta menyampaikan beberapa pernyataan, diantaranya tentang Konsensus Nasional masalah Suksesi Kepemimpinan Nasional mendatang, khususnya yang menyangkut soal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang akhir-akhir ini beritanya mencuat kepermukaan melalui media massa.

Tentang masalah ini Wahono berpendapat "masalah ini tidaklah menjadi masalah baru", karena sistim dan mekanismenya sudah ada, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh dan dalam Sidang Umum MPR hasil pemilu. Oleh karenanya Golkar berpendapat, bahwa prosedur pemilihan itu harus tetap berlandaskan pada konstitusi yang ada. Jadi MPR lah yang mempunyai wewenang untuk itu, "bukan lembaga lain", kata Ketua Umum seraya menunjuk TAP II/MPR/1973 yang menyatakan bahwa calon-calon Presiden diajukan oleh Fraksi-fraksi di MPR, "kalau calonnya tunggal", cukup disahkan, tidak perlu dipilih melalui pemungutan suara. "Apabila calonnya lebih dari satu", disitu mekanismenya sudah diatur, yaitu mengupayakan sejauh mungkin untuk mencari mufakat lewat musyawarah dan apabila sudah tidak dapat dihindarkan maka dilaksanakan dengan pemungutan suara seperti yang digariskan dalam UUD 1945, kata Ketua Umum tegas.

Menghilangkan rasa takut dan bicara yang benar

Lain dari itu, masih dalam kesempatan tersebut Ketua Umum berharap dan sekaligus menyerukan kepada kader-kader Golkar dimana ia mengabdi, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif, di lembaga pengabdiannya harus bekerja keras dan menghilangkan rasa takut; mereka harus berani menyatakan yang benar, serta berani menyatakan salah terhadap sesuatu yang memang salah. Golkar diharapkan mampu menumbuhkan iklim dan budaya terus terang demi suksesnya pembangunan bangsa. Ia berharap agar segenap kader Golkar yang menjabat sebagai eksekutif melaksanakan misinya secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan panca krida kabinet pembangunan V yang pada dasarnya mendukung cita-cita bangsa. Tapi Golkar juga harus tetap waspada karena tantangan masih banyak, antara lain karena makin meningkatnya tuntutan masyarakat secara kualitatif. Adalah tanggung jawab Golkar untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut.

Karenanya, FKP dalam melaksanakan tugasnya untuk mengusahakan agar lebih berbobot dan memfungsikan dirinya dengan baik dalam melaksanakan tugas. Dan dalam melaksanakan tugasnya itu agar selalu dapat sinkron dengan program-program dari pemerintah. Untuk itu menurut Wahono, perlu diintensifkan forum-forum konsultasi dengan kader-kader Golkar yang berada di bidang eksekutif. Dengan demikian FKP dalam memberikan masukan dapat sebaik-baiknya mencanangkan suaranya dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Hal ini merupakan kebutuhan mutlak untuk pembinaan komunikasi dan sinkronisasi dengan jalur-jalur Keluarga Besar Golkar agar dapat sejalan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pada gilirannya kita akan terus bergerak maju dan mengembangkan diri bukan saja sebagai kekuatan sosial politik yang tangguh untuk dirinya sendiri, tapi juga dapat melaksanakan tugas Golkar sebagai pelopor dan pembaharu untuk menyongsong budaya politik baru seperti yang sudah sering dicanangkan. "Memang organisasi ini tidak hanya sebagai pelaksana penyalur aspirasi melainkan juga mengadakan pembaharuan," tegasnya.

Berbicara mengenai Tri Sukses Golkar yang terdiri dari Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita V dan Sukses Pemilu 1992, yang merupakan inti dari Program Umum Golkar untuk masa bhakti 1988-1993, Ketua Umum memaparkan secara garis besarnya, yang pada pokoknya Tri Sukses Golkar yang kedua ini merupakan kelanjutan, pengembangan, peningkatan, pembaharuan dan bahkan penyempurnaan dari Program Umum Golkar masa bhakti 1983-1988 lalu, yang telah dilaksanakan dengan sukses. Dengan lebih diberi bobot pada tanggung jawab dan peranan Golkar dalam rangka memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menjawab tantangan dalam menghadapi Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun tahap kedua.

Pembinaan komunikasi dan sinkronisasi dengan jalur keluarga besar GOLKAR

Akhir dari pengarahannya terhadap fungsionaris DPD Golkar baik di Sultra maupun Sulsel, Ketua Umum berpesan kepada seluruh jajaran kepengurusan DPD dan semua kader Golkar untuk lebih mendekatkan dirinya dengan rakyat dan warganya, lebih peka terhadap aspirasi rakyat yang berkembang secara dinamis, lebih tanggap dalam menampung, mengolah dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menyalurkan dan memperjuangkannya. Dengan lebih dekatnya kader Golkar dengan rakyat, menurutnya, akan mampu mengembangkan inspirasi mereka, memotivasi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan nasional. □ (WT)

Digitized by Google

DPP Bertekad Menjunjung Tinggi Panji-panji Golongan Karya

Sekurang-kurangnya empat puluh lima pasangan suami istri malam itu berjajar bersama-sama, menyalami satu demi satu tamunya yang datang. Seraya berucap ''Minal Aidin wal Faizin maaf lahir batin''.

Ini adalah penampilan Ketua Umum DPP Golkar Wahono dan Istri dan seluruh anggota pengurus DPP Golkar lainnya, pada acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Golongan Karya di Gedung Serba Guna, Senayan Jakarta, Jum'at malam pekan akhir bulan Mei ini.

Acara ini terkesan sangat sederhana, namun hikmad. Hanya ada satu pidato singkat dari Wahono yang mengungkapkan bahwa, halal bi halal adalah sebagai suatu tradisi bangsa yang baik, dan dapat menumbuhkan keakraban serta dapat menumbuhkan toleransi kerukunan antar umat beragama, dapat mewujudkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Disamping itu halal bi halal ini juga merupakan upaya untuk mawas diri dan introspeksi dari segala apa yang telah kita perbuat, sehingga kita dituntut untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat.

Minal aidin wal faizin

Melalui kesempatan itu, Wahono juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua fihak, atas dukungannya terhadap roda organisasi yang dipercayakan kepadanya selama 7 bulan ini. Tentunya, katanya dengan usianya yang baru ini saya merasa

Menumbuhkan keakraban dan toleransi kerukunan antara umat beragama

Digitized by Google

Panggilan tugas masih terbentang luas

masih balita. Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. Saya juga minta maaf terhadap kesalahan maupun kekurangan yang ada, katanya.

Meski dengan kekurangan yang ada, Golkar bertekad untuk menjunjung tinggi panji-panji Golkar demi kejayaan nusa dan bangsa. Sebab panggilan tugas yang masih terbentang luas, tidak akan hampa dari hambatan, halangan maupun rintangan, ujarnya.

Ini semua, lanjut Wahono, menuntut pada kita, bangsa Indonesia untuk bekerja lebih keras, namun juga menuntut sikap keterbukaan dengan lebih mempererat persatuan dan kesatuan.

Dengan tekad yang demikian itu, kata Wahono, niscaya akan segera tercapai cita-cita perjuangan bangsa yang dicita-citakan, tandasnya.

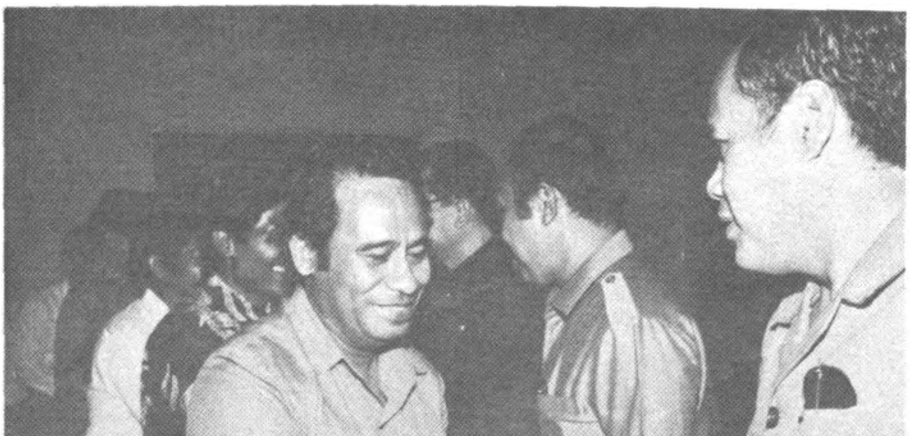

Menyukseskan pembangunan nasional

Akhirnya Wahono yang berpidato tanpa teks selama lima belas menit itu, mengajak seluruh jajaran Keluarga Besar Golkar untuk bekerja lebih keras, dengan mengeratkan lagi rasa persatuan dan kesatuan untuk menyukseskan pembangunan yang akan datang.

Hadir pada acara halal bi halal tersebut lebih kurang 300 orang, diantaranya sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan V, pejabat tinggi dan lembaga tinggi negara, para mantan pengurus DPP Golkar masa bhakti sebelumnya, serta para kader dan simpatisan Golkar, yang dilanjutkan dengan ramah-tamah.

Ruangan Gedung Serba Guna yang cukup luas dan tanpa adanya kursi malam itu, membuat acara tersebut semakin santai dan akrab. Wahono yang terkesan sangat merakyat itu mempersilahkan para tamunya menikmati hidangan di pojok-pojok ruangan yang telah tersedia dengan berbagai macam makanan khas, seperti mie kocok, soto, martabak, sekuteng, es puter dan lain-lainnya. Sementara diiringi sebuah musik orgen dan penyanyi tunggal asuhan Edy Sud.☐ (WT)

Digitized by Google

Peran MKGR Tidak Dapat Dipisahkan Dari Golkar

Ormas bukan underbow partai politik

Setelah Undang Undang Keormasan Nomor 8 tahun 1985 diterima secara bulat dalam percaturan politik Indonesia, maka setiap organisasi kekuatan sosial politik tidak diperkenankan memiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjadi mantel atau underbownya. Sedangkan bagi Golkar yang mempunyai hubungan erat dengan suatu ormas seperti AMPI, MKGR atau Kosgoro itu adalah hubungan historis dan bersifat perseorangan. Karena anggota perorangan dari ormas tersebut juga menjadi anggota Golkar. Sehingga hubungan yang memang sudah berlangsung ini tidak melanggar ketentuan undang-undang tersebut.

Satu misal, kehadiran MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), mempunyai hubungan sejarah terhadap kelahiran Golkar dalam upaya mengemban pembaharuan politik Indonesia. Hubungan ini bukan struktural, melainkan hubungan yang didasarkan tali sejarah. Dan malahan kedua pihak sangat memahami arti kehadirannya sebagai wujud kerjasama organisasi untuk menjabarkan rasa pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara serta sebagai citacita luhur bersama.

Tekad MKGR ini semakin jelas ketika Ketua Umum DPP MKGR RH Sugandhi menyampaikan hasil pelaksanaan pada Mubes III MKGR kepada Wakil Presiden Sudharmono. Sedangkan Wakil Presiden Sudharmono dalam kesempatan pertemuan itu mengatakan, sukses mubes ini sudah barang tentu dijalankan sesuai dengan AD-ART MKGR dan mubes merupakan forum yang berdaulat bagi suatu organisasi sehingga MKGR setelah menyelenggarakan mubes makin terkonsolidasi, yaitu konsolidasi organisasi, konsolidasi program dan konsolidasi kegiatan-kegiatannya untuk melaksanakan hasil mubes tersebut. Adapun tampilnya muka-muka baru dan lama dalam komposisi pengurus DPP MKGR, maka organisasi ini tetap melanjutkan cita-cita dan tujuan organisasi serta menghayati latar belakang pembentukan organisasi MKGR ini. Karena nama MKGR setidak-tidaknya menggambarkan tekad dan cita-cita para pendiri negara ini, yang diteruskan sampai sekarang. Selanjutnya dalam perkembangannya bertekad untuk menegakkan kepribadian, cita-cita dan konsep nasional (negara) pada saat para pendiri negara

Digitized by Google

Kader MKGR memikul tanggung jawab kepemimpinan GOLKAR

kita membentuk negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui sekarang ini, tambahnya, tugas untuk mengembangkan dan memberi isi pada cita-cita kemerdekaan yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini merupakan salah satu ciri yang harus dikembangkan dan kita pegang teguh di dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan sekaligus sebagai ciri utama dari pelaksanaan konsep nasional kita yaitu Demokrasi Pancasila.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Golkar yang membuka Mubes III MKGR ini menilai, konsistensi perjuangan Golkar memandang kader-kader MKGR terbaik senantiasa terpilih untuk turut memikul tanggung jawab kepemimpinan Golkar dari periode ke periode. Artinya, adanya latar belakang sejarah yang sedemikian ini anggota Golkar dan MKGR merupakan kader-kader Golkar. Sehingga suksesnya program Tri Sukses Golkar juga menjadi tanggung jawab setiap anggota dan kader MKGR. Untuk itu secara organisatoris Golkar dan MKGR perlu meningkatkan kerjasama. Baik dalam bidang program kerja, kekaryaan, kaderisasi maupun penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini tentunya pelaksanaan Tri Sukses Golkar periode 1988-1993 yang meliputi sukses konsolidasi, sukses Pelita V dan sukses Pemilu 1992 sangat tergantung pada kekompakan seluruh jajaran keluarga besar Golkar termasuk keluarga besar MKGR untuk tetap berjuang demi mensukseskan perjuangan Golkar serta hal-hal aktual yang menjadi prioritas program kerja Golkar perlu mendapat perhatian bersama. "Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik dalam rangka melaksanakan pendidikan politik, membentuk kader yang tangguh, berkualitas dan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi pada program pembangunan. Maka upaya yang akan dilakukan Golkar adalah meningkatkan kemandirian, kualitas dan kemampuannya untuk berperan dalam kehidupan politik," tegas Wahono di depan peserta Mubes III MKGR tersebut.

Sedang untuk kesamaan bahasa dan pengertian tentang kemandirian Golkar dan mencegah berbagai penafsiran di jajaran keluarga besar Golkar, menurutnya, kemandirian itu mengandung makna kematangan dinamika intern yang menciptakan kemampuan untuk berkembang sendiri tanpa menimbulkan beban pada lingkungannya. Mandiri dalam hal ini berarti memperkokoh kedaulatan organisatoris sendiri tanpa mengurangi hubungan strategis dengan kawan-kawan seperjuangan. Bagi Golkar, kemandirian itu bukan berarti fragmentasi dan aliansi yang sudah mapan untuk memunculkan kekuatan-kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri, dengan kata lain, bukan berarti disasosiasi dari kawan-kawan dan pendukung seperjuangan yang melahirkan serta membesarkan Golkar selama ini. Kaitan ini tentu tidak dapat dipungkiri, karena hakekat dan kelahiran Golkar berasal dari lingkungan tersebut. Di sini, jelas peranan MKGR untuk Golkar tidak bisa dipisahkan begitu saja dan justru MKGR merupakan pelanjut, pencipta dan penjalin kebersamaan Golkar. Baik dalam sikap, pandangan maupun gerak langkah dalam memperjuangkan cita-cita perjuangan Golkar sebagai kekuatan sosial politik. Sehingga dari pengertian ini kita melakukan konsolidasi dan koordinasi program-program kerja di masa-masa mendatang.

pertani
PT. PERTANI (PERSERO)
KANTOR PUSAT P.O. BOX 247 Kby.
TELP.: 7993108, 7991474, 7997197, 7990191 TELEX 47249 JAKARTA

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Mengucapkan:

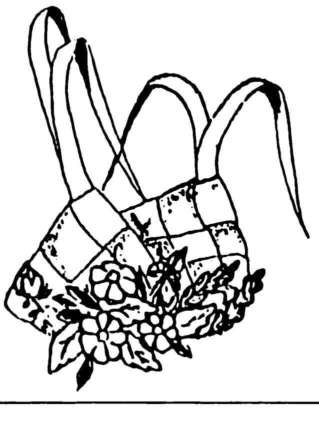

Selamat Idul Fitri

1409 H

Mohon Maaf Lahir & Batin

Digitized by Google

Di sisi lain kewaspadaan terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan masyarakat secara kualitatif tetap ditingkatkan, karena itu akibat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai bangsa kita. Bahkan masalah ini, tutur Wahono, termasuk menjadi tanggung jawab Golkar untuk dapat terus menerus menampung, memadukan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. Secara sadar bahwa bila kita bertumpu pada aspirasi rakyat, maka akan terjelma kuatnya motivasi yang menggerakkan seluruh jajaran organisasi kita untuk bergerak maju dalam derap langkah perjuangan Golkar. Oleh sebab itu, kita harus bergerak maju dan mengembangkan diri bukan saja sebagai kekuatan sosial politik yang tangguh untuk dirinya sendiri. Tetapi juga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelopor dan pembaharu menyongsong budaya politik baru seperti yang telah kita canangkan.

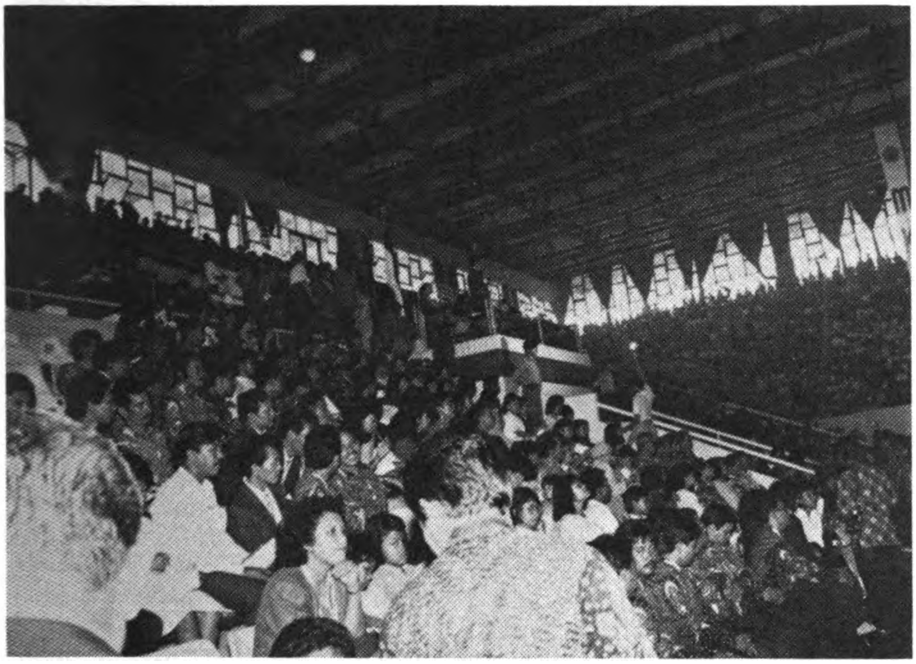

GOLKAR bertumpu pada aspirasi rakyat

Meningkatkan Perwujudan Demokrasi Pancasila

Kemudian Menteri Dalam Negeri Rudini dalam sambutan pengarahan yang dibacakan staf ahli menteri H. Moh. Barier mengatakan, bagaimana penggunaan tolok ukur demokrasi Pancasila tentu sudah tidak merupakan hal yang masih dipertanyakan. Dalam penggunaan tolok ukur itu sudah tidak perlu dipersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan disiplin nasional, sebagaimana kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan secara konstitusional menjadi amanat GBHN kita. Sementara itu keberadaan organisasi kemasyarakatan adalah dalam rangka meningkatkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam mewujudkan demokrasi Pancasila itu, cara pencapaiannya juga dengan cara-cara demokrasi Pancasila. Berkaitan dengan hal ini, MKGR ini sesuai dengan konstitusi organisasi ditentukan oleh mubes dan selaras dengan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam sambutan tertulis itu, pembina politik dalam negeri ini menilai bahwa sudah barang tentu keputusan yang diambil itu sudah dipertimbangkan masak-masak atas dasar tolok ukur Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). "Kesemuanya itu merupakan aturan permainan yang mewarnai mekanisme kehidupan infrastruktur politik dengan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu komponennya. Sedangkan kebijakan organisasi yang mempedomani amanat GBHN dengan sendirinya menyatu dengan keinginan atau aspirasi dan harapan-harapan para anggota masyarakat yang terwadahi serta terhimpun di dalam organisasi. Dan karena kebijakan organisasi sudah sesuai dengan aspirasi anggota yang ditetapkan secara demokratis, maka sudah selayaknya langkah-langkah kebijaksanaan tersebut pelaksanaannya akan didukung dan dibantu oleh partisipasi anggota sepenuhnya. Sehingga dalam alur yang sedemikian ini setiap organisasi akan mendapatkan partisipasi anggotanya," tambah Rudini.

Adapun mekanisme demokrasi Pancasila dalam organisasi akan menciptakan tata kehidupan yang mantap dan menunjukkan stabilitas. Ini akan membantu perhatian organisasi untuk diarahkan kepada tercapainya sasaran-sasaran. Bila aspirasi anggota dapat diwadahi secara demokrasi, maka dengan sendirinya tidak ada lagi ganjalan-ganjalan yang meresahkan ang-

Meningkatkan perwujudan Demokrasi Pancasila

Digitized by Google

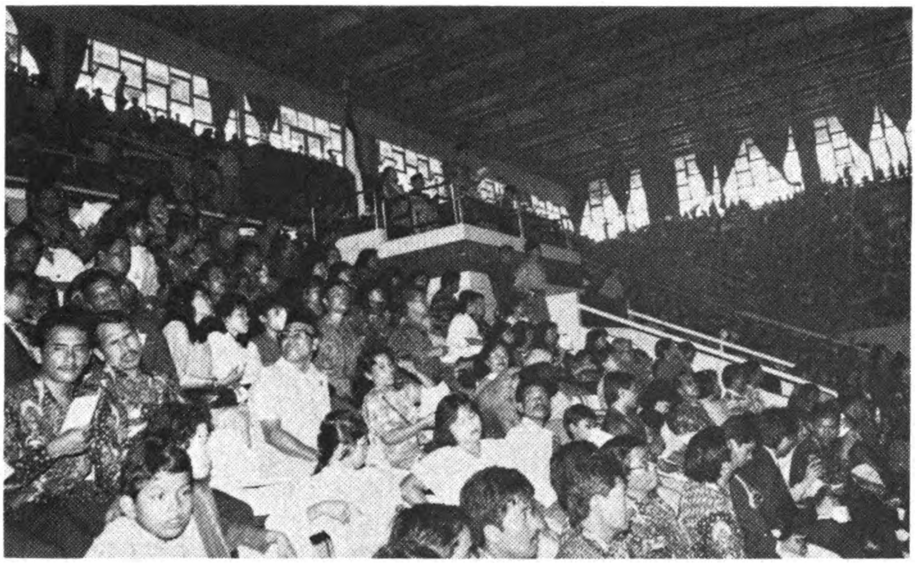

Bangsa Indonesia memiliki sistem, tata nilai dan jati diri sendiri

gota.

Pada kesempatan lain dalam acara Mubes MKGR III ini yang dihadiri sekitar 15.000 orang kader-kader MKGR dari 26 DPD, 282 cabang se-Indonesia dan 16 ormas yang dilahirkan MKGR, Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno menilai, bahwa keliru apabila dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan selama ini menggunakan tolok ukur dari luar karena jelas tidak sesuai dengan sistem dan tata nilai serta jati diri bangsa Indonesia. Sikap dan pola pikir semacam ini sangat berbahaya dan dapat menyesatkan bangsa yang sedang membangun kedalam suatu kondisi, dimana kondisi itu kehilangan rasa percaya diri terhadap jati diri, sistem dan tata nilainya sendiri. Dalam kondisi semacam ini hendaknya kita harus tetap waspada untuk memandang serta menghadapi setiap kondisi ataupun perubahan yang dialami oleh bangsa lain. Karenanya, kita tidak boleh terhanyut, terlena dan terpengaruh oleh perangkat sistem dan tata nilai yang dimiliki dan digunakan bangsa lain. Yang memang jelas tidak akan cocok diterapkan di negara kita mengingat bangsa Indonesia telah memiliki perangkat sistem dan tata nilai serta jati dirinya sendiri.

Jangan pula sampai dalam pola atau alur berpikir terpetik niat dan tindakan yang justru menyimpang, bertentangan dan mengingkari sistem, tata nilai dan jati diri bangsa Indonesia yang sudah baku karena terpengaruh maupun terhanyut oleh perangkat sistem dan tata nilai dari luar. "Sebagai bangsa pejuang, besar dan berbudaya tinggi hendaknya mampu bertumpu dengan kokoh dan tegar dalam mempertahankan jati diri terhadap berbagai pengaruh dari luar. Bahkan jangan terpancing oleh pandangan-pandangan dan pernyataan-pernyataan yang berbau dikotomis dan antagonistis, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, sikap bangsa yang makin dewasa dan penuh kewaspadaan ini harus ditandai oleh tiga komponen dasar, yaitu pikiran jernih, perasaan bersih dan penerapan rasio yang logis," tegas Try Sutrisno.

Mubes III MKGR yang telah berlangsung dari 21 sampai 24 Mei 1989 di Wisma Haji Pondok Gede, ternyata komposisi pengurus DPP MKGR periode 1989-1994 tidak mengalami banyak perubahan kendati muncul wajah-wajah baru disamping pembentukan Dewan Pertimbangan MKGR. Dalam susunan pengurus ini terpilih kembali RH Sugandhi sebagai Ketua Umum DPP MKGR, Sekretaris Jenderal Drs. HM Irsyad Sudiro dan Bendahara Ny. Marie Sutardjo.☐ (DT)

Digitized by Google

AMPI Bentuk Kepengurusan di Timtim

Setelah wilayah Timor Timur dinyatakan terbuka oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, Dewan Pimpinan Pusat AMPI memanfaatkan secara positif momentum itu untuk membentuk komposisi kepengurusan AMPI tingkat I di daerah tersebut. Akan tetapi, pembentukan kepengurusan ini tidak semudah apa yang dibayangkan kader-kader AMPI. Karena wilayah Indonesia termuda ini baru 'bangun' dari tidur berupaya membangun daerahnya yang cukup tertinggal jauh dengan daerah saudara-saudaranya yang lain.

Memahami situasi dan kondisi Timor Timur, DPP AMPI yang di wakili Saud L Tobing selaku Ketua Tim Pembentukan AMPI Timor Timur, mengharapkan agar masyarakat Timor Timur pada umumnya dan kalangan pemuda pada khususnya agar terlibat langsung terhadap proses pembangunan nasional disegala bidang. Adapun AMPI sendiri menurut Saud tidak bisa memenuhi harapan orang banyak bila nantinya tidak mampu menjabarkan program-program kerja, yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu AMPI sangat memerlukan dorongan dari pihak lain yang mempunyai orientasi pada karya dan kekaryaan, terutama peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik terbesar. Oleh karena itu, kehadiran AMPI di Timor Timur ini paling tidak harus mendapat dukungan GOLKAR secara politis maupun non-politis dalam rangka membangkitkan partisipasi dan semangat pembangunan serta pembaharuan bagi masyarakat Timor Timur.

Angin Segar

Sementara itu program-program kerja AMPI, kata Saud L Tobing, harus disesuaikan dengan pola pembangunan daerah. Jangan sampai keberadaan AMPI disana tidak mampu menampung aspirasi masyarakat dan akibatnya akan menghambat proses perjalanan AMPI sendiri dalam kiprahnya di bidang pembangunan bangsa dan negara. Disisi lain, latar belakang sejarah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMPI, lanjut Saud perlu dijabarkan sedemikian rupa kepada kader-kader AMPI di Timor Timur, agar mereka tahu maksud dan tujuan AMPI secara jelas. Untuk itu AMPI harus melakukan pendekatan-pendekatan dalam bentuk karya nyata untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Timor Timur seperti dibidang olahraga, kesenian, pertanian dan sebagainya. Hal tersebut di atas tentu sangat menunjang keberadaan AMPI dalam memasyarakatkan program kerjanya secara kesinambungan dari pusat. Kalau

Angin segar buat AMPI

ini tidak bisa diwujudkan, tidak mengherankan komunikasi AMPI akan dapat terputus dengan masyarakat seperti yang dialami oleh Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, ujar Saud mengingatkan.

"Keterbukaan wilayah Timor Timur membawa angin segar bagi AMPI guna mengembangkan sayapnya. Namun, kesegaran ini bisa tidak segar lagi bila AMPI sendiri tidak mampu berbuat banyak dalam menjabarkan program kerja yang bersifat karya nyata. Dan saya pun merasa optimis animo pemuda Timor Timur cukup besar terhadap AMPI, tapi ada faktor kesulitan dimana kader AMPI di daerah tersebut kebanyakan adalah pegawai negeri tidak seperti daerah lainnya, sehingga waktu mereka sangat terbatas dan ini merupakan penghambat bagi perkembangan AMPI," tegasnya.

Timor Timur Jadikan Subjek

Pembentukan kepengurusan DPD AMPI Tingkat I Timor Timur ini merupakan hasil Rapat Pleno DPP AMPI, 20 Pebruari yang lalu. Pembentukan ini tidak terlepas dari peranan Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Timor Timur Raemando dan Tito dos Santos Baptista untuk menginventarisir nama-nama pemuda yang duduk dalam kepengurusan AMPI, juga, peranan gubernur serta pejabat daerah dalam memberi saran-saran kepada tim pembentukan kepengurusan dan pengurus yang sudah dibentuk. Menurut rencana pelantikan nama-nama pengurus DPD AMPI Tingkat I Timor Timur akan dilakukan sekitar 27-29 Juni mendatang.

Sehubungan dengan pembentukan DPD AMPI Timor Timur ini, Wakil Sekjen DPP AMPI Anton Lesiangi mengharapkan, agar Timor Timur tidak dijadikan objek melainkan dijadikan subjek — terutama yang mempunyai kaitan dengan proses pembangunan daerah —. Ini sangat penting. Sebab AMPI sebagai organisasi kepemudaan turut serta dalam mempersiapkan masa depan pemuda melalui pembinaan secara kesinambungan sekaligus AMPI mempersiapkan kader-kader muda untuk mencoba menjawab tantangan jaman.

Disamping itu kita sadar bahwa Timor Timur sebagai wilayah yang sudah terbuka merupakan suatu momentum positif. Dan mendirikan kepengurusan di wilayah ini sangat tepat setelah rakyat Timor Timur memproklamirkan diri untuk berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia beberapa tahun yang lalu. "Dalam rangka era tinggal landas, Timor Timur tingkat pendidikannya yang masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain perlu mendapat prioritas. Selain itu daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat potensial ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh AMPI dalam melakukan pembinaan kepemudaan dalam kaitan pelaksanaan pembangunan nasional di wilayah Timor Timur. Di sini jelas AMPI menunjukkan keinginannya untuk berperan di dalam melaksanakan dan mewujudkan keseimbangan antara pembangunan phisik dan non-phisik," tegas Anton Lesiangi.☐ DT

Digitized by Google

KOMENTAR

Demokrasi dan Kebebasan Bertanggung Jawab

PADA mula manusia lahir, dia bebas. Berteriak bebas, bergerak bebas, menangis bebas, tanpa ada yang menghalang-halanginya. Ia berkehendak bebas tanpa pembatasan, sehingga orang sering bilang, kebebasan dan kemerdekaan itu adalah bagian paling hakiki bagi kehidupan manusia.

Sepertinya dunia ini hanya didiami sendiri, tak ada lagi orang lain. Manusia kecil yang disebut bayi itu, tak memperdulikan lingkungan dimana dia berada. Ia tak pernah tahu dan tak mau tahu keadaan orang lain. Itulah kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki manusia begitu lahir dibumi ini.

Kebebasan dan kemerdekaan, berangsur surut ketika manusia mulai memasuki proses sosialisasi, pengenalan lingkungan, kebebasan dan kemerdekaan itu mulai berkurang. Ada norma dan kaidah yang harus dipatuhi, agar tidak terjadi ketidak sesuaian — disconformity — dalam lingkungan. Norma dan kaidah itu merupakan pembatasan atas kebebasan dan kemerdekaan pribadi, demi keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat.

Pada jenjang berikut, manusia dituntut menghargai orang lain tak hanya karena status formal tetapi juga sebagai manusia. Untuk itu ada tata krama, yang mengatur keseharian kehidupan manusia dalam lingkungan kehidupannya.

Semakin terbatas lagi kebebasan dan kemerdekaan itu. Tapi memang harus demikian, selama pada dirinya masih melekat predikat sebagai manusia. Orang tak akan lepas dari keseharian kemanusiaannya, karena memang demikianlah hidup ini.

Setelah melalui proses pertumbuhan manusia seperti pada awal dan jenjang pengenalan lingkungan, manusia menjadi dewasa. Dua jenis kedewasaan yang melekat pada diri manusia; pertama dewasa biologis dan dewasa psikologis. Orang lalu menguraikannya lebih lanjut, dimana kedewasaan biologis dirinci menjadi remaja, taruna, pemuda, baru dewasa. Sedangkan untuk kedewasaan psikologis, dirinci menjadi : dewasa pemikiran dan dewasa mental.

Jika tahapan-tahapan tersebut sudah dilewati, maka ia lalu disebut sebagai orang dewasa. Pengertian dewasa sesungguhnya berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang dewasa harusnya sudah punya rasa tanggung jawab terhadap segala apa yang dilakukannya, baik sebagai tugas, kewajiban maupun dalam menggunakan haknya.

Disini lalu orang mulai bicara soal demokrasi. Yang dalam UUD 1945 pasal 28 (penjelasannya) disebutkan sebagai : hasrat bangsa Indonesia untuk membangun suatu negara yang bersifat demokratis. Pasal ini berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Jadi sesungguhnya secara mendasar, pasal ini menuntut agar setiap warga negara dalam menjalankan hak demokrasi atau kemerdekaannya hendaknya diikuti rasa tanggung jawab nasional, terhadap negara dan bangsa. Kembali kemerdekaan dan kebebasan itu ditempatkan pada kerangka pemikiran nasional. Karena itu selalu diorientasikan pada kepentingan nasional bangsa. Dia tidak diartikan sebagai merdeka untuk merdeka atau bebas semata-mata untuk kebebasan.

Usai Sidang Umum MPR tahun 1988, tingkat kesadaran bernegara dari pada masyarakat, menunjukkan garis menaik. Orang mulai menggunakan haknya sebagai warga negara sesuai pasal 28 UUD 1945, untuk menyampaikan berbagai keluhan. Mereka mulai memanfaatkan lembaga Demokrasi yang ada — Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun Daerah — untuk menyampaikan keluhannya.

Suatu gejala positif yang perlu diarahkan, agar tidak merubah kecenderungan positif ini menjadi tuntutan yang "coersive" (memaksa). Jika kesadaran politik yang sudah tinggi untuk berubah bentuk menjadi tuntutan coersive, maka akan timbul konflik sosial. Karena penuntut merasa tak terpenuhi keinginannya. Dia kecewa, lalu mulai mempersoalkan keabsahan representasi para anggota DPR sebagai wakil rakyat. Disini kepekaan anggota Dewan terhadap aspirasi, termasuk tuntutan rakyat, harus cukup jeli.

Nampaknya demokrasi Pancasila adalah pilihan yang tepat, karena dalamnya terkandung tanggung jawab nasional tanpa mengabaikan kepentingan individual. Demokrasi liberal memang tak cocok bagi negeri ini, karenanya setiap kecenderungan untuk menghidupkan demokrasi liberal seyogianya dicegah. Kalau memang kita hendak membangun suatu masyarakat bangsa yang demokratis, yang menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan etnik dan kepentingan premordial, maka demokrasi Pancasila adalah pilihannya karena dalamnya ada tanggung jawab. Demokrasi liberal tak pernah mengutamakan kepentingan nasional, tetapi kepentingan individual yang utama. □

Digitized by Google

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL
(I S T A)

SK.MENDIKBUD NO.0239/0/1989
Kampus : Jl. Raya Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Telp. (021) 5486680.

PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 1989/1990

No	Fakultas	Jurusan	Program (Insinyur)	Status	Persyaratan
1.	Teknologi Industri	1. Teknik Informatika	Sarjana (S1)	Terdaftar	— Berijazah SMA B,Paspal, IPA, A1, A2 atau STM (Kejuruan yang sejenis)
		2. Teknik Mesin,	Sarjana (S1)	Terdaftar	
		3. Teknik Industri	Sarjana (S1)	Terdaftar	
		4. Teknik Manajemen Industri	Sarjana (S1)	Terdaftar	
		5. Teknik Kimia *)	Sarjana (S1)	Terdaftar	— Berkelakukan baik.
2.	Teknik Sipil & Perencana-an	1. Teknik Sipil	Sarjana (S1)	Terdaftar	
		2. Teknik Lingkungan	Sarjana (S1)	Terdaftar	
3.	Teknologi Kelautan	1. Teknik Kelautan	Sarjana (S1)	Terdaftar	*) Tidak buta warna

* KOMPOSISI STAF PENGAJAR **PROFESOR, DOKTOR & MASTER** HAMPIR 70 %
* MAHASISWA YANG BERPRESTASI TERBAIK AKAN DIBERIKAN **BEA SISWA** :
* FASILITAS : **RUMAH SAKIT, LABORATORIUM TEKNIK, BANK, KOPERASI DLL.**

— Pendaftaran : 29 Mei — 23 Juni 1989
— UJIAN TULIS : 24 Juni 1989
— Pengumuman : 28 Juni 1989
— Pendaftaran bagi yang LULUS : 28 Juni — 8 Juli 1989

* Biaya Pendaftaran : Rp 25.000,- (2 jurusan pilihan)
* Tempat Pendaftaran :
  Kampus ISTA: Jl. Raya Kedoya, Kebon Jeruk, Telp. 5486680 Jakarta Barat.

* Transportasi ke Kampus Al-Kamal :

Dari	Lb.Bulus	Tanah Abang	Grogol	Kalideres
Mikrolet	—	M-11	—	—
Metromini	B-85	B-90 P-16	B-92	B-85

* Bagi yang diterima di UMPT, uang pangkal dan uang kuliah yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebanyak 90%.

I S T A

Prof.DR.Ir.H.ACHMAD M. SATARI
R e k t o r

Digitized by Google

Normalisasi, Buah KTT Sino-Soviet

Pertengahan bulan lalu, tepatnya, 16 Mei, suatu peristiwa penting terjadi di Beijing. Peristiwa itu begitu menarik perhatian dunia, karena untuk pertama kali dalam 30 tahun terakhir, pimpinan tertinggi Cina dan Uni Soviet bertatap muka untuk membicarakan permusuhan mereka yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa. Pimpinan tertinggi Cina Deng Xiaoping dan orang nomor satu Kremlin, Mikhail Gorbachev, berangkulan di Balai Agung Rakyat disusul toast yang menandai akhir sebuah permusuhan yang begitu akut antara kedua bangsa. Deng menyapa Gorbachev dengan sebutan "kamrad", sebuah sapaan yang bersahabat di kalangan sesama orang komunis.

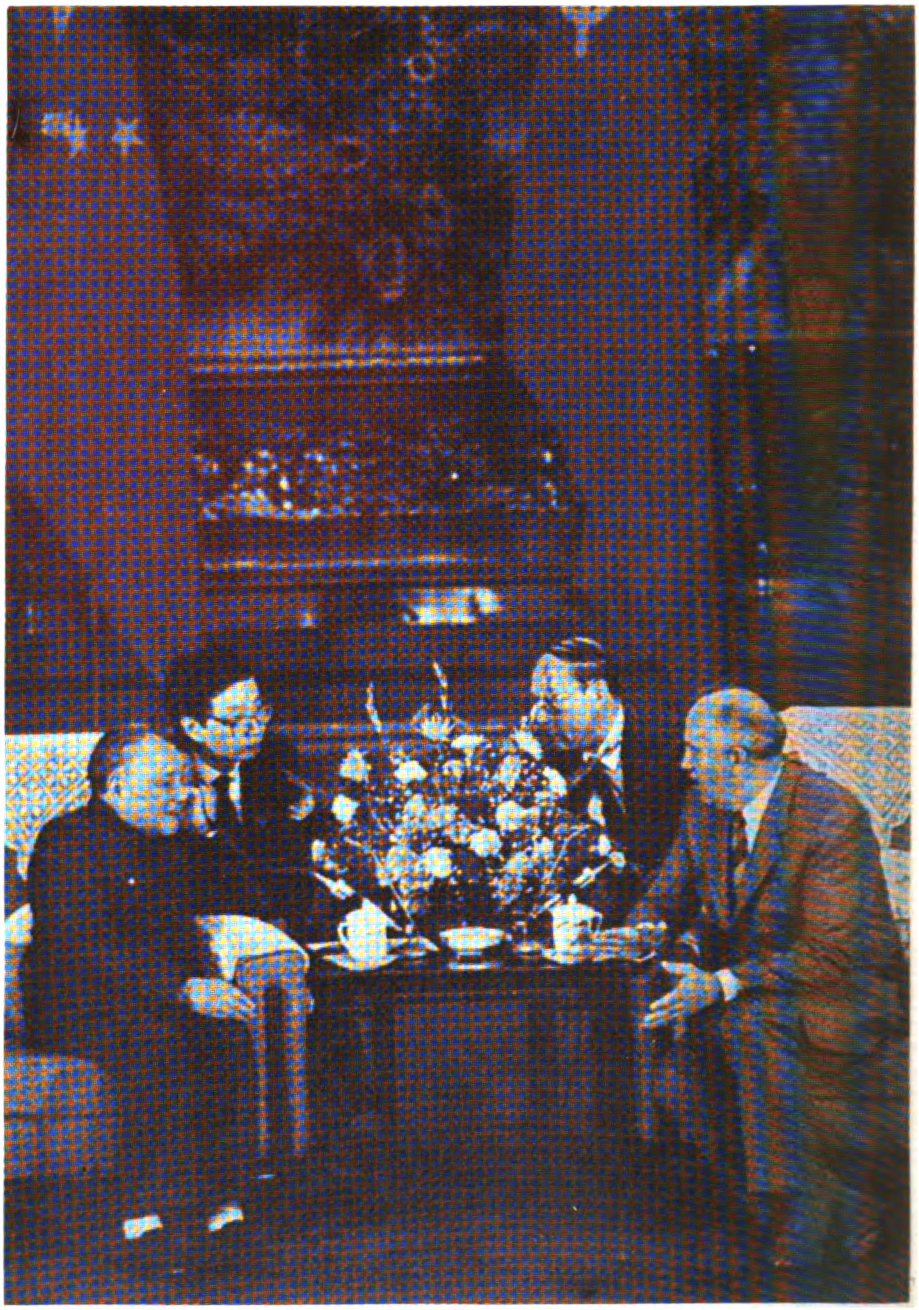

Pertemuan Gorbachev dengan Deng Xiaoping

Hasil dari KTT, seperti telah diketahui, adalah kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara Moskow-Beijing. Kesepakatan itu sendiri dicapai karena sejumlah prasyarat prinsipil yang mengganjal selama ini, menemui jalan keluar yang menyenangkan kedua pihak tentunya. Jauh sebelum normalisasi ini disepakati, Cina selalu mendesak Uni Soviet untuk memenuhi tiga syarat penting, yaitu, pertama, penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, kedua, penarikan pasukan Soviet yang ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Cina sepanjang 6500 km, dan ketiga, penarikan pasukan Vietnam dari Kampuchea. Cina memang mendesak Moskow dalam kasus Kampuchea ini, karena, Soviet merupakan pendukung utama penyerbuan pasukan Vietnam ke Phnom Penh di tahun 1978, yang menyingkirkan rejim Khmer Merah pimpinan Pol Pot dukungan Cina.

Sebelum terbang menuju Beijing, Gorbachev melakukan sejumlah keputusan yang memenuhi tuntutan Beijing itu. Pasukan Kremlin yang ditempatkan di Afghanistan selama 10 tahun, ditarik mundur pada pertengahan Februari. Kemudian hampir separuh dari divisi-divisi militer yang ditempatkan di perbatasan dengan Cina, ditarik seminggu menjelang keberangkatannya, terutama divisi yang ditempatkan di daerah Mongolia. Dan untuk meraih sukses dalam KTT tersebut, Soviet juga mendesak Vietnam menarik pasukannya dari Kampuchea. Hasilnya, Hanoi secara tiba-tiba mengumumkan penarikan pasukan dari Phnom Penh sebelum 30 Oktober mendatang.

Dua ganjalan pertama, yaitu penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan dan dari perbatasan dengan Cina, diterima sebagai kesungguhan rekonsiliasi pihak Moskow. Tetapi tentang Kampuchea, kendati Deng dan Gorbachev berpendapat sama bahwa konflik di Indocina itu harus diselesaikan, namun ada masalah teknis yang tak terpecahkan. Perbedaan pendapat terletak pada masalah siapa yang memerintah di Phnom Penh nanti setelah pasukan Vietnam ditarik mundur?

Walaupun Cina mengatakan bahwa Khmer Merah tidak lagi membawa kepentingan Beijing dalam perjuangan

Digitized by Google

merebut kembali Phnom Penh, namun Moskow tidak percaya kalau Beijing sungguh-sungguh lepas tangan. Pasukan Khmer Merah yang komunis itu, merupakan kekuatan terbesar dalam koalisi yang memerangi pasukan Vietnam. Dendam Cina terhadap Moskow yang mendukung pasukan Vietnam mungkin bisa terobati, tetapi terhadap Hanoi, tidak. Ini terbukti bahwa pada tahun 1979, Cina melakukan penyerbuan ke Vietnam selama dua minggu untuk "memberi pelajaran" kepada Hanoi, bahwa Phnom Penh merupakan taruhan gengsi kekuatan Cina di Asia Tenggara.

Moskow yang tidak percaya bahwa Cina akan melepaskan dukungannya kepada Khmer Merah akhirnya tidak mau memberi konsesi lebih jauh lagi menyangkut penarikan pasukan Vietnam dari Phnom Penh. Disinilah titik buntu itu.

Divisi militer yang ditempatkan diperbatasan

Ekonomi Bukan Ideologi

Setelah 30 tahun bertikai, terutama dalam konteks ideologi, mengapa tiba-tiba muncul kesadaran untuk bersahabat? Cina dan Soviet yang bersahabat kental di tahun 1950-an, muncul sebagai pakta ideologi yang oleh kalangan Barat dianggap sebagai bahaya yang mengancam keutuhan dan perdamaian internasional.

Tetapi kekentalan ideologi itu lama-kelamaan runtuh, karena kedua pihak tidak ingin bernaung di bawah superioritas rekannya. Cina tidak ingin dianggap berguru pada Soviet, sementara Soviet pun menganggap merekalah sesungguhnya yang menjadi pemegang hak paten ideologi komunis Karl-Marx.

Maka terjadilah saling tuduh. Cina menuding Moskow sebagai negara komunis yang mengartikan komunisme dengan hegemoni, sementara Moskow mencaci Beijing sebagai murid yang menyelewengkan kemurnian komunisme. Pertikaian ideologi itu menjadi demikian tajam sehingga pecah perang perbatasan di tahun 1960-an yang menewaskan ratusan serdadu di kedua pihak. Sejak itu, hubungan kedua sahabat ini, berantakan.

Meninggalnya Mao Zedong di tahun 1976, menumbuhkan sebuah fenomena baru di jajaran pimpinan Cina. Sementara itu di Soviet, Kruchev dan Brezhnev perlahan-lahan dikikis dari akar-akar konservatisme.

Munculnya Deng Xiaoping sebagai pengganti Mao Zedong, membawa perubahan mendasar dalam pemerintahan Cina. Deng yang selama Mao berkuasa tidak menunjukkan bakat sebagai seorang reformis, kendati telah aktif dalam bidang politik luar negeri, muncul dengan sejumlah ide pembaruan. Tatkala berkecamuk Revolusi Kebudayaan yang dianggap sebagai usaha Mao untuk memurnikan ideologi komunisme yang lebih berkarakter Cina, Deng dan sejumlah tokoh — terutama dari kalangan militer — dipenjara.

Tetapi dengan dukungan militer, Deng akhirnya muncul sebagai pemenang dalam pergolakan pimpinan di Cina pada tahun 1978. Sejak itu Cina melancarkan politik pintu terbuka di bidang ekonomi, dan Deng dianggap sebagai arsitek pembaruan, hingga saat ini, kendati dia sejak dua tahun terakhir hanya bermain dari balik layar.

Di Moskow, muncul pada tahun 1985 sebuah nama yang kini begitu populer, yaitu Mikhail Gorbachev. Seperti Deng, Gorbachev adalah seorang reformis yang ingin melakukan perubahan-perubahan mendasar di Soviet. Pendekatan Gorbachev yang pragmatis, tersimpul dalam kata perestorika (restrukturisasi) dan glasnost (keterbukaan).

Titik temu dalam pendekatan terhadap negara masing-masing menyongsong abad 21 itulah, yang menyebabkan dua raksasa komunis yang bertikai selama tiga dasawarsa, mau mengakhiri permusuhan mereka. Sebagai orang muda, Gorbachev, 58, mau mengalah dengan mendatangi Deng Xiaoping.

Alasan terpenting dari kesepakatan normalisasi, bukan mendamaikan pertikaian mereka di bidang ideologi, tetapi mengamankan program pembangunan ekonomi. Dalam bidang ideologi, tanpa harus melakukan redefinisi terhadap komunisme pun, hal itu tidak dianggap bahaya lagi. Hanya satu kesepakatan, seperti yang terungkap dari pidato Gorbachev bahwa pertikaian di masa lalu tentang kemurnian ideologi, sebaiknya dilupakan saja, "Asal kita tidak saling mendikte tentang sistim yang harus dianut oleh pihak lain sebagai penjabaran dari ideologi komunisme yang kita anut. Biarkan masyarakat kita dan juga masyarakat lainnya, berkembang menurut persepsi mereka tentang kebenaran dan kemajuan."

Pragmatisme seperti ini tentu didorong oleh kebutuhan obyektif di dalam negeri masing-masing. Untuk mengejar ketertinggalan dalam ekonomi, baik Soviet maupun Cina yang bertetangga itu, harus bebas dari suasana permusuhan. Hegemonisme Soviet yang terjelma dalam politik memayungi dan membiayai sekutu-sekutunya, terutama dalam bidang militer disadari terlalu mahal. Ambisi politik seperti itu disadari memberi beban yang tidak perlu kepada rakyatnya.

Di bawah Gorbachev, Soviet menjadi maklum bahwa penempatan pasukannya di sepanjang perbatasan dengan Cina, di Eropa Timur, di Afghanistan dan dukungannya terhadap Vietnam, Korea Utara, Kuba dan peranannya sejumlah pertikaian di Afrika dan Amerika Latin, secara ekonomi sangat merugikan. Rakyat Soviet rupanya menyadari dan mendesak perubahan arah politik Kremlin terhadap dunia. Dengan semangat

Digitized by Google

Perestroika dan glasnost, Soviet yang dulu mempunyai ambisi *outward,* kini semakin *inward looking.*

Namun untuk menciptakan rasa aman bagi Soviet yang sedang melakukan pembaruan itu, maka semua bentuk ancaman dari luar, terutama ancaman militer, dieliminir sampai sekecil mungkin. Itulah sebabnya mengapa Soviet di bawah Gorbachev melancarkan sejumlah prakarsa yang terkadang sangat mengejutkan pihak Barat. Gorbachev misalnya menandatangani perjanjian pengurangan senjata nuklir jarak sedang (INF) di Eropa dengan pihak NATO. Dan kini dia membuat NATO kebingungan sendiri dengan usulan mengurangi senjata nuklir jarak pendek dan bahkan mau mengurangi kekuatan konvensional di Eropa.

Alasan utama di balik gebrakan Gorbachev itu, adalah kepentingan ekonomi di dalam negeri. Walaupun Gorbachev melontarkan usulan yang masuk akal dan diharapkan oleh banyak negara di Eropa, tetapi AS, kekuatan paling vokal dalam NATO, masih bersikap hati-hati, terutama karena pertimbangan konsistensi antara retorika Gorbachev dengan tindakan nyata Kremlin.

Alasan lain yang menyebabkan Amerika sangat berhati-hati dengan tawaran pengurangan senjata nuklir jarak pendek dan kekuatan konvensional adalah keraguan bahwa Soviet setelah Gorbachev akan tetap konsisten dengan semangat seperti sekarang ini. Jangan-jangan setelah Gorbachev turun tahta, kepemimpinan Soviet kembali berada di tangan kelompok konservatif yang ingin menguasai Eropa dengan perang. Dan bila itu terjadi, maka Soviet yang unggul dalam kekuatan militer konvensional, akan sangat mudah melahap Eropa.

Cina pun menyadari bahwa persaingan ideologi dengan Soviet yang menyebabkan dia terseret ke dalam pembangunan fasilitas militer secara berlebihan, tidak menguntungkan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Itulah sebabnya dua tahun lalu Deng Xiaoping melancarkan program pengurangan personil militer hingga satu juta orang. Dukungan Cina terhadap gerakan komunis di Asia Tenggara, dinyatakan tidak ada lagi, walaupun sejumlah pemimpin di kawasan ini belum merasa yakin benar akan penegasan seperti itu.

Terlepas dari benar tidaknya, atau konsisten tidaknya retorika Moskow maupun Beijing, salah satu kenyataan yang tidak disangkal lagi ialah kedua raksasa komunis ini mulai memikirkan tentang pembangunan di dalam negeri dan semakin melupakan ambisi ideologi. Ini tentu sangat mendukung bagi terciptanya kawasan Asia yang damai dan bahkan dunia yang tenteram.

Tentara Cina angkat senjata

Daya Saing

Normalisasi hubungan Cina dan Uni Soviet, sejak lama dianggap sebagai persahabatan yang ditakuti. Artinya, banyak pemimpin di dunia, terutama kalangan Barat dan Asia khawatir rekonsiliasi Moskow-Beijing akan menjelma jadi kekuatan militer yang begitu dahsyat. Sebagai dua negara yang mengikat kembali tali persahabatan dan dengan ideologi yang sama, kemungkinan seperti itu memang potensial.

Tetapi kondisi obyektif di Cina maupun Soviet saat ini, dimana rakyatnya mendesak pembangunan ekonomi, maka kemungkinan persekutuan militer antara kedua raksasa komunis itu, sangat kecil. Bila persahabatan dua raksasa ini barulah menjadi persekutuan militer yang ekspansionis, maka Soviet maupun Cina akan kembali tenggelam dalam kesulitan masa lalu, yang kini disadari sebagai kesalahan sejarah. Sebagaimana diketahui, pola rekonsiliasi antara kedua negara adalah membina persahabatan yang setara. Tetapi Soviet dan Cina akan kembali terperosok dalam pertikaian masa lalu bila persahabatan itu cenderung menjadi persekutuan militer dimana harus ada yang memimpin dan yang dipimpin. Kedua raksasa ini memang tidak mau dipimpin oleh Moskow maupun Beijing.

Jadi ambisi ideologi yang semakin tenggelam itu menyebabkan dua raksasa ini akan membangun diri dalam bidang ekonomi. Mereka membutuhkan modal dan keahlian. Untuk memacu pembangunan ekonomi, baik Soviet maupun Cina mengalihkan perhatian mereka kepada teknologi dan modal dari Barat. Dengan demikian, persekutuan yang mungkin terjadi adalah dalam bidang ekonomi antara Soviet dan Cina. Kedua negara ini bersama-sama memiliki jumlah penduduk hampir 1,5 milyar. Jumlah ini adalah pasar yang sangat besar, sehingga kekuatan ekonomi Barat akan mengincar pasar tersebut, selama kedua negara belum mandiri dalam modal dan teknologi.

Bila keduanya sukses dalam pembangunan ekonomi, maka persaingan yang sesungguhnya adalah kompetisi yang mematuhi hukum-hukum ekonomi. Artinya bagi Asia Tenggara, untuk menandingi kemajuan Soviet dan Cina nantinya, tidak ada cara lain kecuali memacu daya saing. Dan untuk itu, dibutuhkan keberanian melakukan perubahan-perubahan mendasar yang mendorong daya saing itu.

Dari sejumlah trend tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa normalisasi hubungan Sino-Soviet, dalam banyak hal hanya mempengaruhi kepentingan bilateral saja. Artinya, kedua pihak mulai hidup berdampingan secara lebih aman, sehingga pembangunan ekonomi dalam negeri masing-masing tidak terganggu oleh keraguan terhadap ancaman militer.

Dan dari keamanan kawasan, tentu saja rujuk Sino-Soviet mempunyai kontribusi positif, selama mereka sungguh-sungguh membuang ambisi ideologi. □ TG

Digitized by Google

Unjuk rasa mahasiswa di Cina

Pergolakan di Negeri Tirai Bambu

Setelah sukses menggolkan normalisasi dengan Uni Soviet, pemimpin Cina, Deng Xiaoping, menghadapi sebuah ironi di dalam negeri. Pertama, kedatangan Gorbachev yang ingin menyelesaikan pertentangan ideologi dan permusuhan di antara kedua negara, malah dipergunakan oleh mahasiswa untuk mendesak pembaruan radikal dengan demonstrasi di Tiananmen (lapangan merah). Gorbachev dianggap oleh mahasiswa sebagai pahlawan yang sebaiknya mengajarkan kepada para pemimpin Cina bagaimana merekayasa perubahan dan pembaruan. Kedua, demonstrasi ma-

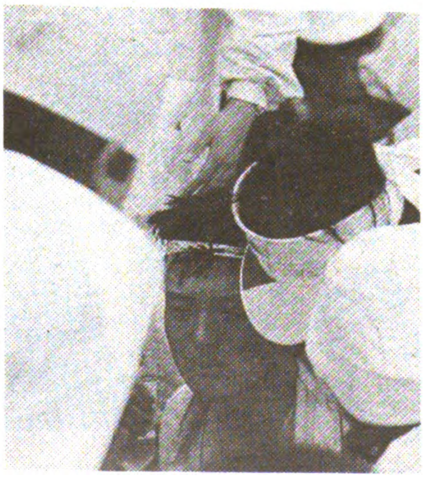

hasiswa yang menggebu-gebu itu, sebenarnya mencerminkan pertarungan kekuasaan di kalangan para pemimpin Cina, antara kubu konservatif yang berhaluan keras dengan tokoh-tokoh reformis yang berhaluan progresif.

Semua pertarungan itu, tentu menyakitkan bagi Deng karena dia terjadi bersamaan dengan kedatangan Gorbachev. Kaum reformis maupun mahasiswa Cina seakan ingin mendesak Gorbachev ''Berilah kami perestroika dan glasnost.''

Para mahasiswa menduduki Tiananmen, yang 40 tahun yang lalu dipakai

Digitized by Google

sebagai tempat Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Cina, setelah berhasil mengusir pendukung Kuomintang (nasionalis) ke Formosa (Taiwan sekarang ini). Tuntutan demonstrasi mereka, adalah demokrasi dan kebebasan pers. Di mata mahasiswa, Cina yang sejak 1978 melancarkan Empat Modernisasi, belum berbuat banyak dalam bidang demokrasi dan kebebasan. Reformasi ekonomi yang partial menyebabkan demokrasi dan kebebasan tersumbat disana-sini.

Ini kesan mahasiswa. Tetapi demonstrasi mahasiswa itu sendiri sebenarnya merupakan manifestasi pertarungan di kalangan pejabat tinggi dan pemimpin negeri itu, antara kelompok reformis dan kelompok garis keras. Kelompok reformis dipimpin Sekjen Partai Komunis Cina, Zhao Ziyang, dan kelompok garis keras ditulangpunggungi oleh Perdana Menteri Li Peng.

Yang rumit dari pertarungan itu adalah posisi Deng Ziaoping sendiri. Baik Li Peng maupun Zhao Ziyang, adalah dua tokoh yang dikenal dekat dengannya. Zhao yang kini berusia 69 tahun, merupakan wakil Deng dalam Komisi Militer, sebuah badan dalam partai yang sangat berpengaruh. Zhao, bukan orang militer, tetapi karena kedekatannya dengan Deng menyebabkan dia berhasil masuk dalam komisi yang bergengsi ini.

Sedangkan Li Peng, sama seperti Zhao, bukan orang militer. Insinyur

didikan Moskow ini adalah orang sipil yang karena persepsi dan kedekatannya dengan Deng, berhasil ditunjuk menjadi Perdana Menteri, posisi yang dulunya ada di tangan Zhao Ziyang. Zhao sendiri menjadi Sekjen Partai tahun 1987, menggantikan Hu Yaobang yang didepak Deng karena sikapnya yang terlalu lunak terhadap mahasiswa. Hu Yaobang, meninggal awal Mei karena serangan jantung. Peristiwa kematian Hu, tokoh yang menjadi idola mahasiswa karena sikapnya yang moderat, menjadi titik awal ledakan demonstrasi yang berlarut-larut di Cina.

Pertarungan antara kelompok Zhao melawan Li Peng mencerminkan bahwa perubahan di dalam masyarakat Cina yang didorong oleh Empat Program Modernisasi Deng, belum mencapai sasaran yang diinginkan, atau mungkin telah menyimpang dari arah yang disasarkan semula. Itulah yang menyebabkan mahasiswa berang. Pemuda-pemuda Cina yang tiap tahun mengalir ke Eropa dan Amerika dalam rangka studi, melihat sejumlah kontroversi dalam arah dan makna perubahan di negaranya sendiri.

Sejumlah kontroversi yang mencolok, seperti nepotisme, korupsi dan partai yang tidak cukup menjadi di-

Unjuk rasa ini merupakan infestasi pertarungan dikalangan pejabat tinggi

Digitized by Google

namo perubahan, menyebabkan demonstrasi melanda Tiananmen dan menyebar ke berbagai ibukota propinsi negeri itu. Tetapi seperti diakui oleh mahasiswa, arah perjuangan mereka, tidak untuk menggugat eksistensi partai komunis atau mendongkel para pemimpin negeri, walaupun kemudian demonstrasi mahasiswa yang semakin emosional oleh karena pemberlakuan UU Darurat Perang di Beijing yang diumumkan Li Peng, menyerukan agar perdana menteri itu dipecat saja. Bahkan perkembangan selanjutnya, mereka pun menuntut Deng agar mundur saja ketika arsitek pembaruan itu malah berpihak pada Li Peng dan kawan-kawan.

Perkembangan sementara menunjukkan pergolakan kekuasaan itu dimenangkan oleh Li Peng yang didukung oleh Presiden Yang Shangkun dan Deng sendiri. Sedangkan Zhao yang didukung Menteri Pertahanan Qin Jiwei dan Ketua Parlemen Wan Li berada di pihak yang kalah. Masuk dalam jajaran Zhao adalah Hu Qili, tokoh yang menjadi anggota tetap Politbiro.

Apapun penyelesaian yang dicapai terhadap demonstrasi mahasiswa dan pergolakan kekuasaan itu, kedua peristiwa ini merupakan yang paling seru dalam sejarah Cina sejak meninggalnya Mao di tahun 1976. Demonstrasi mahasiswa di Tiananmen bahkan dilukiskan sebagai revolusi. Sedangkan pertarungan antara Zhao melawan Li digambarkan sebagai yang paling sengit sejak Revolusi Kebudayaan.

Momentum pertarungan kedua pemimpin Cina ini, meletus ketika keduanya sama-sama mengunjungi mahasiswa yang berdemonstrasi dan sekitar 3000 lainnya melakukan mogok makan di Tiananmen. Dalam dialog dengan mahasiswa itu, Li Peng mengancam akan mengambil tindakan keras, sementara Zhao dengan berlinang air mata meminta mahasiswa agar menghentikan kegiatan mereka yang merusak citra partai dan wibawa pemerintah di mata internasional. Setelah kembali dari Tiananmen, Li mengadakan rapat dengan para pemimpin partai dan militer dan menghasilkan keputusan yang memberlakukan UU Darurat Perang di delapan wilayah kota Beijing.

UU Darurat itu, yang semula menyulut kemarahan mahasiswa dan nyaris menjadi bumerang bagi Li Peng, kemudian berbalik menjadi kemenangan kelompok garis keras, setelah Deng ikut menuduh mahasiswa dan Zhao sebagai "perampok". Sejak pulang dari Tiananmen, Zhao menghilang. Surat kabar partai, Harian Rakyat, yang sebelumnya mengecam Li Peng, kemudian berbalik mendukung Li Peng yang mendapat angin dari Deng. Zhao dan kawan-kawan bahkan ramai dituduh sebagai komplotan yang ingin melakukan makar. Terminologi makar itu, untuk pertama kali dikemukakan seorang mantan anggota Politbiro lewat televisi nasional, setelah surat kabar setempat ramai-ramai meninggalkan Zhao. Tokoh yang jarang muncul itu menuduh Zhao melakukan makar. Mungkin karena itu, Zhao dan kawan-kawan termasuk ketua parlemen Wan Li dikenakan tahanan rumah.

Pertarungan dalam kepemimpinan di Cina, memang belum usai. Li Peng yang belakangan memenangkan dukungan partai, belum merasa aman jika militer dan Deng sendiri belum berada di belakangnya.

Deng memang belakangan seperti meninggalkan anak kesayangannya Zhao Ziyang. Tetapi bila Deng mendepak Zhao dan mendukung Li sepenuhnya, maka atributnya sebagai tokoh reformis terkubur. Bagaimana pun juga Deng yang kini berusia 84 tahun itu, ingin dikenang sebagai tokoh pembaharu, yang membedakan dia dari Mao Zedong. Oleh karena itu, selama dia masih memainkan peranan sebagai "Khomeini Cina",a dia akan menendang juga Li Peng. Dengan demikian Deng berhasil memperlihatkan sikapnya yang adil terhadap dua arus pemikiran yang dia sendiri ragu-ragu membelanya.

Kunci dari pertarungan di Cina juga terletak di tangan militer. Walaupun Deng telah menempatkan militer di luar arena kekuasaan politik tetapi dalam kenyataan militer masih sangat berperanan dalam pemerintahan Cina dewasa ini. Dan satu fenomena yang tak boleh dilupakan bahwa militer Cina akan selalu muncul sebagai penentu di kala pertarungan kekuasaan partai mencapai titik kritis. Pertarungan antara Zhao dan Li Peng yang belum tuntas itu juga disebabkan karena militer belum menentukan sikap untuk berpihak.

Menteri Pertahanan Qin Jiwei yang merupakan teman Zhao enggan mendukung Li Peng. Itu sebabnya mengapa militer yang diperintahkan untuk mengatasi demonstrasi di Tiananmen hanya bersiaga saja di luar kota Beijing dan "mengalah" terhadap hadangan massa. Satuan ini ditarik kembali ke barak mereka, dan diganti oleh divisi yang lebih setia kepada perintah Deng Xiaoping dan Yang Shangkun. Tetapi karena posisi Deng yang ragu menggunakan kekerasan, maka pasukan pun tidak segera menyerbu Tiananmen.

Militer di Cina mulai sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menjadi pengabdi partai. Mereka tidak boleh dipakai untuk menggunakan kekerasan pada saat partai kewalahan menghadapi kemarahan rakyat yang tidak puas dengan segala macam salah urus dalam pemerintahan.

Dan andaikata, Li Peng benar-benar

Digitized by Google

muncul sebagai pemenang dalam pertarungan kekuasaan itu, maka dia harus mengorganisir kekuatan konservatif sedemikian rupa sehingga kekuasaannya akan aman. Tanpa jaminan itu, terutama dari kalangan militer, maka kelompok Zhao akan kembali muncul menandatang.

Kerawanan dalam elite politik di Cina disebabkan oleh dua fenomena dasar. Pertama, Deng Xiaoping yang kini 84 tahun, tidak lama lagi akan menghilang dari struktur kekuasaan di Cina, baik karena usia maupun kemungkinan meninggal, mengingat Deng sekarang sakit-sakitan. Fenomena kedua, masyarakat Cina, terutama mahasiswa dan kaum muda, mulai meragukan eksistensi semangat pembaruan di Cina sendiri. Mereka bertanya-tanya, setelah Deng tutup usia, kemana dan bagaimana pembaruan di negeri berpenduduk lebih dari 1 milyar manusia itu?

Tentang proses suksesi itu dan arah serta watak epmbaruan, akan sangat ditentukan siapa dari kedua kelompok yang bersaing ini akan memenangkan pertarungan di antara mereka. Masyarakat Cina, tidak mempersoalkan apakah sistim kenegaraan yang dipakai di negeri itu didasari oleh paham komunisme atau tidak. Yang jelas mereka butuh perubahan, karena perubahan itu sendiri adalah kebutuhan universal baik di negara yang berdasarkan demokrasi liberal maupun di negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet.

Bila sekarang Deng kelihatan lebih memihak kepada kelompok garis keras, itu hanya disebabkan oleh pertimbangan kemurnian ideologi. Sejak melancarkan pembaruan di tahun 1978, partai komunis merasa bahwa mereka melalaikan tugas pendidikan politik khususnya di bidang ideologi. Akibatnya, beberapa prinsip dasar dari komunisme melemah. Itulah yang membuka peluang anarkisme, seperti yang dituduhkan kepada mahasiswa di Tiananmen itu.

Gerakan mahasiswa maupun massa di Cina, berbeda dari gerakan serupa di negara-negara komunis di Eropa Timur. Kalau di Eropa Timur yang mengaku komunis lebih disebabkan basa-basi, maka di Cina gerakan itu beriktikad memperkokoh komunisme, dengan tujuan progresif. Di Eropa gerakan seperti di Chekoslowakia tahun 1968 dan di Hongaria sekarang, bertujuan menghilangkan kontrol partai yang berlebihan.

Dalam sejarah, pergantian pimpinan di Cina, selalu disebabkan oleh gejolak dan protes sosial. Sejarah menunjukkan secara gamblang tentang proses suksesi baik dari dynasti Manchu sampai dengan kekalahan Mao dalam Revolusi Kebudayaan di tahun 1968.

Sedangkan pergolakan mahasiswa dengan atribut pembaruan, dimulai sejak 4 Mei 1919. Pada waktu itu sejumlah mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa kembali ke negerinya dan memimpin pemberontakan yang menggoyang kekuasaan. Peristiwa 4 Mei itu di kalangan mahasiswa dan tokoh reformis dianggap sebagai pilar inspirasi tentang perubahan dan modernitas.

Gejolak reformasi yang timbul hampir setiap 10 tahun di Cina setelah itu, tidak menggoyahkan cengkeraman partai komunis yang didirikan dua tahun setelah peristiwa 4 Mei, yaitu pada tahun 1921. Kehadiran partai komunis dengan demikian menjadi bagian yang telah diterima dalam kehidupan masyarakat Cina, walaupun budaya Confusius, sangat mengagungkan faktor kepatuhan.

Pertarungan kekuasaan di Cina saat ini, dan tekad mahasiswa menjatuhkan Li Peng, merupakan ujian bagi Deng Xiaoping, sang arsitek pembangunan dan reformasi Cina. Dengan membela Li Peng, apakah Deng akan mengangkangi suara mahasiswa yang mendesak dihapusnya korupsi dan nepotisme? Bila Deng nekad dengan pendiriannya ini, mungkin dia akan pasrah bila pada saatnya nanti, tokoh ini tidak dianggap pahlawan yang patungnya serta fotonya tidak pantas untuk digantung di Tiananmen.

Sikap Deng yang agak membingungkan dewasa ini menyebabkan orang mulai berancang-ancang dengan sejumlah analisa tentang pribadi tokoh yang satu ini. Sebagai seorang reformis

yang telah membangun negerinya dengan sejumlah konsep pembaruan dan hasil nyata tentunya, Deng memang pantas menyandang gelar reformis itu. Tetapi sikapnya yang menendang Hu Yaobang, kemudian membelakangi Zhao serta tutup kuping terhadap suara mahasiswa di Tiananmen, menyebabkan orang pun bertanya, ''Apakah Deng juga seorang demokratis?''

Selama pertikaian antara Zhao dan Li Peng dan gejolak mahasiswa yang kemudian secara berani menuntut Deng mundur, dia tidak bersuara sedikit pun. Para mahasiswa marah, ketika Deng menulis sebuah artikel dalam Harian Rakyat pertengahan bulan lalu yang isinya menuduh mahasiswa sebagai kekuatan yang merusak.

Pertarungan kekuasasan di Cina yang biasanya tergambar dalam gejolak mahasiswa, jauh dari selesai, walaupun Li Peng sekarang muncul sebagai pemenang dalam pertarungannya dengan Zhao cs. Pertarungan di negeri tirai bambu itu, memang dalam banyak hal sangat tertutup. Justru karena itu, pertarungan tersebut menarik untuk diamati. □ (TG)

Digitized by Google

Oleh: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Pajak dan Pelayanan Masyarakat

Sejak pelaksanaan Undang-undang Pajak yang baru, khususnya dalam tingkat intensitas operasional dan fungsi strategisnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun anggaran 1988/1989 yang lalu, kajian kaitan antara pajak dengan pelayanan masyarakat makin menggema dalam berbagai lingkungan dan lapisan masyarakat.

Hasil dari kajian tersebut, pada umumnya menyimpulkan perlunya keseimbangan antara peningkatan dan intensitas operasional serta fungsi perpajakan dengan peningkatan dan pengembangan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah. Disamping itu, kajian bukan saja menyelusuri aspek-aspek analisis ekonomi dan keuangan, bahkan juga sampai pada hal yang lebih mendasar yang menyangkut kaitan pajak dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.

Ini berarti bahwa implikasi adanya ketidakseimbangan penarikan pajak dari masyarakat dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya bukan hanya menyangkut teknis sistem perpajakan, bahkan menyangkut aspek sistem pemerintahan secara menyeluruh, dimana dampaknya dapat menentukan stabilitas politik.

Oleh karena itu, perkembangan dinamika pemikiran masyarakat yang demikian itu, telah menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan pemerintahan. Khususnya dalam rangka pendayagunaan aparatur negara, agar setiap aparatur benar-benar dapat berpola pikir, berdaya kreasi, berguna-fungsi dan bertingkah-sikap sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Sasaran program pembangunan aparatur yang demikian itu harus dapat dicerminkan dalam satu kesatuan strategi, antara upaya peningkatan kesadaran kewajiban masyarakat membayar pajak di satu pihak, dan upaya peningkatan kesadaran pengabdian aparatur terhadap masyarakat di pihak lain.

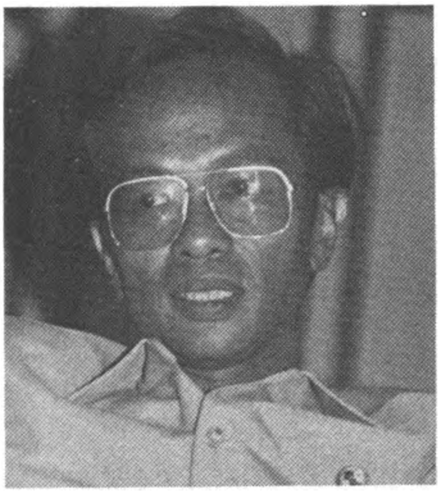

Sarwono Kusumaatmadja

Pajak Tolok Ukur Kemandirian Bangsa dan Negara

Kemandirian suatu Bangsa dan Negara dimanapun merupakan dasar pokok dari Bangsa dan Negara tersebut untuk dapat hidup lestari, berkembang dan maju menuju keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pembangunan nasional jangka panjang pertama Indonesia sampai dengan Pelita V sekarang ini, pada dasarnya adalah ingin membangun konstruksi kemandirian bangsa, agar di masa selanjutnya proses pembangunan dapat berjalan dalam kemantapan sistem dan kemampuan sendiri. Inilah mungkin pengertian politis yang mendasar dari canangan tinggal landasnya pembangunan nasional kita di Pelita VI nanti.

Jika kita ibaratkan kehidupan bernegara dan membangun ini sebagai suatu unit usaha ekonomi, maka kaitan antara proses kehidupan negara dan pembangunan dengan pajak dari masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut: makin banyak pendapatan masyarakat yang diinvestasikan kepada negara (baca pajak), maka hasil nilai tambah yang akan diperoleh kembali oleh masyarakat (baca pelayanan aparatur kepada masyarakat) tentu seharusnya akan lebih besar (baca aman, lancar, pasti, serta adil bagi kegiatan usaha serta kehidupan masyarakat).

Disinilah letak strategis potensi, kontribusi dan hak rakyat dalam proses kehidupan bernegara dan membangun, yang bermakna adanya keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab dengan perolehan imbalan haknya untuk dapat hidup lebih berkembang dan lebih sejahtera.

Oleh karena itu, sistem proses transaksi jasa kewajiban dan tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat perlu dibenahi secara konsepsional, rasional dan proporsional sesuai dengan tuntutan setiap kondisi yang ada. Ini berarti, bahwa untuk mensukseskan program perpajakan, pembenahannya bukan saja pada sistem perpajakan, tetapi perlu disinkronkan pula dengan pembenahan menyeluruh setiap unit pelayanan masyarakat, sejalan dengan intensitas garapan program perpajakan itu sendiri.

Pajak dan Pelayanan Masyarakat

Seperti telah disinggung pada uraian sebelumnya, kaitan antara pajak dan pelayanan masyarakat memerlukan kesatuan sistem dasar dalam menumbuh-kembangkan kesadaran warga negara memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Ini sejalan dengan makna dasar dari konsiderans Undang-undang Perpajakan tahun 1984 yang berbunyi: *"bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan saran peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional".*

Ini menunjukkan adanya dua aspek pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu: 1. Pelayanan dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan, agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya secara murah, lancar, cepat, tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pelayanan dalam rangka pelaksanaan perwujudan hak warga

Digitized by Google

negara untuk mendapatkan imbalan pelayanan bagi kesejahteraan dan kehidupannya secara adil dan merata.

Kedua aspek pelayanan di atas memerlukan kesatuan sistem dan strategi operasional, jika Undang-undang Pajak ingin dioperasionalkan dan difungsikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

— Sasaran dari program ini adalah untuk memantapkan sistem manajemen setiap unit organisasi pemerintahan, sehingga mampu merencanakan sasaran, menyusun program pelaksanaan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasinya secara efisien, efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat

Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa rencana sasaran perpajakan sulit untuk dicapai serta ditumbuhkembangkan, apabila titik tolak strateginya *hanya berorientasi pada lingkup masalah pelaksanaan teknis perpajakan saja.* Bahkan dapat dikatakan bahwa penggalakan pemungutan pajak dengan mengabaikan pelayanan umum dalam arti yang luas, hanya menyebarkan ketidak-adilan yang pada gilirannya akan membawa akibat negatif bagi perkembangan bangsa.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar pajak, pemerintah mengupayakan pula peningkatan kesadaran dan kemampuan pelayanan aparatur kepada masyarakat yang dituangkan dalam program dan strategi pendayagunaan aparatur negara dalam Pelita V.

Prioritas Program Pendayagunaan Aparatur Negara

Memperhatikan tuntutan tugas aparatur pemerintah di masa mendatang dan kondisi kemampuan pelayanan aparatur dewasa ini, maka prioritas strategi penyusunan program pendayagunaan aparatur dalam Pelita V adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Penerapan Analisis Jabatan — Untuk dapat berjalannya struktur dan hirarkhi setiap jabatan sesuai dengan fungsinya secara efisien dan efektif dalam kesatuan proses sistem manajemen pada pelaksanaan tugas setiap organisasi pemerintahan, maka pengadaan dan penentuan spesifikasi pada setiap jabatan harus melalui analisis jabatan terlebih dahulu. Berdasarkan spesifikasi jabatan tersebut ditentukan formasi kebutuhan pegawai.

Dengan demikian, sasaran analisis jabatan merupakan bagian dari usaha peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pelaksanaan tugas unit-unit organisasi pemerintahan.

Penyusunan Jabatan Fungsional — Berhasilnya tugas suatu organisasi dengan baik selalu ditentukan oleh dua kelompok pelaksana, yaitu kelompok pelaksana manajerial dan kelompok pelaksana teknis.

Struktur dan hirarkhi proses tugas manajerial dengan tugas teknis dalam suatu organisasi, tergantung dari beban tugas dan kespesifikan tugas dari organisasi tersebut.

Dalam kenyataan dewasa ini, rancangan strategi organisasi pemerintahan masih terlalu bertumpu pada pelaksanaan tugas struktural atau tugas manajerial, padahal setiap lembaga pemerintahan mempunyai spesifikasi tugas teknis yang pada dasarnya harus dilaksanakan secara fungsional dengan dukungan tingkat profesionalisme tertentu.

Disinilah letak salah satu kelemahan pelaksanaan tugas unit organisasi pemerintahan selama ini, yang dampaknya bukan saja menimbulkan kesulitan dalam pembinaan karier pegawai, tetapi juga berdampak pada kurangnya mutu pelayanan aparatur terhadap masyarakat.

Untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan tersebut, pemerintah harus mengembangkan jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

Dengan dikembangkannya jabatan fungsional, pemerintah secara bertahap bukan saja dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas aparatur, tetapi sekaigus juga memberi ruang gerak peningkatan karier, mutu dan profesionalisme aparatur, yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya fungsi dan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat.

Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur — Lemahnya mutu kepemimpinan aparatur selama ini, disebabkan karena kurangnya wawasan kepemimpinan aparatur baik secara vertikal maupun horizontal, kurangnya kemampuan teknis kepemimpinan dan lemahnya sistem penilaian dan pengangkatan pemimpin pada setiap jabatan pemerintahan.

Kondisi mutu kepemimpinan yang demikian berakibat kurang terintegrasi dan konsistennya arahan kebijaksanaan organisasi serta tidak dapat dioptimalisasikannya sumber daya organisasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian kebijaksanaan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memperbaiki kondisi kepemimpinan aparatur yang demikian, maka sasaran program peningkatan mutu kepemimpinan adalah dengan mengadakan sistem persyaratan jabatan dan pengangkatan jabatan yang legalitasnya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Penerapan sistem ini akan dilakukan secara konsekuen, dengan titik berat pada jabatan eselon III, karena jabatan eselon III merupakan jabatan potensial dan strategis, baik dilihat dari posisinya sebagai pengendali operasional pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maupun sebagai kader inti untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Digitized by Google

Program peningkatan mutu kepemimpinan yang berbentuk pembinaan teknis dilakukan melalui jenjang pendidikan kepemimpinan secara terarah, konsepsional dan terintegrasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan tugas, manajemen dan teknologi.

Penyederhaan Prosedur Kepegawaian — Untuk memacu prestasi pegawai pemerintah dalam serba kekurangan sekarang ini, secara jujur harus diakui merupakan hal yang tidak mudah. Namun harus disadari bahwa pemenuhan insentif kebutuhan materi saja belum menjamin kepastian adanya kenaikan prestasi kerja yang seimbang, karena materi bukanlah satu-satunya kebutuhan yang dapat memberi kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia.

Salah satu bentuk insentif yang menyentuh motivasi kerja adalah adanya pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja secara wajar.

Dalam kondisi kemampuan keuangan negara yang sangat terbatas dewasa ini, sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan gaji pegawai ke tingkat yang lebih memadai, namun bukan berarti tidak adanya peluang untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Disamping pegawai negeri mempunyai status kehormatan tersendiri dalam masyarakat, usaha-usaha yang memperlancar perolehan hak-hak pegawai, akan mampu pula mendorong dan merangsang motivasi dan prestasi kerja pegawai. Apabila program ini dapat sejalan dengan program pendayagunaan aparatur lainnya, maka motivasi, dinamika dan disiplin kerja akan tergerak ke arah peningkatan produktivitas kerja, yang akhirnya akan mempunyai dampak pula pada performa pelayanan aparatur kepada masyarakat.

Oleh karena itu, program penyederhanaan prosedur kepegawaian dalam kondisi pegawai yang serba kekurangan dewasa ini, menjadi amat penting artinya sebagai alternatif pilihan dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai.

Penyederhanaan Tatalaksana Pelayanan Umum — Kondisi kemampuan pelayanan aparatur kepada masyarakat dewasa ini bukan saja menjadi keluhan dan gunjingan di masyarakat, tetapi juga menjadi keprihatinan dan perhatian khusus dari pemerintah.

Dari hasil inventarisasi dan kajian permasalahan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor MENPAN bersama Departemen/Instansi Pemerintah yang terkait, ternyata permasalahannya bukan saja terletak pada ketatalaksanaan tetapi juga menyangkut rumusan konsepsi pelayanan umum itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang menyusun pedoman pendayagunaan dan pengendalian pelayanan umum kepada masyarakat, yang menyangkut rumusan materi-materi tujuan, sasaran, lingkup pelayanan, pola pelayanan, tatalaksana pelayanan, pungutan/biaya jasa pelayanan serta sistem pengawasan dan pengendalian pelayanan.

Pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi pelaksanaan penyederhanaan tatalaksana pelayanan umum oleh setiap instansi pemerintah yang terkait. Dengan konsepsi sistem yang seragam memungkinkan diciptakannya suatu standar pelayanan yang baku.

Jika sasaran program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka dampaknya sangat luas bagi peningkatan pelaksanaan kehidupan, keadilan dan disiplin masyarakat maupun aparatur.

Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan — Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang applikasi manajemen di dunia yang sangat pesat di penghujung abad ini, memberi gambaran bahwa kondisi persaingan dewasa ini terletak pada proses ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, dalam rangka modernisasi organisasi pemerintahan, sistem informasi administrasi pemerintahan harus makin dimantapkan. Pra kondisi yang harus diciptakan untuk itu adalah adanya pembakuan sistem manajemen dan sistem operasional setiap unit pemerintahan dalam kesatuan totalitas sistem pemerintahan.

Kondisi kemampuan sistem informasi administrasi pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, adalah terjadinya kelambatan, berbelit-belit, simpang siur dan tidak konsistennya kebijaksanaan pelayanan.

Ke-enam program pendayagunaan aparatur yang telah diuraikan di atas, produknya sangat erat kaitannya dalam rangka standarisasi administrasi pemerintahan, yang efisiensi dan efektivitas operasionalnya memerlukan dukungan sistem informasi administrasi pemerintahan.

Sasaran akhir yang hendak dicapai dari program ini adalah terlaksananya otomatisasi sistem tatalaksana pemerintahan dalam kesatuan siklus manajemen pemerintahan. Langkah-langkah tatalaksana administrasi pemerintahan yang demikian akan memberikan kepastian dan ketepatgunaan pelayanan aparatur kepada masyarakat. Kondisi pelayanan yang demikian akan mendorong masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan tarap hidupnya, yang secara langsung akan mempengaruhi kontribusinya berupa pajak bagi pembiayaan negara dan pembangunan.

Penitikberatan Otonomi di Daerah Tingkat II — Penitikberatan otonomi di Daerah Tingkat I bukan saja merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, juga dilihat dari sudut teknis sistem manajemen merupakan batasan yang ideal dari lingkup optimalisasi kemampuan jangkauan pelayanan aparatur kepada masyarakat.

Masalah yang dihadapi di Daerah dewasa ini, adalah bagaimana aparatur di Daerah berkemampuan menggunakan otoritasnya untuk menggali dan mengendalikan potensi daerahnya, bukan saja dengan wawasan daerah tetapi juga berwawasan wilayah.

Di pihak lain, perlunya kesadaran aparatur di tingkat Pusat, bahwa bertumpunya tugas dan wewenang di Pusat secara terus-menerus, pada suatu waktu akan sampai pada suatu kondisi dimana aparatur Pusat akan kewalahan sendiri dalam mengendalikan kebijaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh karena pada akhirnya area operasional wewenang Pusat justru berada juga di Daerah, disamping pengendalian wewenang secara terpusat sulit menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal.

Oleh karena itu, program ini bersasaran membina kemampuan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan di Daerah Tingkat II, agar mampu berpredikat untuk menjunjung beban tugas pengembangan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Sasaran lain adalah mengusahakan pelimpahan kewenangan Pusat kepada Daerah secara bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mempunyai rasa tanggung jawab atas berlangsungnya pembinaan kemampuan teknis Daerah secara terus menerus oleh Pusat.

Dengan pelaksanaan program yang demikian, secara bertahap Daerah akan lebih mampu menggali dan mengeksploitasi sumber daya Daerah secara lebih efisien, efektif, dan produktif yang pada gilirannya akan memberi hasil bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara lebih adil dan merata.□

Digitized by Google

Oleh : Rusli Desa

Enambelas tahun yang lalu:

Jawaban Presiden Soeharto & Memorandum DPR Tentang Miniatur Indonesia Indah

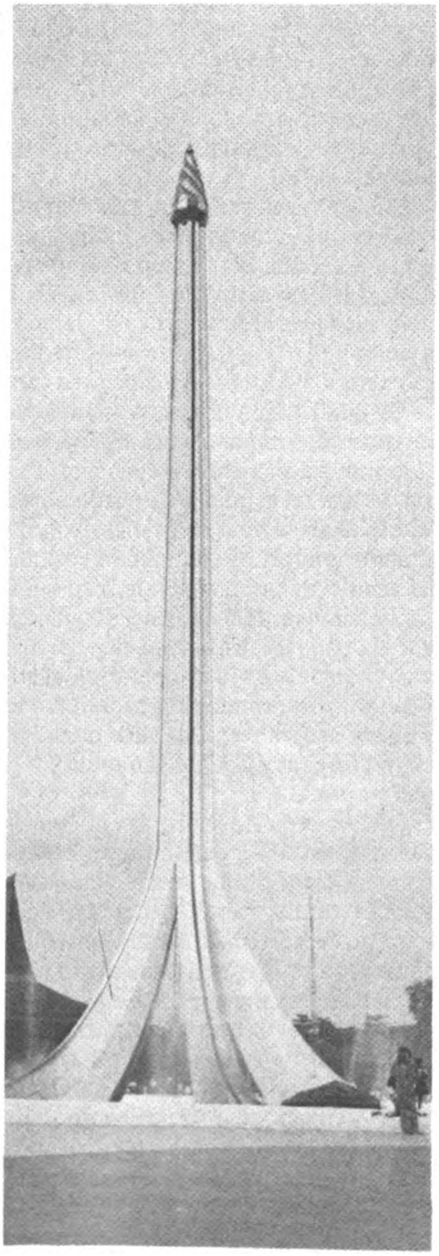

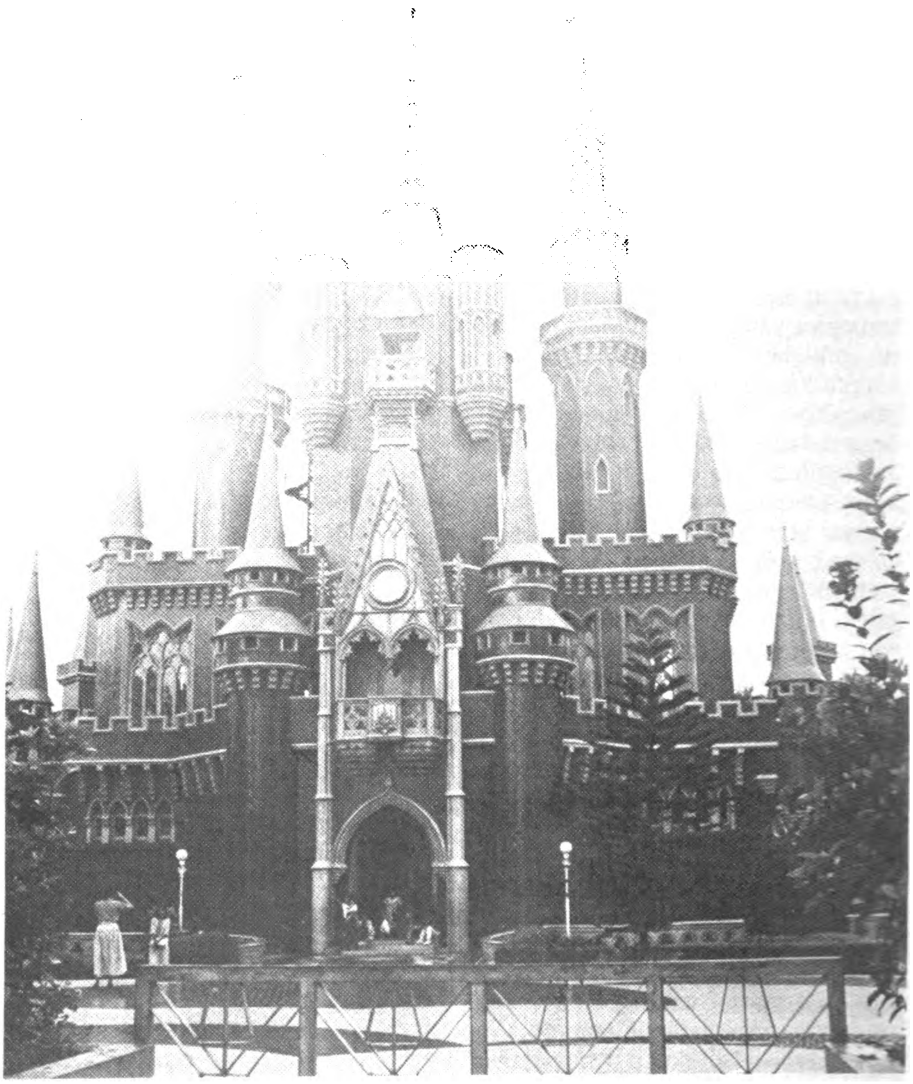

Proyek Miniatur Indonesia Indah usaha pihak swasta

Enam belas tahun yang lalu orang memperbincangkan Proyek Miniatur Indonesia Indah. Ada terjadi beberapa aksi di Jakarta. Aksi-aksi itu telah menjalar ke daerah-daerah. Makin lama kelihatannya aksi-aksi itu makin meningkat dengan berbagai cara dan bentuk. Memang kalau tidak awas akan situasi yang terjadi serta merta hanyut. Orang akan menyaring/memfilter lebih dahulu, apakah dibalik aksi-aksi tersebut. Apa yang tersirat dari yang tersurat. Dan tentu menganalisa dari mana "angin bertiup" sebenarnya. Ini bukan berprasangka, melainkan sudah lazim dalam dunia politik adanya perkiraan atau analisa yang tajam. Diperlukan penglihatan lebih jauh kepada masa lalu, masa kini dan masa depan. Target apakah yang dikehendaki oleh sementara pihak yang mengadakan aksi-aksi yang berkaitan dengan Proyek Miniatur Indonesia Indah.

Proyek Miniatur Indonesia Indah adalah usaha dari pihak Swasta yang ditangani oleh Yayasan Harapan Kita. Ketua Bappenas Prof. Widjoyo waktu itu telah menyatakan "Proyek MII adalah Proyek Swasta". Proyek yang oleh swasta dalam hal pembiayaan dapat berbentuk investasi langsung. Un-

Digitized by Google

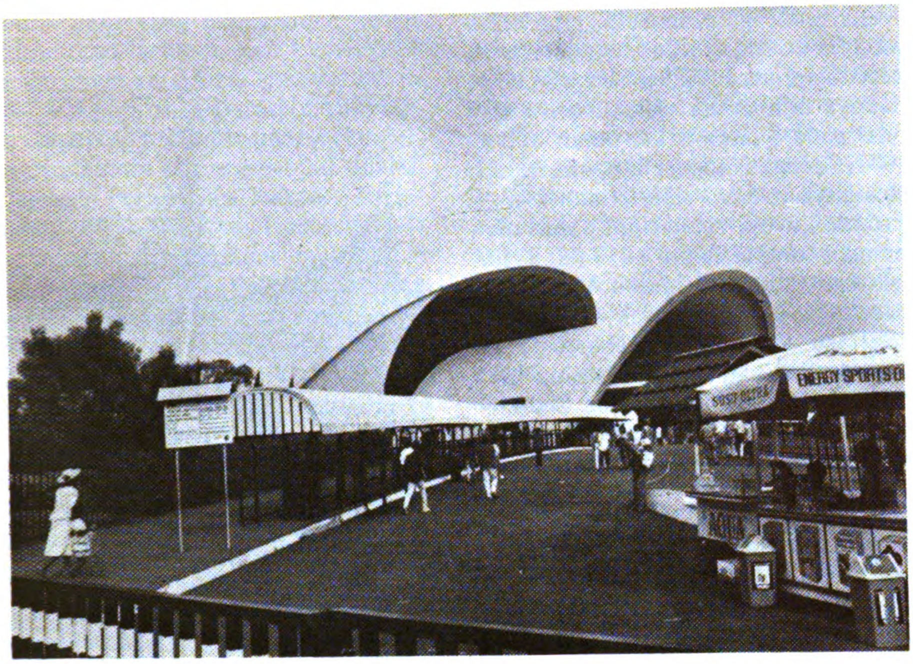

Keong Emas

wa dalam alam demokrasi ini wajar adanya perbedaan-perbedaan pendapat, kritik-kritik serta pertentangan, tetapi apabila hal itu telah melewati batas-batas keserasian demokrasi maka bukan lagi merupakan bumbu-bumbu yang menyedapkan demokrasi tetapi dapat mengganggu ketenteraman dan kestabilan dan hasilnya tidak lagi demokratis. Presiden Soeharto juga menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang memakai kedok demokrasi dengan kritik-kritik dan saran-saran sebagai reaksi atas rencana Pembangunan Proyek Miniatur Indonesia Indah. Ditekankan oleh Presiden Soeharto sebagai seorang suami dari pemrakarsa proyek MII, ia mengetahui dengan jelas tentang rencana tersebut. Dilihat dari segi dan tujuannya maka proyek tersebut tidak bertentangan dengan strategi jangka panjang yaitu perjuangan bangsa dalam menuju rakyat yang adil dan makmur. Dilihat dalam jangka pendek tidak pula

dang-Undang tentang investasi juga telah ada yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, maupun Penanaman Modal Luar Negeri juga telah ada Undang-Undangnya, yang juga diperkuat oleh peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian tidaklah memberatkan pemerintah.

Sebenarnya keterangan-keterangan yang diberikan oleh Prof. Widjoyo itu telah berkali-kali muncul dari berbagai pihak terutama dari kalangan Pemerintah atau berwenang, baik dalam dialog dengan delegasi-delegasi yang berminat untuk diberi keterangan maupun terhadap siapa saja yang ingin mengetahui duduk persoalan Proyek MII. Tetapi yang kelihatan kepermukaan bukan meredanya keadaan, melainkan makin menghangat dan merasa tidak puas. Hanya saja dengan situasi yang menghangat akan ketahuanlah apa maunya sebenarnya. Dalam bertanya-tanya demikian orang tentu akan berpaling pula bagaimana kiranya tindakan atau jawaban yang akan diberikan oleh Presiden Soeharto dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada saat peresmian Rumah Sakit Pertamina Pusat di Jakarta Presiden Soeharto memberikan jawaban yang pasti dan mengejutkan tentang aksi-aksi yang menentang Proyek MII. Jawaban yang diberikan oleh Presiden Soeharto cukup keras dan diluar dugaan sementara kalangan/kaum politisi waktu itu.

Presiden Soeharto menyatakan bah-

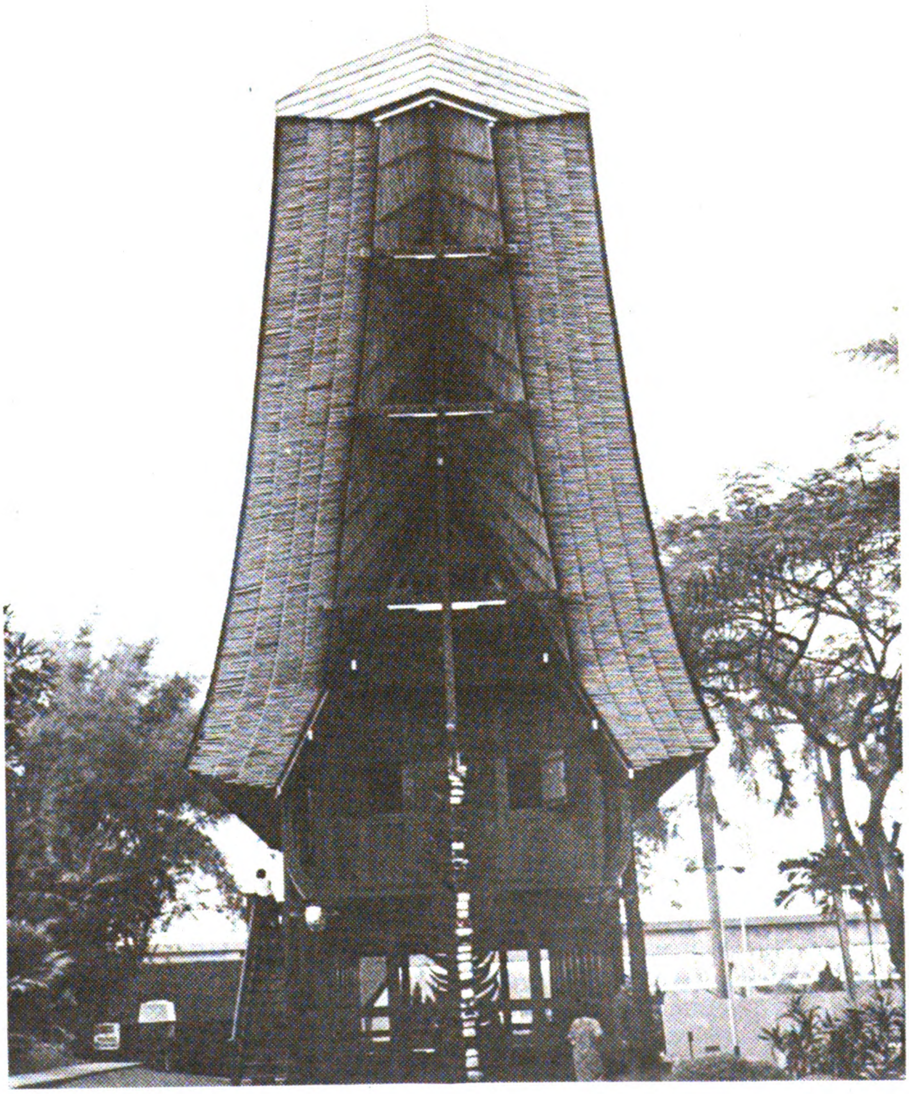

Rumah adat tanah Toraja

Digitized by Google

mengganggu strategi pembangunan bangsa. "Saya sebagai pimpinan Pemerintah menjamin bahwa pembangunan tersebut tidak akan mengganggu keuangan Negara dan penerimaan keuangan Negara".

Presiden Soeharto malahan lebih menekankan lagi, bahwa sejak tahun 1968 issue tersebut sama saja, yaitu memutarbalikkan fakta-fakta, mencari kontradiksi. Orang-orangnya yang dipakai sama, dan yang dibelakang layar saya tahu sama pula. Tujuan isu politik tersebut ada dua kata Presiden yaitu jangka pendek mendiskriditkan Pemerintah dan Soeharto sebagai Presiden dan tujuan jangka panjang adalah mendepak ABRI dari kegiatan eksekutif disamping menghilangkan Dwi Fungsi ABRI serta menggiringnya ke tempat semula yaitu keamanan dan ketertiban saja. Kalau itu yang menjadi soal bukan Miniatur yang menjawab yang akan menjawab adalah ABRI. Disini saya tegaskan bahwa ABRI tidak akan melepaskan Dwi Fungsinya. Oleh Presiden dinyatakan lagi bahwa apabila saya sekarang menindak pasti mendapat dukungan dari ABRI. Begitu pula kalau ada yang mencoba-coba memakai hak berkedok demokrasi yang berlebih-lebihan sehingga mengganggu kestabilan tidak akan saya biarkan dan saya akan bertindak. Kalau ada ahli hukum yang mengatakan tidak ada landasan hukum untuk bertindak, buat saya mudah yaitu Super Semar saya pergunakan demi kepentingan Negara dan Bangsa. Saya akan bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan.

Memang cukup keras pidato Presiden Soeharto dikala itu. Presiden Soeharto orangnya terkenal tenang dan alon-alon waton klaton dalam mengambil segala sesuatu keputusan tetapi penuh dengan kepastian telah berkata sedemikian kerasnya. Berarti telah sampai pada titik puncak. Presiden Soeharto tentu tidak akan berkata sekedar gertak sambal. Ia berbicara dikala itu tentu dengan bahan-bahan yang masuk serta perkiraan dan analisa politik yang dalam. Presiden Soeharto memang tidak tunjuk hidung. Hanya yang merasa juga yang akan tahu. Disini diperlukan kearifan.

Tidak Tanggung-tanggung Lagi

Tidak tanggung-tanggung Presiden Soeharto membuka tabir persoalan. Sudah semenjak tahun 1968. Presiden Soeharto mengatakan lebih lanjut bahwa apabila sudah tidak menghendaki kepemimpinan Presiden Soeharto hendaknya dijalankan secara konstitusional pada Sidang MPR bulan Maret 1973, dengan mencalonkan orang-orangnya untuk Presiden dan Wakil Presiden tetapi kalau tidak sabar menunggu sampai tahun 1973 dapat dilakukan Sidang Istimewa MPR atas persetujuan DPR untuk mengganti Presiden. Presiden Soeharto juga mempersilahkan memilih orang lain untuk hasil yang lebih besar. Sedikitpun ia katanya tidak menyesal atau merasa kehilangan kedudukan.

DPR-RI Tidak Berdiam Diri

Melihat sikon yang terjadi, DPR-RI dikala itu tidak mau tinggal diam. Sementara DPR-RI sibuk dengan membicarakan Nota Keuangan dan RAPBN 1972/1973, DPR-RI tidak melupakan apa yang berkembang dalam masyarakat. DPR sebagai saluran pendapat rakyat secara konstitusional mempunyai kewajiban untuk menyalurkan pendapat/aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Apalagi

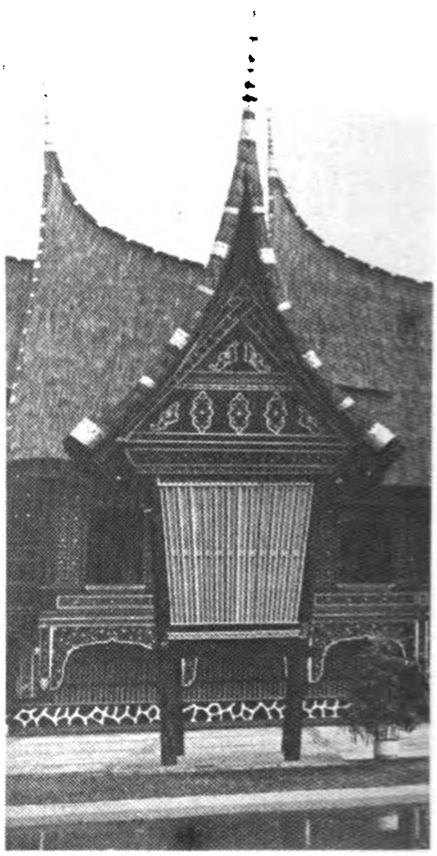

Rumah Gadang

Digitized by Google

setiap cara yang ekstra parlementer tidak akan ditolerir oleh Pemerintah (meminjam kata-kata Jenderal Sumitro waktu itu). Saluran untuk menyampaikan pendapat tidak boleh tertutup. Secara Konstitusional adalah lembaga Perwakilan Rakyat. Kedudukan DPR-RI sebagai penterjemah perasaan dan pendapat masyarakat dan sebagai partner Pemerintah tidak boleh tinggal diam atau sebagai penonton belaka. Pro dan kontra tentang Proyek MII telah terjadi.

DPR-RI harus mempunyai keberanian untuk berbuat. DPR-RI mengadakan dialog dengan semua pihak. Mengadakan dengar pendapat, dan dengar pendapat umum. Terasa DPR-RI memang tempat rakyat mengadu. Pintu DPR-RI terbuka lebar bukan angker. DPR-RI berurusan dengan rakyat tidak boleh berliku-liku bagaikan birokrat yang kaku. DPR-RI harus menyelam sampai kedasar. Dedikasi dan semangat kerja anggota waktu itu sangat tinggi walaupun kesejahteraan anggota masih terasa minim sekali. Kehadiran anggota sangat menggembirakan sampai masa jabatan berakhir. Keberanian dan semangat sangat menentukan bagi wakil rakyat. Jika diingat bahwa Penjelasan UUD 1945 antara lain ada mengatakan: "Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan". Jadi ada motivasi yang jelas sebagai pengabdi yang bersungguh-sungguh bukan hanya sekedar menumpang untuk kehidupan. Ada yang mendorong. Anggota waktu itu tidak memperdulikan masalah suka dan tidak suka yang penting membedakan yang benar dan tidak benar. Direcall atau tidak akibat tindakan politik dalam DPR-RI tidak dipikirkan. Sebab itu biasa dalam dunia politik, bahwa yang mungkin, bisa tidak mungkin dan yang tidak mungkin, bisa mungkin. Yang penting berbuatlah apabila hati nurani telah bicara. Sebab mendustai hati nurani sangatlah berat rasanya, dan bisa menjadi beban mental yang tidak ada akhirnya. Terasa benar rakyat itu terwakili. Sungguh situasi idealisme terasa sekali. Itulah realitas 16 tahun yang lalu. Banyak memorandum dan Pernyataan Pendapat dibuat yang isinya cukup tajam dan menggelitik. Dengan segala seninya bagai harus lepas dari lobang jarum.

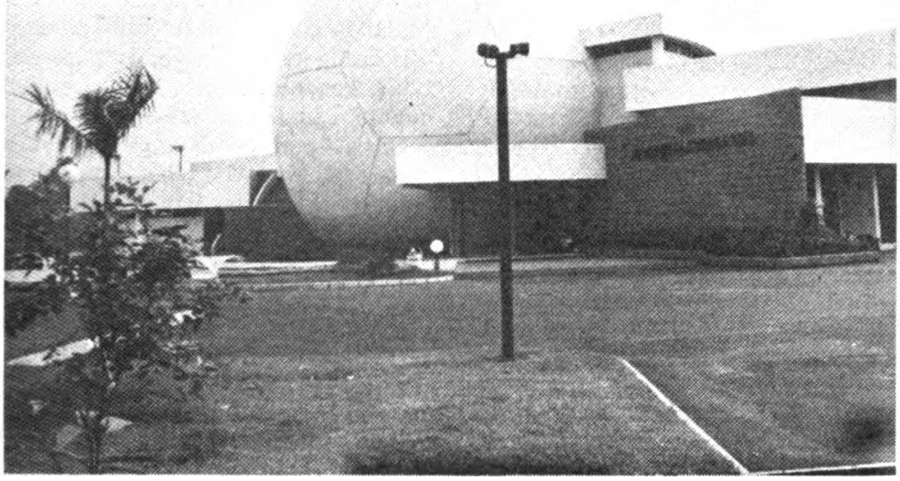

Musium olahraga

Atas dasar itulah maka dalam pemandangan umum tentang RAPBN 1972/1973 masalah Proyek MII ada disinggung oleh sementara pembicara. Akhirnya setelah Pemerintah memberikan jawaban atas pemandangan umum anggota DPR-RI tentang RAPBN dibentuklah Panitia Khusus tentang masalah Miniatur Indonesia Indah. Yang diketuai oleh Martono. Pansus MII itu berjumlah 23 orang, yang terdiri Wakil Fraksi Karya Pembangunan 12 orang, Wakil Fraksi Persatuan Pembangunan 5 orang, Wakil Fraksi ABRI 4 orang dan Wakil Fraksi Demokrasi Indonesia 2 orang.

Pansus MII bertugas: 1. Mengumpulkan bahan mengenai masalah Miniatur Indonesia Indah; 2. Mengadakan rapat-rapat kerja dengan pemerintah cq Menteri-Menteri yang bersangkutan dan mengadakan hearing dengan instansi yang bersangkutan serta mengadakan Public Hearing dengan pihak-pihak swasta yang bersangkutan. 3. Menyampaikan kepada Badan Musyawarah untuk kemudian dimintakan pengesahan dari Pleno DPR-RI. Dalam masa persidangan ke III tahun Sidang 1971/1972 sudah harus selesai tugas yang dibebankan kepada Pansus.

Pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat 4 Maret 1972 sampailah kepada suatu kesimpulan bahwa perlunya pengesahan Memorandum Panitia Khusus Miniatur Indonesia Indah DPR-RI menjadi Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Persetujuan Terhadap Laporan Panitia Khusus Miniatur "Indonesia Indah" DPR-RI No. 13/DPR-RI/III/71-72. Memorandum tersebut terdiri: a. masalah Miniatur Indonesia Indah. b. masalah hari depan Generasi Muda; c. kesimpulan umum.

Kesimpulan umum Memorandum DPR-RI tentang MII itu antara lain menyatakan bahwa DPR-RI sebagai lembaga politik yang mewakili kepentingan rakyat perlu mengemukakan pendapat atas Proyek Miniatur Indonesia Indah menurut proporsinya, termasuk adanya kegelisahan dalam masyarakat. Mengakui dan menghormati kebebasan hak azasi serta kewajiban setiap organisasi dan perorangan sepanjang tidak mengganggu dan merugikan pihak lain yang memperoleh jaminan yang sama dari UUD 1945. DPR-RI menerima baik jaminan Pemerintah bahwa pembiayaan negara dan skala prioritas Pelita tidak akan terganggu, menyerukan agar tidak diadakan pungutan-pungutan dana wajib dari dan di daerah dengan cara dan dalam bentuk apapun. Semua dilakukan secara wajar, tidak ada keluarbiasaan dan keistimewaan bersifat penyimpangan atau penyalahgunaan kedudukan/kekuasaan. Proyek MII dimulai setelah selesai feasibility report.

Digitized by Google

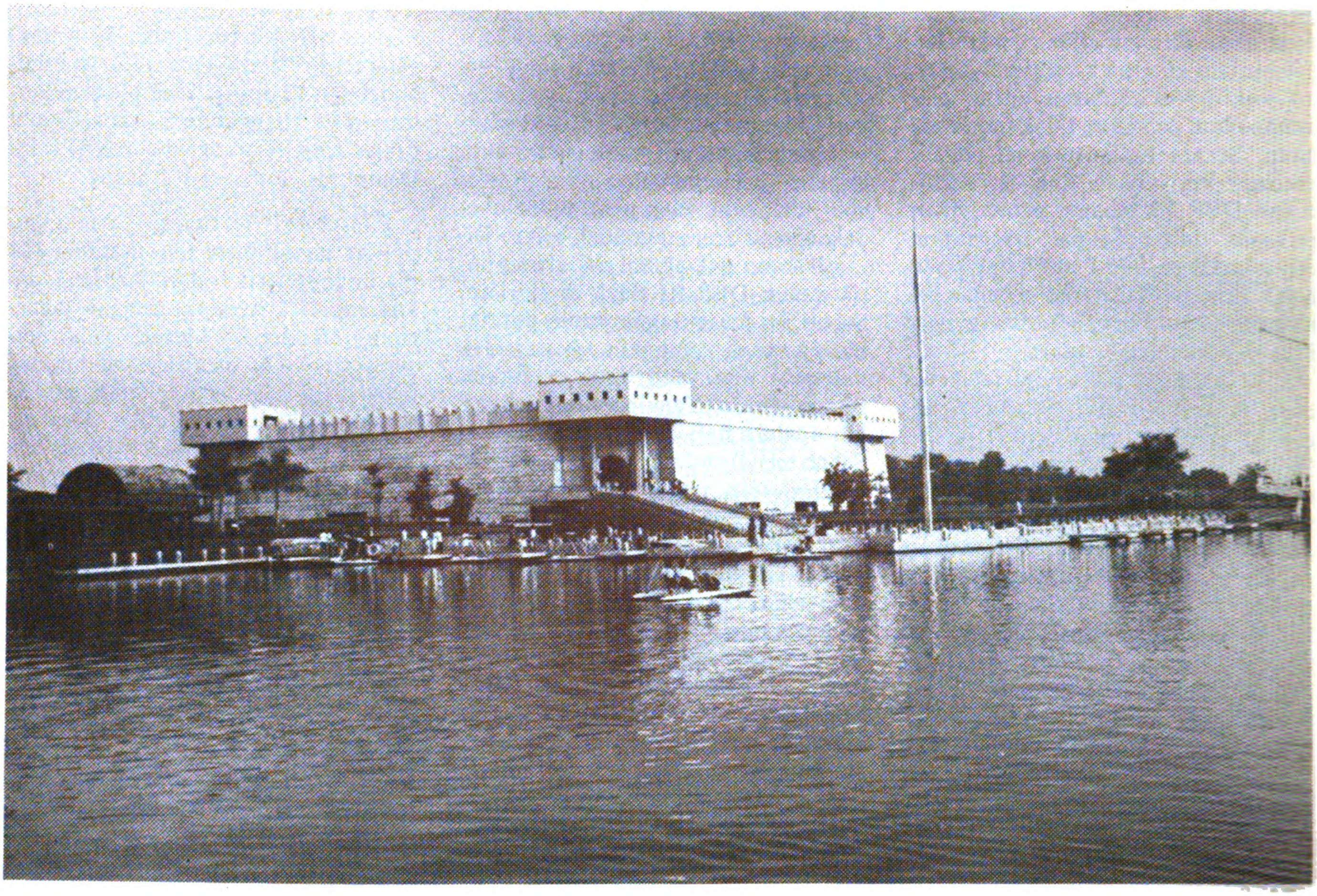

Musim ABRI

Dilaksanakan secara bertahap. Juga diterima pernyataan Yayasan Harapan Kita bahwa akan tetap dijaga sifat keswastaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1961 dan tidak ada atau diadakan tempat-tempat perjudian dan kemaksiatan lain-lain.

Juga dalam Memorandum diserukan kepada Pemerintah agar partisipasi masyarakat dalam rangka sosial kontrol hendaknya diterima dengan wajar sekalipun merupakan kritik.

Karena Generasi Muda dikala itu sangat aktif melakukan aksi-aksi dan kemungkinan adanya salah pengertian maka Memorandum DPR-RI juga berpendapat perlunya meningkatkan komunikasi antara generasi muda dan generasi sebelumnya, khususnya yang ada dalam pemerintahan, untuk menjamin lancarnya pertukaran pendapat yang besar artinya bagi suksesnya pembangunan.

Dengan demikian jelaslah DPR-RI enam belas tahun lalu memberikan jalan keluar, apabila terjadi pro dan kontra dalam setiap masalah. Dalam keseluruhannya DPR-RI tidak boleh sebagai penonton atau melihat angin atau tidak ada keberanian dalam menghadapi masalah-masalah atau keruwetan. Namun juga tidak ASBUN (asal bunyi) tetapi sama sekali juga tidak ABS (Asal Bapak Senang). DPR-RI harus memberikan jalan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. DPR-RI tentu harus arief dan peka dalam menghadapi setiap masalah. Masalahnya juga bukan "menggurui", sebab kalau menggurui ada pula yang tersinggung. Dan ini pengaruh dari suatu subkultur. Dan benar juga apalagi sifat-sifat feodalisme masih ada, yang dibarengi dengan sifat feodalisme bentuk baru yang sangat cepat tersinggung perasaannya apabila dikritik, walaupun kritik itu benar adanya. Namun wakil rakyat tidak boleh terpaku akan sikon yang demikian sebab masalahnya adalah masalah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat jadi bukan masalah menenggang perasaan orang seorang saja. Sebab tidak boleh mandeg atau statis karena tuntutan masyarakat makin lama makin meningkat. Ini memerlukan feeling politik yang tajam tanpa kecuali. Semua harus dengan lapang dada menerima setiap kejadian. Antara dukungan dan pengawasan harus seimbang. Dan benar kalau ada yang berkata bahwa dukungan sama pentingnya dengan pengawasan.

Enam belas tahun yang lalu Proyek MII mendapat tantangan. Kini Taman Mini menjadi kebanggaan nasional. Malahan kalau dapat dikatakan apabila orang ke Jakarta (Indonesia) kini tidak singgah ke MII rasanya belum cukup. Taman MII telah menjadi tujuan bagi para pendatang dari manca negara. Taman MII telah merupakan etalage kebudayaan bangsa atau show window yang dapat mendorong pariwisatawan pergi ke daerah asal, sama halnya dengan mengirimkan rombongan kesenian keluar negeri sebagai sales promotion.

Begitulah gambaran bagaimana Presiden Soeharto menghadapi situasi yang berkembang waktu itu. Kini Presiden Soeharto sedang melaksanakan tugas kepresidenannya untuk masa jabatan yang kelima kalinya. Dan bagaimana DPR-RI memberikan pendapatnya, berupa Memorandum, sehingga menjadi pegangan bagi semua pihak.

Apakah Memorandum DPR-RI itu telah terlaksana atau tidak, sejarah jugalah yang mencatatnya. Yang essensil DPR-RI 1971-1977 telah berbuat sesuai dengan fungsinya. □

Digitized by Google

Maria Sugiharto

"Bukankah itu foto Diego Maradonna?", demikian saya bertanya kepada sopir taksi yang membawa saya di Brussel.

"Betul sekali, nyonya. Dia favorit saya"

"Oh, sama dengan saya", kata saya terhadap si Jean, sopir taksi yang ganteng itu.

"Foto ini saya pasang, karena Maradonna pernah menyewa taksi saya. Saya bangga sekali untuk itu. Ini ada foto-foto lain Maradonna dengan saya", berkata demikian sembari mengeluarkan beberapa snapshots Maradonna dan dia.

BOLA
Dan Fanatisme Penggemarnya

Maradona mengangkat piala UEFA

Dialog antara saya dan si Jean yang sopir taksi Belgia ini tidak sampai disitu saja, karena fanatismenya terhadap bola, sepanjang perjalanan dia ceritakan bahwa setiap ada pertandingan *Piala Dunia* dia ikuti, hadir ditempat.

"Begitu?" kata saya tercengang, karena saya tidak berfikir bahwa seseorang yang berprofesi sopir taksi mampu mengikuti Piala Dunia dengan melanglang buana. "Juga ketika diselenggarakan di Amerika Latin?" tambah saya.

"Benar Nyonya. Saya begitu fanatik, sehingga saya selalu menabung untuk dapat bepergian keluar negeri. Untuk menonton Piala Dunia, tentu saja", demikian dia tekankan.

Dialogpun menjadi campur aduk dengan segi keuangan dan penghasilan sebagai seorang sopir taksi dari hotel berbintang lima, yang memungkinkan dia mampu menabung untuk pergi mengikuti: Piala Dunia. Dia bukan seorang bujangan. Beristeri dan satu anak. Ini berarti bahwa penghasilan cukup banyak yang membuat dia mampu mengikuti Maradonna bertanding. Dan rekaman pertemuan dengan Maradonna yang diabadikan dalam beberapa pose, memang peristiwa bersejarah baginya.

Bola, Soccer dan Asal-Usulnya

Sepakbola, secara internasional dinamakan *Soccer*, telah ada di Cina semenjak 200 S.M. Olahraga ini didasarkan kepada kemampuan menghela bola yang terbuat dari kulit.

Di Inggris, negara dimana permainan sepakbola berasal dan dibesarkan, pada tahun-tahun mulanya dimainkan

Digitized by Google

dengan jarak yang jauh sekali, sampai 3-4 mil jaraknya.

Sampai tahun 1850, belum ada pembakuan tentang banyaknya pemain, karena ketentuan masih berubah-ubah, antara 15 dan 20 orang pemain. Baru pada tahun 1857, klub sepakbola pertama kali didirikan di Sheffield, Inggris. Pada tahun-tahun itu masih belum jelas perbedaan tugas antar pemain. Bahkan goalkeeper atau penjaga gawang masih ikut berlari-lari dengan pemain lainnya mengejar dan mempertahankan bola. Baru pada tahun 1880, ada diskripsi yang standar, bahwa dari sebelas pemain, hanya penjaga gawang yang dibenarkan memegang bola dengan tangan.

Dengan telah adanya klub yang didirikan di Sheffield, klub-klub bermunculan secara beruntun, dan hampir di seluruh negeri berdiri klub-klub sepakbola yang dinamakan *Soccer*. Kata Soccer berasal dari kata *Association Football* yang kemudian disingkat menjadi *Assoc*, sehingga di dalam perkembangannya kemudian dinamakan SOCCER. Pada tahun *1913* FIFA - Federation of International Football Association berdiri, selanjutnya FIFA ini yang mengkoordinir seluruh asosiasi dan klub sepakbola dunia.

Hasil dari federasi ini ialah pertandingan-pertandingan internasional yang lebih terorganisir, dan perebutan *Piala Dunia* untuk mendapatkan Piala Jules Rimet menjadi kesemarakan persepakbolaan dunia.

Fanatisme Penggemar

Kini sepakbola menjadi milik rakyat, bahkan merupakan kebudayaan dunia yang merakyat. Dimainkan oleh 140 bangsa di dunia, dan jumlah pemain sebanyak 16 juta. Contoh yang paling spektakuler ialah perebutan final Piala Dunia tahun 1970 di *Stadion Maracana*, Brazil, yang berkapasitas 200.000 penonton. Pertandingan ini ditayangkan televisi dari Mexico City, dan disaksikan/ditonton oleh 800 juta pemirsa.

Dari tahun ke tahun, penggemar sepakbola makin bertambah besar, dan kecanggihan pengorganisasiannya makin tinggi. Hal ini tidak mengurangi keakraban hubungan *bathin* antara sepakbola sebagai olah raga, dan para penonton sebagai penggemarnya.

Hubungan bathin yang makin mendalam ini, lebih-lebih di negeri asalnya, Inggris, menyebabkan beberapa anekdot terjadi, bahkan sepakbola seperti telah menjadi satu aliran tersendiri di dalam hubungan kehidupan manusia.

Pada suatu hari, seorang wartawan Inggris diminta untuk mengisi sebuah daftar pertanyaan. Pada kolom *"Agama"*, dia kosongkan. Petugas yang menangani menanyakan:

"Anda tidak punya Agama?"

"Punya dong," jawab sang wartawan, santai.

"Kenapa tidak mengisi kolom itu?"

"Apakah perlu?"

"Tentu saja, ya"

Maradona

"Baiklah", katanya sembari mengisi kolom yang masih kosong tadi dengan menulis: *Sepakbola*.

Lelucon atau anekdot ini bukannya menghina agama, atau memperlihatkan betapa sekulernya orang Inggris, sampai-sampai harus berbuat demikian.

Tidak. Kegilaan orang Inggris ke

Digitized by Google

Tragedi akibat ulah penonton sepakbola

gembira ini, dan pilot beserta awak pesawat dengan kegembiraan yang meluap membagi kegembiraannya dengan para penumpang dengan mengadakan *toast* khusus *wodka* yang dibagikan kepada seluruh penumpang. Wodka yang mahal itu tidak terjadwal pada penerbangan biasa tentu saja. Tepuk tangan dengan riuhpun terjadi di pesawat perjalanan Warzawa-London yang hanya dua jam itu.

Pada pertandingan final antara kesebelasan Jerman Barat dan Belanda, maka Amsterdam menjadi seperti kota mati. Anda bisa tiduran selama beberapa menit di tengah jalan *Daam Raak* misalnya, atau di *Calser straat*. Tiada makhluk tampak di luar meskipun masih musim panas pada malam itu, karena semuanya menyaksikan TV tayangan langsung. Yang agak repot, para pemilik cafetaria, yang tempatnya Menjadi *hang-out* para pemirsa jalanan, dengan modal secangkir kopi dan sekerat kueh, hal mana tidak memberikan keuntungan besar bagi pemilik restoran. Tetapi, selalu ada saja orang yang kreatif. Mengerti bahwa sore itu restorannya bakal menjadi ajang pertemuan saja, dia memasang pengumuman bahwa restorannya adalah untuk mereka yang mau makan, dan tidak untuk para pemirsa TV.

pada sepakbola memang luar biasa. Seperti juga Brasilia, beberapa negara Amerika Latin, dan negara-negara Eropa lainnya termasuk Italia, dan negara-negara Eropa Timur. Salah seorang tokoh persepakbolaan Inggris pernah menyatakan bahwa *"Football is not life. It's more than life"*. Sepak bola tidak hanya hidup, tetapi lebih daripada hidup. Masya Allah.

Apakah dengan kata-kata semacam itu, hidup dikatakan tak lebih penting daripada sepakbola. Atau, dengan kata lain kematian itu bukan apa-apa sepanjang itu untuk urusan sepakbola, kurang jelas juga. Bukan mau mengadili peristiwa *Hillsborough,* insiden *Heysel* yang memakan jiwa gara-gara sepakbola. Bukan. Tetapi demikianlah fanatisme yang tercermin di dalam para pecandu sepakbola, sehingga membutuhkan kata-kata yang sifatnya *Hiperbolistis* seperti di atas.

Notable Note mengenai Piala Dunia.
Catatan yang perlu dicatat....

Piala Dunia sedang berlangsung pada tahun 1974. Pada pertandingan perempat final (atau semi final, saya lupa) antara Yugoslavia dan Italia, pertandingan dimenangkan oleh kesebelasan Yugoslavia. Apakah yang terjadi di Roma?

Karena kesal kesebelasan pujaannya kalah, seorang Italia yang bertempat tinggal ditingkat empat sebuah apartemen di jalan raya kota Roma membanting TVnya melalui jendela jatuh di jalanan besar, yang merupakan jalan protokol. TV mengenai mobil yang sedang lewat, mobilpun terbakar, jalanan menjadi macet. Pasti ada beberapa korban. Yang terang temperamen yang demikian menggambarkan fanatisme yang kurang terkontrol, dan merugikan beberapa fihak. Ternyata kemudian kesebelasan Yugoslavia dikalahkan oleh kesebelasan Polandia. Pada waktu peristiwa itu terjadi, saya sedang berada di pesawat LOT (milik perusahaan negara Polandia) dari Warzawa menuju London.

Dimintakan perhatian kepada seluruh penumpang pesawat atas kabar

Piala Dunia 1978

Salah satu catatan lucu, yang pernah saya catat. Pertandingan itu diselenggarakan di Amerika Latin. Seluruh negara partisipan pasti menayangkan langsung. Indonesia, bila tanpa sponsor tidak dapat menayangkan langsung karena mahal tentu saja. Di samping itu, PSSI tidak atau belum pernah masuk di dalam final. Pada waktu itu saya berada di negeri Belanda, tepatnya di Den Haag. Undangan Atase Kebudayaan Prof.Dr. Kusnadi Hardja Sumantri untuk nonton TV tayangan Piala Dunia kami sambut dengan senang hati.

Pak Kusnadi kini Rektor Universitas Gajah Mada. Beliau menunggu sambil telepon dari Indonesia, yang sesuai perjanjian, jam 02.00 pagi itu diterima dari Jakarta. "Belum ngantuk nih? Sedang apa pak?" tanya dari seberang. "Oh tentu saja belum. Ini, nonton Piala dunia... dan rembuganpun selesai, telepon ditutup. Sebentar kemudian, telepon berdering lagi, kali ini dari orang yang asing sama sekali, tetapi dari Indonesia.

"Maaf pak, mohon jangan gusar. Dari Kantor telepon Indonesia nih.

Digitized by Google

Mohon tanya pak, score sekarang berapa?"

Kamipun bergurau, bahwa karyawan Telkom yang mendapatkan informasi dini dari negeri Belanda itu segera saja mendapatkan, memasang buntut, minimal "taruhannya" bakalan menang. Kegilaan bola lagi.

Piala Dunia 1982

Sementara menjalankan tugas di Wina, Austria, antara lain saya mewancarai Menteri Luar Negeri. Ketua Partai Sosialis Austria dan beberapa pejabat penting lainnya. Dari score yang saya buat dengan para pejabat itu, dari satu jam paling sedikit yang saya jadwalkan, selalu bertambah minimal satu jam lagi untuk berbicara mengenai piala dunia. Tentu saja semua pejabat itu mengharapkan kemenangannya, paling sedikit masuk semi final. Sokur final. Dari wawancara-wawancara yang agak kaku dan ketat, semua menjadi longgar dan santai, setelah saya ajukan tentang persoalan bola, dan mereka menjadi lebih antusias dengan menguraikan bola ini.

Kebetulan pada putaran final, saya masih berada di Austria, mengikuti sebuah seminar yang sangat penting dimana para Menteri Luar Negeri Eropa dan ASEAN hadir, termasuk beberapa pejabat teras negara-negara yang bersangkutan. Resepsi-resepsi yang diadakan pada malam hari untuk kesemarakan seminar, kendati seminar diadakan di tempat pegunungan (Alpen) supaya para tamu tidak banyak meninggalkan tempat, toh resepsi-resepsi itu dihadiri hanya separuh, sekedar kehormatan saja. Sebaliknya di hotel tempat para VIP ini menginap menjadi sangat semarak karena mereka lebih senang berada di depan TV menyaksikan kesebelasan pujaan masing-masing. Lucunya, ada delegasi yang bersitegang tentang kesebelasan favoritnya, dan memilih untuk tidak saling berdampingan, daripada berantem.

Sepakbola kini menjadi milik rakyat

Kendati tidak masuk final, kesebelasan Perancis yang dikapteni oleh *Michel Platini* menjadi sangat favorit dinegerinya sendiri. Bila naik taksi, para sopir taksi tidak dapat membendung perasaannya, membicarakan tentang piala dunia itu, dan Platini. Ketika suatu ketika saya tanya tentang dia, spontan jawabnya: *"Oh, je l'adore tres beaucoup"* — Saya sangat menyukainya.

Saya pancing dengan mengatakan *"Il est beau?"* — karena dia tampan? *Il est formidable* ... dia hebat ... sambil mengacungkan jempolnya.

Dan, pertandingan Piala Dunia 1982 dimenangkan oleh Italia. Orang Italia yang temperamental, menjadi beringas atas kemenangan itu. Kota Roma menjadi ajang pesta kemenangan. Hampir-hampir mirip Roma ketika dibakar oleh Kaisar Nero, karena orang berjejal-jejal di kota tersebut, bedanya bila jaman Nero mereka berteriak ketakutan, pada tahun 1982 itu mereka berteriak kegirangan. Saya sendiri hampir terhambat perjalanan menuju ke Fiumicino, tempat Bandara Leonardo de Vinci untuk pulang ke Indonesia. Kemacetan jalanan yang disebabkan pesta pora penduduk Roma dengan berteriak-teriak dan mengibarkan bendera-bendera dalam mobil beserta terompet seperti tahun baru di Jakarta, cukup membuat posisi lalu lintas sewot, disamping orang yang mempunyai kepentingan seperti saya, hampir saja ditinggalkan pesawat.

Satu segi simpatik dari orang Italia di dalam pertandingan-pertandingan bola, ialah bila toh kesebelasan pujaannya kalah, dia tidak akan mendendam pemuja "musuhnya".

Mereka berpendirian: "No Alla Violenza. Si Allo Sport". Tak ada guna ribut-ribut. Hanya olah raga ini.□

Digitized by Google

Hari-hari penuh kepastian...

baca saja

Redaksi/Tata Usaha: Jl. Bangka Raya no. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 791352 (3 Sal), 797020
Teleks 47459 Eska JKT.
Iklan: Jl. Gajah Mada No. 90A Tingkat III Telp. 621691 - 646146 Jakarta Barat.
Perwakilan Jawa Barat Jl. Warta no. 13 Telp 56213 Bandung.
Perwakilan Jawa Tengah & D.I.Y. Jl. Lamper Sari 12A Telp. 313113, Semarang.
Perwakilan Sumatera Utara Jl. Timor 14C Telp. 515089 Medan
Perwakilan Jawa Timur & Bali Jl. Ketintang Komplex Agar-agar Kav. 52 Telp. 814329, Surabaya
Sub. Perwakilan Bali Jl. Imam Bonjol 99 Telp. 3317 Denpasar

Digitized by Google

Digitized by Google

No. 62 Juni 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

UNIV. OF MICH.
JAN 10 1990
Current Serials

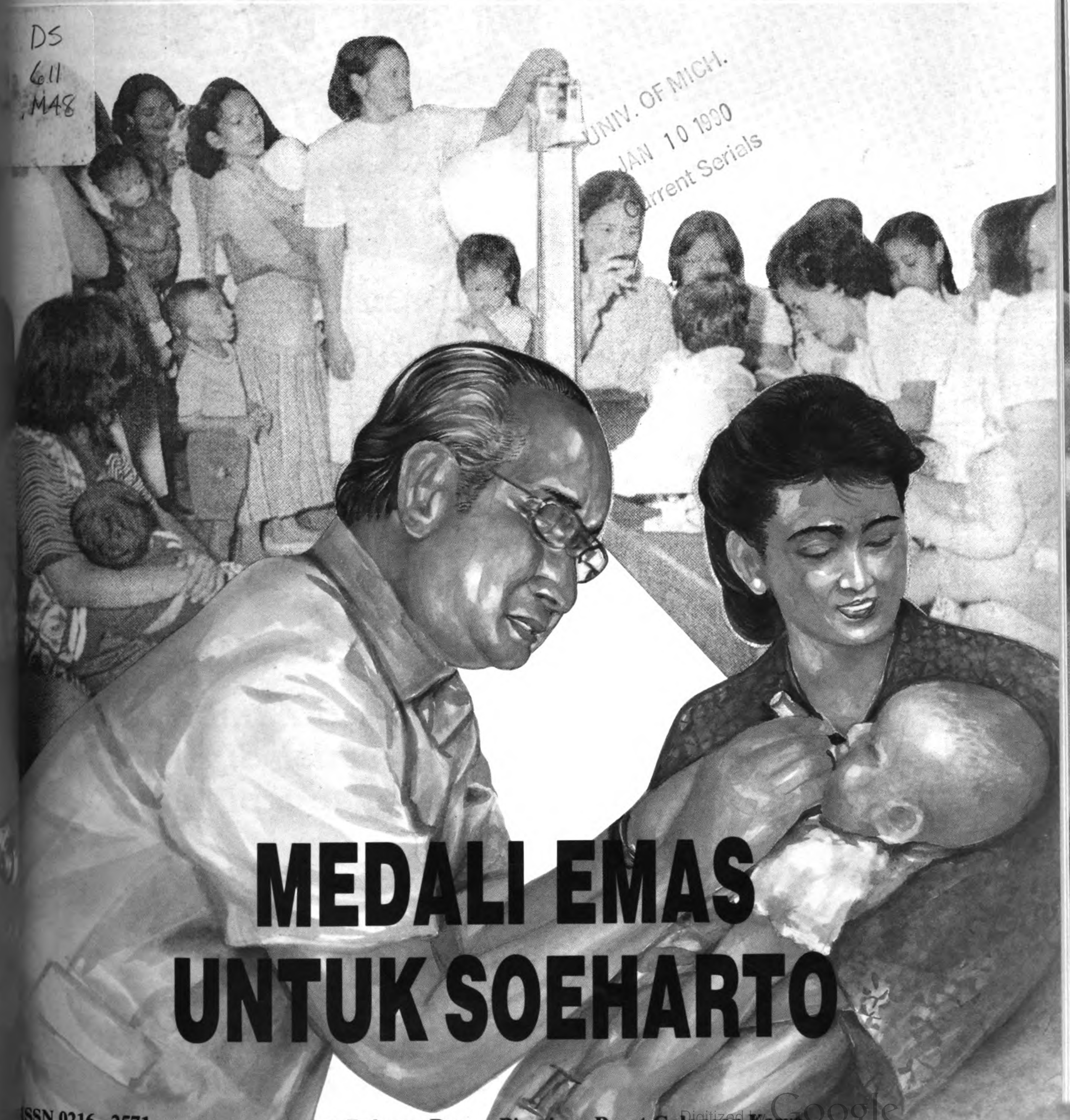

MEDALI EMAS UNTUK SOEHARTO

ISSN 0216 - 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

HARIAN
Pelita
HARIAN MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab :
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/ Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir. Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs. Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny. T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi :
Anang Adenansi
Dr. Alfian
H. Kafrawi MA
Drs. Slamet Efendi Yusuf
Drs. Irsyad Sudiro
Drs. Thomas Suyatno
Ny. Maria Sugiharto
Drs. Wijanarko Puspoyo MA
Drs. Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs. T.A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H.M. Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana :
Drs. Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD. PAND. DV. Noerijathy

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Penghargaan PBB dan Keberhasilan Soeharto

FOKUS

Akhir-akhir ini pelayanan terhadap masyarakat dari aparatur pemerintah tentang segala permasalahan yang dihadapi masyarakat banyak, kembali menjadi sorotan dan pembicaraan umum. Dalam kaitan ini Media Karya menampilkan masukan pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam bentuk tulisan dengan berbagai judul permasalahan yaitu Menuju Pelayanan Umum yang lebih baik, Setelah Menpan Angkat Bicara, Pelayan, Melayani atau Dilayani. Pelayanan Masyarakat perlu dikembangkan.

LAPORAN UTAMA

Investasi, Mengais Mutiara Dalam Lumpur; Menarik Investasi Sebesar Rp 239 Triliun; Bursa Saham, Penunjang Pencapaian Sasaran Investasi; Iklim Investasi Indonesia Bertambah baik.

LAPORAN KHUSUS

Penyegaran Kader Untuk Menggerakkan Mekanisme Organisasi; Dari Penyegaran sampai Kualitas Kader; Aspirasi Masyarakat dan Kekaderan Kita.

NASIONAL

Demokrasi Pancasila dan Masalah Suksesi Dalam Mekanisme Kepemimpinan Nasional. RUU Peradilan Agama Siap Masuki Pembicaraan Tingkat III di DPR; Dari Martono Untuk Martono; Dari PWI ke SPS. Medali emas Untuk Presiden Soeharto;

KOMENTAR

ORGANISASI

Dua Hari di Bumi Nyiur Melambai; Kunjungan Kerja Ketua Umum GOLKAR di Sumatera Barat; Wahono Dialog dengan Karakterdes; Sikap Keterbukaan Untuk Menampung Aspirasi Rakyat; Muhammadiyah Menaruh Perhatian Terhadap GOLKAR;

DAERAH

Tanggerang Dambakan Jadi Kota Madya;

INTERNASIONAL

Cina di Tangan Garis Keras.

Digitized by Google

Penghargaan PBB dan Keberhasilan Soeharto

Tepat pada ulang tahunnya yang ke-68, Presiden Soeharto menerima penghargaan PBB atas keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia. Presiden Soeharto dinilai berhasil menekan laju pertambahan penduduk dari 3,8 persen menjadi 2,2 persen. Suatu penurunan yang cukup besar dalam kurun waktu relatif pendek.

Ketika Presiden Soeharto menerima kepemimpinan atas Republik Indonesia pada tahun 1968, negeri ini berada dalam situasi yang sangat parah. Baik ekonominya, politik maupun keadaan sosial budayanya. Tingkat inflasi waktu itu sebesar 650 persen, harga-harga tak lagi terjangkau oleh daya beli masyarakat. Situasi politik dalam keadaan paling buruk, pergolakan rakyat menumpas G.30.S/PKI dengan dukungan penuh dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Situasi nasional ketika itu benar-benar dalam keadaan paling tidak stabil.

Tetapi Presiden Soeharto beserta para pembantunya, kaum teknokrat dari kalangan Universitas serta kekuatan-kekuatan Pancasilais yang ada, berhasil membawa Indonesia keluar dari situasi yang demikian parah itu, langkah pertama adalah menciptakan situasi politik yang stabil; karena dengan stabilitas nasional itu, upaya melakukan rehabilitasi dibidang ekonomi dan lainnya bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Setahun kemudian setelah ia menjadi Presiden, tahun 1969, dimulai Pembangunan Lima Tahun I. Kendati situasi politik nasional ketika itu masih belum sepenuhnya stabil. Presiden Soeharto dengan para pembantunya ternyata mampu meyakinkan negara-negara industri maju tentang masa depan perekonomian Indonesia. Sehingga terbentuklah sebuah konsorsium yang bersedia memberi bantuan bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Jepang dan Belanda, dua negara yang pernah menjajah Indonesia memprakarsai pembentukan konsorsium yang terdiri dari dua belas negara serta beberapa lembaga keuangan dunia, yang disebut Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI). Dan sejak Pelita I, tahun 1969, IGGI memberi bantuan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hingga sekarang bantuan tersebut masih terus diberikan karena kepercayaan para negara kreditor itu terhadap Indonesia.

Dengan bantuan itulah Soeharto beserta pembantu-pembantunya melaksanakan Program Keluarga Berencana. Bantuan yang diberikan untuk Program KB ternyata memberi hasil yang cukup mengesankan bagi dunia, karena mampu menekan laju pertambahan penduduk. Disamping keberhasilan Indonesia berswasembada dibidang pangan, yang juga diberi penghargaan oleh FAO (Badan Pangan Sedunia) pada tahun 1985 lalu.

Penghargaan untuk dua bidang kehidupan yang paling dekat kaitannya, penduduk dan pangan. Dua sektor ini pula yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Betapapun tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak diimbangi oleh laju pertambahan penduduk yang lamban, maka pembangunan itu tak pernah berhasil. Karena tak dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah.

Soeharto berhasil menekan pertambahan penduduk dan berhasil pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekedar ilustrasi, pada Pelita II dan III, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 7 persen setahun. Tetapi kemudian terhempas oleh resesi ekonomi pada Pelita IV sehingga turun menjadi 3,8 persen setahun.

Setuju atau tidak, sejarah Orde Baru mencatat berbagai keberhasilan penting selama hampir seperempat abad ini. Dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang diperhitungkan dalam percaturan politik internasional karena sikap politik luar negeri yang bebas dan aktif dapat dijalankan secara konsekuen.

Disamping mampu menekan pertambahan penduduk dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga Indonesia yang dulunya tergolong negara miskin, pertengahan dasawarsa 1970-an telah melonjak ke deretan negara-negara berkembang yang sedang melangkah menuju negara industri baru di Asia.

Sosok seorang anak petani yang berhasil memimpin 170 juta rakyat Indonesia, **SOEHARTO**, tepat pada ulang tahunnya yang ke-68 (8 Juni 1989) menerima penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa atas keberhasilannya menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Penghargaan yang kedua kalinya ia terima dari badan dunia itu (pertama kali dari FAO tahun 1985). Penghargaan yang sesungguhnya sekaligus merupakan pengakuan dunia internasional akan kemampuan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.□

Digitized by Google

Menuju Pelayanan Umum Yang Lebih Baik

Dambaan masyarakat akan adanya pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah terhadap segala permasalahan yang mereka hadapi menuntut adanya suatu sikap kesungguhan dari aparatur itu untuk menjawabnya. Paling tidak sikap tanggap dan kesadaran untuk meningkatkan pelayanan umum sebaik-baiknya menjadi sorotan masyarakat sebagai pencari pelayanan. Ini artinya diperlukan usaha sungguh-sungguh para pengambil keputusan di republik ini untuk membenahi apa yang masih kurang dalam kaitan pemberian pelayanan umum yang baik.

Apa yang diinginkan masyarakat menyangkut kepentingan mereka dengan pelayanan aparat pemerintah, adanya kepastian ketentuan, kemudahan prosedural, pelayanan yang cepat tanpa menunda-nunda waktu, kejelasan siapa yang berwenang memberikan pelayanan tersebut. Masyarakat tidak lagi mau tahu kenapa urusan yang mereka bawa kepada pihak yang berwenang menangani menjadi berlarut-larut. Sebab kelambatan dalam memberikan pelayanan kepada mereka, menumbuhkan sikap atau rasa ketidakpuasan kepada aparat pemerintah. Dan hal ini pada akhirnya menumbuhkan pula sikap ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Citra aparat negara menjadi buram kalau tidak boleh dikatakan merosot.

Mencari jawab atas persoalan pelayanan umum bagi masyarakat oleh aparatur pemerintah, Menpan Ir Sarwono Kusumaatmadja mengemukakan bahwa rumus sederhana bagi adanya suatu pelayanan umum yang baik adalah prosedur yang memudahkan kelancaran pengurusan, waktu yang cepat dan adanya kepastian. Namun tidak hanya itu yang menjadi kunci pemberian pelayanan umum yang baik. Banyak faktor penunjang yang ikut mempengaruhi sejauh mana pelayanan kepada masyarakat itu dapat diberikan dengan sebaik-baiknya. Masih banyak hal yang harus dibenahi mulai sekarang.

Adanya pelayanan yang buruk ditambah jangkauan pajak yang semakin dinaikkan pasti akan menimbulkan problem nantinya. Dan yang paling mengerikan kalau sampai timbul kesan atau perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang telah dibebani berbagai pajak. Kewajiban yang tidak seimbang dengan pelayanan yang mereka peroleh menyebabkan orang tidak puas. Oleh karenanya adalah menjadi tugas pemerintah untuk mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Sebab untuk menumbuhkan respek rakyat kepada pemerintah, maka pemberian pelayanan yang baik harus didahulukan. "Manfaat pelayanan umum yang baik, rakyat menjadi respek terhadap pemerintah. Rakyat tidak segan-segan lagi untuk membayar pajak," ujar Sarwono Kusumaatmadja.

Pelayanan umum yang meningkat, menurut Sarwono akan membuat orang itu akan bergairah dan mudah mengembangkan kreativitas serta kemampuannya. Ini artinya nantinya kemampuan nasional juga ikut terangkat naik atau meningkat. Disini diperlukan adanya pendayagunaan aparatur negara, dimana nantinya dapat meningkatkan kemampuan aparatur, baik kemampuan sumber daya manusianya maupun kemampuan administrasinya, sehingga bisa menciptakan pelayanan umum yang lebih lancar. Dari aspek pendayagunaan aparatur negara kita dapat berbicara tentang pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan oleh masyarakat, pengawasan politik, pengawasan fungsional maupun pengawasan yudikatif. Semua bentuk pengawasan itu harus diefektifkan supaya aparatur itu merasa mereka bekerja itu diawasi. Masyarakat bisa memperkuat posisinya melalui pengawasan yudikatif. Pengawasan yudikatif ini akan lebih kuat lagi dengan berlakunya peradilan tata usaha negara (PTUN) nanti.

Sarwono Kusumaatmadja

Masyarakat bisa memperkuat posisinya dengan berorganisasi secara efektif untuk memperjuangkan kepentingannya. Misalnya dengan mengefektifkan di Kadin, SPSI, Lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga konsumen. Sementara DPR juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan public control-nya. Kesimpulan pelayanan umum akan menjadi berjalan lebih baik kalau kehidupan demokrasi juga meningkat kualitasnya. Jadi tidak terlepas dari masalah politik akhirnya.

Memang selama ini ada anggapan bahwa lembaga-lembaga yang belum cukup efektif untuk memperjuangkan kepentingan umum. Lebih-lebih lembaga-lembaga bantuan yang ada mempunyai missi yang berat menyangkut kepentingan sosial. Mereka harus bekerja di atas landasan idealisme. Disamping itu masih ada pejabat yang alergi terhadap lembaga-lembaga tersebut. "Lembaga-lembaga bantuan itu bisa menghilangkan alergi ini asal mereka itu bekerja secara profesional, tidak menggunakan lembaga itu untuk profit making atau terlibat dalam isyu-isyu politik. Ini tidak boleh. Disamping itu pejabat harus melihat kehadiran lembaga-lembaga itu sebagai suatu kebutuhan, bukan sebaliknya, sebagai

Digitized by Google

lawan," ujar Sarwono Kusumaatmadja.

Sanksi disiplin

Sanksi apa yang akan diberikan kepada aparat pemerintah yang tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Sarwono menunjuk disiplin pegawai negeri. Namun disamping sanksi disiplin harus ada imbangan bagi mereka yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan yang baik berupa penghargaan. Ini harus ada, dan berjalan sejajar. Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) diberi arahan agar para pejabat memberikan keseimbangan antara sanksi dan penghargaan.

Masalah disiplin pegawai negeri, Sarwono mengatakan bahwa peraturan yang mengenai hal itu sudah cukup baik, landasan hukum kuat, tinggal sekarang bagaimana pelaksanaannya konsisten atau tidak. Begitu pula mengenai penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan pelayanan umum sudah ada aturannya. Disini berhadapan dengan masalah prosedural yang disempurnakan.

Disamping penegakan disiplin dan pemberian penghargaan, usaha perbaikan pelayanan umum bisa dilakukan melalui penciptaan prosedur-prosedur yang memudahkan. Umpamanya memberikan informasi yang jelas, aturannya jelas, tarif jelas termasuk dasar hukumnya, siapa yang berwenang memberi pelayanan, kemudian juga apa yang dijanjikan dalam pelayanan itu juga jelas. Sebagai contoh Sarwono menyebut soal pengurusan suatu sertifikat atau KTP, berapa waktu yang dijanjikan kalau semua persyaratan sudah terpenuhi. Kalau ketentuan yang sudah jelas tidak bisa ditaati oleh pemberi pelayanan berarti ada sesuatu yang tidak beres. "Kalau memang dijanjikan tiga hari selesai, ya tiga hari harus selesai, jangan mulur-mulur," tegasnya.

Mengenai masih adanya perasaan tidak puas dikalangan masyarakat, hal itu wajar. Karena rakyat itu punya hak untuk dilayani. Rakyat tidak mau dijejali dengan kewajiban saja. Mereka juga butuh perlakuan yang adil. Rakyat butuh penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai apa saja menyangkut pelayanan. Jangan ada penjelasan yang kabur, tidak pasti waktunya. Sehingga menimbulkan kejengkelan. Sementara warga masyarakat tahu kalau dengan uang segalanya akan terselesaikan dengan cepat. Keadaan ini menjadikan rasa tidak puas di kalangan rakyat.

Persoalannya sekarang bagaimana menyalurkan ketidakpuasan masyarakat secara efektif yaitu melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Sebab kalau ketidakpuasan itu disalurkan secara individu-individu tidak mempunyai kekuatan. Melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kuat bisa disalurkan segala keluhan masyarakat. Sebaliknya melalui lembaga itu pula pemerintah bisa minta agar masyarakat melaksanakan kewajiban membayar pajak dan sebagainya.

Perlu kesungguhan

Indikator-indikator untuk menilai apakah pelayanan umum itu sudah berjalan baik atau belum, menurut Sarwono itu ada dan bisa diketahui. Apakah ada trend pelayanan umum yang meningkat, yang penting adalah kesadaran mengenai pentingnya pelayanan umum itu sudah menggelinding dulu. Terutama dari aparatur sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi penegasan Presiden Soeharto agar citra aparatur pemerintah ditingkatkan melalui pelayanan umum yang baik.

Adalah menjadi kewajiban atasan untuk membenahi masalah pelayanan umum menjadi baik. Kalau ada pelayanan yang tidak baik di kantor-kantor tidak terlepas dari kesungguhan atasan untuk membenahi. Tidak ada alasan mengatakan keterbatasan sarana dan keterbatasan tenaga membuat pelayanan umum menjadi tidak baik. "Itu hanya alasan atau dalih yang dicari-cari. Semua itu bisa diatasi. Yang penting punya kemauan tidak untuk membenahi," ujar Sarwono.

Menurut dia kaidah-kaidah administrasi yang baik selalu bisa dikembangkan. Sehingga dengan sarana yang minim dan tenaga orang yang serba berkekurangan pun pelayanan umum masih bisa ditingkatkan. Misalnya dengan melakukan penyederhanaan prosedurnya. "Ini soal kemauan saja. Dan kemauan ini harus dipaksakan untuk timbul," tegasnya.

Selama ini apa yang dilihat Menpan Sarwono memperlihatkan bahwa kalau ada instansi yang bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat disebabkan ada kemauan keras pejabat atasan. Bukan karena adanya kesadasran yang menyeluruh dari seluruh aparat. Oleh karenanya perlu ada program bagaimana membuat setiap pegawai itu merasa terpanggil untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemauan keras dari atasan bisa dijadikan contoh bagi yang lain.

"Kalau hanya bisa mengatakan tenaga kurang, sarana kurang, ini membuat kita tidak bisa maju-maju. Yang penting ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk mewujudkan pelayanan umum yang baik. Ini hanya menyangkut soal sikap mental," tambahnya.

Abdi masyarakat

Dikemukakan bahwa dulu pada masa awal Orde Baru penekanan menempatkan pegawai negeri sebagai abdi negara. Dari segi ini apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru berhasil meletakkan pegawai negeri sebagai abdi negara dan tidak terkotak-kotak seperti halnya pada masa Orde Lama. Tapi disini perlu adanya keseimbangan, penekanan tidak semata-mata sebagai abdi negara tapi juga abdi masyarakat. Ini kalau dikaitkan dengan usaha memberikan pelayanan umum yang baik. Sebab kalau mereka itu sadar sebagai abdi masyarakat, maka dengan sendirinya akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.

Kalau sudah berhasil menumbuhkan citra pegawai negeri sebagai abdi masyarakat, dengan sendirinya citranya sebagai abdi negara juga ikut terangkat. Oleh karenanya, kata Sarwono, janganlah mempertentangkan antara abdi negara dan abdi masyarakat. Sebab kalau aparatur pemerintah itu bisa melaksanakan fungsinya sebagai abdi masyarakat itu dengan baik, otomatis sebagai abdi negara pun lebih kuat. Kalau konsentrasinya hanya sebagai abdi negara, maka peranannya sebagai abdi masyarakat akan menjadi luntur.

"Dengan menjadi abdi masyarakat yang baik, akan menjadi abdi negara yang baik pula. Mengapa, karena negara ini berkedaulatan rakyat. Kalau rakyat yang mempunyai kedaulatan itu kita layani dengan baik berarti kita telah menjalankan tugas negara. Sedangkan kalau lebih menekankan aparatur sebagai abdi negara terus menerus nanti lama-lama kita lupa bahwa negara itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Salah jadinya," ujarnya.

Dikemukakan bahwa saat ini pihak Kantor Menpan sedang menyusun semacam pedoman umum bagi kepen-

Digitized by Google

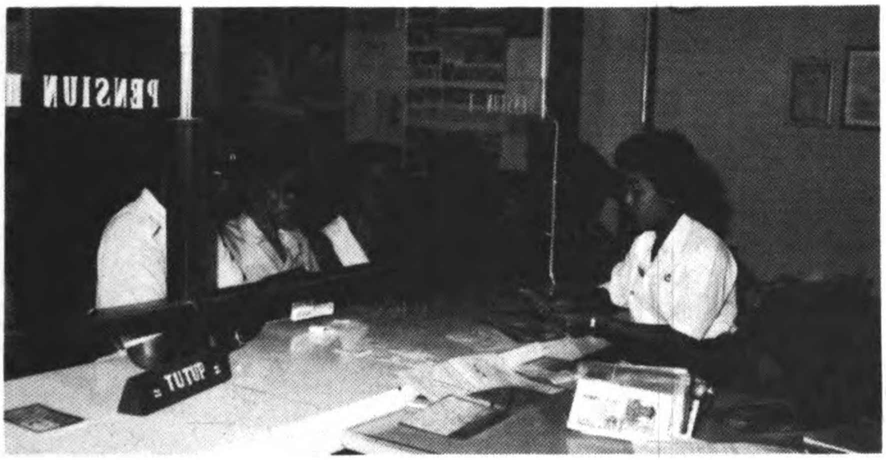

Pelayanan yang buruk akan timbulkan problem

tingan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pejabat yang akan memberikan pelayanan dilakukan di tempat terbuka, memasang papan nama yang jelas berikut NIP (Nomor Induk Pegawai) supaya dikenal masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Bagi pegawai negeri sendiri perlu disadari harus bisa memberikan pelayanan dengan cepat, dengan memanfaatkan alat-alat penunjang yang ada. Pegawai negeri harus merasa memberikan pelayanan umum ini menyangkut pula masalah karirnya. Disini tersangkut pula masalah prosedur kepegawaian.

Mengenai gaji, menurut Sarwono bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pelayanan umum. Kalau pegawai negeri bisa memberikan pelayanan dengan baik, kemampuan nasional akan meningkat. Dan kemampuan nasional meningkat memungkinkan penghasilan negara dari pajak akan naik pula. Dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan pegawai.

"Jadi jangan mempersoalkan kenaikan gaji dulu. Tapi bekerja dulu dengan keras sehingga menimbulkan adanya peningkatan pendapatan negara yang nantinya akan berpengaruh bagi kenaikan gaji. Kita bisa menciptakan rangsangan agar pegawai negeri bisa bekerja lebih baik lagi. Misalnya sistem karir diperbaiki, prosedur kepegawaian diperbaiki," ujarnya lagi.

Segala bentuk jaminan kesejahteraan di luar gaji menurut Sarwono sedang diperjuangkan. Dengan sendirinya kalau langkah ini disambut disiplin kerja pegawai negeri yang baik, otomatis akan menciptakan kesejahteraan pegawai negeri.

Mengenai perbandingan pegawai yang memberikan pelayanan dengan jumlah penduduk yang ada, misalnya satu orang pegawai seharusnya melayani berapa orang, ini masuk dalam analisa jabatan. Dengan analisa jabatan kita tahu berapa orang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualifikasinya bagaimana, sikap mentalnya yang bagaimana, kualifikasi pendidikannya apa, alat kerja yang diperlukan apa.

Kalau kita menugaskan orang tanpa analisa jabatan akibatnya satu orang kewalahan, sementara yang lain menganggur. Kesan kalau melihat orang antri mengurus sesuatu, pegawai yang menangani kurang. Sementara di kantor lain kita melihat banyak pegawai yang menganggur.

Menurut Sarwono sebenarnya fungsi pelayanan umum juga memberi peluang bagi orang supaya bisa bekerja. Karena pelayanan yang baik akan menciptakan bidang-bidang usaha yang banyak, dan bidang ini akan menyerap tenaga kerja. Yang penting, kata Sarwono Kusumaatmadja, pegawai negeri jumlahnya tidak perlu banyak, asal jumlah yang ada itu bisa melipatgandakan kegiatan masyarakat. Dengan kegiatan yang banyak akan menciptakan lapangan kerja baru.☐ WT/BM/NS

MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA
PRESIDEN SOEHARTO
ATAS PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN
DARI PBB

PIMPINAN DAN SELURUH JAJARAN

APKINDO
ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA

APHI
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA

ISA
PERHIMPUNAN PENGUSAHA KILANG KAYU TERPADU INDONESIA

ASMINDO
ASOSIASI PERMEBELAN & KERAJINAN INDONESIA

Digitized by Google

Setelah Menpan Angkat Bicara

Suparno W

Bermula dari ucapan tanpa tedeng aling-aling Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Sarwono Kusumaatmadja, pada pertengahan bulan Mei lalu yang menyoroti betapa masih buruknya pelayanan umum oleh aparat pemerintah.

Mantan Sekjen DPP Golkar yang sudah jadi orang pemerintah ini nampaknya tidak kehilangan identitasnya, sebagai tokoh muda yang suka bicara terus terang seperti kala masih jadi orang swasta dulu.

Karena ucapannya itu tentu saja banyak kuping merah, merasa disindir, merasa sakit hati karena menganggap sudah bekerja sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa pamrih, seperti pujian dari atasan maupun pamrih dari orang yang diberi pelayanan, agar mendapat imbalan sesuatu.

Seorang karyawan Pemda DKI Jakarta yang sudah pasti enggan disebut namanya, mengemukakan kepada "Media Karya" bahwa sebagai abdi negara dibidang pelayanan, merasa sedih dengan ucapan Menpan itu. Soalnya, ia tidak pernah merasa berbuat seperti yang dilontarkan itu. Kalau ia mendapat imbalan sesuatu dari orang yang dilayani, karena pemberian secara iklas. "Mungkin dia merasa senang dan puas dengan pelayanan saya," ucapnya.

Diakui, ada juga karyawan yang tabiatnya brengsek seperti yang dikemukakan Menteri Sarwono, tapi baginya itu tanggung jawab pribadi. "Pokoknya prinsip saya, *sing becik ketitik ala ketoro,*" (yang baik terlihat yang buruk ketahuan).

Menurut Menpan, aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya masih buruk. Bahkan mereka yang seharusnya memberikan pelayanan justru minta dilayani sehingga masyarakat umum sering merasa jengkel.

Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto, orang yang paling pertama memberikan reaksi terhadap ucapan Menpan dan mengakui bahwa pelayanan kepada masyarakat yang diberikan aparatnya masih jauh dari memuaskan.

"Saudara tahu bahwa masalah pungli dan disiplin aparat merupakan hambatan paling besar untuk meningkatkan pelayanan umum di DKI Jakarta," ucap Gubernur tak kalah kerasnya dengan Sarwono.

Menurut Gubernur Wiyogo, ia masih tidak puas dengan penampilan aparatnya dewasa ini, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Namun aparat bawahnya itu masih belum bisa seirama dengan tekadnya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih, manusiawi dan berwibawa.

· Wiyogo Atmodarminto

Ketika memberikan pengarahan di hadapan para rektor perguruan tinggi se DKI Jakarta pada rapat koordinasi penataran P4 di kalangan mahasiswa baru, Wiyogo juga mengatakan, dua tahun kepemimpinannya itu hanya dipusatkan pada soal penertiban aparatur negara. "Kalau berkisar dari masalah itu saja, mungkin lima tahun masa jabatan saya hanya habis untuk membenahi soal itu," ujar mantan Dubes di Jepang ini.

Kata Wiyogo, setelah ia melakukan berbagai upaya guna membenahi aparaturnya itu, sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan dibanding keadaan sebelumnya. Disiplin aparatpun sudah mulai berjalan, meskipun ia sendiri tetap merasa belum puas.

Dikatakan, untuk meningkatkan pelayanan umum di DKI Jakarta, kunci utamanya ia harus melakukan konsolidasi secara sungguh-sungguh, terutama yang menyangkut aspek disiplin. Itupun, kata gubernur, harus dilakukan secara bertahap dari tingkat kelurahan sampai dinas.

Apa penyebabnya? Menurut Wiyogo aspek pendorong yang membuat aparat pemda melakukan perbuatan yang kurang mencerminkan sikap sebagai pamong adalah soal belum terpenuhinya standar kebutuhan pegawai, terutama di eselon tingkat paling bawah.

Belum lagi aparat pemberi ijin, seperti Dinas Kependudukan yang mengeluarkan KTP sampai tingkat aparat kelurahannya, aparat pemberi ijin bangunan (IMB) yang keluarnya seret kalau tidak ada "pelicin" dan banyaknya sertifikat tanah yang asli tapi palsu dan lain sebagainya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suparno Wiryosubroto menganggap ucapan Menpan Sarwono Kusumaatmadja itu ditujukan secara umum, tidak hanya pada aparat Pemda DKI Jakarta saja. Meskipun ia membenarkan kondisi seperti itu paling banyak di DKI Jakarta.

H.M. Rodja, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta yang banyak menyoroti soal-soal berhubungan dengan perijinan dan aktifitas perusahaan daerah milik Pemda DKI Jakarta menilai bahwa selama Wiyogo menjadi pamong di Jakarta telah banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai.

Dalam soal pelayanan petugas parkir misalnya, sekarang ini sudah semakin baik bahkan dari sektor ini pemda DKI Jakarta telah berhasil

Digitized by Google

HM Rodja

meningkatkan jumlah penerimaannya.

Soal adanya parkir ganda di blok M misalnya, menurut Rodja, sebenarnya lebih bersifat sukarela, yaitu pemberian dari seorang yang merasa dibantu dan dilayani dengan baik, sebagai tanda terima kasih ia memberikan imbalan kepada petugas parkir.

Tapi kalau petugas tadi menerapkan budaya ewuh pekewuh dan bersifat perwira, dan menganggap ucapan terima kasih lebih berharga dari pemberian uang yang notabene hanya beberapa ratus rupiah, maka sebagai pejabat perparkiran di wilayah ia tidak akan menerima imbalan tersebut.

Tindakan tegas Wiyogo misalnya, sekarang ini sudah mendapat respon dari aparat bawahannya dengan bersikap tegas pula apabila jajarannya ada yang berbuat tidak sesuai dengan peraturan.

Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta seperti gayung bersambut, memberikan komentar. H.A. Latif Mustofa, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, mengemukakan bahwa pelayanan umum aparat pemda di tingkat bawah masih dirasa memberatkan rakyat kecil dengan adanya pungutan-pungutan diluar ketentuan resmi.

Tapi Latif meminta agar masyarakat tidak mendorong aparat untuk berbuat yang tidak semestinya. "Saya kira sekarang ini aparat pemda sudah mulai ada perbaikan dan peningkatan melalui upaya-upaya mempercepat pelayanan KTP yang semula tiga bulan sekarang bisa 14 hari," ujarnya.

Memang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat dituntut untuk memiliki semangat pengabdian. "Tanpa dedikasi dan semangat pengabdian, pelayanan tidak akan bertambah baik," tandasnya.

Cepatnya pelayanan KTP di DKI Jakarta diakui oleh Anggota DPR-RI Ny. H.R.A. Suryati Atastinah Legowo, pelayanan yang dilakukan oleh petugas kelurahan Menteng cukup memuaskan, sudah bisa menyelesaikan KTP dengan cepat.

Lamanya proses pembuatan KTP, biasanya karena orang yang mengurus itu kurang dilengkapi oleh data-data yang diperlukan. "Ini dialami oleh pembantu saya, sudah beberapa bulan tidak selesai-selesai, karena ternyata surat pindahnya kurang dilengkapi dokumen-dokumen dari daerah asalnya.

Itu pengalaman yang menyenangkan, tapi sebagai anggota DPR pun pernah mengalami pelayanan yang kurang memuaskan, ketika mengurus soal fatwa waris di Pengadilan Agama. Persoalan berlarut-larut, suatu ketika ia diminta untuk datang pada pukul 09.00 pagi. Tapi ternyata petugasnya belum nongol.

Apa masalahnya? ternyata soal transportasi, karena petugas itu menggunakan kendaraan umum akibatnya harus menunggu. Kalau sudah dapat kendaraan, terhalang kemacetan lalu lintas.

"Saya jadi berfikir, kelemahan pelayanan aparat itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan dipundak pegawai saja. Soalnya bisa disebabkan oleh faktor diluar kemampuannya," ujar Ny. Legowo yang sehari-hari Wakil Ketua Komisi VIII DPRRI itu.

Ia menyarankan, sebaiknya aparatur yang bertugas melakukan pelayanan masyarakat fasilitasnya ditingkatkan.

Sebagai anggota DPR yang berpartner kerja dengan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Menteri Negara UPW dan BKKBN ia menganggap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh departemen-departemen di atas masih perlu ditingkatkan.

Pelayanan di bidang kesehatan misalnya, perlu ada penambahan jumlah petugas kesehatan di Puskesmas-puskesmas yang sekarang ini dirasakan belum memadai. Sehingga belum bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara memadai dan memuaskan.

Kurangnya tenaga medis, khususnya di Puskesmas-puskesmas membuat seorang pasien tidak bisa ditangani, tapi harus dikirim ke RS rujukan. Belum lagi banyaknya pasien, sedikitnya petugas, sehingga pasien terpaksa harus jengkel menunggu. "Yang be-

Menambah petugas Puskesmas

Digitized by Google

Tugas aparat untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan

gini ini apa ya harus aparat pelayanannya yang disalahkan?" tanya Ny. Legowo.

Soal keluhan para tenaga medik yang kurang diberikan pelayanan dalam soal penempatan tenaga, menurut Ny. Legowo tidak bisa sepenuhnya disalahkan pihak departemen, karena tenaga medik sendiri yang memilih tempat penugasannya.

Juga pelayanan dari Perum usaha Bhakti, selama ini hambatannya karena masyarakat mau cepat beres, tapi kurang memahami persyaratan yang berlaku, yaitu soal kelengkapan surat-surat. "Karena menganggap petugasnya bawel dan tidak memberikan pelayanan secara baik, iapun langsung memberikan vonis bahwa petugasnya salah," ujar Ny. Legowo.

Kalau sudah begitu, siapa yang harus disalahkan. Aparat pelayanan masyarakat atau masyarakat sendiri? Memang menjadi tugas aparat lain untuk terus memberikan penyuluhan dan bimbingan.

Budaya antri

Timbulnya sogok, suap dan lain sebagainya kepada aparat pelayanan masyarakat biasanya disebabkan engganya masyarakat bersusah-susah menunggu giliran, atau antri. "Budaya antri di masyarakat kita rasanya kok sudah diabaikan," ujarnya.

Keinginan untuk menyelesaikan segala urusan dengan cepat, tanpa mau susah-susah menyebabkan seseorang menyelipkan sesuatu, agar urusannya didahulukan. Kalau masih mematuhi aturan-aturan yang berlaku masih bagus. Celakanya ada yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat. "oknum masyarakat dan petugas yang begini inilah yang tidak bisa ditolerir," sergah Ny. S.A. Legowo.

Tidak usah mengambil contoh jauh-jauh ke negara yang sudah maju. Di Singapura, salah satu negara tetangga kita, antri sudah begitu membudaya. Mau naik bus antri, mau naik taksi antri. Bahkan kalau yang tidak mau susah-susah antri, supir bus atau taksi tidak mau melayani.

Pelayanan masyarakat lainnya menjadi lingkup tugas komisi VIII yaitu Departemen Sosial, satu permasalahan yang tengah dihadapi sekarang adalah pelayanan penitipan anak. Ny. Legowo menganggap yang ada sekarang ini belum memenuhi persyaratan dalam arti, antara petugas yang mengasuh dan jumlah anak yang dititipkan.

Petugas-petugas pelayanan masyarakat yang ditempatkan di sektor ini, baik oleh pemerintah maupun swasta harus yang benar-benar trampil. Ibu yang menitipkan anaknya akan benar-benar merasa aman, baik keamanan fisik maupun perkembangan jiwanya.

Kata Ny. Legowo, selama ini penitipan anak yang dibimbing Depsos memberikan batasan umur antara 3 bulan sampai 5 thn. Kalau bisa, yang masih bayi mbok jangan dititipkan, sebaiknya mulai dari anak-anak yang sudah berusia 1 tahun. Soal rasio perbandingan antara petugas penitipan dengan anak yang dititipkan juga harus diawasi secara ketat.

Posyandu

Berbincang soal yang buruk-buruk memang enak, dan banyak sekali. Tapi menurut Ny. A.S. Legowo rasanya tidak adil kalau tidak menilai sesuatu yang dianggap berhasil yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, seperti program posyandu (pos pelayanan kesehatan terpadu).

Program kerjasama antara Puskesmas dan ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) ini dinilai oleh Komisi VIII DPRRI cukup berhasil. Pelayanan masyarakat dalam rangka membina kesehatan anak-anak ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan kwalitasnya.

Juga sukses program KB yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan dukungan masyarakat, sehingga Indonesia melalui Presiden Soeharto memperoleh anugerah medali dari Perserikatan Bangsa Bangsa.

Meskipun soal KB inipun masih ada beberapa kekurangan misalnya, kurangnya petugas mendeteksi kesenangan daerah-daerah tertentu dalam menggunakan alat kontrasepsi, sehingga begitu alat itu dibutuhkan sudah tersedia.

Belum lagi pelayanan efek sampingan, belum ditangani secara baik sehingga menimbulkan dampak negatif bagi calon-calon akseptor KB.

Akhirnya Ny. Legowo menyarankan, agar tidak terjadi anggapan keliru serta mencegah timbulnya budaya suap disarankan agar, pemerintah harus memberikan penerangan seluas-luasnya mengenai pelayanan masyarakat. Dan kepada aparat itu sendiri harus meningkatkan pelayanannya, sehingga kekurangan-kekurangan bisa diperbaiki.

Sementara kepada masyarakat dihimbau untuk mengerti dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, dengan demikian berarti membantu pemerintah untuk menciptakan aparatur yang bersih. ☐ (AW)

Digitized by Google

Pelayan, Melayani atau Dilayani

BEKAS Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, pertengahan bulan Mei bicara tentang pelayanan yang diberikan aparat pemerintah, katanya masih buruk.

Dia katakan itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebuah jabatan yang memang bertanggung jawab atas pendayagunaan aparatur pemerintah. Tugas yang tak bisa dianggap ringan, karena ia bertanggung jawab atas efektivitas dan produktivitas pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Sarwono Kusumaatmadja

Abdi negara, tidak harus diterjemahkan sebagai tugas pengabdian terhadap negara semata. Tetapi negara dalam arti luas yaitu warga negara. Karenanya ia bukan mengabdi pada pemerintah dalam status sebagai aparatur negara saja, tetapi ia harus mengabdi pada masyarakat negara. Itu berarti, pelayanan yang diberikan seorang aparat pemerintah, tidak hanya kepada lembaga dimana ia bekerja, tetapi juga kepada warga negara secara luas.

''Jadi kalau kita bicara soal abdi negara, maka kita sedang bicara tentang pelayanan yang diberikan oleh seorang aparat pemerintah kepada negara/pemerintah sebagai lembaga dan kepada masyarakat sebagai warga negara, kepada siapa negara itu dibentuk. Ini yang pertama sekali perlu dipahami bersama oleh setiap aparat pemerintah,'' kata Marzuki Darusman SH, Wakil Sekretaris FKP DPR-RI.

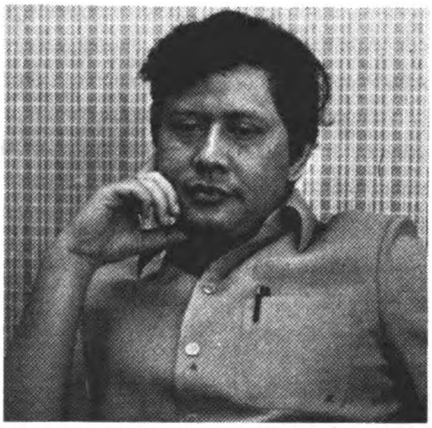

Marzuki Darusman

Marzuki melihat bahwa pengertian abdi itu sebenarnya punya konotasi yang feodalistis. ''Kita sering dengar istilah abdi ini dalam kaitannya dengan sistem sosial yang feodal. Seorang abdi tidak lebih dari ''hamba'', istilah populer di abad pertengahan dulu. Lalu pada sekitar abad ke-XII istilah itu menjadi lebih kasar lagi yaitu ''*budak*''. Nah kalau abdi negara dikaitkan kesana, saya kira itu suatu kekeliruan besar,'' katanya menjelaskan.

Karenanya, terlebih dulu harus diluruskan pengertian abdi negara yang digunakan sebagai simbol Korps Pegawai Negeri sekarang. Kalau itu tetap hendak kita pertahankan, katanya, maka pengertian abdi bukan hamba dari negara sebagai lembaga tetapi ia adalah pelayan bagi negara dalam arti luas tadi (negara sebagai lembaga dan masyarakat sebagai warga negara).

Apabila digunakan pengertian diatas, maka ucapan Menpan itu perlu dikaji lebih jauh lagi. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat masih buruk, menurut Menpan. Padahal, sejak dua tahun terakhir ini pemerintah sedang gencar melaksanakan debirokratisasi dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau begitu, timbul pertanyaan: ''Sudahkah debirokratisasi itu berjalan sebagaimana mestinya atau belum?''

Sebab pada hakekatnya debirokratisasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik dengan memperpendek prosedur birokrasi yang ada sebelumnya. Sehingga masyarakat tak dipusingkan oleh prosedur yang berbelit-belit dan terlalu lama. Anang Adenansi, anggota Komisi I DPR RI dari FKP, mempertanyakan hal itu. ''Katakan saja, debirokratisasi itu berjalan tetapi tidak lancar. Disini kita lalu bertanya lagi, hambatan apa lagi yang membuat tidak lancar itu. Kalau begitu, apa yang dikatakan Menpan ada benarnya. Pelayanan aparat pemerintah terhadap masyarakat masih buruk. Saya kira perlu ditelusuri terus,yang dimaksud buruk oleh Menpan itu. Kedengarannya memang menyakitkan, tapi ini yang terjadi. Untuk menyelesaikan IMB misalnya, semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi tapi harus berhari-hari, bahkan bisa saja seminggu atau dua minggu. Ini membuktikan pelayanan aparat masih belum baik, menurut istilah Menpan masih buruk,'' kata Anang.

Anang Adenansi

Terkadang memang sulit menjelaskan hambatan itu secara rinci. Sulit pula untuk mengatakan apakah aparat yang salah atau masyarakat dalam hal ini yang salah. Ada kebiasaan masyarakat tertentu yang datang dan memberikan semacam 'tips' dengan harapan agar urusannya cepat selesai. Sang petugas yang menerima 'tips' merasa punya utang budi kepada orang yang berkepentingan. Atas dasar itu ia lalu

Digitized by Google

berusaha menyelesaikan dengan segera urusan orang tersebut.

Yang begini ini, siapa yang harus disalahkan? pemberi tips atau penerima tips. "Saya kira kedua-duanya yang salah. Pemberi tips secara tak langsung memaksa aparat untuk melanggar peraturan, antara lain menerima sesuatu yang bertentangan dengan sumpah jabatannya. Kedua, ia lalu mendahulukan yang datang kemudian, sementara telah banyak yang datang jauh lebih dahulu dari pemberi tips itu. Sebaliknya, pemberi tips sendiri telah melanggar disiplin, yaitu memberi upeti (tips) kepada aparat agar urusannya didahulukan. Tindakan ini secara tak langsung mendorong lahirnya kebiasaan buruk dikalangan aparat, yaitu mau mengerjakan jika ada tips. Tanpa tips pekerjaan akan dibiarkan saja," kata Sabam Sirait anggota DPA beberapa waktu lalu.

Sabam Sirait

Menurutnya, pelayanan yang buruk itu tidak seluruhnya ulah aparat. Justru lebih banyak karena sikap masyarakat yang meremehkan peraturan. Belum disiplin dalam menghadapi pekerjaan yang berkaitan dengan aparat. "Artinya, masyarakat sengaja tidak menghiraukan peraturan lalu berusaha mendorong aparat untuk melanggar peraturan yang berlaku. Tapi sebenarnya, petugas harus memegang teguh peraturan, tidak lalu karena tips itu dia melanggar peraturan," jelas Sabam.

Seorang pegawai Departemen Dalam Negeri, yang tak sudi disebut namanya, mengatakan: "Memang dilematis sekali posisi sebagai aparat pemerintah. Terutama yang selalu berurusan dengan pelayanan masyarakat. Kita dihadapkan pada pilihan yang sungguh dilematis. Disatu pihak sebagai aparat yang telah disumpah untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pada pihak lain, dia berhadapan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang tak pernah mencukupi melalui pendapatan sebagai pegawai negeri; tiba-tiba datang orang memberikan sesuatu sebagai imbal jasa atas tugas yang dikerjakan. Saya lalu bertanya: Apakah salah jika pemberian itu diterima?"

Dilematis posisi aparat pemerintah

Menurutnya, jawaban atas pertanyaan itu jelas *salah*. Karena jika ia menerima pemberian itu sebagai imbal jasa baik sebelum maupun sesudah urusan itu selesai, berarti ia telah mengkhianati sumpah jabatannya. Ini jika dilihat semata-mata dari segi jabatannya sebagai aparat pemerintah. Tetapi apabila dilihat dari segi pendapatannya, sulit bagi kita untuk menyebut itu salah. Dia menerima imbalan, kebetulan karena sangat dibutuhkan saat itu.

Yang jadi persoalan sekarang, katanya, bagaimana menghilangkan budaya tips ini. Bagaimana aparat punya cukup kemampuan untuk menolak tips, sebaliknya masyarakat agar tidak terus menggoda dengan memberikan tips. Disini kunci persoalan pelayanan masyarakat itu.

"Inilah pentingnya ditanamkan disiplin nasional. Orang harus didorong untuk disiplin, patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang harus didorong untuk melihat peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagai sesuatu yang mutlak harus ditaati. Lebih dari itu, harus ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggar. Supaya bisa mentaati peraturan, sanksi itu harus tegas dan jelas. Yaitu dengan hukuman kurungan badan, bukan denda.

Karena, orang tak akan jera selama ia masih mampu membayar denda untuk setiap pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi ia akan sangat malu kalau sudah pernah dipenjarakan. Jadi untuk setiap pelanggaran tak lagi berlaku hukuman denda, melainkan hukuman kurungan," kata Anang Adenansi.

Pada akhirnya apa yang dikatakan Menpan, hingga kini masih terus menjadi perbincangan umum. Perbincangan itu meluas karena orang belum tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelayan, melayani dan dilayani. Orang masih sulit untuk membedakan antara pelayan yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Aparat yang melayani atau dia yang harus dilayani?

Selain disiplin nasional harus ditegakkan, barangkali perlu dipikirkan pula standar upah minimum yang dapat mengurangi kecenderungan aparat untuk melanggar peraturan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa kebutuhan hidup selalu ada dan terus berganti, tidak harus terus dipenuhi. Tetapi ada kebutuhan hidup minimum yang patut dipenuhi, agar orang dapat hidup layak sebagaimana mestinya, itu memang perlu dirumuskan.

Barangkali dengan memberlakukan kembali tunjangan kemahalan sesuai dengan tingkat harga di daerah, sehingga tuntutan hidup minimum ini dapat dipenuhi. Jadi berdasarkan tingginya harga barang kebutuhan pokok di suatu daerah, ditentukanlah besarnya tunjangan kemahalan yang dapat diberikan kepada pegawai daerah bersangkutan. Jadi gaji seorang pegawai negeri di Jakarta, tentu tidak akan sama dengan di Irian Jaya yang harga barang kebutuhan pokok cukup mahal.

Yang pasti, pelayanan aparat kepada masyarakat punya kaitan yang panjang. Dia mengkaitkan berbagai masalah hidup dan kehidupan. Mulai dari tingkat pendidikan, mental sampai pada kadar imannya secara spiritual.☐ (TB)

Digitized by Google

Pelayanan Masyarakat Perlu Dikembangkan

Dampak dan manfaat pembangunan nasional sudah berkembang sedemikian jauh. Sehingga tuntutan pelayanan masyarakat sudah menjurus ke arah peningkatan kemampuan pola pikir yang rasional.

Hal tersebut diungkapkan Amin Mu'in, ketika menjawab pertanyaan *Media Karya* sekitar adanya pelayanan masyarakat yang akhir-akhir ini muncul di permukaan dan dirasakan masih belum sesuai harapan orang banyak.

Menurut Amin Mu'in, dampak dari pembangunan itu jangan hanya dilihat dari segi negatipnya saja. Misalnya seperti aparatur tidak berperan sebagaimana mestinya, kata Amin, pembangunan yang dilaksanakan itu harus ada keseimbangan.

Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini lebih bertitik tolak pada sektor ekonomi. Dalam pembangunan yang menitik-beratkan pada sektor ekonomi tersebut, pada akhirnya akan dapat merubah sikap kemurnian manusianya. Diantaranya, dia tidak terlepas dari segi materi, hak-haknya. Misalnya hak kebebasan, hak berpartisipasi di dalam tanggung jawabnya sebagai warga negara dan yang lainnya.

Disinilah, sebenarnya dalam pembangunan ini diperlukan adanya keseimbangan. Misalnya, tentang mengurus ijin bangunan (IMB). Dalam hal IMB tersebut dimaksudkan agar warga

Amin Mu'in

negara dapat menikmati rumahnya dengan aman. Yaitu rumah yang memenuhi kesehatan, kenyamanan, jelas status tanahnya dan yang lain. Namun, dalam implementasinya apa yang terlihat menjadi lain. Yaitu restribusi dari hakekat ijin bangunan itu lebih menonjol. Sehingga sasaran pokoknyapun juga menjadi berubah. Sehingga, bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tersebut, dapat ditolerir dengan kompensasi denda. Dengan demikian, fungsi dari pelayanan akhirnya menjadi hilang. Dan kalau kita kembali berbicara dalam dampaknya terhadap ekonomi, maka hal itu akan terjadi proses ekonomi. Yaitu siapa yang mempunyai uang, dia yang akan memanfaatkan. Kalau sudah demikian, jangan salahkan masyarakat.

Harus ada keseimbangan

"Bila hukum ekonomi yang berlaku, maka orang yang punya uang menginginkan yang lebih baik. Dan kalau perlu dia serobot punya orang lain," ujar Amin.

Agar masyarakat tidak berjalan seperti demikian, kata Amin, perlu ada tata cara, norma-norma, pembinaan dan pelayanan. Membina tata hubungan pelayanan masyarakat, menurut Amin, berarti sedikit mengekang hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, katanya lebih lanjut, bukan untuk menghilangkan semua hak-haknya. Namun, semua itu dipergunakan untuk jangkauan berikutnya.

Jadi pembinaan pelayanan masyarakat memang perlu ditumbuhkembangkan baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan di lingkungan pemerintah dalam arti sebagai mengarahkan pengaturan dan pembinaan, sedangkan yang ditujukan pada masyarakat agar masyarakat mau mengerem, supaya masyarakat tidak mau enaknya sendiri.

Karena di dalam lingkungan masyarakat itu banyak keinginan-keinginan. Ada orang yang kuat dengan uang yang banyak dia akan mempergunakan potensi yang ada. Dan yang paling penting untuk menanggulangi masalah tersebut, bagaimana cara mengeremnya. Misalnya, dalam mengurus sesuatu agar orang-orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Dengan demikian, bila ada orang yang mengurus tersebut tidak harus melihat apakah dia itu orang punya atau tidak.

Selain itu, janganlah kita selalu melihat kelemahan-kelemahannya. Dan bila kelemahan-kelemahan yang dibuka, mereka itu akan membela diri.

Untuk itu, lanjut Amin, perlu dikembangkannya sistim manajemen. Karena dengan adanya sistim tersebut, pada akhirnya nanti akan dapat merubah struktur dan juga hirarki kewenangan orang. Dan kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, memang semua berkembang dengan polanya sendiri. Dan hal inilah yang perlu diluruskan — dalam arti pelayanan masyarakat —.... (BM/SS)

Digitized by Google

Investasi, Mengais Mutiara Dalam Lumpur

SETAHUN sebelum pelaksanaan PELITA I, pendapatan per kapita bangsa Indonesia hanya US$ 80. Tepatnya pada tahun 1968, ketika Indonesia sedang sibuk melakukan rehabilitasi total dalam upayanya menciptakan stabilitas politik secara nasional; setelah peristiwa pengkhianatan G.30.S/PKI yang memporak-porandakan kehidupan negara secara keseluruhan.

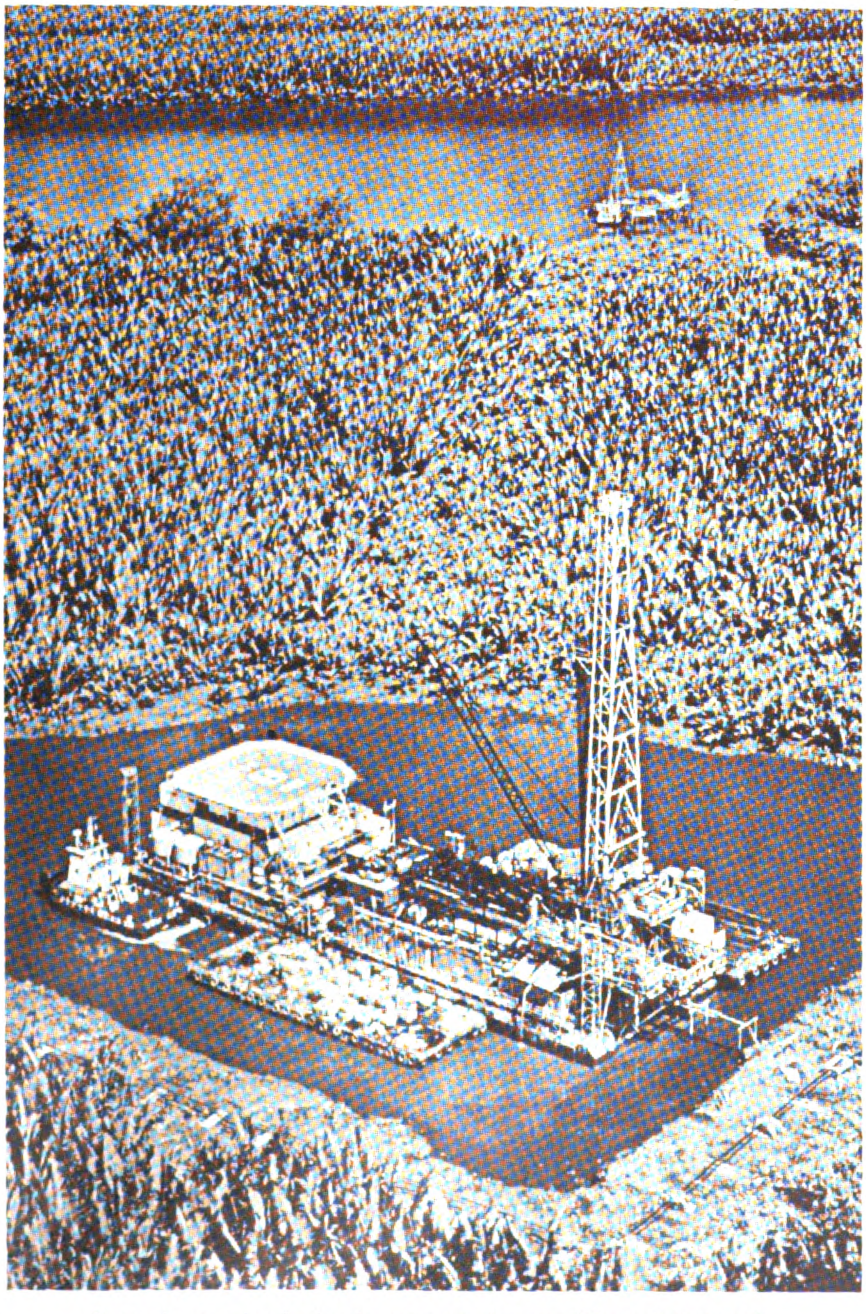

Perusahaan asing berlomba menanamkan modalnya di Indonesia

Situasi politik belum stabil, keadaan ekonomi masih belum beranjak dari kehancurannya, Indonesia mengambil langkah paling berani, dengan melaksanakan Pembangunan Lima Tahun yang pertama.

Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur membaik dari tahun ke tahun. Tidak hanya karena bantunan IGGI, suatu konsorsium negara-negara maju yang diprakarsai Belanda dan Jepang, tetapi banyak perusahaan asing lalu berlomba menanamkan modalnya di Indonesia.

Data yang dikeluarkan BKPM (Indonesian Investment News, No. 1/ 1989) menyebutkan, selama Pelita I Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 16 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar US$ 3,5 miliar. Naik lagi pada Pelita II menjadi: PMDN sekitar Rp. 17 triliun dan PMA sekitar US$ 7,8 miliar dan pada Pelita II PMDN diperkirakan sekitar Rp. 37 triliun dan PMA sekitar US$ 8 miliar lebih.

Angka-angka di atas menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak Pelita I hingga Pelita III. Pada Pelita IV keadaan agak menurun, sebagai akibat resesi ekonomi dunia dan turunnya secara drastis harga minyak bumi dipasaran dunia.

Pada Pelita I, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 8,5% ; Pelita II, 7% dan Pelita III 6,3%. Untuk Pelita IV diperkirakan pertumbuhan rata-rata mencapai 3,8% setahun dan untuk Pelita V diproyeksikan pertumbuhan rata-rata 5% setahun. Pertumbuhan yang tinggi selama Pelita I hingga Pelita III, karena ekspor minyak bumi dan gas alam yang besar dengan harga cukup tinggi. Periode ini sering disebut sebagai ''oil booming periode'' (periode ledakan pendapatan dari minyak bumi dan gas alam).

Dalam periode ini, para investor disektor minyak bumi seakan mengais mutiara dalam lumpur hitam. Jika pada tahun 1970 nilai ekspor Indonesia (termasuk non migas) adalah US$ 1 miliar lebih sedikit, pada akhir Pelita

Digitized by Google

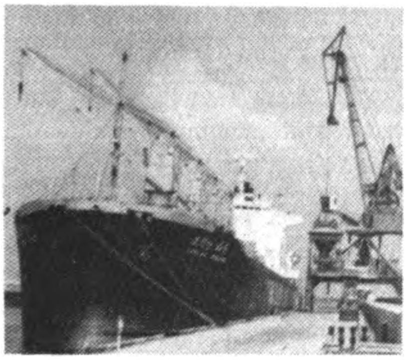

Minyak bumi merosot

I menjadi US$ 6,5 miliar, maka pada tahun 1980 turun menjadi US$ 5 miliar. Titik paling rendah dalam dasawarsa 1980-an adalah pada tahun 1982 yaitu hanya US$ 4 miliar, tetapi kemudian sejak tahun 1983 terus meningkat dan pada tahun 1987 mencapai US$ 8,5 miliar.

Tetapi sejak tahun 1982, peranan minyak bumi dan gas alam dalam penerimaan negara yang tadinya 70% lebih telah turun sangat menyolok. Peranannya hanya tinggal sekitar 50% bahkan mungkin sudah kurang dari itu. Ini jika ditelusuri, maka kebanyakan investasi pada kurun waktu Pelita I hingga Pelita III lebih banyak di sektor pertambangan, utamanya minyak dan gas alam. Sektor-sektor lain belum mendapat perhatian yang cukup. Baru pada Pelita IV investasi beralih pada sektor non migas.

Runtuhnya era migas

Menjelang akhir Pelita III, masa jaya minyak bumi dan gas alam mulai memudar. Oil Booming pada pertengahan Pelita I hingga awal Pelita III — sedikitnya selama sepuluh tahun — pelan-pelan tetapi cukup jelas, mulai runtuh. Harga minyak bumi merosot terus dan pada pertengahan Pelita III — tahun 1982 — benar-benar anjlok dengan drastis.

Berbarengan dengan itu, keadaan ekonomi dunia mulai merosot dan terjadilah resesi ekonomi yang berlangsung cukup lama (1982-1986), menyebabkan Indonesia turut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Apalagi disusul dengan depresiasi nilai dollar terhadap berbagai mata uang internasional.

Menyadari semakin sulitnya keadaan, Indonesia tak lagi sepenuhnya menggantungkan harapan kepada minyak bumi. Mulai terjadi deversifikasi ekspor. Berangsur-angsur beralih ke ekspor non minyak; pada Pelita III, ekspor non migas yang menjadi primadona adalah tekstil. Tetapi masa jaya tekstil juga tak lama bertahan karena terkena dampak UU Jenkin Bill (1986).

Proteksionisme Amerika, Inggris dan beberapa negara Eropa Barat mengakibatkan ekspor tekstil Indonesia menjadi menurun. Upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada ekspor minyak bumi dan gas alam, sejalan dengan kecenderungan perkembangan ekonomi dunia, terus dilakukan kendati cukup banyak kendalanya. Kemerosotan hasil devisa dari minyak bumi dapat dilihat pada grafik (gambar 1) berikut :

Nilai Ekspor Minyak Bumi dan Gas Alam, 1983 - 1987
(dalam miliar US $)

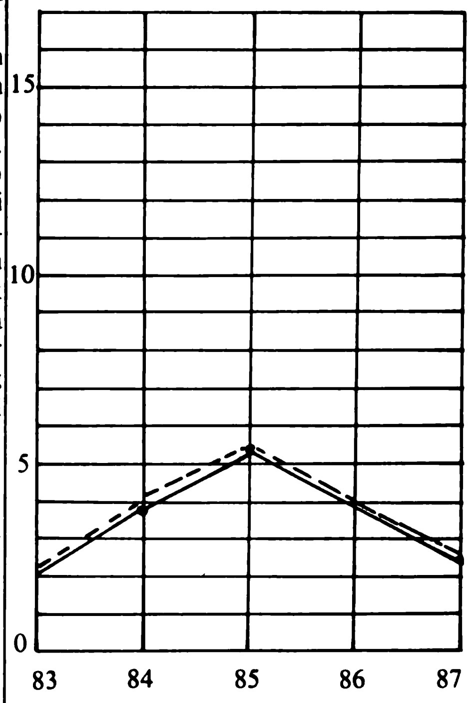

Dari data grafik di atas nampak bahwa pada tahun 1983 ekspor minyak bumi dan gas alam hanya US $ 2 miliar lebih sedikit. Angka ini turun dari US $ 4,8 miliar pada tahun 1973. Baru pada tahun 1985 naik lagi hampir sama dengan tahun 1973.

Perkembangan harga minyak yang tak menentu ini mendorong Indonesia melakukan reorientasi dari ketergantungan pada minyak bumi dan gas alam ke ekspor manufaktur (hasil pabrikan) dan pertanian.

Kedua sub sektor ini mengambil alih posisi tekstil yang bertahan hanya sekitar tiga tahun itu. Reorientasi ekspor ini, ternyata memberi hasil yang cukup besar karena dibarengi oleh serangkaian kebijaksanaan di bidang ekonomi: deregulasi dan debirokratisasi sektor ekonomi secara keseluruhan. Dimulai dengan deregulasi perbankan pada tahun 1983.

Kebijakan-kebijakan perekonomian itu juga telah mendorong peningkatan penanaman modal baik dalam negeri maupun modal asing. Ini akan sangat membantu peningkatan ekspor yang berarti pula peningkatan penerimaan devisa untuk negara. Sebagai ilustrasi, dapat dicatat disini bahwa sejak secara resmi penanaman modal dibolehkan (1968) hingga Desember 1988, nilai penanaman modal asing US $ 2.511 miliar dan penanaman modal dalam negeri Rp. 60.903 triliun.

Pada tahun 1988 jumlah proyek penanaman modal asing 145 buah, 72,4% (105 proyek) adalah untuk ekspor, sedangkan jumlah proyek dalam rangka penanaman modal dalam negeri sebanyak 845 buah, 75,5% (638 proyek) adalah berorientasi pada ekspor. Secara rinci dapat dilihat bahwa hasil dari penanaman modal yang berorientasi ekspor itu adalah sebagai berikut: Tahun 1986/87 nilai ekspor non-migas US $ 6.7 miliar naik menjadi US $ 9.05 miliar pada tahun 1987/1988 dan naik lagi menjadi US $ 11.34 miliar pada tahun 1988/1989.

Peningkatan nilai ekspor non migas dua tahun terakhir ini cukup menonjol, sehingga menambah keyakinan kita, bahwa ketergantungan terhadap ekspor minyak bumi dan gas alam sesungguhnya dapat dikurangi dan dialihkan pada ekspor non-migas dengan hasil yang cukup besar pula.

Tentu saja yang mendapat prioritas utama dalam ekspor non-migas ini, mestinya ekspor hasil pertanian jika melihat Indonesia sebagai negara agraris. Tetapi tidak berarti bahwa upaya menggalakkan ekspor di sektor lain tidak mungkin. Kita telah membuktikan bahwa Indonesia juga mampu mengekspor barang-barang manufaktur berupa hasil-hasil industri.

Malahan dalam Pelita IV lalu ekspor sektor manufaktor adalah 12% dari total ekspor Indonesia, sementara nilai ekspor sektor pertanian hanya 3,6% dari total ekspor Indonesia.

Era hasil pertanian

Setelah tekstil sebagai primadona ekspor Indonesia juga mengalami kemerosotan pada pertengahan Pelita III, maka muncul primadona ekspor yang baru lagi. Hasil pertanian dan

Digitized by Google

manufaktur muncul sebagai primadona baru ekspor Indonesia. Tabel berikut (gambar 2) menunjuk proyek-proyek penanaman modal asing dan dalam negeri yang paling menonjol tahun 1984 - 1988 :

FOREIGN & DOMESTIC INVESTMENT "POPULAR" PROJECT APPROVED BY BKPM, 1984-1988

COMMODITY	PROJECT	INVEST-MENT	PRODUCTION CAPACITY	EXPORT PLAN (000 US$)	
SHRIMP	195	1.432.988	252.048 tons 201.166 ton*	1.479.907	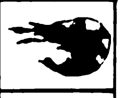
	8	25.863	7.556,5 tons 6.719 ton*	38.970,2	
SPORTS SHOES	66	506.116	152.905.000 pairs	568.240	
	20	126.102	88.890.000 pairs	338.646	
PLYWOOD/ WOOD WORKING	152	1.605.994	9.304.174 M3 7.908.546 M3*	2.767.991	
	16	203.426	1.093.132 M3 942.916 M3*	330.020	
RATTAN INDUSTRY	129	554.618	—	430.582	
	4	7.087	—	9.762	
RUBBER GLOVES	78	431.044	6.442.669.000 pairs	919.133	
	1	6.755	34.680.000 pairs	15.998	

Source : ***BKPM.*** ☐ ***DOMESTIC INVESTMENT*** *(Million Rupiahs)* ***FOREIGN INVESTMENT*** *(Thousand US Dollars)* *for export

Dari angka-angka nampak bahwa investasi yang besar adalah dibidang industri kayu (plywood & wood working) sebanyak 152 proyek PMDN dengan nilai Rp. 1.605.994 juta dan 16 proyek PMA dengan nilai investasi US $ 203.426 ribu; menyusul industri rotan, sebanyak 129 proyek PMDN dengan nilai Rp. 554.618 juta dan 4 proyek PMA dengan nilai US $ 7.987 ribu. Yang paling besar adalah pertambakan udang yaitu sebanyak 195 proyek PMDN senilai Rp. 1.432.988 juta, 8 proyek PMA senilai US $ 25.863 ribu. Pada urutan keempat adalah pabrik sarung tangan karet, sebanyak 78 proyek PMDN senilai Rp. 431.044 juta dan 1 proyek PMA senilai US $ 6755 ribu; tempat kelima adalah sepatu olahraga, 66 proyek PMDN senilai Rp. 506.116 juta dan 20 proyek PMA senilai US $ 126.102 ribu.

Dari data-data tersebut jelas bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumber kekayaan alam yang cukup besar dan tak akan kehilangan orientasi dalam berupaya membangun perekonomiannya. Setelah minyak bumi yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan paling dramatis, muncul tekstil sebagai primadona ekspor kita.

Begitu tekstil juga tertimpa bencana proteksionisme, kembali muncul primadona ekspor yang baru, yaitu hasil pertanian dan manufaktur. Berbarengan dengan itu, telah muncul pula primadona baru lainnya yaitu pariwisata.

Jadi adalah tidak benar jika ada anggapan bahwa perekonomian Indonesia akan tak menentu setelah minyak bumi tak lagi bisa diandalkan sebagai penghasil devisa utama. Kekayaan alam Indonesia cukup banyak sehingga kekuatiran demikian tak perlu.

Investasi di Indonesia sejak 20 tahun lalu hingga sekarang bergerak maju pesat seperti tangan-tangan para pemulung yang dengan cepat mengais bak sampah mencari barang bekas untuk dijual. Mereka mencari yang berharga di tengah onggokan sampah dan jadilah mereka orang-orang kaya.

Sementara para investor dengan modalnya mereka mengais bumi Indonesia mencari onggokan dan bongkahan barang bernilai. Minyak bumi dan gas alam, hasil hutan, hasil pertanian/ perkebunan, hasil laut dan hasil pabrikan yang memang belum tergarap sungguh-sungguh.

Tetapi harus pula diakui bahwa kekayaan bumi dan air Indonesia itu bukan tak pernah akan habis. Karenanya, pemanfaatannya harus lebih efisien. Seperti minyak bumi, ada batas kandungan dalam bumi Indonesia. Dan minyak tak mungkin di reinvestasi, sehingga hasil yang diperoleh dari minyak harusnya dapat dimanfaatkan bagi keperluan pembangunan yang dapat memberi hasil kembali.

Ketika harga minyak bumi masih tinggi, kita mampu memanfaatkan hasilnya untuk berbagai keperluan pembangunan nasional. Selama hampir dua Pelita, pembangunan ekonomi kita didukung selain oleh investasi juga oleh hasil dari minyak bumi.

Kita masih juga mampu mengembalikan/mencicil pinjaman kepada negara-negara IGGI, karena hasil yang dicapai pembangunan hingga sekarang memang cukup berarti. Kendati tertimpa resesi ekonomi dunia, ternyata Indonesia masih mampu menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti (tahun 1988, 3,8%).

Jika kita bicara soal investasi di Indonesia lalu mengacu pada data yang dikeluarkan BKPM, maka nampak bahwa sejak tahun 1968 hingga bulan Mei 1989 lalu, jumlah proyek dalam rangka PMDN 5.303 buah dengan nilai investasi Rp. 66.017,3 miliar; dalam rangka PMA 1.143 proyek dengan nilai investasi US$ 23.212,4 juta.

Dari jumlah dan nilai proyek PMDN maupun PMA tersebut dapat dirinci kedalam beberapa sektor utama yakni: industri tekstil, industri kimia, industri makanan dan industri kayu untuk PMDN (sedikit yang bergerak juga dibidang industri logam). Sedangkan dalam rangka Penanaman Modal Asing, proyek yang banyak diminati adalah: industri barang logam dengan nilai investasi US$ 2.707,7 juta dan industri kimia sebanyak 149 proyek dengan nilai investasi seebsar US$ 4.502,6 juta.

Untuk Pelita V dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 5% setahun, maka ditargetkan penambahan investasi sebesar US $ 138,6 miliar atau Rp. 239,1 triliun. Ini berarti bahwa kesempatan bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing akan meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Minat para investor untuk menanam modalnya di Indonesia, karena mereka melihat tiga faktor utama yang ada di Indonesia yaitu: kemampuan dan keahlian bangsa Indonesia ternyata cukup tinggi, tersedianya tenaga kerja yang cukup dengan upah yang bersaing dan keamanan bagi investasi di Indonesia cukup terjamin. Dengan demikian, benar jika dikatakan bahwa investasi di Indonesia seperti mengais mutiara dalam lumpur.☐ (TB)

Digitized by Google

Menarik Investasi Sebesar Rp 239 Triliun

DNI saja tidak cukup

Berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi rata-rata 5% selama Pelita V ini? Pemerintah telah menyepakati bahwa target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% dibutuhkan investasi sebesar Rp 239 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar dan tak kepalang tanggung.

Untuk mencapai target sebesar itu pihak swasta diminta bisa menyumbang Rp 131 triliun atau 55%, sedang sisanya berasal dari pemerintah.

Pemerintah tampak makin menyadari bahwa peran yang dimainkan dalam kegiatan ekonomi tidak bisa lagi terlalu besar, setelah lepasnya masa jaya minyak. Untuk itu porsi swasta diberi peluang yang lebih besar untuk mencapai besaran-besaran ekonomi yang diinginkan.

Serangkaian deregulasi dan debirokratisasi telah banyak diluncurkan pemerintah. Belakangan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) telah mengeluarkan kebijakan di bidang investasi dengan menghapus DSP (Daftar Skala Prioritas) 1987 serta memperkenalkan DNI (Daftar Negativ Investasi).

Banyak investor, baik di dalam maupun di luar, memang menunggu kelahiran DNI ini. Kebijakan baru bagi PMA/PMDN itu sedikitnya telah mengubah 209 bidang yang dinyatakan tertutup bagi PMA, kini menjadi tinggal 20. Di sisi lain bidang usaha PMA/PMDN serta non fasilitas yang semula tak terbuka (64 bidang) turun hanya menjadi 55.

Kebijakan "buka pintu" dari BKPM itu bahkan menurunkan pula investasi minimum PMA dari US$ 1 juta menjadi US$ 250.000.

Tapi apakah dengan keluarnya DNI itu minat berinvestasi dari pengusaha akan menggebu-gebu? Belum tentu, setidaknya apa yang dikatakan sejumlah pengusaha.

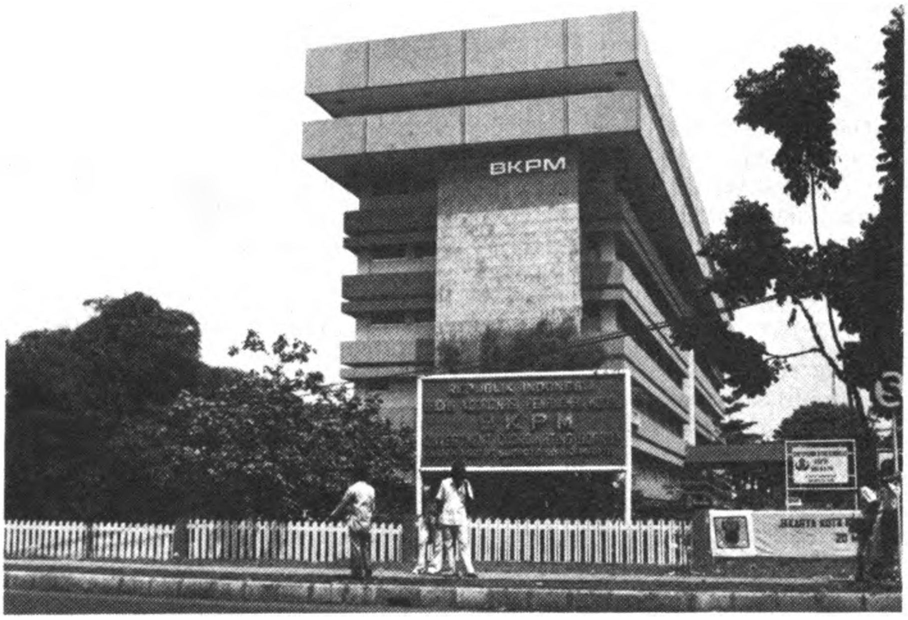

Iklim investasi makin terbuka luas.

"Iklim investasi kini memang makin terbuka luas, namun berbagai perijinan, baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus dibenahi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Sotion Ardjanggi setelah keluarnya kebijakan itu.

Ia menilai bila ijin-ijin itu bisa lancar, baru peluang tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan.

Tampaknya serangkaian deregulasi yang telah dikeluarkan pemerintah memang belum diikuti sepenuhnya oleh aparatnya.

Ketua Kompartemen Industri Mesin dan Logam Dasar Kadin, Fadel Muhammad berpendapat bahwa sikap mental para pejabat di daerah masih belum mendukung usaha-usaha deregulasi dan debirokratisasi. Akibatnya, setiap investasi selalu dipandang oleh mereka sebagai suatu usaha yang pasti untungnya besar.

"Mereka belum melihat bahwa investasi itu berkaitan erat dengan kelancaran roda perekonomian daerah, termasuk kesempatan kerja yang bisa diberikan pada daerah tersebut," katanya.

Para pejabat di daerah diingatkannya jangan terlalu kaku dalam menjalankan peraturan yang ada, karena ini bisa menghambat investasi. Sebagai contoh dia mengemukakan kasus keharusan memiliki Andal (analisa dampak lingkungan).

Andal harus dimiliki setiap pabrik, baik baru maupun perluasan, tanpa pandang bulu. Selain menambah biaya investasi, Andal yang baru bisa selesai paling cepat enam bulan. Ini tentu saja memakan waktu. Padahal, untuk perluasan pabrik, misalnya, keharusan Andal sudah tidak banyak gunanya lagi.

Sementara di mata Sotion Ardjanggi, Andal perlu dilokalisir dan tidak disamaratakan untuk semua bidang industri. "Pabrik elektronika, seharusnya tidak perlu Andal karena sama sekali tidak mencemari lingkungan," katanya.

Tapi meski pelaksanaan operasional investasi masih menghambat Fadel melihat kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi industri yang meng-

Digitized by Google

hasilkan *capital goods*..

''Keadaan itu akan memaksa industri jenis itu berbenah diri, karena mesin-mesin akan makin banyak dibutuhkan,'' kata Fadel.

Hanya saja disayangkan bahwa industri ini masih lemah dalam hal *product technology* dan *management technology*, sehingga mutunya masih rendah, tidak ada produk-produk baru dan harganya mahal.

Untuk menanggulangi ini memang diperlukan penelitian dan pengembangan yang biayanya cukup besar. Dan ini tentu saja sulit dipikul oleh kalangan industri akibat *margin* kecil dibanding industri jenis lain.

Dalam Pelita V ini kondisi seperti itu memang perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab kalau tidak, peluang yang ditimbulkan DNI akan direbut pengusaha asing, dan Indonesia makin tertinggal dari negara-negara lain, seperti Taiwan, Korea Selatan dan RRC.

Yang dipertanyakan pula adalah soal penurunan syarat minimum investasi asing dari US$ 1 juta menjadi hanya US$ 250.000, meski dengan catatan BKPM akan menyeleksi mereka.

''Padahal kemampuan PMDN untuk menanam modal di sektor kecil dan menengah masih besar,'' kata seorang pengusaha. Justru sektor kecil dan menengah itu harus *labor intensive* supaya lebih banyak tenaga kerja tertampung.

Sumber-sumber di Kadin mengungkapkan bahwa penurunan syarat minimum PMA menjadi US$ 250.000 itu sebenarnya atas desakan pengusaha asing, terutama Jepang.

Revaluasi Yen terhadap valuta kuat di dunia telah mengakibatkan mereka kegerahan berusaha di negeri sendiri. Mereka, yang terdiri atas investor kecil Jepang, kepingin mencari lokasi baru di negeri orang, termasuk Indonesia. Ada dugaan, penurunan syarat minimum itu akan menjamin kehadiran mereka berduyun-duyun ke sini.

Hanya saja watak Jepang selalu mengkaitkan investasi mereka di luar negeri dengan pasar domestik. Pendapat *Keidanren* dan *Jetro* membenarkan hal itu. Lihat saja investasi mereka ke AS dan Eropa tampak deras karena hal itu merupakan strategi Tokyo menghindari proteksionisme.

Dengan masuknya mereka ke jantung industri AS dan MEE, sedikitnya hambatan proteksi terselesaikan. Akan halnya modal yang ke Indonesia, Pemerintah mendorong mereka membuat barang ekspor dan membuka lapangan kerja di sini. Hal itu bisa saja tercapai dengan tawaran iklim investasi yang menggiurkan.

Tapi orang Jepang paling pandai mengeluh ketimbang investor benua lain. Konon ada empat faktor yang mempengaruhi suksesnya investasi asing di Indonesia: orientasi kepada pertumbuhan tenaga kerja dan teknologi, sikap mental dan latar belakang budaya serta daya beli masyarakat.

Soal prasarana penunjang perkembangan ekonomi dan industri mencuat akibat pengusaha Jepang lebih vokal menyuarakan penilaian mereka terhadap kondisi di Indonesia. Mulai dari telepon yang susah, listrik, sampai air

Penelitian dan pengembangan

minum yang langka dan tidak siap diminum.

PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) milik Departemen Perdagangan harus membayar Rp 1,8 miliar untuk bisa memperoleh sambungan PAM DKI. Sambungan telepon juga susah masuk KBN, padahal *bonded zone* itu lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23/1986 dan merupakan export *processing zone* yang bisa melayani investasi dalam sistem *one-stop service*.

Sampah yang menumpuk di Cakung dengan luas hektaran yang sejak lama menjadi tetangga akrab di KBN, telah menjadi salah satu kendala lain buat PMA/PMDN. Produk tekstil menjadi rusak terkena polusi udara yang berasal dari timbunan sampah itu. Tapi Pemerintah DKI tampaknya juga sulit mencari lokasi baru untuk menyingkirkan biang polusi itu, sementara masyarakat Jakarta semakin giat memproduksi sampah.

Kini tampaknya Kadin dan kelompok Sumitomo dari Jepang disebut-sebut ingin membuat *bonded zone* di Pasuruan dan Tanggerang. Kawasan serupa akan dibangun pula di medan, Surabaya, Semarang dan Ujung Pandang. Kawasan itu bahkan kabarnya akan dijual US$ 25 m2, yang berarti jauh di atas harga sewa US$ 1,8 per m2 di KBN.

Namun persoalan yang mendesak kini adalah bahwa Indonesia harus sesegera mungkin menawarkan kondisi dan iklim investasi yang semakin menarik kalau tidak ingin tergusur oleh agresivitas negara tetangga, seperti Pilipina atau Thailand.

''Pemerintah memang sebaiknya mengeluarkan deregulasi bidang *industrial estate*,'' kata seorang pengusaha.

Bahkan kalau perlu, katanya, dibentuk *development authority* yang memantau semua kawasan industri supaya kegiatan mereka lebih terpadu dan memiliki daya saing.

Pemerintah pusat dan daerah bisa pula mendayagunakan aparatnya untuk mendukung pembangunan kawasan itu menjadi lebih kompetitif. ''Akan lebih baik bila pemerintah tidak mengijinkan pembangunan industri baru di luar kawasan industri,'' lanjutnya.

Kini soal lokasi industri memang masih simpang siur antara kepentingan memacu investasi dengan masalah lingkungan hidup. Mana yang harus didahulukan? ''Memang sulit,'' kata pengusaha tadi.

Tapi dia berpendapat, bila pemerintah dan dunia usaha memanfaatkan *industrial estate* dengan maksimum, maka problem itu bisa diatasi.

''Asalkan prasarana tersedia dan pemerintah bersungguh-sungguh memberikan pelayanan prasarana yang diperlukan,'' tambahnya.

Kalau pemerintah pusat dan daerah tidak mengutamakan pembangunan prasarana di kawasan industri, maka memang sulit diharapkan problem lingkungan dan investasi segera dipecahkan. Kondisi kawasan industri di Jakarta saja sangat payah. Bisa dibayangkan keadaannya kawasan industri daerah.

Lihat saja minat investor asing. Tidak semua investor asing bersungguh-sungguh menanam modal di sini. Mereka untuk sementara ini hanya terpaksa akibat apresiasi mata uang. Kalau mata uang mereka kembali stabil, apakah minat mereka menanam

Digitized by Google

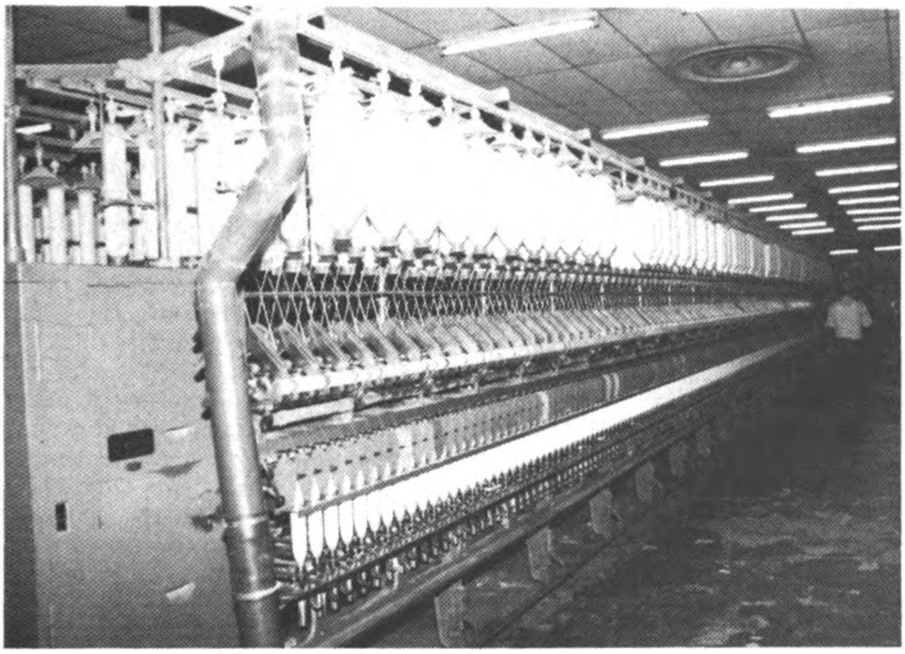

Berorientasi pada pertumbuhan perusahaan

modal di Indonesia masih ada? Karena itu berbagai kemudahan dan rasa aman perlu terus dikembangkan.

"Ada beberapa unsur yang bisa dijadikan pegangan agar investor mau menanamkan modalnya di sini," kata ekonom I Nyoman Moena.

Ia melihat bahwa mantapnya stabilitas nasional yang terdiri dari sektor politik dan moneter merupakan hal yang paling menentukan kegairahan orang berinvestasi.

"Tidak ada gejolak-gejolak yang sampai bisa menghambat kelancaran pembangunan. Sementara di sisi lain adalah tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata setahun dan terkendalinya inflasi," kata Dirut PT. Sucofindo ini.

Kedua sektor inilah yang selalu menjadi pusat perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di sini.

Tapi ada beberapa faktor lain yang bersifat mendukung. Misalnya saja kebijaksanaan pemerintah yang sering berubah-ubah memang bisa membawa pengaruh bagi para investor. Karena itu pemerintah harus tetap konsisten terhadap setiap kebijaksanaan yang dikeluarkannya.

Sebab bagaimanapun investasi memang memerlukan penanaman dalam jangka panjang. Kalau sering berubah-ubah tentu membuat sulit para investor membuat kalkulasi.

Tapi tidak hanya itu lirikan para investor. Sejumlah unsur lain tidak akan dilepaskan dari pengamatannya. Sebut saja, misalnya, soal daya beli masyarakat. Soal ini memang terlihat sepele, tapi ini sangat mempengaruhi bagi penanaman modal.

"Kalau daya beli masyarakat terus berkembang, tentu produk yang mereka hasilkan bisa diserap oleh masyarakat. Tapi kalau tidak buat apa mereka susah-susah menanamkan modalnya di sini," ujar Nyoman Moena.

Moena melihat bahwa daya beli masyarakat Indonesia terus meningkat, dan ini tentu saja menggembirakan buat para investor.

Kalau soal-soal bisa dipenuhi, apakah dengan begitu investor bersedia menanam modalnya di sini? Memang belum tentu. Selain berbagai persoalan yang telah disinggung sebelumnya, ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan mereka, yaitu soal sistem perpajakan.

Sistem perpajakan yang hanya mengejar target memang kurang begitu disukai para investor. Sistem perpajakan yang mereka senangi ialah yang berorientasi pada pertumbuhan perusahaan. Artinya, bila pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan belum berjalan dengan stabil, maka sistem perpajakan hendaknya memberi nafas kepadanya. Kalau sudah stabil, baru mereka digebuk dengan pajak.

Sistem perpajakan yang berorientasi pada pertumbuhan perusahaan bisa juga dianggap sebagai unsur pembinaan kepada perusahaan bersangkutan. "Supaya perusahaan itu betul-betul menjadi ayam yang bisa bertelur emas," kata Nyoman Moena.

Tapi soal kadar birokrasi juga menjadi pertimbangan. Yang kini banyak dikeluhkan para pengusaha adalah masalah pembebasan tanah untuk lokasi investasi. Lamanya pembebasan dan ijin yang berbelit, memang sering terdengar dari kalangan pengusaha.

"Soal tanah dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan - red) memang masih terasa sulit," kata Sudarto, Direktur PT. Kiani Indonesia.

"Juga perlu adanya Undang-undang Hak Paten yang efektif terutama untuk barang-barang yang dilindungi hak patennya," ucap Moena.

Munculnya berbagai penjiplakan barang akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sini.

Pendeknya sejumlah faktor lain akan selalu menjadi perhatian investor, seperti mulai dari sistem devisa, kondisi tenaga kerja, dukungan sistem moneter, sampai adanya kepastian hukum yang mantap di sini.

Dalam hal sistem devisa yang kita anut saat ini merupakan hal yang sangat mendukung bagi penanaman modal. "Jangan sampai ada isu-isu bahwa kita akan kembali ke sistem devisa terkendali. Ini akan membuat takut para investor," kata Nyoman Moena.

Tapi memang perlunya ada fasilitas lain untuk menarik para investor itu. Misalnya soal dukungan sistem moneter yang sangat didambakan para investor yang sesuai dengan jenis usahanya.

Adanya bank devisa, lembaga keuangan non bank, leasing company, discount house, factoring, dan asuransi ekspor yang bisa menjamin.

Moena melihat bahwa lembaga-lembaga seperti itu sangat diperlukan para investor. "Pada suatu ketika mereka memerlukan bank. Tapi pada saat yang lain mereka bisa saja memerlukan factoring," kata Komisaris Oversease Express Bank ini.

Variasi-variasi seperti itu dinilainya sangat disenangi oleh para investor. Indonesia memang telah mempunyai sejumlah lembaga-lembaga itu, tapi untuk factoring dan discount house belum.

"Tapi factoring dan discount house akan segera ada," tambah Moena.

Memang menciptakan iklim investasi yang baik dan sekaligus menyediakan dana investasi sebesar Rp 239 triliun selama Pelita V ini cukup berat.

Dunia usaha saja sangat menyadari bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% setahun itu terasa berat. Apalagi dari *total investment* Rp 239 triliun, swasta diharapkan mampu menyediakan dana sebesar Rp 131 triliun (55%). Suatu jumlah yang luar biasa.

Digitized by Google

Jumlah itu naik dua kali lipat ketimbang sasaran investasi pada Pelita IV. Karena itu, selain DNI, masih banyak upaya yang perlu ditingkatkan untuk bisa mencapai pertumbuhan tadi.

Meski begitu kita harus mengakui bahwa Indonesia bagaimanapun kini makin layak sebagai suatu lokasi produksi. Berbagai perbaikan kebijakan pemerintah di bidang investasi mulai dirasakan hasilnya.

Tidak hanya dalam bentuk nilai investasi yang meningkat, tapi juga tercermin dari makin banyaknya investasi yang kini disasarkan untuk ekspor.

Tahun lalu saja total investasi PMDN mencapai Rp 14,66 triliun dan PMA US$ 4,4 milyar.

Selama 3 tahun dari 1986-1988, terdapat 2007 proyek baru dan perluasan PMDN dengan nilai total Rp 29,3 triliun. Dari jumlah itu, 1.596 proyek menyatakan dirinya akan mengekspor sebagian atau seluruh hasil produksinya. Dalam hal PMA, dari 374 proyek bernilai US$ 6,7 miliar, 294 proyek merencanakan akan mengekspor.

Perkembangan lain yang patut dicatat adalah makin banyaknya investasi di bidang industri. Tersedianya berbagai bahan baku, murahnya tenaga buruh, dan rendahnya nilai rupiah terhadap mata uang negara-negara industri, menyebabkan Indonesia makin atraktif sebagai lokasi industri di mata investor asing.

Ini, misalnya saja, diakui oleh Toshio Oda, Direktur Pelaksana Nissho Iwai Corp., Jepang. Berkunjung ke Jakarta memimpin rombongan 20 pengusaha besar Jepang awal Juni lalu, Oda menyatakan bahwa pembangunan industri di Jepang sudah terlalu mahal. Pengusaha Jepang sudah banyak yang memindahkan pabriknya ke Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura, atau Thailand. Tapi iklim investasi di negeri-negeri itu tidak secerah sebelumnya.

"Indonesia kini ideal untuk penanaman modal Jepang bagi konsumsi ekspor, baik ke Jepang sendiri maupun ke negara lainnya," kata Oda. Nah, apa lagi yang harus kita tunggu.☐ (LT)

DNI 1989: Jurus Baru untuk Menarik Investasi Swasta

Dalam Repelita V ini diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5 persen per tahun, dan untuk itu diperlukan investasi sebesar Rp 239,1 triliun yang diantaranya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp 131,5 triliun. Investasi sektor swasta akan meliputi segala macam penanaman modal baik dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing), PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan Non-PMA/PMDN maupun penanaman modal yang sifatnya informal.

"Apabila dibandingkan dengan sasaran investasi Repelita IV yang lalu maka angka sasaran investasi yang ditetapkan dalam Repelita V adalah dua kali lipat, karenanya perlu upaya dan usaha yang lebih keras agar para penanam modal berminat untuk menanamkan modalnya di negeri kita," demikian kata Dr. Saleh Afiff, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas ketika menjelaskan pokok-pokok dari dikeluarkannya kebijakan mengenai Daftar Bidang-bidang Usaha Tertutup bagi Penanaman Modal (DNI) 1989.

DNI 1989

Dalam bulan Mei lalu, Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru di dalam bidang penanaman modal (DNI 1989), untuk mengganti dokumen lama yang dikenal dengan nama Daftar Skala Prioritas (DSP) bidang-bidang usaha penanaman modal dengan satu daftar bidang usaha tertutup bagi penanaman modal baik PMA, PMDN maupun non PMA/PMDN.

Deregulasi ini dimaksudkan, untuk memberi kelonggaran dan kemudahan para investor untuk memilih bidang usaha yang diminati dengan memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya. Sehingga dapat lebih menggairahkan iklim investasi di Indonesia yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA, dengan tujuan untuk dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja.

Memberi kemudahan dan kelonggaran investor

Menurut kalangan pengusaha, informasi mengenai kesempatan berusaha kini menjadi lebih jelas dan praktis. Karena berbeda dengan DSP sebelumnya yang memuat semua kegiatan/bidang usaha baik yang terbuka maupun yang tertutup baik bagi PMA, PMDN, Non PMA/PMDN, dalam DNI 1989 ini hanya tercantum bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dalam rangka PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN dan tertutup bagi penanaman modal dalam rangka PMA saja.

Dalam keterangannya kepada *Media Karya,* Wakil Ketua BKPM, Ra-

Digitized by Google

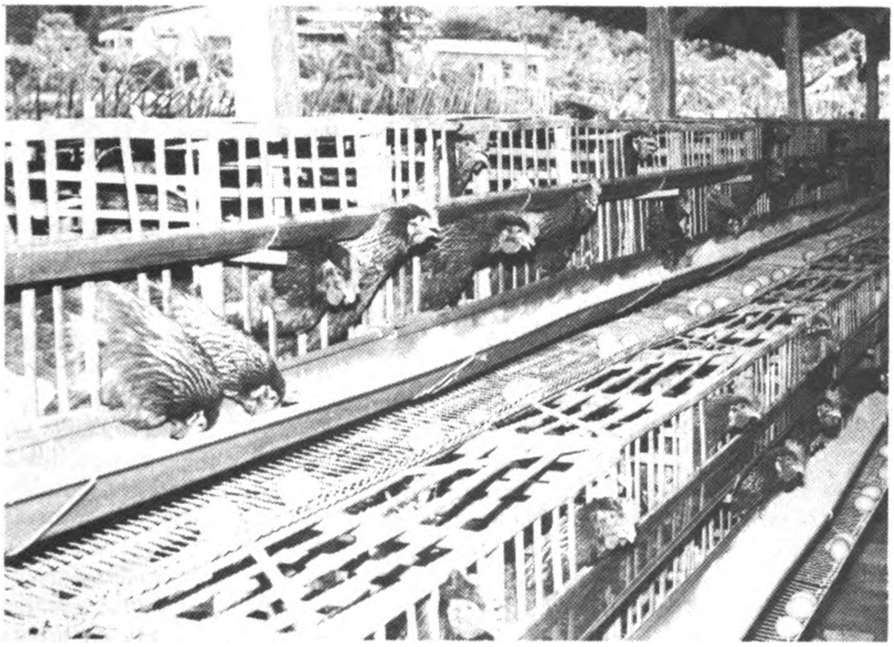

Mengembangkan industri dan pengusaha kecil

sjidi mengemukakan, dibandingkan dengan DSP 1987, jumlah bidang-bidang usaha yang tertutup kini jauh lebih sedikit.

Menurut DSP 1987, jumlah bidang usaha yang tertutup untuk seluruh jenis penanaman modal adalah sebanyak 64 bidang usaha, sedangkan menurut DNI 1989 hanya 51 bidang ditambah empat sektor usaha yang tertutup baru, yakni pemanfaatan dan pengusahaan *sponge* (bunga karang), ganja dan sejenisnya, kasino/perjudian dan jasa saluran televisi umum, "sehingga jumlah keseluruhan bidang usaha yang tertutup bagi seluruh jenis penanaman modal sekarang menjadi 55," katanya.

Jumlah bidang usaha yang tertutup bagi PMA namun terbuka bagi PMDN, dalam DSP 1987 sebanyak 209, menurut DNI 1989 hanya sebanyak 20.

Sedangkan bidang usaha yang dikategorikan sebagai *reservation scheme,* dulu berjumlah 85 sekarang hanya tinggal 36 bidang usaha termasuk 8 bidang usaha sektor pertanian yang dulu tidak dikategorikan dalam *reservation scheme.*

Seperti diketahui, untuk melindungi industri/pengusaha kecil, dalam DNI 1989 ini disertakan pula daftar bidang usaha yang dicanangkan bagi industri/pengusaha kecil (*reservation scheme*). DNI ini pada dasarnya berlaku selama tiga tahun dan setiap tahun dapat diadakan peninjauan kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Ketentuan

Menyinggung soal ketentuan DNI 1989, Rasjidi mengemukakan, bidang usaha yang tidak tercantum dalam daftar bidang-bidang usaha tertutup bagi penanaman modal, pada dasarnya terbuka sepenuhnya bagi investasi baik PMA, PMDN maupun Non PMA/PMDN.

Tapi, katanya lagi, sekalipun suatu bidang usaha dinyatakan tertutup dalam DNI 1989, namun:

— Untuk bidang-bidang usaha tertentu, apabila 100% dari hasil produksinya akan diekspor, bidang usaha tersebut terbuka baik untuk PMA, PMDN, maupun PMA/PMDN. Bidang usaha tersebut adalah peternakan ayam bibit galur murni, peternakan ayam bibit nenek serta peternakan ayam bibit induk.

— Untuk bidang-bidang usaha tertentu, karena berbagai alasan yakni kelestarian alam atau dianggap berbahaya, meskipun untuk 100% ekspor tetap tertutup bagi semua penanaman modal.

Bidang usaha itu adalah pemanfaatan dan pengusahaan sponge (bunga karang), perkebunan ganja dan sejenisnya, industri block board, penggergajian kayu (kecuali di propinsi Irian Jaya), veneer (rotary) serta pengolahan rotan baik mentah maupun setengah jadi.

Sedangkan barang jadi rotan tertutup bagi PMA walaupun 100% ekspor. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kesempatan berkembangnya pengusaha nasional di bidang ini.

— Di luar bidang-bidang usaha tersebut, apabila sekurang-kurangnya 65% dari hasil produksinya akan diekspor, bidang usaha tersebut terbuka untuk semua penanaman modal baik proyek baru maupun perluasan.

Diturunkan

Dikatakan, batas minimum investasi bagi PMA yang selama ini sebesar US$ 1 juta diturunkan menjadi US$ 250 ribu yang penetapannya dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan minat para penanam modal menengah dan kecil yang bersifat padat karya, produksi ekspor, menunjang penyediaan kebutuhan industri besar serta tidak menyaingi investasi yang sudah ada.

Sementara dipihak lain, dalam rangka memajukan usaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dan koperasi, ditetapkan ketentuan bahwa bidang usaha yang terbuka dalam rangka PMDN tetapi tertutup dalam rangka PMA menjadi terbuka untuk PMA, apabila mengikutsertakan koperasi sebagai saham sedikitnya 5% pada saat pembentukan perusahaan patungan PMA yang bersangkutan. Sebelumnya ketentuan prosentase penyertaan koperasi ini adalah 20%.

Disamping itu, katanya, DNI 1989 juga mengatur ketentuan mengenai penanaman modal di bidang industri/usaha kecil.

Tapi, apa sih kriteria industri/usaha kecil? Adalah investasi untuk mesin, peralatan dan bangunan tidak lebih dari Rp 200 juta (di luar harga tanah) dan pemilik usaha adalah hanya warga negara Indonesia.

Penanaman modal untuk bidang-bidang usaha dalam kelompok industri kecil terbuka di seluruh Indonesia dan dapat memperoleh fasilitas yang terbuka dalam rangka PMDN, dan perijinan usaha/registrasi diselesaikan melalui kanwil/kandep setempat.

Satu lagi yang penting dari DNI adalah bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/pengusaha kecil terbuka untuk industri menengah/besar PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN dengan syarat harus melakukan kerjasama usaha dengan industri/pengusaha kecil yang/dan akan mengembangkan industri/pengusaha kecil yang baru. □ (hes)

Digitized by Google

Bursa Saham, Penunjang Pencapaian Sasaran Investasi

Sekurang-kurangnya Rp 239,1 trilyun perlu diinvestasikan selama Repelita V, agar roda perekonomian Indonesia mampu melaju 5%. Target investasi itu pernah menjadi topik pembahasan menarik dalam seminar tentang mobilisasi dana beberapa waktu berselang. Sejumlah bankir terkemuka dan tokoh-tokoh di bidang keuangan menjadi pembicara, bahkan bintang pembicara tampil Menteri Keuangan J.B. Sumarlin.

Angka "fantastis" itu memang menarik perhatian dan menjadi kajian para pakar keuangan dalam seminar itu. Pasalnya? Pemerintah pernah menyatakan, hanya akan mampu mengupayakan investasi sekitar 45% dalam Repelita V. Perincian Rp 47,1 trilyun diambil dari tabungan Pemerintah, kemudian diupayakan bantuan luar negeri Rp 60,4 trilyun. Lalu sisanya yang 55% atau Rp 131,6 trilyun diharapkan dari swasta.

Target itu nampaknya memang berat untuk dicapai. Sebab, sasaran Pelita IV pun yang ditargetkan Rp 145,2 trilyun saat itu belum tercapai. Sebagai gambaran, anggaran pembangunan yang terhimpun dalam lima APBN terakhir hanya sekitar Rp 47,5 trilyun, atau hanya 54% dari target sebesar Rp 78,6 trilyun. Penyebabnya jelas, migas yang menjadi motor pembangunan tak bisa diharapkan lagi sejak 1986, saat harga minyak anjlok sampai US$ 10 per barel.

Kemudian investasi swasta diharapkan mencapai Rp 40 trilyun dan investor asing diharapkan menanam Rp 26,6 trilyun. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi swasta dari April 1984 hingga Desember 1988 mencapai Rp 35,5 trilyun, sementara swasta asing mencatat Rp 12,5 trilyun, hingga jumlahnya Rp 48 trilyun.

Kenyataan itu memang menunjukkan masih jauh dari sasaran. Tapi sesungguhnya ada hal yang melegakan, yaitu investasi masyarakat lewat perbankan. Yang terkumpul dalam deposito hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 24 trilyun. Jika dihitung bersama giro, Tabanas dan Taska menjadi Rp 35 trilyun. Kalaupun ini dijumlahkan, sasaran yang Rp 145,2 trilyun pun belum juga tercapai.

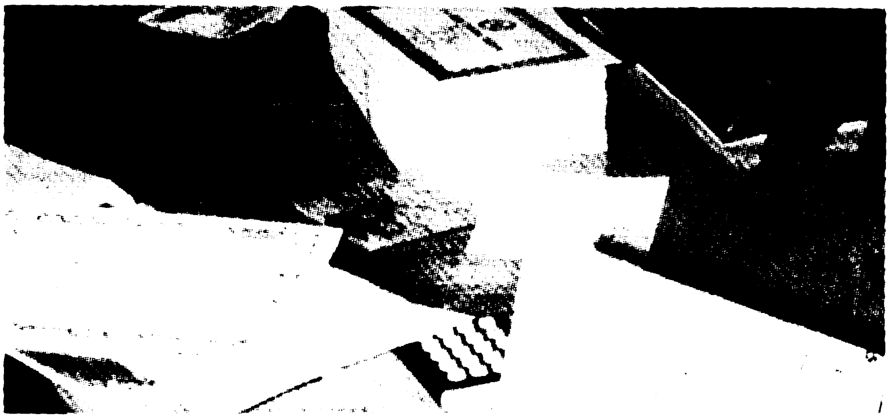

Iklim investasi berperanan penting untuk memobilisasi dana

Iklim Investasi

Ternyata tabungan masyarakat di bank-bank tak semuanya dimanfaatkan untuk investasi. Banyak bank yang kekenyangan dana, tetapi tak mampu menyalurkannya ke dalam kredit yang produktif. Pelariannya, berspekulasi di pasar uang internasional.

Namun kegagalan investasi swasta itu sendiri, menurut Sumarlin, sebagian disebabkan oleh iklim investasi saat itu. Birokrasi atau dampak kebijaksanaan ekonomi. "Waktu itu ekonomi kita tidak kompetitif, karena berbagai pengaturan yang melindungi industri. Juga berbagai langkah yang bertujuan melindungi neraca pembayaran," ujar Sumarlin seperti dikutip *Tempo*.

Iklim investasi nampaknya memang akan berperan penting dalam mobilisasi dana. Dan iklim itu telah diciptakan Pemerintah. Tak heran jika banyak pakar sependapat sasaran Pelita V akan lebih mudah dicapai. Karena, Pemerintah telah menyiapkan berbagai sarana dan iklim yang lebih baik dibandingkan dalam Pelita IV. Berbagai paket deregulasi dibuat demi perubahan struktur ekonomi seperti, sejumlah kendala birokrasi telah dipangkas, struktur lembaga-lembaga keuangan pun diperluas. Seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, asuransi, pasar modal, leasing, modal venture dan lain sebagainya.

Kebijaksanaan ini terbukti juga memberi dampak positif dari dunia internasional. Sidang ke-32 negara-negara donor Indonesia (IGGI) memutuskan memberikan pinjaman sebesar US$ 4,3 milyar plus bantuan khusus US$ 1,85 milyar. Jumlah ini lebih besar dibanding usulan Bank Dunia yang hanya US$ 4,2 milyar.

Hal itu merupakan bukti kepercayaan dunia internasional akan kebijaksanaan yang diambil Pemerintah. Kredit khusus sebesar $ 1.855.1 juta sangat melegakan Pemerintah karena akan segera terasa bagi pembangunan. "Bantuan khusus itu sangat bermanfaat, karena langsung bisa dicairkan dalam tahun anggaran ini juga. Selain itu, bantuan itu juga bisa dirupiahkan semua, sehingga sangat membantu proyek-proyek pembangunan khususnya yang memerlukan dana rupiah," kata Dr. Saleh Afiff yang mengetuai delegasi Indonesia dalam sidang IGGI itu.

Menjaring Investor

Iklim yang semakin baik ini ternyata segera dimanfaatkan dengan tepat oleh BKPM. Kira-kira dua minggu setelah mengeluarkan Daftar Negatif Investasi, Ketua BKPM Sanyoto Sastrowar-

Digitized by Google

toyo mencoba menjaring investor Korea Selatan. Berangkat ke Seoul bersama lebih dari 20 pengusaha. Sanyoto merasa optimis akan misinya. "Pengusaha Korea banyak yang antusias," tuturnya.

Promosi menjaring investor yang dilakukan awal Mei itu diteruskan ke Hongkong. Disini agaknya ia lebih berhasil. Karena dari sekitar 100 pengusaha yang hadir, segera tiga di antaranya menyatakan niatnya memasuki bidang pariwisata.

Agaknya bidang yang satu ini memang sedang naik daun. Terbukti tiga bulan sebelumnya, dari Januari hingga April 1989, sejumlah 29 proyek investasi diperoleh antara lain untuk pembangunan hotel, pusat rekreasi, biro perjalanan dan restoran.

Kendati kemudahan telah diciptakan dan upaya-upaya aktif dilakukan, namun untuk memastikan angka-angka kongkrit yang diperkirakan bisa diperoleh, masih terlalu sulit. Sebagian pakar berpendapat, akan lebih mudah mencapai target Pelita V dengan alasan kemudahan-kemudahan tadi. Sementara pakar menganggap struktur ekonomi belum akan berubah seperti yang diharapkan. Lalu, kita mesti menengok ke mana lagi jika ini dianggap belum sepenuhnya mampu menggalakkan investasi?

Pasar Modal

Salah satu hasil deregulasi yang nampaknya akan banyak "dilirik" karena bisa menjadi sumber investasi adalah pasar modal.

Kalau dahulu Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lebih satu dekade hanya mampu mengundang 24 perusahaan untuk menjual saham senilai Rp 194,1 milyar dan 8 perusahaan menjual obligasi senilai Rp 935,7 milyar, maka kehadiran Bursa Paralel (OTC) dipastikan meningkatkan terkumpulnya dana murah dari masyarakat dalam waktu singkat.

Bursa Paralel memang berbeda dengan Bursa Efek yang dikenal selama ini. Ia lebih luwes, sehingga apa yang disebut secondary market akan berkembang. Namun kemudahan yang dicanangkan pemerintah pun akan mendorong ketiga bursa yang ada sekarang, yaitu Bursa Efek Jakarta (dulu Indonesia), Bursa Paralel Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Bursa Paralel Jakarta yang baru beberapa bulan telah mampu mengundang lebih dari 20 perusahaan untuk go-public. Tidak mengada-ada kalau ada yang memperkirakan akhir tahun ini Bursa Paralel akan mampu menarik sekitar 100 perusahaan untuk mencari dana murah di sini.

Mengapa disebut dana murah? Seiring dengan berkembangnya bursa, para pembeli saham kini semakin kurang mempersoalkan deviden. Masyarakat lebih senang mencari kenaikan laba modal (capital gain) ketimbang mencari deviden.

Hal ini terbukti dari rapat-rapat pemegang saham beberapa perusahaan yang sudah go public. Mereka tak lagi mempersoalkan besarnya deviden yang tak sampai 10% dari harga saham. Bahkan mereka setuju, agar sebagian besar laba ditahan perusahaan, untuk cadangan modal kerja. Ini akan berdampak harga saham meningkat, yang berarti para pemilik saham memperoleh capital gain lebih tinggi daripada sekadar deviden.

Kesempatan memperoleh investasi dari pasar modal memang sangat besar. Karena, selain pemilik uang dari dalam negeri, para investor asingpun semakin sigap untuk memborong saham-saham di pasar modal. Paling banyak adalah investor Hongkong dan Jepang. Bahkan di Hongkong kabarnya sudah ada tiga lembaga keuangan Indoensia Fund yang tugas utamanya bermain di bursa saham di Indonesia.

Bahwa pasar modal dapat kita harapkan dapat membantu mewujudkan sasaran investasi dalam Pelita V, bukan hanya karena ia berkembang secara alamiah dengan sangat menggembirakan. Pemerintah pun tak henti-hentinya mendorong pemilik-pemilik dana nganggur untuk "bermain" di bursa. Seperti yang dilakukan Dirjen Moneter Oscar Suryaatmadja belum lama ini. Ia mengajak 120 yayasan dana pensiun yang diakui Departemen Keuangan untuk meningkatkan penghasilan di Bursa Efek tanpa dikenai pajak penghasilan. Tak kecil ternyata uang yang dimiliki yayasan-yayasan ini, sekitar Rp 6 trilyun!

Nah potensi pasar modal yang begitu besar dalam menggaet investasi dari dalam maupun luar negeri jelas merupakan kontribusi yang besar untuk mencapai sasaran investasi. Karenanya, iklim yang sudah baik ini hendaknya terus ditingkatkan. Apalagi diciptakan dan dikembangkan pula iklim serupa di bidang lain, yang akan menunjang pula pencapaian sasaran investasi itu. □ (Suwachman)

DIREKSI

dan

SEGENAP KARYAWAN P.T. GRAHA PURNA YUDHA

MENGUCAPKAN SELAMAT

KEPADA BAPAK PRESIDEN R.I.

ATAS PENERIMAAN PIAGAM PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN

DARI PBB

P.T. GRAHA PURNA YUDHA

Jl Jend Sudirman kav 50

Jakarta Selatan

Telp 514333 dan 510909

Telex 62219 Gran IA

Fac 514123

Digitized by Google

Iklim Investasi Indonesia Bertambah Baik

Setelah pemerintah melakukan kebijaksanaan dibidang ekonomi yang berupa deregulasi dan debirokratisasi, iklim usaha di Indonesia semakin bertambah baik. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh H Mohammad Amid, salah satu pelaku ekonomi untuk melaksanakan diversifikasi usahanya.

H. Mohammad Amid

Mohammad Amid, yang mengaku mulai berkecimpung dibidang dunia usaha, khususnya elektronika pada tahun 1970 itu, langkah pertama yang dilakukan setelah kebijaksanaan tersebut adalah industri rotan. Setelah itu dilanjutkan dengan bidang-bidang yang lain. Seperti; sarung tangan, lateks, farmasi dan yang lainnya. Dalam dua tahun ini saja 20 perusahaan yang sudah dikembangkan. "Saat ini paling tepat untuk melakukan investasi," katanya.

Menurutnya, iklim investasi sekarang ini sudah baik, tinggal bagaimana peluang itu kita memanfaatkannya. Peluang-peluang untuk mengacu kearah itu juga cukup banyak. Dan tidak akan ada habis-habisnya.

Melihat ketekunan dan kejelian dalam memanfaatkan situasi tersebut, tidak mengherankan pengusaha di luar negeri melirik kepadanya untuk mengajak kerjasama. Mereka itu ada yang dari Eropa, Taiwan dan Korea. "Padahal tawaran-tawaran kerja sama itu banyak yang di luar bidang saya," katanya menambahkan.

Mengapa, pengusaha dari luar negeri itu mengajak kerjasama?

Selain hubungannya yang banyak dengan pengusaha di luar negeri, para pengusaha asing tersebut juga melihat adanya sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja murah, serta potensi pasarnya juga sangat mendukung. Sebagaimana diketahui, penduduk Indonesia yang berjumlah 170 juta itu merupakan potensi pasar tersendiri.

Sebenarnya, tidak hanya pengusaha luar negeri saja yang tertarik untuk menanamkan modal untuk usaha. Pengusaha dalam negeri pun juga demikian. Namun, karena terbatasnya dana yang ada, barangkali inilah yang menjadi sedikit persoalan. "Berapa sih besarnya dana kita," tanyanya.

Meskipun demikian, kita tidak tutup mata, bahwa pengusaha dalam negeri cukup banyak dan telah berhasil dalam mengembangkan usahanya. Namun, yang sedikit menjadi ganjelan adalah, para pengusaha kita itu suka ikut-ikutan. Misalnya, udang, sekarang ini pasaran sedang bagus. Begitu pula dengan industri rotan. Melihat keadaan tersebut, ramai-ramai para pengusaha itu terjun dalam bidang yang sama.

Contoh industri rotan. Sekarang ini di Indonesia ada 381 perusahaan yang berkecimpung di dalam usaha tersebut. Tetapi, yang jalan berkisar 100 perusahaan saja. Selebihnya kembang-kempis hidupnya. Kenapa demikian?

Menurut Mohammad Amid, disebabkan lemahnya manajemen dari perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan tersebut belum siap untuk melakukan diversifikasi. Sebab, katanya terjun dalam usaha tersebut harus mempunyai skil (keahlian) dan didukung dengan dana memadai. Artinya, dana yang digunakan untuk membayar tenaga ahli tersebut.

Memanfaatkan peluang investasi

Digitized by Google

90 persen bahan baku rotan berada di Indonesia

Selain itu, pemasaran juga masih menjadi ganjalan. Hingga saat ini, pemasaran rotan di Amerika Serikat masih dikuasai oleh Pilipina dan Taiwan, kendatipun negara yang bersangkutan sekarang ini tidak lagi mengerjakan.

Sebagaimana diketahui, bahan baku rotan ini sekitar 90 persen berada di Indonesia. Dan negara-negara tersebut, bahan baku rotan untuk dijadikan kursi, dan yang lainnya masih banyak bergantung dari Indonesia. Namun, setelah pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk tidak mengekspor bahan baku mentah ini, kini negara tersebut sudah tidak lagi mengerjakannya.

Setidaknya — sebelum adanya kebijaksanaan — negara tersebut mempunyai stok yang memadai. Diperkirakan cukup untuk satu atau dua tahun. Dengan demikian, negara tersebut akan menjual sendiri barangnya, dan kita harus bersaing dengan negara tersebut.

''Jeleknya, pengusaha-pengusaha kita dalam menjual produknya ke negara Paman Sam, yang merupakan pasar terbesar itu, kurang menjaga mutu. Dan inilah yang dapat merusak citra, ujar Mohammad Amid''.

Memang, langkah-langkah untuk perbaikan itu sudah mulai digarap oleh wadah dari organisasi rotan ini. Yaitu dengan mengontrol mutu barang. Namun, kata Amid, yang tidak kalah pentingnya adalah pengiriman yang tepat waktu.

Promosi

Untuk mendukung iklim investasi yang sudah baik ini, diperlukan promosi. Menurutnya, banyak pengusaha luar negeri yang belum tahu tentang Indonesia yang sebenarnya. Mereka itu hanya tahu sedikit. Para pengusaha itu masih meraba-raba, seperti apa sih Indonesia itu. Apakah masih seperti hutan, atau bagaimana. ''Inilah yang repot,'' kata Amid.

Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah dalam memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia di luar negeri cukup sering. Namun, upaya yang dilakukan dinilai Amid masih terlalu formal. Misalnya dengan mengadakan seminar, makan-makan dan yang lainnya. Sehingga promosi yang dilakukan kurang kena pada yang berkepentingan. Seharusnya dalam melakukan promosi harus ada kontak dulu. Sehingga di Indonesia pengusahanya juga sudah ada kontak partner. Kemudian dengan bendera Kadin atau BKPM, masalah-masalah tersebut dapat dikongkritkan.

Kalau kita disana hanya mengadakan seminar, makan bersama dan duduk-duduk, hal itu sama saja dengan diplomatis. Sehingga dalam masalah tersebut, kita kurang dapat counter part untuk bekerja sama. Artinya, kita harus mencari sendiri-sendiri.

Meskipun iklim usaha dirasakan sudah baik, namun hambatan-hambatan masih saja dirasakan. Yaitu mengenai suku bunga. Dibandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu Thailand, suku bunga kita itu terlalu tinggi. Di negara gajah putih itu suku bunga hanya 7 persen. Sedangkan di Indonesia mencapai 20 persen.

Selain itu, banyaknya para pengusaha itu melirik ke Thailand juga dinilai iklim investasi di negara tersebut lebih stabil. Misalnya, faktor iklimnya yang baik, yaitu mata uangnya stabil.

Sebenarnya, kita itu sudah stabil. Namun, karena dulu-dulunya kita pernah mengadakan devaluasi, maka para pengusaha asing itu masih saja punya persepsi yang demikian. Yaitu dikhawatirkan akan kembali terjadi devaluasi.

Selain itu, dengan banyaknya perubahan peraturan-peraturan dahulu, membuat para pengusaha asing itu masih merasa belum sreg. Dan benang kusut yang pernah ada itu telah diperbaiki, yaitu berupa deregulasi dan debirokratisasi. ''Namun, untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia itu masih memakan waktu'', tutur Amid. Dan dengan adanya peraturan-peraturan baru itu mereka belum banyak mengetahui. Untuk itu, promosi dirasakan sangat penting dan perlu. □ BM/SS

Digitized by Google

Penyegaran Kader Untuk Menggerakkan Mekanisme Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan program kaderisasi GOLKAR pada periode lalu, satu bukti bagi kedudukan GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik, baik ditinjau dari segi konsolidasi organisasi dalam arti yang luas, pemenangan Pemilu, maupun peranan GOLKAR dalam mencerdaskan bangsa. Terkait sukses GOLKAR dalam program kaderisasi itu, maka kini, GOLKAR memandang penting melaksanakan program penyegaran kaderisasi di seluruh Indonesia. Penyegaran dimaksudkan untuk menggerakkan mekanisme organisasi. Karena keberadaan kader GOLKAR dalam jumlah yang besar itu sangat penting untuk memantapkan posisi GOLKAR, dalam usaha meningkatkan pembangunan politik Indonesia dan Demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan program umum GOLKAR bidang kaderisasi ini, kata Ketua DPP GOLKAR Drs. Jacob Tobing MPA, berdasarkan penugasan Munas IV GOLKAR beberapa waktu yang lalu. Sampai bulan Juni ini telah membentuk program perencanaan kerja yang sekaligus telah menjadi keputusan DPP GOLKAR. Dan intinya adalah program penyegaran kader, pembentukan kader dan peningkatan kualitas kader. Adapun maksud program penyegaran kader itu, dikarenakan kegiatan langsung yang melibatkan kader secara nasional akhir-akhir ini menurun, meskipun kegiatan-kegiatan kader itu sendiri dalam lingkungan desa atau kecamatan masih terus berjalan. Dengan adanya GBHN tahun 1988 yang diputuskan oleh Sidang Umum MPR dan program baru DPP GOLKAR periode 1988-1993 yang diputuskan pada waktu Munas IV tahun 1988, serta penyempurnaan pada AD/ART, maka terdapat kebutuhan untuk memperbarui bahan-bahan materi yang disampaikan kepada kader-kader GOLKAR tersebut. Jadi, GOLKAR ingin memperbarui bahan-bahan materi yang menyegarkan dan bahan-bahan materi yang mereka kuasai selama ini disesuaikan dengan keputusan-keputusan DPP GOLKAR. Di samping itu GOLKAR menambah pengetahuan-pengetahuan yang bersifat praktis terhadap kader, yaitu menyangkut bagaimana cara berdiskusi yang benar, bagaimana cara memimpin rapat yang benar dan bagaimana cara melakukan pendekatan yang baik.

Jacob Tobing

Penyegaran, pembentukan dan peningkatan kualitas kader

Dengan bahan-bahan materi ini kader diharapkan dapat penyegaran, baik wawasan dan sikap lakunya, maupun peningkatan didalamnya. Dalam penyegaran ini bukan saja diajarkan tentang masalah-masalah kebangsaan, kenegaraan dan kegolkaran, tapi juga diajarkan masalah-masalah yang berguna sehari-hari seperti teknik memimpin diskusi, rapat dan melakukan pendekatan. Bahkan dalam penyegaran itu GOLKAR memberikan satu paket materi yang menyangkut sistem politik negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau sistem negara Pancasila, yang menyangkut bagaimana pengetrapannya mulai dari tingkat desa sampai pusat. Sedangkan sasaran pertama yang dituju, adalah mereka

Digitized by Google

GOLKAR memberikan satu paket materi tentang sistem politik di Indonesia

yang dulu sebagai penatar kader sejumlah 500 ribu orang itu yang tersebar di seluruh Indonesia —komisaris kecamatan, pembantu komisaris kecamatan, komisaris desa, pembantu komisaris desa dan koordinator kader—. Dengan demikian, mereka ini diharapkan bisa tercapai dalam waktu yang singkat secara berjenjang, dan ini berarti GOLKAR melakukan konsolidasi kembali terhadap jajaran GOLKAR pada tingkat paling bawah (pedesaan) di seluruh Indonesia.

"Untuk itu DPP GOLKAR melakukan persiapan-persiapan penjenjangan memulai dengan mengadakan pertemuan di Jakarta pada 26-27 Juli, dengan mengundang seluruh DPD I yang terdiri dari unsur Pimpinan DPD I, ketua, wakil ketua bidang kaderisasi, wakil sekretaris bidang kaderisasi, ketua biro OKK, ketua pemenangan Pemilu dan sekretaris badan pengelola kader tingkat I. Pada kesempatan pertemuan ini dijelaskan di samping masalah-masalah umum dan nasional, juga dijelaskan metode rancangan pelaksanaan program serta materi-materinya supaya mereka nantinya benar-benar menguasai, karena merekalah yang akan melanjutkan secara bertahap ke tingkat II. Selanjutnya, diharapkan pada bulan Agustus seluruh tingkat II diundang ke tingkat I untuk mendapatkan penjelasan yang sama tentang pelaksanaan program kaderisasi. Itu berarti 300 tingkat II seluruh Indonesia sudah siap melaksanakan program tersebut," sambung Jacob Tobing.

Pada bulan September mulai diadakan pelaksanaan penyegaran kader dari tingkat II yang tadinya belum mengikuti di tingkat I dan diteruskan sepanjang tahun sampai akhir tahun sehingga akhirnya seluruh penatar kader komisaris kecamatan, desa, pembantu komisaris dan koordinator kader ini sudah disegarkan dengan memperoleh bahan yang baru dan sudah terkonsolidasi. Kemudian dari 500 ribu orang kader ini melalui koordinator kader dan kelompok-kelompok diskusi, bahan-bahan penyegaran diteruskan ke seluruh kader yang berada di pedesaan seluruh Indonesia sekitar 9 juta orang. Dan jumlah kader yang 500 ribu orang itu tidak hanya terdiri dari penatar karakterdes saja, melainkan meliputi penatar kader secara keseluruhan, sedangkan pada bulan Oktober DPP GOLKAR mengirimkan fungsionaris pusat ke setiap tingkat II untuk meninjau dan mengecek pelaksanaan program penyegaran kaderisasi tersebut. Ini memang pekerjaan yang cukup besar, memakan waktu, pikiran dan tenaga kendati demikian seluruh jajaran DPP GOLKAR siap melaksanakannya dan ma-

Kader-kader yang berada di pedesaan

Digitized by Google

terinya sendiri sebagaimana kebiasaan DPP GOLKAR untuk mendemokratisasikan dan menumbuhkan kebersamaan, itu drafnya disiapkan DPP dan dikirimkan ke tingkat I untuk dipelajari sebagai bahan diskusi dalam pertemuan pada 26-27 Juli mendatang, setelah itu DPP GOLKAR mengambil kesimpulan dan membuat keputusan.

Sejalan dengan diadakan pertemuan itu, kata Jacob Tobing, juga dilaksanakan Rapat Kerja Teknis Badan Pengelola Kader Tingkat Pusat dengan Badan Pengelola Kader Tingkat I seluruh Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan DPP GOLKAR dalam rangka mengkonsolidasi, membenahi serta meningkatkan kualitas kader itu disertai pula dengan konsolidasi peningkatan kemampuan Badan Pengelola Kader itu. Diketahui pula jumlah kader yang ada itu salah satu sisinya, adalah pemenangan pemilu di samping pembinaan turut serta dalam pembangunan dan sebagainya, maka terdapat kebutuhan di daerah-daerah itu menambah jumlah kader dan ada juga kader-kader fungsional pada periode yang lalu belum selesai atau tuntas dilaksanakan dan baru selesai dilaksanakan sampai daerah atau tingkat tertentu. Atau, ada kader fungsional yang belum terjamah seperti Tani dan Nelayan. Ini masuk kelompok kerja kedua DPP GOLKAR dengan melaksanakan kaderisasi baru dan lebih terpusat ke daerah, khususnya penambahan dan kelompok ketiga, adalah semua kegiatan itu meningkatkan kualitas dengan sasaran kader-kader yang memang sudah siap dan matang supaya lebih dimatangkan dan dimana metodenya sendiri akan dibuat tahun ini pula. Sehingga atas dasar pelaksanaan program penyegaran kader ini diharapkan para kader yang berada di tingkat I dan pusat itu lebih meningkatkan lagi kemampuannya. Karena itu, di samping akan melakukan program sendiri, juga akan memanfaatkan secara maksimal program-program P4, program kewaspadaan nasional dan program lainnya termasuk program studi perbandingan ke luar negeri. Berkaitan dengan ini, selama ini sudah terjadi dimana kader-kader GOLKAR mendapat kesempatan atau mempersiapkan diri untuk memanfaatkan kesempatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, untuk masa yang akan datang akan lebih diorganisir dan ditingkatkan sehingga ini merupakan kesempatan yang baik bagi kader-kader muda untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasinya sekaligus.

"Ini bukan tiket jabatan bagi mereka, tapi ini untuk melengkapi kemampuan mereka agar lebih siap menuaikan tugas organisasi," tambahnya.

Alat Demokrasi

Sementara itu dalam jangka pendek tentang pelaksanaan program kaderisasi ini, jelas Jacob Tobing, adalah konteks ini GOLKAR dapat diandalkan sebagai alat Demokrasi Pancasila sekaligus alat penjamin kelangsungan cita-cita 17 Agustus 1945.

Bahkan, pelaksanaan penyegaran kaderisasi ini merupakan bagian usaha GOLKAR untuk membangun sistem ini supaya lebih kuat, lebih demokratis dan lebih Pancasila. Sedangkan suksesi itu adalah bagian kecil dan penting. Dalam persalan ini pendekatan

Mandiri dan mengakar di tengan masyarakat

ingin melanjutkan konsolidasi organisasi dan kaderisasi secara pisik. Sedangkan dalam jangka panjang, ada hubungannya dengan pembangunan GOLKAR sebagai satu alat demokrasi Pancasila. Pertama, didalamnya ada program tentang kesadaran politik sebagai prasyarat pelaksanaan demokrasi Pancasila dan ini merupakan bagian dari pendidikan politik. Bicara langsung ini akan berakibat kepada operasionalisasi Demokrasi Pancasila pada tingkat paling bawah yaitu desa terus sampai ke atas. Sehingga nantinya mempunyai dampak peningkatan terhadap aspek bottom up daripada kehidupan sosial kenegaraan kita. Juga lebih menentukan posisi GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial secara mandiri dan mengakar di tengah masyarakat. Selain itu, dalam kita impersonal serta sistemnya kita bangun yang kuat. Istilahnya, kalau kita melakukan suksesi itu berjalan seperti biasa. Kalau kita memperoleh pimpinan yang kuat misalnya, ya syukur. Tetapi, sebaliknya mendapat pimpinan yang kuat,ya kita bantu ramai-ramai. Sehingga bila manusia itu ada kekhilafan maka sistem yang sudah kuat itu tentu akan dapat mengkoreksi. Karena, koreksi itu bukan hanya koreksi konsepsi tapi juga koreksi personal dimungkinkan. Misalnya, kita salah pilih presiden dan ternyata setelah dua tahun mengalami suatu cedera atau apa hingga tidak mampu lagi untuk melanjutkan kepemimpinannya, maka sistem yang sudah kuat itu bisa mengambil jalan keluarnya. Untuk itu, masalah suksesi jangan dibesar-besarkan.☐ DT

Digitized by Google

Dari Penyegaran Sampai Kualitas Kader

Kader merupakan tulang punggung bagi kehidupan dan jalannya roda organisasi. GOLKAR sebagai salah satu kekuatan sosial politik menyadari akan pentingnya hal itu. Dan akhir Juni lalu, telah diselenggarakan penyegaran kader.

Materi yang diberikan dalam penyegaran tersebut meliputi; penjelasan tentang GBHN yang baru —hasil produk Munas IV—, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GOLKAR dan Program Umum GOLKAR. Selain itu juga diberikan materi-materi penunjang diantaranya, bagaimana memimpin rapat, teknik diskusi dan teknik mengadakan pendekatan.

Diharapkan, materi penunjang ini dapat meningkatkan para kader, baik dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan GOLKAR, maupun yang berfungsi di dalam masyarakat misalnya kelompok tani, LKMD dan yang lain, ujar Anton Priyatno, ketua Departemen Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan.

Disamping materi-materi yang diberikan di atas, juga akan diberikan materi yang tidak tertulis. Misalnya, bagaimana menciptakan iklim inisiatip, semangat dan kreativitas dari para kader yang sudah ada. "Jangan kader yang kita bentuk 5 tahun lalu mempunyai sikap yang menunggu perintah. Walaupun kader kita banyak, namun kalau kualitasnya hanya menunggu perintah, maka gerakan organisasi itu akan terhambat," ujar Anton.

Penegasan tersebut juga sudah pernah disampaikan Ketua Dewan Pembina, tatkala DPP GOLKAR memperkenalkan hasil Munas GOLKAR

Anton Priyatno

ke IV. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina sebagaimana dikutip Anton mengatakan, jangan sampai kader GOLKAR menunggu perintah dalam menggerakkan fisi GOLKAR. Kader harus punya inisiatip.

Untuk itu, Anton menghimbau, agar kader-kader GOLKAR yang ada di daerah, khususnya tingkat terdepan mampu menciptakan iklim tersebut. Yaitu iklim keterbukaan dan siap menghadapi beda pendapat diantara para kader. Namun, katanya perbedaan pendapat itu jangan digunakan untuk pertentangan pendapat. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dicarikan jalan keluarnya dan akhirnya dapat mencapai musyawarah.

Hal ini, bagi pimpinan GOLKAR di tingkat bawah harus siap menghadapi iklim yang semacam ini. Perbedaan-perbedaan pendapat itu menurut Anton tidak apa-apa, asalkan masih dalam konteks wawasan nasional dan juga digunakan untuk mengisi perjuangan GOLKAR.

Jangan menunggu perintah

Di kalangan bawah dalam menyampaikan gagasan mungkin masih dirasakan adanya rasa keengganan, dan ricuh. Keengganan ini mungkin disebabkan karena orang lain itu lebih tinggi. Dan dalam menyampaikan gagasan yang barangkali beda pendapat itu, menurut Anton, tidak apa-apa. Asalkan dia harus yakin, apa yang disampaikan itu benar dan didukung dengan data.

Dalam masalah ini, Ketua Umum DPP GOLKAR juga memberi kesempatan mengenai hal tersebut. Misalnya, menganjurkan kepada seluruh jajaran keluarga besar GOLKAR dimana saja berada agar berani menyampaikan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, kata Anton harus dioperasionalkan dalam organisasi. Tentu dalam masalah tersebut yang harus dijaga adalah semua harus mempunyai itikad baik dalam menciptakan iklim tersebut. Hal ini, dimaksudkan untuk perbaikan dalam tubuh GOLKAR maupun masyarakat.

"Jadi penyegaran disamping untuk menambah materi-materi pada kader, diharapkan pula mampu menciptakan iklim tersebut. Yaitu berupa penyegaran. Penyegaran ini merupakan hal yang fundamental. Dan ini harus difahami oleh semua pihak, khususnya keluarga besar GOLKAR," kata Anton.

Kualitas Kader

Dalam tahun 1990, GOLKAR akan meningkatkan kualitas kader. Baik dari kader yang sudah ada, melalui seleksi, maupun melalui kader-kader baru. "Yang jelas, kader-kader itu nanti tidak diambil diluar GOLKAR," ujar Anton.

Dengan adanya penyegaran yang berkualitas ini diharapkan akan terjadi proses penggalangan dalam masyarakat. Sehingga kegiatan kaderisasi itu menjadi tumpuan untuk menggalang masyarakat baik itu dalam menggerakkan lingkungannya maupun untuk menggaet pemilih-pemilih GOLKAR. Hal ini bisa dilakukan kalau para kader itu peka terhadap lingkungannya. Tanpa itu memang dirasakan sulit, dan mereka itu tidak dapat disebut sebagai kriteria kader. Ini adalah realitas yang harus kita akui, dan kualitas kader inilah yang harus dikembangkan. BM

Digitized by Google

Oleh: H Anang Adenansi

Aspirasi Masyarakat Dan Kekaderan Kita

BEGITU mendengar istilah kader, orang pasti ingat organisasi, apapun bentuknya. Begitu bicara soal organisasi, muncul dibenak setumpuk aturan yang terhimpun di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta doktrin yang dianut organisasi itu.

Kader adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan dan memasyarakatkan segala kebijaksanaan serta doktrin organisasi. Untuk itu, seorang kader haruslah memiliki sejumlah kemampuan tertentu. Ia tidak hanya mengerti organisasi, termasuk menghayati betul doktrin serta ketentuan-ketentuan organisasi, tetapi juga harus punya bobot (berpendidikan) serta berwibawa. Dengan begitu ia mampu menterjemahkan serta mendaratkan doktrin organisasi secara tepat pada masyarakat anggota organisasi.

Dalam kaitan ini, ada tiga hal pokok yang perlu diingat oleh setiap kader. *Pertama:* memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, agar mampu menterjemahkan setiap kebijaksanaan organisasi, terutama yang menyangkut doktrin, secara jelas dan tepat. Sehingga dapat diterima dan difahami oleh para anggota organisasi. *Kedua,* memahami dan menghayati betul kaidah serta norma-norma organisasi sehingga ia mampu menyampaikannya secara lugas dan jelas kepada anggota yang dibinanya. *Ketiga,* mempunyai tingkat kepekaan terhadap perkembangan situasi dalam masyarakat yang tinggi, sehingga ia dapat menangkap secara utuh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Jika ketiga hal ini sudah dimiliki setiap kader Golkar, itu berarti Golkar benar-benar adalah organisasi kader. Organisasi yang tumbuh dan berkembang karena dukungan kader yang punya bobot. Apabila ketiga hal itu telah dimiliki para kader, sebenarnya tidaklah beralasan untuk terus kha-

Anang Adenansi

watir akan perkembangan Golkar dimasa mendatang. Karena setiap anggota meyakini dan menghayati benar ke-Golkar-annya. Mereka merasa yakin bahwa keputusannya untuk menerima Golkar sebagai penyalur aspirasi politiknya adalah tepat.

Persoalan yang kita hadapi sekarang, bukan kekurangan kader berbobot, justru kebanyakan kader yang berbobot tak lagi aktif. Kebanyakan mereka yang dengan susah payah dididik dan dibina, tetapi kemudian tak teringat lagi. Bahkan mungkin sengaja dilupakan. Sudah empat kali pemilihan umum, setiap menjelang pemilihan umum kita adakan latihan kader. Jumlah mereka tidak sedikit, tapi sekarang kita masih juga bicara soal kader.

Kita masih juga bicara soal kadar kekaderan dari mereka yang telah diberi predikat kader. Seakan masih belum cukup kadar kekaderan mereka, kendati sudah sekian kali dikaderkan. Barangkali bukan kadar kekaderan itu yang perlu dipertanyakan sekarang. Tetapi yang harus dipertanyakan adalah: Sudahkah para kader itu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kader dalam

Pertumbuhan dan perkembangan organisasi karena kader yang berbobot

Digitized by Google

mendaratkan doktrin perjuangan Golongan Karya?

Ini pertanyaan yang harus kita pertanyakan setiap mengadakan Pendidikan dan Latihan kader. Jika ini kita ajukan sebagai pertanyaan, jawabannya adalah kader yang kita miliki baru sekedar mengenal organisasi. Mereka belum cukup mampu untuk menghayati makna sesungguhnya sebagai seorang kader organisasi. Barangkali memahami kekaderan itu sendiri mereka belum cukup mampu. Bagaimana pula bisa diharapkan menghayati makna doktrin organisasi.

Dengan begitu masalah yang kita hadapi setiap kali menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Kader, nampaknya tak jauh berbeda. Ketika itu kita berpikir tentang kualitas dan kadar kekaderan. Kita berpikir tentang pemahaman kader tentang nilai, norma serta kaidah-kaidah yang ada dalam doktrin perjuangan organisasi. Pada saat kita berkesimpulan bahwa kader yang ada belum memahami serta menghayati dengan sungguh-sungguh serta secara benar doktrin organisasi, maka pada saat itu pula kita katakan : Perlu diadakan Pendidikan dan Pelatihan Kader, untuk meningkatkan mutu serta kualitas kader.

Sementara kita sendiri tidak merumuskan kualitas kader yang bagaimana hendak kita capai melalui Pendidikan dan Pelatihan kader itu nantinya. Akibatnya, semua materi Pendidikan dan Pelatihan kader, disampaikan secara teoritis semata tanpa peduli apakah dapat dicernakan oleh peserta pendidikan dan pelatihan kader itu atau tidak.

Disini kita lalu menjadi egoistis, kita hanya memaksakan apa yang menurut kita perlu, padahal belum tentu penting bagi kader. Disini kelemahan setiap kita dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader.

Loyalitas dan Integritas

Padahal sesungguhnya kita tahu persis bahwa dalam setiap pendidikan dan pelatihan kader, masalah yang paling utama adalah bagaimana memotivasi para kader itu agar mereka mampu membaca dan mengamati perkembangan situasi dengan dasar-dasar pengetahuan organisasi yang telah dimilikinya itu. Motivasi demikian ini, akan berhasil dengan baik, jika kader tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai kader.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai kader, selain tiga hal pokok yang telah disebutkan di depan, adalah: loyalitas, dedikasi dan integritasnya terhadap organisasi. Akan sulit bagi kita untuk menuntut mutu dari kader, jika ketiga unsur di atas tak dimiliki seorang yang kita sebut sebagai kader. Betapapun tinggi pendidikannya, kemampuan dan ketrampilan berorganisasinya tinggi, pemahaman akan doktrin perjuangan organisasi bahkan kadar penghayatan terhadap perjuangan organisasi tinggi, tetapi jika tidak memiliki loyalitas, dedikasi serta tidak punya integritas terhadap organisasi maka akan membahayakan organisasi.

Kader demikian ini, pada gilirannya hanya akan menggunakan dan memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadinya. Karena kemampuan-kemampuan yang dimiliki itu, ia selalu berupaya menarik keuntungan dari organisasi. Biasanya, kader yang demikian ini hanya muncul pada saat melihat manfaat organisasi bagi kepentingannya. Setelah berhasil mencapai tujuan individualnya, yang disebut kader tadi tak pernah lagi menghiraukan keadaan organisasinya. Contoh kader demikian ini cukup banyak dan hingga sekarang masih tetap ditolerir oleh kita. Kita masih terus memberi peluang bagi mereka, kendati kita mengerti dan tahu pasti bahwa ia tak pernah lagi memikirkan kepentingan organisasi.

Sementara pada sisi lain, ada kader yang benar-benar memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi tanpa menuntut atau sekedar mengharap imbalan dari organisasi, justru tak pernah dihiraukan. Mereka tak pernah lagi dihiraukan oleh organisasi kendati tetap patuh dan setia membantu pengembangan organisasi. Mereka justru terlupakan oleh kita; kader yang demikian ini, cukup banyak dan tersebar diseluruh pelosok tanah air.

Barangkali karena mereka tak pandai meminta, barangkali mereka tak pandai menyembah, barangkali mereka tak pandai menuntut, sehingga kita lalu tak pernah lagi mau memikirkan mereka. Seribu satu barangkali, bisa dikatakan untuk menunjukkan betapa loyalnya mereka sebagai kader terhadap organisasinya.

Mereka termasuk orang-orang yang selalu bertanya pada dirinya apa yang telah diberikan kepada organisasi, tanpa sesaatpun bertanya apa yang dapat diberikan organisasi kepadanya. Disini kita dihadapkan pada pilihan antara "kader" (jenis kader pertama) dan kader (jenis kader yang kedua, berloyalitas, dedikasi dan integritas tinggi terhadap organisasi). Kita harus memilih satu di antara kedua jenis kader tadi.

Celakanya, pada saat hendak menjatuhkan pilihan, yang sering nampak adalah jenis kader yang pertama ("kader" yang berupaya sungguh-sungguh memanfaatkan organisasi bagi kepentingan individunya). Selain sering nampak, dialah yang paling bisa berceloteh tentang organisasi, trampil dalam meyakinkan orang lain tentang perjuangan organisasi, pandai menyembunyikan diri dibalik tabir kesetiaan imitatif dan punya kemampuan khusus dalam mendekatkan diri ke-

Makna sebagai seorang kader organisasi

Digitized by Google

pada pimpinan organisasi.

Jadi kita tak lagi berkesempatan untuk menguji kadar kekaderan itu, karena yang nampak hanya jenis kader pertama. Mungkin pula, bukan tak punya kesempatan untuk menguji kekaderannya, tetapi dialah yang paling dekat dengan kita sehingga lebih bisa diterima ketimbang yang tak pernah muncul. Kalau setiap kita terutama para pemimpin organisasi hanya mendasarkan pilihan dan penilaian terhadap seorang kader itu pada intensitas hubungan pribadi, maka kita telah berbuat sesuatu yang paling keliru. Dan ini yang selalu terjadi, hingga sekarang pun masih terus berlaku rumusan "subyektif" ini.

Begitu kira-kira gambaran tentang kekaderan Golongan Karya dewasa ini. Kita sering mengeluh tentang kualitas kader, tanpa memiliki ukuran ukuran normatif tentang kader.

Representasi Aspirasi Rakyat

Bicara soal kader, sesungguhnya kita sedang bicara tentang representasi dari aspirasi kelompok tertentu yang dipercayakan kepada kader itu. Kita bicara soal kader Golongan Karya, berarti kita sedang bicara tentang representasi aspirasi keluarga besar Golongan Karya yang dipercayakan kepada kader Golkar itu. Karena Golongan Karya merupakan kekuatan sosial politik terbesar di negara ini, yang didukung oleh 73 persen pemilih Indonesia (sekitar 73 juta rakyat Indonesia yang ikut memilih pada pemilu 1987 lalu), maka yang diemban adalah aspirasi rakyat yang tujuh puluh tiga juta itu.

Jika kader Golkar (8 juta menurut angka komputer yang tercatat di DPP Golkar) merupakan representasi dari rakyat pendukungnya, adalah penting bagi kader itu untuk memahami serta menghayati benar aspirasi rakyat. Tentu tidak semua aspirasi harus diperjuangkan. Ada penyekat yang dapat menyaring jenis-jenis aspirasi yang memang perlu diperjuangkan dan yang harus ditiadakan. Untuk bisa melakukan penyaringan tersebut, seorang kader harus mampu membaca perkembangan yang terjadi dalam masyarakat terutama pada masyarakat anggota (pendukung) Golongan Karya.

Kader Golkar dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan masyarakat sekelilingnya. Tetapi tidak tenggelam dan larut dalam eksplosi-eksplosi emosional yang sering timbul dalam masyarakat. Dia harus dapat melakukan penyaringan terhadap aspirasi yang datang.

Diklat perlu mengarah pada kader paripurna

Dalam kaitan ini, barangkali Pendidikan dan Pelatihan Kader yang akan datang ini hendaknya lebih diarahkan pada upaya membentuk kader paripurna; yaitu kader yang tidak hanya memiliki pendidikan tinggi, daya nalar dan kepekaan tinggi, tetapi harus pula memiliki loyalitas, dedikasi dan integritas yang tinggi pula.

Jika tidak, maka kader yang dilahirkan dari Pendidikan dan Pelatihan itu adalah "kader" bukan KADER. "Kader" hanya akan mencari peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan individualnya. Setelah tujuan itu tercapai, maka tak ada lagi yang perlu diperhatikan dari Golongan Karya yang memberinya peluang tersebut.

Sedangkan yang ingin dicapai melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader nanti, adalah mereka yang benar-benar merupakan KADER; yaitu mereka yang tak pernah bertanya tentang apa yang telah diberikan Golongan Karya kepadanya, tetapi berbalik menanya diri, apa yang sudah ia berikan kepada Golongan Karya.

Terlalu sering kita mengadakan pendidikan kader, sudah cukup banyak kader yang kita miliki. Sebagai catatan: menurut data komputer, jumlah KARAKTERDES yang ada sekarang sekitar sepuluh juta orang. Ini kader yang berhasil dicetak dan di data selama periode 1983-1988. Kita tidak tahu persis berapa persen dari jumlah tersebut adalah KADER. Masih perlu diteliti.

Jika DIKLAT yang akan diselenggarakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kader, artinya agar diperoleh sejumlah kader yang handal bagi keperluan organisasi di masa yang akan datang, maka perlu dirumuskan lebih dulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kader bermutu itu. Apa tolok ukur untuk mengatakan seorang kader itu bermutu dan apa pula tolok ukur untuk menyebut seseorang sebagai KADER Golkar.

Entahlah, tak ada yang tahu persis apakah delapan juta kader (Karakterdes) itu benar-benar KADER atau mereka hanya "kader". Untuk itu, agaknya Diklat nanti, harus dapat menghasilkan KADER yang mampu menjadi wakil-wakil keluarga besar Golongan Karya yang benar-benar representatif. Wakil yang mampu menyerap aspirasi masyarakat secara tepat dan benar, sesuai dengan kepentingan nasional bangsa. Bukan aspirasi yang hanya mementingkan kepentingan kelompok atau golongan saja.

Dengan demikian, maka kader yang akan dihasilkan melalui Diklat itu harus kader berkadar nasional yang loyalitas dan integritasnya terhadap kepentingan nasional bangsa memang telah teruji.

Kita tidak lagi mendidik "kader", yang hanya menjadikan Golkar sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan individualnya. Kita harus lebih teliti agar yang dihasilkan oleh Diklat ini memang adalah KADER. Walau belum dapat disebut sebagai **Kader Paripurna.**□

Digitized by Google

Demokrasi Pancasila
Dan Masalah Suksesi Dalam Mekanisme
Kepemimpinan Nasional

Penjelasan Presiden Soeharto dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekkuin pada tanggal 3 Mei 1989

Pengantar

Pada bagian terakhir dari Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekkuin yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 1989, Bapak Presiden memberi penjelasan tentang Demokrasi Pancasila dan masalah suksesi dalam mekanisme kepemimpinan nasional.

Penjelasan yang sangat penting dan mendasar tersebut disajikan dalam bentuk terbitan ini, yang disunting dari transkripsi penjelasan beliau. Ada sejumlah catatan kaki yang ditambahkan, dengan maksud untuk melengkapi penjelasan tersebut.

Kesempatan ini ingin saya gunakan untuk mengemukakan suatu hal tentang keadaan akhir-akhir ini. Banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat, yang kemudian menjadi sumber pemberitaan, dan tentunya juga menimbulkan tanggapan dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menanggapi pernyataan-pernyataan itu; seperti dari politisi, pakar politik, pakar ekonomi, pakar sosial, maupun juga pakar ilmu kemasyarakatan dan rokhaniawan. Kemudian oleh wartawan, pernyataan-pernyataan tersebut dimanfaatkan untuk lebih mendalami lagi sikap maupun pendapat antara satu pejabat dengan pejabat yang lain, dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ada yang setengah mengadu-domba. Sehingga menimbulkan kesan dalam masyarakat seolah-olah keadaan sekarang memang demikian itu.

Pernyataan-pernyataan yang simpang-siur, kalau berlanjut, sudah

Digitized by Google

barang tentu akan menguntungkan mereka yang tidak menginginі terciptanya stabilitas nasional yang kita perlukan untuk melaksanakan pembangunan. Mereka tentu juga akan memanfaatkan hal itu untuk lebih mengeruhkan keamanan. Dan pasti hal itu ada, baik dari golongan ekstrim kiri maupun juga dari golongan ekstrim kanan.

Tentang Pernyataan Oleh Pejabat Negara Kepada Wartawan

Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Tetapi, pernyataan-pernyataan itu hendaknya selalu didasarkan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan ruang lingkup tugas dalam pekerjaannya masing-masing. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan di luar bidang tugasnya itu. Agar supaya pernyataan-pernyataan itu benar-benar berperan sebagai alat pemerintahan, tentunya Pemerintah bersandar pada suatu landasan dalam melaksanakan tugas pemerintahan itu. Begitu pula mengenai hal mengeluarkan pendapat.

Pegangan-pegangan atau landasan-landasan yang harus kita gunakan, yang digunakan oleh Orde Baru, sejak semula adalah: landasan idiilnya Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar '45, kemudian landasan operasionalnya adalah Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya. Sebetulnya kalau kita berpegangan kepada hal itu, kita tidak akan terjebak oleh pancingan-pancingan pertanyaan-pertanyaan wartawan.

Kepada Sdr. Menteri Penerangan sudah saya minta agar supaya para wartawan itu mengetahui hak, tugas dan tanggung jawabnya. Jangan kemudian mengeruhkan keadaan, sehingga menimbulkan keresahan, seperti tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dan kemana kita akan pergi dalam keadaan yang sekarang ini. Sekali lagi, kita hendaknya supaya benar-benar dapat mengendalikan diri dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan, sehingga tidak membingungkan atau mengeruhkan suasana. Berpegang saja kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan MPR.

Akibat simpang-siurnya pemberitaan, sampai-sampai menimbulkan pertanyaan : apakah ini Demokrasi Pancasila yang ingin kita tegakkan dan akan kita kembangkan? Ada juga yang bertanya, karena masih ragu-ragu, apa yang sebenarnya harus kita kembangkan mengenai Demokrasi Pancasila itu? Seolah-olah kita belum mempunyai satu pegangan sama sekali.

Banyak yang mengatakan bahwasanya Demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal maupun juga bukan demokrasi dari negara komunis yang sifatnya otoriter. Lantas kalau bukan itu, bukan ini, apa?

Demokrasi Pancasila

Sebenarnya, kalau kita tetap berpegang pada landasan operasionalnya, ialah segala Ketetapan dari Lembaga Tertinggi Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah pernah ada pegangan yang jelas tentang pelaksanaan Demokrasi Pancasila itu. Kembali kepada Ketetapan MPRS tahun 1968 No. XXXVII, maka Ketetapan MPRS tahun 1968 ini mencabut Ketetapan tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, yaitu Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Di situ sebetulnya telah dirumuskan, telah diberikan pedoman, kalau kita ingin selalu berpegang pada Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai Lembaga Tertinggi Negara kita, penjelmaan rakyat, yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat Indonesia itu.

Sekali lagi saya minta agar supaya dipelajari Ketetapan MPRS No. XXXVII tahun 1968 itu. Walaupun sudah dicabut, tetapi isinya ditampung dalam Peraturan Tata Tertib MPR, ialah ketetapan MPR No. I/MPR/1973. Kalau itu dipakai, tentunya kita juga akan bisa memberi gambaran tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Di situ digambarkan, bahwasanya Demokrasi Pancasila itu tidak mengutamakan voting atau pemungutan suara, tidak dinilai dari segi demokrasinya "separoh jumlah tambah satu" atau "separoh jumlah tambah satu lebih". Yang seperti itu adalah pelaksanaan demokrasi sebagaimana yang dijalan-

Pengambilan sumpah saat pelantikan Presiden Soeharto

Digitized by Google

Jangan mengeruhkan keadaan dan menimbulkan keresahan

kan oleh negara-negara yang menganut liberalisme.

Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, setiap orang, apalagi mereka yang termasuk di dalam satu kelompok, ikut serta di dalam musyawarah memecahkan suatu masalah untuk mengambil keputusan, dibenarkan untuk mengeluarkan pendapat serta mengeluarkan pikirannya dan juga pandangannya. Hanya, memang pandangannya itu harus didasarkan pada pemikiran dan akal sehat manusia, didasarkan kepada pemikiran-pemikiran yang rasional dan bermutu tinggi. Apa artinya bermutu tinggi itu? Bermutu tinggi berarti tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, tidak bertentangan dengan persatuan dan kesatuan bangsa atau tidak mengancam persatuan bangsa dan juga tidak bertentangan dengan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD '45, yang kemudian kita sebut Pancasila: ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam melaksanakan musyawarah untuk memperoleh mufakat, keputusan musyawarah itu benar-benar harus dijiwai oleh kesadaran dan tanggung jawab sedemikian rupa, sehingga akhirnya bisa mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, yang tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak juga bertentangan dengan dasar negara. Sedangkan sila ke-4 dari dasar negara berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, itu sebetulnya sudah jelas memberikan gambaran, bahwasanya musyawarah yang kita laksanakan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itu, adalah musyawarah yang betul-betul dipimpin untuk mengambil suatu keputusan yang menguntungkan perjuangan kita, yang tidak bertentangan dengan dasar negara, kepentingan rakyat maupun persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPR/1968 itu memang sebenarnya disebutkan, bahwasanya setiap anggota sampai pimpinan harus berusaha dengan sekuat tenaga di dalam musyawarah, mengetrapkan Demokrasi Pancasila. Perbedaan memang jelas dibenarkan. Justru karena ada perbedaan, kemudian dimusyawarahkan, sehingga perbedaan-perbedaan itu diperkecil melewati musyawarah, sedemikian rupa sehingga akhirnya akan memperoleh konsensus dan mengambil keputusan secara bulat.

Ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPR/1968 itu bahwa, harus merupakan kewajiban bagi setiap orang, apa lagi pimpinan, kalau belum tercapai mufakat, pimpinan harus berusaha terus. Kalau memang tidak memperoleh mufakat melewati musyawarah, berarti tidak ada keputusan, barulah kemudian diambil tata cara dengan pemungutan suara. Yang dibenarkan adalah keputusan yang memperoleh dukungan suara terbanyak.

Jadi pertama-tama memang tidak didasarkan kepada pemungutan suara. Musyawarah untuk memperoleh mufakatlah yang diutamakan. Ini hendaknya supaya benar-benar kita pegang teguh, bahwa dalam rangka musyawarah, kritik itu pun boleh, dibenarkan, tetapi harus kritik yang membangun. Kemudian, setelah tidak bisa mencapai mufakat, dalam pemungutan suara ditentukan pula bahwasanya setidak-tidaknya 2/3 dari peserta musyawarah itu yang harus hadir. Kemudian, tentang suara ter-

Digitized by Google

banyak yang diakui ialah separoh dari 2/3 yang hadir ditambah 1, minimal. Itu sudah dianggap terbanyak. Jika separoh tambah lebih dari 1, tentunya juga terbanyak. Itu dianggap sah, merupakan keputusan Demokrasi Pancasila.

Jadi kami mengharapkan agar supaya tidak ada keragu-raguan di dalam menafsirkan maupun dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila, karena memang sudah ada petunjuk sendiri dari wakil-wakil rakyat, baik dalam Ketetapan MPRS tahun 1968 maupun dalam Ketetapan MPR sesudahnya.

Dibenarkan untuk mengeluarkan pendapat dan pemikiran

Jadi bisa kita pakai sebagai pegangan untuk pelaksanaan Demokrasi Pancasila itu.

Suksesi Presiden dan Mekanisme Kepemimpinan Nasional

Akhir-akhir ini juga ada yang memasalahkan suksesi Presiden dan Wakil Presiden. Sebenarnya juga tidak ada larangan mengenai hal ini. Tetapi, yang perlu kita pikirkan dan usahakan, bukan semata-mata tentang suksesi Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi mengenai mekanisme kepemimpinan nasional. Itulah sebenarnya yang harus kita usahakan, dan sekarang memang sudah kita usahakan.

Sejak lahirnya Orde Baru, mekanisme kepemimpinan nasional itulah yang kita usahakan, sehingga akhirnya dapat membudaya dalam melanjutkan kehidupan negara dan bangsa kita berdasarkan UUD'45.

Mekanisme kepemimpinan nasional ini tidak hanya Presiden sebagai Mandataris, tetapi seluruh unsur-unsur yang terlibat dalam mekanisme kepemimpinan nasional sesuai dengan UUD'45.

Unsur-unsur Mekanisme Kepemimpinan Nasional

Di dalam UUD'45 dinyatakan, bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdaulat adalah rakyat. Dengan demikian, rakyat itu merupakan salah satu unsur. Tetapi, pelaksanaan demokrasi atau pelaksanaan kedaulatannya itu dipercayakan kepada wakil-wakilnya. Karena itulah, rakyat harus diberi kesempatan untuk ikut serta melaksanakan Pemilu. Dengan sendirinya memang harus ada unsur melembaga dalam melaksanakan Pemilu. Ini merupakan salah satu unsur dari mekanisme kepemimpinan nasional.

Pemilu menghasilkan DPR. DPR itu juga merupakan salah satu unsur mekanisme kepemimpinan nasional. Kemudian DPR hasil Pemilu bersama DPRD Tingkat I memilih wakil-wakil daerah, digabungkan atau ditambah dengan wakil-wakil dari golongan, tersusun di dalam Lembaga Tertinggi Negara ialah MPR. Ini pun merupakan salah satu unsur mekanisme kepemimpinan nasional tersebut.

Kewajiban MPR — sebagai penjelmaan dari rakyat atau melaksanakan kedaulatan rakyat — adalah membuat atau merubah UUD dan GBHN; memilih Presiden sebagai Mandatarisnya dan memilih Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Ini pun merupakan salah satu unsur dari mekanisme kepemimpinan nasional.

Kemudian, Presiden diberi wewenang untuk menunjuk Menteri-menterinya, dan membentuk pemerintahan tertinggi negara. Ini adalah merupakan unsur pula dari mekanisme kepemimpinan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, setelah Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, Presiden bekerjasama dengan DPR sebagai partnernya dalam membuat undang-undang. Ini pun juga merupakan salah satu unsur dari mekanisme kepemimpinan nasional.

DPR mempunyai kedudukan yang kuat, karena bisa menolak undang-undang. Tetapi bagaimanapun juga DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden. Sebaliknya, Presiden pun tidak bisa membubarkan parlemen. Begitu ada pertentangan antara DPR dengan Presiden, maka jalannya adalah Sidang Istimewa MPR, dimana DPR berhak untuk mengajukan Sidang Istimewa kepada MPR. Ini pun merupakan salah satu mekanisme dalam rangka mengamankan mekanisme kepemimpinan nasional tersebut. Bilamana ada Sidang Istimewa, maka MPR mengadili pengaduan DPR terhadap Presiden/Mandataris. Tentu keputusannya terletak kepada MPR itu sendiri, tidak terletak kepada DPR. Walaupun seluruh anggota DPR itu merupakan anggota MPR, tetapi yang mengambil keputusan adalah MPR, bukan anggota DPR.

Inilah saya kira yang perlu kita amankan di dalam pembangunan politik, sehingga mekanisme kepemimpinan nasional itu benar-benar bisa membudaya dalam kehidupan negara dan bangsa kita, selama UUD'45 itu masih kita terima, kita pertahankan dan kita jadikan sebagai landasan konstitusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suksesi dari Unsur-unsur dalam Mekanisme Kepemimpinan Nasional

Mengenai suksesi unsur-unsur itu, dengan sendirinya, pada saatnya, sudah 4 kali siklus lima tahunan kita laksanakan. Mengenai suksesi rakyat yang berdaulat tentunya tidak akan sama.

Mereka yang tetap bisa ikut adalah

Digitized by Google

selama mereka masih hidup, memenuhi persyaratan dan tidak dicabut haknya. Mereka itu masih termasuk rakyat yang berdaulat. Ditambah lagi mereka yang pada saat Pemilu yang akan datang berumur 17 tahun. Mereka itu memperkuat unsur rakyat yang berdaulat dalam melaksanakan Pemilu. Dengan demikian, maka dalam setiap Pemilu itu dengan sendirinya akan ada perubahan jumlah karena tambahan dari yang muda (usia 17 tahun) yang mempunyai hak melaksanakan Pemilu. Rakyat diberi kesempatan untuk melaksanakan Pemilu. Hasil Pemilu dengan sendirinya akan berbeda pula dari Pemilu yang lampau. Ini juga merupakan suksesi DPR maupun DPRD.

Begitu pula MPR tentu akan berubah. Bahkan dalam rangka perkembangan politik, barangkali juga kemenangan organisasi sosial politik yang ikut serta melaksanakan Pemilu juga bisa berubah-rubah, tidak akan sama. Tentunya masing-masing akan memperjuangkan status yang diperolehnya, artinya untuk memperoleh kemenangan. Mereka yang kalah tentunya akan merubah, tidak mempertahankan status kekalahannya terus. Dengan sendirinya ingin memperoleh kemenangan. Dengan demikian, maka MPR, yang nanti terdiri dari Fraksi-fraksi, juga akan mengalami perubahan.

Mengenai suksesi Presiden, menjadi tanggung jawab MPR sepenuhnya melewati Fraksi-fraksinya. Fraksilah yang sebenarnya mempunyai wewenang untuk mengajukan calon-calon Presiden maupun calon Wakil Presiden, karena mereka merupakan unsur di dalam MPR. Dengan demikian, karena mereka mempunyai hak, tentunya juga bisa saja masing-masing Fraksi itu mengajukan calonnya sendiri. Ini berarti kalau sekarang di MPR kita ada 5 fraksi: 3 fraksi kekuatan sosial politik — Parpol dan Golkar — ditambah 2 fraksi lainnya — yaitu ABRI dan Utusan Daerah — berarti bisa ada 5 calon Presiden. Tetapi, dalam rangka Demokrasi Pancasila: musyawarah mufakat yang dipimpin oleh jiwa dan semangat sila ke-4 dari Pancasila mutlak diperlukan.

Dengan adanya calon masing-masing, kemudian dimusyawarahkan oleh Fraksi-fraksi itu sedemikian rupa, sehingga akhirnya akan memenuhi persyaratan tentang siapa yang selanjutnya akan dicalonkan, karena yang dipilih itu hanya satu. Dalam rangka musyawarah mufakat itu bisa jadi, kalau kemudian semuanya berpegangan pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ekaprasetia Pancakarsa, dalam rangka musyawarah diarahkan agar supaya tidak bertentangan dengan persatuan, tidak bertentangan dengan dasar negara, dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Tidak sulit untuk memperoleh mufakat, asalkan benar-benar mereka itu mau mengetrapkan P-4 ialah Ekaprasetia Pancakarsa itu.

Jadi jelas kalau mereka betul-betul mau melakukan musyawarah untuk mufakat, satu calon itu akan bisa tercapai. Kecuali dalam rangka berpikir perimbangan kekuatan, bisa terjadi lain. Pada imbangan kekuatan itu memang tidak ada yang mayoritas di dalam DPR, berarti juga tidak mayoritas di DPR. Mungkin ada yang mayoritas satu Fraksi tetapi dua Fraksi lain menggabungkan diri, lantas menjadi sama. Dengan demikian akan terjadi dua calon.

Kalau sampai akhirnya dengan musyawarah itupun tetap mempunyai kekuatan yang sama, dua-duanya itu tentu juga akan menjadi calon yang akan dipilih oleh Majelis. Dengan demikian barulah berlaku pemungutan suara karena ada 2 calon. Tetapi tahap pertama dengan sendirinya musyawarah mufakat itulah yang harus diusahakan, bukan lantas sejak semula harus voting, harus menentukan melewati pemungutan suara, tidak. Tetapi musyawarah mufakat inilah yang harus dikembangkan.

Suksesi Presiden yang Sekarang

Jadi sekali lagi, sebetulnya dalam keadaan yang sekarang, untuk membicarakan suksesi Presiden, tentang siapa yang akan jadi Presiden, ini bukan wewenang MPR yang sekarang dan juga bukan wewenang dari Faksi yang sekarang, karena mereka itu sudah melakukan kewajibannya, yaitu memilih Presiden yang sekarang ini. Yang akan memilih dan mencalonkan Presiden berikutnya itu, adalah MPR hasil Pemilu yang akan datang dan Fraksi hasil Pemilu yang akan datang. Itulah yang akan mengajukan dan memikirkan calon-calon yang akan dikemukakan: mungkin lima, mungkin empat. Tetapi, jika jumlah calon lebih dari satu, dimusyawarahkan sedemikian rupa, sehingga akhirnya akan menjadi satu, kalau itu betul-betul menitik beratkan musyawarah. Tetapi kalau ada dua kekuatan yang seimbang, bisa diajukan dua, sehingga kemudian perlu ada pemungutan suara. Jadi kalau dalam keadaan sekarang, baik mengenai MPR sekarang dengan Badan Pekerja dan Fraksi-fraksi di MPR, sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk memilih dan mencalonkan Presiden lagi, karena tidak ada pemilihan Presiden lagi. Tetapi hal itu oleh MPR yang akan datang.

Sekarang, siapa yang harus memikirkan suksesi Presiden dan Wakil Presiden? Karena Fraksi itu ada induknya, maka kekuatan sosial po-

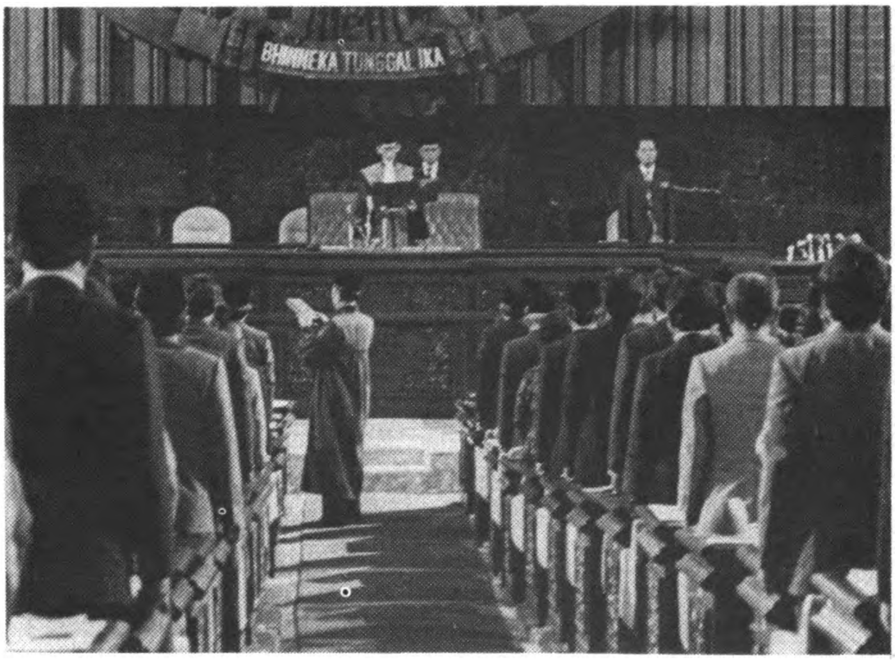

Mengamankan mekanisme kepemimpinan nasional

Digitized by Google

litiklah sekarang yang boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu dan membekali Fraksinya setelah Pemilu. Golkar, Partai Politik, ABRI, Utusan Golongan, Wakil Daerah, memikirkan dalam lingkungannya siapa yang akan diajukan atau dipilih. Sudah mulai sekarang memikirkan siapa yang sekiranya bisa "dielus-elus" untuk menjadi "jago"nya, yang nantinya "diadu" di dalam MPR hasil Pemilu. Itu bisa saja, tergantung pada kekuatan sosial politik. Karena yang mempunyai kepanjangtanganan, artinya "verlengstuk"nya di Majelis itu, adalah kekuatan sosial politik. Sedangkan masyarakat dengan sendirinya harus menyalurkan aspirasinya pada kekuatan sosial politik itu sendiri. Kalau masyarakat mulai sekarang sudah membicarakan, hanya membuang-buang waktu saja, toh nyatanya nanti masing-masing tidak bisa mencalonkan secara langsung. Apalagi jika masing-masing orang ingin mencalonkan diri, dan berkata "Mulai sekarang saya menjadi calon Presiden sesuai dengan konstitusi kita". Itu tidak ada. Yang berhak untuk mencalonkan dan memilih calon itu adalah Fraksi-fraksi di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan orang perorang. Saya pun hingga sekarang, memang tidak pernah berpikir bahwasanya saya akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Tidak! Tetapi seluruhnya kita serahkan pada MPR sesuai dengan konstitusi. Yang mempunyai wewenang adalah Majelis. Majelis mempercayakan kepada Fraksi-fraksi. Dus Fraksi-fraksi itu nanti yang akan melaksanakannya.

Jadi atas dasar pemikiran itu, sebetulnya tidak perlu khawatir bahwasanya Saudara-saudara Menteri yang ikut dalam sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekkuin ini akan saya peralat untuk memperjuangkan saya menjadi Presiden. Tidak ada!

Dari dulu juga tidak pernah saya melakukan demikian. Kita serahkan sepenuhnya sesuai dengan konstitusi, secara konstitusional, kepada lembaga tertinggi negara penjelmaan rakyat, yang melaksanakan kedaulatan rakyat, yang mempunyai wewenang. Setelah MPR menentukan GBHN dan ketetapan-ketetapan MPR maka akan memilih salah soerang warga negara untuk menjadi Presiden/Mandatarisnya, dan memilih Wakil Presiden untuk membantu Presiden/Mandatarisnya. Dan tata cara yang sekarang berlaku adalah melewati Fraksi-fraksi. Sebelum melewati Fraksi-fraksi — karena Fraksi merupakan "verlengstuk" dari kekuatan sosial politik —, tempat untuk memikirkan itu sekarang adalah organisasi kekuatan sosial politik.

Tetap mengembangkan musyawarah mufakat

Jadi, kalau ada pertanyaan kapan dan siapa suksesi Presiden, kita kembalikan saja kepada konstitusi kita. Secara konstitusional kita tidak boleh mencampuri. Semua yang menentukan calon-calon itu adalah MPR sendiri. Sedangkan partai-partai bisa memikirkan mulai sekarang untuk selanjutnya diperjuangkan dalam MPR melewati Fraksi-fraksinya.

Jadi sekali lagi kita tidak perlu terjebak oleh pancingan-pancingan dari orang-orang yang ingin mengetahui lebih dulu, padahal sebenarnya bukan wewenang kita.

Dus, kita ajak rakyat ini agar supaya kembali kepada mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan konstitusi kita, sehingga mekanisme yang telah kita bangun sejak lahirnya Orde Baru itu benar-benar akan membudaya. Jadi, dengan demikian, pergantian unsur di dalam mekanisme kepemimpinan nasional, termasuk Presiden, tidak perlu ada ribut-ribut. Itu akan bisa berjalan dengan baik, karena kalau ada orang yang "ngotot", pasti akan "tertelan" oleh keadaan sendiri. Percayalah bahwasanya itu tidak akan terjadi, kalau betul-betul kita itu secara konsekuen melaksanakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan konstitusi yang memang kita pegang teguh itu.

Inilah hal yang perlu untuk menghadapi waktu-waktu yang akan datang, jangan sampai pernyataan-pernyataan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak jelas maksudnya. Membuat pernyataan jelas, tetapi membawa akibat yang tidak jelas. Jadi supaya kita perhatian

Saya tidak melarang Saduara-saudara mengeluarkan pernyataan, tetapi hendaknya supaya dalam bidangnya masing-masing, dan ada landasannya. Landasan yang memang harus kita pegang ialah landasan idiilnya Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD'45 kemudian landasan operasionalnya adalah Ketetapan-ketetapan MPR, termasuk GBHN.

Mengenai pelaksanaan Demokrasi Pancasila, sudah pernah ada, ialah Ketetapan MPRS tahun 1968 No. XXXVII. Ketetapan itu menjelaskan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, mencabut pelaksanaan Demokrasi Terpimpin; kemudian menentukan, ini lho Demokrasi Pancasila. Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 telah dicabut melalui Tap MPR No. V/MPR/1973 dan meterinya sampai sekarang ditampung dalam Peraturan Tata Tertib MPR ialah Tap MPR No. I/MPR/1973 sampai tahun 1988. Kalau memang kita menghormati keputusan MPR, itulah yang harus kita pakai, jangan mencari teori-teori Barat "tetek bengek".

Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada hari ini, terutama pada Hari Puasa, bisa Saudara-saudara semua ingat dalam menanggapi masalah yang akan datang. □

Digitized by Google

RUU Peradilan Agama Siap Masuki Pembicaraan Tingkat III di DPR

Pembahasan RUU Peradilan Agama telah selesai pada tahap pembicaraan tingkat II, ketika Menteri Agama selaku wakil pemerintah memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung di Jakarta, Senin, 19 Mei 1989 lalu.

Dalam jawaban pemerintah itu, Menteri Agama antara lain mengemukakan bahwa titik berat Peradilan Agama bukan pada negara, tetapi pada sengketa-sengketa perdata (hukum keluarga) dari perorangan. Peradilan agama hanya merupakan peradilan (alat kekuasaan kehakiman) bagi perkara-perkara hukum keluarga antara orang-orang Islam. Hukum keluarga itu merupakan hukum perdata yang tidak mungkin dipisahkan dari keyakinan seorang Muslim.

Dengan mengutip pernyataan Presiden Soeharto di depan delegasi Muhammadiyah pada 29 Mei 1989 lalu, RUU Peradilan Agama adalah sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan RUU ini sesuai pula dengan amanat UU No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di negara RI dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kaitan ini, pemerintah tidak sependapat dengan Fraksi PDI yang menyatakan bahwa UU Nomor 14 tahun 1970 perlu ditinjau terlebih dahulu, dan selanjutnya baru dibicarakan kemungkinan keberadaan alat-alat kelembagaan hukum lainnya. Menurut Menteri Agama, sebelum lahirnya UU no. 14/1970, jiwa konsepsi Wawasan Nusantara mulai tumbuh sejak 13 Desember 1957 dengan keluarnya pengumuman pemerintah mengenai wilayah perairan RI yang lazim dikenal sebagai "Deklarasi Djuanda". Dengan lahirnya TAP MPR IV/1973, UU nomor 14/1970 secara implisit telah diakui oleh GBHN, dan secara eksplisit menjadi dasar bagi UU no 14/1985 tentang Mahkamah Agung, dan UU nomor 2/1986 tentang Peradilan Umum dan UU no. 5/1986 tentang PTUN.

Titik berat peradilan agama bukan pada negara

Menteri mengatakan, pengertian "satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional" jangan diartikan secara sempit. Kalimat itu menurut Menteri, harus diartikan sebagai satu sistem hukum nasional yang di dalamnya terdapat berbagai sub sistem hukum nasional. Titik berat tidak hanya diletakkan pada kesatuan hukum yang diunifikasikan dan berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. "Jika demikian maka yang terjadi adalah pemaksaan-pemaksaan hukum kepada golongan-golongan dalam masyarakat," katanya tegas.

Menurut Menteri, peradilan agama berkembang karena kebutuhan dan kesadaran hukum yang sesuai dengan keyakinan dan telah berada di bumi nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk di wilayah ini.

Secara rinci, Menteri Agama menjelaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda memberikan pengakuan bagi keberadaan pengadilan agama di Indonesia. Ia juga menyitir beberapa pendapat ahli hukum tentang peranan Hukum Islam.

Pemerintah mengakui, dalam perkembangannya ada perbedaan pengaturan pengadilan agama di Pulau Jawa dan Madura dan yang ada di luar Jawa. Namun yang ditangani sama, yaitu nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin, mut'ah, hadonah, waris, shodaqoh, hibah dan baitulmal.

Menteri menyatakan sependapat dengan Fraksi ABRI agar semua pihak menyadari kebhinnekaan dan sifat majemuk bangsa Indonesia. Tidak menyadari kemajemukan dalam negarà Pancasila akan sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Tidak menyadari sifat ini akan melahirkan dominasi mayoritas atau tirani minoritas.

Di bagian lain, Menteri Agama menegaskan bahwa hukum yang bersumber pada hukum Islam dapat dijadikan hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Menteri menolak pandangan Fraksi PDI bahwa RUU PA ini hanya berlaku bagi golongan tertentu dalam kaitan dengan Wawasan Nusantara. Menurut Menteri, pemahaman pasal-pasal UUD 1945 tidak boleh secara sepenggal-sepenggal.

Keterangan Pers

Kepada wartawan, Menteri Agama mengatakan bahwa pemerintah menjamin RUU PA bukan merupakan usaha bertahap dan terselubung untuk

Digitized by Google

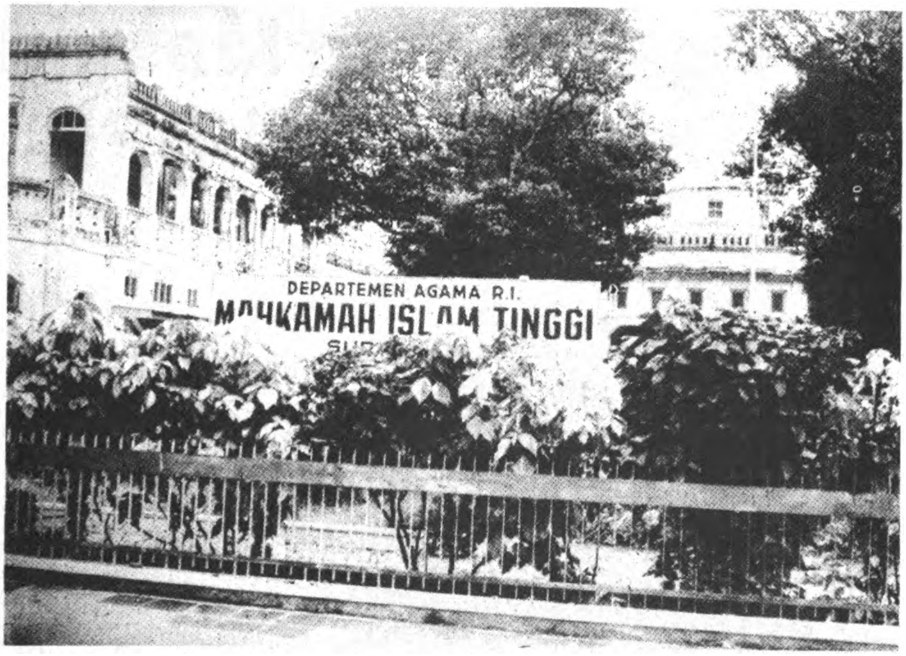

Peradilan agama berkembang karena kebutuhan

mengarah pada kembalinya Piagam Jakarta. RUU itu tidak bertentangan dengan asas Pancasila. RUU ini hanya mengatur tata Peradilan Agama yang selama ini hidup dalam masyarakat.

Atas pertanyaan pers mengenai sikap pemerintah kalau ada masyarakat non Islam yang juga minta adanya UU Peradilan Agama, Munawir mengatakan, kalau untuk umat Kristen dan Katolik tidak ada persoalan karena sudah diatur dalam BW. "Kalau ada pihak lainnya yang mengajukan, kita lihat dulu, apakah betul-betul soal hukum agama ataukah adat," katanya.

Menteri mengatakan, Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di bumi Nusantara sejak Agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini berabad-abad sebelum kehadiran penjajah. Berkembangnya peradilan agama merupakan kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan.

Dalam akhir jawaban Pemerintah, Munawir mengajak semua pihak agar kehadiran RUU PA ini diterima dengan lapang dada. Kehadiran RUU PA ini semata-mata kehendak sejarah dan tidak akan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa.

Pemandangan umum

Jauh hari sebelumnya, Selasa 13 Juni 1989, fraksi-fraksi DPR menyampaikan pemandangan umumnya atas RUU itu.

Dalam pemandangan umum itu hanya fraksi PPP yang merasa sudah sejalan dengan pemerintah, sehingga hanya mengharapkan agar RUU segera ditetapkan sebagai Undang-Undang. Berbeda dengan fraksi PPP, fraksi ABRI, FKP (Golkar) dan PDI masih merasa perlu minta kejelasan atas beberapa masalah yang berkaitan dengan RUU PA. Bahkan secara eksplisit FABRI dan FPDI mengharapkan agar pembahasan RUU PA ini dilakukan dengan sikap hati-hati dan cermat, terbuka dan penuh toleransi serta dengan semangat persatuan, mengingat materi yang dibahas dalam RUU PA sangat sensitif.

Dalam memberikan sikapnya, Fraksi Karya yang diwakili jurubicara Ir Moestahid Astari menyatakan bahwa dalam menelaah RUU Peradilan Agama tidak hanya melihat aspek dan landasan yuridis formal seperti UU nomor 14 tahun 1970 serta berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya, tetapi lebih dari itu. Fraksi Karya juga melihatnya dari landasan ideal dan konstitusionalnya yakni Pancasila dan UUD 1945, strategi pembangunan nasional, GBHN serta Repelita, di samping aspek historis, tingkat perkembangan masyarakat serta hukum-hukumnya yang hidup dan berkembang baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut FKP, Pancasila yang berhasil ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya diakui, tetapi harus dilaksanakan secara utuh. Dalam hal pembangunan hukum, Pancasila haruslah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Tiap produk hukum haruslah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan diarahkan untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat Pancasila.

Tentang kehadiran RUU PA, FKP tidak melihatnya bukan untuk membuat suatu badan kekuasaan kehakiman yang sama sekali baru, tetapi semata-mata bersumberkan UU no. 14 tahun 1970. Atas dasar itu, FKP menyambut baik atas diajukannya RUU PA itu dan mengajak semua pihak agar UU PA yang dilahirkan nanti sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.

FKP juga minta penjelasan dari pemerintah mengenai pencantuman makna dan muatan khusus bagi umat Islam dalam pasal maupun penjelasan. FKP mempertanyakan prinsip kesukarelaan, serta institusi-institusi yang akan dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan RUU PA. FKP juga mempertanyakan tentang perlunya prinsip keterbukaan bagi persyaratan pembela/penasihat hukum dilingkungan Peradilan Agama sepanjang mereka telah menguasai hukum Islam disamping pengetahuan hukum lainnya.

Dipertanyakan ketentuan UU no 14 tahun 1970 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" dalam kaitan dengan RUU PA, serta maksud ketentuan RUU yang menyatakan "tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan UU", pengaturan perceraian yang sebenarnya telah diatur dalam UU Perkawinan.

Fraksi ABRI

Fraksi ABRI berpendapat bahwa masalah Peradilan Agama ini cukup berat dan peka, bukan karena materinya yang berat tetapi karena menyentuh sisi kehidupan pribadi dan keyakinan, yang apabila tidak dibawakan secara bijaksana akan menyentuh kepentingan pihak lain. Namun menurut jurubicara FABRI itu, tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan selama digunakan tolok ukur Pancasila dan UUD 1945.

Fraksi ABRI berpendapat bahwa hukum yang bersumber pada hukum Islam dapat dijadikan hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, atau dapat disesuaikan dengan nilai-nilai itu sebagaimana halnya dengan hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh yang

Digitized by Google

mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib, terarah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin.

Dalam hal ini Fraksi ABRI dapat menangkap adanya kekhawatiran sementara pihak yang kemudian mempertanyakan, apakah dengan demikian tidak berarti membuka kemungkinan untuk secara bertahap memberlakukan Piagam Jakarta, yang justru demi menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dihapuskan dari pembukaan UUD 1945 pada saat akan ditetapkannya UUD 1945 itu?

Fraksi ABRI dapat mengerti adanya kekhawatiran itu, karena memang fakta sejarah menunjukkan bahwa pernah ada usaha untuk mengubah negara Pancasila dan menegakkan negara berdasarkan agama, baik melalui usaha legal maupun tidak legal.

Dalam kaitan dengan ini, apabila memang terbukti ada usaha untuk mengubah negara berdasarkan Pancasila, ABRI lah yang pertama-tama akan menghadapinya, baik dalam fungsinya sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik, karena memang ini termasuk tugas pokok ABRI dan diamanatkan pula oleh Sapta Marga. Dalam kaitan dengan RUU PA, FABRI berpendapat bahwa yang hendak ditegakkan melalui peradilan agama hanyalah sebagian dari hukum perdata Islam dan tidak termasuk pidana materiil, itupun terbatas dengan yang menyangkut hal perkawinan, wakaf, shodaqoh, sedangkan yang menyangkut kewarisan, wasiat dan hibah hanya dapat diberlakukan bagi para pencari keadilan umat Islam yang bersangkutan dalam hal menggunakan hukum Islam, sedangkan bagi yang tidak menggunakan hukum Islam, dapat memilih mengajukan perkaranya melalui peradilan umum.

Terhadap beberapa ketentuan Fraksi ABRI mempertanyakan, apakah persyaratan harus beragama Islam diperlakukan bagi seluruh aparat peradilan agama. Dipertanyakan pula mengenai pemberhentian ketua, wakil ketua dan hakim peradilan dilakukan oleh Presiden, sedangkan pengangkatannya oleh Menteri Agama atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Menurut FABRI, hal itu tidak sesuai dengan kelaziman hukum kepegawaian. FABRI mempertanyakan pula susunan peradilan agama di tiap propinsi, kabupaten dan kotamadya dan padanannya dengan peradilan umum termasuk personilnya. Dipertanyakan kriteria penyelesaian perkara perkawinan, apakah pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam, ataukah beragama Islam sesuai dengan rumusan RUU. Juga dipertanyakan, bagaimana penyelesaian kasus yang menyangkut kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan di lingkungan peradilan umum.

FPDI

Melalui jurubicara Budi Hardjono SH, FPDI mengemukakan bahwa pembentukan UU semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis. Pembentukan hukum harus menghayati aspirasi masyarakat dan memperhatikan aturan yang hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan dengan pembahasan RUU PA, PFDI mengharapkan agar keputusan apapun yang akan diambil hendaknya demi kepentingan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut FPDI, sifat khusus UU PA haruslah tetap memegang teguh asas-asas yang dianut dalam hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Dalam kaitan ini FPDI mempertanyakan, langkah apa yang perlu ditempuh agar UU PA ini tidak menimbulkan persepsi dan pengertian yang salah di antara warga negara Indonesia yang bhinneka tunggal ika. Juga dipertanyakan, apakah ada kebebasan seluas-luasnya bagi pihak yang berperkara untuk melakukan pilihan hukum.

Bahkan FPDI mempertanyakan, apakah latar belakang pemikiran penyusunan RUU PA yaitu UU no 14 tahun 1970 tidak perlu dikaji kembali mengingat UU itu masih melanjutkan diskriminasi yang membagi ragam hukum yang sesuai dengan agama, suku, golongan, orang, sehingga belum merupakan hukum nasional yang dicita-citakan dengan masih berlakunya BW, hukum adat dan hukum Islam. Dengan diterimanya wawasan Nusantara dan Pancasila satu-satunya asas, menurut FPDI kehadiran UU no 14 tahun 1970 perlu ditinjau kembali.

Dukungan FPPP

Bagi FPP yang dijurubicarai H Dikdik Iskandar, RUU PA ini sesuai dengan petunjuk UUD 1945, amanat GBHN, serta sesuai dengan petunjuk GBHN dan memenuhi aspirasi Orde Baru yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 1970 dan UU Pembinaan Peradilan. Selain itu, kata FPP masyarakat menunggu kehadiran UUPA ini karena dengan demikian akan dapat dilayani kebutuhannya setelah UUPA dilengkapi dengan perangkatnya. Karenanya FPP berharap agar RUU PA ini dapat segera diwujudkan.

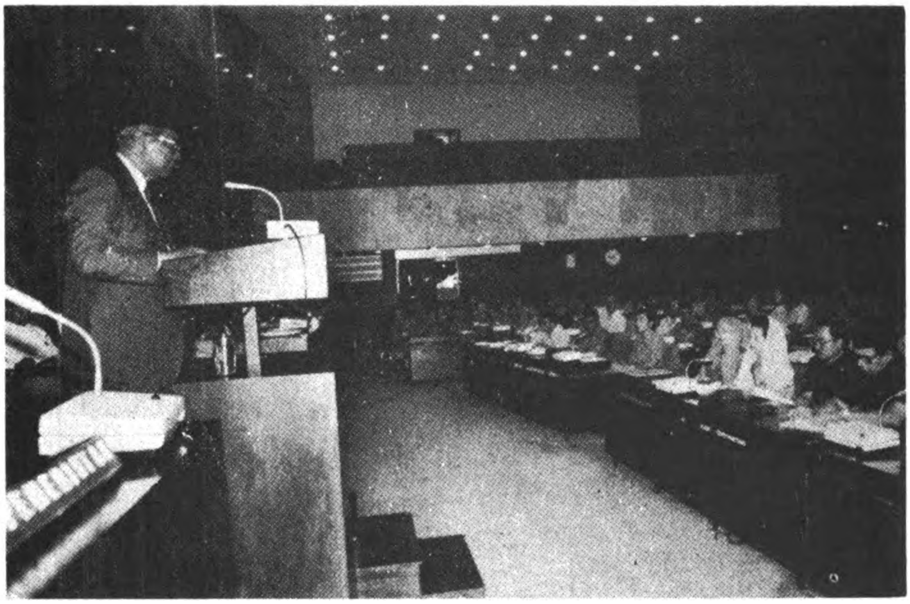

Pemerintah menjamin RUU PA

Bamus

Setelah Menteri Agama memberikan jawaban pemerintah, para anggota DPR bersepakat bahwa pembahasan RUU itu selanjutnya akan ditentukan oleh Bamus (Badan Musyawarah) DPR. Badan inilah yang akan menentukan apakah pembahasan akan dilakukan oleh komisi, ataukah panitia khusus yang beranggotakan dari berbagai komisi.☐ (Sgt)

Digitized by Google

Martono

Dari Martono Untuk Martono

Bagi setiap organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, pergantian pengurus, khususnya pucuk pimpinannya merupakan suatu kewajaran. Begitu pula dengan orang-orang yang masih tinggal — menduduki jabatan semula, atau telah tidak duduk lagi dalam kepengurusan — juga merupakan hal yang biasa. Gambaran tersebut di atas tercermin dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Belum lama ini, tepatnya tanggal 17 - 20 Mei lalu, sebuah organisasi yang orientasinya di bidang pertanian (HKTI) mengadakan Munasnya ke III, sekaligus Kongresnya ke II di Caringin Bogor. Munas yang merupakan lembaga tertinggi bagi setiap organisasi dalam menentukan pengurus serta menetapkan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) telah menentukan dan menetapkan susunan pengurus baru untuk periode lima tahun mendatang. Pengurus periode sebelumnya telah selesai masa tugasnya.

Munas yang berlangsung selama tiga hari itu, memang diluar dugaan panitia. Peserta yang diperkirakan berkisar antara 800 orang membengkak menjadi 1.126 orang. Memang, Munas HKTI yang diikuti peserta dari daerah-daerah se-Indonesia ini dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Pembangunan V dan sekaligus juga memberi pengarahan. Barangkali hadirnya beberapa menteri itu juga merupakan salah satu daya tarik tersendiri. Namun, kata Bambang Ismawan, memang Munas HKTI yang dilangsungkan di Carigin, Bogor selama tiga hari ini lebih baik dengan penyelenggaraan Munas tahun-tahun sebelumnya. Sependapat dengan Bambang, Martono, mantan menteri Transmigrasi, Ketua Umum periode sebelumnya dan juga Ketua Umum yang baru ini menilai bahwa membanjirnya jumlah peserta dalam Munas tahun ini disebabkan karena mereka ingin mengetahui lebih dekat perkembangan HKTI dan sekaligus juga ingin mengetahui perkembangan pertanian di Indonesia.

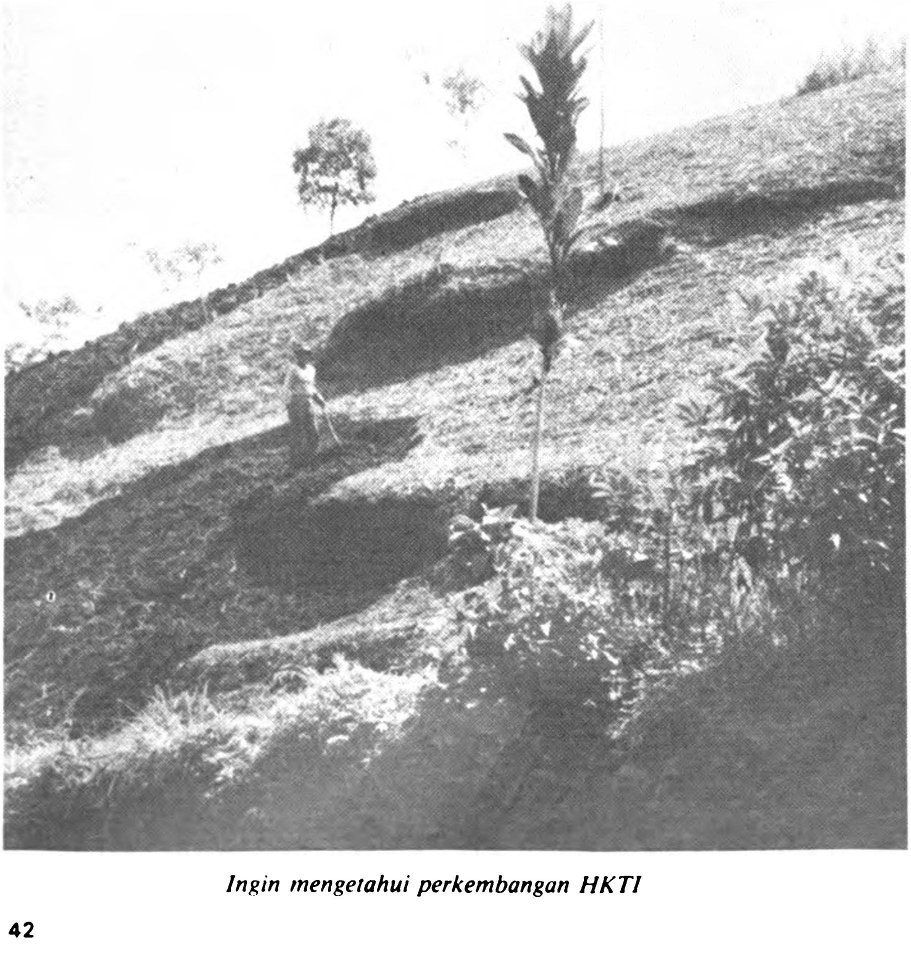

Ingin mengetahui perkembangan HKTI

Muka Lama dan Baru

Dari kepengurusan HKTI periode lima tahun mendatang, saat mengadakan pertemuan sekaligus perkenalan, tercermin adanya muka-muka lama dan sekaligus muka-muka baru. Artinya, banyak dari pengurus yang lama tetap menjadi pengurus. Ada pula yang masih tetap pada jabatan yang semula dan ada pula yang bergeser dari posisinya yang semula. Misalnya, posisi Ketua Umum — sebelumnya dijabat oleh Martono, dalam periode lima tahun mendatang juga oleh Martono. Contoh lain juga pada posisi Ketua misalnya, Usman Hasan, kini salah satu wakil Sekjen DPP GOLKAR, periode sebelumnya menduduki

Digitized by Google

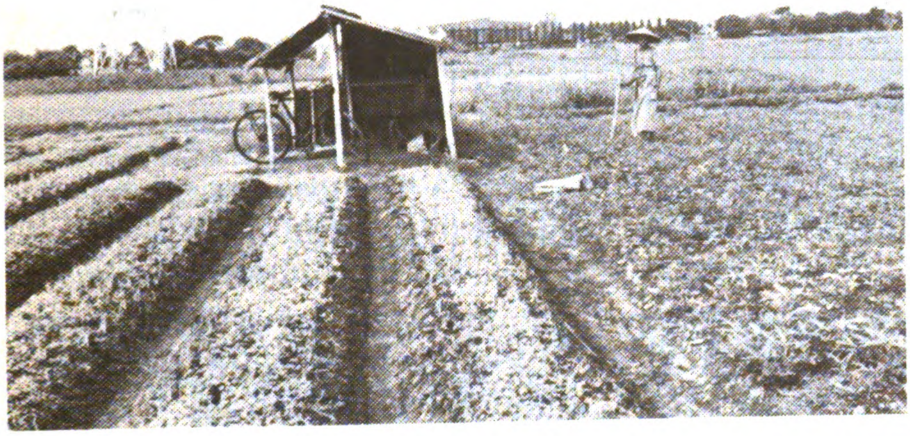

Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara jujur telah banyak membuahkan hasil. Termasuk di dalamnya sektor pertanian. Bahkan yang paling membanggakan adalah telah dicapainya "swasembada beras". Tampaknya itupun belum cukup Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai, tuntutan akan kebutuhan di sektor tersebut juga meningkat. Di dalamnya termasuk pembangunan pedesaan.

Tantangan ke depan yang dihadapi kepengurusan HKTI di antaranya rendahnya kualitas sumberdaya insani, terbatasnya sumberdaya tanah dan pertanian, juga terdapatnya keterbatasan dibidang sumberdaya modal dan teknologi. Disamping itu juga masih belum serasinya hubungan antar mata rantai agribisnis, belum mantap-

jabatan salah satu Ketua, dalam periode yang baru ini juga tetap pada posisinya yang semula.

Sedangkan posisi jabatan yang bergeser adalah Bambang Ismawan yang dalam periode sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) dalam kepengurusan yang baru ini menduduki jabatan salah satu ketua. Posisi Bambang kemudian digantikan oleh Ir Abdurachman Rangkuti. Sebagaimana diketahui, dalam kepengurusan HKTI ini terdapat dua belas ketua, termasuk di dalamnya satu Ketua Umum, Satu Sekjen dan tiga wakilnya, bendahara umum dan dua bendahara serta Ketua-ketua Departemen yang berjumlah 17 Departemen.

Sebagaimana diketahui, hasil Munas HKTI telah menetapkan personalia sebagai berikut; Martono (Ketua Umum). Sedangkan sebelas ketua lainnya adalah; Ir Syamsuddin Abbas, Drs Soelarso, Ir Usman Hasan, H Imam Churmain, Drs Yahya Eddy Sandjaya, H Oyon Tahyan, Ny Mien Sugandhi, Dr.Ir M.Amin Aziz, Ir Sukanda Kartasasmita, Drs Bambang Ismawan MS dan Sri Mulyono Herlambang.

Sedangkan personalia Sekjen adalah Ir Abdurachman Rangkuti. Dan tiga wakil Sekjen di antaranya; Drs H. Heru Suparto, Ir Jafar Hafsah MS dan Sam Patty. Kemudian personalia bendahara adalah; Ny Marie Soetardjo (bendahara umum) dan dua bendahara masing-masing Dra Ny. Sri Kusdyati Supomo dan Tasrin.

Yang tidak kalah menariknya dalam susunan kepengurusan HKTI periode 1989-1994 ini adalah duduknya Presiden Soeharto sebagai Pelindung/ Pembina Utama. Selain itu juga beberapa Menteri Kabinet Pembangunan V juga duduk di dewan Pembina di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi/ Kabulog dan sejumlah Dirjen yang duduk sebagai penasehat.

Memecahkan tantangan di masa depan

Tantangan ke depan

Tugas yang diemban, pengurus HKTI periode 1989-1994, tidaklah ringan. Sejumlah tantangan ke depan telah membayangi untuk dipecahkan.

nya kelembagaan masyarakat tani, kesempatan kerja yang makin terbatas, lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan sejumlah masalah-masalah yang lain. Tampaknya, sejumlah tantangan ke depan yang menghadang ini, telah disadari oleh HKTI. Dan pokok-pokok masalah inipun juga telah menjadi memorandum pembangunan pertanian dan pedesaan, dan ini juga merupakan kesimpulan dari Kongres Tani Indonesia ke II di Caringin, Bogor belum lama ini. Selamat bekerja.☐ BM

Digitized by Google

Dari PWI ke SPS

Ancol, kawasan pariwisata yang terletak di pinggiran pantai. Setiap hari besar bahkan hari-hari biasa, kawasan tersebut ramai dikunjungi orang yang ingin menikmati pemandangan dan hiburan-hiburan yang memang sudah disediakan.

Pekan pertama Mei lalu, kawasan tersebut menjadi bertambah semarak. Sebab, selain orang-orang yang dari Jakarta, bahkan dari berbagai daerah ingin menikmati hari-hari senggangnya, ditambah dengan Serikat Penerbit Surat Kabar yang mempunyai gawe. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh SPS ini bukan pekerjaan yang seperti masyarakat kerjakan. Namun, SPS mengadakan Kongresnya yang ke-XVIII.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kongres yang dilaksanakan SPS ini, selain membicarakan berbagai masalah yang timbul dan berkaitan dengan dunia pers ini juga menetapkan AD/ART dan menentukan kepengurusan yang baru. Masa kepengurusan sebelumnya telah habis masa tugasnya. Sebagaimana diketahui pula, bahwa Ketua Umum yang lalu adalah Sunardi DM. Karena tidak dapat melanjutkan tugasnya, karena meninggal, jabatan tersebut kemudian dipercayakan oleh Yacob Utama.

Semaraknya Kongres yang berlangsung kali ini tidak hanya dihadiri oleh para peserta dari berbagai daerah se-Indonesia yang berjumlah lebih kurang 200 penerbit surat kabar saja. Namun, kongres yang berlangsung selama empat hari, tepatnya mulai tanggal 4-8 Juni lalu juga hadirnya tokoh-tokoh pers dan pemerintahan termasuk di dalamnya Wapres Sudharmono, yang membuka kongres tersebut dan Menteri Penerangan Harmoko, yang sekaligus juga memberi pengarahan-pengarahan.

Namun, barang kali yang tidak kalah penting dan menariknya adalah pemilihan bursa calon pengurus yang baru. Seperti biasa, setiap organisasi ketika mengadakan Kongres/Munas, bursa ketua umum selalu menjadi bahan pembicaraan yang cukup menarik di kalangan peserta. Dan mantan Ketua Umum PWI, Zulharmans, dibicarakan para peserta akan duduk menjadi orang yang paling terhormat dalam wadah organisasi tersebut. Dan apa yang telah dibicarakan itu telah menjadi kenyataan.

Zulharmans

Bagi orang yang berkecimpung di dalam dunia pers, nama Zulharmans, yang lebih akrab dengan panggilan Pak Zul, itu bukan asing lagi. Sebab, Zulharmans selain pernah menjabat Ketua Umum PWI juga telah lama berkecimpung dalam dunia pers.

Dan memang, bagi Zulharmans, dunia pers bukan asing lagi. Hampir hari-harinya telah dihabiskan untuk dunia tersebut. Zulharmans pertama kali melangkah dalam dunia pers seperti yang terdapat dalam biografinya, tahun 1955, yaitu menjadi redaksi kebudayaan pada majalah Merdeka. Nampaknya, Zulharmans yang kini juga salahs atu Ketua Penbitmassmed tidak lama di majalah tersebut, yaitu satu tahun. Dalam tahun yang sama, yaitu 1956, Zulharmans melangkah lagi ke majalah dunia film dan menjadi Pemimpin Redaksi hingga tahun 1957. Pada tahun 1958-1960 menjabat menjadi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mingguan Hari Minggu.

Kemudian pada tahun 1966-1974 menduduki Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Kami. Tahun 1977-1979 menjadi Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Empat Lima. Dan satu tahun berikutnya Zulharmans menjadi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mingguan Berita Minggu Film. Dan pada tahun 1980 hingga sekarang ini, menjadi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Neraca —Harian yang menitikberatkan pada berita-berita ekonomi—.

Zulharmans yang juga anggota DPR dari FKP ini sumbangannya terhadap perkembangan pers nasional boleh dikatakan tidaklah sedikit. Pada tahun 1955, Zulharmans bersama dengan Bus Bustami serta kawan-kawan mendirikan Persatuan Pers Film. Dan sejumlah jabatan lain yang pernah disandangkan, yang tentu berkaitan dengan pers.

Tantangan ke depan

Pers yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi baik yang berupa pendidikan, hiburan dan yang lainnya itu dalam dasawarsa tahun-tahun terakhir ini banyak mengalami perkembangan. Pers telah banyak tumbuh dan berkembang dimana-mana.

Seperti yang dikatakan oleh Wapres Sudharmono, bahwa beberapa usaha penerbitan surat kabar telah melaju dengan cepat, sehingga mampu mengembangkan dirinya dengan pesat. "Namun, kitapun melihat masih banyak yang berjalan tertatih-tatih. Ibarat kerakap tumbuh di atas batu. Hidup enggan mati tak mau".Selain itu, kata Wapres bahwa pers, masih ada yang kurang mampu untuk menjangkau daerah pedesaan.

Dari segi pemerataan, menurut Wapres, pers harus diperjuangkan agar benar-benar dapat makin nyata sebagai hasil pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam segi-segi pemerataan ini, menurut Wapres bukan saja mencakup dilingkungan usaha pers sendiri, tetapi pemerataan memperoleh dan menikmati informasi oleh seluas mungkin masyarakat, terutama yang berada di pedesaan.

Sementara itu, Menteri Penerangan Harmoko dalam acara penutupan Kongres ini juga menyinggung tentang jumlah pembaca pers di Indonesia. Sebagaimana dikatakan, sekarang ini satu surat kabar di Indonesia dibaca oleh 40 orang. Dan ini masih jauh dari ketentuan UNESCO yang menetapkan untuk satu surat kabar dibaca 10 orang. "Dengan demikian masih ada 30 yang lowong dan dapat dikejar oleh persuratkabaran nasional," ujar Harmoko. ☐ BM

Digitized by Google

Medali Emas Untuk Presiden Soeharto

Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke 68, Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 8 Juni yang lalu atas jasa-jasanya di bidang kependudukan. United Nations Population Award itu diterima langsung oleh Presiden Soeharto dalam suatu upacara resmi di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat.

Penghargaan untuk bidang kependudukan

Presiden Soeharto terpilih menerima penghargaan internasional itu karena telah memberikan dukungan besar selama 20 tahun untuk program keluarga berencana nasional di Indonesia.

Panitia yang memilihnya menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto maka tingkat kelahiran, kesuburan dan tingkat kematian anak balita telah merosot secara dramatis, di samping penggunaan kontraseptif hampir mencapai 50 prosen dari pasangan yang memenuhi syarat. Disebutkan pula bahwa penghargaan itu mengakui karya serta pengaruh internasional dari Presiden Soeharto dalam bidang kependudukan.

Penghargaan internasional untuk Kepala Negara RI selama masa Orde Baru ini merupakan peristiwa yang kedua kalinya. Yang pertama terjadi di tahun 1986 sewaktu Presiden Soeharto menerima penghargaan dari organisasi internasional FAO atas jasa-jasanya memajukan bidang pertanian di Indonesia.

Masalah global

Dalam sambutan resminya pada acara penerimaan penghargaan di Markas Besar PBB itu Presiden Soeharto mengemukakan bahwa masalah kuantitas dan kualitas yang dihadapi oleh mayoritas umat manusia yang berada di negara berkembang pasti akan membawa dampak terhadap pertumbuhan dan kehidupan seluruh bangsa di muka bumi. Dinilainya bahwa negara-negara kaya yang semestinya dapat berbuat lebih banyak justru belum cukup berbuat untuk menanggulangi masalah kependudukan sedunia. Oleh sebab itu Presiden Soeharto menghimbau perhatian dan keterlibatan negara-negara maju dalam masalah kependudukan yang merupakan unsur pokok dari pembangunan berkelanjutan secara global.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program KB di Indonesia, strategi dasar yang dikembangkan adalah pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Beralaskan strategi ini maka KB bukanlah semata-mata masalah kuantitatif demografis serta masalah klinis kontrasepsi, tetapi menyangkut usaha mengadakan perombakan tata nilai dan norma. Dengan demikian program KB merupakan bagian dari usaha pembaharuan bangsa, memerangi kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakpedulian.

Keberhasilan program KB di Indonesia bukan dicapai secara mudah. Sebagaimana diketahui dalam budaya masyarakat yang agraris dan tradisional, kehadiran setiap anak adalah sumber kebahagiaan yang memberi rezeki masing-masing. Anak menjadi penolong ayah di ladang atau ibu di dapur, dan menjadi penawar hati orang tua dalam menghadapi kesulitan hidup.

Presiden Soeharto juga menekankan bahwa salah satu hasil pembangunan yang mempunyai pengaruh besar terhadap penurunan jumlah penduduk adalah sektor pendidikan. Secara umum, pendidikan yang makin luas dan tinggi membukakan cakrawala pandangan bagi masyarakat untuk maju dan menerima gagasan baru serta inovasi termasuk wawasan masa depan, motivasi keluarga kecil, tanggung jawab kepada anak, usia kawin yang matang dan sebagainya.

Tuntutan kualitas

Dalam pelaksanaan program kependudukan, pendekatan kuantitatif dengan pengendalian kelahiran tidak lagi akan mencukupi dalam menghadapi tantangan kependudukan di masa-masa mendatang. Jumlah penduduk Indonesia tetap akan membengkak melampaui 200 juta jiwa pada awal

Digitized by Google

abad ke 21. Tuntutan dan kebutuhan pun akan meningkat, baik terhadap lapangan kerja, sarana kehidupan, energi, ruang maupun sumber alam.

Yang dituntut tidak hanya terbatas pada keseimbangan jumlah tetapi juga kualitas yang lebih memadai dan sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi dengan cepat. Yang harus ditanggulangi bukan hanya jumlah penduduk yang besar tetapi kualitas yang melekat pada jumlah itu. Penduduk yang besar jumlahnya saja akan merupakan kendala bagi pembangunan atau beban lingkungan bila tidak mempunyai kualitas yang memadai. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar merupakan modal yang sangat besar pula jika dapat dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Tujuan akhir pembangunan Indonesia adalah membangun manusia seutuhnya; tidak hanya dari segi kuantitatif tetapi juga kualitatif. Tidak sebagai kendala tetapi sebagai sumber daya. Dalam kaitan ini Presiden Soeharto mengemukakan bahwa bantuan negara maju atau badan internasional akan lebih membawa hasil yang lebih bermanfaat bila juga ditujukan pada pemecahan masalah kuantitatif ini. "Saya menghimbau agar kita bersama-sama memikirkan bagaimana menjadikan penduduk dunia ini sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan, yang sama-sama sepakat untuk menciptakan kehidupan umat manusia yang lebih baik," demikian Presiden Soeharto.

Bukan mencari-cari

Tentang piagam dari PBB itu, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia tidak mencari-cari penghargaan dari masyarakat dunia. Seperti dijelaskan oleh Ketua BKKBN Haryono Suyono, penghargaan internasional itu diberikan atas usul dari berbagai lembaga kependudukan dunia, antara lain The Population Institute of America, Lembaga Kependudukan Kuala Lumpur, dan Dewan Kependudukan di New York.

Dari The Population Institute, Presiden Soeharto telah menerima penghargaan ***Global Statesman Award*** yang diserahkan di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 2 Desember 1988, yang merupakan pengakuan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto dalam mensukseskan program kependudukan di Indonesia. Baru kemudian disusul dengan pemberian penghargaan dari PBB tanggal 8 Juni 1989 di New York itu.

Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar dalam sambutannya pada acara penyerahan piagam PBB itu menyatakan bahwa terpilihnya Presiden Soeharto untuk menerima piagam penghargaan didasari atas pertimbangan terhadap dukungan yang kuat selama 20 tahun kepada pelaksanaan program KB di Indonesia. Beberapa bulan setelah memangku jabatan Presiden pada tahun 1967, Soeharto bersama 26 kepala negara lainnya menandatangani sebuah deklarasi tentang kependudukan. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkannya instruksi yang merupakan dasar yang kuat bagi pelaksanaan program kependudukan yang intensif di Tanah Air. Program ini dimulai pada tahun 1970 di bawah kordinasi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tanda penghargaan yang diberikan kepada Presiden Soeharto itu berwujud sebuah piagam dan medali emas, disertai uang sejumlah 12.500 dollar AS. Uang tunai itu oleh Presiden Soeharto diserahkan kembali kepada PBB sebagai sumbangan beliau bagi badan internasional itu dalam membantu negara-negara yang masih membutuhkannya dalam rangka pelaksanaan program di bidang kependudukan. □

(TAP)

KOMENTAR

Di Cina Manusia Tak Punya Harga

MEREKA berkumpul karena satu dalam niat. Kehendak untuk bebas dari keterbelengguan selama hampir setengah abad - empat puluh tahun -, sejak Long Mars Mao Xedong di tahun 1949 dari Hainan menuju Peking (sekarang Beijing). Mereka berteriak menuntut demokrasi, lalu menyediakan diri untuk dibantai hanya karena ingin bebas. Tak ada lagi yang lebih berharga dari pada kebebasan itu menurut para penuntut kebebasan di Cina. Berminggu-minggu mereka berkumpul di lapangan Tienanmen hanya untuk berteriak, berceloteh, serta berargumentasi tentang kebebasan.

Pada mulanya anak-anak muda itu kelihatan bersemangat dan gigih memperjuangkan keinginannya. Suara kebebasan itu terdengar cukup keras, lantang dan menggema keseluruh pelosok negeri Cina, paling keras gaungnya di Beijing. Rupanya getaran suara para penuntut kebebasan itu membuat pemimpin-pemimpin Cina gelisah. Bahkan takut menjadi korban amukan jutaan penuntut kebebasan di Tienanmen.

Agar tidak lebih dulu terkena, lebih baik menyerbu dan menghentikan gerakan kebebasan itu. Daripada runtuh oleh getaran suara kebebasan, lebih baik meredamnya agar tak mengganggu ketenteraman kekuasaan. Begitu pikiran Deng Xiaoping dan kawan-kawannya. Keputusan terakhir: berlakukan hukum darurat. Karena dibawah hukum darurat itulah mereka bisa bertindak membungkamkan mulut para intelektual muda yang berkumpul di Tienanmen dan dengan suara keras berteriak minta kebebasan.

Para mahasiswa yang terkumpul di lapangan Tienanmen sepertinya yakin akan mampu merubah tirani besi yang kokoh itu. Mereka masih percaya bahwa melalui teriakan serupa itu, kebebasan akan datang jua. Sebuah sukses di Philipina tahun 1986, keberhasilan para mahasiswa di Korea Selatan setahun kemudian dan keberhasilan Gerakan SOLIDARITAS pimpinan Lech Walesa di Polandia sejak tahun 1980 (hampir satu dasawarsa).

Di Philipina, gerakan kebebasan itu didukung seluruh lapisan masyarakat; tak hanya mahasiswa, tetapi juga para politisi, Angkatan Bersenjata serta rakyat biasa. Mantan Presiden Marcos memang tak punya kesempatan untuk mengkonsolidasi kekuatannya. Tentara Philipina sudah terpecah, sementara mahasiswa dan rakyat serta kaum politisi memang sudah solid berada dibelakang Corazon Aquino.

Di Korea Selatan, sejak Presiden Cho Dow Hwan naik takhta tahun

Digitized by Google

1980, para mahasiswa mulai bergerak menuntut kebebasan. Mereka memang gigih berjuang, bukan tanpa korban. Ratusan ribu mahasiswa harus menjadi tumbal demi keberhasilan demokrasi. Mereka mendapat dukungan secara luas di masyarakat. Kaum politisi sepenuhnya mendukung mereka, karena tak tahan lagi berada di bawah kekuasaan hukum darurat. Mereka ditumpas secara kejam seperti juga apa yang dilakukan Tentara Cina terhadap mahasiswa di Tienanmen.

Peristiwa Kwangju barangkali sebuah kejadian yang mirip pembantaian di Tienanmen. Mahasiswa diberondong tanpa perasaan kemanusiaan. Tetapi mereka tak dilindas tank dan kendaraan lapis baja seperti apa yang dilakukan Divisi 27 tentara Cina di lapangan Tienanmen. Masih juga tersisa - walau sedikit sekali - naluri kemanusiaan pada para prajurit muda Korea Selatan itu. Tindak kekerasan yang dilakukan para prajurit muda Korea Selatan ketika itu, suatu hal yang memang bertentangan dengan kata hati mereka. Karena yang dihadapi adalah saudaranya sendiri. Juga masih ada nilai-nilai dogmatis yang mengendalikan akal sehat mereka.

Di Polandia, seluruh rakyat bergabung dengan SOLIDARITAS menuntut kebebasan. Hampir satu dasawarsa mereka berjuang untuk memperoleh kebebasan. Tidak sedikit pula korban yang berjatuhan akibat perjuangan SOLIDARITAS. Puluhan bahkan ratusan pengikut SOLIDARITAS meninggal sebagai akibat tindak kekerasan tentara Polandia. Tetapi lambat laun para pemimpin politik Polandia yang berkuasa, tergugah melihat kenyataan dalam masyarakat dalam masyarakat. Lebih dari itu norma agama yang begitu teguh, berhasil merubah sikap politik para pemimpin Polandia sehingga bersedia menerima tuntutan kelompok SOLIDARITAS yang semuanya adalah orang-orang beriman dan pemeluk agama yang patuh.

Lain lagi persoalan di Cina, tak ada yang bisa menghadang nafsu angkara murka para penguasa. Disana sepertinya Tuhan juga dilarang hadir. Bahkan barangkali lebih durhaka lagi, Tuhan justru diusir dari bumi Cina. Sehingga para penguasa bebas bertindak dan berlaku tanpa dihalang-halangi apapun. Manusia tak lagi punya moral, karena memang tak ada nilai-nilai moral disana. Kanibalisme Yunani kuno, kembali di praktekkan di Beijing. Ribuan mahasiswa Cina tergeletak tanpa nyawa memenuhi lapangan Tienanmen serta jalan-jalan sepanjang kota Beijing. Mereka tertembak dan tergilas oleh peluru dan tank tentara divisi 27, yang diperintahkan menyerang oleh Deng Xiaoping dan kawan-kawannya.

Kanibalisme divisi 27 tentara Cina di Beijing awal Juni ini membuat orang bertanya: "Masih adakah harga seorang manusia Cina? Jika masih, barangkali tak seharga dengan seekor tikus sawah yang dianggap sebagai hama sehingga harus dimusnahkan. Manusia lalu dianggap hama yang membahayakan eksistensi para penguasa serta kepolitikan negara komunis terbesar itu.

Di Indramayu, setiap petani memburu tikus, dan membantainya dan berlomba mengumpulkan bangkai tikus. Bangkai tikus-tikus itu justru punya harga. Kulitnya diambil lalu dikeringkan kemudian dijual sebagai komoditi baru bagi penambahan penghasilan petani.

Di Cina, para mahasiswa yang dibantai dikumpulkan di lapangan Tienanmen, kemudian di bakar agar tak ada bekas yang bisa mendorong reaksi serta simpati rakyat Beijing. Disamping untuk menghilangkan bukti kekejaman para pemimpin Cina yang memerintahkan tentara membantai mahasiswa-mahasiswa itu. Para mahasiswa itu tak punya harga sama sekali, lebih berharga seekor tikus di Indramayu dari pada seorang mahasiswa di Beijing.

Kebebasan dan demokrasi memang mahal harganya. Untuk membangun suatu kehidupan demokrasi, memang harus ada pengorbanan. Apalagi kebebasan yang merupakan bagian paling hakiki dari pada demokrasi, harus ditebus dengan harga yang paling mahal.

Kebebasan, kemerdekaan dan demokrasi adalah sebuah kerangka politik yang selalu menjadi kerinduan setiap orang. Pada tingkat pertama keinginan untuk bebas; dengan kebebasan itu diperjuangkanlah kemerdekaan; pada tingkat berikut, setelah merdeka orang lalu berkemauan untuk membangun suatu kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu sendiri bermacam bentuknya; ada demokrasi liberal (negara-negara Barat), demokrasi rakyat (Pakistan jamannya Ali Bhutto) dan demokrasi ala negara-negara Eropa Timur serta demokrasi Pancasila di Indonesia. Pilihan demokrasi yang dikehendaki para mahasiswa Cina itu belum diketahui. Nampaknya mereka menghendaki demokrasi liberal seperti yang dipraktekkan di negara-negara Barat, utamanya di Amerika. Karena dewasa ini ribuan mahasiswa Cina sedang mengikuti kuliah diberbagai perguruan tinggi di sana. Bahkan sudah ada yang kembali ke Beijing.

Barangkali terlalu pagi, para mahasiswa itu memulai gerakan pro demokrasinya. Mereka belum menyiapkan kondisi masyarakat yang dapat mendukung gerakan pro demokrasinya. Nampaknya gerakan pro demokrasi itu diilhami Perestroika dan Glasnost dari Gorbachev di Uni Sovyet. Soalnya apa yang terjadi di Kremlin, sulit diterapkan di Beijing, walau keduanya adalah sama-sama negara komunis terbesar di dunia. Malah mereka adalah panutan bagi negara komunis lainnya di dunia; sama-sama punya pengikut. Di Kremlin, gerakan pembaharuan justru datang dari penguasa tertinggi Sovyet. Itupun masih banyak tantangan, dari sesama penguasa.

Gorbachev yang ingin melakukan pembaharuan mendapat tantangan keras dari kamradnya yang menganut aliran keras dan konservatif. Di Cina, sebaliknya justru penguasa yang menentang pembaharuan. Mahasiswa yang berkeras menginginkan pembaharuan politik. Akibatnya, penguasa yang memiliki sejumlah alat penindas terus menumpas dan menindas gerakan pembaharuan mahasiswa itu.

Satu hal yang pasti, para mahasiswa itu telah memulai sesuatu yang tak pernah dibayangkan bakal terjadi di negeri tirai besi itu. Mereka mulai dengan pengorbanan yang cukup besar. Mereka mulai membuka cakrawala baru dalam tata kehidupan bermasyarakat di Cina, walau harus membayar dengan harga mahal.

Jadilah para mahasiswa Cina itu Sysyphus dalam cerita Yunani kuno, yang mati karena mencari kebebasan dan keadilan. Dia dihukum melempar batu sebesar pelukannya sendiri keatas sebuah bukit. Dengan harapan batu itu bisa melewati bukit, agar dia dibebaskan dari hukuman. Tetapi sial baginya, batu itu berbalik jatuh menimpa kepalanya. Matilah Sysyphus pencari kebebasan dan keadilan. ☐ PT

Digitized by Google

Dua Hari di Bumi Nyiur Melambai

"Menggugah Semangat Cokolele"

Ketua Umum DPP GOLKAR, 9-10 Juni lalu melakukan kunjungan kerja ke daerah kebanggaan GOLKAR yaitu Sulawesi Utara. Ketua Umum dan rombongan menumpang pesawat Garuda 740. Setibanya di Bandara Sam Ratulangi, Ketua Umum disambut oleh CJ Rantung, Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara dan Ketua DPD GOLKAR setmepat dengan upacara yang sangat sederhana. Kemudian dilanjutkan ke Masjid Raya Ahmad Yani Manado, untuk Sholat Jum'at bersama-sama masyarakat muslimin dan muslimat Kodya Manado. Dalam kesempatan itu Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono memberikan sumbangan 5 juta rupiah untuk Masjid Ahmad Yani yang sedang dalam perbaikan.

Selepas sembahyang Jum'at, Ketua Umum menuju Cottage Malalayang untuk menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) GOLKAR Tingkat I dan II se Sulawesi Utara untuk membuka dan sekaligus memberikan pengarahan.

Rakorda yang baru pertama kali diadakan sejak Musda ke IV tahun 1988 yang lalu itu penuh rasa kekeluargaan. Diantara mereka sesama pengurus DPD dan anggota FKP DPRD saling memeprkenalkan diri. Suasana demikian pada hakekatnya juga sejalan dengan diadakannya Rakorda yang salah satunya juga merupakan forum silaturrahmi. Rakorda, menurut Ketua Panitia Penyelenggara akan dipergunakan untuk saling menyampaikan informasi timbal balik mengenai perkembangan dan kebijakan organisasi. Disamping juga akan membahas dan menginventarisir berbagai permasalahan di daerah Sulawesi Utara yang menyangkut kondisi daerah mengenai

Digitized by Google

perkembangan sosial politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan seni budaya. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan organisasi dalam memantapkan pelaksanaan program Tri Sukses GOLKAR.

Sulawesi Utara yang juga merupakan salah satu kantongnya GOLKAR dari pemilu ke pemilu —sejak tahun 71— selalu memberikan andil yang sangat memuaskan bagi perolehan suara GOLKAR, yaitu rata-rata diatas 80 persen. Bahkan pada pemilu 87 lalu Sulut dapat mempersembahkan 5 kursi DPR-RI dari 6 kursi yang diperebutkan, dengan mengantongi suara 87,52 persen, yang berarti melampaui sasaran target Nasional.

Menginventarisir berbagai permasalahan Sulawesi Utara

Prestasi yang demikian gemilang ini tetap akan dipertahankan dalam Pemilu 1992 nanti dan bahkan ingin ditingkatkan lagi. Tekad yang membara ini dikemukakan oleh FPD Lengkey, Ketua DPD GOLKAR Tk I Sulut dihadapan Ketua Umum GOLKAR dan disaksikan seluruh kader-kader GOLKAR Sulut yang saat itu mengikuti Rakorda.

Tekad yang membara itu bukannya tanpa alasan, mengingat keberhasilan program dan prestasi pembangunan Sulut yang dicapai selama ini membawa dampak semakin membaiknya tingkat perekonomian masyarakat. Karenanya seluruh warga GOLKAR Sulut bersama masyarakat bertekad akan selalu menjaga dan meningkatkan suasana yang telah stabil dan dinamis tersebut, yang pada gilirannya akan memberikan jaminan dalam mencapai keberhasilan Pelita V dan terciptanya landasan yang kokoh kuat pembangunan, termasuk didalamnya mensukseskan Pemilu 1992 sesuai dan seirama dengan program Tri Sukses GOLKAR.

Karenanya kedatangan Ketua Umum DPP GOLKAR dan rombongan ke daerah Nyiur Melambai ini dilukiskan oleh Ketua DPD sebagai angin segar yang akan menggugah warganya untuk lebih meningkatkan peran serta dan pengabdiannya dalam upaya dan usaha mencapai sasaran GOLKAR, yang berlandaskan pada perjuangan di segala aspek kehidupan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Sulut CJ Rantung juga mengemukakan bahwa, besarnya dukungan dan kepercayaan masyarakat Sulawesi Utara terhadap GOLKAR dapat dimengerti. Karena program-program yang ditampilkan GOLKAR dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, ujarnya.

Namun ia mengingatkan, tantangan-tantangan yang dihadapi GOLKAR

Menjaga dan meningkatkan suasana yang telah stabil dan dinamis

Digitized by Google

Kampus Universitas Sam Ratulangi

masa mendatang menuntut pula tanggung jawab yang semakin besar dalam mengemban kehidupan Negara. Karenanya GOLKAR dituntut untuk menyiapkan kader-kadernya yang berkualitas dan berkemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas nasional.

Kader yang demikian itu, menurut CJ Rantung, bukan saja kader yang harus bersemangat tinggi untuk mensukseskan program GOLKAR tetapi juga harus mampu untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Kualitas dan kemampuan yang demikian itu tidak hanya diperlukan untuk memenangkan GOLKAR dalam Pemilu 1992, dan sekaligus bermakna memperkokoh kerangka landasan pembangunan nasional dalam rangka menyongsong kerangka landasan dalam Repelita VI yang akan datang.

Sejalan dengan itu Ketua Umum DPP GOLKAR dalam pengarahannya menyatakan, tuntutan masyarakat yang makin kualitatif itu adalah menjadi tanggung jawab GOLKAR. Kemudian Ketua Umum menghimbau kepada kader-kader GOLKAR, agar senantiasa dapat secara terus menerus menampung, memadukan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. Sehingga kita terus bergerak maju mengembangkan diri sebagai kekuatan sosial politik yang tangguh, yang bukan hanya tangguh untuk dirinya sendiri tetapi juga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelopor dan pembaharu dalam menyongsong budaya politik baru, ujarnya.

Lain dari itu Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam pengarahannya juga memaparkan berbagai topik mengenai: Pendidikan politik rakyat; Pemantapan mekanisme organisasi; Dapur pengolahan data; Kemandirian GOLKAR; Budaya terus terang. Dan langkah-langkah persiapan dalam rangka pemenangan Pemilu 1992.

Khusus mengenai pemenangan Pemilu 1992, Ketua Umum menekankan perlunya sedini mungkin melakukan langkah-langkah, adanya perkiraan keadaan berikut peta politik, baik secara nasional maupun per daerah, yang berisikan kenyataan kondisi aktual, yang berkenaan dengan GOLKAR dan kedua Parpol serta kondisi sosial politik. Dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, untuk ditelusuri secara lebih komprehensip.

Untuk keperluan tersebut menurut Ketua umum, sejak saat ini perlu di deteksi dan diikuti secara cermat berbagai gejala yang muncul dan kecenderungan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hubungan berbangsa dan bernegara yang mempunyai bobot politis, psychologis, seperti peningkatan dan perubahan kemauan/tuntutan (rising demands), kebosanan, kecenderungan kepada sesuatu mode baru yang merasa kasihan kepada yang kalah. Kecenderungan ini menurut Wahono yang paling menonjol adalah kalangan generasi muda, dengan berbagai persepsi mereka terhadap dunia politik pada umumnya dan khususnya terhadap pemerintah dan lebih khusus lagi terhadap GOLKAR. Untuk itu perlu adanya program khusus yang mengantisipasi kelompok calon pemilih baru ini.

Demikian juga perlu dimulai adanya usaha penggalangan terhadap kelompok sasaran tertentu yang tergolong strategis dan diperkirakan rawan, seperti kalangan remaja, kampus, rohaniawan, budayawan, cendikiawan, wanita, pekerja, tani dan nelayan, serta kelompok-kelompok sasaran lain yang selama ini telah menjadi kekuatan yang sangat menentukan bagi GOLKAR, pesan Ketua Umum.

Usai pengarahannya pada Rakorda tersebut Ketua Umum berkenan me-

Pembudayaan nilai-nilai Demokrasi Pancasila

Digitized by Google

mukul Tetengkoran (kentongan) dan membagi-bagikan cenderamata berupa jam tangan berlogo GOLKAR kepada Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua-ketua DPD GOLKAR se Sulut dan mantan Ketua DPD Frids Sumampouw.

Sebelum meninggalkan tempat acara, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan rombongan yang terdiri dari Ibu Wahono, Moch Tarmudji, Rachmat Witoelar, Andi Mochtar, Freddy Latumahina, Eric Samola, Ny. Doke Samola, Ny Tati Darsoyo, Alfian dan mantan Gubernur Sulut pertama A. Baramuli, disuguhi tarian tradisional Sulawesi Utara, yang dibawakan gadis-gadis Manado nan cantik dengan riang gembira. Demikian pula dalam acara Halal Bi Halal dengan masyarakat Sulawesi Utara, malam harinya di Gedung Pingkan Matindas, Ketua Umum seusai memberikan sambutan, kembali dihibur dengan tari-tarian tradisional yang telah melekat dengan masyarakat setempat yang bernama tari "Mamanua", tarian ini mengisahkan tentang percintaan manusia jelata dengan bidadari. Di Jawa tarian ini terkenal dengan nama "Jaka Tarup Nawangwulan".

Hari kedua yang merupakan hari terakhir kunjungannya di Manado, Wahono selaku Inspektur Jenderal Pembangunan memberikan ceramah umum di Kampus Universitas Sam Ratulangi, yang dihadiri ratusan mahasiswa civitas akademika Sam Ratulangi dan IKIP Manado.

Ceramah umum yang juga baru pertama kalinya dilakukan Irjenbang semenjak ia terpilih menjadi Ketua Umum DPP GOLKAR itu menguraikan secara panjang lebar tentang seluk beluk pembangunan nasional semenjak Orde Baru hingga mengancik pada tahap awal dari Pelita V, dalam menyongsong masuknya proses tahap tinggal landas pada Pelita VI.

Ceramah umum yang lebih menggugah semangat 'cokolele' bagi para mahasiswa di Manado yang notabene mempunyai karakteristik tersendiri ini, dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih cerah, yang menuntut keterlibatan seluruh masyarakat termasuk para mahasiswa wajib mendukung usaha pembangunan itu.

Karenanya, melalui kesempatan itu Wahono menghimbau agar para mahasiswa, para civitas akademika, kita semua, untuk memberi urunannya masing-masing. Agar terpancar arus semangat baru kebangsaan bangsa kita, terutama di kalangan generasi muda dengan mahasiswanya.

Wahono melihat, sekarang ini ada suatu getaran baru dalam nasionalisme bangsa kita sedang bergerak dengan langkah yang jelas dan pasti. Menurutnya ini merupakan proses lanjutan dari pembudayaan nilai-nilai demokrasi Pancasila kita yang sesungguhnya bertumpu pada persenyawaan antara nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai demokrasi, dalam rangkaian kesatuannya dengan nilai-nilai dari tiga sila lainnya.

Jati diri

Di bagian lain dari ceramah Wahono yang beranjak dari perjuangan GOLKAR yang tidak dapat dipisahkan dari usahanya untuk mendukung pembangunan bangsa di semua segi itu, mengatakan, guna menjemput masa depan yang lebih cerah, maka perguruan tinggi sepantasnya mengambil peran yang tepat. Menggunakan nalar intelektualitasnya dan nilai akademisnya mengambil peran untuk kemajuan bangsanya. Dengan kesiapan diri kaum muda menjemput tantangan itu, jalan yang masih panjang, rentang waktu yang masih terbuka luas, maka peningkatan harkat manusia Indonesia tidak akan merupakan ganjalan bagi kehidupan. Namun selagi harkat manusia masih merupakan masalah, selayaknya kaum muda tidak hanya berteriak atau mencaci maki pihak lain. Sebab masalah itu sendiri juga melingkupi siapa yang mencaci atau siapa yang berteriak. Akhirnya jati diri, identitas bangsa yang terpenting untuk dijaga dan terpelihara, ujarnya.

Mengakhiri ceramah ilmiah dan tanpa adanya tanya jawab itu Wahono mengingatkan letak dan fungsi sebagai warga perguruan tinggi untuk menyumbangkan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara dalam melaksanakan pembangunan.☐ (WT)

Ceramah umum Wahono dengan civitas Akademi Sam Ratulangi

Digitized by Google

Kunjungan Kerja Ketua Umum GOLKAR di Sumatera Barat

Seminggu setelah melakukan perjalanan kunjungan kerja ke Menado, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono kembali melanjutkan perjalanannya ke Padang dan Bukittinggi, Sumatera Barat. Memasuki bumi Padang di Bandara Tabing, Ketua Umum DPP GOLKAR beserta rombongan disambut kader-kader GOLKAR daerah setempat dengan sambutan sekapur sirih —yaitu sambutan yang bersifat tradisi masyarakat Minangkabau terhadap setiap tamu kehormatan yang datang ke daerah orang awak ini—.

Dari bandara robongan DPP GOLKAR berangkat menuju kediaman gubernur Sumatera Barat untuk istirahat. Wahono memulai kunjungan kerja ke Panti Asuhan Al Hidayah di Kalumbuk, Padang, dengan mengadakan peninjauan gedung panti asuhan tersebut. Dalam peninjauan pembangunan gedung ini, Wahono ketika memberi kata sambutan mengatakan, bahwa mengelola panti asuhan, membina dan mengasuh anak-anak asuh merupakan tugas yang berat namun mulia, karena mengasuh anak-anak ini menyangkut nilai-nilai yang fundamental dan mempunyai posisi strategis. Yaitu, anak-anak dalam memasuki masa depan sebagai generasi muda yang dapat diandalkan untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Apalagi anak-anak sekarang ini, kata Wahono, adalah produk generasi masa lalu. Sedangkan generasi yang akan datang merupakan cerminan generasi masa kini. Oleh karena itu, tekad Yayasan Panti Asuhan Al Hidayah untuk mendirikan panti asuhan sekaligus mengasuh, membimbing dan membina anak-anak ini memerlukan dana, upaya, pengabdian secara sukarela dan pengorbanan. Melihat kenyataan yang demikian ini DPP GOLKAR sangat bangga dan menghargai atas prakarsa dan tekad pengasuh yayasan panti asuhan ini. Dan DPP GOLKAR mengajak kader-kader GOLKAR membantu kegiatan Al Hidayah ini.

Sementara itu bentuk bantuan yang diberikan oleh DPP GOLKAR kepada panti asuhan ini berupa uang sebesar Rp 10 juta. Sumbangan ini, menurut Wahono, sebagai upaya DPP GOLKAR untuk membantu meringankan beban para pengasuh Panti Asuhan Al Hidayah dalam mewujudkan cita-citanya.

Setelah selesai mengadakan peninjauan gedung yayasan panti asuhan yang diketuai Ny. Hajjah Rafki Ismail ini, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan rombongan meneruskan perjalanan sejauh lebih kurang 100 kilometer dari kota Padang menuju ke Bukittinggi. Sebelum menunaikan tugas-tugas mulia, rombongan DPP GOLKAR yang dipimpin langsung oleh Wahono bersama pengurus DPD GOLKAR Tingkat I, II dan kader-kader GOLKAR lainnya yang menganut agama Islam menjalani sholat Jum'at di Masjid Agung Tengah Sawah Bukittinggi.

Kemudian sepulang dari sholat Jum'at, rombongan DPP GOLKAR istirahat sebentar untuk makan siang di Gedung Tri Arga Bukittinggi. Selanjutnya berangkat lagi menuju Desa Biaro, Kecamatan Empat Angkat Tjandoeng, Kabupaten Agam, untuk mengadakan pertemuan dan peninjauan Pondok Pesantren Tjandoeng serta meletakkan batu pertama lanjutan pembangunan Gedung Madrasah Tarbiyah Islamiyah. "Betapa besar dukungan dan tanggung jawab warga Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah terhadap perjuangan GOLKAR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional untuk membangun manusia yang seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia secara penuh tanggung jawab. Karenanya, pengembangan dan peranan keagamaan ini mengandung arti penting di dalam hidup dan kehidupan manusia sehingga kaum muslimin dan para ulama memikul tanggung jawab yang besar untuk mendorong umat manusia, agar

Digitized by Google

Mengasuh anak-anak mengandung nilai fundamental dan strategis

potensinya dapat ditumbuhkembangkan dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Upaya untuk membangkitkan potensi umat Islam tergantung pada nilai-nilai agama yang merupakan pembangkit dan jiwa pembangun kekuatan rohani serta kekuatan spiritual masyarakat bangsa Indonesia," tegas Wahono di depan pengurus Pondok Pesantren Tjandoeng dan siswa Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah.

Di lokasi pondok pesantren yang didirikan oleh JMT. Sjec Soelaiman AR Rasoeli Tjandoeng, Wahono yang tampil dengan gaya hidup yang sangat merakyat ini merasakan suatu kehangatan kekeluargaan antara warga GOLKAR dengan warga Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah. Suasana ini memang telah tercipta sudah lama. Bahkan, DPP GOLKAR dibawah pimpinan Ketua Umum Amir Moertono, Sudharmono dan Sukowati pun pernah mengunjungi pondok pesantren ini. Untuk itu, kehadiran Wahono yang bersifat kunjungan kerja sekaligus melaksanakan konsolidasi organisasi ini tidak asing lagi. Dan kehadirannya ini merupakan tindak lanjut daripada konsolidasi organisasi yang memang sudah tercipta.

Dalam kaitan ini Wahono mengharapkan kepada anak-anak didik Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah yang berjumlah 896 orang itu, agar mampu menjadi kader-kader bangsa yang kokoh mental ideologinya dan spiritualnya, serta dapat diandalkan sebagai kader-kader pembangunan dan Pancasila sehingga nantinya mampu meneruskan pembangunan bangsa dan negara.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPD GOLKAR Tingkat II Agam Moh. Thamrin Datuk Penghulu Basa mengatakan, bahwa upaya menyalurkan aspirasi politik warga besar Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah ini ke GOLKAR adalah atas dasar saran almarhum pendiri Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah Buya JMT Sjec Soelaiman AR Rasoeli Tjandoeng sebelum beliau meninggal dunia. Saran ini secara tidak langsung merupakan amanat almarhum agar Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah dititipkan ke GOLKAR. Atas dasar ini maka penyaluran aspirasi politik warga besar ini kepada GOLKAR tidak dapat diragukan lagi dan terbukti dalam Pemilu yang lalu, GOLKAR memperoleh suara cukup besar di daerah kabupaten ini.

Oleh karena itu, untuk memperkuat jalinan dan ikatan bathin yang lebih kokoh antara GOLKAR dengan warga Muhammadiyah Islamiyah, maka Wahono seperti di Panti Asuhan Al Hidayah telah memberikan sumbangan pembangunan Gedung Madrasah Tarbiyah Islamiyah sebesar Rp 10 juta dan langsung meletakkan batu pertama lanjutan pembangunan gedung tersebut.

Bukan Underbouw

Perjalanan kunjungan kerja Wahono selama dua hari dari 16 sampai 17 Juni lalu itu, padat dengan berbagai kegiatan kunjungan dan pertemuan-pertemuan dengan jajaran GOLKAR di Padang dan Bukittinggi. Pada pertemuan dengan jajaran GOLKAR Sumatera Barat bagian utara di Gedung Tri Arga, Wahono menyambung pernyataan Menteri Dalam Negeri Rudini selaku pembina politik di Indonesia tentang keberadaan dan kebebasan anggota Korpri untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol atau GOLKAR. Dalam kesempatan tersebut Wahono menjelaskan, Korpri adalah kader-kader yang tangguh dan perlu didukung terus dalam melaksanakan pengabdiannya terhadap pembangunan. Secara historis dan kejuangannya kader-kader Korpri ini merupakan mitra yang tangguh dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. Kendati demikian, antara GOLKAR dan Korpri ini tidak ada jalinan organisatoris karena Korpri bukan sebagai underbouw GOLKAR dan sebaliknya GOLKAR bukanlah underbouw Korpri. Apalagi Undang-undang Parpol dan GOLKAR mengamanatkan, bahwa keanggotaan kekuasaan sosial poli-

Kehangatan suasana kekeluargaan antara GOLKAR dengan masyarakat

Digitized by Google

Wahono menyampaikan sumbangan Rp 10 juta.

tik adalah sukarela, aktif dan bersifat perorangan. Karenanya, selama lima tahun terakhir ini GOLKAR secara konsekuen melaksanakan hal tersebut dan sejak 1984, GOLKAR telah mengadakan pendaftaran anggota secara sukarela, aktif dan perorangan dengan menghasilkan jumlah anggota sekitar 32 juta orang.

Sikap kesatriaan GOLKAR ini, menurut Wahono, dalam sejarah telah mampu membuktikan bahwa kebersamaan kader GOLKAR baik dari Korpri maupun bukan Korpri dapat mengatasi segala rintangan dan kendala yang menghadangnya. Dengan demikian sudah selayaknya agar jajaran GOLKAR dimana pun berada terus menerus merapatkan barisan dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan dengan seluruh jajaran Keluarga Besar GOLKAR dalam suasana yang penuh semangat kekeluargaan, keterbukaan dan demokratis. Sehingga keberadaan, fungsi dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan semakin dewasa, mandiri, berakar, berkualitas dan demokratis.

Pernyataan serupa ini pun disampaikan Wahono di depan jajaran GOLKAR Sumatera Barat bagian selatan di Gedung Bagindo Aziz Chan yang dihadiri Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Sumatera Barat Prof. Dr. Jamil Bakar, Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Sumatera Barat Gubernur Hasan Basri Durin.

Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono yang didampingi Ny. Mientarsih S. Wahono, Ketua DPP GOLKAR Moch Tarmoedji, Sekjen DPP GOLKAR Ir. Rachmat Witoelar, Wakil Sekjen DPP GOLKAR Dr. R. Suhadi, Wakil Bendahara DPP GOLKAR Ny. Tati S. Darsoyo, Ketua Departemen Penbitmassmed Zulharmans, Ketua Departemen Tenaga Kerja DPP GOLKAR Drs. Potsdam Hutasoit, Ketua Departemen Cendekiawan dan Hubungan Luar Negeri DPP GOLKAR Aulia Rachman, SH dan Ketua Departemen Litbang, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Alam DR. Alfian, dalam kunjungan kerja di Sumatera Barat ini selain meninjau tempat-tempat tersebut juga melakukan peninjauan keliling di RSU dr. Ahmad Muchtar di Bukittinggi dan Gedung DPD GOLKAR Tingkat I Sumatera Barat.☐ (DT)

Wahono Dialog Dengan Karakterdes

Setiap organisasi sosial politik hanya dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat apabila memiliki dan didukung oleh kader yang dapat diandalkan sebagai tulang punggung dan motor penggerak organisasi. Sedangkan GOLKAR sebagai organisasi sosial politik selalu mengupayakan diri untuk membina kader-kader yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Kendati demikian, sejumlah kader GOLKAR yang ada itu belum terbina dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam rangka mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan GOLKAR dalam masyarakat, maka GOLKAR memerlukan kader yang memiliki kualitas dan sangat potensial sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas berat dalam masyarakat untuk mencapai tujuan perjuangan GOLKAR.

Untuk mewujudkan cita-cita perjuangan GOLKAR, yaitu menuju kepada kemandirian, kedewasaan dan lebih mengakar di masyarakat, DPP GOLKAR periode 1988-1993 melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan Munas, yaitu meningkatkan kualitas kader melalui berbagai bentuk dan pola pengkaderan. Antara lain seperti yang diungkapkan Ketua DPP GOLKAR Jacob Tobing MPA, bahwa DPP GOLKAR telah siap melaksanakan Keputusannya tentang penyegaran kaderisasi di tingkat pedesaan di seluruh Indonesia. Sedangkan bentuk penyegarannya, misalnya berupa bagaimana cara memimpin rapat yang baik, bagaimana cara diskusi yang benar dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang kader.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono ketika melakukan kunjungan kerja ke Desa Biaro Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Juni lalu, sangat terkesan menyaksikan penampilan para kader-kader teritorial pedesaan setempat di acara Diskusi Antar Karakterdes Kecamatan se-Kabupaten Agam.

Diskusi yang diselenggarakan mulai 15 sampai 17 Juni dengan mengambil topik 'Masalah Ketenagakerjaan di Pedesaan' ini, dinilai Wahono, sebagai langkah kemajuan bagi kader-kader GOLKAR di tingkat pedesaan. Karena mereka sangat tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan di pedesaan, bahkan terampil dalam memberikan suatu jawaban terhadap perma-

Digitized by Google

Saling asih, asah dan asuh

salahan-permasalahan pedesaan sekaligus memberikan satu alternatif yang tepat guna menghadapi setiap permasalahan itu.

Dalam diskusi ini mereka mampu membahas masalah-masalah yang sesuai dengan persepsi mereka terhadap keadaan di pedesaan, antara lain mereka membicarakan mengenai lapangan kerja. Sebagaimana diketahui, masalah lapangan kerja ini merupakan masalah nasional. "Semua memikirkan bagaimana caranya memperluas lapangan kerja untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kerja, yang makin hari makin bertambah besar jumlahnya. Sebab pengangguran itupun dapat menimbulkan kerawanan," ujar Wahono dalam tatap muka dan dialog dengan peserta diskusi antar karakterdes tersebut.

Menurut pengamatan Wahono, diskusi itu ternyata menunjukkan nilai-nilai kebersamaan, kekompakan dan karakteristik masyarakat dan kader GOLKAR di Minangkabau. Baik pria maupun wanitanya — terutama dari unsur generasi muda — perlu dibina agar nantinya dapat diharapkan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari daerah. Karenanya, generasi muda semangatnya perlu digairahkan, ditumbuhkan, sehingga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Apalagi seorang kader itu merupakan ujung tombak terdepan yang memiliki dedikasi, kualitas tinggi dan terpercaya untuk ikut serta memimpin perjuangan dan misi GOLKAR. Perjuangan GOLKAR adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik dari segi materiil maupun spirituil. Di samping itu sudah menjadi kewajiban GOLKAR untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat supaya sadar politik, hak-hak dan kewajibannya demi terjelmanya Demokrasi Pancasila, tumbuhnya tanggung jawab serta menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam derap pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui, keberhasilan pembangunan telah dirasakan manfaatnya. Disamping itu semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas hasil pembangunan itu. Karenanya, kata Wahono, sudah menjadi kewajiban kita terutama kader-kader GOLKAR untuk melibatkan diri dalam meningkatkan keterampilannya dan pengetahuannya melalui diskusi semacam ini, yaitu yang saling asih, asah dan asuh. Sehingga inilah cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas kader sebagai tokoh panutan di masyarakat.

Dialog dengan Karakterdes

Acara diskusi ini diikuti tiga kelompok yang berasal dari Karakterdes Desa Lasi Kecamatan Perwakilan Empat Angkat, Desa Kaso Kecamatan Baso dan Desa Biaro Kecamatan Empat Angkat Tandjoeng. Dalam kesempatan ini pula Wahono melakukan dialog langsung dengan para karakterdes peserta diskusi tersebut, dimana ketika Ketua Kelompok Karakterdes Desa Lasi Kecamatan Perwakilan Empat Angkat Tandjoeng bernama Berna dengan Nomor NPAG 0304002 3618 ditanya oleh Wahono tentang bentuk Desa Lasi sebagai desa swakarya atau swasembada, maka Berna menjawab bahwa desanya adalah desa swakarya. Kemudian sesuai dengan harapan Wahono agar desa ini ditingkatkan menjadi desa swasembada, kata Berna, harapan Ketua Umum DPP GOLKAR akan diupayakan di masa yang akan datang. Caranya adalah dengan adanya karakterdes seperti sekarang ini diharapkan kepada generasi yang akan datang dan generasi tua dapat mempergunakannya ilmu yang diperolehnya melalui pendidikan di perguruan tinggi maupun tingkat SLTA, agar mereka ini dapat mentrapkannya di desa-desa yang mereka tempati atau di tempat kelahirannya sendiri.

Sedangkan Wahono menanggapi penyelenggaraan diskusi karakterdes ini dapat diharapkan sebagai wahana untuk mengeluarkan ide-ide dan melahirkan pengusaha-pengusaha kecil yang dapat memberikan serta membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja, sebagai langkah baru untuk mengurangi pengangguran yang memang sudah menjadi masalah nasional.

Pada giliran Ketua Kelompok Karakterdes Desa Kaso Kecamatan Baso, Edi Surya dengan nomor NPAG 0303 0019144 ketika ditanya Wahono tentang keberadaan wadah Karang Taruna, ia menjawab, bahwa ia sebagai Ketua Karang Taruna telah mencoba untuk menghimpun tenaga kerja atau pemuda di desanya antara lain mereka diasuh dalam kegiatan konveksi pakaian. Sehingga nanti para tenaga kerja atau pemuda ini dapat mandiri dengan adanya konveksi ini dan juga dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Dengan demikian, langkah-langkah yang ditempuh ini dapat memberi jawaban atau jalan keluar terhadap permasalahan ketenagakerjaan di kalangan masyarakat pedesaan.

Selanjutnya dalam mengakhiri acara tatap muka dan dialog dengan para karakterdes se Kabupaten Agam ini, Wahono memberi hadiah mesin jahit kepada ketiga peserta diskusi itu dengan harapan dapat membantu permasalahan ketenagakerjaan di pedesaan. Adapun, diskusi yang bersifat lomba ini k eluar sebagai juara pertama adalah Kelompok Karakterdes Desa Kaso Kecamatan Baso dengan meraih nilai 2010, kedua Kelompok Karakterdes Desa Lasi Kecamatan Perwakilan Empat Angkat dengan nilai 2002,50 dan ketiga adalah Kelompok Karakterdes Desa Biaro Kecamatan Empat Angkat Tandjoeng dengan nilai 1437.☐ (DT)

Digitized by Google

Sikap Keterbukaan Untuk Menampung Aspirasi Rakyat

GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik terbesar berupaya meningkatkan dialog timbal balik dengan pemerintah. Hal ini sebagai sikap GOLKAR dalam mendukung setiap program pemerintah dan sekaigus memberikan kontrol sosial yang bertanggung jawab terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah, baik yang menyangkut kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebijaksanaan pemerintah tentang kenaikan tarif listrik — GOLKAR melalui kader-kadernya yang duduk sebagai anggota Fraksi Karya Pembangunan di DPR — telah menjabarkan sikap tersebut. Ini merupakan wujud sikap budaya keterbukaan GOLKAR dalam menentukan keberadaannya sebagai kekuatan sosial politik terbesar untuk menampung aspirasi rakyat serta mengembangkannya.

Kebulatan tekad GOLKAR ini terungkap jelas saat DR. Alfian, Ketua Departemen Litbang, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Alam DPP GOLKAR tampil sebagai pembicara tunggal dalam diskusi di ruang pertemuan DPD GOLKAR Tingkat I Padang, Sumatera Barat.

Dalam diskusi ini Alfian membenarkan bahwa keterbukaan itu bukan sesuatu yang baru atau asing bagi bangsa Indonesia termasuk bagi masyarakat di Minangkabau. Karena, sejak dari jaman nenek moyang sampai sekarang, kita sudah bergelut dengan suasana seperti ini. Bahkan, hal ini merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Untuk itu, bila kita tidak berhasil menangkap hati nurani masyarakat, maka akan dapat menimbulkan problematik di dalam kehidupan bersama. Biasanya yang menyuarakan aspirasi itu selalu mahasiswa atau kaum cendekiawan. Sebab mereka itu berupaya mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Terkait permasalahan seperti ini dengan melihat keterangan-keterangan pemerintah akhir-akhir ini memang cukup menggembirakan. Dimana terdapatnya pemahaman yang sungguh-sungguh tentang getaran baru di dalam kehidupan bersama ini, dan tentang keinginan agar suasana keterbukaan serta kualitas demokrasi kita dikembangkan dan ditingkatkan antara lain melalui peningkatan fungsi DPR. Begitupun menurut keterangan Kepala Bakin Mayjen Soedibyo jelas bersikap simpati sekali terhadap para mahasiswa, bahwa mereka itu sebenarnya menyalurkan aspirasinya dengan baik, apakah melalui saluran akademis atau saluran-saluran lain yang tepat.

Kita sudah bergelut dengan suasana keterbukaan sejak lama

Alfian

Sebaliknya, kita tidak mampu atau berhasil menyalurkan aspirasi itu dengan baik maka bangsa kita bisa dihadapkan kepada suasana konflik yang berbahaya seperti yang dihadapi oleh Cina sekarang ini. Itu kehendak hati nurani masyarakat tidak bertemu dengan kebijaksanaan yang ada dari atas. Yang repot, adalah suasana itu menjadi obsesi di kalangan mahasiswa sehingga sulit untuk menarik kembali. Oleh karena itu, sebelum suasana itu menjadi obsesi, perlu adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang melegakan hati. Jadi, masalah di RRC sekarang terjadi karena keterlambatan dalam memahami aspirasi masyarakat yang datangnya begitu cepat dan akibatnya penguasa merasa terdesak. Bilamana terdesak tentunya penguasa itu tetap berpegang pada kekuasaannya bagaimanapun juga. Konflik ini melahirkan suasana yang tidak menguntungkan dan merusak kehidupan suatu bangsa. Contoh lain, adalah Gorbachev dengan prestorika dan glasnostnya, di sini dia kelihatan berhasil dalam memahami aspirasi baru dan menyelami apa yang terkandung di dalam hati nurani masyarakat. Untuk itu, dia cepat mengambil kebijaksanaan yang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Sehingga dia mendapat dukungan luar biasa dari rakyat Soviet. Jadi, kepandaian ini adalah art of politic atau seni dalam politik. Tapi bagaimana pun pengendalian ini merupakan kunci dari semua ini. Bilamana mereka ingin keterbukaan itu cepat dan menjadi obsesi, itu akan rusak. Atau, bilamana ada yang berobsesi dengan mempertahankan pada sikap kecurigaan terhadap keinginan-keinginan yang murni dari masyarakat, itupun bisa membahayakan kehidupan bersama.

Kunci daripada itu, kata Alfian, adalah melakukan dialog terus mene-

Digitized by Google

rus secara terbuka dan secara rasional persuasif. Adapun dialog-dialog seperti ini ternyata telah dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah seperti Menteri Moerdiono, dan Irjenbang Wahono dengan mahasiswa di kampus. Upaya dialog itu bukan hanya dikembangkan di kalangan masyarakat kampus saja melainkan juga di kalangan kelompok strategis di dalam masyarakat, seperti pemuda, cendekiawan dan usahawan. Dua hal inilah kira-kira yang sekarang sedang berkembang dan terus berkembang di masyarakat dalam membudayakan sistem politik Demokrasi Pancasila. Tinggal apakah kita cukup arif dan bijaksana dalam membacanya," kata Alfian.

Kepanjangan tangan

Ketika seorang peserta diskusi menanyakan perlu adanya tim ahli bagi DPR, Alfian menjawab, keinginan itu sudah ada sejak lama dan bukan hal baru. Persoalannya sekarang adalah dengan adanya tim ahli itu memerlukan dana yang besar sekali. Padahal kedudukan anggota fraksi-fraksi itu merupakan kepanjangan tangan dari organisasi politik yang bersangkutan. Oleh karena itu, tim ahli yang perlu diperkuat barangkali di induk organisasinya atau DPP. Sedangkan di DPP GOLKAR hal itu sudah terlihat jelas, bahwa DPP ke bawah sudah kelihatan departemen-departemen dan biro-bironya dan bidang-bidangnya. Sehingga, sekarang ini tinggal mengembangkannya. Misalnya, DPP GOLKAR sedang mengupayakan masing-masing koordinator bidang (koorbid) yang dikepalai oleh salah seorang ketua memiliki satu kelompok kerja tersendiri. Lalu setiap departemen memiliki tim kerja sendiri, dimana seperti departemen Litbang, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Alam telah menyusun dua tim kerja yang terdiri dari 15 samap 20 orang ahli berbagai macam bidang — dari ahli sosial budaya, lingkungan hidup sampai ahli energi. Hasil daripada tim kerja ini tentunya dapat dipergunakan oleh siapa saja. Baik FKP maupun pimpinan GOLKAR dan itu tergantung kesepakatan organisasi politik itu sendiri. Tapi ide tentang tim ahli itu bukan sesuatu hal yang baru.

Sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan seperti yang diutarakan oleh tokoh KNPI Padang Suatri, tambahnya, sebenarnya di dalam masyarakat manapun itu yang memegang pemerintahan (eksekutif) biasanya mengetahui hampir semua permasalahan. Mereka mempunyai data-datanya karena ada lembaga-lembaganya. Oleh karena itu, kecenderungan di negara-negara modern peranan eksekutif makin membesar bukannya makin mengecil. Dan ini dapat dilihat di negara Amerika, Inggris dan Jepang. Sehingga apa yang disebut perwakilan rakyat itu mampu mengawasi hal-hal yang strategis. Jadi, kalau ingin menyaingi pemerintah dalam soal data ahlinya bisa saja. Tapi, biasanya lembaga-lembaga pemerintah itu datanya yang banyak memiliki. Itu suatu kenyataan terutama di Indonesia. Umpamanya kita ingin mengetahui tentang masalah energi tentunya paling banyak tahu adalah Departemen Pertambangan dan datanya semua ada di situ. Pemerintah atau eksekutif mempunyai sejumlah data yang besar sekali. Seandainya DPR menginginkan seperti demikian, itu bukan suatu proses yang bisa sebentar. Coba lihat apa yang disebut Kongres Amerika — perpustakaan Kongres itu luar biasa, tapi hal ini bukan kemarin dibentuk. Itu sudah ratusan tahun atau tradisi lama dan bukan berarti tidak bisa dimulai. Perpustakaan sudah mulai dikembangkan, tapi tidak bisa begitu saja jadi. Ada proses pentahapan di dalam permasalahan ini, juga anggota DPR yang telah dikemukakan itu sebagian mungkin kualitasnya belum memenuhi syarat.

Sementara di Indonesia masalahnya ahli-ahli itu biasanya banyak terpakai oleh pemerintah. Jadi realita-realita ini yang merupakan faktor objektif yang mempersulit idealisasi atau mengkongkritkan apa yang lebih ideal dalam diri masyarakat. Sedangkan pada permasalahan kenaikan tarif listrik, aspirasi masyarakat dalam hal ini semua tahu dan kadang-kadang ada dilema dalam tubuh GOLKAR sendiri. Kalau mau menyuarakan aspirasi masyarakat, tegas Alfian dalam diskusi, tentunya apa yang diucapkan oleh anggota-anggota FKP di dalam mengkritik pemerintah tentang kenaikan tarif listrik itu dapat dibenarkan. Tapi dilihat dalam hal mendukung pemerintah, itu juga merisaukan hati. Ini selalu ada dwifungsi yaitu bagaimana mencari keseimbangan yang wajar pada kedua fungsi tersebut.

"Di dalam UUD ada kata semangat penjelasannya. Bilamana semangat kebersamaan itu dikemukakan barangkali keresahan-keresahan itu tidak akan terjadi. Begitupun dengan adanya keinginan masyarakat mengapa hal itu tidak dikonsultasikan atau dikomunikasikan dahulu, tapi kan tidak semuanya bisa dikonsultasikan. Seperti yang diungkapkan Menteri Moerdiono, soal devaluasi kalau bocor kan tidak jadi devaluasinya. Jadi ada hal-hal yang memang dianggap relevan untuk dibicarakan bersama-sama, tapi walaupun bagaimana, itu merupakan suatu kejadian. Masalah tarif listrik ini barangkali akan menjadi semacam pelajaran untuk masa-masa akan datang, dalam hubungan antara kader-kader GOLKAR yang berada di kalangan pemerintah dan kader-kader GOLKAR di lembaga perwakilan rakyat," sambung Alfian.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh kader dan anggota GOLKAR ini persoalan keterbukaan juga dipertanyakan, karena suasana ini belum kelihatan secara nyata terutama terkait dengan proses seleksi atau pemilihan pengurus organisasi-organisasi dimana masih ada sikap pengkatrolan dan nepotisme. Macam-macam kritik itu ada, tapi bahwa kritik itu sudah dikemukakan secara terbuka berarti menunjukkan suasana keterbukaan semakin ada. Sebelumnya orang diam saja, sekarang mereka berani membuka dan mengungkapkan sesuatu hal permasalahan. Karena itu diharapkan dapat berpengaruh terhadap proses lanjutnya. Jadi di masa yang akan datang, kritik-kritik ini akan dipakai sebagai bahan masukan dan kalau suasananya tidak berubah agak prihatinlah kita.

Sedangkan peserta bernama Hasnah menanyakan tentang tidak ada sinkronisasi antara statemen pemerintah tentang suatu kebijaksanaan dengan penjabarannya. Penanya ini oleh Alfian diharapkan sudah memahami apa yang disampaikan Presiden Soeharto tentang Demokrasi Pancasila. Beliau meminta kepada pembantu-pembantunya kalau bicara — bicaralah pada bidang masing-masing. Sehingga, apa yang ada dihati nurani setiap masyarakat terutama yang menyangkut sinkronisasi tersebut sudah dijawab Presiden Soeharto.

Acara diskusi selain dihadiri oleh kader-kader muda GOLKAR juga dihadiri Ketua DPD I GOLKAR Tingkat I Padang. Adapun suasana diskusi berlangsung penuh dengan semangat dan antusias. Ini dapat dibuktikan dengan melihat jumlah peserta yang datang, kendati tidak terlalu besar, tapi cukup meyakinkan bahwa kader-kader GOLKAR memang tangguh dalam menampilkan diri dalam suatu diskusi.□ (DT)

Digitized by Google

GOLKAR harus mampu memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat

Muhammadiyah Menaruh Perhatian Terhadap GOLKAR

Ketua Umum DPP GOLKAR menyatakan bahwa GOLKAR telah berkembang sebagai organiasi sosial politik yang mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai penyalur aspirasi aspirasi seluruh rakyat dan bangsa. GOLKAR tidak boleh hanya membawakan aspirasi kelompok tertentu, tetapi GOLKAR harus mampu memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, ketika menerima Pengurus Pusat Muhammadiyah, awal Juni lalu di kantornya DPP GOLKAR, dalam rangka menerima sumbangan pemikiran Muhammadiyah sehubungan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUU PA) yang telah diajukan Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disempurnakan menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut Wahono mengatakan, sumbangan pemikiran dari manapun datangnya, terutama dari Muhammadiyah ini, GOLKAR menerima sebagai suatu sikap kedewasaan berbangsa dan bernegara, dan tidak semata-mata oleh karena kelompok, tetapi justru ingin kita persembahkan bagi

Menerima sumbangan pemikiran Muhammadiyah

generasi mendatang tanpa kecuali, tegas Ketua Umum.

Dikemukakan lebih jauh bahwa, GOLKAR adalah pendukung pemerintah secara kreatif. Mendukung, agar pemerintah berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Mendukung dan menjamin bahwa pembangunan yang dijalankan pemerintah bersama-sama rakyat ini berjalan sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh rakyat dalam MPR.

Oleh karena itu, dalam masalah RUU Peradilan Agama, GOLKAR tentu mendukung. Mendukung dengan harapan untuk memberikan atau mendapatkan kesempatan untuk memberikan penyempurnaan-penyempurnaan, tanpa mengurangi jiwa dan semangatnya. "Karena kita mengetahui tugas dan latar belakang pemerintah dalam kaitan dengan RUU Peradilan Agama sekedar melaksanakan Undang-Undang demi Hukum," namun demikian kita melihat "substansinya" itu, kita masih merasa perlu memberikan sumbangan pemikiran, penyempurnaan-penyempurnaan, supaya nantinya Undang-Undang ini kalau sudah diterapkan, diterima oleh seluruh rakyat tanpa ada ganjalan-ganjalan, ujar Wahono penuh harap.

Delegasi PP Muhammadiyah pada kesempatan penyerahan sumbangan pemikiran itu dipimpin ketuanya Logman Harun dan didampingi pengurus lainnya seperti, Ismail Suni, HS Prodjo Koesoemo, Rusdi Hamka, Ramli Toha, Sutrisno Mahdan dan Anwar Abdullah, melaporkan bahwa Muhammadiyah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap GOLKAR agar aspirasinya ini dapat tersalur secara efektif di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, mengingat GOLKAR menduduki mayoritas kursi di DPR. Dan Muhammadiyah berpendapat bahwa RUU Peradilan Agama adalah sesuai dengan UUD 45 dan falsafah Pancasila.

Muhammadiyah, menurut Wahono, adalah merupakan organisasi pembaharu khususnya dikalangan umat Islam. Keberadaannya sejak jaman pergerakan kebangsaan sampai pada gerakan pembangunan sekarang ini telah banyak menciptakan kader-kader bangsa, kader-kader pembangunan dan kader-kader Pancasilais. Diantaranya telah ikut "membidani lahirnya Sekber GOLKAR pada masa itu". Dan kini sebagai organisasi kemasyarakatan Muhammmadiyah telah memberikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam bentuk-bentuk nyata, dan telah mendapat simpati masyarakat, ujar Wahono yang mengaku sejak usia sekolah HIS (SD) telah menaruh simpati terhadap organisasi ini.

GOLKAR telah pula mengambil pelajaran dari pengalaman Muhammadiyah, sehingga GOLKAR juga telah mendapatkan kepercayaan yang demikian besar dari pemilih yang majemuk, termasuk anggota-anggota Muhammadiyah, yang sejak Pemilu, 71,77,82 dan 87 juga ikut berusaha keras berjuang untuk mengemban amanat penderitaan rakyat.☐ (WT)

Digitized by Google

Tanggerang Dambakan Jadi Kota Madya

Tanggerang, sebuah kota administratif (kotatif), yang terletak di wilayah Jawa Barat ini sangat strategis, karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta, menjadikan kota ini mengundang sejumlah harapan dan dambaan.

Tajus Sobirin

Beberapa puluh tahun silam, Tanggerang dan daerah-daerah lain seperti Bekasi, dan Depok, jarang orang menyangka bahwa daerah tersebut keberadaannya akan dapat seperti sekarang ini. Pembangunan daerah itu berkembang cukup pesat, hal ini, tentu merupakan akibat dari perkembangan pembangunan yang dilakukan di Ibukota Jakarta di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, adalah berkat kemauan daerah untuk merancang dan merencanakan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui, pembangunan yang dilakukan di Jakarta (secara fisik) seperti jalan bebas hambatan (tol) dari berbagai arah yang menghubungkan dengan Jakarta, mau tidak mau daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta ini, mudah dijangkau dan tidak memakan waktu yang panjang dan lama. Misalnya, jalan tol yang menghubungkan Bogor-Jakarta, hanya dapat ditempuh lebih kurang tiga perempat jam. Kemudian Cikampek-Jakarta juga tidak memerlukan waktu yang lama. Dan begitu pula dengan tol Jakarta-Merak.

Di sisi lain, akibat adanya urbanisasi —orang-orang yang berbondong-bondong datang ke Jakarta— menjadikan kota Jakarta padat dan menambah problema-problema. Misalnya, akibat banyaknya penduduk —menurut data, jumlah penduduk Jakarta sekarang ini lebih kurang mencapai 7 juta orang— tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau usaha semakin sulit dicari dan kalaupun ada harganya juga mahal.

Dari kondisi-kondisi tersebut diatas, kota-kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjadi incaran orang berpaling ke daerah-daerah tersebut. Tidak mengherankan kalau daerah-daerah itu, khususnya berbatasan langsung dengan Jakarta, pembangunannya bisa berkembang dengan sendirinya. Misalnya saja Tanggerang. Di daerah tersebut sekarang ini bermunculan pembangunan perumahan-perumahan, baik yang dibangun oleh pemerintah yang berupa Perumnas, atau yang dibangun oleh swasta.

Mobilitas penduduk Jakarta-Tanggerang cukup tinggi

Karena, lokasinya berbatasan dan pembangunan yang terus meningkat di Jakarta, menjadikan rasa ketergantungan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggerang semakin tinggi. Baik yang menyangkut masalah kependudukan, perdagangan, industri dan yang lainnya, ujar Bupati Tanggerang Tajus Sobirin.

Selanjutnya dikatakan, mobilitas penduduk Jakarta - Tanggerang dan sebaliknya sangat tinggi dan semakin lama semakin meningkat. Lebih-lebih yang berbatasan langsung dengan Jakarta, misalnya Ciputat, Pondok Aren, Cileduk, dan Batu Ceper. Daerah-daerah tersebut, tanpa dipacu akan dapat berkembang dengan sendirinya. Hal tersebut, kata Tajus Sobirin, karena Kabupaten Tanggerang merupakan daerah penyangga Ibukota Republik Indonesia. Dimana kota Tanggerang dan sekitarnya telah berfungsi sebagai pemukiman penduduk pindahan yang tetap bekerja di Jakarta.

Sedangkan daerah-daerah yang terletak di sebelah barat dan berbatasan

Digitized by Google

Pencari kerja berbondong-bondong ke Tanggerang

dengan Bogor, Serang, Lebak, kalau tidak dipacu dalam jangka 10 tahun, pembangunannya tidak banyak mengalami perubahan,'' ujar Tajus Sobirin.

Selain itu, penduduknyapun juga semakin meningkat. Dari data tahun 1971 jumlah penduduk Tanggerang berjumlah 1.066.695, kemudian meningkat lagi menjadi 1.529.229 pada tahun 1980. Dan pada tahun 1985 bertambah lagi menjadi 1.815.229. Pertumbuhan penduduk Tanggerang periode lima tahun 1971-1980 rata-rata kenaikan per tahunnya 4,04 persen. Kenaikan tingkat penduduk Tanggerang ini menjadi nomer dua setelah Bogor yang mencapai 4,52 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk se Jawa Barat adalah 2,66 persen pertahun.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanggerang yang sebagian merupakan limpahan penduduk dari Jakarta, menjadi suatu problema tersendiri, yaitu mengundang daerah-daerah lain, khususnya daerah sekitar untuk mencari pekerjaan di daerah tersebut. Baik yang di sektor industri maupun perdagangan.

Tidak mengherankan, para pencari kerja berbondong-bondong datang ke Tanggerang. Karena, Tanggerang sebagai daerah penyangga, menjadikan sektor perdagangan dan industri menjadi maju dengan pesat. Dari data yang tersaji, pada tahun 1987 jumlah industri dengan modal asing (PMA) tercatat 35 perusahaan. Dari jumlah sebanyak itu, investasi yang tertanam sebesar US$ 547. Sedangkan jumlah perusahaan dengan modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 90 buah dengan investasi senilai Rp 186 milyar. Kemudian industri menengah non fasilitas dengan investasi sebesar Rp 188 milyar dan industri kecil formal non kerajinan dengan investasi sebesar Rp 618 milyar. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan-kegiatan tersebut berjumlah 94.762 orang.

Usul jadi Kota Madya

Melihat kenyataan dan kondisi di atas, khususnya daerah-daerah yang tidak berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, seperti dikatakan Tajus Sobirin, tidak akan banyak berkembang bila tidak dipacu, maka Pemda berusaha untuk memeratakan pembangunan yang masih belum banyak dijamah ini.

Upaya untuk mengacu ke arah itu telah digarap. Yaitu berusaha untuk menggantikan status Tanggerang sebagai kotatip menjadi Kota Madya. Arah untuk menuju ke arah sana telah dipersiapkan, dengan mempersiapkan lokasi di daerah ''Tigaraksa''. Selain itu upaya-upaya yang berkaitan dengan masalah administratip pun juga sudah mulai dilakukan, termasuk mengajukan permohonan kepada Depdagri. ''Proses pembentukan dan pemindahan dari kotip menjadi Kodya dengan pemindahan lokasi di Tigaraksa sudah mendapat persetujuan dari Departemen Dalam Negeri'', ujar Tajus Sobirin.

Untuk melaksanakan angan-angan tersebut, Pemda tidak jalan sendirian. Pemda melibatkan masyarakat, khususnya pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, pengusaha-pengusaha dari putera daerah. Memang, langkah dan gagasan Tajus Sobirin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan langkah yang baik dan perlu ditiru.

Menyinggung tentang kerjasama dengan pihak swasta dalam hal tersebut, Tajus Sobirin tidak merasa khawatir bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu, Pemda dalam merencanakan dan berupaya untuk merealisasikan gagasan tersebut telah didukung dengan sumber keuangan yang dirasakan cukup memadai.

Untuk mendukung angan-angan tersebut, Pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana dikatakan Tajus Sobirin, anggaran pendapatan daerah Tanggerang dari tahun ke tahun telah menunjukkan peningkatan sekitar antara 3-4 milyar pertahun. Sedangkan anggaran yang lain diperoleh dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APAD) juga sangat mendukung dan meyakinkan. Misalnya dari hasil restribusi dan pajak daerah.

''Jumlah pendapatan selama lima tahun terakhir dari Pajak daerah sebesar Rp 4.840.906.683.47 (73,08% pertahun) dan diproyeksikan lima tahun ke depan sebesar Rp 84.739.998.704. 58, sedangkan jumlah dari sektor restribusi daerah sebesar Rp 26.500.573. 396.01 (36,11% pertahun), kemudian diproyeksikan lima tahun ke depan sebesar Rp 107.763.544.257.08. Kemudian dari sektor APBD perkembangan lima tahun terakhir adalah sebesar Rp 86.543.806.000.00 (17,37% pertahun) yang diproyeksikan lima tahun ke depan akan diperoleh anggaran sebesar Rp 193.089.640.475.96, sehingga adanya hasil pendapatan yang sedemikian besar itu, Pemda Tanggerang semakin memantapkan tekadnya untuk menuju pembangunan daerah dan mewujudkan cita-cita sebagai daerah kotamadya,'' tegasnya penuh semangat.□ (BM/DT)

Digitized by Google

TURUT BERDUKA CITA

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya beserta seluruh warganya, menyatakan turut berduka cita atas wafatnya;

HERMES YOSEPH SUDHARSONO

dalam usia 50 th

Semoga arwah almarhum diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kekuatan Iman. Amin.

DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA

Ketua Umum,

WAHONO

Sekretaris Jenderal,

RACHMAT WITOELAR

TURUT BERDUKA CITA

Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi beserta seluruh jajaran Majalah
''Media Karya/SK Tri Sukses''

MENYATAKAN

Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya;

HERMES YOSEPH SUDHARSONO

Staf Media Karya/SK Tri Sukses

Semoga arwah almarhum diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan Iman. Amin.

Jakarta, 17, Juni 1989.
Kerabat Media Karya
dan SK Tri Sukses.

Digitized by Google

Cina Di Tangan Garis Keras

Pergolakan mahasiswa menuntut demokrasi yang melanda hampir semua kota kota besar di Cina, akhirnya menemui antiklimaks. Pada tanggal 4 Juni, pemerintah mengerahkan pasukan dari Divisi 27 memasuki Tiananmen membantai secara membabibuta siapa saja yang berada di lapangan yang menjadi simbol kesaktian perjuangan komunisme Cina itu. Ribuan penduduk sipil tewas dilindas tank dan disapu muntahkan peluru.

Pemerintah yang kemudian ngeri dengan korban yang demikian banyak berusaha menenangkan rakyatnya bahwa yang meninggal di Tiananmen paling banyak 300 orang dan dari jumlah itu hanya 24 di antaranya mahasiswa. Tetapi dunia internasional tak percaya dengan angka pemerintah itu, karena menurut sumber-sumber Barat dan para saksi mata, korban yang tewas mencapai 7000 orang. Angka ini agaknya mendekati kebenaran karena dari video yang diselundupkan seorang aktivis, Chai Ling, yang kini buron dan diberitakan meminta suaka politik di Australia, dapat terlihat betapa kejam dan dahsyatnya peristiwa pembantaian yang dijuluki tragedi Tiananmen itu.

Pergolakan politik paling gawat di Cina

Penggambaran dari peristiwa itu sendiri sangat simpang siur. Korban yang demikian banyak, menurut para saksi mata bukan karena penduduk sipil dibantai secara tak berdaya oleh divisi 27, tetapi yang terjadi adalah pertempuran antara divisi 27 dan divisi 38. Divisi 27 adalah kesatuan yang taat kepada Perdana Menteri Li Peng dan Presiden Yang Shangkun, karena komandannya adalah keponakan sang presiden. Sedangkan divisi 38 yang bermarkas di Beijing, adalah kesatuan yang menolak melaksanakan UU Darurat Perang yang diperintahkan Li Peng dan Yang Shangkun sejak 20 Mei.

Pertempuran antara dua pasukan yang berbeda sikap terhadap gerakan mahasiswa dan garis kepatuhan itu, menyebabkan Cina nyaris terjerumus dalam perang saudara. Walaupun akhirnya Li dan Yang berhasil mengatasi situasi gawat itu, namun peristiwa itu sendiri merupakan pergolakan politik yang paling parah dalam sejarah Cina sejak tahun 1949.

Pergolakan mahasiswa yang disulut oleh kematian mantan Sekjen PKC (Partai Komunis Cina) Hu Yaobang pada tanggal 9 Mei itu, ternyata mencerminkan garis sikap di antara para pemimpin pemerintah maupun PKC serta militer Cina. Mereka yang bertikai dibagi dalam dua kelompok penting, yaitu yang moderat dengan tokoh utama Sekjen Zhao Ziyang, sedangkan yang garis keras dipimpin PM Li Peng dan Presiden Yang Shangkun. Zhao sendiri sejak terlihat menangis di Tiananmen sehari sebelum UU Darurat diberlakukan tatkala meminta mahasiswa menghentikan mogok makan, tidak nampak lagi di depan publik. Dia memang didepak dan secara terang-terangan dituduh mendukung gerakan mahasiswa pro-demokrasi

Digitized by Google

yang kemudian dicap sebagai kontra-revolusioner.

Menyusul pembersihan di Tiananmen, pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap para aktivis dan pelaku kerusuhan. Sebanyak 21 mahasiswa dinyatakan buronan kakap yang harus ditangkap hidup atau mati. Perbatasan negeri ditutup dan aparat kepolisian diperintahkan untuk melakukan penyelidikan cermat dan terus-menerus terhadap penumpang kereta api, pesawat terbang dan kapal-kapal laut dan kendaraan umum lainnya untuk menangkap para pelaku kejahatan itu. Di antara yang ditangkap, telah diputuskan hukuman mati oleh pengadilan di berbagai kota. Jadi setelah ribuan manusia mati dalam forum tak resmi di Tiananmen, pemerintah memamerkan lagi kematian lewat forum formal, yaitu pengadilan.

Pembelotan

Kendali kepemimpinan PKC yang kembali digenggam oleh kelompok konservatif menyebabkan para diplomat, mahasiswa dan warga yang merasa demokrasi tak bakal diwujudkan di Cina, melakukan pembelotan dan meminta suaka politik di negara lain. Para diplomat Cina di Jepang, Amerika Serikat, Kanada dan sejumlah negara Eropa termasuk Australia, ramai-ramai meminta suaka politik. Ribuan mahasiswa Cina di luar negeri, selain memperpanjang visa mereka, juga ada yang meminta suaka politik. Sedangkan di kedutaan Amerika dan Kanada di Beijing, antrian warga Cina yang ingin memperoleh visa keluar membludak setiap hari.

Pembelotan massal tersebut tentu saja didukung oleh sikap sejumlah negara yang ingin memperlihatkan protes mereka terhadap pembantaian di Tiananmen, dengan memberi kemudahan visa serta syarat-syarat kewarganegaraan. PM Australia Bob Hawke malah mengeluarkan pengumuman perpanjangan visa otomatis selama setahun bagi mahasiswa Cina di negeri itu yang ingin memperpanjang masa tinggalnya. Hal yang sama dilakukan oleh Jepang dan Kanada serta Amerika dan Inggris.

Bila ribuan mahasiswa Cina yang kini berada di luar negeri tidak kembali ke negerinya setelah tamat belajar, maka pembangunan dan modernisasi di negeri berpenduduk di atas 1 milyar itu akan mengalami kemunduran atau stagnasi.

Di tengah kecaman yang mengalir hampir dari semua negara, termasuk dari pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev yang baru sebulan menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Cina, hubungan Beijing memburuk sekali dengan Washington, London dan Canberra serta Tokyo.

Dengan Washington, Cina berang karena kedutaan AS di Beijing melindungi pembangkang terkemuka, ahli astrofisika, Fang Lizhi dan istrinya Li Shuxian yang bersembunyi disana sejak 6 Juni. Fang, 53, menjadi perhatian dunia Februari lalu, ketika aparat keamanan Beijing menolaknya hadir dalam jamuan kenegaraan yang diadakan untuk menghormati Presiden AS George Bush yang berkunjung seusai lawatan ke Jepang dalam rangka pemakaman Kaisar Hirohito.

Kesal dengan Fang dan sikap AS yang terus melindungi pembangkang itu, pemerintah Cina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya bersamaan dengan 21 buronan lainnya. AS pernah merundingkan agar Fang diberi ijin berangkat ke negara ketiga di luar AS, tetapi tidak diketahui bagaimana hasilnya. Sedangkan Amerika sendiri menolak tuduhan bahwa telah memberikan suaka politik kepada Fang, karena pemberian suaka di AS hanya mungkin bila pemohon berada di wilayah hukum negara adikuasa itu. Jadi selama yang meminta perlindungan kepada Amerika itu masih berada di negara lain, maka tidak ada pengertian suaka dalam kasus seperti itu. Alasan lain adalah, komitmen AS pada orang-orang tertindas dan dicekam rasa takut dan oleh karena itu meminta perlindungan, tidak bisa ditolak dengan alasan apapun.

Sebelum kasus Fang terungkap, hubungan Washington dengan Beijing pun telah memburuk, karena sebagai reaksi terhadap pembantaian di Tiananmen, Bush selain mencap rejim di Beijing sebagai pembunuh, juga menghentikan kontrak penjualan peralatan militer serta menunda semua kunjungan tingkat pejabat tinggi ke Beijing selama penindasan terhadap gerakan pro-demokrasi masih dilaksanakan. Sikap ini menurut Washington akan ditambah lagi dengan sanksi ekonomi yang terkoordinasi dengan rekan-rekan AS di Eropa Barat serta Jepang.

Sedangkan ketegangan dengan London terjadi karena Inggris melakukan protes atas penahanan seorang mahasiswa Hongkong di Shanghai pada saat mahasiswa tersebut hendak naik pesawat pulang. Yang membikin berang PM Margaret Thatcher ialah penahanan itu terjadi di depan mata seorang staf konsul Inggris di Hongkong. London mengirim ultimatum akan mengambil tindakan balasan — yang tidak dirinci — bila mahasiswa tersebut tidak segera dibebaskan. Tidak diketahui bagaimana akhir dari kasus tersebut, tetapi London tiba-tiba diam.

Dengan Jepang hubungan memanas, karena Tokyo yang selama ini tidak pernah mengecam Cina tiba-tiba mengutuk pembantaian di Tiananmen

Digitized by Google

itu. Menyusul kutukan itu PM Sosuke Uno yang baru saja mengganti Takeshita mengumumkan kesediaan Tokyo menjadi perantara warga Cina yang ingin mencari suaka politik di AS maupun negara lain.

Sedangkan dengan Australia, Cina berang karena pemerintah PM Bob Hawke mengabulkan permohonan suaka dua orang diplomat Cina di Canberra. Tambahan lagi, kedubes Australia di Beijing, konon, menyembunyikan Chai Ling, mahasiswi psikologi yang menyelundupkan video peristiwa Tiananmen sehingga dunia luar mengetahui secara jelas keganasan peristiwa itu. Dia termasuk di antara 21 buronan yang diperintahkan untuk ditangkap. Tetapi keberanian sang mahasiswa tersebut menyebabkan para akademisi di Oslo, Norwegia, mencalonkannya sebagai pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian tahun ini.

Peranan Deng

Pergerakan mahasiswa di Cina selama satu dasawarsa terakhir dalam banyak hal dipengaruhi oleh orang kuat negeri itu, Deng Xiaoping. Ketika tampil memenangkan pergolakan kekuasaan melawan The Gang of Four yang dipimpin janda Mao Zedong, Deng seperti membuka cakrawala baru, tidak saja di bidang politik ekonomi, tetapi dalam bidang politik itu sendiri. Sikapnya yang membuka diri terhadap investasi asing, menyebabkan ia dijuluki sebagai arsitek reformasi negeri tirai bambu itu.

Tetapi predikat itu ternyata tidak melekat total dan menjiwai Deng secara utuh. Gerakan mahasiswa yang semakin menggelora akibat peluang yang dibuka Deng, lama kelamaan oleh Deng dianggap sebagai bahaya. Dia bahkan agak menyesal dengan pembaharuan yang ia rintis. Hal ini terbukti ketika pada tahun 1983, dia mengerem sejumlah program Empat Modernisasi, karena dalam beberapa hal perkembangan yang terjadi, terlalu cepat sehingga tidak terkontrol.

Deng yang pernah mengenyam pendidikan di Moskow dan dipakai serta dipecat — bahkan dipenjara oleh Mao — berangsur-angsur mulai curiga terhadap perubahan yang terjadi akibat konsekuensi logis reformasi yang ia kobarkan sendiri. Bukti bahwa Deng tidak berpihak pada reformasi, adalah pada tahun 1986, ketika dia menggeser almarhum Hu Yaobang dari posisi Sekjen PKC karena dinilai merestui gerakan mahasiswa waktu itu yang dituduh mengobarkan semangat borjuisme liberal.

Pada tahun 1987, dalam kongres PKC, Deng mengangkat Zhao Ziyang menggantikan Hu. Zhao adalah anak didik Deng sendiri. Tetapi Zhao sendiri harus mengalami nasib seperti Hu. Dia dipecat dan bahkan dikenakan tahanan rumah, menyusul gerakan mahasiswa di Tiananmen yang berlangsung selama tiga minggu sebelum pasukan pemerintah menyapu mereka dengan meriam dan granat pada tanggal 4 Juni lalu.

Pencapaian Cina di bidang ekonomi, memang menunjukkan betapa Deng yang Agustus nanti berusia 85 tahun itu, telah berhasil membangun negaranya. Tetapi Deng agaknya lupa bahwa pembangunan di bidang ekonomi akan membawa akibat ekspansi selera terhadap nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Deng lupa membangun kelembagaan politik yang menampung bias pembangunan ekonomi di sektor politik. Dan ketika bias itu begitu membahayakan karena tidak ada lembaga yang menampungnya, Deng mengutuk tuntutan yang dilahirkannya sendiri. Akibatnya, orang lain jadi korban.

Melihat perilaku Deng, dia sebenarnya sedang mengalami tragedi atas sendirinya. Dia harus menghukum bahkan membantai rakyatnya sendiri karena menikmati reformasi yang ia rintis. Oleh karena itu apa karakter Deng sebenarnya? Jawaban yang paling mungkin ialah Deng adalah reformis yang baik, tetapi bukan penganut demokrasi. Dia adalah reformis dengan prototipe komunis, yang setiap saat siap menerkam setiap gejolak yang membahayakan status quo.

Ini terlihat ketika dia muncul dari "persembunyiannya" dan berbalik mendukung Li Peng dan Yang Shangkun pada saat-saat stagnasi kepemimpinan Cina bulan lalu. Kepada tentara yang telah melakukan pembantaian di Tiananmen, Deng mengatakan, "Kalian telah melaksanakan tugas menyelamatkan negara dan partai dengan sempurna." Dia juga kelihatan tersenyum puas.

Investasi

Tragedi Tiananmen, tidak saja menguburkan sinar dan kehendak demokrasi rakyat Cina, tetapi telah memukul perekonomian negara itu yang belakangan ini dirongrong oleh inflasi yang tak terkendali. Dengan penduduk di atas 1 milyar, dan dalam kondisi sekarang, Cina memang sangat membutuhkan modal asing.

Menghukum dan membantai rakyat sendiri

Digitized by Google

Militer diadu dan sikut menyikut kekuasaan dalam tubuh partai

Tetapi investor asing agaknya mulai belajar dari pengalaman bahwa melakukan investasi di negara seperti Cina risikonya sangat tinggi. Reformasi yang mereka lakukan bisa saja menjadi bumerang pada saat status quo mulai digoyang. Menyusul tragedi Tiananmen, para pengusaha mulai meninggalkan negeri itu. Bank of China di Singapura dan Hongkong diserbu nasabah yang menarik kembali deposito mereka, sehingga bank itu nyaris kering kasnya.

Bila Cina tidak berhasil meyakinkan investor bahwa negeri itu aman untuk investasi asing, maka pembangunan yang dilancarkan Deng selama 10 tahun terakhir, musnah. Cina ibarat memutar mundur jarum jam bangsanya dan membelakangi masa depan.

Menyadari bahaya yang sangat gawat ini, pemerintah Cina berulang kali melakukan "perang" publikasi melawan serbuan pemberitaan pers dunia dengan mengatakan, politik pintu terbuka yang dijalankan Cina selama ini tidak berubah, karena pemerintahan di Beijing stabil. Siapa yang bisa mempercayai retorika semacam itu?

Politik pintu terbuka terhadap investasi asing, harus dijamin oleh sikap yang lentur terhadap perubahan di sektor politik yang diakibatkan oleh reformasi ekonomi. Tanpa kesadaran dan kesediaan untuk mengakomodir arus perubahan politik sebagai akibat perubahan ekonomi, stabilitas yang didengungkan itu, sangat rawan sebenarnya.

Pemerintah Cina masih didominasi oleh tokoh-tokoh tua yang kini bermunculan ketika Li Peng dan Yang Shangkun memenangkan sikut-menyikut di antara pemimpin top PKC. Di antara mereka yang sekarang muncul itu adalah sejumlah veteran yang dulu digeser Deng karena terlalu konservatif. Mereka kini muncul lagi dan siap bahkan diterima di sisi Deng. Fakta ini menunjukkan bahwa Deng yang jabatan formalnya adalah Ketua Komite Militer Sentral PKC, masih merupakan pemegang komando atas pemerintahan di Cina.

Yang paling kecewa dengan perubahan sikap Deng sekarang ini tentu Amerika. Washington seakan tidak percaya kalau pembantaian di Tiananmen itu dilakukan atas restu Deng. Oleh karena itu beberapa pers AS, termasuk Jepang menulis, "Kami heran Deng masih bisa tersenyum di hadapan pasukan yang telah membantai ribuan orang".

Bahaya bagi investasi di Cina, juga diperkuat oleh seruan pemerintah negara-negara kaya seperti Jepang, AS dan Eropa Barat yang menasihati investor mereka untuk tidak kembali ke Cina lagi. Sementara Hongkong yang selama ini menjadi pintu bagi perdagangan Cina dengan luar negeri, juga dihinggapi perasaan anti pemerintah Beijing karena peristiwa Tiananmen itu. Dalam dua tahun terakhir, modal Hongkong telah banyak dipindahkan ke luar koloni Inggris yang akan diserahkan kembali kepada Cina pada tahun 1997 itu.

Pendek kata, tragedi Tiananmen telah menimbulkan kecemasan investor akan nasib modal mereka yang telah ditanam disana. Retorika pemerintah Beijing bahwa politik pintu terbuka tidak berubah dan stabilitas politik terjamin, tidak cukup. Tiananmen adalah pengalaman yang gamblang, betapa rejim di Beijing bisa menjadi kekuatan reaksioner-represif setiap saat pergolakan tiba. Investasi di negeri seperti itu, memang tidak aman.

Peranan Militer

Militer Cina selalu memainkan peranan penting dan menentukan dalam setiap gejolak kekuasaan di negeri itu. Mereka ini mewarisi semangat dan jiwa para jenderal yang telah melakukan Long March dan merebut kekuasaan dari kaum nasionalis pada tahun 1949. Tetapi peranan yang begitu penting itu, tidak terakomodir secara pas di bidang politik dan pemerintahan.

Deng Xiaoping pada tahun 1987 misalnya, mempertegas bahwa militer sebaiknya tetap berada di luar struktur pemerintahan. Tetapi bagaimana pun juga para politisi tahu bahwa militer Cina adalah kekouatan yang harus diperhitungkan karena mereka memiliki senjata pamungkas untuk mematikan setiap serangan maupun gejolak.

Oleh karena itu tokoh-tokoh seperti Zhao, Li, Yang dan Deng, membangun akses ke militer. Deng dan Yang adalah jenderal yang walaupun mulai sirna, tetapi masih mempunyai anak buah yang setia di lapangan. Sedangkan Li Peng dan Zhao Ziyang merupakan orang sipil yang karena pandai membaca permainan berhasil memiliki akses di bidang kemiliteran. Zhao sendiri merupakan wakil Deng dalam Komite Militer Sentral, sebuah organ partai yang sangat berpengaruh.

Karena akses para politisi dalam bidang militer ini, maka tentara pun terjangkit arus pemikiran yang berbeda tentang reformasi dan demokrasi. Dalam konteks seperti ini jelas, sebuah perpecahan di kalangan politisi akan membawa akibat perpecahan di kalangan militer.

Dalam tubuh organisasi militer Cina, dapat disimak pola kesetiaan mereka kepada tokoh-tokoh partai. Dari tujuh wilayah militer di seluruh Cina, Deng Xiaoping memang mempunyai akar pengaruh paling luas. Orang seprti Yang Shangkun, Li Peng dan Zhao hanya mempunyai andalan di beberapa divisi saja. Yang Shangkun mengandalkan Divisi 27 yang setia kepadanya, sedangkan Zhao mengandalkan Divisi 38 yang berpusat di Beijing. Sedangkan Li Peng menumpang pada divisi 27 serta 63 yang kepunyaan Deng. Dalam konstelasi pertikaian seperti itu, tidak mengherankan setiap politisi dalam pergolakan bulan lalu itu mengerahkan pasukannya ke Beijing untuk menjalankan perintah para bos partai.

Itulah yang menyebabkan segera setelah UU Darurat diberlakukan kota Beijing seperti dibanjiri tentara yang tidak saling mengenal satu sama lain dan akhirnya terlibat dalam pertempuran di Tiananmen itu.

Dengan peristiwa itu, maka militer Cina yang terikat pada doktrin untuk

Digitized by Google

tunduk di bawah perintah partai, mulai mempertanyakan kebenaran doktrin tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa militer akan diadu setiap kali terjadi sikut-menyikut kekuasaan dalam tubuh partai. Dan yang paling menyakitkan, kalau mereka diperintahkan oleh para politisi untuk memberondong rakyatnya sendiri, bertentangan dengan predikat Tentara Pembebasan Rakyat yang mereka sandang selama ini.

Prospek garis keras

Kelompok garis keras yang sangat mengandalkan nama besar dan pengaruh Deng Xiaoping, kini muncul sebagai pemenang, sedangkan Zhao Ziyang, reformis all-out, terpental. Namun Li Peng dan Yang Shangkun jangan bertepuk dada dengan kemenangan sekarang ini, karena kemenangan itu sangat ditentukan oleh faktor Deng Xiaoping.

Deng sendiri telah berusia 84 tahun, dan kini sakit-sakitan. Kelompok reformis kini menanti saat, kapan Deng meninggal untuk menguji sekali lagi kehandalan duet Li-Yang. Tanpa Deng, Zhao memiliki pengaruh lebih luas di kalangan militer dibanding Yang Shangkun apalagi Li Peng.

Dengan demikian, kemelut dan pergolakan kekuasaan di Cina akan muncul lagi pada saat Deng meninggal nanti. Sekarang ini akar-akar Deng pun mulai digoncang. Selain demonstrasi mahasiswa, sebuah perusahaan monopoli yang dipimpin putranya, Deng Pufang, ditutup karena merugi dan dililit salah urus. Ini adalah percobaan bagi Deng.

Melihat arus mahasiswa dan rakyat serta buruh yang mendukung gerakan pro-demokrasi, dapat diukur berapa besar pengaruh dan simpati terhadap Zhao. Dukungan ini menyebabkan Zhao yakin, — dan tentu saja kalau dia masih mau — akan memenangkan pertarungan melawan Li-Yang pada saat Deng meninggal kelak.

Semangat pro-demokrasi telah begitu merasuki kaum muda Cina sehingga suatu saat akan muncul bila kesempatan itu ada. Komunisme Cina memang melemah akibat reformasi yang dilakukan Deng. Oleh karena tokoh-tokoh konservatif yang kini bermunculan menyerukan penggalakan pengajaran Marxisme di semua kalangan rakyat negeri itu.

Bagaimana pun juga, perubahan yang mulai disadari di negara-negara komunis, akan mempengaruhi arus pemikiran bangsa Cina. Para pemimpin konservatif tidak akan mampu menyumbat perubahan itu terus-menerus. Bahwa perubahan itu nantinya menggugat komunisme atau tidak, itu soal lain. Tetapi perubahan sebagai keharusan, tidak bisa dihalang-halangi. Masalahnya adalah bagaimana kesiapan kelembagaan yang mampu menampung perubahan itu sendiri.

Bila komunisme mampu melakukan itu, tentu rakyat Cina akan mendukungnya. Tetapi bila tidak, maka pergolakan di Cina akan selalu muncul dalam siklus sepuluh tahunan. Ini agaknya telah menjadi konvensi sejarah. □ (TG)

Sejak 1910

LAMBANG KUALITAS DAN KEKUATAN

Portland Cement, SII 0013/1981.

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

PT SEMEN PADANG (PERSERO)

Kantor Pusat/Pabrik : Indarung - Padang - Sumatera Barat. Telp.: (0751) 25066 (7 Saluran). Telex: 55116 PTSPIN IA. FAX: (0751) 25032
Perwakilan Jakarta : Gedung Veteran Lantai II Jl.Jend.Sudirman 50 Telp: (021) 511557 (langsung) Telex: 62649 PSGIA IA. FAX: (021) 512177
Kantor Pemasaran : Padang: Indarung, Telp. (0751) 28973 - (0751) 25066 EXT: 2007/2013. Telex: 55161 PTSPIN IA. Fax: (0751) 25032.
Medan : Jl. Kolonel Soegiono No. 14 - 14A. Telp: 327275 - 321998
Pekan Baru : Jl. Nangka No. 203 Telp: 22722 - 25192

Kami telah membuat sebelum yang lain memikirkannya

Digitized by Google

UNIVERSITAS JAYABAYA
DAN
AKADEMI-AKADEMI JAYABAYA

PENGUMUMAN
tentang
PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 1989/1990

A. PROGRAM STUDI

NO.	FAKULTAS DAN AKADEMI	STATUS	SYARAT AKADEMIK (Semua lulusan negeri atau yang sederajat)
1.	**FAKULTAS HUKUM**		
	Jurusan Hukum Pidana	Disamakan	SMA, SLTA Sejenis
	Jurusan Hukum Perdata	Disamakan	SMA, SLTA Sejenis
	Jurusan Hukum Tata Negara	Disamakan	SMA, SLTA Sejenis
2.	**FAKULTAS EKONOMI**		
	Jurusan Manajemen Perusahaan	Disamakan	SMA, SMEA, PSPP, SMPP, Aliyah
	Jurusan Akuntansi	Terdaftar	SMA, SMEA, PSPP, SMPP, Aliyah
3.	**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**		
	Jurusan Administrasi Negara	Disamakan	SMTA, SLTA Sejenis
	Jurusan Hubungan Internasional	Disamakan	SMTA, SLTA Sejenis
4.	**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**		
	Jurusan Teknik Mesin	Diakui (Proses Disamakan)	SMA IPA, STM Mesin, PPSP/SMPP Palma, Aliyah IPA
	Jurusan Teknik Elektro	Terdaftar	SMA IPA, STM Elektro, PPSP/SMPP Palma, Aliyah IPA
	Jurusan Teknik Kimia	Terdaftar	SMA IPA, STM Kimia, PPSP/SMPP Palma, Aliyah IPA
5.	**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**		
	Jurusan Teknik Sipil	Diakui (Proses Disamakan)	SMA IPA, STM Sipil, PPSP/SMPP Palma, Aliyah IPA
	Jurusan Teknik Arsitektur	Terdaftar	SMA IPA, STM Sipil, PPSP/SMPP Palma, Aliyah IPA
6.	**AKADEMI AKUNTANSI**	Disamakan	SMA, SMEA, PSPP, SMPP Palma, Aliyah IPA
7.	**AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN**	Disamakan	SMA, SMEA, PPSP, SMPP Palma, Aliyah IPA
8.	**PROGRAM DIPLOMA III TEKNOLOGI**		
	Jurusan Teknik Mesin	Diakui	SMA IPA, STM Mesin, PPSP/SMPP Palma, Aliyah IPA
	Jurusan Teknik Sipil	Diakui	SMA IPA, STM Sipil, PPSP/SMPP Palma, Aliyah IPA

B. Dibuka juga PROGRAM S1 lanjutan bagi lulusan Akademi untuk Program Studi :
Manajemen Perusahaan, Akuntansi, Administrasi Negara, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro.

C. SELEKSI PENERIMAAN & WAKTU KULIAH

1. PENDAFTARAN :
19 Juni s/d 29 Juli 1989, di Kampus A Universitas Jayabaya
Jl. Jend. A. Yani - By Pass, Jakarta Pusat

2. SELEKSI
Diadakan pada
Tanggal 30 Juli 1989

3. WAKTU KULIAH :
Pagi dan Sore

Jakarta, Juni 1989

Ketua Yayasan Jayabaya,
ttd,
Prof. Dr. H. Moeslim Taher SH

Rektor Universitas/Koordinator Akademi-Akademi Jayabaya
ttd,
Prof. Dr. H. Tb. Achjani Atmakusuma

Digitized by Google

Pentas Mutu & Model Pentas Mutu & Model Pentas Mutu & Model Pentas Mutu & Model Pentas Mutu &

JUALAN BESAR

Atas permintaan Khalayak
DIPERPANJANG s/d 16 JULI 1989
Dengan puncak acara
HUMOR TOTAL oleh
pelawak-pelawak terkenal ibukota

Saksikan!!!
BINTARO JAYA AUTOMOTIVE CROSS COUNTRY
2 Juli '89 di Bintaro Jaya Unit 3,
kerjasama dengan **RAMAKO GROUP**
(Radio Ramako, Mustang, Aristiara)

BINTARO JAYA
3 Juni – 2 Juli 1989

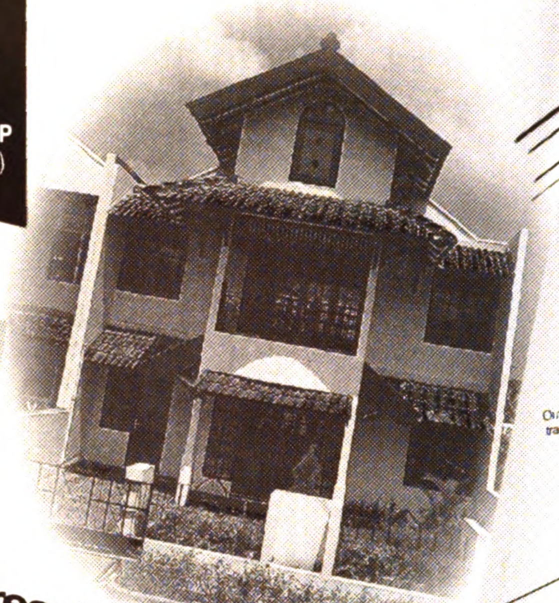

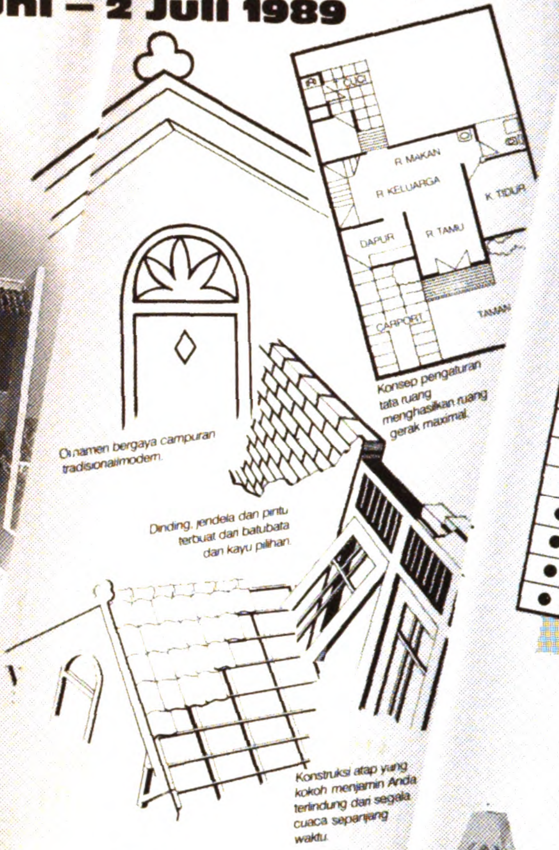

Jualan Besar Bintaro Jaya, Jualan Kebanggaan Kami. Ada rumah sudut berhadiah furniture, rumah disain khusus berdiscount s/d 23% serta rumah di lokasi baru berharga 18% lebih ringan.

Bergegaslah, ajaklah serta keluarga Anda, lihat rumahnya resapi lingkungannya, saksikan atraksinya.

Sungguh kami senantiasa memberi nuansa kepuasan tersendiri bagi Anda.

Saksikan Acara Unik & Meriah

- Start & Finish IPMJ Speed Rally, Jabar I
- Slalom test
- Light Music Contest
- Jakarta Ngeceng Contest
- Pameran Mebel & Mobil
- Lomba ketangkasan skate board
- Sepeda rally
- Karnaval anak-anak & sepeda hias
- Lari marathon
- Lomba perkutut
- Matra Medica Sehat

Menampilkan Kreasi Trend '89

Harga baru rumah-rumah Bintaro Jaya

TIPE	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	HARGA BIASA	HARGA BINTARO 5
Sriti	90 (6x15) m2	27 m2	Rp. 15.930.000,-	Rp. 13.200.000,-
Cucur	90 (6x15) m2	36 m2	Rp. 18.360.000,-	Rp. 14.760.000,-
Sri Gunting	120 (8x15) m2	46 m2	Rp. 27.970.000,-	Rp. 23.170.000,-
Ciung	120 (8x15) m2	51 m2	Rp. 29.445.000,-	Rp. 24.645.000,-
Nuri	135 (9x15) m2	95,5 m2	Rp. 46.250.000,-	-
Cucak	135 (9x15) m2	100 m2	Rp. 47.725.000,-	-
Belibis	180 (9x20) m2	102 m2	Rp. 54.390.000,-	-
Camar	180 (9x20) m2	112 m2	Rp. 57.340.000,-	-
Cendrawasih	250 (10x25) m2	110 m2	Rp. 66.200.000,-	-
Pelikan	250 (10x25) m2	122 m2	Rp. 69.740.000,-	-
Cariama	300 (12x25) m2	112,5 m2	Rp. 82.400.000,-	-
Rajawali	372 (12x31) m2	149 m2	Rp. 104.225.000,-	-

JUARA I – Lomba Lingkungan se-DKI Jakarta Tahun 1985

JUARA I – Dalam Memasarkan Rumah Menengah se-DKI Jakarta Tahun 1986

JUARA I – Lomba Penghijauan Real-Estate se-DKI Jakarta Tahun 1987

JUARA I – Lomba Taman Lingkungan se-DKI Tahun 1988

JUARA I – Lomba Penghijauan Permukiman Tingkat Nasional Tahun 1988

hidup nyaman di alam segar
BINTARO JAYA
KANTOR TAMAN BINTARO JAYA Gedung A, Lantai 2, Jl. Bintaro Raya Jakarta-12330.
Telp. 7396898, 7397674. Ext. 237,238,239
Developer Anggota REI No. 00.00001

P.T. PEMBANGUNAN JAYA

No. 63 Juli 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS 611 M48

Tujuh Kunci Sukses Keberhasilan KB

ISSN 0216 - 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Hari-hari penuh kepastian...

baca saja

Redaksi/Tata Usaha: Jl. Bangka Raya no. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 791352 (3 Sal), 797020
Teleks 47459 Eska JKT.
Iklan: Jl. Gajah Mada No. 90A Tingkat III Telp. 621691 - 646146 Jakarta Barat.
Perwakilan Jawa Barat Jl. Warta no. 13 Telp 56213 Bandung.
Perwakilan Jawa Tengah & D.I.Y. Jl. Lamper Sari 12A Telp. 313113, Semarang.
Perwakilan Sumatera Utara Jl. Timor 14C Telp. 515089 Medan
Perwakilan Jawa Timur & Bali Jl. Ketintang Komplex Agar-agar Kav. 52 Telp. 814329, Surabaya
Sub. Perwakilan Bali Jl. Imam Bonjol 99 Telp. 3317 Denpasar

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/
Penanggung Jawab :
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/
Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi :
Anang Adenansi
Dr Alfian
H Kafrawi MA
Drs Slamet Efendi Yusuf
Drs Irsyad Sudiro
Drs Thomas Suyatno
Ny Maria Sugiharto
Drs Wijanarko Puspoyo MA
Drs Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs T A Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H M Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana :
Drs Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD PAND DV Noerijathy

STT NO 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat
Jl Taman Anggrek Slipi
telp 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh PT Enka Parahiyangan

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Koperasi dan Nasionalisme Ekonomi.

FOKUS

Tujuh Kunci Sukses Keberhasilan KB; KB Tidak Bertentangan Dengan Agama.

LAPORAN UTAMA

Menjaring Modal Untuk Koperasi; Mencari 2.000 KUD Mandiri Sebagai Lokomotif Pengembangan Koperasi; Koperasi Mempunyai Dua Aspek Kembar; Gerakan Koperasi Butuh Kesetiakawanan.

LAPORAN KHUSUS

Lemahnya Etika Berusaha Akibatkan Kriminalitas Ekonomi; Kriminalitas dan Wibawa Hukum.

NASIONAL

PGRI Bertekad Laksanakan Pendidikan Politik bagi Anak Didik; Monumen Yogya Kembali Yang Sarat Makna; Keterbukaan Yang Makin Didambakan; Idul Adha Mengandung Pesan Kesetiakawanan.

ORGANISASI

Pimpinan Golkar Agar Membina Semangat Kebersamaan; Kalsel Telah Mempersiapkan Kemenangan Golkar Pada Pemilu 1992; Penyegaran Untuk Tingkatkan Kualitas Kader; Masih Banyak Kalangan Pengamat di Luar Negeri Kurang Memahami Latar Belakang Bangsa Indonesia; Mewujudkan Impian Generasi Muda.

KOMENTAR

Miskin Versus Kaya di Paris.

INTERNASIONAL

Kelompok 7 dan Dunia Ketiga.

SPEKTRUM

Peranan Guru PGRI Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik; Beberapa Prakondisi Ekonomi Tinggal Landas.

SENI & BUDAYA

Film Indonesia dan Citra Seni Budaya Bangsa; Kuan Sama Dengan The King Can Do Wrong oleh Maria Sugiharto.

Digitized by Google

Koperasi dan Nasionalisme Ekonomi

TANGGAL 12 Juli 1989, Koperasi Indonesia genap berusia 42 tahun. Usia yang cukup untuk dikatakan atau digolongkan sebagai dewasa. Dalam pengertian, dewasa biologis, psikologis, dewasa mental dan mandiri — tingkat kedewasaan dalam berpikir, bertindak dan berbuat — tanpa tuntunan.

Pada batang usia ini, bagi manusia, ia sudah mandiri dalam pengertian menentukan dan mengatur sendiri hidup dan kehidupannya, baik sendiri maupun sekeluarga. Ia secara biologis sudah dewasa, secara pisik juga sudah dewasa, tahu betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tak boleh. Serta punya kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap setiap langkah yang dilakukan.

Bagi Koperasi, kendati masih dalam proses mandiri mantap, sudah cukup mampu untuk mengelola kepentingan rumah tangga sendiri. Sepuluh tahun belakangan ini, koperasi menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan-kemajuan yang cukup mengesankan. Sepuluh tahun lalu, yang paling menonjol perkembangannya adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Sedangkan Primer Koperasi nampak tak ada kegairahan orang untuk mengembangkannya.

Sekarang, orang justru berlomba-lomba mendirikan koperasi karena melihat manfaatnya secara nyata. Lalu mulai berkembang berbagai jenis koperasi. Didukung oleh persyaratan mendirikan koperasi yang cukup ringan, maka koperasi mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Pertumbuhan koperasi memang cukup menggembirakan, tetapi apakah ia sudah memberi arti bagi **"eksistensi"**nya sebagai koperasi, itu masih harus dipertanyakan lagi.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 berbunyi: "Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Jika penjelasan ini yang dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka Koperasi punya makna yang paling dalam.

Berdasarkan penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini, sesungguhnya Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia. Koperasi adalah tonggak perekonomian nasional, yang harus memberikan kemakmuran kepada seluruh anggota masyarakat bangsa.

Dengan begitu, sebenarnya melalui Koperasi ditumbuhkan nasionalisme ekonomi. Yaitu perekonomian nasional yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan; suatu perekonomian yang dibangun untuk kemakmuran masyarakat bangsa secara nasional, bukan kemakmuran orang seorang.

Jadi secara eksistensial, Koperasi dimaksudkan untuk membangun perekonomian yang pada gilirannya akan memberikan kemakmuran bagi semua warga negara yang menjadi anggotanya. Apabila Koperasi menyadari betul fungsi dan peranannya dalam kehidupan negara bangsa, maka tujuan "kemakmuran" untuk semua itu, akan dapat diwujudkan.

UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 menyebutkan: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua ayat ini mengacu pada peranan negara didalam pengelolaan kekayaan alam (bumi, air dan segala yang berada didalamnya) untuk kemakmuran semua. Disinilah letak peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika diamati secara mendalam, makna dari pasal 33 UUD 1945 ini, maka jelas bagi kita bahwa peranan Koperasi dan BUMN secara hukum memang kuat sekali. Kedudukan kedua pelaku ekonomi ini dalam struktur kenegaraan sangat penting.

Karena secara hukum ditetapkan dalam UUD, bukan diatur oleh Undang-Undang. Pelaksanaannya kemudian diatur dengan Undang-Undang. Disini bedanya Koperasi dengan perusahaan lainnya. Koperasi dan BUMN secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945.

Jadi pertanyaan yang perlu diperbincangkan adalah: Sudah berapa jauh Koperasi memainkan peranan dalam mendorong ekonomi nasional? Sudahkah Koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai sokoguru perekonomian nasional? Banyak lagi pertanyaan yang bisa dilontarkan.

Empat puluh dua tahun sudah, Koperasi masih terus berupaya mengangkat dirinya ketempat yang disediakan UUD. Dia masih terus berupaya melaksanakan fungsinya sebagai pelaku ekonomi seperti BUMN, disamping swasta yang juga punya peranan dalam pembangunan ekonomi.

Persoalannya sekarang, dalam usia yang ke empat puluh dua ini, Koperasi harusnya sudah berperan penuh sebagai pelaku ekonomi, untuk mewujudkan kemakmuran bagi semua warga negara sesuai dengan pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.□

Digitized by Google

Tujuh Kunci Sukses Keberhasilan KB

Program pelaksanaan Keluarga Berencana di Indonesia telah memakan waktu yang cukup panjang. Kini, hasil dari jerih payah itu tidak sia-sia dan telah membuahkan hasil yang membanggakan. Bahkan, Badan Dunia (PBB) mengacungkan jempol dan memberi penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan Keluarga Berencana di Indonesia.

Untuk mencapai program pelaksanaan Keluarga Berencana yang mantap, dilakukan dengan penuh liku-liku dan perjuangan. Dimana, sebelum Presiden Soeharto menandatangani deklarasi kependudukan dunia tahun 1969, orang membicarakan masalah KB ini masih dirasakan tabu. Dan setelah program KB dilaksanakan, suara-suara yang bernada minor juga bermunculan di permukaan. Ada yang beranggapan, haram hukumnya ikut Keluarga Berencana.

Namun, program nasional yang salah satu tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, terus berjalan. Untuk menerobos dan menyukseskan program tersebut dilakukan dengan penuh hati-hati, terprogram dan terencana. Cara pertama yang dilakukan adalah, memperkenalkan Keluarga Berencana itu kepada masyarakat. Jawa khususnya. Dalam memperkenalkan KB, memang tidak banyak akseptor yang dapat tergaet. Hanya 50 ribu dalam setahun. "Terus terang, dalam tahun-tahun tersebut (1970), kita tidak terlalu banyak mencari akseptor," ujar Haryono Suyono, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam percakapannya dengan *Media Karya* baru-baru ini.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1970 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 130 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah akseptor yang ada, sebanyak 50 ribu, tidak banyak berpengaruh terhadap demografis kita dan bahkan juga terhadap tingkat kesuburan ibu.

Memang dalam tahun-tahun itu, program pelaksanaan KB lebih dititikberatkan kepada masalah memperkenalkan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya agar ma-

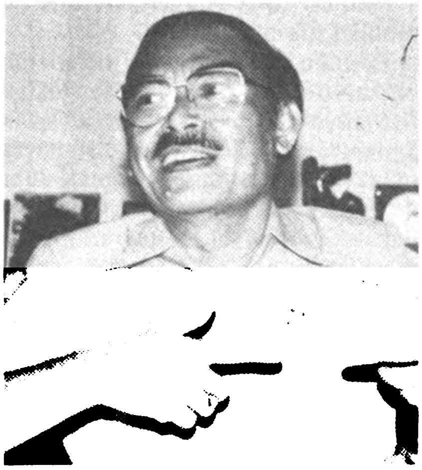

Haryono Suyono

syarakat berbicara tentang KB. Baik Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan yang lainnya. Hal ini masih terbatas di pulau Jawa saja.

Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 1974, program memperkenalkan KB diperluas hingga di luar pulau Jawa. Misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan lima tahun kemudian persisnya tahun 1979/1980 program pelaksanaan KB ini telah menyentuh seluruh propinsi di Indonesia, didalamnya termasuk Timor-Timur. "Dan pada tahun itu, program KB sudah mempunyai sifat ganda. Sifat itu antara lain tidak hanya menangani masalah vitalitas saja, tetapi sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dalam rangka untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera, kata Haryono Suyono menegaskan.

Kemudian dalam perjalanannya selama 10 tahun, program Keluarga Berencana ini sepertinya terus dipacu. Dimana selama kurun waktu itu jumlah penduduk menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Dari tahun 1970-1980, penduduk Indonesia bertambah menjadi 30 juta jiwa. Mulai saat itu, program Keluarga Berencana terus semakin ditingkatkan. Dan pada tahun itu pula (1980), program "Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja" terus dicanangkan. Dengan adanya program tersebut, hasilnyapun

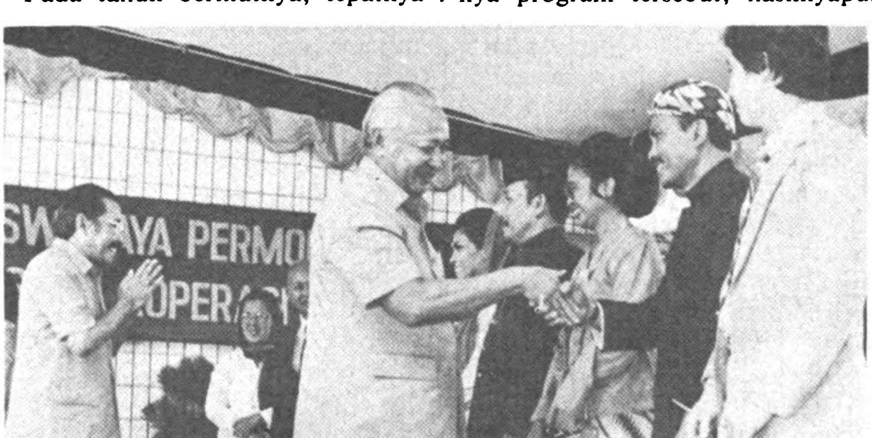

Dua anak cukup, laki-laki, perempuan sama saja

Digitized by Google

cukup nyata dan menggembirakan. Akseptornya pun dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan.

Dalam satu tahun, jumlah akseptor dapat mencapai 4 sampai 5 juta. "Bila jumlah akseptor sebanyak itu, dihitung secara akumulatip, maka dalam satu hari jumlahnya mencapai 15 sampai 20 ribu akseptor," ujar Haryono.

Semenjak itu, dampak demografis sudah semakin terasa. Tingkat kematian bayi turun secara drastis. Begitu pula dengan tingkat pertumbuhan penduduk turun menjadi hanya 3,1 persen. Namun, kalau diukur dengan tingkat kesuburan ibu selama 10 tahun, turunnya mencapai 40 persen. Sedangkan tingkat kematian dari tahun 1970 hingga 1985 juga mengalami penurunan sekitar 50 persen.

Lalu, apa kunci sukses semua ini?

Kepala BKKBN membuka tabir kesuksesan ini dengan gamblang dan terbuka. Menurutnya, ada 7 kunci sukses yang membuat program KB ini berhasil.

Pertama, adanya komitmen dari Presiden Soeharto, bukan saja karena adanya deklarasi kependudukan yang ditandatangani tahun 1969, tetapi komitmen yang terus berlanjut. Selain itu Presiden Soeharto memperhatikan dan menterjemahkan kegiatan pelaksanaan Keluarga Berencana ini di lapangan.

Kedua, komitmen itu terus berdengung dan diikuti oleh para pemimpin lainnya seperti; Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat seperti Dharma Wanita, KOWANI dan yang lainnya.

Ketiga, adanya komitmen politik. Komitmen ini telah diikuti oleh program kegiatan masyarakat dan pemerintah.

Keempat, program Keluarga Berencana ini mempunyai waktu. Artinya, program yang dilaksanakan ini mempunyai target.

Kelima, target-target tersebut kemudian dievaluasi.

Keenam, tidak pernah memperdebatkan orang yang tidak ikut dalam Keluarga Berencana. Tetapi selalu menanyakan pada diri sendiri, bagaimana melaksanakan program Keluarga Berencana itu dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dengan mulus.

Ketujuh, keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari manajemen yang lincah namun luwes. Misalnya dalam pemakaian alat yang berkaitan dengan KB tersebut. Seperti spiral. Bila orang tersebut tidak cocok menggunakan alat itu, bisa menggunakan yang lain seperti pil atau kondom serta yang lainnya.

Strategi yang ampuh

Keberhasilan Keluarga Berencana di Indonesia setidaknya telah membuat kagum negara lain. Dalam kurun waktu 20 tahun, pelaksanaan KB mencatat prestasi yang patut dibanggakan. Dan karena itu Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dari Badan Dunia (PBB) dan sekaligus memberikan sambutan di depan para anggota dewan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan KB di Indonesia ini, dinilai oleh negara-negara lain disebabkan oleh adanya strategi yang tepat dalam melaksanakan program Keluarga Berencana. Seperti diuraikan Haryono Suyono, Indonesia dalam melaksanakan program KB tidak dilakukan dengan cara konfrontatip. Namun, dilakukan dengan cara menampung aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

Misalnya, pada awal dilakukannya pelaksanaan program KB, ada sekelompok golongan masyarakat yang tidak setuju dan bahkan menganggap

Orang Senang Pakai Pil

ADA pepatah yang bunyinya kurang lebih demikian; rambut sama hitam, namun keinginan bisa berlainan. Pepatah ini sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melaksanakan program KB. Sebab, alat yang digunakan untuk mengurangi tingkat kehamilan mempunyai macam, bentuk dan jenis yang berlainan. Seperti kondom, sistim suntik, spiral, pil, susuk dan yang lainnya.

Dari berbagai jenis perangkat pencegah kehamilan ini, pil menempati urutan teratas. Kesenangan sebagian besar masyarakat dalam melaksanakan program Keluarga Berencana dengan menggunakan pil dapat dimaklumi. Sebab, penggunaan pil itu selain praktis juga tidak harus meminta bantuan orang lain.

Dari data yang ada, penggunaan pil ini menempati urutan teratas dibandingkan dengan pemakaian alat yang lain, yaitu 39,9 persen, disusul dengan spiral 30,8 persen dan suntikan 19,1 persen. Sedangkan alat kontrasepsi yang masih sedikit dipakai adalah kondom yang hanya mencapai 1,7 persen. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan adanya tingkat kesadaran masyarakat yang belum cukup tinggi.

Meski promosi dalam menunjang program keberhasilan KB dilakukan secara gencar, namun masih saja ada masyarakat yang enggan menggunakan alat-alat tersebut. Dari data yang dapat dihimpun, bahwa pada tahun 1985, masih besarnya wanita kawin umur 10-49 tahun yang enggan menggunakan alat kontrasepsi tersebut, yaitu berjumlah 56,16 persen. Sedangkan wanita yang memakai kontrasepsi adalah 38,52 persen dan yang pernah pakai tetapi pada waktu dilakukan pencacahan tidak memakai berkisar 5,32 persen.

Dalam data tersebut tersirat bahwa kelompok usia muda 10-14 tahun, belum banyak memperhatikan tentang masalah Keluarga Berencana, masih belum banyak memperhatikan tentang perlunya Keluarga Berencana. Ini terlihat jelas dalam data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan masih betapa kecilnya kelompok usia kawin muda yang ikut dalam program tersebut, yaitu hanya 3,13 persen. Sedangkan wanita kawin dalam usia 30 sampai 34 tahun jumlahnya cukup membanggakan, yaitu 48,21

Digitized by Google

Penambahan tenaga medis jawaban bagi keluhan masyarakat

pelaksanaan tersebut bertentangan dengan kepercayaan yang dianut. Namun, berkat keuletan dan perjuangan yang tidak kenal berhenti, suara-suara yang minor itu, akhirnya berhasil juga diluntURkan.

Satu contoh, waktu ada pandangan yang mengatakan haram hukumnya bagi ibu yang ber-KB dengan menggunakan spiral, karena harus membuka aurat. Alur pandangan itu diikuti, tetapi juga terus dicarikan jalan keluarnya. Misalnya dengan menggunakan pil, atau kondom. Dan alternatip ini kemudian dicoba, namun belum juga membawa hasil yang diharapkan. Kemudian dilaporkan lagi dengan para pemuka agama, bahwa pelaksanaan KB belum banyak menghasilkan. Setelah dengan mengadakan pendekatan-pendekatan, akhirnya keluarlah fatwa yang mengatakan melaksanakan program KB dengan menggunakan spiral dibolehkan asal dengan menggunakan tenaga medis wanita, atau dalam pelaksanaan tersebut ditunggui oleh suaminya.

Untuk melaksanakan dan menunjang keberhasilan KB, memang merupakan suatu tantangan. Tenaga yang mendukung dalam program pelaksanaan tersebut juga masih terbatas. Dari 8 sampai 9 ribu tenaga medis yang ada, sangat berat untuk melayani akseptor yang berjumlah 65 juta.

Melihat kenyataan tersebut, Menteri Kesehatan Adiyatma merencanakan dalam Pelita V ini akan mencetak tenaga medis (bidan) baru. Sedangkan tugas tenaga medis tersebut antara lain untuk menolong kematian bayi dan melaksanakan program Keluarga Berencana.

Penambahan tenaga medis merupakan jawaban atas adanya keluhan dari masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan. Dengan demikian, diharapkan pula, masyarakat yang jauh dari pedesaan sudah tidak harus berjalan berpuluh-puluh kilometer jauhnya guna mendapatkan pertolongan.

Sebagaimana diketahui, kata Haryono Suyono, bahwa tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan masih 90 sampai 100 kali di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Maka dari itu, Menteri Kesehatan bersemangat untuk memperbaiki hal tersebut, ujarnya.☐ (BM)

persen. Dari data tersebut juga menunjukkan betapa rendahnya tingkat kesadaran kawin usia muda yang menggunakan alat kontrasepsi.

Meskipun demikian, para ibu usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi cenderung lebih banyak. Dan tampaknya tingkat kesadaran mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi jauh lebih tinggi. Keberhasilan masyarakat, khususnya ibu-ibu usia subur dalam menggunakan alat kontrasepsi tidak hanya ditentukan oleh usia cukup dalam hal perkawinan, namun juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam menunjang pelaksanaan program tersebut, sudah banyak poliklinik yang telah dibangun. Baik di kota maupun di desa. Dari tahun ke tahun jumlah poliklinik itupun juga terus meningkat. Tahun 1983 sampai tahun 1988 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, yaitu mencapai 3.172 buah poliklinik. Tahun 1983 untuk setiap poliklinik KB dapat melayani 3.709 pasangan usia subur. Tahun 1988 setiap satu klinik KB melayani 3.009 pasangan usia subur. Indikasi ini menyebutkan bahwa adanya pelayanan yang baik terhadap pasangan usia subur untuk dapat berpartisipasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya akseptor baru, yaitu pada tahun 1987 terdapat 4,9 juta. Dan pada tahun 1988 tercatat 4,7 juta akseptor baru. Atau 18,8 persen pasangan dari usia subur pada tahun 1987 dan 17,7 persen pasangan baru pada tahun 1988.

Sebagaimana diketahui, bahwa poliklinik memang telah dibangun di kota dan desa. Secara nasional pada tahun 1988 tercatat 8.878 buah poliklinik. Jawa Timur merupakan yang terbanyak dibangun klinik KB dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, yaitu berjumlah 1.570 buah pada tahun 1986. Tahun 1987 bertambah lagi menjadi 1.668 buah dan tahun 1988 telah tercatat 1774 buah klinik KB.

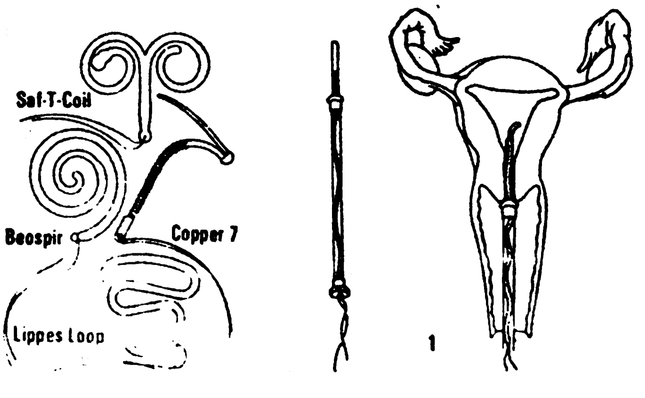

Alat pencegah kehamilan

Kemudian disusul Jawa Barat yang menempati posisi kedua setelah Jawa Timur. Pada tahun 1986 jumlah klinik yang tercatat 928 buah. Pada tahun 1987 meningkat lagi menjadi 981 buah dan pada tahun 1988 membengkak menjadi 1.011 buah poliklinik. Sedangkan pembangunan poliklinik di propinsi lain dalam tahun 1988, dirasakan juga sudah cukup memadai, yaitu rata-rata sudah lebih dari 100 buah poliklinik.☐ BM

Digitized by Google

KB Tidak Bertentangan Dengan Agama

Keluarga Berencana (KB), pertama kali dilakukan di Indonesia hanya melihat dua aspek, yaitu kesehatan Ibu dan kesehatan anak. Dalam perjalanannya, pelaksanaan Keluarga Berencana ini kemudian mengarah pada kehidupan sosial ekonomi.

Negara berkembang yang pertama kali mempelopori KB dikaitkan dengan masalah sosial dan ekonomi adalah India. Dan program tersebut dilakukan tahun 1953. Sedangkan di Indonesia dalam dasawarsa tahun 1970, pelaksanaan program Keluarga Berencana masih bertumpu pada aspek untuk kesehatan ibu dan anak.

Namun, setelah Presiden Soeharto menandatangani deklarasi kependudukan, yang disponsori oleh PBB — deklarasi ini menitik-beratkan kepada pengaturan kependudukan — maka, konsentrasi pelaksanaan Keluarga Berencana juga mengarah ke pertumbuhan sosial dan penduduk.

Untuk melaksanakan program tersebut pertama-tama memang dirasakan kurang mendukung. Kemudian untuk menyukseskan pelaksanaan program tersebut, Presiden Soeharto meminta Idham Chalid — waktu itu Menteri Kesra (Kesejahteraan Rakyat) — untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemungkinan program kependudukan

PP Sumbung

dan Keluarga Berencana ini sebagai pemeran nasional program pembangunan sosial ekonomi.

Dalam menunjang program pelaksanaannya, pada tahun 1968 dibentuklah sebuah lembaga yang kemudian dikenal dengan nama *Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)*. "Badan tersebut merupakan perpaduan dan kerjasama, antara pemerintah, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Dewan Gereja dan yang lainnya. Sehingga lembaga LKBN ini diberi konotasi semi pemerintah," ujar PP Sumbung, Wakil Kepala BKKBN.

Melihat akan arti pentingnya pelaksanaan Keluarga Berencana, maka LKBN mengikutsertakan peranan kaum ulama. Sedang tokoh-tokoh lainnya dikirim ke luar negeri dalam rangka misi program Keluarga Berencana antara lain ke India, Pakistan dan Thailand untuk mempelajari tentang pelaksanaan Keluarga Berencana di negara tersebut. Dan tokoh-tokoh ulama dikirim ke Mesir, Tunisia, Maroko dimaksudkan untuk mem-

Digitized by Google

pelajari, apakah pelaksanaan Keluarga Berencana ini bertentangan dengan agama atau tidak. Kebanyakan para ulama waktu itu pergi ke Mesir.

Di negara tersebut, para alim ulama ini membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan program KB, apakah itu bertentangan dengan agama atau tidak. Namun, setelah melakukan proses yang panjang, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Keluarga Berencana itu tidak bertentangan dengan agama.

Setelah melihat pengalaman negara lain, maka kita berkesimpulan, bahwa di Indonesia sudah waktunya Keluarga Berencana ini dijadikan program nasional. Dan pada tahun 1970, LKBN berubah nama menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), dan program Keluarga Berencana ini pun dimasukkan dalam Repelita I," ujar Sumbung.

Sedangkan tugas BKKBN ini, lanjut Sumbung, adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan dan perencanaan

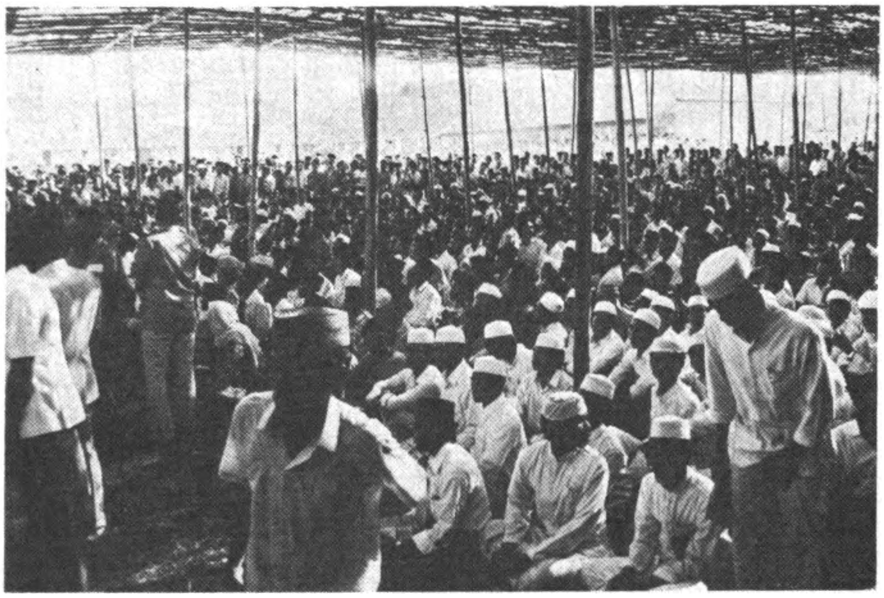

Mengikutsertakan ulama

program kependudukan Keluarga Berencana, dalam arti bahwa instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan Keluarga Berencana, didorong untuk melaksanakan program tersebut dibawah koordinasi BKKBN.

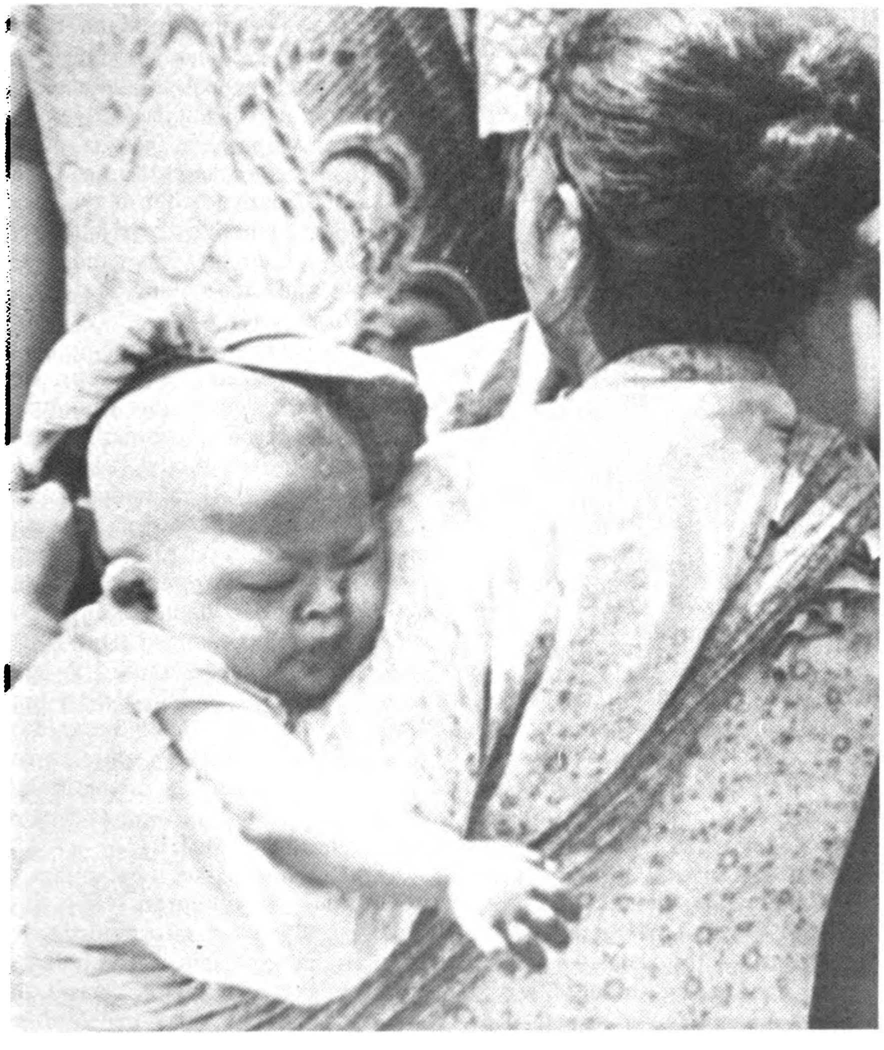

Misi Program Keluarga Berencana

Jadi, kata Sumbung, BKKBN ini selain sebagai perencana, koordinator sekaligus juga memonitor pelaksanaan Keluarga Berencana. Namun, karena terbatasnya dana dalam menunjang program tersebut, maka dalam pelaksanaannya, BKKBN mengaitkan pula dengan instansi yang lain. Misalnya, dengan Departemen Kesehatan, dimana departemen tersebut telah mempunyai fasilitas seperti rumah sakit, poliklinik dan yang lain. Selain itu juga dengan Departemen Penerangan, dimana departemen tersebut dapat membantu dalam pemberian informasi.

Sebagaimana diketahui, bahwa di negara-negara lain, KB ini dimasukkan dalam jajaran Departemen Kesehatan seperti India. Sedangkan di Indonesia BKKBN ini tidak berdiri sendiri bahkan merupakan integral dari Depkes, Deppen dan yang lainnya.

Mengenai masalah dana, pada awalnya dana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Keluarga Berencana ini masih banyak bergantung dari bantuan luar negeri, yaitu 80 persen. Selebihnya yang 20 persen didapat dari dana pemerintah, ujar Sumbung.

Namun, dalam perjalanannya, keadaan itu menjadi berbalik. Dana yang digunakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana itu 80 persen dari dalam negeri, sedangkan selebihnya berasal dari bantuan luar negeri. □

(BM)

Digitized by Google

Menjaring Modal Untuk Koperasi

Tiba-tiba saja masalah koperasi kembali hangat dibicarakan. Penyebabnya bukan soal bagaimana peran mereka sebagai salah satu pelaku ekonomi di negeri ini yang masih tertinggal dibanding dua pelaku ekonomi yang lain; BUMN dan swasta. Tapi perhatian orang kini banyak tertuju pada masalah permodalan di badan usaha ini.

Apalagi di tengah peringatan Hari Koperasi ke-42 ini, masalah permodalan, tampak tambah semarak dibicarakan. Sejumlah ahli dan orang yang terlibat langsung dalam usaha ini seperti terkena "sentrum" untuk membahasnya dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang essensial ini.

Perlu keseimbangan optimal antara modal dengan penggunaan modal

Lalu kenapa topik ini yang diambil? "Masalah permodalan merupakan salah satu faktor dasar dan essensial sekali dalam kelangsungan suatu usaha," kata bekas Direktur Kredit Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Drs. Ismet Abdullah. Dan ia tidak mengenyampingkan faktor lain yang menentukan, seperti manajemen, produksi, dan marketing.

Masalah permodalan memang menjadi semakin penting di tengah terus meningkatnya perkembangan teknologi dan pelbagai spesialisasi dalam dunia usaha.

Dalam lembaga usaha koperasi, sumber modal yang diperoleh biasanya berasal dari dalam dan luar. Elemen modal sendiri meliputi simpanan, pinjaman, penyisihan dari sisa hasil usaha (SHU), termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Sedang komponen modal luar, biasanya adalah pinjaman pihak ketiga (bank) dan pinjaman masyarakat.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan modal — khususnya modal dari luar (modal asing) — memang tidak terlepas dari usaha untuk memperoleh modal yang dibutuhkan oleh koperasi dan menggunakan modal itu seefisien mungkin.

"Bagi koperasi, bila dikelola secara badan usaha yang sehat, tentu akan memperhitungkan *cost and benefit* dalam pemanfaatan modal yang berasal dari luar dengan sistem pembelanjaan yang tepat," tutur Ismet Abdullah.

Ia melihat bahwa efek dari penambahan modal dari luar baik ditinjau dari kepentingan modal sendiri maupun pemilik, dapat mempunyai dampak finansial yang menguntungkan.

Bila kebutuhan modal sudah meningkat — karena bertumbuhnya badan usaha dan modal dari intern telah digunakan semua — memang tampaknya tidak ada pilihan lain, selain menggunakan modal dari luar; apakah itu melalui utang atau dengan menambah besarnya simpanan-simpanan di koperasi.

Tapi penambahan modal dari luar itu membawa beban biaya dana. Besar kecilnya biaya dana tersebut tergantung dari jenis-jenis modal luar apa yang dipilih. Terlalu besar jumlah modal yang diperoleh, ini bisa mengakibatkan menurunnya sisa hasil usaha, karena adanya beban biaya dana yang besar. Sebaliknya, terlalu kecil modal yang diambil, dapat mengakibatkan usaha yang sedang dijalankan akan kurang berhasil.

Tapi Ismet tampaknya mempunyai resep untuk soal ini. "Perlu diusahakan adanya keseimbangan yang optimal antara perolehan modal dengan biaya penggunaan modal," katanya.

Kalau mendasarkan pada prinsip yang konservatif, maka dalam keadaan bagaimanapun juga, jangan mempunyai jumlah utang yang lebih besar ketimbang jumlah modal sendiri. "Artinya, modal luar jangan lebih besar dari dua kali modal sendiri," jelas Ismet. Dengan cara itu, modal luar yang dijamin tidak lebih besar dari modal yang menjadi jaminannya. *Debt ratio* atau *leverage factor* adalah rasio antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri.

Tapi umumnya rasio tersebut jarang diterapkan lagi, lantaran resiko dari bidang usaha yang satu berbeda dengan usaha yang lain. Pada industri bank, misalnya, rasio itu masih dianggap sehat bila tidak melebihi sepuluh kali modal sendiri.

Sejumlah kalangan memang pernah

Digitized by Google

Mengelola usaha koperasi tidak berbeda dengan badan usaha lain

berpendapat bahwa mengelola usaha koperasi tidak berbeda dengan mengelola badan usaha lain. Tapi sebaliknya ada yang mengatakan bahwa mengelola koperasi diperlukan pemahaman tertentu.

Sebab perlu diingat, koperasi selain sebuah badan usaha — yang berarti mengelola perusahaan — juga sebuah organisasi kumpulan dari anggota-anggotanya. Koperasi tunduk pada apa yang dikenal sebagai asas dan sendi dasar koperasi.

Makin majunya perkembangan dunia usaha, maka pengelolaan koperasi memang menuntut para tenaga pelaksana yang mempunyai kemampuan manajerial yang cakap untuk menjalankan kegiatan dan mengembangkan organisasi ini.

Meski begitu, tampaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan modal dari luar ini. Misalnya, besarnya *cost of capital* (biaya modal atas dana yang digunakan).

''Ini penting untuk membandingkan berapa besar penghasilan yang diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan,'' kata Ismet.

Yang tak kalah penting adalah yang menyangkut waktu dari uang. Bila modal uang yang diperoleh, akan diinvestasikan dalam aktiva tetap, maka perlu diperhitungkan nilai waktu dari uang, mengingat dana yang ditanam dalam aktiva tetap adalah jangka panjang.

Untuk mengoptimalisasikan modal luar perlu disusun *cash flow*. Sebab dengan cash flow dapat diproyeksikan kapan dana akan dikeluarkan dan kapan ada pemasukan dana. Ini juga untuk mengetahui, apakah kegiatan usaha yang dijalankan betul-betul mendapat keuntungan atau tidak.

Dalam rangka untuk menarik modal yang dibutuhkan oleh koperasi, selain mendasarkan pada keinginan, juga harus memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan modal tersebut. Keinginan ditinjau dari sudut kepentingan koperasi yang membutuhkan modal dan kemungkinan yang dihubungkan dengan kepentingan pihak pemilik modal.

Tapi yang penting dari itu adalah bagaimana memelihara dan mempertahankan kepercayaan pihak luar (pemberi modal). Di sini tampaknya perlu dijaga kondisi keuangan, baik dari sudut likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas.

Tapi Ismet memberi tambahan, bila *earning power* dari tambahan modal lebih kecil ketimbang tingkat bunga,

Digitized by Google

maka tambahan modal itu akan lebih menguntungkan bila dipenuhi dengan modal sendiri daripada modal asing.

Sebaliknya, bila selama tingkat bunga (biaya) utang lebih rendah dibanding earning power, memang lebih baik dibiayai dengan modal luar.

Pada hakekatnya pinjaman dari luar itu adalah utang, maka konsekuensinya harus dibayar kembali. Untuk itu perlu diperhitungkan tingkat kemampuan pengembalian.

Memang pemanfaatan modal luar sebagai salah satu alternatif untuk menunjang percepatan pertumbuhan koperasi (khususnya koperasi pegawai negeri) sangat dirasakan. Apalagi bila penambahan modal itu bisa dikelola secara profesional dengan memperhitungkan segala cost and benefitnya, maka langsung atau tidak hasilnya akan terlihat.

Tapi Ismet memberi saran hendaknya koperasi diberi kesempatan berusaha dan bekerja secara luas sebagaimana layaknya badan usaha. Dengan cara ini koperasi mampu berkembang lebih baik atas kekuatan sendiri.

"Tapi kita perlu juga mendorong koperasi untuk memperkokoh dengan sumber kekuatan sendiri terlebih dulu, baru kemudian mencari bantuan dari luar yang memadai," tambah Ismet.

Koperasi memang bukan perkumpulan modal, tapi memerlukan modal bagi pengembangan usahanya. Koperasi tidak menolak modal dari luar, tapi sesuai dengan asas swadaya dan mandiri yang dianutnya pembentukan modal pertama-tama diupayakan dari dalam organisasi sendiri melalui berbagai bentuk simpanan dan cadangan.

"Modal dari luar selalu ditempatkan sebagai pelengkap dan hanya menutup kekurangan modal yang diperoleh dari dalam," kata Sekjen Kadin Indonesia, Ibnoe Soedjono.

Menurut Ibnoe, modal dari dalam adalah modal yang ideal, karena bersifat murah. Ia bisa berjangka panjang dengan syarat-syarat ringan dan memerlukan pengikat hubungan antara koperasi dan anggota-anggotanya. Di sisi lain, ia juga merupakan investasi anggota, sekaligus kewajiban yang menjadi dasar bagi haknya untuk mengendalikan koperasi.

Tapi masalah utama dalam pemupukan modal dari dalam adalah kedudukan anggota yang relatif lemah. Ini membuat pemupukan modal lewat tabungan memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperoleh jumlah yang besar.

Karena itu, biasanya diperlukan

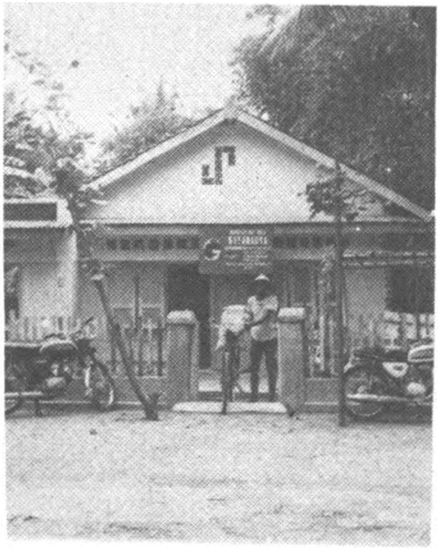

modal dari luar dalam bentuk pinjaman, bantuan, jaminan dan sebagainya yang menuntut tanggungan koperasi maupun anggotanya. Di sinilah diperlukan loyalitas, kesetiakawanan dan partisipasi aktif anggota-anggotanya.

"Tidak ada program yang efektif tanpa persediaan dana yang memadai," kata Ibnoe.

Ibnoe tampaknya memang lebih menitikberatkan pembahasannya pada koperasi pegawai negeri. Ia menyebut koperasi pegawai negeri memang memiliki dana yang relatif besar. Tapi semua ini tersebar pada semua tingkat organisasi untuk membiayai kegiatan masing-masing, hingga tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program khusus, seperti Panca Program.

Pada saat ini memang hanya IKPN-RI yang menguasai dana dalam jumlah yang relatif besar yang berasal dari Keppres No. 22 Tahun 1970, No. 33 Tahun 1983 dan No. 34 Tahun 1985. Tapi kelemahan dari posisi dana ini ialah bahwa statusnya adalah amanat yang dapat ditarik kembali setiap saat. Program mobilisasi dana adalah untuk mengganti dana tersebut dan kalau sasarannya berhasil membuat koperasi kuat dan mandiri guna melaksanakan program-program selanjutnya.

Bagaimana gerakan menabung di lingkungan pegawai negeri? "Gerakan ini menghadapi satu dilema," jawab Ibnoe. Di satu sisi diakui bahwa gaji pegawai negeri rendah, sehingga kemampuan menabung menjadi terbatas dan kemampuan untuk menabung pada koperasi makin terhambat, karena mereka juga harus memenuhi kewajiban membayar iuran dan sejenisnya terhadap kegiatan lain yang diikutinya, seperti Korpri, Dharma Wanita dan kegiatan ekstra yang lain.

Tapi di sisi lain, tanpa tabungan koperasi pegawai negeri akan tumbuh dengan kekuatan pihak lain. Dilihat dalam perspektif jangka panjang, koperasi pegawai negeri harus dapat mengatasi masalah-masalah yang terkandung dalam lilitan dilema ini.

Ibnoe menilai, untuk mendukung keberhasilan gerakan menabung melalui koperasi diperlukan berbagai tindakan pelengkap yang dapat mengurangi beban pegawai negeri sebagai akibat dari kewajibannya untuk ikut menyediakan sebagian dari pendapatannya yang masih rendah bagi lembaga non kedinasan.

Masalah ini tampaknya hanya dapat dipecahkan bersama-sama dengan

Bagaimana memelihara dan mempertahankan kepercayaan pemberi modal

Digitized by Google

Koperasi bukan perkumpulan modal

atau oleh pemerintah. Antara lain, dengan menetapkan prioritas, dalam arti lembaga mana yang didahulukan memperoleh kesempatan menarik iuran dari pegawai negeri yang umumnya dilakukan melalui pemotongan gajinya. Berdasarkan alasan-alasan konstitusional (UUD 1945) strategi pembangunan (GBHN) dan kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, sudah selayaknya kalau koperasi pegawai negeri dimasukkan dalam prioritas tersebut.

Gerakan tabungan dengan jumlah Rp 100 per anggota perorangan yang dilancarkan sekitar dua tahun lalu, ternyata belum efektif karena alasan-alasan tersebut dan juga tidak tersedianya insentif yang memadai untuk merangsangnya serta belum dikembangkan sistem dan teknik yang efektif untuk pelaksanaannya.

Tabungan memang bukan sekadar masalah kemampuan finansial, tapi juga menyangkut masalah psikologis dan harapan-harapan yang pasti terhadap kemanfaatan dan pemanfaatan. Karena itu, perlu ditumbuhkan adanya kesadaran untuk menabung, diciptakan perangsang-perangsang yang sesuai dan diberikan jaminan yang pasti bahwa tabungan mereka setiap saat diperlukan dapat dimanfaatkan.

Ibnoe dalam kaitan ini melihat bahwa pengembangan koperasi pegawai negeri dalam jangka panjang dan Rencana Pengembangan Lima Tahun IKPN-RI 1989-1993, jajaran koperasi pegawai negeri mempunyai satu potensi yang tidak dipunyai oleh koperasi manapun di Indonesia.

Pertama, pegawai negeri mempunyai pendapatan yang pasti setiap bulan dengan jumlah uang yang tetap. Pegawai negeri perorangan berjumlah lebih 3 juta pegawai, hingga sebagai keseluruhan daya beli pegawai negeri sangat besar, meski secara individual terbatas.

Kedua, anggota perorangan terikat dalam organisasi pemerintahan RI, sehingga secara relatif lebih mudah diatur dalam melaksanakan program. Apalagi kalau memperoleh dukungan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Ketiga, anggota perorangan koperasi pegawai negeri tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh desa dalam pemerintahan. "Memang koperasi pegawai negeri adalah satu organisasi besar dalam wilayah geografis yang luas," tutur Ibnoe Soedjono. Tapi dengan dukungan teknologi moderen saat ini yang dapat dipakai sebagai alat yang efektif, maka tujuan gerakan menabung IKPN-RI dalam jangka panjang (atau dalam kurun waktu 1989-1993) menjadi lebih mudah untuk dicapai.

Keempat, perkembangan dalam lingkungan (eksternal) koperasi pegawai negeri, khususnya dengan keluarnya Paket 27 Oktober 1988, mengandung peluang dan sekaligus penghambat bagi usaha gerakan menabung maupun mobilisasi dana koperasi pegawai negeri.

"Tetapi peluang itu hanya dapat dimanfaatkan bila organisasi pegawai negeri sudah terbina sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam melayani kepentingan anggota perorangan koperasi pegawai negeri," tutur Ibnoe.

Gerakan menabung IKPN-RI dan mobilisasi dana koperasi pegawai negeri pada dasarnya adalah untuk memperkuat kemampuan koperasi pegawai negeri dalam hal dana sendiri. Pemilikan dana sendiri yang terus meningkat akan memperkuat pula posisi IKPN-RI dalam menghadapi kerjasama dengan pihak ketiga dan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Dilihat dari pengembangan program mobilisasi dana, Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 di bidang lembaga keuangan dan perbankan memberikan

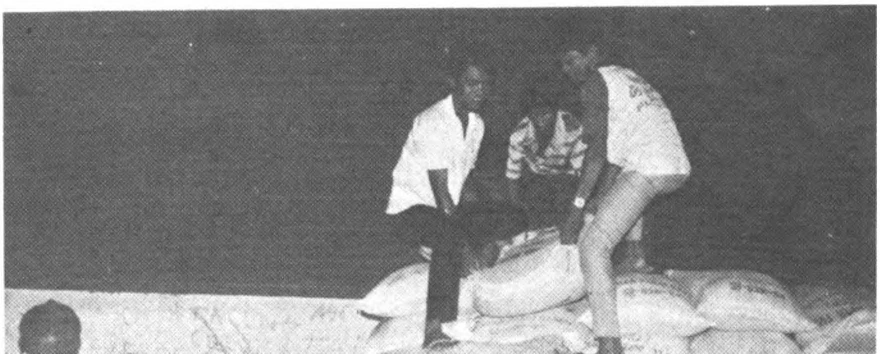

Memperkokoh sumber kekuatan sendiri

Digitized by Google

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi pegawai negeri, meski hal itu akan membawa masalah dan implikasi tersendiri terhadap sasaran restrukturisasi organisasi koperasi pegawai negeri yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahap sekarang ini adalah penting sekali untuk memperkuat persatuan dalam organisasi pegawai negeri, sementara perlu pula dipelajari manfaat deregulasi pemerintah.

Ibnoe melihat bahwa deregulasi itu masih berkelanjutan di bidang-bidang lainnya dalam lingkungan Ekuin. "Dan adalah lebih bijaksana untuk mengamati dan mempelajari perkembangannya, sebelum mengambil keputusan-keputusan yang pasti," katanya.

Ia menilai gerakan menabung merupakan bagian dari mobilisasi dana koperasi pegawai negeri yang harus bersifat menunjang program peningkatan keanggotaan perorangan koperasi pegawai negeri.

"Ini berarti bahwa gerakan menabung dan mobilisasi dana IKPN-RI harus terkait, dan tidak boleh dipisahkan dari insentif yang diciptakan dalam program simpan pinjam dan perkreditan umum atau program kredit perumahan untuk pegawai negeri anggota perorangan koperasi pegawai negeri," lanjut Ibnoe.

Di satu sisi, tata cara pelaksanaan gerakan menabung harus sederhana, baik yang menyangkut proses penabungan maupun proses penggunaan tabungan. Sementara di sisi lain, gerakan menabung dan mobilisasi dana koperasi pegawai negeri harus dapat memberikan gambaran tentang dana sendiri dari koperasi pegawai negeri secara keseluruhan.

Gerakan menabung dan mobilisasi dana koperasi pegawai negeri

Sebab, satu sama lain hal itu akan memperkaut posisi IKPN-RI dalam memanfaatkan dana-dana yang bersangkutan, hingga memiliki dampak secara nasional dalam usaha mengembangkan koperasi pegawai negeri.

Karena itu, dengan hasil mobilisasi dana dalam bentuk tabungan, simpanan wajib khusus dan bentuk lainnya, ditinjau dari disiplin perencanaan harus dibukukan untuk dan atas nama IKPN-RI. Dengan demikian, kemungkinan untuk dilakukan pemantauan secara efektif dan digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan.

Meski begitu, dana-dana yang terkumpul tersebut tidak perlu ditarik ke IKPN-RI seluruhnya.

"Tapi dapat ditempatkan dan dipergunakan di tingkat-tingkat organisasi yang ada. Dengan ketentuan bahwa penggunaannya harus berpedoman pada perencanaan yang telah disepakati dengan IKPN-RI," tutur Ibnoe.

Membentuk permodalan hanya semata-mata dari tabungan yang jumlahnya kecil per anggota perorangan memang memerlukan waktu yang sangat lama. Itu pun barangkali dengan hasil yang kurang memadai. Karena itu sumber pemupukan modal harus diperluas. Ini misalnya bisa dilakukan antara lain simpanan wajib biasa yang saat ini diserahkan kepada IKPN-RI Rp 10/anggota perorangan, kemudian simpanan wajib khusus yang dikaitkan dengan kredit yang diberikan oleh lembaga usaha perkreditan IKPN-RI, cadangan yang diperoleh dari berbagai usaha IKPN-RI dan dari sumber-sumber lain yang mungkin timbul dikemudian hari.

"Dengan cara seperti inilah diharapkan mobilisasi dana dapat dicapai," ucap Ibnoe.

Tapi Ibnoe memberi *wanti-wanti* bahwa dengan program simpan pinjam dan perkreditan umum serta program kredit perumahan IKPN-RI, lembaga usaha perkreditan IKPN-RI harus melibatkan diri dalam kegiatan, seperti pengembangan bank data dan sistem informasi manajemen koperasi pegawai negeri yang bertolak dari program peningkatan keanggotaan perorangan koperasi pegawai negeri.

"Lembaga itu juga harus melibatkan dalam proses restrukturisasi organisasi koperasi pegawai negeri," ucap Ibnoe mengingatkan.☐ (LT)

Sumber pemupukan modal harus diperluas

Digitized by Google

Mencari 2.000 KUD Mandiri Sebagai Lokomotif Pengembangan Koperasi

Ir Iman Taufik

Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat harus terus didorong perkembangannya dalam rangka mewujudkan Demokrasi Ekonomi.

Koperasi harus dapat dikembangkan menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, yang pertumbuhannya berakar didalam masyarakat. Karenanya kesadaran, kegairahan dan kemampuan serta partisipasi masyarakat untuk berkoperasi harus terus digalakkan.

Pendidikan perkoperasian, pembinaan KUD dan Koperasi Primer lainnya serta diversifikasi usaha perkoperasian harus lebih ditingkatkan.

Barisan kata-kata indah itu, merupakan amanat yang digariskan dalam GBHN 1988. Namun bagi bangsa Indonesia, dia tak hanya berhenti pada kata-kata.

Sebab, seperti disebutkan dalam salah satu kalimat pada Bab V Penutup, GBHN 1988 telah jelas-jelas dinyatakan bahwa berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara seluruh rakyat Indonesia.

Tapi dalam rangka memperingati hari Koperasi yang ke-42, yang jatuh pada 12 Juli lalu, tentu sudah pada tempatnya bila kita renungkan dan pertanyakan beberapa aspek yang menyangkut kehidupan koperasi di negeri tercintra ini.

Pokok soal yang perlu dipertanyakan menyangkut: Bagaimana peran dan perkembangan koperasi selama ini? Sudah tepatkah arah kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah, dalam mendorong perkembangan koperasi? Bagaimana prospek dan tantangan koperasi di masa depan, utamanya dalam Pelita V? Dan sebagainya.

Ketinggalan

Bicara mengenai perkembangannya, Wakil Ketua Kadin Indonesia, **Ir. Iman Taufik** dan **Drs. HJ. Mokoginta** (Anggota Komisi VI-DPR) dalam percakapannya dengan *Media Karya* mengemukakan, hingga kini perkoperasian kita masih jauh dari tingkat yang diharapkan, apalagi untuk mengimbangi kedua pelaku ekonomi lainnya.

"Dari keseluruhan sekitar 24.000 koperasi di Indonesia, termasuk kurang lebih 7.500 KUD, jumlah asset maupun nilai usahanya masih dibawah salah satu perusahaan swasta besar di Indonesia. Apalagi dibandingkan dengan BUMN seperti Pertamina, Perumtel, dan PLN," tandas Iman Taufik.

Pembinaan sektor koperasi oleh BUMN serta sektor swasta sudah banyak dilakukan, seperti melalui sistim Bapak Angkat/Anak Angkat dan subkontraktor. Tapi nilainya masih

Digitized by Google

jauh dari yang diharapkan.

Pembinaan koperasi seringkali dianggap mempunyai tujuan politis, atau hanya untuk menarik simpati masyarakat semata-mata, meski pembinaan tersebut benar-benar merupakan hal yang murni dan konsekuen.

"Gambaran mengenai perkoperasian saat ini menunjukkan citra koperasi yang masih perlu diperbaiki," tandas Iman dan Mokoginta.

Namun kaitan ini, Iman menuding pers. Katanya, koperasi yang sukses seringkali tidak diberitakan di mass media. Yang sering diberitakan malah papan nama dan penyelewengan-penyelewengan oleh pengurus KUD, Kopti, Badan Pengurus yang merupakan elite desa, yang meninggalkan bekas mendalam di hati anggota masyarakat sehingga kepercayaan terhadap koperasi menjadi berkurang.

Padahal koperasi jelas merupakan senjata yang ampuh melawan sistim tengkulak yang sampai saat ini masih berakar di desa-desa, utamanya di kalangan para petani dan nelayan.

Profesional

Menyinggung soal permasalahan pokok yang dihadapi koperasi di Indonesia, Iman mengemukakan, salah satunya karena pengurus koperasi belum sepenuhnya berfungsi dan bergairah untuk bekerja keras memajukan koperasi. "Selain, soal jiwa wira usaha para manajer koperasi yang belum sepenuhnya berkembang."

Guna mengatasi persoalan tersebut, Mokoginta menyarankan, agar dipertimbangkan pemakaian manajer profesional dalam koperasi. Seperti yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan keluarga di Indonesia.

Banyak soal yang disebut Iman sebagai permasalahan. Seperti soal pengorganisasian dan pembinaan koperasi, yang dikatakannya, belum sepenuhnya berdasar prinsip usaha yang secara ekonomis dan sosial memberi manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat sekitar. Serta belum sepenuhnya dilaksanakan dengan berasaskan sendi dasar koperasi.

Mokoginta melihat lain. Dia menilai, faktor yang turut memberi andil terhadap kurang melajunya pengembangan koperasi di Indonesia adalah masih sulitnya mendapatkan izin koperasi dan masih besarnya campur tangan pemerintah.

Untuk itu, anggota Komisi VI ini menghimbau agar campur tangan pemerintah dikurangi. "Selain itu, soal

Drs. HJ. Mokoginta

perizinan seyogyanya cukup dari notaris, seperti kalau kita ingin mendirikan PT," jelasnya.

Tapi terhadap komentar Mokoginta itu, Pemerintah mengatakan bahwa aksentuasi kegiatan kerja Departemen Koperasi sekarang telah beralih dari fungsi regulasi kepada fungsi pelayanan, "Dalam penciptaan dan pemberlakuan berbagai kemudahan serta iklim usaha yang mampu mendorong gairah usaha dan perkembangan dunia usaha koperasi," tutur Menteri Koperasi, Bustanil Arifin dalam keterangannya kepada Komisi VII-DPR belum lama ini.

Peraturan pelaksanaan

Dalam keterangannya kepada *Media Karya,* Mokoginta juga menyebut perlunya Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari UU No. 12/1967 tentang Koperasi.

Hal ini dianggap perlu untuk memacu perkembangan koperasi di masa mendatang.

Ketika ditanya, hal-hal apa saja yang perlu diatur lebih lanjut, Mokoginta mengatakan, antara lain mengenai ketentuan kerjasama antara koperasi, swasta dan BUMN.

Sepanjang pemantauan *Media Karya,* sebetulnya soal perlu tidaknya pengkajian kembali relevansi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU No. 12 tahun 1967 mengenai Pokok-pokok Perkoperasian sesuai tuntutan pembangunan sekarang ini, sudah sering dipermasalahkan dan dibahas dalam berbagai kesempatan.

Tapi dalam hal ini, Pemerintah tetap berpendapat bahwa Undang-undang tersebut masih relevan dan karenanya dapat digunakan untuk pedoman dasar pembangunan koperasi menjelang era tinggal landas memasuki pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun tahap kedua.

Tapi, menurut Bustanil Arifin, agar pelaksanaan UU No. 12/1967 dapat lebih mendorong pertumbuhan dan kemandirian koperasi, perlu diadakan pengaturan lebih lanjut, baik yang berupa peraturan/petunjuk pelaksanaan maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat menyeluruh sesuai dengan perkembangan perkoperasian di Indonesia.

Hal-hal yang memerlukan penegasan dan penjabaran lebih lanjut antara lain mengenai pengertian koperasi dan fungsi koperasi, badan hukum koperasi, struktur organisasi koperasi, keanggotaan koperasi, permodalan ko-

Partisipasi masyarakat berkoperasi perlu digalakkan

Digitized by Google

Mempertimbangkan pemakaian manajer profesional dalam koperasi

perasi, Sisa Hasil Usaha koperasi dan pembinaan koperasi.

Dalam rangka penegasan dan penjabaran lebih lanjut, telah dikeluarkan Instruksi Menteri Koperasi No.04/Inst/M/VI/88 tanggal 17 Juni 1988 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri serta petunjuk pelaksanaannya, antara lain Surat Dirjen Bina Lembaga Koperasi No. 1309/BLK/VII/1988; Surat Dirjen Bina Usaha Koperasi No. 342/BUK/VII/1988; Surat Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi No. 164/SJ/VIII/1988; Surat Inspektur Jenderal Departemen Koperasi No. 17/IJ/VIII/1988 dan Surat Kepala Balitbang No. 211/LIB/VIII/1988.

Kerjasama antar pelaku

GBHN 1988 telah menetapkan sistim ekonomi nasional yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam tingkat operasional hal ini berarti kerjasama yang serasi antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta serta keterkaitan yang mantap antara pengusaha besar, menengah dan kecil. Juga antar sektor pertanian, pertambangan, industri, jasa dan perdagangan sehingga mewujudkan suatu sistim ekonomi nasional yang mantap dan mampu bersaing secara profesional serta kompetitif di pasaran dunia sebagai "Indonesia Inc".

Namun menurut Iman Taufik, perkembangan sistim ekonomi nasional yang pada saat ini terjadi belum sepenuhnya menguntungkan sektor usaha koperasi. Karena terlihat gejala-gejala pengelompokkan kekuatan ekonomi skala besar swasta yang terpadu dan tangguh. Sedangkan keterkaitan dengan usaha menengah/kecil dan koperasi belum terlihat nyata.

Dikatakan, pengelompokkan kekuatan ekonomi swasta ini, sebenarnya adalah merupakan gejala-gejala umum akibat persaingan ekonomi yang sangat keras ditingkat ekonomi dunia.

Melalui penguasaan/pengambilalihan saham-saham perusahaan besar dan lain-lain di mana dengan gelombang globalisme yang melanda ekonomi dunia, kelompok-kelompok kekuatan ekonomi swasta berusaha terus memperkokoh kekuatan ekonominya karena takut dilindas oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar.

"Keadaan ini jelas tidak mendukung usaha-usaha mewujudkan sistim ekonomi nasional idealistis yang bersifat kekeluargaan dengan koperasi sebagai sokogurunya," tandas Iman.

Dalam pada itu usaha koperasi yang diharapkan sebagai tulang punggung sistim ekonomi nasional, masih terlalu lemah dan belum mempunyai citra yang baik akibat ulah oknum-oknum tertentu ditingkat operasional.

Menurutnya, masyarakat masih perlu diyakinkan bahwa koperasi adalah juga badan usaha yang menguntungkan sesuai dengan UU No. 1/1987 tentang Kadin apabila dapat dikelola secara profesional.

"Karenanya perjuangan Kadin untuk mendorong kerjasama antara ketiga pelaku ekonomi khususnya dengan memasyarakatkan koperasi pada dasarnya adalah bagian dari Gerakan Ekonomi Masyarakat," tambahnya.

Gerakan

Sesuai dengan "Demokrasi Ekonomi" maka peranan pelaku ekonomi harus merupakan suatu gerakan dari masyarakat dari bawah atau disebut "Gerakan Ekonomi Masyarakat" yang merupakan kekuatan yang nyata dengan memanfaatkan seluruh potensi ekonomi nasional baik sumber daya alam maupun manusia tanpa memilih kasih.

"Suatu sistim ekonomi nasional akan benar-benar kuat apabila mendapat dukungan penuh dari masyarakat kita yang merupakan konsumen terbesar yang terlibat langsung dalam laju pertumbuhan ekonomi kita," tandasnya.

Gerakan ekonomi masyarakat memerlukan dinamisme seluruh lapisan masyarakat, karenanya pemerintah harus lebih mendorong usaha-usaha masyarakat dalam turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Iklim usaha harus benar diciptakan bagi gerakan ekonomi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Monopoli yang merugikan masyarakat baik oleh pemerintah maupun swasta harus dihilangkan. Monopoli hanya diperbolehkan oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Koperasi harus diberi kesempatan seluas-luasnya dalam jenis-jenis usaha yang menguntungkan.

Iman melihat, profesionalisme dalam bidang usaha harus dikembangkan di masyarakat baik bagi sektor BUMN, koperasi maupun swasta.

"Bisnis fasilitas yang diberikan kepada pengusaha harus dihilangkan secara bertahap. Peningkatan profesionalisme badan usaha koperasi menjadi salah satu pokok program," tandasnya.

Digitized by Google

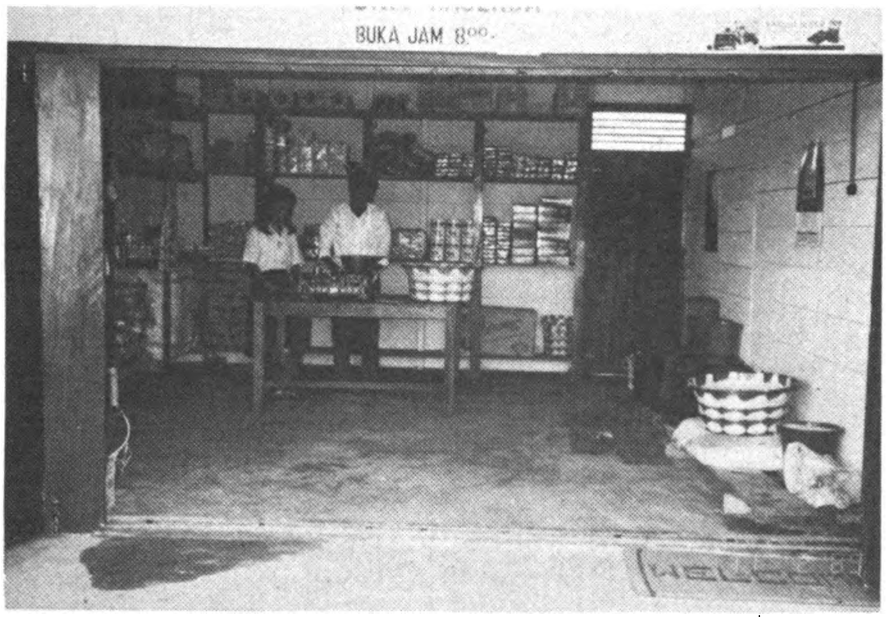

Mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional

Etika bisnis, katanya, juga harus dikembangkan dengan baik dalam membina pelaku-pelaku ekonomi sehingga menjadi kekuatan yang nyata.

Dikatakan, etika bisnis yang merupakan aturan permainan tidak tertulis dalam bidang usaha merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk mempersatukan seluruh kekuatan pelaku ekonomi karena tanpa etika bisnis, tidak mungkin "dasar kekeluargaan" dalam sistim ekonomi nasional dapat dipertahankan.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional harus terus dipertahankan dengan mengutamakan aspek pemerataan.

Dalam hal ini yang diharapkan adalah pemerataan yang bertanggung jawab, bukannya pemerataan hanya demi pemerataan semata-mata, tanpa mempertimbangkan aspek profesionalisme, etika bisnis dan pertumbuhan ekonomi.

KADIN

KADIN bekerja atas dasar pedoman-pedoman yang telah diatur dalam UU No. 1/1987, dalam mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, swasta dan koperasi, disertai dengan penciptaan pemerataan berusaha.

Menyadari adanya perbedaan asas dan motif usaha antara ketiga jenis usaha itu, maka untuk mewujudkan kerjasama yang serasi itu, KADIN berusaha sejauh mungkin menghindari terjadinya perbedaan-perbedaan, tapi sebaliknya selalu mencari segi-segi persamaan kepentingan.

Pertama-tama ditekankan, ketiga jenis usaha itu mempunyai satu tujuan yang sama, mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 UUD 1945.

Kedua, melalui pendekatan ekonomi pragmatis dalam kerangka konseptual yang ada, memilih kegiatan usaha tertentu yang menjadi kepentingan ekonomi bersama ketiga jenis usaha yang secara praktis segera dapat dilaksanakan.

Misalnya untuk ekspor komoditi tertentu yang bahan bakunya dihasilkan oleh produsen-produsen kecil yang tergabung dalam koperasi dan pengolahan serta pemasarannya dapat dikerjakan oleh usaha negara, swasta atau membentuk usaha bersama, sambil membimbing koperasi untuk memantapkan kedudukan dan peranannya dalam kegiatan yang dapat memperbesar nilai tambah.

Menurut Iman, dari pola kerjasama seperti itu diharapkan tercipta secara bertahap hubungan kerjasama yang luas dan serasi antara ketiga pelaku ekonomi nasional.

"Untuk itu, KADIN mengharapkan perhatian pemerintah untuk menciptakan kebijaksanaan khusus yang secara terarah menopang upaya kerjasama itu dengan menciptakan iklim yang sesuai dan memberikan insentif perpajakan maupun kemudahan lain bagi pelaku-pelaku usaha yang bersedia bekerjasama dengan koperasi seperti itu."

Dalam hubungan ini Peraturan Pemerintah untuk memberikan dasar hukum bagi kerjasama itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU No. 12/1967 kiranya dapat dikeluarkan, usul Iman Taufik.

Dalam arti menyeluruh, maka upaya KADIN dalam rangka membina kerjasama itu adalah untuk mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan di bidang usaha negara, koperasi dan swasta dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 UUD 1945.

KUD Mandiri

Dari ungkapan-ungkapan di atas, terlihatnya bagaimana strategisnya arti pengembangan koperasi di Indonesia.

Pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri melalui proses panjang

Digitized by Google

Mempersatukan seluruh kekuatan ekonomi

Lantas pertanyaannya, apa yang menjadi prioritas pengembangan koperasi di masa mendatang?

Dengan bertitik tolak pada GBHN 1988, maka prioritas pembinaan koperasi dalam kurun waktu Pelita V adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tidak melupakan pembinaan terhadap koperasi primer lainnya.

Dari sejumlah 7.636 KUD (data Juli 1988) yang ada saat ini, prioritas pembinaan ditujukan pada 2.000 KUD calon mandiri dan 2.000 KUD mengganti calon mandiri.

"Pada akhir Pelita V diharapkan terwujud adanya minimum 2.000 KUD mandiri yang tersebar pada kecamatan-kecamatan untuk menjadi lokomotif penggerak terhadap KUD dan koperasi primer lainnya," kata Bustanil Arifin.

Sekarang sudah ada ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai apakah suatu KUD sudah mandiri atau belum, seperti:

— Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan di daerah kerjanya.

— Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha KUD secara keseluruhan.

— Minimal tiga tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai petunjuk dinas.

— Anggota pengurus dan Badan Pemerintah semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuk pengurus lima orang dan Badan Pemeriksa tiga orang.

— Modal sendiri KUD minimal Rp 25 juta dan hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan.

— Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha KUD (program dan non program) sebesar 20%.

— Ratio keuangan: likuiditas antara 150% hingga 200% dan solvabilitas minimal 100%.

— Total volume usaha harus profesional dengan jumlah anggota, dengan minimal rata-rata Rp 250 ribu per anggota per tahun.

— Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi dan sarana usaha layak serta dikelola sendiri.

— Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh pengelola KUD serta tidak mempunyai tunggakan.

Menurut Menteri Koperasi, pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri adalah suatu proses yang berkesinambungan yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk menerapkan secara murni UU No. 12/1967, agar KUD/koperasi benar-benar menjadi organisasi ekonomi para anggotanya.

Diakui, mengingat kondisi daerah dan kemampuan KUD yang berbeda-beda, maka pencapaian 13 kriteria KUD Mandiri tidak akan dapat dicapai secara serempak oleh semua KUD.

Karenanya, pencapaian kriteria itu dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tingkat masing-masing KUD. Dengan demikian, kriteria itu disamping digunakan sebagai ukuran, juga merupakan panduan yang dapat memberikan bimbingan dan arah bagi KUD untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

"Untuk mencapai kriteria itu memang tidak mudah, tapi bila KUD itu bekerja keras dibantu dengan pembinaan yang baik oleh pemerintah dalam membangkitkan partisipasi anggota masyarakat dan masyarakat sekitarnya untuk mengelola potensi ekonomi yang ada, maka kita yakin semua kriteria dapat dicapai oleh KUD," demikian Menteri Koperasi, Bustanil Arifin. □ (HS)

Digitized by Google

Koperasi Mempunyai Dua Aspek Kembar

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional secara kuantitatip mempunyai dua aspek kembar. Pertama, koperasi sebagai suatu perkumpulan dan koperasi sebagai perusahaan. Dua aspek tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Demikian diungkapkan Ibnoe Sudjono, Sekjen Kadin Indonesia kepada Media Karya belum lama ini.

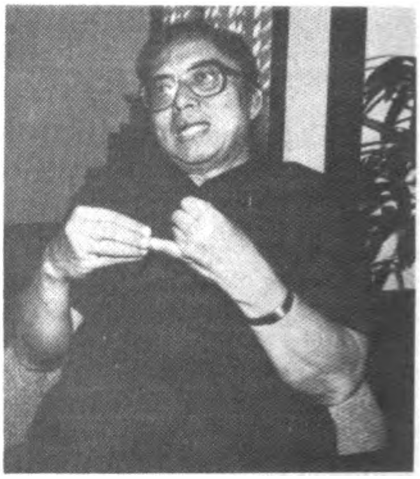

Ibnoe Sudjono

Memang, koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan dengan dua pelaku ekonomi lainnya — swasta dan BUMN —. Koperasi dalam melakukan fungsinya masih terikat dengan masalah moral. Misalnya, cara untuk mengambil keputusan dalam kekuasaan tertinggi di koperasi terdapat dalam rapat anggota. Dan dalam rapat tersebut untuk satu anggota mendapat satu suara.

Sedangkan dalam mengambil keputusan di perusahaan (PT), ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dengan ketentuan satu anggota satu saham. Kemudian mengenai pembagian surplus (keuntungan) dalam koperasi ditentukan oleh besar kecilnya jasa dari anggota. Sedangkan dalam perusahaan keuntungan dibagi berdasarkan besar kecilnya saham yang ditanam. "Bila melihat hal tersebut di atas, maka koperasi itu tidak bebas nilai. Karena dalam koperasi sudah tercermin, seperti yang tertuang dalam asas dan sendinya, yaitu berupa kegotong-royongan, kekeluargaan dan kebersamaan", ujar Ibnoe Sudjono.

Aspek sosial

Dalam Undang Undang disebutkan bahwa koperasi itu merupakan badan ekonomi yang berwatak sosial. Kata-kata berwatak sosial ini yang masih menjadi pembicaraan orang dan ada yang menilai kata-kata tersebut dapat menghambat gerak majunya koperasi.

Namun, Ibnoe Sudjono berpendapatan, koperasi yang berwatak sosial itu tidak mungkin dapat dihilangkan. Karena, sejak lahir koperasi ini sudah dilandasi dengan watak tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa koperasi itu lahir akibat adanya penderitaan. Penderitaan ini disebabkan oleh sistim kapitalisme yang kejam terhadap kehidupan perekonomian. Dan hal tersebut menjadikan protes dari suatu masyarakat yang tertindas. Maka untuk menentang sistim kapitalisme ini, maka lahirlah koperasi. "Dengan demikian, koperasi itu lahir mengandung watak nilai-nilai kejuangan dan berwatak sosial," ujar Ibnoe.

Melihat dari kenyataan tersebut, dinilai Ibnoe, koperasi itu cocok untuk membangun perekonomian Indonesia. Kalau koperasi itu dihilangkan, maka suatu harga yang terlalu mahal untuk kepentingan ekonomi. Jadi yang penting, dalam membangun koperasi itu tidak menghilangkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek sosialnya, katanya lebih lanjut.

Di negara-negara yang sudah maju ekonominya, seperti Jerman Barat, dalam membangun koperasi, aspek sosial juga tidak dihilangkan. Semboyan yang tumbuh subur di negara tersebut mengenai koperasi adalah "Satu untuk semua dan semua untuk satu". Sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan kepentingan pribadi diselaraskan dengan kepentingan umum.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Indonesia, di desa-desa khususnya, aspek sosial lebih menonjol dibandingkan aspek ekonominya. Maka, kalau melihat kondisi yang ada, maka tidaklah keliru untuk tetap mempertahankan koperasi itu tetap mempunyai watak sosial, ujar Ibnoe.

Diakui, bahwa secara kualitatip, koperasi ketinggalan dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu swasta dan BUMN. Hal tersebut menurut Ibnoe, masih terdapat penyelewengan dalam koperasi. "Adanya penyalahgunaan wewenang tersebut kita tidak tutup mata. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, menurut Ibnoe diperlukan pendidikan yang terarah, dan menyadarkan kembali pada masyarakat akan arti pentingnya koperasi

Watak sosial tidak mungkin dihilangkan dalam koperasi

Digitized by Google

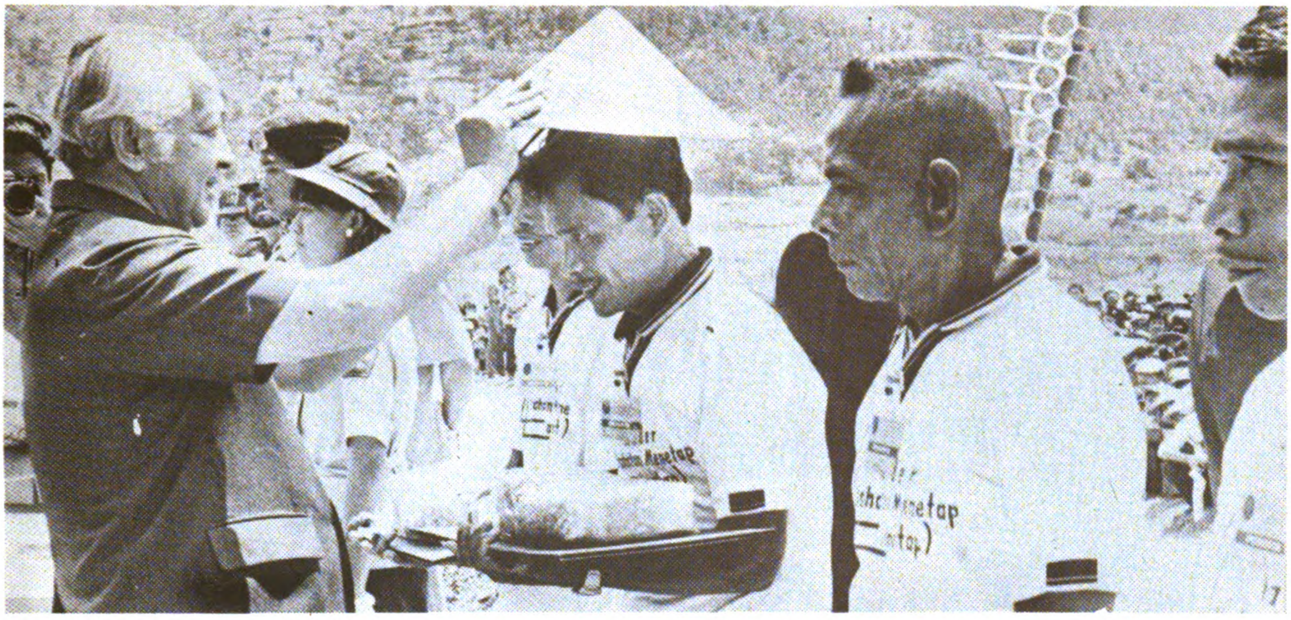

Bukan semua anggota koperasi lemah

dalam perekonomian Indonesia''.

Koperasi dan Kadin

Dalam Undang Undang Kadin Nomor 1 tahun 1987, disebutkan bahwa keanggotaan koperasi itu dibina oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Mengenai hal tersebut, Kadin mempunyai dua penglihatan. Pertama, pembinaan yang bersifat khusus, misalnya dengan memberikan pendapat, saran atau mengusulkan kepada pemerintah agar koperasi dapat dibantu dan yang lainnya.

Usul-usul Kadin yang pernah disampaikan kepada pemerintah, misalnya perlunya diadakan pembinaan khusus terhadap koperasi seperti yang tertuang dalam Undang Undang. Sebagaimana diketahui, bahwa kebanyakan anggota koperasi itu lemah. Bukan semua anggota koperasi itu lemah. Sedangkan usul yang lain adalah seandainya dalam rangka BUMN mau dijual dalam rangka efisiensi, apa salahnya dijual kepada koperasi karyawan. Pandangan Kadin mengenai hal ini dan untuk menghindari adanya pengangguran, maka pesangon yang diberikan akibat dari penjualan tersebut tidak harus diberikan dalam bentuk uang, melainkan berupa pemilikan terhadap BUMN tersebut.

Sedangkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka, saat akan menyerahkan dari BUMN — ke Koperasi —, koperasi tersebut harus dipersiapkan. Misalnya, karyawan tersebut sebelum masuk dalam koperasi harus dibina dan dipersiapkan lebih dahulu, supaya nantinya dapat me-*manage* perusahaan yang lainnya.

Penglihatan Kadin kedua adalah dalam rangka membina keanggotaan koperasi adalah melalui jalur kerjasama. Dalam UU Kadin menyebutkan, bahwa ketiga pelaku ekonomi, Koperasi, BUMN dan Swasta harus dapat kerjasama.

Diakui, bahwa antara ketiga pelaku ekonomi itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsip seperti asas dan tujuannya, seperti koperasi mempunyai tujuan pelayanan. Sedangkan swasta mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Meskipun demikian antara ketiga pelaku ekonomi itu juga terdapat pula persamaan-persamaannya. ''Persamaan-persamaan itulah yang harus kita cari demi kepentingan bersama yang praktis sifatnya,'' ujar Ibnoe.

Kemudian dia mengambil contoh adanya suatu proyek yang dapat dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya, bahan baku yang berasal dari rakyat itu diorganisir oleh koperasi. Dan swasta yang mempunyai kemampuan untuk mengekspor supaya dapat menangani. Dan bentuk-bentuk seperti ini, kata Ibnoe sudah ada, namun masih perlu dimantapkan.

Sedangkan bila koperasi itu bekerjasama dengan BUMN dirasakan tidak terlalu sukar. Sebab, semangat antara swasta dan BUMN, sudah dekat. Untuk itu, Ibnoe menyarankan agar pemerintah dapat memberikan rangsangan. Misalnya, bila swasta akan melakukan kerjasama ini perlunya diberikan rangsangan seperti adanya kemudahan-kemudahan dalam memperoleh kredit dan pajak, misalnya.

Koperasi mengapa ketinggalan?

Dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, BUMN dan swasta, koperasi itu masih ketinggalan. Kenapa?

Melihat dari latar belakangnya, bahwa koperasi itu muncul di Indonesia pada abad ke-XX, itupun secara sporadis dan masih mencoba-coba. Misalnya dilakukan di sektor pertanian. Dan hasilnya masih belum membanggakan. Selain itu, waktu itu bentuk ekonomi yang baru diterapkan dikalangan masyarakat yang masih terbelakang. Terbelakang dari segi pendidikan, maupun terbelakang dari aspek sosial ekonominya.

Sedangkan di sektor BUMN lain lagi ceritanya. Sejak jaman penjajahan Belanda, perangkat dan pendukung BUMN sudah ada dan tersedia. Begitu pula dengan swasta, dari dulu pemerintah dengan kebijaksanaan-kebijaksanaannya telah memberikan kesempatan kepada swasta untuk berkembang.

Meskipun demikian, dalam perjalanannya Koperasi telah dapat berkembang meskipun belum seperti yang diharapkan banyak orang. Maka tidak heran, kalau Presiden Soeharto berkali-kali menghimbau agar masyarakat mempunyai kesadaran berkoperasi. Semua itu dimaksudkan agar koperasi menjadi maju dan menjadi sokoguru perekonomian nasional. □ (DT/WIT)

Digitized by Google

Penyanggah perekonomian dan wahana untuk mewujudkan kesetiakawanan

Gerakan Koperasi Butuh Kesetiakawanan

Menumbuhkan koperasi sebagai wadah berhimpunnya warga masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bukanlah pekerjaan yang gampang. Paling tidak diperlukan kesabaran dan kesungguhan pengurus koperasi untuk menggugah rakyat yang belum sadar arti penting koperasi bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Ini tercermin dari isyarat Presiden Soeharto ketika memberikan amanat pada peringatan hari Krida Pertanian ke-17, Hari Koperasi ke-42 dan Hari Program Keluarga Berencana Nasional ke-19 (Pertasikencana II) yang dipusatkan di pelabuhan perikanan Brondong, Lamongan, Jawa Timur baru-baru ini. Presiden Soeharto dalam bagian sambutannya menyayangkan bahwa belum semua masyarakat terpanggil masuk menjadi anggota Koperasi.

Padahal, kata Presiden, koperasi tidak sekadar berperan sebagai penyangga perekonomian, namun lebih merupakan wahana untuk membentuk dan mewujudkan kesetiakawanan. Melalui wadah koperasi, lanjut Presiden, tingkat kesejahteraan para anggotanya pasti akan lebih baik.

Yang menjadi pertanyaan kini, mampukah koperasi menciptakan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan baik kepada anggota maupun masyarakat umumnya. Sebab disini citra koperasi sangat ditentukan bagaimana penampilannya memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anggotanya.

Berhasil tidaknya koperasi mengangkat harkat hidup orang banyak akan memberi penilaian sendiri bagi koperasi bersangkutan. Paling tidak koperasi sebagai bentuk usaha bersama harus benar-benar mampu menjembatani kepentingan warganya dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan

Untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, Presiden mengharapkan kelompok tani dapat menjadi pelopor. Dalam kaitan inilah pentingnya diwujudkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD), sehingga seluruh kelompok tani menjadi anggota KUD. Apabila kegiatan petani dan nelayan yang jumlahnya berjuta-juta disatukan dalam gerakan koperasi, pasti menghasilkan kekuatan pembangunan yang amat besar, yang dapat mempercepat laju kemajuan bangsa.

Namun kepada masyarakat yang sudah bergabung atau berhimpun ke dalam wadah koperasi, Presiden mengatakan memang belum semua koperasi bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggotanya. ''Keberhasilan koperasi tidak bisa dinilai dari upaya saling memberi informasi. Bagi koperasi yang merasa belum maju dalam usahanya hendaknya tidak malu-malu belajar dari koperasi

Digitized by Google

Kekuatan pembangunan dihimpun melalui koperasi

yang sudah maju. Pelajari apa kunci keberhasilan koperasi yang sudah maju itu,'' ujar Presiden.

Secara khusus Presiden menilai belum berhasilnya beberapa koperasi saat ini karena secara keseluruhan rakyat merasa belum terpanggil meskipun koperasi merupakan amanat dari UUD 1945. Koperasi hendaknya tidak hanya dinilai dari kemajuan yang telah dicapai dalam pelayanan kepada anggotanya semata. Kunci keberhasilan gerakan koperasi, menurut Presiden adalah kesetiakawanan rakyat yang merasakan dirinya terpanggil untuk berhimpun dalam wadah koperasi.

''Saat ini, kesadaran rakyat tentang pentingnya berhimpun dalam koperasi tersebut, kalau memang mereka sudah merasakan hasilnya. Kalau belum menikmati, mereka kurang percaya,'' kata Presiden lagi.

Oleh karenanya, gerakan koperasi hendaknya benar-benar merupakan wadah perekonomian rakyat yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila dapat meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat.

Belum seluruhnya

Memang dewasa ini sudah banyak keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan ini, namun diakui belum seluruh rakyat mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan bersama.

Dalam Repelita V ini bangsa Indonesia harus memberikan perhatian yang makin besar kepada pembangunan pertanian, koperasi dan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), sebagai persiapan untuk memasuki proses tinggal landas. Koperasi harus dapat berdiri tegak ditengah-tengah kemajuan ekonomi yang sangat dinamis, ditengah-tengah ekonomi dunia yang penuh dengan persaingan yang makin bertambah ketat.

Oleh karena itu, tidak bisa lain koperasi harus dikelola secara profesional. KUD hendaknya mengembangkan diri menjadi KUD yang mandiri. Kekuatan pembangunan yang dihimpun melalui koperasi tentu akan lebih besar lagi jika koperasi juga makin mengembangkan diri untuk bidang-bidang lain dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang sangat luas.

Untuk menunjang pembangunan diperlukan manusia-manusia yang sehat, produktif dan bermental pembangunan. Manusia-manusia seperti itu harus dipersiapkan sejak dini. Bahkan sejak dalam kandungan. Semuanya itu dapat dilakukan jika dapat diciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia.

Satya Lencana

Presiden dalam upacara yang berlangsung sederhana tapi cukup meriah yang dihadiri Ibu Tien Soeharto dan sejumlah menteri juga telah menganugerahkan Satya Lencana Pembangunan kepada Gubernur Jambi, Masychun Sofwan, serta sejumlah Bupati/Walikota atas jasanya memajukan koperasi di wilayah masing-masing. Juga dianugerahkan Satya Lencana Wirakarya kepada Gubernur Jateng, H Ismail dan Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan atas jasanya memajukan program KB di daerahnya.

Disamping itu, Presiden juga menyerahkan piagam dan kelapa hibrida kepada peserta KB Lestari, dan kredit motor serta Banpres mesin pembuat tepung ikan kepada sejumlah KUD.

Sedang KUD terbaik tahun ini, yang memperoleh penghargaan adalah KUD Sinar Jaya, Kabupaten Bandung; KUD Sepogo, Boyolali; KUD Tani Bahagia, Mojokerto; KUD Kewapante, Kabupaten Sikka (NTT) dan KUD Ulun Tanjuno, Kabupaten Badung (Bali)□ (NS)

Digitized by Google

Lemahnya Etika Berusaha Akibatkan Kriminalitas Ekonomi

Komputer membuat pembobolan bank lebih efektif

Kita tidak selamat berhubung sudah berbuat benar. Kita tidak selamat berhubung sudah berbuat baik. Tapi kita berbuat baik karena Tuhan memilih kita untuk diselamatkan dari dosa.

Pandangan dan doktrin tokoh utama dalam sejarah Eropa beberapa abad lalu, orang itu adalah John Calvin, tampaknya memang ganjil. Tapi itu tak diragukan lagi, telah mengilhami dan mempengaruhi tingkah laku serta peri kehidupan jutaan orang, lebih dari empat ratus tahun.

Doktrin Calvin yang belajar hukum di Universitas Orleans tersebut, agaknya belum banyak menyadarkan masyarakat Indonesia yang masih mengambil jalan pintas dalam mendapatkan kekayaan secara ilegal.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H. LLM, struktur hubungan antara kalangan bisnis dan pemerintah yang tidak fair dengan memberikan secara ilegal previlasi pada kelompok dunia usaha tertentu, menyebabkan terjadinya jalan pintas sehingga menimbulkan crime economics (kriminalitas ekonomi).

Hal tersebut, ditambah lagi dengan kesempatan berusaha yang memang kurang sehingga menumbuhkan budaya jalan pintas dan mengakibatkan lemahnya etik berusaha secara jujur dan terbuka.

Kondisi itu menimbulkan gejala manipulasi cek kosong, kejahatan asuransi, kejahatan komputer.

Kejahatan bank celakanya lebih banyak melibatkan orang dalam. Berbagai kasus membuktikan, bahwa hampir tak ada kejahatan bank yang tak melibatkan orang dalam.

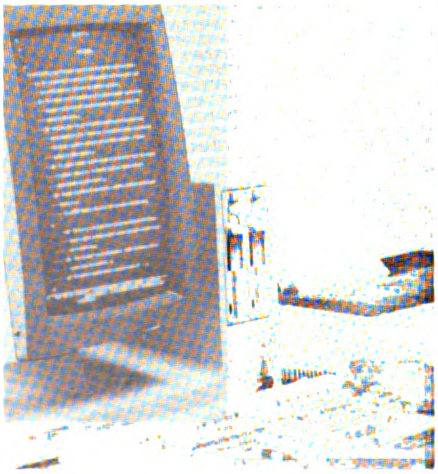

Salah satu contoh, pada 1988 lalu, adalah bekas Kepala Cabang Utama Bank Umum Nasional (BUN) Cabang Jakarta, Lim Wang Cheng dinyatakan sebagai buron Mabes Polri setelah mentransfer deposito nasabahnya ke berbagai bank di Amerika dan Australia sebesar Rp 8,2 miliar.

Di sisi lain, kejahatan komputer yang terjadi di Indonesia, diperkirakan akan lebih banyak lagi di kemudian hari. Sehingga perlu dipikirkan pencegahan dan penanggulangannya.

Kejahatan komputer perlu diberikan batasan serta unsur-unsur dan klasifikasinya yang dapat dibuat secara luas atau sempit sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Apabila sudah dilakukan, maka mungkin kejahatan yang dulunya disebut kejahatan komputer dapat dikategorikan pelanggaran.

Selanjutnya perlu diperhatikan unsur manusianya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer, yaitu sudah waktunya bagi para pembina dan penegak hukum serta petugasnya dan pemeriksaan sistem, agar dilengkapi dengan pengetahuan mengenai teknologi komputer. Juga perlu ditanamkan kesadaran akan computer security yang baik pada para pemilik dan pemakai komputer.

Masuknya komputer ke dunia perbankan, selain mengefisienkan pelayanan, mesin pintar tersebut juga membuat pembobolan bank lebih efektif. Di Amerika misalnya, tiga tahun lalu, dinas rahasia departemen keuangan AS mencatat lebih dari 5.000 kejahatan bank dengan komputer. Ini mengakibatkan bank lebih besar butuh biaya untuk membayar pengamanan.

Selama ini kerjasama antar bank untuk melawan para pembobol hanya terjalin dalam bentuk imbauan di kongres Perbanas. Kenyataannya, bank-bank yang pernah kebobolan itu sampai sekarang masih menutup diri.

Jumlah perkara dan kerugian bank pada 1982/83 sebanyak 15 perkara dengan kerugian Rp 5.357.006.000 dan sasarannya empat bank pemerintah, tujuh bank swasta dan empat bank asing.

Digitized by Google

Pada 1987/88 jumlah perkara naik menjadi 19 buah dengan kerugian Rp 3.939.798.000, sasarannya satu bank pemerintah, dua bank swasta serta satu bank asing. Jumlah perkara itu meningkat lagi pada 1988/89 menjadi 41 buah dengan kerugian mencapai Rp 12.150.451.566, sasarannya dua bank pemerintah dan dua bank swasta.

Sehingga jumlah seluruh perkara sejak 1982 sampai 1988/89 ini mencapai 106 buah dengan kerugian sebesar Rp 45.774.188.134,-.

Pencegahannya, kata Abdul Hakim Garuda Nusantara, harus ada upaya untuk membangun satu kebijaksanaan yang lebih memungkinkan hubungan-hubungan yang lebih terbuka antara dunia usaha dengan pemerintah.

Selain itu, juga harus ada kontrol terhadap penyelenggaraan kebijaksanaan ekonomi negara dengan kebijaksanaan perdagangan. Katakanlah seperti aturan kompetisi perdagangan yang lebih jujur.

Praktek monopoli di bidang perdagangan, akan menumbuhkan jalan pintas. Selain itu, juga menimbulkan unfair competition di kalangan dunia usaha itu sendiri.

"Barangkali kebijaksanaan bidang perdagangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti debirokratisasi dan deregulasi, belum melayani kepentingan pengusaha," ujarnya. Sehingga pada sisi lain, masyarakat melihat untuk mendapatkan kekayaan secara mudah tanpa kerja keras yaitu dengan jalan pintas itu tadi.

Jadi, masalahnya, budaya jalan pintas tersebut sebenarnya dikondisikan oleh pola umum dalam dunia bisnis dengan pihak swasta. Untuk itu, pendidikan bagi para enterpreneur diperlukan untuk menumbuhkan dunia usaha yang sehat.

Sedangkan kontrol terhadap aparat penegak hukumnya sendiri, perlu terus menerus dilakukan. Itu juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan untuk kepentingan masyarakat.

Kalau masyarakat diberikan perlindungan dan perilaku keteladanan, maka akan tumbuh dunia usaha yang sehat. Kalau tidak, maka sulit diharapkan munculnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Masyarakat dengan wilayah geografi yang besar, jumlah penduduk yang besar serta kehidupan yang kompleks menghendaki suasana tatanan yang tidak sederhana.

Orang tidak lagi bisa berpuas hati hanya dengan mengatakan hendaknya 'orang mengasihani orang lain', 'berbuatlah jujur', 'jangan menyakiti orang lain' dan lainnya. Dewasa ini orang membutuhkan armada peraturan yang tidak tanggung-tanggung banyaknya.

Mungkin orang akan berkelakar, bahwa manusia zaman sekarang sudah tuli. Sehingga, dibutuhkan lebih banyak perintah untuk menertibkan masyarakat. Hal yang menjadi masalah, yaitu semakin banyaknya masyarakat secara fisik serta kehidupan sosial ekonominya menjadi lebih kompleks.

Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa

Pada saat seperti itulah, dengan jelas muncul fungsi hukum sebagai sarana mengintegrasi masyarakat. Di mana masyarakat yang kompleks menampilkan banyak hubungan yang mengandung konflik.

Sudah sering didengar, hukum itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Melainkan di tengah-tengah suatu lingkungan yang sarat dengan berbagai kaidah sosial lainnya, proses-proses ekonomi, politik, singkat kata di tengah-tengah sekalian jaringan hubungan kekuatan dan kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Bagaimana pun hukum diberi otoritas untuk mengalokasikan sumber daya dan menentukan serta menyelesaikan hubungan-hubungan dalam masyarakat. Tetapi ia tetap dikuasai sekalian faktor tersebut.

Telah diketahui, bahwa yang namanya hukum pada awalnya menyatu dengan bidang lain dalam masyarakat. Tapi sejak ia harus bekerja dalam masyarakat yang modern, maka hukum dituntut untuk menjadi lembaga yang makin formal dan birokratis.

Sejak itu pulalah ia menjadi otonom berhubungan dengan lingkungannya. Bahkan menjadi instrumen kekuasaan publik. Dengan demikian, hukum yang semula menyatu dengan lingkungannya, sekarang berubah melakukan pertukaran dengan lingkungannya.

Dalam penegakkan hukum yang berkeadilan, pelanggar hukumnya sendiri sebetulnya juga masih dianggap anggota masyarakat. Karena itu dia juga tetap perlu diayomi oleh hukum. Kendati mereka melawan hukum, namun mereka tetap punya hak diperlakukan adil sesuai dengan perundang-undangan.

Tegasnya, hak-hak asasi manusia semua pihak mulai dari korban sampai si pelanggar tetap harus dilindungi. Dan salah satu ujud perlindungannya itu ialah pemberian bantuan hukum.

Munculnya tindakan sadistis, kata Abdul Hakim Garuda Nusantara, karena ada semacam budaya kekerasan dari aparat itu sendiri sehingga menimbulkan reaksi kekerasan dari masyarakat yang melanggar hukum.

Budaya kekerasan yang timbul, jangan dilihat dari masyarakatnya itu sendiri. Tapi juga dari aparat penegak hukumnya. Dan untuk pencegahannya, aparat agar konsisten melaksana-

Digitized by Google

Pelaku tindak kejahatan tidak lagi menggunakan cara tradisional

kan ketentuan hukum bagi pelaku.

Ahli kriminologi Mulyana W. Kusumah menilai, pola kriminalitas yang terjadi di masa datang semakin canggih dan terorganisir serta bersifat internasional.

Kejahatan kini tidak bisa lagi dilakukan secara sendiri-sendiri tapi sudah harus terorganisir (organized crime). Sebagai contoh, yaitu sindikat pembobolan bank, pencurian kendaraan bermotor, jaringan pengedar narkotika atau kawanan penjarah tambak udang.

Pelaku-pelaku kejahatan tersebut sudah tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional dalam melakukan aksinya. Tapi menggunakan senjata api, peralatan mobilitas tinggi serta alat-alat komunikasi yang modern dan canggih.

Menghadapi kejahatan dan penjahat yang semakin canggih tersebut, maka setiap aparat penegak hukum harus mengimbangi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas termasuk profesionalisme yang ditunjang dengan sarana dan prasarana operasional yang memadai.

Menurut Mulyana, pengungkapan kasus kejahatan kini sudah mencapai angka 60 persen, padahal tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar antara 40 sampai 50 persen dari seluruh kejahatan yang dilaporkan.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, secara umum peringkat teratas jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja tetap ditempati oleh jenis kejahatan terhadap harta benda, terutama pencurian ringan dan pencurian dengan pemberatan.

Akan tetapi, peningkatan kualitatif diyakini telah terjadi dengan menonjolnya keterlibatan penduduk usia muda dalam penyalahgunaan narkotika (bukan hanya pemakai, akan tetapi juga pengedar), alkoholisme, bentuk-bentuk agresivitas kolektif serta pengelompokan-pengelompokan pemerasan.

Agresivitas kolektif sebagaimana diperlihatkan dalam kasus perkelahian lebih cenderung bersifat ekspresif.

Di kota-kota besar terdapat banyak kemungkinan untuk persekutuan para pelanggar hukum yang pada gilirannya akan semakin mempertinggi kualitas kejahatan.

Dalam keadaan tiadanya tokoh-tokoh identifikasi di lingkungannya (keluarganya) atau lingkungan lebih luas, maka proses identifikasi dengan mengacu pada peran-peran kriminal yang seringkali diketengahkan oleh media-media komunikasi merupakan faktor interaksi lain yang berpengaruh.

Faktor-faktor pencetus adalah tekanan-tekanan situasional yang dialami kelompok usia muda akibat gagal menjalankan role performance yang diharapkan atau tekanan-tekanan emosional yang diakibatkan oleh toleransi atas frustasi yang rendah yang merupakan faktor penting dalam kejahatan oleh kelompok penduduk usia muda.

Faktor reaksi sosial adalah keseluruhan sikap dan tindakan baik masyarakat umum maupun penegak hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan yang tak jarang dapat berdampak negatif. Baik oleh karena timbulnya stigmatisasi yang menyulitkan penyesuaian-penyesuaian sosial selanjutnya dari pelanggar hukum maupun kecenderungan untuk mengasingkan atau mengisolasi para bekas pelanggar hukum maupun kecenderungan untuk mengasingkan atau mengisolasi para bekas pelanggar hukum dari kehidupan masyarakat.

Strategi penanggulangannya harus disusun dengan memperhitungkan tipologi kejahatan dan pelakunya. Di samping pendekatan dialogis untuk mengundang peran serta aktif dari mereka dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, tidak kalah pentingnya dengan pendekatan-pendekatan yuridis dalam kerangka penegakan hukum.

Pendekatan dialogis merupakan metode yang dipilih tidak hanya karena keterbatasan sarana penegak hukum, akan tetapi juga oleh karena pendekatan ini dapat mendayagunakan potensi-potensi masyarakat sendiri untuk menangkal kejahatan. Karena tidak semua konflik harus diselesaikan dengan tindak kekerasan. Dan orangtua lah yang wajib memberikan pengertian, teladan, contoh, agar nilai-nilai tertanam dan terwujud dalam perilaku anak-anak.

Untuk itu harus ada usaha untuk mempersiapkan anak, agar memiliki kesadaran hak dan kewajiban.

Setiap orang menginginkan keadilan. Tapi seperti halnya semua idaman,

Digitized by Google

Pendidikan hukum di Indonesia terlalu mengarah akademis

makin dikejar makin tampak seginya yang rumit. Ada anggapan dasar bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

Pendidikan Hukum

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH sudah ada perbedaan kalau dilihat dari sistem hukumnya, antara sistem hukum common law yang dianut negara-negara Anglo Saxon (Amerika) dan civil law yang kita anut, plus sekarang dengan ide-ide hukumnya.

Tapi sistem pendidikan hukum di Indonesia sudah mengarah ke pola Amerika, namun tidak mengenai sistem hukumnya, karena masih banyak continentalnya. Hanya caranya mungkin. Dan kalau dilihat yang dirumuskan GBHN dan Repelita, di sana ada kodifikasi. Sedangkan Amerika Serikat mana punya kodifikasi?

Sistem Amerika, ujar Oemar Seno Adji, memang praktis sekali. Dan buat Indonesia memang kadang-kadang kurang memuaskan, tapi kadang-kadang enak juga.

Dengan sistem pendidikan hukum yang sekarang ini, masih dapat dilakukan. Tapi kurikulum yang diterima mahasiswa terlalu banyak. Kalau dulu hanya diajarkan 18 vak dan masa ujiannya hanya dua kali. Sekarang, tiap tahun ada ujian dan bahkan sekarang setiap semester.

Sementara sistem pendidikan hukum di Indonesia juga terlalu mengarah akademis (academic oriented). Apalagi kalau dibandingkan dengan Amerika yang pragmatis sekali.

Terlalu banyaknya mata kuliah, membuat sulit untuk memperdalam. Meski ada kecenderungan cara mengajar yang praktis, seperti Amerika sementara sistem hukumnya masih Eropa kontinental.

Perekayasaan hukum bisa dibantu oleh praktek atau proses di luar hukum, misalnya melalui pendidikan. Hukum membentuk perilaku dan sikap. Dan hal itu memperoleh bantuan yang besar dari pendidikan yang meneruskan pembentukan pola perilaku tersebut kepada anak didik.

Pembinaan perilaku hukum melalui jalur pendidikan dapat lebih efektif dari pada melalui jalur hukum atau penerapan dan penegakkan hukum.

Karena itu dapat dikatakan, melalui jalur pendidikan, hasil perekayasaan dianggap lebih baik. Sebab itu dilaksanakan melalui cara-cara persuasif dan tidak paksaan.

Melalui cara persuasif maka internalisasi nilai kaidah dalam hukum dapat berjalan lebih alami. Sehubungan dengan hal tersebut, barangkali dunia pendidikan mempunyai saham yang tidak kecil dalam turut menegakkan hukum di Indonesia, khususnya yang menyangkut kaidah-kaidah yang bersifat dasar.

Sejarah pendidikan hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup panjang. Kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari politik etis pemerintah kolonial Belanda seputar tahun 1909, yang bertujuan mencetak pegawai yang mampu menjalankan administrasi hukum negara modern.

Setelah kemerdekaan, menurut Direktur LBH Abdul Hakim Garuda Nusantara, nampaknya orientasi pendidikan hukum belum banyak berubah. Para sarjana hukum lebih banyak melayani kepentingan-kepentingan dan kelompok kelas menengah.

Fokus pada pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah sejak Pelita I lebih menguatkan peranan profesi hukum yang seperti itu.

Ekonomisasi politik, hukum dan budaya dengan ideologi pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan pemerintah Orde Baru, telah menjadikan lahan subur bagi timbulnya sikap pragmatisme dalam masyarakat.

Akibatnya, usaha-usaha mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas belum sepenuhnya tercapai. Sementara kurikulum pendidikan hukum diarahkan pada memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis, dengan pendekatan teknis semata.

Kalau ditinjau secara sekilas perkembangan kurikulum pendidikan

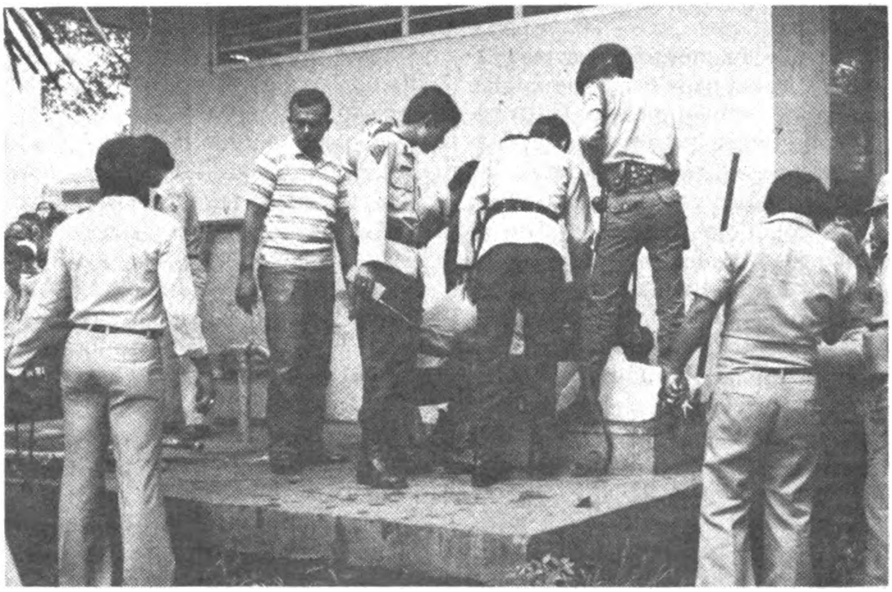

Eskalasi ancaman Kamtibmas terus berkembang

Digitized by Google

tinggi hukum di Indonesia, sejak jaman penjajahan, maka nada utama dari pendidikan tinggi hukum itu untuk penegakkan keadilan di pengadilan.

Pola itu begitu membudaya di masyarakat, sehingga pandangan masyarakat tentang hukum hanyalah rust en orde atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan pendidikan tinggi hukum hanyalah untuk menghasilkan hakim, jaksa dan pengacara semata-mata.

Bahkan timbul mitos, masalah hukum hanyalah masalah perlindungan hak asasi manusia (di pengadilan). menciptakan hukum baru. Demikian pula masyarakat luas mempertanyakan, bagaimanakah sebenarnya pelayanan hukum dalam soal pertanahan, hak cipta dan sebagainya.

Dengan demikian jelaslah orientasi pendidikan hanya pada masalah perlindungan hak asasi di pengadilan tidaklah memadai. Bahkan tumbuh anggapan, bahwa bagaimanapun hukum ditegakkan di pengadilan, apabila hukumnya memang kurang memadai, maka usaha tersebut kurang membawa hasil yang memuaskan.

Sementara eskalasi ancaman kamtibmas terus berkembang. Bahkan

Pembunuhan mengakibatkan trauma bagi masyarakat

Dan ini tercermin pada ketertiban di masyarakat luas. Kerancuan itu berkembang, karena terutama bernadakan Kamtibmas dan Polkam fungsi hukum tersebut. Maka orang agak enggan atau takut terlibat (agar tidak dihukum).

Dalam usaha mengejar kesejahteraan masyarakat pada masa datang dan pada masa lampau, dengan berorientasi pada fungsi hukum yang semata-mata menegakkan keadilan dan ketertiban, maka tumbuh kebijaksanaan untuk seolah-olah menghukumkan seluruh proses atau usaha pencarian kesejahteraan tersebut oleh instansi pemerintah. Tumbuhlah keadaan over regulated dengan hukum-hukum birokratik. Akibatnya tumbuh kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Dari segi ilmu hukum tumbuhlah permasalahan tentang penerapan hukum dan pelayanan hukum.

Masyarakat ekonomi mulai mempertanyakan, bagaimanakah sebaiknya pengaturan-pengaturan tersebut. Karena deregulasi pada dasarnya juga nyaris melampaui perkembangan teknologi kriminalistik sendiri. Ini adalah ancaman serius di dunia penegakkan hukum Indonesia.

Dari berbagai peristiwa kejahatan, pembunuhan tetap dipandang sebagai suatu kejahatan yang mengakibatkan trauma tersendiri bagi masyarakat karena dipengaruhi oleh derajat keseriusannya.

Beberapa kasus menonjol yaitu pembunuhan sejak 1987 sampai kuartal pertama 1989 ini, memberi gambaran tentang adanya korelasi antar korban dan pelakunya. Contohnya kasus Diece, kasus Drs. Marhaenis. Atau paling tidak adanya mata rantai yang cukup jelas, seperti kasus pembunuhan karena motif asuransi. Barangkali kasus-kasus itu dapat dijadikan parameter terhadap kasus mayat dipotong tujuh yang menghebohkan akhir-akhir ini.

Peran serta aktif dari masyarakat dalam memberi informasi terhadap jalannya penyidikan sungguh sangat penting.

Sebagaimana diketahui, selain informasi dari masyarakat, langkah-langkah yang diambil pihak kepolisian pun dalam mengungkap setiap kasus, selalu merekrut para ahli sesuai kasus yang dihadapi.

Beberapa kasus pembunuhan sadis tersebut dapat diungkapkan dengan baik, meskipun memakan waktu relatif lama. Kendati cara-cara melakukan tindakan kriminal semakin beragam dan maju, kemampuan kepolisian pun dalam menjalankan tugasnya juga sudah sangat maju dibanding masa aktifnya dulu. Polisi selalu dibelakang penjahat. Karena itu akal penjahat juga akan dapat terbaca dan diikuti.

Sebagai bukti, cara polisi mengungkap kasus mayat terpotong tujuh. Ilmu yang digunakan untuk mengungkap kasus yang dihadapi sudah sangat maju dengan ditunjang teknologi yang semakin canggih.

Selain itu, pelajaran-pelajaran yang diberikan dalam berbagai pendidikan kepolisian juga menunjukkan kemajuan. Namun, hal itu juga hasil dari kerjasama yang dilakukan Polri dengan kepolisian negara lain yang giat melakukan.

Dalam menghadapi kejahatan yang terus meningkat itu, Polri juga melakukan strategi offensif, baik dibidang operasional maupun bidang pembinaan.

Dibidang operasional antara lain menata manajemen operasional Polri, mengoptimasikan fungsi deteksi, pembentukan satuan-satuan khusus, meningkatkan dan mengoptimasikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian.

Secara preventif, mengoptimasikan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dan usaha-usaha memberikan daya tangkal kepada masyarakat.

Kebijaksanaan yang ditempuh Polri pada 1988/89 diarahkan untuk mengintensifkan segala pagelaran kekuatan serta upaya penataan kedalam.

Sedangkan upaya ke bidang pembinaan ditempuh dengan memperpanjang masa didik Seba Polri dari sembilan bulan menjadi sebelas bulan dengan ijasah minimal SMTA.

Sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika masyarakat yang sedang giatnya membangun, menjadikan tugas dan tanggung jawab penegak hukum di masa datang akan semakin berat dan bertambah kompleks. □ **(Hers)**

Digitized by Google

Kriminalitas dan Wibawa Hukum

Pada mulanya, Tuhan menciptakan Adam dan dari tulang rusuk Adam yang diambil, Tuhan menciptakan Eva. Maka hiduplah sepasang manusia ciptaan Tuhan, Adam dan Eva ditaman Firdaus. Sebuah taman yang dipenuhi dengan segala kebutuhan hidup agar kedua makhluk Tuhan itu bisa hidup. Tetapi diantara semua yang ada didalam taman itu, terdapat sebatang pohon yang disebut Pohon Pengetahuan Baik dan Jahat.

Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, ranum dan sungguh menarik untuk dimakan. Tetapi sesudah Adam dan Eva diciptakan, Tuhan bersabda : "Semua yang ada dalam taman ini boleh dimakan. Kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada ditengah taman ini jangan dimakan" (Kejadian pasal 1).

Adam dan Eva melanggar titah Tuhan, mereka berdua makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan itu. Sejak itu, mereka tak lagi bersih.

Keturunan Adam yang pertama, adalah Kain kemudian lahir adiknya dan diberi nama Habel. Kain dan Habel pada mulanya hidup rukun sebagai kakak beradik, yang setia dan patuh pada orang tua. Pekerjaan dua bersaudara ini berbeda-beda. Kain bekerja sebagai seorang pemburu sedangkan adiknya Habel bekerja sebagai peternak.

Kebiasan mereka, pada waktu tertentu memberi persembahan kepada Tuhan melalui pembakaran hasil buruan atau ternak yang tambun. Dan menurut kepercayaan manusia pertama itu, diterima tidaknya sebuah persembahan dapat dilihat dari asap yang naik. Apabila asap dari pembakaran persembahan itu naik tegak lurus, berarti Tuhan menerima persembahan tersebut dan yang memberi persembahan akan diberkati. Sedangkan jika asap yang naik itu tidak lurus, maka itu berarti persembahannya ditolak Tuhan.

Suatu ketika, kedua bersaudara itu melakukan pembakaran persembahan. Kain yang selain menjadi pemburu juga adalah seorang petani, mempersembahkan hasil pertaniannya. Habel mempersembahkan seekor anak lembu jantan yang gemuk dan tambun.

Dari asap kedua persembahan itu, asap yang berasal dari persembahan Habel naik tegak lurus, berarti diterima Tuhan. Sedangkan asap persembahan Kain, naik tidak lurus, pertanda persembahannya di tolak Tuhan.

Disini berawal rasa cemburu manusia. Kecemburuan Kain terhadap adiknya Habel kian hari kian memuncak. Lalu datang godaan iblis, Kain mengajak adiknya Habel pergi berburu. Ditengah hutan itulah Habel dibunuh akibat rasa cemburu Kain yang teramat dalam terhadapnya, karena persembahannya diterima Tuhan sedangkan persembahan Kain tidak.

Pada saat itu kejahatan mulai berkembang menjadi salah satu unsur negatif dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi sesungguhnya, sejarah kelahiran kejahatan sudah sama tuanya dengan sejarah manusia. Dia ada sejak manusia mula-mula, dia berkembang menurut perkembangan akal budi manusia. Karena dia sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kejahatan tak akan ada, ketika manusia juga telah tiada.

Cerita tentang Kain dan Habel, anak-anak kandung Adam ini membuktikan bahwa kejahatan sesungguhnya sudah ada bersamaan dengan adanya manusia mula-mula di taman Firdaus. Bentuk kejahatan pertama adalah membunuh; pembunuhan sedarah, kakak membunuh adik.

Kejahatan berikut menurut kitab suci Perjanjian Lama, adalah penipuan. Ketika Yacub menipu ayahnya, Yitzhak saat Yitzhak sudah buta matanya dan mulai dimakan usia. Hari itu Yithzak terbaring diatas tempat tidurnya, datanglah Yacub minta diberkati. Dia tahu bahwa Yitzhak hari itu akan mengurapi dan memberkati anaknya yang tua, Esau, kakaknya Yacub.

Esau adalah laki-laki yang badannya berbulu, tidak seperti Yacub yang mulus. Pengurapan dan pemberkatan anak sulung adalah adat kebiasaan mereka.

Ketika bertelut dihadapan Yitzhak, Yacub memakai bulu domba untuk menyamar sebagai Esau. Begitu mendengar suara Yacub, Yitzhak berkata : "Suara ini suara Yacub, tetapi badan ini adalah badan Esau", sambil mengusap kepala Yacub.

Jadi sesungguhnya apa yang sekarang disebut sebagai kejahatan, apakah itu pembunuhan, penipuan, pencurian, perampokan dan sebagainya telah ada sejak manusia ada.

Tentu bentuk dan jenis kejahatan itu saja yang berbeda dengan yang mula-mula. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, jenis dan bentuk kejahatanpun berkembang pesat. Malah menjadi suatu profesi, yang dari padanya pelaku kejahatan mencari nafkah.

Barangkali yang perlu diperhatikan disini, adalah faktor pendorong yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Pada kasus Kain dan Habel, faktor paling dominan adalah rasa cemburu yang dalam. Kain yang merasa telah berbuat segalanya sesuai perintah Alkitab, tetapi persembahannya tidak diterima.

Lain lagi pada kasus Yacub, dia melakukan tindak penipuan karena ingin diberkati oleh ayahnya, Yitzhak. Yacub terdorong selain rasa cemburu, juga oleh kerakusannya. Barangkali akan lebih tepat jika disebut sebagai rasa tamak, untuk menguasai segala milik Esau.

Barangkali inilah contoh kasus tentang kejahatan yang ada pada zaman manusia mula-mula. Sekarang kasus kejahatan seperti itu terus berkembang bahkan menjadi semakin canggih baik modus maupun jenisnya.

Kadangkala orang berusaha untuk menghindar dari menuduh orang. Kalau menyampaikan berbagai theisis tentang hubungan-hubungan kausal secara impresif antara tindak kejahatan dengan pelaku kejahatan. Lalu timbul pertanyaan : Mengapa dia jahat, berbuat kejahatan, mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya. Seolah-olah, manusia itu tidak harus berbuat jahat; manusia itu pada dasarnya tidak jahat, karena itu harus dicari sebab ia berbuat kejahatan.

Orang lupa bahwa kejahatan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tentu saja setelah manusia itu melewati proses sosialisasi dalam masyarakat lingkungan dia berada. Proses sosialisasi dimana manusia melakukan adaptasi sosial dengan lingkungannya, memaksanya untuk mengenal atau berkenalan dengan realitas hidup dan kehidupan sebagai manusia. Disini terjadi benturan-benturan antara baik dan jahat.

Soalnya bagaimana manusia melihat

Digitized by Google

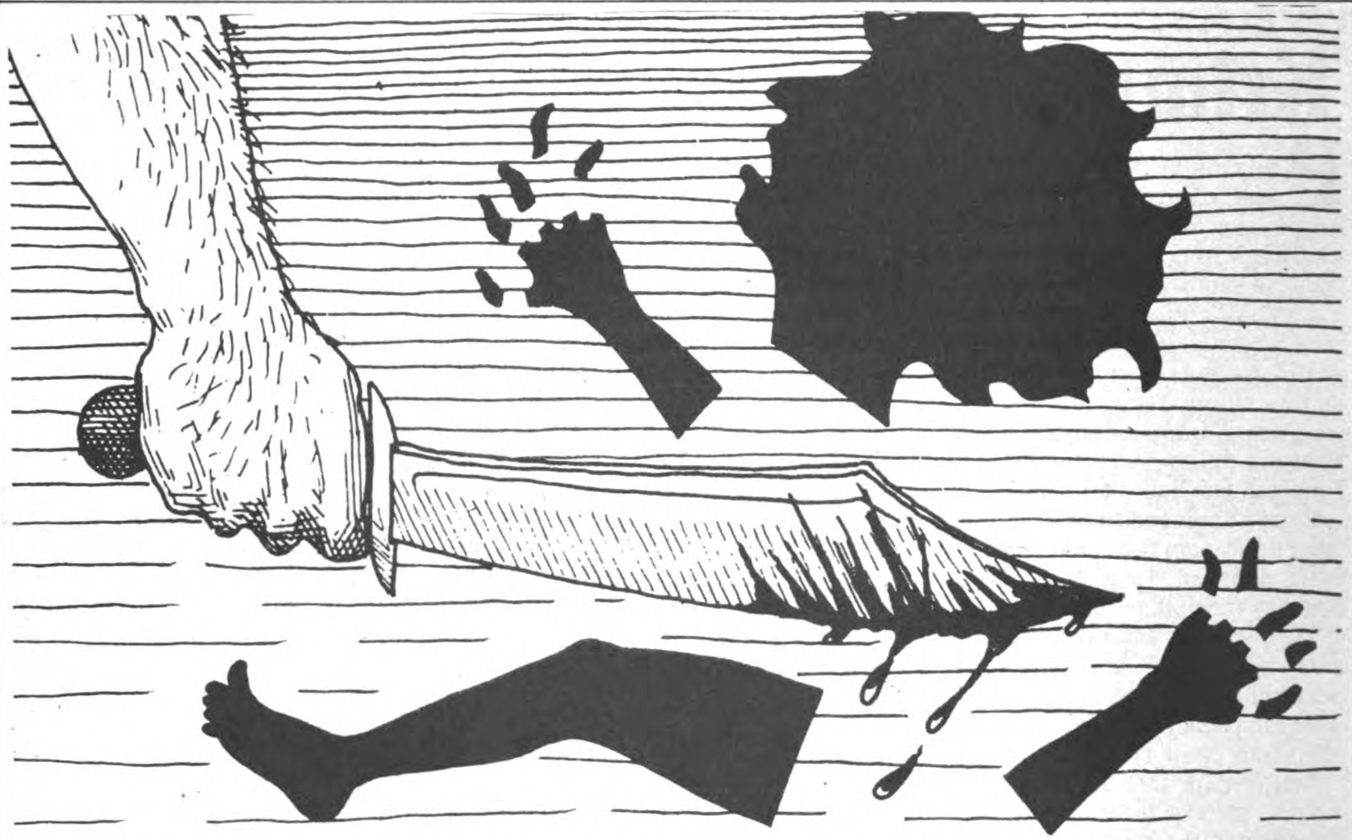

benturan-benturan itu dalam kaitan perkembangan kehidupannya. Apabila ia berada dalam posisi kedirian yang labil, maka ia akan terombang ambing oleh benturan-benturan itu. Jika realitas negatif yang lebih magnitis, maka orang akan terserap kedalam daya tarik kejahatan. Tetapi ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan norma dan kaidah kehidupan yang ada dalam masyarakat.

Kesadaran ini pula yang membuat orang semakin ragu dalam mengikuti proses sosialisai kehidupannya. Karena ia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang cukup sulit. Memilih antara kata hati dan desakan realitas keseharian yang dialami. Dua hal yang sungguh ambivalen.

Tetapi karena terus dihadapkan pada benturan-benturan sosialisasi yang demikian itu, maka kata hati lalu dikalahkan, ditekan, sementara impulsi-impulsi negatif dari lingkungan diberi tempat khusus.

Jadi sesungguhnya apabila hendak memperbincangkan masalah kejahatan, kita tak perlu lagi menanyakan : mengapa orang itu berbuat kejahatan. Pertanyaan ini lalu akan membawa kita pada perasaan "kasihan" terhadap pembuat kejahatan. Dengan alasan bahwa orang itu berbuat kejahatan karena terpaksa, karena keadaannya dan seribu satu sebab lainnya.

Kejahatan yang pada mulanya hanya dilakukan orang seorang, sekarang kejahatan sudah berbentuk. Ada organisasinya, mereka bekerja juga menurut perencanaan yang tersusun rapi. Itulah yang dikenal sekarang dengan sebutan "organized crime" (kejahatan berencana). Jaringan organisasinya juga sudah meluas secara internasional.

Dari organisasi kejahatan itu muncul berbagai kelompok sindikat menurut jenis kejahatan yang dilakukan. Ada sindikat penculikan komersial, sindikat pembunuhan komersial, sindikat pembajakan, sindikat perdagangan obat bius/narkotika dan segala macam sindikat lainnya. Jika dengar sindikat, orang lalu teringat akan kejahatan terorganisasi dengan pemimpin-pemimpinnya seperti Alcapon yang mengorganisir kelompok penjahat yang berasal dari Sicilia (Italia).

Karenanya jika keadaan kejahatan dewasa ini dinilai brutal, sebenarnya itu terjadi karena perkembangan situasi kehidupan manusia. Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan peradaban manusia serta pergaulan antar bangsa yang terus berkembang menjadikan pola kejahatanpun ikut berkembang.

Selama tahun 1989 ini, beberapa kejahatan yang sangat tidak berkemanusiaan muncul. Pelaku pembunuhan misalnya, mencacah korbannya menjadi beberapa potong tanpa merusak jenazah korban. Ini semua terjadi karena tingkat pengetahuan manusia/penjahat tentang organ manusia sudah meningkat. Sehingga pemotong tubuh korbanpun dilakukan secara teratur dan rapi.

Persoalan kita sekarang adalah bagaimana upaya para penegak hukum menekan tingkat kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Tetapi kembali kita dihadapkan pada masalah manusianya. Katanya, agar para penjahat jerah, maka hukuman harus diperberat. Ada pula anggapan yang mengatakan bahwa hukuman yang berat, tidak selalu membuat orang jerah. Malahan mungkin siterhukum akan lebih tambah jahat. Ada lagi anggapan bahwa pemberian hukuman hendaknya juga dilihat segi pendidikannya.

Terlalu banyak kendala yang membentang didepan pelaksanaan tugas para penegak hukum. Sehingga tidak heran jika mereka juga selalu terhalang untuk bertindak tegas. Apalagi ketentuan perundang-undangan yang ada nampaknya belum mampu merumuskan sanksi yang sesuai bagi setiap kejahatan. Disini barangkali kelemahan kita, dalam upaya menegakkan wibawa hukum.☐ (tb)

Digitized by Google

PGRI Bertekad Laksanakan Pendidikan Politik bagi Anak Didik

H Basyuni Suriamiharja

Kongres ke 16 PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yang berlangsung di Jakarta 3 - 8 Juli 1989 kembali mempercayakan kepemimpinannya kepada H Basyuni Suriamiharja dan Drs WDF Rindorindo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral untuk masa bakti 1989-1994. Bahkan H Basyuni Suriamiharja yang juga anggota DPP Golkar itu sampai saat ini sudah mencapai 19 tahun menjabat Ketua Umum organisasi pendidik itu.

Selain memilih kepemimpinan organisasi, Kongres juga mengeluarkan pernyataan yang antara lain menegaskan tekad PGRI untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anak didik, membina generasi muda sebagai sumberdaya insani masa depan, melaksanakan pembudayaan P-4 kepada semua lapisan masyarakat, serta memperkokoh landasan dibidang penyiapan tenaga terdidik pada Pelita V. Selain tekad, PGRI juga menyampaikan harapan agar sistem kenaikan pangkat otomatis bagi guru tetap berlaku, dan tunjangan fungsional bagi guru disesuaikan.

Kepada para guru, pada saat meresmikan pembukaan Kongres di Istana Negara, Presiden Soeharto mengingatkan betapa penting peranan para guru selaku pendidik. Ia minta perhatian kepada para guru, agar tidak hanya bertindak selaku pengajar yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga sebagai pendidik yang baik kepada para anak didik.

Para pendidik itu diminta untuk menginsyafi bahwa pendidikan yang diberikan hendaknya tidak mengakibatkan anak-anak bangsa ini, pemilik masa depan, terasing dari nilai-nilai kehidupan dan budaya bangsanya. Pendidikan yang mengakibatkan keterasingan yang demikian akan menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari, yaitu munculnya bangsa yang lemah, kata Presiden. ''Pendidikan yang demikian mungkin saja dapat membuat anak didik maju dalam pengetahuan dan pemikiran, tetapi mereka akan mengalami kegersangan tentang nilai budaya masyarakatnya. Anak-anak didik kita kelak ibarat layang-layang yang putus talinya. Mereka terbang tinggi, melayang kemana-mana tanpa arah yang mereka ketahui'', kata Kepala Negara.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, Presiden mengemukakan bahwa bangsa Indonesia perlu bersyukur karena telah memiliki RUU tentang sistem Pendidikan Nasional. Namun diingatkannya, adanya UU tidak berarti semua masalah pendidikan menjadi beres. Untuk melaksanakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila, dan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, guru bukan saja harus bertindak selaku pengajar yang mengalihkan ilmu pe-

Guru disamping sebagai pengajar juga memberikan pengetahuan

Digitized by Google

ngetahuan, tetapi juga pendidik.

Pemerataan Pendidikan

Presiden Soeharto juga menekankan betapa penting pemerataan pendidikan. Betapa pentingnya pemerataan pendidikan itu, Presiden mengatakan, ada kalanya jumlah lebih diutamakan daripada mutu. Pendidikan harus dapat mengantarkan anak didik yang sangat besar jumlahnya agar kelak mampu mengembangkan diri menjadi kekuatan pembangunan. ''Kita tidak boleh hanya melayani keperluan sebagian kecil masyarakat saja. Apabila hal ini terjadi, berarti kita akan makin menjauh dari cita-cita pembangunan,'' kata Presiden. Baru setelah usaha untuk mewujudkan pendidikan yang merata berhasil, titik berat pendidikan dapat dialihkan kepada peningkatan mutu, kata Kepala Negara.

Kesejahteraan

Kesejahteraan guru merupakan salah satu masalah yang menjadi pembicaraan selama Kongres, bahkan menjadi salah satu titik dalam pernyataan organisasi. Presiden Soeharto pun dalam pidatonya mengakui bahwa kondisi kesejahteraan para guru masih jauh dari yang diharapkan, meskipun telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaikinya. Presiden menjanjikan pemerintah akan selalu berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan guru dalam batas-batas kemampuan yang ada. Adanya Surat Keputusan Menpan yang memungkinkan tiap guru mencapai pangkat setinggi-tingginya diharapkan oleh Presiden agar dapat menambah gairah semua guru untuk makin menekuni tugas-tugas mereka.

Masalah kesejahteraan ini pula yang menjadi sorotan utama Wakil Presiden Sudharmono SH, ketika memberikan amanat pada penutupan Kongres, di Istora, Senayan. Wakil Presiden juga mengakui bahwa kehidupan sebagian besar guru-guru di Tanah Air belum sepadan dengan keluhuran tanggung jawab mereka. Meskipun demikian, dengan penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang serba terbatas, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.

Dalam amanatnya itu, Presiden juga menyesalkan tindakan oknum-oknum yang sampai hati melakukan berbagai tindakan yang merugikan para guru. Pemotongan gaji yang tidak semestinya, menghambat proses administrasi pengangkatan dan kenaikan pangkat merupakan contoh tindakan yang merugikan guru. ''Berbagai laporan dan keluhan tentang hal ini telah banyak diterima melalui Kotak Pos 5000'', kata Sudharmono.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, Wapres

Adanya UU tidak berarti semua masalah pendidikan menjadi beres

Digitized by Google

Kondisi kesejahteraan guru masih jauh dari harapan

berharap agar PGRI dapat berbuat lebih banyak untuk membantu anggotanya. PGRI diminta ikut menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dan tidak segan-segan melaporkan hambatan-hambatan yang mungkin masih ada terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tidak kalah seriusnya dalam menyoroti masalah kesejahteraan ini, Menteri P dan K juga berpesan dalam kongres, jika gaji dipotong dengan alasan tidak jelas, hendaknya para guru segera lapor. "Kalau saudara dipotong gaji diam saja, ya akan dipotong terus," kata Menteri.

Meskipun gaji belum memadai, Menteri berharap agar para guru tidak memiliki loyalitas ganda yang dapat merendahkan wibawa dan citra guru di mata masyarakat. Para guru diharapkan lebih loyal terhadap profesinya sehingga memperoleh apresiasi dari masyarakat yang setimpal.

Masih dalam hal kesejahteraan, Wapres dalam kunjungan kerja ke Riau juga menyoroti kasus guru honorer. Dalam kunjungan kerja itu, Wapres mendapat laporan tentang masih adanya guru honorer. Atas laporan itu, Wapres berharap kasus itu segera diteliti, karena saat ini mestinya sudah tidak ada lagi guru honorer.

Selaras pula dengan upaya peningkatan kesejahteraan, Menteri P dan K Fuad Hassan menyatakan bahwa guru tidak dilarang mempunyai pekerjaan sampingan, sepanjang tidak mengganggu tugas pokok sebagai pendidik, mengingat kesejahteraan guru masih sangat rendah sementara tugas dan tanggungjawab sangat berat.

Atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, sejumlah pakar menilai positif. Kebijakan Menteri itu diakui bisa menimbulkan ekses, tetapi realistis. Setidaknya merupakan alternatif, atau jalan keluar, walaupun lebih bersifat penyelesaian darurat karena rendahnya tingkat kesejahteraan guru. □ (Sgt)

Digitized by Google

Monumen Yogya Kembali Yang Sarat Makna

Sebuah bangunan berbentuk gunungan yang terpotong bagian puncaknya tegak berdiri di hamparan tanah seluas 55.680 m2, sembilan kilometer arah utara kota Yogyakarta, tepatnya di dusun Jengkang, Sariharjo, Kabupaten Sleman, DIY, menyimpan makna sejarah perjuangan bangsa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Peristiwa sejarah yang dinyatakan dengan peristiwa Yogya Kembali, terekam dalam monumen itu dimana tanggal 6 Juli 1949, Bung Karno dan Bung Hatta yang waktu itu Presiden dan Wakil Presiden republik ini pulang dari pengasingan kembali memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Juli 1989, peristiwa itu diperingati dengan peresmian monumen itu oleh Presiden Soeharto yang waktu jaman revolusi itu salah satu pelaku yang ikut berperan dalam peristiwa Yogya Kembali.

Presiden yang memberikan sambutan dalam peristiwa bersejarah itu menegaskan sejarah masa lampau hanya akan mempunyai makna jika kita jadikan bekal, kekuatan dan kesegaran untuk melanjutkan perjuangan masa datang. ''Kita membangun monumen bukan sekadar untuk mengenang peristiwa sejarah masa silam. Tetapi kita bangun monumen ini mengabadikan makna yang dikandung suatu peristiwa besar agar menjadi bagian tradisi nasional kita sebagai bangsa pejuang,'' kata Presiden Soeharto.

Lebih jauh Presiden menegaskan perjuangan mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah perjuangan tanpa akhir. Cita-cita untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menegakkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah tugas nyata yang tanpa akhir.

Untuk itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan yang tangguh dalam melaksanakan tugas nasional, bukan saja secara lahiriah tapi persatuan dan kesatuan dan kebersamaan sejak dari semangat dan nurani yang paling dalam.

Monumen Yogya Kembali menurut Presiden hanyalah salah satu tonggak peringatan rangkaian panjang perjuangan. Dari sejumlah monumen dan bukti sejarah perjuangan yang ada dan tersebar di seluruh tanah air, menunjukkan bahwa kemerdekaan nasional

Digitized by Google

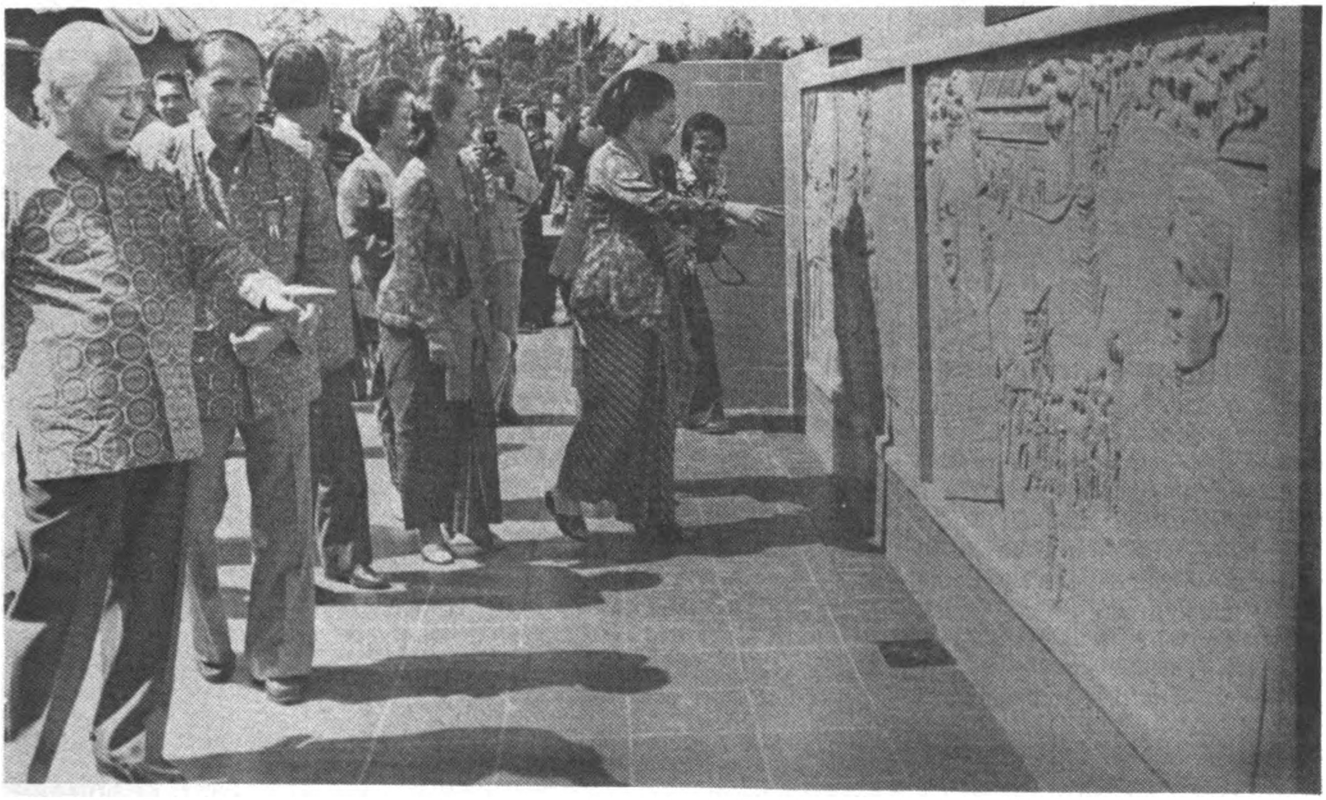

Monumen bukan sekedar untuk mengenang peristiwa sejarah

kita diperoleh dengan merebut yang kemudian ditegakkan dan dipertahankan dengan kekuatan sendiri. Oleh karenanya kita bangga sebagai bangsa pejuang yang penuh percaya diri.

Secara singkat digambarkan bagaimana perjuangan para pahlawan mengusir penjajah yang bermaksud ingin kembali berkuasa di Indonesia, sampai puncaknya Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Dari peristiwa itu diketahui bagaimana kemanunggalan rakyat dengan ABRI, kemanunggalan rakyat dengan pemimpinnya, dan rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang merupakan kekuatan yang tak terbendung dalam memenangkan perjuangan.

Gagasan pembangunan monumen itu sendiri bermula dari ide Kol. (purn) Soegiarto ketika masih menjabat Walikota Yogyakarta. Monumen yang dibangun sejak 1986 dan menelan biaya sebesar Rp 9,4 milyar sarat dengan makna dan memperhatikan nilai-nilai filsafat yang sudah tertanam sejak Pangeran Mangkubumi membangun kota Yogyakarta.

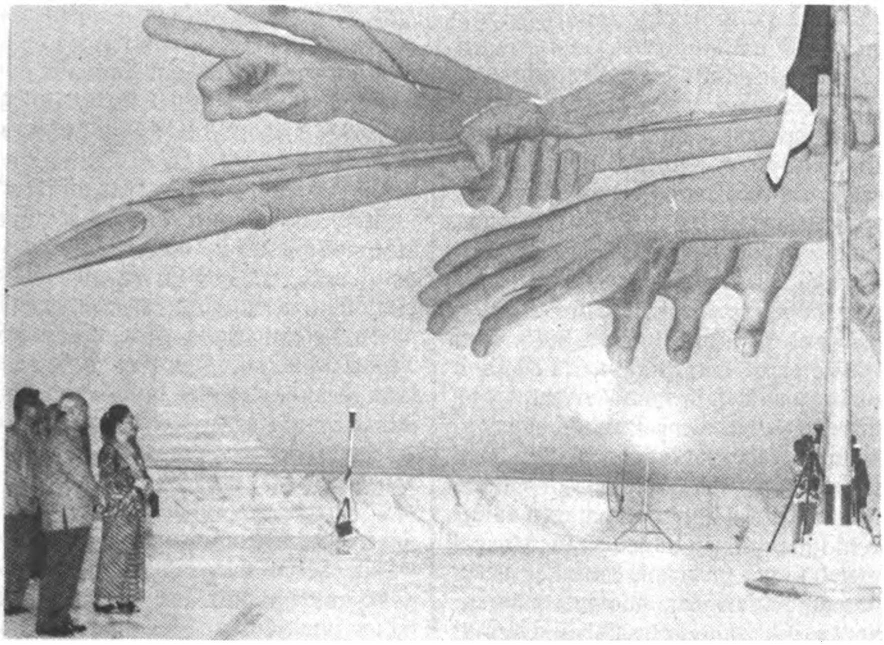

Tonggak peringatan perjuangan

Tinggi monumen 31,80 meter dengan diameter bawah 45,60 meter, bagian atas diameter 5,40 meter. Bangunan induk monumen terdiri dari tiga lantai. Lantai I untuk museum, perpustakaan, aula, ruang musollah dan kantin. Lantai II, merupakan ruang yang menggambarkan peristiwa sejarah perjuangan bangsa dalam bentuk diorama dan relief.

Ruang bundar di Lantai III yang berdiameter 28,50 meter — disebut ruang Grabha Graha, yang berarti tempat kelahiran — merupakan ruang hening. Lantai ruangan ini berlapis batu bintang dan persis di tengah atas terdapat lubang dimana cahaya matahari masuk dari lubang tersebut.

Di bagian depan monumen terdapat plaza, dimana sebagai pembatas antara plaza dan bangunan induk dibatasi rana atau sketsel, sebuah dinding beton setinggi 3 meter, panjang 60 meter. Disini tercantum 408 nama dari 632 pahlawan yang diketahui gugur pada masa clash II di wilayah Wehrkreise III.☐ (NS)

Digitized by Google

Keterbukaan Yang Makin Didambakan

Tuntutan bagi adanya suatu iklim keterbukaan dalam kehidupan demokrasi kita semakin terasa belakangan ini. Paling tidak lembaga perwakilan rakyat yang namanya DPR telah membuka cakrawala baru bagi pentingnya kehidupan keterbukaan oleh pemerintah baik kepada DPR maupun masyarakat. Ini artinya Dewan menghendaki adanya keseimbangan baru hubungan pemerintah dan Dewan yang selama ini oleh kalangan pengamat dan anggota Dewan sendiri dinilai belum menunjukkan keseimbangan yang nyata, lebih kuat pada sisi pemerintah.

Persoalannya sekarang apa yang dimaksudkan dengan keterbukaan itu sendiri, dan kondisi yang bagaimana yang bisa mewujudkan keterbukaan dalam segala aspeknya. Ini nampaknya yang membuat Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi II DPR-RI berketetapan hati untuk mengundang dua pengamat politik, masing-masing Jenderal (Purn) Soemitro, mantan Pangkopkamtib, dan Dr Alfian, kepala Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, untuk berdialog masalah yang satu ini secara terbuka. Belakangan kemudian menyusul dalam kalangan eksekutif, seperti Mensesneg Drs Moerdiono. Kemudian menyusul Komisi I juga mengundang Menhankam LB Moerdani dalam kesempatan rapat kerja, dimana sebagian besar waktu disita juga untuk bicara banyak soal keterbukaan.

Apa yang dipersoalkan dengan keterbukaan menurut Soemitro merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan politik yang demokratis. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mengekang orang untuk berbicara apa saja, termasuk juga masalah suksesi kepemimpinan oleh generasi berikutnya. Masih adanya tangan-tangan yang tidak kelihatan yang membuat orang enggan berbicara secara terbuka memberi kesan ada pemasungan di republik ini. Dan ini sangat mengganggu suasana keterbukaan yang diharapkan. Oleh karenanya, kata Soemitro, rakyat harus dibebaskan dari rasa takut menyatakan pendapat. Pers juga bebas mengungkapkan permasalahan secara terbuka. Tidak ada lagi sensor yang ketat yang memberi kesan ketertutupan.

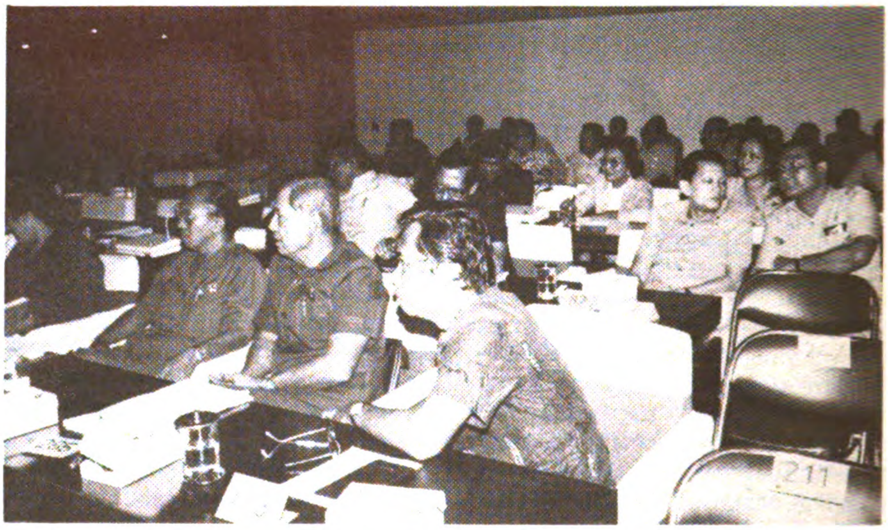

Keterbukaan kebutuhan mutlak

Menjadi pertanyaan sekarang apakah keterbukaan itu suatu hal yang baru bagi bangsa ini. Atau sebelumnya sudah ada tapi menjadi hilang secara tidak kentara karena perkembangan yang terjadi. Disini Dr Alfian yang juga fungsionaris DPP Golkar mengingatkan kembali bahwa sebenarnya pemikiran keterbukaan ini bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Paling tidak masyarakat di pedesaan dulunya adalah penganut sistem keterbukaan yang murni. Bahkan keterbukaan bagi masyarakat menjadi bagian yang integral bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari naluri kehidupan rakyat di pedesaan. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan bagian dari budaya mereka. Setiap kali ada permasalahan dikemukakan secara terbuka dan dibahas melalui musyawarah semua pihak antara tokoh yang memimpin desa itu dan warga desanya sendiri. Ini cerminan kehidupan demokrasi yang merakyat di pedesaan.

Tapi dalam perkembangan lebih jauh, keterbukaan itu mulai menipis atau paling tidak mengalami suatu hambatan untuk tetap bisa berjalan. Hal ini menurut Alfian karena terjadinya transformasi diri pada bangsa ini. Transformasi itupun terjadi karena latar belakang gejolak politik yang terjadi di masa lalu. Keterbukaan memang tidak bisa diharapkan dalam waktu relatif cepat bisa diwujudkan. Ada tahapannya kalau ingin menghendaki keterbukaan bisa berjalan secara wajar. Sebab kalau keterbukaan dipaksakan bukan tidak mungkin malahan menjadikan keadaan timbul anarki. Keterbukaan harus ditumbuhkan tidak hanya dari satu arah saja.

 Digitized by Google

Keterbukaan harus terkait dengan rasa tanggungjawab sosial dan disiplin bangsa. Disini masih terdapat kadar tanggungjawab sosial dan disiplin bangsa yang masih lemah disamping aturan-aturan hukum yang juga masih lemah.

Masih dalam konteks pertanyaan adakah keterbukaan itu, wakil sekretaris bidang Polkam FKP DPR-RI, Marzuki Darusman SH mengemukakan senada dengan Alfian bahwa keterbukaan itu sudah ada. Persoalannya sekarang sejauhmana keterbukaan itu menjadi permasalahan. Keterbukaan yang disampaikan F-ABRI lebih mengarah kepada masalah demokrasi. Kalau demikian halnya menjadi pertanyaan siapa yang bisa mengatakan di Indonesia ini sudah ada demokrasi yang kita inginkan bersama. Jelas-jelas dikemukakan oleh pemerintah bahwa yang ada sekarang baru awal dari proses pembangunan demokrasi. Ini tidak berarti tidak ada demokrasi, tapi baru kesepakatan asas dasar menuju pembangunan demokrasi itu. Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah FKP perlu menyerasikan langkah dan pemikiran sehubungan dengan munculnya permasalahan itu secara terbuka. Sebab kesan seolah-olah ada ketertutupan tidak sepenuhnya benar. Bagi anggota DPR tidak ada batas dalam menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah dalam rangka kontrol sosial.

Bagi FKP permasalahan yang mendasar bagaimana menjadikan keterbukaan itu bagian dari sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan seperti diatur dalam konstitusi. Dalam hal mengemban tugas di lembaga legislatif, sikap dan langkah pemikiran FKP juga didasarkan pernyataan politik Golkar dan petunjuk Ketua Umum DPP Golkar, yang menyatakan agar kita semua mampu mengatakan yang benar itu benar. Dan ini merupakan sikap keterbukaan.

Keterbukaan yang menjadi dambaan seperti dikehendaki Soemitro janganlah diartikan keterbukaan yang tidak mengikuti etika politik. Keterbukaan yang bercirikan musyawarah untuk mufakat menempatkan pemerintah tidak sebagai satu-satunya pengambil keputusan mengingat kompleksnya permasalahan yang harus ditangani pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Keterbukaan pada akhirnya menempatkan kekuatan sosial politik dan masyarakat di luar ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tidak sekedar menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah. Disini diperlukan kekuatan yang berimbang antara legislatif dan eksekutif.

Dan untuk menjadikan legislatif berbobot seimbang dengan eksekutif, maka kekuatan sosial politik yang menopang legislatif hendaknya tidak direkayasa dari atas. Begitu pula DPR tidak lagi bersifat pasif, harus berinisiatif mengambil semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat supaya tidak terjadi akumulasi kekuasaan di pihak eksekutif. Dan pandangan pun mendapat tanggapan positif Komisi II DPR yang menerimanya sebagai kesimpulan dialog.

Pertanyaan lain, dari mana keterbukaan itu harus dimulai dan lapisan mana keterbukaan dikembangkan. Disini ditegaskan dalam dialog Komisi II DPR dengan Soemitro dan Alfian, bahwa keterbukaan harus mulai dianut di setiap lapisan masyarakat. Sebab kondisi pentingnya keterbukaan sudah diisyaratkan oleh pimpinan nasional. Keterbukaan berarti adanya suatu adu argumentasi. Artinya pendapat yang baik hendaknya dapat diterima, bukan main menang-menangan. Kalau demikian halnya maka yang kuat selalu berada pada posisi pemenang. Oleh karenanya perlu adanya suatu konsensus bagaimana keterbukaan itu dapat dioperasionalkan sementara stabilitas tetap dapat terjamin.

Sikap dan langkah pemikiran FKP juga didasarkan pernyataan politik Golkar dan petunjuk Ketua Umum DPP Golkar, yang menyatakan agar kita semua mampu mengatakan yang benar itu benar. Dan ini merupakan sikap keterbukaan.

Ada hal-hal yang perlu dicatat dalam menuju keterbukaan yaitu menyangkut mekanisme keterbukaan, kualitas informasi dan kualitas masyarakat itu sendiri. Pendapat itu dikemukakan Mendagri Rudini juga di depan Komisi II DPR-RI baru-baru ini. Mekanisme keterbukaan itu sendiri sebenarnya sudah ada piranti yang mengaturnya, yaitu Undang-undang bidang politik. Kalau semua pihak baik lembaga formal maupun non formal melaksanakan seluruh ketentuan undang-undang sesuai dengan fungsinya masing-masing, niscaya mekanisme keterbukaan dapat berjalan.

Namun satu segi tidak boleh diabaikan dalam proses keterbukaan ini, yaitu kualitas masyarakat sendiri, termasuk didalamnya para pelaku politik. Keterbukaan membutuhkan dukungan kualitas masyarakat. Kualitas disini menyangkut kesadaran politik dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai seorang warga negara berdasarkan Pancasila.

Mengenai budaya terus terang yang merupakan cerminan adanya keterbukaan harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang kita anggap cocok dengan budaya bangsa. Misalnya kita harus berpegang teguh menjaga kehormatan martabat seseorang. Keterus-terangan yang disampaikan tanpa harus merendahkan martabat seseorang. Ini pandangan yang disampaikan Mensesneg Moerdiono, juga dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi II DPR-RI. Dengan tetap menjaga martabat seseorang janganlah diartikan adanya ketertutupan. Mungkin karena kita tidak biasa berbeda pendapat, maka pada saat beda pendapat jadinya kasar.

Begitu penting budaya terus terang itu dibicarakan, sebagaimana dikemukakan anggota Komisi II dari FKP, Drs Awang Farouk Ishak, karena merupakan salah satu esensi dari demokrasi. Ini tidak mungkin terwujud dalam suasana ketertutupan yang penuh dengan rasa curiga. Suasana saling curiga bukan hanya menghambat berkembang dan membudayanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan tetapi pada saatnya juga akan menghambat berkembang dan membudayanya nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Adanya dinamika masyarakat yang menyuarakan aspirasi demokrasi, terutama terlihat di kalangan generasi muda dan cendekiawan, merupakan suatu hal yang wajar sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembangunan politik nasional. Mereka menganggap dan merasakan suasana keterbukaan yang ada sekarang ini masih belum begitu wajar dan sehat.

Lalu bagaimana kalau masih ada pejabat pemerintah yang kurang peka terhadap kritik atau koreksi dari masyarakat kendati Presiden Soeharto sudah mengisyaratkan perlunya koreksi terhadap dampak sampingan pembangunan. Bisa jadi karena kurang siapnya atau kurang lapang dadanya pejabat bersangkutan.☐ (NS)

Digitized by Google

Idul Adha Mengandung Pesan Kesetiakawanan

Idul Adha merupakan peristiwa keagamaan yang amat penting bagi umat Islam. Karena mengandung pesan kemanusiaan, perdamaian dan kesetiakawanan sosial yang sangat tinggi.

Dengan kesetiakawanan dapat menjadi ringan

Apa yang terungkap disini merupakan bagian dari khotbah Idul Adha yang disampaikan ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, KH Syafi'i Hadzam di Masjid Istiqlal baru-baru ini, dimana Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sudharmono dan Ibu EN Sudharmono ikut bersembahyang bersama para menteri, pejabat tinggi negara dan pejabat Korps Diplomatik serta warga masyarakat Ibukota.

Menurut KH Syafi'i Hadzam, kesetiakawanan dalam Islam adalah suatu kewajiban dan termasuk sifat yang terpuji. Kesetiakawanan sosial tergolong sifat penangkal ketegangan, kebencian dan permusuhan atau kejahatan.

Melalui kesetiakawanan akan dapat dilaksanakan semua beban dan tanggungjawab, bahkan dengan kesetiakawanan itu semuanya akan terasa ringan untuk dilakukan.

Kesetiakawanan dalam Islam disebut aaddabusshuhbah atau tatakrama bersahabat. Rasulullah sebagai panutan yang baik, uswatun hasanah, telah banyak memberikan contoh-contoh dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ditunjukkan contoh oleh Rasulullah ketika mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshor. Kaum Anshor sebagai pribumi di Medinah membela dan menolong Rasulullah, menampung orang-orang Muhajirin yang hijrah dalam keadaan miskin.

"Mereka kasih terhadap orang-orang yang telah berhijrah, tidak ada rasa benci atau muak dan bosan kepada saudara-saudaranya dalam dada mereka. Tidak ada rasa iri di hati kaum Anshor," ujar KH Syafi'i Hadzam dalam bagian khotbahnya berjudul "Kesetiakawanan Sosial & Mantapnya Stabilitas Nasional".

Kepada umat Islam, KH Syafi'i Hadzam mengajak untuk senantiasa mengingat Allah dan mensyukuri atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. "Khususnya kepada bangsa Indonesia yang telah dewasa dalam kemerdekaan dan sukses dalam pembangunan baik pembangunan fisik maupun mental spiritual," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan dengan itu semua diharapkan akan lebih meningkatkan lagi rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan dengan hikmah Idul Adha itu dapat ditingkatkan kesetiakawanan sosial dalam rangka pemantapan stabilitas nasional.

Di bagian lain KH Syafi'i Hadzam mengemukakan bahwa ibadah Haji merupakan ibadah badaniyah sekaligus ibadah Maliyah. Yakni pelaksanaan ibadah yang dilakukan dengan menyertakan harta benda di samping anggota badan secara keseluruhan.

Badaniyah ibadah Haji dilakukan dengan ihram, wukuf di Arafah, Thawaf Ifdhah mengelilingi Ka'bah, Sa'i antara Safa dan Marwa dan Tahalul. Sedang Maliyah haji dilakukan dengan perjalanan jauh dari tempat tinggal menuju tanah suci Makkah. Di sana diperlukan biaya tempat tinggal yang sangat tinggi. Kalau ibadah Mal seperti zakat hanya sebagian dari harta yang dimiliki maka bukan mustahil kalau melaksanakan ibadah Haji harus mengorbankan semua harta benda.

Perjuangan melaksanakan ibadah haji merupakan pengorbanan berat bagi sebagian besar manusia. Akan tetapi dengan niat ikhlas karena patuh dan taat melaksanakan perintah Allah Subhanawata'ala bukanlah merupakan rintangan untuk melaksanakan perintah agama.

Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dilaksanakan secara nyata oleh Nabi Besar Muhammad SAW, pengorbanan yang berapapun besarnya akan dirasakan ringan, karena mengharapkan ridha Allah semata-mata.

Diharapkan oleh khotib KH Syafi'i Hadzam agar pelaksanaan ibadah apapun, termasuk ibadah Haji dengan qurban dilakukan ikhlas semata-mata. Karena Allah, bukan semata-mata daging dan darah yang dinilai sebagai pengorbanan, tetapi kepatuhan dan ketaatan serta taqwa yang memegang peranan utama.

Pada gilirannya, melaksanakan qurban bukan satu kebanggaan material, tetapi sebagai wujud kesetiakawanan. Untuk bersama-sama tetangga, sanak famili dan handai tolan serta kalangan fakir miskin agar dapat bergembira selama satu hari raya, yakni dilakukan dengan membagi rata jamuan Allah kepada semua hambanya. Dengan kesetiakawanan akan dapat dilaksanakan semua beban dan tanggungjawab, bahkan dengan kesetiakawanan itu semuanya akan terasa ringan untuk dilakukan.

Selesai sembahyang Id bersama, Presiden dan Wakil Presiden menyerahkan hewan korban berupa lembu masing-masing satu ekor.☐ (NS)

Digitized by Google

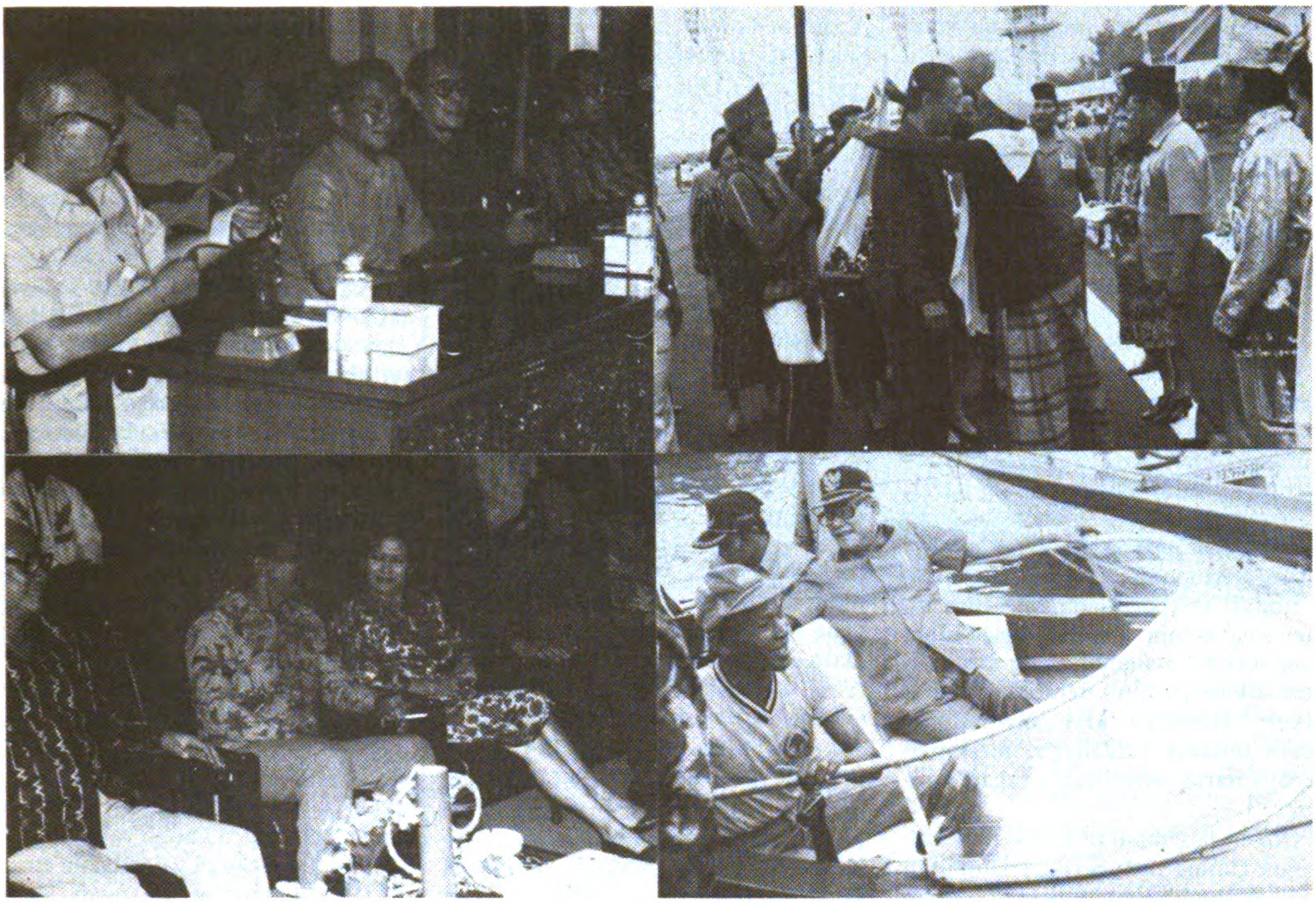

Pimpinan GOLKAR Agar Membina Semangat Kebersamaan

Pesawat Garuda DC-9 dengan nomor penerbangan GA-530 yang membawa Ketua Umum GOLKAR beserta rombongan mendarat dengan mulus, walau mendung tebal menyelimuti lapangan terbang Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di tangga pesawat, Ketua DPD Tingkat I, HM Ismail Abdullah dan Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Kalsel, Moh. Said, sejumlah pengurus dan kader-kader GOLKAR telah menunggu kedatangan Ketua Umum Wahono. Juru foto, cameramen berlari-lari mendekati dan membidikkan kameranya. Tentu, mereka adalah kuli tinta yang tugasnya selalu memburu berita.

Dalam kunjungan kerjanya di kota Banjarmasin, bagi Wahono, ini merupakan pertama kali semenjak beliau menduduki jabatan Ketua Umum GOLKAR. Namun, kunjungan serupa juga sudah banyak dilakukan seperti, Menado dan Sumatera Barat.

Dalam lawatannya di Banjarmasin, memang tampak terasa lain. Kehangatan, kekeluargaan tampak mewarnai kunjungan tersebut. Misalnya, disaat Ketua Umum GOLKAR menginjakkan kakinya di bumi Kalimantan, disambut sebuah kalungan bunga dan tetabuhan kesenian khas Kalimantan Selatan. Kemudian Ketua Umum meneruskan perjalanannya menuju Wisma Batung Batulis — jaraknya lebih kurang 23 km dari arah bandara Syamsudin Noor —. Para kader GOLKAR Banjarmasin banyak berjejer di sepanjang jalan sambil mengacungkan dua jari. Selain itu banyak spanduk terpampang di berbagai sudut kota, "Selamat Datang Ketua Umum GOLKAR Wahono", demikian salah satu bunyi spanduk tersebut.

Kehangatan semakin terasa tatkala Ketua Umum GOLKAR Wahono, mengadakan sholat Magrib berjamaah bersama tokoh-tokoh alim ulama, kader GOLKAR serta masyarakat sekitar. Keakraban tercermin saat sholat usai. Dimana, Ketua Umum terlihat berbincang dengan para jamaah, yang kemudian disertai makan bersama.

Kunjungan Ketua Umum GOLKAR di Kalimantan Selatan ini, cukup padat. Selesai sholat berjamaah, tidak lama kemudian, di gedung Bina Krida Budaya yang berkapasitas 3000 orang ini dipenuhi dengan kader-kader GOLKAR yang ingin bersilaturahmi dan melihat Ketua Umum GOLKAR dari dekat. Ditempat silaturahmi diadakan, sejumlah acara memang telah disiapkan seperti band dan kesenian tradisional. Tidak ketinggalan acara sambutan-sambutan.

Dalam kesempatan tersebut dua perusahaan telah memberikan bantuan

Digitized by Google

masing-masing 100 juta untuk pembangunan gedung DPD Tingkat I Kalimantan Selatan yang cukup megah, siangnya Ketua Umum GOLKAR meletakkan batu pertama sebagai tanda pembangunan gedung itu dimulai. Menurut Wantim (Dewan Pertimbangan) Moh. Said, gedung tersebut akan menelan biaya sebesar Rp 750 juta.

Hari kedua yang merupakan hari terakhir dari kunjungan kerja Ketua Umum GOLKAR ini, dilakukan di Kecamatan Mekarsari untuk mencanangkan proyek Bhakti Sosial GOLKAR. Daerah yang jaraknya lebih kurang 7 km ditempuh sekitar 45 menit, tidak dapat melalui darat, dan untuk menuju tempat tersebut Ketua Umum menggunakan kendaraan air dengan melintasi sungai Barito.

Lokasi tempat diadakan acara itu memang belum mendukung. Hujan yang turun di malam hari itu menjadikan lokasi menuju tempat tersebut becek. Namun, tidak menjadikan acara tersebut terganggu, meskipun sepatu harus belepotan dengan lumpur.

Dalam kesempatan tersebut, selain Ketua Umum memberikan sambutan singkat juga memberikan bantuan mesin diesel untuk penerangan mesjid "Al Muksin" dan sumbangan uang sebesar Rp 2,5 juta untuk pembangunan proyek sosial GOLKAR. Dalam kesempatan itu, Ibu Mientarsih Wahono, menggunting pita sebagai tanda proyek tersebut dapat dimulai. Sebagaimana diketahui, bahwa proyek bhakti sosial ini merupakan program nyata dari kader-kader GOLKAR dalam membangun daerahnya.

Acara itu dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Ali Said yang kemudian meresmikan Masjid bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila di daerah Tamban.

Ke depan, berat

Pada malam acara silaturahmi, Ketua Umum GOLKAR Wahono, mengingatkan akan arti pentingnya tugas ke depan. Sebagaimana dikatakan, tugas ke depan kita terbentang cukup luas. "Tugas penting kenegaraan tidak hampa dari rintangan dan hambatan," katanya.

Namun, seberat apapun tugas itu, sepelik mana tugas yang menghadang, akan dapat diatasi dengan semangat kekeluargaan, keteguhan hati dan kekompakan. Tugas-tugas kita dimasa datang tidaklah ringan, sebab masyarakat kita terus bergerak maju. Oleh karena itu, kata Wahono, GOLKAR harus selalu mengembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan aktip dan dinamis dari seluruh masyarakat, khususnya bagi seluruh anggota GOLKAR dalam pembangunan.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan petunjuk Ketua Dewan Pembina, maka kita perlu meningkatkan lagi usaha-usaha untuk menempatkan GOLKAR dalam jajaran kepeloporan Orde Baru dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk itu, kata Ketua Umum, kita perlu menggalang potensi dengan kekompakan yang tinggi, semangat perjuangan yang ikhlas dengan tanpa pamrih. Untuk menunjang hal tersebut diatas, maka kualitas manusia sebagai sumber daya insani merupakan kebutuhan yang mendesak dan perlu ditingkatkan. GOLKAR menyadari karena manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, ujar Wahono.

GOLKAR sebagai salah satu kekuatan sosial politik, hal tersebut merupakan tantangan, dan sekaligus merupakan tugas yang mulia untuk diemban. Oleh karena itu, kata Wahono, kita harus dapat berhasil menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara konstitusional, demokrasi dan berdasarkan hukum.

Tugas-tugas tersebut diatas telah ditetapkan dalam Munas GOLKAR dengan melalui keputusan-keputusannya untuk 5 tahun mendatang. Tugas-tugas itu adalah Tri Sukses GOLKAR. Sebagaimana diketahui, Tri Sukses itu meliputi; Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita V, Sukses Pemilu 1992/Sidang Umum MPR 1993.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, Wahono mengharapkan kepada seluruh dewan pimpinan GOLKAR untuk membina semangat keterbukaan, kebersamaan, kekompakan dikalangan pimpinan. Dengan adanya hal tersebut diatas, tugas akan menjadi ringan bahkan menjadi tugas yang mulia. "Ini merupakan kehormatan kita semua," katanya. Mengenai hal tersebut Wahono yakin, bahwa Kalimantan Selatan yang dalam Pemilu 1987 meraih kemenangan, dapat mengatasi segala macam tantangan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wahono juga menguraikan panjang lebar dengan berbagai masalah, misalnya program umum GOLKAR, pembangunan, meningkatnya tuntutan masyarakat dan yang lainnya.

Menyinggung tentang keberhasilan pembangunan ini, dinilai Wahono sebagai suatu yang membanggakan sekaligus juga merupakan tantangan yang berat pula. Sebab, katanya, akibat dari pembangunan itu, tuntutan masyarakat juga semakin kualitatip. "Ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk dapat secara terus menerus menampung, memadukan dan memperjuangkan aspirasi tersebut," ujarnya.

Perlu disadari, lanjut Wahono, bahwa kita bertumpu pada aspirasi rakyat, sehingga akan terjelma kuat motivasi yang dapat menggerakkan seluruh jajaran bangsa untuk bergerak maju dalam derap langkah dan derap perjuangan bangsa. Sejalan dengan itu, kita harus terus bergerak maju dan mengembangkan diri sebagai kepeloporan pembaharu dalam menyongsong budaya pembangunan.

"Selain DPP GOLKAR kami berusaha untuk memberikan urunan ter-

Melintasi sungai Barito

Digitized by Google

hadap pembangunan, karena setiap unsur dalam negara ini dituntut untuk berbakti dan mengabdi kepada pembangunan bangsa, tidak kecuali kekuatan-kekuatan sosial politik di negara ini," ujarnya.

Terikat dan tidak terpisahkan dalam tugas pokok seluruh kekuatan sosial politik adalah kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat. Usaha untuk membuat rakyat sadar politik, sadar akan hak-hak dan kewajibannya adalah tugas yang berat tetapi mulia. Kita sadar bahwa dengan cara inilah kita dapat menumbuhkan Demokrasi Pancasila, dimana kita tumbuhkan rasa tanggung jawab dan kita gerakan partisipasi seluruh rakyat dalam mendukung pembangunan bangsa.

Sumbangan 200 juta dari 2 pengusaha

Harapan DPP

Tugas-tugas kedepan tidaklah semakin menjadi ringan, namun terasa semakin berat. Karena berbagai macam dan ragam bentuk tantangan akan muncul di permukaan. Untuk itu, Wahono menghimbau kepada seluruh jajaran keluarga besar GOLKAR di daerah khususnya dan para pengurusnya untuk dapat lebih meningkatkan konsolidasi organisasi dengan berbagai aspeknya. Pertama, konsolidasi yang mantap merupakan modal dasar untuk dapat menyukseskan Pelita V khususnya dan pembangunan nasional umumnya, serta menyukseskan pemilu 1992.

Kedua, agar pengurus meningkatkan efektivitas manajemen organisasi, menggali dan menggunakan secara rasional dan optimal semua sumber daya, sarana pendukung dan kemudahan-kemudahan yang secara berencana dan bertanggung jawab.

Ketiga, pimpinan dan semua kader GOLKAR perlu lebih dekat dengan rakyat dan warganya, lebih peka lagi terhadap aspirasi rakyat yang berkembang secara dinamis, serta lebih tanggap dalam menampung, mengolah dan berusaha dengan sungguh-sungguh menyalurkan dan memperjuangkannya. Dengan lebih dekatnya kader GOLKAR dengan rakyat, kata Ketua Umum, akan mampu mengembangkan aspirasi, memotivasi mereka untuk lebih berpartisipasi aktip dalam pembangunan nasional.

Keempat, agar pengurus lebih meningkatkan dialog dan komunikasi timbal balik dengan pemerintah daerah dan para kader GOLKAR di pemerintahan dan badan-badan/badan usaha pemerintah baik melalui dukungan, maupun kontrol sosial secara bertanggung jawab. Sebab anggota KORPRI yang juga adalah kader kader GOLKAR yang tangguh perlu didukung terus dalam pengabdiannya melaksanakan pembangunan. Secara historis dan kejuangannya para anggota KORPRI merupakan partner yang tangguh dalam memperjuangkan kepentingan bangsa. "Memang kita sama-sama mengetahui, diantara GOLKAR dan KORPRI bukanlah onderbouw GOLKAR, dan GOLKAR bukan bovenbouw KORPRI. Undang-undang Parpol dan GOLKAR mengamanatkan bahwa keanggotaan kekuatan sosial politik adalah suka rela, aktip dan perorangan. Selama 5 tahun ini GOLKAR secara konsekuen melaksanakan hal tersebut. Sejak tahun 1984 GOLKAR telah mengadakan pendaftaran anggota secara perorangan, aktip dan suka rela dengan menghasilkan jumlah anggota 32 juta. Dan sejarah juga telah membuktikan, bahwa kebersamaan kader GOLKAR baik dari KORPRI maupun bukan KORPRI mampu mengatasi segala rintangan yang menghadangnya."

Wahono menyerukan agar terus merapatkan barisan, meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan dengan seluruh keluarga besar GOLKAR dalam suasana semangat kebersamaan, keterbukaan dan demokratis sesuai dengan hikmah kekeluargaan.

Dalam kunjungannya selama dua hari di Banjarmasin, Ketua Umum didampingi Ibu Mientarsih Wahono, dan sejumlah fungsionaris antara lain; AE Manihuruk, Rachmat Witoelar, Ny. TS Darsoyo, H. Anang Adenansi, H. Moh Barier, KH Kafrawi, H. Agus Tagor dan Dr Alfian.☐ (BM)

Wahono disambut masyarakat Kalimantan Selatan

Digitized by Google

Kalsel Telah Mempersiapkan Kemenangan GOLKAR Pada Pemilu 1992

HA Ismail Abdullah

Pemilihan Umum yang merupakan salah satu wahana pendidikan politik rakyat, sudah masuk dalam kalender GOLKAR, yaitu dalam Tri Sukses GOLKAR. Dalam Pemilu 1992, GOLKAR mentargetkan meraih kemenangan. Minimal sama dengan yang diraih dalam Pemilu 1992.

Meskipun Pemilu 1992 masih jauh tiga tahun lagi, tetapi langkah-langkah menuju suksesnya Pemilu, sudah mulai digarap, khususnya bagi Kalimantan Selatan. Sebagaimana diketahui, daerah Kalimantan Selatan dalam 4 kali Pemilu menunjukkan grafik yang naik-turun. Namun dalam Pemilu 1987, kemenangan yang diraih cukup meyakinkan, yaitu 71 persen.

Melihat kemenangan yang diraih, membuktikan kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap GOLKAR semakin tinggi dan meyakinkan. Namun bagaimana dengan Pemilu 1992 nanti? Kami optimis, GOLKAR Kalimantan Selatan akan tetap meraih kemenangan, minimal dapat mempertahankan kemenangan seperti Pemilu tahun 1987, yaitu meraih 71 persen suara, ujar H.A. Ismail Abdullah, Ketua DPD Tingkat I, Kalimantan Selatan.

Optimisme H.A. Ismail Abdullah memang beralasan. Sebab, untuk menuju ke arah itu langkah-langkah sudah mulai dipersiapkan dan sebagian telah dilaksanakan. Misalnya, DPD Tingkat I Kalimantan Selatan telah merumuskan masalah itu sudah tertuang dalam Musda — Program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut, juga kami sesuaikan dengan program yang ada di pusat, ujarnya.

Sedangkan arah untuk mensukseskan agar GOLKAR Kalimantan Selatan dapat meraih harapannya, telah menugaskan Litbang untuk mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan itupun sudah mulai dilaksanakan. Misalnya, mengadakan penelitian suatu daerah, dimana dalam Pemilu 1982 daerah tersebut GOLKAR hanya meraih 40 persen suara. Sedangkan dalam Pemilu 1987 kemenangannya melonjak menjadi 71 persen suara.

Sebagaimana dikatakan H.A. Ismail Abdullah, hasil penelitian itu kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan mengenai kemenangan GOLKAR di daerah tersebut memang terdapat banyak pendapat. Ada yang mengatakan, bahwa daerah itu dulunya merupakan basis dari NU, dan yang lainan.

"Kami tidak hantam kromo dalam menerjunkan jurkam-jurkam dalam Pemilu 1992 nanti" katanya. Kemudian Ismail menguraikan pengalamanannya dalam pelaksanaan Pemilu 1987. Dalam Pemilu tahun tersebut daerah yang meminta Jurkam, langsung saya kirimkan. Dari pengalaman tersebut, kata Ismail hasil yang dicapai belum optimal, katanya. Dan dalam Pemilu 1992 nanti, Jurkam akan kami batasi dan akan disesuaikan dengan kebutuhan, katanya.

Generasi Muda

Akhir-akhir ini sebutan generasi muda sering menjadi buah bibir. Generasi muda, dalam Pemilu 1992 nanti bahkan bagai primadona yang diperebutkan ketiga kekuatan sosial politik. Sebab, selain mempunyai potensi, jumlah pemilih baru nanti cukup besar.

GOLKAR, Kalimantan Selatan menyadari akan potensi itu. Untuk dapat menggaet agar generasi muda itu masuk jajaran GOLKAR, maka langkah-langkah menuju ke arah itu telah digarap. Seperti yang diungkapkan H.A. Ismail Abdullah, untuk menarik agar generasi muda, khususnya yang masih berada di bangku sekolah, kami mengadakan kerja sama dengan PGRI. Diharapkan peranan guru dalam memberikan penjelasannya kepada murid, misalnya mengenai pembangunan dan yang lain. Maka, dalam Pemilu 1992 nanti, kami tinggal masuk saja. Artinya, tinggal menyambung apa yang sudah pernah disampaikan oleh guru-guru tersebut.

lain. Namun, dalam diskusi yang panjang itu, akhirnya Departemen yang ditugaskan untuk menggarap hasil dari penelitian itu berkesimpulan, bahwa kemenangan GOLKAR di daerah itu disebabkan karena program yang ditawarkan cocok dengan kondisi daerah, ujar H.A. Ismail Abdullah.

Untuk itu, kata Ismail Abdullah dalam Pemilu 1992 nanti, program yang akan ditawarkan GOLKAR di Kalimantan Selatan akan disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Misalnya bila daerah itu pertanian, maka program yang akan ditawarkan harus berkaitan dengan daerah tersebut. Dan juru kampanye (Jurkam) yang akan diturunkanpun juga harus memahami tentang pertani-

Selain itu, GOLKAR Kalimantan selatan dalam menarik simpatisan generasi muda ini juga dilakukan dengan berbagai macam kegiatan. Misalnya kegiatan olahraga, kegiatan di LKMD dan yang lainnya.☐ BM

Digitized by Google

Penyegaran Untuk Tingkatkan Kualitas Kader

Keputusan DPP GOLKAR Nomor : Kep-195/DPP/GOLKAR/11/1987 tentang Pedoman Penyegaran Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa, berjalan sesuai dengan sasaran yang telah digariskan. Penyegaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan konsolidasi organisasi dalam rangka mengakarkan GOLKAR di masyarakat luas, dan mengisi Komisaris dan Pembantu Komisaris yang lowong sekaligus mengganti Komisaris dan pembantu Komisaris yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1985, pasal 10 ayat 1 butir c antara lain disebutkan bahwa di setiap kecamatan/desa - Partai Politik dan GOLKAR dapat menetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris tersebut dibantu oleh beberapa orang pembantu. Lima orang Pembantu Komisaris Kecamatan dan empat orang Pembantu Komisaris Desa.

Keputusan yang sudah berjalan sekitar 20 bulan ini hasilnya sangat menunjang kebijaksanaan GOLKAR dalam melaksanakan serta menjabarkan setiap program-program kerja di masyarakat. Keputusan DPP GOLKAR tentang penyegaran tersebut, kata Prof.Dr. Djamil Bakar, Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Sumatera Barat, dilakukan setahun sekali melalui rakerda dan musda. Sekarang sedang dipersiapkan perencanaan yang mengarah pada penyegaran tersebut di tingkat I dan II.

Bentuk penyegaran itu sendiri, seperti dikatakan Djamil Bakar, yaitu dengan mencoba untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Hal tersebut juga sudah dilakukan oleh karakterdes di Kabupaten Agam. Menyinggung tentang penyegaran ini diibaratkan Djamil Bakar sebagai menarik rambut dalam tepung yang besar, tapi rambutnya tidak putus. Artinya, harapan kita pada teman-teman (kader GOLKAR) kalau bisa pelaksanaan penyegaran ini secara formal. Namun, sebelum itu dilaksanakan secara informal serta DPD GOLKAR Tingkat I mencoba untuk memonitor apa-apa yang bisa dikerjakan oleh daerah-daerah dan sekarang kita telah memberikan tugas kepada setiap wakil ketua untuk memonitor komisaris-komisaris — mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang tidak bisa dilanjutkan.

Djamil Bakar

Kendati demikian, kita tidak mendikte mereka dan semuanya diserahkan kepada daerah dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan setelah melakukan penelitian untuk mensuport daerah-daerah tersebut. "Saya sampai sekarang ini belum melihat adanya hal-hal yang drastis di dalam pelaksanaan pendekatan antara masyarakat dengan DPD. Bila ada yang kurang baik dan kurang mencolok, maka itu biasanya diperbaiki. Tapi, hal itu sendiri masih belum tampak dan mungkin sekali ini karena pemilihannya kemarin lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemarin, selain menetapkan kita bertanya lebih dulu sehingga waktu formatur pun sedikit agak panjang," sambungnya.

Fungsinya sangat strategis

Adapun posisi Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa di seluruh Indonesia berdasarkan instruksi DPP GOLKAR Nomor: Ins-580/GOLKAR/11/1975 yang tertanggal 19 Nopember 1975 dan Juklak DPP GOLKAR Nomor: Juklak-002/GOLKAR/3/1976 tanggal 30 Maret 1976, sejak pertengahan tahun 1976 telah diadakan kegiatan-kegiatan untuk membentuk Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa

Digitized by Google

di seluruh Indonesia yang sifatnya bukan merupakan pengurus GOLKAR dan berdiri sendiri, tetapi fungsinya sangat strategis karena tugasnya adalah membantu DPD GOLKAR Tingkat II dalam membina anggota GOLKAR serta memasyarakatkan tujuan dan program perjuangan GOLKAR di dalam masyarakat kecamatan dan pedesaan atau kelurahan. Selain itu, Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan/Desa ini benar-benar dapat diandalkan sebagai ujung tombak GOLKAR di daerah-daerah pedesaan.

Terkait dengan permasalahan penyegaran ini wilayah Sumatera Barat yang tercatat mempunyai jumlah anggota GOLKAR sebesar 1.133.645 orang, kata Djamil Bakar, dalam mengaktivitaskan anggotanya tidak hanya terletak pada kegiatan yang bersifat spontanitas saja seperti kegiatan kampanye Pemilu. Tapi, kader-kader GOLKAR ini telah diberi berbagai kegiatan yang mempunyai dampak positif dalam mengembangkan kualitas kader yang bersangkutan. Juga, mereka disegarkan dengan kegiatan-kegiatan seperti diskusi dan pengabdian masyarakat. Jadi, tidak benar bahwa aktivitas kader GOLKAR hanya terlihat pada kegiatan yang bersifat musiman pada saat menjelang Pemilu saja. Padahal di samping itu kita melakukan semua kegiatan selalu menyentuh kepentingan orang banyak. Atau, mungkin orang lain melihat kegiatan GOLKAR hanya pada yang tampak saja, tapi yang tidak tampak bisa dilihat pada aktivitas di DPP GOLKAR tentang apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan selama ini.

Djamil Bakar yakin bahwa di Minangkabau ini mereka tidak boleh ditinggalkan, karena di sini ada istilah 'sato sekaki' yang artinya mereka ikut dan turut memperbincangkan. Kalau mereka tidak diterima usul-usulnya tidak apa-apa, tapi yang penting mereka turut dan ikut dalam suatu pembicaraan. Jadi mereka selain telah diberi konsumsi lahir juga ada konsumsi batin. Sehingga, pembinaan kader ini sangat diperlukan pendekatan lahiriah maupun bathiniah, agar kader-kader ini dapat lebih banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua konsumsi itu saling mendukung dalam meningkatkan kualitas seorang kader. □

DT

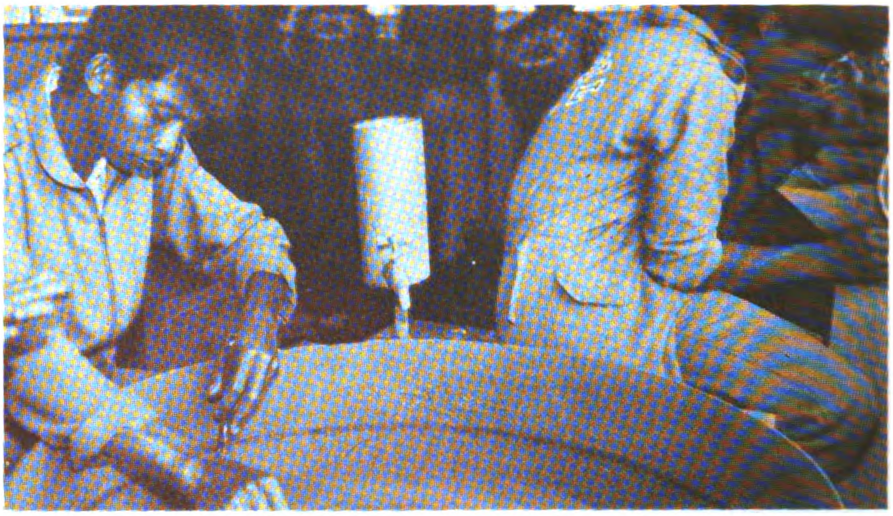

KARPIN Mendukung GOLKAR

Karyawan Pengrajin Indonesia (KARPIN) dalam mengaktualisasikan operasional organisasi siap mendukung dan memantapkan posisi GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tersirat pada cita-cita perjuangan GOLKAR untuk mewujudkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Demikian diungkapkan Ketua Umum DPP KARPIN A. Gafar ketika diterima Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono di ruang VIP DPP GOLKAR, Jakarta Barat.

Sedangkan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa prinsipnya GOLKAR menerima dukungan dimaksud, karena program KARPIN sejalan dengan perjuangan GOLKAR, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi. Untuk itu, kata Wahono, KARPIN perlu meningkatkan perannya dalam mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan peningkatan ekspor non migas. Sehingga langkah-langkah KARPIN ini sangat positif dilaksanakan sekaligus ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mendatangkan devisa negara, tegas Wahono.

Kegiatan ekspor non migas ini dapat membantu untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga-tenaga kerja atau pengangguran. Saya harapkan KARPIN sebagai organisasi mampu melibatkan diri dalam memecahkan permasalahan nasional di Indonesia. Apalagi pengangguran ini mempunyai dampak yang kuat terhadap timbulnya suatu kerawanan sosial dan sekaligus menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu, KARPIN harus benar-benar tampil dengan semangat tinggi untuk meningkatkan ekspor non migas di bidangnya, tegas Wahono.

Lebih lanjut dikatakan, sejalan dengan peningkatan ekspor non migas ini maka KARPIN perlu juga meningkatkan kreatifitas operasional organisasi dengan menggali potensi pengrajin-pengrajin yang bersangkutan. Ini penting karena menunjang karya masyarakat pengrajin Indonesia. Di samping itu, kata Wahono, agar KARPIN dapat memprakarsai terbentuknya koperasi untuk menghadapi tantangan terhadap pelaksanaan pemasaran barang-barang karya pengrajin itu, supaya lebih memperhitungkan soal kualitas pengrajinnya sendiri dalam mewujudkan cita-citanya tersebut. KARPIN dengan didukung tenaga-tenaga pengrajin yang memiliki kualitas tinggi, diharapkan suatu saat organisasi tersebut akan mengarah pada kemandirian dan profesionalisme dalam mengaktualisasikan dan mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip dan program organisasi.

Dalam pertemuan ini, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono yang didampingi oleh Wakil Sekjen DPP GOLKAR Freddy Latumahina dan Andi Mochtar menerima pula hasil-hasil seminar yang diselenggarakan KARPIN. Sedangkan, Ketua Umum KARPIN A. Gafar yang didampingi sekjen DPP KARPIN R. Soewandi dan anggota-anggota lainnya akan memperhatikan setiap petunjuk GOLKAR dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan GOLKAR di masyarakat. □

Digitized by Google

Rachmat Witoelar:

Masih Banyak Kalangan Pengamat di Luar Negeri Kurang Memahami Latar Belakang Bangsa Indonesia

Di depan kalangan pemerintah, cendekiawan dan bisnis Singapura, Sekjen DPP GOLKAR, Ir Rachmat Witoelar mengemukakan masih banyak kalangan pengamat di luar negeri yang kurang memahami latar belakang bangsa Indonesia. Apa yang mereka ketahui tentang demokrasi Pancasila kurang lengkap.

Menurut Rachmat Witoelar, konsensus dan pelaksanaan demokrasi Pancasila berperan besar bagi peningkatan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sekitar 100 orang yang menghadiri ceramahnya yang diselenggarakan Lembaga Studi Kebijaksanaan (*Institute of Policy Study-IPS*) Singapura, Rachmat Witoelar menguraikan bahwa kata atau sebutan Pancasila diambil dari bahasa Sansekerta yang mempunyai arti lima sila atau asas yang kemudian dikenal sebagai ideologi dan filsafat negara sejak tahun 1945.

Kelima sila tersebut, pertama, mengandung pengertian pengakuan adanya Tuhan yang satu; ke-dua, mengandung pengertian perikemanusiaan; ke-tiga, mengandung pengertian tentang nasionalisme atau persatuan Indonesia; ke-empat, mengandung pengertian tentang demokrasi; ke-lima, mengandung pengertian tentang keadilan sosial.

Menurut Rachmat Witoelar, perubahan paling penting dalam kehidupan politik di Indonesia, yaitu sejak diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik, ekonomi dan sosial yang ada. Konsensus ini telah menghilangkan rasa saling curiga diantara politisi yang berbeda, dan ini merupakan landasan bagi kesepakatan dimana bangsa ini menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.

Dalam ceramah selama 50 menit, Rachmat Witoelar menegaskan pula bahwa bangsa Indonesia dengan konsekuen, menjaga dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mampu meningkatkan dan menjaga kelangsungan pembangunan negara.

Tentang kerusuhan yang terjadi di RRCina, Witoelar mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di Indonesia, karena kepemimpinan di Indonesia telah membuka kesempatan adanya keterbukaan dan partisipasi di kalangan generasi muda bangsa ini. Mengenai masalah suksesi kepemimpinan, dikatakan bahwa penggantian Presiden ditentukan tidak hanya oleh pemegang kekuasaan terbesar di GOLKAR tapi oleh seluruh kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia.

Dalam program ceramah oleh tokoh negara-negara ASEAN yang akan diundang untuk berbincang tentang masalah ekonomi, politik dan sosial negara mereka masing-masing, Rachmat Witoelar tampil sebagai pembicara pertama dalam program tersebut.□

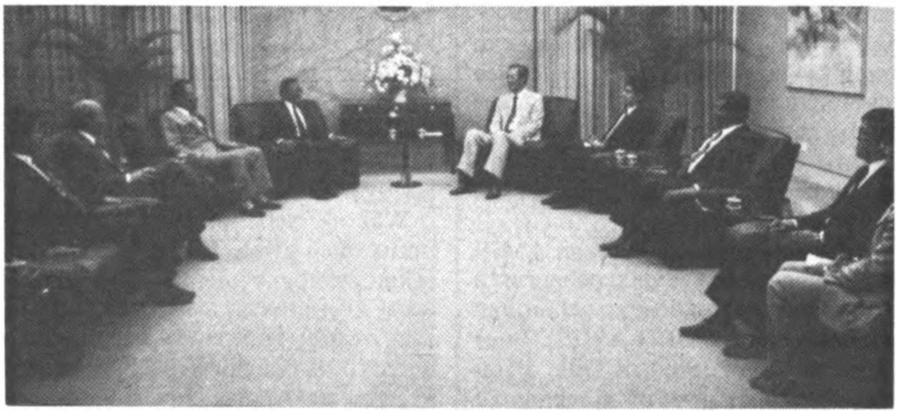

Kerusuhan di Cina tidak akan terjadi di Indonesia

Dubes AS Kagumi Pembangunan di Indonesia

Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, menerima Duta Besar Amerika Serikat (AS) John Cameron Monjo, di ruang kerjanya.

Kedatangan Dubes AS ini dimaksudkan untuk memperkenalkan diri. Sebagaimana diketahui, bahwa John Cameron Monjo ini merupakan Dubes AS yang baru untuk Indonesia, yang sebelumnya dijabat oleh Paul Wolfowitz.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam ini penuh dengan rasa keakraban dan kekeluargaan. "Kami sudah lama kenal beliau", kata Ketua Umum GOLKAR. Dubes AS ini, kata Wahono, mengagumi pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Sebagaimana dikatakan, sewaktu beliau ada di sini — waktu itu John Cameron tinggal di Indonesia —, pembangunan belum seperti sekarang ini.

Selain itu, Dubes AS ini juga menanyakan berbagai masalah kepada Ketua Umum tentang generasi muda yang belum pernah mengalami masa penjajahan Belanda, Jepang, pemberontakan DI/TII dan yang lain.

Sebagaimana dijawab oleh Ketua Umum, pada mereka khususnya generasi muda sekarang ini sedang diberikan pendidikan politik. Selain itu, Dubes AS itu juga menanyakan tentang keberhasilan pembangunan, termasuk di dalamnya masalah Keluarga Berencana (KB).□

Digitized by Google

Mewujudkan Impian Generasi Muda

Berawal dari suatu pengelompokan pemikiran dan orientasi politik ke arah pembaharuan dalam pembangunan politik bangsa, maka AMPI dilahirkan. Di Pandaan, Jawa Timur, pemuda-pemuda yang berafiliasi terhadap garis politik GOLKAR kemudian mencetuskan Deklarasi Pandaan. Berangkat dari kota dingin yang terletak di Lereng Gunung Welirang itu, dalam perjalanannya AMPI mampu mengembangkan dirinya untuk membentuk kepengurusan dari DPP, DPD I dan DPD II sampai tingkat sub rayon di seluruh tanah persada ini.

Kini AMPI sudah menginjak usia 11 tahun. Dan semangat Deklarasi Pandaan yang dicetuskan tahun 1978 tidak pernah luntur dihati fungsionaris AMPI dalam mengaktualisasikan organisasi kepemudaan ini di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbukti ketika AMPI melengkapi dirinya dengan membentuk kepengurusan DPD tingkat I di Timor Timur.

Gagasan dan gerak langkah AMPI dalam mengembangkan kepengurusan telah dilaksanakan dengan pelantikan pejabat pengurus DPD AMPI Timor Timur (27 Juni 1989) di Dilli. Pembentukan kepengurusan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Timor Timur.

Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono saat menerima delegasi DPP AMPI yang dipimpin Ketua Umum DPP AMPI HR Agung Laksono, dalam pesannya mengatakan bahwa, AMPI sebagai organisasi kepemudaan yang berorientasi pada karya dan kekaryaan sekaligus menempati posisi utama dalam pembinaan kader bagi GOLKAR, diharapkan mampu memberikan pendidikan politik terhadap generasi muda Timor Timur dan mampu melaksanakan kaderisasi dengan melihat permasalahan secara objektif. Sehingga, akan menjadi program utama AMPI untuk melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kepemudaan.

AMPI hendaknya memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Timor Timur setelah bebas dari belenggu bangsa Portugis, dan aspirasi masyarakat ini perlu ditampung dan dijabarkan dalam setiap program AMPI yang bersifat pengabdian masyarakat. Dengan demikian masyarakat yang telah dijajah selama bertahun-tahun ini mendapat kesempatan yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, seperti masyarakat Indonesia yang berada di propinsi lainnya.

Wahono selanjutnya mengatakan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan martabat masyarakat, maka AMPI harus bisa memberikan suatu penghayatan demokratis dengan kepastian hukum yang benar. Apalagi AMPI sendiri telah bertekad untuk merubah budaya kehidupan pemuda-pemudanya, maka tekad ini secara tidak langsung akan menemui suatu kendala sebagai tantangan AMPI guna mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk maksud itu, AMPI jangan ragu-ragu untuk menjabarkan berbagai bentuk program yang mengarah pada pembaharuan dan pembangunan, meskipun di depan mata nantinya terbentang berbagai tantangan. Itu merupakan dinamisasi organisasi dan cukup menarik untuk dikaji sebagai modal dasar AMPI dalam memantapkan eksistensinya di tengah masyarakat.

Keinginan dan harapan Wahono agar AMPI dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda Timor Timur, ternyata mempunyai persamaan dengan keinginan dan harapan Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Timor Timur Raimundo Jose De A. Sarmento, kehadiran wadah pembinaan generasi muda memang sudah lama diimpikan oleh kalangan pemuda-pemuda dan warga GOLKAR Timor Timur. Karena kehadiran AMPI ini berarti menambah lebarnya sayap GOLKAR di propinsi termuda ini. Berbicara apa dan bagaimana tentang AMPI, berarti berbicara apa dan bagaimana tentang GOLKAR. Keterkaitan ini karena AMPI dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tengah masyarakat mempunyai hubungan erat terhadap program kerja GOLKAR. Oleh karenanya, nantinya AMPI Timor Timur ini memikul tanggung jawab besar dalam membina dan mengarahkan seluruh potensi angkatan muda GOLKAR untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pelita V, Pemilu 1992 serta Sidang Umum MPR 1993.

"AMPI Timor Timur meskipun sudah ada, tapi masih memerlukan perhatian secara khusus, dalam ber-

Disambut hangat pembentukan DPD AMPI Timor-Timur

Digitized by Google

bagai hal. Baik secara material maupun non material, sehingga nantinya AMPI dapat tumbuh dengan subur dan mampu berjalan dengan kekuatannya sendiri," tegasnya.

Pada acara pelantikan personalia pejabat pengurus DPD AMPI Tingkat I Timor Timur di Gedung Prajurit Dilli ini, yang dihadiri seluruh Ketua DPD AMPI Tingkat I seluruh Indonesia berjalan penuh khidmat. Wakil Sekjen DPP GOLKAR Suhadi yang mewakili Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, saat memberikan sambutan pengarahan menekankan agar jaket dan baret AMPI yang dikenakan itu menjadi kebanggaan kader-kader AMPI dalam segala tingkah laku serta gerak juang berikutnya. "Pegang teguhlah dan jaga kehormatan ini sebagai anggota AMPI dalam mengenakan atribut tersebut". Satu hal yang sangat membanggakan, kata Suhadi, bahwa AMPI telah mendahului dalam melangkah ke depan. Sehingga di dalam propinsi yang termuda di negara Indonesia ini terbentuk DPD AMPI Tingkat I.

Sedangkan Gubernur Timur Timur Ir. Mario Viegas Carrascalao mengatakan, kehadiran AMPI Timor Timur ini berarti lengkap sudah lembaga kepengurusan AMPI di seluruh propinsi Indonesia. Dengan demikian hakekat keberadaan AMPI beserta segala motivasi perjuangannya dalam kaitan kebutuhan propinsi mempunyai daya juang yang efektif untuk mengemban pembaharuan dan pembangunan seperti tersirat dalam perjuangan AMPI itu sendiri. Di samping itu cita-cita AMPI tidak bisa terpisahkan dengan cita-cita perjuangan GOLKAR. Untuk itu, AMPI Timor Timur akan menjadi dinamisator, motivator dan mediator generasi muda di Timor Timur dengan orientasi terhadap karya dan kekaryaan.

Dalam kaitan ini, sambungnya, rakyat Timor Timur mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai rakyat Indonesia lainnya meskipun rakyat Timor Timur sendiri baru menikmati kemerdekaan dan berintegrasi ke wilayah Indonesia 13 tahun yang lalu. Hal itu tidak mengurangi pengertian dan pemahaman rakyat Timor Timur terhadap kepentingan nasional untuk meningkatkan semangat serta partisipasi mereka dalam proses pembangunan nasional. Bahkan, gubernur menaruh kepercayaan terhadap pengurus AMPI untuk mendorong rakyat Timor Timur, "semoga peranan ini dapat merupakan dorongan bagi AMPI Timor Timur dalam melaksanakan perjuangan GOLKAR secara umum dan program AMPI sekaligus membawa dampak positif terhadap proses pelaksanaan pembangunan di Timor Timur," ujar Gubernur Carrascalao.

Untuk memahami pengertian yang demikian ini Anggota Dewan Pembina AMPI Ir. Sarwono Kusumaatmadja menilai, Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk harus terus menerus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Persamaan pengalaman kita tidak hanya terjadi pada Timor Timur sebagai propinsi yang termuda ini. Namun, terjadi pula di propinsi lainnya di seluruh Indonesia. Di sinilah makna penting kehadiran AMPI untuk membentuk dan melantik ke-

Babak penting dalam sejarah AMPI

pengurusannya di Timor Timur sebagai tindak lanjut keberadaannya untuk melibatkan diri secara utuh dalam upaya memelihara serta mengembangkan cita-cita kemerdekaan kita, baik segala pengalaman maupun persepsinya.

Oleh karena itu, tambah Sarwono Kusumaatmadja, tantangan AMPI adalah bagaimana menterjemahkan rumusan-rumusan yang bagus dalam Deklarasi Pandaan ini menjadi suatu kenyataan yang kongkrit. Dan kita sudah terbiasa melahirkan rumusan-rumusan yang bagus terus menerus, tapi terlalu sering lupa mewujudkan rumusan itu dalam kenyataan. Ini tentunya tidak bisa terus menerus begini dan dalam hal ini Sarwono Kusumaatmadja merasa gembira, karena Ketua Umum DPP AMPI sendiri telah mencanangkan program pertukaran pemuda. Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan dalam rangka persamaan cita-cita, pengalaman dan persepsi tadi. Program pertukaran pemuda ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kaum pemuda yang berada di Timor Timur. Atas dasar ini sudah barang tentu pemerintah akan mendukungnya.

Sementara itu, dalam Surat Keputusan DPP AMPI Nomor 01/M/DPP-AMPI/V/1989 tentang komposisi dan personalia pejabat pengurus DPD AMPI Tingkat I Timor Timur, terpilih sebagai pejabat pengurus unsur Ketua DPD AMPI adalah Jose Gaspar. Terpilihnya dan pelantikan pemuda-pemuda Timor Timur sebagai pengurus DPD AMPI ini, seperti yang diungkapkan Ketua Umum DPP AMPI HR Agung Laksono, adalah salah satu babak penting dalam sejarah AMPI. Bukan saja karena pelantikan itu, melainkan adanya wujud nyata daripada keinginan untuk menyatukan langkah seluruh potensi pemuda dibawah naungan wadah pembinaan generasi muda yaitu AMPI. Karenanya, khususnya AMPI Timor Timur kehadirannya ini harus mampu menciptakan gerak dan irama yang sama dengan propinsi lain di Indonesia dalam hal menunjukkan peranannya di masyarakat sekaigus turut serta dalam menyukseskan pembangunan.

Orientasi kaderisasi AMPI di Timor Timur, kata Agung Laksono, hendaknya menggugah dan mendorong para pemuda serta masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui karya nyata secara langsung terasa manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat dan kalangan generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Untuk itu, di samping pendidikan politik maka titik berat arahan kaderisasi AMPI adalah pendidikan keterampilan diri, agar mampu untuk mengantisipasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan di kalangan generasi muda sebagai masalah nasional.

Pada kesempatan ini selain melaksanakan pelantikan pengurus DPD AMPI Timor Timur, Ketua Umum DPP AMPI Agung Laksono dalam rangka memperingati HUT AMPI ke XI telah diadakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat seperti penghijauan, pengobatan dan penyuluhan kesehatan cuma-cuma serta hiburan gratis.☐ (DT)

Digitized by Google

Miskin Versus Kaya di Paris

Dari tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 1989, di Paris berlangsung pertemuan tujuh negara industri maju — Perancis, Jerman Barat, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Kanada dan Jepang —, membicarakan berbagai masalah dunia.

Masalah utang negara berpenghasilan menengah, masalah perkembangan politik di Eropa Timur (Polandia dan Hongaria), masalah lingkungan hidup dan perekonomian Uni Sovyet yang semakin merosot atas permintaan Mikhail Gorbachev. Berbagai masalah dibahas dan telah dituangkan dalam kesepakatan yang menjadi keputusan bersama.

Untuk pertama kali, secara eksplisit pertemuan ketujuh negara kaya di dunia itu mencantumkan masalah negara-negara komunis dalam agenda pembicaraan mereka. Bahkan untuk pertama kalinya pula mereka sepakat membantu negara-negara seperti Polandia yang terlilit utang sebesar US$ 39 miliar. Mereka sepakat agar diadakan penjadwalan kembali pembayaran utang Polandia dan membantu perekonomian negara-negara Eropa Timur yang sedang mengalami proses demokratisasi di segala bidang kehidupan itu.

Juga Hongaria yang sedang berada dalam proses pendemokrasian kehidupan nasional bangsanya. Ketujuh negara itu sepakat membantu upaya demokrasi di negara tersebut dan memberi dukungan penuh.

Permintaan Mikhail Gorbachev agar pertemuan tersebut membicarakan situasi perekonomian Uni Soviet yang memburuk dewasa ini, juga diterima baik dan dibicarakan secara sungguh-sungguh.

Tetapi ketika teringat situasi di Cina, ketujuh negara itu ramai-ramai mengutuk penguasa Cina dan sepakat memberikan perpanjangan ijin tinggal bagi para mahasiswa Cina yang belajar di negara-negara itu, jika para mahasiswa itu memintanya.

Apa yang terjadi di Paris selama dua hari itu, cukup menarik perhatian kita. Nampaknya dunia telah jenuh hidup dalam pertikaian dan permusuhan. Sepertinya para pemimpin Timur dan Barat bersepakat untuk membangun suatu dunia baru yang berkedamaian dan berkesejahteraan.

Sama-sama menyadari bahwa tak ada negara di dunia yang merupakan negara autorki absolut (negara yang secara mutlak mandiri tanpa tergantung pada negara lain). Mereka sadar bahwa selama masih ada hidup dan kehidupan, selama itu pula saling ketergantungan tetap ada antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

Ada gerakan impulsif yang kuat, untuk memahami posisi masing-masing. Kelompok tujuh negara kaya mau menerima baik permintaan Uni Sovyet untuk membicarakan juga situasi ekonomi nasional pemimpin Blok Timur itu.

Satu hal yang tak pernah terjadi sejak akhir Perang Dunia II, Sovyet minta bantuan secara terbuka kepada negara Barat. Sejak rezim Stalin hingga rezim Breznev, aroganisme idiologis menempatkan Uni Sovyet pada suatu posisi kepemimpinan dunia yang semu. Betapapun kehancuran dalam negeri, penampilannya keluar selalu aroganistis. Dia menjadi super power dalam kehancuran nasional.

Begitu selesai pertemuan tujuh negara kaya itu, satu kelompok negara-negara yang menyebut dirinya negara termiskin mengadakan pertemuan sehari (Sabtu, 15 Juli) juga di Paris. Mereka juga terdiri dari tujuh negara: Brazil, Bangladesh, Burkina Faso (dulu Konggo Brazaville), Haiti, Mozambik, Filipina dan Zaire.

Jika negara-negara kaya bicara tentang keringanan utang negara-negara berpenghasilan menengah, ketujuh negara termiskin di dunia itu bicara soal ketimpangan ekonomi dunia. Mereka melihat tata ekonomi dunia sekarang ini tidak adil dan tidak manusiawi. Karena melupakan kepentingan negara-negara miskin. Untuk itulah ketujuh negara miskin ini mengadakan pertemuan puncak tersebut.

Berdasarkan hal tersebutlah, ketujuh negara termiskin itu menuntut adanya suatu tata ekonomi dunia baru, yang lebih adil dan manusiawi bagi kepentingan rakyat miskin.

Mereka bicara soal pengurangan beban utang seperti yang dilontarkan dalam "Brady Plan" (rencana Brady), Menteri Keuangan Amerika Serikat. Para peserta KTT negara miskin menilai Brady Plan sebagai suatu langkah maju namun menurut mereka, belum cukup memadai.

Disini letak perbedaan titik pandang antara kedua kutub yang bersidang di Paris itu. Kelompok kaya, melihat bantuan kepada penerima, sebagai suatu keharusan politik. Bantuan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik kendati tidak secara eksplisit disebutkan. Artinya, bantuan yang diberikan kepada suatu negara tidak hanya didasarkan pada kepentingan komersial tetapi juga kepentingan strategi secara global. Yaitu, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik disatu pihak serta kepentingan strategi global dalam kaitannya dengan kepentingan pertahanan keamanan pada sisi lain.

Dua pertemuan yang berlangsung di Paris itu, menarik perhatian dunia. Dari kedua pertemuan tersebut sedikitnya muncul tiga hal penting. *Pertama*, kesepakatan G-7 untuk mengurangi beban utang negara-negara berpenghasilan menengah termasuk penjadwalan kembali pengembalian pinjaman Polandia. Serta kesepakatan mereka untuk membantu negara-negara Eropa Timur yang mulai berkembang menuju pendemokratisasian kehidupan nasional seperti di Hongaria.

Kedua, kesadaran akan pentingnya peredaan ketegangan baik politik maupun ekonomi antara blok timur dan blok barat. Ini terlihat jelas dari kesediaan negara-negara G-7 menerima dan membahas permintaan Gorbachev untuk membahas bantuan ekonomi kepada Uni Sovyet.

Ketiga, tuntutan untuk membangun suatu tata ekonomi dunia yang lebih adil dan manusiawi, agar dapat melihat perekonomian dunia tidak hanya bagi kepentingan negara kaya tetapi juga bagi kepentingan rakyat miskin yang selama ini terlupakan.

Barangkali yang paling penting dari kedua pertemuan di Paris itu, adalah bagaimana menciptakan suatu tata kehidupan dunia yang lebih adil, manusiawi dan aman. Dimana saling ketergantungan merupakan hal yang tak boleh diingkari. Yang miskin butuh bantuan si kaya, sebaliknya dalam beberapa hal yang kaya juga butuh bantuan si miskin, karena tak ada negara absolut autorki di dunia ini. -

Digitized by Google

Kelompok 7 dan Dunia Ketiga

Di Paris pertengahan bulan Juli, berlangsung KTT tujuh negara industri terkemuka dunia yang lebih dikenal dengan Group of Seven (G-7) — Kelompok 7 —. Dalam kelompok ini bergabung tujuh negara industri terbesar, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Inggris, Jerman Barat, Italia dan Prancis.

KTT dua hari di ibukota Prancis itu diwarnai oleh kemeriahan spesifik, karena pada saat bersamaan rakyat Prancis merayakan 200 tahun Revolusi Prancis yang menjungkalkan kekejaman penjara Bastille yang menjadi simbol sistim monarchie. Tetapi kemeriahan suasana KTT tidak memantulkan hasil yang sepadan bagi perkembangan ekonomi global karena dari deklarasi setebal 22 halaman, sedikit sekali disinggung hubungan utara-selatan maupun utang dunia ketiga, sebuah topik yang sebelum KTT dimulai banyak diharap oleh para pemimpin kawasan selatan.

Deklarasi itu sendiri didominasi oleh keprihatinan ketujuh pemimpin dunia itu terhadap masalah pencemaran lingkungan, terorisme, Eropa Timur, Cina dan surat pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Sedangkan utang dunia ketiga yang kini membengkak menjadi 1.3 trilyun dolar tidak dibahas secara mendalam. Demikian pula seruan KTT Utara-Selatan yang disuarakan oleh Presiden Prancis Francois Mitterrand, dibatalkan oleh mayoritas peserta. Padahal sejumlah pemimpin dunia ketiga yang hadir di Paris dalam rangka 200 tahun Revolusi Prancis telah menyampaikan satu petisi yang ditandatangani oleh Kelompok 7 negara termiskin, agar segera diadakan KTT Utara-Selatan untuk membahas realisme baru di bidang perekonomian global dimana dunia ketiga tidak lagi menjadi suplemen bagi perekonomian internasional, tetapi subyek yang menentukan juga.

Presiden Prancis, Mitterrand, satu-satunya kepala negara beraliran sosialis dalam G-7, memang harus kecewa dengan kegagalan itu. Padahal dengan menyuarakan suara dunia ketiga, dia ingin meningkatkan citranya sebagai pemerhati kepentingan dari selatan. Tetapi apa lacur, Perdana Menteri Inggris dengan argumen bahwa berbicara tentang Utara-Selatan hanya akan membuat rancu realisme yang sesungguhnya, mampu membuyarkan retorika Mitterand.

KTT tujuh negara di Paris

Dari kacamata dunia ketiga, KTT G-7 yang baru lalu dianggap gagal. Pertama, karena realisme utara-selatan yang oleh dunia ketiga dianggap sebagai fenomena yang tidak dikarang-karang, gagal mendapat pengakuan substansial. Pengertian utara-selatan yang selama ini dianggap sebagai fakta dikotomis, dibantah oleh kelompok negara industri maju ini. Kedua, utang dunia ketiga yang kini mencapai angka 1.3 trilyun dolar, tidak digubris secara mendalam. Padahal jauh-jauh hari sebelum KTT dimulai baik kelompok G-7 maupun dunia ketiga memperlihatkan animo yang besar dalam masalah yang mencekik ini. Dan ketiga, dari kepentingan G-7 sendiri, KTT tersebut juga dinilai gagal karena tidak membahas secara mendalam persoalan utama yang selama ini mengganjal, yaitu masalah inflasi dan ketimpangan neraca perdagangan.

Formula Brady

Satu-satunya negara miskin yang berhasil meraih sukses dari KTT G-7 adalah Bangladesh. Negara yang terkenal dengan julukan negeri bencana ini memenangkan komitmen sebesar 10 milyar dolar untuk membiayai proyek pengendalian banjir di negeri kawasan Asia Selatan itu. Kemenangan ini mungkin satu-satunya kebanggaan Mitterrand yang memang menyuarakannya dalam KTT, serta sukses kehadiran Presiden Bangladesh Mohamad Ershad yang juga berada di Paris untuk ''mengintip'' jalannya KTT.

Sebenarnya, Jepang, satu-satunya wakil Asia dalam G-7 mempunyai formula yang lebih riel dalam membantu kesulitan dunia ketiga. PM Sosuke Uno yang memangku jabatan sebulan lebih, datang dengan tiga paket bantuan masing-masing untuk dunia ketiga dalam mengawasi utang sebanyak 60 milyar dolar lebih, 600 juta dolar untuk negara-negara miskin di Afrika dan satu lagi untuk proyek bersama pencegahan polusi untuk menyelamatkan lingkungan.

Tetapi entah mengapa, paket ''raksasa'' Uno ini tidak memenangkan dukungan KTT sehingga tidak tercantum secara eksplisit dalam deklarasi. Para pengamat mengatakan, kegagalan formula Uno disebabkan oleh citra PM yang sedang dilanda gosip di dalam negeri menyangkut permainannya dengan sejumlah geisha. Jepang yang sebelumnya mengklaim diri sebagai wakil dunia ketiga, malah tergeser oleh Prancis. Padahal, ketika masih menjadi menlu, Uno merupakan tokoh yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi dia sebenarnya tidak kalah dalam perang diplomasi.

Dalam konteks utang dunia ketiga, Meksiko adalah negara dari kawasan Amerika Latin yang beruntung, karena negara ini disepakati menjadi *pilot project* rencana penghapusan beban utang yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Nicholas Brady. Untuk negara-negara

Digitized by Google

Utang dari Dunia Ketiga menjadi masalah pelik

pengutang lainnya yang terlalu berharap memperoleh rejeki dari rencana Brady ini, tentu harus kecewa karena deklarasi memerintahkan mereka untuk berurusan sendiri dengan bank-bank komersial yang menjadi kreditur lewat perundingan yang rasional.

G-7 kembali mengemukakan syarat klasik bahwa lembaga-lembaga internasional hanya akan memberi bantuan kepada dunia ketiga yang dililit utang apabila pengutang menunjukkan upaya sungguh-sungguh melakukan restrukturisasi ekonomi dan mengencangkan ikat pinggang. Tanpa kesungguhan seperti itu, bantuan tidak akan direkomendir.

Yang menjadi pertanyaan, tentunya, apakah sikap G-7 seperti itu, cukup bertanggungjawab? Menjawab pertanyaan sama rumitnya dengan mengajukan pertanyaan itu sendiri. Argumen yang berputar sekitar utang ini demikian banyak dan masing-masing memperlihatkan derajad masuk akal yang tinggi pula.

G-7 beranggapan, menuntut mereka meringankan utang negara dunia ketiga adalah desakan yang tidak masuk akal, karena mereka sebenarnya telah menjadi juru selamat ketika meluangkan milyaran dolar pinjaman sebelum ini. Dari segi perhitungan ekonomi, sangat tidak diterima akal apabila seorang kreditur pada akhirnya harus menjadi pihak yang repot dengan beban pembayaran pinjaman.

Tetapi negara-negara pengutang pun mempunyai argumen yang rasional juga. Dalam perhitungan yang baru disadari belakangan ini, kredit-kredit yang disalurkan begitu antusias di masa lalu, sebenarnya perangkap dari kreditor untuk menciptakan ketergantungan dan pasar, karena kredit-kredit itu biasanya dikaitkan dengan keharusan membeli atau menyiapkan "monopli" bagi produk tertentu dari negara pemberi pinjaman. Berhitung dari segi ini, maka nilai kredit mungkin sudah dilunasi oleh arus barang dari dunia maju yang membanjiri pasar dunia ketiga lewat mekanisme monopoli maupun pasar bebas.

Dalam konteks ini, maka dunia ketiga berpendirian bahwa masalah utang telah menjadi problem internasional yang akan berdampak counter *productive* pada perekonomian negara-negara maju itu sendiri. Belum lagi kebuntuan pembayaran kembali utang akan menimbulkan solidaritas dunia ketiga untuk melakukan pembangkangan kolektif dengan tidak mau membayar lagi utang-utang mereka. Bila ini terjadi maka betapa besar kerugian yang akan diderita oleh negara industri. Cara yang paling mungkin - kalau penghapusan utang sebagian dianggap tidak bisa - maka harus diciptakan suatu mekanisme baru yang lebih longgar dalam penyaluran pinjaman baru, sehingga dunia ketiga mampu mengatasi kesulitan ekonomi untuk kemudian bisa membayar utangnya.

Namun persoalan di sekitar utang dunia ketiga ini, tetap merupakan masalah pelik. Kebijakan restrukturisasi perekonomian domestik dengan paket pengencangan ikat pinggang secara berlebihan seperti yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga pemberi pinjaman internasional seperti Bank Dunia dan IMF (International Monetary Fund) telah menimbulkan kerusuhan yang menelan nyawa. Argentina dan Jordania merupakan contoh korban restrukturisasi berlebihan itu.

Eropa Timur

Salah satu fenomena menarik yang tidak pernah muncul sebelum ini dari forum G-7 adalah perhatian dan komitmen yang begitu besar terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara sosialis Eropa Timur. Dalam deklarasi mereka baru-baru ini tercantum komitmen untuk memberi bantuan sebisa mungkin kepada negara-negara Eropa Timur yang kini sedang membangun perekonomian mereka. Polandia dan Hongaria, merupakan prioritas perhatian G-7 tersebut. Kepada kedua negara ini, pinjaman akan diberikan tanpa keharusan negara bersangkutan melakukan restrukturisasi ekonomi terlebih dahulu.

Pengalihan perhatian dan komitmen G-7 kepada Eropa Timur merupakan sukses diplomasi presiden Amerika Serikat George Bush, yang sebelum menghadiri KTT di Paris melakukan kunjungan ke Polandia dan Hongaria. Kepada kedua negara ini Bush berjanji akan mengupayakan koordinasi bantuan dari Barat bagi pembangunan perekonomian mereka, asal memper-

Digitized by Google

tahankan arah dan momentum perubahan demokrasi yang kini mulai menggejala.

Komitmen tersebut merupakan keyakinan pada realisme baru bahwa perkembangan demokrasi di Eropa Timur yang selama ini terkungkung oleh kekakuan komunisme, hanya bisa dimenangkan bila perkembangan ekonomi mendukung. Tanpa kemajuan ekonomi, sia-sia menyuarakan demokrasi. Tambahan lagi, perkembangan ekonomi global akan semakin harmonis bila kawasan Eropa Timur juga mencatat kemajuan di bidang yang satu ini.

Eropa Timur tidak bisa lagi dikucilkan dari percaturan perekonomian global sehingga masa sebagai *the silent market* harus segera diakhiri, terlepas dari sistem apa yang mendominasi.

Tetapi sikap baru G-7 itu sendiri tidak terlepas dari gerakan pembaruan - glasnost dan perestroika - yang dilancarkan oleh Gorbachev, pemimpin yang paling menentukan derap dan arah perubahan di Eropa Timur yang berada di bawah payung politik Kremlin. Secara perlahan-lahan; Gorbachev mulai melepas kendali Kremlin atas perubahan di Eropa Timur, dan membiarkan negara-negara satelitnya memilih mekanisme perubahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat mereka masing-masing. Sistim partai tunggal yang selama empat dasawarsa mendominasi Eropa Timur dilonggarkan, termasuk di Uni Soviet sendiri. Sikap inilah yang akhirnya berhasil meraih momentum dari G-7, karena dianggap sangat kondusif bagi perkembangan demokrasi. Oleh karena itu dalam kunjungan ke Eropa Timur baru-baru ini, walaupun dikecam oleh kalangan konservatif di Cekoslowakia, Jerman Timur, Bulgaria, Rumania sebagai dukungan terhadap reformasi yang mencelakakan kemapanan komunisme, Bush menyerukan rakyat Eropa Timur untuk mendukung arah dan semangat perubahan yang dikumandangkan oleh Gorbachev.

Gorbachev sendiri nampaknya sangat memanfaatkan momentum tersebut. Di tengah arus simpati Barat yang semakin tinggi terhadap perubahan yang diprakarsainya, ia menulis surat pribadi ke forum G-7 yang akhirnya sangat mencuri perhatian. Dalam suratnya itu ia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam masyarakat ekonomi Barat untuk secara bersama-sama mengatasi persoalan dunia. Untuk itu Eropa Timur dianjurkan agar disatukan dalam beberapa institusi perekonomian dunia.

Walaupun ada yang menilai terlalu dini untuk memasukkan Eropa Timur, khususnya Uni Soviet ke dalam unit-unit institusi perekonomian Barat, namun permintaan Gorbachev dianggap rasional dan konstruktif. Jerman Barat yang selama ini terkenal pro-Soviet segera menganjurkan agar Uni Soviet diberi status sebagai peninjau dalam GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

Bagi dunia ketiga di luar Eropa Timur, pengalihan perhatian G-7 ke kawasan tersebut, merupakan pelajaran bahwa sistim politik tidak lagi menjadi pagar mati yang membatasi kerjasama ekonomi. Tetapi di sisi lain juga mengajarkan bahwa bargaining politik akhirnya mampu memenangkan komitmen ekonomi.

Namun di atas segalanya, komitmen ekonomi pada siapapun harus dijamin oleh feasibilitas entah itu dalam jangka pendek atau panjang. Eropa Timur agaknya telah menjawab itu secara tepat. dari selera G-7, trend ekonomi dan politik di Eropa Timur, feasible.

Kegagalan Intern

KTT G-7 yang baru lalu, terlepas dari komitmen yang begitu besar terhadap lingkungan, hak asasi dan kutukan terhadap Cina, serta kekecewaan dunia ketiga, toh gagal juga menyelesaikan konflik intern mereka terutama dalam topik inflasi dan ketimpangan neraca perdagangan.

Terhadap Cina, mereka memang berhasil menelorkan kutukan terhadap rejim sekarang yang telah membantai ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi 3 dan 4 Juni lalu, tetapi gagal menyepakati sanksi ekonomi yang sebelumnya disuarakan sangat lantang. Perubahan sikap terhadap Cina ini, lagi-lagi memperlihatkan sukses diplomasi Bush yang tidak ingin mengucilkan 1 milyar lebih penduduk negara tersebut. AS dan juga Jepang, memang berkepentingan untuk tidak kehilangan Cina, negara yang telah menyedot investasi mereka dalam jumlah sangat besar selama satu dekade terakhir. Cina yang walaupun balas mengutuk G-7 karena sikap yang "tidak masuk akal" dalam membela gerakan "kontra-revolusioner" toh harus bersyukur karena sanksi ekonomi tidak jadi dilaksanakan oleh G-7.

Anehnya, G-7 yang begitu ngotot dengan kelestarian lingkungan dan Eropa Timur, malah tidak membahas masalah intern mereka secara mendasar. Ini adalah pengingkaran terhadap Kesepakatan Plaza tahun 1985 dan Persetujuan Toronto tahun lalu yang mengharuskan mereka bersikap sama dalam politik dan manajemen moneter. Artinya mereka setiap kali harus memperbarui sikap dalam tekad menstabilkan kurs yang menjamin keseimbangan perdagangan.

Di kalangan pengamat, ketidakmampuan anggota G-7 membahas masalah-masalah ini mencerminkan kegagalan untuk menyelesaikan pertikaian intern mereka, walaupun Thatcher coba membela diri dengan argumen bahwa tidak dibahasnya aspek moneter dan perdagangan dalam KTT itu mencerminkan bahwa para anggota telah terbiasa dengan masalah itu sehingga mengetahui persis kebijakan apa yang akan mereka tempuh. Pernyataan ini dianggap pantulan rasa puas diri berlebihan di kalangan beberapa anggota G-7.

Kegagalan membahas aspek moneter ini menyebabkan dalam waktu-waktu mendatang, kurs dolar akan menjadi tanda tanya besar, karena para pedagang internasional tidak bisa mengantisipasi kecendrungan mata uang yang paling menimbulkan spekulasi itu. Pemimpin G-7 memang sengaja tidak membahas ini, karena mereka sebenarnya telah mengakui bahwa kecenderungan moneter dewasa ini telah berkembang sedemikian jauh di luar jangkauan instrumen yang tersedia. Seperti diketahui semua peserta KTT secara diam-diam telah menghabiskan milyaran dolar untuk melakukan campur tangan pasar guna mengacaukan kurs dolar agar menguntungkan neraca perdagangan masing-masing.

Kalau untuk memecahkan masalah intern mereka saja sudah tidak mampu, apa yang diharapkan dari G-7 dalam rangka mengatasi kesulitan perekonomian dunia ketiga, khususnya dalam masalah utang? Eropa Timur telah menunjukkan pelajaran yang berharga bagaimana memenangkan bargaining dengan G-7. Pendekatan yang terlalu didominasi oleh karakter dikhotomis, seperti utara-selatan, sudah tidak lagi menjadi senjata pamungkas untuk menyelesaikan persoalan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana dunia ketiga memperlihatkan kompetensi yang feasible dalam percaturan ekonomi maupun politik. Hanya dengan senjata ini, bargaining enak dilakukan. □ (TG)

Digitized by Google

Oleh: Wahono

Peranan Guru PGRI Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik

Guru sebagai pejuang tanpa tanda jasa
Guru sebagai pengabdi tanpa pamrih
Guru sebagai arsitek hari depan Bangsa

Dalam Anggaran Dasar GOLKAR disebutkan bahwa salah satu Fungsi GOLKAR adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat, sedangkan Tugas Pokok GOLKAR yang akan diemban dalam rangka tersebut antara lain adalah "meneruskan usaha pembaharuan dan pembangunan politik yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia serta melaksanakan pendidikan politik bagi seluruh rakyat dalam rangka semakin memantapkan Demokrasi Pancasila".

Demikian pula dalam rangka Konsolidasi Idiil, sebagai salah satu bagian dari Tri Sukses GOLKAR, ditegaskan bahwa upaya Pendidikan Politik merupakan bagian tak terpisahkan dengan usaha pemasyarakatan P4. Sedangkan usaha dan kegiatan pendidikan dan Latihan pada umumnya sangat terkait dengan usaha-usaha dalam rangka Konsolidasi Organisasi di bidang Keanggotaan dan Kaderisasi.

Dilain pihak, dalam hubungannya dengan sukses Pelita V, di bidang Sosial Politik diamanatkan sebagai berikut, "meningkatkan pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga makin mampu mengembangkan partisipasi politik yang tumbuh dari bawah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa."

Dalam memenuhi dan mengejawantahkan semua amanat dan rencana tersebut, tentu yang paling dibutuhkan adalah adanya Sistim/metoda Pendidikan dan Latihan itu sendiri, dan adanya tenaga Pendidik atau Guru yang cukup dan berkemampuan, serta didukung oleh perangkat keras dan fasilitas lainnya yang tersedia dan memadai.

Lebih dari itu Guru sebagai tokoh dan pimpinan masyarakat serta cendekiawan ditingkatannya masing-masing, adalah panutan dan rujukan rakyat, tidak saja dalam hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan kesadaran politik rakyat. Oleh karenanya fungsi dan peranan positip Guru terhadap pendidikan politik sungguh tidak diragukan.

Berbicara khusus tentang Guru anggota PGRI, bagi GOLKAR mempunyai makna tersendiri, mengingat

Mengembangkan partisipasi politik yang tumbuh dari bawah

Digitized by Google

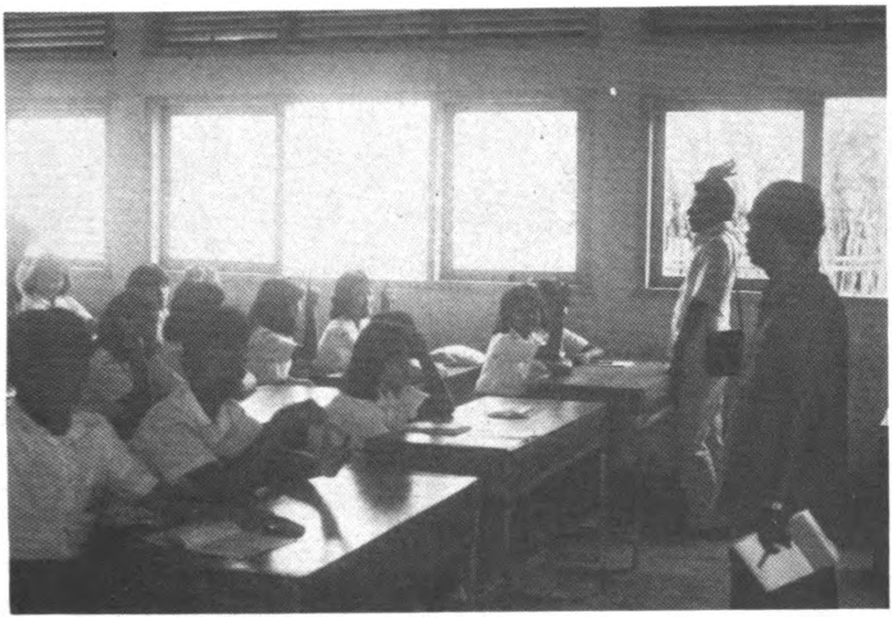

Pendidikan sebagai proses pembangunan nalar manusia

antara PGRI dan GOLKAR sejak awal telah terjalin hubungan aspiratip dengan dasar latar belakang sejarah yang mempunyai berbagai kesamaan. Karenanya pula peranan Guru PGRI, terhadap pendidikan Politik, dimata GOLKAR lebih bersifat sebagai suatu perjuangan bersama yang harus dimenangkan oleh para Kader GOLKAR baik yang ada di Dewan Pimpinan GOLKAR maupun yang aktip di PGRI. Untuk itu perlu ada dan semakin mantapnya tata hubungan kerjasama, koordinasi dan tata kerja (mekanisme) yang lebih berdaya guna dan berhasil guna di masa-masa yang akan datang.

Permasalahan pendidikan pada umumnya

Pendidikan sebagai suatu usaha sadar dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa. Dalam rangka ini, secara praktis terjadi proses saling isi dan saling pengaruh/kontaminasi antara sesama anggota masyarakat dan saling menarik pelajaran, teladan serta dan mencontoh dari pihak lainnya, sebagai akibat dari adanya interaksi antara sesama anggota masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang berlangsung seumur hidup.

Pendidikan, jenis dan jenjang apapun dapat berlangsung secara formal-klasikal, dan dapat pula terlaksana secara nonformal dan nonklassikal. Demikian juga halnya dengan pendidikan politik. Sasaran, arah dan tujuan dari suatu pendidikan, bagaimanapun sistimnya dan dimanapun diterapkan, adalah untuk meningkatkan mutu atau kualitas manusia.

Demikianlah tujuan pendidikan nasional kita yang berdasarkan Pancasila menurut GBHN adalah "untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani".

Kita mempunyai sistim pendidikan nasional yang saat ini telah didukung oleh suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya mencakup dan mengatur berbagai hal dan aspek berkenaan dengan dunia pendidikan.

Pendidikan sebagai proses pembangunan nalar manusia dan warganegara Indonesia pada dasarnya mempunyai dua dimensi utama yakni: dimensi peningkatan ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, dan dimensi menggugah/membangkitkan dan meningkatkan kesadaran (conciousness), rasa/perasaan (feeling) dan keyakinan (conviction). Kedua dimensi tersebut pada gilirannya akan bermuara pada sikap, tingkah laku dan tindakan-tindakan manusia. Dilain pihak, pendidikan sebagai alat modernisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis baik dilihat dari segi target groupnya yaitu warga negara Indonesia maupun ditilik dari segi pembangunan nasional pada umumnya.

Di negara manapun, khususnya di negara yang sedang berkembang sebagaimana halnya Indonesia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan sentral. Dalam hubungan ini pendidikan menyatu tak terpisahkan dengan komunikasi sosial, yang keduanya merupakan mesin penggerak dalam setiap denyutan dan tahapan proses perubahan yang terjadi secara dinamis, aspiratip dan prospektip.

Bila secara spesifik dikaitkan dengan pendidikan politik, maka tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia atau warga negara Indonesia yang berkualitas, akan bermakna bahwa; Adanya manusia Indonesia yang mempunyai budaya dan tindakan politik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti, tidak ada ruang bagi tumbuh dan berkembangnya budaya dan tindakan atau tingkah laku politik yang tidak berke-Tuhanan Yang Maha Esa di bumi Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini.

Terbina dan berkembangnya mental manusia Indonesia yang mempunyai sikap dan menjalankan praktek-praktek politik yang berbudi pekerti luhur dan berkepribadian, atau yang mempunyai budaya politik yang etis dan manusiawi, tegasnya tindak tanduk politik yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.

Berlangsungnya tata laksana dan mekanisme politik yang tertib dan taat asas, yang dicerminkan oleh budayanya sikap mental manusia Indonesia yang disiplin, mempunyai etos kerja keras, tangguh dan bertanggung jawab.

Terciptanya manusia Indonesia yang sadar politik, cerdas dalam analisa, trampil dalam aktualisasi prinsip-prinsip perjuangan dan dasar-dasar filosofi Bangsa, serta mandiri dalam penampilan konsepsi dan pelaksanaan usaha dalam rangka Program perjuangan.

Terpeliharanya kondisi fisik manusia Indonesia yang sehat dan tumbuh kembangnya sikap mental dan semangat yang secara politik menunjang kepada peningkatan peranannya dalam pembangunan nasional. Dengan kondisi manusia Indonesia seperti ini, dia tidak saja siap untuk menjadi obyek pembangunan atau sebagai target group pembangunan, tetapi lebih jauh dari itu dia juga siap dan layak sebagai subyek pembangunan atau sebagai manusia pembangunan.

Digitized by Google

Menggugah dan meningkatkan kemampuan rakyat dalam kegiatan pembangunan

Pendidikan politik bagi rakyat

Tentang masalah ini. GBHN menegaskan sebagai berikut "pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu lebih ditingkatkan agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara sehingga makin mampu ikut berperan secara aktip dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa".

Penegasan tersebut mengandung beberapa essesi antara lain; Pendidikan politik haruslah secara tegas dan konsekuen mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945. Sasaran dari pendidikan politik sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Maksud dari pendidikan politik adalah untuk menggugah dan meningkatkan kemampuan rakyat untuk berperan serta secara aktip dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan nasional. Maksud lainnya dari pendidikan politik adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan idealistis dari kesemua itu adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesadaran rakyat sebagai warganegara Indonesia, akan menegaskan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai individu manusia Indonesia dalam hubungannya dengan manusia Indonesia lainnya, dalam hubungan dengan alam sekitarnya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu juga akan lebih menyadarkan kita akan kedudukan, hak dan kewajiban serta keterbatasan-keterbatasan yang berkenaan dengan adanya konsensus dan kesepakatan yang mengikat, pengaturan dan pembatasan yang wajib ditaati, serta berbagai tatacara dan aturan permainan yang harus dituruti dan dijalani, yang landasan idiilnya Pancasila, landasan Konstitusional UUD 1945, dan acuan operasionalnya adalah GBHN. Inilah sesungguhnya makna operasional dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia; yang merupakan hakekat pembangunan nasional.

Pendidikan politik memang dapat berlangsung secara aktip berupa usaha mengajarkan sesuatu berkenaan dengan politik dan pembangunan pada umumnya. Dapat pula dan lebih sering berlangsung secara pasip melalui dan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam rangka pembangunan nasional. Yang lebih mendasar dan berbobot sugestip dan motivatip adalah melalui keteladanan, yakni adanya penampilan, tingkah laku dan kegiatan-kegiatan seseorang yang berkualifikasi pemimpin atau yang menjadi panutan, yang mempunyai demontrasi effek positip di kalangan masyarakat sekitarnya. Yang terakhir ini akan sangat efektip untuk menumbuhkan kesadaran, menggugah tindakan dan membentuk sikap rakyat dalam rangka pendidikan politik. Namun yang terakhir ini pula yang paling mempunyai resiko tinggi.

Sebab, bila tokoh panutan tidak tampil sebagaimana yang diharapkan, tentu demontrasi effeknya akan negatip, dan akan lebih fatal lagi, bila panutan tersebut tampil tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagai acuan dasar pendidikan politik kita, tentu akan sangat berbahaya bagi suasana kehidupan bermasyarakat, bernegara

Digitized by Google

Ikut memikul beban dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan

dan berbangsa.

Kesadaran rakyat akan keberadaan dirinya sebagai warganegara Indonesia, juga disebut sebagai kesadaran politik rakyat. Tumbuh dan berkembangnya suasana seperti ini bukanlah semata-mata sebagai fenomena dari keberhasilan (achievement) pembangunan politik, dan konotasinyapun tidak hanya berkaitan dengan aspek politik semata. Tetapi ini adalah di satu pihak sebagai "buah" dari berbagai usaha pembangunan nasional di segala bidang, sedang di lain pihak, dia mempunyai dampak menyebar (spreading effect) terhadap berbagai segi dan aspek pembangunan lainnya. Oleh karena itu essensi lainnya dari pendidikan politik, adalah untuk menggugah dan meningkatkan kemampuan rakyat untuk berperan serta secara aktip dalam pembangunan.

Berkenaan dengan partisipasi aktip segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan, GBHN menegaskan beberapa hal antara lain; Partisipasi rakyat haruslah lebih meluas dan merata. Partisipasi masyarakat tersebut bermakna, ikut memikul beban pembangunan, ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, menerima kembali hasil-hasil Pembangunan. Perlu adanya suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan. Tumbuhnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat.

Suasana dan iklim seperti yang diharapkan di atas, tidak akan terjadi dengan sendirinya, kecuali harus diciptakan melalui proses pendidikan politik. Sedangkan setiap kondisi yang dicapai saling berpengaruh kepada kondisi lainnya. Tumbuhnya rasa tanggungjawab, sebagai misal, harus diawali dengan tumbuh dan adanya rasa memiliki di kalangan rakyat terhadap pembangunan dan lebih lebih lagi terhadap bangsa dan negara. Sedangkan rasa memiliki terhadap pembangunan, tumbuh, jika rakyat memang merasakan bahwa pembangunan tersebut berasal darinya atau sesuai dengan aspirasi mereka, pelaksanaannya ikut mempertimbangkan kepentingan dan mengajak serta membuka peluang keikutsertaan mereka dan hasilnyapun bermanfaat nyata bagi rakyat. Atau tegasnya pembangunan itu cukup demokratis, berasal dan tumbuh dari bawah, sehingga bermanfaat untuk memenuhi misi dari thema "pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat".

Dengan latar pemikiran dan alasan praktis di atas, dapat ditegaskan bahwa bukanlah rakyat yang salah bila partisipasinya kurang dalam pembangunan.

Yang lebih penting lagi, hendaknya didasari bahwa partisipasi bukanlah berarti mobilisasi secara paksa. Partisipasi haruslah berakar pada kesadaran yang tumbuh dari kondisi mental dan kehidupan moril yang dipacu oleh dorongan motivasi yang kuat untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dalam rangka pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara, serta sebagai ibadatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bila ada kenyataan bahwa rakyat kurang gaerah dan kurang aktip partisipasinya dalam pembangunan, maka yang perlu kita lakukan adalah, melihat diri kita masing-masing terutama yang berkualifikasi dan dianggap pemimpin, baik yang menjadi aparat/pejabat di instansi Pemerintahan maupun di Organisasi Infrastruktur, yakni Organisasi Kekuatan Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (termasuk PGRI). Tanyakan dan teliti, apakah kekurangan dan kesalahan kita, kok rakyat enggan berpartisipasi.

Bila hal ini dilakukan dengan penuh keihlasan dan rasa tanggung jawab pengabdian kepada Bangsa dan Negara, kami yakin kita akan menemukan penyebabnya dan tentunya akan memperbaiki kesalahan dan kekurangan tersebut. Hanya orang atau pemimpin yang mengakui kekurangan dan mau belajar dari pengalaman orang lain serta mau mendengarkan suara hati nurani rakyat, menyatu dengan aspirasi rakyat, maka dia akan menjadi pemimpin rakyat yang sejati dan mendapat dukungan rakyat secara nyata.

Sejalan dengan itu Pendidikan Politik Rakyat, kiranya mampu pula menempati posisi sebagai sarana komunikasi dan dialog antara Rakyat dan Pemerintah.

Dia juga berperan untuk lebih memantapkan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Dalam hubungan kedua hal yang terakhir ini, Pendidikan Politik baik sebagai proses dan mekanisme alamiah di tengah-tengah masyarakat maupun sebagai upaya yang sengaja dilakukan, hendaknya benar-benar menjadi arena dan wahana untuk memupuk semangat persatuan dan kesatuan Bangsa serta Wawasan Nusantara. Pendidikan politik juga kiranya mampu membina dan mengembangkan kebersamaan

Digitized by Google

dalam konstelasi integralistik yang dikerat oleh prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, sebagai salah satu jawaban terhadap realitas Bangsa yang berciri Bhineka Tunggal Ika.

Peranan guru dalam pendidikan politik

Pendidikan, walaupun secara sektoral instansional digolongkan kedalam kelompok bidang sosial budaya, namun sejarah Kebangsaan telah membuktikan betapa besarnya peranan pendidikan dalam proses perjuangan kemerdekaan kita, dan betapa menentukan pula pendidikan dan orang-orang terdidik sebagai pejuang dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan pada waktu-waktu berikutnya.

Sederetan pahlawan Bangsa, telah memilih pendidikan sebagai salah satu cara dan bentuk perjuangan, dan mereka berhasil membuktikan bahwa cara dan model tersebut cukup ampuh. Dr. Wahidin bersama Dr. Sutomo, memprakarsai adanya dana pelajar untuk anak-anak yang cerdas dibawah thema; ''memajukan pendidikan/pengajaran dan kebudayaan bangsa''. KH. Ahmad Dahlan melakukan pembaruan pendidikan agama dengan memasukkan mata pelajaran umum pada pendidikan Agama dan beliau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1922, sedangkan Maria Walandau Maramis dan Dewi Sartika menggalakkan pendidikan untuk wanita, para isteri dan anak-anak. Kartini terkenal sebagai Pendekar Emansipasi Wanita, melalui usahanya, antara lain pendidikan wanita, sedangkan KH Hasyim Asy'ari membina dan mengembangkan Pendidikan melalui Pesantren.

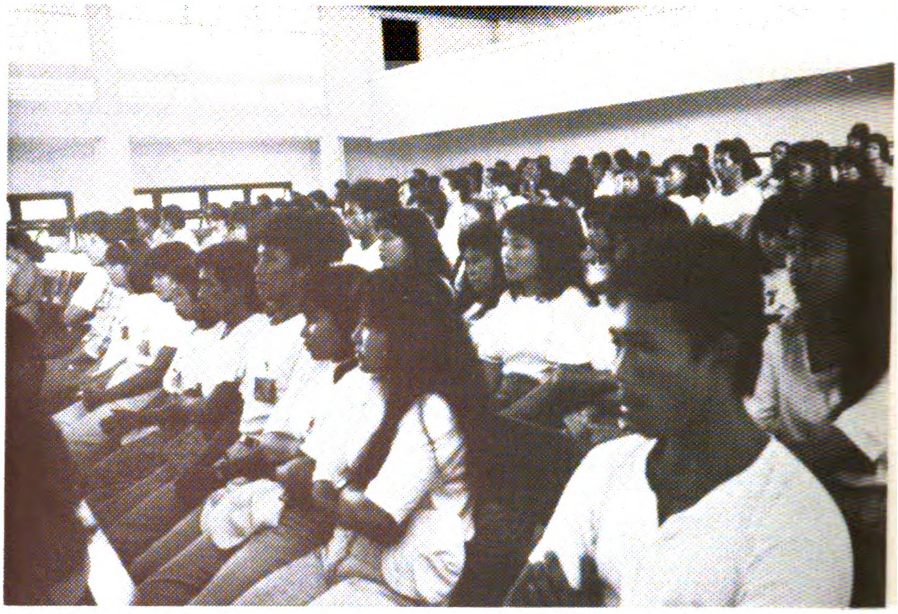

Peranan pendidikan sangat besar dalam proses perjuangan kemerdekaan

Di tahun 1922 didirikan Taman Siswa oleh KH. Dewantara, sebagai lembaga pendidikan yang selain mengajarkan pelajaran umum, juga menanamkan rasa dan kesadaran kebangsaan kepada anak didiknya. Dari cukilan sejarah tersebut, jelas terlihat betapa besar peranan dan pengaruh atau dampak pendidikan dalam perkembangan bangsa sejak awal, dan di dalamnya tentunya yang sangat menonjol dan tak terpungkiri adalah peranan para pemrakarsa dan guru-gurunya.

Yang hendak kami katakan pada bagian ini adalah, himbauan kami agar para guru PGRI dapat mengikuti tapak-tapak sejarah yang telah dilalui oleh para Pahlawan tersebut. Anda sekalian adalah pejuang untuk meneruskan perjuangan mereka dalam mengisi Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Guru adalah tokoh mentrasfer ilmu dan ketrampilan. Guru juga sebagai komunikator berbagai permasalahan baik antara murid dan lingkungan sekolah dengan masyarakat dan pemerintah, maupun di antara anggota masyarakat. Guru juga memberikan contoh dan memperagakan praktek-praktek yang baik, yang seyogyanya diikuti dan dilakukan oleh anggota masyarakat, agar menjadi lebih baik dalam arti luas.

Disamping itu, dengan predikat formalnya tersebut, Guru sering ditokohkan dan membawa citra seorang pemimpin, tidak saja terhadap muridnya tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan kedudukan, fungsi dan tugas yang disandangnya dan kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukannya, dengan sendirinya menempatkan guru menjadi panutan masyarakat.

Oleh karenanya fungsi dan peranan guru dalam kegiatan apapun berkaitan dengan pembangunan dan khususnya berkenaan dengan upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa secara umum sungguh sangat besar. Wajar pula bila kepada Guru tergantung banyak harapan dan dambaan masyarakat,

Memajukan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan bangsa

Digitized by Google

Guru PGRI harus terampil dan penuh inisiatip

tentunya sekaligus banyak pula tuntutan-tuntutan, sebagai sisi lain dari harapan masyarakat tersebut.

Penghargaan masyarakat kepada gurupun cukup tinggi, sehingga banyak ungkapan yang membesarkan hati dialamatkan kepada Guru, misalnya "guru sebagai pejuang tanpa tanda jasa", "guru sebagai pengabdi tanpa pamrih", "guru sebagai arsitek hari depan bangsa", dan sebagainya.

Namun sejalan dengan kedudukan, fungsi, tugas, harapan dan tuntutan serta penghargaan masyarakat tersebut, terselip sekaligus adanya tantangan bagi guru, baik tantangan yang secara sempit berkaitan dengan keprofesian guru itu sendiri, maupun arti luas dalam bentuk pelaksanaan kiprah guru dalam pembangunan Bangsa dan Negara, utamanya pembangunan manusia Indonesia.

Salah satu tantangan dari guru berkaitan dengan wawasan di atas, adalah kemampuannya untuk tampil di luar kelas atau di luar sekolah, sebagai tokoh dan anggota masyarakat dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara yakni; Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani. Walaupun di kelas, seorang guru ada dan dapat saja mengajarkan sesuatu berkenaan dengan politik seperti Pendidikan Moral Pancasila, PSPB, GBHN dan sebagainya, namun pendidikan politik dalam arti yang lebih luas sebagaimana kami uraikan terdahulu, akan lebih banyak diperankan oleh guru tersebut di luar kelas atau di luar sekolah. Apalagi kalau pendidikan politik tersebut akan berkaitan dengan atau menjurus kepada pilihan-pilihan politik. Demikian pula dalam rangka upaya memantapkan kehidupan konstitusional, praktek Demokrasi Pancasila dan terjaminnya kepastian hukum yang mengayomi rakyat secara adil, maka peran guru khususnya guru anggota PGRI akan tampil lebih sebagai Pimpinan Nonformal, panutan masyarakat dan kader Bangsa yang Pancasialis, ketimbang sebagai seorang tenaga pengajar di suatu sekolah.

Sebagai seorang Kader Pancasila yang pada dasarnya adalah Kader Pembangunan, Guru PGRI haruslah cukup terampil, penuh inisiatip dalam berasosiasi dengan masyarakat, sehingga selain mampu memberikan informasi yang benar, berdialog dengan gaya dan bahasa yang komunikatip, juga mampu memutar dinamika sosial masyarakat yang terarah kepada lebih gairah dan aktipnya partisipasi rakyat dalam pembangunan.

Unsur inisiatip dan kreativitas, sungguh diperlukan dalam proses dan kegiatan pendidikan apapun, termasuk pendidikan politik, sebab bila tidak, dia akan reaktip, dan setiap yang reaktip biasanya selalu ketinggalan. Demikian pula halnya dengan pendidikan politik, terutama bila telah terkait dengan tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan Politik.

Khusus dalam hal yang terakhir Ini, kami melihat betapa perlunya para Guru mempersiapkan diri, baik dari aspek intelektual, mental spiritual, maupun tekad sebagai pejuang dan tekad untuk membawakan missi, yakni terlaksananya semua sasaran dan tujuan pembangunan nasional, sebagai suatu gerakan rakyat dari bawah (growth from below) dan berlangsungnya mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang benar-benar mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan itu tumbuh dan berkembangnya suasana kemasyarakatan yang demokratis, terbuka, dengan semangat kebersamaan yang ditaburi warna-warni musyawarah-mufakat secara kekeluargaan.

Hubungan dan kerjasama GOLKAR dengan PGRI

Program Umum GOLKAR hasil MUNAS IV yang lalu menegaskan tentang Hubungan dengan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan, Profesi/ Fungsional sebagai berikut; "Mengatur dan meningkatkan mekanisme hubungan kerjasama dengan organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/ fungsional dalam rangka pelaksanaan program, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat".

Dilain pihak tentunya kita semua mengetahui bahwa PGRI termasuk kategori Organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh UU Nomor 8 tahun 1985, sedangkan GOLKAR adalah Organisasi kekuatan Sosial Politik yang diatur dengan UU Nomor 3 tahun 1985.

Dalam kedua UU tersebut tidak mengatur adanya stelsel keanggotaan Organisasi dalam suatu Organisasi lainnya. Sedangkan kita mengetahui persis bahwa PGRI adalah organisasi yang dipimpin oleh seluruhnya Kader-Kader GOLKAR, dan dalam perjuangan kita, telah tercatat bahwa PGRI sebagai Organisasi pendukung GOLKAR atau yang menyalurkan aspirasi anggotanya melalui GOLKAR.

Antara GOLKAR dan PGRI mempunyai jalinan hubungan yang secara aspiratip menyatu, dan pertautan aspirasi ini diperkuat oleh latar belakang sejarah yang juga mempunyai berbagai kesamaan. □

Digitized by Google

Oleh; Mubyarto

Beberapa Prakondisi Ekonomi Tinggal Landas

Menurut GBHN 1988 Pembangunan Nasional selama 4 Pelita, telah berhasil mewujudkan kerangka landasan pembangunan nasional. Kerangka landasan ini akan lebih diperkuat agar pembangunan nasional bisa sungguh-sungguh memasuki proses tinggal landas.

Kemantapan kerangka landasan pembangunan nasional harus berarti pula kemantapan setiap manusia Indonesia dalam mengamalkan Pancasila, mulai dari: (1) penggunaan landasan moral dan etik-spiritual dalam setiap perilaku di segala bidang, (2) peningkatan makna manusia yang utuh, (3) peningkatan kesetiakawanan, (4) peningkatan semangat demokrasi politik dan ekonomi, dan (5) perwujudan sistem ekonomi kekeluargaan.

Ekonomi tinggal landas yang mengandung arti adanya kemampuan, semangat dan tekad kemandirian, harus ditopang oleh partisipasi yang luas dari seluruh rakyat dan warga masyarakat agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan partisipasi seluruh potensi masyarakat ini harus menghindari kecenderungan pemutusan kekuatan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Ekonomi Tinggal Landas

Perekonomian yang sudah siap memasuki proses tinggal landas harus memenuhi beberapa pra-kondisi sedemikian rupa sehingga harapan akan terwujudnya suatu (keadaan) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jelas dan mantap. Keadaan yang digambarkan disini mencakup 3 ukuran sebagai berikut: (1) kemakmuran minimal tercapai bagi seluruh rakyat; (2) semua orang memperoleh pekerjaan; (3) jurang kaya-miskin tidak besar.

Dengan menggunakan 3 kriteria dasar ini, kita bisa menilai sejauh mana kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sudah berhasil mencapainya. Sudah jelas dibandingkan keadaan awal Pelita I, kondisi kehidupan rata-rata bangsa Indonesia dewasa ini, pada awal Pelita V, sudah jauh lebih baik. Sedang pangan sudah terpenuhi secara cukup memadai meskipun terasa belum merata. Dalam pada itu keadaan kesempatan kerja terasa semakin berat karena permintaan jauh lebih besar daripada penawaran, sedangkan mereka yang sudah bekerja pun penghasilannya kadang-kadang sangat rendah. Akhirnya ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan menimbulkan perasaan ketidakadilan sosial, sehingga ada semacam "keresahan" yang mengganggu hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan.

Perasaan peradilan masyarakat sangat tajam

Paket-paket Deregulasi

Paket-paket kebijaksanaan Deregulasi yang sudah berjalan 6 tahun sejak 1983, memang merupakan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi kemerosotan ekonomi akibat anjlognya harga ekspor minyak bumi. Namun sasaran lain yang lebih penting adalah sebagai upaya meningkatkan efisiensi ekonomi yang memang mengalami kemerosotan justru sebagai dampak negatif datangnya bonansa akibat kenaikan yang luar biasa dari harga minyak bumi mulai 1973/1974. Selain itu deregulasi dalam kaitannya dengan debirokratisasi, secara langsung ditujukan untuk memerangi ekonomi biaya tinggi khususnya sebagai akibat monopoli dan oligopoli yang dipegang perusahaan-perusahaan tertentu baik swasta, BUMN maupun kolusi keduanya. DERE dan DEBI dalam pengertian yang demikian jelas sejalan dengan upaya meningkatkan demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.

Namun demikian, DERE yang bertujuan baik pun tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya ekses yang mengesankan munculnya persaingan liberalistik (free flight liberalism). Hal ini bisa terjadi karena dunia usaha tidak sama kekuatannya. Dan apabila dalam perekonomian yang mengalami resesi (sejak 1982) dunia produsen secara sengit berebut kue yang semakin kecil, maka tidak terhindarkan terjadinya penggilasan usaha-usaha besar terhadap usaha-usaha kecil yang menimbulkan penganggguran-penganggguran baru.

Di bidang perbankan, DERE tahap ke-2 yang merangsang pendirian Bank-Bank baru sampai ke pedesaan (Pakto 27) secara teoritis berdampak amat positif bagi pembangunan wilayah dan masyarakat pedesaan. Namun demikian besar kecilnya modal minimal Bank yang ditetapkan, kembali menciptakan persaingan jenis baru yang berkesan liberalistik. Maka kesediaan pemerintah untuk bersifat luwes mempertimbangkan aneka rupa masalah yang timbul di lapangan sangat diharapkan.

Bagaimanapun DERE tahun delapanpuluhan memang amat berbeda

Digitized by Google

Memperkecil ketergantungan rakyat desa pada tanah

sifatnya dengan DERE tahun enampuluhan. Yang pertama adalah upaya memerangi ekonomi biaya tinggi akibat monopoli/oligopoli bisnis swasta, sedangkan DERE tahun enampuluhan jelas lebih dekat ke Debirokratisasi yaitu bertujuan menghapuskan ekses-ekeses sistem etatisme. Demokrasi ekonomi berasas kekeluargaan memang lebih terasa urgensinya sekarang ketimbang tahun enampuluhan, karena dewasa ini sektor swasta kuat (yang berkembang melalui aneka fasilitas birokrasi) benar-benar sudah menjadi amat kuat.

Akhirnya apabila orang menyangsikan apakah DERE akan menjamin tercapainya ekonomi kekeluargaan yang bisa mewujudkan keadilan sosial, memang jaminan itu sulit diberikan. Ukuran keberhasilan DERE adalah pada peningkatan efisiensi ekonomi nasional, sedangkan harapan masyarakat luas dalam ekonomi kekeluargaan adalah efisiensi dan keadilan atau pertumbuhan dan pemerataan. Demikian apabila ada semacam kesangsian adanya kaitan langsung antara DERE dan keadilan (ekonomi dan sosial) maka kesangsian itu memang masuk akal, yang memang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Apabila Trilogi Pembangunan tetap menjadi landasan strategi dan kebijaksanaan ekonomi kita, di mana pemerataan kita tempatkan pada urutan pertama, maka adalah wajar untuk selalu mempertahankan setiap kebijaksanaan DERE dari aspek pemerataan dan keadilan ekonomi dan sosial ini. Perasaan keadilan masyarakat adalah amat tajam khususnya rakyat kecil yang miskin. Rakyat kecil tidak menginginkan persamaan pendapatan, tetapi mereka selau ingin diperlakukan secara adil dalam kehidupan sosial-ekonomi mereka.

Salah satu masalah ekonomi dan politik yang sangat serius yang memerlukan kebijaksanaan pemerataan, dan yang nampaknya sulit diharapkan mengatasinya melalui kebijaksanaan deregulasi, adalah ketimpangan yang nampak semakin gawat antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Jawa dan wilayah-wilayah di luar Jawa. Pada pertengahan tahun limapuluhan "kemakmuran" penduduk luar Jawa (khususnya Sumatera) jauh lebih tinggi dibanding penduduk Jawa. Tokh muncul keluhan dan protes atas kebijaksanaan pembangunan yang "terlalu berorientasi" ke Jawa karena Sumatera merupakan penghasil devisa negara yang utama.

Sejak Pelita I bisa diamati pembangunan ekonomi yang berjalan amat cepat di Jawa yang menghasilkan Kenaikan pendapatan (nominal) dan kemakmuran dengan laju yang tinggi (34% per tahun). Ini berarti kenaikan pendapatan penduduk Jawa adalah 32 kali selama 17 tahun. Sebaliknya kenaikan "pendapatan" ini di Luar Jawa hanya 18% per tahun atau 12 kali dalam periode yang sama. Demikian maka bisa disimpulkan bahwa jika kemakmuran penduduk Jawa sebelum Pelita I adalah rata-rata 35% lebih rendah dibanding kemakmuran penduduk luar Jawa, sehingga program transmigrasi sering "disindir" sebagai program pemindahan kemiskinan dari Jawa ke Luar Jawa, maka tahun 1987 keadaannya terbalik, karena kemakmuran penduduk Jawa menjadi rata-rata 26% lebih tinggi atau pendapatan penduduk luar Jawa tahun 1987 menjadi 20% di bawah pendapatan penduduk Jawa.

Apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan tersebut? Jelas tindakan deregulasi untuk memerangi ekonomi biaya tinggi bukan obat yang bisa (langsung) mengatasinya. Kebijaksanaan yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan khusus dalam mendorong investasi prasarana ekonomi di luar Jawa, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rangsangan khusus bagi dunia usaha untuk menanamkan modal di wilayah-wilayah "terbelakang" ini. Di bidang politik sudah jelas perlu didorong pelaksanaan desentralisasi sehingga putusan-putusan ekonomi penting bisa lebih lancar dan lebih mengenai sasaran masyarakat daerah.

Digitized by Google

Sebagai sekedar ilustrasi Tabel 1 menunjukkan angka taksiran pendapatan berbagai daerah tahun 1987.

Tabel 1

Taksiran Pendapatan Per Kapita Penduduk Per Wilayah di Indonesia, 1987

Wilayah Wilayah	Pengeluaran Rp/kapita/tahun (sebagai taksiran pendapatan)
DKI Jakarta	Rp 552.000,00
Jawa termasuk DKI Jakarta	Rp 345.000,00
D I Y	Rp 333.000,00
Jawa tak termasuk DKI Jakarta	Rp 293.000,00
Sumatera	Rp 287.000,00
Bali	Rp 279.000,00
Kalimantan	Rp 253.000,00
Sulawesi	Rp 227.000,00
Nusa Tenggara	Rp 183.000,00
Maluku dan Irian Jaya	Rp 177.000,00
Indonesia	**Rp 255.000,00**

Sumber: Dihitung dari SUSENAS penerbitan BPS, 1987

Kebijaksanaan EKUIN dan Kesempatan Kerja

Dibandingkan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, kebijaksanaan untuk mengatasi meluasnya pengangguran khususnya bagi angkatan kerja muda adalah relatif paling berat. Pengangguran anak-anak lulusan SLA dan perguruan tinggi selama 1976-86 telah meningkat sangat pesat. Inilah kiranya salah satu faktor penambah keresahan di kalangan mahasiswa akhir-akhir ini. Meskipun aneka rupa isu muncul sebagai "bendera" para mahasiswa untuk berunjuk rasa, namun gejala semakin sulitnya mencari pekerjaan setelah mereka selesai kuliah, boleh jadi merupakan salah satu faktor penambah keresahan mereka.

Kebijaksanaan EKUIN khususnya DERE, DEBI dan perpajakan, masih lebih bersifat kebijaksanaan moneter untuk mengkompensasi penurunan penerimaan negara dari minyak, dan belum secara efektif dirasakan bagi perluasan sektor produksi. Bahkan perpajakan khususnya pengenaan PPN, tingkat bunga yang belum berhasil diturunkan dan akhirnya kenaikan tarif listrik, senantiasa menjadi "kambing hitam" tidak bergairahnya sektor produksi.

Kegairahan baru memang muncul dalam bidang perbankan sebagai hasil positif Pakto 27. Tetapi seperti telah disebutkan di atas, kebijaksanaan inipun tidak urung merangsang persaingan yang semakin dirasakan mengarah pada persaingan tidak sehat yang sangat merugikan usaha kecil dan menguntungkan usaha-usaha besar terutama yang tergabung dalam kolusi kelompok-kelompok ekonomi kuat.

Demikian unsur-unsur kekeluargaan dan kebersamaan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN kita dirasakan tidak semakin mudah pengembangannya. Inilah tantangan kita, pengembangan secara terus-menerus semangat kekeluargaan, dan pengikisan kecenderungan-kecenderungan kolusi dan monopoli swasta yang merugikan masyarakat dan rakyat banyak. Tanpa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang demikian, maka dikhawatirkan kelesuan sektor produksi tidak akan terobati dan pengangguran pun sulit diatasi.

Dualisme Sistem Ekonomi

Dualisme dalam sistem ekonomi di mana dikenal 2 sistem ekonomi yang mapan (yang satu modern yang lain tradisional), lebih sering kita anggap berdampak negatif. Namun analisis dengan perspektif sejarah menunjukkan bahwa "kelahiran" sistem ekonomi yang dualistik adalah merupakan "jalan keluar" atau "pemecahan" masalah. Sistem yang dualistik sebenarnya hanya menunjukkan ketidakmungkinan dipersatukannya kedua sistem besar tersebut. Dengan "terpisahnya" sektor tradisional dari rakyat Indonesia dan sektor perkebunan modern dari kapitalis Belanda, maka kehancuran sektor tradisional bisa dihambat sekedarnya. Dengan demikian sektor modern pun bisa berjalan menurut "aturan main" mereka sendiri.

Demikian bila pada saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945, diputuskan untuk "membiarkan" adanya dualisme ekonomi dengan memperkenalkan Peraturan peralihan Pasal II UUD 1945, maka putusan ini harus dianggap tepat dan wajar. Tanpa adanya aturan peralihan tersebut kiranya akan terjadi kekacauan. Melalui Peraturan Peralihan tersebut berbagai usaha sektor modern bisa berjalan seperti biasanya karena pemerintah Indonesia merdeka belum siap dengan undang-undang baru yang bersifat nasional.

Tidak bisa diungkiri bahwa pengembangan perundang-undangan dalam bidang ekonomi memang sangat lambat, lebih-lebih dalam masyarakat dualistik. Dalam pada itu pilihan kita pada sistem ekonomi pasar terbuka, yang tidak harus berarti sistem yang kapitalistik, akan tetap memberi peluang kepada terkaitnya perekonomian kita dengan ekonomi dunia yang kapitalistik. Oleh sebab itu penghapusan semua peraturan/undang-undang zaman kolonial tidak dengan sendirinya membuat kita lebih siap untuk memasuki tahap tinggal landas, kecuali jika secara keseluruhan ekonomi Indonesia sudah benar-benar mencapai tahap mandiri. Upaya menuju kemandirian inilah yang harus menjiwai setiap strategi dan kebijaksanaan ekonomi dalam Pelita V ini, sehingga dalam Pelita VI ekonomi nasional Indonesia yang tangguh dan mandiri benar-benar bisa terwujud, dan itulah ciri-ciri kesiapan kita memasuki tahap tinggal landas.

Pola Kebijaksanaan untuk Memperkecil Kesenjangan Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan

Sebenarnya pemerintah telah memiliki seperangkat undang-undang yang apabila dilaksanakan dengan konsekuen dapat mencegah/mengurangi kesenjangan ekonomis/sosial di daerah pedesaan. Undang-Undang Pokok Bagi Hasil dan Undang-Undang Pokok Agraria apabila di-

Digitized by Google

Deregulasi merangsang pendirian Bank

laksanakan dengan konsekuen dapat mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi di pedesaan. Namun seperti kita ketahui kedua undang-undang itu belum dilaksanakan secara konsekuen. Pelaksanaan kedua undang-undang ini dengan demikian merupakan keharusan pada masa yang akan datang.

Di samping pelaksanaan kedua undang-undang itu maka diperlukan pula beberapa kebijaksanaan yang dapat mendorong timbulnya kegairahan kehidupan ekonomi pedesaan. Pertama, pemerintah perlu memberikan perangsang bagi siapapun untuk memulai usaha-usaha ekonomi baru di daerah pedesaan. Usaha ekonomi baru ini diperlukan untuk mencapai tujuan memperkecil ketergantungan rakyat desa pada tanah, dan menghilangkan etos kerja serta sikap hidup ''serba miskin'' akibat dari ketergantungan mereka pada tanah. Perangsang itu dapat berupa semacam ''tax holiday'' kepada para pemilik modal yang ingin membuka usaha di daerah pedesaan. Kedua, untuk menggairahkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan kehidupan politik yang demokratis perlu ditumbuhkan di masyarakat pedesaan. Kelompok tani, baik kelompok tani yang anggotanya adalah pemilik tanah maupun kelompok tuna kisma, haruslah tidak hanya diperlakukan sebagai ''obyek'' pembangunan melainkan mereka harus bisa berperan pula sebagai ''subyek'' pembangunan dalam artian mereka haruslah diberi hak untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi pembangunan anggotanya sebagai suatu kelompok. Ketiga di samping demokratisasi kehidupan politik desa, maka kebijaksanaan lain yang perlu dilakukan adalah mendesentralisasikan proses perencanaan pembangunan pedesaan, dan mengukuhkan pendekatan pembangunan wilayah sebagai strategi pembangunan pedesaan. Keempat, menciptakan suatu sistem perpajakan baru bagi masyarakat pedesaan yang memungkinkan rakyat pedesaan dapat memupuk modal guna secara mandiri membangun masyarakatnya.

Strategi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua

Masalah Strategi Pembangunan Nasional sering dianggap peka (sensitive) untuk dibahas oleh ilmuwan/cendekiawan di Indonesia terutama apabila ia dibahas dalam konteks ''mempertanyakan'' strategi pembangunan yang sedang berjalan, yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Nampaknya peka tidaknya masalah strategi ini untuk dibahas, memang berhubungan dengan kurun waktu strategi pembangunan yang disoroti. Makin pendek kurun waktunya makin tinggi tingkat kepekaannya.

PNJP 25 tahun pertama sering disebutkan dengan nama strategi akselerasi yang arti harfiahnya adalah tancap gas. Pada awal Orde Baru semacam strategi moneter telah dijalankan selama 3 tahun (1966-69) yang kemudian dilanjutkan dengan Pelita I yang bercirikan sebagai strategi Revolusi Hijau. Mulai Pelita II kita telah mulai dengan program-program pemerataan, dan sejak Pelita IV pemerintah telah jelas-jelas melaksanakan program-program dan kebijaksanaan industrialisasi, meskipun pembangunan pertanian masih selalu tercantum sebagai prioritas utama pembangunan. Akhirnya para penentu kebijaksanaan kita di bidang ekonomi selalu menyebutkan sifat perekonomian kita yang terbuka (open economy) yang memang diakui mengandung risiko tetapi dianggap merupakan jalan terbaik untuk mengundang modal dan teknologi unggul dari luar negeri.

Strategi pembangunan yang sosialistis pernah pula dicoba terutama sejak 1959, namun karena menjurus ke etatisme kemudian dikoreksi secara total pada tahun 1966.

Kami melihat bahwa aneka ''strategi'' dan ''kebijaksanaan'' pembangunan yang telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka selama 44 tahun ini di bidang ekonomi banyak diwarnai oleh upaya-upaya realistik dan pragmatis untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi jangka pendek atau jangka menengah meskipun barangkali kurang berwawasan jangka panjang.

Kiranya memang sudah sangat tepat untuk mencirikan strategi pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun kedua sebagai strategi peningkatan kualitas manusia Indonesia, sehingga seluruh manusia (dan rakyat) Indonesia tiada kecualinya, bisa berperan serta sesuai harkat dan kemampuannya. Apabila kualitas manusia Indonesia sudah cukup tinggi, cerdas dan penuh percaya diri, maka dengan sendirinya ia akan mampu mengembangkan dan menggunakan teknologi yang paling cocok bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.□

Digitized by Google

Oleh: HM Irsyad Sudiro, Ketua Dep. Seni Budaya DPP GOLKAR

Film Indonesia dan Citra Seni Budaya Bangsa

HM Irsyad Sudiro

Film sebagai media komunikasi massa, pada dasarnya ia bebas nilai. Ia semata-mata adalah benda mati yang dengan tanpa syarat akan menerima, memuat dan menyampaikan segala isi pesan yang dikehendaki oleh manusia yang menguasainya. Suatu film baru mempunyai nilai setelah terlibat dalam siklus proses komunikasi secara tuntas. Mulai dari pengisian, baik gambar maupun suara, kemudian penggabungan-penggabungan dalam suatu rangkaian yang berkonsep, selanjutnya diputar untuk dilihat gambar dan didengarkan suaranya, maka terjadilah proses satu arah. Arah selanjutnya setelah gambar dan suara itu ditangkap dan dicerna, kemudian menimbulkan pengertian dan kesan. Siklus itu tuntas setelah pengertian dan kesan itu disampaikan kembali atau diekspresikan oleh manusia yang menyaksikannya. Di sini baru bisa dibicarakan soal nilai dari film tersebut.

Jika dikaitkan dengan film Indonesia, khususnya film cerita yang komersial, maka banyak hal yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai yang mempengaruhi pada citra Seni Budaya Bangsa.

Karya film adalah karya kolektif. Sederetan kelompok manusia yang terbagi dalam berbagai kekhususan profesi dan keahlian merupakan barisan panjang yang secara estafet akan menghasilkan suatu film, betapapun film itu pendek ataupun panjang, murah ataupun mahal dan buruk ataupun bagus.

Masalah inti yang terkait dengan nilai dan citra Seni Budaya salah satunya ialah cita rasa. Dalam cita rasa ini terhimpun sejumlah substansi dan essensi kultural yang dimiliki oleh sejumlah manusia yang terlibat dalam proses terjadinya dan disaksikannya suatu film. Secara kualitatif maupun kuantitatif cita rasa yang dimiliki oleh sejumlah insan pemroses dan penikmat film dapat bertemu dan berinteraksi yang menghasilkan apa yang namanya citra Seni Budaya. Jadi lahirnya citra tersebut tidak cukup dari proses yang satu arah, yakni para pembuat dan penyaji, tetapi juga dari pemirsa dan penikmatnya.

Atas dasar penalaran tersebut di atas maka seburuk atau sebaik apa pun Film Indonesia yang ada ini, dalam rumus lahirnya citra Seni Budaya Bangsa kita merupakan realitas yang menjadi milik bersama masyarakat bangsa. Oleh karena itu apabila ada fihak yang menghendaki adanya dinamika atau perubahan-perubahan baik kualitas maupun kuantitas, hakikatnya adalah tuntutan yang alamatnya ditujukan kepada diri sendiri. Atau dengan kata lain setiap kita yang berkepentingan dengan kemajuan atau peningkatan Film Indonesia merupakan tugas bersama dalam posisi apapun kita dalam hal ini.

Sejalan dengan pikiran tersebut di atas apabila belakangan ini ada ributribut tentang Film Indonesia, khususnya yang menyangkut sadisme dan pornografi, akhirnya kesemuanya itu tidak bisa lepas dari realitas, situasi dan kondisi dari para insan yang terkait dengan proses pembuatan, penyajian, pengawasan dan penikmatan dari film-film tersebut. Dalam hal ini ada hal yang laksana "lingkaran setan", sehingga tidak mudah untuk mencari sumber penyebab dari gejala atau kecenderungan meningkatnya bentuk-bentuk film yang sadistis dan pornografis. Mau disalahkan produser? Mereka berdalih film jenis itu yang laku dan menguntungkan. Atau dengan kata lain film-film itu digemari. Sebagai fihak yang tidak mau rugi, jelas mereka memilih thema yang menguntungkan. Mau disalahkan artisnya? Mereka berdalih cari makan. Tentu yang perlu baginya order dari produser. Mau disalahkan sutradara? Sebagai seniman, sekaligus karyawan ia berkewajiban menafsirkan keinginan produser. Idealnya memang ada kemandirian bagi sutradara, namun

Citra film Indonesia masih serba salah

Digitized by Google

sebagai manusia biasa mereka itu tidak bisa kenyang dengan idealisme saja. Mau disalahkan penonton? Tidak mungkin, sebab mereka menonton produk yang dihasilkan secara sah dan diputar di bioskop yang juga memiliki izin resmi. Pemerintahkah yang salah? Para pejabatnya pasti menyebutkan aturan-aturan yang berlaku yang tentu sudah bagus sekali. Nah, siapa yang salah?

"Lingkaran setan" itu tidak akan lenyap dengan hanya saling menuding, mencari kesalahan dan kambing hitam. Terjadinya citra Film Indonesia yang masih serba salah itu bersumber dari realitas, situasi dan kondisi dari masyarakat bangsa ini sendiri. Sebab dari segala sebabnya adalah dari masih belum meratanya tingkat budaya kita secara keseluruhan, baik yang terkait dengan intelektualitas, penguasaan teknologi, perkembangan ekonomi, kemantapan sikap mental dan spiritual yang mengacu kepada nilai-nilai luhur Bangsa.

Sekarang bagaimana jalan keluar yang kira-kira disepakati untuk dilaksanakan oleh semua fihak? Ditekankan di sini adalah keterlibatan dari sebanyak mungkin fihak yang terkait dalam proses pemanfaatan media film sebagai media komunikasi yang memuat antara lain nilai-nilai Seni Budaya. Sebab memang nilai Seni Budaya bukan satu-satunya nilai yang berkepentingan dalam film. Ada nilai-nilai lain seperti politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, keagamaan dan sebagainya.

Dari sisi Seni Budaya diperlukan film-film yang mampu menyajikan isi pesan yang bisa mendorong peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan dengan segala kompleksitas permasalahannya yang sedemikian rupa sehingga mencapai posisi yang unggul di atas makhluk Tuhan yang lain. Dengan film itu manusia hendaknya tidak berbalik merosot sama atau bahkan lebih rendah dari hewan dengan segala naluri hewaniahnya. Juga tidak laksana setan dengan segala kejahatan dan kezalimannya. Sebab secara potensial manusia bisa lebih kejam dari semua makhluk yang ada. Bisa lebih hebat dalam melakukan kebiadaban dan kekejaman dari segala makhluk. Dan itu akan muncul bila dirangsang, bila dilatih, bila diberi kesempatan, bila dibiarkan. Dan film sangat mungkin untuk merangsang, mengajar, mendorong, membiasakan, memberi peluang untuk itu semua. Maka maukah kita, relakah kita, bahagiakah kita jika film-film kita itu menjadi alat untuk merusak martabat kemanusiaan bangsa kita. Betapa pun dalihnya untuk cari untung, untuk cari makan, untuk pelampiasan rasa estetika dan seterusnya, namun bila merusak cita rasa yang luhur sebagaimana terangkum dalam Pancasila, mutlak harus dicegah.

Mungkin pernyataan demikian akan mendapat banyak tantangan. Mungkin ada fihak-fihak yang tidak sependapat. Mungkin ada yang menilai sok alim, puritan, kolot, ortodoks dan sebagainya. Boleh saja ada orang yang demikian, namun kita ingin bertanya, kalau sampai Bangsa Indonesia ini kehilangan martabatnya sebagai bangsa yang terhormat karena perilakunya laksana hewan atau setan, siapa yang mau bertanggung jawab? Produser? Sutradara? Artis? Pengusaha bioskop? Badan Sensor? Penonton? Silahkan menjawab dalam posisi masing-masing. Namun dari sisi dan posisi Seni Budaya GOLKAR martabat Bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila adalah mutlak harus diperjuangkan, dibina dan ditingkatkan.□

DIRGAHAYU HUT KEMERDEKAAN RI KE 44
SEMOGA KITA DIBERI KEKUATAN MENERUSKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN SEMANGAT BERKARYA, KAMI SIAP MENJADI MITRA USAHA ANDA UNTUK MENYEDIAKAN PRODUKSI YANG BERMUTU DAN HANDAL UNTUK SETIAP KEBUTUHAN :
- SEMUA JENIS BENANG TENUN COTTON, TETORON RAYON
- SEMUA BENANG TENUN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
- SEMUA BAHAN BATIK, TEKSTIL UNTUK SANDANG DAN INDUSTRI

DAN SELALU MENGUTAMAKAN :
- MUTU PRODUKSI, MUTU PELAYANAN, DAN MUTU PURNA JUAL

ANDA DAPAT BERHUBUNGAN DENGAN KAMI :

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

P.T. INDUSTRI SANDANG II
(PERSERO)

KANTOR PUSAT :
JL. A. YANI 124 SURABAYA - 60235 TELP. : 816116, 816626, 816634
TELEX : 33176, 33259 ISDSBY IA FAX : 031. 816418

KANTOR PERWAKILAN :
JL. TANJUNG SELOR NO. 8 TELP. : 344712
TELEX : 45173 ISDUA IA FAX : 021. 341750 JAKARTA PUSAT

Digitized by Google

Oleh : Maria Sugiharto

KUAN SAMA DENGAN THE KING CAN DO NO WRONG

"Hai, anak-anak punggawa, si Mendut memang cantik ya...."
"Setuju..." sahut para punggawa secara saur manuk (menyahut a la burung secara bersama-sama).
"Aku kan masih gagah ya, meskipun sudah lanjut usia?...."
"Setujuu...."
"Dan pantas sekali memperisteri si Mendut ya...."
"Setujuuu...."

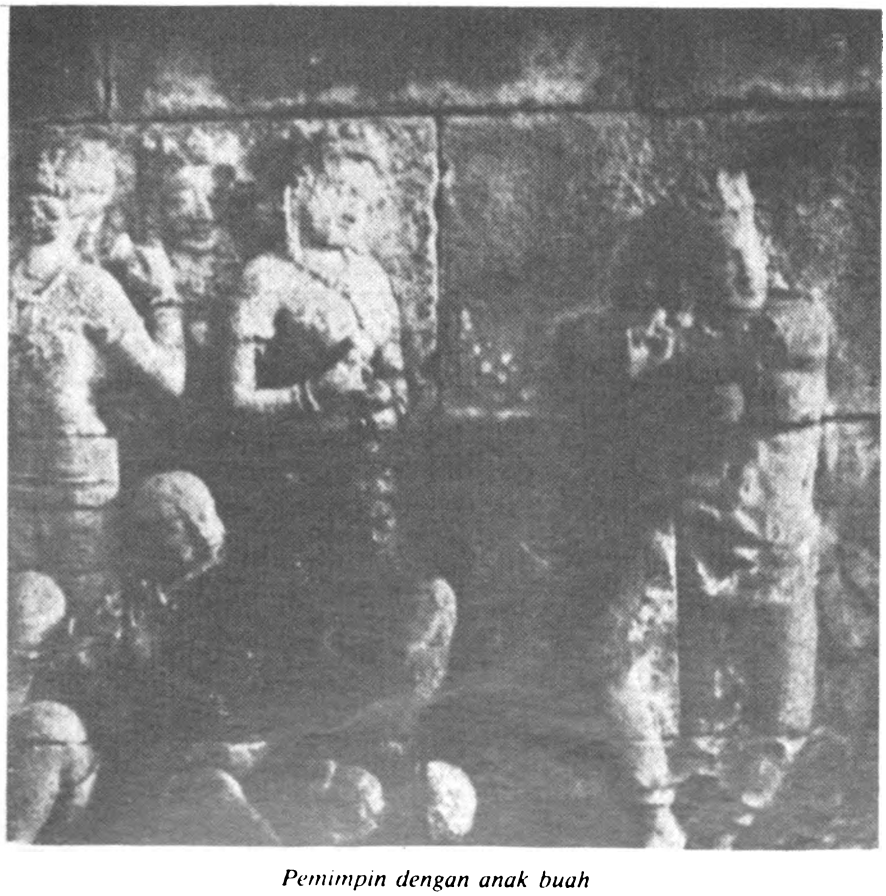

Pemimpin dengan anak buah

Ini adalah cuplikan dialog antara Tumenggung Wiroguno, Panglima Kerajaan Mataram, yang sangat tergila-gila dengan Roro Mendut, gadis tawanan dari pantai Utara. Dialog ini terjadi di dalam film Roro Mendut garapan sutradara Ami Priono, berdasarkan novel yang ditulis oleh budhayawan terkenal, J.B. Mangunwidjojo.

Seorang raja, atau pemimpin, bila disegani, akan selalu diturut tutur katanya oleh anak buahnya. Dengan kata lain, seorang Penguasa, akan selalu diturut oleh anak buahnya, benar atau salah tetapi bila yang menghendaki atau yang mengucapkan sang Pemimpin maka benarlah adanya. Bila seandainya hal itu salah, akan dicarikan cara dan jalan sehingga kesalahan itu akan terhapus dengan halal. Anak buah tidak dapat menyalahkan atau mengkritik sang Penguasa, karena akan berat sangsinya, dan maka dari itu bagi anak buah berlaku nyanyian klasik bernada tunggal: *Setuju*.

The King Can Do No Wrong

The King Can Do No Wrong adalah ungkapan yang diciptakan oleh seorang Raja dari Inggris, *Richard The Lion Heart* — Richard Sihati Singa — yang memperlihatkan absolutisme kekuasaan seorang penguasa. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa seorang penguasa tidak dapat dipersalahkan, tidak tergoyahkan seperti misalnya ungkapan Raja Louis (Lodewijk) XIV dari Perâncis yang terkenal itu dengan menamakan dirinya "*L 'Etat c'est moi*" atau Negara adalah saya. Louis XIV yang memerintah sebelum Revolusi Perancis meletus, sebenarnya sudah mengawali sebuah

Digitized by Google

revolusi sosial di Perancis itu. Merajalela, dia menyatakan dirinya sebagai *Le Roi Soleil* atau Raja Matahari. Menurut orang-orang Perancis kini, yang pemerintahannya menganut sosialisme (republik sosialis), seandainya sang Raja berpakaian gelandanganpun, dia adalah benar, tidak bersalah, dan harus dipuji. The King Can Do No Wrong.

Barabas, adalah seorang Yahudi yang dijatuhi hukuman mati karena dicap sebagai Penjahat oleh kekuasaan kolonial Romawi. Dia, yang hidup pada jaman Nabi Isa masih hidup di dunia, tertuduh sebagai seorang penghasut rakyat, pengacau negeri dan lain-lainnya kejahatan termasuk merampok. Sebenarnya, bila dikaji dengan sistim pemerintahan jaman sekarang, dia adalah pejuang nasional bangsanya yang tertindas. Dia terkenal, karena menjadi *penukar* Nabi Isa. Seperti diketahui, Nabi Isa dihukum oleh penguasa karena tuduhan menghasut rakyat. Dan, karena Nabi Isa menggantikan kedudukannya, Barabas pun bebas.

Yang menarik untuk diungkapkan disini ialah *serangan* Barabas terhadap Majelis yang mengadilinya.

''Tuan-Tuan, saya bersalah karena saya melanggar hukum yang diberlakukan di negeri ini. Tiada orang yang membela diri saya, karena bagi makhluk yang hina dina seperti saya, hukuman mati yang mengancam. Lain dengan kedudukan tuan-tuan. Bila kalian berbuat kesalahan, tuan-tuan dapat membebaskan diri dengan peraturan-peraturan yang tuan-tuan sendiri buat. Tuan-tuan dapat menciptakan pasal-pasal di dalam undang-undang untuk membebaskan diri tuan-tuan dari kesalahan-kesalahan yang bila itu terjadi pada seorang rakyat seperti saya, hukuman matilah ancamannya. Tuan-Tuan dapat membuat *hukum* untuk membebaskan diri.''

Memang, hakekat hukum yang dibuat oleh penguasa adalah untuk merealisir kata-kata The King can do no wrong.

Rule number one...

Ada peraturan setengah universil yang mengatakan begini: Rule number one is: The Boss can do no wrong. Rule number two: If the Boss is wrong, see rule number one.

Terjemahannya: Peraturan pertama: Boss tidak dapat berbuat salah. Peraturan kedua: Bila Boss berbuat salah, maka lihatlah peraturan nomor satu. Tentu saja peraturan ini hanya akan berputar-putar disekitar satu dan dua, yang pada hakekatnya tidak akan menyalahkan boss. Semua ini hanya merupakan manifestasi dari ungkapan bahwa boss atau seorang pemimpin atau yang berkuasa tidak bisa berbuat salah atau tidak bisa dipersalahkan.

Sabdo Pendito Ratu

Di dalam kehidupan dinasti raja-raja Jawa, ada kata-kata yang *mengikat* bagi perbuatannya, yaitu yang dinamakan *Sabdo Pendito Ratu.* Maksud dari kata-kata tersebut adalah: Apa yang telah dikatakan oleh Raja, tidak dapat dicabut kembali. Apa yang telah ditetapkan oleh Raja, harus dijalankan, karena itu adalah sabda raja, dan sabda raja adalah The King can do no wrong.

Seorang penguasa Jawa dari jaman sebelum Republik, berjuluk Raja, pada suatu hari merasa bahwa setiap kali memandang permaisurinya, seperti memandang monyet yang sedang mencari kutu. (Di dalam bahasa Jawa sikap demikian disebut *munyuk didis*). Lama kelamaan, sang raja tidak tahan atas pemandangan ini, yang terasa membuat frustrasi. Diputuskan oleh Baginda untuk meng-*kebon*-kan sang permaisuri. Maksudnya mengeluarkan sang Ratu dari tembok kraton, dan bermukim di luar kraton. Beberapa

Bangunan candi sebagai bukti adanya kekuasaan Raja terhadap rakyatnya

Digitized by Google

Institusi penguasa yang telah digariskan tetap bernilai benar

waktu kemudian setelah sang Ratu bermukim diluar, pemandangan seperti munyuk didis menjadi kabur. Beliau tampak cantik kembali seperti semula. Apa lacur, betapa menyesalnya sang Raja, *Sabdo Pendito Ratu* telah terucapkan, dan sebagai seorang raja penguasa, tidak boleh mencabut kembali. Meskipun hasilnya negatif bagi yang berkepentingan tetapi itu semua adalah hasil dari prinsip the king can do no wrong.

Konon, menurut ceritanya (ini adalah kejadian nyata) permaisuri memang dikerjain dengan guna-guna oleh salah seorang selir raja yang mempunyai ambisi agar putranya menjadi raja kelak. Untuk itu selir menginginkan diangkat menjadi garwa padmi atau permaisuri. Meskipun hasilnya tidak mengenakkan bagi Raja, tetapi sebagai institusi penguasa, apa yang telah digariskan tetap bernilai the King can do no wrong.

Perkataan Raja tidak dapat dicabut kembali

Kuan

Kuan adalah kata berbahasa Cina yang berarti Tuhan, atau yang berkuasa. Secara kaligrafis, tulisan Cina berkarakter sesuai dengan maksud dan tujuannya. Bagi masyarakat Cina, Kuan memang segala-galanya, karena dia adalah yang berkuasa. Secara karakteristik, tulisan *Kuan* memiliki dua buah mulut. Itulah sebabnya Kuan sangat berkuasa karena memiliki dua buah mulut. Siapa akan menang dengan seorang yang memiliki dua mulut, karena bila mulut yang satu mengatakan A, satu lagi mulutnya bisa mengucapkan B. Itulah pendirian dan lukisan cara Cina, yang sangat tepat ditrapkan bagi peribahasa the King can do no wrong.

Boss, atau penguasa, apakah itu berbentuk direktur, general manager, pimpinan perusahaan atau apapun, semuanya identik, ialah penguasa. Dan, penguasa tidak luput dari *''hak''*nya menyandang the king can do no wrong.

Ini adalah cerita seorang sekretaris eksekutif, yang sangat cekatan dan terampil, sehingga sang boss sangat tergantung kepada sekretaris ini. Bahkan, sang nyonya boss juga ikut-ikutan tergantung kepada sang sekretaris. Kemanapun boss pergi, sekretaris harus mendampingi.

Suatu Kali, boss harus berdinas keluar kota, dan tentu saja sekretaris harus mendampingi karena boss akan mengunjungi konperensi internasional, pertemuan yang sangat bergengsi bagi perusahaan yang dipimpinnya. Demi suatu penghematan dan mentrapkan sistem ekonomi yang baik serta mengefisiensikan waktu, si Boss minta agar sekretaris tinggal bersama di hotel yang sama, bahkan di suite room sang boss. Dengan merendah sekretaris yang cantik ini menolak, dan dia akan menginap di hotel yang lebih murah, demi penghematan dan efisiensi. Sang boss, dengan nada mengancam, mengatakan kepada sekretaris, mau menginap bersama dalam satu suite room, atau... kehilangan pekerjaan. Suatu pilihan yang sulit bagi sang sekretaris, karena gaji yang besar, kedudukan yang bergengsi, tidak gampang diraih di dalam waktu yang singkat. Sekamar dengan boss, job terjamin, atau kehilangan segala-galanya. Sekretaris memilih kehilangan segala-galanya sementara, karena bagaimanapun juga, the boss can do no wrong. The boss, atau the King memiliki rule number one dan rule number two. Itulah Kuan.□

Digitized by Google

HARIAN
Pelita
MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

Menabung mudah, dan hasilnya...wah!

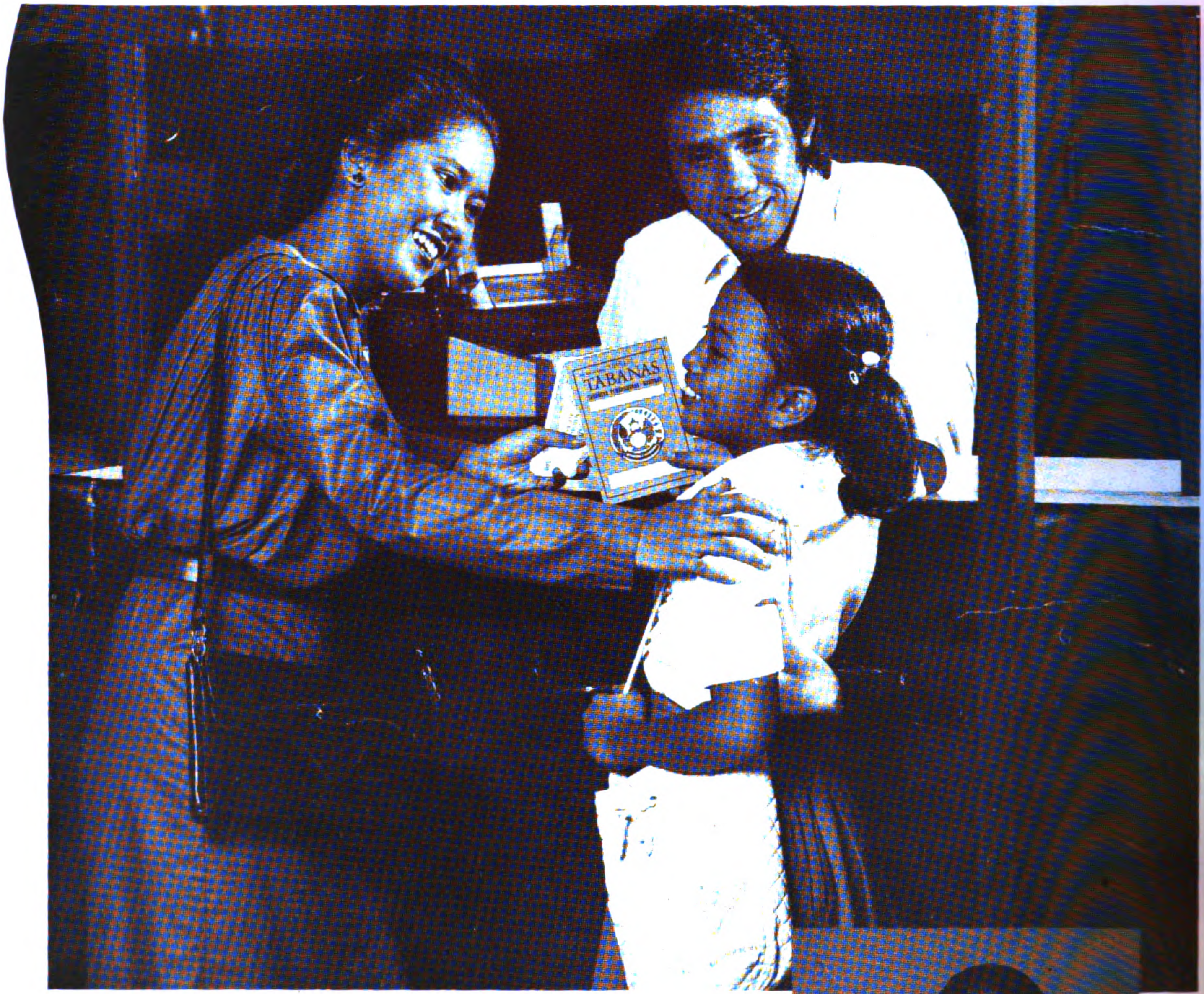

Menabung melalui Tabanas sekarang ini sungguh mudah, bahkan menyenangkan. Anda tinggal luangkan waktu sebentar, menyerahkan uang, dicatat seperlunya, selesai.

Tidak ada segala tetek bengek yang menyulitkan sebagaimana mungkin anda sangka. Sementara itu manfaatnya untuk rencana masa depan sungguh besar.

Ikutilah jutaan kawan kita yang lain menabung untuk masa depan melalui Tabanas. Mudah dan wah!

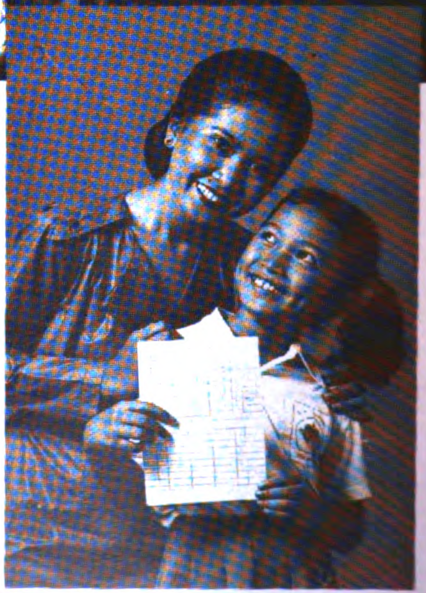

MENABUNG & MEMBANGUN

TABANAS
Cara menabung paling mudah!

Digitized by Google

No. 64 Agustus 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
M48

Dialog Dengan Pemuda

Pancasila, Ideologi Yang Terbuka

SSN 0216 - 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Hari-hari penuh kepastian...

baca saja

Redaksi/Tata Usaha: Jl. Bangka Raya no. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 791352 (3 Sal), 797020
Teleks 47459 Eska JKT.
Iklan: Jl. Gajah Mada No. 90A Tingkat III Telp. 621691 - 646146 Jakarta Barat.
Perwakilan Jawa Barat Jl. Warta no. 13 Telp 56213 Bandung.
Perwakilan Jawa Tengah & D.I.Y. Jl. Lamper Sari 12A Telp. 313113, Semarang.
Perwakilan Sumatera Utara Jl. Timor 14C Telp. 515089 Medan
Perwakilan Jawa Timur & Bali Jl. Ketintang Komplex Agar-agar Kav. 52 Telp. 814329, Surabaya
Sub. Perwakilan Bali Jl. Imam Bonjol 99 Telp. 3317 Denpasar

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab :
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/ Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir. Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs. Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny. T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi :
Anang Adenansi
Dr. Alfian
H. Kafrawi MA
Drs. Slamet Efendi Yusuf
Drs. Irsyad Sudiro
Drs. Thomas Suyatno
Ny. Maria Sugiharto
Drs. Wijanarko Puspoyo MA
Drs. Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs. T.A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H.M. Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana :
Drs. Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD. PAND. DV. Noerjathy

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh PT. Enka Parahiyangan

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI
Kemerdekaan Harga Sebuah Perjuangan

FOKUS
Akhir-akhir ini masalah keterbukaan sering menjadi buah bibir. Namun, apa kata Menpan Sarwono Kusumaatmadja, Menko Polkam Sudomo tentang masalah tersebut. Ikuti Pancasila, Ideologi Yang Terbuka; Demokrasi Pancasila Mampu Mengembangkan Kapasitasnya.

LAPORAN UTAMA
Dunia Perbankan Setelah Pakto 27; Jor-joran di Bisnis Perbankan; Memacu Kreativitas Bank-bank Lewat Pakto 27; Bisnis Perbankan dan Investasi Swasta.

LAPORAN KHUSUS
Dialog Dengan Pemuda; Melalui Dialog Berbagai Pandangan Dapat Dipertemukan.

ORGANISASI
Dari Rakernas Penyegaran Kader; Menuju Kualitas Kader Yang Diharapkan; Sikap GOLKAR Tentang Sistem Pemilu; Rakernas KNPI Ke-II di Timor Timur; GOLKAR Pembela dan Pengamal Koperasi; Perjalanan Dua Hari di Jambi; Diharapkan, Sentuhan Wanita Bisa Tingkatkan Saling Pengertian; Aszadalliyah Menimba Ilmu di GOLKAR; Kerjasama DPP GOLKAR Dengan Prasetia Mulya; DEKOPIN Melapor ke DPP GOLKAR.

NASIONAL
Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus lalu menyinggung berbagai permasalahan. Diantaranya sistem Pemilu. Menyinggung masalah tersebut, Presiden mengatakan, kalau ada kekuatan sosial politik yang memandang ada sistem Pemilihan Umum yang lebih baik dari yang kita sepakati sekarang, maka tidak ada halangan untuk memperjuangkan pandangannya itu. Yang penting adalah tercapainya konsensus nasional, yang nanti kita kukuhkan dengan Undang Undang. Untuk selengkapnya baca Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto; Komentar Atas Pidato Presiden.

INTERNASIONAL
Menuju Penyelesaian Tuntas Kamboja

SENI & BUDAYA
Sensor Film oleh Maria Sugiharto.

Digitized by Google

Kemerdekaan Harga Sebuah Perjuangan

Awal abad ke-XX rasa kebangsaan di Indonesia mulai punya bentuk. Dia muncul sebagai suatu phenomena sosial budaya dalam artikulasi politik. Masalahnya, ketika itu orang Indonesia yang disebut sebagai kaum pribumi, tidak diperkenankan berpolitik apalagi membentuk organisasi politik.

Yang dibolehkan hanyalah gerakan/kegiatan seni budaya dan pendidikan. Karena itu, sebelum bernama BOEDI OETOMO, nama yang dipakai adalah TRI KORO DHARMO. Yang disebut terakhir adalah organisasi yang menitikberatkan kegiatannya pada kebudayaan dan pendidikan.

Dua puluh tahun kemudian setelah gerakan kebangsaannya Boedi Oetomo (1908), yaitu pada tahun 1928 semangat kebangsaan itu menemukan bentuk melalui Ikrar SUMPAH PEMUDA. Sejak itu perjuangan kebangsaan menuntut kemerdekaan nasional bagi bangsa Indonesia mulai berkembang menjadi perjuangan kemerdekaan nasional.

Gema Sumpah Pemuda menggaung sampai kepelosok tanah air. Sumpah Pemuda menjadi "stepping stone" bagi perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia. Sebagai akibat dari gema Sumpah Pemuda itu, awal dasawarsa 1930-an bermunculan berbagai organisasi/partai politik. Pendidikan Nasional Indonesia berubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) pada pertengahan tahun 1930-an.

Mulai saat itu, kegiatan politik menjadi begitu populer dikalangan kaum intelektual bangsa Indonesia. Pergerakan politik digalakkan dimana-mana. Para mahasiswa Indonesia baik didalam negeri maupun diluar negeri melancarkan aksi-aksi politik melawan penguasa bangsa asing. Di Indonesia berdiri berbagai studi klub di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Jakarta dan Bandung.

Sementara diluar negeri berdiri Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Di negeri Belanda, Jerman, Belgia dan beberapa negara Eropa lainnya. Melalui organisasi-organisasi inilah perjuangan kemerdekaan nasional digelorakan. Sampai awal dasawarsa 1940-an, pergerakan politik di Indonesia kian menghangat. Perang Dunia II merupakan titik kulminasi perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaan nasionalnya.

Tahun 1945 kemerdekaan nasional Indonesia bisa direbut dari tangan penjajah Jepang. Setelah puluhan bahkan ratusan ribu sosok tubuh membujur tak bernyawa dihati bumi dan ratusan ribu liter darah manusia membasahi bumi Indonesia tercinta ini. Sungguh mahal harga yang harus dibayar bangsa Indonesia untuk kemerdekaan itu.

Empatpuluh empat tahun sudah usia bangsa ini sebagai sebuah negara kebangsaan. Perjalanan sejarah negara kebangsaan Indonesia punya catatan panjang. Catatan tentang pergolakan dan pertikaian diantara sesama kita; pertikaian antara kaum "republikein" dan kaum separatis, antara kepentingan premordial dengan kepentingan nasional bangsa dan berbagai pertikaian lainnya. Cukup banyak untuk disebut satu persatu.

Harga sebuah perjuangan yang teramat mahal; kemerdekaan, adalah harga sebuah perjuangan. Dan memang itu yang diharapkan dari perjuangan sejak awal abad ke-XX ini.

Persoalan sekarang adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Cukup lama juga kita membiarkan diri hanyut dalam pertikaian-pertikaian politik. Tidak kurang dari duapuluh tahun negeri ini terendam dalam konflik politik. Konflik antara kepentingan premordial yang berkepanjangan, memaksa negeri ini untuk menyelesaikan konflik dan nyaris terlupa kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu pembangunan ekonomi.

Baru duapuluh dua tahun belakangan ini kita memberi perhatian bagi pembangunan nasional secara utuh dan bersungguh-sungguh. Sejak tahun 1967, kita memutuskan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional Berencana secara bertahap yaitu setiap lima tahun. Sekarang kita memasuki bagian terakhir dari Pembangunan Nasional jangka panjang — 25 tahun — pertama.

Hasilnya sudah nampak, banyak yang sudah dicapai selama pemerintahan Orde Baru ini. Dan kita berkewajiban untuk memelihara serta meningkatkan capaian pembangunan ini demi kepentingan mereka yang datang kemudian dari kita. Karena pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak hanya untuk hari ini, tetapi agar mereka yang datang kemudian dari kita, tak lagi menderita seperti yang kita alami. Itulah makna paling penting dari pada Kemerdekaan.□

Digitized by Google

Pancasila, Ideologi Yang Terbuka

MUNCULNYA berbagai bahasan-bahasan mengenai konsep masa depan kehidupan politik bangsa Indonesia ibarat jamur di musim hujan. Bermula dari pernyataan seorang bekas Dubes negara adikuasa yang akan meninggalkan posnya di Jakarta beberapa waktu lalu — menyangkut keterbukaan — bergema sampai ke lembaga legislatif.

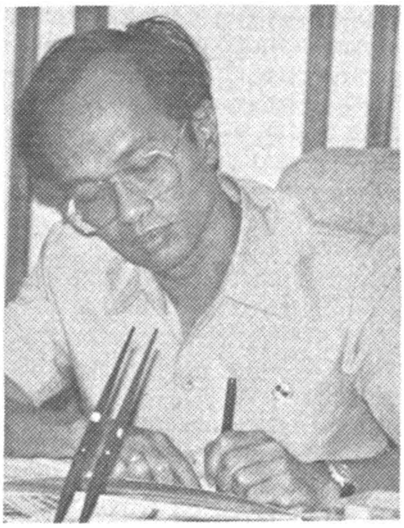

Sarwono Kusumaatmadja

Dorongan untuk menumbuhkan kehidupan politik penuh keterbukaan nampaknya menjadi santapan kalangan pengamat politik, praktisi sampai kepada yang namanya generasi mudanya. Apa yang mereka inginkan sebagai gagasan keterbukaan mendapat tanggapan pihak eksekutif. Paling tidak Mendagri, Mensesneg bahkan Menko Polkam, menegaskan bahwa masalah keterbukaan bukanlah suatu hal yang selama ini dikesankan tidak ada sama sekali.

Belakangan muncul ide dan gagasan alternatif lewat berbagai seminar. Misalnya pemikiran untuk merombak sistem pemilihan umum sampai kepada gagasan mengenai peninjauan kembali terhadap Undang Undang Dasar 1945, sebagai konsekuensi dari adanya keterbukaan. Namun, pagi-pagi Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno mengingatkan untuk jangan ada pemikiran semacam itu.

Pertanyaan kemudian apakah betul pada masa Orde Baru ini belum diletakkan suatu landasan bagi masa depan kehidupan politik bangsa Indonesia. Apakah betul ideologi Pancasila tidak memberikan kesempatan bagi masuknya ide atau pemikiran baru.

Berikut ini politisi Golkar yang kini duduk di lembaga eksekutif sebagai Menpan, **Ir Sarwono Kusumaatmadja**, mengemukakan pandangannya tentang hal itu dalam suatu percakapan khusus dengan *Media Karya* di ruang kerjanya.

Bagi Sarwono Kusumaatmadja, munculnya berbagai gagasan atau pemikiran alternatif, merupakan hal yang wajar. Ibarat air yang mengalir tidak perlu harus dibendung atau dimatikan. Tinggal nanti bagaimana masyarakat menerima gagasan itu. Kalau ternyata masyarakat resisten terhadap gagasan tersebut, itupun suatu hal yang wajar. Tidak bisa dicegah. Justru disitu nanti gagasan-gagasan itu akan diuji atau dites, lulus tidak nantinya. Kalau lulus, tentunya akan mempunyai masa depan. Dan ini pun tidak perlu menunggu infra struktur yang ada kuat dulu.

Ideologi Terbuka

Kalau orang mempertanyakan apakah ideologi Pancasila bisa menerima adanya ide-ide atau pemikiran-pemikiran baru, Sarwono dengan tegas mengatakan bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka dan memberikan ruang gerak bagi berkembangnya ide-ide baru. "Keterbukaan itu adalah bagian dari Pancasila," tegasnya.

Lalu, apa yang masih harus diragukan lagi dengan ideologi bangsa ini? Tinggal bagaimana seharusnya kita melihat keterbukaan. Apakah kita bicara keterbukaan itu hanya untuk keterbukaan itu sendiri. Disini Sarwono mengingatkan hendaknya setiap membicarakan gagasan-gagasan selalu harus dalam ruang lingkup Pancasila. Sebab, Pancasila sendiri sudah merupakan konsensus nasional, komitmen yang sudah disepakati para pendiri negara ini saat akan memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Oleh karenanya, setiap gagasan yang berkembang hendaknya merupakan operasionalisasi daripada Pancasila itu sendiri. Artinya gagasan itu sendiri juga harus sesuai dengan wawasan Nusantara, harus menunjang ketahanan nasional, harus berfungsi memelihara ketertiban umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Jadi, harus memenuhi syarat-syarat yang secara penjiwaan ada dalam rujukan UUD 1945," ujar Sarwono sambil mengingatkan agar kita tidak menganut demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi untuk mencapai tujuan nasional.

Sebagai contoh, kata Sarwono, munculnya keinginan untuk mendiri-

Bisa ditampung lewat Ketetapan MPR

Digitized by Google

kan partai agama. Apakah ini perlu untuk didiskusikan, sebab sudah jelas partai agama itu tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya lagi ada keinginan menjadikan negara Republik ini menjadi negara federal. Perlu tidak hal ini didiskusikan atau diperdebatkan. Jawabannya, tidak perlu. Kenapa? Karena dari awalnya kita sudah komit bahwa negara yang berdasarkan UUD 1945, adalah negara kesatuan. Lalu apa yang bisa didiskusikan?

Sarwono menyebut bagaimana kalau yang didiskusikan masalah memperkuat infrastruktur. "Ini lahan diskusi yang sangat luas, karena lemahnya infrastruktur di Indonesia itu berkaitan dengan lemahnya organisasi kemasyarakatan. Mengapa organisasi kemasyarakatan lemah? Karena kemampuan organisasinya lemah.

"Nah, bagaimana cara mengatasinya, ini yang bisa didiskusikan bersama secara terbuka dan panjang lebar," ujarnya lagi.

Lalu, bagaimana kalau muncul juga ide mengganti ideologi bangsa ini. Secara teoritis bisa saja kalau seluruh rakyat Indonesia menghendaki. Tapi tidak mungkin, karena kita sudah lewat fase itu. Dan sekarang ini adalah fase mengisi yang ada. Bagaimana caranya mengisi dari yang sudah ada saja, sudah banyak ide yang bisa dikembangkan dari situ.

Kalau masih ada pertanyaan apakah Orde Baru telah meletakkan landasan bagi masa depan kehidupan politik bangsa, Sarwono justru balik bertanya. Apakah dengan adanya paket Undang-undang di bidang politik tidak merupakan peletak landasan bagi kehidupan politik di masa depan?

Sistem Distrik?

Bahasan lain masih cukup menarik ditanggapi. Seperti munculnya gagasan pemilihan umum sistem distrik, menggantikan sistem proporsional yang selama empat kali pemilu telah berjalan dengan baik. Bagi Sarwono sendiri, orang boleh mengatakan sistem distrik dijamin lebih demokratis, karena pemilih bisa langsung mengenal wakil yang dipilih. Tapi apakah sistem distrik itu otomatis lebih baik daripada sistem proporsional?

Sebab, kata Sarwono, justru di negara yang dari awalnya melaksanakan demokrasi, bahkan lebih dini dari Indonesia, masih juga menghendaki sistem proporsional dalam pemilu. Sebab, dengan sistem proporsional tidak hanya partai yang besar yang menikmati. Partai kecil justru akan memperoleh keuntungan dengan sistem tersebut. Karena proporsionalitas perolehan suara diperhitungkan, sehingga bagi partai kecil yang kalah dalam pengumpulan suara tetap memperoleh bagian kursi di lembaga legislatif nantinya." Artinya apa, justru dengan sistem proporsional partai-partai kecil menikmati keuntungan sistem tersebut," ujar Sarwono.

Sistem proporsional tidak hanya partai besar yang menikmati

Sebaliknya dengan sistem distrik meniadakan kemungkinan partai kecil memperoleh keuntungan mempunyai wakil di parlemen. Sebab hanya partai yang besar dan memperoleh suara terbanyak yang bisa menikmati sistem distrik itu.

"Kalau saya menjadi ketua partai yang sekarang belum mempunyai jumlah suara yang besar, saya nggak mau sistem distrik. Sebaliknya bagi Golkar, kalau sistem distrik itu dilaksanakan maka akan memperoleh keuntungan," ujarnya lagi.

Namun Sarwono tidak menutup bagi perlunya pengkajian secara kritis atas asumsi-asumsi dasar tentang sistem distrik itu. Sebab dia melihat banyak sekali pertimbangan argumentasi yang dilewatkan begitu saja. Seolah-olah sistem distrik secara apriori lebih demokratis dan lebih unggul daripada sistem proporsional. Kalau sistemnya mono partai, ya begitu. Sekali pemilu menang yang lainnya tidak kebagian. "Apa maunya begitu? Kita tidak mau mono partai itu terjadi. Kita ingin seperti sekarang, ada satu Golkar, dua partai dan ada ABRI-nya. Nantinya kalau sistem distrik dipakai akan berhadapan dengan keadaan dimana ada anggota parlemen yang dipilih tanpa harus mengikuti pemilu, yaitu ABRI. Lalu bagaimana dengan konsep dwi fungsi ABRI yang ada, apakah konsep itu harus dirombak total karena sistem pemilihannya juga diubah," kata Sarwono.

Oleh karenanya, kata Sarwono, janganlah kita terburu-buru menginginkan sistem distrik dalam pemilu. Sebab pada sistem itu pun terdapat kelemahannya, yaitu bisa juga tidak demokratis. Mengapa? Karena biasanya partai yang menang yang berkuasa. Dan karena berkuasa, maka partai itu yang menentukan distrik pemilihannya itu, diatur supaya distrik pemilihannya itu acak sedemikian rupa sehingga menguntungkan partai yang dominan. "Nah, jadinya ya tidak demokratis juga," tegasnya.

Menangkap Isyu

Bagi sejumlah isyu atau gagasan, bisa saja dipertimbangkan sebagai bahan diskusi dengan memanfaatkan iklim keterbukaan. Karena pada hakekatnya diterima atau tidaknya isyu yang berkembang dalam masyarakat sangat tergantung apa manfaat atau kaitannya dengan kehidupan masyarakat sendiri. Dan ini tidak semuanya bisa kita bendung.

Sebagai contoh gerakan penyelamat lingkungan hidup yang lima belas tahun belum terdengar disini. Gerakan ini ternyata mempunyai pengaruh yang kuat, karena memang merupakan kebutuhan bagi manusia untuk memperhatikan lingkungan hidup. "Kita harus ikuti isyu itu, dan kita kendalikan dengan baik," ujarnya.

Contoh lain disebut Sarwono, misalnya isyu kemiskinan, kesehatan masyarakat, yang kesemuanya itu sudah menjadi masalah dunia. "Ini mana bisa kita bendung. Semua orang ikut

Digitized by Google

dalam arus ini,'' tambahnya.

Dalam kaitan ini, Sarwono membenarkan bahwa pada saatnya infrastruktur yang ada ini akan mengambil isyu-isyu yang sedang berkembang. Sebab isyu-isyu itu akan menjadi kenyataan politik yang berpengaruh di dunia ini. Demikian juga kemiskinan, sebagai isyu politik universal, akan berpengaruh sedemikian rupa sehingga nantinya negara-negara kaya tidak bisa mengabaikan isyu tersebut. Mereka tidak bisa kaya sendiri. Akhirnya orang sangat berkepentingan agar kemakmuran itu merata di belahan dunia ini.

''Jadi, perhatian terhadap pemberantasan kemiskinan juga satu hal yang tidak bisa dibendung. Tapi, dengan sendirinya terhadap ide-ide atau isyu yang aneh-aneh, kurang matang dan tidak dilandasi pemikiran yang baik, dibolak-balik bagaimanapun ya nggak akan berpengaruh,'' ujarnya lagi.

Banyak contoh, misalnya gugatan mahasiswa mengenai Sistem Kredit Semester (SKS). Karena SKS itu merupakan sistem yang diperlukan dalam jaman yang serba cepat, kendati ada protes yang gencar, tetap saja sistem itu berjalan. Dan akhirnya pun berhenti dengan sendirinya.

Singkat dan Supel

Kembali ke masalah pembangunan politik, dimana muncul ide atau gagasan bagi perlunya UUD 1945 itu direvisi atau diubah. Sarwono secara tegas mengatakan bahwa ide-ide semacam itu akan mati dengan sendirinya. Mengapa, kata Sarwono, karena UUD 1945 itu sudah sangat singkat dan supel. Artinya kita bisa saja memasukkan ide-ide baru tanpa harus mengubah materi UUD itu sendiri.

''Saya yakin semua ide itu akan bisa ditampung tanpa mengubah UUD. Memang, kalau dilihat bahasa UUD itu tidak sempurna rumusannya. Tapi persoalannya bukan itu. Masalahnya kita sebagai bangsa harus punya komitmen yang teguh kepada UUD 1945. Kenapa? Alasan historis saja,'' ujar Sarwono.

Dijelaskan bahwa sekali kita melakukan perubahan terhadap UUD kebiasaan ini akan berlanjut. Setiap kali ada masalah, selalu yang dijadikan persoalan UUD-nya, sementara masalah dasarnya tidak pernah tersentuh. Lain halnya kalau UUD 1945 itu *njlimet* atau terlalu ketat, pasal-pasalnya ratusan, boleh saja orang bicara mengenai hal itu.

Kita ingin satu GOLKAR, dua Parpol dan ada ABRInya.

''Tapi, ini kan tidak. Jadi, urgensinya apa kita membahas gagasan mengubah UUD, apakah hanya untuk memuaskan selera gramatikanya saja, atau membetulkan letaknya, bunyi dan kalimatnya. Masak kalau hanya itu kita harus mengubah suatu dokumen yang sifatnya dasar,'' tegasnya.

Menurut dia, ada alasan historis yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena belajar dari pengalaman negara-negara lain, kebiasaan mengubah UUD atau konstitusi sangat berbahaya, bisa nantinya menjadi alat politik yang menyesatkan. Kalau kebiasaan memotong-motong dibiarkan bisa keterusan. Kalau begitu bisa menjadikan kita berantakan.

Apakah perlu disempurnakan? Tidak perlu dan tidak harus. Kalau penyempurnaan itu dikaitkan dengan perkembangan jaman yang ada, bisa ditampung lewat keputusan atau ketetapan MPR, lewat penyusunan GBHN. Bagi Sarwono sendiri, UUD 1945 mempunyai nilai yang tinggi sebagai simbol bangsa dan negara. Seperti juga kerajaan Inggris atau Belanda, mereka sangat menjaga simbol masing-masing dengan kokoh. Bagaimana mungkin di jaman yang sudah moderen ini masih ada kerajaan. Begitu pula di Thailand dan Jepang. Mereka sangat menjaga simbol kerajaan atau raja serta ratu tanpa harus mempersoalkannya. Bahkan di Inggris sendiri, tidak ada satu pun orang yang mengutik-utik status ratu atau kerajaannya. Begitu pula dengan Belanda.

Lalu, kalau kita sudah mencoba mengubah UUD atau Konstitusi, lama-lama karena alasan kurang cakep minta lambang negara burung Garuda diubah, begitu pula bendera merah putih. Apa jadinya kalau sudah begini, tanya Sarwono.

Memang diakui, kalau dipanggilkan ahli bahasa, maka kelihatan bahwa kalimat dalam UUD itu tidak sempurna, kadang kalimat satu pasal dengan pasal yang lain tidak nyambung, bahkan dalam aturan peralihan sendiri sangat mengganggu. ''Tapi buat apa itu semua dipersoalkan, nggak ada urgensinya untuk didiskusikan,'' tegasnya.

Suasana Batin

Sebagai bangsa kita seharusnya bisa memelihara simbol itu secara utuh. Karena UUD merupakan simbol dari perjuangan menegakkan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan. Jadi ada nilai historis yang sangat berharga untuk dipertahankan. Seperti halnya tandu Pak Dirman (Panglima Besar Soedirman-red), karena alasan kurang cakep lalu akan diubah atau diperbaiki. Maka, jadinya hilang nilai historisnya.

Nah, kalau sekarang ada keinginan orang mengubah UUD 1945, yang sebenarnya sudah singkat dan supel dan mampu mengakomodir segala perkembangan yang terjadi, maka akan kehilangan suasana batin yang ada dalam UUD 1945 itu. ''Harus disadari bahwa UUD 1945 itu merupakan simbol bangsa yang mempunyai nilai historis. Negara tidak hanya berdiri atas dasar rasionalitas, tapi atas dasar suasana batin, atas dasar kesejarahan. Dan sejarah ini harus kita jalin ke depan sebagai suatu untaian yang kontinyu antara kemarin, hari ini dan masa depan. Kalau nggak nanti kita jadi rusak,'' tegasnya mengakhiri percakapannya dengan *Media Karya*.☐ (BM/NS)

Digitized by Google

Demokrasi Pancasila Mampu Mengembangkan Kapasitasnya

Struktur politik merupakan penggerak kehidupan politik

Perhatian utama menjelang tinggal landas yaitu bagaimana membangun sistem politik yang kokoh, sistem politik demokrasi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitasnya secara terus menerus, sehingga memungkinkannya tetap relevan dengan perkembangan aspirasi rakyat dan tuntutan kemajuan jaman yang menghendaki pembaharuan secara berkesinambungan.

Dengan demikian sistem politik tersebut bukan saja harus mampu bertahan, tetapi juga tanggap terhadap persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan baru dalam derap pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Sudomo, mengatakan hal itu, ''membahas pembangunan politik lima tahun mendatang, tentu tidak akan terlepas dari masalah supra sistem dari pembangunan politik itu sendiri,'' jelasnya.

Supra sistem itu yaitu sistem pembangunan nasional, serta berbagai sistem lainnya yang berada di dalamnya. Diberikan contoh, sistem ekonomi, sistem sosial budaya dan sistem pertahanan keamanan. Seluruh sistem tersebut, meski punya titik berat sendiri-sendiri, selalu terjalin dalam interaksi dan interdependensi antara satu dengan lainnya. Dan secara integral mewujudkan tercapainya tujuan dari supra sistemnya, yaitu tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN.

Secara padat, jelas Menko Polkam Sudomo, hal ini dapat kita kenal dengan Trilogi Pembangunan.

Sebagian dari amanat GBHN bidang Politik pada hakekatnya merupakan kesinambungan tekad kita untuk membangun masyarakat Pancasila. Untuk itu, kita telah mengadakan berbagai penataran kehidupan politik, dan keamanan, antara lain di bidang politik berkaitan dengan struktur dan kultur politik, aspek struktural dari pembangunan politik yang dinamis, sebagai pelaksanaan demokrasi Pancasila yang berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945; sedang aspek pembangunan kultural politik adalah berkenaan dengan proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh tata kehidupan politik nasional.

Menurut Sudomo, di bidang keamanan kita harus terus meningkatkan peranan ABRI yang efektif dan efisien. ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai kekuatan sosial politik.

Kaitan Erat

Kehidupan politik sangat erat kaitannya dengan struktur politik dan proses politik. Struktur politik merupakan penggerak kehidupan politik, sehingga suatu sistem politik yang sehat banyak tergantung pada struktur politik yang mendukungnya.

Kehidupan politik bergerak dalam suasana pemerintahan dan suasana masyarakat, sehingga struktur politik dibedakan dalam dua strata yaitu institusi struktur politik dalam suasana pemerintahan yang disebut suprastruktur politik dan suasana kehidupan masyarakat yang disebut infrastruktur politik.

Menko Polkam Sudomo menunjukkan tiga hal penting sebagai tolok ukur mantapnya suprastruktur politik, yang kemudian berdampak mantapnya stabilitas nasional.

Pertama, Sidang Umum MPR 1988, sebagai hasil Pemilu 1987 yang berjalan mulus. Sebagaimana diketahui pada Pemilu 1982 masih terdapat keributan di lapangan Banteng. Sehingga ketika Sidang Umum MPR 1983 Menko Polkam yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Pangkopkamtib, masih harus menjaga di luar gedung MPR sampai selesainya acara pengambilan sumpah jabatan Presiden.

Yang penting, ujarnya, bahwa pembentukan MPR, DPR hasil Pemilu, SU MPR, penyusunan GBHN, pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pengisian lembaga-lembaga tinggi negara, yang disebut dengan mekanisme kepemimpinan nasional atau yang dalam ilmu politik disebut sebagai suprastruktur politik sudah kuat.

Dengan suprastruktur politik yang kuat itu, maka suksesi dan regenerasi di Indonesia tidak bakal menimbulkan masalah lain. Suksesi dan regenerasi merupakan hal yang mutlak perlu.

Hal itu sekaligus sudah merupakan proses yang ditanamkan sejak Orde Baru. Usaha ini yang tidak terlepas dari proses sejarah dan pertumbuhan politik,'' kita memerlukan 35 tahun

Digitized by Google

untuk menegakkan "political maturity" (pematangan politik)," katanya. Di mana, 15 tahun pertama, khususnya antara 1950 sampai 1959 penuh dengan berbagai hambatan dalam bentuk gangguan keamanan dan berkembangnya demokrasi liberal, kemudian dengan penuh kesungguhan diadakan penataan secara berencana dan berkesinambungan, melalui pembangunan nasional dan tahap-tahap Pelita.

Menko Polkam bertutur lebih lanjut, kehidupan politik dan kenegaraan sekarang ini sudah jauh berkembang menuju kemantapan yang diperlukan, agar suksesi dan regenerasi itu berjalan sebagaimana mestinya.

Berbagai peristiwa politik berjalan lancar, tertib dan aman. Antara lain telah disyahkannya lima Undang-Undang bidang Politik, terselenggaranya sidang umum MPR 1988, merupakan bukti bahwa kehidupan sosial politik dewasa ini telah matang dan mantap.

"Seluruhnya mempunyai nilai penting dalam memantapkan lebih lanjut kehidupan politik dan kenegaraan di masa datang, yang memungkinkan suksesi dan regenerasi berjalan lancar," jelasnya optimis.

Kedua, penghapusan Kopkamtib merupakan salah satu tolok ukur adanya stabilitas politik dan keamanan yang mantap. Hal itu, sekaligus keberanian pemerintah di bidang keamanan. Jika terjadi suatu gangguan, cukup ditangani dengan secara koordinatif.

Ketiga, regenerasi ABRI dapat berjalan dengan mulus. Hal itu ditandai dengan diserahterimakannya jabatan Pangkopkamtib dari Sudomo kepada Jenderal Benny Moerdani, dan kemudian diserahkannya jabatan Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani yang lahir 1932 kepada Jenderal Try Sutrisno yang lahir pada 1935.

Di samping itu, juga regenerasi di kalangan pembantu Presiden di mana dalam Kabinet Pembangunan V sekarang ini telah tampil beberapa Menteri yang berusia muda dari kalangan eksponen '66.

Hal itu, jelas Menko Polkam, membuktikan lagi bahwa regenerasi dan suksesi memang disadari mutlak perlu dalam kehidupan sosial politik, dan sudah merupakan suatu proses yang sedang berjalan.

Semuanya ini merupakan bukti bahwa Indonesia berbeda dengan negara lain di Asia terutama yang menghadapi persoalan regenerasi dan suksesi. Pengalaman negara lain menjadi hik-

Sudomo

mah bagi Indonesia, bahwa kemajuan ekonomi yang sedemikian pesatnya, belum dapat dijadikan jaminan andaikata tidak disertai oleh demokratisasi dan terselenggaranya proses kehidupan sosial politik yang stabil dan dinamis, yang hakekatnya sebagai indikator mantapnya suprastruktur politik suatu negara.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila yaitu suatu sistem penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan secara utuh. Oleh sebab itu, ruang lingkupnya meliputi semua bidang kehidupan; ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut Sudomo, demokrasi dideskripsikan sebagai suatu sistem tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, sistem politik demokrasi Pancasila ialah suatu tatanan kehidupan negara dan masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Demokrasi Pancasila berpangkaltolak dari faham kekeluargaan, gotongroyong dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang juga berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan silasila lainnya.

Ditegaskannya, untuk membangun suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional diperlukan berbagai prasyarat pokok.

Demokrasi Pancasila berpangkal dari faham kekeluargaan.

Digitized by Google

— Perangkat dan mekanisme kehidupan demokrasi itu sendiri; — Kualitas dari pengemban dan pengembang demokrasi Pancasila. Di samping itu diperlukan suatu disiplin nasional; — Diperlukan pula tradisi, kebiasaan-kebiasaan politik, dan konsensus nasional, baik tingkat suprastruktur maupun infrastruktur politik yang selalu mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Konsensus nasional merupakan hasil dari suatu proses, yang pada dasarnya konsensus diambil sebelum keputusan formal, bersifat memperlancar dan karenanya tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dengan demikian, akan mengembangkan kehidupan kenegaraan yang didasarkan pada kesepakatan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Untuk itu, Menko Polkam menghimbau, sebaiknya organisasi sosial politik telah mempersiapkan diri guna menghasilkan konsensus nasional tersebut. Hal itu penting, untuk menghindarkan kekhilafan masa lampau dan lebih lanjut juga sebagai tolok ukur "kematangan politik" organisasi sosial politik.

Dia memberikan contoh, melalui konsensus nasional maka proses pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1993 tidak akan jadi masalah, dan dijamin akan berjalan lancar dan aman tanpa adanya gejolak politik, seperti di berbagai negara di belahan bumi ini.

Konsensus nasional dalam kaitan ini, bukan menyangkut siapa yang akan dicalonkan, tetapi menyangkut prosesnya. Kalau nanti tiap fraksi dari MPR masing-masing mengajukan calonnya, persoalan pokok adalah bagaimana nanti MPR memutuskannya.

Sementara infrastruktur politik mencakup kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh politik, kelompok kepentingan atau golongan fungsional, media komunikasi masa dan bentuk struktural lainnya baik yang melembaga maupun yang kurang melembaga, sepanjang berpengaruh pada kehidupan sosial politik.

Infrastruktur politik dalam pembangunan ppolitik sekarang ini, masih perlu pembenahan dan pengembangan. Walaupun dasar-dasar formal telah diletakkan melalui berbagai Undang-Undang bidang Politik. Tapi ternyata fusi dan integrasi yang dilakukan sebagai komponen infrastruktur politik belum dilakukan tuntas.

Untuk itu, infrastruktur politik perlu dikembangkan agar dapat lebih mendukung sistem demokrasi Pancasila, antara lain melalui regenerasi yang konsepsional, penyiapan kader yang juga konsepsional, pendidikan politik dan komunikasi politik.

Pendorong Utama

Fraksi ABRI merupakan pendorong utama diangkatnya topik "keterbukaan politik". Karena sampai sekarang masalah itu masih merupakan tuntutan utama, kata anggota Komisi II F-ABRI Roekmini Koesoemo Astoeti Soedjono.

Roekmini dan Kelompok Komisi F-ABRI mengangkat masalah keterbukaan politik ketingkat yang lebih tinggi. Dan topik itu dipilih, ada kaitannya dengan demokrasi, kata ibu empat anak itu.

Sedangkan Menko Polkam Sudomo cenderung untuk menetapkan terlebih dahulu definisi keterbukaan itu. Setelah ada definisi baru terdapat kesatuan bahasa mengenai keterbukaan.

"Hal itu penting, sehingga tidak ada saling tuduh-menuduh karena penilaian keterbukaan itu saling berbeda," ujar Menko Polkam. Dan menurutnya keterbukaan yang dapat dilaksanakan di Indonesia, harus sesuai dengan demokrasi Pancasila dan UUD'45.

Dengan demikian, bukan keterbukaan seperti di negara-negara liberal. Dalam demokrasi Pancasila ada dua hal yang penting diperhatikan yaitu kekeluargaan gotongroyong dan musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan kekeluargaan itu, menurut Sudomo, keberadaan partai dianggap sebagai keluarga besar. Orang yang tak setuju dengan pendapat pemerintah boleh saja, karena ia kita anggap sebagai warga keluarga besar itu.

Sebab itu, warga keluarga besar jika ingin menyampaikan kritik harus secara sopan walaupun boleh keras. Kritik itu hendaknya tidak menyangkut masalah pribadi, karena akan mengganggu hak asasi seseorang.

Menko Polkam Sudomo juga berpesan, kritik itu hendaknya juga obyektif, tidak hanya mengemukakan dari segi yang tidak baik tetapi juga harus melihat kebaikannya selama ini.

Sementara pakar Ilmu Politik, Dr. Alfian, mengatakan telur keterbukaan sudah lama menetas di masyarakat pedesaan, hanya upaya menstransformasikan hal itu dalam skala nasional mengalami kegagalan. Misalnya dengan demokrasi liberal, yang kemudian terjerumus dalam anarki. Lalu dibuat percobaan dengan demokrasi terpimpin, yang terjadi malah pengekangan yang ketat.

Waktu Orde Baru mengambil alih kekuasaan, para ekonom di beri kepercayaan untuk membangun dengan asumsi pembangunan ekonomi akan memotivasi pembangunan politik. Ketika itu belum ada ahli yang bicara soal pendekatan struktural. Yang ada, kata Alfian, yaitu pendekatan kultural.

Dengan adanya keterbukaan, maka berarti masyarakat dapat membicarakan berbagai permasalahan bersama. "Keterbukaan itu sudah ada. Hanya perkembangannya belum begitu luas," ujarnya lagi menambahkan.

Jadi selama ini ada atau tidak keterbukaan politik itu? Munculnya dua pendapat yang berbeda mengenai hal ini, agak disebabkan oleh penggunaan tolok ukur yang berbeda mengenai hakikat dan batasan keterbukaan.

Atau mungkin karena batasan yang lama sekarang ini dianggap tidak pas lagi, seiring dengan kemajuan ekonomi. Standar hidup yang membaik, diakui memang menimbulkan tuntutan-tuntutan baru, kebutuhan untuk mengemukakan pendapat, misalnya.

Setiap orang punya visi sendiri-sendiri tentang konsep keterbukaan. Yang jelas, semua pihak tampaknya sepakat bahwa keterbukaan itu ada batasnya, dan tidak boleh mengganggu stabilitas nasional.

Menurut Dr. Alfian yang juga Kepala Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, meskipun saat ini harus diakui bahwa kekuatan suprastruktur politik terkesan lebih kuat daripada infrastrukturnya, namun secara bertahap pembagian kekuatan ini akan semakin berimbang.

Tapi untuk sampai ketahapan itu, harus selalu diupayakan menciptakan suasana yang konduksif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan kehidupan politik bangsa Indonesia.

Salah satunya yang terpenting, katanya, yaitu memelihara dan terus meningkatkan suasana keterbukaan yang mulai sama-sama disadari urgensinya.

Sedangkan kuatnya suprastruktur, dibutuhkan di masa-masa awal dalam rangka menata kehidupan politik. Namun, jelas Alfian, secara bertahap perimbangan ini akan semakin membaik. Yang perlu diingat, kita jangan terlalu menuntut hasil seketika. Sebab

Digitized by Google

Dr. Alfian

pembangunan politik adalah proses yang bertahap dan makan waktu panjang.

Cara yang terbaik untuk mencapai keseimbangan yang selaras ini yaitu dengan mengembangkan konsep stabilitas yang dinamis. Stabilitas, memang menjadi kebutuhan tetap kita.

Tapi pada saat bersamaan, juga dilengkapi dengan dinamika yang menggambarkan perkembangan dalam bidang politik, katanya.

Di masa awal, untuk membangun kerangka politik yang kokoh, porsi stabilitas memang lebih dominan dibanding dimensi dinamikanya. Karena itu pula, rekayasa politik lebih banyak datang dari atas (suprastruktur).

Tapi, sekarang ini, setelah sekian lama membangun kerangka landasan itu, terlihat banyak perubahan yang bermakna, di mana rekayasa yang dulu sangat dominan datang dari atas, kini semakin diimbangi masukan dari bawah (infrastruktur).

Dr. Alfian lebih lanjut mengatakan, yang justru menjadi masalah sekarang ini adalah dalam kehidupan politik. Kini di rasakan kehidupan infrastruktur (Parpol dan Golkar) masih belum juga mandiri.

Padahal kemandirian itu merupakan kebutuhan mutlak untuk meningkatkan masukan dari bawah, dan bisa menampung berbagai aspirasi yang bergolak dalam masyarakat.

Kemandirian inilah yang perlu dibenahi, agar fungsi kekuatan yang ada pada infrastruktur menjadi efektif, ujarnya.

Alfian memberikan saran cara meningkatkan kemandirian yaitu antara lain perangkat infrastruktur, yakni orpol-orpol yang ada perlu menyehatkan diri, menghindarkan bermacam percekcokan.

Selain itu, orpol dituntut untuk mengembangkan sistem dan mekanisme demokrasi dalam dirinya, agar dalam proses pemilihan pengurus dan pengambilan keputusan, tidak perlu ada droping, katrol, nepotisme.

Cara lainnya, orpol harus semakin antisipasif terhadap perkembangan bangsa pada masa datang. "Itu dapat dinilai masyarakat dalam program-program yang mereka tawarkan," katanya lagi.

Dalam GBHN Pola Umum Pelita Kelima dinyatakan bahwa pembangunan politik merupakan usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berazaskan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila.

Sehubungan dengan itu pula dan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik, perlu lebih didorong dan dikembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik bangsa. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka memantapkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila, perlu makin diperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. Demikian pula perlu dimantapkan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional dan berfungsinya serta saling hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara berdasarkan UUD 1945. ☐ (hers)

Pembangunan Politik dan Stabilitas

Kehidupan bernegara sesungguhnya adalah bagaimana mengatur dan menata kehidupan politik. Karena negara adalah wujud daripada perjuangan politik. Negara itu sendiri perlu pengakuan politik untuk bisa diterima sebagai warga masyarakat bangsa-bangsa.

Untuk bisa diakui sebagai negara, maka harus dipenuhi syarat-syarat: mempunyai kesatuan politik, kesatuan wilayah dan kesatuan budaya. Tiga hal pokok yang diperlukan untuk bisa diakui sebagai negara.

Di dalam penyelenggaraan negara, politik menempati urutan paling dominan. Pengaturan tata ekonomi nasional harus memperhatikan kepentingan nasional bangsa. Itulah yang disebut sebagai politik ekonomi. Sama halnya dengan mengatur pertahanan dan keamanan, juga harus memperhatikan kepentingan nasional bangsa, dan itulah politik pertahanan keamanan.

Sesungguhnya politik, ekonomi dan pertahanan keamanan — untuk tidak menyebut militer — adalah satu kesatuan yang mutlak dimiliki suatu negara. Karena itu, terkadang muncul adagium, "kekuatan militer adalah penyelesaian akhir dari politik". Maksudnya apabila upaya melalui jalur politik tidak berhasil maka kekuatan militer akan menentukannya.

Beberapa pengamat mengatakan dalam percakapannya dengan Media Karya bahwa Kemerdekaan yang berhasil direbut bangsa Indonesia itu sepenuhnya adalah hasil perjuangan politik yang diselesaikan dengan kekuatan militer. Sejak awal abad XX, perjuangan politik untuk mendirikan sebuah negara bangsa telah dimulai. Semua melalui jalur perjuangan politik.

"Selama duapuluh tahun pertama kemerdekaan Indonesia, kita terus bergumul dengan masalah-masalah politik dan militer. Kita habiskan dana dan daya untuk kepentingan-kepentingan politik dan militer. Sehingga keadaan pereknomian menjadi morat marit," kata H.Anang Adenansi menanggapi masalah pembangunan politik di Indonesia.

Menurutnya, pada waktu itu bukan pembangunan politik yang dilakukan tetapi "match forming" — pembentukan kekuatan politik — dalam rangka mencari pengaruh politik. Lebih populer dikatakan sebagai jorjoran politik. Yang menghasilkan adu kekuatan di antara partai politik yang ada. Akibatnya, terjadi polarisasi politik yang sangat tajam. Meletusnya peristiwa G.30.S. adalah salah satu manifestasi dari adanya "match forming" itu, kata Anang.

Dia melihat bahwa selama duapuluh tahun, terjadi beberapa kali perubahan sistem politik. Dari sistem liberal dengan multi partai, menjadi sistem ter-

Digitized by Google

pimpin dengan tetap mempertahankan sistem multi partai, walau ada pengurangan jumlah dari 28 partai pada tahun 1955 menjadi 10 partai pada tahun 1960. Dalam konstelasi politik yang demikian ini, sulit membangun suatu pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Karena selalu terjadi konflik politik yang mengakibatkan terjadi krisis kabinet.

Jadi selama duapuluh tahun pertama itu, tidak ada pembangunan politik dalam arti sesungguhnya. Yang ada ialah pembentukan kekuatan politik dalam upaya merebut kepemimpinan politik, kata Anang Adenansi.

Lain lagi Drs. Fredy Latumahina, Wakil Sekjen DPP GOLKAR. Dia melihat bahwa selama pemerintahan Orde Baru ini, pembangunan politik telah mencapai hasil yang besar. Dia mulai cerita tentang keberhasilan pembangunan politik itu dengan fusi partai politik pada tahun 1971.

"Baru dua tahun Indonesia mulai melaksanakan pembangunan berencana — Pelita I — (1969-1974) berhasil dilaksanakan pembaharuan politik dengan mengadakan fusi partai politik. Dari sembilan partai menjadi dua partai saja. Tahun 1978, Majelis Permusyawaratan Rakyat berhasil merumuskan satu lagi masalah politik yang besar, yaitu memantapkan idiologi Pancasila melalui Penataran tentang Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Menyusul Penetapan Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia. Juga lahir undang-undang tentang partai politik dan undang-undang keormasan. Ini semua merupakan hasil yang paling penting dalam rangka pembangunan politik di zaman Orde Baru", katanya.

Menurut Fredy, keberhasilan pembangunan politik ini harus dilihat dalam kaitannya dengan stabilitas nasional. Sebetulnya keberhasilan pembangunan politik ini dimungkinkan karena tingkat stabilitas politik memang cukup tinggi. Stabilitas itu sendiri hanya bisa tercapai apabila kadar kesadaran politik secara nasional juga tinggi. Dalam arti, melihat permasalahan secara lebih dewasa dengan menempatkan kepentingan nasional bangsa di atas kepentingan-kepentingan premordial.

"Nah, disini kita lalu bicara soal pluralisme dan nasionalisme. Atau dalam keseharian politik kita mengenalnya sebagai ke-bhineka-an dan ke-Ika-an. Ini filosophinya kehidupan bernegara bangsa dalam masyarakat Pancasila. Yaitu bagaimana kita melihat masalah bangsa ini secara lebih objektif. Artinya, kita mengakui pluralitas masyarakat bangsa ini, tetapi pluralitas itu tak boleh menghambat upaya pemantapan ke-Ika-an nasional. Inilah yang dikatakan nasionalisme itu", kata Fredy.

Jadi, nasionalisme itu sebenarnya adalah sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan premordial yang pluralistis, katanya lagi. Tidak pula berarti bahwa kita lalu mengabaikan pluralisme bangsa ini. Itu memang ada sebagai sebuah realitas sosial yang tak dapat ditiadakan begitu saja. Justru kita menyebut pluralisme itu sebagai salah satu asset nasional yang paling berharga. Dia adalah kekayaan budaya bangsa yang harus tetap dilestarikan, kata Wakil Sekjen DPP GOLKAR itu meyakinkan.

Menurutnya, selama Orde Baru ini pembangunan nasional berjalan seimbang. Antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi serta pembangunan sosial budaya. "Kenyataan yang tak dapat disangkal sekarang, adalah hasil-hasil yang dicapai di sektor pembangunan ekonomi juga dibarengi oleh capaian-capaian yang mengesankan di sektor pembangunan politik", kata Fredy.

Untuk mencapai semua itu, bangsa ini telah memberikan perhatian penuh terhadap proses pembangunan nasional yang berkesinambungan, dari Pelita I hingga Pelita IV sekarang ini. Yang jelas, kata Fredy, selama pemerintahan Orde Baru kita telah mencapai hasil-hasil yang cukup besar. Untuk memantapkan Pancasila sebagai asas kehidupan bernegara dan bermasyarakat, telah dilewati proses yang cukup panjang. Melalui jalan berkerikil dan berbatu tajam. Tetapi pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat bangsa ini, melihat bahwa Pancasila adalah pilihan paling tepat bagi mewujudkan suatu masyarakat yang adil berkesejahteraan dan sejahtera berkeadilan.

Dalam kaitan pembangunan politik ini, seorang tokoh lain bicara tentang sistem politik di Indonesia. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Mardiansyah berpendapat bahwa sistem politik yang ada sekarang sudah memadai. Yaitu dengan adanya tiga kekuatan sosial politik (Golkar, PPP dan PDI). Dia tidak melihat hal yang mendasar untuk merubah sistem politik sekarang.

Menurutnya, apa yang dihasilkan dalam pembangunan politik selama pemerintahan Orde Baru ini cukup baik. Yang perlu diperhatikan adalah masalah-masalah teknis yang sering menjadi gangguan dalam kehidupan politik. "Orang diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari organisasi politik yang ada, sebagai penyalur aspirasinya. Tidak perlu membentuk wadah lain lagi", kata Mardiansyah.

Menurutnya, Undang-undang No. 5 tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya telah mengatur segala hal menyangkut kehidupan politik itu. Barangkali yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana dari undang-undang tersebut.

Ketiga tokoh politik itu sependapat tentang pembangunan politik selama Orde Baru ini. Mereka melihat bahwa selama pemerintahan Orde Baru, pembangunan politik benar-benar terarah dan berhasil.

Fredy Latumahina dan Anang Adenansi sependapat bahwa selama orde baru ini telah dihasilkan karya-karya besar dibidang politik. "Kalau kita mau jujur, maka kita harus mengakui bahwa hanya Indonesialah yang mampu merumuskan secara jelas asas kehidupan bernegara dan bermasyarakat bagi warga negaranya. Semua orang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat", kata mereka.

Ini satu karya besar dalam pemerintahan orde baru. Dua puluh tahun pertama sejarah berdirinya bangsa ini, dihabiskan hanya untuk mencari identitas kepolitikan. Sehingga terkadang — bahkan sering terjadi — kepentingan nasional bangsa dinomor duakan. Sementara kepentingan premordial justru diberi prioritas tinggi. Lihatlah bagaimana Kabinet jatuh bangun selama periode Demokrasi Parlementer (1945-1959).

Ini semua adalah manifestasi dari pada gerakan "match forming" yang bertujuan merebut kepemimpinan politik semata-mata. Akibatnya cukup fatal, terjadi peristiwa keji G.30.S/PKI di penghujung tahun 1965 itu. Pengalaman cukup pahit, kendati bukan yang pertama (tahun 1948, PKI mencoba merebut kekuasaan negara melalui pemberontakan Madiun).

Tetapi peristiwa itu harus tidak terulang, dia adalah peristiwa yang *ein maliech*. (tb)

Digitized by Google

Dunia Perbankan Setelah Pakto 27

Paket 27 Oktober (Pakto 27) belum genap setahun. Namun dalam usia semuda itu telah mampu membuat kejutan, khususnya bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia perbankan di tanah air. Hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya kantor-kantor bank, bukan saja dialami oleh bank-bank umum, tapi juga bank-bank nasional, bank asing, bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank-bank campuran. Selain itu, kebijaksanaan pemerintah melalui Pakto 27 ini, dapat menimbulkan suasana persaingan ketat antar bank untuk menarik simpati para nasabah sekaligus ada upaya keras pihak bank untuk menarik tenaga profesional bank tertentu secara besar-besaran guna masuk ke bank yang lain.

Kantor-kantor bank semakin menjamur

Menurut data sementara, sejak diberlakukannya kebijaksanaan Pakto 27 pembukaan kantor bank baru sudah mencapai sekitar 400 buah. Bank-bank baru yang sudah mendapat ijin prinsip sebagian sudah beroperasi. Misalnya Bank Umum (Komersial) sekitar 20 bank, BPR yang meningkatkan dirinya menjadi Bank Umum mencapai 8 buah, bank-bank asing yang berpatungan dengan bank swasta nasional ada 8 buah, dan BPR yang mendapat ijin prinsip dan beberapa sudah beroperasi mencapai sekitar 140 buah.

Ketidakseimbangan

Pertumbuhan kantor-kantor bank yang pesat ini, baik kantor bank yang baru maupun lama termasuk bank yang melebarkan sayapnya dengan membuka kantor baru, menurut Sekjen Perbanas, *Thomas Suyatno,* telah mengakibatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga profesional atau semi profesional dengan pertumbuhan kantor-kantor bank, khususnya guna memenuhi permintaan-permintaan dari kantor-kantor bank. yang memperluas usahanya maupun bank-bank baru.

Tiadanya kesimbangan ini pada akhirnya telah menimbulkan apa yang disebut pembajakan tenaga profesional dari satu bank oleh bank lainnya. "Akibat situasi yang demikian itu menjadikan persaingan antar bank menjadi tidak sehat lagi," ujarnya kepada *Media Karya* sambil menambahkan bahwa situasi saling caplok antar bank menjadikan bank-bank itu semakin meninggalkan etika bisnis atau etika usaha.

Dalam situasi seperti itu, Perhimpunan Bank-bank swasta nasional (Perbanas) menghimbau dan mengharapkan agar masing-masing bank bisa menahan diri dan tidak saling caplok tenaga kerja yang ada. Kalau situasi itu tetap terjadi, maka akan menimbulkan situasi yang disharmoni di dalam masyarakat perbankan khususnya dalam keluarga besar bank-bank swasta nasional.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, Perbanas dalam surat himbauannya nomor 548/1/89 kepada direksi bank-bank nasional swasta di seluruh Indonesia mengingatkan situasi penarikan tenaga kerja antar bank swasta nasional yang sedemikian rupa itu punya dampak negatif bagi hubungan antar bank. Disamping itu caplok-mencaplok tenaga kerja akan menimbulkan masalah moral bagi karyawan lama di bank bersangkutan, karena pada umumnya perolehan gaji maupun fasilitas lainnya bagi karyawan yang baru ditarik lebih tinggi dibandingkan karyawan lama.

Sifat hubungan antara karyawan baru dengan bank tersebut adalah jangka pendek, sulit diharapkan mereka dapat berprestasi pada lingkungan yang tidak mendukung. Dan pada gilirannya akan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara bagi karyawan yang suka pindah karena menginginkan gaji yang lebih besar hampir dapat dipastikan akan sulit diharapkan dedikasinya kepada bank yang baru.

Ekonomi Pedesaan

Efek apa yang akan timbul setelah kantor-kantor bank semakin menjamur ditinjau dari segi pembangunan dan ekonomis, Thomas Suyatno mengemukakan bahwa ditinjau secara makro, khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan penyebaran kegiatan ekonomi, pertumbuhan kantor-kantor bank ini mempunyai efek yang baik. Karena, kata Thomas Suyatno lagi, dengan tumbuhnya kantor-kantor bank yang baru itu, timbul persaingan dalam kecepatan bank memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tumbuhnya bank perkreditan rakyat di pedesaan akan memacu kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Potensi ekonomi di pedesaan yang tadinya tidur dengan hadirnya BPR-BPR, akan tergugah dan digiatkan oleh masyarakat.

Namun diingatkan oleh Thomas Suyatno, menggerakkan potensi ekonomi di pedesaan jangan lalu menyebabkan larinya dana masyara-

Digitized by Google

kat ke perkotaan, sehingga terkesan dana-dana yang ada di masyarakat pedesaan terkuras habis masuk kota. Sebaliknya, kehadiran BPR itu harus mampu mengalirkan dana-dana dari kota masuk dan mengarah kepada kegiatan ekonomi di pedesaan, sehingga ekonomi rakyat daerah pedesaan dapat lebih berkembang.

Menyadari kenyataan tersebut, semua pihak harus berusaha untuk mengalirkan dana-dana dari perkotaan ke pedesaan guna menggali dan memfungsikan potensi ekonomi rakyat yang ada. Sementara dalam upaya pengontrolan agar mekanisme seperti itu berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan, semua bank berada dalam pembinaan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Dengan melihat *flow of money* dan neraca yang ada pada bank-bank itu, Bank Indonesia dan BRI selaku bank pembina dapat memberikan sanksi hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran kode etik perbankan.

Peningkatan Kualitas

Thomas Suyatno mengakui, bersamaan dengan pertumbuhan kantor-kantor bank itu, pola kerja pejabat atau pegawai bank yang berada di desa maupun di kota perlu diubah. Karena menurut pengalaman selama ini, yang namanya pejabat atau pegawai bank itu umumnya mempunyai sikap menunggu dan sangat pasif dalam menciptakan hubungan dengan masyarakat calon nasabah maupun yang sudah menjadi nasabah. Kesan aparat bank yang demikian itu sangat tidak menunjang perkembangan kantor bank dalam menjaring calon nasabah, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap dunia perbankan.

Sistem *door to door* dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat hendaknya dilakukan aparat bank, agar perekonomian di pedesaan dapat bergerak maju, khususnya di sentra-sentra ekonomi pedesaan bersangkutan. Dengan demikian masyarakat akan semakin *bank oriented*. Misalnya mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk disini tokoh-tokoh informal yang ada, dalam rangka memperkenalkan jasa-jasa perbankan yang ada yang dapat dinikmati masyarakat desa.

Kampanye secara besar-besaran dan terbuka dalam rangka menghimpun dana masyarakat pedesaan dapat dilakukan juga oleh bank-bank yang bergerak di pedesaan. Sehingga masyarakat menjadi *bank mindedness*. Ini tidak mempengaruhi operasional bank-bank pemerintah, swasta maupun asing. Tinggal sekarang bagaimana manajemen bisa dikelola dengan baik.

Keterbukaan yang diberikan pemerintah kepada bank-bank untuk menyedot dana masyarakat maupun memberikan kredit kepada masyarakat dengan adanya Pakto 27 itu, menjadi jelas. Tidak ada batasan, tinggal sekarang bagaimana melaksanakan itu sesuai dengan aturan perundangan yang ada dan mengatur masalah tersebut. Bagi bank-bank pemerintah sendiri dengan adanya Pakto 27 itu, membuatnya harus bekerja ekstra keras lagi menghadapi persaingan dengan bank-bank lainnya yang juga beroperasi sampai di pedesaan.

"Semua dana masyarakat yang disimpan di bank-bank itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya bank bersangkutan, kecuali Tabanas yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah," ujar Thomas Suyatno.

Menunjang Perekonomian

Seiring dengan kepesatan pertumbuhan dunia perbankan ini, ternyata sangat menolong dan menunjang perekonomian Indonesia. Karena, menurut Thomas Suyatno, sekarang semua bank dihadapkan pada suatu tantangan berat, untuk menghimpun dana-dana masyarakat. Banyak cara dirumuskan oleh bank-bank guna menghimpun dana masyarakat, yang kalau kemarin-kemarin tidak masuk ke sektor perbankan, kini dengan penuh kesadaran mulai masuk ke sektor perbankan. Kondisi semacam ini telah menjadikan bank-bank itu mempunyai kemampuan untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Dan pada akhirnya dukungan kredit perbankan itu telah mampu meningkatkan aktivitas perdagangan sehingga tercapai suatu pertumbuhan ekonomi yang semakin menggembirakan.

Thomas Suyatno

Pada saat-saat tertentu atau pada fase operasional perbankan, memang terjadi persaingan antar Bank yang kadang-kadang tidak sehat. Bank-bank secara individualistik tidak memikirkan secara makro bagaimana masyarakat perbankan itu menggalang suatu situasi ke arah sasaran-sasaran yang sehat di dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi, dalam memperluas kesempatan kerja, dan dalam meningkatkan produksi. Bank-bank dalam situasi persaingan yang tajam itu, banyak hanya memikirkan dirinya sendiri atau kelompoknya tanpa memperhitungkan akibat-akibat luas ditinjau dari segi makro masyarakat perbankan secara keseluruhan. Ekses-ekses ini yang perlu dihindari. Masing-masing pihak harus menahan diri, jangan sampai satu bank secara individual atau secara kelompok melakukan kegiatan yang *over acting*, yang secara makro merugikan masyarakat perbankan itu sendiri.

Salah satu contoh dikemukakan Thomas Suyatno adanya persaingan dalam memberikan bunga deposito oleh berbagai bank. Misalnya Bank A memberikan bunga deposito sebesar 22 pCt, lebih tinggi dari bunga deposito bank-bank lain yang hanya 18 pCt. Oleh masyarakat Bank A tersebut dinilai lebih sehat dibanding bank-bank lain, karena mampu memberikan bunga deposito yang lebih tinggi. Akibatnya dana masyarakat berlomba-lomba masuk ke bank tersebut. Dalam situasi seperti ini, tentu bank-bank lain tidak tinggal diam. Mereka berlomba pula untuk meningkatkan suku bunga depositonya yang lebih menarik kepada masyarakat. Dan ini merupakan inisiatif yang diambil sebagai strategi operasional oleh bank-bank tersebut untuk berlomba dengan Bank A dalam menggaet uang masyarakat.

"Kalau sudah demikian keadaannya maka tatanan akan menjadi rusak. Oleh karenanya bank-bank harus mau menahan diri untuk tidak saling berlomba menaikkan bunga depositonya. Masyarakat perbankan harus bisa bekerja berdasarkan *cost of money* yang tepat," ujar Thomas Suyatno. □ DT

Digitized by Google

Jor-joran di Bisnis Perbankan

Kalau Anda punya uang menganggur, saat ini memang yang paling enak hanya ditabung dalam deposito rupiah. Meski kena pajak 15 persen, tapi masih paling menguntungkan dibanding cara lain. Kalau ingin keuntungan maksimal, sebaiknya jangan ditaruh untuk waktu lama, tetapi cukup tiga bulanan saja.

Alasannya sederhana saja, uang itu bisa cepat diambil untuk kemudian ditaruh di tempat yang suku bunga tabungannya lebih tinggi, ditambah fasilitas lain. Sebab paling tidak, dalam tahun-tahun mendatang ini, pertarungan antarbank akan semakin seru.

Pertarungan itu bukan tidak mungkin akan mengakibatkan suku bunga tabungan bergerak naik, atau paling tidak mempertahankan tingkat yang ada. Belum lagi insentif-insentif lain yang pada tahun ini akan berkembang dan semakin menggiurkan.

Dan tidak lagi seperti dulu, bankir dikejar-kejar nasabah, tapi kini sudah berbalik. Nasabah sekarang ini raja. Dengan dibukanya kesempatan membuka bank, maka pilihan masyarakat semakin banyak, sehingga nasabah justru sekarang yang menjual mahal.

Tahap demi tahap, dunia perbankan memang menunjukkan gejolak pertumbuhan yang mengesankan. Sejak dibukanya kran Pakto 27 Tahun 1988, sejumlah konglomerat sudah mengambil ancang-ancang untuk masuk dalam industri ini. Atau paling, bank-bank yang telah ada beramai-ramai melebarkan sayapnya ke kota-kota lain.

Contoh yang paling sederhana adalah di Bogor. Bagaikan jamur, bank-bank swasta membuka cabang untuk beroperasi di Kota Hujan itu. Sebanyak enam kantor cabang dan pembantu sudah siap melayani masyarakat Bogor dan sekitarnya. Mereka yang membuka cabangnya adalah Bank Windu Kencana, Lippo Bank, Bank Harapan Sentosa, Bank Danamon, Bank Bali, dan Bank Central Dagang.

Mereka umumnya menilai Kota Bogor dan sekitarnya ternyata masih banyak sumber dana yang potensial yang belum digali. Dan mereka berusaha berlomba-lomba untuk menggali bersama-sama, lalu selanjutnya disalurkan kembali pada sektor-sektor usaha yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan ekonomi.

Dibukanya kantor cabang bank-bank swasta itu, tentu saja membuat enam bank pemerintah yang beroperasi di situ harus pasang kuda-kuda. "Ini merupakan cambuk tersendiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata sumber di kantor cabang Bank BNI.

"Sebagai layaknya penjual jasa, kini bank harus aktif *menjual dirinya,* mempromosikan banknya dengan segala macam cara," kata pengamat perbankan Riyanto kepada *Media Karya.*

Perang memang sudah dimulai. Apalagi dengan munculnya sejumlah konglomerat yang mendirikan bank baru. Di Jakarta, kawasan segitiga Veteran, Hayam Wuruk, dan Sawah Besar, yang sudah diramaikan oleh sejumlah bank, tak membuat keder Ometraco Group untuk mendirikan Bank Tiara Asia (BTA) — bank swasta pertama yang lahir setelah Pakto — memilih basis usaha disitu.

Pendiri BTA merasa optimis bahwa mereka akan banyak mendapatkan nasabah. Sebab, Ometraco Group yang bergerak di bidang peternakan dan pakan ternak, perkebunan, udang, industri peralatan listrik, serta perhotelan, di 12 kota di Indonesia mempunyai banyak rekanan bisnis.

"Kami akan menyalurkan kredit berkisar Rp 100 juta sampai Rp 500 juta," kata Loeki S. Poetera, Direktur BTA. Aset bank ini diperkirakan seluruhnya Rp 500 miliar, dan BTA hendak memberi pelayanan dari pintu ke pintu di kawasan itu.

Langkah BTA tak lama kemudian diikuti pendirian Bank Risjad Salim International (RSI), yang kabarnya seluruh modalnya berasal dari keluarga Ibrahim Risjad, pengusaha besar, rekan bisnis Liem Sioe Liong (Sudono Salim). "Untuk sementara ini, kami memilikinya 100 persen," kata Risjad menjawab sekitar isu penyertaan modal Liem di RSI.

RSI disebut-sebut akan bergerak di sektor *corporate banking,* dan akan beroperasi sebagai bank umum dengan sasaran nasabah yang potensial.

Tampaknya pendirian bank-bank baru ini tak lepas dari prospek bisnis

Digitized by Google

perbankan di Indonesia yang masih sangat cerah. Taipan Liem Sioe Liong pernah mengatakan, Hongkong yang penduduknya hanya beberapa juta jiwa saja, telah dilayani oleh ribuan bank. "Sedangkan Indonesia yang penduduknya 180 juta, banknya cuma ada berapa?" katanya.

Prospek cerah itu pula yang membuat Dharmala Group mengoperasikan bank umum baru: PT. Bank Dharmala Nugraha. Bank ini sebenarnya merupakan penggabungan dari empat bank pasar yang dibeli keluarga Suhargo Gondokusumo antara tahun 1983 dan 1987. Kini aset Bank Dharmala Nugraha sebesar Rp 300 miliar. Dharmala menetapkan target, pada akhir tahun ini, asetnya bisa melonjak dua kali lipat. Ini tentu saja target yang ambisius sekali. Bandingkan saja dengan Bank Danamon yang baru menjadi bank devisa — tapi asetnya baru sekitar Rp 400 miliar.

Langkah seperti Dharmala juga dicoba PT. Gudang Garam. Perusahaan rokok kretek dari Kediri ini tahun 1983 membeli Bank Pasar Bangkit (Surabaya) yang waktu itu bernilai Rp 44 juta. Awal tahun ini GG mengangkat derajat bank pasar itu menjadi bank umum nasional dengan nama PT. Halim Indonesia Bank, sesuai dengan nama bos GG, Rachman Halim. Asetnya kini sudah mencapai 20 miliar, dan akhir tahun ini ditargetkan sudah membengkak menjadi Rp 70 miliar.

Tapi Pakto tidak hanya melahirkan bank-bank baru, ia juga membangunkan bank-bank yang mati suri. Inilah yang tampaknya menjadi incaran William Soeryadjaya, bos kelompok Astra. Astra dan Summa — satu dari perusahaan keluarga Soeryadjaya — membeli bank-bank yang mati suri. Dimulai dengan membeli Bank Agung Asia Desember tahun lalu. Kemudian menyusul Bank Pertiwi, yang *kolaps* karena ditinggal pemiliknya, dan dilanjutkan dengan membeli Bank Marannu yang sedang merana.

Kini Marannu yang didirikan oleh pengusaha asal Sulawesi Selatan, Andi Sose, telah berganti nama menjadi PT Bank Kredit Universal. Sose tak mau menyebutkan jumlah yang diterimanya dari Astra. Yang pasti sahamnya di Marannu — bank dengan aset Rp 312 miliar dan punya 14 cabang — menjadi minoritas.

Sementara itu, PT Fuji Bank International Indonesia (FBII) tampaknya akan muncul sebagai bank patungan pertama yang beroperasi di sini. Sesuai dengan Pakto, Rp 50 miliar telah disetor penuh, di mana 85% oleh pihak Fuji, sedang sisanya disetorkan Bank Internasional Indonesia (BII).

FBII yang mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan pada 2 Februari 1989 lalu, pertama-tama akan menawarkan jasa pelayanan perbankan kepada perusahaan-perusahaan, kemudian menyusul individu-individu. Bahkan kabarnya FBII saat ini minimal sudah mempunyai 26 nasabah. Dua perusahaan kelompok Fuyo (Fuji Bank Group) adalah Hitachi dan Kubota. Di samping itu ada Mitsui, Nippon Steel Corp., Mitsubishi Corp., Exxon, Bayer, General Motor, dan Coca Cola.

Di pihak lain, BII telah meneken kontrak dengan Bank Credit Lyonais dari Perancis. Patungan Lyonais-BII ini sudah direstui Menteri Keuangan pada 16 Januari lalu, dua minggu sebelum BII mendapat izin berjodoh dengan Fuji.

Bank Lyonais-BII akan beroperasi Oktober mendatang, di bawah pimpinan Daniel Bougery, yang kini masih menjadi boss Credit Lyonais di Hongkong.

Tapi bukan hanya BII yang bisa berpatungan dengan bank-bank asing. Beberapa nama seperti Bank Duta, Bank Central Dagang dan sejumlah bank swasta lainnya kini dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan bank-bank asing. Bahkan awal Agustus lalu telah terbentuk PT. Sanwa Bank Indonesia, sebuah usaha patungan antara Sanwa Bank Jepang dengan Bank Bali.

Bergabungnya para pengusaha bank Jepang dengan pengusaha bank di Indonesia disebut Riyanto akan menjadi saingan utama bank-bank asing lain yang beroperasi di sini. Pendapat ini diperkuat oleh Wakil Komisaris Sanwa Bank Indonesia, Djaja Ramli. "Ini wajar, sebab hingga kini 42 persen dari seluruh ekspor Indonesia dikirim ke Jepang," katanya.

Sanwa Bank Indonesia merupakan bank devisa patungan Indonesia-Jepang yang ke delapan di Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat ini sebuah patungan bank Indonesia-Jepang juga akan dibuka di sini. "Sehingga dalam Pelita V, paling sedikit ada 10 buah bank patungan Indonesia-Jepang yang akan beroperasi di Jakarta," kata Ramli.

Itulah dampak Pakto. Sejak dikeluarkannya paket itu, pemerintah telah memberi izin 418 bagi pendirian bank baru dan perluasan jaringan usaha perbankan.

Dengan rincian 29 izin pendirian bank umum baru, 9 izin untuk pendirian bank campuran, 150 izin pendirian bank perkreditan rakyat serta 230 izin perluasan jaringan usaha bank-bank yang sudah ada untuk membuka atau menambah kantor-kantor cabang baru.

Deregulasi di bidang perbankan memang menyebabkan persaingan semakin mengasyikkan. Praktis semua jenis bank, sekarang ini memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Ini merupakan titik awal dari suatu perkembangan bank baru, yang akan benar-benar sehat. Sehingga tidak perlu lagi saling iri, karena semua tingkat memperoleh kemudahan, maupun beban yang sama.

Tapi salah satu yang mengkhawatirkan, baik bagi bank pemerintah maupun bank swasta, adalah kehadiran bank asing tadi. Sehingga tingkat persaingan semakin keras, apalagi bank asing tersebut sudah dikenal sangat efisien. Tapi menurut Direktur Pengawasan Bank-bank Swasta dari BI, Sujitno Siswowidagdo, munculnya bank asing akan merangsang efisiensi bank lain.

"Kali ini kita tidak bisa main-main lagi. Kita memang sudah siap menghadapi persaingan yang semakin keras, namun kita tidak bisa lengah," kata Dirut Bank Niaga, Robby Djohan akhir tahun lalu.

Dalam deregulasi yang baru, bank swasta asing memang diperbolehkan membuka kantor cabang pembantu di enam kota di luar Jakarta yaitu Medan, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Ujungpandang.

Tetapi bukan itu saja, justru yang lebih gawat adalah diperbolehkannya bank-bank asing tersebut menggaet nasabah yang berdomisili di luar enam kota tersebut. Sehingga bisa saja, misalnya, Citibank yang memiliki kantor cabang pembantu di Ujungpandang, membajak nasabah besar di bidang perkayuan yang berdomisili di Banjarmasin atau Balikpapan.

Apalagi dalam era gelombang tiganya Alvin Toffer, di mana sistem telekomunikasi sudah sangat canggih, sehingga informasi dan komunikasi sangat lancar, maka lautan bukan lagi hambatan. Bahkan dengan kemampuan teknologi dan sistem pelayanan yang canggih dari bank asing nantinya, mampu mengatasi semua hambatan yang masih mungkin ada.

Digitized by Google

Belum begitu banyaknya jumlah nasabah yang berkualitas di Indonesia, memang akan menambah persaingan bank semakin seru saja. Sebab, bukan tidak mungkin, nasabah yang baik akan menjadi rebutan ratusan bank tadi. Bank-bank besar akan bertarung di kelas atas, misalnya antara bank asing, bank-bank pemerintah, maupun bank swasta nasional, seperti BCA, Bank Niaga, Bank Umum Nasional dan sebagainya.

Sementara di tingkat menengah, mereka akan mengkhususkan diri pada kelompok pedagang eceran. Persaingan di sektor ini terjadi pada bank-bank, seperti Bank Perkembangan Asia, Bank Umum Majapahit, Bank Surya Indonesia, dan sebagainya. Tapi bukan hanya mereka saja yang akan berkutat di sini. Sejumlah konglomerat, baik Dharmala Group, Bakrie & Brothers, maupun Summa Group akan meramaikan bisnis di sektor eceran ini. Mereka umumnya menilai bahwa diversifikasi usaha di sektor perbankan karena adanya peluang yang tercipta dari kepesatan perkembangan usaha eceran.

Nurachman Soekasah, Direktur Bank Agung Asia (bank dari konglomerat Summa Group) mengemukakan, meski banknya sudah naik kelas menjadi bank umum, tapi akan tetap mempertahankan pembiayaan sektor perdagangan eceran sebagai basis bisnisnya.

"Bank Nusa Internasional atau Bank Nusa nanti juga akan bergerak dalam pembiayaan sektor perdagangan eceran, terutama dengan agrobisnis," kata boss Bakrie & Brothers, Aburizal Bakrie mengenai banknya yang akan dipimpin Bangun Sarwito Koesmoelyono di Landmark Centre, Jakarta.

Begitu pula halnya Bank Dharmala yang akan dipimpin langsung oleh Suhargo Gondokusumo.

"Kami jadi berminat juga membuka cabang di daerah Matraman dan Pramuka, meski persaingan di kawasan itu cukup berat," kata Jusuf Arbianto, Direktur Bank Danamon.

Hasrat untuk meramaikan persaingan di daerah Jakarta Timur yang sektor perdagangan ecerannya berkembang pesat, bukan hanya datang dari Danamon. Meski sudah ada BNI, BDN, atau BCA, ternyata Lippobank pun telah ekspansi ke situ. Hal serupa terlihat pula secara mencolok dari pembukaan cabang sejumlah bank di kawasan Mayestik, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Begitu juga di daerah-daerah. Setiap pertokoan baru dibuka, bank pun langsung menyerbu.

Dengan demikian diperkirakan penyaluran dana akan lebih sengit dibanding dengan penghimpunan dana. Berbeda dengan persaingan penarikan dana masyarakat yang cukup diiming-imingi pelbagai tabungan berhadiah, penyaluran dana lebih membutuhkan kejelian melihat segmen pasar.

Tapi para bankir menyadari bahwa persaingan di industri ini semakin keras. Mulai dari rebutan manajer yang handal, meraih dana murah masyarakat, sampai menawarkan jasa pembiayaan yang bersaing. Setiap modus baru yang diperkenalkan oleh suatu bank dan berhasil dipasarkan, dengan cepat diikuti bank lainnya.

Contohnya adalah Tahapan (tabungan hari depan) berhadiah total Rp 500 juta yang diselenggarakan kelompok Lippobank dan BCA. Sukses Tahapan meraup dana senilai Rp 200 miliar membuat modus penghimpunan dana ini ditiru oleh belasan bank lainnya secara kolektif yang akan memperkenalkan tabungan Kesra (kesejahteraan rakyat) berhadiah total Rp 1 miliar.

Kenapa bank-bank itu memberi iming-iming hadiah sebesar itu? Bekas Ketua Umum Perbanas I Nyoman Moena kepada *Media Karya* mengatakan bahwa bukan tidak mungkin munculnya hadiah-hadiah itu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bankir yang bersangkutan dengan berdirinya bank baru dari group-group perusahaan besar.

Group-group perusahaan itu yang semula menempatkan dananya di bank-bank tersebut, jelas akan memindahkan dananya ke banknya sendiri.

"Penghimpunan dana lewat tabungan berhadiah itu adalah untuk mencegah agar jangan sampai terlalu kaget, bila sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dari group-group perusahaan itu," kata Moena.

Produk-produk tabungan memang semakin beraneka ragam, yang intinya adalah untuk menarik dana masyarakat. Semakin maju banknya, semakin banyak lagi produk yang bisa ditawarkan. Bank Duta yang mengeluarkan kartu kredit Visa, menawarkan pemberian kartu itu bagi penabung Rp 10 juta ke atas, berikut fasilitas lain.

Bank Niaga memang baru akan mulai dengan pemberian asuransi jiwanya, tapi fasilitas teknologi canggih yang dimilikinya saat ini, merupakan daya tarik sendiri.

Teknologi itu adalah ATM (*Automatic Teller Machine*) yang memberikan kemudahan bagi pemilik uang dalam giro di Bank Niaga, untuk menarik dananya sewaktu-waktu selama 24 jam.

Di Indonesia baru Citibank dan Bank Niaga yang sudah mulai di beberapa tempat. Bank Dagang Negara juga sudah mulai, tapi masih tahap sangat awal. Bank BNI baru tahap perencanaan, untuk sekaligus nantinya membentuk jaringan secara menyeluruh di Jakarta. Namun dalam komputerisasi, Bank BNI boleh dibilang yang paling maju di antara bank-bank pemerintah yang lain, meski belum mengeluarkan ATM.

BRI juga tidak mau kalah. Tapi karena jaringan bank pemerintah ini terlalu besar, maka komputerisasi hanya akan ditempatkan pada kantor-kantor cabang yang besar saja.

Memang mahal, tapi komputer tidak bisa lagi ditinggalkan. Sebab hanya dengan ini akan semakin banyak lagi produk yang bisa dijual di pasaran dengan pelayanan yang semakin memuaskan.

Bisa diperkirakan, bila bank-bank dalam waktu dekat ini tidak menggunakan teller, maka mereka akan dijauhi nasabah. Dengan sistem ini, seorang kasir memperoleh wewenang untuk mengeluarkan sejumlah uang, tanpa perlu persetujuan pimpinan lain. Tapi untuk ini diperlukan komputer, sehingga kasir itu bisa mengetahui rekening nasabah. Dengan cara ini pelayanan akan sangat cepat, sehingga bank tidak perlu lagi menyediakan kursi, cukup hanya antri berdiri.

Nah, itulah sejumlah perangkat dan produk yang di tahun ini dan mendatang akan digelarkan perbankan untuk menghadapi persaingan yang kian sengit ini. Apalagi adanya sejumlah bank baru, di samping puluhan bank unit BRI yang menurut Kamardy Arief akan menyerbu kota-kota besar.

Semakin banyak bank, memang diharap akan semakin baik pelayanannya kepada masyarakat. "Yang penting, mobilisasi dana akan lebih efektif," kata Menkeu Sumarlin.

"Persaingan antarbank tak perlu dikhawatirkan. Tak ada bank yang bangkrut karena persaingan. Kalaupun ada, tak lain karena tak mampu untuk mengelolanya secara profesional," tambah Sumarlin. Nah, kita lihat saja.☐ (LT)

Digitized by Google

Memacu Kreativitas Bank-bank Lewat Pakto 27

Dalam waktu tidak terlalu lama lagi, sebuah bangunan "jangkung" di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta akan diresmikan. Bank BNI, bank terkaya di Indonesia saat ini, akan menempati bangunan baru itu pada 14 September mendatang dan menjadikannya sebagai kantor pusat yang baru. Menggantikan yang lama, sebuah bangunan yang monumental, yang terletak di Jalan Lada.

Tidak jauh dari kantor pusat Bank BNI yang baru, sejumlah bank tengah membangun gedung kantor mereka di kawasan tersebut.

Ini gejala ramai-ramai menaikkan gengsi? Ya. Sebagai lembaga kepercayaan, perbankan tentu berusaha untuk membangun citra yang kokoh di tengah masyarakatnya.

Bank-bank, memang sejak diperkenalkan kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni 1983, berlomba berbenah diri dan memacu pengembangan usahanya.

Mereka berupaya menyempurnakan organisasi dan meningkatkan kualitas manajemen, untuk merebut pasar sekaligus memenangkan persaingan.

Suhu persaingan antar bank semakin meninggi, setelah Pemerintah mengeluarkan lagi paket kebijaksanaan di bidang keuangan, yang dikenal dengan Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto 27).

Bank Baru

Di alam deregulasi sekarang, bukan hanya gedung baru yang dibangun. Tapi juga, sejumlah nama bank baru muncul.

Menjelang satu tahun usia kebijaksanaan Pakto 27, sudah ada lima bank umum (swasta) baru yang berdiri. Mungkin sampai tanggal 27 Oktober mendatang, akan ada lagi sejumlah bank baru yang bakal diumumkan.

Ini sangat mungkin terjadi, karena menurut keterangan Menteri Keuangan, DR. J.B. Sumarlin, Pemerintah telah memberikan 25 izin prinsip pendirian bank umum.

Di antara bank baru itu, adalah Bank Risjad Salim Internasional, Bank Tiara, Bank Umum Bumi Putera (BUBP) dan Halim Internasional Bank.

Luar biasa? Memang, Pakto 27 ini luar biasa. Coba saja, tanggal 27 Oktober kebijaksanaan ini lahir, keesokan harinya Bank Danamon langsung memanfaatkan Pakto dengan mengajukan permohonan "naik kelas" kepada Pemerintah.

"Memang kami yang pertama. Bank Danamon merupakan bank swasta non devisa pertama yang menjadi bank devisa setelah lahirnya Pakto. Tanggal 27 Oktober Pakto lahir, tanggal 28 kami penuhi persyaratan untuk menjadi bank devisa. Lantas tanggal 5 Nopember sudah keluar persetujuan dari Bank Indonesia. Jadi prosesnya cuma seminggu. Saya kira salah satu penyebab gampangnya proses ini, karena kami sudah sejak lama termasuk bank "sehat" dan kami memang sudah siap untuk menjadi Bank Devisa," kata Drs. Jusuf Arbianto Tjondrolukito, Direktur Bank Danamon.

Bank Danamon sendiri adalah bank swasta nasional, yang dikenal sangat agresif mengembangkan bisnisnya. Bank ini pula, yang pertama kali memperkenalkan tabungan sejenis Tabanas. Yang kemudian, model tabungan ini dikembangkan banyak bank swasta lainnya, termasuk empat "empat Bank Mochtar Riady" (BCA, Lippobank, Bank Umum Asia dan Bank Bhumy Bahari) yang memperkenalkan Tahapan (Tabungan Hari Depan) sejak 1 Mei 1989 lalu, plus dengan iming-iming hadiah ratusan juta rupiah.

Bank Danamon kini termasuk 10 besar bank-bank swasta nasional. "Meski, setelah Pakto ini persaingan antar bank semakin sengit, kami tetap mentargetkan agar tetap bisa masuk dalam lingkungan sepuluh besar bank-bank swasta nasional."

Dampak

Di atas, telah dilukiskan sedikit mengenal dampak dari dikeluarkan paket kebijaksanaan 1 Juni 1983 dan Pakto 27. Tapi, bagaimana gambaran industri perbankan sebelum adanya kebijaksanaan itu?

Bila kita menengok ke belakang, melihat apa yang terjadi dalam periode 1974/1975 sampai dengan 1981/1982, kita akan ingat bahwa pada periode tersebut kondisi ekonomi kita dapat dikatakan mencapai zaman keemasan.

Ditandai dengan melonjaknya harga minyak mentah Indonesia yang semula hanya US$ 11,7 per barel pada April 1974 menjadi US$ 35 per barel pada bulan Januari 1981, yang merupakan harga tertinggi selama ini, ekonomi kita cukup berjaya karena disamping kenaikkan harga, minyak Indonesiapun terus meningkat produksinya.

Akibatnya, ekspor kita meningkat

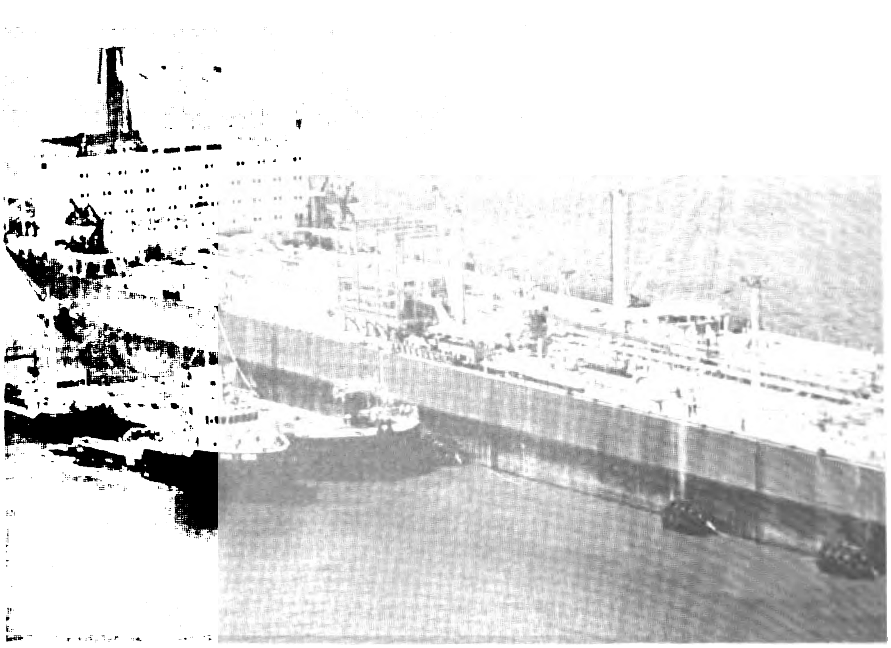

Pakto 27 juga berdampak meningkatnya ekspor

Digitized by Google

dengan pesat meskipun didominasi oleh ekspor migas yang mencapai rata-rata 73 persen selama periode tersebut.

Peningkatan ekspor itu berpengaruh cukup besar terhadap posisi Tabungan Pemerintah, yang merupakan sumber dana pembangunan kita. Dengan adanya lonjakan harga minyak yang merupakan penerimaan dalam negeri, maka dana cukup banyak tersedia sehingga partisipasi dana luar negeri relatif kecil.

Ketersediaan dana pembangunan yang cukup banyak tadi ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan kondisi perbankan kita.

Penyaluran dana pembangunan ke sektor riil dilakukan melalui perbankan, sementara itu sektor-sektor riil yang belum menemukan sasaran investasi yang cocok juga masih menyimpan uangnya di bank.

Sebagai akibatnya, bank mengalami kelebihan likuiditas dalam jumlah yang cukup bayak *sehingga semangat untuk mengerahkan dana masyarakat kurang berkembang dengan baik.*

Sementara itu, periode sebelum 1 Juni 1983 juga ditandai dengan pengaturan pagu perkreditan dan tingkat bunga oleh Bank Indonesia, serta penyediaan Kredit Likuiditas dalam jumlah yang melimpah.

Dengan demikian, segalanya telah diatur oleh Bank Indonesia, termasuk penetapan suku bunga deposito dan pinjaman, sehingga dapat dikatakan bahwa bank-bank komersial hanya sebagai "bank pelaksana", dalam penyaluran kredit-kredit Bank Indonesia, terutama kredit-kredit prioritas. *Ini berarti bahwa bank-bank komersial tidak didorong untuk melakukan inovasi berdasarkan kreativitas sendiri.*

Jelas dalam situasi itu, maka peranan bank komersial pada saat itu terbatas. Mobilisasi dana masyarakat sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan tidak dilakukan sekuat tenaga oleh perbankan, sebab bank tidak perlu khawatir akan mengalami kesulitan likuiditas.

Demikian pula semangat kewirausahaan tidak berkembang dengan baik karena bank komersial, khususnya bank pemerintah yang menguasai 80 persen dari pasar perbankan Indonesia, beroperasi dalam suasana terlindung. Artinya, tanpa pola pemasaran yang agresif pun mereka akan memperoleh profitabilitas yang baik karena segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Bank Indonesia.

Seperti misalnya pada sisi penggunaan dana, kata Mantan Direktur Utama Bank BNI, Somala Wiria, bank tidak perlu bekerja keras dan bersaing dengan ketat dalam mencari nasabah kredit.

Tingkat bunga secara semu dibuat rendah dengan adanya subsidi bunga melalui kredit likuiditas, sehingga bank komersial tidak perlu aktif memasarkan kreditnya.

"Nasabah datang sendiri ke bank, dan mengingat tingkat bunga telah diatur oleh Bank Indonesia dan relatif sama antara bank satu dengan yang lain, maka persainganpun tidak terjadi," tandas Somala.

Menurut Somala, suatu pelajaran penting dari kondisi perbankan kita pada saat itu adalah kurang terdidiknya bank-bank komersial di Indonesia untuk mandiri. Karena situasinya memang sudah serba diatur maka dengan pola operasi yang kurang profesionalpun laba yang diperoleh akan cukup baik, terutama bagi bank-bank Pemerintah. Akibatnya, pola pengelolaan bank cenderung konvensional, profesionalisme kurang berkembang dengan baik, dan kreativitas serta inovatif menjadi terhambat.

Era Deregulasi

Sejak tanggal 1 Juni 1983, Pemerintah mengambil langkah yang sangat mendasar dalam usaha mendewasakan perbankan Indonesia.

Keputusan penting ini tidak terlepas dari perkembangan perekonomian kita, yang pada saat itu agak mengalami kemunduran akibat harga minyak mentah kita yang mulai turun.

Perkembangan harga minyak yang mulai menurun sejak akhir tahun 1982 telah memberi dampak kurang menguntungkan dan tekanan berat terhadap neraca pembayaran kita.

Berdasarkan kenyataan bahwa pada periode 1982/1983 terjadi defisit neraca pembayaran kita dalam jumlah yang cukup besar (US$ 3.280 juta, sehingga cadangan devisa merosot menjadi hanya US$ 3.074 juta, dari rata-rata tahun sebelumnya sebesar 5,5 miliar), maka dapat dikatakan kita menghadapi situasi yang cukup berat.

Disamping itu merosotnya harga minyak juga berpengaruh cukup besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama untuk penerimaan dalam negeri walaupun penerimaan non migas telah mulai mening-

Anda menabung di bank!
Dana dari Anda yang terkumpul disimpannya
...dan diputarkannya. Itu Bank!

Ini... **SATU LAGI!**

Tabungan Pradana - BTN

Bedanya, uang Anda lebih aman!

Bank Tabungan Negara pengelola tabungan masyarakat paling berpengalaman, kini dengan manajemen gaya baru yang mengutamakan mutu pelayanan yang tinggi, menyajikan Tabungan Pradana dengan keuntungan-keuntungan seperti:

- ☐ Anda dapat memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah BTN
- ☐ Mendapatkan hadiah menarik dengan cara undian
- ☐ Bebas diambil sewaktu-waktu
- ☐ Bebas pajak pendapatan atas bunga

BANK TABUNGAN NEGARA
Aman, karena mementingkan kesejahteraan bersama

Hubungi kantor-kantor cabang Bank Tabungan Negara terdekat untuk informasi yang lebih lengkap:

• Jakarta I Wisma Puncak Jl. H. Rasuna Said Kav. C 17 Jakarta 12940 Telp. 5201210 • Jakarta II Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat Telp. 349191, 348710, 341560, 355941 • Bandung Jl. Jawa No. 7 Telp. (022) 432112, 50269 • Semarang Jl. M.T. Haryono No. 717 Telp. (024) 31 1533 • Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman No. 71 Telp. (0274) 2225, 2468, 86289 • Malang Jl. Suropati No. 9 Telp. (0341) 26849, 24521, 24805 • Surabaya Jl. Pemuda No. 50 Telp. (031) 44480, 42610, 45073 • Palembang Jl. Sudirman No. 125 (Km 4.5) P.O. Box 243 Plg Telp. (0711) 23175, 22212 • Padang Jl. Rasuna Said No. 3 Telp. (0751) 24900, 24903 • Medan Jl. Pemuda No. 10A Telp. (061) 326480, 23223, 570212 • Ujung Pandang Jl. Slamet Riyadi No. 7A Telp. (0411) 6352, 6388, 6389 • Manado Jl. Wolter Monginsidi No. 56 Telp. (0431) 51695 • Banjarmasin Jl. Laksm. R.E. Martadinata No. 8 Telp. (0511) 8133 • Denpasar Jl. Suropati No. 13 Telp. (0361) 24964, 24946, 24352 • Bogor Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Telp. (0251) 23007, 311700 • Bekasi Jl. Jend. Sudirman No. 16 Telp. (99) 72813 • Jayapura Jl. Jend. A. Yani No. 33 Jayapura 99111 Telp. (0967) 21440, 22666, 22889

Digitized by Google

kat.

Menghadapi situasi demikian, agaknya Pemerintah berpandangan sangat realistik dan menyadari bahwa sesuatu harus dilakukan pada sektor perbankan.

"Keputusan penting untuk menderegulasi perbankan pada 1 Juni 1983 menurut hemat saya juga tidak terlepas dari sikap realistik itu, di mana dengan deregulasi tadi maka peranan dana masyarakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan mulai diperhitungkan, dan sekaligus merupakan upaya untuk mendewasakan perbankan Indonesia," tutur Somala.

Seperti diketahui, pokok penting dari deregulasi itu meliputi: dihapusnya sistim pagu pinjaman; diberikannya kebebasan bagi bank-bank untuk menetapkan tingkat bunga pinjaman dan deposito; dihapuskannya pengenaan pajak atas bunga penempatan, baik penempatan dalam rupiah maupun valuta asing dalam pasar uang, dan kredit likuiditas secara bertahap diturunkan.

Perkembangan lebih lanjut dari perekonomian kita ternyata telah membawa pada pemikiran realistik mengenai pentingnya peranan swasta dalam pembangunan di negeri kita. Ini berarti partisipasi swasta diharapkan lebih besar lagi dan untuk mendorong kondisi demikian peran perbankan dan anggota-anggota sektor keuangan yang lain didorong untuk lebih aktif melalui deregulasi berikutnya dibidang moneter (Pakto 27).

Paket ini dimaksudkan untuk mendorong ekspor nonmigas, meningkatkan mobilisasi dana, memperbaiki efisiensi perbankan dan menciptakan iklim yang lebih baik bagi perkembangan pasar modal.

Secara garis besar, Pakto 27 berisi: 1. Mengijinkan semua bank menawarkan tabungan sebagai tambahan produk deposito berjangka yang telah ada; 2. Menurunkan Reserve Requirement dari 15% menjadi 2%; 3. Memperkenankan BUMN menempatkan 50% dananya yang ditempatkan pada bank-bank swasta, baik asing maupun domestik; 4. Mengijinkan LKBB mengeluarkan Sertifikat Deposito; 5. Memperpanjang jangka waktu Swap dari 6 bulan menjadi 3 tahun dan menetapkan premi Swap atas dasar fluktuasi pasar; 6. Mengijinkan pembukaan Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan di luar ibu kota negara, ibukota propinsi dan ibukota Dati II; 7. Mengijinkan bank asing yang sehat untuk membuka kantor di tujuh kota besar di Indonesia; 8. Mengijinkan pendirian bank-bank baru, baik bank komersial maupun bank-bank pembangunan dengan modal disetor minimal Rp 10 miliar; 9. Mempertahankan bank-bank asing yang memiliki perwakilan di Indonesia untuk membuka bank campuran dengan partner bank-bank swasta nasional di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Ujung Pandang, asalkan sekurang-kurangnya 50% kredit yang diberikan ditujukan untuk ekspor. 10. Melonggarkan ketentuan tentang pembukaan cabang atau cabang pembantu oleh bank-bank nasional; 11. Menetapkan ketentuan pembatasan pemberian kredit kepada debitur, debitur grup, serta pemegang saham dan pengurus.

Menurut Somala, dari dua paket deregulasi perbankan, dapat dilihat betapa telah terjadi perubahan yang drastis dan mendasar sekali pada perbankan Indonesia dibandingkan dengan era sebelum 1 Juni 1983.

Dikatakan, perubahan ini telah membawa perubahan struktur pada perbankan Indonesia, yang semula didominasi oleh bank-bank Pemerintah, dalam perjalanan selanjutnya bank swastapun mulai mengambil peranan.

Sebagai contoh, sejak dilakukannya deregulasi, telah terjadi peningkatan yang sangat pesat dalam pengerahan dana deposito berjangka. Bila kita ambil periode 5 tahun sebelum 1 Juni 1983, rata-rata pertumbuhan deposito berjangka perbankan hanya sebesar 20,37% per tahun, maka dalam era deregulasi (1983-1988), pertumbuhan tersebut mencapai 35,8% per tahun.

Sedangkan dalam nilai absolut, posisi deposito berjangka ini sampai Oktober 1988 telah mencapai Rp 20,37 triliun atau 9,22 kali dibanding posisi 1982.

Dari segi pelaku, terjadi pula perubahan yang mencolok, dimana jumlah deposito sebesar Rp 2,2 triliun pada 1982, porsi bank pemerintah menempati 56% dari total deposito yang ada. Sedangkan bank swasta memiliki porsi 26,0%.

Namun bila dilihat posisi 1988, dari jumlah deposito sebesar Rp 20,3 triliun, porsi bank swasta telah mencapai 35,34% yang berarti peningkatan pangsa pasar sebesar 9,3%. Sementara porsi bank pemerintah pada tahun ini mencapai 59,5% yang berarti hanya mengalami peningkatan pangsa pasar sebesar 3,5%.

Dalam pemberian pinjaman, pada periode deregulasi ini tercatat perkembangan yang cukup mencolok dari yang semula hanya Rp 8,1 triliun posisi 1982, menjadi Rp 38,9 triliun per September 1988 atau suatu kenaikkan hampir 5 kali.

Hal yang menarik dari segi pinjaman ini adalah adanya perubahan struktur pasar dari yang semula terlalu didominasi oleh bank pemerintah dengan pangsa hampir 79% pada tahun 1982 dan bank swasta hanya memperoleh 11,8%, maka untuk posisi 1988 kondisi itu telah berubah menjadi 67,7% pangsa bank pemerintah dan 25,2% untuk bank swasta.

Apa yang dipaparkan di atas melukiskan betapa kondisi yang lebih dinamis di lingkungan perbankan Indonesia sejak adanya deregulasi yang dimulai 1 Juni 1983. Suasana persaingan yang makin ketat, suasana bisnis yang makin dinamis makin nampak setelah dikeluarkan Pakto 27.

Dari apa yang sudah berjalan, utamanya sejak diperkenalkan Pakto 27, maka dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan sementara, antara lain:

— Persaingan dalam memperebutkan dana dan nasabah akan semakin tajam.

— Keuntungan semakin menipis, karena berkurangnya margin dan bertambahnya biaya operasi.

"Menghadapi tantangan akan perluasan kegiatan serta peningkatan efisiensi, bank akan berusaha membenahi organisasinya, menyempurnakan sistim operasinya serta meningkatkan kualitas personilnya. Dalam menuju pengelolaan bank yang semakin efisien, pada bagian permulaan akan terjadi peningkatan biaya investasi yang cukup besar; baik investasi untuk perangkat keras (perlengkapan seperti komputer dan sebagainya), perangkat lunak, maupun investasi dibidang sumber daya manusia. Hal ini akan mempengaruhi tingkat bunga," kata sejumlah pengamat mencoba menjelaskan hal yang terjadi di dunia perbankan setelah adanya Pakto:

— Nasabah-nasabah retail akan semakin menuntut kenyamanan serta harga dan layanan yang lebih baik.

— Bank-bank akan semakin sulit memperoleh staf-staf yang berkualitas dan profesional.

— Kesulitan pengumpulan dana masyarakat karena persaingan akan mengakibatkan menurunnya keuntungan jangka pendek bank.□ (HS)

Digitized by Google

Bisnis Perbankan dan Investasi Swasta

Pakto 27 memang kemungkinan bagi para pemilik modal untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Melalui kebijaksanaan ini kegairahan berusaha para pemilik modal mulai tumbuh kembali.

Sebenarnya Pakto 27 merupakan rangkaian dari deregulasi ekonomi yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1983, dimulai dengan deregulasi perbankan. Kebijaksanaan ini dimaksud untuk mendorong kegairahan para pengusaha untuk lebih banyak lagi berperan dalam perekonomian nasional.

Selama Repelita V, diproyeksikan investasi swasta dapat mencapai 55% dari total investasi yang diharapkan akan terjadi selama kurun waktu lima tahun itu. Itu berarti bahwa investasi swasta diharapkan senilai Rp 131,6 triliun dari total investasi selama Pelita V yang berjumlah 239,1 triliun. Sisanya Rp 107,5 triliun adalah investasi sektor pemerintah.

Proyeksi investasi sebesar itu, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5 persen setahun. Dan dengan pertumbuhan ekonomi yang 5 persen setahun itu, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung laju pertambahan angkatan kerja yang rata-rata 3 persen setahun itu.

Melihat proyeksi investasi untuk swasta sebesar Rp 131,6 triliun nampaknya memang sulit untuk mencapainya. Tetapi dengan kebijaksanaan deregulasi, gairah investasi sektor swasta mulai meningkat. Setidaknya di sektor perbankan, akhir-akhir ini nampak berkembang pesat. Sebanyak 162 Bank baru yang telah mendapat izin prinsip maupun izin usaha.

Dari sekian banyak Bank baru, diperkirakan modal yang diinvestasikan sebesar Rp 6,48 triliun. Berarti baru sekitar 2 persen dari jumlah investasi swasta yang diproyeksikan pada Pelita V ini. Sebelum ini, orang melihat bursa saham sebagai salah satu bisnis yang cukup menarik. Karena dalam waktu relatif singkat, orang bisa meraih keuntungan dari saham yang dimilikinya.

Ambillah contoh, saham Ficorinvest yang harga perdananya hanya Rp 10.000,- dua minggu kemudian melonjak menjadi Rp 23.500,- per saham. Sekarang, masyarakat mulai tertarik pada janji-janji yang diberikan bank bagi para penabung. Hadiah-hadiah cukup menarik ditawarkan kepada masyarakat agar mau menabung di bank tertentu.

Persaingan antar bank dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat cukup ketat. Sebetulnya bisnis perbankan dewasa ini memang memberi harapan dan prospek yang cukup cerah. Karena bank swasta sudah diizinkan untuk membuka cabang-cabangnya di daerah-daerah. Dengan begitu, bank yang dulunya punya nasabah terbatas kini semakin bertambah banyak nasabahnya. Sebaliknya bagi masyarakat, dia punya kesempatan untuk belajar menyisihkan sebagian dari penghasilannya — mungkin penghasilan tambahan — untuk masa depannya.

Sejak awal Pelita IV, pemerintah memberi dorongan bagi sektor swasta untuk lebih banyak lagi berperan dalam pembangunan nasional. Beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah telah memberi kesempatan bagi swasta untuk lebih berperan.

Kalau saja kita berpegang pada rumus Repelita V bahwa sektor swasta supaya menyumbang 55% dari total investasi, kemudian melihat pada Anggaran pembangunan untuk tahun anggaran 1989/1990 yang Rp 13,1 triliun itu, sektor swasta diharapkan akan melakukan investasi sebesar Rp 16,0 triliun. Jumlah tersebut telah mencakup investasi PMA dan PMDN baik melalui BKPM maupun investasi nonfasilitas melalui departemen teknis dan investasi yang dilakukan oleh sektor informal.

Ini belum termasuk investasi sektor informal yang memang sulit dipantau. Tetapi angka Rp 16,0 triliun yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun anggaran 1989/1990 itu, merupakan patokan bagi BKPM maupun departemen teknis. Apabila realisasi investasi tahun 1989/1990 ini berada dibawah jumlah tersebut, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhan tahun ini. Tetapi jika realisasi investasi berada diatas patokan Rp 16,0 triliun itu, maka sasaran yang ditetapkan Pelita V dapat dicapai.

Tetapi barangkali perlu diperhatikan beberapa faktor lain yang juga penting untuk diperhitungkan. Antaranya faktor stabilitas moneter dan peluang-peluang pemasaran yang ada baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Rasanya pasaran dalam negeri dewasa ini masih sangat lemah, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Upaya menggairahkan pasaran dalam negeri, tergantung pada kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli itu (purchasing power) tergantung pula pada jumlah kesempatan kerja yang dihasilkan oleh tingkat investasi yang tinggi.

Ini berarti bahwa kelesuan pasar dan kelesuan investasi harus dapat diterobos agar dapat menghadirkan kegairahan usaha di kalangan pengusaha. Upaya terobosan itu dapat dilaksanakan melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang dapat membangkitkan kepercayaan dunia bisnis terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

Kepercayaan — kredibilitas — itu hanya dapat dibangun melalui kerja keras para aparat untuk membendung derasnya arus kebocoran. Disini pengawasan menjadi sangat penting, karena dengan pengawasan yang ketat, derasnya kebocoran dapat dihambat.

Selama kebocoran masih mengalir deras, selama itu pula upaya memperbaiki perekonomian akan sia-sia. Deregulasi tak akan punya arti, karena dunia bisnis akan melihat kebijaksanaan tersebut sekedar sebuah upaya untuk menjaga kredibilitas legitimasi ekonomi.

Satu hal yang patut dibanggakan adalah dalam keadaan ekonomi dunia yang belum pulih benar, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Pelita IV adalah 5,1 persen setahun. Kendati begitu, pertumbuhan ini tidak boleh membuat kita terbuai. Karena tantangan pembangunan ekonomi selama kurun waktu Pelita V ini masih cukup berat.

Keberhasilan itu belum mampu mengatasi masalah paling mendasar yaitu masalah lapangan kerja yang masih sangat terbatas dibanding jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Disamping ketergantungan yang masih besar terhadap utang luar negeri. □ (tb)

Digitized by Google

Dialog Dengan Pemuda

Presiden Soeharto menghimbau agar dialog dengan pemuda dan mahasiswa ditingkatkan, sehingga dapat memberi kesempatan kepada generasi muda untuk menyampaikan dan mengembangkan pendapatnya.

Medio Juli lalu, ketika menerima Menpora Akbar Tanjung, Presiden Soeharto setidaknya telah membawa angin segar. Pada kesempatan tersebut, Presiden seperti dikatakan Menpora, mengharapkan dengan diadakan komunikasi akan dapat melatih generasi muda untuk mengapresiasikan pendapat orang lain. Dan dengan mengadakan dialog dengan pemuda dan mahasiswa, generasi muda diharapkan dapat mengikuti dan memikirkan usaha-usaha bangsa dalam mengatasi berbagai tantangan yang diperkirakan akan muncul kemudian hari.

Sebelumnya, langkah-langkah mengadakan dialog dengan pemuda dan mahasiswa juga sudah banyak dilakukan. Belum lama ini misalnya, Mendagri Rudini mengadakan dialog dengan pemuda dan mahasiswa yang disponsori KNPI.

Sebagaimana diketahui, keinginan para pemuda dan mahasiswa untuk mengadakan dialog secara terbuka dengan Mendagri cukup besar. Terbukti dari peminat yang datang. Gedung yang disediakan untuk tempat dialog tidak dapat menampung keinginan pemuda dan mahasiswa untuk mendengar berbagai masalah dari sumber utama. Bagi mereka yang datangnya terlambat, harus puas mendengarkan dialog dari luar.

Begitu pula dialog yang dilakukan oleh Menko Polkam Sudomo dengan mahasiswa di kampus IKIP Rawamangun — kedatangan Sudomo di kampus tersebut atas undangan dari Rektor IKIP — juga mendapat perhatian dari para mahasiswa cukup banyak dan besar. Hal serupa juga dialami oleh Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita.

Berbagai dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemerintahan ini dan yang ditanyakan oleh pemuda dan mahasiswa kepada Mendagri Rudini, Sudomo dan Ginandjar Kartasasmita umumnya menyangkut masalah-masalah yang berkembang akhir-akhir ini. Misalnya kebijaksanaan pemerintah tentang kenaikan tarip listrik, kasus tanah Kedung Ombo, Kacapiring dan yang lainnya.

Himbauan Presiden Soeharto dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh beberapa menteri untuk mengadakan dialog dengan pemuda dan mahasiswa mendapat sambutan positip. Menpan Sarwono Kusumaatmadja dan Sekjen KNPI Tjahyo Kumolo menyambut baik himbauan Presiden Soeharto dan langkah-langkah yang sudah dilakukan.

Sarwono Kusumaatmadja

"Mengadakan dialog merupakan suatu langkah penting", kata Menpan Sarwono Kusumaatmadja. Sedangkan Tjahyo Kumolo berpendapat, himbauan Presiden Soeharto dan langkah-langkah kongkrit ini dinilai merupakan hal yang sangat baik dan perlu terus untuk ditingkatkan.

Baik Menpan Sarwono maupun Tjahyo Kumolo mengenai diselenggarakan dialog dan himbauan dari Presiden Soeharto ini mengungkapkan berbagai argumentasinya. Seperti dikatakan Tjahyo Kumolo, dialog dengan mahasiswa ini harus ditingkatkan diberbagai forum, katanya.

Sedangkan kata Menpan Sarwono, dialog yang diadakan itu akan dapat menyamakankesamaan ide. Lebih jauh Menpan mengatakan, bila dialog-dialog itu tidak dilakukan, dikhawatirkan pemuda dan mahasiswa itu akan terasing dari gagasan nasional. Dan bila sudah demikian akan dapat menimbulkan problematik, tutur Menpan.

Mengenai perlunya mengadakan dialog dengan pemuda dan mahasiswa di luar negeri, Menpan sangat mendukung dan setuju. Mahasiswa yang belajar di luar negeri itu, kata Menpan mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, yang tidak dimiliki oleh para pemuda dan mahasiswa yang berada di dalam negeri. Sebab, pemuda dan mahasiswa di negara mana mereka berada akan menerima ide-ide atau gagasan dari negara yang bersangkutan (akibat majunya dunia komunikasi). Misalnya, media cetak, elektronika dan bahkan ide-ide atau gagasan itu apakah disampaikan secara tatap muka.

Untuk melarang agar gagasan yang datangnya dari negara yang bersangkutan dimana mahasiswa dan pemuda itu berada, suatu hal yang tidak mungkin. Begitu pula dengan melarang agar mahasiswa untuk tidak belajar di luar negeri juga tidak mungkin, kata Menpan. Oleh karena itu dialog merupakan suatu jalan yang penting dan perlu, tegas Menpan.

Menyinggung lebih jauh tentang dialog tersebut, Menpan mengatakan, terlepas ada dan tidak adanya gejolak, dialog itu perlu dilakukan. Kalaupun ada gejolak, dinilai Menpan itu masih merupakan suatu kewajaran. Sebab, negara kita ini sedang mengalami perubahan yang cukup pesat, sehingga banyak membuat orang resah.

Adanya keresahan ini, kata Menpan juga merupakan suatu pertanda hal yang sangat bagus. Sebab, bila terjadi perubahan-perubahan kemudian orang tidak resah, mungkin orang tersebut tidak sensitip dengan adanya perubahan yang terjadi. Keresahan itu harus dilihat dari hal yang positip," tutur Menpan.

Kemudian Tjahyo Kumolo, Sekjen KNPI dan juga anggota DPR dari FKP ini, menilai dialog yang sudah dilakukan itu merupakan suatu hal yang selama ini didambakan oleh pemuda dan mahasiswa. Kemudian Tjahyo mengharapkan agar dialog yang dilaksanakan itu tidak hanya sekedar basa-basi. Jawaban-jawaban yang diberikan dalam dialog tersebut seharusnya tidak hanya terpaku seperti yang tertuang dalam GBHN saja — yang berdampak politis — tetapi yang

Digitized by Google

Dialog akan dapat menyamakan ide

diinginkan oleh pemuda dan mahasiswa itu adalah jawaban secara terbuka," tutur Tjahyo.

Menurut pengamatannya, dialog yang sering dilakukan akhir-akhir ini dirasakan mengalami kemandekan. Untuk lebih meningkatkan dan agar dialog itu terus berkelanjutan, diharapkan agar juga dilakukan diberbagai forum.

Sedangkan kata Tjahyo, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) sebagai wadah berhimpunnya para pemuda ini, juga telah menciptakan iklim suasana yang berdialogis. Misalnya, KNPI telah mengadakan kontak-kontak dengan DPD tingkat I maupun tingkat II dan bahkan ormas-ormas agar setiap kegiatan yang dilakukan menciptakan suasana dialogis. Selain itu, DPP KNPI sendiri telah melaksanakan suasana tersebut. Misalnya sewaktu mengadakan penataran P4, "suasana dialogis sudah tercipta", ujar Tjahyo.

Selain itu, Tjahyo juga melihat, suasana dialogis di daerah dirasakan masih kurang. Sebagaimana diketahui, bahwa dialog-dialog dengan beberapa pejabat, tokoh-tokoh masyarakat masih banyak dilakukan di pusat.

Kurangnya dialog dengan tokoh-tokoh tersebut, kata Tjahyo, menjadikan berbagai masalah yang terdapat di daerah tidak disalurkan kepada daerah yang bersangkutan. Bahkan, masalah-masalah itu justru dibawa ke pusat (Jakarta). Mengenai hal ini dinilai oleh Tjahyo masih adanya kelemahan-kelemahan, pada fungsi kelembagaan legislatip di daerah itu, yaitu fungsi DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Sehingga fungsi dari lembaga tersebut sebagai penyalur aspirasi dan sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat porsinya lebih kecil dibanding pemerintah daerah.

Adanya fungsi yang demikian, kata Tjahyo, dapat menjadikan kemacetan dari aspirasi yang disampaikan dari bawah. Agar aspirasi yang dari bawah itu bisa tersalurkan diharapkan peranan GOLKAR sebagai salah satu kekuatan sosial politik, ABRI dan dua parpol. Sebab, katanya lebih lanjut, kalau aspirasi yang dari bawah itu disalurkan melalui ormas, kurang begitu mendapat perhatian, kata Tjahyo.

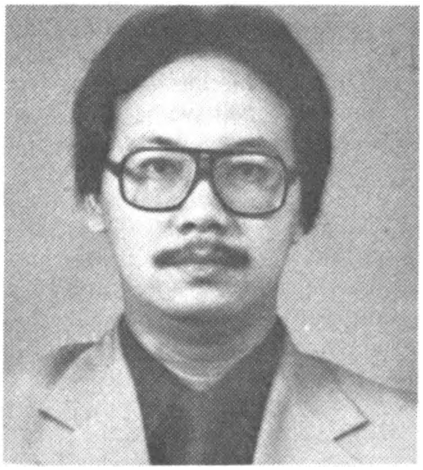

Tjahyo Kumolo

Pemimpin dan Masyarakat

Apa yang disampaikan Presiden Soeharto itu — meningkatkan dialog —, menurut penilaian Tjahyo merupakan hal yang sangat mendasar. Dan juga merupakan suatu isyarat akan keberhasilan dari pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini.

Kesuksesan pembangunan yang sampai pada keberadaan yang sekarang ini, kata Tjahyo tidak terlepas dari adanya kepercayaan yang memimpin dan yang dipimpin, khususnya dikalangan generasi muda.

Meskipun pembangunan yang dilaksanakan ini telah membawa hasil yang membanggakan, namun Tjahyo juga masih melihat adanya kekurangan-kekurangan dan perlu untuk mendapat perhatian. Misalnya dengan ketiga lembaga demokrasi kita, yaitu Lembaga Peradilan, lembaga Legislatip dan lembaga Eksekutip.

Meskipun ada lembaga peradilan, kata Tjahyo, namun masih ada sebagian orang yang belum menikmati keadilan. Begitu pula dengan adanya lembaga legislatip, masih belum semua orang terasa terwakili dan belum semua masyarakat aspirasinya tersalurkan. Begitu pula dengan adanya lembaga eksekutip, semua kebijaksanaan yang ditempuh masih belum dapat menjemput semua keinginan masyarakat.

Dan kalau aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut tidak dapat terjembatani, maka akan dapat menimbulkan antipati masyarakat pada pemimpinnya, lebih khusus dari kalangan generasi muda. Misalnya aspirasi tentang pendidikan, sosial dan yang lainnya.

Sedangkan kekurangan berikutnya adalah adanya misi yang belum sama diantara pemimpin kita. Dengan adanya ketidaksamaan persepsi akan dapat menimbulkan kekaburan, kebingungan diantara masyarakat bawah, lebih khusus lagi kalangan generasi muda.

Selain itu adanya polusi persepsi yang dapat mengaburkan masalah. Misalnya adanya aksi-aksi mahasiswa, dimana antara satu rektor dengan rektor lainnya, tidak dalam satu persepsi dalam menjawab masalah tersebut. Hal-hal tersebut juga akan dapat mengaburkan masalah.

Kemudian juga adanya kelompok-kelompok dari generasi muda sendiri yang masih mempunyai rasa ketergantungan yang melekat terhadap pemerintah. □ BM

Digitized by Google

Drs. Slamet Effendi Yusuf, Ketua Dep. Pemuda DPP GOLKAR

Melalui Dialog Berbagai Pandangan Dapat Dipertemukan

Dialog pemuda dan pemerintah memang sebuah keharusan yang sekaligus kebutuhan dalam kehidupan bersama kita. Melalui dialog, dapat dipertemukan berbagai pandangan mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, memang tidak dapat dipungkiri, dalam sebuah negara demokrasi akan selalu muncul banyak pandangan, baik yang sama maupun berbeda.

Kesamaan dan perbedaan pandangan atau pendapat tersebut sama-sama sah dalam kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pemuda sebagai lapisan warga negara yang relatip lebih kritis dalam melihat persoalan-persoalan bangsa, memang sering kali tampil dalam performance yang vokal. Ini suatu kelebihan pemuda. Karena dengan keberanian yang dilandasi oleh sikap kritis itu, pemuda ikut memberi andil dalam mendinamisasikan masyarakat dan bangsa.

Tetapi dipihak lain, harus diakui pula bahwa pemuda masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu terutama dalam memperoleh informasi yang legkap mengenai berbagai persoalan bangsa khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah.

''Disinilah saya melihat, betapa dialog antara pemuda dan pemerintah menjadi penting. Sebab, dengan itu persepsi bahkan aspirasi pemuda dapat didengar oleh pemerintah. Dan sebaliknya pemuda dapat mendengar secara langsung berbagai latar belakang kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah''.

Dialog seperti itu mungkin baru akan terselenggara bila ada keterbukaan kedua belah fihak. Keterbukaan baru muncul bila ada rasa saling percaya, tidak saling curiga dan tidak apriori. Suasana dialogis dengan begitu dapat terselenggara dengan enak.

Karena itulah setiap dialog harus bermula dari kehendak positip. Niat yang baik dan bermuara pada langkah yang konstruktip. Siapapun yang terlibat dalam dialog seharusnya didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan kenegaraan yang sesuai dengan cita-cita bersama.

Sikap kritis itu harus ditunjukkan dalam konteks tanggungjawab untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat dan berwibawa serta diorientasikan kepada rakyat banyak. Dengan cara itu, etika dialog sekaligus etika demokrasi dapat ditegakkan.

Saya ingin kembali menekankan, bahwa dialog bagian dari tradisi masyarakat yang demokratis. Karena itu suasana dialogis bukan hanya diperlukan antara pemuda dan pemerintah, tetapi juga antara pemuda itu sendiri, antara lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan, serta semua pihak yang merasa ikut bertanggung jawab dan berperan dalam kehidupan bersama ini.

Karena itu sungguh menjadi suatu kewajiban bersama untuk dapat menciptakan iklim yang memungkinkan dialog itu. Diantaranya iklim yang diinginkan, selain keterbukaan adalah toleransi yang besar terhadap perbedaan pendapat — tidak mungkin ada dialog bila kita tidak alergi terhadap perbedaan pendapat —. Yang harus dijaga adalah bagaimana agar perbedaan pendapat itu tidak mengarah kepada sikap mutlak-mutlakkan yang akhirnya akan bermuara kepada merusak persatuan dan kesatuan. Fungsi pendapat dengan begitu kita letakkan sebagai sarana penguji, agar dapat diperoleh pendapat/rumusan/gagasan yang terbaik. Dan yang terbaik itulah yang harus kita kembangkan.

Apakah dialog itu hanya ada di pusat?

Menurut pendapat saya tidak. Melalui dialog-dialog itu harus dapat dijaring pendapat dan aspirasi yang berdimensi horisontal maupun vertikal. Karena itu suasana dialog juga harus dilakukan di daerah-daerah. Bahkan rasanya cukup banyak persoalan yang langsung dengan nasib rakyat banyak justru terjadi di daerah. Kalau ada persoalan yang demikian, penyelesaian terbaik tentu melalui dialog ditempat itu juga.

Setelah ada anjuran Presiden agar terus melakukan dialog dengan kaum muda, mungkin saatnya kaum muda lebih intens merumuskan pendapat dan gagasan mengenai masalah-masalah bangsa dewasa ini, maupun masa depan.

Jadi yang didialogkan tidak hanya soal-soal aktual yang sedang menjadi isyu ditengah masyarakat, tetapi juga gagasan yang menjangkau ke depan dan bersifat substansial. Maka, dengan demikian kaum muda sekaligus dilatih untuk tidak saja responsif terhadap problem situasional, tetapi juga mampu melihat masalah aktual dalam dimensinya yang substansial dan kemudian memecahkannya dalam bentuk-bentuk konsepsi-konsepsi yang jauh menjangkau ke depan. □

Dialog antara Pemerintah dan Pemuda menjadi penting

Digitized by Google

Dari Penjelasan Tingkat Pusat Tentang Penyegaran Kader

"Perlu dicegah kemungkinan terbentuknya kelompok kader yang eksklusif"

Musyawarah Nasional IV GOLKAR antara lain menugaskan DPP GOLKAR untuk meneruskan dan meningkatkan usaha pendidikan dan latihan kader, serta untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pendaya-gunaan kader sebagai penggerak inti organisasi, baik dari segi jumlah, jenis, maupun dari segi kualitasnya.

Upaya untuk memenuhi amanat Munas IV ini, DPP GOLKAR, 26-28 Juli lalu, telah melakukan upaya awal, yaitu berupa penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tentang Penyegaran Kader. Raker ini diikuti 281 peserta dari seluruh Indonesia, dengan mengambil tempat di kawasan Puncak, Ciloto, Jawa Barat, dibuka dan ditutup sendiri oleh Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono. Turut serta memberikan pengarahan dalam acara yang berlangsung selama dua hari itu selain, Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno, juga Menteri Dalam Negeri Rudini. Sedangkan penjelasan materi-materi Rakernas diberikan oleh Fungsionaris DPP GOLKAR diantaranya; penjelasan tentang Korbid PP-OKK disampaikan oleh Drs Jakob Tobing, penjelasan tentang materi GBHN disampaikan oleh AE Manihuruk, penjelasan tentang materi AD/ART GOLKAR disampaikan oleh Rachmat Witoelar, penjelasan tentang materi Program Umum GOLKAR disampaikan oleh Soegeng Widjaya, sedang penjelasan materi tentang Teknik Diskusi, Teknik Memimpin Rapat dan Teknik Mengadakan Pendekatan yang akan dirumuskan sebagai panduan bagi para penatar nantinya disampaikan secara bergantian oleh Panitia Penyelenggara diantaranya adalah Anton Priyatno, SH, Anang Adenansi, Freddy Latumahina.

Program penyegaran kader merupakan bagian kaderisasi

Sementara dalam sambutan pembukaan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono mengemukakan, program Penyegaran Kader yang akan dilakukan ini, merupakan salah satu bagian dari sekian banyak kegiatan kaderisasi yang akan dilakukan GOLKAR. Oleh sebab itu DPP GOLKAR memandang perlu Program Penyegaran Kader ini didahulukan, terutama pada tingkat Penatar Kader, berikutnya pada tingkat Koordinator Karakterdes dan selanjutnya kader Fungsional, kata Ketua Umum.

Target yang hendak dicapai dalam penyegaran kader ini hanya lima ratus ribu orang Penatar untuk seluruh Indonesia, mereka ini ujar Wahono, bukan merupakan orang baru, melainkan diambilkan dari sembilan juta kader terdahulu, yang pembentukannya telah dilakukan sejak tahun 1984 lalu. Jadi pelaksanaan program kaderisasi yang hendak dilakukan sekarang ini bukan mulai dari titik nol,

Digitized by Google

melainkan melanjutkan dan meningkatkan potensi kader yang telah ada, jelas Wahono.

Lebih jauh Ketua Umum mengemukakan, langkah untuk meningkatkan dan pendayagunakan kader GOLKAR, yang merupakan kader organisasi sosial politik ini, akan semakin mampu dan dapat menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat. Akan berarti pula untuk lebih mengembangkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya.

Dengan demikian, komunikasi politik, yang amat penting bagi pertumbuhan bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan ini, akan semakin berkembang, baik diantara warga masyarakat sendiri, maupun antar masyarakat dengan lembaga-lembaga Perwakilan diantara masyarakat dengan Pemerintah.

Apabila komunikasi politik itu lebih berimbang, GOLKAR mempunyai keyakinan, bahwa budaya politik bangsa Indonesia akan semakin terbuka, semarak, tertib dan teratur. Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila akan semakin terwujud.

Selain itu, GOLKAR juga berkeyakinan, upaya kaderisasi yang menjangkau di 70.000 desa yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air kita ini, akan dapat lebih mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang teratur dan dinamis, yang berorientasi pada kepentingan nyata masyarakat, bersama upaya-upaya lain, yang dilakukan oleh bangsa kita untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia,

Pangab Try Sutrisno juga memberi sambutan

yang pada gilirannya akan dapat membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan pengembangan sistim politik Pancasila yang memiliki wawasan kebangsaan.

Kreatif dan Mandiri

Sementara pada kesempatan lainnya, ketika Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono menyampaikan pengarahannya di forum Penyegaran Kader, dikatakannya, kualitas kader GOLKAR amat ditentukan oleh sikap kreatif dan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas. Sikap yang demikian hanya akan dapat terwujud apabila iklim itu diberikan dan dikembangkan secara sehat dan dinamis.

GOLKAR tidak menghendaki kader yang hanya menunggu perintah dan selalu menggantungkan diri pada orang lain, sifat yang demikian, belum memenuhi kriteria kader GOLKAR dalam arti yang sesungguhnya, tandas Wahono, yang selanjutnya mengatakan, ''tidak ada artinya jumlah kader yang demikian banyak, tetapi sikapnya tidak kreatif dan mandiri''.

Hiburan ikut memeriahkan acara

Digitized by Google

DPP GOLKAR berkeyakinan, kata Wahono, bahwa kader kita memiliki potensi untuk kreatif dan mandiri. Hanya kita sendiri yang belum mampu menciptakan iklim tersebut dengan sepenuh hati. Hal itu mungkin dikarenakan banyak pertimbangan dan pengaruh-pengaruh kekhawatiran yang berlebihan, sehingga iklim demikian belum tercipta secara menyeluruh.

Oleh karenanya DPP GOLKAR berkesimpulan, iklim keterbukaan sesama kader masih perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Untuk itu, kata Wahono, hendaknya pimpinan GOLKAR di semua tingkatan mau membuka iklim keterbukaan, demi terciptanya kreativitas dan kemandirian gerak para kader.

Berbicara mengenai kemandirian GOLKAR, seperti halnya yang sering dikemukakan Wahono di beberapa kesempatan, dikatakannya, bagi Golongan Karya, kemandirian itu merupakan kematangan dinamika intern yang menciptakan kemampuan untuk berkembang sendiri, dengan tanpa menimbulkan beban pada lingkungannya. Mandiri berarti memperkokoh kedaulatan organisasi sendiri, dengan tanpa mengurangi, apalagi menghilangkan hubungan strategis dengan kawan-kawan seperjuangan.

Sehubungan dengan itu, Wahono mengharapkan, jangan ditafsirkan atau dikembangkan, bahwa kemandirian GOLKAR berarti putusnya hubungan GOLKAR dengan komponen Keluarga Besar GOLKAR. Penafsiran yang demikian itu jelas salah dan hendaknya jangan berfikir kearah sana. Memang, diluar dikembangkan pemikiran seperti itu, dan itu adalah pendapat orang luar, bukan pendapat organisasi. Oleh karenanya Ketua Umum GOLKAR mengingatkan para Kader GOLKAR diminta jangan sampai terpengaruh dengan pendapat yang diluaran itu, tegas Wahono.

Lebih jauh bicara tentang keterkaitan kaderisasi dengan kemandirian GOLKAR, Ketua Umum menjelaskan, kaderisasi adalah merupakan bagian dari sukses konsolidasi, yang menyangkut tiga aspek yaitu konsolidasi idiil, wawasan dan organisasi. Didalam konsolidasi Organisasi inilah kaderisasi dilakukan, karena kader memang merupakan tenaga inti penggerak organisasi. (Lebih jelas tentang fungsionalisasi kader organisasi GOLKAR dapat dilihat uraian Mendagri Rudini "Menuju Kualitas Kader Yang Diharapkan" pada halaman lain). Kader sebagai tenaga inti penggerak organisasi, lanjut Wahono, ia harus memiliki mental idiologi Pancasila, berwawasan Nasional serta menghayati perjuangan GOLKAR, memiliki kreativitas dan mampu mandiri dalam melaksanakan program GOLKAR.

Semakin banyak kader GOLKAR yang berkualifikasi di semua lapisan masyarakat, maka semakin tinggi pula pengakuan masyarakat terhadap GOLKAR, dan semakin besar pula dukungan masyarakat kepada GOLKAR. Lain kata GOLKAR semakin berakar di masyarakat, dan semakin mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan demikian terjadilah apa yang disebut kematangan dinamika intern GOLKAR, sehingga GOLKAR juga semakin mampu berkembang dan mampu mengurangi beban pada lingkungannya.

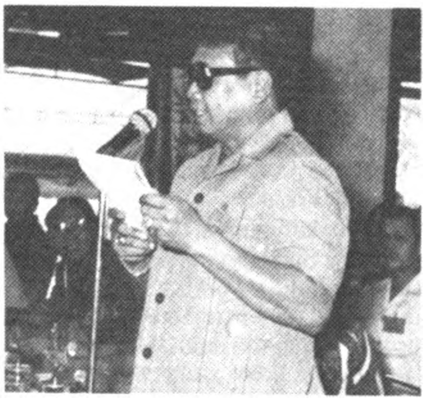

Salah seorang peserta

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Ketua Umum GOLKAR tentang konsolidasi ini, Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno dalam pengarahannya juga menekankan tentang aspek konsolidasi idiil, wawasan dan organisasi ini yang diuraikan secara jelas dan gamblang. Dikatakannya bahwa konsolidasi idiil yang merupakan usaha mengkonsolidasikan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan itu, merupakan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa dan negara, tujuan serta ideologi nasional, dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam melaksanakan pembangunan.

Mensinyalir tentang masih adanya kelompok tertentu yang masih meragukan akan kebenaran Pancasila, dan bahkan ada yang mulai membicarakan kemungkinan perubahan UUD 1945, Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno mengingatkan, agar Keluarga Besar GOLKAR sebagai komponen Orde Baru, tetap teguh serta tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai godaan yang dapat menggeser kebulatan tekadnya. Keluarga Besar GOLKAR harus tetap konsisten dan bertanggung jawab terhadap kelestarian Pancasila dan UUD 1945," tegas Pangab.

Untuk itulah, maka konsolidasi idiil ini memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh, agar masing-masing individu terutama di dalam jajaran GOLKAR, benar-benar memiliki sikap, "rumongso melu handarbeni, rumongso melu hangkrukebi, dan mulat saliro hangrosowani", terhadap Pancasila dan UUD 1945, pesan Try Sutrisno.

Tentang konsolidasi wawasan, Try Sutrisno menguraikan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas kekeluargaan, yang tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga negaranya. "Setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Negara, kata Try Sutrisno, melindungi kepentingan golongan dan kepentingan perorangan, tetapi, lanjutnya, lebih mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan nasional diatas kepentingan kelompok dan kepentingan perorangan, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dan terdiri atas berbagai suku, ras dan agama sejalan dengan kondisi geografik negaranya, namun pada hakekatnya adalah bertanah air satu, berbangsa satu, yaitu Indonesia. Kemajemukan dalam kesatuan dan persatuan tersebut, tersirat dan tersurat pada lambang negara kita, yang lebih dikenal dengan istilah "Bhinneka Tunggal Ika".

Menyadari kondisi yang demikian, maka didalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia telah membulatkan wawasannya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yaitu wawasan nusantara, yang pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari konsepsi pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum, Try Sutrisno menjelaskan, wawasan nusantara memandang negara republik Indonesia

Digitized by Google

menjadi satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.

Konsepsi wawasan nusantara sebagai upaya mengkristalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, kata Pangab, pada dasarnya bertujuan untuk lebih memantapkan prinsip-prinsip paham negara kekeluargaan tersebut. Oleh sebab itu Pangab mengharapkan, agar masalah wawasan nusantara yang sebagai wawasan pembangunan bangsa Indonesia itu, terus lebih dipopulerkan di dalam lingkungan GOLKAR khususnya, dan masyarakat umumnya, guna mewujudkan tujuan nasional tersebut.

Sedang dalam uraiannya tentang konsolidasi organisasi, Try Sutrisno menyebutkan bahwa bidang ini lebih bersifat administratif, yang meliputi pengaturan masalah keanggotaan dan kelembagaan. Namun ia menilai bidang ini tidak kalah penting dengan dua bidang diatas. Oleh sebab itu konsolidasi organisasi memerlukan perhatian dan penanganan yang serius oleh tenaga-tenaga yang tanggap, cakap dan terampil, pesan Try Sutrisno, sehingga faktor kepemimpinan paripurna menjadi sangat berperan dalam proses konsolidasi organisasi.

Lebih jauh Try Sutrisno mengemukakan, konsolidasi organisasi ini erat kaitannya dengan kemandirian GOLKAR, sebagai suatu kondisi sikap mental untuk tidak bergantung dan mudah dipengaruhi pihak lain, dan tanpa harus melupakan faktor sejarah pertumbuhan dan perkembangannya.

Kemandirian, kata Try tidak identik dengan "menutup diri", karena sebagai organisasi dituntut untuk selalu mampu menyerap, menampung, menerima segala aspirasi masyarakat, dan mampu menyalurkan pada jalur yang telah disepakati, serta komunikatif dengan kekuatan sosial politik lainnya, ujarnya.

Keterbukaan

Menyinggung keterbukaan politik yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, Pangab Jenderal Try Sutrisno mengatakan, sesungguhnya sistim politik yang dianut oleh bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila adalah terbuka, karena Pancasila itu sendiri adalah merupakan ideologi yang bersifat terbuka, ujar Try.

Keterbukaan politik yang kita kehendaki, kata Try Sutrisno lebih lanjut, adalah didalam kerangka menegakkan mekanisme demokrasi Pancasila, memperkuat kehidupan konstitusional. Namun Pangab mengingatkan, keterbukaan politik itu jangan sampai mengarah kepada timbulnya kehidupan yang bebas tanpa batas, yang cenderung tidak bertanggung jawab, serta mengarah kepada anarki.

Pemberian cinderamata

Oleh karenanya, didalam konteks ini, Try Sutrisno berpendapat, masalah pendidikan politik dalam rangka penghayatan, pengamalan dan pelestarian Pancasila dan UUD 1945, menjadi sangat penting. Pendidikan politik perlu terus diintensifkan, agar menjangkau segenap lapisan dan golongan di dalam masyarakat.

Mengakhiri pengarahannya didepan para peserta Rakernas Penyegaran Kader GOLKAR itu, Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno mengingatkan, bahwa hendaknya didalam pengelolaan kader ini, perlu selalu diingat dan dicegah sedini mungkin kemungkinan terbentuknya kader atau kelompok kader, yang mungkin berkembang kearah kelompok yang eksklusif atau mengkotakkan diri secara "tertutup", sehingga berada "diluar" lingkungan masyarakat. Dan hendaknya para kader selalu ditanamkan pengertian, bahwa ia justru harus selalu "didalam", dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.

Budaya Politik Baru

Menyinggung tentang budaya politik baru yang banyak dibicarakan khalayak akhir-akhir ini, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam bagian pengarahannya mengatakan, budaya politik baru bukan berarti GOLKAR meninggalkan dasar-dasar filosofis Pancasila dan kerangka ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945. Sistim politik Demokrasi Pancasila dan kerangka ketatanegaraan kita, memberikan ruang gerak dinamika sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berbagai gejala yang harus ditangkap sebagai hasil dari keberhasilan pembangunan itu adalah, sering dan bahkan telah menjadi pengamatan GOLKAR selama ini, yaitu semakin meningkatkan tuntutan kualitatif masyarakat. Masalah-masalah primer yang pada masa lalu telah dapat dipenuhi, menumbuhkan peningkatan kebutuhan yang diatas primer. Seperti soal keadilan, penegakan hukum, keterbukaan dan hak asasi yang masih dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Rakyat semakin mempunyai kesadaran politik tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka juga semakin memiliki daya kritis terhadap segala permasalahan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Kekritisan itu diaktualisasikan pada sikap untuk mempertanyakan segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya.

Didalam mempertanyakan ini, memang seringkali ada yang biasa dan adapula yang lembut, selaras dengan latar belakang budaya lokalnya. Pertanyaan-pertanyaan itu juga harus dijawab dengan terus terang dan rasional serta mendalam pula. ☐ (WT)

Digitized by Google

Menuju Kualitas Kader Yang Diharapkan

Pengantar Redaksi

Pengkaderan Golongan Karya berikut penyegarannya adalah merupakan kebutuhan organisasi Golongan Karya. Hal ini bisa ditangkap dari maksud pokok Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh DPP GOLKAR selama dua hari, di Ciloto, Jabar, baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Rudini dalam sambutannya memberikan pokok-pokok pengarahan tentang pengkaderan pada forum tersebut. Dan akan sangat bermanfaat bila disimak kembali pokok-pokok pengarahan Mendagri tersebut, mengingat pentingnya kaderisasi yang akan dilakukan Golongan Karya untuk menyongsong tugas berat di masa mendatang.

Karenanya Redaksi memandang perlu untuk menurunkan secara lengkap pengarahan Menteri Dalam Negeri Rudini, dengan harapan dapat merupakan pemahaman bagi kader-kader GOLKAR dimanapun berada.

Setiap organisasi kekuatan sosial politik hanya dapat hidup dan berkembang di dalam masyarakat bilamana memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain memiliki dan didukung oleh Kader yang dapat diandalkan yang merupakan tulang punggung dan motor penggerak organisasi. Oleh sebab itu adalah wajar bila Golongan Karya sebagai organisasi kekuatan sosial politik harus selalu berusaha membina kader-kader yang bermutu tinggi dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

Sekarang ini, Golongan Karya telah memiliki sejumlah kader. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas berat dalam masyarakat guna mencapai tujuan Golongan Karya diperlukan disamping jumlah kader yang cukup adalah juga kualitas yang tinggi. Berkenaan dengan hal itu, timbul pertanyaan apakah kader-kader Golongan Karya itu sudah terbina dengan baik dan sudah dimanfaatkan secara maksimal!

Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, apalagi evaluasi secara detail, jelas hal itu diluar wewenang saya. Namun demikian dalam rangka membantu menemukan jawaban atas pertanyaan itu, kita perlu menengok kembali mengenai apa cita-cita dan perjuangan Golongan Karya, dan bentuk pengkaderan yang bagaimanakah yang sesuai dengan perjuangan Golongan Karya.

Pada dasarnya cita-cita Golongan Karya tidak bisa dibedakan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertera di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yakni membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demikian pula perjuangan Golongan Karya tidak dapat dipisahkan dengan proses "pembangunan bangsa". Sedangkan pembangunan bangsa kita ini dasarnya adalah Pancasila, karena itu pranata-pranata kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan dibangun berdasarkan Pancasila, sistim perekonomian dibangun berdasarkan Pancasila, demikian juga kebudayaan nasional dibangun berdasarkan Pancasila. Dalam pengertian ini maka pembangunan nasional adalah merupakan wahana bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Atas dasar cita-cita Golongan Karya yang demikian itu, maka penciptaan dan pembinaan di dalam Golongan Karya seharusnyalah dilandasi oleh cita-cita Golongan Karya, dimana cita-cita itu adalah sama dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga dalam pengkaderan itu Golongan Karya mempunyai kewajiban untuk menyiapkan manusia-manusia penerus yang mau dan mampu mengemban tugas melangsungkan kehidupan bangsa dan negaranya. Dalam pengertian itu maka pengkaderan Golongan Karya harus mengarah kepada penyiapan kader-kader untuk menjadi "kepercayaan yang sungguh-sungguh" dari dasar-dasar dan cita-cita nasional.

Dengan demikian kader harus dapat menjiwai, memberikan andil yang sebesar-besarnya bagi perjuangan Golongan Karya yang adalah juga perjuangan bangsa Indoensia, yakni: Manusia-manusia yang mau dan mampu mempertahankan eksistensi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat; Manusia-manusia yang mau dan mampu mencurahkan perhatian pada masalah-masalah pembangunan, serta mengatasi paham kelompok dan paham perorangan; Manusia-manusia yang mau dan mampu menggerakkan lingkungan-lingkungan masyarakat Indonesia untuk hidup dan bergerak di dalam kerangka tatanan dan cita-cita nasional.

Untuk mencapai maksud itu maka tentu saja harus selektif di dalam menentukan atau memilih kader Golongan Karya, yakni mereka itu harus memiliki beberapa persyaratan minimal, yakni: Memiliki kemauan dan kemampuan memahami cita-cita kebangsaan kita; Memiliki kemauan dan kemampuan menghayati dan melaksanakan hidup yang dijiwai oleh "commitment" terhadap cita-cita kebangsaan; dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melihat gambaran operasional historis mengenai masa depan bangsa.

Fungsionalisasi Kader Golkar

Setelah kita mencoba mengingat kembali mengenai perlunya jumlah kader yang cukup, juga sekilas mengenai kualitas yang harus dimiliki oleh kader Golongan Karya, maka perlu kiranya direnungkan lebih lanjut tentang beberapa hal yang pada dasarnya bersifat teknis-operatif mengenai fungsionalisasi kader Golongan Karya, dimana hal ini amat diperlukan baik oleh Badan Pengelola Kader Golongan Karya Tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah.

Di dalam kehidupan organisasi istilah kader diartikan sebagai anggota inti yang terlatih dan cakap memberi

Digitized by Google

bimbingan, dan latihan kepada orang-orang lain.

Apabila fokus dari pengertian kader adalah kekuatan inti, maka pertanyaan yang patut diajukan adalah: kekuatan macam apakah yang disebut kader itu?

Sebagai kekuatan inti, maka kader dapat dipahami sebagai kelompok orang yang berkualitas lebih, yang didukung oleh dua peranan menonjol yakni: Satu, harus menjadi pembawa gagasan, petunjuk dan perumus jalan keluar; dalam hal ini mendekati apa yang dimaksud dengan fungsi "creative minority", jadi yang memberikan respons ampuh pada tantangan yang dihadapi oleh lingkungan; Dua, mampu mengembangkan aksi, prestasi dengan kegiatan yang konkrit dan bermanfaat dalam pembangunan baik dalam arti sempit, yakni kepentingan organisasi maupun dalam arti luas yakni kepentingan masyarakat.

Untuk terlaksananya kedua peranan itu diperlukan sikap kepemimpinan yang berkeahlian, berwibawa serta kejujuran, disamping mempunyai semangat pengabdian yang tinggi untuk mampu menjawab tantangan baik lingkungan, masyarakat maupun pemerintah.

Dengan demikian kader akan berfungsi: mencatat *sebagai radar* terhadap tendensi perubahan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga dalam hal ini seorang kader dituntut kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang ada; *Merancang tindakan* untuk menyelamatkan masyarakat dan kebudayaannya. Dalam hal ini diperlukan kemampuan melihat arah yang harus ditempuhnya; *Bertindak cepat* dalam upaya penyelamatan masyarakat tersebut dalam situasi dan kondisi tertentu atau dalam keadaan mendesak.

Kader pada dasarnya adalah merupakan salah satu komponen dari organisasi. Ia merupakan kekuatan, dan bukan sebaliknya organisasi merupakan alat dari seorang kader. Dengan kata lain organisasi bukan sekedar sarana perjuangan bagi seorang kader untuk mewujudkan cita-cita pribadi atau kelompoknya.

Dari itu tindakan yang akan dilakukan oleh kader harus selaras dengan kebijakan organisasi. Kader, disamping harus terampil dan jujur juga dituntut loyalitasnya terhadap organisasi.

Selama ini terdapat kecenderungan untuk mengartikan kader sebagai calon elite penguasa, setidak-tidaknya sebagai yang dipersiapkan untuk memperoleh kedudukan formal didalam organisasi atau pemerintahan. Pendapat yang demikian tidak selalu mengandung kebenaran. Pada dasarnya organisasi akan menempatkan kader dalam suatu kedudukan adalah sesuai dengan maksud yang ingin dicapai oleh organisasi, disamping itu tidak semua kader memiliki kapabilitas yang sama, interest yang sama, dan sebagainya. Disamping itu medan perjuanganpun beraneka ragam.

Kemudian mengingat adanya perbedaan baik mengenai kemampuan masing-masing kader, tanggung jawab dan peranannya dalam perjuangan organisasi, maka berdasarkan jabatan dalam organisasi, kader Golongan Karya dapat dibedakan sebagai berikut:

Kader penentu kebijakan pada tingkat nasional. Kader ini merupakan kader tingkat tertinggi dalam organisasi Golongan Karya;

Kader pemikir, yang lebih banyak dituntut kemampuannya sebagai pemikir dan perencana aktivitas perjuangan Golongan Karya.

Kader pelaksana, yang banyak memperoleh tugas untuk aktivitas perjuangan organisasi sebagaimana yang telah diprogramkan.

Organisasi Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik, tentu tidak lepas pula dari upaya untuk memperoleh ruang gerak. Untuk itu maka kader Golongan Karya pada dasarnya pula dapat dibedakan berdasarkan ruang gerak, yakni:

Kader Eksekutif, yakni kader Golongan Karya yang mempunyai posisi di dalam lembaga-lembaga dilingkungan eksekutif baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah yang didalam menjalankan tugasnya harus selalu didasarkan kepada tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;

Kader Legislatif, yakni kader Golongan Karya yang mempunyai posisi dalam lembaga-lembaga legislatif baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, yang dalam menjalankan tugasnya dapat membawakan aspirasi masyarakat, sebagai unit sosial yang juga mencita-citakan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;

Kader Organisasi/Administrasi, yakni kader Golongan Karya yang mempunyai posisi didalam struktur organisasi Golongan Karya baik pada Tingkat Pusat maupun Daerah, yang dalam menjalankan tugasnya selalu didasarkan kepada upaya meningkatkan dan mempertahankan kontinuitas tata kerja demi kelangsungan perjuangan Golongan Karya;

Dan *Kader Wiraswasta,* yakni kader Golongan Karya yang mempunyai kegiatan/usaha di bidang wiraswasta dan memiliki kegiatan/usaha di bidang wiraswasta serta menjadi pendukung atau berorientasi pada perjuangan Golongan Karya.

Kemudian, sebagaimana Golongan Karya mengenal tingkatan kepemimpinan organisasi berdasarkan daerah bakti seperti: DPP, DPD Tingkat I, DPD Tingkat II, dan seterusnya, maka sejalan dengan hal itu perlu terwujudnya penjenjangan kader berdasarkan

Diperlukan kader yang berkualitas tinggi

Digitized by Google

Kader dituntut peka pada perobahan yang ada

daerah bakti, yaitu: *Kader Nasional,* yakni kader Golongan Karya yang berdasarkan kesetiaan, pengabdian dan kapabilitasnya tepat untuk memperoleh fungsi, peranan dan kedudukan di dalam organisasi Golongan Karya pada Tingkat Nasional; *Kader Daerah Tingkat I,* yakni pada Tingkat Propinsi; *Kader Daerah Tingkat II,* yakni pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya; dan *Kader Kecamatan/Desa,* yakni pada Tingkat Kecamatan/Desa.

Arah Pembangunan Kader

Perlu kiranya kita pahami bahwa pengkaderan itu pada dasarnya adalah suatu proses yang berlanjut. Seseorang dapat dikatakan sebagai kader apabila memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kadar loyalitas, pengabdian dan sebagainya, sehingga bagi organisasi perlu memperhatikan pula masalah penyegaran bagi para kader yakni meliputi pembinaan loyalitas, pemeliharaan mentalitas, peningkatan pengetahuan ataupun ketrampilannya.

Mengapa pembinaan loyalitas diperlukan, tiada lain adalah untuk menghindari adanya kader yang berbalik haluan pada saat organisasi mengalami surut, ataupun karena tidak menduduki jabatan penting.

Pemeliharaan mentalitas bagi seorang kader juga amat diperlukan, sebab setiap kader dituntut tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk keperluan pribadi/kelompoknya di luar organisasi.

Kemudian, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kiranya amat diperlukan juga bagi seorang kader, adalah karena organisasi amat memerlukan pelaksana-pelaksana program kerja yang cakap, sebab pada akhirnya kelangsungan organisasi akan banyak bergantung pada prestasi yang konkrit.

Pembentukan pribadi penyegaran seorang kader dengan berorientasi kepada tiga hal di atas tidak mungkin hanya dilakukan dengan melalui pendidikan formal teoritis semata-mata, melainkan harus bersamaan dengan praktek, latihan, serta ujian-ujian di dalam kehidupan masyarakat. Dari itu pendidikan kader bukanlah merupakan satu-satunya proses pengkaderan, melainkan merupakan salah satu dari proses tersebut.

Disamping itu perlu kiranya kita ingat kebhinekaan kader Golongan Karya, dalam arti bahwa banyak macam/jenis, kelompok serta jenjangnya, yang kesemuanya itu masing-masing memerlukan perhatian, pembinaan ataupun penyegaran tersendiri. Namun demikian haruslah *satu* di dalam perjuangan demi hari depan bangsa dan negara. Pendidikan dan latihan pada dasarnya hanya merupakan suatu pentahapan untuk menseleksi secara formal administratif serta membedakan antara anggota organisasi dengan kader organisasi.

Kiranya telah menjadi kesadaran kita bahwa pengkaderan Golongan Karya berikut penyegarannya adalah merupakan kebutuhan nyata bagi organisasi Golongan Karya. Hal ini bisa ditangkap dari maksud pokok rapat kerja yang diselenggarakan oleh DPP Golongan Karya dalam dua hari ini. Tetapi hendaknya dapat diketahui bahwa proses pengkaderan itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan lancar apabila masih dijumpai adanya beberapa hambatan pokok, seperti misalnya: (1) belum ada kesatuan pemikiran dikalangan Pimpinan Golongan Karya mengenai pengkaderan itu baik tentang pengertian, sistem, dan pola pendidikannya maupun pembinaannya. Terlebih lagi bila ada kecenderungan menciptakan "pengamanan" bagi diri maupun kelompoknya, yang tentunya hal demikian ini bertentangan dengan ide dasar didirikannya Golongan Karya;

(2) Terdapat kecenderungan penerapan prinsip akomodasi dalam kepengurusan organisasi Golongan Karya baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Misalnya, adanya polarisasi berdasarkan pertimbangan organisasi kemasyarakatan, hal ini dapat menimbulkan problem yang serius. Belum lagi misalnya ada kelompok tertentu yang berkeinginan menempatkan dirinya sebagai pilar organisasi Golongan Karya, maka hal ini akan menambah keanekaragaman di dalam mengimplementasikan pengertian, corak ataupun sistem pengkaderan yang akan dilaksanakan;

(3) Belum adanya kejelasan penjenjangan kader dalam organisasi Golongan Karya, sehingga tidak mudah dirumuskan dengan jelas kualifikasi seorang kader, yang pada gilirannya akan menciptakan kekurangserasian hubungan antara sesama anggota, karena belum adanya sinkronisasi antara motivasi kader sebagai individu dengan motivasi organisasi dalam menyelenggarakan pengkaderan.

Kemudian, untuk terlaksananya pengkaderan di dalam organisasi Golongan Karya, maka beberapa hambatan perlu ditiadakan. Harus disepakati suatu pangkal tolak pemikiran yang bulat serta jangkauan yang mantap baik strategis maupun pragmatis, sehingga dari pangkal tolak pemikiran itu dapat ditarik pokok-pokok pikiran yang mendasar, yang kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi kebijaksanaan dan program kegiatan pengkaderan di dalam organisasi Golongan Karya.

Adapun tolok ukur untuk mencapai

Digitized by Google

kesepakatan itu sudah jelas dan eksplisit, yakni telah dirumuskan dalam wujud Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Golongan Karya pada bulan Oktober 1988; sudah menjadi suatu keharusan dan tidak perlu ada masalah lagi bahwa semua pihak di dalam tubuh Golongan Karya untuk mentaati dan melaksanakan secara konsekuen hasil-hasil musyawarah nasional tersebut. Berbekal kesepakatan dan ketaatan itulah maka kiranya tak akan menemui kesulitan di dalam merumuskan pangkal tolak pemikiran mengenai pengkaderan di dalam Golongan Karya, yang pada dasarnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

Adanya tekad bersama untuk mewujudkan suasana kader yang dinamis, kritis, kreatif, dan konstruktif dalam rangka ikut memberikan dharma baktinya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia; dengan demikian tidak berarti tergelincir pada semangat kelompok yang sempit melainkan berorientasi pada kepentingan wawasan yang memperjuangkan aspirasi seluruh masyarakat maupun kepentingan nasional.

Perlu kesatuan pengertian dan kesepakatan mengenai kader dan sistim pengkaderannya. Hal ini penting untuk menjawab siapa yang menjadi kader Golongan Karya dan bagaimana pengkaderan itu dipersiapkan dan dilaksanakan. Sehingga dengan demikian dapat terjawab pula persoalan yang berhubungan dengan masalah akomodatif dalam kepengurusan Golongan Karya, karena semua anggota Golongan Karya hanya dapat menjadi kader Golongan Karya setelah melalui penjenjangan dan evaluasi yang dilakukan oleh organisasi Golongan Karya.

Perlu dinyatakan bahwa kader Golongan Karya hanya dapat dihasilkan dari proses perencanaan dan pelaksanaan pengkaderan keluarga besar

Kader merupakan komponen organisasi

Golongan Karya. Dalam pengertian bahwa pengkaderan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan pertama-tama adalah untuk menghasilkan kader bagi organisasi yang bersangkutan, namun juga menjadi sumber kader Golongan Karya yang perlu dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya.

Pengkaderan Golongan Karya merupakan pekerjaan yang tidak kecil dan ringan, sebab melibatkan seluruh komponen organisasi dari Pusat sampai Daerah Tingkat II, bahkan melibatkan partisipasi dan dukungan dari seluruh keluarga besar. Dan oleh karena pengkaderan Golongan Karya menjadi kebutuhan dan proses seumur hidup disamping merupakan juga upaya konsolidasi organisasi yang tak pernah ada selesainya, maka perlu dianut prinsip sentralisasi perencanaan dan desentralisasi pelaksanaan sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan yang diselenggarakan merupakan bagian dari sistem yang menyeluruh dan terpadu.

Dengan pokok pemikiran diatas, kiranya akan menjadi jelas arah pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Tentu saja harus ada keberanian untuk memulainya, karena tujuan kaderisasi Golongan Karya sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Keputusan DPP Golongan Karya Nomor Kep-048/DPP/Golkar/5/1984 tanggal 5 Mei 1984 dinyatakan bahwa Kader Golongan Karya adalah dimaksudkan sebagai tulang punggung dan motor penggerak organisasi, agar Golongan Karya dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan.

Dari sini tersirat suatu arahan bahwa pengkaderan Golongan Karya tidak hanya disiapkan untuk aktip dalam Pemilihan Umum, setelah itu berhenti tanpa kegiatan. Kader dibina dan disiapkan untuk dapat memberikan dharma bakti kepada organisasi, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu Kader Golongan Karya tidak hanya mampu memperluas pengaruh, tetapi juga memperkokoh akar dukungan masyarakat kepada Golongan Karya, sehingga Golongan Karya menjadi Organisasi Kekuatan Sosial Politik yang semakin kukuh kuat keberadaannya dalam tata kehidupan politik nasional.

Aspek-aspek Pengkaderan

Beberapa aspek yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan pengkaderan, yakni aspek *konsepsional* dan aspek *operasional*. Dalam pengertian bahwa harus ada keterkaitan antara konsep dasar yang mengandung cita-cita serta wawasan dengan kenyataan empiris yang sifatnya konkrit dan berkembang.

Oleh karena pengkaderan yang dimaksud pada dasarnya adalah fungsi di dalam mencapai cita-cita perjuangan Golongan Karya, maka pengkaderan itu harus direncanakan dengan memperhitungkan keterkaitannya faktor penentu, seperti masalah: kualitatif, kuantitatif, efektivitas dan efi-

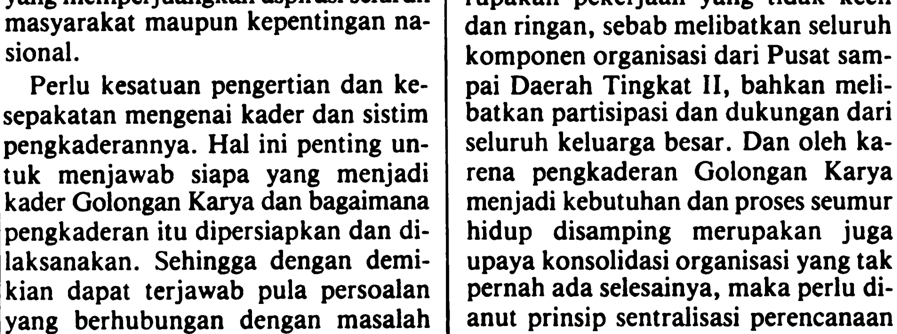

Kader suatu kelompok yang berkualitas lebih

Digitized by Google

siensi.

Proses pengkaderan Golongan Karya tentu saja diharapkan menghasilkan kader-kader yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh Golongan Karya baik mengenai sikap hidupnya, cara berpikirnya maupun cara kerjanya.

Sedangkan dalam hubungannya dengan masalah medan perjuangan, akan minta diperhitungkan masalah kuantitatif yang dalam hal ini dapat diperhitungkan dengan masalah jumlah lingkungan, wilayah, dan sebagainya. Kemudian, karena di dalam pengkaderan itu diharapkan menghasilkan sejumlah kader, maka masalah efektivitas mempunyai arti penting yang dalam hal ini berkaitan dengan metodik-didaktik dan sistem evaluasi. Sementara itu masalah efisiensi yang dimaksud adalah menyangkut perihal pengelolaan, administrasi maupun pemanfaatan serta pembinaan kader-kader Golongan Karya.

Kemudian, di dalam proses pengkaderan itu diperlukan komponen-komponen dasar, yakni hal-hal yang berkenaan dengan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh proses kaderisasi itu, antara lain adalah: pengelolaan sistem pengkaderan, kurikulum, instruktur, prasarana, fasilitas sistem pengkaderan dan administrasi.

Perencanaan program pengkaderan harus dilaksanakan dengan berpegang kepada wawasan "bhineka tunggal ika", mengingat bahwa Golongan Karya memiliki satu cita-cita dasar, konsep perjuangan dasar, tetapi harus dilaksanakan didalam kenyataan yang serba kompleks dan majemuk oleh berbagai asal kader. Dengan berpegang pada wawasan tersebut maka perencanaan program pengkaderan perlu memperhatikan beberapa hal yakni: Satu, harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu; Dua, perlu direncanakan dengan memperhitungkan kaitannya dengan perkembangan karier kader-kader Golongan Karya; Tiga, perlu direncanakan dengan mempertimbangkan mobilitas baik horisontal maupun vertikal; Empat, harus dilaksanakan dalam struktur yang mengandung berbagai jenjang secara terpadu.

Mungkin timbul pertanyaan mengapa masalah kualitatif, efektivitas dan efisiensi itu perlu diperhitungkan. Kiranya perlu diingat bahwa pengkaderan adalah proses menciptakan kader yang tangguh, yang menghayati dan mengamalkan cita-cita perjuangan Golongan Karya, yang diharapkan mampu mengadakan aksi-aksi taktis dalam rangka mencapai sasaran strategi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam hal menyangkut masalah kualitas, maka kurang tepat bila sistem pengkaderan semata-mata didasarkan orientasi kepada bahan, melainkan harus berorientasi pada pembentukan kepribadian yang lengkap. Dari itu pengkaderan pada dasarnya tidak boleh hanya terbatas pada waktu diselenggarakannya pengkaderan itu, melainkan seluruh kehidupan dan keterlibatan di dalam Golongan Karya merupakan proses pengkaderan yang terus-menerus.

Dan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi merupakan bagian dari proses pengkaderan itu pula, yang dalam hal ini membuka kemungkinan adanya mobilitas vertikal maupun horisontal bagi anggota-anggota Golongan Karya sebagai kader Golongan Karya. Pengertian kualitatif disini merupakan faktor penting karena Golongan Karya membutuhkan berbagai jenis kader seperti: kader penentu kebijakan, kader pemikir, kader pelaksana, kader eksekutif, kader legislatif, kader organisasi/administrasi, kader wiraswasta, kader nasional, kader Daerah Tingkat I, kader Daerah Tingkat II, kader Kecamatan/Desa. Fungsi tertentu pasti akan membawa tuntutan-tuntutan kualitatif tertentu pula.

Kemudian faktor kuantitatif perlu diperhitungkan pula adalah karena kader-kader Golongan Karya harus menjalin kerjasama dengan masyarakat pada umumnya. Dari itu perlu diperhitungkan baik berkenaan dengan medan demografik yang harus dijangkau maupun jumlah kader yang harus dipersiapkan.

Dan mengapa pengkaderan itu harus dilaksanakan secara efektif, adalah karena penyelenggaraan pengkaderan itu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dengan biaya tertentu, sementara itu hasil harus sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu masalah efektivitas ini kiranya banyak hubungannya dengan penyusunan kurikulum, yakni menyangkut perihal bahan (isi dan komposisi materi) serta metoda dan evaluasinya.

Oleh karena masalah pengkaderan itu berkaitan erat dengan masalah bagaimana memanfaatkan tenaga, dana maupun sarana agar dalam waktu tertentu dengan apa yang tersedia itu bisa dicapai hasil yang sebaik-baiknya, maka masalah efisiensi dalam pengkaderan Golongan Karya ini perlu diperhatikan, termasuk dalam hal ini adalah efisiensi di dalam hal pembinaannya. Secara lebih konkrit dapat diungkapkan bahwa efisiensi yang dimaksud adalah menyangkut masalah: pengelolaan, tenaga (instruktur), sarana, fasilitas, dan administrasi.

Berkenaan dengan masalah pengelolaan ini bagi Golongan Karya kiranya tidak ada persoalan, sebab sudah jelas terdapat pengelolaan tunggal terpadu dari program kaderisasi Golongan Karya yakni DPP Golongan Karya dengan BAPEKA (Badan Pengelola Kader) yang berdasarkan Keputusan DPP Golongan Karya Nomor Kep. 37/DPP/Golkar/1/1989 tanggal 11 Januari 1989, badan tersebut telah disempurnakan. Dengan penyempurnaan itu diharapkan BAPEKA mampu mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

Dalam pengkaderan Golongan Karya, tenaga atau instruktur merupakan kunci penting pula bila ditinjau dari sudut efisiensi, mengingat Golongan Karya secara kuantitatif harus mencetak berbagai jenis kader dalam jumlah yang memadai. Dan sebagai satu-satunya jalan pintas adalah meletakkan prioritas pertama pada usaha pembinaan instruktur-instruktur baik di Tingkat Nasional maupun di Tingkat Daerah. Sementara itu, sebagai bagian dari sarana kaderisasi adalah tersedianya bahan cetak. Hal ini tidak saja diperlukan pada saat penyelenggaraan pendidikan, melainkan akan sangat bermanfaat pula sebagai sarana pembinaan bagi kader-kader Golongan Karya.

Kemudian mengenai bagaimanakah dengan pemanfaatan kader? Tentu saja pemanfaatan kader ditentukan oleh atau atas dasar kepentingan Golongan Karya didalam perjuangannya dalam kurun waktu tertentu ataupun di dalam menghadapi sesuatu permasalahan tertentu. Sedangkan dalam hal pembinaannya, yakni sebagai usaha untuk mendayagunakan dan membimbing secara terus menerus, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah diadakannya struktur pengkaderan secara berjenjang yakni pengkaderan tingkat *dasar* dan pengkaderan *lanjutan*.

Struktur seperti ini dapat menjadi bagian dari sistem pengkaderan reguler; Dikatakan reguler, sebab dalam pengkaderan Golongan Karya mungkin pula dilaksanakan pengkaderan khusus.☐

Digitized by Google

Sikap GOLKAR Tentang Sistem Pemilu

Pemilihan Umum 1992, masih terasa jauh. Namun, sudah banyak tokoh-tokoh dan pengamat politik yang membicarakan. Lebih khusus lagi mengenai sistim Pemilu kita. Ada yang berpendapat, sistim distrik sudah waktunya untuk diterapkan. Namun, ada pula yang berpendapat, sistem proporsional, yang sudah dilakukan sekarang ini lebih pas dan cocok dengan kondisi Indonesia.

Sistem Pemilu, yang dibicarakan ini seperti tidak ada habis-habisnya. Bahkan, terus saja menjadi polemik yang berkepanjangan. Namun apa kata Ketua Umum GOLKAR Wahono, tentang sistem Pemilu tersebut? Ucapan Ketua Umum GOLKAR ini sekaligus juga merupakan jawaban dan sikap GOLKAR atas sistem dari pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Seperti diungkapkan Ketua Umum Wahono di Jambi awal Agustus lalu, bahwa sistem yang kita miliki (proporsional) sudah memadai dan memenuhi kebutuhan. Mengenai sistem yang dilaksanakan sekarang ini, kata Wahono tidak perlu ada perubahan, baik sistem maupun caranya. Kalaupun ada, hanyalah peningkatan dari pada pelaksanaan secara teknis maupun kualitatip.

Lebih lanjut dikatakan, pilihan yang dihadapkan pada kita adalah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah berjalan dan bekerja dengan beberapa kelemahan dan kekurangannya. Atau dengan memakai sistem lain, kata Wahono yang secara teoritis mungkin tampak lebih baik oleh sebagian orang, namun sistem itu belum sempurna dan belum pernah dicoba.

Dalam sistem proporsional yang sudah dicoba dan dilaksanakan di Indonesia ini, GOLKAR, kata Ketua Umum tidak ragu-ragu. GOLKAR, kata Wahono berkeyakinan, bahwa sistem yang kita anut sekarang adalah yang terbaik, bagi perkembangan dan pengisian kehidupan demokrasi didasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Sedangkan, kata Ketua Umum untuk merobah, sistem yang sekarang ini diperlukan proses konsensus nasional baru, yang diperkirakan akan dapat memakan waktu yang cukup lama pula. Kita ketahui, lanjut Ketua Umum, sistem distrik dulu sudah pernah diajukan sebagai salah satu alternatip. Dan hasil konsensus nasional ketika itu, melalui proses yang cukup panjang, dan akhirnya disepakati sistem proporsional dan ditetapkan dalam Undang Undang Pemilu No 15 tahun 1969.

Karenanya, kata Ketua Umum GOLKAR melihat bahwa pemikiran kembali tentang sistem Pemilu alternatip, bukan pada tempatnya dewasa ini. Sementara itu adalah kewajiban kita untuk mentaati secara konsekwen konsensus nasional selama ini, karena memang kita yakini, bahwa sistem proporsional ini merupakan yang terbaik. Sejauh ini sistem proporsional yang kita laksanakan selama empat kali Pemilu, telah berhasil mengembangkan suasana kehidupan politik

Sistem proporsional sudah memenuhi kebutuhan

Wahono

yang stabil dan dinamis.

Namun, Wahono juga mengakui, bahwa mungkin saja sistem proporsional ini memang mengandung berbagai kelemahan. Tetapi GOLKAR yakin, semua kelemahan-kelemahan itu berangsur-angsur akan dapat diatasi melalui proses pencalonan dan persiapan Pemilu yang secara kwalitatip lebih baik. "Justru disinilah salah satu tantangan perjuangan kita, yaitu untuk membangun budaya politik yang berdasarkan kesepakatan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," tegas Wahono.

Sedangkan masalah lain yang men jadi titik perhatian Ketua Umum GOLKAR adalah masalah keterbukaan. Masalah keterbukaan ini, kata Ketua Umum GOLKAR tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena masalah keterbukaan ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dalam Orde Baru.

Kemudian Ketua Umum GOLKAR menguraikan secara singkat tentang keterbukaan ini. Sebagaimana dikatakan, bahwa semenjak dimulainya pembangunan dalam Orde Baru, keterbukaan merupakan unsur pendukung perencanaan dan pelaksanaan dengan secara konsekwen melibatkan masyarakat banyak didalamnya. "Kami berulang kali mengungkapkan hal ini karena sesuai dengan semangat hasil MUNAS IV GOLKAR," kata Ketua Umum.

Selanjutnya, Ketua Umum berpendapat, bahwa masalah keterbukaan ini tidak perlu lagi terlalu banyak dibicarakan ataupun didifinisikan lagi, apalagi dijadikan bahan polemik. Yang penting sekarang adalah, lanjut

Digitized by Google

Ketua Umum, pengisiannya yang diabadikan kepada kelanjutan pembangunan kita. Kemudian Ketua Umum menyerukan kepada kader-kader GOLKAR di seluruh jajarannya, agar memahami sedalam-dalamnya fungsinya sebagai pengemban cita-cita perjuangan GOLKAR, yang pada dasarnya adalah penjabaran cita-cita bangsa Indonesia.

Menyinggung tentang masalah yang akhir-akhir ini muncul di berbagai koran, yaitu mengenai adanya ungkapan bahwa DPR tidak berani dan tidak mempergunakan hak-haknya, ditegaskan oleh Ketua Umum, bahwa FKP di DPR sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan mengungkapkan masalah yang perlu dikemukakan secara konstruktip dan positip sesuai dengan pengarahan DPP GOLKAR. Bahwasanya FKP tidak mendorong DPR untuk lebih "berani" dan mempergunakan hak-haknya (hak angket, hak amandemen dan yang lainnya) adalah atas pertimbangan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. "Kami berpendapat bahwa langkah-langkah pembangunan yang semakin mantap sekarang ini tidak perlu diganggu dengan hal-hal yang semacam itu," ujar Ketua Umum.

Sehubungan dengan hal itu, Ketua Umum menghimbau kepada kader-kader GOLKAR di legislatip, maupun dimana dia berada untuk lebih giat bekerja, bersikap lugas dan profesional dalam mengamalkan darma bhaktinya kepada negara.

"Kader-kader GOLKAR tidak ada yang takut dan tidak perlu ragu-ragu dalam melaksanakan seluruh amanat MUNAS IV GOLKAR," tegas Ketua Umum.

Selain itu, Ketua Umum GOLKAR juga menghimbau kepada seluruh pimpinan GOLKAR agar memberikan iklim dan suasana serta dorongan agar budaya ini berkembang demi suksesnya pembangunan bangsa ini. Tidak ada kader GOLKAR yang takut di recall, ataupun perlu takut di recall, karena pimpinan GOLKAR tidak akan merecall siapapun dari jabatan organisasinya, selama yang bersangkutan melaksanakan amanat MUNAS GOLKAR secara konsekwen.

Demikian pula, lanjut Ketua Umum, dengan kader-kader GOLKAR yang menjabat sebagai eksekutip, agar betul dan secara sungguh-sungguh melaksanakan misinya untuk melaksanakan Panca Krida Kabinet Pembangunan V, yang pada dasarnya adalah mengayomi kepentingan rakyat banyak.

Semangat yang sama inilah, kata Ketua Umum, yaitu semangat Ikrar "Panca Bhakti" yang dituntut dari semua kader GOLKAR. Karena pada pribadi masing-masing kader itulah tergantung kesuksesan dari perjuangan GOLKAR.☐ (BM)

Rakernas KNPI Ke-II di Timor Timur

Wilayah Timor Timur merupakan wilayah yang mempunyai daya tarik dan selalu menjadi sorotan mata dunia internasional dan perhatian bangsa Indonesia, kendatipun bumi ini baru merasakan arti kemerdekaannya dalam usia 13 tahun. Menginjak era kemerdekaannya ini, Timor Timur mendambakan suatu pemolesan dalam bidang pembangunan. Baik bidang pembangunan phisik maupun bidang pembangunan manusia seutuhnya.

Memandang penting atas kehadiran wilayah propinsi termuda ini, generasi muda khususnya yang terorganisir dalam suatu wadah pembinaan generasi muda dengan melakukan aktivitas organisasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat Timor Timur, dan dapat diambil hikmahnya sebagai modal dasar dalam gerak pembangunan daerah melalui pemikiran-pemikiran baru, konsepsi baru dan nuansa baru.

Gerak langkah ini terbukti setelah AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) membentuk kepengurusan DPD Tingkat I Timor Timur pada 27 Juni 1989 dan kemudian DPP KNPI (Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap pemolesan bidang pembangunan di wilayah ini, terpanggil untuk memusatkan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Dilli Timor Timur selama tiga hari atau tepatnya dari 27-29 Juli yang lalu.

Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno dalam sambutan tertulisnya menilai, pemilihan kota Dilli sebagai pusat kegiatan bagi berkumpulnya para pemuda Indonesia yang tergabung dalam organisasi KNPI saat ini, adalah suatu langkah yang sangat tepat baik dalam skala nasional, regional maupun secara global. Secara Nasional langkah KNPI ini dapat digunakan sebagai upaya untuk lebih mempertinggi semangat persatuan dan kesatuan generasi muda Timor Timur pada khususnya dan generasi muda Indonesia pada umumnya. Sedangkan secara regional dan global, kegiatan ini dapat digunakan sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Timor Timur dengan segala kehidupannya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Apalagi KNPI sejak kelahiran dan keberadaannya sebagai wadah pemuda telah memiliki serta menunjukkan suatu kesadaran dan perhatian yang sangat mendasar terhadap perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya untuk bersama-sama menyingsingkan lengan baju, mempunyai visi ke depan dengan penuh optimisme. Oleh karena itu, kata Try Sutrisno, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional melalui gerak pembangunan nasional yang telah memasuki Pelita V sebagai tahapan yang sangat menentukan bagi kelangsungan dan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya. Terutama dalam memasuki era tinggal landas pada tahun 1994, maka diperlukan adanya stabilitas nasional yang kokoh, mantap, dinamis dan benar-benar mampu mengatasi setiap bentuk ancaman yang timbul di permukaan. Untuk menjamin dan meningkatkan kondisi stabilitas nasional yang sedemikian ini, maka diperlukan upaya secara serentak dan bahu membahu dari segenap rakyat Indonesia secara keseluruhan termasuk unsur-unsur generasi mudanya. Sebab, para generasi muda atau pemuda sebagai inti kekuatan bangsa hendaknya dapat memberikan dan menunjukkan peranannya secara aktif sebagai perwujudan dari rasa cinta dan tanggung jawabnya kepada negara dan bangsa demi kehidupan masa depan bangsa dan negaranya.

"Untuk itu kita semua perlu terus memantau dan mewaspadai setiap ge-

Digitized by Google

lagat perkembangan situasi yang terjadi pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan," pesannya.

Kearah mana KNPI bergerak

Seiring dengan pengarahan Try Sutrisno ini, Gubernur Timor Timur Ir. Mario Viegas Carrascalao menyambung, bahwa upaya dan usaha membangun secara terus menerus untuk mengisi kemerdekaan ini adalah merupakan suatu perwujudan tekad kita untuk bersama-sama memikul tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara. Dalam gerak maju itu harus terkandung keberanian mengadakan koreksi terhadap kekeliruan di masa lalu dan mengadakan pembaharuan guna memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan zaman yang terus berubah dan bertambah maju. Dengan demikian, pengurus KNPI perlu mengintrospeksi ke dalam tubuh KNPI sendiri untuk merenungkan kembali sedalam-dalamnya apa yang telah dilakukan KNPI di masa lalu sekaligus dapat mengetahui seberapa jauh pengabdian KNPI di dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini dan kearah mana KNPI akan bergerak selanjutnya.

Pada sisi lain, sejarah telah membuktikan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan, KNPI telah ikut aktif menciptakan stabilitas yang dinamis di dalam masyarakat bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya dan mampu melaksanakan serta mengembangkan sistim demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945. Kelahiran KNPI ini, tambahnya, jelas menunjukkan hal yang sangat mendasar dan menjadi ciri KNPI — yaitu KNPI lahir dan tumbuh untuk mempertahankan dan mengamankan Pancasila, menegakkan kehidupan yang demokratis, konstitusional dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di samping ikut menggerakkan pembangunan melalui karya-karya nyata.

Seperti halnya sambutan Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno dan Gubernur Ir. Mario Viegas Carrascalao, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Ir. Akbar Tanjung pun mengharapkan agar KNPI sebagai organisasi yang lahir dalam periode Orde Baru tidak melepaskan diri dari cita-cita, tekad dan komitmen Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sekaligus melaksanakan pembangunan serta pembaharuan di segala bidang untuk mengisi kemerdekaan sebagai pengamalan Pancasila. Adapun kesempatan berakernas ini supaya digunakan untuk melakukan konsolidasi sebagai pengkajian ulang terhadap pelaksanaan berbagai program umum KNPI yang intinya pengembangan dan peningkatan komunikasi, pengembangan dan pemantapan partisipasi, pembinaan dan pemantapan organisasi serta pemantapan dan peningkatan kaderisasi.

Brigade Pembangunan KNPI

Akbar Tanjung juga menekankan, bahwa posisi Brigade Pembangunan yang berada di tingkat kecamatan perlu mendapatkan perhatian secara mendalam dan khusus. Karena posisi mereka ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya program KNPI. Brigade Pembangunan KNPI sebagai satuan pelaksana program KNPI merupakan ujung tombak KNPI di tengah masyarakat. Namun, katanya, peranan KNPI di mata masyarakat masih jauh ketinggalan dibandingkan peranan karang taruna, PKK dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Untuk itu, KNPI perlu mengadakan pendekatan yang lebih supel dan luwes agar lembaga-lembaga tersebut dapat mengadakan kerjasama dalam memecahkan permasalahan generasi muda. Baik di kecamatan maupun di desa. Secara khusus, KNPI dengan modal sepuluh departemen dan empat lembaganya lebih serius dalam menangani program yang disusunnya sehingga departemen-departemen yang ada itu mampu memiliki daya guna dan mencapai hasil guna yang tepat dengan program yang bersifat strategis, mendasar dan berkesinambungan.

Juga KNPI harus tanggap terhadap berbagai gejala yang timbul di pedesaan. Misalnya, masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang masih belum merata antar daerah Jawa dan luar Jawa. Bersamaan dengan itu, gejala-gejala yang timbul itu adalah kekurangan gizi, tempat tinggal yang belum memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan melek huruf, tingginya mobilitas, banyaknya pengangguran, tingkat pendapatan yang rendah, semakin menciutnya luas lahan pertanian dan sebagainya. Menghadapi tantangan ini, KNPI harus aktif mensukseskan program Sarjana Penggerak Pembangunan Desa (SP3) sehingga secara tidak langsung kader-kader KNPI terlibat dalam upaya memodernisir daerah pedesaan.

Rakernas II KNPI yang diikuti oleh Ketua DPD Tingkat I seluruh Indonesia dan pengurus DPP KNPI ditutup oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan LB Moerdani. Pada penutupan ini LB Moerdani mengajak seluruh fungsionaris KNPI beserta kader-kader KNPI lebih semangat dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas yang bersifat positif serta strategis guna menyongsong era tinggal landas.

Menhankam mengakui, dengan adanya perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi maka yang perlu dipikirkan bersama terutama dalam rangka pembinaan pemuda-pemuda Indonesia, adalah kewaspadaan kita dalam mempertahankan sistem nilai dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sistem nilai operasional boleh disesuaikan dengan situasi dan kemajuan zaman. Tapi sistem nilai dasar yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh berubah. Hal ini yang perlu mendapatkan pemikiran secara konsepsional dalam rangka melaksanakan program pembinaan pemuda Indonesia. Presiden Soeharto pun kepada Menpora telah mengemukakan bahwa perlu ada usaha-usaha dari semua yang berkaitan dengan pembinaan pemuda supaya dapat menciptakan suasana kebutuhan komunikasi dalam penalaran dan pemahaman. Sehingga para pemuda dapat memahami sepenuhnya konsepsi-konsepsi dari pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Kesempatan penalaran yang sewajarnya perlu diberikan agar dapat memahami dengan sepenuhnya pemikiran yang sedang berkembang dalam pembinaan bangsa serta sanggup untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Momentum ini perlu diciptakan dan dipergunakan dengan baik oleh KNPI dalam mengisi program-programnya yang langsung dapat menyentuh kepentingan pemuda.

"Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa hanya pemuda yang berkualitas dan mampu berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara sajalah yang akan menjadi harapan bangsa. Di luar itu hanyalah merupakan beban bangsa. Oleh karenanya, atribut yang paling tepat bagi KNPI bukanlah ditunjukkan melalui jaketnya, melainkan melalui idealisme dan perbuatannya bagi pemuda, bangsa dan negara," tegas LB Moerdani di depan peserta Rakernas II KNPI.☐DT

Digitized by Google

GOLKAR Pembela dan Pengamal Koperasi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Wahono, menegaskan bahwa GOLKAR tetap sebagai pembela dan pengamal koperasi. Baik koperasi sebagai gerakan maupun sebagai badan usaha. Karena GOLKAR sadar, bahwa koperasi adalah merupakan amanat konstitusi UUD 1945 yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, ketika memberikan pengarahannya pada Rapat Anggota Tahunan 1989 Koperasi Fungsional DPP GOLKAR "Karya Kita" di Jakarta.

Sikap GOLKAR ini menurut Wahono adalah merupakan realisasi dari salah satu Ikrar Panca Bhakti GOLKAR, tandasnya.

Menilai ukuran keberhasilan suatu koperasi, Wahono mengatakan keberhasilan suatu koperasi terletak sejauh mana koperasi dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar anggotanya terlayani dan manajemennya tertata dengan baik, "bukan pada volume sisa hasil usaha (SHU) dan bukan hanya pada omset usaha dan pelayanan masyarakat non anggota", ujar Wahono yang mengaku sejak usia muda telah menghayati dan merasakan manfaat berkoperasi, dan selama menjabat sebagai Gubernur telah banyak membina dan mengembangkan perkoperasian, khususnya di Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui, Koperasi "Karya Kita" yang dikelola oleh karyawan sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, saat ini baru mempunyai anggota 118 orang, yang diantaranya adalah pengurus dan fungsionaris DPP GOLKAR. Sedangkan kegiatan usahanya baru meliputi mengembangkan jenis usaha simpan pinjam. Dan saat ini sedang merintis kegiatan bidang usaha konsumsi, pertokoan dan jasa.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, dalam pesannya mengatakan, koperasi Karya Kita yang selama ini hanya bergerak pada usaha simpan pinjam itu, hendaknya dikembangkan pada jenis-jenis usaha lain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari para anggotanya", dan "dapat memenuhi kebutuhan, penyediaan barang-barang yang dibutuhkan bagi kegiatan GOLKAR". Dengan demikian koperasi Karya Kita lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya dalam arti luas. Lebih jauh Ketua Umum mengemukakan, bila perlu mereka ditarik untuk menjadi anggota agar memperjelas hubungan dengan koperasi Karya Kita.

Untuk itu, Wahono mengingatkan, agar koperasi Karya Kita terus meningkatkan ketatalaksanaan (management) koperasi. Karena, bidang ini membutuhkan ketrampilan berperilaku bisnis, administrasi dan pembukuan yang baik, tanggap sasmita serta tepat memanfaatkan momentum.

Akhirnya Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono berpesan agar Koperasi Karya Kita yang berada di lingkungan DPP GOLKAR ini untuk dimanfaatkan secara maksimal, dengan motto "mulat sariro hangroso wani", mawas diri, berbenah diri, dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan yang lebih baik di masa mendatang.

Pengarahan Ketua Umum ini dihadiri oleh Drs Imam Sudarwo, H. Tarmoedji, Rachmat Witoelar, Freddy Latumahina, Iman Taufik, Agus Tagor serta dihadiri pejabat Departemen Koperasi Jakarta Barat yang turut memberikan sambutan.☐ (WT)

Perjalanan Dua Hari di Jambi

Hidup GOLKAR, hidup Wahono, terdengar berulang-ulang ketika Ketua Umum GOLKAR Wahono, memasuki ruangan VIP room, Bandara Sultan Taha, Jambi, awal Agustus lalu. Yel-yel tersebut berasal dari kader-kader muda GOLKAR yang menjemput kedatangan Ketua Umum Golkar.

Kedatangan Ketua Umum ke Propinsi Jambi untuk memenuhi undangan propinsi tersebut guna menyaksikan sekaligus membuka pelaksanaan penyegaran kader, Rapat Kerja Teknis (Rakernis). Kunjungan selama dua hari di propinsi itu, Ketua Umum juga melihat dari dekat pelaksanaan pembangunan dan berbagai masalah di propinsi tersebut.

Kunjungan kerja di propinsi Jambi yang oleh Ketua Umum dilukiskan sebagai kota "Jaya, Aman, Makmur, Bersih dan Beriman itu cukup padat. Hari pertama dari tiga acara yang menjadi perhatiannya Wahono. Selaku Irjenbang, Wahono melihat dari dekat pelaksanaan pembangunan jembatan Sei Batanghari yang dalam tarap penyelesaian di kabupaten Batanghari. Konon, awal Oktober atau akhir September ini, jembatan tersebut akan diresmikan penggunaannya. Lebih jelasnya, tentang jembatan Sei Batanghari, baca "Sei Batanghari Jembatan Terpanjang".

Di lokasi jembatan yang akan rampung pembangunannya itu, Wahono menerima penjelasan, serta menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut. Setelah itu atas nama Ketua Umum GOLKAR Wahono melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Kuala Tungkal untuk melihat dari dekat lokasi kebakaran.

Bupati Kuala Tangkal, Slamet Barus dalam laporannya kepada Ketua Umum secara rinci mengungkapkan peristiwa kebakaran tersebut. Sebagaimana diungkapkan, kebakaran yang terjadi menjelang lebaran lalu itu, telah menelan banyak korban materi. Namun, tidak dijelaskan berapa kerugian yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. Dari data yang dilaporkan, akibat amukan si jago merah ini, 483 dari bangunan yang terletak di atas tanah 8 hektar ini habis dimakan api. Di dalamnya termasuk 3 sarana tem-

Digitized by Google

pat ibadah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum GOLKAR dihadapan masyarakat Kuala Tungkal dan kader-kader GOLKAR yang hadir itu mengingatkan, bahwa bencana alam yang terjadi dimuka bumi ini bukan saja karena alam, tetapi juga karena ulah manusia. Seperti penggundulan hutan dan yang lainnya. Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut kata Ketua Umum, diperlukan pencegahan secara prefentip.

Guna meringankan beban akibat musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten yang lokasinya berdekatan dengan negara tetangga itu, Ketua Umum menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp 7,5 juta. "Terima kasih. Sumbangan tersebut, akan kami pergunakan secepatnya untuk mengatasi kembali yang diakibatkan oleh kebakaran itu", ujar Slamet Barus, Bupati Kuala Tungkal.

Setelah melihat dan mendengarkan peristiwa kebakaran itu, Ketua Umum kemudian melanjutkan perjalanannya untuk melihat dan bertatap muka dengan kader-kader GOLKAR, tokoh-tokoh masyarakat Tingkat II Kuala Tungkal, kabupaten Tanjung Jabung. Di tempat tersebut, Ketua Umum menerima laporan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan GOLKAR di daerah tersebut yang disampaikan oleh Ketua DPDnya. Diantaranya meliputi pelaksanaan Pemilu 1987, jumlah kader GOLKAR, sampai kader-kader GOLKAR yang telah menerima KAG (Kartu Anggota GOLKAR).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum selain memberikan sambutan, pengarahan, juga mengadakan dialog kepada warga GOLKAR setempat. Kesempatan yang berharga ini tidak dilewatkan oleh kader GOLKAR setempat untuk menanyakan berbagai hal yang selama ini menjadi unek-uneknya. Dari tiga penanya — pertanyaannya hampir senada — yaitu meminta perhatian agar berbagai sarana yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut untuk diperhatikan. Pertama, meminta pembangunan prasarana jalan antara Kodya Jambi dan Kabupaten Kuala Tungkal yang sampai saat ini masih dalam pembangunan untuk secepatnya dapat direalisasikan.

Pertanyaan berikutnya adalah meminta, agar Kabupaten Kuala Tungkal dapat menerima air bersih. Daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keperluan airnya menganualkan dari tadah hujan. Sedangkan pertanyaan yang lainnya juga demikian, meminta kesediaan pemerintah untuk membangunnya stasion relly. Sebagaimana diketahui, daerah Kuala Tungkal, untuk dapat menikmati siaran TV itu masih dari negara tetangga kita.

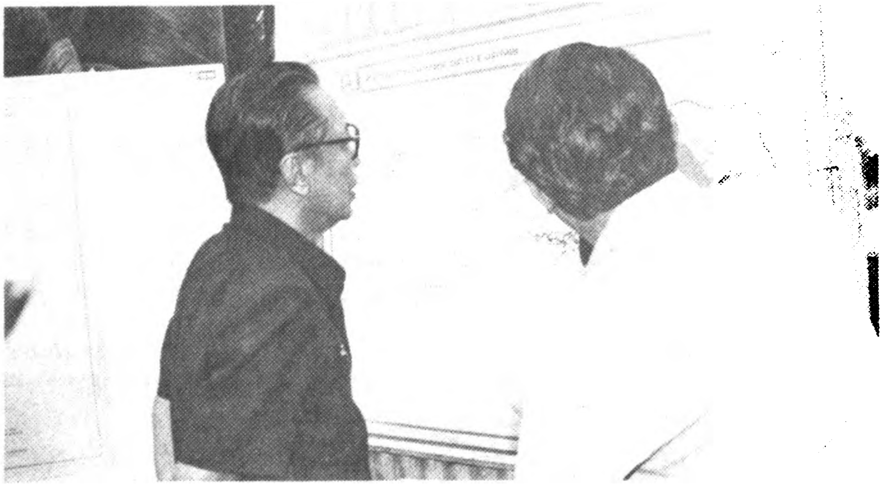

Terima penjelasan proyek Sei Batanghari

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Umum GOLKAR meminta agar aspirasi itu disampaikan lebih dahulu kepada pemerintah daerah. Namun, Ketua Umum GOLKAR itu juga berjanji untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada yang berwenang menangani. Khusus mengenai permintaan, stasion relly, Ketua Umum GOLKAR akan mencoba untuk menyampaikan kepada Menteri Penerangan.

Medannya Berat

Kunjungan kerja dua hari di Propinsi Jambi, khususnya perjalanan menuju Kabupaten Kuala Tungkal merupakan yang paling melelahkan. Sebab, jarak antara kodya Jambi dengan Kabupaten Kuala Tungkal — masih dalam propinsi Jambi — tidak mulus benar. Untuk mencapai daerah itu dengan kendaraan darat memerlukan waktu sekitar 4 jam. Padahal jarak antara Kodya Jambi dan Kabupaten Kuala Tungkal lebih kurang 120 km.

Lamanya waktu mencapai Kabupaten tersebut, selain harus melewati hutan, banyak kelokkan dan kondisi jalannya sebagian besar masih belum teraspal. Dari jembatan Sei Batanghari sampai lokasi jaraknya lebih kurang 100 km. Dari panjang jalan sejauh itu, yang sudah teraspal sekitar 40 km. Selebihnya masih dalam tarap penyelesaian dan sebagian lagi masih berbatu.

Perjalanan panjang seharian penuh ini memang terasa melelahkan. Namun, lelah itu terasa hilang tatkala, malam harinya disuguhkan kesenian daerah. Berupa tari-tarian, lagu-lagu daerah serta mode-mode pakaian yang semuanya khas daerah Jambi dan dibawakan oleh gadis-gadis dan remaja-remaja Jambi yang ayu dan ganteng. Dan yang menambah suasana semarak, tatkala istri Wakil Gubernur menyumbangkan dua buah lagu diantaranya *Tuhan* dan *Kudaku lari* dengan suara yang merdu dan menawan.

Sedangkan hari kedua, yang merupakan hari terakhir dari kunjungan Ketua Umum di Jambi ini tidak kalah padatnya. Namun, semua kegiatan itu berada di kota Jambi. Acara pertama, mengadakan pertemuan dengan keluarga besar GOLKAR yang dihadiri oleh Wantim, Wanhat Tingkat I dan Tingkat II se Jambi di kantor DPD Tingkat II Jambi.

Sebagaimana biasa, setiap acara didahului dengan sambutan yang disampaikan Ketua DPD. Dan kemudian disambung dengan sambutan Ketua Umum dan sekaligus pengarahan. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum menyinggung berbagai hal. Misalnya langkah-langkah dan program untuk memenangkan Pemilu 1992.

Dalam berbagai kegiatan dan operasionalnya, kata Ketua Umum memerlukan dukungan dari berbagai faktor penunjang, lebih khusus lagi dari jajaran organisasi. Kita perlu juga memperhitungkan faktor ekstern yang mempengaruhi, tegas Ketua Umum.

Dalam hubungan ini, lanjutnya Ketua Umum percaya semua DPD telah mempunyai program umum sebagai

Digitized by Google

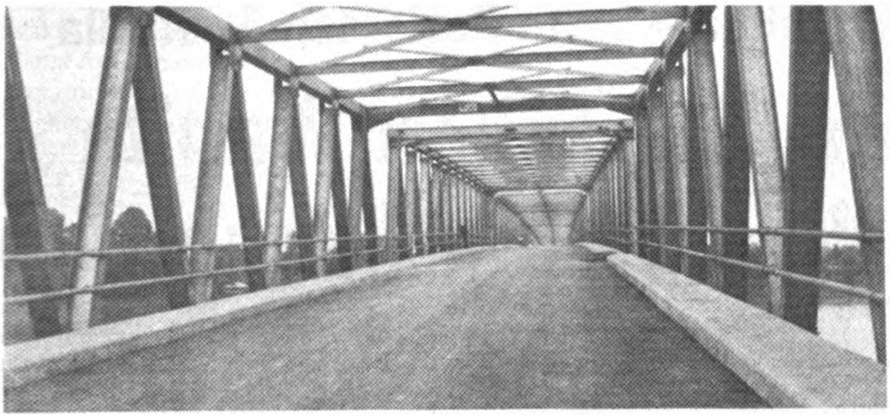

Jembatan Sei Batanghari

hasil Musda yang lalu dan telah pula mempunyai rencana pelaksanaannya, yang merupakan rincian lebih lanjut dari program umum tersebut, kata Ketua Umum.

Setelah selesai mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh GOLKAR setempat Ketua Umum kemudian melanjutkan kunjungannya ke Balai Pemuda dan Kebudayaan Jambi. Di tempat tersebut bisa dikatakan merupakan puncak dari kunjungan kerja. Sebab, ditempat inilah Ketua Umum menghadiri pembukaan penjelasan tentang penyegaran kader dan Rakernis, Bapekada Tingkat I dengan Bapekada Tingkat II dan sekaligus membukanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum menyinggung berbagai masalah, misalnya tentang keterbukaan dan sistim pelaksanaan Pemilu (baca Sikap GOLKAR Tentang Sistim Pemilu). Namun, yang lebih mengharukan dalam acara tersebut, ketika Ketua Dewan Pertimbangan yang juga Gubernur Jambi itu memberikan kata sambutan. Dalam sambutan yang singkat itu digunakan pula oleh H. Masjchun Sofwan untuk berpamitan kepada masyarakat Jambi, khususnya kader-kader GOLKAR. Sebab, tidak lama lagi jabatan yang dipegangnya sekarang akan berakhir.

Namun, dalam suasana yang mengharukan itu, Ketua Umum GOLKAR Wahono dalam sambutannya yang sekaligus menjawab uluran perpisahan ini, tetap meminta H. Masjchun Sofwan, kendati nanti tidak lagi menempati jabatan tersebut untuk melantik penggantinya.

Acara yang dihadiri oleh kader-kader GOLKAR se Jambi ini, diakhiri dengan penyerahan cindra mata oleh Ketua Umum kepada kader-kader GOLKAR setempat.

Sedangkan acara berikutnya — setelah selesai mengadakan pertemuan dengan kader-kader GOLKAR di gedung Pemuda — perjalanan dinas tersebut kemudian dilanjutkan untuk melihat dari dekat Sekolah Luar Biasa (SLB) Prof. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH. Dan setelah itu dilanjutkan menuju kelurahan Lebak Bandung untuk bertatap muka dengan kader-kader GOLKAR setempat. Dan ini adalah serangkaian kunjungan kerja Ketua Umum GOLKAR di Jambi selama dua hari. Kunjungan kerja yang padat dan penuh makna ini, Ketua Umum didampingi oleh Ibu Mientarsih S. Wahono, Ir. Rachmat Witoelar, Ir. H Usman Hasan, Drs Freddy Latumahina, Sri Redjeki, SH dan Drs. Irsyad Sudiro.☐ (BM)

Sei Batanghari Jembatan Terpanjang

Di setiap daerah biasanya ada sesuatu yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. Di Palembang, misalnya, Jembatan Ampera, telah menjadi lambang dan simbol kota tersebut dan sekaligus menjadi kebanggaannya. Di Jakarta demikian pula, yaitu berupa tugu Monas, tentu masih banyak daerah-daerah lain yang mempunyai kebanggaan apakah itu berupa monumen, bangunan dan yang lainnya.

Sebentar lagi, perbendaharaan daerah yang mempunyai kebanggaan akan bertambah lagi, yaitu Jambi. Di Propinsi tersebut sebuah jembatan terpanjang tidak lama lagi akan dioperasionalkan penggunaannya. Tentu, jembatan ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Jambi, seperti juga daerah-daerah lain.

Jembatan yang akan mulai dioperasionalkan sekitar akhir September atau awal Oktober tahun ini, merupakan sebuah jembatan terpanjang di Indonesia nantinya. Dan panjang jembatan yang menghubungkan sungai Batanghari itu panjangnya 508 m. Sedangkan alokasi yang digunakan untuk membangun sebuah jembatan itu sebesar Rp 6.88.845.000,- itu di dapat dari tiga sumber. Pertama dari APBD (Anggaran Pendapatan Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) dan bantuan luar negeri.

Barangkali yang mengesankan dan membanggakan jembatan Sei Batanghari itu adalah, dibangun oleh tenaga-tenaga dari bangsa Indonesia. Begitu pula kontraktornya. Meskipun demikian, jembatan yang menurut rencana akan diresmikan oleh Presiden Soeharto ini, bukan tidak mengalami hambatan. Diantaranya adalah masalah pendanaan.

Dan mungkin yang paling unik dalam pelaksanaan pembangunan jembatan itu adalah sebagian sarana penunjang yang mendukung pelaksanaan pembangunan itu adalah, berupa batu. Sebagaimana diketahui, untuk menyediakan batu-batu itu, seperti yang diungkapkan pimpinan proyeknya tidak diperoleh dari wilayah Jambi, melainkan dari Merak.

Pembangunan jembatan Sei Batanghari, yang dimulai 4 tahun itu telah mendapat dukungan dan akan menjadi kebanggaan masyarakat Jambi, khususnya pemakai jalan. Dengan selesainya jembatan itu nanti, berarti sarana penunjang ekonomi akan lebih lancar.

Jembatan yang awal Agustus lalu ditinjau Irjenbang, Wahono, dan tidak lama lagi akan diresmikan itu, setidaknya akan dapat memperlancar roda perekonomian propinsi tersebut, khususnya yang berada di seberang sungai Batanghari. Selain itu, dengan adanya jembatan itu, daerah-daerah yang terletak di sebelah barat bila akan menuju ke wilayah timur akan dapat dipersingkat waktunya.☐ BM

Digitized by Google

Ny. T.S. Darsoyo Terima Wanita Parlemen Australia

Diharapkan, Sentuhan Wanita Bisa Tingkatkan Saling Pengertian

Saling memberi cinderamata

Baru-baru ini, wanita anggota Parlemen Australia mengunjungi DPP Golkar dan diterima oleh Ny. T.S. Darsoyo, Wakil Bendahara. Rombongan wanita anggota Parlemen negara tetangga yang dipimpin Ny. Patricia Gills dan didampingi Dutabesar Australia di Jakarta ini, bermaksud memperkenalkan organisasi wanita anggota parlemen dunia yang anggotanya konon telah mencapai 500 orang.

Meski wanita anggota DPR-RI belum ada yang menjadi anggota organisasi itu, namun pertemuan yang dilanjutkan dengan makan siang bersama dan pemberian cinderamata itu diliputi suasana akrab, penuh persahabatan dan menelurkan harapan bahwa wanita akan memegang peran penting dalam meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.

Setidaknya itulah yang diharapkan Ny. Darsoyo dari kunjungan mereka. ''Saya yakin, melalui sentuhan wanitanya, kedua bangsa — Australia dan Indonesia — dapat menyebarluaskan saling pengertian terutama di bidang *political will*. Ini sangat penting, karena kedua negara terletak di kawasan Asia Pasifik, kawasan yang di masa mendatang akan menjadi sangat penting bagi kehidupan dunia,'' tutur Ny. Darsoyo.

Organisasi Wanita

Pemimpin rombongan, Ny. Patricia Gills yang berasal dari negara bagian New South Wales itu, menguraikan tujuan perjalanannya ke beberapa negara, yaitu untuk mengembangkan organisasi wanita anggota Parlemen dunia yang dipimpinnya dan kini telah beranggotakan 500 lebih.

Menurut Ny. Patricia, terbentuknya organisasi itu diawali ketika Dutabesar Swedia di Australia mengundangnya ke sebuah pertemuan di Stockholm tahun 1985. Beberapa wanita anggota Parlemen negara lain juga diundang saat itu, sehingga 15 negara terwakili pada temu muka itu. Mereka berbincang-bincang tentang Non-Blok, tak ketinggalan pula Semangat Bandung. Fokusnya adalah memang mewujudkan perdamaian dunia melalui para wanita anggota parlemen se dunia.

''Sejak pertemuan Stockholm, secara rutin kami tiap tahun mengadakan pertemuan. Tahun berikutnya di Nairobi, kemudian Meksiko dan tahun lalu (1988) di Australia,'' ujarnya. Pada setiap pertemuan dipilih ketua dari negara tuan rumah. ''Kini saya menjadi ketua hingga pertemuan tahun mendatang di negara Afrika. Kalau tidak di Kenya mungkin di Zimbabwe,'' tambahnya.

Menurut Ny. Patricia, sekarang organisasi dunia itu telah berkembang pesat dengan ratusan anggota. Terbesar, katanya, Swedia yang mencapai 86 orang. Lalu 59 orang dari India, Meksiko 56 orang dan 50 dari Australia. Meski sudah banyak anggota, namun Indonesia yang banyak punya wanita anggota parlemen belum terwakili.

Untuk meningkatkan keanggotaan itulah, ia berkelana keliling dunia, termasuk Indonesia. Setelah kunjungan ini Ny. Patricia akan bertolak ke Thailand, Cina, kemudian Vietnam dan Islamabad. Karena ketua organisasi selalu dipilih dari negara penyelenggara, maka ketika tahun lalu pimpinan dipegang Meksiko, negara itu juga diminta meningkatkan keanggotaan di kalangan negara-negara Amerika Latin.

Hal Baru

Menanggapi missi yang diemban tokoh wanita parlemen Australia itu, Ny. Darsoyo menjelaskan, baginya organisasi itu masih merupakan hal yang baru. Kendati demikian, tidak berarti wanita anggota DPR Indonesia tak terwakili di dunia internasional. ''Dalam setiap pertemuan Persatuan Parlemen Dunia (*International Parliamentary Union*) kami juga terwakili, seperti dalam pertemuan tahun lalu. Namun apa yang kami lakukan masih dalam kerangka Persatuan Parlemen Dunia,'' ungkap Ny. Darsoyo yang

Digitized by Google

menambahkan, para wanita yang mewakili negaranya ke pertemuan itu dapat membicarakan masalah apapun yang positif.

Ditegaskan, dalam pertemuan Parlemen Eropa di Madrid nanti, Indonesia pun berminat ikut. Kabarnya tiap negara diminta mengirimkan tiga wanita anggota parlemen. Tapi ia belum tahu pasti, apakah Indonesia diundang, namun pihaknya sedang melobi untuk memastikan keikutsertaan itu. Mengenai organisasi wanita anggota parlemen itu, Ny. Darsoyo menyatakan akan mempelajari dahulu, perlunya keanggotaan Indonesia di dalamnya.

Menyangkut hal itu, Ny. Patricia berjanji akan mengirimkan laporan lengkap kegiatan yang telah dilakukan organisasinya serta daftar anggota yang telah ada.

Dalam pertemuan ramah tamah yang penuh diwarnai gelak tawa itu, disinggung pula berbagai hal mengenai pertemuan-pertemuan di masa lalu. Seperti pertemuan di Budapest, yang dihadiri dua kali oleh Ny. Darsoyo. Ia menjadi ingat perkenalannya dengan **Roger Franky** anggota parlemen dari Australia, yang namanya mengingatkannya pada bintang tenar AS **Roger Moore.** Anggota parlemen ini, menurut Dubes Australia tidak ikut, tapi mungkin dalam bulan Agustus akan datang. Ia kini sibuk dengan tugas-tugasnya di Majelis Rendah.

Ketika ditanyakan anggota Parlemen Ratshogi, Ny. Patricia juga mengenalnya. Ny. Darsoyo yang sangat mengenalnya ketika di Sydney, pernah dikenalkan kepada anaknya, Andrew. Yang terakhir ini kata Ny. Patricia, kini wakil ketua (*deputy*) Partai Nasional di New South Wales dan terkenal sebagai pemimpin yang baik.

Dengan bercanda Ny. Darsoyo mengingatkan, karena Andrew dikenal sebagai dokter, maka dengan kegiatannya sebagai politisi ia akan menjadi "dokter bedah politik". Kelakar itu disambut tawa kedua belah pihak. Menurut Ny. Patricia, karena dirinya mewakili New South Wales dan harus berkantor di Canberra, maka ia sering menempuh jarak 700 km, setidaknya seminggu sekali.

Pertemuan itu diakhiri dengan pemberian cinderamata dan makan siang bersama.☐ (WT)

Aszadalliyah Menimba Ilmu di GOLKAR

Lebih kurang 30 pengurus pondok pesantren Aszadalliyah, dari desa Ampel, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mendatangi kantor DPP GOLKAR untuk bertemu dengan Ketua Umum GOLKAR Wahono, belum lama ini.

Keinginan warga pondok pesantren tersebut bertemu dengan Ketua Umum GOLKAR dikandung maksud untuk menimba ilmu. Kemauan besar warga pesantren Aszadalliyah agar dapat bertemu dengan Ketua Umum disebabkan karena adanya masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pesantren tersebut. Misalnya, sekitar 30 dari 60 pengurus pondok pesantren Aszadalliyah itu merasa belum mampu untuk mengorganisir jamaahnya yang tersebar di berbagai daerah, seperti Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kuningan dan Majalengka, ujar Kyai Machmud selaku pimpinan rombongan menegaskan.

Menanggapi akan maksud pimpinan Aszadalliyah, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono mengatakan, mengingat posisi dari jamaah Aszadalliyah yang sudah sejak lama menyatakan sebagai Keluarga Besar Golongan Karya, maka sebagai fungsionaris pemuka-pemuka agama Islam, dan jamaah Aszadalliyah diharapkan dalam keorganisasiannya hendaknya dapat mengikuti ketentuan-ketentuan pembinaan keorganisasian DPD-DPD GOLKAR Tingkat I dan Tingkat II dimana jamaah itu berada. Dengan demikian kegiatan-kegiatan Keluarga Besar GOLKAR dapat dibina oleh DPD-DPD GOLKAR Tingkat I dan Tingkat II bersangkutan, tegas Ketua Umum.

Mengetahui dan menyadari bahwa jamaah Aszadalliyah bukan merupakan suatu organisasi kekuatan sosial politik, namun sebagai Keluarga Besar Golongan Karya, kata Wahono, jamaah Aszadalliyah perlu mengetahui akan sikap politik GOLKAR terhadap Agama. Sebagaimana diketahui, kata Ketua Umum, pernyataan politik GOLKAR pada Munas ke IV, antara lain menyebutkan "GOLKAR menyadari sepenuhnya, dengan sesungguhnya, pentingnya peranan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, maupun sebagai sumber aspirasi dan motivasi pembangunan moral dan spiritual masyarakat bangsa kita".

Maka, kata Ketua Umum, secara keseluruhan faham kemasyarakatan dan kenegaraan yang perlu dipadu para jamaah Aszadalliyah adalah asas Pancasila, Pedoman Kenegaraan UUD 1945 dan arah yang akan dicapai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila sesuai dengan GBHN. "Ini merupakan ujud ibadah sosial kemasyarakatan dan kenegaraan yang hendak ditingkatkan dan dimantapkan dalam Pelita V. Dan juga suksesnya Pemilu 1992 juga merupakan suatu ibadah," kata Wahono.

Menyinggung tentang program GOLKAR yang terangkum dalam Tri

Digitized by Google

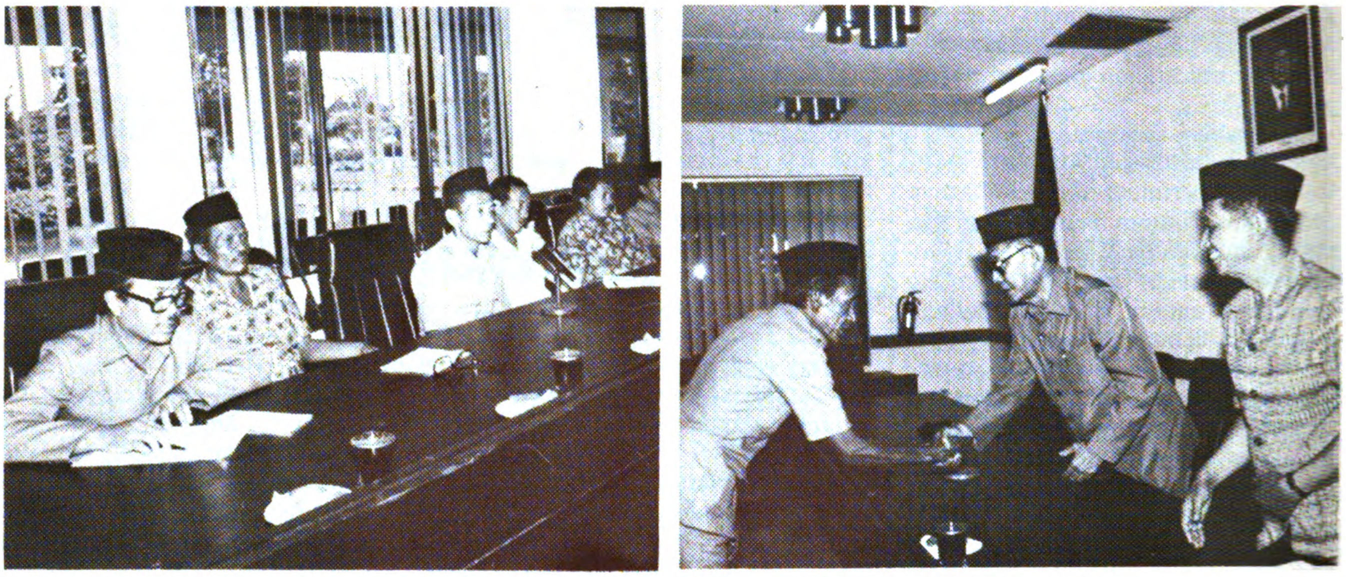

Warga pondok pesantren Aszadalliyah diterima Ketua Umum

Sukses, Ketua Umum berpesan pada jamaah Aszadalliyah, terutama para kader fungsional pemuka agama Islam, untuk ikut serta menjamin persatuan, demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memantapkan persatuan dan kesatuan sebagai wawasan nusantara, memelihara stabilitas nasional dan meningkatkan pembangunan yang bertahap dan berkesinambungan.

Ketua Umum GOLKAR Wahono, dalam pesannya menegaskan agar warga jamaah Aszadalliyah selain untuk mengkonsolidasikan organisasinya, juga diminta turut serta secara aktif membina, menggalang generasi muda secara terus menerus demi suksesnya pemilu 1992 yang akan datang.

Menyinggung tentang sukses pelita V, Ketua Umum menerangkan, bahwa dalam kurun waktu lima tahun ini pembangunan kita masih bertumpu pada asas Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menjamin stabilitas nasional. Sedang kegiatannya meliputi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Kesemuanya itu ditujukan untuk kesejahteraan dan keseimbangan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal mana juga merupakan perintah agama, sebagaimana yang sering kita dengar dengan sebutan ''hablum minaloh, hablum minanas'', ujar Wahono mengakhiri pertemuan tersebut.

Turut mendampingi Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, dalam kesempatan itu adalah Ketua H Tarmoedji, Wakil Sekjen Andi Mochtar, dan Ketua Departemen Kerohanian, H. Umar Mansyur.☐ (WT)

DIREKSI BESERTA KARYAWAN
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)

MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 — 17 AGUSTUS 1989

Alamat: Tanjung Enim — Sumatera Selatan, Phone: (0711) 24333; Telex: 27376 TABA IA;
Fax.: (0731) 22543; (0731) 22546

Digitized by Google

Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial

Jalan Taman Lawang 2 • Telp. 330579 - 334709 - 334754 • Jakarta 10310

Mengucapkan

Dirgahayu Republik Indonesia

Terima Kasih sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada anda, atas segala kasih sayang dan tulus yang anda tumpahkan kepada sesama manusia yang kekurangan/ menderita; dan kepada usaha-usaha pembinaan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik anda dan senantiasa menumbuhkan pada diri kita rasa persaudaraan dan kasih sayang sesama manusia.

Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial menghimpun sumbangan anda melalui BSDSB serta menyalurkannya kepada yang membutuhkan bantuan.

Digitized by Google

Kerjasama DPP GOLKAR Dengan Prasetia Mulya

Kalau ingin sukses dan besar, "harus rajin, kerja keras, hemat dan belajar dari pengalaman," ungkapan sederhana ini terlontar dari Soedono Salim, yang lebih dikenal Liem Sioe Liong, salah seorang pengusaha terkemuka ketika memberikan sambutannya dalam acara penandatanganan kerjasama antara DPP GOLKAR dengan Institut manajemen Prasetia Mulya (IMPM) di Kantor DPP GOLKAR Jakarta pekan lalu.

Kepercayaan dari DPP GOLKAR dengan mengajak pihak Prasetia Mulya untuk mendidik pengusaha kecil ini merupakan suatu penghormatan besar, ujar Soedono Salim yang dalam hal ini selaku Ketua Badan Penyantun Yayasan Prasetia Mulya. Usaha demikian ini, katanya lebih lanjut, cocok dengan tujuan dari Prasetia Mulya yaitu membantu pengusaha kecil. Tapi bantuan tidak berbentuk uang tapi kepintaran. Jadi pengusaha-pengusaha kecil sesudah belajar di IMPM bidang pendidikan manajemen bisnis terapan ini diharapkan menjadi pintar dan jadi besar, tuturnya.

Orang berusaha harus dari kecil dulu dan belajar terus supaya lama-lama jadi besar. Besar bukan karena fasilitas, tapi berkat keuletan, kerja keras, efisien dan jujur. Fasilitas pemerintah sifatnya hanya menunjang. "Kalau masih kecil memang harus dibantu sedikit-sedikit, tetapi kalau sudah besar tidak usah dibantu lagi," kata pengusaha terkemuka ini.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono mengatakan, GOLKAR sebagai pelopor dan pembaharu pembangunan seyogyanya mampu berperan sebagai mesin penggerak pembangunan disegala bidang kehidupan. Hal ini harus dimulai pada dirinya sendiri dengan melembagakan dan membudayakan kehidupan konstitusional, suasana demokratis dan bertindak menurut ketentuan hukum atas dasar peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan pemikiran ini, kata Wahono, pihaknya melihat strategisnya perjanjian yang disepakati ini sebagai langkah untuk meningkatkan profesionalisme di jajaran kader-kader GOLKAR. Dengan demikian akhirnya tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan lebih baik lagi. "Saya yakin bahwa kader-kader yang meningkatkan keahlian manajemennya di Prasetia Mulya ini betul-betul akan mampu menampilkan dirinya sebagai pelopor bagi lingkungannya," kata Wahono.

Menurut koordinator program pendidikan manajemen bisnis terapan DPP GOLKAR, Widjanarko Poespoyo MA, dalam laporannya mengemukakan, sekitar 2.160 orang kader GOLKAR, mulai tanggal 21 Agustus mendatang akan mendapat pendidikan manajemen praktis. Kader-kader GOLKAR yang akan mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan itu adalah bagi mereka yang tergolong pengusaha lemah dan pengelola koperasi yang mempunyai nomor pokok anggota GOLKAR yang berasal dari 27 propinsi. Dalam setiap kelas pesertanya diatas 30 orang, sehingga penyelenggaraan pendidikan akan berlangsung 72 kali.

Sebagai angkatan pertama, seluruhnya diambil dari lima wilayah DKI Jakarta saja terdapat 118 sentra industri kecil dan ribuan koperasi. Dari 118 sentra industri itu terdapat 8964 unit usaha dan melibatkan 37.377 tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan pendidikan manajemen praktis ini, dalam kesempatan itu juga telah dilakukan penandatanganan naskah kerjasama antara DPP GOLKAR—Institut Manajemen Prasetya Mulya, yang dilakukan oleh Ketua DPP GOLKAR Drs Imam Sudarwo dan Pjb Direktur Eksekutif IMPM, Prasasto Sudjatmiko dengan disaksikan oleh Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan Soedono Salim. Hadir dan turut memberikan sambutan dalam kesempatan itu Pimpinan Yayasan Prasetia Mulya, Yusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi.☐ (WT)

DEKOPIN Melapor ke DPP GOLKAR

Pekan lalu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Wahono, didampingi Ketua yang membidangi ekonomi Drs. Imam Sudarwo, Soegeng Widjaya, Rachmat Witoelar, Ir Usman Hasan, Dr A. Baramuli dan Ir Iman Taufik, menerima laporan Pengurus Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang terdiri Ketua Umum Dekopin Prof Dr Sri Edi Swasono dan 12 pengurus Dekopin lainnya.

Kedatangannya ke Kantor DPP GOLKAR, untuk melaporkan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan Dekopin dalam Repelita V.

Dalam laporan singkatnya, Ketua Umum Dekopin Sri Edi Swasono mengemukakan butir-butir strategi pembangunan koperasi yang mengacu pada pesan UUD 1945, yang terdiri dari sepuluh aspek acuan dasar, diantaranya; kesatu, akan memperkuat kelembagaan Dekopin, kedua penyusunan tahapan-tahapan pembinaan menuju kemandirian, ketiga ikut aktif bersama pemerintah dan DPR menangkal ditingkat makro sistim liberalistik dan kapitalistik yang masih berlaku, keempat meningkatkan kerjasama dengan gerakan-gerakan koperasi luar negeri, kelima meningkatkan kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), keenam memperkuat tegaknya pilar-pilar koperasi, ketujuh membentuk/menyusun jaringan koperasi vertikal dan horisontal, kedelapan meningkatkan kesadaran berkoperasi baik dalam kaitannya dengan ideologi negara dan cita-cita konstitusi, kesembilan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan yang kesepuluh mengadakan kerjasama seluas-luasnya dan seintensif mungkin dalam pemerintah.

Sedang Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, dalam pertemuan singkat itu hanya mengucapkan terima kasih dan selamat, tanpa memberikan pengarahan maupun petunjuknya. "Namun yang jelas GOLKAR adalah tetap sebagai pembela serta pengamal koperasi, baik koperasi sebagai gerakan maupun sebagai badan usaha", seperti yang sering dikemukakan Wahono dalam berbagai kesempatan.☐

(WT)

Digitized by Google

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
DI DEPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 16 AGUSTUS 1989

Saudara Ketua, para wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;

Hadirin yang berbahagia;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan salam Sejahtera kepada Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air semuanya, baik yang memperoleh kesempatan untuk hadir dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang semarak ini maupun yang mengikuti persidangan ini dengan penuh perhatian melalui siaran radio dan televisi.

Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan selalu mendatangkan keharuan yang sangat dalam bagi setiap bangsa yang pernah dijajah, apalagi yang terjajah selama ratusan tahun dalam puluhan generasi. Rasa haru yang sangat dalam itu lebih-lebih terasa bagi bangsa kita, yang merebut kemerdekaan ini melalui perjuangan yang sangat panjang dan dengan memberi segala bentuk pengorbanan yang dapat dibayangkan oleh manusia. Perjuangan kemerdekaan kita itu merupakan bagian dari sejarah besar umat manusia untuk membebaskan diri dari semua bentuk penindasan di muka bumi ini, karena penindasan itu berlawanan dengan martabat manusia.

Setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, seperti yang besok pagi akan kita lakukan rasa haru kita disertai dengan kebanggaan yang sangat besar. Kita adalah bangsa pejuang, yang merebut dan menegakkan serta mempertahankan kemerdekaan nasional dengan kekuatan sendiri. Pengorbanan yang diberikan dengan ikhlas oleh pendahulu-pendahulu kita tidak terbilang besarnya. Sejarah telah menunjukkan tempat-tempat pembuangan yang mengerikan, penjara-penjara yang mendirikan bulu roma, kisah-kisah kepahlawanan yang mendebarkan jantung dan riwayat penderitaan bagnsa yang panjang. Di seantero Tanah Air, kita saksikan makam-makam pahlawan tempat pembaringan abadi kusuma-kusuma bangsa: di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di desa-desa, di lembah-lembah ngarai, di lereng-lereng gunung dan di dasar-dasar laut. Di antara kita yang hidup sekarang ada yang menderita cacat tubuh demi tegaknya Kemerdekaan Nasional, ada janda-janda pejuang kemerdekaan yang dengan penuh ketabahan dan keikhlasan menghadapi perjuangan hidup.

Karena itu, setiap kali kita berada di hari-hari peringatan Kemerdekaan Nasional, kita sampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan rasa hormat yang tidak terbatas kepada semua pejuang, pendahulu-pendahulu kita, yang telah menghadap kembali kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa.

Apabila hari-hari ini, kita mengadakan perbandingan dengan peristiwa yang kita alami di masa lampau, dan juga mengadakan perbandingan dengan peristiwa-peristiwa bergolak yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa lain, maka rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberiNya nikmat suasana tenteram dan aman serta kegembiraan di seluruh Tanah Air yang indah ini. Bersamaan dengan rasa syukur itu, bangkit kesadaran kita semua untuk memanfaatkan suasana tenteram dan aman serta penuh kegembiraan tadi untuk meneguhkan kembali tekad nasional dan disiplin nasional guna membawa masyarakat, bangsa dan negara kita untuk mencapai kemajuan yang lebih besar menuju terwujudnya cita-cita nasional, cita-cita kemerdekaan kita.

Saudara Ketua yang saya hormati;

Telah lebih dari dua dasawarsa kita mengembangkan

Digitized by Google

berbagai tradisi baru di bidang politik dan kenegaraan, yang besar manfaatnya bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita selanjutnya. Salah satu dari tradisi itu ialah, paling sedikit dua kali dalam setahun, Presiden Republik ini mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan berbicara langsung dengan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Kesempatan yang pertama adalah ketika menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Dewan. Kesempatan yang kedua adalah seperti yang terjadi hari ini, ialah menyampaikan Pidato Kenegaraan menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan yang akan berlangsung pada hari berikutnya. Pada kesempatan meyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Presiden mengemukakan program nasional yang rinci untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Pada kesempatan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi, Presiden mengajak bangsa Indonesia untuk mengadakan renungan tahunan yang bersifat nasional mengenai masa lampau, masa sekarang dan masa depan dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita. Pada hari-hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan itulah kita sebagai bangsa mengadakan dialog dengan sejarahnya sendiri.

Setiap kali kita mengadakan renungan dan berdialog dengan sejarah itu, maka secara segar kita akan melihat kembali dari mana kita datang, di mana kita berada sekarang dan ke mana kita hendak melanjutkan perjalanan sejarah ini.

Dengan demikian, setiap tahun, kita selalu mengingatkan diri kita bahwa dalam perjuangan nasional kita terdapat kesinambungan. Agar kesinambungan itu bergerak dinamis sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan zaman, maka kesadaran akan perlunya kesinambungan tadi kita iringi dengan tekad mengadakan pembaharuan terus menerus dari satu tahun ke tahun berikutnya, dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Dengan demikian, sekaligus setiap tahun, kita mengingatkan diri kita bahwa hal-hal besar dalam kehidupan bangsa tidak pernah dapat tercapai dalam satu tahun, dalam satu kurun waktu atau dalam satu generasi saja. Hal-hal besar dalam kehidupan bangsa-bangsa, juga dalam kehidupan bangsa dan negara kita, hanya dapat dicapai sebagai hasil perjuangan panjang selama bertahun-tahun, selama beberapa kurun waktu dan oleh beberapa generasi secara berturut-turut dan sambung menyambung.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Renungan kita bersama tahun ini, menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-44, menyadarkan kita semua bahwa tahun ini mempunyai makna yang khas dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita. Sebab, tahun ini kita telah memasuki REPELITA V yang merupakan tahap penutup dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama. Selanjutnya, dengan REPELITA VI nanti kita akan mulai memasuki proses tinggal landas dalam mewujudkan tekad kita untuk membangun masyarakat yang kita cita-citakan; ialah masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Tahun-tahun di hadapan kita adalah tahun-tahun yang sangat menentukan. Kita harus memantapkan kerangka landasan pembangunan agar tekad untuk tinggal landas itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan memantapkan kerangka landasan pembangunan menuju tinggal landas nanti, dapat kita katakan, bahwa kita menegakkan Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. Sedangkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam proses tinggal landas nanti kita akan membawa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat itu menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Dilihat dari tanggung jawab generasi, maka pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam era tinggal landas nanti pada dasarnya adalah tanggung jawab Generasi Penerus. Generasi Pembebas, Generasi '45, akan mengantarkan bangsa ini ke depan pintu gerbang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas dalam pembangunan itu. Generasi Pembebas akan merampungkan tugas sejarahnya, bersama dengan Generasi Penerus, agar bangsa ini kelak berhasil dan tidak gagal dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dalam era tinggal landas, apabila Generasi Pembebas secara berangsur-angsur akan meninggalkan pentas sejarah.

Kurun waktu yang dahulu kita masuki dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sedang kita rampungkan, dengan mantapnya landasan pembangunan pada akhir REPELITA V ini. Setelah itu, kita akan segera memasuki kurun waktu yang baru. Karena itu diperlukan wawasan yang baru, guna menjawab tantangan dan masalah-masalah baru yang akan muncul.

Kurun waktu yang baru itu akan kita masuki dalam tahap proses tinggal landas yang akan kita mulai sejak REPELITA VI nanti. Seperti yang saya kemukakan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei yang lalu, dalam kurun waktu tinggal landas nanti kita bertekad untuk menempatkan bangsa dan negara kita sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah maju.

Dalam hubungan inilah Sidang Umum MPR tahun 1993 nanti akan mempunyai arti yang sangat penting. Segenap pemikiran dan upaya kita dalam memantapkan landasan pembangunan, kita arahkan guna persiapan memasuki proses tinggal landas. Proses tinggal landas dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua itu akan dirumuskan dalam GBHN 1993, yang akan merupakan hasil Sidang Umum MPR 1993 pula.

GBHN 1993 nanti tidak lepas dan tidak merupakan pemutusan terhadap Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama yang dalam beberapa tahun yang akan datang ini akan kita rampungkan. GBHN 1993 nanti terikat oleh kesinambungan, peningkatan dan pembaharuan dengan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama; bahkan dengan perjuangan nasional yang kita jalankan sejak Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, Revolusi dan Perang Kemerdekaan, kelahiran Orde Baru dalam tahun 1966.

Dalam berbagai kesempatan, juga dalam Pidato-pidato Kenegaraan maupun dalam mengantarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun-tahun yang lalu, saya selalu mengingatkan kita semua agar kita tetap memiliki wawasan sejarah dalam membangun dan memajukan semua segi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita.

Roda zaman memang terus berputar. Tantangan-tangan baru muncul, masalah-masalah baru timbul, aspirasi-aspirasi baru dan kekuatan-kekuatan baru akan terus menerus tampil dalam masyarakat kita yang bergerak makin dinamis. Wawasan kita bertambah kaya dan pengalaman kita ber-

Digitized by Google

tambah banyak. Kita harus belajar dengan sebaik-baiknya dari pengalaman-pengalaman itu, termasuk kesalahan-kesalahannya. Kita harus menyalurkan secara kreatif semua aspirasi dan kekuatan baru yang terus menerus muncul dalam masyarakat kita, dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang kita pandang perlu.

Tetapi, dalam mengadakan penyesuaian dan pembaharuan yang terus menerus tadi, kita harus memelihara kesinambungan sejarah antara masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang.

Ada faktor kesinambungan yang sangat mendasar yang kita anggap luhur dan menyatukan kita sebagai bangsa. Faktor kesinambungan yang mendasar itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intisasri dari faktor kesinambungan yang sangat mendasar inilah yang tidak boleh berubah. Yang kita lakukan adalah melaksanakan dan mengamalkannya secara kreatif dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang terus menerus muncul dalam perkembangan masyarakat kita dan masyarakat dunia yang sangat dinamis.

GBNHN 1993 tentu tidak terlepas dari hasil Pemilihan Umum 1992. Pemilihan Umum 1992 nanti akan kita adakan untuk menyusun DPR dan MPR sebaik-baiknya, sesuai dengan hakikat lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sidang Umum MPR itulah yang akan menetapkan GBHN 1993. GBHN 1993 nanti juga tidak akan terlepas dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Sidang Umum MPR 1993 nanti itulah yang akan memimpin dan memberi inspirasi kepada bangsa ini dalam melaksanakan GBHN 1993, yang akan merupakan kurun waktu keseluruhan proses tinggal landas dalam pembangunan nasional. Pada gilirannya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu juga tidak terlepas dari mekanisme kepemimpinan nasional, yang akan terus kita mantapkan dalam tahun-tahun mendatang. Termasuk di dalamnya pemantapan fungsi-fungsi, kerjasama, saling hubungan dan pengawasan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan dengan MPR.

Dalam pada itu, sebagai bagian dari masyarakat dunia yang makin erat hubungannya satu dengan yang lain, perkembangan kita di Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan di dunia. Perkembangan Indonesia dipengaruhi oleh dan ikut mempengaruhi perkembangan dunia umumnya itu. Sama seperti Indoensia, maka juga di dunia umumnya kita lihat berakhirnya kurun waktu yang dimasuki setelah selesainya Perang Dunia II di tahun 1945. Di mana-mana sedang muncul wawasan-wawasan baru, aspirasi-aspirasi baru dan kekuatan-kekuatan baru dalam memasuki era baru dari sejarah umat manusia menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Dalam dunia yang terasa makin kecil dan makin menjadi satu karena hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih, bangkitlah kesadaran bahwa semua bangsa, tidak ada kecualinya, memikul tanggung jawab bersama mengenai masa depan seluruh umat manusia. Ancaman-ancaman yang dapat memusnahkan umat manusia dan peradabannya hanya dapat diatasi oleh umat manusia secara bersama-sama; seperti ancaman perang nuklir, ancaman kelaparan, ancaman ketidakadilan dan ancaman kerusakan lingkungan hidup.

Pada satu pihak kita melihat tanda-tanda meredanya perang dingin yang berdasarkan pertentangan ideologi dan persaingan di antara sistem-sistem sosial politik dan sosial ekonomi yang berlain-lainan. Pada pihak lain, kita menyaksikan berhembusnya angin baru di Barat, di Utara, di Timur dan di Selatan; yaitu angin yang menyegarkan nilai-nilai moral, etik, spiritual dan keagamaan, angin yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan termasuk hak-hak dan kewajiban asasi manusia, angin yang memperkuat solidaritas nasional dan internasional, angin yang menghidup-hidupkan cita-cita kerakyatan, kebebasan dan keterbukaan dan angin yang menyegarkan cita-cita keadilan sosial.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki dihapuskannya segala sesuatu di atas dunia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan yang ingin menegakkan keterbukaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah sesuai dengan angin segar yang sedang bertiup di Barat, di Utara, di Timur dan di Selatan itu.

Saudara Ketua, para Wakil ketua dan Sidang Dewan yang terhormat;

Tugas yang kita hadapi dalam tahun-tahun mendatang memperlihatkan persamaan, di samping perbedaan, dengan tugas-tugas yang kita hadapi untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan nasional di tahun 1945 dahulu.

Ketika Indonesia merdeka, pendahulu-pendahulu kita telah mengambil intisari akar-akar kepribadian masyarakat kita, telah menggali kembali kepribadian bangsa kita. Pendiri-pendiri Republik ini juga mengambil intisari segala pengalaman pergerakan kemerdekaan kita mulai Kebangkitan Nasional 1908 yang dijadikan kerangka landasan berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk perjuangan selanjutnya; ialah peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional dalam suatu Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Di tahun-tahun yang akan datang, kita juga akan mengambil intisari pengalaman kita bersama sejak tahun 1945 hingga sekarang, untuk memantapkan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Di tahun-tahun yang akan datang itu kita akan mengalami peralihan untuk memasuki era baru, era tinggal landas dalam pembangunan.

Dalam peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat nasional, Pancasila telah menjalankan fungsinya yang sangat penting. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Hal ini akan lebih kita sadari jika kita mengadakan perbandingan dengan keadaan masyarakat nasional di banyak negara, yang mencapai kemerdekaannya hampir bersamaan waktu dengan kita.

Dalam peralihan memasuki era tinggal landas, Pancasila juga akan menjalankan fungsinya yang penting. Itulah yang kita ungkapkan dalam tekad kita semua untuk melaksanakan pembangunan kita sebagai pengamalan Pancasila.

Peralihan memasuki era tinggal landas merupakan kurun waktu yang sangat penting, penuh ujian berat dan kritis. Sampai sekarang, ada negara yang gagal dan ada pula negara yang berhasil dalam melewati kurun waktu peralihan yang sangat penting dan krisis itu.

Karena itulah, dalam Pidato Kenegaraan tahun 1984 saya mengingatkan, bahwa kita harus mengembangkan konsep dan model pembangunan kita sendiri, yang kita bangun di atas nilai-nilai kehidupan dan budaya kita sendiri. Kita tidak akan meniru-niru begitu saja model pembangunan negara lain yang manapun. Di seluruh dunia, tidak ada satu model pembangunan yang dapat diterapkan begitu saja kepada sesuatu masyarakat.

Digitized by Google

Dengan model pembangunan kita sendiri seperti itu, kita tidak akan mengadakan pemutusan dengan perjuangan kita di masa lampau. Kita juga tidak akan tercabut dari akar kerpibadian kita sendiri dalam peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang maju dan berkeadilan sosial. Dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila kita melanjutkan, meningkatkan dan memperbaharui segala hasil pembangunan yang kita capai sampai sekarang.

Proses peralihan menuju tinggal landas akan terus menerus melahirkan aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan yang baru. Kegagalan dapat timbul apabila aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan baru itu tidak tersalurkan secara kreatif; atau apabila terjadi persaingan dan saling tabrakan di antara aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan baru tadi.

Dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, kita berusaha mencegah munculnya kedua sumber kegagalan tadi.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, di satu pihak, menyediakan peluang untuk menyalurkan secara kreatif semua aspirasi dan kekuatan yang terus muncul dalam masyarakat yang makin maju, dalam masyarakat industri maju. Sesungguhnya, di mana pun di dunia ini tidak mungkin dibangun masyarakat industri yang maju dengan sebaik-baiknya apabila nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai solidaritas nasional dan internasional, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan sosial diabaikan.

Di pihak lain, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila memberi kerangka dan sarana kepada kita sehingga semua aspirasi dan kekuatan-kekuatan yang berlain-lainan yang terus muncul dalam masyarakat yang maju itu dapat diserasikan. Dengan demikian, semua aspirasi dan kekuatan yang baru tidak saling tabrakan, akan tetapi justru saling memperkuat sehingga menjadi satu keseluruhan yang harmonis.

Dengan melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, maka masyarakat industri yang kita bangun dalam era tinggal landas nanti, tidak meniru begitu saja masyarakat industri maju yang telah ada sekarang ini. Kita membangun masyarakat industri maju yang telah mengungkapkan kepribadian dan cita-cita perjuangan nasional kita sendiri, seperti yang telah kita abadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian jelas tugas utama kita di tahun-tahun yang akan datang adalah memantapkan kerangka landasan bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju proses tinggal landas.

Untuk melaksanakan tugas besar itu kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang kreatif di semua bidang. Segenap kalangan, lapisan dan golongan masyarakat kita dari semua generasi harus mengembangkan pemikiran-pemikiran besar yang kreatif itu: kekuatan sosial politik dan organisassi kemasyarakatan, kalangan cerdik cendekia, kalangan pendidikan, kalangan budaya dan seniman, kalangan agama, kalangan dunia usaha, kalangan pers dan semuanya saja.

Itulah sebabnya, beberapa tahun yang lalu saya kemukakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Dengan memandang Pancasila sebagai ideologi terbuka maka kita dapat mengembangkan pemikiran baru yang segar dan kreatif untuk mengamalkan Pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis. Nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah. Sedangkan pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Pendahulu-pendahulu kita, para perancang Undang-Undang Dasar 1945, telah mengingatkan agar kita memperhatikan sungguh-sungguh dinamika masyarakat. Para pendiri Republik ini, sejak semula, hanya menetapkan aturan pokok yang dasar-dasarnya diletakkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua yang hidup kemudian diberi peluang untuk mengembangkan pelaksanaannya secara luas. Karena itulah kita berkeyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita yang kukuh dan sekaligus kenyal. Karena itu pula tepat sekali ketetapan MPR yang menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus kita amankan secara berlapis-lapis, yang diawali dengan meminta pendapat rakyat melalui referendum terlebih dahulu apabila MPR berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945.

Pemantapan kerangka landasan di bidang politik memerlukan perhatian kita yang sebesar-besarnya. Pengalaman dari semua negara berkembang membuktikan, bahwa pembangunan politik yang diabaikan dapat merupakan sumber bagi kelambatan dan kemunduran, bahkan dapat menggagalkan seluruh pembangunan menuju tinggal landas. Sebaliknya, pembangunan politik yang terlalu jauh mendahului kemajuan pembangunan di bidang lainnya, juga dapat merupakan sumber bagi munculnya berbagai kesulitan dan permasalahan yang mengganggu kemajuan dalam pembangunan. Yang kita perlukan adalah pertumbuhan dan perkembangan Demokrasi Pancasila yang bergerak maju seirama dengan kemajuan di bidang-bidang lain; dan yang terus menerus mampu menjamin stabilitas nasional, pertumbuhan yang dinamis, persatuan dan kesatuan bangsa, terpeliharanya keamanan nasional dan meningkatnya ketahanan nasional.

Dalam rangka itulah saya melihat berkembangnya dialog-dialog nasional mengenai berbagai hal di bidang politik yang memenuhi pikiran kita dalam beberapa bulan terakhir ini. Marilah kita endapkan semua pikiran dan aspirasi-aspirasi politik yang telah terungkapkan itu dengan hati yang setenang-tenangnya, dengan pikiran yang sejernih-jernihnya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Segala pikiran dan proses kemajuan yang kita inginkan hendaklah kita capai dengan sadar dan dengan rencana yang cermat, dengan arah yang jelas dan dengan irama yang tepat.

Pemantapan kerangka landasan di bidang ekonomi juga akan memperoleh perhatian yang sebesar-besarnya. Demi terwujudnya pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial, kita tetap memerlukan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang cukup besar di bidang ekonomi. Kita menamakannya sebagai Trilogi Pembanguan. Malahan seluruh pembangunan ekonomi itu kita letakkan dalam pemikiran yang menyeluruh dari pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Ini berarti pembangunan dan kehidupan ekonomi harus kita kaitkan dengan pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan pengamalan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan pengamalan Sila Persatuan Indonesia, dengan pengamalan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan dengan pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Itulah sebabnya, bulan yang lalu, saya meminta kepada pimpinan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, agar memikirkan penjabaran yang lebih luas dan lengkap mengenai De-

Digitized by Google

mokrasi Ekonmi yang kita kembangkan berdasarkan Pancasila. Kita semua berharap agar pemikir-pemikir kita di bidang ekonomi dapat mengembangkan pemikiran mengenai Demokrasi Ekonomi itu; yang di satu pihak, memiliki integritas ilmiah secara universal, dan di lain pihak, dikaitkan dengan pengamalan semua Sila dalam Pancasila selalu kesatuan yang utuh. Tentu saja pemikiran kita mengenai Demokrasi Ekonomi bukanlah semata-mata milik para sarjana ekonomi. Pada tingkat terakhir, pemikiran kita mengenai Demokrasi Ekonomi adalah pemikiran politik, pemikiran seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang dijelmakan oleh MPR. Dalam rangka itu, pemikiran sarjana-sarjana ekonomi kita yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia akan merupakan salah satu sumbangan pikiran yang besar manfaatnya.

Pemantapan kerangka landasan di bidang budaya juga memerlukan perhatian kita yang tidak kalah besarnya di tahun-tahun yang akan datang. Seperti yang diisyaratkan oleh GBHN 1988, peralihan menuju ke masyarakat industri yang maju memerlukan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Bagi kita, perubahan nilai-nilai itu tidak berarti kita akan tercabut dari akar-akar kebudayaan kita yang telah berabad-abad lamanya. Tetapi itu juga tidak berarti kebudayaan kita akan dapat bertahan begitu saja dalam masyarakat industri yang akan datang. Kebudayaan kita yang lama itu harus mengalami perubahan-perubahan dan membuka diri terhadap kerjasama dan persaingan dengan kebudayaan maju yang lain di dunia ini. Dengan demikian akan lahir kebudayaan Indonesia yang tidak kalah moderennya dengan kebudayaan-kebudayaan moderen yang lain, akan tetapi di samping itu, tetap mengungkapkan kepribadian dan cita-cita perjuangan nasional kita, yang kita abadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang saya maksud, ketika di sekitar tahun 70-an saya mengingatkan kita semua, bahwa dengan membangun kita memang bertekad untuk menjadikan Indonesia yang moderen akan tetapi dalam kemoderenannya itu kita tetapkan berkepribadian Indonesia.

Pemantapan kerangka landasan di bidang pendidikan nasional sangat penting bagi kita di tahun-tahun yang akan datang. Pengalaman negara-negara berkembang yang berhasil mencapai tinggal landas menunjukkan, bahwa umumnya mereka bukan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam; tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdedikasi tinggi. Semuanya itu merupakan hasil dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional di negara mereka. Karena itu untuk berhasil dalam proses tinggal landas nanti, maka salah satu syarat utamanya adalah pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi. Kita bersyukur bahwa 44 tahun setelah Indonesia merdeka, yang dalam alam kemerdekaan itu bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita telah memiliki undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional.

Pemantapan kerangka landasan di bidang hukum juga memerlukan perhatian kita yang besar. Hal itu merupakan upaya kita untuk lebih memantapkan ciri dan hakikat negara kita sebagai negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata-mata, suatu sikap yang sejak berdirinya negara ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk pemantapan kerangka landasan di bidang hukum ini adalah langkah-langkah di berbagai bidang yang diperlukan guna memberi kepastian hukum dan rasa keadilan. Pemikiran kita di bidang hukum dan pembangunan di bidang hukum pada umumnya, dengan sendirinya akan tetap bergerak dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dalam rangka Wawasan Nusantara dan dalam rangka penegasan kita mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semuanya tadi harus mengungkapkan pendirian kita yang teguh bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

Pemantapan kerangka landasan dalam kehidupan keagamaan juga memerlukan perhatian kita semua. Di banyak negara yang sedang membangun kita lihat bahwa masalah keagamaan sering menjadi sumber bagi hambatan dan gangguan dalam pembangunan menuju tinggal landas. Kita di Indonesia yang memiliki Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, menempatkan rasa keagamaan kita sebagai sumber kekuatan dalam upaya kita untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Di bidang kehidupan keagamaan ini kerukunan hidup antara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, ialah tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual bagi pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, seperti yang telah kita tegaskan dalam GBHN 1988. Untuk melaksanakan tanggung jawab bersama itu, di tahun-tahun yang akan datang, para pemikir dan pemuka dari semua golongan agama akan mengembangkan pemikiran yang kreatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tetap setia kepada iman yang mereka yakini masing-masing.

Perhatian kita yang besar juga tetap kita berikan pada pemantapan kerangka landasan di bidang pertahanan keamanan. Peredaan ketegangan dunia dan suasana aman di dalam negeri kita manfaatkan sebaik-baiknya guna terus mengkonsolidasikan kekuatan ABRI dan peningkatan kemampuan profesional, dengan tetap menempa ABRI sebagai prajurit pejuang dan tanpa mengendorkan kewaspadaan. Peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik diarahkan agar terus menerus dapat ikut menumbuhkan, memperkuat dan menyegarkan kehidupan demokrasi Pancasila.

Segala aspirasi dan pemikiran kita mengenai proses tinggal landas nanti akan kita bulatkan dalam Sidang Umum MPR 1993 dalam bentuk GBHN 1993.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan sejarah, yang menjaga kesinambungan dan membuka diri terhadap pembaharuan, maka bersamaan dengan pemikiran dan langkah-langkah kita untuk mengatasi masalah-masalah nyata yang kita hadapi setiap saat sebagai bangsa, kita juga harus mengembangkan pemikiran-pemikiran kita mengenai arah yang akan kita tempuh dalam jangka panjang.

Dalam rangka itu pula, sejak awal, selaku Presiden/ Mandataris Majelis, saya telah menugasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional untuk menyiapkan bahan-bahan mengenai GBHN 1993. Sama halnya dengan praktek penyelenggaraan negara yang telah kita kembangkan selama ini, bahan-bahan GBHN 1993 nanti juga merupakan sumbangan pikiran dari Presiden/Mandataris kepada Sidang Umum MPR yang akan datang. Adalah wewenang sepenuhnya dari Majelis untuk memperlakukan

Digitized by Google

bahan-bahan sumbangan pikiran dari Presiden/Mandataris: akan menggunakannya sebagai bahan dalam menyusun GBHN 1993, akan mengubahnya, akan merombaknya atau tidak akan menggunakannya sama sekali. Satu-satunya alasan penyampaian sumbangan pikiran itu adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis yang sangat penting dan menentukan perjalanan kita sebagai bangsa. Praktek penyelenggaraaan negara berupa sumbangan pikiran mengenai bahan GBHN dari Presiden/Mandataris itu berkembang karena pengalaman sejarah. Dalam Sidang Umumnya di tahun 1968, MPR(S) tidak dapat merampungkan penyusunan GBHN, sehingga menugasi Presiden/ Mandataris untuk menyusun REPELITA sendiri tanpa GBHN.

Tentu saja, sesuai dengan semangat penyusunan GBHN yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional juga telah berusaha menampung semua aspirasi yang muncul dalam masyarakat, membuat perkiraan-perkiraan strategis jangka panjang dalam ruang lingkup nasional maupun internasional serta meneliti kendala yang ada dan peluang yang terbuka. Dalam menyiapkan bahan-bahan tadi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional mengikutsertakan secara aktif perguruan tinggi negeri maupun swasta, tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat dan kalangan pemerintahan. Penyusunan bahan-bahan GBHN yang demikian itu telah merupakan bagian dari proses demokrasi tersendiri. Dengan itu GBHN tidak hanya akan merupakan kumpulan dari daftar panjang keinginan, melainkan telah dapat kita rangkum menjadi strategi pembangunan yang realistis dan bertanggungjawab.

Sumbangan pikiran Presiden/Mandataris mengenai bahan-bahan GBHN bagi Sidang Umum MPR itu bukan "monopoli" Presiden. Kekuatan-kekuatan sosial politik dapat berbuat yang sama, ialah sejak dini mulai mengumpulkan bahan dan jika perlu menyusunnya dalam Rancangan GBHN yang dapat dibekalkan kepada fraksinya dalam Sidang Umum MPR nanti.

Penetapan GBHN merupakan mata rantai yang penting dari mekanisme kepemimpinan nasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, yang diawali oleh Pemilihan Umum. Pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah kita laksanakan secara teratur sejak kita membangun Orde Baru, yang merupakan pelaksanaan yang penting dari pembangunan politik dan menjadi kunci dari pemantapan stabilitas nasional.

Pemilihan Umum itu kita laksanakan sejiwa dengan kehendak pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan Umum itulah yang menghasilkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pelaksanaan Pemilihan Umum, susunan Dewan dan susunan Majelis telah kita tetapkan melalui undang-undang. Dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan proses kemajuan dalam kehidupan politik serta demokrasi, undang-undang mengenai Pemilihan Umum serta susunan Dewan dan Majelis itu telah kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Sampai sekarang, undang-undang mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum serta susunan Dewan dan Majelis kita tetapkan berdasarkan konsensus nasional. Konsensus nasional itu kita sepakati setelah kita bersama-sama memperhatikan dengan sungguh-sungguh pandangan semua pihak dan setelah kita bersama-sama mengadakan penilaian mengenai keadaan kita. Dengan mempertimbangkan semua segi tadi, maka sampai sekarang ini setiap kali kita telah mencapai konsensus nasional mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum serta susunan DPR dan MPR yang kita anggap paling baik, dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di tengah-tengah tingkat perkembangan sejarah di mana kita berada.

Kalau ada kekuatan sosial politik yang memandang ada sistem Pemilihan Umum yang lebih baik dari yang kita sepakati sampai sekarang, maka tidak ada halangan untuk memperjuangkan pandangannya itu. Yang penting adalah tercapainya konsensus nasional, yang nanti kita kukuhkan dengan undang-undang.

Selain menetapkan GBHN, maka Sidang Umum MPR 1993 nanti juga akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 1993-1998. Ada kaitan yang erat antara penetapan GBHN dan pemilihan Presiden. Presiden sebagai Mandataris yang dipilih harus bersedia dan dianggap paling mampu melaksanakan sebaik-baiknya GBHN yang telah ditetapkan.

Walaupun pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis dengan suara terbanyak, namun berkembang pandangan yang luas di kalangan masyarakat bahwa lebih baik bagi masyarakat, bangsa dan negara kita apabila penetapan GBHN serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terutama dalam mengambil keputusan mengenai hal yang sangat mendasar dan menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kita secara keseluruhan, kita menganggap pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat lebih unggul mutunya daripada melalui pemungutan suara. Sesuai dengan faham negara kekeluargaan yang menjiwai seluruh pemikiran Undang-Undang Dasar 1945, yang menghendaki agar negara mengatasi segala faham perorangan atau faham golongan, maka musyawarah untuk mencapai mufakat menjamin diperhatikannya semua aspirasi dan kepentingan lapisan dan golongan dalam masyarakat kita. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, akan menjamin bahwa yang "kecil" tidak akan selalu dikalahkan oleh yang "besar". Apabila musyawarah telah diusahakan sekuat tenaga, namun mufakat tidak tercapai juga karena pandangan yang berbeda kurang lebih sama kuatnya, maka barulah kita ambil jalan terakhir melalui pemungutan suara.

Bagian penting lainnya dari keseluruhan mekanisme kepemimpinan nasional adalah kekuatan-kekuatan sosial politik, terutama karena mereka ikut serta dalam Pemilihan Umum yang akan menentukan susunan DPR dan MPR. Kehidupan demokrasi kita akan makin segar, makin dewasa dan makin kuat, jalannya mekanisme kepemimpinan nasional akan makin lancar, apabila kekuatan-kekuatan sosial politik ini juga makin kuat dan mandiri dalam rangka pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan demokrasi kita secara nasional akan segar, apabila kehidupan demokrasi dalam kekuatan-kekuatan sosial politik itu juga tumbuh dengan segar.

Pemantapan mekanisme kepemimpinan nasional merupakan upaya kita yang sangat penting di tahun-tahun mendatang untuk memantapkan kerangka landasan pembangunan nasional sebagai ancang-ancang untuk memasuki proses tinggal landas. Pengalaman banyak bangsa me-

Digitized by Google

nunjukkan, bahwa ketidakberhasilan mereka dalam memantapkan mekanisme kepemimpinan nasional, termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memantapkan sistem pengawasan, sering menjadi sumber dari ketidakstabilan nasional yang berkepanjangan. Sehingga ada negara yang telah mencapai kemerdekaan nasionalnya lebih dari 100 tahun, negara itu belum juga mencapai kemajuan yang berarti dalam pembangunan nasionalnya. Kita bertekad agar pengalaman seperti itu tidak akan terjadi di Indonesia dalam dasawarsa-dasawarsa yang akan datang, bahkan dalam abad-abad yang akan datang.

Dengan memantapkan kerangka landasan pembangunan nasional, termasuk memantapkan mekanisme kepemimpinan nasional, dengan melaksanakan Pemilihan Umum 1992 sebaik-baiknya, dengan menetapkan GBHN 1993 yang realistis dan menjamin kemajuan yang berkeadilan di masa datang, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 1993-1998, maka Insya Allah, bangsa kita akan benar-benar siap memasuki proses tinggal landas dalam pembangunan mulai REPELITA VI yang akan datang.

Para Anggota Dewan yang terhormat;

Pusat perhatian dan kegiatan kita yang tercurah pada pemantapan landasan pembangunan sebagai persiapan memasuki proses tinggal landas, kita sertai dengan pelaksanaan tanggungjawab kita atas perkembangan dunia.

Seperti saya singgung tadi, dalam tahun-tahun belakangan ini timbul perkembangan dan perubahan-perubahan mendasar dalam perkembangan internasional, yang antara lain ditandai oleh gerak saling pendekatan antar negara, khususnya antara negara-negara besar di dunia. Perkembangan ini tidak saja telah dapat mengurangi ketegangan Timur — Barat, tetapi telah juga membuka kesempatan baru bagi upaya mencari penyelesaian damai terhadap berbagai konflik regional.

Terciptanya suasana baru dalam hubungan internasional itu kita sambut dengan gembira. Namun, hal ini tidak menutup kenyataan bahwa keadaan internasional masih tetap rawan dan serba tidak menentu. Hubungan antar negara masih diwarnai oleh berbagai bentuk ketidakadilan, ketegangan dan campur tangan, khususnya oleh negara-negara besar dan kuat terhadap yang lemah dan kecil. Di kawasan-kawasan tertentu masih bercokol sisa-sisa kolonialisme dan rasialisme yang merintangi hasrat universal bangsa-bangsa untuk mencapai kemerdekaan sejati, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Perekonomian dunia tetap mengalami gejolak yang berkepanjangan. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang masih menunjukkan ketimpangan-ketimpangan yang sangat menyolok. Bahkan, akhir-akhir ini tampak bertumbuhnya pengelompokan-pengelompokan antara negara-negara maju, yang perlu dipantau terus arah perkembangannya, karena berpotensi membawakan dampak negatif terhadap kepentingan negara-negara berkembang.

Bagi Indonesia, membaiknya suasana internasional yang dapat lebih menjamin keamanan, kestabilan dan kerjasama saling menguntungkan di dunia merupakan kesempatan baik bagi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional kita. Sebaliknya, setiap perubahan atau gejolak dunia yang dapat menghambat pembangunan kita terus kita amati secara cermat, agar kita dapat sedini mungkin meredam atau mencegah pengaruh negatifnya. Dalam rangka inilah, Indonesia selama tahun yang silam telah berperan aktif dalam memberi sumbangan bagi terwujudnya dunia yang lebih damai dan adil; dan bagi penyelesaian berbagai masalah regional maupun internasional.

Pada tingkat regional, kita tetap memandang ASEAN sebagai wadah kerjasama yang menduduki tempat utama dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam upaya mengembangkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial budaya demi kesejahteraan dan kemajuan sesama negara anggotanya, ASEAN telah berhasil mencatat kemajuan-kemajuan nyata.

Upaya menyumbang pada suatu penyelesaian damai terhadap kemelut di Kamboja, yang sampai saat ini merupakan ganjalan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, kini mulai menunjukkan titik-titik terang. Terselenggaranya Pertemuan-pertemuan Informal Jakarta, telah menerobos kebekuan bertahun-tahun dalam upaya ke arah penyelesaian kemelut di sana yang membawa penderitaan dan membuka jalan bagi Konperensi Internasional mengenai Kamboja yang kini tengah berlangsung di Paris. Namun berhasil tidaknya segala daya upaya tadi, pada akhirnya, tergantung pada itikad serta tekad yang berpandangan jauh dari pihak-pihak yang langsung terlibat. Indonesia berharap agar pihak-pihak Kamboja serta negara-negara yang berkepentingan lainnya dapat menunjukkan keluwesan dalam menjembatani perbedaan-perbedaan antara mereka, sehingga Konperensi Paris dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang menyeluruh, adil dan langgeng, yang pada gilirannya akan merupakan sumbangan penting bagi tercapainya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

Sementara itu, dalam proses menuju normalisasi hubungan diplomatik antara RI dan RRC kini telah dicapai suatu titik kejelasan. Sekarang, telah diperoleh kesepakatan dan penegasan resmi dari pihak RRC bahwa hubungan antara kedua negara akan sepenuhnya didasarkan pada Dasa Sila Bandung dan lima prinsip hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan wajar Indonesia, yaitu agar tidak ada campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, baik pada tingkat Pemerintah maupun pada tingkat antar rakyat atau partai, sekarang telah terpenuhi. Persiapan dan perembukan lebih lanjut antara kedua pihak sedang berlangsung sampai pada saat yang baik untuk mewujudkan normalisasi tersebut.

Sebagai kawasan yang berbatasan dengan Indonesia dan ASEAN, kita berkepentingan akan adanya ketenteraman dan kestabilan di Pasifik Selatan. Karena itu kita berhasrat terus mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini, antara lain melalui kerjasama ekonomi dan teknik yang selama ini telah terjalin.

Perkembangan di wilayah Pasifik umumnya, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang demikian pesat dan terdapat sejumlah mitra ekonomi utama kita, memang memerlukan perhatian kita yang semakin meningkat. Maka dari itu, Indonesia bersikap terbuka terhadap usul-usul serta gagasan-gagasan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara Pasifik, asalkan peningkatan itu tetap bertujuan mempertahankan sistem ekonomi dunia yang terbuka dan tidak diarahkan untuk membentuk suatu blok perdagangan tertutup. Lagi pula, peningkatan kerjasama ekonomi Pasifik harus dapat memenuhi aspirasi serta kepentingan dasar negara-negara berkembang seperti Indonesia dan jangan sampai mengurangi arti penting ASEAN, malah sebaliknya harus mendukung kerjasama ASEAN serta memanfaatkan mekanisme yang sudah ada dalam kerangka ASEAN.

Digitized by Google

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Sekarang, marilah kita melihat perkembangan ekonomi kita dan hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai bersama.

Sesuai amanat GBHN, pada waktu itu mengakhiri REPELITA IV beberapa bulan yang lalu, struktur ekonomi kita makin seimbang pada tingkat yang tinggi. Selangkah demi selangkah kita dapat membangun industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh.

Produksi pertanian dapat kita tingkatkan, sementara swasembada beras yang telah kita capai beberapa tahun yang lalu dapat terus kita mantapkan. Kita juga berhasil meningkatkan pembangunan yang menyangkut kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, gizi, keluarga berencana, pemukiman, transmigrasi, pembangunan daerah dan sebagainya. Perekonomian kita juga makin kukuh dengan jaringan prasarana yang bertambah luas dan kegiatan ekonomi yang makin berkembang.

Memang, REPELITA IV yang baru lalu merupakan tahun-tahun yang penuh hikmah; baik dari kemajuan-kemajuan yang kita capai maupun dari ujian-ujian berat yang kita hadapi.

Memasuki dasawarsa 70-an, di tengah-tengah kita melaksanakan pembangunan, dunia dilanda resesi yang cukup parah dan berlangsung cukup lama. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia merosot dan harga minyak bumi terus melemah. Pada waktu itu kita menyadari bahwa perekonomian dunia sedang mengalami perubahan besar. Kita perlu menyesuaikan diri dengan arus perubahan itu. Kita juga menyadari bahwa masih ada kelemahan yang mendasar dalam perekonomian kita, yaitu ketergantungannya pada minyak bumi sebagai sumber utama penerimaan devisa dan penerimaan negara. Tantangan ini harus dijawab.

Demikianlah, sewaktu kita memasuki REPELITA IV keadaan perekonomian dunia penuh dengan ketidakpastian dan harapannya tidak terlalu cerah. Namun kita telah bertekad untuk melaksanakan amanat GBHN sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya. Tujuan ganda dari REPELITA IV, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat dan meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan selanjutnya, harus dicapai. Kerangka landasan untuk persiapan menuju tahap tinggal landas harus diciptakan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah digariskan tadi, dalam suasana seperti itu, kita telah menentukan arah kebijaksanaan yang jelas, yaitu menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana pembangunan dari dalam negeri, terutama yang berasal dari sumber-sumber di luar minyak dan gas bumi. Dalam hubungan inilah, dalam REPELITA IV kita telah berupaya habis-habisan untuk meningkatkan ekspor non migas. Dalam rangka ini pula kita menyadari bahwa penerimaan dalam negeri, terutama yang berasal dari pajak, mutlak harus kita tingkatkan. Dalam kaitan ini pulalah, sumber-sumber dana masyarakat harus dikerahkan lebih efektif melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Semua ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan yang terarah dan terencana di berbagai bidang yang terkait.

Karena itulah, menjelang dimulainya pelaksanaan REPELITA IV kita melakukan pembaharuan yang mendasar di sektor keuangan, berupa langkah deregulasi di bidang perbankan pada pertengahan tahun 1983. Kebijaksanaan ini merupakan landasan bagi rangkaian langkah kebijaksanaan di bidang keuangan yang kita ambil kemudian. Hasil-hasilnya ternyata sangat menggembirakan. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya telah meningkat dengan pesat. Selama REPELITA IV dana yang dapat dihimpun oleh perbankan telah meningkat hampir tiga kali lipat: dari Rp. 13,3 trilyun menjadi Rp. 39,5 trilyun. Jumlah kredit yang disalurkan untuk berbagai kegiatan ekonomi juga terus meningkat. Apabila pada akhir REPELITA III jumlah kredit perbankan baru mencapai Rp. 16,1 trilyun, maka pada akhir REPELITA IV mencapai Rp. 46,5 trilyun. Sektor perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain makin bergairah dan jangkauan pelayanannya juga makin meluas, terutama setelah dilaksanakannya kebijaksanaan Oktober 1988. Sementara itu, pasar modal juga mulai menunjukkan perkembangan awal yang positif sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Semua ini menunjukkan bahwa pola dan tatacara penghimpunan dana masyarakat makin berkembang.

Kebutuhan dana pembangunan untuk membiayai berbagai proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah seperti pembangunan prasarana, kesehatan, pendidikan, pembangunan daerah dan lain sebagainya, juga terus meningkat. Untuk itu kita melaksanakan pembaharuan menyeluruh dari sistem perpajakan.

Hasil dari langkah-langkah pembaharuan tadi sangat membesarkan hati. Penerimaan dalam negeri Pemerintah dari sumber-sumber non migas meningkat dari Rp. 4,9 trilyun pada akhir REPELITA III menjadi Rp. 13,5 trilyun pada tahun terakhir REPELITA IV. Atau, penerimaan dalam negeri dari sumber-sumber non migas itu naik dari 34% pada akhir REPELITA III menjadi kira-kira 59% dari seluruh penerimaan dalam negeri Pemerintah pada tahun terakhir REPELITA IV. Hal ini merupakan perkembangan yang mendasar dalam struktur penerimaan negara kita dan mutlak perlu terus ditingkatkan untuk makin mengembangkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.

Dinamika pembangunan memerlukan langkah-langkah pembaharuan tidak hanya di bidang keuangan dan perpajakan, tetapi juga di berbagai bidang lain, termasuk bidang perdagangan, perhubungan, penanaman modal dan sebagainya. Dalam hubungan ini serangkaian langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang luas cakupannya telah kita ambil. Hasil-hasil dari langkah-langkah ini antara lain telah berhasil meningkatkan sangat pesat ekspor non migas. Apabila pada tahun terakhir REPELITA III ekspor non migas baru mencapai 5,4 milyar dolar Amerika Serikat atau sekitar 27% dari seluruh nilai ekspor, maka pada tahun terakhir REPELITA IV ekspor non migas kita telah mencapai lebih dari 12 milyar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 60% dari seluruh nilai ekspor.

Sementara itu, minat untuk menanamkan modal, baik penanam modal dalam negeri maupun dari penanam modal asing, juga sangat meningkat terutama selama 2 tahun terakhir ini, sebagai hasil dari langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, di samping adanya perkembangan-perkembangan yang menguntungkan Indonesia di luar negeri. Selama REPELITA I sampai sekarang, penanaman modal dalam negeri mencapai lebih dari Rp. 69 trilyun, yang menghasilkan hampir 5.500 buah proyek pembangunan. Di samping itu telah dibangun pula lebih dari 1.200 proyek dari penanaman modal asing senilai hampir 26 milyar dolar Amerika Serikat, yang jika dinilai dengan kurs yang berlaku sekarang nilainya sekitar Rp. 46 trilyun. Ini berarti bahwa nilai penanaman modal asing sekitar 40%

Digitized by Google

dari seluruh investasi swasta. Dilihat dari jumlah proyeknya, jumlah proyek penanaman modal asing itu sekitar 18% dari seluruh proyek penanaman modal. Dari angka-angka tadi terbukti bahwa investasi modal swasta dari dalam negeri sendiri lebih besar dari investasi modal swasta asing. Perkembangan ini sesuai dengan amanat GBHN, ialah pengerahan modal dari luar merupakan pelengkap dari dana-dana dalam negeri. Perlu saya tambahkan bawha seluruh investasi swasta masih lebih besar lagi, karena angka-angka tadi hanya mencakup investasi swasta dalam rangka undang-undang penanaman modal.

Kalau kita lihat perkembangan empat REPELITA, maka tampak bahwa selama REPELITA I dan II modal swasta dalam negeri dan swasta asing tadi ditanamkan pada industri hilir atau kegiatan yang menghasilkan barang-barang pengganti impor. Dalam REPELITA III mulai memasuki sektor-sektor yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan penolong. Sedangkan dalam REPELITA IV kegiatannya terarah pada barang-barang untuk pasaran ekspor. Apabila dalam tahun 1986 sekitar 45% dari penanaman modal diarahkan pada industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, maka dalam tahun 1988 sekitar 72% kegiatan penanaman modal swasta itu diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan barang-barang ekspor. Momentum yang baik dari penanaman modal ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan perkembangan tadi kita dapat mencatat beberapa perkembangan penting lainnya. Hasil-hasil industri dalam negeri mulai dapat menjadi sumber utama dari peningkatan ekspor non migas. Jika pada tahun terakhir REPELITA III hasil-hasil industri mencakup 63,4% dari penerimaan ekspor non migas, maka pada akhir REPELITA IV hasil-hasil tersebut meliputi hampir 80% dari penerimaan ekspor non migas

Peranan sektor industri juga makin menonjol dalam produksi nasional. Industri dalam negeri telah dapat berkembang pesat selama REPELITA IV. Atas dasar data terbaru yang dikumpulkan dari Sensus Ekonomi Nasional 1986 dan survei-survei lain, sektor industri telah tumbuh dengan laju rata-rata 13,2% setiap tahun selama periode 1983-1988. Angka ini melampaui sasaran REPELITA IV untuk sektor ini sebesar rata-rata 9,5% setiap tahun. Sejalan dengan itu, sumbangan sektor industri dalam produksi nasional juga telah meningkat dari 12,7% menjadi 18,4%. Perkembangan ini mempertebal keyakinan kita bahwa sektor industri akan dapat menjadi penggerak utama pembangunan di tahun-tahun mendatang. Perkembangan ini juga membuktikan bahwa sektor industri ternyata mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dan mampu berkembang pesat dalam iklim usaha yang wajar, tanpa harus dimanjakan.

Sektor pertanian juga telah tumbuh dengan memadai, yaitu dengan rata-rata 3,5% setiap tahun selama REPELITA IV, yang berarti melampaui sasaran yang ditetapkan sebesar rata-rata 3% setiap tahun.

Demikianlah, selama pelaksanaan REPELITA IV kita telah berhasil melangkah maju lagi dalam upaya kita untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

Dalam pada itu, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam REPELITA IV ternyata juga cukup memadai. Atas dasar perkiraan sementara, laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu itu mencapai rata-rata 5,1% setiap tahun atau sedikit di atas sasaran REPELITA IV sebesar 5% setiap tahun. Terutama setelah tahun 1985, perekonomian Indonesia bangkit kembali secara mantap dan pada tahun 1988 mencapai laju pertumbuhan sebesar 5,7%. Apabila kita melihat bagian perekonomian kita yang merupakan sumber mata pencaharian langsung bagi lapisan terbesar rakyat kita, ialah sektor-sektor ekonomi di luar minyak dan gas bumi, maka laju pertumbuhannya lebih tinggi lagi yaitu rata-rata 5,9% setiap tahun selama REPELITA IV. Dalam tahun 1988 kelompok sektor-sektor non migas ini telah tumbuh dengan 7,4%. Perlu saya jelaskan bahwa angka laju pertumbuhan ini didasarkan atas perhitungan kembali Produk Domestik Bruto Indonesia sejak tahun 1983 dengan menggunakan data terbaru, khususnya data untuk sektor industri yang disebutkan di atas, di samping perhitungan kembali untuk beberapa sektor lain.

Selama REPELITA IV laju inflasi dapat ditekan pada tingkat rata-rata 6,6% setiap tahun. Pengendalian inflasi tadi jauh lebih berhasil jika dibanding dengan REPELITA III yang mencapai rata-rata 13,2% setiap tahun. Hal ini berkat tersedianya secara cukup dan lancarnya distribusi berbagai barang-barang kebutuhan pokok serta berkat keteguhan hati kita untuk tetap berpedoman pada kebijaksanaan anggaran belanja berimbang dan kebijaksanaan moneter yang berhati-hati.

Sementara itu, selama REPELITA IV, neraca pembayaran kita mengalami tekanan-tekanan berat sebagai akibat dari merosotnya harga minyak waktu itu dan kenaikan kurs berbagai mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat. Pada bulan September 1986 kita terpaksa melakukan devaluasi untuk mengamankan neraca pembayaran kita dari gejala-gejala spekulatif di bursa valuta asing dan dari dampak penurunan drastis harga minyak yang terjadi selama 8 bulan pertama tahun tersebut. Langkah devaluasi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas Indonesia. Dengan langkah-langkah pengamanan tersebut dan terutama dengan makin meningkatnya ekspor non migas kita, situasi neraca pembayaran tetap terkendali dengan baik dan makin mantap.

Sidang Dewan yang terhormat;

Dalam pada itu, dengan sadar kita pelihara keutuhan fungsi sumber alam dalam menopang pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini didorong oleh tanggung jawab kita untuk memelihara kelestarian lingkungan alam; tidak saja untuk kepentingan kita yang hidup di zaman ini tetapi juga untuk generasi-generasi di zaman yang akan datang.

Tanggungjawab kita itu juga didorong oleh kesadaran penuh bahwa sumber alam dan lingkungan hidup tidak hanya penting bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga penting bagi umat manusia penghuni bumi ini. Itulah sebabnya, kita terus menerus mendesak negara-negara industri yang telah sekian lama menikmati manfaat submer alam Indonesia serta sumber alam negara-negara berkembang lainnya untuk membuktikan sikap tanggung jawab mereka dalam mengatasi masalah lingkungan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di samping itu kita juga berkewajiban untuk mengingatkan negara-negara maju akan tanggung jawab mereka untuk dengan sungguh-sungguh mengatasi sumber-sumber ancaman terhadap lingkungan yang ada di negeri mereka sendiri, karena kenyataan menunjukkan dengan jelas bawha proses industrialisasi yang telah sekian lama dilaksanakan oleh negara-negara maju serta pola konsumsi yang sudah sekian lama mereka nikmati itulah yang merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan

Digitized by Google

hidup umat manusia di seluruh dunia.

Dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup di dunia, kita berpendirian bahwa secara mutlak perlu dipercepat pembangunan negara-negar berkembang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dunia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penanggulangan masalah lingkungan hanya akan berhasil apabila berhasil sepenuhnya mengatasi keterbelakangan yang merupakan sebab utama rusaknya lingkungan.

Faktor utama yang merusak hutan tropis di negara berkembang adalah keterbelakangan ekonomi negara berkembang, yang mengakibatkan rendahnya taraf hidup mereka. Karena itu untuk menyelamatkan lingkungan hidup, kita mengajak negara-negara maju untuk bersama-sama menggerakkan roda pembangunan negara-negara berkembang.

Khusus dalam pengelolaan hutan tropis, kita mengajak negara-negara maju untuk bersama-sama menanam pohon secara aktif untuk memperluas areal hutan tropis Indonesia sebanyak 20 juta hektar. Indonesia menyisihkan setiap tahun dana sebanyak 300 juta dolar Amerika Serikat untuk menanam hutan kembali sebanyak 300.000 hektar setahun. Jika Indonesia mengerjakannya sendiri maka dibutuhkan waktu 65 tahun untuk meliputi 20 juta hektar ini. Karena itu kita mengajak negara-negara maju untuk memperpendek jangka waktu tersebut dengan jalan ikut serta aktif menanam hutan tropis di wilayah Tanah Air kita, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka ikut serta memelihara sehatnya paru-paru dunia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Demikianlah, seperti saya katakan tadi, kita melihat bahwa REPELITA IV ternyata merupakan tahap pembangunan yang penuh hikmah. Tantangan-tantangan yang timbul justru makin mempertebal tekad kita dan makin menggugah kita untuk bekerja lebih keras lagi. Meskipun dalam suasana perekonomian dunia yang kurang menguntungkan, perekonomian Indonesia ternyata dapat tumbuh dengan memadai. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seiring dengan itu, perekonomian Indonesia juga telah mampu mengembangkan dirinya ke arah struktur yang makin tangguh, makin seimbang dan makin siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Kebijaksanaan pembaharuan ekonomi, termasuk langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi, ternyata mampu membangkitkan potensi-potensi pembangunan yang ada dalam masyarakat kita. Ekspor dan penerimaan dalam negeri yang berasal dari sumber-sumber non migas telah meningkat dengan pesat dan peranannya sebagai sumber devisa dan sumber penerimaan negara makin penting. Proses industrialisasi berjalan dengan mantap dan pasti. Sektor industri berkembang dengan pesat dengan dukungan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya. Investasi dunia usaha juga telah bangkit dan memperkuat harapan bahwa ia akan dapat menjalankan peranannya seperti yang diharapkan di tahun-tahun mendatang. Ini semua memperkuat kerangka landasan yang telah kita bangun bersama dalam REPELITA IV untuk menyongsong tahap tinggal landas nanti.

Dengan bekal itu semua, kita memasuki REPELITA V. Tugas-tugas yang kita hadapi tidak ringan. Taraf hidup dan kecerdasan rakyat harus terus kita tingkatkan. Kerangka landasan yang telah berhasil kita bangun dalam REPELITA IV perlu kita mantapkan, agar bangsa Indonesia siap untuk mulai memasuki proses tinggal landas dalam REPELITA VI nanti. GBHN memberi petunjuk pada kita bahwa partisipasi masyarakat serta kualitas manusia Indonesia merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kita juga menyadari bahwa prakarsa dan kreativitas masyarakat sendirilah yang merupakan kekuatan utama pembangunan di waktu-waktu mendatang. Sementara itu, dalam REPELITA V kita harus mampu pula menanggulangi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja kita yang terus bertambah. Upaya untuk memacu ekspor non migas, meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sumber-sumber non migas serta mendorong penanaman modal oleh dunia usaha dan pengerahan dana-dana masyarakat merupakan pekerjaan-pekerjaan yang telah kita laksanakan dalam REPELITA IV, yang perlu kita lanjutkan dan tingkatkan dalam REPELITA V.

Untuk itu semua kita perlu terus mengadakan pembaharuan dan penyegaran kelembagaan di berbagai bidang, termasuk langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi.

Kita juga harus terus menghilangkan kendala-kendala yang masih menghambat prakarsa dan kreativitas masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kita juga akan makin memantapkan peranan dan kemampuan negara dalam memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan, serta dalam mengawasi dan melaksanakan aturan permainan yang adil bagi semua warga negaranya. Setiap warga negara perlu memperoleh kesempatan yang sama dalam menyumbangkan kemampuannya bagi pembangunan dan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang timbul sebagai hasil dari pembangunan. Koperasi yang merupakan wadah yang tepat bagi pengembangan prakarsa, kreativitas dan partisipasi rakyat —terutama mereka yang berkedudukan ekonomi lemah— wajib dan terus kita bangun, agar benar-benar dapat menjadi sokoguru perekonomian kita. Kita juga akan terus memperkuat peranan Pemerintah dalam melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, antara lain melalui penerapan sistem perpajakan yang adil dan progresif. Yang tidak kalah penting adalah, makin mempertajam prioritas agar program-program pembangunan makin mengarah pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak terbesar bagi rakyat banyak. Dalam hubungan ini, yang penting bagi kita sebenarnya bukan bagaimana memperluas peranan Pemerintah, tetapi bagaimana meningkatkan mutu peranan Pemerintah di bidang-bidang strategis itu, sejalan dengan makin luasnya kesempatan bagi warga negara untuk mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya yang kini mulai bangkit.

Dalam setiap langkah, demokrasi ekonomi selalu menjadi pedoman kita.

Saudara Ketua yang saya hormati;

Pertanyaan kita yang mendasar adalah: apakah dengan keadaan perekonomian dan hasil-hasil pembangunan tadi kesejahteraan rakyat kita bertambah baik seperti yang menjadi cita-cita kemerdekaan, yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar dan digariskan oleh GBHN?

Jawabannya sangat membesarkan hati. Sebab, kesejahteraan rakyat itu memang telah bertambah baik, kehidupan masyarakat luas memang makin terangkat.

Banyak petunjuk mengenai bertambah baiknya tingkat kesejahteraan dan naiknya taraf kehidupan masyarakat luas itu.

Salah satu di antaranya yang penting adalah menurunnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Batas

Digitized by Google

garis kemiskinan yang kita gunakan adalah besarnya pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan gizi sebesar 2.100 kalori setiap hari untuk setiap orang; ditambah dengan pengeluaran minimum untuk beberapa kebutuhan pokok di luar makanan, yaitu biaya untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan pengangkutan. Keluarga yang pengeluaran setiap anggota keluarganya di bawah batas tadi dimasukkan ke dalam golongan penduduk miskin, sedangkan yang berada di atas batas tadi dianggap sebagai golongan yang tidak miskin.

Dengan menggunakan ukuran itu, hasil survei Sensus Ekonomi Naisonal sejak tahun 1976 memberi gambaran yang membesarkan hati. Dalam tahun 1976 itu ada 4 diantara 10 penduduk kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1987 keadaannya jauh lebih baik: kurang dari 2 di antara 10 orang penduduk kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jika kita lihat dari jumlahnya, maka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan turun dari 54 juta orang menjadi sekitar 30 juta orang. Ini berarti selama 11 tahun tidak kurang dari 24 juta orang yang berhasil mengangkat dirinya dan bebas dari kemiskinan, berkat pembangunan kita.

Apabila kita teliti lebih cermat lagi, gambaran hasil-hasil pembangunan itu makin membesarkan hati. Penduduk pedesaan ternyata dapat lebih cepat membebaskan diri dari kemiskinan dibanding dengan penduduk daerah perkotaan. Dalam masa 11 tahun tersebut penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari 40,4% menjadi 16,4%, sedangkan penduduk perkotaan menurun dari 38,8% menjadi 20,1% dari seluruh penduduk perkotaan. Jumlah orang miskin di daerah pedesaan menurun dari 44,2 juta orang menjadi 20,3 juta orang. Sedangkan jumlah orang miskin di daerah perkotaan belum menunjukkan penurunan secara berarti, dan sejak tahun 1981 justru sedikit meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya proses urbanisasi, ialah mengalirnya penduduk dari desa ke kota dan juga mekarnya wilayah perkotaan itu sendiri. Hal ini hendaknya menyadarkan kita semua, terutama Saudara-saudara kita yang hidup di pedesaan, bahwa hidup di kota belum tentu lebih baik jika dibanding dengan hidup di desa-desa yang dari hari ke hari makin bertambah maju itu. Perbaikan taraf hidup masyarakat pedesaan ini membuktikan keberhasilan pembangunan pertanian, proyek-proyek Inpres Desa, pemerataan pembangunan, gerakan PKK, pendidikan, pengabdian aparatur pedesaan, kesadaran masyarakat desa untuk membangun dan lain-lainnya.

Sesungguhnya perbaikan taraf hidup masyarakat kita lebih luas lagi dari petunjuk-petunjuk tadi. Angka-angka pengeluaran rumah tangga tidak dapat mengungkapkan seluruh proses pemerataan kebutuhan dasar yang sebenarnya telah terjadi sebagai hasil pembangunan.

Seperti saya kemukakan tadi, dewasa ini barang-barang kebutuhan pokok dan pelayanan dasar bagi masyarakat tersedia secara luas dan makin mudah diperoleh. Perkembangan ini juga merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan umum. Peningkatan yang pesat dari produksi pangan dan sandang, tersedianya secara luas berbagai kebutuhan hidup berkat meningkatnya produksi dalam negeri, meluasnya jangkauan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan perhubungan telah mengubah suasana secara mendasar. Jika dua dasawarsa yang lalu semua kebutuhan hidup dan pelayanan dasar serba langka sehingga hidup masyarakat kita dari hari ke hari terancam suasana kekhawatiran, maka sekarang ada kepastian untuk memperoleh kebutuhan pokok dan pelayanan dasar. Semuanya itu mendatangkan perasaan lebih tenteram.

Jika pada tahun 1969 dahulu produksi tekstil kita dapat menyediakan 4 meter tekstil setiap tahun untuk setiap orang, maka pada tahun 1988 yang lalu telah naik dengan 5 kali lipat, untuk beras naik dari lebih dari 107 kilogram untuk setiap orang setiap tahun menjadi lebih dari 161 kilogram, daging naik dari 2,7 kilogram menjadi 5,3 kilogram, telur naik dari 0,5 kilogram menjadi 2,7 kilogram, susu naik 0,3 liter menjadi 1,5 liter, ikan naik dari 10,7 kilogram menjadi 16,4 kilogram. Ketika mulai membangun dalam REPELITA I dahulu baru ada 4 orang dokter untuk melayani 100.000 penduduk, maka sekarang kita telah memiliki hampir 14 orang dokter yang melayani 100.000 penduduk. Untuk 100.000 penduduk itu jumlah Puskesmas juga naik dari sebuah menjadi 3 buah atau kadang-kadang lebih. Pada akhir REPELITA III dahulu 55% penduduk kita mendapat fasilitas air bersih, sedangkan pada akhir REPELITA IV yang baru lalu jumlahnya meningkat menjadi 65%. Jika pada tahun 80-an baru sekitar 280.000 rumah tangga yang mendapatkan listrik, sekarang telah naik berlipat ganda menjadi lebih dari 4,8 juta rumah tangga. Listrik juga terus masuk desa-desa kita, sehingga sekarang 1 diantara 3 desa telah diterangi oleh sinar listrik di malam hari. Panjang jalan juga bertambah dari 7,4 kilometer menjadi hampir 13 kilometer untuk 10 ribu penduduk. Jumlah bus-bus umum juga naik sekitar 10 kali lipat selama 4 REPELITA, sehingga sekarang tersedia sekitar 2 buah bus untuk 1.000 penduduk. Demikian gambaran sekilas mengenai bertambah baiknya penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat kita.

Unsur penting lainnya yang merupakan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah kestabilan harga. Harga barang-barang kebutuhan pokok yang relatif stabil mempunyai makna tersendiri bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya kemantapan harga, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran mereka dengan lebih baik. Perasaan lebih tenteram juga meliputi hatinya, karena tidak dibayangi oleh ketidakpastian dan ketakutan adanya inflasi yang mengikis habis penghasilannya yang masih pas-pasan. Stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi, yang menjadi salah satu unsur dari Trilogi Pembangunan, tidak semata-mata penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi akan tetapi secara langsung juga merupakan unsur yang tidak kalah penting untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat.

Di samping makin banyak dan mudahnya memperoleh barang hasil produksi dalam negeri, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat juga meningkat karena bertambah baiknya mutu barang produksi dalam negeri itu. Dengan makin beranekaragamnya produksi dalam negeri, masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk memilih barang yang dianggap terbaik bagi mereka. Kesempatan yang lebih luas untuk memilih, tentu lebih baik dari kesempatan pilihan yang terbatas.

Stabilitas politik yang dinamis dan keamanan yang terpelihara selama lebih dari dua dasawarsa terakhir ini, telah memberi rasa tenteram dan rasa aman dalam makna yang lebih mendasar. Hal ini pun telah meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti yang lebih luas lagi.

Dengan perasaan lega, kita dapat mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi, telah dapat meningkatkan mutu kehidupan dan memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat.

Segala kemajuan tadi kita catat jauh dari rasa keangkuhan

Digitized by Google

atau puas diri. Kemajuan tadi adalah hasil kerja keras kita semua tanpa kecuali, disertai dengan pengorbanan-pengorbanan yang pada saat kita berikan dahulu terasa hampir-hampir tidak terpikul. Juga kadang-kadang, saya tahu, dengan rasa tidak sabar.

Karena itulah, dalam mencatat segala kemajuan tadi, rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pemurah, karena telah memberi ridho kepada bangsa kita dalam melewati cobaan-cobaan berat dan tantangan-tantangan besar di tahun-tahun yang lalu.

Kita menyadari bahwa kesejahteraan rakyat mempunyai pengertian yang dinamis. Keberhasilan pembangunan itu sendiri meningkatkan aspirasi masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan rakyat, muncul pula kebutuhan-kebutuhan baru. Apa yagn dahulu tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok dan tidak harus dipenuhi, sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai mutu yang memadai, sekarang telah menjadi mutu yang kurang memadai. Ini semua adalah perwujudan dari kemajuan. Ia adalah gejala yang wajar dalam masyarakat yang sedang membangun dan perlu ditampung dan disalurkan dengan baik.

Namun adanya peningkatan aspirasi ini kadang-kadang memberikan kesan bahwa, meskipun kita telah berusaha keras membangun, seolah-olah kita "berlari di tempat" atau tidak ada kemajuan. Kesan semacam ini tidak beralasan, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang tadi telah saya bentangkan.

Kita juga menyadari, bahwa kita tidak dapat sepenuhnya menghindari adanya sebagian dari warga masyarakat yang lebih berhasil daripada warga masyarakat yang lain dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru yang dibuka dan diciptakan oleh proses pembangunan. Perbedaan yang terlalu besar antara warga yang satu dengan warga yang lain melawan rasa keadilan rakyat dan, karena itu, perlu dihindari. Ini merupakan tugas negara. Langkah mendasar dalam menciptakan rasa keadilan masyarakat adalah mengembangkan iklim yang sehat, membuka kesempatan yang sama dan menegakkan aturan permainan yang adil bagi semua warga negara. Selanjutnya, dan tidak kalah pentingnya, kita perlu terus berusaha untuk mengurangi perbedaan kemampuan warga masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka oleh pembangunan. Dalam hal ini, peningkatan kualitas manusia dan pengembangan sumber daya manusia memegang peranan yang menentukan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Pada hari-hari kita memperingati 44 tahun Kemerdekaan Nasional, pada bulan-bulan pertama kita bertekad untuk memperkuat landasan pembangunan bagi proses tinggal landas nanti, saya telah mengajak kita semua untuk membuat renungan mengenai keseluruhan perjalanan kita sebagai bangsa. Kita telah menengok ke belakang pada perjalanan pembangunan yang telah kita tempuh, melihat sekeliling tempat kita berada sekarang dan memandang jauh ke depan dalam perjalanan untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan.

Kita terus melaksanakan tekad nasional untuk menempatkan pembangunan ekonomi itu pada prioritas yang tinggi, tanpa mengabaikan pembangunan bidang-bidang lain yang memang kita perhatikan dengan saksama. Sejak semula kita memusatkan perhatian yang sangat besar kepada pembangunan ekonomi ini, sebab kemajuan dan kesejahteraan bangsa yang kita cita-citakan hanya akan terwujud melalui pembangunan ekonomi. Tidak akan pernah ada kemajuan dan kesejahteraan, tidak akan pernah ada ketenteraman batin, tidak akan pernah ada keamanan, apabila keadaan perekonomian kita terbengkalai.

Jika kita menengok ke belakang, maka tampak kembali betapa panjangnya perjalanan yang telah kita tempuh dalam membangun bangsa ini. Jalannya pun tidak selamanya lurus dan mulus. Tidak sedikit halangan yang telah kita singkirkan, tidak kurang rintangan yang telah kita lampaui, tidak terbilang pula ujian-jian berat yang telah kita hadapi.

Kita bersyukur bahwa semuanya tadi telah kita lewati dengan selamat.

Pada saat-saat perekonomian kita mendapat tekanan-tekanan berat karena perkembangan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan, kita telah berani mengambil langkah-langkah penyesuaian. Tidak jarang langkah penyesuaian itu terasa sangat berat dan menyakitkan pada waktu itu. Bersamaan dengan segala daya upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan jangka pendek, kita juga menyiapkan diri untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan dalam jangka panjang. Semua kepahitan dan pengorbanan itu ternyata tidak sia-sia. Sebab, pada saat terbukanya peluang untuk mengadakan terobosan ke depan, kita telah siap dan berhasil memanfaatkan sebaik-baiknya. Inilah barangkali pesan yang dikandung oleh pepatah lama yang sangat kita kenal: Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Itulah sebabnya, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengingatkan kita semua, jika kita mampu mengatasi ujian berat yang kita hadapi waktu itu, mudah-mudahan, kelak kita dapat mengatakan bahwa semua ujian dan tantangan berat itu adalah rakhmat yang terselubung.

Kita telah membangun sistem politik yang mampu membangkitkan dan menyalurkan semua aspirasi yang timbul dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, dengan tetap menjaga stabilitas nasional yang memberi ruang gerak bagi dinamika, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tetap memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam pembangunan ekonomi, kita telah berhasil mencapai kemajuan-kemajuan yang sangat mendasar; terutama dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan menyiapkan kerangka landasan bagi tahap pembangunan selanjutnya, seperti yang diamanatkan oleh GBHN.

Semuanya itu telah membangkitkan rasa percaya diri, menambah tebalnya keyakinan kita, bahwa dalam REPELITA V ini, kita siap memperkuat kerangka landasan pembangunan yang telah kita bangun. Selanjutnya, dengan bekerja lebih keras lagi, dengan meningkatkan sikap tertib dan disiplin nasional, kita percaya bahwa kita dapat mulai memasuki proses tinggal landas dalam melanjutkan pembangunan Negara Proklamasi kita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberi segala taufik dan hidayahNya kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Digitized by Google

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan

Tanggal 17 Agustus merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal dan bulan itu, 44 tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari cengkeraman penjajah dan kemudian memproklamirkan kemerdekaannya. Sehingga pada tanggal dan bulan itu, setiap tahunnya hari proklamasi itu diperingati.

Pukul 00.00 WIB, Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sudharmono, dan sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan V mengadakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menghormat arwah pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Sedangkan puncak peringatan detik-detik proklamasi dipusatkan di Istana Merdeka. Puncak peringatan itu dihadiri oleh Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sudharmono, Ibu Tien Soeharto, Ibu Sudharmono, pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta undangan yang lainnya.

Puncak peringatan yang dilakukan di Istana Merdeka itu penuh hikmat. Tepat pukul 10.03, sama seperti waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, 44 tahun yang lalu.

Dalam acara itu, teks proklamasi yang dulunya dibacakan Soekarno-Hatta, dalam peringatan yang terjadi 17 Agustus lalu dibacakan oleh Ketua DPR-MPR, M Kharis Suhud dengan mantap. Sedangkan Presiden Soeharto dalam kesempatan itu memimpin untuk mengheningkan cipta.

Bersamaan dengan peringatan tersebut, di berbagai Departemen, kantor-kantor pemerintah dan di berbagai daerah dan desa serta masyarakat juga tidak ketinggalan. Sebagaimana biasa, setiap bulan dan tanggal itu partisipasi masyarakat dalam memperingati hari kemerdekaan ini dilakukan dengan berbagai cara. Umumnya, berupa hiburan yang menyegarkan. Misalnya memanjat pohon lontar yang diatasnya diberi iming-iming yang menawan serta menarik. Seperti berupa baju, sarung dan yang lainnya.

Selain itu, hiburan-hiburan lain yang menyegarkan diantaranya balapan karung yang dilakukan oleh anak-anak bahkan orangtua. Kemudian makan kerupuk yang digantung diatas seutas benang dan yang lainnya. □ BM

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka

Digitized by Google

Komentar Atas Pidato Presiden

Keterbukaan Itu Memberikan Tantangan Untuk Dijawab

Pidato kenegaraan Presiden Soeharto yang disampaikan di depan sidang paripurna DPR pada 16 Agustus 1989 lalu segera mendapat sambutan dari berbagai pihak, baik para pakar pengamat sesuai bidang masing-masing maupun para politisi dan praktisi. Sambutan berupa tanggapan atau komentar secara garis besar menyangkut dua bidang pokok yaitu politik dan ekonomi.

Berbeda dengan para pengamat, pakar dan politisi lain, mantan menteri yang juga seorang pakar ekonomi Drs Frans Seda segera menurunkan suatu tanggapan yang komprehensif melalui artikel di bawah judul "Renungan ini jangan cepat berlalu" (Suara Karya 18 Agustus 1989). Ia berpendapat, pidato Presiden 16 Agustus lalu sangat menarik. Apa yang dikemukakannya merupakan masalah-masalah fundamental dan menggugah kreativitas berpikir. Diungkapkan fungsi-fungsi sejarah dari Pancasila sebagai ideologi yang telah menghantar bangsa Indonesia dari posisi bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, serta sebagai ideologi yang menghantar bangsa masuk era tinggal landas, yakni dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial.

Paling menarik, demikian Frans Seda, ungkapan bahwa Pancasila adalah ideologi pengatur dan penata dalam pengelolaan harmoni dan konflik (termasuk frustrasi dan ketidakpuasan sosial, politik dan ekonomi), serta keharusan menyalurkan aspirasi dan kekuatan baru dalam masyarakat bangsa.

Menurut Frans Seda, adalah bermanfaat untuk melengkapi fungsi-fungsi sejarah dari Pancasila sebagai ideologi koreksi dan korektif terhadap segala macam kesewenangan dan penyalahgunaan wewenang, pemusatan kekuasaan dan kekayaan seperti yang pernah kita alami. Penegasan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi terbuka cocok dengan apa yang selalu dikemukakannya untuk mendorong dan membenarkan tuntutan keterbukaan dalam pergaulan dan interaksi politik yang didasarkan pada Pancasila.

Sistem Pemilu

Masalah politik yang mendapat tanggapan luas antara lain mengenai sistem pemilihan umum. Tentang hal ini, Presiden Soeharto dalam pidatonya menyatakan bahwa kalau ada ke-

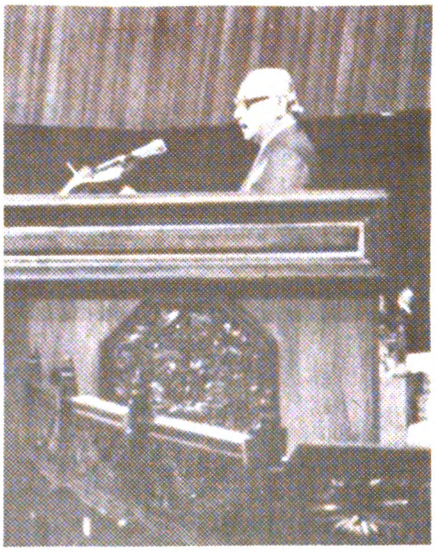

Sensor berkonotasi negatip

kuatan sosial politik yang memandang ada sistem pemilu yang lebih baik dari yang disepakati sekarang, tidak ada halangan untuk memperjuangkan pandangannya itu.

Kendatipun Presiden berpendapat bahwa terbuka adanya kesempatan untuk membicarakan sistem pemilu, ketiga teras pimpinan organisasi kekuatan sospol, Wahono (Golkar), HJ Naro (PPP) dan Surjadi (PDI) berpendapat, sistem Pemilu sekarang belum perlu diubah. Kalaupun terjadi perubahan hanyalah berupa penyempurnaan pada pelaksanaannya sehingga secara kualitatif lebih baik.

Ketua Umum DPP Golkar Wahono berpendapat bahwa bagi Golkar, sistem pemilu yang berlaku sekarang sudah baik. Sistem sekarang, yaitu sistem kombinasi antara proporsional dan distrik sudah tepat, apalagi itu merupakan hasil konsensus kekuatan sospol, katanya. Ia memang mengakui, mungkin sistem proporsional memiliki kelemahan, tetapi menyempurnakannya lebih baik daripada menggantikannya dengan sistem baru yang belum teruji.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP Dr. HJ Naro tidak mempermasalahkan sistem yang berlaku sekarang. Menurut dia yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan yang benar-benar "luber" dan "jurdil". Bagi PPP, katanya, tidak ada permasalahan dengan sistem pemilu, apakah sistem proporsional atau sistem distrik. Apapun sistemnya, PPP siap asalkan dilaksanakan secara luber dan jurdil. Jadi apakah sistem distrik, proporsional atau kombinasi antara keduanya, PPP dapat menyetujuinya. Yang penting pelaksanaan pemilu harus lebih baik.

Ketua Umum PDI Drs. Surjadi berpendapat bahwa sistem pemilu yang berlaku sekarang merupakan sistem yang terbaik. Hanya saja, pelaksanaannya perlu disempurnakan. Sebagai contoh, ia menginginkan agar peranan OPP (Organisasi Peserta Pemilu) diperjelas sejak dari persiapan sampai selesainya Pemilu. Gangguan yang dirasakannya seperti — harus memberikan suara di tempat kerja dan di sekolah — perlu ditiadakan sehingga tidak timbul kesan pemerintah tidak netral. Ia juga menilai "minggu tenang" tidak ada gunanya diberlakukan, karena hanya memancing terjadinya hal-hal yang merugikan OPP dan pemilih.

Kendatipun sistem yang berlaku sekarang merupakan yang terbaik, PDI membuka diri untuk mendengarkan pendapat dari pihak yang menganggap sistem lain yang lebih baik. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sekjen DPP Golkar, Ir. Rachmat Witoelar. Ia menyatakan bersedia untuk berdialog dan beradu argumentasi dengan mereka yang menghendaki sistem lain yang berbeda dengan sistem sekarang. Meskipun demikian ia berpendapat bahwa sistem pemilu yang dianut sekarang

Digitized by Google

adalah yang paling tepat dengan memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan secara kualitatif.

Sekjen DPP Golkar itu berpendapat, esensi dari sistem pemilu adalah bahwa rakyat bisa terwakili sebaik-baiknya. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat majemuk, diperlukan sistem yang menjamin wawasan kebangsaan yang tinggi, yang sangat penting bagi terbinanya persatuan bangsa. Sistem distrik, misalnya, dinilainya dapat mendorong pemecahbelahan bangsa karena akan memungkinkan berkembangnya sikap dan pemikiran yang lebih mementingkan kedaerahan, apakah yang bersifat primordial, eksklusif, ataupun parokial. Hal itu perlu perhatian, mengingat kesadaran politik masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Dikatakannya, sistem yang berlaku sekarang memenuhi semangat wawasan nusantara. Sistem itu memungkinkan wakil-wakil dari berbagai daerah menyatu dalam wawasan nasional melalui organisasi masing-masing. Di lain pihak sistem proporsional juga memberikan keuntungan bagi semua pihak. Sebagai gambaran, kalau pemilu yang lalu memakai sistem distrik, kemenangan Golkar yang baru lalu akan menghasilkan semua kursi perwakilan jatuh ke tangan organisasi politik itu, karena Golkar tidak mengalami kekalahan di salah satu propinsi mana pun.

Diakui oleh Rachmat Witoelar bahwa sistem proporsional sekarang memberi kesan bahwa para wakil rakyat lebih berkiblat pada organisasi kekuatan sosial politik yang menjadi induknya, daripada berkiblat pada masa pemilihnya. Hal itu bisa diatasi apabila para wakil itu benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk ini, Golkar telah memberikan jaminan, bahwa tidak akan merecall anggota DPR yang vokal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, mantan Sekjen DPP PDI Sabam Sirait berpendapat bahwa sistem distrik lebih baik daripada sistem kombinasi antara proporsional dan distrik seperti sekarang. Ia mengingatkan, sistem distrik telah diingatkan oleh Angkatan Darat dalam seminar II di tahun 1966. Pemikiran itu tidak disetujui, dan kemudian kesepakatan yang tercapai adalah tentang berlakunya kombinasi antara sistem proporsional dan distrik seperti sekarang. Dalam perkembangannya, sistem kombinasi itu lebih cenderung ke arah proporsional. Hal itu dinilainya searah dengan masalah sentralisasi dan desentralisasi yang tergambarkan bahwa sekarang semua orang tergantung pada orang pusat, orang di Jakarta. Menurut hematnya sistem distrik lebih baik dibandingkan dengan sistem sekarang, karena demokratisasi akan lebih terwujud di daerah. Sehubungan dengan itu, ia menginginkan agar kekuatan sospol mengkaji ulang sistem pemilu meskipun tidak secara langsung beralih ke sistem distrik.

Musyawarah Mufakat

Bagian lain dari pidato kenegaraan yang dikomentari oleh Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar adalah musyawarah mufakat khususnya dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sistem musyawarah mufakat dinilainya akan dapat menghindarkan adanya antagonisme perbedaan pendapat. Namun ia berpendapat hendaknya sistem itu dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan unsur yang kompeten seluas mungkin. Ia tidak setuju bila musyawarah mufakat itu nantinya merupakan penggiringan dalam pengambilan keputusan sehingga yang bermusyawarah nantinya tinggal 2-3 orang yang duduk sebagai pimpinan dengan mengatasnamakan semua pihak.

Frans Seda mengakui bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah Pak Harto nanti memang lebih sulit. Selama pengalaman 44 tahun merdeka, Indonesia memiliki dua Presiden, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Konsensus untuk menetapkan kedua tokoh itu sebagai Presiden relatif mudah karena keduanya "hero" yang memiliki karisma nasional dalam kepemimpinan mereka. Lain halnya tokoh lain setelah mereka. Karenanya dapat terjadi adanya alternatif, adanya pilihan. Menurut Frans Seda, masalah itu perlu diantisipasi mulai sekarang dengan kajian, apakah mekanisme konstitusional sudah cukup berbobot untuk menanganinya.

Rancangan GBHN

Tentang pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa terbuka kesempatan bagi kekuatan sospol untuk mengajukan usul Rancangan GBHN merupakan tantangan yang harus dijawab oleh kekuatan sospol. Apabila tiap-tiap kekuatan sospol siap dengan rancangannya, ia yakin nanti dalam memasuki pembahasan Rancangan GBHN masing-masing pihak lebih siap dengan konsepsi masing-masing, dan tidak hanya menerima saja masukan dari pemerintah. Diakuinya pula, bahwa kesiapan kekuatan sospol ini juga membawa dampak bagi pelaksanaan pembahasannya di MPR. Karenanya ia berpendapat perlu pemikiran agar sidang-sidang MPR nanti dapat lebih efektif khususnya dalam membahas materi sidang yang lebih luas dan lebih komprehensif.

Pernyataan Presiden mengenai RGBHN ini juga ditanggapi oleh Frans Seda sebagai keterbukaan yang tulus. Dikatakannya, untuk menyusun GBHN diperlukan bukan terutama keahlian atau ekspertis, tetapi wawasan-wawasan, yaitu mengidentifikasikan, mengkonsistensikan, dan mengkonfirmasikan wawasan-wawasan dalam bentuk GBHN.

Bidang Ekonomi

Pidato Presiden yang mengungkapkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,1 persen setahun dinilai oleh para pakar memberikan optimisme bagi pembangunan nasional jangka panjang. Namun para pakar itu mengingatkan bahwa diperlukan kewaspadaan atas titik-titik rawan yang dapat menghambat pembangunan.

Drs Frans Seda secara khusus melihat deregulasi dan debirokratisasi (derdeb) sebagai kunci tercapainya pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan selama Pelita IV. Namun ada kesan bahwa derdeb itu dilaksanakan secara tergesa-gesa sehingga ada beberapa bagian yang memerlukan penataan kembali. Selain itu, perkembangan ekonomi itu juga dimungkinkan terjadinya "boom" bidang ekonomi di dunia internasional sejak 1982. Karenanya menurut hematnya sinyalemen bahwa ekonomi dunia selama ini tidak menentu adalah tidak benar. Hal lain yang dicatat Frans Seda adalah makin tergantungnya pembangunan ekonomi pada hutang luar negeri selama Repelita IV. Hutang itu bisa membengkak dan tidak terpikul apabila ekonomi kita berada dalam kesulitan. Karenanya masalah ini perlu mendapat perhatian.

Drs Kwik Kian Gie justru mempertanyakan angka pertumbuhan yang melampaui 5 persen. Mantan Menteri Pertambangan Sadli juga mengatakan bahwa mungkin ada orang yang mempertanyakan tingkat pertumbuhan itu, dan kurang mempercayainya. "Ada prasangka Biro Pusat Statistik dapat

Digitized by Google

ditundukkan pada suatu kepentingan politik," katanya. Namun ia mengingatkan bahwa angka pertumbuhan dalam tingkat di atas 5 persen itu sudah banyak yang memperkirakan. Hal itu dikaitkan dengan pertumbuhan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Timur. Selama tahun lalu, kawasan itu menampakkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebagai gambaran, pertumbuhan Muangthai tahun lalu mencapai 11 persen. Sementara itu, anggota DPR BP Messakh minta agar BPS memberikan rincian hasil pemantauannya di bidang ekonomi itu kepada DPR.

Anggota DPR lainnya, Aberson Sihaloho mempertanyakan kemakmuran para petani dan masyarakat pedesaan. Masalahnya, nilai tukar komoditi para petani tetap kecil. Berdasarkan nilai tukar itu pula, pendapatan petani justru menurun.

Pakar ekonomi dari UI, Dr Prijono Tjiptoherijanto berpendapat, apabila peningkatan taraf hidup pedesaan dikarenakan berkurangnya penduduk sebagai akibat urbanisasi, bukan hal yang menggembirakan. Namun diakuinya, komitmen pemerintah yang kuat dalam pembangunan pedesaan sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang juga menjadi catatan Frans Seda adalah penyusunan konsep atau modal pembangunan ekonomi yang cocok dengan sejarah dan aspirasi perjuangan bangsa. Menurut hematnya, tugas itu tidak cukup dilaksanakan oleh para ahli ekonomi, tetapi juga menjadi tugas semua ilmuwan sosial termasuk para filosof, dan theolog yang berwawasan sosial serta cendekia yang berwawasan kebangsaan. □ (Sgt)

KOMENTAR

Kapitalisme dan Komunisme Dalam Transisi

John Kenneth Galbraith, guru besar ekonomi pada Universitas Harvard menulis, Uni Sovyet, Cina dan negara-negara Eropa Timur yang pernah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di zaman Lenin dan Stalin, sekarang dipaksa bergumul dengan masalah-masalah ekonomi yang semakin memberat.

Demikian juga dengan Amerika Serikat yang terkenal sebagai negara kapitalis terbesar di dunia, kini menghadapi krisis ekonomi yang cukup memusingkan. Amerika berusaha menjaga standar kehidupannya, dengan membuat hutang internal dan eksternal secara massasif. Prestasi industrinya tak lagi kompetitif terhadap produk industri "New Industrial Countries" seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan beberapa negara industri baru di kawasan Pasifik.

Prof. John Kenneth Galbraith lebih jauh mengatakan, dewasa ini Amerika lebih risau tentang ancaman ekonomi dari Jepang ketimbang ancaman politik dari Uni Sovyet. Sementara Uni Sovyet sendiri dihadapkan pada masalah kegagalan sosialisme di berbagai kawasan, seperti di Afganistan, Ethiopia dan Mozambik serta sulit diterapkannya kapitalisme maju di Dunia Ketiga oleh Amerika Serikat.

Menurut Galbraith, hal ini sesungguhnya tak perlu mengagetkan orang sosialis yang baik. Kalau saja mereka masih menghayati prinsip Karl Marx bahwa sosialisme hanya bisa berkembang setelah pengaruh sosialisasi awal dari kapitalisme berakhir. Bagi Amerika, menurut Galbraith, kebijaksanaan ekonomi sehat bagi Amerika, oleh negara-negara seperti India, Afrika atau Amerika Latin dianggap tidak cocok.

Dari cerita Galbraith ini, nampak bahwa kapitalisme liberal dan sosialisme komunal mulai menghadapi masa transisi. Ada pergeseran yang mendasar dalam tata nilai kehidupan antar bangsa. Kapitalisme yang mendasarkan diri pada persaingan bebas, dimana yang kuat akan menindas yang lemah, tak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan manusia. Nilai humanitas makin merasuk pergaulan manusia sehingga penindasan dan penghisapan demikian dianggap bertentangan dengan peradaban manusia.

Sosialisme yang mengutamakan kepentingan bersama secara komunal, dianggap bertentangan dengan hak-hak azasi individual. Sosialisme komunal dianggap merampas dan memperkosa hak azasi.

Begitu tulis Galbraith tentang kecenderungan yang sedang terjadi di Amerika dan Uni Sovyet. Dua negara adikuasa ini sedang dalam proses mengadaptasikan diri dengan perkembangan dunia sekarang. Mereka sedang mencari model yang paling sesuai untuk melakukan pendekatan baru terhadap negara-negara di dunia.

Tetapi Galbraith melihat sesuatu yang positif dari transisi kapitalisme dan komunisme itu. Dia mengambil contoh misalnya, perubahan-perubahan yang terjadi di Uni Sovyet belakangan ini, menunjukkan adanya pergeseran nilai dari komunisme tradisional kearah sistem yang lebih terbuka.

Sementara Amerika sendiri dipaksa untuk melihat dunia ini sebagai suatu totalitas bukan partikel-partikel yang tak berkait. Liberalisme yang dianut bukan lagi liberalisme mula-mula, tetapi liberalisme yang sudah mau berkompromi dengan realitas keseharian kehidupan. Penindasan yang kuat terhadap yang lemah tak lagi menjadi mithos, bahkan Amerika sering menampilkan diri sebagai pengecam penindasan apapun bentuknya.

Ada pergeseran cukup berarti di kedua negara adikuasa itu. Kecenderungan perubahan sikap yang terjadi di kedua negara adikuasa itu dilihat Galbraith sebagai belum memuaskan. Karena perubahan sikap pada tingkat pengambil keputusan tidak dibarengi oleh tindak laku dalam masyarakatnya. Masih banyak orang Amerika yang tidak toleran terhadap kemiskinan; di Uni Sovyet justru dikalangan elit kekuasaan, terjadi pertikaian antara kekuatan yang setuju pembaharuan dan yang mempertahankan sosialisme komunal yang tradisional.

Galbraith mengakhiri tulisannya dengan mengatakan: "Disatu pihak ada perubahan tapi pada pihak lain ada perlawanan keras terhadap perubahan itu. Kekuasaan yang mendorong munculnya kepercayaan institusional, berhadapan dengan kepentingan intelektual serta kepentingan ekonomis yang terkandung di dalamnya. Disini para pengambil keputusan terkadang membuat keputusan yang tak sesuai karena pertimbangan politik untuk mempertahankan kebijaksanaan penguasa sebagai penentu." □ •••

Digitized by Google

Menuju Penyelesaian Tuntas Kamboja

Dalam konteks Asia Tenggara masalah Kamboja masih tetap merupakan hambatan utama bagi terciptanya stabilitas kawasan, di samping menjadi penghalang tercapainya lingkungan yang damai, bebas dan netral di kawasan ini.

Karena itulah, berbagai negara yang berkepentingan berupaya keras mencapai titik temu antar faksi yang bertikai melalui perundingan dalam pertemuan tidak resmi Jakarta (JIM) I dan II, pertemuan antara pemimpin kelompok perlawanan Kamboja, Pangeran Norodom Sihanouk dengan PM rezim Phnom Penh, Hun Sen maupun melalui Konferensi Internasional Masalah Kamboja (ICK) di Paris.

Di ICK Paris itu, untuk pertama kalinya keempat faksi Kamboja yang saling bertikai itu bergabung dalam satu delegasi pada forum internasional resmi dan sepakat untuk mencapai penyelesaian masalah mereka.

Konferensi Paris yang dibuka sejak 30 Juli dan berakhir 1 Agustus 1989 itu berhasil membentuk tiga komite kerja dan satu komite ad hoc di bawah naungan komite internasional, yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Perancis.

Komite koordinasi bertugas mempersiapkan dokumen akhir yang akan diajukan kepada para Menlu 28 Agustus, sebagai lanjutan ICK tahap kedua.

Sementara ketiga komite dan komite ad hoc merumuskan persetujuan secara menyeluruh, sisa pasukan Vietnam di Kamboja yang ditaksir sekitar 50.000 personil akan ditarik mundur di bawah pengawasan internasional.

Setelah itu, untuk mewujudkan netralisasi Kamboja, diadakan pemilihan umum bebas, pemulangan para pengungsi serta membangun kembali Kamboja yang telah porakporanda akibat perang selama 11 tahun terakhir ini. Selain itu, konferensi Paris itu juga menerima baik usul Sekjen PBB Javier Peres de Cuellar untuk mengirim misi pencari fakta yang bertugas mengumpulkan data teknis di lapangan.

Tim pimpinan Letjen Martin Vadset dari Norwegia itu terdiri atas 15 perwira militer dari Australia, Inggris, Perancis, Norwegia, Malaysia, India, Kanada, Indonesia, Polandia ditambah sejumlah pejabat sipil dari Iran dan Jamaika.

Misi PBB yang akan memantau penarikan mundur pasukan Vietnam bulan depan dari Kamboja, secara mengejutkan melakukan kunjungan ke Vietnam. Di Ho Chi Minh City, mereka bertemu dengan para pejabat Kemlu Vietnam sebagai upaya untuk mencari fakta dan cara yang patut diambil untuk mewujudkan perdamaian di Kamboja serta memantau janji Hanoi menarik pasukan terakhirnya pada 26 September.

Awal prahara

Maret 1970, kepala negara Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk melakukan kunjungan ke Uni Sovyet. Saat itu, PM Lon Nol dengan dukungan AS, melancarkan kudeta tak berdarah. Sihanouk terpaksa mengasingkan diri ke Beijing sambil menyusun siasat untuk kembali memimpin negerinya.

Pada Oktober 1970, Lon Nol memproklamasikan Kamboja menjadi Republik Khmer, sementara tentara AS dan Vietnam Selatan membantunya menggempur pangkalan-pangkalan komunis Khmer Merah.

Tapi, pemerintahan Lon Nol tidak bertahan lama. Tahun 1975 ia ditumbangkan oleh Khmer Merah. Ia melarikan diri ke Guam lewat Bali, karena AS yang menjadi tuan pelindungnya pun telah di depak dari Vietnam.

Khmer Merah kemudian membentuk sebuah pemerintahan kiri di bawah pimpinan Sekjen Partai Komunis Kamboja, Pol Pot yang juga merangkap sebagai PM dan jabatan presiden diserahkan kepada Khieu Samphan. Pol Pot adalah seorang Maois tulen dan secara tegas melaksanakan ajaran Mao dalam pemerintahannya.

Ia mengosongkan dan menggiring penduduknya untuk bekerja di lahan pertanian guna meningkatkan produksi yang seluruhnya dikuasai oleh negara. Sistem pasar ditiadakan dan Kamboja pun menjadi sebuah negara tertutup yang nyaris tak ada hubungan dengan negara lain kecuali Cina.

Pada saat inilah, Pol Pot berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Mereka yang membangkang atau tidak mau mengikuti garis partai dibunuh. Jutaan orang Kamboja menemui ajalnya oleh siksaan Khmer Merah.

Akibat perbuatan tak berprikemanusiaan ini, rezim Khmer Merah kehilangan simpati dari negara Barat maupun negara-negara non komunis di kawasan Asia Tenggara.

Vietnam yang merasa terjepit oleh persahabatan Cina-Kamboja melancarkan serangan ke wilayah Kamboja pada Desember 1978. Khmer Merah berhasil ditumbangkan dan Januari 1979 mendudukkan Heng Samrin, seorang kepala divisi Khmer Merah yang membelot, sebagai kepala pemerintahan di Phnom Penh.

Walaupun penyerbuan Vietnam itu bisa menghentikan suatu pemerintahan yang kejam terhadap rakyatnya sendiri, namun sebagian besar negara tidak membenarkan tindakan Vietnam. Apalagi sampai sekarang Vietnam masih meninggalkan sisa pasukannya sekitar 50.000 orang di wilayah Kamboja, sehingga Kamboja tidak lebih dari sebuah negara boneka Vietnam.

Rakyat Kamboja sendiri menyatakan ketidaksenangannya terhadap kehadiran Vietnam di negeri mereka. Tiga kelompok Kamboja bergerilya menentang Vietnam. Ketiganya adalah kelompok KPLNF pimpinan mantan PM Son Sann, Moulinaka pimpinan Sihanouk dan Khmer Merah pimpinan Khieu Samphan.

Di antara ketiga kelompok perlawanan ini yang paling berperan adalah Khmer Merah. Menurut taksiran kelompok ini berkekuatan sekitar 30.000 anggota. Dan, senjata yang mereka miliki lebih satu pucuk bagi setiap anggotanya. Semua senjata dan kebutuhan lainnya berasal dari Cina. Persenjataan dari kebutuhan Khmer Merah itu dikirim ke kantong-kantong gerilya lewat wilayah Thailand.

Walaupun demikian, tidak jarang terjadi kontak senjata antara kelompok perlawanan khususnya Khmer Merah dengan pasukan Phnom Penh dukungan Vietnam di dalam wilayah perbatasan Kamboja-Thailand.

Akibatnya ribuan penduduk Kamboja terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dan tinggal di kamp-kamp pengungsi di wilayah Thailand yang sebagian besar berada di bawah pengawasan Khmer Merah.

Sikap Sihanouk

Secara logika, penyelesaian masalah

Digitized by Google

Kamboja dapat diselesaikan dalam perundingan antara kelompok perlawanan pimpinan Sihanouk dengan Hun Sen dari pihak Phnom Penh. Namun, beberapa kali pertemuan langsung keduanya di Paris maupun dalam JIM I dan II, tidak membawa hasil konkrit.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya titik temu itu, antara lain sikap Sihanouk yang dinilai "plin-plan" dan suka ngambek.

Ia memang seorang pemimpin yang karismatis namun bersikap otoriter. Ada yang menilai "mengundurkan diri" mungkin adalah pekerjaan yang paling sering dilakukan Sihanouk dalam sejarah kepolitikannya.

Tindakan pengunduran dirinya terakhir yang dilakukan ialah "berhenti" sebagai Presiden Pemerintahan Koalisi Kampuchea Demokratik (CGDK) tahun lalu.

Menurut seorang pengamat, perspektif kebiasaannya mengundurkan diri Sihanouk itu bisa ditafsirkan sebagai pemimpin yang cepat putus asa.

Sikapnya terhadap Khmer Merah yang juga membantai sejumlah anggota kerajaan, sanak keluarga Sihanouk, kadang-kadang dinilai tidak tegas. Ia malah bersekutu dengan Khmer Merah dalam koalisi perlawanan Kamboja untuk memerangi pasukan Phnom Penh dan Vietnam.

Banyak negara Barat yang bersikap dingin kepada Sihanouk setelah ia membentuk koalisi perlawanan bersama Khmer Merah. Semasa Orde Lama, Sihanouk ikut menggodok rencana pembentukan "Poros Jakarta, Phnom Penh, Peking, Pyongyang".

Hal inilah antara lain yang menyebabkan mengapa tahun 1970, Indonesia bersama beberapa negara lain menentang diundangnya Sihanouk ke KTT Non Blok di Lusaka.

Namun, dapat dimaklumi, karena Sihanouk yang beristerikan Puteri Monika asal Perancis itu menetap di Beijing dan sudah barang tentu senantiasa berada di bawah tekanan Cina.

Kadang-kadang ia melemparkan kecaman kontroversial terhadap Khmer Merah atau Hun Sen, yang dulunya juga tokoh Khmer Merah tapi membelot. Ia pernah menyebut Khmer Merah sebagai "ular berbisa. Kalau Khmer Merah meraih kemenangan, saya pasti akan mereka tendang," katanya.

Tetapi belakangan ini tersiar kabar bahwa sejumlah pasukan Moulinaka yang tadinya sering diteror Khmer Merah, malah bergabung dengan Khmer Merah.

Ada juga pengamat yang menilai Khmer Merah merupakan duri dalam daging bagi penyelesaian konflik Kamboja.

Contohnya, dalam pertemuan Pokja di Jakarta awal tahun ini, Khmer Merah tidak mengirim utusan walaupun dalam diplomasi bolak-balik Jakarta, Bangkok, Hanoi, Menlu Indonesia Ali Alatas telah mendapat jaminan dari seorang tokohnya bahwa mereka akan datang.

Demikian pula ketika Sihanouk-Hun Sen bertemu untuk kedua kalinya di Paris akhir tahun lalu. Dalam pertemuan dengan kelompok lain setelah perundingan kedua tokoh Kamboja itu, tak seorang pun utusan tingkat tinggi Khmer Merah yang hadir. Khmer Merah hanya mengirim seorang wakil yang kehadirannya ditampik oleh Hun Sen.

Ada juga pengamat yang menilai Khmer Merah merupakan duri dalam daging bagi penyelesaian konflik Kamboja.

Peranan Indonesia

ASEAN bersama beberapa negara lain berupaya mencarikan penyelesaian politik secara menyeluruh bagi masalah Kamboja lewat PBB maupun konferensi internasional sebagaimana diadakan di Paris baru-baru ini. Indonesia ditunjuk sebagai interlocuter atau jurubicara. ASEAN berharap diakhirinya segera sengketa di kawasan ini dan kemudian satu sama lain menjalin hubungan bersahabat dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam upaya ini termasuk menyingkirkan campurtangan kekuatan asing, menciptakan zona damai, bebas dan netral serta zona bebas senjata nuklir.

Untuk kepentingan inilah Menlu Ali Alatas maupun pendahulunya, Mochtar Kusumaatmadja melakukan "diplomasi bolak-balik", yang antara lain menghasilkan Ho Chi Minh Understanding dan penyelenggaraan JIM I dan II.

Secara nyata JIM I dan II maupun ICK Paris belum menghasilkan penyelesaian yang didambakan selama ini, namun telah tercapai suatu pendekatan antar bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yakni antara ASEAN dan Indocina.

Sekarang ini, di Indocina timbul semacam "vacuum ekonomi" yang pengisiannya dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk hingga bisa membawa laba cukup besar bagi investor di masa mendatang.

Mengingat serba sentralisasi kekuasaan di negara-negara Indocina khususnya Vietnam maka pembukaan pintu bagi investor ini adalah sekedar soal politik dan nampaknya putusan ini sudah diambil, antara lain dalam ICK Paris dan salah sebuah negara yakni Jepang menawarkan bantuan untuk membangun kembali negara yang hancur akibat perang saudara selama 11 tahun itu.

Indonesia telah sejak lama menjajaki perluasan hubungan ekonominya dengan Vietnam melalui diplomasi bolak-balik Jakarta-Hanoi oleh Menlu Ali Alatas maupun Nguyen Co Thach, Menlu Vietnam.

Selain membahas penyelesaian masalah Kamboja, Indonesia juga memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menawarkan ekspor semen dan pesawat terbang produksi IPTN Bandung dan berbagai komoditi lainnya.

Walaupun demikian, tingkat aktivitas diplomasi Indonesia tidak luput dari dampak faktor penghambat seperti sikap dari negara-negara tertentu anggota ASEAN yakni Thailand dan Singapura. Namun demikian, Indonesia senantiasa berupaya terus mewujudkan penyelesaian damai konflik Kamboja ini.

Tahun 1986 misalnya, Indonesia mengajukan suatu gagasan penyelesaian politik masalah Kamboja dalam bentuk 12 butir usul Menlu RI. Oleh karenanya, Indonesia mendukung usul 8 pasal yang diajukan CGDK, karena mendukung elemen-elemen seperti yang diajukan oleh Indonesia.

Dalam forum multilateral khususnya di sidang Majelis Umum PBB 1986, resolusi yang diprakarsai oleh ASEAN mengenai masalah ini telah mencapai kemajuan dengan kian bertambahnya dukungan internasional.

Resolusi yang berisi tuntutan penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja dan penentuan nasib sendiri rakyat Kamboja tersebut telah didukung oleh 116 negara dibanding 114 negara pada tahun sebelumnya.

Apabila, penyelesaian konflik Kamboja dapat dicapai dengan damai maka citra Indonesia akan semakin meningkat di dunia interasional.☐ (TG)

Digitized by Google

Oleh Maria Sugiharto (Mantan Anggota BSF)

SENSOR FILM

***** *Anggota BSF sebaiknya dituntut di Pengadilan, demikian kata DPR.*
***** *Sebel deh, bila ada adegan ciuman diserial TV, pasti... hilang, kata pemirsa TV yang awam.*
***** *Anggota BSF penting untuk didekati. Ada yang* **can** *(bisa), tetapi ada yang galak... demikian kata produser dan importir.*
***** *Oh, ça exist encore, le Censure? kata orang Perancis dari Centre Culturel Français, agak sinis. (artinya, masih ada to, BSF?).*

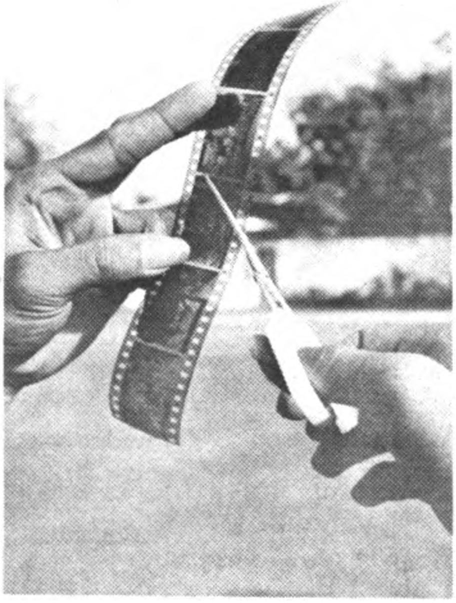

Banyak hal yang dihadapi BSF

Sensor mengandung konotasi negatif. Kata *"Sensor"*, membayangkan sebuah alat, tepatnya sebuah *gunting*, untuk memotong, tentu saja. Sensor, berasal dari kata Latin *censor*, yang berarti Pengadilan Romawi. Kata censor, kemudian mendapatkan arti secara figuratif, sebagai sesuatu yang mengawasi hal-hal yang salah atau hal-hal yang harus dikontrol atau diawasi oleh instansi resmi, didalam hal ini Pemerintah.

Badan Sensor Film, adalah sebuah lembaga yang mengawasi dan membuang hal-hal yang tidak seharusnya ada, karena sesuai dengan fungsi yang diemban dengan nama klasik Censor itu, ialah mengawasi.

Badan Sensor Film, selanjutnya dikenal dengan nama BSF, adalah lembaga resmi dari Pemerintah Indonesia yang bertugas mengkaji, menelaah serta menyensor film, baik impor maupun film nasional yang akan diputar. Melihat tugasnya ini tentulah BSF sangat berarti serta bermartabat tinggi, karena didalam penyensoran film (sekali lagi baik impor maupun nasional) akan ditujukan lebih-lebih kepada apakah film itu layak ditonton sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Konotasi yang lebih mengesan pada lembaga BSF adalah menghilangkan atau menggunting adegan-adegan didalam film yang bersifat, lebih-lebih... pornografis, sadistis, kekerasan.

Apa yang di Sensor? Bagaimana Menyensor?

Sebagai lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah, bahkan bernaung di bawah Departemen Penerangan, BSF bekerja berdasarkan sebuah undang-undang, yang sebenarnya sudah agak usang, karena sampai kini belum ada perundangan mengenai perfilman, maka yang dipergunakan sebagai dasar bagi dunia perfilman adalah *Ordonantie* dari jaman kolonial Belanda. Ordonantie itu berdata tahun 1940 no. 507, dan dibuat dibawah Pemerintah Gubernur Jenderal Tjarda Van Starkenborgh. Tepatnya ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 1940.

Jadi, mengenai seluk beluk perfilman, sementara masih didasarkan kepada Ordonantie 1940 tersebut, kendati usaha memperjuangkan kedalam undang-undang sudah berkali-kali diisyaratkan.

Digitized by Google

Banyak liku-liku yang dihadapi para penyensor, didalam hal ini para anggota BSF, karena film yang diputar di Indonesia dituntut untuk kultural dan edukatif. Lho, mengapa susah? Bila menyensor sudah ada sarana serta undang-undang dan prinsip-prinsipnya? Justru disini inilah banyak hal yang harus dihadapi oleh para anggota BSF, yang kadang-kadang harus melakukan akrobat, karena apa yang tersurat dan tersirat membutuhkan pengkajian yang teliti dan yang bersih lingkungan atau "suci hama" dari faktor komersialisasi didalam dunia perfilman, beserta seluruh aspek yang melingkupi, ialah produser, sutradara, pemain, dan importir, bagi film-film import.

Para anggota BSF dipilih dari berbagai unsur didalam pemerintahan, seperti para akademisi, pakar perfilman, para pendidik, anggota organisasi masyarakat dan beberapa unsur didalam pemerintahan yang menunjang seperti BP-7, Kejaksaan Agung, Mabes ABRI, Mabes POLRI, MUI, KWI, PWI, PGRI, KNPI. Segudang organisasi berpartisipasi, dengan harapan bahwa penggarapan penyensoran akan lebih akurat, lebih ethis, lebih kultural dan edukatif, karena thema film menyangkut bermacam-macam aspek. Drama, sex, horor, action, sadis, dan lain-lainnya, tergantung selera masyarakat didalam menonton film. Semacam sebuah kata majemuk, *kultural-edukatif,* merupakan suatu pegangan atau buku biru didalam cara penyensoran semua film yang akan diputar di Indonesia. Terasa sangat ideal, bila kata kultural edukatif itu benar-benar dapat diterapkan kepada film-film yang dipertontonkan, dan lebih-lebih terasa sangat ideal bila yang kultural dan yang edukatif itu juga melingkupi artian yang komersial dan laris.

Selera menonton film mengalami perubahan, sesuai dengan perubahan jaman serta pengaruh kemajuan teknologi, seperti jalannya mode saja. Meskipun masih ada suatu matra bagi idealisme didalam lapangan ini, atau suatu patokan yang lebih patent, misalnya bentuk patokan (busana misalnya) yang dari jaman ke jaman akan selalu *in de mode* atau *fashionable.*

Didalam perfilman juga terkena arus ini. Film berdasarkan novel terkenal atau film sejarah yang spektakuler (seperti *The Last Emperor* atau *Tjoet Nya' Dien*) tidak lekak karena usang, tetapi akan memilih kepada masyarakat yang sudah lebih "educated" untuk mendapatkan pasaran.

Pengalaman menyensor

Anggota BSF akan diajukan ke Pengadilan!! Demikian pernyataan anggota DPR terhadap film yang kendati sudah lolos sensor (berarti diloloskan oleh BSF), tetapi terpaksa ditarik dari peredaran, karena pertimbangan-pertimbangan moral. Film yang seperti mengorbitkan peran utamanya karena keberaniannya bermain "panas", berjudul *Pembalasan Ratu Laut Selatan* (PRLS). Bila anggota BSF dituntut ke Pengadilan, siapa yang dituntut? Para penyensornya *an sich* yang menyensor pertama kali, atau anggota BSF keseluruhan, ataupun BSF sebagai sebuah lembaga?

Tata cara kerja BSF sebagai pelaksana SK Menteri Penerangan yang notabene menimbang dan mengingat undang-undang yang terdahulu (dasarnya adalah Ordonantie 1940) menetapkan tentang keanggotaan BSF, dan memberikan pelilah atau ijin untuk menyusun tatacara kerja, yang dari tahun ke tahun tidak bergeser banyak, karena tata tertib yang ada dianggap sudah baik. Tiga orang adalah syah untuk menyensor sebuah film yang masih "Gres" keluar dari produksi. Apakah itu film nasional, ataukah film import. Film import, bisa saja dari Amerika, Eropa, Asia Mandarin dan Asia non Mandarin. Bila dikatakan Gres baru, sebenarnya tidak benar. Apalagi yang import. Gres, didalam arti belum pernah diputar di Indonesia. Bagi para importirnya, film tersebut sudah merupakan barang lama, karena mereka sudah menyaksikan di luar negeri, ketika membeli. Bahkan, kalau perlu, mereka bisa memotong sebagian yang dipandang tidak perlu (secara komersial). Hal ini dibenarkan secara undang-undang (Ordonantie 1940), karena didalam ordonantie disebutkan didalam salah satu pasalnya bahwa film adalah sebuah komoditi yang bisa saja memungkinkan pemiliknya (didalam hal ini importir) untuk "menjual" dengan sesuka hati, termasuk memodifikasi atau bahasa jurnalisnya yang lebih keren meng-*edit.*

Apakah editing seorang pedagang - importir atau distributor film nasional selalu sesuai dengan garis yang ditetapkan bagi anggota BSF dalam menyensor? Pernah ada sebuah film Amerika mengenai sebuah pengadilan. Seperti kita ketahui, bila film Amerika mengemukakan adegan di Pengadilan, apakah itu didalam film serial atau film cinema, selalu dengan akurat serta gamblang, karena rupanya urusan pengadilan selalu menjadi obsesi orang Amerika. Bagi penyensor, yang tiga orang (tim tiga) yang kebetulan oknum-oknum yang mengerti soal-soal begini, mempertanyakan, pemotongan sebagian adegan dan meminta sebuah forum Pleno bagi seluruh anggota BSF. Forum juga dihadiri importirnya, untuk mempertanggung-jawabkan pemotongan yang dia lakukan tidak tepat pada tempatnya. Film menjadi buntung, tiada tampak korelasinya, apalagi, karena ini adegan di

Digitized by Google

pengadilan, maka ketika tahu-tahu si tergugat bebas, tidak seorangpun mengetahui jalannya sidang. Si importir mempertanggung-jawabkan pemotongan yang sepanjang 20 menit yang merupakan dialoog *cross examination* didalam pengadilan, dengan alasan bahwa kepanjangan itu tiada guna, bahkan hanya memakan waktu pemutaran saja.

Wallahualam! Tetapi, apa boleh dikata, bila hal ini dibenarkan oleh undang-undang? Nyatanya para anggota BSF tiada berkutik, dan setelah perdebatan seru bahkan musyawarahpun tiada terselesaikan, maka *voting* merupakan jalan akhir. Tidak tahu bagaimana, yang terang *tim-tiga* yang meminta dikembalikannya adegan yang duapuluh menit itu, kalah total. Apa boleh buat.

BSF berkewajiban menyensor segala macam yang berhubungan dengan film, termasuk video cassette, film serial TV, film-film atau Cassette Video yang dimiliki oleh lembaga-lembaga kebudayaan seperti Centre Culturel Francais, PPIA, serta lembaga-lembaga pendidikan bahasa misalnya, termasuk film-film buatan pribadi atau organisasi, seperti Suku Asmat, juga penyensoran terhadap poster-poster film dan balihoo. Beberapa serial di TV termasuk Si Unyil, memang tidak banyak memberatkan pekerjaan anggota BSF, meskipun bila kita akan lebih akurat, ternyata suatu kali ditemui hal-hal yang kurang edukatif didalam salah satu episode serial itu (meskipun si Unyil), hal mana merupakan suatu dosa yang selayaknya tidak dilakukan oleh anggota BSF.

Bukan menutup-nutupi realita, tetapi banyak dan kerapkali terjadi bahwa anggota yang mendapatkan giliran menyensor tidak hadir karena, seperti diketahui, banyak diantara para anggota BSF memiliki bermacam-macam jabatan. Bahkan ada yang sepanjang tahun tidak pernah tampak menyensor, dan ada yang sama sekali tidak memiliki waktu, karena tugas sebagai pejabat telah menyita banyak waktunya, maka harus diambil seorang pengganti yang segera harus didatangkan. Bila diantara tiga orang (tim-tiga) itu didalam keadaan siap pakai, maka menyensor, disamping bekerja, memang bisa dinikmati. Ini bagi tim-tiga orang yang memang memiliki gelombang yang sama (maksudnya gelombang pengetahuan) sehingga resonansi terdengar harmonis, dan hasil sensoran biasanya perfect (meskipun tidak ada barang yang sempurna di dunia ini?). Minimal mendekati kesempurnaan, sesuai dengan kaidah. Tetapi, bisa-bisa saja, bahwa salah satu atau kadang-kadang dua orang diantara yang tiga itu mengantuk karena kecapaian bekerja, atau kurang interesse kepada film yang disensor, atau kurang mengerti bahasa Inggeris yang dipakai didalam dialoog film, dan barangkali juga karena usia yang jauh sudah lanjut, maka setelah rapat tim-tiga (penyensoran pertama) untuk menentukan klasifikasi untuk usia berapa, dan menggolongkan film dalam kategori apa dan lain-lainnya, maka anggota yang tadi ngantuk (atau katakanlah *absence minded*) akan menutupi kekurangannya dengan mengadakan debat yang bermacam-macam, yang tentu saja menghambat.

Kadang-kadang, karena didalam penyensoran film besar selalu dilaksanakan reel per reel, dan film panjang bisa mencapai 8 reel, maka untuk mereka yang ogah bertele-tele, ada semacam *agreement*, bahwa setiap adegan bugil, kalau dari depan, potong. Bila itu adegan ciuman, juga potong saja, tidak peduli apakah itu ciuman antar tunangan atau ayah dan ibu, ataupun antar kekasih dalam film yang berthema bagus. Pokoknya potong, untuk tidak mengambil resiko.

Maka, kerapkali, bagi seorang anggota BSF mendapat kecaman dari teman atau rekan atau kenalan: Mengapa adegan ciuman dalam film serial TV yang baik kok dipotong? selalu deh, kalau sudah mau ciuman ... cut (baca: kat). Jadi sebel deh "... Padahal itu kan bukan berbau sex." keluhnya kesal.

Memang, menyensor tidak bisa seratus persen obyektif. Disamping faktor-faktor yang saya kemukakan diatas, juga setiap anggota memiliki selera, mood, dan penilaian yang sifatnya relatif pribadi, tergantung pendidikan, tingkat *broad-mindedness* (maaf, maksudnya keluasan wawasan) setiap anggota BSF.

Menghadiri Konferensi Internasional untuk Penyensoran Film

Birokrasi dan feodalistis didalam keanggotaan serta tugas-tugas yang diemban, ternyata masih juga terjadi didalam sebuah badan seperti BSF. Bukan saya ingin mengeritik tanpa beralasan, tetapi bila ini menyangkut profesionalisme, maka sepantasnyalah dikemukakan, untuk melatar belakangi penilaian tentang anggota BSF, sehubungan dengan pembantaian akhir-akhir ini, bahwa anggota DPR mengusulkan untuk mengajukan BSF ke Pengadilan.

Atas undangan panitia internasional untuk sebuah konperensi Internasional untuk penyensoran film yang diprakarsai Inggris dan diadakan di London untuk pertama kalinya pada tahun

Film tidak dapat keluar karena menunggu penyensoran

Digitized by Google

1982, BSF mempertimbangkan untuk hadir. Semua dibicarakan baik, hanya alasan klasik yang selalu menjadi kendala, ialah tidak ada dana.

Almarhum Menteri Penerangan Ali Moertopo, adalah orang yang selalu berusaha memajukan departemennya dengan fungsinya yang sempurna. Maka, karena kami yang kebetulan anggota BSF, sedang berdinas ke luar negeri, diberi SK untuk menghadiri konperensi tersebut. Apa lacur, direktorat yang membawahi BSF menentukan lain.

Sebaiknya anggota BSF yang akan hadir di London menjadi alternate saja, sedangkan delegasi resmi dikirim dari KBRI di London, ialah seorang staf dari Atase Penerangan di London. Singkat cerita, ketika kami tiba di London, kami diberi kabar bahwa staf KBRI tersebut tidak dapat menghadiri konperensi, sehingga minta kebijaksanaan kami untuk mengambil keputusan. Staf lain yang menjemput kami mengatakan bahwa yang seharusnya menjadi delegasi dikonperensi, karena kurang pengetahuan mengenai bahan penyensoran film, mengambil kebijaksanaan untuk tidak hadir. Nah, apa kata! Akhirnya kami kemukakan kepada panitia, bahwa kami yang datang dari Jakarta dan telah ditelegramkan serta tertulis didalam pendaftaran menjadi alternate, ternyata dibenarkan oleh panitia untuk menjadi delegasi penuh. Sambil keheranan berkomentar: "Mengapa harus menjadi alternate, bahkan lebih dari seorang delegasi untuk staf panitia satu negara dibenarkan didalam konperensi ini. Lagi pula, bukankah anda yang anggota BSF....? I wonder, what's wrong ..." komentar panitia berbangsa Inggris itu.

Tidak akan saya ceritakan seluruh jalannya konperensi yang membahas tentang penyensoran film di London itu, karena ini akan merupakan cerita sendiri yang panjang. Tetapi beberapa hal yang pantas dicatat, bahwa,bahkan di Inggris, AS, Perancis, Denmark, Swedia, Australia, india, Pakistan, dan beberapa negara di Afrika, memiliki BSF, dan menghadapi banyak masalah sehubungan dengan perkembangan film. Satu hal yang mempunyai korelasi dengan ditariknya film nasional berbau porno (PRLS) yang menghebohkan itu, yang pernah saya catat, tentang film porno yang ditarik dari peredaran pula, dan menjadi kasus Pengadilan. Ini di Inggris.

Sebuah film porno bisa menjadi kasus pengadilan, bukan dari pornografisnya -- didalam konperensi itu bila menunjuk kepada film yang porno sekali disebut *hard-core pornography*-- tetapi ada alasan lain mengapa maju ke pengadilan.

Film itu adalah import. Jelasnya dari AS. Film terpaksa ditahan di pabean karena dikategorikan sebagai barang terlarang atau barang selundupan. Hal ini bisa terjadi, karena Pemerintah Inggris sudah mensinyalir tentang beredarnya film yang dinilai *hard-core pornography* itu. Nah, sebagai barang sitaan, perlu maju ke pengadilan. Untuk pengkajiannya, film diputar didepan dewan juri. Setelah film selesai diputar, dan lampu dinyalakan, maka paling sedikit selama lima menit tiada seorangpun dewan juri yang semuanya terdiri para pria itu berani beranjak dari kursi.

"No body dares to stand up..." demikian keterangan yang diberikan sebagai bahan informasi oleh seorang *Barrister* (Pengacara) yang masih muda. Dan meskipun orang Inggris terkenal sangat sopan sehingga mendapatkan julukan *British Gentleman,* sang Barrister toh berani berbicara tentang pengalaman ini dengan sedikit humor dan berbicara dengan aksen *Cockney*nya, wajahnya sempat memerah karena malu dan lucu.

Beberapa pengalaman yang pantas dicatat

"Seperti membeli kucing dalam karung", demikian kata para importir menceritakan pengalamannya membeli film import. Mereka membeli harus satu paket, tidak memilih-milih, seperti membeli kaset lagu, tidak dapat memilih lagu yang disenangi saja. Maka sebagai seorang business, mereka berhitung secara business pula. Bila satu film laku keras, maka yang lainnya bisa-bisa saja tiada harga. Untuk itu, ada saja akal para importir dan produser bila film masuk ke BSF. Minta agar cepat di sensor, dan bila di sensor berani menawarkan sekelumit kemudahan, seperti "makan apa", apakah butuh ini, itu, untuk rumah? Cassette video? Ini semua tentu saja bukannya tanpa kompensasi yang diminta, antara lain agar diloloskan dengan rating (rata-rata usia) 17 tahun keatas misalnya, agar laku. Dan tentu saja tidak mustahil, mereka yang tahu, kira-kira yang akan kena gunting sensor yang mana, menggunting duluan, sebelum disensor (dibenarkan oleh ordonantie), dan nantinya memasang lagi. Selalu mungkin.

Pernah, didalam kamar pengguntingan terhadap film nasional yang serupa PRLS, dimainkan oleh aktris terkenal cantik dan sexy, Suzanna, maka produser dengan gigihnya menunggu di kantor BSF, kalau perlu begadang, sambil bersikap ramah tamah terhadap para penggunting yang terdiri dari anggota,dan pelaksana teknis (karyawan). Bagi produser atau importir, mereka memang harus memelihara sikap begini, layaknya orang business dalam banyak bidang, harus tahu menservis. Karena, tidak lolosnya sebuah film (bila ditolak oleh BSF) atau dibantainya sebuah film (karena terlalu banyak guntingan) adalah neraka. Business bisa hancur.

Pernah, seorang produser dan pemain film terkenal, tanpa kompromi dengan BSF, ingin meng-GALA PREMIER-kan filmnya ke Surabaya, tepat pada waktu film masuk ke BSF baru sehari. Antrean panjang, bagi dia tidak soal, karena dia biasa menservis BSF. Tetapi sekali ini dia kena batunya. Dia minta dengan marah-marah, agar filmnya segera disensor, karena sore hari akan dibawa ke Surabaya. Siapa suruh? demikian beberapa anggota penyensor bertanya. Siapa bisa menghalangi saya? katanya sombong. Ini! Dia setengah membanting amplop berisi uang, untuk menyogok para penyensor.

"Film saudara tidak akan keluar hari ini, karena harus menunggu antrean penyensoran. Kami tidak ingin itu (amplop)," demikian anggota tim tiga tegas. Sang produser/aktor terkenal sempat menangis.

Dengan dalih memajukan film nasional, para anggota BSF kerapkali dipojokkan kepada kenyataan harus memilih dua pilihan yang jelek. Tidak meloloskan, katanya menghambat produksi nasional. Meloloskan, wong film tidak pantas untuk diloloskan, karena bertentangan dengan kultural edukatif.

Memang, menjadi anggota BSF sebenarnya lebih banyak kena beban daripada enaknya. Syukurlah, keanggotaan BSF berdasarkan pilihan dan periodik. Hanya jangan salah pilih tentu saja. Teman saya orang Perancis dari Centre Culturel Français, yang senang bersinis serta bercanda, mengkomentari kepada keanggotaan saya didalam BSF untuk periode yang kedua: Ca Existe, encore, le Censure....

Oh La ... La...! maksudnya. Masih ada to, yang namanya BSF.....

Digitized by Google

HARIAN

Pelita

MANAGEMENT BARU

Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

THE INDONESIA TIMES

INDEPENDENT NEWSPAPER

Press idealism still exists

President Soeharto :

Sihanouk's visit cancellation understandable

France second biggest donor to RI

No plan to raise prices of domestic fuels

Malaysian by-elections progress smoothly

Sabah extends amnesty to RI's immigrants

IN THIS ISSUE

THE INDONESIA
TIMES

The Times Are Changing

Facts and figures about Jakarta's leading English language daily newspaper

Keep in touch with and ...
...——————advertise in

Editorial Department: Jl.Let.Jend.S.Parman No.72. Jakarta — Phone: 592403. Business Department: Jl. Blak No.31.C. Jakarta — P.O. Box 224/JKT Jakarta. Phones: 348170, 350113, 358477 Telex 46968 INTIME IA — FAX (021) 375012

Advertisement rates:
Clasified ads service rate: Rp.1.000/line
Casual ads Rp.1,500 per mm.col. Family ad Rp.1,000 per mm.col. Front page ad Rp.2,500 per mm.col.
Special ad (1 col x up to 200mm) Rp.1,000 per mm.col

JAPAN:
Media Sales Japan Inc.
3 - 3 - 14, Shimbasji Minato-Ku
Tokyo 105, Japan.

SINGAPORE:
Media Link (PTE) LTD
04 - 26, Peace Centre
1 Shopie Road, Singapo
Telp: 3-361.725; 3-366.166

No. 65 September 1989

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

Pancasila Jati Diri Bangsa

Bursa Saham "Meledak"

ISSN 0216 - 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Google

THE INDONESIA TIMES

President Soeharto:

Sihanouk's visit cancellation understandable

Press idealism still exists

No plan to raise prices of domestic fuels

France second biggest donor to RI

Malaysian by-elections progress smoothly

Sabah extends amnesty to RI's immigrants

IN THIS ISSUE

We reach for the sky three times a week to Toronto

THE INDONESIA TIMES

The ——— Times ——— Are ——— Changing ———

Facts and figures about Jakarta's leading English language daily newspaper

Keep in touch with and ...

... ——————— advertise in

Editorial Department: Jl.Let.Jend.S.Parman No.72. Jakarta — Phone: 592403. Business Department: Jl. Blak No.31.C. Jakarta — P.O. Box 224/JKT Jakarta. Phones: 348170, 350113, 358477 Telex 46968 INTIME IA — FAX (021) 375012

Advertisement rates:

Clasified ads service rate: Rp.1.000/line
Casual ads Rp.1,500 per mm.col. Family ad Rp.1,000 per mm.col. Front page ad Rp.2,500 per mm.col.
Special ad (1 col x up to 200mm) Rp.1,000 per mm.col

JAPAN:
Media Sales Japan Inc.
3 - 3 - 14, Shimbasji Minato-Ku
Tokyo 105, Japan.

SINGAPORE:
Media Link (PTE) LTD
04 - 26, Peace Centre
1 Shopie Road, Singapore 0922
Telp: 3-361.725; 3-366.166.

Digitized by Google

Diterbitkan oleh:
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/ Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir. Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs. Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny. T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi:
Anang Adenansi
Dr. Alfian
H. Kafrawi MA
Drs. Slamet Efendy Yusuf
Drs. Irsyad Sudiro
Drs. Thomas Suyatno
Ny. Maria Sugiharto
Drs. Wijanarko Puspoyo MA
Drs. Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs. T.A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H.M. Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana:
Drs. Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD. PAND. DV. Noerijathy

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat:
Jl. Taman Anggrek Slipi
Telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh: PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Menjadikan Pançasila Sebagai Jatidiri Bangsa

FOKUS

Pancasila sebagai falsafah dan idiologi bangsa Indonesia terbukti telah mampu menangkal dari berbagai rongrongan dan keinginan-keinginan untuk merubah dengan idiologi lain. Apa kata Prof Dr Padmo Wahyono SH tentang idiologi bangsa ini, baca Pancasila, Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia; Ikuti pula: Bahaya Ekstrimisme Harus Terus Diwaspadai; Menjadikan Pancasila Identitas Nasional.

LAPORAN UTAMA

Bursa saham di Jakarta akhir-akhir ini mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Mengapa demikian? Ikuti laporan tentang Menyerbu Pasar Modal; Bursa Efek, Berlian yang Belum Diasah dan Spekulasi, Latah atau Kurang Pengertian?

LAPORAN KHUSUS

Radio, Ikut Mengisi Pembangunan; PRSSNI Dari Sekedar Amatir Menuju Profesional.

ORGANISASI

Belum lama ini, Departemen Koperasi dan Wiraswasta DPP GOLKAR mengadakan Rakernas. Sejumlah tokoh-tokoh berbicara dalam Raker tersebut. Lebih jauh simak Pengusaha Menggugat Etika Bisnis. Dan sejumlah peristiwa organisasi antara lain: Irian Jaya, Benteng GOLKAR Tak Tergoyahkan; Langkah Kongkret Konsolidasi GOLKAR Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur; GOLKAR Dituntut Peka Terhadap Gejala Perubahan.

NASIONAL

Dalam bulan ini banyak masalah nasional yang menarik. Ikuti Sekitar Kunjungan Presiden Soeharto ke Beograd dan Uni Soviet; Parasamya Purna Karya Nugraha Untuk Jawa Barat; Kesenjangan Dunia Kerja Dengan Kondisi Angkatan Kerja; Upaya HNSI Sejahterakan Warna Nelayan; Indonesia Raya Berkumandang 102 Kali di Malaysia; DPP Baru Hasil Muktamar PPP.

KOMENTAR

Berfikir Nasional dan Bicara Emosional.

INTERNASIONAL

Hubungan Ekonomi Internasional Dijadikan Prioritas; Jalan Panjang Menuju Kemerdekaan Namibia.

SPEKTRUM

Identitas Pemuda Pelopor Bagi Masa Depan Politik Indonesia.

SENI & BUDAYA

Memantapkan dan Memelihara Kebudayaan Nasional, Salah Satu Tantangan Bagi GOLKAR; Wein, Weib und Gezang.

Digitized by Google

Menjadikan Pancasila Sebagai Jatidiri Bangsa

Ketika Karl Marx memperkenalkan sosialisme proletariatnya awal abad ke-20 maka yang mula-mula hendak dikatakan ialah Marxisme adalah "jati diri" sosialisme kerakyatannya. Ia belum menyebut ajarannya itu sebagai sebuah idiologi. Tetapi dengan memperkenalkan Marxisme sebagai "jati diri" — identitas — sosialisme kerakyatan, sebetulnya Karl Marx hendak mengatakan bahwa ajaran-ajarannya adalah sebuah doktrin yang berpangkal pada realisme sosial dalam masyarakat. Ia mengangkat keseharian masyarakat, konflik kepentingan antara buruh dan pengusaha — majikan —, konflik antara kapitalis dan proletar.

Marx sendiri adalah seorang sarjana theologia, yang mengambil spesialisasi Perjanjian Baru — New Testamen — sehingga nampak sekali nada Kristiani dalam pengantar ajaran Marx. Dia berangkat dari doktrin KASIH yang dicanangkan oleh Kristus sang MESIAS. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". Ajaran KASIH inilah yang merasuk Karl Marx sehingga ia melihat realitas keseharian kehidupan rakyat Eropa umumnya, Jerman khususnya, waktu itu sebagai sesuatu yang harus dirubah. Harus ada suatu "kelahiran baru" — reikarnasi —, untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

Ajaran Marx ini lahir ketika revolusi industri di Eropa berada pada puncaknya. Penemuan-penemuan baru di dunia industri telah mendorong berkembangnya kapitalisme sekaligus memperbesar eksploitasi manusia sebagai sumber tenaga kerja. Pengerahan manusia sebagai pekerja pabrik, pekerja tambang, buruh berbagai perusahaan, membuat Marx semakin teguh akan kebenaran ajaran kasihnya itu.

Tetapi Marx ketika mengembangkan ajaran KASIH itu lalu mengalami berbagai penyesuaian yang cukup radikal. Dia melangkah lebih jauh lagi dalam menterjemahkan ajaran KRISTUS, tentang kasih itu. Jika Kristus mengartikan: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" adalah menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan, maka Karl Marx mengartikannya lebih jauh lagi. Dia mengartikan hukum kasih itu sebagai SAMA RATA SAMA RASA. Kedua pengertian ini sangat berbeda.

Dalam hukum kasihnya Kristus, kasih dimaksudkan untuk menolong orang yang benar-benar butuh pertolongan. Sedangkan Marx lebih radikal lagi, yaitu "sama rata sama rasa". Inilah yang dijadikan Marx sebagai *jatidiri* bagi sosialisme kerakyatan yang dia ajarkan. Ini pula yang kemudian dijadikan jatidiri komunisme, yang hingga sekarang terus dipertahankan sebagai idiologi.

Di Indonesia, sebenarnya ajaran Kasih dari Kristus itu juga telah ada dan berkembang jauh sebelum Marx muncul dengan ajaran sosialisme kerakyatannya. Bahkan serupa — jika tak mau disebut sama —, dengan ajaran Kristus, yaitu GOTONG ROYONG. Gotong royong melihat kehidupan ini sebagai "homo sacra res homini" tidak hanya sebagai "homo homini lupus".

Makna paling dalam dari gotong royong sesungguhnya adalah mengakui dan menghargai manusia sebagai ia ada, karenanya berusaha saling membantu tanpa konotasi material. Atas dasar saling menghargai dan mengakui keberadaan sesama manusia itulah, maka secara tandas dicantumkan dalam PANCASILA (Sila kedua). Tidak hanya sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab; tetapi lebih dipertegas lagi dalam sila kelima (terakhir): Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya PANCASILA merupakan pengejawantahan dari pada makna kegotong royongan itu.

Setelah mengalami berbagai ujian, ternyata Pancasila mampu menjawab setiap tantangan yang muncul di negeri. Kita tentu masih ingat bagaimana kejamnya PKI Muso melakukan pembantaian di Madiun yang terkenal dengan sebutan PEMBERONTAKAN MADIUN. Ratusan putra terbaik Indonesia, para patriot dan pejuang kemerdekaan, terbantai oleh kekejaman PKI Muso waktu itu. Tujuh belas tahun kemudian kembali PKI melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila dengan dipimpin oleh Dwipa Nusantara (D.N.) Aidit, tanggal 30 September 1965.

Antara peristiwa Madiun dan Pengkhianatan G.30.S/PKI, yaitu pada tahun 1958 PKI berusaha menggantikan Pancasila dengan komunisme. Akhirnya, Presiden Soekarno mendekritkan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar fasafah bangsa. Dari rentetan peristiwa yang menguji kemampuan Pancasila ini, ternyata ia tetap teguh dan kokoh tak tergoyahkan oleh serangan apapun. Bahkan sekarang Pancasila telah dikukuhkan sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat bagi bangsa Indonesia.

Kenyataan-kenyataan sejarah ini, membuktikan bahwa Pancasila kini telah menjadi "jatidiri" — identitas — nasional bangsa Indonesia. Karena memang dalam Pancasila, kebhinnekaan bangsa ini dapat dipersatukan dalam BHINNEKA TUNGGAL IKA.□

Digitized by Google

Pancasila, Jati Diri Bangsa Indonesia

Pada saat rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu kesatuan bangsa, pada saat itu timbul pertanyaan, apa yang menjadi landasan falsafah bangsa ini. Falsafah yang bisa mempertemukan semua suku yang ada di Indonesia. Falsafah yang menjadi alat pemersatu. Ternyata kemudian muncullah Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa. Falsafah yang tidak hanya sebagai benteng, tapi juga sebagai senjata atau ajimat bagi bangsa ini untuk tetap tegaknya Indonesia. Pancasila kemudian telah menjadikan dirinya sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Prof Dr Padmo Wahyono, SH

Oleh karenanya di dalam kehidupan politik pun, bagi siapa saja yang berkeinginan menguasai bangsa ini, selalu menggunakan bahasa Pancasila sebagai senjata atau ajimatnya. Ini tidak hanya terjadi pada jaman RIS, tapi pada jaman kehidupan demokrasi liberal pun selalu Pancasila dijadikan alat untuk menguasai kelompok bangsa ini. Termasuk PKI, yang dengan penafsiran sendiri mengenai Pancasila berusaha menguasai bangsa Indonesia bagi kepentingan politiknya.

Seperti dikemukakan wakil kepala BP-7, Prof Padmo Wahyono SH, Pancasila kenyataan telah menjadi rebutan. Dan masing-masing berusaha untuk memberikan tafsir sendiri-sendiri tentang Pancasila itu. Tapi satu hal yang jelas, setuju atau tidak setuju, Pancasila telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dan sebagai jati diri bangsa, Pancasila seolah sudah merupakan tolok ukur orang berperilaku. Kalau ada suatu kebijaksanaan yang tidak baik saja, orang bergumam.... ah, kok tidak Pancasila.

Menjadi tekad bagi bangsa ini untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai jati diri bangsanya. Setuju tidak setuju orang akan menampilkan dengan sebaik-baiknya jati dirinya. Masing-masing orang menggunakan Pancasila sebagai tolok ukurnya. Setiap kali muncul kesulitan orang larinya pasti ke Pancasila. Maka orang berusaha untuk mengkaji dirinya, sampai seberapa jauh telah menghayati, memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Padmo Wahyono juga mengemukakan bahwa sudah menjadi tekad bangsa ini sejak 1945, mempertahankan Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa dan negara. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari orang yang kendati belum pernah ditatar mengenai Pancasila, akan berusaha menampilkan dirinya seolah-olah sudah ditatar Pancasila, baik dalam berbicara maupun bertindak. Ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan kriteria bagi diri setiap orang yang dinilai lebih hebat dari yang lain.

Sedemikian hebatnya Pancasila yang dirumuskan oleh Founding Father bangsa ini, sampai-sampai PKI pun mengakui Pancasila sebagai alat pemersatu. Lalu kalau sudah bersatu apa Pancasila itu tidak perlu lagi atau dihilangkan saja? Tidak, Pancasila tidak bisa dihilangkan, karena sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. "Maka, adalah aneh kalau masih ada orang menawar-nawar Pancasila, sementara musuh Pancasila bila ingin menguasai Indonesia mesti berbahasa Pancasila. Dan bagi mereka yang ingin merubah Pancasila itu pasti tidak melihat kenyataan yang ada, sekaligus menentang arus yang deras," kata Padmo Wahyono.

Persoalannya sekarang bagaimana orang itu bisa mewujudkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini membutuhkan adanya kehidupan bangsa yang cerdas. Maka adalah tepat apa yang menjadi cita-cita para founding father atau pendiri bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga pada akhirnya Pancasila tidak hanya dipegang atau diyakini sebagai ajimat semata-mata, tapi dioperasionalkan atau diamalkan di dalam segala aspek kehidupan.

Begitu pentingnya jati diri suatu bangsa sampai-sampai negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia dan Hongkong mencoba mengetahui bagaimana Pancasila itu sebagai jati diri bangsa Indonesia. Maka menjadi tanggungjawab bersama untuk tetap menjaga Pancasila jati diri bangsa, menjelmakannya dalam setiap tatanan hidup dalam rangka memantapkan Pancasila agar tidak mudah goyah oleh musuh-musuh Pancasila sendiri.

Etika Profesi

Persoalannya sekarang bagaimana kita bisa mengoperasionalisasikan Pancasila dalam sikap perilaku. Pedo-

Digitized by Google

man-pedoman apa saja yang harus diikuti dalam menjabarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Disini Padmo Wahyono menyebut adanya 36 butir Pancasila yang harus dipahami sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan Pancasila dalam kehidupan ini.

Memang ada Tap MPR No. II/1978 yang menjadi pedoman dalam operasionalisasi Pancasila, tapi itu masih merupakan bentuk yang mentah. Pedoman disini masih harus disesuaikan dengan institusi atau lembaga masing-masing. Pedoman tersebut selanjutnya disebut sebagai etika profesi, atau etika kelompok, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Menurut Padmo Wahyono kehidupan berorganisasi sekarang sudah mantap, khususnya sejak diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas. Namun penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu harus diterjemahkan dalam sikap perilakunya. Begitu pula dengan 36 butir yang terkandung dalam P-4, harus digerakkan sebagai pengamalan sikap perilaku di dalam pembangunan sekaligus menerjemahkannya.

Organisasi profesi harus di-P4-kan dan tidak mentah P4. Sebab, kalau seorang dokter, misalnya, tidak menengok Pancasila, maka akibatnya taripnya akan tinggi terus. Dan etika profesi ini yang tahu adalah organisasi profesi itu sendiri. Bukan BP-7. Oleh karenanya etika profesi itu harus dikembangkan sebagai isyu nasional. Dengan dimilikinya etika profesi maka pada saat tinggal landas nanti tidak perlu khawatir lagi atau menjadi was-was.

Begitu pula guru besar juga harus memiliki etika profesi, yang nantinya menjadi pedoman guru besar dalam bekerja. Dan pedoman itu mengacu kepada 36 butir yang terdapat dalam P-4. Ini sebagai penjabarannya dalam kehidupan profesi. Dengan demikian Pancasila mulai masuk dalam etika profesi atau kelompok.

Sebab, kalau sampai Pancasila tidak masuk dalam etika profesi, maka bisa jadi dokter tidak mau menengok Pancasila. Begitu pula Sarjana Hukum juga tidak menengok Pancasila. Lalu, apa hanya orang yang ada di desa saja yang harus menengok ke Pancasila? Misalnya melalui permainan simulasi.

Pokoknya semua organisasi profesi harus mengacu kepada Pancasila melalui 36 butir yang ada dalam P-4.

Dengan dikuasainya etika profesi, maka dengan sendirinya dalam hal perilaku profesi sudah bisa dikatakan lepas landas. Kita tidak perlu was-was lagi bahwa pembangunan sudah pasti berdasarkan Pancasila.

Kerangka landasan ideologis ini, menurut Padmo harus dikembangkan. Begitu pula yuridis formal yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan organisasi di Indonesia.

Menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang harus memulai atau kuncinya ada dimana untuk mengoperasionalkan Pancasila itu? Menurut Padmo Wahyono, operasionalisasi Pancasila dapat dimulai dari Organisasi Sosial politik yang ada. Sebab Orsospol itu organisasi yang dominan dalam menggerakkan negara ini. Karena Orsospol itu mempunyai akses pada setiap organisasi kemasyarakatan, walaupun tidak mengakui sebagai onderbownya. Disini Orsospol mempunyai krip atau kunci terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada. ☐ (BM/DT/NS)

23 Tahun SP 11 Maret :

Bahaya Ekstrimisme Harus Terus Diwaspadai

Apa makna waktu: sesuatu yang selalu terlepas dan tak akan tertangkap kembali.

Seorang pengembara Arab di abad ke-9, Sulaiman al-Tajir, menulis, "kita pernah merasakan waktu sebagai sesuatu yang lain; tertib, teratur, tak tergoyahkan dan manunggal dengan kekuasaan yang dipertuan".

Hidup dikumandangkan sebagai sesuatu yang predictable. Kita selalu bisa memperkirakan, apa yang akan tiba berikutnya. Tapi dalam prakteknya, hidup tentu tak seperti itu. Kini ahli-ahli *'futurologi'*, yang semakin tak terdengar gemanya, tahu bagaimana harus berhati-hati. Lim Sioe Liong juga dulu tidak tahu bahwa bisnis akan lesu.

Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian melahirkan Orde Baru, kini genap 24 tahun. Dan 24 tahun bukan waktu yang pendek.

Ketua Presidium KAMI Pusat Cosmas Batubara, yang kini Menteri Tenaga Kerja mengisahkan, "saya sebaiknya mulai pada tanggal 3 Maret 1966. Pada hari itu terjadi pertemuan partai-partai politik dan Presiden Soekarno. Sore harinya kami mengetahui bahwa dari pertemuan itu lahir pernyataan yang tidak menguntungkan gerakan-gerakan mahasiswa. Kami semua marah, lalu menemui Subchan Z.E. (tokoh NU dan Pimpinan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu) di rumahnya di jalan Banyumas, Jakarta Pusat".

Dari Subchan (yang meninggal di Mekkah tahun 1973) kami ketahui apa yang sebenarnya terjadi; para pimpinan partai ditekan Bung Karno untuk mengutuk mahasiswa.

Tanggal 11 Maret kegiatan demonstrasi berjalan seperti biasa. Perhatian terpusat ke sekitar Istana karena hari itu ada sidang kabinet. Malamnya saya dan teman-teman bermalam di markas Kopur Kostrad di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kami sudah beberapa malam di situ, karena tempat itu aman. Ini karena kami mendapat informasi bahwa ada golongan bersenjata yang mau menculik kami, para pimpinan mahasiswa.

Sepanjang hari itu, kami tidak tahu sama sekali adanya apa yang disebut pasukan liar yang berkeliaran di sekitar Istana itu.

Keluarnya Supersemar itu kami dengar dari Jenderal Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad waktu itu. Saya tidak ingat dengan pasti pukul berapa waktu itu, tapi setelah pukul tujuh, Pak Kemal datang dan berseru, "Kalian menang, PKI dibubarkan." Lalu saya berkata, "Kita semua menang." Pak Kemal tertawa.

Di Kostrad kami dengar dengan jelas mengenai Supersemar dan pembubaran PKI. Tapi di Kostrad kami be-

Digitized by Google

lum lagi tahu bahwa akan ada *show of force*. Berita mengenai itu, kami dapatkan dari Salim Said yang menelpon dari Fakultas Psikologi UI yang waktu itu terletak di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Rupanya, keputusan melakukan *show of force* itu diputuskan kemudian. Pak Sarwo Edhie yang memimpin pameran kekuatan pada 12 Maret itu. Dari Salemba kami kirimkan kurir kepada semua markas mahasiswa untuk menyampaikan pesan: kita semua akan ikut show of force hari esoknya.

Tidak Istimewa

Peristiwa bersejarah itu, tidak diperingati secara istimewa. Tiadanya peringatan istimewa itu mungkin karena pengemban Supersemar, Presiden Soeharto, telah beberapa kali menolak prakarsa untuk memperingati hari lahir Supersemar secara besar-besaran.

"Ini untuk menghindarkan timbulnya mitos terhadap peristiwa itu, atau dapat pula menimbulkan mitos kepada diri saya," kata Presiden Soeharto pada tahun 1971.

Menjelang 11 Maret 1971 itu Presiden Soeharto untuk pertama kali menjelaskan latar belakang dan sejarah lahirnya Supersemar karena, katanya, rakyat Indonesia memang berhak mengetahuinya.

"Supersemar merupakan bagian sejarah yang sangat penting untuk meluruskan kembali perjuangan bangsa dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan memberi isi kemerdekaan," kata Presiden Soeharto.

Supersemar memang peristiwa yang bersejarah. Ada yang menyebutnya "tonggak sejarah Orde Baru", atau "Momentum Orde Baru". Presiden Soeharto sendiri menyebutnya "Awal Perjuangan Orde Baru".

Dan awal sebuah sejarah baru pun dimulai. Yang tua tak hanya menang di umur. Yang muda tak memiliki apa yang dimiliki yang tua; sebuah masa lalu yang panjang, kadang kala penting.

Untuk itu, Menko Polkam Soedomo mengingatkan kembali agar masyarakat termasuk generasi muda selalu waspada untuk tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak disadari merupakan kegiatan perangkap strategi gerakan kiri baru maupun ekstrim kiri dan ekstrim kanan.

Bahaya ekstrim kiri maupun kanan, kata Soedomo, yang kegiatannya berdasarkan ideologi tertentu harus terus diwaspadai, apalagi menjelang pemilihan umum 1992 mendatang.

Gerakan kiri baru (new left) yang berkembang di Eropa ingin meluaskan pengaruhnya ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

Gerakan ini ingin melakukan perubahan-perubahan radikal bukan berdasarkan suatu ideologi tertentu, tetapi melandaskan pada prinsip "kebebasan" kata Menko Polkam lagi. Tambahnya, karenanya tidak tertutup kemungkinan gerakan ini menggunakan orang-orang yang sakit hati (dissident) untuk mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, katanya, budaya politik di Indonesia tidak lain adalah pengejawantahan atau pelaksanaan sistem politik yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

Karenanya "keterbukaan dalam budaya politik di Indonesia" tidak mungkin dilepaskan dari sistem politik yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Hal ini juga berarti akan selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia yakni demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila bertitiktolak pada Sila keempat Pancasila, suatu demokrasi yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam UUD 1945. Karena Pancasila merupakan suatu kebulatan utuh, maka sila keempat itu akan selalu dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya dalam suatu kesatuan yang integralistik.

Sedangkan sistem politik itu sendiri tidak mungkin melepaskan diri dari konstitusi. Oleh sebab itu apabila berbicara mengenai sistem politik di Indonesia tidak mungkin memisahkan diri dari konstitusi yang kini diberlakukan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni UUD 1945.

Dan UUD 1945 itu sendiri selain merupakan penjabaran dari Pancasila, iapun sekaligus dijiwai oleh semangat Pancasila sebagai dasar negara maupun ideologi bangsa. Oleh sebab itu, keterbukaan yang kita anut juga mendasarkan diri pada Konstitusi dan Pancasila.

Atas dasar konstitusi inilah dapat dipertanyakan siapa sajalah yang

Mayor Jenderal Soeharto ketika menyaksikan pengambilan jenazah para korban pahlawan revolusi. (Ist)

Nilai Perjuangan

Generasi penerus secara konsekuen harus memiliki jiwa patriotisme untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Dan dalam era pembangunan, tentunya kewaspadaan perlu terus ditingkatkan guna mengatasi tantangan-tantangan yang timbul. Pembangunan nasional harus selalu diupayakan menumbuhkan jati diri Indonesia dan kepemimpinan.

Jiwa kepemimpinan nasional harus selalu menonjolkan kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 serta pandangan politiknya harus lurus.

Menurut Menteri Tenaga Kerja Drs. Cosmas Batubara, budaya politik di Indonesia pada hakekatnya telah melekat di dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia.

Hal ini juga berarti bahwa budaya politik itu harus mendasarkan diri pada norma-norma, nilai-nilai serta ketentuan yang ada dalam sistem politik itu, yang tidak lain adalah sistem politik berdasarkan Pancasila.

Digitized by Google

harus terbuka. Selain rakyat, maka lembaga-lembaga yang tercantum dalam UUD 1945 itu bersifat terbuka. Sehubungan dengan hal ini perlu pula diperhatikan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, media massa dan tidak lupa LSM-LSM yang kini sedang menjamur.

"Jadi dalam setiap pelaksanaan suatu hal perlu kita lihat bahwa ada tatanannya. Dan kita sudah mengetahui dalam sistem politik kita ada infrastruktur politik dan suprastruktur," jelas Cosmas Batubara.

Sehingga, harus selalu dilihat dengan kaitan adanya infrastruktur dan suprastruktur tadi. Dalam hal-hal penggunaan daripada apa yang kita sebut sebagai keterbukaan itu setiap mereka yang ikut melakukan harus juga memilah-milahkan. "Jadi tidak keterbukaan mutlak," tegasnya lagi.

Dalam demokrasi Pancasila dianut sistem perwakilan, oleh sebab itu bagaimana keterbukaan yang sesuai dengan sistem perwakilan itu harus dilaksanakan, sehingga keterbukaan tidak akan melanggar tatanan-tatanan yang telah disepakati bersama.

Menurutnya, kita mengenal adanya anggota DPR dan tentu kita mengharapkan DPR sendiri dalam penerapan dan pelaksanaan tugas sehari-harinya tentu mereka mendekati dengan pendekatan keterbukaan. Tetapi harus juga bisa memilahkan, misalnya waktu membahas suatu Rancangan Undang-Undang, itu kan tertutup dan pers tidak boleh masuk dan di situ barangkali keterbukaan itu dilakukan antar mereka tapi belum tentu keluar karena belum matang.

"Nah di situ yang kita harus pandai-pandai menerapkannya. Contohnya, misalnya saya membahas tentang peradilan agama. Kalau itu dibuka diluar tentu bisa menimbulkan perbedaan yang runcing kalau ada perbedaaan yang tajam," jelas Cosmas Batubara.

Atau mungkin ada masalah lainnya, yang ada hal-hal tertentu yang terbuka sekali, tetapi ke masyarakat harus di seleksi dahulu.

Jelasnya tidak keterbukaan mutlak. Karena keterbukaan itu sangat baik, tapi dapat dikembangkan dalam kerangka yang memang perlu. Jadi ada tatanan yang perlu dipatuhi bersama.

Peranan Pemuda

Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, mengatakan, ketika menjawab pertanyaan apakah gerakan pemuda sebagai kekuatan politik masih merupakan kemungkinan di masa depan?

Kalau para pemuda, khususnya yang berada dalam organisasi pemuda menunjukkan sikap dan komitmen yang lemah dalam berbagai kegiatannya, suara mereka hanya akan menjadi buah tertawaan saja.

Untuk itu organisasi pemuda dalam mengisi pembangunan ini, sebaiknya berkembang sebagai kekuatan yang mendorong masyarakat untuk menjadi kokoh dan bermoral.

Oleh karenanya, organisasi pemuda sendiri harus merupakan organisasi yang juga kokoh dan bermoral, karena dengan hanya bermodal itu organisasi pemuda dapat bersuara vokal untuk mengajak masyarakat menjadi kuat, tangguh dan hidup berdasarkan nilai-nilai tinggi.

Bangsa Indonesia selama 24 tahun Orde Baru telah mencapai kemajuan yang besar, namun perjalanan masih jauh dan tantangan tidak bertambah lemah justru sebaliknya.

Sementara itu, ada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih tergolong lunak. Hal mana dapat dilihat dari pada disiplinnya yang lemah, komitmen dan kesungguhan pada warganya yang kurang. Semuanya mengakibatkan berbagai penyelewengan yang merugikan perjuangan bangsa.

Kalau gerakan pemuda dapat membuat dirinya kuat dan mempengaruhi masyarakat menjadi masyarakat yang tangguh, maka peran pemuda di masa kini dan masa depan tidak kalah maknanya untuk perjuangan bangsa dibandingkan dengan pendahulunya di jaman penjajahan atau setelah merdeka.

Untuk itu gerakan pemuda harus dapat diandalkan, dapat menyusun dan memelihara organisasi yang rapih, termasuk adanya kaderisasi yang teratur serta menghidupkan semangat para anggotanya yang cukup menyala-nyala.

"Kalau itu dapat dilengkapi dengan wawasan yang tepat mengenai perjuangan bangsa, maka pasti gerakan pemuda akan kembali menonjol di Indonesia," harapnya optimis.

Namun, diperingatkan, gerakan pemuda yang seperti itu bukan merupakan organisasi yang mengarah kepada perwujudan kekuatan politik, tapi lebih bersifat organisasi yang mengabdikan diri kepada perkembangan masyarakat yang kemudian dapat mempunyai dampak sebagai kekuatan politik,tidak ubahnya ABRI.

Pada tahun 1966 TNI berdampingan dengan Kesatuan Aksi, sedangkan dalam masa Orde Baru TNI dan ABRI secara keseluruhan berkewajiban menjamin stabilitas nasional guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Gerakan mahasiswa yang bermaksud politik, bertentangan dengan pemeliharaan stabilitas nasional itu, karenanya ABRI tidak mendampingi gerakan mahasiswa yang bermaksud politik. Meskipun masih ada usaha di sementara Perguruan Tinggi untuk melakukan gerakan mahasiswa itu, hasilnya sama sekali negatif dan tidak bermanfaat bagi para mahasiswa sen-

Kesatuan aksi mahasiswa tahun 1966 (Ist)

Digitized by Google

Mayor Jenderal Soeharto memimpin langsung pengambilan para jenazah para pahlawan revolusi (Ist)

diri, katanya lagi.

Gerakan pemuda sebagai kekuatan politik yang berdiri sendiri hanya mungkin terjadi kalau di Indonesia terjadi kekacauan dan vakum kekuasaan. Tetapi demi perkembangan negara dan bangsa kita menuju masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, kita tidak menginginkan dan sama sekali tidak berkepentingan dengan timbulnya kekacauan dan vakum kekuasaan di Indonesia. Hal demikian hanya akan menjauhkan kita dari perjuangan kita dan kemajuan yang telah tercapai dapat sirna tanpa bekas.

Sayidiman mempertegas, bahwa sebenarnya peran pemuda masih amat diperlukan agar perjuangan bangsa ini lebih berhasil.

Berbeda

Era pembangunan dewasa ini jelas berbeda tantangan dan motivasi perjuangan. Era pembangunan sejak masa Orde Baru merupakan kesempatan baru untuk memperbaharui tekad semangat juang, yang di masa-masa lalu terbukti sangat ampuh.

Di masa pembangunan ini keberlangsungan cita-cita dan perjuangan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri, untuk unjuk dada, untuk membuktikan sebagai bangsa yang besar adalah suatu kesempatan yang baik.

Dan pembangunan merupakan penjabaran dari cita-cita perjuangan bangsa. Sedangkan cita-cita perjuangan bangsa harus selalu dipupukkembangkan supaya pembangunan tidak menjadi macet.

Rizal MK, S.H. aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak anggapan bahwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia cenderung menurun setelah Indonesia merdeka 44 tahun yang lalu.

Ukuran nasionalis dan tidak nasionalis itu berbeda dari masa ke masa. Sebab nasionalis erat kaitannya dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam suatu waktu.

Yang jelas nasionalisme bukan chauvinisme, yakni sikap cinta tanah air yang terlalu berlebih-lebihan dan membabi buta, sehingga tidak kritis lagi terhadap penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Menurutnya, adanya aktivis LSM yang bicara apa adanya mengenai fakta yang ada di Indonesia di forum internasional, belum tentu nasionalisme dan wawasan kebangsaannya rendah atau tidak ada. Apabila mereka berbicara dengan iktikad baik untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka itulah sebetulnya pahlawan pembangunan.

Tapi kalau ada aktivis LSM yang berbicara dengan iktikad buruk, penuh 'vested interest' dan kerjanya hanya menjelek-jelekkan bangsa, maka LSM yang demikian itu perlu ditindak tegas dan dicap sebagai penghianat bangsa.

Prsiden Soeharto pernah menyatakan, bahwa pembangunan adalah proses perubahan menuju kemajuan. Karena itu, harus terus menerus diadakan penyegaran dan pembaharuan. Malahan jika dianggap perlu harus berani mengadakan koreksi. Sebab pembangunan bangsa yang sangat luas dimensinya itu pasti tidak akan luput dari munculnya akibat samping yang negatif, yang bukan merupakan tujuan utama pembangunan.

Koreksi-koreksi itu terasa bertambah perlu karena perkembangan politik, keamanan dan perekonomian dunia yang serba tidak menentu mengharuskan segera mengadakan penyesuaian sikap dan langkah yang setepatnya dan sebaiknya bagi kelanjutan pembangunan.

Kurun Pelita V merupakan kurun waktu penutup dari pembangunan jangka panjang 25 tahun yang pertama yang telah menjadi kesepakatan nasional selama ini.

Dalam perspektif pembangunan bangsa dalam jangka panjang, dewasa ini tidak ada perkembangan strategi baru yang mengharuskan diubahnya kesepakatan nasional itu. Dengan kata lain, dengan mempertimbangkan kepada Majelis agar Bab I, Bab II dan Bab III GBHN 1983 yang antara lain memuat Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang tetap menjadi bagian dari GBHN tahun 1988.

Sementara sikap realistik yang dipadukan idealisme merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai kemajuan pembangunan di berbagai bidang sejak Repelita I hingga sekarang ini.

Dalam melaksanakan pembangunan yang tidak pernah sepi dari ujian dan tantangan, selalu dikembangkan sikap realistik yang berpengharapan. Kenyataan yang ada dilihat seperti apa adanya, betapa pun pahitnya kenyataan itu dan betapa pun beratnya keadaan itu.

Tapi sebagai bangsa yang besar yang dapat menarik manfaat dari segala ujian dan cobaan yang menghadang di masa lampau maka tidak akan bimbang menghadapi ujian berat di masa datang. Tantangan besar dihadapan kita malahan dirasakan sebagai tantangan yang menggairahkan.

Dalam Pelita V pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan tumbuhnya ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Prioritas pembangunan tetap diletakkan pada bidang ekonomi, dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian.

Bersamaan dengan itu akan ditingkatkan pembangunan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, yang mengolah hasil pertanian dan yang menghasilkan industri mesin-mesin. □

(Hers)

Digitized by Google

Menjadikan Pancasila Identitas Nasional

Sejak negeri ini memproklamirkan kemerdekaannya, telah ada kerangka dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ada Undang-Undang Dasar, yang mengatur tata penyelenggaraan bernegara. Ada falsafah yang dijadikan sebagai idiologi nasional.

Dalam perjalanannya, Konstitusi dan falsafah itu mengalami berbagai tantangan, baik secara politis, sosial maupun secara ekonomis. UUD yang mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan, sejak merdeka terus mengalami tantangan berat. Pancasila sebagai falsafah bangsa, juga mengalami berbagai tantangan, bahkan berkali-kali ada usaha untuk menggantinya dengan falsafah lain.

Ambillah UUD 1945, sejak tahun 1947 mengalami berbagai cobaan. Dia harus diganti dengan UUD RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Kemudian pada tahun 1950 hingga 1959 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara. Selama periode 1949-1950 dan 1950-1959, kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam kehidupan bernegara tak memperoleh tempat sebagaimana harusnya. Orang sengaja tidak membicarakan Pancasila dalam kaitan penyelenggaraan negara, karena memang ketika itu sedang dicari falsafah lain yang dapat mengganti tempatnya PANCASILA.

Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955, diberi tugas untuk menyusun UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950, selama empat tahun tak berhasil. Mereka gagal, hanya karena tak pernah sepakat tentang dasar negara.

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali memberlakukan UUD 1945. Dewan Konstituante dibubarkan. Setahun kemudian, partai-partai politik disederhanakan. Dari 28 partai, diciutkan menjadi hanya 10 PARTAI SAJA (PNI, NU, PKI, PSII, Partindo, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, Perti dan MURBA). Penyederhanaan partai politik itu disusul dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat kemudian diganti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1960 sebagai gantinya Dewan Konstituante.

Sejak itulah Pancasila mulai mendapat tempat yang layak sebagai dasar falsafah bangsa. Pancasila yang menjadi Pembukaan UUD 1945 memperoleh kembali statusnya sebagai idiologi nasional. Sejak itu pula Pancasila mulai diakui sebagai Pemersatu Bangsa. Bukan sekedar *alat pemersatu bangsa,* tetapi Pancasila diakui dan diterima sebagai dasar falsafah bangsa secara nasional.

Jika ia disebut sebagai ''alat'' pemersatu bangsa, itu berarti Pancasila tak diperlukan lagi kalau persatuan dan kesatuan bangsa sudah tercapai. Inilah dasar pikiran Partai Komunis Indonesia (PKI) waktu itu, yang terus berusaha menggantikan Pancasila dengan idiologi komunis. Berangkat dari pemikiran demikian itu, PKI sekali lagi berusaha menghancurkan Pancasila dan UUD 1945 melalui Gerakan 30 September yang terkenal sebagai pengkhianatan PKI itu.

Tetapi untuk kesekian kalinya pula PKI gagal memusnahkan Pancasila dan UUD 1945, karena mendapat perlawanan keras dari rakyat yang benar-benar sudah menerima dan mengakui Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa.

Upaya meniadakan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa sudah dimulai tiga tahun setelah merdeka. Tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai Pemberontakan Madiun. Pemberontakan itu merupakan awal usaha mereka untuk merubah UUD dan dasar falsafah bangsa Pancasila. Tetapi karena ketangguhan patriot-patriot bangsa yang mempertahankan dan tetap membela Pancasila, maka PKI gagal mencapai tujuannya untuk merubah konstitusi dan Pancasila.

Tepat tujuh belas tahun kemudian, 30 September 1965, PKI kembali berusaha merebut kekuasaan melalui suatu pemberontakan yang paling keji. Putra-putra terbaik bangsa ini dibunuh secara keji oleh PKI. Kembali mereka gagal, karena Pancasila memang telah membuktikan kemampuan dan keampuhannya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Kemampuandan keampuhan

Pancasila selalu membuktikan kemampuan dan keampuhannya dalam

Digitized by Google

menjawab setiap tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila telah membuktikan kemampuannya menjawab tantangan. Ia mampu memberi jawaban atas persoalan-persoalan bangsa baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Dia dikatakan ampuh, karena selalu mampu menyingkirkan lawan-lawannya. Dalam situasi yang bagaimana sekalipun Pancasila selalu memberi jawaban. Karenanya tak ada pilihan lain untuk dijadikan sebagai idiologi nasional, kecuali Pancasila. Karena didalamnya kepentingan nasional bangsa ini terakomodasikan.

Setelah melewati sekian kali cobaan, Pancasila semakin berakar dalam kehidupan bernegara bangsa. Tahun 1985 ia diterima sebagai satu-satunya asas kehidupan bernegara dan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia.

Untuk didukuhkan sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Pancasila telah melewati proses sejarah yang panjang. Memang tidak mulus, jalan yang ditempuh penuh kerikil bahkan berbatu tajam. Tetapi Pancasila berhasil lolos dari ancaman-ancaman itu.

Berawal dari Ketetapan MPR No.II tahun 1978, tentang Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), upaya memantapkan Pancasila sebagai asas kehidupan bernegara dan bermasyarakat terus digalakkan. Dalam kurun waktu delapan tahun, Pancasila mendapat pengukuhan sebagai idiologi nasional.

Identitas nasional

Ketika dikukuhkan menjadi satu-satunya asas bernegara dan bermasyarakat, muncul persoalan. Pengukhan itu baru secara yuridis formal. Sedangkan yang dikehendaki adalah pengakuan sosiologis. Yaitu suatu pengakuan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dari masyarakat. Suatu pengakuan bahwa Pancasila benar-benar merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terlihat dalam keseharian tingkah lakunya. Dia telah menjadi bagian integral dari tata kehidupan orang seorang.

Dengan kata lain, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk bisa diamalkan, Pancasila harus benar-benar dihayati sebagai falsafah hidup. Sulit untuk diamalkan jika belum dihayati secara utuh makna

Penyederhanaan partai (Ist)

Pancasila bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tanpa menghayatinya sungguh-sungguh orang sulit mengamalkannya. Apabila penghayatan itu sudah dilaksanakan, maka Pancasila lalu menjadi jatidiri — identitas — bangsa Indonesia.

Persoalan kita sekarang adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai identitas nasional bagi orang Indonesia. Hingga sekarang yang dipakai sebagai identitas nasional Indonesia hanya bahasa Indonesia. Kita punya bahasa persatuan, kita juga punya kesatuan etnik, kita punya kesatuan politik, kesatuan ekonomi dan kesatuan sosial budaya.

Unsur-unsur tersebut sesungguhnya merupakan dasar bagi pembentukan suatu identitas nasional. Semua unsur itu sudah ada dalam Pancasila. Sehingga apabila kita hendak mencari identitas nasional, Pancasila adalah satu-satunya bentuk yang bisa menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Didalam Pancasila kemajemukan bangsa ini terwadah, juga kesatuan dan persatuan menjadi tujuannya. □

(tb)

DIRGAHAYU GOLKAR

Selamat ulang tahun XXV, 20 Oktober 1989

PERUM PERUMNAS
Jln. D.I Panjaitan kav. 11
Jakarta Timur

Tlp : 8194807
Telex : 48432 RUMNASIA
Fax : 8190082

Digitized by Google

Menyerbu Pasar Modal

Antrian panjang masyarakat yang kini dilanda demam saham hampir menjadi tontonan sehari-hari. Gedung Danareksa yang terletak Jalan Merdeka Selatan selalu dipenuhi masyarakat yang ingin membeli formulir dari saham suatu perusahaan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang datang sejak pukul 2.00 dinihari untuk membeli formulir dari saham perusahaan Lippo Group atau BCA Group di Jalan Thamrin.

Masyarakat antri untuk memperoleh formulir saham perusahaan (Nc)

Memang sejak Marzuki Usman duduk sebagai Ketua Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal) — dan tentu saja sejumlah deregulasi di sektor keuangan — perusahaan-perusahaan yang ingin mencari dana lewat pasar modal semakin bertambah. Dan masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan ini juga makin gandrung untuk mendapatkan keuntungan yang ''lumayan''.

Tapi yang lebih membuat pasar tambah ramai adalah adanya kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada investor asing membeli saham di pasar Modal Indonesia.

Menkeu Sumarlin melalui keputusannya mengatakan bahwa saham semua perusahaan *go public* dapat dibeli maksimal 49% dari jumlah saham yang diemisikan. Tanpa mempersoalkan status perusahaan; PMA atau PMDN.

Beberapa hari setelah ucapan Sumarlin itulah, masyarakat beramai-ramai menyerbu pasar modal, dan membuat harga-harga saham membumbung tinggi.

Perdagangan saham itu disebut-sebut ''menggila'' yang mengakibatkan *boom* di dua bursa; Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), serta mendorong naiknya indeks harga gabungan masing-masing sebesar 82,347 dan 10,260.

Kenaikkan indeks di kedua bursa itu merupakan yang terbesar dalam perdagangan sehari.

Tapi nilai transaksi tertinggi di BEJ terjadi pada 29 Agustus yang mencatat rekor senilai Rp 31,235 miliar, disusul meledaknya permintaan atas saham PT. United Tractors yang mencapai Rp 1,28 triliun.

Nilai tertinggi perdagangan sebelumnya terjadi 21 Maret, yaitu sebanyak Rp 20,719 miliar, atau sekitar 50,76% di bawah rekor yang terjadi pada 29 Agustus.

Gernot G. Kluss, Managing Director PT Aseam Indonesia (underwriter saham United Tractor) menuturkan bahwa perkembangan perdagangan di beberapa bursa Indonesia akhir-akhir ini sangat menggembirakan.

Ini semuanya terjadi karena terus mengalirnya modal asing yang masuk ke negeri ini, meski Pemerintah Indonesia membatasi jumlah pembelian hanya 49% dari saham yang *listing*.

Kemajuan Pasar Modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini telah menyaingi Thailand yang juga sedang menggalakkan *stock market*.

Ia tidak berani berspekulasi tentang nilai modal asing yang mengalir ke Indonesia. ''Tapi yang jelas jutaan dolar,'' katanya.

Animo investor asing ke Indonesia banyak disebabkan pertumbuhan ekonomi negeri ini yang relatif baik, serta perkembangan penting lainnya.

Presiden Direktur United Tractor, Subianto, juga mengakui bahwa meledaknya jumlah pesanan atas saham perusahaannya karena besarnya minat pemodal asing.

Oversubcribed yang terjadi atas saham United Tractor, merupakan rekor terbaru di Pasar Modal Indonesia selama ini. Rekor sebelumnya diciptakan oleh penawaran saham PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, yaitu sebanyak 1.290%.

Bahkan beberapa pialang memperkirakan bahwa lantai bursa dalam waktu dekat meledak lagi. Sejumlah investor akhir Agustus lalu disebut-sebut telah menghubungi beberapa perusahaan pialang dan memasang order beli saham berapa pun harganya. Bahkan ada yang bersikeras untuk mendapatkan saham di bawah tangan, asal diserahkan hari itu juga.

Permintaan saham yang menggebu-gebu ini diperkirakan melahirkan *boom* lagi.

Kalangan pengelola bursa Asia Timur dalam pertemuan di Jakarta merasa optimis akan munculnya gejala itu.

''Saya percaya bursa Indonesia akan mengalami *boom* lagi dalam beberapa waktu mendatang,'' ungkap Chao Hsio Feng, Direktur & President Taiwan Stock Exchange Corporation.

Menurut Chao, ada tiga alasan yang akan mendorong kejadian ini, pertama sumber daya nasional yang besar, luas areal Indonesia yang besar serta ke-

Digitized by Google

mauan kerja keras masyarakatnya.

"Bila suasana pasar modal yang sekarang ini dipertahankan dan didukung oleh ketiga faktor tersebut, maka saya percaya, cepat atau lambat bursa akan mengalami *boom* yang sebenarnya. Baik dari segi volume transaksi, nilai, maupun indeks perdagangan," tutur Chao.

Chao menjelaskan suasana ke arah itu sudah terlihat, namun tinggal unsur pendukung tersebut. Bila sumber daya yang besar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup rakyat, maka orang mau tak mau semuanya ingin memiliki saham atau surat berharga lain.

Di sisi lain, bila semua areal pertanian dan industri bisa dioptimalkan, dan perusahaan yang mengelola masing-masing sektor itu sehat dan menawarkan saham mereka ke masyarakat, maka saat itu orang berminat ke pasar modal.

"Kecenderungan itu sudah ada sekarang," tutur Chao.

Secara statistik ia tidak bisa menjelaskan kapan terjadi *boom* itu. "Tapi yang jelas kaum *businessman* sejumlah negara telah melihat trend seperti itu. Mereka akan memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jaringan dan memperbesar keuntungan mereka," jelasnya.

Memang lonjakan peminat yang ingin ikut mempertaruhkan peruntungan modalnya di bursa saham, kian hari terus meningkat. Ini tercermin, bukan hanya jubelan pemodal yang antri untuk memperoleh formulir saham, tapi juga meningkatnya permintaan keterangan prosedur permainan bursa, serta kian ramainya pengunjung di anjungan BEJ.

Meski itu bisa disebut menggembirakan — karena dana nganggur masyarakat mulai dimanfaatkan untuk membeli saham — namun sejumlah kalangan, toh, masih merisaukan.

Dari hasil pengamatan sementara terlihat jelas berbagai kelemahan masih mengemuka dalam penanganan bursa. Mulai dari hal sepele, seperti sistem pelayanan dan pengamanan, pemberian informasi, sampai pada mekanisme yang mengatur permainan di bursa.

Hal sepele umpamanya bagaimana mengamankan anjungan yang seputarnya terbuat dari kaca. Jejalan pemodal dan pengunjung yang mengamati perkembangan harga saham di pasar sekunder Lantai III Gedung Bursa, yang bukan mustahil bisa memecahkan kaca. Kalau itu terjadi, tak hanya kegiatan pasar sekunder yang terganggu tapi juga menyangkut keselamatan jiwa.

Lalu pelayanan yang menyangkut pelaksanaan bursa. Keterbatasan sarana komunikasi, amat mencolok mata. Sehingga para pemain sering terpaksa antri menunggu telepon di tengah keterbatasan waktu transaksi.

Berkenaan dengan mekanisme, kelemahan terlihat mulai dari tata cara pembagian formulir saham, sampai aturan main layaknya sebuah bursa saham. Di balik semua itu, kegiatan BEJ mulai diramaikan dengan mulai beredarnya desas-desus bergeraknya pemodal tertentu yang mengandalkan kewenangannya untuk memperoleh bagian saham dalam jumlah besar, tanpa harus repot-repot antri formulir,

Marzuki Usman

dan tanpa peduli soal alokasi.

Setelah lebih dari sepuluh tahun dilanda kesepian, BEJ memang telah mendadak menjadi pusat perhatian masyarakat, menyusul deregulasi pasar modal.

"Namun puncaknya baru belakangan ini, setelah beberapa perusahaan dari kelompok kuat terjun ke bursa menawarkan saham, dan pemodal asing mulai ramai berdatangan," kata seorang pialang.

Paling tidak kini disebut-sebut ada sekitar 100 wajah baru yang datang menanyakan soal bagaimana cara membeli atau memperoleh dan menjual saham. Mereka bukan hanya pemodal kuat, namun juga banyak yang mengaku berasal dari kalangan "paspasan". Bahkan untuk membeli 100 saham perdana pun harus berpatungan dengan rekan-rekannya.

Beberapa pendatang baru umumnya bersikap menonton dahulu. Gerak-gerik sejumlah pemodal yang dengan teropongnya mengawasi setiap pencatatan penawaran atau pembelian berikutnya harganya diamati dengan cermat. Begitu juga ketika pemodal itu tiba-tiba menuju pesawat telepon, yang hanya tersedia dua buah di anjungan untuk menghubungi para pialangnya. Percakapan telepon singkat sekitar tujuh sampai 10 menit, coba disimak mereka dengan cermat.

Kemudian mereka bertanya kepada pemodal itu, atau siapa pun di sisinya. Namun karena yang ditanya juga tengah asyik mengamati, biasanya penanya dipersilahkan menghubungi Humas Bapepam. Sebaliknya, Humas Bapepam pun mempersilahkan penanya itu langsung saja bertanya kepada para pialang.

"Tetapi bagaimana mungkin pialang mau memberikan penjelasan yang baik, kalau mereka sendiri pun begitu sibuk," kata seorang pemodal.

Seorang ibu yang tampaknya juga ingin membeli saham menanyakan sejumlah prosedur pembelian saham beserta mekanisme permainan di bursa.

"Kalau perlu saya bersedia membayar," kata ibu itu.

Namun ibu ini disarankan agar ke PT Danareksa yang menyediakan buku petunjuk dan sejarah pasar modal setebal 397 halaman. Terlepas dari apapun jawaban para petugas di seputar gedung bursa, agaknya suatu tata cara pemberian informasi yang efektif masih sangat dibutuhkan masyarakat.

Keramaian di gedung bursa memang bukan hanya bersumber dari pemodal yang sudah aktif bermain, masyarakat yang sekadar ingin tahu bursa saham, atau pencari informasi serius sebelum terjun langsung ke pasar, tapi juga oleh mereka yang masih disibukkan usaha memperoleh formulir saham, meski pengumuman formulir habis sudah ditempelkan.

"Bursa bisik-bisik" formulir saham perusahaan yang segera masuk ke pasar perdana pun terjadi di gedung bursa. Bahkan seorang peminat dibisiki seseorang yang bermaksud membeli formulir dengan harga penawaran mencapai Rp 75.000 per lembar untuk saham Lippo dan PT Pakuwon yang secara resmi sudah dibagikan kepada masyarakat beberapa hari sebelumnya.

Kendati pembelian saham yang secara resmi sudah dibagikan kepada masyarakat, toh masih tetap banyak saja yang mencari. Bahkan para penjamin kabarnya sudah mencetak ulang formulir tersebut.

Digitized by Google

Masalah ini memang bisa saja diatasi dengan mencetak ulang seperti itu, tapi ini pun bisa menimbulkan persoalan baru. Karena bila dilakukan pencetakan ulang, niscaya akan terjadi apa yang disebut kelebihan permintaan saham (*over-subcribed*).

Ini akan menyulitkan penjamin emisi untuk memenuhi permintaan secara adil. Jumlah permintaan itu tetap bisa dipenuhi seandainya persyaratan tingkat minimal 100 lembar saham diterapkan mutlak.

Suasana yang kurang sejuk di sekitar anjungan karena jejalan pengunjung dan ramainya "bursa bisik-bisik" pencari formulir, masih dihangatkan lagi dengan desas-desus adanya praktek tidak adil dari "penguasa formulir". Sementara masyarakat sampai harus antri untuk memperolehnya, ternyata ada kalangan tertentu bisa memperoleh secara nyaman, karena ada "jatah khusus".

Tak heran kalau sejumlah anggota DPR dan ekonom harus angkat bicara. Wakil Sekretaris F-KP Bomer Pasaribu dan Wakil Ketua Komisi VII telah menghimbau semua pihak agar berhati-hati menghadapi perkembangan di bursa efek.

Kedua anggota DPR ini menilai bahwa lonjakan permintaan saham belakangan ini lebih banyak sebagai akibat faktor spekulasi para pembeli, bukan bertujuan mendapatkan keuntungan berupa dividen.

"Masyarakat yang antri membeli saham belakangan ini lebih didorong untuk memperoleh keuntungan dari lonjakan harga saham tersebut. Unsur spekulatif ini jauh lebih dominan," kata Yahya Nasution.

Di sisi lain Bomer dan Yahya juga melihat bahwa perusahaan yang *go public* seharusnya tidak hanya menyebutkan keuntungan muluk-muluk dan yang dapat diperoleh, tapi juga memberitahu kepada masyarakat tentang resiko kerugian yang mungkin terjadi.

"Perusahaan yang *go-public* perlu juga memberi pengertian kepada masyarakat kemungkinan terburuk berupa adanya kerugian yang bisa diderita," kata Bomer.

Bapepam yang sebagai badan yang mewakili pemerintah disebut mereka harus aktif memberi penjelasan kepada calon pembeli saham perusahaan yang dijual di pasar modal.

Untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang merugikan semua pihak, maka pemerintah dan DPR perlu segera membuat UU.

"UU itu harus memiliki sanksi hukum yang tegas agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Selain itu, perlu untuk mencegah terjadinya *insider trading*,," kata ekonom dari LP3E Kadin, Suryo Sediono.

Menurut Suryo, praktek *insider trading* sulit dihindarkan karena Paket 20 Desember 1988 yang berisi larangan praktek itu tidak disertai sanksi-sanksi yang tegas.

Dalam praktek perdagangan efek yang *go-public* di pasar modal saat ini didesas-desuskan melibatkan praktek *insider trading*.

"Kebenaran mengenai ada atau tidaknya *insider trading* memang sulit dibuktikan. Tapi kalau dilacak dengan serius mungkin bisa ditemukan hal-hal yang tidak wajar."

Karena itu mereka umumnya sependapat bahwa perlu adanya kode etik bisnis khusus yang mengatur semua pihak yang terlibat dalam bursa.

"Kode etik bisnis itu seharusnya sudah dibuat setelah adanya deregulasi agar mampu mencegah terjadinya kanibalisme ekonomi," kata Bomer.

Namun kode etik bukan merupakan aturan yang regulatif dan birokratif, melainkan UU khusus yang mengaturnya. Selain itu, perlu ada UU Anti Monopoli dan UU yang mengatur hubungan keterkaitan antara usha kecil, menengah dan besar. "Sehingga tidak terjadi monopoli yang hanya merugikan si kecil."

Yahya mengingatkan bila pemerintah tidak segera membenahi kecenderungan yang terjadi di bursa efek, bukan tidak mungkin akan terjadi *crash,* seperti yang dialami di bursa *Wall Street.*

Ketua Bapepam Marzuki Usman memang telah mendesak asosiasi *underwriter* dan *broker* untuk mempunyai kode etik masing-masing. "Ini memang bukan main-main, karena situasinya sudah mendesak benar," katanya.

Bila ada pelanggaran oleh anggota masing-masing, mereka dapat memberikan sanksi bersama, sehingga semua aturan perdagangan di pasar modal ditaati sebagaimana diharapkan pemerintah.

Beberapa penjamin emisi yang dihubungi mengatakan bahwa suatu tim kecil dari asosiasi *underwriter* telah menyelesaikan draft kode etik mereka.

"Tapi saya tidak mengetahui mengapa draft tersebut belum selesai," kata seorang staf *underwriter.*

Menkeu Sumarlin juga telah mengingatkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru tentang pasar modal untuk meningkatkan kelancaran perdagangan.

Peraturan baru itu disebut-sebut menyangkut asuransi, dana pensiun, dana investasi swasta dalam negeri. Selain itu perbaikan pada ketentuan yang mengatur keberadaan lembaga penunjang seperti broker, dealer, dan

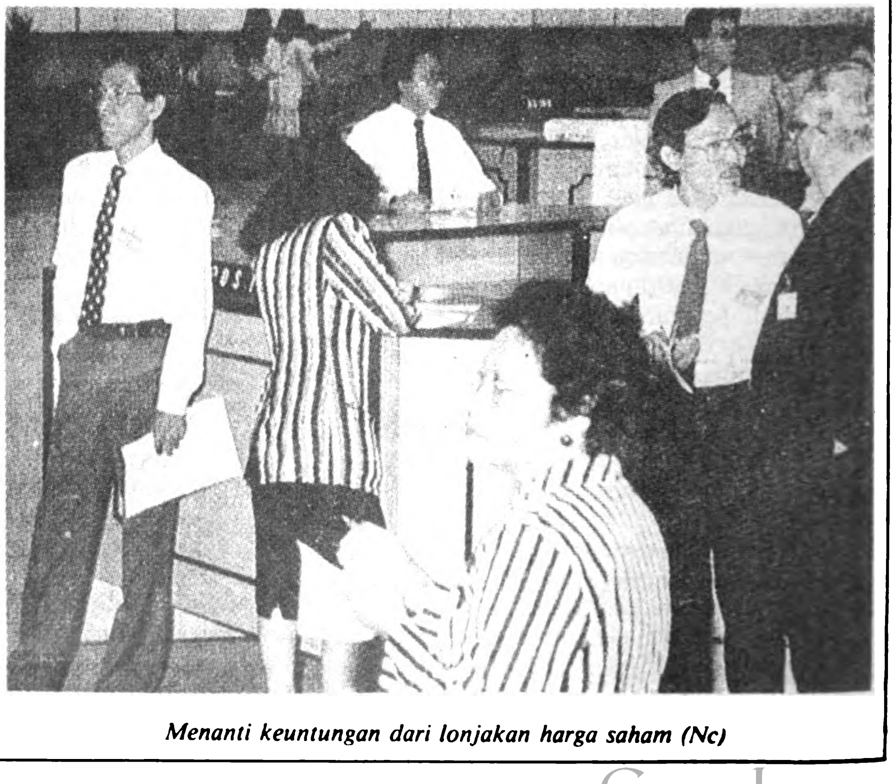

Menanti keuntungan dari lonjakan harga saham (Nc)

Digitized by Google

underwriter.

Peraturan semacam itu memang sudah sangat diperlukan. Bahkan Bapepam telah mentargetkan bahwa sampai akhir tahun ini 100 perusahaan akan menjual sahamnya. Disebut-sebut dari 50 perusahaan yang akan *go public*, di antaranya adalah beberapa BUMN.

Tapi yang menjadi pertanyaan kini adalah, bagaimana saham-saham yang dijual itu bisa mewujudkan tingkat pemerataan? Sebab bila tidak, perkembangan yang terjadi di pasar modal akan timpang.

Ini misalnya diingatkan oleh Ketua Umum Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), Sri Edi Swasono.

"Saham-saham perusahaan yang dijual hendaknya ditawarkan lebih dulu untuk dibeli Kopkar (Koperasi Karyawan - red), sebelum dijual kepada masyarakat umum," jelasnya.

Sebab dengan jalan demikian, kata Edi, ini sesuai dengan tekad dan kebijaksanaan pemerintah yang ingin mewujudkan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah.

Ia bahkan melihat bahwa perkembangan pasar modal yang terjadi saat ini terlihat timpang. Penjualan saham justru didahulukan bagi masyarakat umum, sedang kepentingan Kopkar dinomorduakan.

Agus Sudono, Ketua Umum Inkopkar (Induk Koperasi Karyawan) juga mempunyai nada yang sama. Sebab, menurutnya, jika saham-saham perusahaan ditawarkan lebih dulu kepada masyarakat umum maka akhirnya hanya dibeli dan dikuasai sebagai "tabungan" oleh segelintir orang saja yang memiliki kelebihan uang.

Sebaliknya jika saham-saham itu dijual dan dibeli oleh Kopkar, keuntungan yang diperoleh akan dinikmati oleh karyawan setempat yang menjadi anggota.

"Hal ini akan berdampak positif, yakni terjadinya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas kerja mereka," kata Agus.

Sri Edi Swasono sendiri menilai, baik Presiden Soeharto maupun Wapres Sudharmono sering menegaskan bahwa penjualan dan pemilikan saham oleh perseroangan bukan tujuan utama. Tetapi prioritas harus diberikan kepada para karyawan.

"Gejala yang timbul akhir-akhir ini justru sebaliknya," kata Edi.

Dan kepada para manajer koperasi ia menganjurkan agar meningkatkan profesionalisme secara lengkap.

BP Messakh, Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi dan Keuangan F-KP juga telah mengingatkan agar penjualan saham BUMN yang *go public* lebih diprioritas kepada Kopkar.

Menurutnya, kebijaksanaan memberikan prioritas kepada koperasi karyawan sebenarnya sudah lama diterapkan di Amerika Serikat.

"Bahkan di sana sudah ada peraturan dan perundangan yang mengatur masalah itu," katanya.☐ (LT)

Bursa Efek, Berlian yang Belum Diasah?

Sekarang, tidak cuma tabungan berhadiah yang diburu masyarakat, juga saham-saham. Ini terlihat dari besarnya minat masyarakat membeli saham, utamanya pada pasar perdana dalam beberapa waktu belakangan ini.

Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, tiba-tiba menjadi pusat per hatian. Setelah sepuluh tahun dilanda kesepian.

Memang sudah sejak akhir tahun lalu Bursa Efek Jakarta mendadak menjadi perhatian masyarakat, menyusul setelah dikeluarkan kebijaksanaan deregulasi pasar modal. Namun puncaknya baru belakangan ini, setelah beberapa perusahaan dari kelompok kuat terjun ke bursa menawarkan saham dan pemodal asing mulai ramai berdatangan.

Apa yang terjadi pada penghujung bulan Agustus lalu, lebih mengejutkan lagi. Karena baru terjadi dalam sejarah Bursa Efek Jakarta, di mana sekitar 5.000 orang pemodal terpaksa antri untuk mendapatkan formulir penawaran perdana saham PT. Lippo Pasific Finance.

Masyarakat investor yang mengincar saham Lippo kelihatan seperti orang sedang antri untuk mendapatkan jatah makanan. Antrian puluhan meter ini, yang berlangsung sejak pagi sampai siang hari itu, tak saja ada di BEJ tapi juga di dua kantor underwriter (pejamin utama emisi), masing-masing PT. Multicor (Gedung Bank Central Asia, Jalan Jenderal Sudirman) dan PT. Danareksa (Gedung Bursa, Jalan Medan Merdeka Selatan).

Diantara peminat itu, ada yang bernasib mujur karena bisa mendapatkan formulir. Tapi ada juga yang sial, karena sudah ikut antri sejak pagi namun tidak kebagian formulir. Malah ada yang sampai jatuh pingsan. Inilah sejarah baru kegiatan pasar modal di Indonesia.

Presiden Direktur PT Danareksa, Soebagyo melukiskan kejadian ini sebagai di luar dugaannya. Dikatakan, kejadian itu merupakan sejarah dan pengalaman baru bagi pasar modal Indonesia. "Kita salut dengan perhatian para investor. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengecewakan mereka dengan memperbanyak pengadaan formulir."

Sejumlah pengusaha yang dihubungi *Media Karya* mengomentari peristiwa itu dengan mengatakan, minat investor terhadap bursa saham sekarang ini cukup menggembirakan. Mereka tidak lagi membiarkan uangnya menganggur, dan kesadaran masyarakat akan investasi melalui pasar modal sudah tinggi.

Mengenai soal kurangnya formulir, sebenarnya juga sudah terjadi beberapa pekan sebelumnya. Bahkan ada yang menggambarkan formulir penawaran perdana sebagai barang yang langka.

Hal ini terjadi atas penawaran per-

Digitized by Google

dana saham seperti PT. Asuransi Bina Dharma Arta (ABDA), PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marien), PT. Bakrie & Brothers, PT. Astrijati Indonesia Rotan Industries (AIRI) dan PT. United Tractors.

Sedikit

Sekarang ini perusahaan yang go public memang baru sedikit. Sehingga, ketika masyarakat mencium keuntungan dengan membeli saham yang ditawarkan, mereka pun berbondong-bondong menyerbu. Mereka kemudian menjual kembali saham beberapa hari setelah listing dengan mengantongi capital gain yang lumayan.

Menurut beberapa pengamat bursa, kondisi itu berbeda sekali dengan diluar negeri, "bahkan di sana tidak ada lagi hingar bingar menjelang penawaran perdana."

Tahir, pengusaha dan pemilik Mayapada Group mengatakan, kondisi saat ini adalah bagian dari sebuah proses dan Indonesia dipercaya akan mencatat perkembangan pasar modal yang sangat pesat.

Ya, memang repot bila masyarakat hanya menyerbu ketika penawaran perdana saja. Repotnya, ya rebutan formulir itu.

Namun kini, untuk mencegah terjadi antrian panjang serta terjadinya penjualan formulir saham secara ilegal, Asosiasi Penjamin Emisi Indonesia (APEI) atas "restu" Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) menetapkan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- per formulir.

Ketentuan itu dikenakan pertama kali terhadap saham Gajah Surya Multi Finance (GSMF) yang memasuki pasar perdana tanggal 12-18 September lalu.

Vice President GSMF, Jusak Widjaja, SE mengatakan yakin minat masyarakat tidak akan berkurang untuk membeli saham, meski formulir yang biasanya didapat gratis, sekarang dikenakan biaya Rp 5.000,-.

Sementara itu, Ketua APEI, AT. Prastowo mengatakan, untuk penawaran berikutnya, formulir akan disediakan tanpa batas.

Kami (APEI dan Bapepam- Red) sepakat, untuk emisi-emisi berikutnya harus disediakan formulir secukupnya dan dalam hal emisi yang laku keras, seperti Lippo Pasific Finance, masa penjatahan dan pengembalian akan diperpanjang," tandas Prastowo.

Proses

Kegiatan pasar modal di Indonesia kini memang sedang dalam proses menuju masa depan yang menggairahkan. Seperti yang dikatakan Bapepam, Marzuki Usman, SE, MA.

Petugas keamanan turut menertibkan pembeli saham (Nc)

Menurutnya, berbagai usaha telah ditempuh untuk mendorong agar pasar modal menjadi lebih mapan, sehingga benar-benar dapat dijadikan salah satu sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional.

Tindakan-tindakan penting yang telah diambil meliputi serangkaian kebijaksanaan deregulasi yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan peranan pasar modal melalui penyederhanaan berbagai peraturan serta untuk menciptakan kemudahan-kemudahan lainnya bagi dunia usaha.

Dikatakan, sejak tahun 1987 Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mendasar bagi perkembangan pasar modal melalui Paket Kebijaksanaan 23 Desember 1987, Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 dan Paket Kebijaksanaan 19 Desember 1988.

Melalui serangkaian kebijaksanaan tersebut, berbagai kemudahan dan penyederhanaan peraturan telah diberikan, baik untuk sisi penawaran (supply side), yaitu calon emiten yang akan menerbitkan efek, maupun untuk sisi permintaan (demand side), yakni para pemodal.

Untuk lebih meramaikan pasar modal Indonesia, masyarakat calon emiten, yaitu perusahaan-perusahaan nasional, termasuk yang berstatus PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing), diharapkan dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk memperoleh dana.

"Bagi perusahaan PMA pasar modal dapat diharapkan meningkatkan penyertaan nasional untuk memenuhi ketentuan tentang Penanaman Modal Asing," tutur Marzuki.

Menurutnya, pasar modal yang maju akan dapat menunjang iklim penanaman modal asing di Indonesia, karena bagi pihak asing akan lebih mudah untuk melakukan penjualan atas investasinya bila diinginkan sehingga yang bersangkutan dapat melakukan penanaman di sektor lain.

Disamping itu, pasar modal yang maju juga merupakan salah satu alternatif bagi investor untuk melakukan investasi yang tidak kalah menariknya dengan media investasi lainnya.

Sumber Pembiayaan

Melihat pengalaman masa lalu, dan melihat tingkat pembangunan ekonomi yang telah dicapai dengan prospeknya, diperkirakan bahwa pasar modal akan berkembang dengan cukup baik.

Perkembangan teknologi komunikasi dan teknik pasar modal dunia juga memungkinkan perkembangan pasar modal ke arah bentuk persaingan sempurna, sehingga dapat dicapai tingkat efisiensi pasar modal yang lebih tinggi. Suatu pasar modal yang efisien akan menurunkan biaya transaksi.

Digitized by Google

Sehubungan dengan itu diharapkan bahwa di masa mendatang pasar modal akan menjadi jalur sumber pembiayaan jangka menengah/panjang yang semakin penting bagi dunia usaha, di samping jalur-jalur pembiayaan yang sudah ada. Tentu saja perkembangan pasar modal tidak terlepas dari arah perkembangan perekonommian secara makro serta dukungan peraturan/ketentuan yang mendorong ke arah efisiensi pasar modal.

Bagi sektor perbankan, pasar modal lebih dilihat sebagai alternatif pembiayaan yang bersifat komplementer terhadap kredit perbankan. Tidak dapat dihindari bahwa sebagian porsi kredit perbankan jangka menengah/ panjang akan diambil alih oleh pembiayaan melalui pasar modal.

Misalnya, apabila pasar modal dapat menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dan fleksibel, maka debitur akan menerbitkan obligasi untuk mengganti kredit atau untuk menambah pinjaman.

Apabila perusahaan ingin memperoleh struktur keuangan yang lebih kuat, maka debitur akan mengganti kredit dengan menerbitkan saham. Setelah kondisi keuangan debitur bertambah kuat, maka sektor perbankan akan memperoleh portfolio perkreditan yang lebih sehat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperkirakan sektor perbankan akan mendorong para debitur primanya untuk memanfaatkan pembiayaan pasar modal.

Dunia usaha akan semakin leluasa untuk mencari struktur pembiayaan yang paling sesuai dengan kegiatan usahanya dengan semakin luasnya pilihan sumber pembiayaan.

Komposisi struktur pembiayaan dunia usaha di Indonesia saat ini sangat tergantung dari dana pinjaman jangka pendek, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga.

Pada saat perekonomian sedang membaik, struktur pembiayaan semacam ini dapat memberi keuntungan yang tinggi bagi pemilik perusahaan.

Tetapi, biaya bunga akan menjadi beban yang berat apabila perekonomian mulai melesu. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan: dilihat dari sisi keuangan perusahaan, sebagian besar dunia usaha akan dapat memperoleh manfaat dari timbulnya pasar modal yang aktif.

Satu hal yang perlu dicatat, menurut Marzuki Usman, bahwa potensi pasar modal sebagai sumber pembiayaan nampaknya lebih terbuka bagi perusahaan yang telah terbukti memiliki track record yang baik. Sebaliknya, perusahaan baru atau yang permodalannya lemah akan memiliki akses yang relatif lebih sempit terhadap pasar modal. Hal ini adalah wajar mengingat masyarakat investor umumnya tidak akan mengambil risiko yang berlebihan dengan melakukan tindakan spekulatif.

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah telah memperluas akses terhadap pasar modal bagi perusahaan baru atau yang permodalannya lemah tetapi dinilai prospek yang baik dengan adanya bursa paralel. Disamping itu, melalui kesempatan pembukaan bursa-bursa swasta di kota-kota besar di Indoensia akan lebih terbuka lagi kesempatan bagi dunia usaha untuk memperoleh dana masyarakat.

Selain sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, pasar modal sering pula dikaitkan dengan manfaat penting lainnya, antara lain:

Lapangan Kerja: Perusahaan yang memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal untuk dana investasi dalam rangka ekspansi perusahaannya diharapkan akan cepat menciptakan lapangan kerja.

Pemilikan Saham: Dengan dimilikinya saham perusahaan oleh publik berarti perusahaan tersebut semakin populer di masyarakat.

Kepopuleran ini mempunyai dampak positif, yaitu bahwa hasil-hasil produksi perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat. Hal ini adalah suatu promosi yang murah.

Selain itu, dengan semakin tersebarnya pemilikan saham dalam proporsi yang kecil-kecil, pemilik lama diharapkan tidak merasa khawatir akan kehilangan hak kontrol terhadap perusahaan. Yang penting bagi masyarakat adalah bahwa perusahaan tersebut mempunyai pertumbuhan yang baik sehingga saham-saham yang mereka miliki dapat mendatangkan hasil yang memadai, baik berupa dividen maupun capital gain.

Keterbukaan: Perusahaan yang terjun ke pasar modal adalah sebagai pionir guna menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan terbuka.

Dengan keterbukaan tersebut perusahaan-perusahaan dipacu untuk mengelola usaha mereka secara profesional. Dengan demikian jelas bahwa pemilik perusahaan seyogianya dapat memanfaatkan tenaga-tenaga profesional untuk duduk dalam pimpinan perusahaan. Tambahan pula, perusahaan-perusahaan yang go public diharapkan daspat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan keluarga yang umumnya bersifat tertutup dan masih menunjukkan keengganan untuk go public.

Investor

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri ialah adanya pasar modal yang maju merupakan alternatif yang menarik bagi para investor dalam melakukan investasi. Para investor kini sudah semakin menyadari, bermain di pasar modal tidak saja mengharapkan bunga dan dividen, tapi yang tidak ka-

Memantau permainan penjualan saham di bursa efek (Nc)

Digitized by Google

Pendataan melalui peralatan komputer (Ist)

lah menariknya adalah capital gain.

Walaupun para investor pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH 1983) maka investor yang mendapat rangsangan adalah Dana Pensiun yang merupakan salah satu investor institusional.

Adanya dana pensiun tidak saja atas dasar kehendak karyawan, akan tetapi lebih banyak atas inisiatif pemberi kerja dalam usaha menjamin kesinambungan produksi dan kestabilan jalannya usaha.

Dengan semakin tenteramnya karyawan berarti akan semakin stabil dan produktif jalannya usaha. Pemberi kerja yang berkeinginan membentuk dana pensiun tersebut bukan saja berasal dari perusahaan-perusahaan, akan tetapi dapat pula dari sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan sebagainya, bahkan bagi pekerja yang mandiripun dimungkinkan untuk ikut dalam program pensiun yang bersifat program pensiun sistim iuran.

Secara kasar dapat diperkirakan bahwa pada akhir Pelita V akan terdapat tidak kurang dari 300 dana pensiun yang mengelola dana yang sangat besar dan siap ditanamkan, antara lain di pasar modal.

Sejalan dengan itu sebagai konsekuensi logis dari pembangunan, tingkat pendapatan per kepala akan naik, berarti pada gilirannya akan menambah jumlah pemodal individual.

Jika dianggap bahwa selera terhadap instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi dan sekuritas akan tercipta dengan cepat sebagai hasil dari kegiatan kampanye yang dilakukan secara bersama-sama, berarti bahwa permintaan terhadap instrumen pasar modal pada akhir Pelita V tidak lagi merupakan hal yang perlu dirisaukan.

Namun begitu, peranan para broker dan trader adalah mutlak diperlukan untuk dapat meyakinkan para pemodal bahwa instrumen pasar modal merupakan komoditi yang diinginkan.

Faktor lain yang tidak boleh dilupakan ialah dibukanya pasar modal Indonesia bagi para pemodal luar negeri. Mereka memiliki banyak kesempatan dan kemampuan yang besar.

Sebenarnya sebelum mereka memilih pasar modal Indonesia, mereka sudah dapat memasuki pasar modal lain, seperti Hongkong, Singapura, Bangkok, dan sebagainya.

Di lain pihak, apabila mereka memilih untuk menanamkan uangnya di Bursa Efek Jakarta dimana nilai nominal saham yang terdaftar tidak sampai Rp 200 miliar, berarti akan terjadi perubahan yang cukup besar yang dapat mempengaruhi harga saham yang diperjual-belikan di bursa saham. Pada gilirannya hal tersebut akan membuka mata pemodal Indonesia yang selama ini nampaknya belum menyadari sepenuhnya bahwa saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta merupakan ''berlian yang belum diasah''.

Tambahan pula, melalui Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988, Pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih berimbang antara investasi di pasar modal dan di perbankan, setelah dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 15 persen terhadap bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan. Melalui paket tersebut para pemodal diharapkan akan lebih tertarik untuk terjun ke pasar modal.

Dari sisi permintaan patut pula dicatat bahwa terdapat usaha untuk membentuk ''investment Fund'' yaitu suatu trust fund yang dibentuk di luar negeri dan mempunyai fungsi untuk memobilisasi dana luar negeri guna ditanamkan dalam perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

Dari sisi permintaan, apabila ditanam di pasar modal Indonesia dana tersebut akan sangat mendukung usaha pemerintah dalam mengundang modal asing untuk menunjang pembangunan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) telah membentuk Asian Development Equity Fund (ADEF) yang dananya direncanakan juga untuk membeli saham-saham dari perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dari berita-berita yang masuk kelihatannya beberapa bank internasional sudah mulai menjajaki untuk membentuk fund-fund yang serupa yang nantinya ditanamkan pada instrumen pasar modal yang tersedia di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek lainnya.

Menjawab pertanyaan, Marzuki Usman mengemukakan, hingga akhir Agustus 1989, perusahaan yang telah go public mencapai 56 perusahaan yang terdiri dari 32 perusahaan menjual saham dan sisanya menjual obligasi.

Sementara itu, perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta juga terus mengalami peningkatan baik dilihat dari segi peredaran saham, nilai efektif, trading turn over dan indeks harga saham. □ (hes)

Digitized by Google

Oleh: Suwachman

Bursa Saham Jakarta "Meledak"

Spekulasi, Latah Atau Kurang Pengertian?

"Meledaknya" Bursa Efek Jakarta belakangan ini mengagetkan sejumlah pengamat. Mengapa tiba-tiba masyarakat ingin memborong surat-surat berharga, sementara banyak di antara mereka yang belum tahu aturan permainan maupun resikonya?

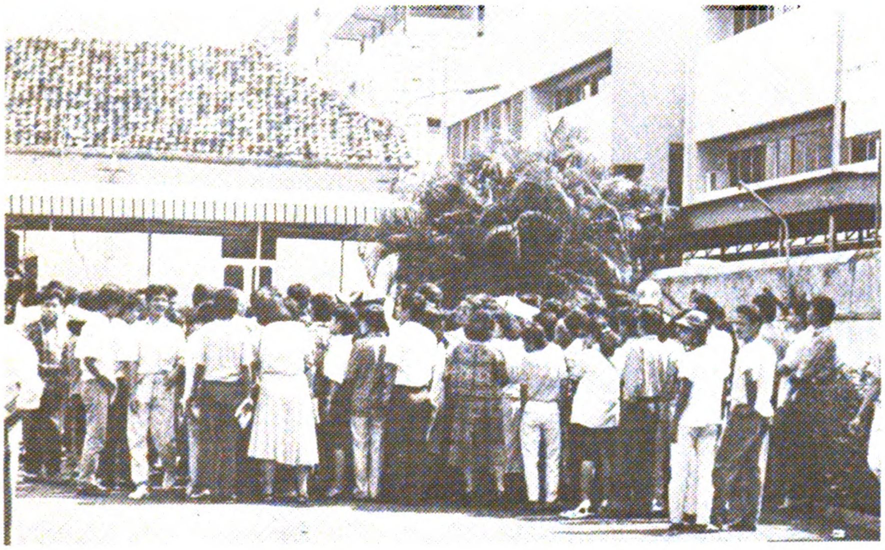

Masyarakat pembeli saham masih diliputi emosional (Nc)

Mungkin benar kata seorang pakar ekonomi kepada sebuah media ibukota baru-baru ini, bahwa unsur spekulasi masih terlalu besar dalam transaksi di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Seperti latah, mereka nampaknya ingin ikut untung-untungan tanpa memperdulikan keadaan perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya *(go public)*. Besarnya deviden tak menjadi soal, yang penting mendapatkan selisih harga atau laba dalam jual-beli saham, yang dikenal sebagai *capital gain*.

Unsur spekulasi memang selalu ada dalam tiap jual-beli saham. Namun, di negara maju unsur deviden yang menunjukkan sehat-tidaknya perjalanan sebuah perusahaan tetap menjadi pertimbangan. Karenanya, para investor di bursa luar negeri selalu membaca lebih dulu dengan teliti prospektus penawaran saham, terutama yang menyangkut laporan keuangannya. Hal ini tak banyak dilakukan oleh calon pembeli saham di sini, sebagian karena ada kendala, yaitu sulitnya membaca pembukuan perusahaan.

Mengkhawatirkan

Tetapi, spekulasi yang terjadi di BEJ akhir-akhir ini agaknya cukup mengkhawatirkan. Lihat, apa yang terjadi. Antrian panjang massa yang ingin memperoleh formulir pembelian saham perusahaan-perusahaan besar di pasar perdana, dihadang bisik-bisik yang memperjual-belikan formulir. Bahkan formulir *Lippo Pacific Finance* ditawarkan setinggi Rp 175 ribu per lembar!

Gejala apa ini dan mengapa bisa terjadi? Masyarakat awam calon pembeli saham di negeri kita nampaknya masih sangat emosional. Terbayang bahwa jual-beli saham dapat mendatangkan keuntungan besar, tak segan-segan mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh formulir yang merupakan kunci untuk membeli saham itu. Meski dengan harga tak masuk akal, formulir tetap dibeli, padahal sebenarnya formulir diedarkan cuma-cuma alias gratis!

Tetapi, peristiwanya sendiri sebenarnya sangat masuk akal. Formulir yang biasanya dijual para penjamin emisi dan pialang akan cepat berkurang jika permintaan banyak. Bila permintaan terus meningkat, orang pun akan cenderung memperdagangkannya. Ia menjadi barang langka yang bisa berharga tinggi.

Lalu, siapa yang salah? Sebenarnya tak ada, sebab hal itu terjadi karena faktor calon pembeli yang emosional tadi. Hanya, keadaan itu sesungguhnya bisa diatasi, kalau saja *underwriter* atau penjamin emisi cepat tanggap dengan mencetak lebih banyak lagi formulir. Kalau tidak, "Kredibilitas *underwriter* akan menurun yang berakibat masyarakat kurang percaya lagi padanya," kata Marzuki Usman, ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam).

Tetapi cara ini pun akan menimbulkan ekses. Permintaan akan formulir yang terus menerus dituruti akan berakibat kelebihan permintaan *(over subscription)*. Dan kalau ini terjadi, mudah ditebak apa yang akan menyusul kemudian. Di pasar ke dua *secondary market)* harga saham akan melonjak hebat. Harga meningkat di pasar kedua memang biasa terjadi, apalagi kalau di pasar perdana ada pihak yang memborong saham yang ditawarkan. Tetapi lonjakan yang tak wajar tentu bukan merupakan hal yang baik. Unsur spekulasinya menjadi terlalu besar. Dan kalau masyarakat latah saja, bukan tak mungkin mereka akhirnya akan kecewa jika ternyata harga anjlok dan deviden yang dijanjikan kecil atau malah tak ada karena perusahaan merugi!

Kendala

Sebenarnya Pemerintah sejak lama telah menerapkan berbagai langkah pengamanan agar pasar modal tidak menjadi ajang spekulasi seperti halnya *stock exchange* di luar negeri. Pertama, porsi saham yang ditawarkan kecil, kemudian ada PT Danareksa yang berfungsi sebagai penyangga. Dengan porsi besar saham yang dibeli perusahaan ini, fluktuasi harga yang tak wajar dapat dicegah.

Digitized by Google

Tetapi cara ini ternyata menjadi kendala yang menyebabkan pasar kedua tak bisa berkembang selama dasawarsa lalu. Pasalnya, pasar modal menjadi kurang menarik bagi para investor. Mungkin yang laku keras saat itu adalah obligasi yang bisa menawarkan bunga dengan pasti.

Lalu lahirlah serangkaian deregulasi di bidang ini disusul dengan lahirnya Bursa Paralel (*Over The Counter Market*) atau OTC. Tak bisa dipungkiri, langkah-langkah ini telah menyehatkan pasar modal. Pasar kedua menjadi bergairah, semakin banyak perusahaan yang *go public,* semakin banyak perusahaan pialang (*brokers*) dan masyarakat investor besar maupun kecil mulai melirik pasar modal.

Dalam perkembangannya keadaan ini menumbuhkan sikap spekulatif, bahkan lebih dari itu, ada permainan yang kurang sehat. Sofyan Hotels mungkin merupakan emiten pertama yang mengalami hal itu. Bayangkan, setelah sebelumnya orang menggebu-gebu memperebutkan saham-sahamnya, harganya terperosok jauh di bawah harga nominalnya. Tentu saja saham-saham hotel milik swasta nasional ini mandek, bahkan pemiliknya yang merasa terpukul bersedia membeli kembali saham-sahamnya. Suatu hal yang tentu saja tidak mungkin, karena menyalahi ketentuan *go public.*

Belakangan saham-saham perusahaan beken seperti Lippo, Pakuwon, Bakrie & Brothers menjadi incaran. Saking emosionalnya para pengincar dan jelinya para penjamin emisi dan pialang, baru formulirnya saja sudah menjadi rebutan. Konon, telah terjadi praktek tidak adil dari "penguasa formulir". Bahkan di saat masyarakat harus antri panjang, ada orang tertentu yang bisa memperolehnya dengan mudah karena ada "jatah khusus". Kalau ini benar maka spekulasi terjadi lebih dini. Dan di sinilah letak kekhawatiran berbagai kalangan akan perkembangan selanjutnya pasar modal kita.

Belum lagi kekhawatiran tentang pembeli asing yang mungkin saja ikut menentukan harga. Karena mungkin melihat sikap latah yang ada di kalangan pembeli kita, mereka bisa saja mempermainkan harga. Dengan memborong banyak di pasar perdana, misalnya. Lalu mereka mempelopori membeli dengan lonjakan harga tinggi di pasar kedua. Ini akan diikuti, begitu pula jika harga mereka turunkan.

Seorang pakar ekonomi mengkhawatirkan dampak lanjutannya, jika hal itu terjadi. Kalau masyarakat kita sudah mulai pintar atau ada hal lain yang mengakibatkan mereka tak bisa leluasa bermain, bisa saja mereka memindahkan uang mereka ke tempat lain. Dan kalau mereka itu banyak memborong saham-saham besar, bukan tak mungkin bisa terjadi *crash* seperti di bursa New York.

Kekhawatiran demi kekhawatiran nampaknya akan terus muncul di saat terjadi *boom* pasar modal seperti saat ini. Lalu bagaimana kita mesti bersiap-siap agar pasar modal tidak menjadi ajang spekulasi tak bertanggung-jawab yang dapat menjerumuskan banyak pihak?

Memasyarakatkan saham perusahaan

Penerangan

Nampaknya sisi lain yang kurang terpikirkan dalam pengembangan pasar modal yang begitu pesat adalah faktor penerangan. Mungkin kita lupa, pasar modal bagi sebagian besar masyarakat kita adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang tentu saja masih perlu banyak disingkapkan agar menjadi jelas.

Apa yang banyak dilakukan selama ini, seperti seminar-seminar dengan topik pasar modal adalah untuk konsumsi kalangan tertentu yang sedikit banyak sudah paham. Seminar atau ceramah dengan harga mahal itu hanya menambah wawasan kalangan terbatas. Lalu masyarakat luas yang membutuhkan penerangan bisa memperolehnya dari mana? Dari brosur, *booklet* atau *leaflet?* Belum banyak membantu. Media ini masih sangat terbatas jangkauannya.

Sesungguhnya, karena peranan para pialang sangat besar, maka seyogyanya mereka ini harus sekaligus menjadi juru penerang. Di luar negeri, mereka yang bergerak di bidang *stock brokerage* semacam ini biasanya tidak sekadar menjadi perantara jual-beli saham. Mereka juga menjadi semacam konsultan bagi calon pembeli. Meski untuk itu harus dikeluarkan imbalan *(fee),* calon pembeli akan mendapat segala sesuatu yang diperlukan dengan jelas. Kepercayaan akan meningkat terhadap pialang yang menjadi konsultan ini, karena dengan informasi yang benar, si pembeli akan menjadi nasabah. Tak perlu antri seperti di sini, cukup angkat telpon. Dan segala yang diinginkan calon pembeli dari formulir sampai saham-saham yang diinginkan akan diurus sang pialang.

Selain itu, Departemen Penerangan dengan segala aparat yang dimilikinya tentunya akan sangat membantu jika turut serta mengumandangkan derap pasar modal dengan informasi-informasi yang jelas dan akurat. Di samping itu, tentu saja pihak Bapepam sendiri, melalui sarana yang dimilikinya, lebih menyebarluaskan informasi secara intensif. Hingga tak ada lagi nanti calon pembeli saham datang ke Bapepam ingin menemui Kepala Humas, hanya untuk meminta penjelasan mengenai cara membeli saham.

Apabila semua pihak yang terlibat dalam jual beli saham memahami segala aturan permainan dan melaksanakannya dengan baik, pemerataan dalam segala hal, termasuk pengalokasian formulir kepada penjamin emisi dan pialang akan mudah dipantau dan tak perlu menjadi permainan yang tidak sehat. Tapi itu semuanya tentu saja berpulang kepada itikad masing-masing pihak.

Dengan begitu, kita tidak perlu latah, tak perlu spekulasi karena cukup memahami apa yang kita lakukan. Dengan cara ini pun masing-masing pihak masih bisa mendapatkan keuntungan yang memadai.☐

Digitized by Google

Radio, Ikut Mengisi Pembangunan

Radio sebagai salah satu media elektronik mempunyai arti penting bagi tegaknya kemerdekaan bangsa Indonesia. Dulu, di jaman revolusi radio mempunyai peranan mengobarkan semangat perjuangan putera-putera Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Kita mengenal Bung Tomo yang dengan lantang lewat corong radio membakar semangat arek-arek Surabaya untuk bangkit mengangkat senjata melawan Belanda yang ingin kembali bercokol di tanah air tercinta.

Radio efektif untuk mengisi pembangunan

Getaran yang dirasakan lewat suara lantang di radio yang bergema di seluruh penjuru tanah air membuka mata dan telinga dunia terhadap perjuangan penegakkan kemerdekaan Republik Indonesia yang proklamasi kemerdekaannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta, 17 Agustus 1945 juga disebarluaskan lewat siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Dua kenyataan di atas, dan masih banyak lagi peristiwa lainnya, juga disiarkan oleh radio. Demikian penting peranan radio sebagai alat komunikasi pada waktu itu. Kini, setelah Indonesia merdeka dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, misi dan orientasi yang dibawakan oleh radio sudah berubah. Orientasinya bukan lagi sebagai alat perjuangan melawan penjajah Belanda, namun bagaimana radio ikut serta mengemban misi nasional melaksanakan pembangunan bangsa, mencerdaskan bangsa dan membebaskan warga masyarakat dari keterbelakangan.

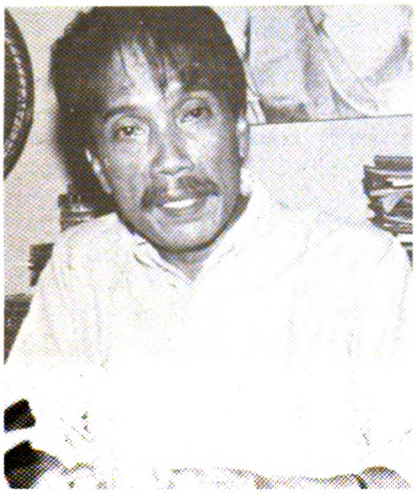

Zainal Suryo Kusumo

''Kalau dulu radio sebagai alat perjuangan untuk mengobarkan semangat melawan penjajah, sekarang ini bagaimana memerangi kebodohan, kemiskinan, mengejar ketinggalan di banding bangsa lain yang sudah maju,'' ujar Zainal Kusumo, Direktur Utama Radio Arief Rachman Hakim (ARH) kepada *Media Karya.*

Tantangan yang dikemukakan Zainal Kusumo itu telah dijawab sendiri oleh radio yang ada, baik radio pemerintah (RRI) maupun radio swasta. Hal ini terlihat jelas dari berbagai program siaran yang ditawarkan radio-radio tersebut kepada masyarakat luas.

Radio ARH, seperti dikemukakan Zainal, lebih diarahkan kepada generasi muda penghuni daerah kumuh di seantero wilayah di Jakarta. Meskipun banyak menitikberatkan siarannya pada hiburan, seperti halnya radio-radio yang lain, ARH juga memberikan informasi berkaitan dengan masalah sosial budaya, meningkatkan motivasi belajar, kegiatan swadaya dan swakarsa bagi para remaja, merangsang serta mendorong agar para usia belia lebih kreatif.

Begitu pula dengan radio Prambors, seperti dikemukakan Malik Syafei selaku Dirut radio Prambors, sasarannya juga menitikberatkan pada generasi muda namun yang berdiam di daerah gedongan. Dan untuk menyampaikan pesan-pesan digunakan bahasanya anak muda.

Untuk lebih meningkatkan kualitas intelektual generasi muda, tidak lama lagi radio yang berdomisili di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat itu, akan membuka program baru, yaitu program siaran bahasa Inggris bagi kalangan remaja agar mereka ini lebih terdorong untuk menguasai bahasa asing itu bagi kepentingan mereka sendiri. Tentunya cara penyuguhannya dibuat sedemikian menariknya sehing-

Digitized by Google

ga tidak membosankan. Misalnya mengumpulkan mereka dalam satu tempat, dibuka dialog dalam bahasa Inggris diantara mereka sendiri. Dari situ akan kelihatan siapa yang belum menguasai bahasa Inggris secara baik. Diharapkan mereka yang belum mampu berbahasa Inggris akan timbul keinginan untuk mendalami penguasaan bahasa Inggris, entah melalui kursus atau cara lainnya. Prambors akan membantu memberikan informasi dimana tempat kursus bahasa Inggris.

Begitu pula dengan radio Draba. Selain menyajikan masalah-masalah hiburan juga menginformasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Misalnya memberikan informasi tentang arti penting donor darah, tentang masalah kemacetan di berbagai jalan di Jakarta, kegiatan sosial, kunjungan lurah atau camat.

Strategis

Keberadaan radio di tengah-tengah masyarakat suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Radio sudah menyatu dengan masyarakat, bahkan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat khususnya bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sarana komunikasi lainnya, seperti koran, televisi dan sebagainya.

Dengan radio masyarakat tidak saja memperoleh hiburan murah tapi juga informasi yang penting tentang pembangunan. Disini nampak sekali radio mempunyai kedudukan yang strategis sebagai media informasi sekaligus hiburan.

Seperti dikemukakan Ketua Bidang Pembinaan Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, dr. Sutomo Parastho kepada *Media Karya*, peranan radio dalam pembangunan cukup efektif dan strategis.

Dalam perkembangannya radio mempunyai segmentasi dan format, sehingga siaran yang disampaikan radio itu akan lebih spesifik. Misalnya ada radio yang mengkhususkan siarannya pada generasi muda. Disini informasi tentang bahaya narkotika akan lebih kena sasaran karena korban narkotika lebih banyak pada generasi muda.

Namun tidak hanya itu saja peranan radio. Sutomo Parastho menunjuk siaran pedesaan atau yang ditujukan kepada masyarakat di pedesaan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produksi dan membuka pengetahuan baru

Sutomo Parastho

tentang seluk-beluk berhubungan dengan bank bagi warga desa. Ini sekaligus untuk menghindarkan masyarakat dari ijon. Informasi lain diperlukan misalnya bagaimana menjual produksi pertanian atau lainnya.

Radio Swasta

Peranan radio swasta dalam pembangunan tidak kecil. Berbagai informasi yang menunjang semangat masyarakat, khususnya di daerah yang sudah maju, semakin besar oleh radio swasta. Bahkan oleh Shidki Wahab selaku Dirut Radio Draba ditegaskan bahwa peranan radio swasta justru kekuatannya terletak di lokal.

Dia beberkan kekuatan radio yang lokal itu, dimana RRI dalam memberikan informasinya itu belum dapat

PRSSNI, Dari Se

Radio Siaran Swasta sebagai sarana komunikasi banyak bermunculan sejak Orde Baru lahir. Mula-mula dipelopori para pemuda, pelajar dan mahasiswa, mengudara radio-radio amatir di seantero wilayah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Keadaan yang masih semrawut menuntut adanya penertiban di kalangan radio-radio amatiran itu.

Melihat arti penting dari kehadiran radio siaran swasta itu, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970. Empat tahun kemudian di penghujung tahun 1974, tepatnya tanggal 17 Desember 1974 dibentuklah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) sebagai satu-satunya wadah organisasi radio siaran swasta.

Kini, dalam usia 15 tahun perjalanan radio siaran swasta semakin nyata. Jumlah anggota makin bertambah, bahkan permintaan untuk mendirikan radio swasta juga mengalir. Menurut data yang ada, jumlah radio siaran swasta seluruh Indonesia meliputi 498 buah. Yang benar-benar menjalankan fungsi komersial meliputi 491 buah dan yang non komersial 7 buah. Khusus untuk daerah Jakarta dan sekitarnya sendiri, tercatat 43 stasion radio swasta.

Munculnya permintaan baru untuk mendirikan radio swasta bisa dipahami, karena untuk mendirikannya tidak diperlukan modal yang besar. Dengan sebuah pemancar dan listrik yang cukup, sudah dapat mengudara. Ditambah lagi dengan kemampuan radio dalam menjaring iklan dari perusahaan-perusahaan, maka keuntungan pun diraih dan ini merupakan kenyataan.

Namun, permasalahannya bukan hanya itu. Radio sebagai media komunikasi, yang diharapkan ikut berperan dalam pembangunan, harus dapat dikontrol. Terutama penyajian siarannya. Sebab radio itu mempunyai ciri yang lain dari media massa lainnya. Media cetak misalnya, dalam pengontrolannya mudah, karena media yang menguasai waktu itu bila keluar dari ketentuan tidak terlalu sulit untuk dikontrol. Sebaliknya, radio, siapa yang akan mengontrol dan memonitor dari detik ke detik? Apalagi jumlahnya sekarang ini cukup banyak.

Khusus untuk daerah yang sudah padat, seperti Jakarta, PRSSNI tidak menghendaki adanya penambahan stasion radio swasta. Penambahan baru disetujui bagi daerah yang masih terbuka dan belum terjangkau oleh media massa lainnya, seperti surat kabar. "Kita sangat berkepentingan mengamankan pembangunan yang sudah baik. Dan lagi agar radio swasta itu nantinya tidak jatuh ke tangan yang

Digitized by Google

r Menuju Profesional

tidak terseleksi dengan baik," ujar Shidki Wahab, ketua PRSSNI.

Namun, apa yang terjadi di daerah-daerah, seperti dijelaskan Sutomo Parastho, masih terjadi perbedaan persepsi antara PRSSNI dan pejabat di daerah. Radio bagi PRSSNI merupakan alat yang strategis, sementara di beberapa daerah ada pejabat yang beranggapan radio itu sekedar hobi.

"Mungkin bapak-bapak itu menganggap apa sih radio itu? Sedang di sisi lain kita ingin membina organisasi ini dengan baik. Disinilah sering terjadinya konflik," ujarnya.

Diakui bahwa keadaan sekarang ini sudah baik. PRSSNI sendiri setelah keluarnya SK Menpen Nomor 242 dan 245 menyangkut pengakuan PRSSNI sebagai satu-satunya wadah yang menangani radio swasta telah mengambil sikap memberikan rekomendasi bagi siapa yang akan mengajukan permohonan ijin radio baru. Namun sikap yang diambil PRSSNI itu mendapat benturan yang keras. Akhirnya disepakati bahwa PRSSNI hanya memberikan saran dan pertimbangan bagi perijinan baru. Kendati demikian, saran dan pertimbangan PRSSNI telah mendapat perhatian. Sebab, kalau tidak, sulit untuk mengawasi radio swasta itu, khususnya menyangkut segi informasinya.

Pembinaan

Kini dalam perkembangan yang lebih jauh dari radio siaran swasta itu, mulai nampak arah masing-masing, diantaranya ada yang mengarah ke bisnis. Karena bentuknya yang macam-macam itu, maka harus jelas arahnya. Arah yang menuju keseimbangan antara tujuan idiel dan materiel. Tahun 1978/1979 dibuatlah suatu program apa yang dinamakan kriteria fisik siaran.

Seperti diketahui, kriteria fisik dari setiap radio tidak sama. Ada yang besar ada pula yang kecil. Karena radio sekarang ini hidup dari iklan, sementara iklan yang dijual di daerah itu tergantung pula dengan barang yang dibeli masyarakat daerah tersebut, maka untuk itu PRSSNI menetapkan kriteria perijinan untuk radio baru dengan kemampuan daya beli masyarakat setempat.

Bila ada anggota yang melakukan pelanggaran, maka PRSSNI sebagai satu-satunya wadah dari radio siaran swasta akan memberi peringatan. "Tapi PRSSNI intinya membantu para anggota, sehingga jangan sampai karena kekeliruan, mereka itu ditutup," ujar Shidki Wahab.

Namun, kalau sudah diberi peringatan masih saja melakukan pelanggaran, kepada yang bersangkutan harus berani mempertanggungjawabkan sendiri. Bila ijinnya dicabut pemerintah dan tidak bisa melanjutkan lagi, maka dengan sendirinya mereka gugur sebagai anggota.□ (BM)

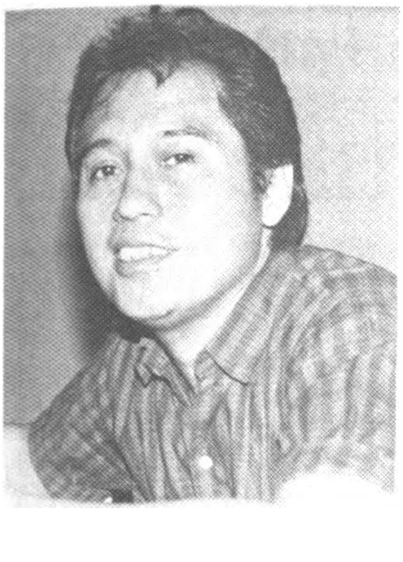

Shidki Wahab

mencakup secara keseluruhan kebutuhan dan kejadian yang terdapat di lokal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka radio lokallah yang mempunyai peranan.

Pandangan itu didukung Malik Syafei, yang selanjutnya mengatakan bahwa dengan adanya radio swasta yang lokal sifatnya itu, semua denyut dari kegiatan masyarakat setempat dapat diketahui. Misalnya apa yang sedang dan mau kemana Pak Lurah hari ini.

Selanjutnya Malik Syafei mengatakan, bila radio swasta itu berperan lebih efektif, maka tidak akan ada bagian yang ketinggalan. Sebagai ilustrasi, Malik menunjuk kota Jakarta yang berpenduduk 8 juta jiwa itu, kini terdapat sekitar 43 stasiun radio swata. Bila setiap radio itu membagi secara

Malik Syafei

efektif para pendengarnya, apakah berdasarkan etnis, kelompok sosial dan lainnya, maka tidak akan ada orang yang tidak terjangkau oleh sistem informasi lewat radio.

Dulu ada anggapan bahwa dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi cetak, radio akan mati. Karena tergeser dan tersaing dengan media cetak. Namun dalam kenyataannya, radio swasta khususnya tetap mampu menarik perhatian pendengarnya. Dengan keluwesan dan program yang disajikan radio swasta ternyata masih mampu hadir di tengah-tengah pendengar setianya. Khususnya dengan adanya acara sandiwara radio, hampir setiap jam-jam siaran acara tersebut, warga pendengar tidak mau beranjak dari radio.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pola pelayanan radio mulai bergeser kepada individu-individu. Ini disebabkan kemajuan teknologi komunikasi yang ada. Disini komunikasi dua arah dapat disiarkan secara langsung dan dapat dinikmati oleh pendengar lainnya. Bila ada sebuah motto dari sebuah penerbitan, berita hari ini dapat disampaikan hari ini juga, maka radio mempunyai motto berita detik ini dapat disampaikan detik ini pula.

Dengan kemajuan teknologi pula, kata Shidki Wahab, radio telah meningkat kualitasnya. Misalnya kalau dulu banyak radio menggunakan AM maka sekarang dengan adanya kemajuan teknologi telah meningkat menjadi FM. Dan ternyata dengan menggunakan FM terdengar suaranya lebih bagus. Namun kemajuan teknologi itu tidak berarti timbul persaingan, tapi justru akan saling isi mengisi satu sama lain. Apa yang tidak dapat dijangkau media cetak, dapat diisi oleh radio.□ (BM)

Digitized by Google

Dari Rakernas Pengusaha Indonesia

Pengusaha Menggugat Etika Bisnis

Diskusi tentang berbagai topik, dalam Rakernas Pengusaha Indonesia yang diselenggarakan Departemen Koperasi dan Wiraswasta DPP Golkar tanggal 19-21 Agustus 1989, menarik untuk disimak, karena menyangkut berbagai hal tentang kegairahan dan kemampuan usaha dari pelaku-pelaku ekonomi/dunia usaha.

Mengupayakan kemantapan demokrasi ekonomi di Indonesia

Diakui dan dirasakan adanya suasana kegairahan dan kemampuan yang tidak merata dan tidak seimbang baik di kalangan sesama usaha swasta maupun antara usaha swasta, koperasi dan BUMN. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya kesempatan usaha tersebut, baik karena terbatasnya lapangan usaha, karena peraturan/regulasi dan kebijaksanaan Pemerintah maupun karena faktor-faktor manusiawi di lingkungan birokrasi dan di kalangan pengusaha itu sendiri.

Tuntutan bagi perlunya ada etika bisnis sebagai kode etik dunia usaha mendapat perhatian luas dan antusias kalangan pengusaha yang datang dari pelosok tanah air. Ini semua guna menjamin tetap terpeliharanya dan meningkatnya harmoni dan suasana kekeluargaan yang integralistik di kalangan masyarakat serta untuk memberikan hasil guna dan nilai tambah yang lebih besar demi kesejahteraan rakyat. Bila praktek bisnis berjalan tidak dengan landasan saling harga menghargai dan menurut norma-norma atau etika akan cenderung hanya untuk mencari uang dan keuntungan material tanpa memperhatikan fungsi sosial sama sekali. Etika bisnis yang didambakan kalangan usaha adalah etika yang mengikat secara moril dan sekaligus dihormati semua pihak.

Para pengusaha yang berkumpul di Hotel Horizon mengakui bahwa praktek perekonomian selama ini belum mencerminkan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara utuh. Bahkan dilukiskan oleh Mendagri masih terdapat gejala pertumbuhan yang timpang di antara sektor perekonomian kota dan desa. Lebih jauh lagi diskusi dalam Rakernas itu mencatat kegiatan ekonomi khususnya pertumbuhan dan perkembangan industri masih lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan belum diarahkan melalui suatu kebijaksanaan yang terpadu ke luar Jawa. Ini adalah salah satu kenyataan faktual yang ditemui sebagai bentuk kesenjangan dan kelemahan.

Namun secara jujur pula diakui oleh para pengusaha bahwa timbulnya ketidak merataan itu bisa jadi karena ulah dari kalangan pengusaha sendiri yang juga membuat peluang-peluang usaha itu tidak terbagi secara merata.

Di bidang pembangunan ekonomi telah didiskusikan pula tentang sistem ekonomi yang dikaitkan dengan Demokrasi Ekonomi, dengan acuan dasarnya adalah Pasal 33 UUD 1945. Dari segi kenyataan bahwa penampilan dan praktek ekonomi kita terutama dalam hubungan dengan keberadaan, peranan dan praktek pelaku-pelaku dalam dunia usaha yakni Koperasi, Usaha Swasta dan BUMN, dirasakan belum seluruhnya mencerminkan amanat pasal 33 UUD 1945, serta mekanisme hubunganketiganya dalam beberapa hal belum sejalan dengan semangat konstitusi tersebut. Sebagai akibat dari berbagai kebijaksanaan dan pengaturan-pengaturan oleh pemerintah dan sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan dimasa lalu belum cukup favourable dan belum cukup mendukung untuk keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan ketiga pilar dunia usaha.

Timbul keinginan yang keras dari peserta Rakernas untuk memberikan perhatian, melakukan upaya-upaya konkret untuk menanggulangi masalah tersebut dan memintakan perhatian DPP Golkar agar segera merumuskan pokok-pokok pikiran dengan penekanan-penekanan pada lebih meningkatkan peranan koperasi, meningkatkan peranan pengusaha kuat dan BUMN maupun swasta untuk membina dan mengembangkan golongan ekonomi lemah, menengah dan koperasi.

Sebagai pengusaha kader Golkar, peserta Rakernas bertekad untuk mendukung segenap usaha Golkar dan Pemerintah dalam hubungan dengan peningkatan kualitas demokrasi ekonomi dalam rangka memantapkan sistem ekonomi nasional yang berdasarkan UUD 1945 dan GBHN. Menying-

Digitized by Google

gung tentang etika bisnis, peserta juga sependapat hendaknya etika bisnis berakar dalam tatakrama budaya dan kepribadian bangsa yaitu Pancasila, dan dengan etika itu selain akan memperlihatkan hak-hak setiap pengusaha juga akan menegaskan kewajiban masing-masing.

Dengan etika bisnis diharapkan tidak akan terjadi persaingan bebas berdasarkan mekanisme pasar semata; Golongan ekonomi kuat menekan, malahan mematikan yang lemah; yang besar semakin besar dan cenderung memproteksi diri; mencari keuntungan sebesar-besarnya; menonjolkan sifat dan semangat individualisme, dan penampilan sifat-sifat negatifnya. (Lebih jauh baca: Etika Bisnis, oleh Tanri Abeng).

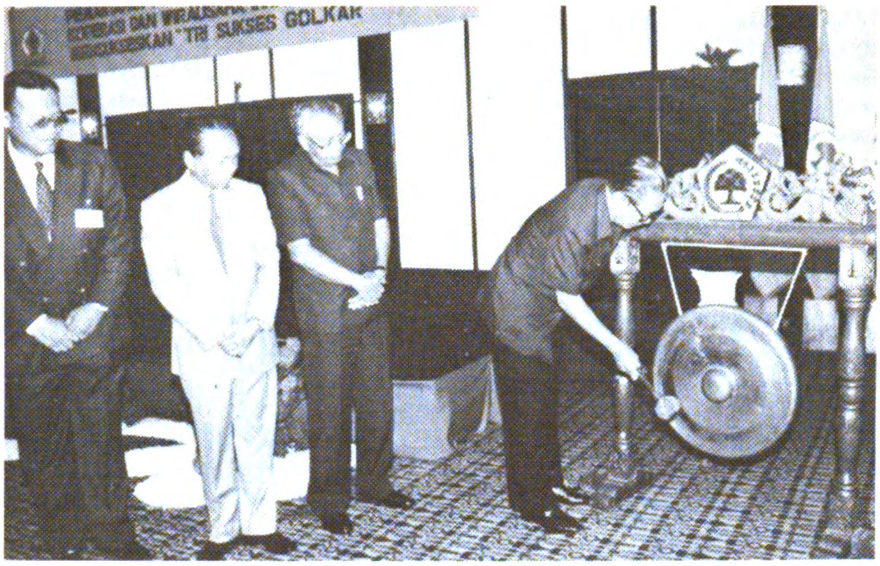

Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono membuka Rakernas Pengusaha Indonesia

Aspek pemerataan

Di bagian lain Rakernas juga mencatat keberhasilan pembangunan ekonomi dan kaitannya dengan aspek pemerataan dan perkembangan ekonomi rakyat serta kesejahteraan rakyat. Rakernas juga telah mendapatkan banyak masukan dan mendiskusikannya berbagai hal berkenaan dengan dampak keberhasilan pembangunan ekonomi nasional terhadap aspek pemerataan; perkembangan dan kegairahan perekonomian rakyat, serta informal, tradisional dan koperasi; pembangunan daerah; peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan terhadap aspek kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Secara konsepsional Rakernas juga menilai bahwa pembangunan nasional telah berjalan secara benar menurut trilogi sebagai landasan kebijaksanaannya di setiap Pelita.

Namun ada beberapa catatan yang menjadi perhatian peserta Rakernas bahwa dibalik keberhasilan pembangunan nasional, kegiatan ekonomi khususnya pertumbuhan dan perkembangan industri masih tertumpu di

ETIKA BISNIS

Oleh: Tanri Abeng

Memulai suatu pemahaman etika bisnis nampaknya sulit dipisahkan dari pengamatan terhadap sifat, kondisi maupun corak lingkungan sosial-politik-ekonomi dan budaya suatu masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena lingkungan BISNIS itu sendiri merupakan satu masyarakat, yang biasa disebut dengan masyarakat bisnis atau *business community*. Oleh karena itu maka dari sudut pandang sosiologis dapat pula diungkapkan bahwa etika bisnis merupakan salah satu produk sosial, merupakan suatu produk lingkungannya.

Upaya untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya etika bisnis itu juga bukan tanpa kesulitan, karena tiadanya pengertian yang berlaku permanen serta universal terhadap etika bisnis itu sendiri. Konkretnya, apa yang dianggap sebagai hal yang etis di Amerika Serikat belum tentu dapat di-

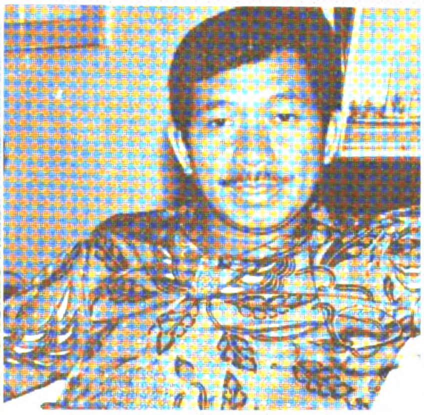

Tanri Abeng

terima sebagai hal yang etis pada suatu lingkungan masyarakat lain seperti Indonesia. Bahkan apa yang dianggap etis hari ini, belum tentu dapat diterima demikian dalam perkembangan masa depan.

Namun demikian, barangkali terdapat suatu landasan ataupun jiwa yang menghidupi pengertian etika bisnis ini, yaitu seperangkat aturan-aturan yang berkaitan dengan kode etik profesi bisnis atau *code of conduct of the business profession*. Aturan main ini dilandasi oleh pandangan-pandangan moral yang berkaitan dengan sistem nilai atau value system seseorang atau sekelompok pelaku ekonomi tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, ataupun wajar dan tidak wajar. Tidak jarang sistem nilai seorang pimpinan kelompok usaha mewarnai falsafah dan budaya kelompoknya atau perusahaannya. Inilah yang biasa disebut *corporate culture* atau budaya perusahaan yang penekanannya mungkin berbeda-beda sebagaimana beraneka ragamnya sistem nilai dari pimpinan pelaku-pelaku ekonomi. Kendatipun demikian, kelompok-kelompok usaha yang telah mapan, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional, menyadari pentingnya melengkapi kultur perusahaannya dengan falsafah *"good citizen"* atau warga masyarakat yang baik di manapun mereka berada. Hal ini juga secara implisit memberi makna bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di mancanegara ini mengakui perbedaan lingkungan sosial-budaya

Digitized by Google

Jawa, belum diarahkan melalui suatu kebijaksanaan secara terpadu ke luar Jawa. Akibat dari berbedanya skala usaha dan kemampuan,khususnya kemampuan permodalan dan teknologi, maka kesempatan, peranan dan partisipasi pun menjadi kurang merata yakni antara pengusaha pusat dengan yang di daerah, pengusaha kuat dan lemah, dan demikian pula antara usaha swasta dan koperasi.

Lebih jauh ketidak merataan itu pembangunan sarana dan prasarana ekonomipun menjadi tidak merata dengan alasan tidak feasible. Kesemuanya ini diperkirakan yang menjadi sebab utama dari timpangnya kondisi ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh suasana ketidakselarasan di dalam masyarakat yang cenderung memperlebar jurang antara sebagian kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional dengan sebagian besar masyarakat yang masih berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan masih relatif kecil prananny dalam kegiatan perekonomian nasional sebagaimana dinyatakan dalam GBHN.

Terhadap keadaan lesu dan kurang berkembangnya perekonomian rakyat, peserta Rakernas mengamati hal itu disebabkan kurang meratanya pemilikan asset dan kurang kuatnya akses mereka terhadap sumber-sumber keuangan dan permodalan seperti bank misalnya. Di samping itu diakui bahwa kemampuan untuk menggali dan memobilisasi dana/modal dari sumber sendiri masih rendah. Suatu lingkaran setan yang dimulai dari kelemahan didukung oleh faktor-faktor yang lemah pula. Dengan iklim yang juga belum sepenuhnya menunjang, tentu saja akan menghasilkan lemahnya peranan dan rendahnya kegairahan perekonomian rakyat, walaupun diakui peranan keseluruhan sektor industri kecil dan aneka industri cukup besar dibandingkan dengan peranan

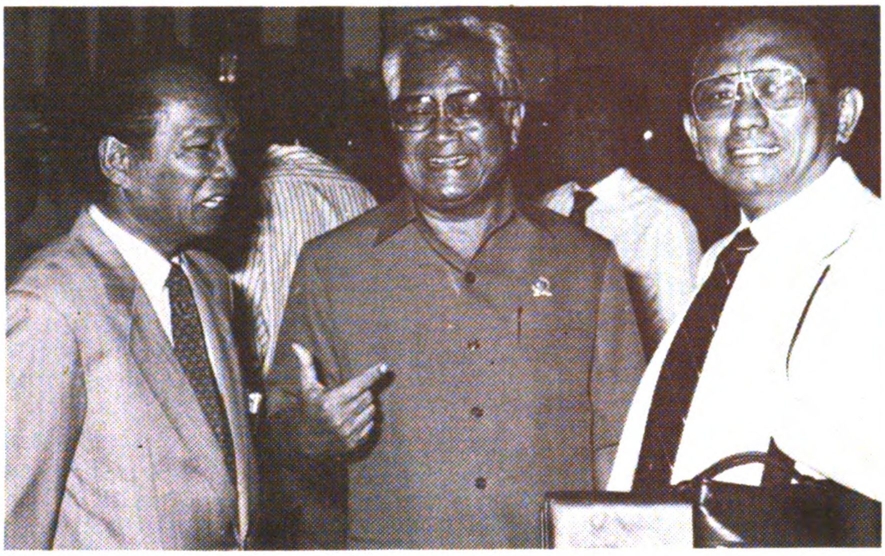

Dialog antar pelaku-pelaku ekonomi

dari satu negara ke negara lain dan, dengan demikian, haruslah diadakan penyesuaian ataupun adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Sosok Permasalahan

Jika kita pada hari ini memilih salah satu judul diskusi yaitu *"etika bisnis"*, apakah ada masalah-masalah pokok yang mendesak dalam perkembangan dunia usaha nasional kita? Barangkali memang demikianlah keadaannya, mengingat kondisi masyarakat bisnis yang semakin terbuka untuk disorot karena peranannya yang semakin besar dalam struktur ataupun tatanan sosial-politik dan ekonomi bangsa — Hal ini dapat ditelusuri dari perkembangan maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pertumbuhan masyarakat bisnis itu sendiri, dalam mana dapat dikemukakan antara lain:

1) Pertumbuhan dunia usaha dalam dua dekade terakhir ini telah berkembang dengan pesat. Namun proses pertumbuhannya maupun kondisinya sangatlah beraneka ragam. Ada yang maju karena beraliansi dengan penguasa, ada pula yang tumbuh dan berkembang secara mandiri, ada kelompok-kelompok usaha besar, menengah, dan banyak yang relatif kecil dan lemah.

2) Era deregulasi telah mengubah peranan pemerintah (transformasi peranan) dari pengaturan dan pelaku ekonomi menuju pencipta iklim berusaha yang segar dan menguntungkan bagi masyarakat luas, *tidak* hanya masyarakat bisnis sendiri.

3) Masyarakat bisnis sendiri merupakan kelompok yang makin besar arti dan peranannya dalam konteks masyarakat luas atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Lalu sampai seberapa jauh tanggung-jawab sosial dari kelompok masyarakat ini?

Fenomena yang dikemukakan di atas tentunya hanya merupakan beberapa dari aspek-aspek yang memberi gambaran bahwa dalam proses pembangunan bangsa di segala bidang, pada salah satu kelompok masyarakat, yaitu masyarakat bisnis, telah terasa urgensinya untuk dikembangkan suatu falsafah dasar yang sangat hakiki yaitu etika bisnis, yang berfungsi sebagai patokan moral bagi kelompok masyarakat ini. Penjabaran dari permasalahan-permasalahan di atas secara singkat dapat dilukiskan sebagai berikut:

Pertama, seperti telah dikemukakan terdahulu, etika bisnis merupakan salah satu produk lingkungan sosial. Dalam suatu negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, satu hal yang dapat diamati adalah kenyataan bahwa kekuasaan politik dan pemerintahan sangatlah besar pengaruhnya terhadap pembentukan nilai serta norma yang menjadi aturan permainan yang dapat diterima oleh masyarakat umumnya, khususnya masyarakat bisnis. Oleh karena itu maka teramatlah penting etika politik dan pemerintahan mencerminkan citra positif sehingga ia menjadi payung bagi segala etika yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu ilustrasi dapat dikemukakan pernyataan Ignacio Pichardo, Sekjen. Federasi Pengawas Keuangan United Mexican States dalam majalah *Leaders* edisi September 1987 dengan judul *"A New Top-Down Moral Reform"... "The Act on Accountability of Public Servants is, in fact, a code of ethics that demands of public employees the kind of behaviour that adheres to the highest legal principles of morality. This code sets forth the concepts of impartiality, economy, efficiency, loyalty and honesty as principles to be lived by, by every public employee. It*

Digitized by Google

Pembinaan koperasi di daerah menjadi pusat perhatian

sektor industri besar terhadap nilai ekspor hasil-hasil industri.

Masalah daerah

Berbagai persoalan atau permasalahan yang dinilai menonjol yang dialami dan mengganjal di daerah juga mendapat perhatian dalam diskusi selama Rakernas berlangsung. Seperti masalah tanah, dimana masalah ini terkait dengan alokasi peruntukannya bagi pembangunan, yang sering dirasakan merugikan kepentingan rakyat dan para pengusaha lemah, baik dalam bentuk ganti rugi dan prosedur serta ketentuan yang dapat menjamin kepastian hak bagi rakyat.

Disamping itu, kebijaksanaan penghapusan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dirasakan selain akan mematikan swamill yang umumnya pengusaha menengah dan golongan ekonomi lemah, juga akan mengurangi lapangan kerja serta cenderung berdampak semakin ramainya pencurian kayu atau penebangan kayu secara liar.

Terhadap pembinaan koperasi di daerah pun dirasakan berlebihan sehingga menimbulkan kekacauan, menyempitkan ruang gerak, dan tidak mendorong kemandirian serta kadangkala ikut menambah biaya. Menyang-

---

also specifies procedures for investigating and defining administrative liability."

(Undang-undang tentang pertanggung-jawaban pegawai negeri sebetulnya merupakan suatu kode etik yang menuntut perilaku para pegawai negeri yang telah dicanangkan sebagai prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi. Kode etik tersebut memuat konsep-konsep tentang sikap adil, ekonomis, efisiensi, kesetiaan dan kejujuran sebagai prinsip-prinsip yang harus dilestarikan oleh setiap pegawai negeri. Kode etik itu juga menetapkan prosedur-prosedur untuk menyelidiki dan menentukan pertanggung-jawaban administratif).

Posisi birokrat atau pegawai negeri yang terikat kuat dengan kode etik sebagai prinsip-prinsip moral memberi petunjuk bahwa terdapat hubungan yang wajar antara birokrasi dan masyarakat bisnis. Hubungan ini kita angkat mengingat kenyataan yang dapat diamati, yaitu adanya suatu *aliansi* antara birokrat dan pelaku ekonomi sebagai anggota masyarakat bisnis.

Tetapi apakah semua bentuk aliansi dapat dianggap sebagai sesuatu yang etis baik ditinjau dari peranan birokrasi maupun dari kalangan masyarakat bisnis sendiri? Apakah kebijaksanaan perlindungan kepada segolongan anggota masyarakat bisnis yang mengakibatkan sistem ekonomi pasar kurang berfungsi, karena tidak semua anggota memperoleh kesempatan yang sama, dapat dianggap sebagai norma yang benar dan wajar? Lalu bagaimana pula menentukan kriteria pembagian kesempatan ini, yang merupakan hak dan kekuasaan politik, dalam suatu masyarakat bisnis yang kemampuannya berbeda-beda? barangkali disiniah justeru salah satu pokok permasalahannya — penentuan "kriteria" tadi, di samping kejelasan sasaran-sasaran kebijaksanaan semacam ini. Kalau salah satu sasaran kebijaksanaan adalah memperbanyak populasi masyarakat bisnis dan/atau meningkatkan kemampuan golongan masyarakat ekonomi lemah, apakah pengalokasian kesempatan ini mengenai sasaran, yaitu mereka yang berhak, wajar dan berbakat, sehingga tidak terjadi pemborosan pengalokasian sumber-sumber daya yang terbatas.

Maka permasalahan pokok lainnya adalah proses pelaksanaan atau *implementation process* dari kebijaksanaan semacam ini oleh pimpinan birokrasi yang memiliki kewenangan. Pokok-pokok permasalahan ini perlu diangkat dalam pembicaraan tentang etika bisnis dalam proses pertumbuhan dunia usaha Indonesia.

Kedua, setelah era deregulasi, peranan pemerintah lebih diarahkan kepada penciptaan iklim berusaha yang lebih segar, mengembangkan kebijaksanaan yang terbuka dan dengan demikian menumbuhkan kreativitas masyarakat bisnis untuk lebih berperan dalam proses pembangunan bangsa — karena hasil-hasil pembangunan yang mantap (pemerataan, pertumbuhan, stabilitas) adalah kondisi yang menguntungkan masyarakat bisnis. Namun, apakah dengan membuka kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat justru hanya akan dimanfaatkan oleh segolongan tertentu saja, mengingat kemampuan (kapital, organisasi, manajemen dan lain-lain) yang sangat berbeda-beda? Jika demikian berarti yang "mampu" akan terus berkembang dan yang kurang mampu akan lebih ketinggalan lagi — Lalu apakah kondisi ini sesuai dengan falsafah bangsa kita yang seyogyanya menjadi dasar dari etika masyarakatnya, termasuk masyarakat bisnisnya?

Digitized by Google

kut perkreditan dirasakan syarat dan prosedurnya masih sulit dari perbankan. Apalagi kalau dikaitkan dengan agunan terutama bagi pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah.

Masuknya pengusaha dari pusat ke daerah juga menjadi perhatian peserta Rakernas, dimana dikemukakan, masuknya pengusaha pusat itu berarti mendesak yang ada di daerah. Kadangkala mereka ini tidak mengikutsertakan pengusaha daerah, malahan diajak bersaing yang sudah tentu pengusaha daerah tidak mampu melawan yangdari pusat karena mereka umumnya tidak sekuat dan sebesar pengusaha pusat.

Berbasarkan pemikiran-pemikiran tersebut oleh pimpinan Golkar hasil Rakernas itu akan dibahas melalui kelompok kerja, tim kerja dan rapat harian. Menurut Ketua Umum DPP Golkar Wahono, hasil pembahasan ulang itu akan dijadikan keputusan DPP Golkar. Dan melalui keputusan itu nantinya akan mengikat semua jajaran dan warga Golkar baik yang di pusat maupun daerah dan wajib diperjuangkan oleh segenap kader Golkar.

Wahono, penceramah dan cenderamata

Harus realistis

Sementara itu dalam sambutan penutupan Rakernas Pengusaha Indonesia, Ketua Umum DPP Golkar, Wahono mengingatkan bahwa kita tetap teguh dengan pendirian pembangunan ini haruslah secara pasti berjalan menuju kepada sasaran dan tujuan yang lebih berbobot idealistis, yang mengacu kepada nilai Pancasila dan konsitusional UUD 1945.

''Kitapun teguh berpendapt, bahwa sistim ekonomi yang kita dukung dan hendak kita kembangkan, justru yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan itu, Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik, wadah dan alat perjuangan rakyat, dan hidup di alam nyata, haruslah pula cukup realistik dalam melihat, memahami dan kemudian bersikap terhadap segala kondisi yang nyata, tanggap terhadap berbagai gejala yang muncul dan aneka permasalahan masyarakat, serta senantiasa menyatu dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang,'' ujar Wahono.

Menurut Ketua Umum DPP Golkar, inilah yang sering dinamakan

Ketiga, kelompok masyarakat bisnis tentunya harus pula memikul tanggung-jawab sosial yang dimensinya semakin bertambah luas. Salah satunya adalah dimensi pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas sosial-politik. Secara singkat tanggung-jawab masyarakat bisnis ini dalam proses pencapaian cita-cita pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi — Perkembangan teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi yang demikian pesatnya, telah mengubah peranan penguasaan sumber-sumber alam sebagai modal utama yang dibutuhkan dalam proses pembangunan kepada kecerdasan manusia untuk menciptakan nilai tambah atau *added value*. Penciptaan nilai tambah ini tidak saja terjadi dalam suatu proses produksi atau *manufacturing process*, tetapi juga dalam pengembangan strategi pemasaran yang antara lain mencakup informasi pasar yang memungkinkan pencapaian tingkat harga yang optimal. Bahkan jasa-jasa atau *services* yang ditawarkan oleh para perantara, apakah ia disebut *broker* atau *consultant* yang oleh karena kecakapan ataupun kemampuannya yang khusus telah memberi kontribusi di dalam suatu kegiatan ekonomi dan oleh karenanya kehadirannya merupakan suatu kebutuhan atau *necessity*.

Di lain pihak kehadiran para perantara ini tidaklah otomatis merupakan kebutuhan. Manakala proses bisnis harus melalui suatu jalur tertentu yang berfungsi sebagai perantara karena diatur demikian, maka belum tentu perantara ini memberi nilai tambah. Bahkan keharusan menggunakan jalur khusus ini dapat merupakan sumber biaya dan hanya memberi kontribusi terhadap penciptaan ekonomi biaya tinggi yang harus dikikis habis-habisan untuk meningkatkan efisiensi nasional serta daya saing internasional kita. Lalu dimanakah tempat etika bisnis, apabila dalam masyarakat bisnis sendiri terdapat satu kelompok yang menopang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, sedangkan kelompok lain justru berkembang kendati menjadi beban pertumbuhan ekonomi bangsa?

Bagaimana pula tanggung-jawab masyarakat bisnis dalam *perantaraan* berusaha dan *stabilitas* nasional? Bukankah kecemburuan sosial dapat mengganggu kondisi stabilitas sosial-politik yang sangat didambakan oleh masyarakat bisnis sendiri? Falsafah bangsa yang seyogyanya menjadi landasan etika kehidupan masyarakatnya memberi petunjuk kepada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Maka pemerintah pun mendorong terciptanya kerja-sama ataupun keterkaitan antara yang besar dengan yang kecil, yang kuat dengan yang lemah, tentunya dengan satu kriteria, yaitu *saling menguntungkan*. Ya, kata kunci disini adalah saling menguntungkan itu sehingga yang besar merasa membutuhkan si kecil dan demikian pula sebaliknya. Lalu kondisi apakah yang dibutuhkan agar proses keterkaitan sebagai cerminan kebersamaan ini dapat direalisasikan? Tentunya harus ada kemauan ataupun komitmen politik *(corporate political will)* untuk membina yang kecil karena tanggung jawab sosial itu tadi. Sebaliknya, yang kecil atau yang dianggap lemah seyogyanya dapat pula memberi *nilai tambah* (dalam jangka panjang) yang dibutuhkan oleh yang besar melalui pengorbanan yang tidak lebih besar dari pada jika dilakukannya sendiri. Untuk itu maka kata kunci lainnya adalah *profesionalisme*. Tuntutan profesionalisme ini tidak hanya ber-

Digitized by Google

Ungkapan realistis mewarnai rakernas

sebagai pola pembangunan yang berwawasan kemanusiaan, dan pola pembangunan yang disemangati oleh idealisme yang teguh dan selalu bertumpu pada kenyataan (realistis), sebagai pengamalan Pancasila.

Dalam kesempatan itu, Wahono menilai apa yang dibicarakan dalam Rakernas sebagai ungkapan yang realistis. Dan betapapun ungkapan tersebut disana-sini terasa keras, tajam dan kadangkala menyakitkan, namun tidaklah berarti hal tersebut akan menggoyahkan kita, dari sikap dan acuan dasar serta tujuan idealisme kita dalam membangun, khususnya dalam pembangunan ekonomi.

Ketua Umum juga menambahkan bahwa periode sekarang ini merupakan periode yang maha penting di dalam pembangunan bangsa. Saat ini berada dalam proses di ambang era proses tinggal landas. Sebagaimana diamanatkan dalam Munas IV Golkar, satu hal yang penting adalah usaha untuk mewujudkan bentuk yang lebih kokoh dari perekonomian kita, keterkaitan antar sektor, dan usaha peningkatan konsolidasi, menjadi kekuatan nasional yang terpadu.

Hal penting lainnya, agar dicari usaha untuk meningkatkan secara drastis kegiatan ekonomi kecil dan koperasi, sehingga menjadi suatu rangkaian mata rantai kegiatan ekonomi yang saling menghidupi, dan merupakan salah satu wujud dari usaha pemerataan. Di dalam Rakernas ini, kata Wahono, telah dibahas masalah-masalah tersebut secara luas dan mendalam, dan menghasilkan masukan-masukan yang sangat berharga.☐ (NS)

---

laku bagi anggota masyarakat bisnis yang tergolong besar atau kuat, tetapi juga yang kecil atau lemah melalui pendalaman dan peningkatan kemampuan untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan demikian akan tercipta keterkaitan yang dilandasi oleh falsafah kebersamaan dan saling membutuhkan. Mungkinkah pokok permasalahan dalam proses pengembangan etika bisnis ini bersumber dari kurangnya *corporate political will* dari golongan yang kuat serta kurangnya sikap dan pandangan profesionalisme dari golongan yang relatif lemah?

Visi Manajemen dan Profesionalisme

Masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan etika bisnis ini telah pula mengundang visi manajemen yang berorientasi kepada aspek-aspek dinamisme kemasyarakatan atau *the social engineering*. Manajemen tidak dapat lagi hanya mengutamakan kepentingan para pemilik modal atau *shareholders* saja, melainkan seluruh anggota masyarakat atau *the stakeholders*. Manajemen mempunyai tanggung-jawab untuk mengembangkan harta kekayaan perusahaan berupa kapital, teknologi, sumber daya manusia serta citra perusahaan itu sendiri bukan untuk kepentingan pemilik modal saja tetapi juga masyarakat lingkungannya yaitu pemerintah, karyawan, pemasok dan konsumen. Manajemen harus dapat mengangkat citra perusahaan sebagai anggota masyarakat yang dicintai oleh lingkungannya.

Sikap dan pandangan profesionalisme dalam kehidupan bermasyarakat adalah penting dalam pengembangan etika bisnis yang dipengaruhi oleh etika masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, maka tuntutan profesionalisme tidak terbatas pada manajemen organisasi bisnis saja melainkan seluruh bentuk organisasi termasuk pemerintah, dan lembaga-lembaga profesi yang lain seperti akuntan, pengacara, notaris, peradilan dan lain-lain yang seyogyanya juga mengembangkan kode etikanya masing-masing.

Lalu apakah kriteria profesionalisme itu? Secara praktis, seseorang adalah profesional karena: 1. Dia memiliki sikap mental atau *attitude* yang positif, jujur dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap profesinya. Dia merasa keberadaannya adalah karena dibutuhkan oleh pelanggannya atau yang menggunakan jasa-jasanya dan oleh karenanya harus memberikan apa yang terbaik dari padanya.

2. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam atau *depth of knowledge* yang mendukung tingkat kemampuan teknis yang tinggi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan cermat, tepat dan efisien.

3. Dia mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat melihat jauh ke depan dengan daya kreativitas yang tinggi pula. Dia harus dapat berpikir secara strategis serta bertindak secara rasional dengan menggunakan ilmu pengetahuan serta kearifan yang dimilikinya.

Nampaknya dalam konteks pembicaraan tentang etika bisnis, aspek kepemimpinan atau *leadership* perlu mendapat sorotan khusus. Salah satu alasannya adalah karena dalam suatu institusi bisnis, pemimpinlah yang seyogyanya merumuskan falsafah perusahaannya atau kultur organisasinya yang menjadi dasar pula bagi pengembangan etika bisnisnya.

Oleh karenanya maka kebutuhan yang mendesak pada masyarakat bisnis adalah peningkatan "mutu" dari kepemimpinan dunia usaha atau *quality of business leaders*. Hal ini akan relatif mudah jika saja kita ingin terus belajar *(continuous learning)*, karena dalam dunia usaha, tiada kepastian kecuali ketidak-pastian itu sendiri dan yang permanen hanyalah perubahan yang terus berlangsung. Inilah tantangan masyarakat bisnis Indonesia yang di dalam proses pertumbuhannya yang sangat pesat ini membutuhkan falsafah yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat luas.☐

Digitized by Google

Irian Jaya, Benteng GOLKAR Tak Tergoyahkan

Irian Jaya, sebutan untuk Propinsi di ufuk timur wilayah Nusantara yang masih menyimpan segudang harapan bagi masa depan yang cerah, mendadak disibukkan oleh kedatangan Ketua Umum DPP GOLKAR, Wahono beserta rombongan di minggu pertama bulan September lalu. Sebuah kunjungan mempunyai arti, baik bagi Ketua Umum DPP GOLKAR sendiri maupun bagi warga Golongan Karya khususnya dan masyarakat di Irian Jaya umumnya.

Bagi Wahono, kunjungan itu sebagai pemenuhan dari janjinya untuk menengok keluarga besar GOLKAR Irja sekaligus kunjungan pertama dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum GOLKAR. Sambutan yang cukup semarak di tengah hujan rintik-rintik di Lapangan Udara Sentani, Jayapura, menambah keakraban antara Ketua Umum GOLKAR dengan warga beringin di belahan timur Indonesia itu.

Mengenakan setelan safari warna biru tua, Ketua Umum GOLKAR yang sedianya disertai Nyonya Wahono, disambut dengan kalungan bunga oleh seorang gadis hitam manis disertai Gubernur Irja, Barnabas Suebu SH, dan Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Irja, Djasman Wongsoatmodjo. Sebuah tarian oleh sejumlah putera-puteri Irja lengkap dengan hiasan bulu dan warna-warni pakaian menghantar Ketua Umum GOLKAR menuju ruang VIP di Lapangan Udara Sentani untuk istirahat sejenak sebelum meneruskan perjalanan menuju kota Jayapura.

Kesigapan para kader GOLKAR Irja dalam mempersiapkan iring-iringan kendaraan yang akan membawa Ketua Umum dan rombongan memperlihatkan mereka sudah terlatih menyambut kedatangan pejabat dari Pusat. Semuanya berjalan dengan tertib, seperti tidak mau ada yang keliwatan.

Irian Jaya sendiri sebagai wilayah yang berbatasan dengan Papua Nugini oleh Gubernur Bas Suebu dilukiskan sebagai bumi yang senantiasa menjadi benteng terakhir Pancasila dan benteng GOLKAR yang tak tergoyahkan di ujung timur Nusantara tercinta ini.

Ungkapan itu disampaikan Gubernur Bas Suebu selaku ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Irian Jaya pada pembukaan Penjelasan Kader Tingkat I dan Penyegaran Kader se Irian Jaya 9 September malam hari di Gedung Sasana krida di Jayapura. Sementara Ketua Umum GOLKAR melukiskan daerah Irian Jaya merupakan daerah kebanggaan GOLKAR karena selalu mencapai kemenangan dalam Pemilu ke Pemilu.

Apa yang dilukiskan baik Gubernur Irja maupun Ketua Umum GOLKAR bukanlah omong besar. Seperti ditegaskan ketua DPD GOLKAR Tingkat I, Djasman Wongsoatmodjo, bahwa dalam Pemilu yang lalu wilayah ini meraih lebih 96% suara kemenangan.

Dialog serius dua pimpinan

Terbentang Tugas Berat

Mengawali sambutannya pada pembukaan **Penjelasan Penyegaran Kader & Rapat Konsultasi Pemenangan Pemilu/Rakernis Bapekada Tingkat I dengan Tk II se Irian Jaya** Ketua Umum DPP GOLKAR mengingatkan akan tugas berat yang membentang cukup luas. Tugas penting yang tidak hampa rintangan dan hambatan yang dengan semangat tinggi, keteguhan

Digitized by Google

Kenang-kenangan dari Ketua Umum DPP GOLKAR

hati dan kekompakan pasti dapat diatasi. Dan menjadi tugas GOLKAR untuk senantiasa mengembangkan suasana yang membangkitkan peranan aktif dan dinamis dari seluruh masyarakat khususnya seluruh anggota GOLKAR untuk mampu menjawab masyarakat yang terus bergerak maju dalam segala aspek kehidupannya.

Mengutip pesan ketua Dewan Pembina GOLKAR, Wahono mengingatkan agar meningkatkan lagi usaha untuk menempatkan GOLKAR dalam jajaran pelopor Orde Baru dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Untuk itu kita semua perlu menggalang potensi kita, dengan kekompakan yang tinggi, dan dengan semangat perjuangan yang ikhlas, tanpa pamrih. Kualitas manusia sebagai sumber daya insani merupakan kebutuhan mendesak yang perlu ditingkatkan, karena GOLKAR menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan," ujarnya.

Mengacu kepada hasil Munas IV GOLKAR tahun lalu, Wahono mengingatkan kembali sasaran lima tahun mendatang, yaitu melaksanakan Tri Sukses GOLKAR yang kedua: Sukses Konsolidasi, Sukses Repelita V, Sukses Pemilu 1992/Sidang Umum MPR 1993, sebagai kelanjutan dari Tri Sukses Pertama (1983-1988).

Di bagian lain, Ketua Umum GOLKAR mengemukakan masalah kaderisasi, dimana ditekankan pada peningkatan kualitas kader yang sudah dimiliki GOLKAR. Namun kegiatan kaderisasi ini tidak hanya terbatas pada penyegaran saja melainkan lebih luas, lebih kompleks dan mendasar, kendati dilaksanakan secara bertahap. Usaha-usaha kaderisasi itu, lanjut Wahono, perlu diperluas untuk mencapai jumlah yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan yang juga meningkat secara kuantitatif.

Tidak Tunggu Perintah

Dalam kesempatan itu, Wahono menegaskan bahwa bagi GOLKAR tidak menghendaki adanya kader yang hanya menunggu perintah saja. GOLKAR juga tidak butuh kader yang mudah mundur karena tidak kebagian jabatan. "Kita tidak perlu kader-kader yang hanya diam saja ibarat hanya menunggu turunnya hujan dari langit. Seorang kader GOLKAR tidak mencari jabatan buat dirinya sendiri, tetapi justru menjadi pendekar yang ingin berbakti kepada Nusa dan Bangsa," tegasnya.

Tarian khas Irja

Dengan tegas pula Wahono mengatakan, yang dibutuhkan adalah kader yang berani berbuat demi kemajuan organisasi dan pembangunan bangsa, mempunyai sifat apa yang bisa diberikan kepada organisasi, bukan apa yang bisa diperoleh dari organisasi. Penegasan itu mendapat sambutan pengunjung yang memadati gedung Sasana Krida.

Bagi Wahono sudah jelas yang dibutuhkan dalam GOLKAR adalah kader yang kreatif dan mandiri. "Tidak ada artinya jumlah kader yang demikian banyak, tetapi sikapnya tidak kreatif dan tidak mandiri," kata Wahono mengutip ucapan Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina GOLKAR.

Memperhitungkan Faktor Ekstern

Kepada jajaran GOLKAR di Irian Jaya, Ketua Umum juga mengingatkan, untuk berbagai kegiatan dan usaha operasional yang akan dilaksanakan di masa depan, memerlukan dukungan dari berbagai faktor penunjang, khususnya dari seluruh jajaran intern organisasi, disamping juga perlu memperhitungkan faktor ekstern yang mempengaruhi.

Melalui pembentukan Pokja/Timja, ini adalah usaha konkret untuk meningkatkan kualitas kader, dimana dalam Pokja/Timja itu dibahas dan dibuat analisis mengenai masalah-masalah yang menjadi tantangan pembangunan kita. Pembangunan kita, kata Wahono, senantiasa mesti berpegang kepada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sehingga rencana-rencana pembangunan itu juga senantiasa mesti peka terhadap perkembangan yang ada di kalangan masyarakat setiap saat.

Kepada seluruh kader GOLKAR yang ada di Irian Jaya, Wahono juga menyampaikan harapan-harapan untuk lebih meningkatkan daya juang, mengingat banyaknya tugas, beratnya kewajiban dan tanggungjawab, beraneka ragamnya tantangan yang dihadapi. Disini diperlukan usaha meningkatkan konsolidasi organisasi dengan berbagai aspeknya. Sebab, kata Wahono, konsolidasi yang mantap merupakan modal dasar untuk dapat mensukseskan Pelita V khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya, serta mensukseskan Pemilu 1992.

Digitized by Google

Sistem Coblos

Sementara itu, ketua DPD GOLKAR Tingkat I, Djasman Wongsoatmodjo mengawali sambutannya mengemukakan bahwa menghadapi Pemilu mendatang kepada rakyat Irja harus diberikan penyuluhan dan penerangan mengenai pelaksanaan sistem Pemilu, khususnya tentang tatacara pemungutan suara yang nantinya disamakan dengan daerah-daerah lainnya di luar Irja. "Ini merupakan konsekuensi peningkatan hasil pembangunan demokrasi yang dipelopori GOLKAR," ujarnya.

Apabila tatacara pemungutan suara di Irja disamakan dengan daerah lainnya, ini berarti pula massa pemilih di Irja akan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem coblos untuk pertama kalinya. Hal demikian menurut Djasman Wongsoatmodjo menuntu pelaksanaan operasi pemenangan Pemilu secara intensif dan lebih dini, yang memerlukan dukungan daya dan dana yang tidak sedikit.

Sedang Gubernur Bas Suebu dalam pengantarnya menegaskan bahwa kegiatan GOLKAR sekarang mempunyai arti penting dan sangat strategis dalam rangka terus meningkatkan perjuangan GOLKAR sekarang dan di masa datang. Dikatakan penting dan strategis karena sejumlah lebih dari 60.000 kader merupakan aset yang sangat berharga bagi perjuangan GOLKAR selanjutnya. Untuk itu, kata Bas Suebu, mutu kader GOLKAR harus ditingkatkan dan dibina terus agar makin memberi sumbangan yang berarti bagi perjuangan GOLKAR.

Upacara pembukaan Penjelasan Tingkat I dan Penyegaran Kader se Irja, yang diikuti seluruh fungsionaris DPD TK I dan II seluruh Irja, juga kader fungsional dan kader GOLKAR yang duduk di DPRD Tk. I dan II, selanjutnya dibuka dengan pemukulan gong oleh Ketua Umum GOLKAR, diiringi tepuk tangan hadirin termasuk rombongan Ketua Umum yang terdiri dari Ketua DPP GOLKAR, Oetoyo Oesman SH; Sekjen DPP GOLKAR, Ir Rachmat Witoelar dan Nyonya Erna Witoelar; Wakil Sekjen Drs Freddy Latumahina; Ketua Departemen Pemuda, Drs Slamet Effendy Yusuf; Wakil Bendahara, Pontjo Sutowo dan dari Bapekapus, Shyratus Syafei dan John Tetelepta.☐ (NS)

Ketua Umum GOLKAR Meninjau Wamena Serahkan Sumbangan Korban Gempa Kurima

Menggunakan pesawat Airfast, rombongan Ketua Umum DPP GOLKAR menuju Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, untuk memperoleh gambaran secara langsung dari ketua Satkorlak, Bupati Jayawijaya, Jos B Wenas. Perjalanan udara yang menempuh waktu 50 menit menembus celah-celah pegunungan Jayawijaya terasa singkat setelah roda pesawat menjejak bumi Wamena yang subur untuk lahan pertanian.

Disambut langsung oleh Bupati Wenas dan segenap jajaran Muspida setempat, Ketua Umum GOLKAR, Wahono yang didampingi Gubernur Irja, Bas Suebu dan ketua DPD GOLKAR TK. I Djasman Wongsoatmodjo menuju ruang tunggu lapangan udara Nayak untuk selanjutnya beriringan kendaraan menuju rumah dinas Bupati Jayawijaya, Jos B Wenas. Seperti di Jayapura, sambutan dari masyarakat Wamena cukup antusias. Terlihat dari kerumunan masyarakat Wamena yang memadati halaman lapangan udara. Tidak seperti lapangan udara Sentani, kali ini sambutan kader-kader GOLKAR diwujudkan dalam bentuk lagu-lagu koor bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai ungkapan kegembiraan terhadap tamu dari GOLKAR Pusat, dibarengi yel-yel hidup GOLKAR bersahutan.

Berkali-kali Ketua Umum GOLKAR melambaikan tangan menjawab sambutan warga masyarakat yang mengelu-elukan di pintu masuk ruang tunggu. Kesibukan lain nampak ketika rombongan menerima jabatan tangan satu-persatu dari para penyambut sambil bertepuk tangan mengiringi lagu yang dibawakan para bapak dan ibu secara koor.

Pusat Kegiatan GOLKAR Irja

Singkat kata rombongan DPP GOLKAR yang terdiri dari Ketua Umum, Ir Rachmat Witoelar dan Nyonya, Freddy Latumahina, Pontjo Sutowo, Slamet Effendy Yusuf, sesampainya di rumah dinas Bupati mendapatkan penjelasan secara rinci dari Bupati Wenas mengenai bencana alam yang menimpa warga Kecamatan Kurima, terutama di desa Soba dan Pasema.

Menurut Bupati, korban bencana alam gempa bumi itu menimpa sebagian besar anak-anak dan perempuan yang sedang bekerja di kebun memetik sayur. Kejadian pada tanggal 1 Agustus itu telah membawa korban jiwa 121 orang meninggal, sementara puluhan lainnya menderita luka yang sampai saat ini masih dirawat di RSUD Wamena. Kondisi masyarakat di daerah gempa menurut Bupati sangat parah. Kelaparan nyaris tak terhindarkan. Beruntung ada bantuan heli Puma dari ABRI sehingga upaya pertolongan dapat dilakukan dengan cepat, yaitu dengan mendrop bahan

Digitized by Google

Senyum Wahono untuk masyarakat

makanan kepada mereka.

Melihat kondisi alam dari lokasi gempa, menurut Bupati tidak aman bagi tempat pemukiman. Kebanyakan mereka tinggal di daerah perbukitan yang tinggi dan kondisi tanah yang miring. Kebiasaan perang antar suku yang masih sering terjadi diantara penduduk di Kecamatan Kurima menyebabkan mereka mencari tempat yang tinggi yang dirasa aman dari serangan musuh. Kendati risikonya besar mereka lebih senang tinggal dengan keadaan demikian itu.

Melihat kenyataan seperti itu, sudah menjadi tekad pemerintah setempat untuk memindahkan mereka dari lokasi yang membahayakan itu, ke tempat lain yang dirasa aman dari bencana gempa bumi atau tanah longsor akibat hujan. Namun pekerjaan itu tidak lah gampang. Kendala sarana angkutan guna melakukan evakuasi mereka jelas besar. Satu-satunya yang bisa dipakai adalah heli Puma yang mempunyai daya angkut besar, selanjutnya disambung dengan kendaraan darat menuju daerah Apalapsi yang memiliki tanah cocok untuk bercocok tanam atau berkebun.

Ketua Umum GOLKAR setelah mendengar penjelasan dari Bupati Jayawijaya selanjutnya menyerahkan sumbangan yang dikumpulkan dari kader-kader GOLKAR meliputi jumlah Rp 15.6 juta, ditambah lagi sumbangan dari kader-kader GOLKAR yang ada di PHRI berupa bahan makanan meliputi jumlah 50 karton. Dalam kesempatan itu Ketua Umum GOLKAR mengatakan bahwa sumbangan yang diberikan itu sebagai tanda simpati atas musibah yang menimpa warga kecamatan Kurima. Sedianya Ketua Umum dan rombongan akan meninjau dari udara lokasi bencana alam, tapi satu-satunya heli Puma yang akan digunakan sedang digunakan untuk mengangkut bahan pangan ke daerah bencana.

Meninjau Rumah Sakit dan Pasar

Selanjutnya sebagai bagian dari acara kunjungan kerja Ketua Umum DPP GOLKAR, kunjungan diteruskan ke rumah sakit Wamena dimana para korban bencana alam itu dirawat. Disini Ketua Umum melihat langsung korban yang kebanyakan anak-anak dan wanita. Menurut dr Tigor Silaban yang mengepalai rumah sakit itu, korban kebanyakan menderita retak atau patah tulang akibat kejatuhan batu dari perbukitan pada saat berada di kebun.

Namun beberapa dari korban sudah kelihatan bisa bergerak bahkan bisa tertawa ketika rombongan menengok dan berdialog dengan mereka, walaupun bahasanya saling tidak dimengerti. Salah satu korban, seorang anak kecil bahkan mengundang tawa rombongan karena gerakan yang lucu, bisa berkata terima kasih sambil menggerakkan tangannya. Kesempatan itu digunakan juru potret berbagai mass media yang menyertai rombongan dari Jayapura untuk mengabadikannya.

Satu per satu korban ditengok oleh Ketua Umum, sambil terus menerus membesarkan hati mereka untuk selalu tabah dan sabar menerima musibah ini. Melalui penterjemah disampaikan pesan-pesan Ketua Umum tersebut yang disambut anggukan oleh korban.

Sudut lain yang ditinjau Ketua Umum adalah pasar Nayak, yang merupakan satu-satunya pasar yang ada di Wamena. Disini terjadi transaksi dagang antara penduduk asli dengan para pendatang yang memang berdomisili di Wamena untuk berdagang di los-los pasar. Kendati keadaan jalanan di dalam pasar becek, nyaris berlumpur, Ketua Umum tetap berkeliling, bersenggolan dengan masyarakat asli Wamena yang sebagian

Korban bencana alam di rumah sakit

Digitized by Google

masih mengenakan koteka bagi yang prianya dan rumbai bagi wanitanya. Keadaan perbauran ini menarik perhatian tersendiri bagi mereka yang untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di bumi Irian Jaya. Sejumlah penduduk asli dari suku Dani itu menawarkan barang-barang kerajinan tangan berupa kantong dari anyaman tali, dan sejumlah barang-barang lainnya seperti kalung dari untaian manik-manik warna warni.

Perhatian Ketua Umum tertuju pula pada sejumlah pedagang yang bukan penduduk asli Wamena, terlihat dari warna kulit yang coklat seperti penduduk yang menurut pengakuannya berasal dari Ujung Pandang. Kepada orang-orang itu Ketua Umum menanyakan keadaan sehari-hari, kerasan atau tidak, yang dijawab semuanya oleh mereka yang ditemui Ketua Umum.

Selesai mengadakan peninjauan ke pasar, rombongan menuju ke kantor DPD GOLKAR Tingkat II, yang kondisinya banyak bagian yang rusak. Konon menurut beberapa sumber kesulitan bahan bangunan menyebabkan pembangunan gedung itu tidak sempurna. Seperti semen misalnya di Wamena mencapai Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per sak. Dalam kantor itu Ketua Umum menyempatkan melihat keadaan ruangan yang ada, dan memperhatikan buku-buku yang ada dalam almari arsip.

Wahono mengamati visualisasi korban bencana alam

Kembali ke Jayapura

Tidak lama memang kunjungan ke kantor DPD GOLKAR tersebut, rombongan harus bersiap-siap meninggalkan Wamena sebelum kabut menyelimuti daerah pegunungan Jayawijaya. Disamping itu Ketua Umum juga sudah ditunggu di Jayapura untuk suatu acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu lomba lari 10 Kilometer memperingati 25 tahun GOLKAR serta peresmian lomba tari Yosim Pancar, sebuah tarian pergaulan yang menjadi tradisi putra-putri Irian Jaya setiap ada perayaan. Pesertanya tidak hanya mereka yang sudah dewasa, tapi justru kebanyakan anak-anak kecil.

Gerakan-gerakan yang lucu diperagakan oleh anak-anak itu sehingga mengundang decak kagum rombongan yang menyaksikan di GOR Cenderawasih, Jayapura. Belum lagi sajian drumb band/marching band oleh anak-anak SLTA Gabungan yang merupakan kebanggaan kota Jayapura.

Dalam kesempatan itu Ketua Umum, Sekjen dan Nyonya didaulat untuk menyerahkan piala dan hadiah tabanas bagi pemenang lomba lari 10 Kilometer, baik yang diikuti atlet Pelatda PON Irja maupun umum.

Dua hari perjalanan Ketua Umum ke daratan Irian Jaya memberi arti tersendiri bagi Ketua Umum. Setidaknya dari kesan-kesan selama kunjungan kerja itu mencerminkan kebanggaan tersendiri bagi Ketua Umum DPP GOLKAR dalam rangka pengenalan sekaligus pembinaan kader-kadernya yang berada di batas timur Nusantara ini. Melihat semangat dan antusiasme warga GOLKAR di Irja, diyakini bahwa GOLKAR di daerah ini akan tetap memperoleh kemenangan dalam Pemilu mendatang, seperti yang dikemukakan kepada wartawan sesaat sebelum meninggalkan bumi Irian Jaya kembali menuju Jakarta. □ (NS)

Serangkaian kunjungan kerja di Irja

Digitized by Google

Langkah Kongkret Konsolidasi GOLKAR Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur

Sebagai langkah konkret untuk melaksanakan konsolidasi, demi terwujudnya Tri Sukses GOLKAR, Ketua Umum Wahono telah banyak melakukan kunjungan di berbagai daerah. Selama 10 bulan terakhir ini, Ketua Umum telah melakukan perjalanannya di 21 dari 27 Propinsi yang ada di Indonesia.

Daerah-daerah yang belum dikunjungi Ketua Umum diantaranya; Propinsi Lampung, Riau, Yogyakarta, NTB (Nusa Tenggara Barat), Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sedangkan Propinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mendapat giliran akhir Agustus lalu. Seperti diketahui, dalam kunjungannya di berbagai daerah itu, Ketua Umum menjelaskan berbagai masalah, khususnya yang berkaitan dengan ke-GOLKAR-an. Misalnya menjelaskan mengenai hasil keputusan Munas IV dan berbagai informasi tentang program dan langkah kebijaksanaan organisasi yang harus dilaksanakan GOLKAR di berbagai tingkatan.

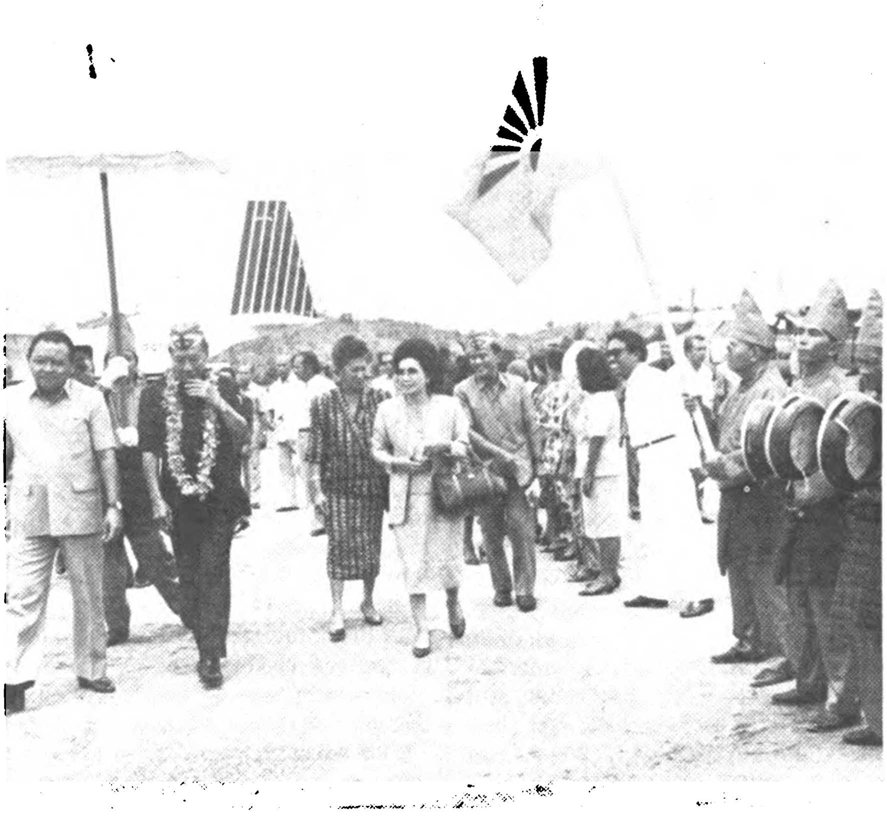

Disambut dengan adat Kaltim

Ketika mengawali kunjungannya di Sulawesi Tengah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program di atas, Ketua Umum meletakkan batu pertama dan menandatangani prasasti untuk pembangunan gedung kantor DPD GOLKAR Tingkat I Donggala. Gedung yang dibangun atas swadaya masyarakat itu dan disponsori oleh kader-kader GOLKAR daerah tersebut yang direncanakan akan menelan biaya Rp 60 juta.

Menurut Sahata Sinaga, Ketua DPD Tingkat II Donggala, pembangunan kantor DPD GOLKAR tersebut merupakan prioritas utama DPD. Sebab, daerah Tingkat II Donggala ini merupakan barometer bagi pemenangan Pemilu Propinsi Sulteng, sejak tahun 1971. Selain itu, daerah Donggala yang berkeinginan untuk mandiri, kata Sahata, khususnya bidang dana, kader-kader Sulteng melalui Yayasan Panca Bhakti GOLKAR, berupaya untuk mengembangkan tanaman untuk komoditi ekspor non migas. Misalnya, coklat dan mengelola taman rekreasi di Palu.

Dalam sambutannya, Ketua Umum memuji langkah-langkah yang diambil oleh kader-kader GOLKAR daerah tersebut. Dan pada kesempatan itu pula Ketua Umum memberikan bantuan senilai Rp 5 juta.

Selain itu Ketua Umum juga menyinggung tentang konsolidasi dan kaderisasi. Sebagaimana dikatakan, dalam memasuki tahap awal pelaksanaan program yang bersifat kedalam, GOLKAR berupaya memantapkan konsolidasi dan kaderisasi.

Sedangkan program yang bersifat keluar, GOLKAR menjaga dan mempertahankan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mensukseskan pembangunan, khususnya dalam Pelita V.

Selain itu GOLKAR bertekad untuk menampung, memahami, memadukan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan motivasi yang dapat menggerakkan seluruh potensi bangsa, dapat tumbuh dan bergerak maju dalam derap langkah pembangunan. "Memang, GOLKAR berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan GOLKAR sendiri," tegas Ketua Umum.

Selesai acara di lokasi pembangunan Kantor DPD, Ketua Umum di Gubernuran Siramindi, menerima Pengurus Besar Perguruan Al Chairat, yang dipimpin Ketua Umumnya Saad Al Jufri beserta 17 pengurus lainnya. Saad Al Jufri dalam laporannya kepada Ketua Umum intinya adalah mendukung kepemimpinan GOLKAR saat ini, yaitu turut mensukseskan program Tri Sukses GOLKAR, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Dalam kesempatan itu dikemukakan pula bahwa perguruan Al Chairat saat ini mempunyai 700 buah tempat pendidikan dan mengajarkan berbagai pendidikan disiplin ilmu yang tersebar di 7 Propinsi Indonesia Timur. Khusus

Digitized by Google

mengenai program pemenangan pemilu 1992 bagi GOLKAR, Al Chairat sejak dini mengadakan pendekatan sosio religius melalui juru dakwah dengan pembekalan khusus.

Saat menerima pengurus Al Chairat petang itu telah menunggu pula acara berikutnya, yaitu untuk menutup selesainya Penyegaran Kader GOLKAR se Kalteng di Gedung Wanita, Palu, yang sekaligus penutupan Rakernis Badan Pengelola Kader Daerah (Bapekada) dan Rakernis Kebendaharaan GOLKAR setempat.

Dalam kesempatan ini Ketua Umum menyampaikan berbagai informasi dan petunjuk-petunjuk yang berkenaan dengan berbagai kebijakan DPP dan DPD GOLKAR. Diantaranya tentang kewajiban untuk melakukan pendidikan politik rakyat sejak usia remaja, pengokohan kesadaran politik masyarakat, kemandirian dan menguraikan secara panjang lebar tentang hasil-hasil keputusan Munas IV, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan dan pemantapan Demokrasi Pancasila.

Berkenaan dengan Penyegaran Kader di Sulteng, Wahono menekankan pentingnya untuk menjaga semangat yang menggelora bagi para kader untuk dapat memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, dalam rangka usaha-usaha untuk meningkatkan kiprah organisasi. Dengan demikian diharapkan akan lebih mendorong peningkatan daya joang kita untuk mengatasi rintangan-rintangan yang memungkinkan timbul dimasa-masa yang akan datang.

Ketangguhan dan tingkat kualitas kader-kader GOLKAR akan sangat menentukan dalam melancarkan perjuangan GOLKAR, dengan kualitas kader yang tinggi, menurut Wahono, GOLKAR akan dapat mengisi dan memberi bukti nyata. Untuk itu ia menekankan perlunya usaha peningkatan kualitas kader, termasuk didalamnya kualitas generasi muda.

Wahono mengamati peta politik Sulteng

Sejalan dengan kaitan ini, Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Sulteng Abdul Aziz Lamajido SH dalam bagian sambutannya mengemukakan, daerahnya kini tercatat sebanyak 70.000 kader penggerak teritorial, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak Gerakan Terobosan Pembangunan Desa (Gerbosbangdesa), dan ini merupakan suatu gerakan Pemerintah Daerah, yang dapat dijadikan bahan pembinaan dan pengembangan, dalam aspek sasaran subyek, yang implementasinya berkaitan erat dengan generasi muda dan kesempatan kerja.

Melalui salah satu aspek sukses kegiatan pembangunan yang digerakkan kader-kader GOLKAR daerah ini, Lamajido optimis, akan menghantarkan GOLKAR untuk dapat mempertahankan 83,12 persen dan bahkan akan dapat meningkatkan perolehan suara bagi GOLKAR dalam Pemilu 1992 mendatang.

Mengakhiri kunjungan kerjanya selama dua hari di daerah ini, sebelum melanjutkan langkah panjang ke Kaltim, Ketua Umum di bandara Mutiara Palu masih berkesempatan konperensi pers dengan wartawan daerah, berkenaan dengan berbagai permasalahan penting nasional, yang telah pula mengimbas ke daerah-daerah.

Kalimantan Timur

Berbeda dengan kedatangannya di Palu, Ketua Umum langsung menancapkan prasasti pembangunan Gedung DPD GOLKAR, sedang di Kalimantan Timur langsung meresmikan Kantor DPD GOLKAR Tingkat II Samarinda bernilai Rp 178 juta yang dibangun hasil swadaya kader GOLKAR setempat. Sehubungan Kantor yang segera akan ditempati itu belum ada peralatannya, maka secara spontanitas pula Wahono memberikan iurannya sebesar Rp 5 juta.

Usai meresmikan kantor DPD, Ketua Umum melanjutkan acaranya ke Kelurahan Karang Asam guna melihat kegiatan warga GOLKAR di kelurahan itu yang sedang mengadakan gotong-royong memperbaiki jalan lingkungan dengan penyemenan beton. Dalam kesempatan itu Wahono menyumbang semen sebanyak 10.000 sak.

Ketua Umum terima penjelasan pembangunan Gedung DPD GOLKAR

Digitized by Google

Meninjau kegiatan HWK

Dialog

Selang 200 meter dari kegiatan perbaikan jalan lingkungan itu, Ketua Umum GOLKAR mengadakan dialog dengan para komisaris Kecamatan dan melihat markas GOLKAR yang berada ditingkat paling bawah ini. Melihat kenyataan ini Wahono sangat terkesan. Pasalnya, Komcat Samarinda Hulu yang berada di tepian jalan Slamet Riadi itu mempunyai duta yang lengkap dan terpampang dengan jelas di dinding, mulai dari peta lingkungan, jumlah penduduk lengkap dengan jumlah pemilih dan calon pemilih, perkiraan keadaan dan peta politik desa. "Kiranya Komcat ini patut dijadikan contoh," ujar Wahono. Seraya menanya pada Ketua Komcat H. Sanusi, kendala-kendala apa yang ditemukan dalam tugas sebagai komisaris kecamatan. Kendala itu seperti yang dikatakan H. Sanusi terutama dalam melakukan pembinaan warga, khususnya bagi pembinaan generasi mudanya yang notabene mempunyai minat yang berbeda-beda. "Kendala kami adalah para generasi muda susah diikuti minat dan seleranya. Mereka suka berpindah-pindah, namun kami bertekad untuk merangkul dan membina mereka," kata Sanusi dengan lantang.

Dengan sikap kebapakan Ketua Umum meminta agar segenap pengurus GOLKAR khususnya para Komisaris Desa (Komdes) dan Komisaris Kecamatan (Komcat) dalam membina warganya terutama para generasi muda dilakukan secara wajar tanpa ada pemaksaan, karena dalam hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik akan makna pembinaan yang sesungguhnya. Lebih-lebih bila pembinaan itu dilakukan semata-mata menjelang saat-saat Pemilu, sehingga terkesan sporadis dan temporal. Namun pembinaan itu perlu dilakukan secara terus menerus, dan berkelanjutan. "Yang kita harapkan adalah, generasi muda dan seluruh masyarakat yakin betul akan kebenaran perjuangan dan sumbangan yang telah diberikan GOLKAR selama ini," pesan Wahono.

Puncak acara kunjungan kerja Ketua Umum GOLKAR di propinsi Kalimantan Timur adalah acara tatap muka dengan keluarga besar GOLKAR se Kaltim yang sekaligus merupakan acara pembukaan penjelasan Penyegaran Kader, yang mengambil tempat di Gedung Sport Hall Segiri. Dalam pengarahannya antara lain mengatakan, kegiatan kaderisasi ini tidak hanya terbatas pada penyegaran kader saja, melainkan akan lebih luas, lebih kompleks dan mendasar. Dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Usaha kaderisasi ini akan diperluas terus untuk mencapai jumlah yang lebih besar, memenuhi kebutuhan yang juga meningkat secara kuantitatif. Namun ia tidak menghendaki kader yang selalu menunggu perintah, apalagi menggantungkan diri pada orang lain.

Kita juga tidak menghendaki kader yang mudah mundur, karena tidak kebagian jabatan. Sifat yang demikian menurut Ketua Umum belum memenuhi kriteria kader GOLKAR dalam artian sesungguhnya. Kita memerlukan kader yang mempunyai semangat lebih untuk mengejar prestasi, berani berbuat demi kemajuan organisasi dan pembangunan bangsa, mempunyai sifat apa yang dapat diberikan kepada organisasi, bukan sebaliknya, tegas Wahono.

Turut memberikan sambutan malam itu selain Ketua Dewan Pertimbangan Kaltim HM Ardans, juga Ketua DPD GOLKAR, H Eddy Suchaedi yang dalam sambutannya melukiskan, bahwa kedatangan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan Sekjen Ir. Rachmat Witoelar beserta rombongan ke Kaltim akan membawakan "rachmat" bagi warga masyarakat Kalimantan Timur.

Meluangkan waktu dalam mengikuti kunjungan kerja Ketua Umum di kedua daerah Palu dan Samarinda, Wakil Bendahara Ny. Tati Sumiati Darsoyo, selaku Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) mengadakan pertemuan dan peninjauan ke daerah binaan HWK yang menjadi teladan desa, mengembangkan berbagai ketrampilan wanita untuk menambah penghasilan keluarga.

Turut dalam rombongan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono selama tiga hari di daerah itu, antara lain Sekjen Ir Rachmat Witoelar, Wakil Sekjen Drs Freddy Latumahina, Ir Usman Hasan, Wakil Bendahara Ny. Tati Sumiati Darsoyo, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu H. Anang Adenansi, Ketua Dept. Pengabdian Masyarakat H.R. Agung Laksono dan Ny.Mientarsih Wahono serta Ny. Ir. Erna Witoelar.☐ (WT)

Ralat

*Di dalam laporan organisasi Media Karya No. 62 - Juni 1989 halaman 52 terdapat kekeliruan. Kata **Muhammadiyah Tarbiyah Islamiyah**, seharusnya **Tarbiyah Islamiyah**.*

Dengan demikian kekeliruan diperbaiki dan redaksi mohon maaf.

Digitized by Google

GOLKAR Dituntut Peka

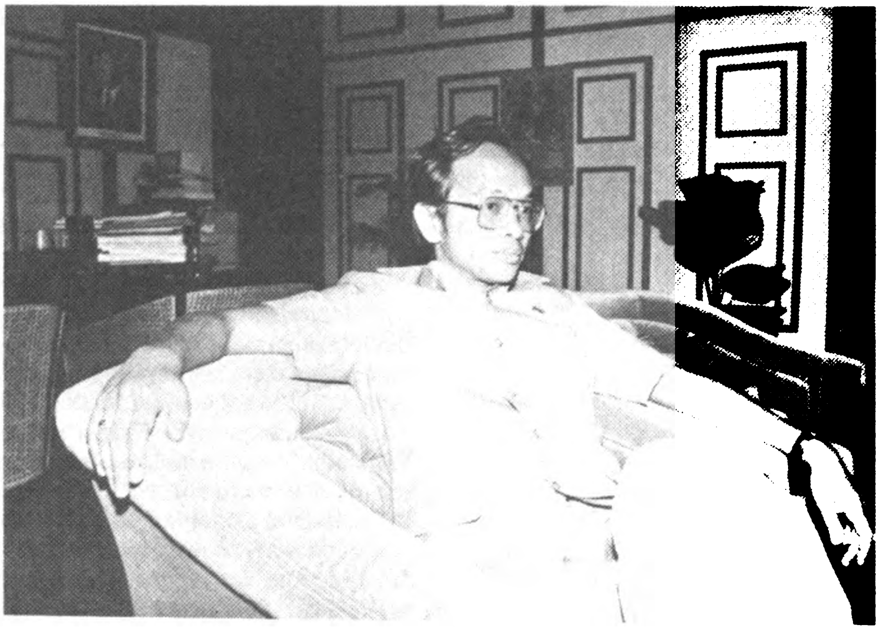

Sarwono Kusumaatmadja

Sekarang ini sedang berada di suatu masa yang penuh dinamika atau perubahan yang kadang-kadang membingungkan. Bagi mereka yang aktif bergerak dalam dunia politik, memperhatikan setiap gejala perubahan adalah sangat perlu. Lebih-lebih bagi GOLKAR sendiri yang menginginkan suatu kemenangan dalam Pemilu 1992, maka kepekaan menghadapi setiap gejala perubahan yang terjadi adalah penting.

Sarwono Kusumaatmadja ketika berbicara di depan keluarga besar Golongan Karya Jawa Barat di Bandung baru-baru ini mengemukakan bahwa perhatian yang cukup besar terhadap gejala-gejala perubahan sangat penting untuk dimiliki, karena pada akhirnya nanti kemenangan GOLKAR dalam Pemilu mendatang, merupakan hasil dari daya penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Kalau GOLKAR terlalu tertinggal oleh keadaan dan tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang memberikan harapan bagi masa depan perjuangan kita, maka kemungkinan besar GOLKAR akan mengalami kesulitan atau hambatan. Apalagi mengingat prestasi Pemilu yang lalu sudah amat tinggi, sehingga mempertahankannya juga sulit.

Sarwono mengingatkan agar kita menyadari gejala-gejala perubahan yang ada, dan berupaya untuk memahami dan mencari jalan transformasi-transformasi apakah yang diperlukan di berbagai bidang kehidupan, supaya leadership atau kepemimpinan politik di Indonesia masih ada di tangan keluarga besar GOLKAR. Dan penguasaan leadership ini yang nantinya menentukan kemenangan GOLKAR dalam Pemilu mendatang.

Perlu pula disadari, kata Sarwono, kemenangan GOLKAR sebesar 72% dalam Pemilu lalu sulit untuk dipertahankan kalau tidak diimbangi dengan kerja keras. Apalagi kalau ingin meningkatkan kemenangan tersebut.

Beberapa catatan dikemukakan sehubungan dengan GOLKAR yang sudah menginjak usianya seperempat abad Oktober mendatang. Bahwa biasanya organisasi yang sudah punya umur itu sering mempunyai masalah di dalam tubuh sendiri. Menurut mantan Sekjen DPP GOLKAR belajar dari pengalaman partai demokrasi liberal (LDP) Jepang yang selalu memperoleh kemenangan dalam setiap Pemilu ternyata mulai ditinggalkan atau kehilangan kepercayaan pendukungnya. Kondisi yang terlalu mapan dari organisasi politik itu telah mengurangi kepekaan terhadap keadaan yang terjadi di sekeliling. Ditambah lagi berbagai skandal yang menimpa pucuk pimpinan partai itu, sehingga pada waktu ada Pemilu dikalahkan oleh partai yang dipimpin oleh seorang wanita.

Sarwono melihat hal itu sebagai gejala umum dari suatu organisasi yang sedang mapan, dimana pada umumnya sangat lambat melihat dirinya sendiri, dan baru melakukan introspeksi terhadap keadaan yang terjadi setelah mendapat desakan atau rangsangan dari luar.

Sentral Perubahan

Menyinggung perubahan yang bisa terjadi, Sarwono mengingatkan untuk terlebih dulu mengetahui sentral perubahan itu sendiri. Dari pengamatannya ternyata kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan. Sebagai contoh betapa kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan perubahan struktur ekonomi.

"Kita masih ingat ketika jaman keemasan harga minyak, dimana OPEC sangat menentukan harga pasaran minyak dunia dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari monopoli minyak tersebut," tuturnya.

Namun apa yang terjadi kemudian, negara-negara konsumen mengantisipasi keadaan itu dengan melakukan perubahan pola pemakaian minyak dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi yang mereka kuasai. Dengan teknologi canggih mereka eksplorasi tambang minyak secara efisien dan melakukan berbagai penghematan dengan menggantikan dengan energi alternatif. Dampak dari langkah-langkah yang diambil negara-negara non OPEC, strategi mempertahankan harga minyak di pasaran menjadi buyar karena tidak lagi efek-

Digitized by Google

tif. Ilmu dan teknologi telah memberikan jawaban yang telak. "Akhirnya kita tentunya harus menerima kenyataan ini," ujarnya.

Menyadari kenyataan itu, keharusan bagi kita untuk menyusun satu perekonomian yang tidak lagi mengandalkan minyak bumi sebagai tulang punggung penerimaan negara. Menteri Pertambangan dan Energi sendiri menegaskan bahwa kita sudah harus berfikir dalam struktur dan sistem ekonomi pasca minyak bumi. Bahkan diingatkan pula kalau kegiatan eksplorasi minyak tidak digalakkan maka dalam waktu beberapa lama mungkin ekspor minyak bumi tidak bisa dilakukan karena minyak yang ada harus digunakan untuk keperluan dalam negeri sendiri.

Beruntung sekali kita tidak seperti Venezuela dan Nigeria yang mengandalkan ekspor minyak sementara sektor pertanian tidak mendapat perhatian. Indonesia melalui strategi pembangunan nasionalnya mengarah kepada industri yang kuat dengan dukungan sektor pertanian yang tangguh.

Dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang terlalu mengandalkan penerimaan dari sektor minyak bumi, maka kini Indonesia melakukan transformasi struktur penerimaan negara dari sektor minyak ke sektor pajak. Sebagai satu gejala ini merupakan gejala yang mempunyai pengaruh yang sangat luas diberbagai segi kehidupan kita.

Kalau sekarang sektor pajak baru mencapai tingkat perbandingan 8% dari produk domestik bruto (PDB), pemerintah mempunyai rencana menaikkan perbandingan itu menjadi 15% dari PDB pada akhir Pelita V, ini berarti setiap tahun harus terjadi kenaikan penerimaan dari sektor pajak sebesar rata-rata 23,3%. Berarti pula bahwa disini dituntut kesadaran rakyat sebagai potensi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Disini perlu keseimbangan antara kewajiban dan hak rakyat. Rakyat sebagai pembayar pajak harus mendapatkan imbalan dari pemerintah berupa pelayanan yang lebih baik. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi akumulasi kekecewaan pada rakyat yang bisa menimbulkan kerawanan.

Masalah Kualitatif

Sarwono mengatakan melalui suatu diskusi yang intensif oleh GOLKAR antara lain juga mengikutsertakan DPD-DPD, ditarik satu kesimpulan bahwa untuk masa-masa datang justru masalah-masalah kualitatif seperti keadilan, demokrasi, yang akan menjadi titik perhatian utama bangsa Indonesia.

Sarwono melihat bahwa masalah-masalah tersebut harus diikuti supaya khalayak ramai sebagai pendukung GOLKAR, dan juga yang mempertimbangkan untuk menjadi pendukung GOLKAR melihat dalam diri GOLKAR sebagai suatu kekuatan sosial politik yang dapat memberikan satu kesan yang kuat di masyarakat.

Persoalan lain dikemukakan Sarwono menyangkut lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terus bertambah tiap tahunnya. Mereka ini ada yang bekerja, setengah bekerja atau asal kerja. Ini semua menuntut perhatian kita semua dan tidak bisa dianggap enteng. Salah satu jawabannya adalah memperkuat sektor agro ekonomi atau agro industri. Ini sesuai dengan strategi nasional kita yaitu pertanian yang tangguh didukung industri yang kuat. Mengapa di sektor ini kita mempunyai kesempatan yang cukup besar, karena negara-negara berkembang di daerah tropis yang mempunyai potensi yang sama dengan kita masih banyak yang tertinggal dari kita.

Pengembangan Sumber Daya

Dalam kesempatan memberi ceramah itu, Sarwono juga menyinggung tentang pengembangan sumber daya manusia yang ada. Lapisan tenaga terdidik yang ada pada kita lebih sedikit dibanding Filipina. Negara itu mempunyai lapisan tenaga terdirik Universiter yang bermutu jauh lebih tebal dari kita. Sementara sumber daya manusia yang kita miliki bertumpuk pada lapisan di bawah, yaitu mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan SLTA, SLTP bahkan SD.

Persoalannya bagi kita sekarang bagaimana mengembangkan sumber daya manusia itu supaya mereka dapat lebih adaptable untuk bekerja. Dari berbagai diskusi yang dilakukan dengan Depnaker, ditarik kesimpulan bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada kesanggupan kita untuk menyesuaikan diri dengan ilmu dan teknologi. Akan tetapi masalahnya lebih terletak kepada pembentukan wawasan kerja dari generasi muda kita ini yang agak terbengkelai. Pernah dilontarkan kritikan kita terlalu lama mencoba mendidik orang supaya menjadi pintar, tapi lupa mendidik orang supaya bisa kerja. Kita butuh banyak orang yang bisa kerja. Karena orang yang bisa kerja itu otomatis pintar.

Segi lain dikemukakan menyangkut ethos kerja, disiplin kerja. Ini juga merupakan suatu masalah yang harus dipikirkan di dunia politik.

Ke-GOLKAR-an

Sarwono juga menyinggung masalah-masalah menyangkut ke-GOLKAR-an, antara lain menghadapi isyu Korpri di-GOLKAR-kan. Kita tidak perlu kaget dengan adanya isyu-isyu semacam itu. Karena persoalannya jelas, tidak ada keharusan masuk GOLKAR. Begitu pula dalam Anggaran Dasar GOLKAR pun tidak ada keharusan Korpri masuk GOLKAR. Daripada kaget mendengar isyu itu, kata Sarwono, lebih baik memikirkan bagaimana setelah pegawai negeri itu menjadi anggota GOLKAR. Apa bisa dipelihara terus menerus ke-GOLKAR-annya.

Begitu pula dengan isyu Pemilu sistem distrik yang banyak diramaikan orang. Menurut Sarwono suatu adopsi sistem distrik yang tidak terpikirkan dengan baik, akan lebih menonjolkan masalah-masalah daerah daripada kebersamaan di tingkat nasional. "Coba kita kaji bagi kepentingan nasional atau kepentingan kita sendiri apakah perlu kita ini buru-buru menuju ke sistem distrik. Saya sarankan tidak," tegas Sarwono.

Masalah lain menyangkut kemandirian GOLKAR. Bagi Sarwono soal kemandirian itu bukanlah rumusan yang baru. Tapi yang perlu harus diingat adalah rumusan strategi dari kemandirian itu yang harus betul-betul pas, yaitu bahwa secara strategis pula kemandirian GOLKAR ini bukanlah berarti lepasnya hubungan antara tiga kekuatan keluarga besar GOLKAR itu.

Disini yang harus dijaga kekompakan, persatuan dan kesatuan antara ketiga unsur, jangan dicampuradukkan dengan soal kemandirian. Karena yang dimaksudkan dengan kemandirian GOLKAR adalah otonominya dalam melaksanakan urusan sehari-hari, dan juga pertanggung jawabannya atas keputusan yang diembannya jangan sampai keputusan itu kemudian pertanggung jawabannya seakan-akan di luar jalur itu. "Nah kesatuan persepsi strategis dari ketiga jalur itu harus utuh," tegas Sarwono Kusumaatmadja.☐ (NS)

Digitized by Google

Penandatanganan kesepakatan Indonesia-Uni Soviet

Sekitar Kunjungan Presiden Soeharto ke Beograd dan Uni Soviet

Berbagai surat kabar di Indonesia menempatkan pada halaman pertama perjalanan Presiden Soeharto ke KTT Non Blok, Beograd, Yugoslavia dan Uni Soviet, belum lama ini. Kunjungan kerja selama beberapa hari itu memang menarik untuk ditempatkan pada halaman depan.

Pasalnya, perjalanan menuju KTT Non Blok ke IX yang diikuti oleh 60 kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagian hanya mengirimkan menterinya, merupakan yang pertama kali bagi Presiden Soeharto selama 20 tahun. Terakhir kehadiran Presiden Soeharto dalam KTT Non Blok dilakukan pada tahun 1970 di Lusaka (Zambia).

KTT Non Blok yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini, sebelumnya Indonesia hanya mengirimkan Wakil Presiden. Sebagaimana dikatakan Presiden, sewaktu memberikan keterangan pada pers dalam perjalanan pulang dari Uni Soviet ke Tanah Air, pada tahun 1970 Indonesia baru memasuki Repelita I, dan belum dapat menunjukkan apa-apa. Presiden memutuskan untuk berkonsentrasi pada pembangunan nasional.

Menurut Presiden, politik luar negeri apapun juga akan ditentukan bobotnya pada keadaan dalam negeri dari pada berbicara dengan negara-negara yang memang masih sulit diajak berbicara secara rasional. "Jadi bukan berarti kita mundur dari Non Blok, tapi mengamankan saja agar tetap dipertahankan, tidak diselewengkan. Sebab kalau demikian akan sangat merugikan gerakan Non Blok itu sendiri".

Bagi Presiden, kedatangannya di negara tempat diselenggarakan KTT Non Blok ini bukan merupakan hal yang baru. Presiden sudah tiga kali mengadakan kunjungan di negara tersebut. Pertama pada tahun 1961. Waktu itu Presiden Soeharto masih menduduki jabatan Deputi I KASAD, untuk mengadakan kontak dengan para atase Militer RI dan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, Jerman dan Perancis. Dan pada tahun itu pula di negara tersebut diselenggarakan KTT Non Blok untuk yang pertama kalinya. Kunjungan kedua dilakukan pada tahun 1975. Dan terakhir pada tahun 1989. Kunjungan Presiden di negara tersebut dapat dikatkaan 14 tahun sekali.

Yang tidak kalah menariknya dari perjalanan kerja Presiden Soeharto sepekan lebih ini adalah ke Uni Soviet. Kunjungan di negara lahirnya ideologi

Presiden Soeharto beri penjelasan pada pers

Digitized by Google

komunis ini juga merupakan yang pertama kali selama 20 tahun.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara kedua negara itu pernah mengalami pasang surut. Era Presiden pertama, Indonesia dan Uni Soviet pernah menjalin hubungan yang cukup erat. Bahkan, bantuan negara tersebut mempunyai arti penting bagi Indonesia. "Ini tidak mungkin dilupakan oleh rakyat Indonesia," ujar Presiden.

Sedangkan bantuan yang diberikan Uni Soviet, kepada Indonesia waktu itu, dirasakan langsung oleh Presiden Soeharto sendiri. Sewaktu jaman revolusi. Bahkan, pada jaman pembebasan Irian Barat, Presiden Soeharto yang waktu itu menjadi Panglima Operasi Mandala, secara langsung menggunakan bantuan Uni Soviet menjak Presiden Soeharto mengadakan kunjungan di negara Beruang Merah, belum lama ini. Sebagaimana diketahui, hubungan dengan negara-negara di kawasan Blok Timur mulai dirintis, terutama Uni Soviet, dengan melakukan misi-misi perdagangan.

Kehangatan itu tercermin, tatkala Presiden Soeharto dengan menggunakan kendaraan Limousine memasuki Istana Kremlin. Presiden Gorbachev yang lebih dikenal dengan gagasannya tentang glasnost (keterbukaan) dan prestorika (pembaruan) dengan senyumnya yang khas menyambut kedatangan Presiden Soeharto.

Kunjungan Presiden Soeharto di negara tersebut, dapatlah dikatakan merupakan babakan baru bagi kedua negara setelah hampir 20 tahun kepala pemerintahan masing-masing tidak Sutrisno, menghasilkan pernyataan bersama menyangkut dasar-dasar hubungan bersama kedua negara yang saling menguntungkan. Dalam pernyataan tersebut juga terdapat adanya pemikiran baru yang melandasi kebijaksanaan luar negeri Uni Soviet yang mencakup demiliterisasi, demokratisasi dan deideologisasi dalam hubungan antar negara.

Pernyataan kedua negara tersebut menyangkut pula upaya mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama konstruktif atas dasar saling menghormati kemerdekaan masing-masing, bebas memilih bentuk dan corak pembangunan masing-masing, serta taat pada prinsip persamaan yang berdaulat, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan prinsip saling menguntungkan.

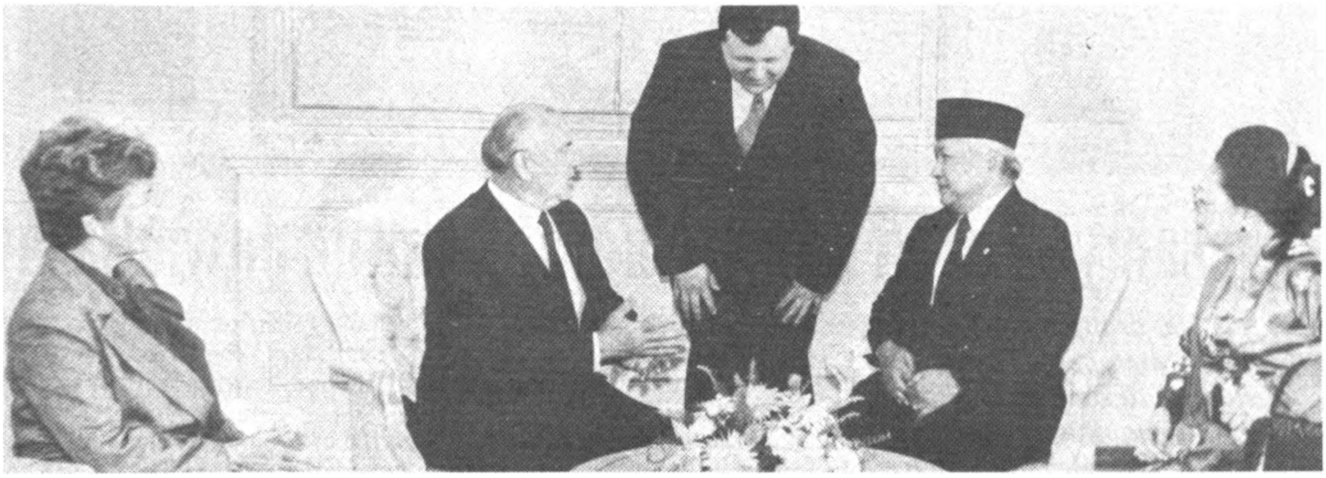

Dialog Presiden Soeharto dengan Presiden Gorbachev

yang berupa senjata itu.

Bukan hanya itu, bantuan lain yang diberikan Uni Soviet kepada Indonesia yang nyata dan bahkan masih dapat dilihat wujudnya hingga sekarang ini adalah Stadion Utama dan Istora Senayan, Rumah Sakit Persahabatan, Reaktor Atom di Bandung dan Reaktor Atom di Serpong, Jawa Barat.

Kemudian setelah meletus peristiwa G30S/PKI tahun 1965, hubungan kedua negara mencapai titik terendah. Beberapa tahun kemudian, insiden kecil menjadi sangat menggangu kedua negara. Misalnya, ketika petugas Laksus memergoki Letnan Kolonel Soesdaryanto, pejabat di jawatan Hydrografi dan Oceanografi, tertangkap basah ketika menjual sejumlah dokumen TNI AL kepada agen KGB, serta sejumlah masalah-masalah lain.

Hubungan Indonesia - Uni Soviet terlihat semakin mesra, terutama se-saling kunjung. Di ruangan merah, dimana Presiden dipersilahkan, terjadi tukar pikiran diantara kedua pemerintahan. Gorbachev menceritakan gagasannya tentang prestorika dan glasnost. Sementara Presiden Soeharto dalam dialog tersebut juga menegaskan tentang sikap Indonesia dan kondisi sekarang in dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan UUD 45, baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi maupun keadilan. Seperti dikatakan Presiden, meskipun Indonesia memusatkan perhatiannya pada pembangunan, namun tidak pernah meninggalkan politik luar negeri yang bebas aktif yang dianut dan tetap konsekuen pula menentang penjajahan.

Sedang, dalam pertemuan lanjutan antara Indonesia dan Uni Soviet, yang dihadiri Menko Ekuin Radius Prawiro, Menlu Ali Alatas, Mensesneg Moerdiono, dan Pangab Jenderal Try

Selain itu, kedua negara juga berusaha untuk mengembangkan secara kualitatif dimensi-dimensi baru dalam hubungan Indonesia-Uni Soviet, menggiatkan dan memperluas dialog politik serta meningkatkan kerja sama di forum internasional demi kepentingan perdamaian dan keamanan dunia.

Kemudian kedua negara juga merasa puas dengan peranan yang dimainkan Non Blok dalam menyelesaikan berbagai masalah internasional yang mendesak. Dinyatakan, perluasan dan peningkatan antara kedua negara tidak bertujuan untuk merugikan kepentingan negara lain manapun juga, serta tidak akan mempengaruhi kewajiban bilateral, regional maupun multilateral. Pernyataan antara kedua negara tersebut masing-masing ditandatangani oleh kepala negara masing-masing. Hal tersebut di atas merupakan oleh-oleh Presiden Soeharto dari kunjungannya ke Uni Soviet.☐ BM

Digitized by Google

Gubernur Yogie SM menerima Parasamya Purna Karya Nugraha dari Presiden Soeharto (Neg)

Parasamya Purna Karya Nugraha Untuk Jawa Barat

Sekitar 200 orang penari dan 20 nayaga mempertontonkan kebolehannya di stadion Gasibu Bandung, Jawa Barat. Tarian yang disajikan oleh mojang Priangan dengan gerak yang dinamis ini menggambarkan upaya kerja keras secara bersama-sama dalam mencapai kesejahteraan.

Sebuah tari yang diberi judul Torwa Gaweh, belum lama ini sengaja ditampilkan untuk menyambut keberhasilan Jawa Barat dalam upayanya untuk mencapai hasil pembangunan yang selama ini dilakukan.

Upaya Jawa Barat, dalam membangun daerahnya dinilai mencapai sukses. Tidak heran, bila Presiden Soeharto menganugerahkan sebuah bintang penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Sebuah penghargaan kepada daerah dalam usaha pembangunannya.

Bersamaan dengan itu pula, dua daerah yang mendapat penghargaan adalah Jawa Timur berupa Prayojana Kriya Pata Parasamya Purna Nugraha. Bagi Jawa Tengah, penghargaan ini merupakan yang ketiga kali, setelah daerah itu meraih Parasamya Karya Nugraha. Sedangkan bagi Jawa Timur penghargaan ini untuk keempat kalinya.

Salah satu sukses daerah Jawa Barat dalam membangun daerahnya seperti diungkapkan Presiden Soeharto dalam sambutannya ketika memberi penghargaan daerah itu adalah, Jawa Barat telah berhasil dalam mencapai kemajuan-kemajuan yang membesarkan hati, terutama dalam garis naiknya gerak pembangunan secara nasional.

Sementara keberhasilan Jawa Barat dalam upaya mencapai tingkat sukses ini, seperti yang digambarkan Yogie SM, Gubernur Jawa Barat bahwa, secara nasional Jawa Barat telah memasok untuk produksi padi sekitar 23 sampai 26 persen. Selain itu, dalam kontribusi di sektor industri untuk penerimaan daerah mencapai 19 persen. Sebagaimana diketahui, bahwa pusat kegiatan industri banyak terda-

Jawa Barat melangkah sukses dalam meningkatkan program pembangunan (Neg)

Digitized by Google

pat di daerah Parahiyangan.

Keberhasilan Jawa Barat, sehingga mencapai penghargaan itu berkat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan, juga adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam ikut membangun daerahnya.

Meningkatkan Perekonomian

Presiden Soeharto dalam kesempatan memberikan sambutan ketika memberi kehormatan penghargaan kepada ketiga daerah teresbut juga menyinggung akan arti pentingnya keadilan sosial.

Sebagaimana dikatakan, dalam Repelita IV ini, kita harus mencurahkan perhatian kepada keadilan sosial di dalam berbagai segi kehidupan masyarakat disamping kita berusaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Juga harus mencurahkan perhatian yang lebih besar lagi terhadap pemerataan hasil-hasil pembangunan di segenap lapisan masyarakat.

Sedangkan Repelita IV yang baru kita selesaikan, kata Presiden merupakan kurun waktu yang penuh dengan tantangan dan ujian berat. Yaitu dimulai dengan terjadinya suasana perekonomian dunia yang penuh ketidak pastian dengan memberikan harapan yang tidak terlalu cerah. Kendati demikian, lanjut Presiden, pelaksanaan pembangunan kita tetap dalam tekad untuk terus berupaya keras meningkatkan taraf hidup rakyat. ''Selain dapat mengatasi hambatan, tantangan dan meningkatkan taraf hidup rakyat, kita telah mampu meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan berikutnya dengan kebulatan tekad sesuai dengan amanat GBHN,'' ujar Presiden.

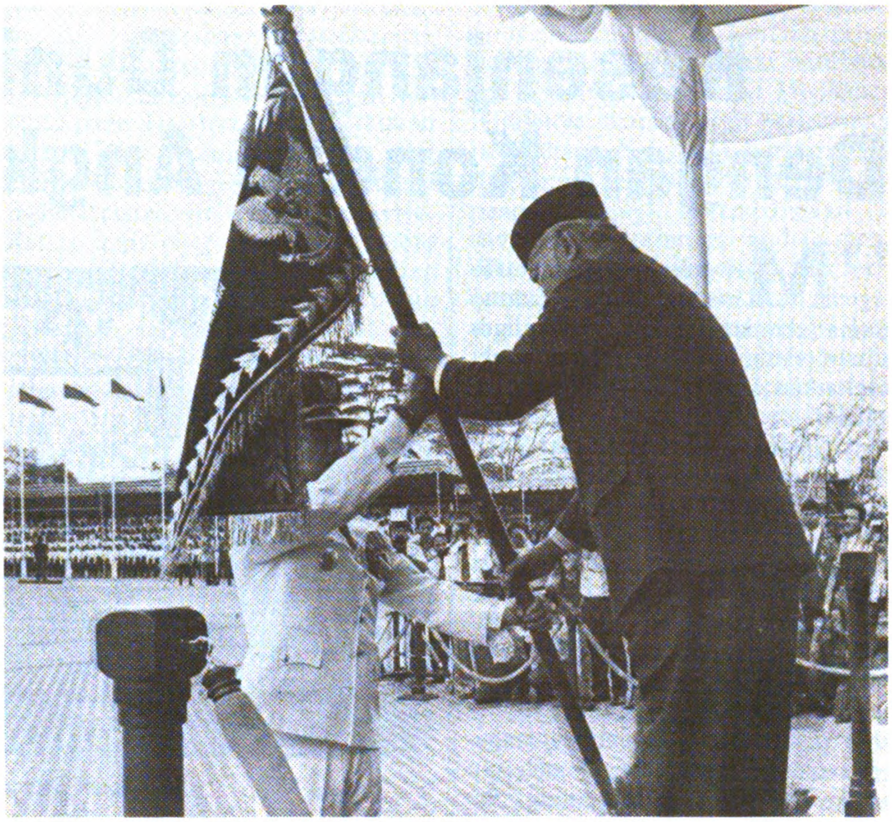

Presiden Soeharto meresmikan hasil pembangunan di Jawa Barat (Neg)

Sementara Presiden mengakui, bahwa keberhasilan pembangunan yang telah dicapai ini jelas tidak terlepas dari dan berkat kerja keras yang dilandasi rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya dari semua lapisan serta semua golongan masyarakat. Sehingga pada akhirnya Pelita IV yang lalu, kita telah mencapai kemajuan-kemajuan pembangunan. Hal ini terbukti, kata Presiden bahwa selama sebelas tahun terakhir ini tidak kurang dari 24 juta penduduk Indonesia telah terangkat tarap hidupnya dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, sebagai bangsa, kita mempunyai kekuatan dan mendapatkan momentum baru untuk memasuki tahap baru yang lebih maju dari pembangunan kita.

Dengan demikian, kata Presiden dalam garis naiknya gerak pembangunan secara nasional itu, maka propinsi Jawa Barat juga berhasil mencapai kemajuan-kemajuan yang membesarkan hati. Rakyat Jawa Barat dan kita semua juga gembira, karena telah berhasil melaksanakan Pelita IV yang penuh dengan berbagai tantangan. Namun, pinta Presiden, keberhasilan pembangunan ini jangan menjadikan kita puas diri. Rasa puas diri ini dapat mengendapkan semangat dan mengurangi kewaspadaan kita.

Dalam acara penuh warna dan semarak ini, dihadiri pula oleh tokoh mantan Wapres, Umar Wirahadikusumah, mantan Ketua DPR/MPR-RI Amirmachmud dan seluruh Bupati se Jawa Barat.☐ DT

Meninjau salah satu lokasi pembangunan di daerah Cilegon (Neg)

Digitized by Google

Kesenjangan Dunia Kerja Dengan Kondisi Angkatan Kerja

''Menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka perlu ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani...''. Demikian bunyi amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara seperti tersurat dalam bab Pola Umum Pelita V.

Peningkatan kualitas manusia yang sudah menjadi komitmen bangsa khususnya dalam pelaksanaan Pelita V itu dijadikan dasar bagi Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung untuk menyelenggarakan Seminar yang bertujuan melihat pemecahan masalah ketenagakerjaan di Indonesia sebagai salah satu langkah strategis yang penting. Seminar yang dilaksanakan akhir bulan Juli yang lalu dengan mengambil judul ''Pendekatan Psikologi dalam Menanggulangi Kesenjangan antara Dunia Kerja dengan Kondisi Angkatan Kerja di Indonesia'' itu menampilkan sejumlah penyaji antara lain Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara.

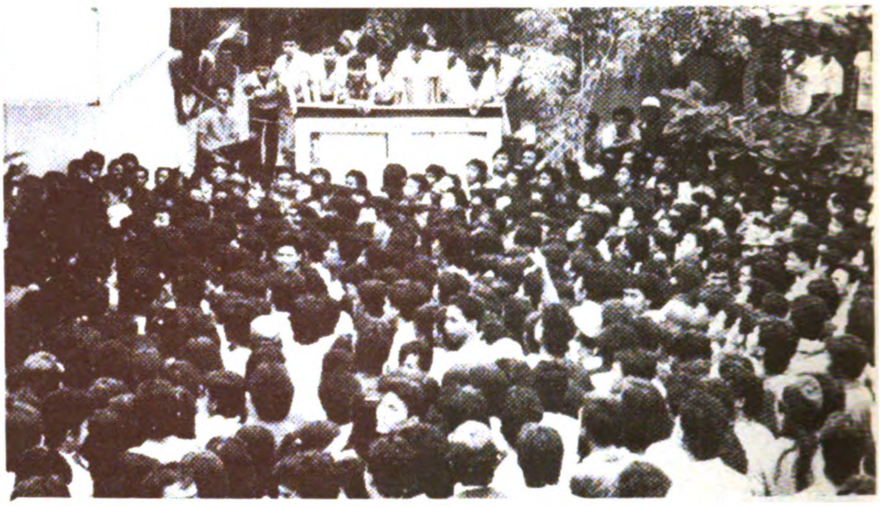

Dibutuhkan tenaga kerja siap pakai (TP)

Kualitas rendah

Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya dewasa ini merupakan petunjuk akan rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Menteri Tenaga Kerja dalam prasarannya di Bandung itu mengatakan bahwa masih ada sekitar 17,3 juta orang penduduk Indonesia dalam kelompok umur 10-44 tahun masih buta aksara. Sejumlah 34,5 juta atau 66,2% angkatan kerja Indonesia tidak tamat Sekolah Dasar. Menurut catatan di tahun 1985, angkatan kerja berpendidikan di atas SLTA yang mencakup Sarjana, Sarjana Muda, lulusan Diploma I dan II berjumlah hanya sekitar 841.000 orang atau 1,3% dari seluruh angkatan kerja.

Diakui oleh Mennaker bahwa masih terdapat kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Bursa tenaga kerja yang ada menunjukkan besarnya pencari kerja lulusan SLTA, Sarjana Muda dan Sarjana. Di satu pihak tingkat pendidikan di Indonesia pada umumnya rendah, tetapi di lain pihak tampak bahwa sebagian tenaga terdidik sukar memperoleh pekerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini Cosmas menyatakan perlunya perencanaan dunia pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja. Namun, tambahnya, betapapun pendidikan formal direncanakan, sangat sulit untuk mampu menyediakan tenaga yang otomatis cocok dengan dunia kerja. Dunia pendidikan umumnya memerlukan waktu yang relatif panjang sementara itu teknologi berubah dengan cepat. Dengan demikian, dunia pendidikan yang didisain cocok dengan teknologi sekarang ini, sekitar 5 tahun yang akan datang mungkin sudah ketinggalan jaman. Di samping itu sistem pendidikan yang demikian akan menjadi sangat mahal. Salah satu langkah untuk mengatasi kesenjangan itu adalah dengan peningkatan dan pengembangan latihan kerja.

Kondisi seperti itu dikonstatir oleh penyelenggara Seminar sebagai kesenjangan antara Dunia Kerja dengan potensi Angkatan Kerja. Dalam laporannya kepada para peserta Seminar, Ketua Penyelenggara Drs. Hatta Albanik mengemukakan, kesenjangan antara dunia kerja dan potensi angkatan kerja selama ini secara psikologis dianggap sesuatu yang harus terjadi dan wajar terjadi. Sebab, kondisi-kondisi psikologis yang terdapat dalam environment kerja dengan sendirinya akan menyebabkan terbentuknya suatu alam tertentu yang dikenal dengan 'dunia kerja'. Sementara alam di luarnya akan membentuk environmentnya sendiri pula, termasuk environment di mana potensi angkatan kerja itu berada. Kesenjangan itu akan makin lebar akibat perkembangan environment dalam dunia kerja itu sendiri yang berubah sedemikian rupa sehingga tak dapat diikuti oleh potensi angkatan kerjanya.

Staf pengajar Fakultas Psikologi UNPAD ini mengharapkan agar dari Seminar ini diperoleh masukan-masukan yang diperlukan bagi para ahli psikologi Indonesia dalam ikut serta memecahkan masalah ketenagakerjaan yang tidak terlepas dari muatan-muatan psikologis dan memerlukan *psychological handling* pula.

Kemampuan teknologis

Mennaker Cosmas Batubara dalam prasarannya lebih lanjut mengemukakan, kesiapan menghadapi kemajuan teknologi adalah kenyataan hidup yang harus diterima semua negara di dunia dewasa ini, dan merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan kemudahan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemajuan ilmu dan teknologi itu akan

Digitized by Google

mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat setiap negara termasuk Indonesia.

Negara-negara berkembang tentu sangat tertarik mengambil kemanfaatan kemajuan teknologi tersebut. Pengalaman menunjukkan, masuknya teknologi maju itu sering menimbulkan masalah-masalah baru, antara lain karena kelemahan dalam penerapan teknologi tersebut mempunyai dampak negatif terhadap perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, perubahan nilai-nilai dan kehidupan sosial. Menciptakan sendiri teknologi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat sering mengalami kesulitan karena keterbatasan dana dan kemampuan tenaga-tenaga ahli di bidang tersebut. Menteri menyebut Jepang sebagai negara yang berhasil dalam penerapan dan penciptaan teknologi. Dinilainya, keberhasilan Jepang itu terletak pada kemampuan sumber daya manusianya. Jepang bukan hanya menyesuaikan teknologi yang diimpornya dengan kondisi setempat, bahkan negara tersebut mampu meningkatkan teknologi impor itu menjadi lebih maju daripada aslinya. Dengan perkataan lain dapat disimpulkan, keberhasilan penerapan teknologi tinggi dan kemampuan menciptakannya akan sangat tergantung kepada tersedianya tenaga-tenaga ahli yang kreatif dan inovatif di bidang ilmu dan teknologi.

Strategi Penyediaan

Menghadapi tantangan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap dunia kerja itu perlu ditetapkan suatu strategi dalam penyediaan tenaga kerja. Mengenai hal ini Mennaker menuturkan bahwa strategi penyediaan tenaga kerja dilakukan melalui kebijaksanaan pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, jalur latihan kerja, dan jalur pengembangan melalui pengalaman di tempat kerja. Ketiga jalur pengembangan tersebut harus saling mendukung dan saling melengkapi. Untuk memasuki dunia pekerjaan, seorang lulusan dunia pendidikan perlu memahami persyaratan jabatan dan kondisi lingkungan kerja, serta penambahan kemampuan atau ketrampilan teknis melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program latihan baik secara formal di Balai Latihan Kerja maupun di perusahaan dalam bentuk on the job training atau magang. Dalam rangka ini Menteri menawarkan ide bahwa mungkin UNPAD dapat merintis suatu program kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perusahaan-perusahaan guna memberikan training kerja bagi para mahasiswa di perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga setelah lulus dari pendidikan formal para sarjana sudah lebih siap memasuki dunia kerja.

Dunia pendidikan berfungsi memproduksi tenaga-tenaga yang berkualitas untuk berbagai jenis dan tingkatan keahlian. Dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi menghasilkan sarjana-sarjana, tenaga-tenaga terpilih yang diharapkan menjadi dinamisator, motivator, inovator, dan penggerak pembangunan. Untuk itu dalam dunia pendidikan perlu dikembangkan sikap dan kemampuan profesionalisme. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang cepat, relevansi dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan perlu secara terus menerus disesuaikan dan ditingkatkan. Demikian Cosmas Batubara.

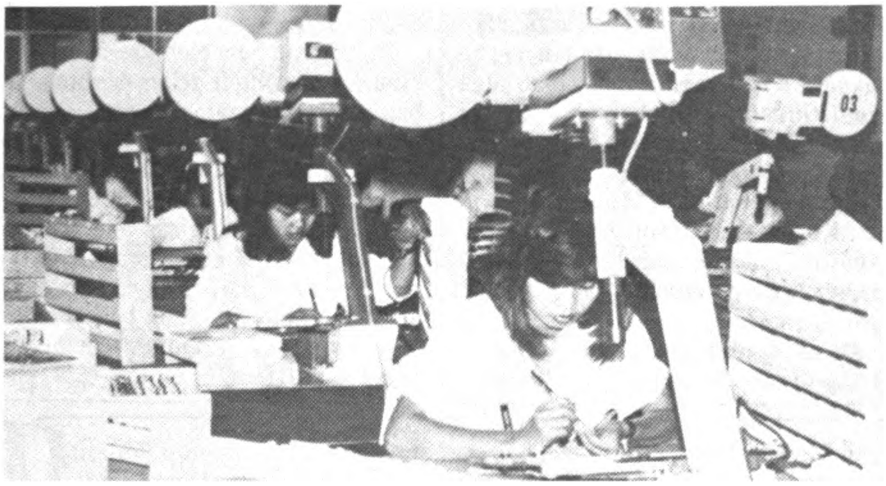

Tenaga ahli yang kreatif dan inovatif

Teknologi baru, lanjut Mennaker, umumnya diciptakan di perusahaan-perusahaan. Sebab itu, umpan balik dari dunia pekerjaan terhadap dunia pendidikan perlu dikembangkan. Di samping itu program latihan perlu dikembangkan bukan saja untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan, akan tetapi juga untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menyesuaikan ketrampilan karyawan terhadap perkembangan teknologi. Dalam hubungan ini Menteri mengatakan bahwa program latihan mempunyai dua sasaran yaitu tenaga-tenaga yang sudah bekerja dan tenaga-tenaga yang segera akan bekerja.

Makna kerja

Pada bagian akhir dari prasarannya di depan Seminar di UNPAD itu Menteri Tenaga Kerja menekankan pentingnya ditanamkan pengertian dan keyakinan pada setiap orang tentang makna dan fungsi kerja. Pertama, pekerjaan adalah sumber penghasilan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan seseorang. Orang yang menginginkan tingkat penghidupan yang lebih baik haruslah bersedia bekerja keras. Kedua, pekerjaan adalah suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan kesempatan berbakti. Melalui pekerjaan seseorang dapat berbuat sesuatu yang bernilai, yang selain bagi dirinya juga bermanfaat bagi anggota keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan bagi Tuhan Pencipta. Ketiga, pekerjaan adalah suatu karunia Tuhan yang harus disyukuri dan diterima dengan suka cita. Oleh sebab itu pekerjaan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keempat, pekerjaan menumbuhkan harga diri. Seorang penganggur akan kehilangan harga dirinya sebagai seorang yang belum mampu berbuat sesuatu.

Setiap pekerjaan yang produktif dan halal haruslah dihargai sebagai sumber penghasilan, kesempatan dan berkat. Sebab itu setiap orang harus menghargai pekerjaan sendiri serta menghargai orang lain dalam pekerjaannya. Setiap orang harus menghargai martabat orang lain, lepas dari pertimbangan halus kasarnya pekerjaan, jenis pekerjaan fisik atau pekerjaan non-fisik. Demikian Mennaker. □

(TAP)

Digitized by Google

Upaya HNSI Sejahterakan Warga Nelayan

Sugiharto, yang kini duduk sebagai anggota DPA, terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk periode 1989-1994 dalam Kongres II HNSI yang berlangsung di Jakarta, 29-31 Agustus lalu.

Ia terpilih bersama 15 personil pengurus lainnya dalam struktur pimpinan harian. Kelimabelas pengurus itu selengkapnya sebagai berikut: Drs Subiyakto, Drs Rabbul Bahari, Moh Soleiman, Djoko Aminoto MSc, Andi Hisbuldin Patunru, dan Pinantun Hutasoit. Sekjen Ir Suyoto Harjosutowo, didampingi wakil-wakil Sekjen, Ir. BS Tjokroperdoto, Ir Budi Harjanto, Ir Kodrat Ikasaputra, dan Drs Djimanto. Bendahara dijabat Drs AH Soetrisno dan Wakil-wakil Bendahara Ir Wibisono dan Ibnoe Hadjar.

Untuk periode 5 tahun mendatang, Kongres menetapkan 5 program umum yang akan dijabarkan dalam kegiatan organisasi. Kelima program itu ialah 1. pelestarian dan pengembangan sumber daya lautan, 2. peningkatan pendidikan dan latihan, 3. pemantapan dan pengembangan profesi, 4. pengembangan dan pembangunan desa pantai, dan 5. memasyarakatkan wawasan kelautan.

Ketua Umum HNSI Sugiharto menyatakan, HNSI akan selalu melindungi para nelayan, tetapi tidak dengan cara-cara yang bersifat agitatif. Diakuinya pembangunan melahirkan dilema, di satu pihak kemajuan pembangunan menghasilkan nilai tambah yang besar dibanding dengan usaha rakyat kecil, tetapi di lain pihak juga memerlukan pengorbanan. "Tetapi yang pasti, HNSI akan selalu berusaha melindungi para nelayan," katanya.

Kongres HNSI itu dibuka oleh Menteri Koperasi, Bustanil Arifin SH, 29 Agustus. Pada kesempatan itu Menteri menyampaikan amanat tertulis Presiden Soeharto.

Dalam amanatnya itu, Presiden Soeharto berpesan agar HNSI berusaha meningkatkan kemampuan jutaan nelayan untuk menjadi kekuatan pembangunan. HNSI harus berusaha meningkatkan kemampuan nelayan supaya taraf hidup mereka meningkat.

Presiden juga mengingatkan, pembangunan di bidang perikanan, tidak dapat dipikul sendiri oleh HNSI, karena mencakup bidang yang sangat luas. HNSI perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti kalangan cendekiawan, lembaga-lembaga penelitian, kalangan industri, dan dunia usaha, koperasi, perdagangan, serta aparatur pemerintah.

Diingatkan pula oleh Presiden, meskipun pemerintah telah berbuat sebaik-baiknya bagi nelayan, namun peningkatan kesejahteraan terletak pada kekuatan para nelayan sendiri. Bila secara sendiri-sendiri para nelayan akan tetap lemah, tetapi bila berhimpun dalam wadah organisasi yang baik, niscaya para nelayan itu akan menjadi gabungan yang berkekuatan besar bagi pembangunan, demikian Presiden.□ (Mdk/Sgt)

Jalan Genteng Hijau, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940
Telp. 512533 (4 saluran), 5204110

20 Oktober 1964 — 20 Oktober 1989

DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta turut serta berperan aktif di bidang pendidikan untuk menyukseskan Pelita V di dalam mengisi era tinggal landas.

Paguyuban Widyani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta

Digitized by Google

Senyum manis menghiasi wajah petinju Indonesia (BL)

Indonesia Raya Berkumandang 102 Kali di Malaysia

Duta-duta olahraga Indonesia di arena olahraga SEA Games XV 1989 Malaysia pulang ke tanah air dengan membawa nama harum bangsa dan negara. Karena, pada arena olahraga yang cukup bergengsi ini Kontingen Indonesia mampu mempertahankan predikat juara umum. Sebagaimana diketahui, ada beberapa cabang olahraga yang menurut catatan merupakan ladang perolehan medali emas bagi atlit-atlit Indonesia, namun diputuskan untuk tidak dipertandingkan dalam arena SEA Games XV ini.

Keberhasilan Kontingen Indonesia ini untuk menjadi juara umum tidak diperoleh dengan mudah, tetapi melalui perjuangan dan persaingan yang ketat antar kontingen negara-negara peserta seperti Thailand, Singapura, Philipina, Myanmar, Brunai Darussalam, Vietnam, Laos dan tuan rumah Malaysia. Hampir di setiap cabang olahraga yang dipertandingkan, atlit-atlit Indonesia mengalami suatu perjalanan yang tidak mulus. Terbukti ada atlit Indonesia yang masih belum mampu menunjukkan keperkasaannya dalam merebut satu medali.

Ketua Kontingen Indonesia Soeweno yang semula berwajah sedikit tegang saat melihat posisi Indonesia di hari kedua disusul tuan rumah Malaysia, namun setelah Indonesia memastikan diri keluar sebagai juara umum, ketegangan yang menyelimuti wajah Soeweno berganti menjadi kecerahan. Bahkan, Soeweno di depan para wartawan yang meliput kegiatan SEA Games menyatakan bahwa kita memang berhasil mempertahankan gelar juara umum. Namun persaingan di SEA Games ke XV kali ini telah memberi isyarat pada kita untuk lebih serius membina olahraga di masa mendatang.

Pekan olahraga paling akbar antar bangsa se Asia Tenggara yang berlangsung mulai 20 sampai 31 Agustus 1989 ini selain telah menciptakan rekor baru, juga diwarnai kejadian-kejadian yang membuat kecewa negara peserta. Kekecewaan itu lebih sering disebabkan oleh tindakan wasit dinilai kurang sportif dalam memimpin pertandingan. Salah satu contoh, di cabang olahraga tenis meja — atlit-atlit Indonesia mengundurkan diri ketika petenis meja Indonesia Rossy Syeh Abubakar melawan petenis meja tuan rumah karena selalu dirugikan ulah wasit yang memimpin pertandingan tersebut dan nota bene adalah wasit dari tuan rumah sendiri. Atas kejadian yang sangat merugikan ini, official tenis meja Indonesia melakukan protes dan tidak melanjutkan pertandingan. Adapun pemecahan rekor yang paling besar terdapat di cabang olahraga renang, dimana dari 31 nomor yang dipertandingkan telah pecah 24 rekor baru.

Mohon maaf

Sementara itu Indonesia dalam SEA Games XV ini mengirimkan atlit dan official dengan kekuatan 669 orang atlit. Hasilnya sangat memuaskan para pembina, pelatih, official dan masyarakat olahraga di tanah air. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu berbicara di tingkat Asia Tenggara dalam bidang olahraga. Dibalik kesuksesan ini ternyata masih ada sisi gelap bagi pembinaan cabang olahraga sepakbola yang kurang mujur nasibnya dalam mempertahankan gelar juara.

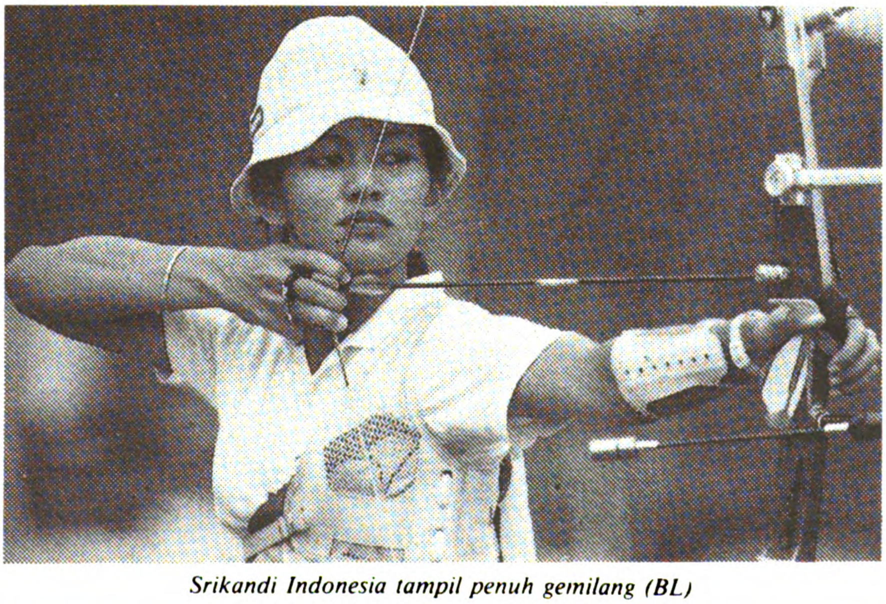

Srikandi Indonesia tampil penuh gemilang (BL)

Digitized by Google

Karena sepakbola yang diharapkan akan dapat menambah perbendaharaan medali, pada babak semifinal, kesebelasan Indonesia yang ditangani trio pelatih Basri, Iswadi Idris dan Abdul Kadir serta tim menejer Nirwan Bakrie digulung kesebelasan Singapura dengan skore 1-0. Dengan demikian kesebelasan Indonesia di babak berikutnya harus puas menduduki peringkat III dengan memperoleh medali perunggu setelah mengalahkan kesebelasan Thailand 9-8 melalui adu pinalti. Dengan kekalahan kesebelasan Indonesia yang tidak mampu menempatkan diri pada babak final tersebut otomatis sedikit mengurangi kemantapan Kontingen Indonesia dalam mempertahankan juara umum. Sebab, cabang sepakbola ini merupakan olahraga milik rakyat dan Nirwan Bakrie bersama trio pelatihnya sebagai penanggung jawab sukses tidaknya kesebelasan Indonesia secara kesatria memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegagalan kesebelasan Indonesia dalam mempertahankan gelar juara SEA Games.

Pada cabang olahraga lain yang tidak mampu memenuhi targetnya untuk menggondol medali emas dialami oleh tim tenis Indonesia. Ketua Umum Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Perti) Drs.Moerdiono juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena tim tenis Indonesia yang diperkuat pemain handalnya belum berhasil meraih lima medali emas. "Kegagalan ini disebabkan kondisi petenis berada dibawah form. Padahal, jika pemain dalam kondisi yang sebenarnya, target lima medali emas itu dapat dipenuhi," sambung Drs. Moerdiono.

Menggalang persatuan

Sebagaimana diketahui, pertama kali SEA Games digelarkan dengan nama SEAP Games di Bangkok 12-17 Desember 1959, arena untuk menadu prestasi dibidang olahraga ini mempunyai arti penting di dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa negara-negara di Asia Tenggara. Keterlibatan Indonesia dalam arena olahraga ini yang diselenggarakan dua tahun sekali pernah mengalami pasang surut dalam mempertahankan predikat juara umum, yaitu ketika SEA Games XIII Bangkok 1985, Indonesia hanya mampu menduduki urutan nomor dua dibawah tuan rumah Bangkok saat itu. Kepudaran keperkasaan duta-duta olahraga Indonesia di Bangkok itu bukan dikarenakan oleh prestasi sang atlit atau kurangnya pembinaan olahraga di tanah air, tapi bisa juga turun naiknya perolehan medali itu dikarenakan dan ditentukan oleh banyaknya nomor cabang olahraga yang dipertandingkan.

Petenis putri Indonesia mendulang tiga emas (BL)

Sedangkan pada SEA Games XV ini rincian medali yang dikumpulkan Kontingen Indonesia adalah sebagai berikut: anggar 7-2-3, angkat besi 6-3-1, atletik 10-12-6, bola basket 0-0-1, balap sepeda 4-3-3, bowling 0-0-2, binaraga 1-0-2, bulutangkis 6-5-1, dayung 4-0-0, golf 0-1-0, hoki 0-0-1, judo 10-2-1, karate 7-8-8, layar 0-1-1, loncat indah 3-3-2, menembak 5-5-1, panahan 4-2-1, polo air 0-0-1, renang 3-10-11, senam 7-7-5, sepakbola 0-0-1, pencak silat 10-2-1, taekwondo 2-4-6, sepak takraw 0-0-0, tenis 4-3-2, tenis meja 4-3-4, tinju 4-1-5 dan bola voli 1-1-0. Sedangkan data prestasi Kontingen Indonesia dalam beberapa arena SEA Games IX Kuala Lumpur tahun 1977: 62-41-34, SEA Games X Jakarta 1979: 92-78-52, SEA Games XI Manila 1981: 85-73-26, SEA Games XII Singapura 1983: 64-67-54, SEA Games XIII Bangkok 1985: 62-73-76, dan SEA Games XIV Jakarta 1987: 185-136-84.

Selanjutnya, setelah pesta SEA Games XV Kualalumpur ini ditutup resmi oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, diumumkan pula bahwa Philipina sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games XVI mendatang. Untuk masa dua tahun ini Kontingen Indonesia harus memikirkan sebaik mungkin, karena menurut rencana ada beberapa cabang olahraga yang dihapuskan untuk tidak dipertandingkan seperti hoki, pencak silat, senam ritmik, loncat indah dan dayung.

Daftar perolehan medali SEA Games XV Kuala Lumpur 1989 secara keseluruhan (**emas, perak, perunggu**):

1. Indonesia	102 - 78 - 70
2. Malaysia	67 - 58 - 75
3. Muangthai	62 - 63 - 66
4. Singapura	32 - 38 - 67
5. Philipina	26 - 37 - 64
6. Myanmar	10 - 14 - 20
7. Vietnam	3 - 11 - 5
8. Brunai Darussalam	1 - 2 - 24
9. Laos	0 - 1 - 0

(DT)

Digitized by Google

DPP Baru Hasil Muktamar PPP

Anggota DPR, H. Ismail Hassan Metareum SH terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode kepengurusan 1989-1994 dalam Muktamar II PPP yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 — 31 Agustus 1989 setelah mengalami perpanjangan satu hari dari jadwal semula karena tim formatur yang bertugas membentuk susunan pengurus DPP tidak dapat memenuhi jadwal waktu yang ditetapkan.

Terpilih sebagai Sekretaris Jendral yang mendampingi Ketua Umum, Matori Abdul Jalil, Wakil Ketua DPW Jawa Tengah, yang saat ini juga duduk sebagai anggota DPR.

Anggota susunan pengurus DPP PPP hasil Muktamar II selengkapnya sebagai berikut: Ketua Umum, Ismail Hassan Metareum SH, Ketua-ketua: H Hamzah Haz, Drs Mardinsyah, Ny. Safinah Oedin, H Asyori Syam, RMO Mahdi Tjokroaminoto, H Yudo Paripurno, Drussamin, dan H Zen Badjeber. Sekjen, Matori Abdul Jalil, dan wakil-wakil Sekjen terdiri atas 5 orang: Yusuf Syakir, Muh. Buang, Zarkasih Noor, Sjaiful Anwar Husein, dan Muhammad Dja'far Siddiq. Sebagai bendahara terpilih H Yanis Zahiruddin dengan wakil H Kiai Ali Demak.

Susunan pengurus DPP itu berhasil terbentuk setelah melalui proses sidang tim formatur yang berjalan "alot". Tim formatur yang dipilih dengan pemungutan suara secara langsung melalui sidang maraton yang dimulai 29 Agustus pukul 22.00 WIB hingga dinihari pukul 04.00 WIB, 30 Agustus. Ketujuh anggota tim formatur berikut suara yang mendukungnya adalah H Muchsin Bafadal (252 suara) dari Nusa Tenggara Barat, Sulaiman Fadli (245) dari DPW Jawa Timur, H Imam Sofwan (189) dari DPW Jawa Tengah, H Karmani SH (160) dari DPW Jawa Tengah, H Ismail Hassan Metareum SH (157) dari DPW DI Aceh, H Kadir Abas (146) dari DPW Riau, dan Dr H Jailani Naro (136) dari DPW Jakarta.

Tim formatur itu baru dapat menyelesaikan tugas setelah selama dua hari melewati sidang-sidangnya yang berlangsung seret, termasuk berkonsultasi dengan pemerintah, dalam hal ini Mendagri Rudini, dan Dirjen Sospol Depdagri, Hari Sugiman. Setelah melewati sehari dari jadwal yang ditetapkan, akhirnya formatur berhasil membentuk susunan pengurus. Ismail Hassan Metareum SH, tokoh PPP kelahiran desa Metareum, Sigli, Aceh 57 tahun lalu terpilih sebagai Ketua Umum. Tokoh yang mulai meniti karier politik melalui organisasi HMI dan pernah menjabat Ketua Umum PB HMI tahun 1962 itu selama ini menjadi anggota DPR, dan dalam organisasi, duduk dalam jajaran Ketua DPP. Sementara itu Sekjen yang baru, Matori Abdul Jalil, ayah dari 8 anak sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPW Jawa Tengah, dan duduk di Komisi APBN, DPR.

Menjadi Besar

Dengan pekikan takbir Allahu Akbar tiga kali ketika mengawali pidatonya, Ismail Hassan Metareum mengajak para muktamirin untuk bersyukur karena Muktamar II PPP berjalan secara demokratis.

Sebagai Ketua Umum, ia mengajak jajaran PPP untuk bersama-sama dengan satu tekad dan niat yang sama memperjuangkan agama Allah SWT, dan melaksanakan pembangunan bangsa dan negara.

Ia mengatakan, walaupun PPP merupakan partai yang kecil, tetapi ia menganggap partai itu besar. Meskipun tidak duduk dalam pemerintahan, PPP bukan partai oposisi. PPP akan melaksanakan Demokrasi Pancasila dan dalam melaksanakan tugasnya, PPP tidak akan melakukannya secara beroposisi, tetapi menegur yang salah dan membantu serta meluruskannya.

Ia juga berharap, seluruh warga PPP dapat menyalurkan pendapatnya lewat partai, dan selalu berusaha menciptakan suasana damai dan demokratis dalam partai. Ia berjanji akan bekerja untuk kemakmuran bangsa, untuk menyemarakkan demokrasi dan membangun masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Tentang dirinya ia mengatakan di depan peserta muktamar, "Apabila tindakan saya benar, ikutilah saya, tetapi jika tindakan itu salah, tegurlah saya". Kata-kata Ketua Umum yang akrab dipanggil dengan gelar "Buya" itu mengingatkan akan ucapan Khalifah Abu Bakar Shiddiq ketika dilantik menjadi khalifah pertama sesudah Nabi Muhammad SAW wafat.

Demokrasi Yang Sehat

Muktamar II PPP itu diawali dengan amanat Presiden Soeharto dalam acara pembukaan secara resmi di gedung Manggala Wana Bhakti, Senayan.

Dalam amanatnya itu, Kepala Negara menekankan pentingnya suasana demokrasi yang sehat dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik. Jika dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik berkembang suasana demokratis yang sehat, perkembangan kehidupan demokrasi dalam tubuh bangsa kita juga akan sehat. Sebaliknya, jika dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik tidak berkembang suasana demokrasi yang sehat, kehidupan demokrasi secara nasional juga akan mengalami hambatan, kata Presiden dalam amanatnya itu.

Presiden mengharapkan, agar perkembangan yang sehat dari kehidupan politik dan kehidupan demokrasi dapat dimantapkan dalam tahun-tahun terakhir pada saat kita merampungkan tugas sejarah yang besar, yakni menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama. Setelah itu, kita akan memasuki proses tinggal landas, kata Presiden.

Presiden juga berharap agar muktamar PPP, dan juga kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan umumnya, dapat menghasilkan program-program nyata yang memberikan sumbangan bagi kelancaran pembangunan di tahun-tahun yang akan datang.

Presiden juga berpesan agar kekuatan-kekuatan sospol melaksanakan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat bukan saja dilakukan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat kita yang sangat majemuk, tetapi juga dalam jajarannya sendiri masing-masing. Semangat kekeluargaan dan semangat kebersamaan yang merupakan semangat nasional perlu dikembangkan dalam tubuh kekuatan sospol, demikian Presiden.

Sementara itu, Wakil Presiden Sudharmono yang memberikan amanat pada penutupan Muktamar, berpesan agar seluruh jajaran PPP menjadikan suasana muktamar sebagai bahan

Digitized by Google

pengalaman untuk meningkatkan konsolidasi organisasi, sehingga PPP menjadi organisasi yang mantap, dan berbobot, serta dapat menumbuhkan kehidupan organisasi yang demokratis, terbuka, dan mampu mengedepankan program-program pembangunan yang mantap. Ia berharap pula agar PPP dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi politik dengan melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Muktamar itu, PPP juga menghasilkan pernyataan politik. Dalam pernyataan itu antara lain dikemukakan bahwa PPP sebagai organisasi kekuatan sosial politik bertekad untuk menyukseskan Pemilu 1992. PPP menyambut baik iktikad pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu.

Di bidang politik, PPP melihat bahwa perlu dihindarkan adanya pemusatan kekuasaan secara totalitas. Dalam hal ini PPP terus berjuang untuk menegakkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. PPP akan terus memperjuangkan keadilan, pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPP bertekad untuk terus berorientasi pada kepentingan rakyat dan dalam keikutsertaan membuat keputusan politik PPP akan berjuang seoptimal mungkin mencegah lahirnya keputusan-keputusan yang memberatkan kehidupan rakyat.□ (MK/Sgt)

KOMENTAR

Berpikir Nasional dan Bicara Emosional

Sebelum orang mau bicara tentang sesuatu, biasanya terlintas dibenaknya apa yang hendak dibicarakan. Ia lalu mulai berpikir tentang cara menyampaikan pikirannya itu dalam komunikasi verbal. Terkadang dalam benak kerangka pikir itu belum tertata rapih. Masih terjadi silang pikir, yang lahir sebagai hasil gejolak emosional tanpa menempatkan masalah itu pada proporsi sebenarnya.

Tetapi kadangkala gejolak emosi yang ada dalam benak itu mampu dikendalikan sehingga menghasilkan bicara-bicara rasional. Pengendalian itu akan nampak ketika orang mulai bicara. Dalam bicara, nampak kerangka pikir tersebut sudah disusun berdasarkan kaidah-kaidah normatif yang didukung oleh pirasa-pirasa etis. Sehingga ucapan-ucapannya terlontar tanpa emosi.

Kendati pada mulanya ada gejolak emosional, tetapi tingkat kematangan dan kedewasaan berpikir, mampu meredam gejolak tersebut untuk menterjemahkannya kedalam pikiran rasional yang akan dilontarkan melalui bicara.

Tentu tidak semua orang mampu meredam gejolak emosional itu dan menterjemahkannya secara rasional kedalam bicara-bicara dengan komunikan. Kadangkala, kematangan dan kedewasaan berpikir seseorang juga tak mampu meredam emosi-emosi itu. Jadi tidak semua orang yang matang dan dewasa dalam berpikir punya kemampuan untuk meredam gejolak emosi dalam benaknya.

Begitu persoalan manusia. Kesehariannya sering membuat dia menjadi emosional. Karena tak mampu menghadapi realisme sosial yang ada dan berkembang disekitarnya. Sulit memang, menemukan orang dengan kemampuan meredam dan mengendalikan gejolak emosi secara obyektif sekaligus. Terkadang ia mampu berpikir rasional, tetapi tak mau bicara tanpa emosi. Soalnya, waktu bicara beberapa faktor muncul.

Saat itu faktor prestise, wibawa, status dan kepangkatan selalu mempengaruhi ucapan-ucapan yang hendak dilontarkan. Orang ketika hendak bicara, terpikir olehnya dalam kapasitas apa ia bicara, siapa lawan bicara dan bagaimana pengaruh ucapannya terhadap prestise, kewibawaan serta status kepangkatannya. Disini ia lalu mengatur bicaranya.

Karena bicara-bicaranya harus dapat melindungi dan menjaga harkat, martabat serta wibawa dari pada status kepangkatan yang melekat pada dirinya. Untuk itu diperlukan kemampuan dan kebijakkan orang dalam berbicara. Kematangan dan kedewasaan bersikap tindak menjadi penting disini. Sedikit saja tergelincir dalam bicara, martabat dan kewibawaan itu akan tak lagi dihargai komunikan apa lagi lawan bicaranya.

DR. Jaelani Naro, mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1988 lalu, mengatakan bahwa tampilnya dia sebagai calon Wakil Presiden adalah pencerminan daripada kehidupan demokrasi di negeri ini. Bulan Agustus lalu dia tergusur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, juga melalui suatu proses demokratis. Dia harus menerima keputusan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang tak memilihnya lagi sebagai Ketua Umum melalui suatu proses yang "demokratis" pula.

Wajar sekali, tidak terpilihnya Naro kembali sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dia menuntut agar demokrasi ditegakkan, karenanya keputusan formatur yang dianggap "demokratis" itu, harus juga diterimanya dengan penuh kebesaran jiwa.

Naro nampaknya saat itu tak bisa bicara apa-apa, karena memang tak ada lagi yang bisa dikatakan. Kalau saja masih ada kemungkinan untuk dia bicara, pasti dia akan mempertahankan martabat dan kehormatannya serta kewibawaannya, apapun dan bagaimanapun caranya. Saat itu mungkin sekali Naro akan menjadi sangat emosional, tak lagi rasional. Dia berpikir radikal dan bicara emosional. Soalnya yang dibicarakan adalah status kepangkatan yang erat kaitannya dengan prestise dia. Rasionya tak mampu lagi mengendalikan emosi personal yang amat egoistis itu. Kendati dia seorang pemimpin tertinggi Partai Politik yang bisa dikatagorikan sebagai negarawan.

Jadi rasanya kematangan dan kedewasaan berpikir seseorang belum menjamin orang itu tak bisa emosional. Justru terkadang mereka yang tergolong disini, adalah orang-orang yang paling peka terhadap kritik sehingga membuat mereka sangat mudah tergelincir menjadi emosional. Mereka bukan tak bisa berpikir rasional, juga bukan tak pernah bicara emosional. Justru merekalah orang-orang yang tingkat berpikir rasionalnya cukup tinggi. Tapi juga kemungkinan menjadi sangat emosional selalu ada pada orang-orang seperti ini. Apalagi jika menyinggung soal-soal yang berkaitan erat dengan status dan kewibawaannya.****

Digitized by Google

Sekitar KTT-IX Gerakan Non Blok

Hubungan Ekonomi Internasional Dijadikan Prioritas

Presiden Soeharto awal September yang lalu berangkat ke Yugoslavia untuk memimpin delegasi RI dalam Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok yang diselenggarakan di Beograd. Keberangkatan Kepala Negara kali ini merupakan suatu peristiwa yang khusus, karena sudah hampir 20 tahun sejak KTT Non-Blok di Lusaka, Zambia tahun 1970 yang lalu Presien Soeharto tidak pernah menghadiri KTT Non Blok yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali itu. Selama ketidakhadirannya itu delegasi Indonesia pada KTT-KTT Non-Blok dipimpin oleh Wakil Presiden RI.

Keaktifan Indonesia pada Gerakan Non-Blok merupakan salah satu dari rangkaian pelaksanaan program Politik Luar Negeri yang bebas aktif, yang juga menjadi perwujudan dari semangat Dasa-Sila Bandung yang tercetuskan dalam Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.

Gerakan Non-Blok (GNB) didirikan pada tahun 1961 sebagai reaksi atas polarisasi dunia akibat perang dingin antara blok Amerika Serikat dan Rusia. Indonesia adalah salah satu arsitek dan pendiri Gerakan Non-Blok bersama-sama dengan Yugoslavia, Mesir, India dan Ghana. GNB yang pada kelahirannya hanya beranggota 25 negara, kini telah berkembang dan memiliki keanggotaan dari 102 negara di dunia yang mewakili sekitar dua pertiga jumlah penduduk dunia. Negara terakhir yang menjadi anggota adalah Venezuela dari Amerika Latin.

Dalam KTT yang ke IX yang diselenggarakan di Beograd kali ini tercatat hadir 60 kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan yang lain mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh tingkat menteri dari negara anggota Gerakan Non Blok.

Perekonomian Internasional

Dalam pidatonya di depan forum Sidang KTT-IX Gerakan Non-Blok pada tanggal 5 September yang lalu Presiden Soeharto menekankan pentingnya diprioritaskan pembahasan pada masalah pembangunan negara-negara berkembang dan hubungan ekonomi internasional.

Presiden menilai bahwa angin pembaruan sedang bertiup di gelanggang ekonomi dunia. Perubahan-perubahan itu disamping mengandung peluang baru juga tantangan baru bagi kepentingan bersama GNB. Kemajuan-kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengubah drastis pola-pola lama di bidang produksi dan hubungan internasional membuka kemungkinan baru bagi tercapainya kesejahteraan yang lebih merata antara semua negara dalam suatu perekonomian internasional yang semakin berintegrasi.

Namun perkembangan itu juga dapat berdampak negatif terhadap keunggulan daya saing negara-negara berkembang dan terhadap gagasan pembagian kerja internasional. Oleh Presiden dikemukakan tentang timbulnya pusat-pusat kekuatan ekonomi baru yang lebih mempertegas ciri multi-polaritas dalam perekonomian dunia. Kenyataan ini dibarengi pula dengan munculnya berbagai blok persekutuan ekonomi baru di antara negara-negara maju.

Presiden Soeharto menyesalkan bahwa perubahan-perubahan penting itu sebagian besar hanya menguntungkan negara-negara maju. Sedangkan mayoritas negara-negara berkembang masih tetap terbelenggu dalam keterbelakangan struktural, di mana nilai tukar perdagangannya semakin merosot, dan perekonomiannya bukannya maju bahkan semakin mundur.

Bagai gayung bersambut, penekanan terhadap masalah ekonomi dunia ini diungkapkan pula oleh Presiden Yugoslavia Dr. Janez Drnovsek dalam pidato pembukaan KTT selaku Ketua GNB periode 1989-1992. Dikatakannya bahwa mengingat masalah-masalah ekonomi semakin bertambah menentukan kehidupan masyarakat dunia, maka perhatian besar kita berikan terhadap penyelesaiannya. Prioritas dalam hal ini menurut Drnovcek adalah penciptaan sarana-sarana untuk pembangunan ekonomi dan teknologi yang lebih berimbang dari semua negara. Pembangunan negara-negara berkembang yang lebih cepat disertai pemanfaatan maksimal kemampuan intern mereka, memerlukan juga bantuan masyarakat internasional, terutama dari negara-negara yang paling maju.

Pidato Presiden Soeharto menggugah negara-negara anggota GNB (Neg)

Krisis Utang LN

Krisis utang luar negeri yang menjadi lebih parah lagi disebabkan oleh fluktuasi dalam nilai tukar mata uang utama, menurut Presiden Soeharto kini telah mencapai tingkat yang sungguh genting.

Aliran dana bantuan bagi pembangunan, baik yang bersifat resmi maupun komersial nampak terus men-

Digitized by Google

Kedatangan Presiden Soeharto di Beograd sebagai angin segar (Neg)

ciut dan bahkan telah mengakibatkan terjadinya arus balik dalam aliran dana ke negara-negara maju. Ekspor negara-negara berkembang ke negara-negara industri masih tetap menghadapi berbagai rintangan proteksionis. Pasaran dan harga-harga bahan mentah termasuk minyak dan gas bumi masih belum sepenuhnya pulih setelah dilanda kemerosotan harga dan kelesuan selama sekian tahun.

Akibatnya, demikian Presiden, kesenjangan sosial ekonomi antara negara maju dan negara berkembang terus melebar, dan kemiskinan masih tetap merupakan kenyataan pahit di pelbagai kawasan dunia.

Presiden Soeharto membenarkan bahwa sejumlah negara berkembang betapapun menghadapi kesulitan telah berhasil juga mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dan terus mencatat pertumbuhan dalam ekonominya. Juga benar bahwa perundingan perdagangan dalam rangka Putaran Uruguay kini telah menunjukkan prospek keberhasilan yang lebih besar bagi tercapainya suatu sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dan adil. Dengan mulai beroperasinya Dana Bersama, timbul harapan bahwa harga-harga bahan mentah akan menjadi lebih stabil, pada tingkatan harga yang lebih menguntungkan. Bahkan dalam masalah hutang pun mulai terlihat sikap yang lebih melentur pada negara-negara pemberi bantuan yang besar.

Namun demikian jika ditinjau dari gambaran seluruhnya akan tampak dengan jelas tantangan-tantangan historis yang kini dihadapkan oleh kegiatan-kegiatan baru, baik politis maupun ekonomi dalam rangka dunia yang sedang berubah sedemikian cepatnya.

Presiden menilai, pada tahapan penting perkembangan internasional dewasa ini GNB terpanggil untuk tepat pada waktunya memberi tanggapan yang memadai terhadap peluang maupun tantangan yang terkandung dalam perkembangan tersebut. Hal ini tidak hanya menuntut tindakan penyesuaian yang dinamis terhadap kondisi-kondisi serta kebutuhan baru, tetapi juga terhadap sikap pendekatan dan sistem kerja yang lebih efisien dalam tata cara GNB kedalam.

Menanggapi masalah hutang luar negeri yang menjadi beban negara-negara berkembang, Ketua Sidang KTT IX Dr. Drnovcek mengatakan dalam pidatonya bahwa terpusatnya rasa tidak bisa dipertahankannya lagi kedudukan dewasa ini dari negara-negara berkembang dan tercederanya sistem hubungan ekonomi internasional telah terlihat timbul dalam krisis utang yang sudah hampir sepuluh tahun memeras perekonomian dan masyarakat sejumlah besar negara-negara berkembang. Sehubungan itu Presiden Yugoslavia ini menyambut prakarsa yang merupakan evolusi pengertian para pemberi bantuan mengenai masalah-masalah yang berukuran kritis dan perlunya kegiatan bersama untuk penyelesaiannya.

Utara — Selatan

Presiden Soeharto menilai masih terjadi ketidakadilan dan ketimpangan mencolok dalam hubungan Utara-Selatan.

Perekonomian negara-negara maju dan negara-negara berkembang belum pernah saling terkait seerat seperti sekarang ini. Tatanan ekonomi internasional yang kini berlaku telah terbukti tidak mampu menanggulangi masalah-masalah pembangunan global. Kedua fakta ini membuktikan bahwa pemulihan ekonomi di Utara tidak mungkin dimantapkan jika tidak dibarengi oleh pertumbuhan ekonomi di Selatan. Selanjutnya kedua fakta itu menunjukkan betapa perlunya dialog Utara-Selatan dihidupkan lagi, dan betapa pentingnya multilateralisme serta pendekatan global terhadap masalah ekonomi global diperkuat, ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden Soeharto menyatakan keyakinan Indonesia bahwa bagaimanapun besar perbedaannya di antara mereka, negara-negara maju dan negara-negara berkembang sama-sama berkepentingan akan adanya suatu sistem perdagangan dan moneter dunia yang lebih terbuka, lebih mantap dan adil bagi semua. Sama-sama berkepentingan akan harga bahan mental yang stabil, sama-sama berkepentingan untuk suatu penyelesaian yang menyeluruh dan langgeng terhadap krisis utang, melalui pendekatan yang berorientasikan pembangunan dan bertumpu pada pengurangan beban utang maupun penyediaan arus keuangan baru dalam jumlah yang memadai.

Karena itu, menurut Presiden, keabsahan tujuan-tujuan pokok seperti terkandung dalam gagasan Tata Ekonomi Internasional Baru tidak dapat diragukan. Cara dan gaya perundingan kita mencapai tujuan-tujuan tersebut mungkin perlu dirubah dan lebih mendasarkan pada kebersamaan dalam kepentingan antara Utara-Selatan dan pada tuntutan saling ketergantungan yang sejati.

Presiden Soeharto juga mengatakan sama pentingnya pula untuk mengarahkan segala upaya dan potensi ekonomi bersama guna meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan. Kerja sama antara negara-negara berkembang penting pula dalam rangka memperkuat posisi bersama di meja perundingan Utara-Selatan.

Lingkungan Hidup

Salah satu hal yang menarik pula untuk dicatat dari pidato Presiden Soeharto pada KTT-X Gerakan Non Blok itu adalah ditekankannya perlunya perhatian bersama terhadap masalah lingkungan hidup. Menurut Presiden, GNB tidak bisa bersikap acuh

Digitized by Google

tak acuh mengenai masalah-masalah baru seperti pelestarian lingkungan hidup. Ancaman kerusakan lingkungan hidup yang tak terkendalikan lagi melalui peningkatan polusi, menipisnya ozon, perubahan cuaca dunia, penggundulan hutan dan sebab-sebab lain, telah mencuat menjadi mata acara utama agenda dunia. Sebagai suatu masalah yang menyangkut hari depan bersama, bahkan kelangsungan hidup seluruh umat manusia, maka penting sekali penanganannya tetap berdasarkan atas solidaritas antara semua negara.

Menurut Presiden, perlu dicegah jangan sampai masalah ini menjadi pokok pertikaian baru antara Utara dan Selatan. Ini berarti perlu dibina suatu kerja sama multilateral yang efektif, termasuk dana-dana tambahan, guna memajukan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga dengan demikian pertumbuah ekonomi dan kemajuan sosial dapat terus terjamin tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi-generasi berikutnya.

Pertikaian

Presiden Soeharto menilai bahwa pertemuan internasional di Paris mengenai masalah Kamboja bulan Juli yang lalu tidak dapat dikatakan gagal seluruhnya, karena perundingan selama sebulan itu masih mencatat kemajuan. Tetapi patut disayangkan bahwa konperensi Paris itu belum menghasilkan penyelesaian politik yang menyeluruh terhadap konflik Kamboja. Menurut Kepala Negara, tampaknya situasi dan kondisi serta kemauan politik pihak-pihak yang langsung terlibat masih belum memadai. Sebab itu diputuskan untuk tidak menutup Konperensi, tetapi menundanya agar dapat dihidupkan kembali bila keadaan sudah matang untuk itu. Indonesia sebagai salah satu Ketua Bersama Konferensi Paris, bertekad untuk meneruskan upayanya dalam memberi sumbangan bagi tercapainya perdamaian yang adil di Kamboja.

Mengenai kemelut di Afghanistan bersamaan dengan penarikan mundur pasukan Uni Soviet dari negeri itu, Kepala Negara menyatakan bahwa pemulihan kedaulatan, kemerdekaan dan status non-blok Afghanistan hanya bisa tercapai jika semua pihak secara jujur dan cermat melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian Geneva.

Presiden Soeharto juga menyambut baik penghentian tembak menembak dan permulaan perundingan damai antara Iran-Irak.

Berbicara mengenai situasi di Timur Tengah, Presiden RI menilai bahwa perjuangan Intifada sebagai penjelmaan semangat dan tekad bangsa Palestina yang tak terpatahkan, khususnya para remajanya di daerah-daerah pendudukan untuk merebut kembali kemerdekaannya, telah menampilkan suatu dimensi baru yang sangat penting dalam konflik Arab-Israel. Namun walaupun pimpinan rakyat Palestina di bawah Presiden Yasser Arafat telah mengambil keputusan dan bertindak sedemikian jauh, jalan menuju Konferensi Perdamaian mengenai Timur Tengah tetap terhambat oleh sikap keras kepala Israel serta maksud-maksud agresif dan ekspansionis terhadap kawasan Timur Tengah itu. Dalam hubungan ini Presiden Soeharto menyerukan bahwa pada taraf yang menentukan sekarang ini GNB perlu terus mendesak agar Konferensi Perdamaian di Timur Tengah itu diselenggarakan secepat mungkin. Konperensi merupakan satu-satunya kerangka perundingan yang tepat dan dapat mencakup semua unsur penting bagi suatu penyelesaian yang adil.

Terhadap pertikaian di Lebanon, Kepala Negara menyatakan keprihatinannya. Pemerintah Indonesia sepenuhnya mendukung usaha Komite Tiga Kepala Negara Liga Arab untuk menghentikan konfrontasi bersenjata dan penderitaan rakyat Lebanon serta mengupayakan kerukunan nasional. Sementara itu Indonesia akan tetap teguh mendukung tuntutan sah Lebanon agar seluruh pasukan pendudukan Israel segera ditarik keluar wilayahnya.

Mengenai perkembangan di Afrika, Presiden Soeharto menilai situasi di Namibia sekarang sebagai permulaan babak akhir sejarah kolonialisme di Afrika. Kemerdekaan Namibia yang diambang pintu dan merupakan puncak kemenangan bagi gerakan pembebasan nasional rakyat Namibia dibawah pimpinan SWAPO itu membesarkan hati kita. Akan tetapi sangat merisaukan bahwa Afrika Selatan masih bersikap membangkang terhadap berbagai aspek penting dalam pelaksanaan Rencana Kemerdekaan Namibia seperti tertera dalam Resolusi Dewan Keamanan No. 435. Dalam kaitan pelaksanaan Resolusi PBB itu Indonesia merasa gembira dapat ikut menyumbang secara nyata melalui partisipasi Kontingen Kepolisian RI dalam rangka Kelompok Perbantuan Sementara PBB di Namibia.

Perjuangan Afrika untuk mencapai kebebasan penuh belum selesai selama rakyat Afrika Selatan masih tetap tertindas di bawah regim minoritas rasial yang menerapkan sistem apartheid yang dikutuk oleh seluruh dunia. Gerakan Non-Blok tetap bertekad untuk merombak satu-satunya sistem rasialisme yang telah melembaga itu, agar kemudian dapat dibangun suatu masyarakat non-rasial dan demokratis di Afrika Selatan. Demikian Presiden Soeharto.

Siapa Penyelenggara KTT-X?

Siapa yang akan menjadi tuan rumah KTT-X Gerakan Non-Blok menjadi pusat perhatian pula dalam KTT-IX di Beograd yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 7 September itu. Dua negara mengajukan diri untuk menjadi penyelenggara KTT X Gerakan Non Blok tahun 1992 yang akan datang, masing-masing adalah Indonesia dan Nicaragua. Keduanya bahkan sudah mencalonkan dirinya sejak KTT ke VIII di Harare, Zimbabwe tahun 1986, untuk menjadi tuan rumah KTT IX

Delegasi Indonesia dalam sidang KTT-IX GNB (Neg)

Digitized by Google

1989. Namun karena kedua-duanya tetap bersikeras tidak ada yang mau mundur, akhirnya malah dipilih alternatif lain yaitu Yugoslavia sebagaimana yang kita lihat sekarang sebagai tuan rumah KTT-IX di Beograd.

Keinginan Indonesia sebenarnya memang pantas dan masuk di akal, karena Indonesia merupakan negara sponsor berdirinya GNB. Kepeloporan Indonesia itu oleh presiden Zimbabwe Robert Mugabe diingatkan kembali kepada froum KTT-IX di Beograd dengan mengungkapkan nama-nama tokoh Tito (Yugoslavia), Soekarno (Indonesia), Nehru (India), Gamal Abdul Nasser (Mesir), dan Kwame Nkrumah (Ghana) sebagai orang-orang yang telah berjasa membentuk GNB hingga dapat berkembang seperti yang ada sekarang ini. Keinginan RI untuk menjadi pimpinan GNB adalah cukup wajar, karena sebagai pendiri hingga kini belum pernah penyelenggarakan dan menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non Blok. Diberitakan bahwa Yugoslavia dalam KTT ke IX juga mendukung pencalonan Indonesia itu.

Walhasil, karena kedua negara baik Indonesia maupun Nicaragua tetap mencalonkan diri, akhirnya oleh Sidang KTT IX diputuskan untuk menugaskan kepada Konperensi Tingkat Menlu yang akan diselenggarakan di Ghana tahun 1991 guna menentukan siapa yang terpilih menjadi tuan rumah KTT X sekaligus menjadi Ketua GNB periode berikutnya. Akan terpilihkah Indonesia? Marilah kita nantikan bersama.

Keputusan-Keputusan

Selain itu Sidang KTT-IX GNB di Beograd tercatat menghasilkan Keputusan yang berupa Deklarasi yang disertai dengan Dokumen Politik dan Ekonomi.

Merupakan suatu hal yang menarik bahwa melalui Dokumen Politik itu GNB menyambut baik penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM) ke I dan II yang diadakan pada bulan Juni 1988 dan Februari 1989, yang dinilai telah memberikan sumbangan yang berarti bagi penyelesaian masalah Kamboja. Sementara Konperensi Paris di bulan Juli 1989 disebutkan telah mencapai kemajuan dalam menguraikan secara luas berbagai unsur yang perlu untuk mencari penyelesaian, kendati tidak berhasil mencapai penyelesaian secara menyeluruh. Sidang mendesak kepada semua pihak termasuk GNB khususnya Komite Kampuchea untuk melanjutkan usaha membantu mencari penyelesaian secara damai atas masalah Kamboja dan menciptakan perdamaian, kemerdekaan dan netralitas di kawasan itu.

Terhadap masalah Korea, Dokumen Politik menyebutkan dukungan GNB atas penyatuan dua Korea melalui dialog Utara-Selatan tanpa campur tangan asing.

Dokumen berisi pula dukungan terhadap Negara Palestina untuk menjadi anggota penuh GNB, dan menyerukan kepada semua pihak baik anggota maupun bukan anggota GNB agar mengakui negara merdeka Palestina dan membuka hubungan diplomatik dengannya.

Deklarasi menyatakan kesetiakawanan penuh dengan rakyat Lebanon dan menegaskan dukungan penuh untuk mencapai kesatuan, kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon yang tidak berpihak, melalui dialog-dialog tanpa campur tangan dan tekanan dari pihak luar.

Deklarasi juga menuntut pelaksanaan penuh resolusi-resolusi PBB agar pasukan Israel segera mengundurkan diri tanpa syarat dari seluruh wilayah Lebanon.

Dinyatakan pula dukungan penuh terhadap upaya penentuan nasib sendiri dan suatu transisi menuju kemerdekaan Kaledonia Baru.

Terhadap masalah Namibia, KTT IX menegaskan pengukuhannya atas Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 435 yang merupakan satu-satunya basis internasional yang dapat diterima bagi penyelesaian secara damai masalah kemerdekaan Namibia. Pemilu yang rasialis di Afrika Selatan dikutuk dan dinyatakan tidak sah. Diserukan agar pemerintah rasialis Afrika Selatan segera menghentikan tindakan represif terhadap rakyat Afrika Selatan.

Deklarasi mengukuhkan kembali sikap KTT VII dan VIII yang berisikan dukungan terhadap hak rakyat Afganistan untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri.

GNB melalui KTT ke IX juga menyatakan kepuasannya atas keputusan Iran dan Irak melakukan gencatan senjata sejak 20 Agustus 1988 dan mengadakan pembicaraan langsung di bawah Sekjen PBB untuk mencari jalan penyelesaian yang adil dan terhormat. Untuk itu GNB menyatakan keinginan dan kesiapan untuk secara aktif mendukung Sekjen PBB dalam usaha penyelesaian konflik Iran-Irak.

Diserukan pula kepada semua negara untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional, untuk menahan diri dari kegiatan mengorganisir, membantu atau ikut dalam kegiatan terorisme. Semua kegiatan terorisme baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun oleh negara adalah terkutuk.

Perlunya kerja sama di bidang ekonomi di antara negara-negara berkembang dinyatakan pula oleh Deklarasi. Dikemukakan di dalamnya bahwa utang luar negeri negara-negara berkembang yang melebihi 1.320 milyar dollar AS merupakan rintangan bagi negara-negara berkembang dalam pembangunan sosial ekonominya.

Pelestarian lingkungan hidup juga mendapat perhatian dalam Deklarasi. Dinyatakan keprihatinan atas perusakan lingkungan hidup yang terjadi, dan dicanangkan kesiapan negara-negara berkembang untuk menggiatkan dan meningkatkan kerja sama internasional guna mencegah perusakan lingkungan yang lebih jauh dan mengganggu keseimbangan ekologi secara global.

Santap Pagi

Di tengah-tengah kesibukan Sidang KTT IX di Beograd, Presiden Soeharto yang didampingi oleh Menlu Ali Alatas dan Mensesneg Moerdiono memanfaatkan waktu yang terluang untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pimpinan delegasi negara-negara peserta yang lain, guna membahas masalah-masalah bersama serta mempererat persahabatan.Di antaranya adalah menghadiri acara santap pagi bersama 11 kepala negara/pemerintahan yakni Presiden Peru (pemrakarsa), Presiden RI, Presiden Venezuela, Argentina, Aljazair, Nigeria, Senegal, Mesir, Zimbabwe, Yugoslavia dan India. Dalam santap pagi itu Presiden Soeharto menyampaikan pandangannya tentang masalah dialog Utara-Selatan dan kerjasama Selatan-Selatan. Selain itu Kepala Negara juga mengadakan pertemuan-pertemuan khusus yang bersifat bilateral masing-masing dengan Presiden Aljazair, Mesir, Venezuela, Emir Kuwait, Presiden Vietnam, Nigeria, Argentina dan Palestina.

Sebelum meninggalkan Beograd dan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Moskwa, Presiden Soeharto sempat mengadakan acara tatap muka dengan warga RI di Yugoslavia bertempat di KBRI Beograd.□ (TAP)

Digitized by Google

Jalan Panjang Menuju Kemerdekaan Namibia

Setelah melalui berbagai rintangan dan hambatan akhirnya pada tahun 1988 di New York, tercapai dua persetujuan bersejarah bagi masa depan Namibia.

Persetujuan yang ditandatangani di Markas Besar PBB itu masing-masing mengenai pemberian kemerdekaan Namibia oleh Afrika Selatan dan penarikan 50.000 pasukan Kuba dari Angola.

Persetujuan yang dicapai di Brazaville antara Afrika Selatan, Angola dan Kuba, yang ditengahi Amerika Serikat, akan mengikat Afrika Selatan dalam suatu persetujuan internasional.

Berdasarkan resolusi-resolusi PBB tentang Namibia yang selama ini tidak digubris Afrika Selatan, ketiga pihak setuju mengambil langkah perdamaian Namibia, dalam empat tahap.

Pertama, sampai tanggal 1 April 1989, Kuba akan menarik 3.000 dari 50.000 pasukannya yang ditempatkan di Angola untuk membantu pemerintah Marxis memerangi pemberontak UNITA yang didukung Amerika Serikat;

Kedua, Resolusi DK PBB nomor 435 mulai berlaku tanggal 1 April 1989. Pasukan Perdamaian PBB ditugaskan untuk mengawasi pemilihan Majelis Konstituante Namibia. Kuba melanjutkan penarikan pasukannya yang pada 1 November 1989 akan mencapai separoh (25.000 personil). Sisanya ditarik ke sebelah utara jalan kereta api Benguela;

Ketiga, pemilihan Majelis Konstituante dilakukan 1 November. Kemerdekaan penuh bagi Namibia dicapai dengan pengesahan Konstituante oleh anggota majelis itu yang dipilih beberapa bulan kemudian.

Keempat, menjelang tanggal 1 Juli 1991, seluruh pasukan Kuba ditarik dari Angola.

Untuk mengawasi peralihan kemerdekaan kepada Namibia yang dulunya bernama Afrika Barat Daya itu, PBB menempatkan 4.650 pasukan, 1.000 polisi dan ratusan pejabat sipil dari berbagai negara anggota, termasuk Indonesia. Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar mengatakan, jika PBB berhasil melaksanakan misi perdamaiannya dan menyelenggarakan pemilihan yang 100 persen demokratis di Namibia, maka itu akan merupakan prestasi paling gemilang bagi badan dunia itu.

"Yang perlu kita berikan saat ini adalah jaminan kepada para pemilih bahwa mereka bebas memberikan suaranya demi masa depan Namibia," katanya.

Jika pelaksanaan pemilihan untuk menentukan masa depan dan kemerdekaan Namibia itu berjalan mulus, tidak mustahil peranan PBB di Afrika bagian Selatan ini kembali mendapat penghargaan internasional seperti yang diraihnya tahun lalu atas prestasi diplomatiknya lewat Pasukan Penjaga Perdamaian di Timur Tengah, yaitu hadiah Nobel bagi Perdamaian.

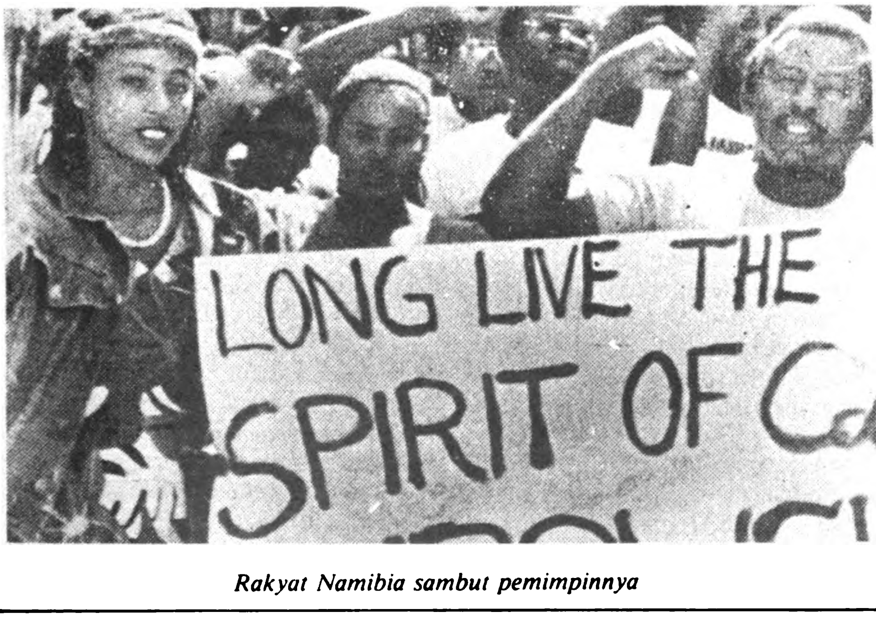

Rakyat Namibia sambut pemimpinnya

Jalan Panjang

Selama 63 tahun terakhir, Namibia berada dalam kungkungan dominasi kolonial AFrika Selatan. Kaum rasialis secara yuridis menindas penduduk kulit hitam di negeri itu. Tujuan politik Afrika Selatan ialah memelihara dominasi bidang ekonomi dan politik di Namibia dengan jalan membentuk pemerintahan boneka.

Negeri yang sebelumnya bernama Afrika Barat Daya itu antara tahun 1884 sampai 1915 merupakan protektorat Jerman. Kemudian pada tahun 1915 diserahkan kepada Afrika Selatan.

Nama "Namibia" diresmikan oleh Majelis Umum PBB Mei 1968. PBB juga menetapkan "Hari Namibia" pada tanggal 26 Agustus. Hari itu merupakan peringatan tahunan bagi negara-negara anggota PBB dan siapa saja yang berkepentingan, untuk memperbaharui dukungan bagi perjuangan rakyat Namibia mencapai penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan nasional.

Peringatan tersebut sesuai dengan sebuah keputusan yang diambil Majelis Umum PBB bulan Desember 1973.

Sebelumnya, PBB telah melakukan serangkaian diplomasi dalam mendukung kemerdekaan Namibia. Pada tahun 1967, PBB mencabut mandat Afrika Selatan untuk melakukan pemerintahan di Namibia. Kemudian dibentuklah suatu badan PBB Urusan Namibia, yang mendapat wewenang hukum untuk memerintah di negeri itu dalam masa peralihan. Akan tetapi, dengan dukungan Barat terutama Amerika Serikat, Afrika Selatan tidak mengijinkan utusan PBB masuk Namibia.

Dengan demikian, Namibia tetap berada di dalam kungkungan kolonial yang bertentangan dengan Piagam PBB, asas-asas maupun bertentangan dengan hukum internasional.

Pada tahun 1987, Afrika Selatan memperlunak sikapnya dan mengijinkan perutusan PBB masuk Namibia. Tapi, Kepala Administrasi Dewan PBB untuk Namibia, Bernt Carlson, tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya di Namibia. Dengan terpaksa ia melakukan kegiatannya di luar Namibia, terutama dalam program

Digitized by Google

persiapan menyambut kemerdekaan Namibia.

Namun, menjelang penandatanganan dua persetujuan di Markas Besar PBB New York itu, Carlson tewas dalam kecelakaan pesawat Pan-Am yang jatuh di Skotlandia dalam perjalanannya dari Inggris ke Amerika Serikat bersama 258 penumpang termasuk awak pesawatnya. Dengan demikian, Carlson tidak dapat menyaksikan rakyat Namibia merdeka.

Rakyat Namibia setelah melihat upaya perdamaian dalam mencapai kemerdekaan lewat PBB gagal, lalu membentuk gerakan perlawanan yang diberi nama Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya (SWAPO). Organisasi yang dipimpin Sam Nujoma ini merupakan organisasi yang diakui PBB sebagai satu-satunya wakil dari Namibia. Dan mengutuk Afrika Selatan yang tetap menolak untuk menarik diri dari wilayah tersebut.

Khawatir terhadap pengaruh SWAPO yang terus meningkat di kawasan Rakyat Namibia, rezim Pretoria lalu bertindak membabi buta. Misalnya dengan menggunakan kekerasan senjata menumpas organisasi yang diakui PBB, menjebloskan para pimpinannya ke dalam penjara.

Organisasi yang diakui PBB ini merasa tidak aman dalam bergerak di Namibia, maka gerakan organisasi tersebut menyingkir ke negara tetangganya, yaitu Angola. Dan selama ini, negara tersebutlah yang membantu berbagai aktivitas gerakan organisasi SWAPO itu.

Perjuangan yang dilakukan SWAPO ini mendapat sambutan di kalangan Internasional. Namun, Afrika Selatan semakin nekat selain menggempur SWAPO, acapkali juga melancarkan agresi terhadap Angola. Alasannya untuk mencari dan mengejar gerilyawan SWAPO yang melarikan diri ke negara tersebut.

Dari data sejak tahun 1976, rezim Pretoria melakukan sekitar 1.500 kali profokasi militer ke Angola. Selain itu, Afrika Selatan juga membantu pemberontak UNITA pimpinan Jones Sabimbi yang didukung Amerika Serikat.

Itulah sebabnya, Kuba kemudian mengirimkan sekitar 50.000 pasukannya ke Angola untuk membantu negara itu untuk menghadapi pemberontakan UNITA maupun agresi Afrika Selatan.

Dengan latar belakang inilah, maka dua persetujuan tentang perdamaian Namibia dengan melibatkan Afrika Selatan, Angola dan Kuba, sementara Amerika Serikat bertindak sebagai penengah.

Sam Nujoma kembali ke negaranya

Apartheid

Untuk memperkuat cengkeramannya terhadap Namibia, Afrika Selatan memberlakukan apartheid (politik perbedaan warna kulit).

Kesewenang-wenangan Afrika Selatan itu telah dikutuk masyarakat internasional, tapi rezim Pretoria tak perduli, karena negara ini mendapat dukungan kuat dari negara Barat terutama Amerika Serikat.

Gerakan Non Blok dalam setiap KTT-nya selalu mempermasalahkan apartheid. Demikian pula PBB. Indonesia, sebagai anggota Komite Khusus PBB menentang apartheid dan juga anggota Dewan PBB untuk Namibia, merupakan pendukung yang tangguh bagi tujuan perjuangan rakyat Namibia.

Politik apartheid secara resmi diberlakukan di Afrika Selatan, ketika Partai Nasional pimpinan Daniel Francois Malan, meraih kemenangan gemilang dalam pemilu Afrika Selatan tahun 1948. Sejak itulah, sampai Partai Nasional berkuasa di bawah pimpinan Presiden Botha dan kini dilimpahkan kepada de Clerk, sistem yang dikutuk masyarakat internasional ini tetap berlaku di Afrika Selatan termasuk Namibia.

Secara fakta, apartheid adalah kekuasaan sewenang-wenang 4,8 juta masyarakat minoritas kulit putih atas sekitar 25 juta masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Demikian pula halnya dengan Namibia.

Untuk memecah belah Namibia, penduduk kulit hitam dipecah belah atas dasar ras dan etnis. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor AG tanggal 24 April 1980, penduduk Namibia dibagi atas 11 ras dan etnis.

Afrika Selatan juga membagi Namibia menjadi tiga wilayah. Pertama, sepanjang perbatasan dengan Angola. Di zona ini berdiam separo penduduk negeri itu. Yang kedua, ke sebelah selatan zona pertama. Di zona ini terdapat tanah garapan yang paling subur, yang direbut oleh petani kulit putih. Para petani ini dapat berdinas di pasukan-pasukan pengawalan, se-

Digitized by Google

dangkan pesawat-pesawat sipil milik mereka dapat melakukan penerbangan pengintaian. Zona ketiga, pangkalan militer dan pelabuhan laut di Walvis Bay. Walvis Bay adalah satu-satunya pelabuhan di Namibia yang dapat disinggahi kapal-kapal laut berukuran besar.

Di zona ini berdinas sekitar 2.500 personil AD, AL dan AU Afrika Selatan. Mereka adalah bagian dari sekitar 100.000 personil militer yang ditempatkan di wilayah ini ditambah lagi 100.000 polisi.

Dengan berbagai dalih, rezim Pretoria tetap ngotot untuk berkuasa di Namibia. Mengapa?

Pretoria banyak menerima kredit dari bank-bank Inggris dan Jerman Barat. Sebagai imbalannya, negara ini memberikan keleluasaan kepada modal asing. Investasi modal AS dan negara-negara Barat lainnya di Amerika Selatan berjumlah puluhan miliar dolar. Modal itu di tanam dalam berbagai jenis perusahaan tambang potensial. Logam-logam strategis yang mereka tambang di Namibia sangat dibutuhkan industri militer Barat khususnya Amerika Serikat seperti titan, chrom, mangan, vanadium, dan platina.

Karena itu, dapat difahami, beberapa negara Barat tertentu enggan memberlakukan embargo perdagangan terhadap Afrika Selatan ketika PBB memberlakukannya beberapa tahun lalu, termasuk sanksi terhadap negara rasialis ini.

Dewasa ini di Namibia beroperasi sekitar 300 buah perusahaan Afrika Selatan maupun Barat, yang tanpa mengindahkan keputusan PBB untuk melindungi kekayaan nasional negeri itu, terus menguras sumber alam Namibia.

Akibatnya, meski memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, Namibia disaat menjelang kemerdekaan lewat pemilu 1 November 1989, tetap terkebelakang dengan perekonomian di bawah pengendalian rezim Pretoria.

Afrika Selatan tampaknya belum rela sepenuhnya angkat kaki dari bumi Namibia. Buktinya, ketika permulaan proses alih kekuasaan diberlakukan 1 April 1989, rezim Pretoria dengan berbagai dalih berupaya merintangi pemulihan keamanan dengan melakukan penghadangan terhadap pasukan gerilya SWAPO yang memasuki Namibia dari garis perbatasan Angola. Akibatnya pecah bentrokan berdarah yang meminta korban ratusan jiwa di pihak SWAPO maupun pasukan Afrika Selatan. Tapi situasi itu berhasil diatasi pasukan perdamaian.

Kini, semua mata tertuju kepada proses pemilihan umum mendatang yang diharapkan tanpa rintangan untuk mewujudkan impian rakyat Namibia bagi kemerdekaan negerinya. Fajar kemerdekaan itu telah menyingsing.☐ TG

GOLONGAN KARYA

TURUT BERDUKA CITA

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya beserta seluruh warganya menyatakan turut berduka cita atas wafatnya;

DRS HA LATIEF MUSTOFA

Sekretaris DPD GOLKAR DKI

Semoga arwah almarhum diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kekuatan Iman. Amin.

DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA

Ketua Umum
Wahono

Sekretaris Jenderal
Rachmat Witoelar

Digitized by Google

Oleh: Arbi Sanit

Identitas Pemuda Pelopor Bagi Masa Depan Politik Indonesia

Dengan patokan bahwa pemuda adalah penduduk yang berusia di antara 14 sampai 34 tahun, maka porsinya terhadap penduduk adalah 33,7% dalam tahun 1985 (BPS, 1987: 34-35). Selain dari porsi yang besar itu, komposisi tenaga kerja menunjukkan pula besarnya peran pemuda di dalam masyarakat. Dalam tahun 1986, tercatat bahwa porsi pemuda di antara segenap penduduk yang bekerja yakni sebanyak 68.338.187 orang adalah sebesar 48,3% (BPS, 1987:42-43).

Dalam kehidupan politik yang antara lain diperlihatkan oleh Pemilu, peran pemuda memberikan andil yang besar sebagaimana digambarkan oleh porsi mereka sebagai pemilih dan aktivis lapangan dari masing-masing kontestan. Apalagi jika dilihat sebagai pengemban kehidupan politik masa depan, peran itu semakin terasa. Setidaknya, potensi pemuda untuk kelanjutan dan pengembangan kehidupan politik di masa depan menjadi ukuran untuk mengenali peran pemuda di masa depan.

Sungguhpun begitu, keberhasilan pemuda masa kini untuk menunaikan tugasnya di masa depan, amatlah ditentukan oleh kesepadanan kesiapan mereka dengan permasalahan dasar yang dihadapinya di masa depan. Semakin matang pengetahuan dan pengalaman mereka tentang cita-cita dan kehidupan politik, semakin mampu dan mandiri mereka menghadapi permasalahan politik di masa depan.

Masalahnya ialah, memadaikah persiapan pemuda untuk menjadi pelopor masa depan? Cukupkah pengetahuan mereka tentang cita-cita politik dan pola kehidupan politik bangsa yang akan menjadi sumber pemikiran dan dasar budaya politik mereka untuk menghadapi masa depan? Apakah penghayatan mereka terhadap kehidupan politik dewasa ini menghasilkan keseimbangan di antara idealisme dan realisme politis dalam persepsi dan sikap politik mereka di masa depan? Adakah pembentukan kepribadian pemuda dewasa ini cukup andal untuk menghasilkan pemuda yang mampu bereaksi secara inovatif terhadap masalah yang nantinya akan mereka hadapi? Akankah mereka mempunyai kecenderungan bereaksi secara klise dengan cenderung mengikuti pola reaksi para pendahulu mereka?

Pengenalan kepeloporan pemuda dalam menghadapi masa depan politik Indonesia, pertama kali dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan kepeloporan mereka. Setidaknya diketahui empat macam tolok ukur untuk mengetahui kemampuan dimaksudkan, yaitu: a) sikap yang tertangkap dalam tatanilai atau ideologi yang mereka anut, b) pemahaman mereka terhadap permasalahan bangsa, c) kemampuan mereka berorganisasi, dan d) kemampuan mereka berkomunikasi dengan masyarakat bangsa itu sendiri. Kedua, kepeloporan pemuda masa depan, dapat pula diketahui melalui tingkat proses regenerasi yang mereka alami. Artinya, kadar keterlibatan mereka di dalam proses sirkulasi peran kemasyarakatan dan politik antar generasi yang menjuruskan mereka kepada kemandirian politik, merupakan alat ukur pula untuk mengenali kepeloporan pemuda di masa depan.

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok di atas dengan jalan memanfaatkan kedua kelompok tolok ukur kepeloporan pemuda tersebut, maka studi ini memusatkan perhatian kepada trand kepeloporan pemuda di Indonesia, tantangan politik yang akan dihadapi Indonesia di tahun 1990-an, dan identitas pemuda pelopor yang diperlukan untuk menghadapi kondisi masa depan itu.

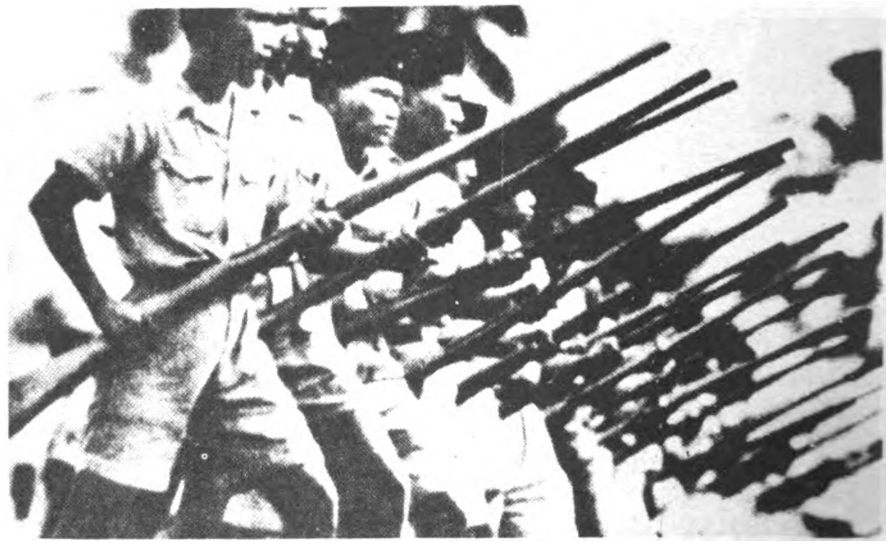

Persiapan pemuda untuk menjadi pelopor di jaman revolusi phisik

Perkembangan Kepeloporan Pemuda

Di masa pergerakan kemerdekaan, dominasi pemuda dalam politik tidaklah terbantah. Mayoritas pemuka pergerakan kemerdekaan adalah pemuda. Sukarno, Hatta, Sjahrir untuk hanya menyebut beberapa nama, adalah pemuda yang menampilkan peranan mereka di dalam pergerakan kemerdekaan. Pada saat generasi pemuda pelopor kemerdekaan itu telah menjadi dewasa menjelang Perang Dunia ke II, generasi baru pemuda tampil mendampingi mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Pemuda generasi Adam Malik menunjukkan gejala itu pada waktu mereka tampil di gelanggang perjuangan kemerdekaan, menyongsong proklamasi kemerdekaan dengan gaya yang menantang dalam bentuk menyayangkan kelambanan bertindak generasi politisi pendahulunya *(Anderson, Java in a Time of Regolution).'*

Digitized by Google

Di masa revolusi pisik pemuda memasuki segenap wahana perjuangan kemerdekaan, mulai dari barisan kesehatan sampai kepada pejuang bersenjata. Pemuda mempertaruhkan keamanan dirinya untuk menyertai revolusi pisik. Pemuda bertugas sebagai prajurit dan komandan tempur.

Selama 20 tahun pertama kemerdekaan, peran pemuda memang tidak lagi sedominan masa-masa sebelumnya. Kepeloporannya bukan lagi ditampilkan sebagai pemuka dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, akan tetapi menjadi sumber kekuatan bagi elit politik pengemban tugas nasional. Pemuda menjadi kader partai dan kekuatan politik lainnya. Masyumi, PSI, PNI dan segenap partai lainnya mengandalkan pemuda sebagai kadernya. Begitu pula deorganisasi-organisasi bianaan TNI/AD seperti KOSGORO, SOKSI, MKGR, dan yang lainnya. Dalam statusnya sebagai kader, pemuda mempelopori gerakan massa untuk mendukung ataupun menantang kebijaksanaan negara (pemerintah) yang dihasilkan oleh kekuatan politik formal tersebut di atas. Kedalam kepeloporan itu, termasuk pula peran pemuda dalam melaksanakan perubahan masyarakat seperti penerapan UUPA, pengamanan masyarakat dari kekuatan pengacau keamanan, perjuangan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, dan sebagainya. Di dalam proses perubahan Orla ke Orba, tidak terbantah peran pemuda di garis depan perjuangan politik.

Berbeda dengan masa sebelumnya, dalam seperempat abad kedua kemerdekaan ini, kesempatan bagi peran pemuda diarahkan ke dalam proses pembangunan. Karena itu kepeloporan mereka juga diharapkan berkembang ke arah itu. Namun begitu, karena peran generasi terdahulu adalah dominan, maka peran pemuda lebih terarah kepada pelaksanaan pembangunan. Generasi tua mendominasi posisi politik dan pembuatan kebijaksanaan negara/pemerintahan. Akan tetapi, ada suatu hal yang perlu dicatat, yakni peran pemuda yang otonom dalam bidang pembangunan yang tidak menjadi pusat perhatian generasi terdahulu dan pemerintah. Dalam hal ini pemuda telah menunjukkan kepeloporannya untuk membantu golongan masyarakat lemah mengatasi problemanya. Perhatikanlah kepeloporan pemuda dalam gerakan LSM sejak awal tahun 1970-an. Begitu pula dengan peran pemuda memberikan kritik kepada proses pembangunan, sebagaimana ditampilkan dalam peristiwa Malari tahun 1974 dan gerakan-gerakan lainnya. Lalu perlu pula dicatat peran pemuda dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat lemah yang menjadi korban pembangunan, seperti di lingkungan bendungan Kedung-ombo dan berbagai permasalahan tanah.

Pergeseran peran umum pemuda tersebut di atas, terbukti pula secara spesifik menurut aspek-aspek analisis kepeloporan pemuda yang telah dikemukakan dalam bahagian terdahulu. Sekalipun jauh lebih pasif dari masa pergerakan kemerdekaan, peran pemuda dalam pengembangan ideologi masih terkait kepada dukungan kepada salah satu dari berbagai ideologi yang saling bersaing di Indonesia. Dengan jalan itu, keterlibatan pemuda dalam kehidupan ideologi tetap tampil. Tapi akhir-akhir ini, keterlibatan tersebut menjadi semakin terbatas karena mereka lebih menjadi objek ideologi ketimbang pelakunya. Di samping itu, pemuda jauh dari kesempatan untuk memberikan penafsiran ideologi sebab tugas itu sudah menjadi monopoli generasi terdahulu melalui penguasaan mereka terhadap lembaga pengembangan ideologi Pancasila.

Sekalipun diwakili oleh sebagian kecil pemuda, terutama mereka yang berkecimpung di dalam berbagai kelompok studi dan LSM serta beberapa Ormas pemuda, pemuda telah meningkatkan kemampuan mereka memahami permasalahan masyarakatnya. Malah mereka telah terbiasa dengan pemikiran alternatif untuk mengatasi berbagai masalah masyarakat dan kenegaraan. Sekalipun begitu, mereka juga menyadari kesesuaian pemikiran alternatif tersebut dengan realitas Indonesia. Yang menjadi masalah dalam kaitannya dengan kemampuan pengenalan masalah masyarakat dan politik ini ialah relatif kecilnya lingkungan pemuda yang melibatkan diri secara intens. Sebagian besar pemuda lebih terlibat dengan permasalahan yang dihadapinya sendiri secara langsung. Misalnya masalah kesempatan mengembangkan karier di dalam sistem yang sedang berproses.

Berbeda dengan pengalaman mereka memahami permasalahan bangsa, pengalaman mereka berorganisasi tampaknya tertinggal jauh di belakang. Memang organisasi pemuda berkembang dalam artian struktural. Akan tetapi fungsionalisasi organisasi itu dihambat oleh berbagai kebijaksanaan yang berpangkal kepada usaha untuk memelihara stabilitas politik. Melalui UU keormasan, ideologi, kepemimpinan dan kegiatan organisasi pemuda diletakkan di bawah pengawasan dan pembinaan pemerintah. Malah melalui KNPI diupayakan pengarahan pemuda di bawah satu wadah sentral. Amat disayangkan bahwa keseluruhan kegiatan organisasi pemuda dipisahkan dari kehidupan

Pemuda bertugas sebagai prajurit dan komandan tempur (Neg)

Digitized by Google

Aktivitas organisasi pemuda

politik. Organisasi itu berkesempatan luas untuk mengadakan kegiatan sosial dan budaya, tapi diarahkan supaya tidak terlibat di dalam proses politik. Kalaupun organisasi pemuda bergiat di dalam proses politik, hal itu lebih dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penguasa.

Kurang terlibatnya pemuda dalam proses politik menyebabkan mereka kurang berpengalaman untuk berkomunikasi secara mendalam dengan masyarakat luas. Pemuda dalam LSM adalah sekelompok kecil dari mereka yang mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Akan tetapi lingkupnya adalah terbatas pada warga masyarakat yang menjadi sasaran upaya LSM itu sendiri. Itulah sebabnya maka pemuda tidak mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara massal dengan masyarakat.

Mandegnya sirkulasi elit menyebabkan pemuda memasuki proses regenerasi secara amat terbatas dan lambat. Pemuda yang berkesempatan memasuki lingkaran elit secara terbatas itupun adalah mereka yang berkemampuan menyesuaikan diri secara tuntas terhadap tatanilai dan kepentingan elit dewasa ini. Adalah pemuda yang benar-benar dipercaya akan meneruskan nilai para pendahulunya yang lolos dari saringan para penguasa untuk dijadikan partner. Pemuda yang berkemampuan tinggi sekalipun tidak akan diterima oleh elit, jika tidak lolos dari ujian loyalitas. Logika kebijaksanaan itu mungkin dapat dimengerti jika dilihat secara sempit, yakni dari segi kesinambungan kehidupan bangsa. Tapi jika dilihat dari segi perubahan, maka tidaklah beralasan pertimbangan elit untuk menerima pemuda dalam kalangan mereka.

Permasalahan Masa Depan Bangsa

Baik secara ekonomi maupun politis, ada dua permasalahan masa depan bangsa yang menonjol yakni pertama adalah peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dan kedua ialah peningkatan peran daerah. Melemahnya sumber dana dan kemampuan pemerintah pusat untuk menggali dana secara sendiri sejak akhir tahun 1970-an, menyebabkannya lebih mengandalkan peran masyarakat dan daerah.

Akan tetapi upaya itu semakin memerlukan keterlibatan masyarakat dan daerah di dalam proses kebijaksanaan, mulai dari menggagaskan dan memutuskan sampai kepada melaksanakan dan mengawasinya. Dengan itu diharapkan kegairahan masyarakat dan daerah mengumpulkan dana pembangunan di satu pihak, dan mengawasi jalannya pembangunan di lain pihak, dapat ditingkatkan.

Identitas Pemuda Pelopor Masa Depan Politik

Sesungguhnya diperlukan jiwa dan kegiatan kepeloporan untuk menghadapi masalah bangsa di masa depan. Sebab amatlah banyak perubahan yang diperlukan, sehingga permasalahan itu tidak menjadi beban proses perkembangan bangsa.

Karena pemuda adalah salah satu sektor masyarakat yang berpotensi besar untuk menghadapi masalah masa depan, maka diperlukan kesiapan mereka mulai dari saat ini. Sejalan dengan aspek analisis kepeloporan pemuda, maka pemuda yang siap untuk menghadapi masa depan Indonesia dengan sendirinya perlu memenuhi persyaratan ideologis, kemampuan memahami masalah masyarakat dan negara, kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, dan berpengalaman dalam kehidupan politik masa kini.

Persyaratan ideologi bagi pemuda pelopor ialah mampunya mereka menterjemahkan keinginan bangsa yang tertuang dalam ideologi negara ke dalam program dan kegiatan politik. Untuk itu pemuda perlu paham betul tentang seluk beluk ideologi

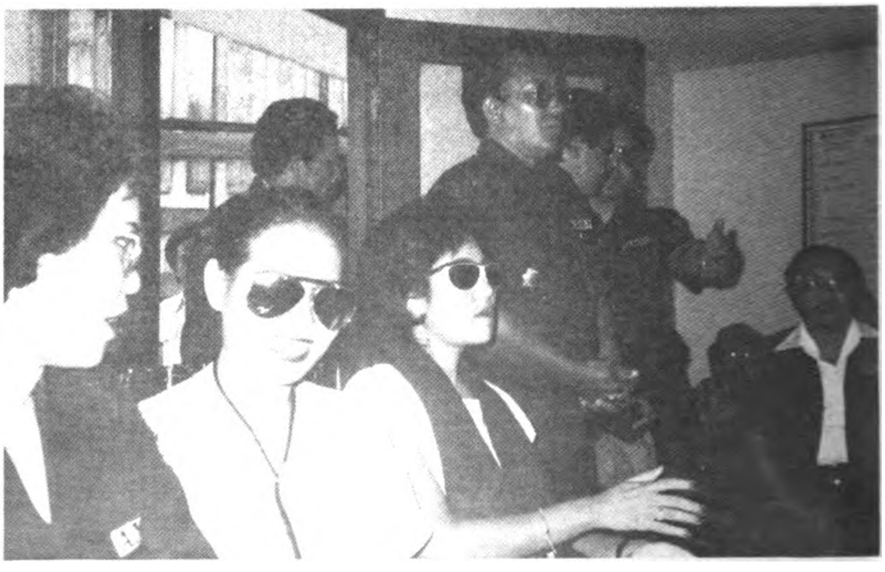

Pemuda pelopor harus mampu menerjemahkan keinginan bangsa

Digitized by Google

seperti sejarah, fungsi, substansi dan pengembangan ideologi. Untuk sampai kepada hal itu mereka perlu menguasai berbagai ideologi dan pemikiran politik yang ada di dunia dan di dalam tradisi masyarakat Indonesia, di samping menguasai kehidupan bangsa sendiri. Keseluruhan pemahaman itu adalah bahan untuk menterjemahkan ideologi ke dalam kegiatan. Dan pemahaman yang luas itu diperlukan pula bagi pengembangan ideologi Pancasila yang masih sederhana dan terbatas kemampuannya itu.

Sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu, hanya sebagian kecil pemuda yang berkemampuan memahami kehidupan bangsa serta permasalahannya secara baik dan kritis. Sebagian besar pemuda asyik dengan permasalahannya sendiri. Sebahagian lagi memahami masyarakat secara tidak kritis. Karena permasalahan bangsa masa depan adalah kompleks dan banyak berbeda dengan permasalahan masa kini, maka hanya pemuda yang memahami masalah bangsa secara kritislah yang berkemampuan memberikan perannya sesuai dengan kebutuhan masa depan bangsa.

Oleh karena perkembangan masyarakat dan permasalahan yang semakin kompleks maka diperlukan kemampuan pengelolaan dari para pemimpin yang semakin canggih untuk menyelesaikannya. Jika pemuda hendak berperan mengatasi permasalahan seperti itu, maka dituntut kemampuan berorganisasi yang canggih dari mereka. Kemampuan itu, bukan saja untuk mengefektifkan proses politik, akan tetapi sekaligus harus pula memprosesnya secara demokratis. Imbangan itu diperlukan, justeru untuk menghindari tampilnya kekuatan represif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Sebagian besar pemuda asyik dengan permasalahannya sendiri

Karena peran masyarakat dan daerah dituntut menjadi lebih besar di masa mendatang, maka pemuda yang akan memainkan perannya kala itu dituntut untuk berkemampuan mengembangkan komunikasi dengan masyarakat luas. Hal itu diperlukan karena selain untuk merangsang partisipasi sukarela masyarakat sambil merangsang inisiatif mereka, maka cara tersebut dimanfaatkan pula dengan jalan menumbuhkan kepribadian mereka, memberikan pengalaman berorganisasi yang luas, dan memupuk daya kritis mereka.

Sistem politik yang ada sekarang menciptakan pemuda kritis

Kesimpulan

Sistem politik yang ada dewasa ini memang telah membuktikan kemampuannya untuk melandasi pembangunan ekonomi. Akan tetapi sistem itu juga menghasilkan pemuda yang pasifis dan loyalis dalam jumlah yang terbesar. Sistem itu hanya menghasilkan pemuda kritis yang amat terbatas.

Adalah perkembangan bangsa sejak dekade terakhir yang menampilkan keperluan akan perubahan politik secara mendasar dalam bentuk meningkatnya demokratisasi politik dengan jalan memberikan peran yang lebih luas kepada masyarkat dan daerah.

Untuk menyongsong perkembangan tersebut, diperlukan para pemimpin masa depan yang kreatif dan kritis. Pemuda sebagai pengemban kepemimpinan masa depan, tentulah harus menyiapkan diri untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh perkembangan tersebut. Tapi karena tipe pemuda kritis yang diperkirakan memenuhi persyaratan itu amat terbatas jumlahnya, maka adalah menjadi program kepemudaan untuk menumbuhkan mereka sehingga kebutuhan masa depan bangsa terpenuhi. Tugas itu bukan saja terletak dipundak pemuda dewasa ini, akan tetapi generasi terdahulu yang sedang berkuasa bertanggung jawab pula untuk mempersiapkannya. □

Identitas Pemuda Pelopor bagi Masa Depan Politik Indonesia disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan DPP Wira Karya Indonesia.

Digitized by Google

H.M. Irsyad Sudiro, Ketua Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR

Memantapkan dan Memelihara Kebudayaan Nasional, Salah Satu Tantangan Bagi GOLKAR

Musyawarah Nasional Golongan Karya IV yang lalu sebagaimana dapat kita ketahui dari berbagai sumber informasi, telah menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi amanat bagi segenap warga GOLKAR untuk dipahami, dihayati lalu dilaksanakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Di bidang sosial budaya terdapat amanat yang ditujukan kepada jajaran GOLKAR yang terkait dengan kebudayaan agar memantapkan dan memelihara Kebudayaan Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai perwujudan cipta, rasa dan karya Bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan amanat ini pula GOLKAR bertekad pula untuk memantapkan, meningkatkan pengertian bahwa masyarakat Indonesia dan Budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya.

Sebagai upaya mencapai amanat tersebut di atas, GOLKAR memandang perlunya menumbuhkan kemampuan masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan diperlukan bagi perubahan dalam proses pembangunan. GOLKAR melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan itu menggalang kerjasama dalam rangka membangkitkan sikap budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan serta mendukung upaya pembaharuan dan pembangunan. Guna mencapai sasaran tersebut, maka GOLKAR membina kadernya yang bergerak di bidang Seni dan Kebudayaan untuk lebih meningkatkan kualitas termasuk dalam aspek idiil, wawasan dan pengakaran GOLKAR dalam masyarakat.

Departemen Seni Budaya GOLKAR berusaha mendekati amanat Munas IV GOLKAR tersebut dari sisi konsepsi, perencanaan operasional dan penyiapan mekanisme kerja antara lain dalam bentuk Tim Kerja Seni Budaya DPP GOLKAR. Langkah-langkah yang ditempuh Dep. Seni Budaya dalam waktu hampir setahun ini, jika terhitung dari Oktober 1988, memang terasa agak lambat. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain adanya upaya menjaga kepastian hukum, suasana kebersamaan dan menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Walhasil bahwa langkah pelaksanaan program-program yang dihasilkan oleh Munas IV GOLKAR khususnya di bidang Sosial Budaya dapat dikatakan "slow but sure", untuk tidak disebut "alon-alon asal kelakon".

Semua Departemen dalam DPP GOLKAR bisa menyatakan dirinya masing-masing sebagai departemen yang penting dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran GOLKAR. Termasuk Departemen Seni Budaya tak bisa dianggap remeh fungsi dan peranannya. Sebut saja umpamanya dalam hal meraih kemenangan dalam Pemilu yang akan datang, berdasarkan pengalaman selama ini Departemen Seni Budaya memegang peranan yang cukup penting. Setidak-tidaknya tidak pernah setiap kali Pemilu, GOLKAR tidak menyertakan potensi Seni Budaya sebagai sarana meraih kemenangannya.

Untuk masa mendatang dapatlah diperkirakan tidak jauh dari keadaan beberapa kali Pemilu yang lalu. Potensi Seni Budaya termasuk para aktor/aktris, penyanyi, pelawak, pemusik, penari, dalang, nayaga, pesinden, penyair, penulis, MC dan seterusnya niscaya dikerahkan sebagai kader GOLKAR guna membaktikan profesi dan keahlian masing-masing. Sasarannya adalah kegembiraan, rasa simpati, kekaguman rasa cinta dan sikap memihak kepada GOLKAR yang terus membangun dan berkarya demi kejayaan negara, rakyat dan bangsa Indonesia.

Di sisi lain GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik yang besar dan dominan, dituntut untuk memiliki orientasi yang lebih luas dan terkait dengan peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara lebih luas dan berjangka panjang. GOL-

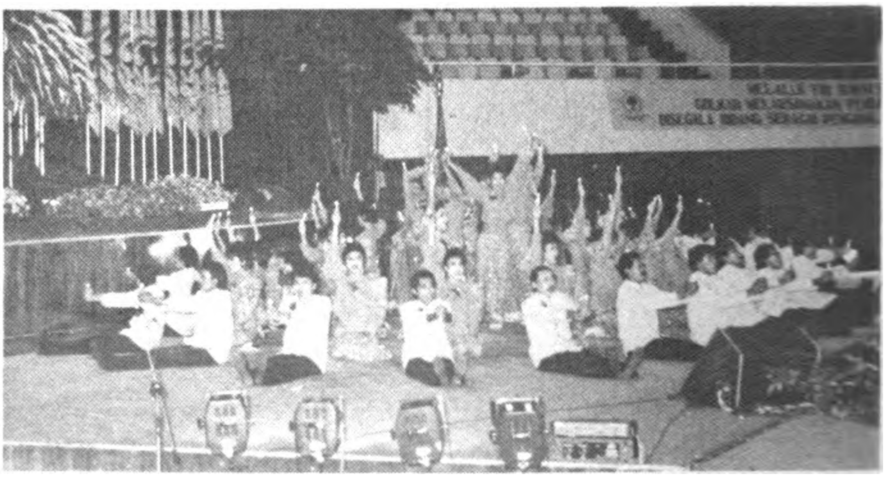

GOLKAR mengangkat nilai-nilai sosial budaya

Digitized by Google

Salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia

KAR mempunyai tanggung jawab sejarah yang terkait dengan pasang surut dan maju mundurnya bangsa Indonesia di semua bidang. Tidak hanya bidang politik saja, tetapi juga di bidang ekonomi, kebudayaan, pertahanan keamanan, keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seterusnya. Oleh karena itu selain berorientasi kepada kepentingan politik praktis, segenap potensi yang ada dalam GOLKAR dituntut juga untuk mempunyai orientasi kepada kepentingan strategi nasional dalam lingkup kebangsaan dan Wawasan Nusantara.

Memantapkan dan memelihara Kebudayaan Nasional adalah salah satu bentuk amanat yang berlingkup lintas kepentingan politik praktis antar kekuatan sosial politik yang perlu dilihat oleh GOLKAR sebagai suatu tantangan untuk iya atau tidak mau dan mampu diwujudkan dalam kiprah organisasi.

Tantangan tersebut pada hakekatnya ditujukan kepada seluruh warga GOLKAR di mana pun mereka bertugas. Sebab hakekat suatu program itu mengandung kesepakatan dan janji bersama untuk melaksanakan secara kolektif dan terpadu. Adanya pembagian tugas dalam organisasi semata-mata untuk memberikan titik berat dan titik awal dalam proses kebersamaan tersebut. Oleh karena itu Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR tidak akan pernah berpretensi sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap tercapai atau tidaknya sasaran di bidang sosial budaya termasuk dalam memantapkan dan memelihara Kebudayaan Nasional. Namun yang ada ialah rasa turut memiliki, turut menjaga dan bisa merasa, tanpa hanya merasa bisa.

Dengan telah terbentuknya Tim Kerja Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR, berarti jajaran departemen ini tidak hanya berisi dua orang seperti tercantum dalam Susunan dan Personalia DPP GOLKAR itu saja, tetapi ditambah dengan 51 (lima puluh satu orang) lagi yang nota bene dinilai sebagai pakar di bidang masing-masing. Mereka ini semua secara sendiri atau bersama-sama merupakan potensi yang diharapkan dapat memikul tanggung jawab atas pelaksanaan program GOLKAR masa bakti 1988-1994.

Guna lebih mengenali para anggota Tim Kerja Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR, dalam tulisan ini dikemukakan keseluruhannya yaitu, Drs. H.M. Irsyad Sudiro, Erwan Sukarja, SH, H. Eddy Sudihadjo, Drs. Bambang Suharto, Asep Sudjana, BA, Lym Campay, Enteng Tanamal, Rinto Harahap, Titiek Puspa, Drs. Suparmo, Drs. Sukartono, H. Ratno Timur, Dicky Zulkarnaen, H. Anton Is Sudibyo, Sys NS, Drs. Djadjat Sudradjat, Ully Sigar, Yelly Tobing, A. Riyanto, Yanuar Ishak, Senjaya Wijaya, M. Lubis, Dra. Lies Said, Drs. F. Hamid Kuning, Kris Subiantoro, Koes Hendratmo, Hartono Hendra, Paku, Tetty Kadi, Yoseano Waas, Siu, Sucipto, Yung Indrajaya, Didi Hadju, Sampan Hismanto, Paul Awal, Drs. Agus Topoe, Chandri Suharto, Dwie Ria Wenny Nasution, Rai Budiarsa, Drs. A. Sadzili, Adi Nugroho, Yudhi Kristanto, Dr. Henry Siregar, Drs. Datuk Labuan, Muchsin Alatas, Zainal Bintang, Eros Djarot, Ilham Bintang, Fiam Mustamin, H. Budiardjo.

Lima puluh satu orang tersebut merupakan tim yang akan senantiasa dalam satu kesatuan membagi tugas bersama melaksanakan program Seni Budaya GOLKAR. Diharapkan Tim dapat bekerja dinamis, kompak, terarah dan produktif.

Di sisi lain perlu dikemukakan bahwa para kader GOLKAR lain yang merasa berkompeten, berkemampuan, berkemauan dan relevan untuk melaksanakan kegiatan apa saja di bidang Seni Budaya, sudah pasti tidak ada larangan dan bahkan semestinya dengan sepenuh hati rela melaksanakannya. Sebab pada dasarnya program GOLKAR adalah milik dan tanggung jawab segenap warga dan kadernya. Maka kader yang baik pasti tidak mempermasalahkan tercantum atau tidak namanya dalam suatu struktur tertentu, namun yang dipertimbangkan adalah peluang untuk mengabdi dan berkarya. Departemen Seni Budaya GOLKAR akan sangat berterima kasih kepada para kader di mana saja yang dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan Seni Budaya, berupa apa pun yang sejalan dengan arah dan tujuan GOLKAR.

Jika demikian adanya maka segala tantangan yang dihadapi GOLKAR tak pelak lagi akan dapat dijawab dengan baik, selesai dan sukses. Termasuk dalam memantapkan dan memelihara Kebudayaan Nasional yang cakupan maupun bobotnya tidak mungkin hanya dihadapi oleh satu atau dua orang. Sebab Kebudayaan Nasional itu sendiri merupakan sosok yang wujudnya masih harus diperjelas, dipertajam, diutuhkan, dimolekkan, diharumkan, disemarakkan, diperkaya, diperkuat, digelorakan dan disempurnakan terus menerus. Kita harus yakin bahwa itu bisa. Insyaallah. □

Digitized by Google

Oleh: Maria Sugiharto

WEIN, WEIB UND GEZANG

"Wein, Weib Und Gezang", sebuah ungkapan bahasa Jerman yang artinya Anggur, Wanita dan Nyanyian, dimaksudkan sebagai suatu eksprsi yang bila di Indonesia (tepatnya, Jawa) miri-miri MO-LIMO. Apa artinya ini? MO atau M dimaksudkan sebagai akronim dari lima buah M, ialah Mangan (makan yang tanpa ukuran, tentu saja), Minum (minuman keras), Madon (perempuan), Main (berjudi) dan Madat (Candu. Jaman sekarang dimaksudkan sebagai narkotika).

Bila seseorang telah dihinggapi Mo-5 ini, sebenarnya dia telah menyia-nyiakan hidup dengan segala kenikmatan duniawi. Singkat cerita, dia adalah manusia yang mengabdi setan. Hal ini tampaknya dilebih-lebihkan. Hal demikian berlaku secara universil. Di Eropa, dengan diekspresikan dengan Wein, Weib und Gezang, mengungkapkan betapa nikmatnya hidup dengan anggur dan wanita, tetapi belum pasti membahagiakan diakhirat.

Pengkajian terhadap Mo-5 dan WWG (wein, weib und gezang) ini tentu saja mengalami perubahan nilai, sejalan dengan kemajuan jaman serta kemajuan cara berfikir manusia. Bila istilah wein melulu ditujukan kepada ungkapan *minum* dalam arti negatif, rupanya kini sudah tidak tepat lagi, karena *Wein* atau anggur bagi beberapa negara tertentu (bahkan di Indonesia), menjadi sebuah komoditi yang menentukan bagi penghasilan negara.

Disini saya akan berbicara mengenai anggur dan beberapa seluk beluknya, karena anggur yang telah di*konservasi* atau diawetkan dan disimpan didalam botol-botol indah, menempati tempat istimewa, bermukim di rumah-rumah gedongan milik orang-orang berduit, merupakan semacam *simbul status* bagi pemiliknya.

Anggur, Kebun Anggur, Minuman Anggur

Berbicara tentang anggur, ada konotasi minuman keras. Padahal tidak demikian. Minuman anggur dihasilkan dari buah anggur, setelah mengalami proses pembuatannya, untuk menjadi sebuah minuman yang enak, sekaligus *elite*.

Perancis merupakan negara pertama di dunia penghasil anggur. Anggur dari Perancis menduduki peringkat pertama didalam kualitas dan kuantitas anggur-anggur di dunia. Daerah-daerah Bordeaux (baca: Bordo), Bourgogne, Anjou, Loire, Languedpc, Provence, Beaujalais, dan masih banyak daerah lainnya di Perancis, adalah daerah-daerah penghasil anggur. Berhektar-hektar tanah di daerah tersebut merupakan kebun anggur yang subur dan indah.

Anggur, juga dipakai sebagai nama minuman keras atau semi keras yang mengandung alkohol. Pembuatan anggur minuman dengan cara *fermentasi* (pembusukan) buah, memberikan nama yang sama kepada minuman-minuman dengan cara pembuatan yang sama, meskipun bukan dari buah anggur. Di Indonesia dikenal anggur Bali, yang dinamakan *Brem*, dibuat dari beras. Juga anggur Jepang yang terkenal dengan nama SAKE, dibuat dari beras ketan. Masih banyak negara yang menghasilkan anggur, yang dibuat bukan dari buah anggur (grape). Seperti di beberapa negara Timur Tengah, membuat anggur dengan fermentasi buah pisang.

Usia anggur di dunia, hampir sama dengan usia manusia. Anggur juga mengenal usia tua. Makin tua, makin bermutu. Ini tentu saja tergantung kepada cara pembuatannya, serta tanah dimana anggur itu ditanam.

Bila buah anggur telah dipanen, dipilih yang bagus dan masak. Pemrosesan anggur dilaksanakan secara manual. Proses pembuatan yang prinsip adalah bila buah anggur itu dibuat fermentasi didalam tong-tong kayu. Makin tua tongnya, makin bagus hasilnya. Disinilah proses fermentasi berlangsung.

Cocktail

Digitized by Google

Peringkat anggur serta macamnya

Anggur memiliki beberapa peringkat serta beberapa macam warna dan mutunya. Ada Anggur Merah, dan ada Anggur Putih. Di Perancis, anggur merah biasanya dinamakan Bordeaux. Di daerah Bordeaux, tanaman anggur menghasilkan anggur merah. Dari sini, timbul istilah warna *merah bordeaux* maksudnya merah indah seperti buah anggur.

Anggur putih, memiliki tiga peringkat, sesuai dengan mutu dan cita-

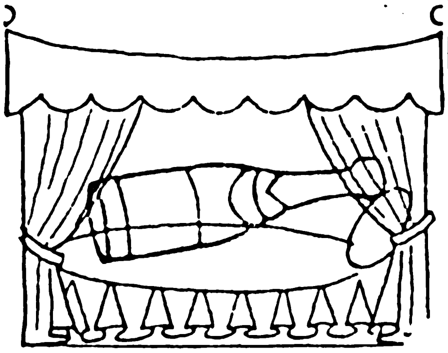

Menyimpan anggur

rasanya. Pertama adalah anggur putih *sec,* (kering). Anggur ini sama sekali tidak manis. Selanjutnya kualitas anggur *demi sec,* ini agak manis. Dan yang ketiga adalah anggur *doux.* Ini manis rasanya.

Champagne

Champagne (baca: sampanye), adalah anggur putih yang bening dan berkilauan. Champagne memiliki kadar alkohol tertentu, dengan bermacam-macam mutu, sesuai dengan mutu buah anggurnya. Pada dasarnya, champagne adalah salah satu proses anggur, dengan fermentasi yang kurang lengkap. Peringkat dan mutu champagne sama seperti anggur putih, ialah *sec, demi sec* dan *doux.* Pada champagne dengan kadar *sec* yang murni, disebut *Brut.*Champagne yang begini sama sekali tidak manis, dan sangat orisinil. Bila ditemui champagne dengan catatan pada label *Brut-de-Brut,* adalah champagne nomer satu, asli... Ada *champagne rosé,* berwarna merah jambu atau pink, dan minuman ini bermutu biasa, berharga murah.

Champagne memiliki kedudukan penting didalam kehidupan moderen, karena dia akan dihadirkan pada pesta-pesta, peresmian-peresmian serta event-event penting, juga pada peristiwa yang bersejarah seperti misalnya didalam merayakan kejuaraan olahraga (biasanya didalam lomba rally). Terlepas rasa, enak atau tidak, jamuan dengan champagne memiliki nilai eksklusif, serta bergengsi.

Bagi remaja negara Barat, diijinkan minum champagne berarti sudah dianggap dewasa. Bagi keluarga yang menjunjung tinggi sopan santun serta pendidikan didalam keluarga, seseorang boleh minum champagne apabila sudah berusia 17 tahun.

COGNAC

Residu (ampas) dari anggur, dibuat minuman keras dengan cara menyuling (distilasi), dan air yang keluar menjadi liquor atau minuman keras yang disebut *cocnag.*

Anggur, Champagne dan thèthèk bengèknya

Pengetahuan atau ilmu mengenai anggur disebut *Deunologi.* Kultur atau tanam-menanam anggur disebut *Viticultur.* Deunologi menjabarkan tentang segala sesuatu mengenai anggur dan tanaman, buahnya, sampai kepada minuman kerasnya sebagai produk, serta konservasinya.

Siapa menentukan anggur baik mutu, dan yang kurang?

Maria Sugiharto

Seseorang pakar didalam sesuatu hal, biasanya disebut connaisseur. Khusus untuk urusan coba-mencoba dan rasa merasakan anggur ini, dinamakan *Sommelier.*

Pekerjaan seorang sommeliler adalah mencoba, merasakan anggur, serta menilainya, termasuk anggur mahal atau tidak, serta termasuk mutu yang mana, sesuatu minuman anggur. Sommelier, disamping memiliki bakat, dan tentu saja lidahnya berharga mahal, serta memiliki perasa yang sangat tajam, ada ilmunya untuk di-

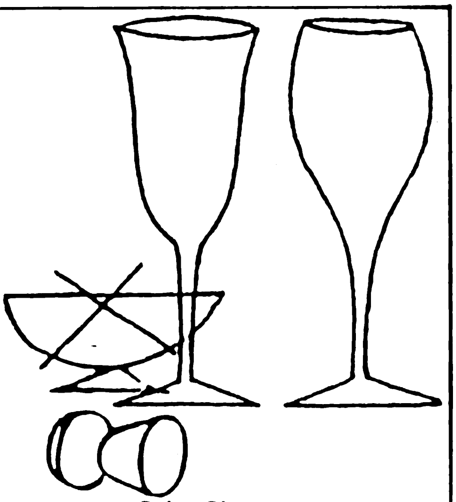

Gelas Champagne

pelajari. Ini tentu bukan suatu pelajaran yang dikursusi semusim kursus-kursusan, tetapi memakan waktu dan bakat yang mendalam. Sommelier mencoba beratus-ratus macam anggur, tidak ditelan, tetapi dirasakan saja dengan lidah, dan disekitar mulut saja, kemudian dibuang. Buah anggur yang tidak terpakai untuk pembuatan anggur minuman, dikeringkan dan dikonservasi menjadi manisan, dinamakan *Kismis.*

Bagaimana menempatkan didalam botol-botol?

Bagi anggur merah ditempatkan didalam botol yang berwarna gelap, biasanya hijau tua, dan bentuk botol agak besar. Sedangkan bagi anggur putih yang tidak manis (sec) ditempatkan didalam botol ramping berwarna tua, biasanya hijau. *Demi-sec* didalam botol berwarna terang, berbentuk agak membesar dibawahnya. Anggur *doux* kebanyakan botolnya cerah.

Kapan minum anggur?

Anggur akan cocok bagi mereka yang tinggal diudara dingin. Diudara panas atau tropis, anggur membuat peminumnya merasa gerah dan kurang nyaman. Tetapi, ada kalanya orang memandang bahwa minum anggur sekali-sekali perlu, karena itu semacam *gengsi.*

Di negara-negara Eropa, minum anggur merupakan suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini diberlakukan pada waktu makan. Di Hongaria, minum anggur seperti minum air saja. Anggur Hongaria dinamakan *jenever* (orang Jawa kuno menamakan orang minum anggur minum jenewer), dan merupakan minuman seperti minuman es teler di Indonesia. Kapan saja dan dimana saja orang dapat minum anggur, dan murah harganya. Adalah "berdosa"

Digitized by Google

Botol Champagne

bila berada di Hongaria tidak minum anggur.

Anggur merah disuguhkan serta diminum pada waktu orang makan *steak,* atau masakan daging lainnya. Sedangkan anggur putih, disuguhkan bersama masakan dari ikan atau hasil laut lainnya. Bagi anggur doux, minuman ini menyertai makan kue-kue atau snack.

Dari tata cara minum anggur ini, bisa dilihat bahwa anggur menempati waktu dan tempat tertentu untuk diminum, seakan-akan memiliki budaya tersendiri atas kehadirannya. Bisa dikatakan bahwa minum anggur dan kebiasaan minum anggur diperuntukkan bagi mereka yang *sophisticated* atau *berbudaya.* Tentu saja hal ini dipandang dari kacamata masyarakat yang merasa anggur sebuah budaya.

Minum Champagne?

Meskipun bukan hukum, minum champagne ada aturannya yang tidak tertulis, paling sedikit dilihat dari gelas yang dipergunakan untuk minum champagne. Gelas yang ramping akan mewakili produk champagne itu sendiri, yang seperti bersifat *priyayi,* sehingga minum minuman yang berbudaya, dengan cara yang berbudaya pula.

Bagaimana menyimpan anggur dan champagne?

Memajang botol-botol minuman anggur dan minuman keras atau liquor di rumah-rumah gedongan merupakan semacam gengsi bagi pemiliknya. Tidak jarang, bahkan menjadi mode bagi yang tidak minum minuman keraspun disebabkan karena agama misalnya, selalu memiliki bagian almari pajangan atau meja pajangan beroda untuk meletakkan botol-botol anggur, champagne, wisky, dan liquor lainnya.

Bagi yang patuh menjalani agama dan tidak menghalalkan minuman keras, kadang-kadang memiliki seperangkat ini, karena minuman minuman tersebut adlah pengasih atau kiriman sebagai tanda persahabatan atau penghormatan dari relasi diplomat atau relasi businessnya.

Meletakkan botol-botol itu, ternyata ada seni tersendiri. Bagi liquor — whisky, brandy — seninya seni umum, karena cukup meletakkan botol-botol tersebut dengan berdiri, dan memamerkan brand atau labelnya, karena harga yang menunjukkan gengsi, juga terletak pada label itu. Tahun berapa, dibuat dimana, dengan kode-kode tertentu, benar-benar menentukan harga bagi pemilik. Bagi anggur, lain caranya. Menaruh anggur, botol harus dimiringkan sedemikian, sampai air anggur menyentuh penutup (gabus). Gabus inipun memiliki bermacam-macam mutu, tergantung isi atau anggur yang ditempatkan. Hal atau cara begini bisa diterangkan secara logis, karena bila anggur ke-

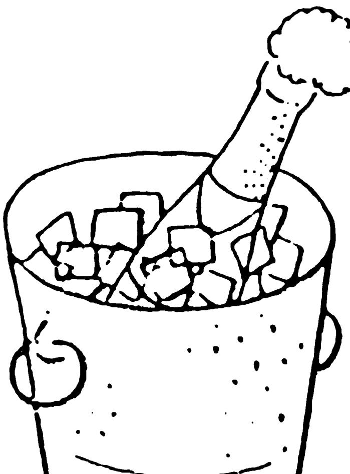

Champagne dingin

Whisky

masukan udara, maka mutu menjadi turun, disebabkan terjadinya proses oxidasi.

Cara menyuguhkan Champagne?

Jamuan-jamuan resmi yang diadakan untuk event-event yang resmi, kadang-kadang di Restoran internasional bergengsi, kerapkali menyuguhkan champagne. Cara menyuguhkan, disamping seharusnya, ada juga gayanya. Botol champagne ditaruh disebuah tempat berbentuk ember kecil, yang sudah diisi air dan es batu. Suhu air dan es batu akan sangat sempurna untuk mendinginkan champagne yang ditaruh disitu, dengan gaya memiringkan. Champagne yang begini memiliki taste yang sangat kena.

Perayaan atas kemenangan didalam event olah raga, biasa dirayakan dengan membuka botol champagne. Hal ini biasanya dilakukan pada kemenangan lomba rally. Agak bertentangan dengan semangat olahraga itu sendiri tentu saja, karena olahragawan dituntut untuk tidak meminum minuman alkohol. Namun demikian, para olahragawan memang hanya membuka champagne dan menikmati busa yang keluar itu sebagai tanda kegembiraan dan tidak meminumnya, pantang.

Pada suatu kemenangan rally internasional yang dimenangkan oleh perally Finlandia *Ari Vatanen,* bukan champagne yang dibuka sebagai tanda kegembiraan, karena dia sendiri tidak peminum champagne, maka botol champagne yang indah itu ketika dibuka mengeluarkan susu, minuman kegemaran sang juara, yang telah dicampur dengan semacam mousse (busa) agar dapat meledak seperti champagne.□

Digitized by Google

HARIAN

Pelita

MANAGEMENT BARU

Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

**Mulai
11 Maret '86.**

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

Botol Champagne

bila berada di Hongaria tidak minum anggur.

Anggur merah disuguhkan serta diminum pada waktu orang makan *steak*, atau masakan daging lainnya. Sedangkan anggur putih, disuguhkan bersama masakan dari ikan atau hasil laut lainnya. Bagi anggur doux, minuman ini menyertai makan kue-kue atau snack.

Dari tata cara minum anggur ini, bisa dilihat bahwa anggur menempati waktu dan tempat tertentu untuk diminum, seakan-akan memiliki budaya tersendiri atas kehadirannya. Bisa dikatakan bahwa minum anggur dan kebiasaan minum anggur diperuntukkan bagi mereka yang *sophisticated* atau *berbudaya*. Tentu saja hal ini dipandang dari kacamata masyarakat yang merasa anggur sebuah budaya.

Minum Champagne?

Meskipun bukan hukum, minum champagne ada aturannya yang tidak tertulis, paling sedikit dilihat dari gelas yang dipergunakan untuk minum champagne. Gelas yang ramping akan mewakili produk champagne itu sendiri, yang seperti bersifat *priyayi*, sehingga minum minuman yang berbudaya, dengan cara yang berbudaya pula.

Bagaimana menyimpan anggur dan champagne?

Memajang botol-botol minuman anggur dan minuman keras atau liquor di rumah-rumah gedongan merupakan semacam gengsi bagi pemiliknya. Tidak jarang, bahkan menjadi mode bagi yang tidak minum minuman keraspun disebabkan karena agama misalnya, selalu memiliki bagian almari pajangan atau meja pajangan beroda untuk meletakkan botol-botol anggur, champagne, wisky, dan liquor lainnya.

Bagi yang patuh menjalani agama dan tidak menghalalkan minuman keras, kadang-kadang memiliki seperangkat ini, karena minuman minuman tersebut adlah pengasih atau kiriman sebagai tanda persahabatan atau penghormatan dari relasi diplomat atau relasi businessnya.

Meletakkan botol-botol itu, ternyata ada seni tersendiri. Bagi liquor — whisky, brandy — seninya seni umum, karena cukup meletakkan botol-botol tersebut dengan berdiri, dan memamerkan brand atau labelnya, karena harga yang menunjukkan gengsi, juga terletak pada label itu. Tahun berapa, dibuat dimana, dengan kode-kode tertentu, benar-benar menentukan harga bagi pemilik. Bagi anggur, lain caranya. Menaruh anggur, botol harus dimiringkan sedemikian, sampai air anggur menyentuh penutup (gabus). Gabus inipun memiliki bermacam-macam mutu, tergantung isi atau anggur yang ditempatkan. Hal atau cara begini bisa diterangkan secara logis, karena bila anggur kemasukan udara, maka mutu menjadi turun, disebabkan terjadinya proses oxidasi.

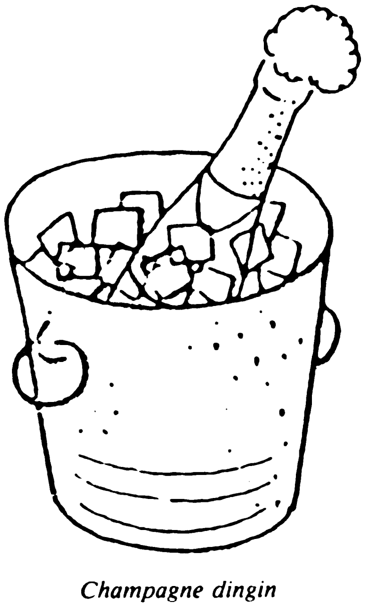

Champagne dingin

Whisky

Cara menyuguhkan Champagne?

Jamuan-jamuan resmi yang diadakan untuk event-event yang resmi, kadang-kadang di Restoran internasional bergengsi, kerapkali menyuguhkan champagne. Cara menyuguhkan, disamping seharusnya, ada juga gayanya. Botol champagne ditaruh disebuah tempat berbentuk ember kecil, yang sudah diisi air dan es batu. Suhu air dan es batu akan sangat sempurna untuk mendinginkan champagne yang ditaruh disitu, dengan gaya memiringkan. Champagne yang begini memiliki taste yang sangat kena.

Perayaan atas kemenangan didalam event olah raga, biasa dirayakan dengan membuka botol champagne. Hal ini biasanya dilakukan pada kemenangan lomba rally. Agak bertentangan dengan semangat olahraga itu sendiri tentu saja, karena olahragawan dituntut untuk tidak meminum minuman alkohol. Namun demikian, para olahragawan memang hanya membuka champagne dan menikmati busa yang keluar itu sebagai tanda kegembiraan dan tidak meminumnya, pantang.

Pada suatu kemenangan rally internasional yang dimenangkan oleh perally Finlandia *Ari Vatanen*, bukan champagne yang dibuka sebagai tanda kegembiraan, karena dia sendiri tidak peminum champagne, maka botol champagne yang indah itu ketika dibuka mengeluarkan susu, minuman kegemaran sang juara, yang telah dicampur dengan semacam mousse (busa) agar dapat meledak seperti champagne.□

Digitized by Google

HARIAN
Pelita
MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

DIREKSI DAN SELURUH KARYAWAN

P.T. PP. BERDIKARI

Jalan M. Ikhwan Ridwan Rais No. 7 Jakarta Pusat Telp. 361281-356021-359951-357880-371867 Telex 45421-46212 – BIDIK IA

&

SEMUA P.T. P.T. ANAK PERUSAHAAN
BESERTA
CABANG-CABANG/UNIT-UNIT
DI SELURUH INDONESIA
(BERDIKARI GROUP)

Dirgahayu ke 25 Golongan Karya
20 Oktober 1989

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

P.T. P.T. ANAK PERUSAHAAN

P.T. UJUNG LIMA
Jln. Yos Sudarso No. 3 – 11 Jakarta Utara
Telpon 495520-495332-491934-491936
Telex 49391 UL JKT.

P.T. WOTRACO
Jln. Hayam Wuruk 103 – 104 Jakarta
Telpon 6295185 6297432 631337 6292508 6291065 6292213 6297539 6295291
Telex 41147 WTC

ASURANSI timur jauh
Jln. Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta
Telpon: 375408 370266 375286-370074-370586
Telex 44202-44828 FAREAST IA

P.T. BERDIKARI UNITED LIVESTOCK
Gedung Perkantoran Liga Mas Indah
Jln. Pasar Minggu (Samping Sate Pancoran)
Telpon: 791125 791208 Jakarta Selatan
Telex 48507 BULI IA

P.T. KAPAS INDAH INDONESIA
Kantor Pusat Jln. Halu Oleo No. 87 Kendari
Telpon: 21676
Telex 71472 KAPAS KDI
Perwakilan Jln. M. Ikhwan Ridwan Rais No. 7 Jakarta Pusat

P.T. BERDIKARI SARI UTAMA FLOURS MILLS
Kantor Pusat: Level 9 Kav. 70-71
Jln. Jend. Sudirman
Telpon: 5782321 5782320 Jakarta
Telex 46654 BSUF IA

P.T. BERDIKARI SULTRA
Jln. Malik Raya No. 7 Kendari.
Telpon: 21212.

P.T. PUSDIKARI SULAWESI
Jln. Panakkukang III Blok E 19/1
Telpon: 83670, Telex: 71260
Ujung Pandang – Sulawesi Selatan.

DISTRIBUTOR NASIONAL ALUMINIUM INGOT PRODUKSI: P.T. INALUM
•
PABRIK PENGALENGAN NENAS DI JAMBI

P.T. PUSDIKARI AGROTAMA
Kaloran Temanggung Jawa Tengah.

P.T. PUSDIKARI RABAPORT
Jln. Bayamassa No. 1 Ujung Pandang
Telpon: 83204-83284
Telex 71562 BERDI IA.
Facsimile 83227.

PABRIK BATIK BERDIKARI DAN KERAJINAN TANGAN PALMERAH
Jln. Masjid Pal VII Palmerah
Telpon: 5482814 Jakarta Selatan.
•
PERKEBUNAN NENAS DI TAPANULI UTARA.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

No. 66 Oktober 1989

EDIAKARYA

N PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

lkar Lahir Dibawah Teriakan ”Bubarkan Sekber Golkar”

Wahono, Semangat Kader Begitu Tinggi Dalam Upaya Menyukseskan Pembangunan

MICH.
JAN 10 1990
Current Serials

SSN 0216 - 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Digitized by Google

Diterbitkan oleh:
DPP GOLKAR

Pemimpin Umum:
Wahono

Wakil Pemimpin Umum:
A.E. Manihuruk

Wakil Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ir. Rachmat Witoelar

Pemimpin Redaksi/ Wakil Penanggung Jawab:
Zulharmans
Agus Tagor

Dewan Redaksi:
Ir. Rachmat Witoelar
Ir. Usman Hasan
Andi Mochtar SH
Dr. Suhadi
Drs. Freddy Latumahina
Eric Samola SH
Ny. T.S. Darsoyo
Ponco Sutowo
Zulharmans
Agus Tagor

Pembantu Tetap Redaksi:
Anang Adenansi
Dr. Alfian
H. Kafrawi MA
Drs. Slamet Efendy Yusuf
Drs. Irsyad Sudiro
Drs. Thomas Suyatno
Ny. Maria Sugiharto
Drs. Wijanarko Puspoyo MA
Drs. Syafaat Habib
Sudarsono SH
Drs. T.A. Purnomo
Sugiyanto
Laurens Tato
H.M. Nahumury
Subiyanto SP

Redaksi Pelaksana:
Drs. Peter Tomasoa
Sudaryanto BA
Badrul Mustofa

Tata Usaha:
RD. PAND. DV. Noerijathy

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat.
Jl. Taman Anggrek Slipi
Telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh: PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan artikel-artikel (ulasan. komentar. analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut dengan tidak mengurangi isi

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI
Dua Puluh Lima Tahun Golongan Karya

FOKUS
Tanggal 20 Oktober ini, GOLKAR berusia 25 tahun. Dengan demikian, 1 tahun pula usia kepengurusan DPP periode 1988-1993. Apa yang sudah dilaksanakan kepengurusan DPP periode sekarang ini dalam melaksanakan amanat Munas? Ikuti wawancara Media Karya dengan Ketua Umum GOLKAR, Wahono.

LAPORAN UTAMA
GOLKAR Lahir Dibawah Teriakan "Bubarkan Sekber Golkar"; Apa Kata Mereka Tentang GOLKAR dan sebuah tulisan dari Sukarton Marmosudjono, SH tentang Posisi Dan Peranan Kader GOLKAR Dalam Menghadapi Tantangan Ke Masa Depan.

LAPORAN KHUSUS
Sejak Pemerintah Orde Baru melaksanakan tekad untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang secara terencana, terprogram dan berkesinambungan, hasilnya telah nyata, termasuk di Kalimantan Selatan. Kenapa Kalsel berhasil dalam melaksanakan pembangunan? Ikuti Membuka Isolasi, Mendorong Pertumbuhan.

ORGANISASI
Menyambut HUT GOLKAR ke-XXV, serangkaian kegiatan telah dilakukan, termasuk kunjungan Ketua Umum di berbagai daerah. Ikuti: Wahono Sehari di Bumi GORA; Wahono Di Bumi Lancang Kuning; Riau Berpotensi Bagi Perjuangan GOLKAR; GOLKAR Bahas Konsepsi Masa Depan; Kualitas Manusia Kunci Sukses Pembangunan; Tidak Dikehendaki Kader Yang Hanya Tunggu Perintah; Kadarkum Program Kowani Yang Paling Menonjol; Ratno Timoer Siap Sumbangkan Tenaga Untuk GOLKAR; Peningkatan Kualitas Kader Untuk Jangkauan Ke Depan; MDI Di Pulau Dewata dan Serangkaian Menyambut HUT GOLKAR Ke XXV.

NASIONAL
HUT ABRI Ke-44, Kesederhanaan Dalam Kemegahan; Sumpah Pemuda Tonggak Sejarah Kebangsaan; Profil Budaya Politik Indonesia; Lancar Pembahasan RUU Peradilan Agama Oleh DPR dan Pemerintah; Kearifan Sejarah, Perlu Dikembangkan; Indonesia Naik ke Golongan Lebih Tinggi; Korupsi Perlu Penanganan Serius.

KOMENTAR
Kebebasan Beragama dan Perdamaian

INTERNASIONAL
Akhir Sebuah Kepedihan; Eksodus Warga Jertim, Akibat Kekakuan Politik.

SPEKTRUM
Kader GOLKAR dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan; Dengan Maulid Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Kedalaman Iman dan Taqwa Modal Pengamalan Pancasila.

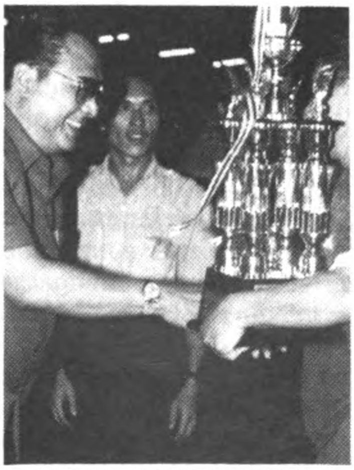

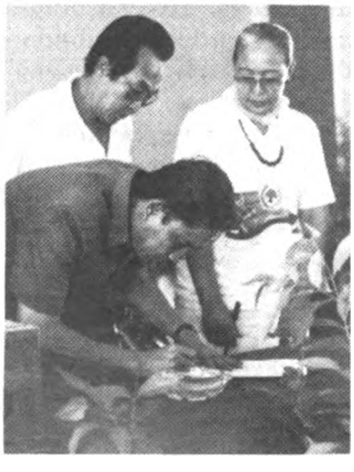

Digitized by Google

Dua Puluh Lima Tahun Golongan Karya

Tepat pukul 00.00 dini hari, tanggal 20 Oktober 1964, Aula Sekretariat Jenderal Front Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 (sekarang Gedung Bursa), 35 organisasi fungsional melangkah penuh keyakinan maju kedepan untuk menandatangani Proklamasi lahirnya Sekertariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Di depan terdapat sebuah meja panjang dengan beberapa batang lilin yang menyala karena listrik memang sengaja dimatikan. Suasana hening bening penuh khidmat, dan dibawah cahaya lilin itu pulalah semua yang hadir menaikkan doa menurut agamanya masing-masing.

Pagi hari 20 Oktober 1964, 97 organisasi berkumpul dihalaman Sekretariat Jenderal Front Nasional menyatakan niatnya untuk bergabung dalam Sekber Golkar. Pada hari itu pula Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya dibahas dan pada hari itu pula diterima dengan beberapa perubahan tertentu.

Rapat Umum ke-97 organisasi yang baru bergabung dalam Sekber Golkar itu mengamanatkan agar segera dibentuk Dewan Pimpinan Harian. Beberapa waktu kemudian terbentuklah Dewan Pimpinan Pusat Sekber Golkar yang diketuai Brigjen Djoehartono (almarhum).

Sementara Rapat umum Sekber Golkar berlangsung didalam Gedung Front Nasional, diluar gedung sedang berlangsung demonstrasi para anggota Pemuda Rakyat — mantel organisasinya PKI — berteriak dengan mengacung-acungkan spanduk bertulisan: "BUBARKAN SEKBER GOLKAR".

Begitu cerita tentang kelahiran Golongan Karya dua puluh lima tahun lampau. Dia dilahirkan oleh kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang seluruhnya adalah kekuatan-kekuatan Pancasilais. Mereka bergabung dalam satu front bersama untuk menghadapi derasnya arus indoktrinasi Partai Komunis yang sudah mulai mengakar di masyarakat.

Secara politis, Sekber Golkar waktu itu memang tidak diakui sebagai partai politik, tetapi Sekber Golkar punya peranan politik yang cukup besar di Front Nasional, sebuah organisasi yang berisi semua kekuatan partai politik yang ada. Sekber Golkar punya suara dalam Front Nasional, dia ikut bicara bahkan turut merumuskan berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Front Nasional sehubungan dengan perkembangan politik yang terjadi di masyarakat.

Bersama kekuatan-kekuatan Pancasilais lainnya yang ada di Front Nasional, Sekber Golkar terus berupaya menjawab setiap tantangan dari Partai Komunis Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sekber Golkar, Brigjen Doehartono, waktu itu adalah juga wakil Sekjen Front Nasional. Ia selalu muncul sebagai wakil Sekber Golkar dalam setiap kesempatan. Dikalangan pimpinan Front Nasional pun ia diterima dan diakui sebagai representasi dari pada Sekber Golkar.

Begitulah kenangan kita tentang peristiwa tanggal 20 Oktober 1964 pukul 00.00 dini hari, ketika para pendiri Sekber Golkar membubuhkan tandatangannya sebagai pengesahan berdirinya organisasi kemasyarakatan itu.

Dua puluh lima tahun sudah usia Golongan Karya yang berawal dari Sekertariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Panjang perjalanan yang ditempuh, banyak sudah pengalaman yang telah menempa Golongan Karya menjadi sebuah organisasi politik yang kokoh kuat hingga sekarang. Dia berdiri tegak diantara kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada di negeri ini. Karena memang sudah mengakar jauh dihati masyarakat Indonesia.

Kini Golkar menjadi kekuatan sosial politik yang besar dan cukup berperan dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia. Eksistensi Golkar kini menjadi sangat substansial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari dalamnya lahir gagasan dan wawasan kebangsaan, yang menempatkan kepentingan nasional bangsa diatas kepentingannya. Karenanya Golkar kini telah menjadi tumpuan harapan rakyat dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Golkar memang ada oleh rakyat yang Pancasilais, dia berjuang untuk rakyat dan menjadi milik rakyat. Empat kali pemilihan umum selama pemerintahan Orde Baru, semua itu telah dibuktikan. Rakyat mempercayakan nasibnya pada Golkar karena mereka tahu pasti bahwa Golkar selalu membela kepentingan rakyat; Golkar memperjuangkan kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan para pemimpin Golkar.

Untuk itulah dalam memperingati Ulang Tahun ke-XXV ini, Golkar memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah dimampukan untuk menjadi wadah perjuangan rakyat Indonesia. DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA.□

Digitized by Google

Wahono, Semangat Kader Begitu Tinggi Dalam Upaya Menyukseskan Pembangunan

Ketua Umum DPP Golkar, Wahono

Pengantar Redaksi :

Berbagai kesibukan telah menyita waktu ***Pak Wahono*** *belakangan ini. Lebih-lebih menjelang* ***HUT GOLKAR ke-25****, serta berbagai kegiatan kunjungan kerja ke berbagai daerah, disamping tugas rutin sebagai Irjenbang.*

Namun, di sela-sela kesibukan itu, masih ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Media Karya untuk berdialog dengan orang nomor satu di GOLKAR itu. Berikut ini cuplikan wawancara Media Karya *(Tanya) dengan Ketua Umum GOLKAR, Wahono (Jawab).*

Tanya: *Dalam Munas GOLKAR IV tahun lalu, telah disepakati untuk meneruskan program Tri Sukses — Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita V dan Sukses Pemilu 1992. Sejauhmana GOLKAR dalam kepengurusan yang sekarang ini telah melaksanakan amanat Munas IV tersebut?*

Jawab: Sejak diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum GOLKAR, saya berusaha sebaik-baiknya melaksanakan amanat Munas tersebut. Tentu dalam melaksanakan amanat Munas itu, saya tidak bekerja sendirian. Bersama-sama pengurus lainnya, serta partisipasi masyarakat khususnya simpatisan dan warga GOLKAR.

Langkah untuk mewujudkan amanat Munas, telah saya laksanakan konsolidasi seluruh jajaran dan menyusun langkah-langkah operasional. Memperinci dan melaksanakan Program Bidang dan Departemen DPP. Misalnya, dalam tahun ini, dalam menyukseskan konsolidasi, saya telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Hingga akhir September tercatat 23 propinsi sudah saya kunjungi untuk kepentingan penggalangan kader-kader yang ada di daerah. Dalam kesempatan kunjungan itu, saya gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan petunjuk dan informasi kepada para kader. Misalnya yang menyangkut ke-GOLKAR-an dan informasi-informasi penting lainnya. Saya juga menyerap banyak dari Kader GOLKAR dan masyarakat di daerah baik hal-hal yang berkenaan dengan keorganisasian maupun masalah-masalah pembangunan. Satu hal yang berkesan pada saya, bahwa semangat warga GOLKAR sebagai kader bangsa begitu tinggi dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional. Ini memberikan rasa optimis saya bahwa sukses yang lain, yaitu sukses Pelita V dan sukses dalam Pemilu mendatang, akan terealisir.

Tanya: *Bisa dijelaskan sasaran program umum GOLKAR yang selalu ditetapkan menjadi kerangka acuan untuk menjawab tantangan ke depan?*

Jawab: Saya ingin mengulangi apa yang sering saya kemukakan sehubungan dengan sasaran organisasi kita. Sasaran yang akan dicapai dengan program umum secara interen adalah untuk lebih memantapkan keberadaan, fungsi dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan, agar semakin dewasa, mandiri, berakar, berkualitas dan demokratis.

Dengan demikian GOLKAR dapat lebih mampu menjadi pelopor pembaharuan dan pembangunan, serta mewujudkan Demokrasi Pancasila.

Sedang sasaran eksteren adalah tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Juga suksesnya Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila — khususnya Pelita V — untuk memantapkan landasan guna memasuki era tinggal landas, meningkatnya kegairahan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1992.

Tanya: *Apa yang menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas kader GOLKAR di masa mendatang?*

Jawab: Berbicara mengenai kualitas kader, maka hal ini sangat ditentukan oleh sikap kreatif dan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.

Tegasnya, kita butuh kader-kader yang berdedikasi, loyal, kreatif dan mandiri. Namun perlu diingat bahwa sikap kreatif dan mandiri akan dapat

Digitized by Google

terwujud apabila iklim untuk itu diberikan dan dikembangkan secara sehat dan dinamis oleh GOLKAR sendiri.

Kita tidak menghendaki kader-kader yang bisanya hanya menunggu perintah dan hanya menggantungkan diri kepada orang lain.

Kita juga tidak menghendaki kader-kader yang mudah mundur karena tidak kebagian tempat. Seorang kader GOLKAR adalah mereka yang tidak mencari jabatan buat diri sendiri, tetapi justru menjadi pelopor dan pendekar yang ingin berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Mereka adalah orang yang berani berbuat demi kemajuan organisasi dan pembangunan bangsa, mempunyai sifat apa yang bisa diberikan kepada organisasi, bukan sebaliknya, apa yang bisa saya peroleh dari organisasi.

Tanya: *Masih soal kaderisasi, bagaimana bentuk pembinaannya agar menghasilkan kader-kader GOLKAR yang berkemampuan dan berkualitas?*

Jawab: Perlu saya ingatkan kembali bahwa saat ini kita sedang melaksanakan tugas mewujudkan cita-cita GOLKAR, melaksanakan Tri Sukses. Tri Sukses sebagai program induk GOLKAR, juga pada dirinya mengandung dimensi sebagai acuan, pedoman dan bahkan arahan bagi segenap kader GOLKAR di setiap tingkatan dan semua bidang kegiatan fungsional masing-masing. Lebih dari itu, Tri Sukses adalah juga tantangan dan harapan bagi kader dan warga GOLKAR, untuk berjuang mewujudkannya.

Untuk mencapai hal ini, pembinaan kader haruslah mengandung dimensi-dimensi kualitatif dan fungsional.

Kualitatif dalam arti kader GOLKAR harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga memiliki idealisme perjuangan, kemampuan berpikir dan keuletan untuk memperjuangkan cita-cita.

Fungsional, dalam arti, bahwa kader GOLKAR haruslah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat memerankan kepeloporan dalam memikul tanggungjawab sebagai pelaksana dan penerus perjuangan GOLKAR di lingkungannya masing-masing.

Tanya: *Akibat keberhasilan daripada pembangunan, maka timbul pula tantangan baru di hari depan. Tuntutan masyarakat pun mulai menunjukkan adanya suatu peningkatan secara kualitatif dan makin canggih. Bagaimana GOLKAR mengantisipasi kondisi yang demikian itu?*

Jawab: Merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan telah menciptakan prestasi yang patut dibanggakan. Ada peningkatan luar biasa, tapi sekaligus hal itu menjadi tantangan, khususnya memasuki era tinggal landas.

Sebagai organisasi sosial politik GOLKAR turut bertanggungjawab untuk mempersiapkan mulusnya bangsa ini memasuki era tinggal landas. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat yang makin kualitatif dan canggih, tidak dapat dielakkan mengharuskan kita untuk menyesuaikan cara pendekatan, struktur maupun penanganan masalah juga harus semakin kualitatif dan canggih.

GOLKAR tidak cukup sekedar besar dan kuat, serta tidak cukup hanya memenangkan Pemilu, tetapi kita perlu lebih tajam menganalisa masalah, dan lebih penting lagi, yaitu keakuratan antisipasi terhadap kemungkinan lahirnya masalah dengan persepsi jauh ke depan dengan penuh kewaspadaan dan wawasan kebangsaan yang kokoh dan konsekuen mengacu kepada kepentingan masyarakat banyak. GOLKAR menganggap perlu adanya forum pengkajian yang berkualitas dan bekerja secara profesional. Untuk itu telah dibentuk kelompok kerja & tim kerja yang terdiri dari pakar-pakar di berbagai bidang.

Tanya: *Ada beberapa pengamat politik yang ingin melihat GOLKAR sebagai organisasi sosial politik yang benar-benar mandiri. Bagaimana Ketua Umum melihatnya ini?*

Jawab: Mandiri hendaknya diartikan memperkokoh kedaulatan organisasi sendiri, dengan tanpa mengurangi, apalagi menghilangkan hubungan strategis dengan kawan-kawan seperjuangan.

Bagi GOLKAR, kemandirian itu merupakan kematangan dinamika intern yang mencerminkan kemampuan untuk berkembang sendiri, dengan tanpa menimbulkan beban pada lingkungannya.

Saya berharap janganlah soal kemandirian ditafsirkan atau dikembangkan sebagai pemutusan hubungan GOLKAR dengan komponen keluarga besar GOLKAR. Penafsiran demikian itu jelas salah. Hendaknya jangan berpikir ke arah sana. Memang, di luar berkembang pemikiran seperti itu. Tapi itu pendapat orang di luar GOLKAR. Artinya bukan pendapat organisasi. Dalam kesempatan ini, saya ingatkan kepada seluruh jajaran GOLKAR agar jangan sampai terpengaruh dengan yang berkembang di luar itu.

Tanya: *Soal Pemilu beberapa waktu lalu santer orang membicarakannya. Ada yang menghendaki sudah saatnya sistem Pemilu diganti dengan sistem distrik. Bagaimana sikap GOLKAR?*

Jawab: Bagi GOLKAR sistem Pemilu yang sudah berjalan ini sudah memadai dan memenuhi kebutuhan. Jadi, tidak perlu ada perubahan sistemnya. Mungkin pelaksanaannya secara teknis perlu ada penyempurnaan disana-sini. Tapi tidak harus menggantikan dengan sistem distrik yang katanya lebih demokratis.

Perlu diketahui bahwa untuk merubah sistem Pemilu dibutuhkan waktu dan proses yang panjang untuk mencapai konsensus nasional, seperti apa yang sudah dicapai dengan sistem proporsional. Kalau masih ada pihak yang menginginkan yang distrik, ini hanya membuang waktu saja. Sementara hasilnya belum tentu lebih demokratis. Kenapa GOLKAR menganggap sistem proporsional yang terbaik, karena melalui sistem ini telah berhasil dikembangkan suasana kehidupan politik yang stabil dan dinamis. □

Digitized by Google

Golkar Lahir Dibawah Teriakan "Bubarkan Sekber Golkar"

Tepat pukul dua belas malam, lampu listrik dipadamkan. Suasana pun seketika beranjak hening dan khidmat. Lantas di bawah temaram cahaya lilin, satu demi satu utusan maju ke depan, menggoreskan tanda tangannya, yang menandai dukungannya atas kelahiran Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Di antara keheningan itu terdengar doa, secara Islam, Kristen, dan Hindu Bali.

Peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Oktober 1964 malam, 25 tahun sialm, di aula Sekretariat Front Nasional, Jalan Merdeka Selatan 13, Jakarta. Pada malam itu, hadir 35 organisasi fungsional yang punya niat sama: bergabung membangun kelompok baru yang bercirikan federatif.

Keesokan paginya, 97 organisasi secara bulat menyatakan niatnya untuk bergabung dalam Sekber Golkar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang telah dipersiapkan sebelumnya, dibahas secara singkat, dan diterima dengan beberapa perubahan.

Lantas, rapat besar itu mengamanatkan agar segera dibentuk dewan pimpinan harian. Pertemuan pun usai. Sementara di luar gedung sekretariat itu, berlangsung aksi demontrasi oleh barisan Pemuda Rakyat, organisasi yang bernaung di bawah bendera PKI. Para demonstran mengacung-acungkan spanduk yang bertuliskan "Bubarkan Sekber Golkar".

Organisasi-organisasi yang berfederasi dalam Sekber Golkar itu semuanya kelompok fungsional yang bebas dari naungan partai politik mana pun. Tak lama kemudian, dewan pimpinan pun terbentuk, dengan Ketua Brigjen. Djuhartono, seorang perwira tinggi dari Staf Umum Angkatan Darat.

Organisasi yang bergabung campur aduk. Ada yang gurem, seperti Persatuan Karyawan Radja Farma atau Kopрs Penilik Pegadaian Indonesia. Terdapat pula organisasi "elit", antara lain IDI, Persatuan Jaksa, dan Persahi, yang diwakili Ketuanya Kol. Sudharmono, kini Wakil Presiden. Lalu ada pula barisan kuat, seperti HMI, Pemuda Muhammadiyah, SOKSI, MKGR.

Sekber Golkar lahir ketika Front Nasional — lembaga yang dibangun untuk mendukung aksi-aksi revolusioner Presiden Soekarno mulai *gonjang-ganjing* lantaran dijadikan ajang perebutan pengaruh para partai politik. Cikal-bakal Front Nasional adalah institusi binaan ABRI yang diberi nama Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB), yang dibentuk pada 7 Januari 1958.

Bahwa pihak militer perlu membentuk lembaga itu, tak lain lantaran didesak oleh kebutuhan akan adanya suatu kekuatan sosial politik yang solid, kompak, dan tak hanya pintar menonjok kawan seiring.

Lahirnya Sekber Golkar merupakan suatu pendobrakan atas ketidakberhasilan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ke arah cita-cita membangun masyarakat dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Dalam masa Liberal maupun dalam masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada belum berfungsi selaku *alat demokrasi*. Belum ada kekuatan sosial politik yang mampu tampil penuh sebagai penjunjung tinggi kepentingan rakyat mengatasi kepentingan golongan. Dan dalam masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan-kekuatan sosial politik tidak dapat berperan mengambil bagian dalam kepemimpinan nasional, serta tidak mampu membendung arus Komunisme yang jelas-jelas membahayakan Pancasila sebagai dasar negara. Kehidupan kekuatan-kekuatan sosial politik yang berdasarkan persaingan ideologi, merupakan sumber terjadinya kegoncangan politik dan pemberontakan. Harga yang cukup mahal untuk sejumlah pelajaran mengenai hidup berbangsa dan bernegara.

Kenyataan itulah yang kemudian membangkitkan kesadaran mengenai pembaharuan dalam kehidupan dan struktur politik dengan merombak pola kehidupan kekuatan sosial politik dari orientasi kepada ideologi golongan, menjadi orientasi kepada perjuangan kesejahteraan berdasarkan program. Lagi pula suatu suasana ideologi sentris, menimbulkan kecenderungan-kecenderungan untuk merubah dasar negara Pancasila.

Setelah tertumpasnya PKI — yang sekaligus merupakan masa permulaan Orde Baru — bangsa ini dihadapkan pada beberapa pemikiran alternatif yang berkembang waktu itu. Ada pemikiran yang didorong oleh perhitungan kegagalan sistem politik

Golkar menyatu dengan dinamika masyarakat

Digitized by Google

masa lampau, menghendaki pembubaran sama sekali partai-partai politik lama dan membentuk partai-partai politik baru yang berorientasi program dan menganut hanya satu ideologi, yakni Pancasila. Di sini lain, ada pemikiran di kalangan partai-partai politik yang telah ada, yang mempertahankan eksistensinya, terutama mereka yang turut dalam penumpasan pemberontakan PKI maupun sisa-sisanya.

Dalam fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator, ABRI rupanya memilih semacam jalan tengah. Melalui proses politik yang sangat hati-hati dan penuh kesabaran, melalui jalan panjang yang demokratis dan konstitusionil, sedikit demi sedikit telah menyehatkan kehidupan politik. Mulai dengan penyederhanaan jumlah, untuk selanjutnya memberi dorongan kepada partai-partai politik untuk meninggalkan orientasinya pada ideologi lain, diluar ideologi Pancasila.

Dalam pada itu, tumbuh dan berkembangnya Golkar, ternyata menyatu pemacu bagi semua pihak menuju sistem kehidupan politik Orde Baru. Seraya menjadi pemacu bagi pihak lain, Golkar sendiri pun dalam dirinya senantiasa memacu proses konsolidasi yang pada permulaan berupa pemurnian diri dari perpanjangan tangan partai-partai melalui serikat-serikat atau anak-anak organisasinya yang berselubung kekaryaan. Proses ini berlangsung di masa kelahiran Sekber Golkar dalam periode Orde Lama, dan berlanjut pada awal Orde Baru, disusul bentuk-bentuk konsolidasi lainnya secara terus-menerus.

Bagi Golkar, memang berlaku *adagium pembaharu.* Pertama-tama membaharui dirinya. Pembaharuan awal dari Sekber Golkar adalah pemurnian golongan karya. Bahkan pembentukan Sekber Golkar ini sendiri, merupakan bagian dari pemurnian golongan karya. Sebab, dari mula Sekber Golkar telah menggariskan syarat organisasi yang dapat menjadi anggotanya, haruslah yang tidak berafiliasi kepada sesuatu partai. Sebagai pengemban cita-cita Orde Baru, Sekber Golkar pertama-tama juga mengordebarukan dirinya. Itulah sebabnya, konsolidasi ke dalam tetap dijalankan.

Dengan bekal pemurnian dan pembaharuan struktur yang dicapai itu, Sekber Golkar tampil menghadapi Pemilu 1971. Pada Pemilu 1971, Golkar membawakan diri sebagai alat pembaharuan dengan ideologi Pancasila, sebagai pembawa strategi Orde Baru. Sehingga kemenangan Sekber Golkar waktu itu, membuktikan pula bahwa strategi Orde Baru diterima sebagai pilihan rakyat. Pemilu 1971, dengan demikian juga merupakan sarana demokratis untuk memperbaharui tata kehidupan politik.

Satu hal yang menarik adalah bahwa menjelang Pemilu 1971, Golkar yang telah memurnikan diri, mampu mengajak generasi muda dari kalangan Angkatan 66 dan kalangan cendekiawan yang independen untuk bergabung menjadi pendukung.

Sebelumnya, kelompok generasi tersebut tidak tertarik kepada pola ideologistis yang dijalankan oleh partai-partai. Namun mereka belum menemukan wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi demokratis serta aspirasi pembaharuan.

Masuknya banyak kalangan cendekiawan dan generasi muda yang dinamis ke dalam Golkar merupakan faktor tersendiri pula yang pada gilirannya makin memperkuat aspirasi pembaharuan, dan pola orientasi pada program di dalam tubuh Sekber Golkar.

Sepanjang sejarah Orde Baru, Golkar mampu tampil sebagai motor penggerak utama pembaharuan di segala bidang dalam rangka pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 45. Dalam mengemban strategi politik Orde Baru, Golkar telah turut serta, dan bahkan mempelopori gerak yang menghasilkan berbagai produk politik yang menunjang proses penciptaan mekanisme dan kehidupan politik yang menjadi cita-cita Orde Baru, sesuai yang dikehendaki dalam UUD 45. Hal yang mendasar adalah dalam masalah perombakan dan pembaharuan struktur politik.

Salah satu produk terpenting adalah Tap No. XX-II/MPRS/1966 yang mengatur mengenai kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju penyederhanaan, serta Tap No. XI/MPRS/1966 yang menentukan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum. Lalu pelaksanaan Pemilu 1971 itu sendiri, adalah sarana memantapkan Orde Baru

Hasil Pemilu 1971 yang menampilkan Golkar sebagai pemenang merupakan pula katalisator ke arah pembaharuan struktur politik, meski masih lebih banyak mengandung aspek kuantitatif, yaitu penyederhanaan jumlah partai. Lewat Pemilu, rakyat telah menyeleksi partai-partai.

Pengalaman dalam Pemilu 1971 memberikan gambaran yang menyegarkan, asumsi bahwa tema berdasarkan ideologi akan lebih populer daripada tema program, terbukti keliru. Kenyataan itu, sekaligus membuka cakrawala yang bersifat kualitatif. Dan begitulah seterusnya hingga Pemilu 1987.

Kini Golkar telah menginjak usia yang ke 25 tahun, suatu usia yang terbilang mulai merangka dewasa. Peran yang dimainkan selama kurun waktu itu telah banyak membuahkan hasil. Mantan Sekjen PPP, Drs Mardinsyah pernah mengemukakan bahwa Golkar telah berperan cukup, dan cukup banyak yang telah dilakukan, namun tetap berpegang pada asas musyawarah mufakat. Ia melihat bahwa hal itu merupakan pertanda positif.

Memang apa yang dilakukan Golkar selama ini dalam lembaga, seperti DPR, misalnya, tampak tetap berpegang kepada asas kekeluargaan musyawarah mufakat. Namun beberapa pengamat di sini mengharapkan agar Golkar terus mengembangkan diri di dalam lembaga-lembaga di mana Golkar berada bersama kedua kekuatan politik lainnya.

Mantan Ketua Umum Golkar, Sudharmono SH, (kini Wakil Presiden) juga pernah mengatakan bahwa Golkar sejak semula ingin mempelopori Demokrasi Pancasila, baik dalam kampanye pemilu maupun di forum-forum demokrasi. "Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita saja. Kita selalu terbuka dengan ide-ide baru. Musyawarah mufakat ingin kita terapkan. Kalau ada pihak yang belum menerima, akan kita coba untuk menjelaskan," katanya waktu itu ketika masih menjabat Ketua Umum Golkar.

Golkar memang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri saja, tetapi memperjuangkan aspirasi dan mengembangkan inspirasi seluruh rakyat.

Apalagi dalam periode sekarang ini yang merupakan periode yang maha penting dalam pembangunan bangsa, Golkar telah bertekad untuk mensukseskan Pelita V sebagai salah satu sasaran Tri Sukses Golkar.

Golkar memang akan tetap teguh dengan pendiriannya bahwa pembangunan yang kini tengah dijalankan harus berjalan menuju kepada sasaran dan tujuan yang lebih berbobot idelaistis, yang mengacu kepada nilai Pancasila dan konstitusional UUD 45. Bahwa sistem ekonomi yang kita dukung dan hendak dikembangkan ada-

Digitized by Google

Kelompok fungsional

lah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Namun di balik itu, Golkar sebagai organisasi kekuatan politik hendaknya harus cukup realistis dalam melihat, memahami dan bersikap terhadap segala kondisi yang nyata; tanggap terhadap berbagai gejala yang muncul dan aneka permasalahan masyarakat, serta senantiasa menyatu dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Inilah yang sering disebut sebagai pola pembangunan berwawasan kemanusiaan, dan pola pembangunan yang disemangati oleh idelaisme yang teguh dan selalu bertumpu pada kenyataan sebagai pengalaman Pancasila.

Karena itu Golkar mencanangkan program kaderisasi dan pelaksanaan Tri Sukses, yang mempunyai makna strategis, terutama bila dikaitkan dengan tantangan-tantangan bangsa Indonesia yang akan dihadapi di masa mendatang.

Tantangan yang jelas ada kini adalah bagaimana lebih meningkatkan kesejahteraan lahir batin rakyat, sejalan dengan menaiknya tingkat tuntutan kebutuhan dan hasrat kesejahteraan masyarakat sesuai kemajuan jaman.

Tapi tantangan-tantangan lainnya bisa berbentuk ancaman. Dalam suasana komunikasi dunia yang semakin terbuka, berbagai jenis ancaman bisa datang dari luar, bisa dari dalam tubuh masyarakat itu sendiri, atau keduaduanya sekaligus.

Yang lebih sulit dihadapi sebenarnya bila berasal dari dalam tubuh masyarakat kita sendiri. Karena bentuk ancamana seperti itu, biasanya lebih sukar dikenali dan sekaligus mudah mengundang ancaman baru dari luar sistem tata masyarakat kita.

Untuk memberi kesimpulan dapatlah dikatakan bahwa tugas Golkar di masa datang adalah meningkatkan kualitas kehidupan politik dalam Demokrasi Pancasila, sehingga kehidupan demokrasi Pancasila mampu menciptakan stabilitas nasional yang dinamis dan menyeluruh, sebagai prasyarat untuk kesinambungan pembangunan bangsa yang dicita-citakan. Dan tampaknya peranan Golkar sebagai pelopor dalam kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 akan diperlukan sepanjang masa.

Juwono Sudarsono dalam kesannya mengemukakan bahwa Golkar kini terlihat lebih mandiri. Kemandirian ini disebutnya merupakan hasil pekerjaan raksasa dalam bidang organisasi, dan perubahannya tidak terduga telah berakibat sangat luas.

Golkar sebagai alat politik nasional mampu menjadi transformator, penggerak utama dalam masyarakat. Transformasi dalam masyarakat memang memerlukan durasi, artinya ia tidak seperti ilusi perancang politik, yang seolah-olah transformasi dapat dilakukan cepat dan berlaku pada satu sektor. Di sinilah Golkar harus mampu membaca peta, struktur dan nilai-nilai yang berlaku pada masing-masing daerah, sehingga tidak sepenuhnya apa yang berlaku di Jakarta diterapkan di daerah-daerah.

Seorang pengamat politik mengemukakan bahwa dalam transformasi berlaku ketepatan dan prioritas. Maka yang perlu diketahui adalah sektor mana yang didahulukan, dan mana yang perlu lebih cepat ditransformasikan, serta mana yang harus dibelakangkan.

Katanya, transformasi itu berlaku sesuai dengan lingkungan, kultural dan tingkatan ekonomi masyarakat. Semua ini harus tercermin dalam program seperti kaderissi, karakterdes, yang merupakan usaha untuk memantapkan organisasi sampai ke daerah-daerah.

Selain itu — dan tampaknya — yang perlu dilakukan lagi oleh Golkar bagaimana organisasi politik lebih dekat lagi dengan rakyat, agar apa yang disebut dengan program Tri Sukses dapat terwujud sesuai dengan program.

Sebab bila ia dekat dengan rakyat akan memudahkan Golkar mengetahui secara lebih mendalam problema masyarakat itu sendiri. Dengan demikian apa yang berkembang dalam masyarakat lebih mudah diketahui, serta langkah apa yang harus diperbuat.

Beberapa pedagang kaki lima yang sempat direkam dalam pembicaraan mengharapkan organisasi ini untuk lebih memperhatikan orang-orang kecil, sehingga keberadaan mereka di tengah pembangunan yang sangat pesat ini, ada tempat buat mereka mengadu.

"Kita mengharapkan Golkar lebih memperhatikan pedagang seperti kami ini, sehingga buat kita ada tempat berlindung," kata Musto, 35, seorang pedagang kaki lima di bilangan Jatinegara.

Ia menilai bahwa keberadaan organisasi politik ini terasa kian mantap. Dan ini, katanya, harus terus lebih dimantapkan di masa mendatang.

"Keberadaan Golkar di tengah-tengah kita sudah mapan. Tapi memang perlu dikembangkan oleh para kadernya," tambah Musto. □ Lt

Digitized by Google

Apa Kata Mereka Tentang Golkar

Setelah diuraikan serba sedikit mengenai sejarah dan perkembangan Golkar, ada baiknya juga disimak kesan-kesan anggota masyarakat tentang Golongan Karya.

Aberson M. Sihaloho (anggota DPR dari F-PDI): Dilihat dari penampilan Golongan karya selama empat kali Pemilihan Umum, di mana dia selalu menjadi pemenang. Malah yang terakhir, Pemilu tahun 1987 Golkar mendapat 73 persen, jadi mayoritas mutlak. Maka dilihat dari situ, kelihatan Golkar telah mencapai hasil yang besar.

Nah, tapi masalahnya sekarang apakah besarnya Golongan Karya yang secara formal melalui Pemilu memperoleh dukungan rakyat yang begitu besar, dapat memanfaatkan hasil tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional, demi mencapai tujuan cita-cita perjuangan bangsa?

Dalam hal ini saya melihat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala itu ada dalam tubuh Golkar sendiri.

Maksudnya, kita masih lihat terjadinya masalah-masalah apakah itu dibidang sosial, politik, budaya dan sebagainya, yang terjadi diberbagai daerah, di mana Golkar memperoleh dukungan mayoritas rakyat.

Menurut saya, masalah-masalah tersebut tidak perlu terjadi apabila ada suatu persamaan keinginan dalam tubuh Golkar sendiri.

Dari kejadian-kejadian itu, kita di satu sisi mendapat kesan: Apakah kemenangan mutlak Golkar itu benar-benar riel, artinya benar-benar begitu kehendak rakyat. Atau karena Golkar belum mampu melakukan konsolidasi wawasan, dengan kemenangan besar itu.

Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang tidak bergabung dengan Golkar. Ini saya kira salah satu pertanyaan yang cukup mendasar, yang perlu mendapat perhatian dalam rangka HUT Golkar tahun ini.

Lebih lanjut dikatakannya, seharusnya kemenangan mutlak yang diperoleh Golongan Karya itu, harus membuat Golkar lebih bisa menggilimir adanya masalah-masalah sosial. Seperti yang terakhir ini terjadi, yakni masalah antara para pedagang asongan dengan Pemerintah Daerah.

Kader Golkar dalam Pemilu 1987

Pada bagian lain perbincangan ini, Arberson juga menunjuk soal lain yang perlu mendapat perhatian.

Dikatakan, dari sisi lain yang menonjol adalah kehadiran tokoh-tokoh ABRI yang belum mencapai usia pensiun secara formal, namun karena memimpin Golongan Karya, lantas dipensiunkan.

Ini juga merupakan pekerjaan rumah yang saya kira sangat penting bagi Golongan Karya dalam rangka mencari keserasian. Artinya, di dalam keseluruhan sistim politik kita.

Sebab, bagaimanapun juga Frkasi ABRI itu 'kan ada di DPRD/DPR maupun di MPR. Sedangkan di satu pihak ada ABRI yang juga belum pada usia pensiun, tapi kemudian dipensiunkan karena dia memimpin Golkar. Dia juga bisa menjadi Kepala Daerah.

Nah, ini tentu memerlukan suatu keserasian. Karena bagaimanapun, kemandirian dari masing-masing kekuatan sosial politik itu perlu.

Tapi, bukan kemandirian dalam arti bahwa dia harus dipertentangkan satu dengan lain, tidak. Namun, kemandirian itu perlu di dalam rangka kita menyerap aspirasi daripada rakyat, supaya mempunyai persepsi yang sama.

Menurutnya, Presiden Soeharto sendiri dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 1989 lalu menekankan betapa pentingnya soal kemandirian.

Presiden Soeharto dalam kesempatan itu antara lain mengatakan, organisasi kekuatan sosial politik, utamanya kekuatan sosial politik yang ikut menjadi peserta pemilihan umum, harus makin kuat dan mandiri dalam rangka pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, Presiden Soeharto mengatakan, kehidupan demokrasi secara nasional akan semakin segar apabila demokrasi dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik juga tumbuh dengan segar.

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Golongan Karya ke-25, saya sangat mengharapkan Golkar sebagai salah satu modal dasar pembangunan kita dan yang juga pemenang mutlak/yang mendapat suara terbanyak dalam empat kali Pemilihan Umum, untuk dapat memperhatikan pidato Presiden Soeharto tersebut.

Karena dia menyangkut bagaimana peranan daripada organisasi kekuatan-kekuatan sosial politik, utamanya yang menjadi organisasi peserta Pemilu. Ini sangat strategis sekali. Dan, pendapat saya, ini penting diperhatikan Golkar, terutama dalam konteks yang tadi saya sebutkan.

Saya bukan tidak setuju kehadiran dari perwira-perwira ABRI sebagai pengurus atau sebagai fungsionaris Golongan Karya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Digitized by Google

Saya sepenuhnya setuju, tapi maunya itu semua tetap dalam rangka mewujudkan apa yang disampaikan Presiden Soeharto.

Menyinggung soal kaderisasi, Aberson Sihaloho mengatakan, kader itu yang baik menurut saya adalah lahir daripada proses itu sendiri, alamiah. Kita itu hanya menyiapkan sarana dan prasarana saja agar setiap warga negara itu bisa mengembangkan dirinya, yang juga akan menjadi pemimpin-pemimpin nasional.

Jadi kaderisasi harum secara alamiah. Sedangkan kaderisasi-kaderisasi yang menekankan pada mobilisasi-mobilisasi, nah itu menurut saya tidak akan banyak manfaatnya. Karena itu hanya penampilan-penampilan secara seremonial yang banyak.

Menjawab pertayaan dia mengatakan, dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua kader Golkar, maka dapat dicegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama. "Jadi yang penting, kita berikan kesempatan yang sama, kita ciptakan iklim demokratis. Nah, itu yang dikatakan oleh Presiden Soeharto bahwa kehidupan demokrasi dalam kekuatan-kekuatan sosial politik itu yang sangat penting untuk ditumbuhkan. Karena dengan demikian akan lahir kader-kader yang tangguh."

Namun demokrasi yang saya maksudkan di sini, bukan demokrasi yang sekedar untuk kebebasan untuk mengatakan segala sesuatu. Tapi demokrasi yang saya maksudkan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan demokrasi yang memberi peluang kepada semua orang untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya, dan bertanggungjawab.

Menyinggung kesan-kesan lainnya, Aberson sekali lagi menegaskan, semua pihak berkepentingan agar Golongan Karya makin mandiri. Karena Golkar disamping sebagai salah satu modal pembangunan juga merupakan salah satu organisasi peserta pemilu yang mendapat dukungan sangat besar dari rakyat. Demikian pula halnya mengenai soal agar didalam tubuh Golkar tumbuh kehidupan demokratis.

Jadi, semua pihak berkepentingan, bukan hanya Golkar. Ini kepentingan bangsa dan negara. Kita juga bukan harus PDI yang bisa, misalnya, mencapai cita-cita tujuan perjuangan bangsa. Ya, apakah Golkar atau ABRI, kita silakan saja.

Misalnya untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan, kita juga bukan harus PDI. Bagi siapapun, asal itu bisa kita perangi, ya silakan.

Jadi, bukan siapa yang harus mencapai tujuan itu. Itu makanya, salah satu perlunya pemilihan umum supaya masing-masing organisasi sosial politik itu menyampaikan programnya dan biarkan rakyat yang memilih.

BP. Messakh (Anggota Fraksi Karya Pembangunan-DPR): Dalam umur Golongan Karya yang sudah mencapai 25 tahun, maka saya kira masalah kaderisasi merupakan suatu tuntutan mendesak. Tapi kaderisasi yang dilakukan bukan lagi ditujukan untuk mencapai pada jumlah yang banyak. Namun orientasinya sudah harus tertuju pada kualitas, yang disesuaikan agar calon-calon kader itu nantinya mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di masa depan.

Namun agar proses kaderisasi itu mampu menghasilkan kader-kader yang tangguh dan berkualitas diperlukan prasyarat-prasyarat.

Artinya, untuk mendapatkan kader-kader yang benar-benar menghayati/meyakini ikrar Golongan Karya serta meyakini segala ajaran-ajarannya, maka proses kaderisasinya tidak hanya cukup dengan mengajari mereka secara verbal saja (Hanya ngomong). Tapi harus dibarengi dengan perbuatan/perilaku sesuai yang diajarkan kepada mereka.

Kalau hanya melalui pendidikan verbal saja, sulit diharapkan mereka bisa meyakini kebenaran perjuangan Golongan Karya. Bila tidak ada keyakinan, maka sulit diharapkan adanya persepsi yang sama.

Untuk itu, bila mengharapkan kader-kader memiliki keyakinan terhadap kebenaran perjuangan Golongan Karya dan mereka mempunyai persepsi yang sama, maka pendidikannya yang diberikan kepada mereka tidak cukup hanya dengan bicara saja. Tapi juga dibarengi dengan tindakan yang sesuai dengan yang diajarkan.

Bila kita mengatakan mencuri itu tidak baik, korupsi itu jelek, ya kita jangan melakukan. "Bila tiap hari kita melakukan mencuri atau korupsi, bagaimana kader-kader bisa memiliki keyakinan atas kebenaran perjuangan yang kita ajarkan."☐ (Hes)

GABUNGAN ASOSIASI PENYALUR GULA PASIR TEPUNG TERIGU BULOG

GAPEGTI-BULOG

SEKRETARIAT : JALAN TELUK BETUNG No. 26, JAKARTA 10310
TELEPHONE : 324538 - 3106604 - 3106605 - 3104827

DEWAN PENGURUS HARIAN GAPEGTI-BULOG BESERTA APEGTI BULOG SELURUH INDONESIA

MENGUCAPKAN :

Dirgahayu ke 25 Golongan Karya
20 Oktober 1989

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Segenap Anggota Golkar Untuk mencapai Cita-cita dan Perjuangan Golkar dalam rangka Kesinambungan Pembangunan Nasional

Digitized by Google

Oleh: Sukarton Marmosudjono, SH

Posisi Dan Peranan Kader Golkar Dalam Menghadapi Tantangan Ke Masa Depan

Sukarton Marmosudjono, SH

Sudah 25 tahun Golkar hadir di tengah-tengah perjuangan bangsa kita dan sejak Orde Baru tampil serta berperan besar dalam kehidupan nasional kita sampai saat sekarang ini, yang kita perjuangkan untuk berlangsung terus kemasa depan. Sejak kelahirannya, konsepsi dasar yang diperjuangkan oleh Golkar adalah membangun suatu sistem nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena berkeyakinan bahwa hanya dengan demikianlah persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional dapat terpelihara dan teguh kokoh, kemajuan-kemajuan nasional dapat dicapai, yang kesemuanya adalah untuk mencapai tujuan nasional atau cita-cita luhur bangsa yang disepakati dan dipegang teguh sejak berdirinya Negara Kebangsaan Indonesia.

Konsepsi pembangunan nasional yang ditampilkan oleh Golkar ternyata mendapat dukungan rakyat, sebagaimana terbukti dengan perolehan suara Golkar sejak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1987 yang lalu dan peranserta yang diberikan rakyat dalam merealisasikan konsepsi pembangunan itu melalui keseluruhan gerak pembangunan nasional kita. Hasil-hasilnya sudah kita rasakan bersama, yang pada pokoknya dapat dinyatakan sebagai berikut:

-Semakin mantapnya pengamanan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional, yang merupakan hal sangat penting bagi keutuhan bangsa serta mengarahkan perwujudan dan warna perkembangan masyarakat, bangsa dan negara kita kemasa yang akan datang. Salah satu bentuk pengamanan Pancasila yang sangat berpengaruh ke masa depan adalah seberapa jauh kita mampu mengamalkan Pancasila itu dalam keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara nyata.

-Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional kita. Integrasi nasional yang kokoh merupakan faktor sangat penting dalam mendukung upaya-upaya kita untuk meraih kemajuan-kemajuan bagi kesejahteraan, derajat dan martabat bangsa kita termasuk rakyat yang menjadi pendukung utamanya. Bagaimanapaun besarnya potensi yang dimiliki semuanya tidak akan dapat berkembang maju bila integrasi nasional kita dalam keadaan rapuh. Persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional yang kokoh itu merupakan salah satu hasil sangat penting dari pembangunan yang telah dilaksanakan, serta menjadi salah satu modal teramat penting untuk melanjutkan pembangunan ke masa datang.

-Kemajuan-kemajuan nasional atau progres nasional yang menyangkut kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat kita terangkat kemampuan derajat dan martabanya, yang sekaligus berarti lebih mampu pula memberi sumbangan bagi kelangsungan pembangunan dimasa yang akan datang. Progres nasional yang menyangkut kesejahteraan ini mempunyai arti penting, karena berkaitan pula dengan kepercayaan diri dan kemampuan kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang lebih berat lagi dihari esok.

-Mekanisme kepemimpinan nasional yang telah diletakkan dasar-dasarnya secara cukup kokoh, yang menjadi suatu faktor penting dalam menjamin stabilitas nasional yang dinamis, demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Mekanisme kepemiminan nasional yang telah diletakkan dasar-dasarnya secara cukup kokoh ikut juga merupakan suatu hasil teramat penting dalam pembangunan nasional kita selama Orde Baru, karena melalui mekanisme seperti itu dapat tampil kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa ini mencapai tingkat integrasi nasional yang tinggi, kemajuan-kemajuan nasional yang mengarah pada kesejahteraan rakyat, memiliki wawasan strategis yang jauh ke depan dan menggugah rakyat untuk secara demokratis berperanserta menuju masa depan bersama itu.

-Demokrasi Pancasila yang terus dikembangkan baik dibidang politik, ekonomi dan sosial, yang memberi kesempatan luas bagi rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras, serasi dan seimbang dalam wadah kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Bentuk-bentuk perwujudan Demokrasi Pancasila seperti yang telah kita capai selama ini juga merupakan aset penting untuk terus dikembangkan ke masa datang.

-Hasil-hasil penting dan mendasar yang telah dicapai melalui pembangun-

Digitized by Google

an nasional selama ini, bukanlah sesuatu yang akan terpelihara dan berkembang dengan sendirinya tanpa perjuangan berlanjut yang lebih keras dan lebih bermutu lagi kemasa depan, mengingat tantangan-tantangan yang akan dihadapi dimasa datang itu akan lebih berat dan lebih kompleks, baik karena dinamika dari dalam tubuh bangsa kita sendiri maupun karena pengaruh dari luar. Kita akan dapat memelihara dan bahkan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai itu, bilamana kita mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan baru tersebut. Kemampuan-kemampuan yang telah kita miliki harus dikembangkan dan ditingkatkan, agar mampu menghadapi dan menyelesaikan tantangan masa depan itu. Tantangan-tantangan baru itu pada garis pokoknya dapat dinyatakan sebagai berikut:

-Ilmu pengetahuan dan tehnologi akan mempunyai pengaruh lebih besar, yang akan membawa pergeseran dan perubahan-perubahan besar pada hampir semua aspek kehidupan bangsa kita. Masyarakat akan mengalami differensiasi dan spesialisasi yang lebih luas dan lebih dalam, yang mana memerlukan kecakapan yang tinggi untuk menangani dan menyelenggarakannya. Differensiasi dan spesialisasi yang lebih luas dan lebih dalam tidak dapat dihindarkan sebagai dampak dari semakin besarnya pengaruh ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam kehidupan kita, dan untuk menghadapi hal itu maka tiada pilihan lain selain meningkatkan profesionalisme disemua bidang.

Mereka yang tidak mampu meningkatkan professionalismenya akan gagal menempatkan diri dan gagal mengambil peran dalam perkembangan kemajuan masyarakat yang semakin luas dan mendalam differensiasi dan spesialisasinya itu. Kegagalan menempatkan diri dan mengambil peran dalam arus kemajuan seperti itu, mempunyai dampak luas dan membawa konsekuensi yang besar dalam kehidupan bangsa kita dimasa datang itu.

-Kemajuan-kemajuan yang kita capai dalam hal kesejahteraan membawa serta tampilnya aspirasi-aspirasi baru yang bersifat kualitatif seperti peningkatan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, pemerataan dan pelayanan umum (public service) yang lebih baik dan semacamnya. Masyarakat juga menuntut keterbukaan yang lebih luas. Aspirasi-aspirasi baru yang bersifat kualitatif ini tidak dapat diabaikan apalagi dihindari, bilamana kita ingin terus memelihara dan memperkuat sistem nasional yang kita bangun ini. Bilamana dapat diserap dan diolah secara memadai, maka aspirasi-aspirasi baru itu akan menyegarkan sistem kita, sedangkan apabila kita gagal menanganinya maka aspirasi-aspirasi baru itu akan merupakan problem serius bagi sistem yang ada ini. Untuk menyerap dan mengolah aspirasi-aspirasi baru tersebut sebagai hal yang menyegarkan sistem yang kita bangun ini, diperlukan kemampuan atau kualitas-kualitas tertentu yang relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan terbuka serta mendambakan orientasi kerakyatan yang lebih nyata dan berbobot.

-Munculnya generasi baru yang persepsi dan aspirasi sedikit banyak mempunyai perbedaan dengan generasi sebelumnya, baik dalam melihat perkembangan demokrasi, keadilan dibidang ekonomi dan hukum, pemerataan, pelayanan umum (public service) yang dilakukan birokrasi dan bobot keikutsertaan rakyat dalam menentukan masa depan bangsa dan negara pada umumnya.

Munculnya generasi baru dengan persepsi dan aspirasinya yang spesifik itu, dengan latar belakang pendidikan yang relatif lebih tinggi serta sifatnya yang kritis, rasional dan dinamis, merupakan tantantangan tersendiri yang memerlukan renungan mendalam dari kita semua yang ingin memelihara dan melanjutkan perjuangan Golkar ini kemasa datang.

Jelaslah bahwa tantangan kita kemasa depan adalah memelihara dan memantapkan hasil-hasil yang sudah dicapai selama ini serta sekaligus menghadapi dan menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan baru yang kita antisipasikan. Kombinasi dari kemampuan untuk memelihara dan memantapkan hasil yang telah dicapai dengan kemampuan menghadapi tantangan-tantangan baru yang akan muncul, merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para kader Golkar dalam mengambil posisi dan peranan kemasa depan, yang harus kita persiapkan secara sistematis, konsepsional, konsisten dan sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Kualitas yang perlu dimiliki itu pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

-Mempunyai kommitmen yang teguh terhadap Pancasila dan mampu mengamalkannya secara nyata sebagai tauladan bagi masyarakat. Ketauladanan para kader Golkar dalam mengamalkan Pancasila itu merupakan suatu faktor penting dalam mengamankan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kemasa depan. Yang diperlukan dan dituntut masyarakat sekarang ini, terlebih lagi kemasa depan, adalah ketauladanan. Tanpa ketauladanan yang nyata terlihat dan terasakan oleh masyarakat, maka pengamalan dan pengamanan Pancasila kemasa depan akan mengalami banyak masalah besar.

Munculnya generasi baru dengan persepsi spesifik

Digitized by Google

-Kecapakan professional yang tinggi sesuai bidang pengabdiannya sehingga bisa mandiri dan menjadi pelopor yang mampu menggerakkan masyarakat dalam mengambil peranan pada arus pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat yang semakin mendalam dan kompleks sifatnya. Kecakapan professional tidak hanya dibidang politik dalam arti sempit yang mengacu pada penugasan sebagai anggota lembaga legislatif, tetapi pada semua bidang dan sektor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan rakyat. Semakin lama dan semakin maju pembangunan nasional, semakin kita sadari bahwa saling kaitan dan saling pengaruh antar bidang dan sektor semakin erat, sehingga semua bidang dan sektor harus kita kembangkan dan kita bangun. Itu semua membutuhkan kepeloporan dari para kader dengan kemampuan professional yang tinggi, sehingga dinamika masyarakat benar-benar dapat digerakkan dan disalurkan secara sepadan dengan tuntutan peningkatan pembangunan nasional. Tanpa kecakapan professional yang tinggi itu, maka para kader kita tidak akan mampu menempatkan diri dan berperan sebagai pelopor dan pemimpin yang mempunyai lingkup pengaruh dalam masyarakat.

Pergeseran dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala besar dan luas, membuat masyarakat semakin menghargai mereka yang memiliki kemampuan professional yang dapat menggerakkan berbagai bidang dan sektor kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat itu. Bilamana sekarang ini pola pikir sebagian besar kader kita masih mengarah pada peningkatan kecakapan professional yang mengacu pada penugasan di sektor legislatif, maka sekarang dan terlebih kemasa depan kita harus mengembangkan pola pikir yang berorientasi pada peningkatan kemampuan professional disegala bidang dan sektor, agar para kader kita dapat diterima peranan dan pengaruhnya disemua bidang dan sektor kehidupan masyarakat itu pula. Dengan demikian para kader Golkar bukan menjadi beban tambahan melainkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

-Memiliki karakter yang teguh dan utuh, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan karenanya mampu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat itu dalam arus perjuangan pembangunan. Dalam suatu masyarakat yang sedang dan akan terus mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan besar, kita menyadari banyaknya pengaruh negatif terhadap perkembangan kepribadian para kader kita. Masyarakat juga mengamati dan melihat hal itu. Tantangannya sekarang adalah bagaimana para kader kita dapat memelihara karakter yang teguh dan utuh dalam menghadapi berbagai kemungkinan pengaruh negatif itu, dan tetap mampu bertahan serta mengembangkan diri dalam alur kejuangan dan perjuangannya sebagai kader Golkar, dibidang atau disektor manapun ia mendapatkan penugasan untuk mengabdikan diri. Kredibilitas para kader Golkar dimata masyarakat akan sangat banyak ditentukan kemasa datang oleh persoalan karakter ini.

-Memiliki akses yang luas dan keterbukaan terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan, berbekal sikap demokratis-kerakyatan yang berkembang melalui perhatian, keperdulian dan kesetiakawanan dengan masalah dan kesulitan yang memang dirasakan oleh rakyat kita. Bila kita sungguh-sungguh mengingini agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat tumbuh dari bawah, maka kader Golkar haruslah memiliki akses yang luas pada kelompok-kelompok dalam masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan, sehingga dapat menjadi penggerak dan pengarah dari dinamika yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Hanya dengan memiliki kualitas seperti itu dan mengembangkan secara nyata, para kader Golkar dapat menempati posisi dan mempunyai peranan berharga dalam melanjutkan perjuangan Golkar yang berarti pula perjuangan bangsa dan negara kemasa yang akan datang.□

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN
PERJAN PEGADAIAN

mengucapkan :

DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA PADA ULANG TAHUN KE-25
TANGGAL 20 OKTOBER 1989

KAMI SIAP MELAYANI KEBUTUHAN UNTUK MODAL USAHA/USAHA PRODUKTIF LAINNYA
UNTUK MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH MAUPUN MENENGAH

HUBUNGI KANTOR-KANTOR CABANG KAMI
YANG TERDEKAT DENGAN DOMISILI ANDA

ANDA DATANG DENGAN MUKA MURAM, PULANG DENGAN TAWA RIA

Digitized by Google

Membuka Isolasi, Mendorong Pertumbuhan

Ir. H. Moh. Said

"Teori yang mengatakan bahwa pembangunan prasarana jalan disuatu daerah, harus dilihat lebih dulu dukungan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Agar dapat memungkinkan kembalinya investasi yang telah ditanam untuk pembangunan prasarana jalan tersebut.

Teori ini sekarang kita balik, bangun jalan akan bisa mendorong kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dapat dicapai", kata Ir.Moh.Said, Gubernur Kalimantan Selatan dalam wawancara khususnya dengan MEDIA KARYA awal Oktober lalu.

Itu dikerjakannya, ia membangun prasarana jalan untuk membuka daerah-daerah yang selama ini terisolasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan.

Pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota propinsi, Banjarmasin sepanjang 287 km telah selesai dibangun. Daerah Tanah Laut, adalah daerah yang selama bertahun-tahun terisoler dari pusat kota, sehingga pertumbuhan ekonominyapun sangat rendah dibanding dengan Kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Selatan.

Selama Pelita IV, prioritas pembangunan diberikan kepada pembangunan prasarana jalan. Utamanya di bagian Timur dan bagian Utara. Kedua kawasan ini merupakan daerah-daerah yang terisoler dari pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Teori Moh.Said ternyata berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang dilalui jalan yang dibangun dengan hotmix sepanjang 287 km dari Banjarmasin sampai Batulicin itu. Jarak yang sebelumnya ditempuh dengan pesawat udara, dan berhari-hari jika lewat darat, kini cukup empat jam saja.

Sedikitnya ada sepuluh masalah yang mendapat prioritas dalam pembangunan di Kalimantan Selatan selama Pelita IV, yaitu:

1. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan utama (jalan negara, propinsi dan jalan Kabupaten) dengan cara mengusahakan bantuan luar negeri yang didukung APBD.
2. Secara bertahap membuka daerah-daerah yang selama ini terisoler.
3. Meningkatkan produksi pertanian dengan titik berat pada pelestarian swasembada pangan.
4. Mengundang investor untuk menanam modalnya di Kalimantan Selatan dibidang industri, pertanian dan pertambangan dalam arti luas.
5. Membina dan meningkatkan industri kerajinan dan industri rakyat.
6. Peningkatan dan pengembangan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama dengan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi.
7. Memberi motivasi kepada masyarakat untuk dapat hidup sehat melalui pembangunan Posyandu, peningkatan gizi, hidup bersih, ikut KB dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
8. Mengusahakan latihan-latihan ketrampilan bagi pemuda di BLK dan KLK serta latihan-latihan oleh beberapa instansi.
9. Menggalakkan P-4, sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia.
10. Mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sebab tanpa persatuan dan kesatuan tidak mungkin membangun daerah ini.

Prioritas-prioritas yang diletakkan dalam pembangunan selama Pelita IV ini, tergambar jelas dalam cerita berikut:

Perekonomian dan pendapatan asli daerah

Menurut Gubernur Moh.Said, selama Pelita IV perekonomian daerah Kalimantan Selatan bertumbuh dengan rata-rata 6% setahun. Dengan rincian: tahun 1984 - 6,17%, 1985 = 3,72%, 1986 = 5,85%, 1987 = 7,39% dan tahun 1988 = 7,21%. Pertumbuhan ekonomi ini juga tercermin dalam pendapatan perkapita penduduk Kalimantan Selatan yang terus meningkat selama Pelita IV yakni: tahun 1984 = Rp. 392.579,94. 1985 = Rp. 420.106, 67. 1986= Rp. 457.224,07. 1987 = Rp. 541.016,11. dan tahun 1988

Digitized by Google

= Rp. 620.991,77.
Dari angka-angka tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 1984 hingga 1988 pendapatan regional perkapita Kalimantan Selatan mengalami kenaikan rata-rata 12,59%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1987 sebesar 18,33%, dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita diatas ternyata juga tergambar dalam tingkat kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi dan terbagi secara merata pula. Berdasarkan penelitian dan penghitungan Gini Ratio tahun 1981, menunjukkan bahwa GR Kalimantan Selatan 0,41. Tahun 1987 meningkat menjadi 0,36. Gini Ratio (GR) adalah tolok ukur untuk menghitung tingkat kemakmuran. Dari kedua angka GR tersebut dapat ditafsirkan bahwa telah terjadi perbaikan dalam pembagian pendapatan daerah. Dengan kata lain, tingkat pemerataan pendapatan pada tahu 1987 lebih baik dari tahun 1981.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan itu juga tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Selama Pelita IV, PAD Kalimantan Selatan adalah:

Ketua Komisi D DPRD Kalimantan Selatan, Djebbar Habib, dalam wawancara terpisahnya dengan MEDIA KARYA mengatakan, "Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan selama Pelita IV memang cukup mengesankan, dibanding pada waktu-waktu sebelumnya".

Terutama sekali keputusan Gubernur untuk membangun prasarana jalan umum sepanjang Kalimantan Selatan bagian Timur dan Utara, yang sebelumnya merupakan daerah terisoler. Jalan dari Banjarmasin sampai Kota Baru sepanjang 287 km, telah membuka daerah yang selama puluhan tahun terisoler dari pusat-pusat kegiatan ekonomi, kini telah berkembang dan memberi hidup bagi masyarakat sepanjang jalan tersebut.

"Untuk membangun jalan tersebut, beliau menempuh jalan yang memang tidak populer, yaitu menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana jalan tersebut. Jalan ini dibangun oleh sebuah kontraktor dari Korea Selatan", kata Djebbar.

Disektor pertanian, Kalimantan Selatan yang dulunya hanya mengenal tanaman monokultur, hanya karet saja, sekarang telah diperluas dengan tanaman kelapa sawit, cokelat, tebu, palaga dan lada. Kelapa sawit dan tebu menggunakan sistem PIR dimana para plasma sekarang ini sudah mulai menikmati hasilnya.

Yang paling pesat perkembangannya adalah PIR Tebu dan Kelapa Sawit yang kebanyakan dikerjakan oleh para transmigran. Pabrik gula Pelaihari misalnya, bahan bakunya — tebu — dipasok oleh petani PIR Tebu. Para petani itu sebagai plasma, kini telah menikmati hasil dari pada tanaman tebunya.

Tabal 1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Rencana (Rp).	Realisasi Rp.	Realisasi %
1984/1985	4.860.445.271,50	4.808.520.989,08	98,93
1985/1986	4.602.003.965,00	5.137.861.089,39	111,64
1986/1987	4.610.003.099,00	5.676.256.339,23	123,13
1987/1988	5.506.239.000,00	6.390.573.997,90	116,06
1988/1989	6.922.370.000,00	7.686.204.295,63	111,03

Catatan: Angka-angka diatas tidak termasuk PBB dan IHH.

Tabel 2 - Struktur Ekonomi

(atas dasar harga konstan 1983)

No	Sektor ekonomi	1983 (%)	1988* (%)
1.	Pertanian	31,66	28,63
2.	Penggalian	0,56	0,52
3.	Industri pengolahan	12,35	13,69
4.	Listrik dan air minum	0,86	1,32
5.	Bangunan/konstruksi	3,52	3,40
6.	Perdagangan, restoran dan perhotelan	20,37	23,51
7.	Pengangkutan & komunikasi	10,82	9,76
8.	Keuangan, asuransi, sewa rumah dan jasa perusahaan	8,01	7,77
9.	Pemerintahan & jasa-jasa	11,49	11,40
	J u m l a h	100,00	100,00

1988* angka sementara

Penerbitan

Untuk menjamin kelancaran pembangunan ekonomi, sosial dan politik, langkah penertiban disegala bidang selama Pelita IV memang diberikan perhatian khusus. Terutama di dalam tubuh pemerintah daerah sendiri. Selama Pelita IV pembenahan dalam tubuh birokrasi terus dilaksanakan, dengan melaksanakan penggeseran dan penempatan aparat secara tepat guna, sehingga dapat mandiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

"Singkatnya, selama Pelita IV Gubernur Kepala Daerah melakukan pembenahan yang diikuti oleh pendelegasian kewenangan kepada aparatnya. Sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan oleh Gubernur, tetapi cukup pada tingkat Biro sudah cukup. Dengan begitu, Gubernur akan memusatkan perhatiannya pada masalah masalah serta kebijaksanaan-kebijaksanaan strategis," kata Ketua Komisi D DPRD Kalimantan Selatan itu menambahkan.

Salah satu cara memacu pembangunan di daerah ini, adalah dengan menekan pengeluaran rutin disamping menggali sumber-sumber dana baru maupun meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber yang telah ada.

"Jadi bukan melakukan pengalihan anggaran seperti sering terjadi, tetapi melalui penggalian sumber-sumber baru yang dimasukkan dalam Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana-dana inilah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan disektor yang telah diberi prioritas", Usman Dundrung, Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD Kalimantan Selatan. Menurut Usman walau dana tersebut berasal dari sumber-sumber yang belum tercantum dalam RAPBD tetapi selalu dimintakan persetujuan Dewan sebelum

Digitized by Google

digunakan.

Pembangunan Sosial

Dibidang pembangunan sosial, masalah pendidikan dan kependudukan — Keluarga Berencana —, cukup mengesankan. Dibidang pendidikan umum, secara keseluruhan 97% dari penduduk usia sekolah telah tertampung. Tinggal sekitar 2 sampai 3% saja yang masih belum sekolah.

Pembangunan pendidikan selama Pelita IV di Kalimantan Selatan cukup menggembirakan, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah muridnya. Tabel 3 menunjukkan perkembangan pendidikan dari tahun 1984/1985 hingga 1988/1989:

Jalan Hotmix Banjarmasin - Batulicin

Tabel 3

Jumlah sekolah dan murid selama Pelita IV

No.	Jenis	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89
1.	S D	2.791	2.818	2.889	2.905	2.929
	Murid	381.127	378.968	378.326	377.944	374.937
2.	SMTP	279	303	337	312	295
	Murid	65.417	70.085	73.235	73.037	69.390
3.	SMTA	110	108	126	139	138
	Murid	37.611	36.612	42.733	46.426	48.201

Dari data di atas dapat dilihat bahwa SD telah mengalami peningkatan sebesar 4,94% atau rata-rata 1,21%. SMPT telah meningkat sebesar 5,73% atau rata-rata 1,40% per tahun. SMTA telah meningkat sebesar 25,45% atau rata-rata 5,83% per tahun.

Dari segi pendidikan tinggi, daya tampung Perguruan Tinggi Negeri dan swasta cukup memadai walau belum mampu menampung seluruh lulusan SMTA.

Tentang pendidikan tinggi ini, kata Ir.Moh.Said, pemerintah pusat telah menyetujui dibukanya Fakultas Kedokteran di Universitas Mulawarman. Diharapkan akan dibuka mulai tahun akademi yang akan datang, kata Gubernur Moh.Said.

Pembangunan disektor sosial budaya, memang mendapat perhatian yang cukup besar. Tidak hanya disub sektor pendidikan tetapi juga kependudukan. Hal ini terbukti dari kemajuan yang dicapai dalam bidang keluarga berencana. Selama Pelita IV, tidak kurang dari 68,4% Pasangan Usia Subur (PUS)telah mengikuti program Keluarga Berencana.

Dalam hal ini, peranan para alim ulama cukup besar. Gubernur menceritakan bahwa, untuk bisa berhasil program KB, para ulama sebagai pemimpin-pemimpin non formal sangat berperan. Mereka turut memberi penerangan tentang program keluarga berencana itu. Tetapi masih ada yang belum bisa diterima oleh para alim ulama itu, ialah pemakaian IUD (spiral). Karena masih ada anggapan dikalangan para ulama itu bahwa yang memasang IUD itu adalah dokter-dokter pria yang menurut ajaran agama tidak dibenarkan.

Peranan mereka dalam mendorong masyarakat untuk hidup sehat, memelihara lingkungan yang bersih. Melalui bantuan yang diberikan para ulama itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan lalu kini mulai berupaya menghilangkan jamban-jamban umum disepanjang kali, yang sangat mengganggu kesehatan itu. Dalam banyak hal peranan para ulama cukup besar dan menentukan bagi keberhasilan sebuah proyek pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Peranan Wanita

Berbagai upaya untuk meningkatkan peranan wanita di Kalimantan Selatan dilaksanakan penuh oleh Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan organsiasi yang tergabung dalam BKOW (Badan Kerjasama Organsiasi Wanita).

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan masyarakat, melalui jalur PKK, dan penghargaan atas peran aktif ibu-ibu dalam menggerakkan PKK, maka diadakan lomba pelaksanaan terbaik 10 program PKK dan lomba desa P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera).

Hajjah ROMELAH, anggota DPRD Kalimantan Selatan, sebagai salah seorang aktifis organisasi wanita melihat bahwa upaya pengikutsertaan wanita dalam pembangunan daerah melalui organsiasi kewanitaan yang ada, cukup baik. Bahkan Tim Penggerak PKK selalu dilibatkan bersama kaum ulama untuk memberikan penyuluhan tentang Keluarga Berencana kepada masyarakat. Juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, kaum wanita diikutsertakan dalam proyek pembangunan yang berkaitan langsung dengan peranaan wanita.

Hajjah Romelah menilai, selama Pelita IV keterlibatan wanita dalam pembangunan daerah semakin meningkat, jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Menurut dia, hampir disemua bidang sosial, peranan wanita nampak menonjol. Secara lantang Hajjah Romelah bercerita: "Gubernur Moh. Said, sepertinya tahu persis apa yang harus dilakukan oleh semua kekuatan yang ada di Kalimantan Selatan untuk memacu pembangunan daerah ini. Sehingga dalam mengikutsertakan mereka dalam kegiatan pembangunan ia dapat menempatkan dan memberikan peranan yang sesuai dengan kemampuan

Digitized by Google

dan ketrampilan yang ada pada kekuatan yang dilibatkan dalam pembangunan itu. Disini barangkali kelebihan Gubernur Kalimantan Selatan yang satu ini," kata Romelah.

Generasi muda

Pembinaan Generasi Muda dilakukan secara aktif dalam rangka melaksanakan peranan dan tanggung jawabnya sebagai penerus pembangunan nasional bangsa dan negara. Pembinaan ini dilakukan melalui organisasi pemuda yang telah ada seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Pramuka.

Upaya pembinaan itu telah dilaksanakan antaranya adalah mengadakan latihan kader pengurus organisasi pemuda, bimbingan sosial dan latihan ketrampilan, pembinaan Karang Taruna, Pramuka dan lainnya.

Hamdan dan Anang Jusnie, tokoh-tokoh generasi muda Kalimantan Selatan, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi mereka selau mendapat bimbingan langsung dari pimpinan daerah. Generasi muda malah selalu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah. Misalnya dalam gerakan penghijauan, gerakan kebersihan dan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial lainnya, generasi muda selalu dilibatkan secara langsung.

Bahkan, menurut Hamdan dan Anang Jusnie pengikutsertaan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak sekedar sebagai pelengkap tetapi justru sebagai subyek yang mengakomodasikan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Hubungan dengan legislatif

Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Legislatif, selama Pelita IV berjalan lancar dan sangat baik. Kerjasama yang baik itu tercermin dalam pembahasan semua rancangan peraturan daerah baik yang menyangkut masalah anggaran, perubahan anggaran maupun perhitungan daripada anggaran itu sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selalu dilibatkan secara dini sehingga pembahasan itu berjalan lancar dan ada saling pengertian antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Keterbukaan kedua belah pihak ini merupakan jaminan bagi kelancaran tugas-tugas baik Pemerintah Daerah

H. Ma'woh Masykur

maupun Dewan sendiri sebagai mitra kerja pemerintah. Disamping itu, pemerintah dalam hal ini Gubernur juga selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Dewan.

Begitu cerita H.Ma'woh Masykur, Ketua Fraksi PP DPRD Kalimantan Selatan dalam perbincangannya dengan MEDIA KARYA. "Gubernur sangat memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Dewan, baik itu nota dari komisi yang disampaikan kepada Gubernur lewat pimpinan Dewan, maupun segala permasalahan yang diangkat oleh Dewan dalam kesempatan-kesempatan rapat maupun pandangan umum fraksi-fraksi. Dan gubernur selalu memberi jawaban yang konkrit terhadap apa-apa yang disampaikan Dewan kepadanya itu," kata Haji Ma'woh.

Sehingga Dewan merasa bahwa kerjasama dengan Gubernur selama ini cukup berkesan. Malahan sering terjadi untuk menyelesaikan masalah-masalah penting selalu dibawakan ke Dewan Pertimbangan Daerah dan dibahas secara tuntas. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Usman Abdullah, memperkuat apa yang dikatakan oleh Ma'woh.

"Selama ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan Gubernur. Yang menarik dari Gubernur dalam menjalankan kepemimpinannya selama ini, adalah pemecahan masalah-masalah jarang dilakukan lewat pertemuan-pertemuan formal tetapi justru melalui pertemuan-pertemuan informal seperti dalam kesempatan berolahraga, selepas sholat bahkan terkadang dijalan pun beliau bersedia bicara. Saya kira selama ini hubungan kerja antara Dewan dengan Pemerintah Daerah cukup baik", kata Usman.

Usman Abdullah, yang dari FPP ini melihat bahwa jalinan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan seperti hubungan antar suami dengan istri saja. Cukup harmonis, sehingga tak pernah terdapat hambat dalam menyelesaikan setiap masalah daerah yang muncul kepermukaan.

Haji Tadjudin Noor, wakil ketua FPP melihat hubungan kerja antara Dewan dengan Pemerintah Daerah, sesungguhnya tidak ada masalah. Sebagai mitra kerja, Pemerintah selalu mengadakan pendekatan-pendekatan informal lebih dahulu sebelum sesuatu masalah disampaikan secara resmi kepada Dewan. Pendekatan informal inilah yang memperlancar tugas Dewan. Karena itu jarang terjadi perdebatan berkepanjangan di Dewan tentang masalah-masalah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, kata Haji Tadjudin Noor mengakhiri pembicaraannya dengan MEDIA KARYA.□ (Tb).

H. Anang Jusni dan Hamdan

Digitized by Google

Wahono, Sehari Di Bumi Gora

"Ingat Gogo Rancah (Gora), ingat Nusa Tengara Barat." Bumi yang tumbuh subur dengan padi-padian Gogo Rancah, sejak tahun belakangan ini telah mampu mensejajarkan dengan Propinsi lainnya di Indonesia dalam hal "berswasembada pangan".

Daerah yang dulu dikenal sebagai daerah minus, belakangan ini dapat menghasilkan berbagai komiditi primadona, selain padi gogo rancahnya, juga dikembangkan hasil bumi lainnya seperti bawang putih, batu apung dan hasil ternaknya, sehingga daerah ini mampu mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya.

NTB, yang kini lebih dikenal dengan sebutan "Bumi Gora", akhir pekan lalu mendapat kunjungan kerja ke 22 Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, dalam upaya konsolidasi GOLKAR tahap pertama di seluruh propinsi se Indonesia.

Kedatangan Ketua Umum di Bandara Selaparang, Mataram, disambut tiga ratusan kader-kader muda GOLKAR, diiringi tarian adat setempat dan bentangan sebuah spanduk "Selamat datang Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono di Bumi Gora".

Sejenak menerima adat minum kelapa hijau muda dan mengunyah daun sirih, Wahono dan rombongan setelah santap siang di pendopo Gubernuran, didampingi gubernur NTB Warsito selaku ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR, menuju Lombok Timur, untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung Kantor DPD GOLKAR Tk II Kabupaten Lombok Timur di desa Selong.

Jalan panjang hotmik antara Mataram — Lombok Timur dengan jarak tempuh 1 jam jalan darat, terasa amat singkat bagi perjalanan Ketua Umum GOLKAR dan rombongan. Betapa tidak, selain jalan mulus, dapat terlihat dari dekat disepanjang tepian jalan, kegairahan masyarakat menambang batu apung. Ditambah sambutan semarak warga GOLKAR Lombok Tengah, yang mendaulat di tengah perjalanan Ketua Umum GOLKAR. Dengan wajah cerita penuh kebapakan, Wahono turun menyalami satu demi satu Kader dan pengurus GOLKAR Lombok Tengah yang hadir mendaulat di jalan itu.

Tak disadari, sesaat rombongan telah sampai ke lokasi pembangunan Gedung Kantor DPD GOLKAR, yang terletak di tepian jalan raya yang menghubungkan antara Lombok Tengah dan Lombok Timur, di pinggiran kota Selong Ibukota Lombok Timur. Bertempat di tanah sawah, masih penuh dengan tanaman jagung dan kacang-kacangan itu, Wahono mencanangkan batu pertama dimulainya pembangunan gedung Kantor DPD yang akan menjadi markas GOLKAR dalam melayani masyarakat.

Dihadapan ribuan warga yang hadir menyaksikan peristiwa bersejarah bagi GOLKAR Selong ini, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, memujui berbagai keberhasilan yang telah ditunjukkan kader-kader GOLKAR di Lombok Timur dan sangat menghargai semangat gotong-royong seluruh Keluarga Besar GOLKAR, dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Gedung Kantor DPD ini.

Lebih lanjut Wahono mengatakan, keberhasilan rencana kerja dan segala rekayasa kita disamping ditentukan oleh dukungan bagi seluruh warga masyarakat, juga ditentukan oleh kemampuan dan pengendalian pelaksananya. Karenanya ia berharap agar hal ini menjadi perhatian masalah kita bersama, tuturnya.

Disamping itu juga dikemukakan, bahwa perjuangan dan cita-cita GOLKAR kita telah melakukan persiapan-persiapan yang cukup, dengan membuat rencana-rencana kerja, baik ditingkat pusat maupun di daerah-daerah, dan kita telah bersama-sama membulatkan tekad untuk terus memperjuangkan cita-cita GOLKAR yang pada dasarnya mendukung cita-cita bangsa. Namun kita harus tetap waspada terhadap tantangan-tantangan, tuntutan masyarakat yang notabene makin meningkat di hampir semua segi kehidupan yang semakin kualitatif.

Karenanya menjadi tanggung jawab GOLKAR untuk senantiasa menampung, memadukan, menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut. Kita menyadari, apabila kita selalu bertumpu pada aspirasi rakyat, maka akan tumbuh motivasi yang kuat

Kunjungan Ketua Umum di NTT

Digitized by Google

untuk dapat menggerakkan seluruh jajaran organisasi guna berjalan seirama dengan derap langkah perjuangan bangsa. Oleh karenanya Ketua Umum berharap dan menekankan agar setelah selesainya pembangunan Kantor DPD GOLKAR tersebut, para pengurusnya lebih meningkatkan kegiatannya dan yang lebih penting lagi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Mengakhiri acara tersebut, Ketua Umum menyerahkan sumbangan sebesar Rp. 5 juta sebagai turut berpartisipasi dalam mewujudkan bangunan kantor DPD, yang direncanakan akan menelan biaya Rp. 60 juta. Sementara itu, pada kesempatan silaturrahmi dengan warga pondok Pesantren Nahdlatun Wathan, Pancor, Lombok Timur, Ketua Umum juga berkenan memberikan sumbangan pembangunan pondok sebesar Rp. 1 juta.

Dihadapan sekitar 5000 warga pondok pesantren itu, ketua Umum DPP GOLKAR Wahono mengemukakan, bahwa pembangunan yang terus digalakkan ini bukan hanya mengejar fisiknya saja, tapi yang ingin dicapai adalah keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual yang serasi, selaras dan seimbang.

Ketua Umum dihadapan para santri

Kita patut bersyukur bahwasanya negara kita yang berdasarkan Pancasila ini, kehidupan beragama telah tumbuh dan berkembang secara semarak. Menyebut contoh ia menunjuk rumah-rumah ibadah, apakah itu masjid atau mussola terus bertambah dan senantiasa penuh sesak dengan jemaah. Tempat-tempat ibadah bukan saja terdapat di kota-kota bahkan sudah tersebar di kampung, desa, pabrik, stasiun dan bahkan di tempat-tempat obyek wisata. Lebih dari itu Presiden Soeharto, yang juga adalah Ketua Dewan Pembina GOLKAR sangat besar perhatiannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan ini. Di tengah kesibukan beliau me-

PT. TAMADO INSAN JAYA

EMPLOYMENT AGENCY

Kantor : Jl. Sumbing No. 18 Jakarta Selatan Telp. 8294882, Fax. 8294882.

KOMISARIS, DIREKSI BESERTA KARYAWAN

PT. TAMADO INSAN JAYA

mengucapkan

DIRGAHAYU KE-25 GOLONGAN KARYA 20 OKTOBER 1989

"Semoga di Usiamu yang ke-25 Indonesia semakin Jaya"

Kami siap melayani pengiriman tenaga kerja cuti ke Manca Negara

Marito Sinaga, SH.
Managing Director

Ny. Halimah Kasjmir S.
Director Utama

Digitized by Google

mimpin bangsa dan negara, masih menyempatkan diri dan bahkan memimpin sendiri sebuah Yayasan yang tugasnya membangun tempat-tempat Ibadah "Masjid", yaitu Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila.

Sementara itu pada acara temu wicara, di Lapangan Tugu depan Kabupaten Lombok Timur, ketua Umum GOLKAR dan rombongan mendapat sambutan yang luar biasa dari warga GOLKAR daerah ini. Lebih dari 10.000 orang hadir mendengarkan penjelasan dan pengarahan Ketua Umum secara langsung. Wahono dengan gaya khas kebapakannya, saat itu memaparkan berbagai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru dan menjelaskan sejarah kelahiran GOLKAR serta hasil dan amanat usaha dari seluruh Indonesia, dan masalah seperti ini, juga menjadi perhatian Rakernas, ungkap Wahono, yang disambut dengan tepukan tangan hadirin.

Tidaklah mengherankan bila di berbagai tempat di NTB ini Ketua Umum GOLKAR selalu mendapat sambutan yang antusias masyarakat, mengingat daerah ini juga merupakan kantong-kantong GOLKAR yang setiap pemilu senantiasa memperoleh kemenangan mutlak. Sebagaimana halnya Pemilu 87 lalu GOLKAR NTB memperoleh kepercayaan rakyat sebesar 82,56 persen, jauh dibanding perolehan suara Orpol, dengan kedudukan kursi di DPRD I, 30 kursi bagi GOLKAR, berbanding 4 dan 2 bagi PPP dan PDI. Posisi yang sudah demikian mantap ini akan selalu dipertahankan, ujar Ketua masih perlu banyak mendapat perhatian. Dari pembinaan kualitas kader ini akan lebih banyak ditujukan pada peningkatan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT). Sehubungan dengan ini Ketua DPD mengemukakan, akan mengambil tindakan bagi para kadernya yang melakukan pelanggaran PDLT demi kewibawaan organisasi, tegasnya.

Tidak Terlalu Dini

Mengenai suksesi Pemilu 1992, Lukman berkeyakinan, daerahnya akan mampu mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, dan bahkan diperkirakan meningkat. Keyakinan ini dilandasi dengan tekad untuk mensukseskan konsolidasi dan Pelita V. Dengan keberhasilan kedua program tersebut, keberhasilan Pemilu 1992

Mendapat sambutan meriah warga setempat

Munas yang programnya terangkum menjadi sebutan Tri Sukses GOLKAR itu, mampu meredam ribuan massa di tengah lapangan hingga acara sore itu usai.

Menanggapi keluhan yang terungkap dalam temu wicara tentang susahnya memasarkan hasil bumi dan kerajinan, serta berbagai kendala mengenai perkoperasian, Wahono menghimbau para pengusaha swasta nasional dapat turut membantu pemasarannya dan mau menjadi bapak angkat bagi para pengrajin yang bergabung dalam koperasi. Diungkapkan pula dalam kesempatan itu bahwa DPP GOLKAR baru-baru ini telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Dept. Koperasi dan Wiraswasta yang diikuti para kader-kader peng-

Dewan Pertimbangan NTB Warsito dalam laporannya, ketika diadakan pertemuan kader-kader Keluarga Besar GOLKAR se-Mataram dengan Ketua Umum, di Gedung Pertemuan Gora, mataram.

Sejalan dengan itu, ketua DPD GOLKAR H. Lukman SR, mengatakan saat ini GOLKAR NTB tengah memantapkan program konsolidasi idiil dan wawasan sebagai inti penekanan pembinaan kader GOLKAR. Sedang konsolidasi organisasi, GOLKAR NTB lebih menitikberatkan pada konsolidasi personil dan kaderisasi. Karena, menurut Lukman, pembinaan personil atau kaderisasi di NTB banyak mengalami kelemahan. Diutarakan, dari segi kuantitas kader kita cukup banyak, tapi dari segi kualitas

akan mudah dicapai, ujarnya.

Untuk itu, tidak terlalu dini jika kita sekarang mulai bicara tentang langkah garis besar perjuangan organisasi untuk memenangkan Pemilu 1992, kata Wahono. Usaha dini diperlukan untuk meningkatkan perjuangan GOLKAR. Lebih lanjut Wahono mengemukakan bahwa pembentukan Pokja/Timja di DPP GOLKAR adalah merupakan usaha konkrit. Dikelompok ini akan dibahas dan dibuat analisis mengenai masalah-masalah yang menjadi tantangan pembangunan. Mereka senantiasa harus peka terhadap perkembangan yang ada di kalangan masyarakat setiap saat.

Kelompok kerja ini juga merupakan "kuping-kuping GOLKAR" yang dapat memantau masalah dan mem-

Digitized by Google

berikan early warning bila diperlukan. Sehingga kita tidak dihadapkan pada pendadakan masalah, tetapi dapat berusaha untuk mendahului, sehingga setiap permasalahan akan dapat cepat teratasi agar tidak berkembang terlalu jauh. Maka diharapkan lewat Pokja dan Timja ini perjuangan GOLKAR akan lebih kualitatif dan lebih relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di NTB ini, yang memerlukan perhatian dan bantuan yang lebih, kata Wahono. Diharapkan pula Pokja dan Timja ini pada saatnya juga akan memformulasikan usulan GOLKAR untuk GBHN yang akan ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 1993, sehingga GBHN akan sungguh relevan terhadap kebutuhan masyarakat dari seluruh lapisan, dan dari seluruh penjuru tanah air.

Membina Generasi Muda

Dikemukakan juga oleh Wahono, dalam tahapan sekarang ini kita sudah memasuki tahapan peningkatan kualitas kader untuk lebih melancarkan program-program GOLKAR. Selain itu juga diminta, agar kita harus mulai membina kader dari generasi muda, karena GOLKAR berusaha untuk menjadi wahana penampung aspirasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat generasi muda. Dengan kata lain, generasi muda merupakan salah satu unsur terpenting dan merupakan sumber inspirasi dan kekuatan GOLKAR dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bangsa dan Negara.

Temu wicara dengan kader Golkar NTT

Dalam tahap akhir proses alih generasi ini, menurut Wahono, GOLKAR memandang generasi muda dengan penuh harapan, dan mendambakan masa depan yang lebih baik lagi bagi mereka. GOLKAR ingin bersama-sama mereka memperjuangkan masa depan yang lebih baik, bersama kelompok-kelompok lain dan pemerintah kita, menyusun kekuatan untuk mencapai kemenangan melalui penyuksesan pembangunan nasional di segala bidang.

Hasil kerja keras

Menyoroti perkembangan politik khususnya mengenai hasil pemilu, yang diistilahkan "Ancaman" oleh sementara mass media, bagi Pemilu 1992 sehubungan dengan terbentuknya pimpinan baru PPP, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dihadapan para kader Keluarga Besar GOLKAR itu menegaskan, bahwa hasil pemilu yang diperoleh GOLKAR sama sekali tidak tergantung kepada kelemahan partai politik lain, tetapi adalah hasil kerja keras kader teritorial dan kader fungsional yang jumlahnya 9 juta orang, ditambah lagi keanggotaan GOLKAR yang terdaftar sebanyak 32 juta anggota. Tegasnya kemenangan itu adalah hasil perjuangan anggota GOLKAR di seluruh pelosok tanah air termasuk hasil kerja keras dari seluruh Keluarga Besar Golongan Karya.

Kebesaran GOLKAR adalah karena pembuktiannya dan konsistensinya terhadap Ikrar, Doktrin GOLKAR dan program-program yang telah diamanatkan oleh MUNAS. Dengan keyakinan ini maka akan terjelma citra GOLKAR yang utuh sebagai pendekar untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. "Tidak ada masalah-masalah eksternal yang besar yang dapat menggoyahkan kita dari keyakinan ini," tegas Ketua Umum GOLKAR.

Sedangkan untuk mendapatkan kesemuanya itu, sangat ditentukan oleh kerapian barisan kader-kader GOLKAR dan seluruh Keluarga Besar GOLKAR untuk selalu mampu memelihara kepercayaan rakyat.☐ WT

KOSTI JAYA

KOPERASI SUPIR TAKSI JAKARTA RAYA (KOSTI JAYA)

BADAN HUKUM NO. 1684/B.H./I

SEKRETARIAT: WISMA KOPERASI LT. III JL. S. PARMAN KAV. 80 JAKARTA BARAT KOTAK POS: 105 JKWB PHONE: 5601977

Mengucapkan :

Selamat Hari Ulang Tahun Golongan Karya Ke-25 Tanggal 20 Oktober 1989

Digitized by Google

Disambut adat setempat

Wahono di Bumi Lancang Kuning

Yel-yel Hidup GOLKAR, Hidup Pak Wahono dari kader-kader GOLKAR Pekanbaru mengiringi pendaratan pesawat Garuda yang membawa Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono bersama rombongan ketika mendarat di Bandara Simpang Tiga Pekanbaru. Yel-yel itu disampaikan oleh sekitar dua ribu orang kader GOLKAR yang berdiri sepanjang halaman bandara dengan suara sambung-menyambung.

Kedatangan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dan rombongan di Bumi Lancang Kuning ini merupakan satu perjalanan yang mengandung arti penting bagi usaha memantapkan pelaksanaan konsolidasi organisasi pada tingkat bawah. Dengan penampilan khas, Wahono pun tidak menyia-nyiakan kesempatan kunjungan kerja selama dua hari dari tanggal 29 sampai 30 September ini dengan mengadakan serangkaian kegiatan organisasi.

Dalam kunjungan kerja yang pertama kali ke Propinsi Riau ini Wahono telah membawa berkah bagi kader-kader GOLKAR di dalam melaksanakan pembukaan Penyegaran Penatar Karakterdes dan Karsinal GOLKAR Tingkat II se-Kodya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar di Balai Dang Merdu Pekanbaru. Berkah itu tidak lain terbukti saat kedatangan Wahono di bumi Lancang Kuning ini tidak disiram oleh curah hujan sepanjang hari. Padahal hari-hari sebelum kedatangannya, curah hujan tidak pernah bosan hadir setiap saat.

Wahono saat membuka penyegaran kader tingkat II ini mengakui, sekarang GOLKAR memasuki tahap peningkatan kualitas kader-kader GOLKAR. Peningkatan kualitas kader ini dimulai dengan melakukan penyegaran kader dengan materi-materi kaderisasi baru. Hal ini dilakukan mengingat adanya beberapa perubahan atas berbagai materi pendidikan yang dulu disusun guna disesuaikan dengan hasil Keputusan Munas maupun Sidang Umum MPR, disamping adanya beberapa materi perubahan. Namun, kegiatan kaderisasi yang hendak dilakukan ini tidak hanya terbatas pada penyegaran kader saja, melainkan lebih luas, kompleks dan mendasar. Hanya pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dari Penyegaran Kader Tingkat Pusat, Penyegaran Kader Tingkat I sampai Tingkat II.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan dan meningkatkan gairah para kader di seluruh pelosok tanah air guna merealisasikan program-program GOLKAR bagi kepentingan masyarakat. Yang penting, katanya, berbicara tentang kualitas kader GOLKAR ini adalah sikap kreatif dan kemandiriannya dalam melaksanakan tugasnya. Sikap demikian hanya akan dapat terwujud apabila iklim itu diberikan dan dikembangkan secara sehat serta dinamis. "Saya harapkan di Riau ini, Pimpinan DPD I sampai DPD II memberikan iklim itu," tambahnya.

Wahono dalam sambutan pengarahan menyitir ungkapan Ketua Dewan Pembina GOLKAR Soeharto ketika DPP GOLKAR beraudiensi dengannya, bahwa iklim yang demikian ini perlu mendapat perhatian. Karena tidak ada artinya, kata Wahono menirukan ungkapan Ketua Dewan Pembina GOLKAR Soeharto, jumlah kader yang besar tanpa ditunjang kualitas kader yang tinggi, sikap tidak kreatif serta tidak mandiri. Atas dasar pemikiran ini, maka DPP GOLKAR berkeyakinan bahwa kader GOLKAR di Riau pasti memiliki potensi untuk kreatif dan mampu mandiri sehingga DPP GOLKAR mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi kader-kader itu sebaik-baiknya. Selain

Digitized by Google

itu, DPP GOLKAR berusaha untuk menjadi wahana penampungan aspirasi seluruh masyarakat termasuk generasi muda. Sebab GOLKAR sendiri mempunyai sejarah yang intim dengan generasi muda bukan saja generasi muda merupakan salah satu unsur terpenting bagi keberadaan dan kebesaran GOLKAR, tapi generasi muda merupakan sumber inspirasi dan kekuatan GOLKAR dalam memperjuangkan aspirasi serta kepentingan bangsa dan negara yang sedang dibangun secara bersama-sama.

Melalui dinamika mereka yang tinggi, polos dan lugas, merupakan kekuatan moral yang tidak pernah lelah memperjuangkan nasib rakyat banyak. Wahono menilai, GOLKAR menemukan, memahami dan menghayati apa yang sesungguhnya terkandung dalam hati nurani bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam tahap akhir proses alih generasi ini GOLKAR memandang generasi muda dengan penuh harapan sekaligus mendambakan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Dalam memperjuangkan masa depan itu GOLKAR ingin bersama-sama mereka, kelompok-kelompok lain dan pemerintah bekerjasama saling bahu membahu menyusun kekuatan untuk mencapai kemenangan melalui pensuksesan pembangunan nasional di segala bidang.

"Keberhasilan GOLKAR tidak datang dengan sendirinya dan tidak secara otomatis berkelanjutan. Di depan mata tetap terbentang tugas yang tidak ringan karena tantangan-tantangan pembangunan terus meningkat. Namun, keadaan ini tidak mengecilkan hati untuk menghadapi seberat apapun tugas dan masalah yang timbul di permukaan umum. Karena, hal ini dapat diatasi dengan semangat dan kekompakan tinggi yang dimiliki oleh kader-kader GOLKAR," tegas Wahono di depan dua ribu kader GOLKAR Riau.

Mempertahankan Nilai Kejuangan

Ketua Dewan Pembina Soeharto ketika membuka Munas IV GOLKAR berkata, jika kita menengok kembali sejarah ke belakang, maka lahirnya GOLKAR 1964 didorong oleh tujuan yang besar dan sangat mendasar. Dalam keadaan apapun tujuan besar dan mendasar itu harus dipegang teguh GOLKAR. Karena kebangkitan GOLKAR bertujuan untuk menyelamatkan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar 1945 dari bahaya-bahaya yang dari tahun ke tahun terasa makin mencapai puncaknya, karena makin kuatnya pengaruh PKI.

Terkait ungkapan Ketua Dewan Pembina GOLKAR ini, maka Wahono mengajak seluruh jajaran kader GOLKAR dan seluruh anggota GOLKAR dimanapun berada untuk memperkokoh semangat dan cita-cita perjuangan GOLKAR agar tidak dapat digoyahkan oleh pengaruh kekuatan apapun. Itu sebabnya, sehubungan adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Wahono menilai, hari peringatan ini perlu direnungkan maknanya secara mendalam dan menjadikannya sebagai motivasi dalam melanjutkan perjuangan. Apalagi selama ini GOLKAR berjuang sebagai pelopor Orde Baru, dan tegaknya Pancasila adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seluruh kebijakan GOLKAR, motivasinya serta kebesarannya terkait dengan pendirian ini yang tercermin pada jiwa, cita-cita, sikap politik dan konsistensi perjuangannya.

Sedang mengenai jumlah pemilih dan pendukung GOLKAR terus bertambah setiap Pemilu pada hakekatnya merupakan konsekuensi logis dari penampilan politik GOLKAR tersebut. Bila ingin mempertahankan kebesaran GOLKAR itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali GOLKAR harus mampu mempertahankan nilai-nilai kejuangan yang telah diletakkan sejak saat kelahirannya 24 tahun yang lalu. Itu terletak pada cita-citanya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Semua ini merupakan tantangan sekaligus tugas yang berat tapi mulia bagi GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik. Karenanya, GOLKAR harus senantiasa berusaha menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum," sambung Wahono.

Demikian besarnya esensi tujuan GOLKAR itu dan kemudian dijabarkan dalam program Tri Sukses GOLKAR yang meliputi Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita V, Sukses Pemilu 1992 dan Sidang Umum MPR 1993, maka menurut Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Tingkat I Riau Soeripto, menyambung pengarahan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, untuk melaksanakan program Tri Sukses GOLKAR itu diperlukan keterlibatan langsung para kader GOLKAR yang tangguh, efektif, kreatif, mandiri serta memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan disiplin tinggi. Ini adalah dasar alasan untuk menyelenggarakan penyegaran kader, agar nantinya di Riau tampil kader-kader GOLKAR yang memiliki kualitas dan wawasan yang jauh ke depan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang.

Oleh karena itu, kata Soeripto, momentum penting ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan bobot kualitas seorang kader. Baik Kader Penggerak Teritorial Desa (Karakterdes) maupun Kader Fungsional (Karsinal) di dalam

Sekapur sirih untuk Wahono

Digitized by Google

mensukseskan Tri Sukses GOLKAR tersebut. Untuk mensukseskan program GOLKAR ini tentu saja tidak bisa lepas dari posisi Riau secara Geo Politik, Geo-Ekonomi dan Geografis dimana Riau memiliki potensi sumber daya alam, daya manusia dan daya produksi yang tinggi serta berskala internasional. Sebagai kawasan yang integralistik, tambahnya, Riau memiliki utilitas pembangunan dan kultur budaya yang berorientasi pada pembangunan masa depan, yang menyentuh kepentingan rakyat banyak dan teraktualisasi melalui prioritas pembangunan pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri dan perhubungan - pariwisata.

Sedang dalam Pelita V, Riau memang akan terus meningkatkan ketiga sektor kunci ini supaya tercipta pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita penduduk Riau serta terciptanya kesempatan kerja. Usaha ini merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam mensukseskan Pelita V dan menumbuhkan kesan tersendiri di hati rakyat pemilih dalam Pemilu 1992 mendatang. Tekad dan niat warga serta kader-kader GOLKAR ini tidak lain suatu upaya keras di dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan serta mampu memberikan yang terbaik dalam rangka membangun Riau melalui pemantapan dan penggalian sumber potensi yang ada.

Dalam rombongan DPP GOLKAR yang hadir dalam kunjungan kerja di Riau selain Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono bersama Ny. Mientarsih Wahono, juga hadir Sekjen DPP GOLKAR Ir. Rachmat Witoelar bersama Ny. Erna Witoelar, Ketua DPP GOLKAR Drs. Waskito, Wakil Sekjen DPP GOLKAR dr. Suhadi, Wakil Bendahara DPP GOLKAR Ponco Sutowo, Ketua Departemen Peranan Wanita DPP GOLKAR Ny.Gunariyah K.Mochdie dan Ketua Departemen Tenaga Kerja DPP GOLKAR Drs. Potsdam Hutasoit.

Mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum

Pada kesempatan ini pula rombongan DPP GOLKAR yang mendapat sambutan luar biasa dari kader-kader GOLKAR Riau telah mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat daerah, bahwa kehadiran GOLKAR dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan guna melaksanakan pembaharuan-pembaharuan dalam pembangunan.

Ketua DPD GOLKAR Tingkat II Kodya Pekanbaru/Kabupaten Kampar H. Ahmad Bebas selaku Ketua Penyelenggara Penyegaran Penatar Karakterdes dan Karsinal ini dalam sambutannya mengatakan, jumlah peserta penyegaran penatar kader ini sekitar 800 orang dan materinya dibagi dalam empat kelompok. Kelompok A membahas penjelasan GBHN, Kelompok B membahas penjelasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum GOLKAR, Kelompok C membahas teknik mengadakan pendekatan dan teknik memimpin rapat/diskusi, serta Kelompok D membahas kebijaksanaan pembangunan di daerah.

Ditambahkan bahwa tujuan penyegaran kader ini adalah untuk membentuk kader fungsional sebagai calon pemimpin organisasi yang tangguh, kreatif dan mandiri. Baik di GOLKAR sendiri, di lingkungan organisasi kemasyarakatan maupun di lingkungan eksekutif dan legislatif. Bahkan, membentuk dan meningkatkan mutu kader fungsional pada GOLKAR di bidang usaha di lingkungan kerjanya masing-masing.

Selesai membuka penyegaran penatar kader ini, Wahono memberi cinderamata kepada fungsionaris GOLKAR Riau berupa jam tangan dan pulpen dengan simbol GOLKAR. Namun hal ini bukan berarti selesai sudah kehangatan yang muncul di tengah pertemuan ini, malahan konsolidasi ini membawa dan menghasilkan catatan penting bagi perkembangan GOLKAR di Riau untuk masa-masa mendatang. Sementara itu yel-yel tetap menggema di Balai Dang Merde. Hidup GOLKAR, Hidup Pak Wahono.□ DT

Pengurus DPP yang mengikuti perjalanan Ketua Umum

Digitized by Google

Riau Berpotensi Bagi Perjuangan GOLKAR

Propinsi Riau merupakan daerah yang potensial bagi perjuangan GOLKAR, karena dari Pemilu ke Pemilu kader-kader GOLKAR telah membuktikan diri sebagai daerah yang selalu memenangkan GOLKAR dalam perolehan suara pemilih.

Pada Pemilu 1971 GOLKAR meraih suara 76,72%, Pemilu 1977 meraih suara 63,44%, Pemilu 1982 meraih suara 71,74%, dan Pemilu 1977 kembali kader-kader GOLKAR bangkit dengan semangat tinggi demi suksesnya GOLKAR dengan memperoleh suara sekitar 79,75%. Sedangkan data sementara anggota GOLKAR Riau yang masuk dalam daftar Departemen OKK DPP GOLKAR sekitar 558.620 orang. Jumlah anggota ini sesuai perkembangan dan pertumbuhan GOLKAR sendiri untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, kemungkinan besar bertambah lagi, sehingga menghadapi Pemilu 1992 mendatang kader-kader GOLKAR Riau ini tidak perlu diragukan mampu memenangkan GOLKAR dalam pesta demokrasi tersebut.

Melihat angka-angka kemenangan itu, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam kunjungan kerja ke Riau, 30 September lalu, memanfaatkannya untuk mengadakan dialog langsung dengan Dewan Pertimbangan GOLKAR Tingkat I Riau Soeripto, Ketua Jalur A, Jalur B, pengurus DPD GOLKAR Tingkat I Riau, FKP, DPRD I Riau, dan Ketua Dewan Penasihat GOLKAR se-Riau di Gedung Gubernuran Riau.

Ketua DPD GOLKAR Tingkat I Riau Ir. H. Firdaus Malik dalam kesempatan membuka temu wicara ini mengatakan, pada Pemilu 1992 diharapkan untuk daerah perkotaan Kodya Pekanbaru ini target pemenangan GOLKAR lebih tinggi dibandingkan hasil Pemilu yang lalu. Ini tentunya tergantung kepada kader-kader GOLKAR dan pengurus GOLKAR dalam melakukan konsolidasi organisasi, serta tidak terlepas dari bimbingan para Ketua Dewan Penasihat GOLKAR Tingkat II masing-masing.

Sementara itu DPD GOLKAR Tingkat I dan II Riau di dalam kegiatan mensukseskan Tri Sukses GOLKAR, baik menyangkut sukses Konsolidasi, sukses Pelita V maupun sukses pemenangan Pemilu, telah menyelenggarakan kegiatan terpadu dalam jajaran keluarga besar GOLKAR. Khusus menyangkut kegiatan DPD I dan II, kegiatan-kegiatan antara DPD GOLKAR dan Orsosmasinal diusahakan dapat terpadu agar pendekatan kewilayahan atau teritorial yang dipegang oleh DPD GOLKAR sampai Komisaris Tingkat Kecamatan dan Desa dapat diseimbangkan dengan pendekatan secara fungsional. Keterpaduan atau sinkronisasi ini diperlukan mengingat adanya keterbatasan segala sumber daya (dana). Baik yang disediakan secara mandiri maupun bantuan yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Penasihat GOLKAR di Daerah Tingkat II masing-masing.

Oleh karena itu, sambung Firdaus Malik, sumber daya ini meskipun cara-cara penghimpunannya sudah diberikan oleh DPP GOLKAR, masih terasa sebagai kendala bagi operasionalisasi program kerja jajaran keluarga besar GOLKAR. Kendati demikian kendala ini bukan merupakan harga mati bagi DPD GOLKAR sendiri dalam melaksanakan program-programnya, karena selama ini apa yang dirasakan dengan turun tangannya para Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Penasihat GOLKAR se-Riau ini telah memberikan semangat kepada jajaran keluarga besar GOLKAR dalam merealisir Tri Sukses GOLKAR di daerah ini.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Soeripto dalam sambutannya menekankan pada persoalan persiapan kemandirian GOLKAR Riau dengan mengkaitkan potensi-potensi yang ada di daerah ini. Baik ditinjau dari segi geografis, demografis maupun sumber daya. "Untuk itu, kemandirian organisasi-organsiasi yang berorientasi pada perjuangan GOLKAR perlu ditingkatkan kemam-

Melakukan kunjungan kerja di Riau

Digitized by Google

puannya terutama menyangkut keberadaan generasi muda. Karena pembinaan terhadap generasi muda secara konsepsional memang sangat diperlukan guna menunjang operasionalisasi program-program GOLKAR di tengah masyarakat," sambungnya.

Tumpuan Harapan

Suasana temu wicara atau dialog, kendati relatif singkat sekitar satu setengah jam dari pukul 09.00 sampai 10.30 WIB, ternyata bagi Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono sebagai pertemuan silaturakhmi DPP GOLKAR dengan seluruh jajaran keluarga besar GOLKAR se-Riau. Dan manfaatnya dirasakan cukup besar bagi perjuangan GOLKAR sendiri. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, kata Wahono, kita telah bergerak maju dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian GOLKAR perlu mengembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan aktif dan dinamis selulruh masyarakat dalam pembangunan.

"Kita harus ingat, GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik selalu menjadi tumpuan harapan masyarakat, dan karenanya kita selalu mengupayakan atau memperjuangkan amanat yang dipercayakan kepada kita seperti apa yang kita tegaskan dalam Ikrar Panca Bhakti GOLKAR, yaitu melaksanakan amanat penderitaan rakyat serta mengadakan pembaharuan," ujarnya.

Harapan masyarakat, apa jasa organisasi kekuatan sosial politik terbesar ini terhadap mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasinya. Di sini Wahono melihat persoalannya bukan besar tidaknya GOLKAR, tapi yang lebih penting apa yang harus diperjuangkan dan dipersembahkan kepada rakyat bangsa Indonesia.

Bahkan Wahono ketika tampil di temu wicara ini menyinggung kembali tentang pentahapan pelaksanaan penyegaran kader-kader GOLKAR sebagai langkah mewujudkan dan meningkatkan kualitas kader-kader GOLKAR yang bersangkutan. Karena itu, Wahono mengingatkan GOLKAR perlu memperhatikan jumlah pemilih pada Pemilu 1992 mendatang, dimana menurut laporan Ketua DPD GOLKAR sendiri diperkirakan jumlah pemilih di Riau akan mengalami kenaikan jumlah yang besar, sekitar 1.848.378 orang pemilih. Sedang jumlah kader menurut catatan Wahono, sekitar 134.938 orang, terdiri dari 123.890 orang Karakterdes dan 11.048 orang Karsinal. Sehingga dengan demikian kualitas kader perlu ditingkatkan disesuaikan dengan pemilihan tersebut.

Ketua Umum diantara kader Golkar

Khusus kader-kader GOLKAR yang berada di FKP DPRD I dan II, Wahono minta agar dalam peranannya lebih meningkatkan bobotnya karena bobot GOLKAR sendiri sangat tergantung pada bobot FKP sebagai fraksi yang terbesar. Sedangkan bobot FKP tergantung pada anggota-anggotanya. "Saya yakin bahwa setiap anggota FKP mempunyai semangat tinggi, dan DPD, dalam hal ini, tinggal menjaga supaya suasana maupun iklim dapat memungkinkan anggota FKP bekerja dengan sebaik-baiknya," tambah Wahono.

Sasaran Pemilu 1992

Beberapa waktu yang lalu ada pemikiran yang muncul dipermukaan umum tentang usulan untuk merubah sistem pelaksanaan Pemilu 1992 dengan sistem Distrik. Dalam kaitan ini, Wahono menegaskan, GOLKAR berpendapat sistem proporsional yang telah dimiliki sudah memenuhi kebutuhan sehingga tidak perlu ada perubahan mengenai tata cara maupun sistemnya. Kalaupun ada hanyalah peningkatan pelaksanaannya secara teknis atau kualitatif. Sementara pilihan yang dihadapkan pada kita adalah memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah berjalan dan bekerja atau memakai sistem lain. Yang secara teoritis mungkin tampak lebih baik dinilai oleh sebagian orang, tapi masih kurang sempurna dan belum dipraktekkan.

Atas munculnya pemikiran seperti itu, lanjutnya, GOLKAR tidak ragu-ragu lagi untuk tetap mempergunakan sistem proporsional dalam Pemilu 1992. Apalagi terlihat jelas resiko pertama lebih kecil dibandingkan resiko kedua terutama menyangkut kondisi masyarakat kita yang majemuk dalam suasana transisi ini. Sedang untuk merubahnya diperlukan proses konsensus nasional baru yang diperkirakan memakan waktu cukup panjang. Dan lagi kita ketahui sistem distrik itu pernah dulu diajukan sebagai salah satu alternatif dan hasil konsensus waktu itu pun memakan waktu panjang dari 1966 sampai 1969 dengan menghasilkan suatu kesepakatan untuk memakai sistem proporsional dalam Pemilu (UU Pemilu Nomor 15 tahun 1969) dan sistem distrik yang diajukan tersebut ditolak mentah-mentah dalam konsensus. Oleh karena itu, GOLKAR melihat pemikiran kembali kepada sistem Pemilu alternatif itu bukanlah pada tempatnya.

"Kewajiban kita sekarang adalah menaati secara konsekuen konsensus nasional selama ini, karena memang kita yakin bahwa hal itu adalah yang terbaik. Juga, selama pelaksanaan Pemilu sebanyak empat kali itu telah berhasil mengembangkan suasana kehidupan politik yang stabil dan dinamis," tegas Wahono.

Digitized by Google

Dialog

Seusai Wahono memberikan pengarahan singkat kepada seluruh jajaran keluarga besar GOLKAR Riau, langsung membuka kesempatan kepada kader-kader GOLKAR untuk bertanya. Alhasil pancingan Wahono mengundang lima orang untuk tampil sebagai penanya dengan berbagai macam pertanyaan yang sangat erat hubungannya dengan perkembangan kehidupan politik di Indonesia akhir-akhir ini.

Thamrin misalnya yang mendapat giliran pertama mengatakan, selama ini bantuan kalangan birokrasi kepada GOLKAR sangat kuat. Proses seperti ini pernah dialami oleh PNI pada tahun 1955, kemudian saat Sekber GOLKAR lahir dan membawa misi pembaharuan maka kita waktu itu telah disodorkan konsep massa mengambang dalam arti kita mengajak masyarakat sekali dalam lima tahun untuk berpolitik yaitu pada kegiatan Pemilu saja. Sedangkan pada Pemilu 1971 kita (Sekber GOLKAR) berusaha untuk mematahkan kekuatan dominasi PNI saat itu dalam pemerintahan dan usaha ini berhasil sekaligus berproses sampai Pemilu 1977.

Melihat kenyataan ini, apakah kira-kira ketergantungan GOLKAR ini pada birokrasi berlanjut dalam arti kata positif, karena kita belum melihat suatu model. Apakah pada masa mendatang, barangkali, ini diteruskan? Bahkan, apakah hal ini tidak ada perubahan pada masa mendatang? Karena secara realitas di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin berubah.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, Wahono menegaskan, ini memang dalam pembicaraan dengan Ketua Umum DPP PDI Suryadi secara kelakar dikesankan seolah-olah GOLKAR yang sekarang ini bersandar pada birokrasi korp sama halnya PNI di tahun 1955. Pada hal keadaan sebenarnya tidak demikian karena apabila kita

Dialog dengan kader Golkar

sekarang bekerjasama, itu sifatnya adalah GOLKAR sebagai pendukung kebijaksanaan pemerintah terutama di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Ini merupakan kunci daripada hubungan antara GOLKAR dan pemerintah, dan bukan berarti GOLKAR bersandar pada kekuatan birokrasi seperti yang diperkirakan banyak orang.

Juga, Munas IV GOLKAR yang lalu pun telah mengamanatkan pada GOLKAR untuk memantapkan keberadaan fungsi dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik sehingga GOLKAR akan lebih mandiri, dewasa, berakar, berkualitas dan demokratis." Jadi, sekali lagi bila sekarang terlihat hubungan antara birokrasi dengan GOLKAR itu adalah hubungan kerjasama dan saling memerlukan bantuan. Untuk mencapai amanat Munas, maka fungsinya adalah kita harus mampu meningkatkan kualitas organisasi maupun kader-kader GOLKAR," ujar Wahono.

Kemudian menjawab pertanyaan Tadjudin tentang adanya janji-janji GOLKAR yang pernah disampaikan kepada masyarakat, Wahono mengatakan, janji-janji Pemilu palsu. Tapi secara moral berkewajiban untuk me-nuhi janji itu. Untuk itu, perlu diinventarisir dan sejauh mungkin dipenuhi janji itu secara mencicil.

"Sementara itu mengenai sikap politik GOLKAR terhadap kalangan Undang-Undang Peradilan Agama yang sedang dibahas di DPR, maka DPP GOLKAR menyerahkan sepenuhnya kepada FKP agar mendukung RUU Peradilan Agama dengan catatan diadakan penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya. Karena RUU ini adalah dalam rangka sistem hukum nasional kita dan juga untuk menjaga serta melaksanakan peradilan yang ada. Mudah-mudahan RUU dapat disahkan menjadi UU," kata Wahono menjawab pertanyaan H. Bachtiar Daud.

Selanjutnya, tampilnya Ismail Hasan Metareum sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dalam temu wicara turut mewarnai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Abdullah. Apakah hal ini tidak mempengaruhi posisi GOLKAR dalam memperoleh suara pada Pemilu 1992 mendatang? Atas pertanyaan ini Wahono mengakui, memang setelah Muktamar II Partai Persatuan Pembangunan selesai dan wartawan-wartawan datang kepadanya untuk menanyakan bagaimana sikap GOLKAR dengan terpilihnya Buya Ismail Hasan Metareum itu. Lalu dia katakan, sebagai kawan perjuangan, GOLKAR menyambut baik hasil Muktamar II Partai Persatuan Pembangunan. Dan siapapun yang menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap keberadaan GOLKAR, karena GOLKAR memiliki garis perjuangan jelas dan tegas. Kebesaran GOLKAR ini tergantung pada jiwa, cita-cita, sikap politik dan konsistensi perjuangannya. ☐ (DT)

Digitized by Google

Ismail Saleh, dalam sebuah Raker

GOLKAR Bahas Konsepsi Masa Depan

Peranan GOLKAR dalam mencetuskan konsepsi-konsepsi masa depan, dibahas oleh Koordinator bidang Hukum dan Umum DPP GOLKAR selama tiga hari di Jakarta.

Pembahasan yang dilakukan di salah satu hotel di Jakarta ini diikuti oleh kader-kader GOLKAR seluruh Indonesia. Diantaranya kader dari KORBID Hukum, dan Umum dengan Ketua Departemen dan POKJA-POKJA POLKAM, IPTEK, EK-TAN, KESRA, Budaya pada tingkat pusat.

Selain itu, peserta Rapat Kerja ini juga diikuti oleh kader-kader GOLKAR yang berada di daerah. Misalnya dari wakil-wakil ketua yang membidangi Hukum dan Umum, pimpinan biro-biro dan juga para cendekiawan-cendekiawan GOLKAR.

Rapat kerja yang dibuka oleh Ketua Umum GOLKAR itu memang terasa padat. Setidaknya delapan bahan yang akan disajikan oleh kader-kader GOLKAR. Misalnya peranan cendekiawan dan LITBANG dalam menyukseskan pembangunan nasional yang akan diceramahkan oleh Meneg Ristek BJ Habibie; Pembangunan hukum di Indonesia akan diceramahkan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, Peranan kader GOLKAR dalam menyukseskan pembangunan yang berwawasan lingkungan diceramahkan Menteri KLH Emil Salim, Masalah dan prospek peranan Indonesia dalam pergaulan regional di masa yang akan datang diceramahkan Dr Hasyim Djalal; Fungsi dan peranan Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat diceramahkan Ketua Mahkamah Agung Ali Said; Diversifikasi energi dan energi pedesaan diceramahkan Menteri Pertambangan dan Energi Drs. Ir. Ginandjar Kartasasmita; Fungsi dan peranan POLRI dalam penegakan hukum; Fungsi dan peranan Jaksa dalam penegakan hukum oleh Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono.

Ketua Pelaksana Rapat Kerja KORBID Hukum dan Umum, Oetoyo Oesman mengatakan, urgensi penyelenggaraan rapat koordinasi ini didasarkan atas kebutuhan akan ketetapan wawasan, persepsi serta penanganan masalah-masalah yang dibawakan oleh perkembangan pembangunan disegala bidang yang cepat dan kompleks yang disebabkan oleh kemajuan terutama ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat sendiri.

Sedangkan menurut Ketua Umum GOLKAR Wahono, Rakernas ini dirasakan merupakan masalah yang berharga bagi DPP GOLKAR. Dan Ketua Umum berjanji akan mengolah dan menjadikan sebagai dasar bagi kebersamaan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan program GOLKAR secara umum, maupun khusus.

Pada bagian lain, kata Ketua Umum, hasil dari Rakernas ini akan dijadikan penuntun DPP untuk melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi yang berkualitas. Dan semua ini nantinya akan dipersembahkan kepada pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan harkat serta martabat rakyat banyak. Selain itu, hasil Rapat Kerja ini akan dapat menentukan kualitas dari usul GOLKAR untuk GBHN (Garis-garis Besar Halulan Negara) 1993, yang telah DPP sepakati untuk diajukan ke MPR dalam sidangnya tahun 1993 nanti.

Seperti diketahui, kata Ketua Umum, dewasa ini bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang menentukan. Dalam kurun waktu sekarang ini akan diselesaikan pola pembangunan jangka panjang dalam rangkaian lima Pelita yang diawali 20 tahun yang lalu. Dan kurun waktu yang sekarang ini

Digitized by Google

merupakan ancang-ancang memasuki tahap proses tinggal landas. GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik turut bertanggung jawab untuk mempersiapkan mulusnya era tersebut.

Pasalnya, kata Ketua Umum, GBHN tahun 1993 nanti akan mengandung makna yang sangat penting, terutama dalam GBHN itu nanti antara lain akan berisi rumusan tentang pembangunan jangka panjang tahap kedua yang akan membawa bangsa Indonesia menuju era tinggal landas. Era baru ini mengandung tantangan dan masalah-masalah baru, oleh karena itu bangsa kita memerlukan wawasan yang baru pula, yaitu wawasan yang mampu menampung aspirasi-aspirasi baru dari dinamika perkembangan masyarakat kita serta tuntutan perubahan jaman.

Terciptanya wawasan baru itu, lanjut Ketua Umum, berjalin erat dengan lahir dan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru yang kreatif, dan pada gilirannya nanti berperan penting dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang bervisi jauh ke depan.

Seperti diketahui, kata Ketua Umum, pembangunan kita yang bersifat kesinambungan yang berwawasan sejarah itu, ialah Pancasila dan UUD 1945 yang esensi, intisari atau hakekatnya tidak boleh berobah. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan masyarakat kita yang diharapkan menjadi masyarakat industri modern, yaitu masyarakat maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari dalam pembangunan jangka panjang kedua nanti bukan saja tidak kehilangan jatidirinya, melainkan juga sekaligus dapat mempermantap dan mengembangkan maknanya, melalui pengamalannya dalam proses pembangunan itu sendiri.□ BM

Kualitas Manusia Kunci Sukses Pembangunan

Rapat Kerja DPP GOLKAR dengan DPD Tingkat I seluruh Indonesia yang berlangsung di Jakarta tanggal 8 sampai 10 Oktober 1989 telah membicarakan dan memantapkan program dan mekanisme kerja dalam bidang hukum, kecendekiawanan, LITBANG, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Alam, yang menjadikannya makin operasional pada tingkat Nasional maupun Daerah.

Di samping pengarahan dari Ketua Umum Wahono, para peserta Raker juga memperoleh masukan dari Ketua Mahkamah Agung Ali Said, Menteri Negara Ristek Habibie, Menteri Negara KLH Emil Salim, Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita, Menteri Kehakiman Ismail Saleh, Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono, dan Kapolri M. Sanusi.

Raker antara lain telah membahas pentingnya makna peningkatan prestasi dan produktivitas unjuk kerja nasional di segala bidang dalam rangka melakukan terobosan baru, terutama untuk mencapai masyarakat industri yang modern namun tetap dengan jatidiri masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, dalam Era Tinggal Landas nanti. Untuk itu antara lain kualitas pendidikan, penelitian dan pengembangan perlu ditingkatkan dengan dukungan anggaran atau dana yang memadai.

Mengingat berbagai potensi pengembangan serta kendala yang dihadapi dalam bidang Energi, Sumber Alam dan kehadiran berbagai masalah lingkungan yang dapat merusak ekosistem, secara nasional dan global, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif buat menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan dan melestarikan lingkungan.

Kunci dari sukses pembangunan terutama terletak pada keberhasilan meningkatkan kualitas manusia secara phisik — rohani, mental — ideologi maupun teknis — profesional, termasuk kualitas pengendalian dirinya dalam berbagai bidang kehidupan agar supaya tidak terjerumus ke dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang merusak kehidupan bersama dan lingkungan yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Memandang semakin pentingnya peranan hukum dan perwujudan keadilan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakkan hukum secara effektif merupakan upaya penting dalam tahap pemantapan kerangka landasan untuk memasuki Era Tinggal Landas. Sementara itu Raker juga menekankan pentingnya perwujudan, pemantapan dan pengembangan usaha-usaha pembentukan satu sistem Hukum Nasional dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Raker juga telah membahas mekanisme yang relevan guna memelihara dan mengembangkan kehidupan kecendekiawanan yang dinamis, kreatif dan inovatif serta kritis. GOLKAR mengharapkan kaum cendekiawan, ilmuwan, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis lainnya dalam masyarakat untuk ikut serta memberi masukan dalam penyusunan rumusan rancangan GBHN 1993. Untuk itu Raker telah merumuskan jadwal serta mekanisme penyusunan Rancangan GBHN 1993. Melalui mekanisme tersebut GOLKAR akan menampung aspirasi masyarakat mulai dari Tingkat II, terus ke Tingkat I dan akhirnya bermuara di DPP. Pada waktu yang sama DPP GOLKAR akan menghimpun buah-buah pikiran berbagai pihak terutama dari kaum cendekiawan, ilmuwan, dan pemuka-pemuka masyarakat melalui Pokja-pokja yang akan disalurkan dan dipertemukan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat. Melalui mekanisme ini GOLKAR bermaksud mengembangkan pendekatan pembangunan yang mengkombinasikan secara wajar dan sehat pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) dan pendekatan dari atas ke bawah (top down).

Raker juga menghargai posisi yang diambil oleh para cendekiawan yang karena idealisme, kekuatan pemikiran serta integritas dirinya senantiasa bersikap inovatif dan kritis dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara sehingga oleh karenanya perlu dikembangkan suasana yang kondusif bagi semaraknya kehidupan intelektual yang dinamis, kreatif serta konstruktif. Itu semua adalah dalam rangka memperkaya gagasan-gagasan bagi tercapainya cita-cita bangsa, terbentuknya masyarakat adil makmur berlandaskan Pancasila.□

Digitized by Google

Wahono

Tidak Dikehendaki Kader Yang Hanya Tunggu Perintah

Setelah menyelenggarakan penyegaran kader angkatan ke-I yang diikuti oleh DPD Tingkat I dari seluruh Indonesia, tidak lama kemudian dilanjutkan dengan penyegaran kader angkatan ke-II yang diikuti oleh kader-kader GOLKAR yang dipercaya duduk menjadi anggota DPR. Penyegaran kader yang diselenggarakan ini, merupakan program yang telah ditetapkan dalam Munas GOLKAR ke-IV Oktober tahun lalu

Ketua Umum GOLKAR dalam sambutannya di depan Peserta penyegaran kader anggota DPR dari FKP ini telah menyinggung berbagai masalah yang banyak berkaitan dengan perkembangan saat ini dan yang akan datang. Misalnya, mengenai kreatifitas dan kemandirian kader, sistem Pemilu dan program kaderisasi.

Menyinggung tentang keberhasilan GOLKAR, Wahono menegaskan bukan datang dengan sendirinya dan tidak pula secara otomatis berkelanjutan. Namun di depan telah terbentang tugas yang tidak ringan. Tantangan itu disebabkan adanya masyarakat yang semakin bergerak maju dalam segala aspek dan kehidupannya. Untuk itu, kata Wahono, GOLKAR harus tetap mampu membangkitkan peranan aktip dan dinamis dari seluruh masyarakat.

GOLKAR perlu meningkatkan lagi usaha untuk menempatkan dirinya dalam jajaran pelopor Orde Baru memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan menggalang potensi atas dasar kekompakan yang tinggi, semangat perjuangan yang ikhlas dan tanpa pamrih.

Dalam menjawab tantangan tersebut, berbagai macam kegiatan telah dilakukan sesuai dengan keputusan Munas GOLKAR ke-IV Oktober tahun lalu. Pogram Umum GOLKAR, yang menjadi ketetapan MUNAS IV Nomer IV ini, selalu menjadi kerangka acuan dari sasaran, agar hdapat maju terus dengan derap langkah yang terkoordinasi dan saling mengisi.

Mengenai sasaran dari organisasi ini sering dikemukakan oleh Ketua Umum, sasaran yang akan dicapai dalam program umum secara intern adalah untuk lebih memantapkan keberadaan, fungsi dan peranan GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaan, agar semakin dewasa, mandiri, berakar, berkualitas dan demokratis. Dengan demikian GOLKAR akan lebih mampu menjadi pelopor pembaharuan dan pembangunan, serta mewujudkan Demokrasi pancasila.

Sedangkan sasaran ekstern adalah tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Juga suksesnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila — khususnya Pelita V — untuk memantapkan landasan guna memasuki tahap tinggal landas, meningkatnya kegairahan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, serta kemenangan GOLKAR dalam Pemilu 1992.

Sistem Pemilu

Menyinggung sistem Pemilu yang sering menjadi titik perhatian masyarakat ini, Ketua Umum GOLKAR dalam beberapa kunjungan kerjanya juga sering mengungkapkan masalah ini. Sistem yang sering menjadi titik pembicaran itu adalah adanya pemikiran mengganti sistem Pemilu dari Proporsional menjadi sistem Distrik.

Dalam kesempatan pembukaan penyegaran kader angkatan ke-II yang dinilai sebagai moment yang istimewa ini, Ketua Umum menegaskan kembali akan pandangan GOLKAR tentang sistem Pemilu.

Wahono: Keberhasilan bukan datang dengan sendirinya

Digitized by Google

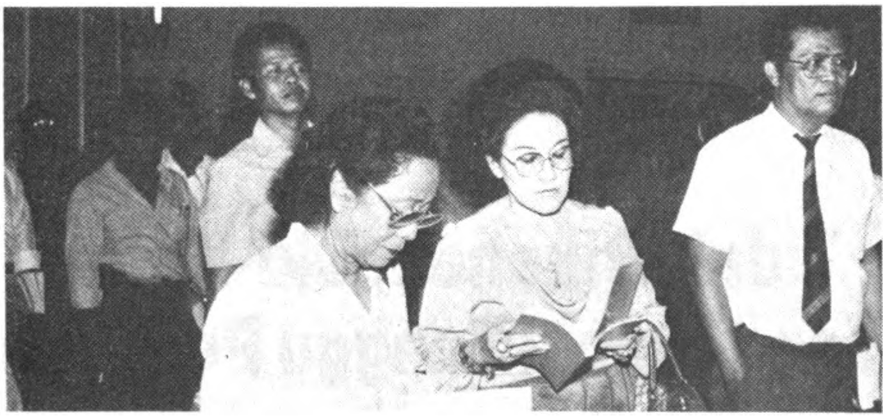

Mengisi waktu dengan baca buku

Dikatakan, GOLKAR berpendapat bahwa sistem Proporsional sudah memadai dan memenuhi kebutuhan. Tidak perlu ada tatacara maupun sistem lain. Kalaupun ada, hanyalah peningkatan daripada pelaksanaannya secara teknis dan kualitatif.

Pilihan yang dihadapkan kepada kita adalah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang sudah berjalan dan bekerja, atau memakai sistem lain, yang secara teoritis mungkin tampak lebih baik oleh sebagian orang, namun sebenarnya masih kurang sempurna.

Mengenai sistem yang sudah berjalan, yaitu sistem Proporsional, GOLKAR tidak ragu-ragu. Menurut Ketua Umum, sistem proporsional mempunyai resiko yang lebih kecil, karena masyarakat kita yang majemuk dan masih dalam suasana transisi. Sedangkan untuk merobah dari proporsional ke sistem distrik diperlukan konsensus nasional baru, dan diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama pula.

Seperti diketahui, sistem distrik ini pernah diajukan sebagai sistem alternatip. Dan untuk mencapai konsensus nasional ketika itu, melalui proses yang cukup panjang (1966-1969).

Oleh karena itu, kata Wahono, GOLKAR melihat pemikiran kembali tentang sistem Pemilu alternatip bukan pada tempatnya dewasa ini. Sementara itu adalah kewajiban kita untuk mentaati secara konsekwen konsensus nasional selama ini, karena memang kita yakini bahwa sistem Proporsional adalah yang terbaik. Sejauh ini sistem proporsional yang kita laksanakan selama empat kali Pemilu telah dapat mengembangkan suasana kehidupan politik yang stabil dan dinamis.

Untuk mencapai sasaran di atas, menurut Wahono, kuncinya terletak pada kualitas manusia yang mengemban tugas-tugas tersebut. Sebab, kualitas manusia itu merupakan sumber daya insani, merupakan kebutuhan yang perlu terus ditingkatkan. Dan GOLKAR menyadari, bahwa manusia itu merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan.

Semua ini, kata Wahono, merupakan tantangan dan sekaligus juga merupakan tugas yang mulia bagi GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik. Oleh karena itu, katanya kita harus berusaha menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum.

Kemandirian

Menyinggung tentang kemandirian, kata Wahono, tidak terlepas dari sikap kreatif dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Sikap demikian itu hanya akan terwujud apabila iklim untuk itu diberikan dan dikembangkan secara sehat dan dinamis. Kita tidak menghendai kader yang hanya menunggu perintah dan hanya menggantungkan diri kepada orang lain. Kita juga tidak menghendaki kader yang mudah mundur karena tidak kebagian jabatan. Kita tidak perlu kader yang hanya diam saja ibarat hanya menunggu turunnya hujan dari langit. Seorang kader GOLKAR tidak mencari jabatan buat dirinya sendiri, tetapi justru menjadi pelopor dan pendekar yang ingin berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Yaitu yang berani berbuat untuk kemajuan organisasi dan pembangunan bangsa, mempunyai sifat apa yang dapat diberikan kepada organisasi, bukan apa yang bisa diperoleh dari organsiasi," tegasnya.

Wahono berkeyakinan bahwa kader GOLKAR memiliki potensi untuk kreatif dan mampu mandiri, dan menjadi kewajiban untuk terus menciptakan iklim tersebut dengan sepenuh hati.

Tidaklah terlalu dini, kata Wahono, apabila mulai sekarang mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam garis besar perjuangan. Baik dalam rangka menghadapi tugas berat kita secara umum, yaitu melaksanakan program-program dimasa-masa yang akan datang, maupun secara khusus untuk memenangkan Pemilu 1992". Untuk berbagai kegiatan dan usaha operasional yang akan dilaksanakan di masa depan, tentunya kita harus terus memerlukan dukungan dari berbagai faktor penunjang, khususnya dari seluruh jajaran intern organisasi," tuturnya.☐ BM

Anggota FKP yang ikut penyegaran kader

Digitized by Google

Ny. Mien Sugandhi

Kadarkum, Program Kowani Yang Paling Menonjol

Kongres Wanita Indonesia (Kowani), salah satu organisasi wanita, dekade kepengurusan yang sekarang ini, Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), merupakan program yang paling menonjol.

Program yang diperuntukkan agar kaum wanita mengerti dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menjadi titik perhatian dari organisasi wanita ini. Langkah yang diambil agar supaya wanita tidak buta oleh masalah hukum ini, sudah digarap diberbagai propinsi. Misalnya, Jawa-Barat, Jambi, Yogyakarta, Kalimantan Timur, NTB dan dalam waktu dekat akan menyusul propinsi-propinsi yang lainnya.

Program (Kadarkum) Keluarga Sadar Hukum yang sudah berjalan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Departemen Kehakiman dengan Kowani. Sedangkan materi-materi yang diberikan kepada para kaum wanita ini meliputi berbagai informasi tentang hukum dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan wanita. Misalnya mengenai Undang-Undang Perkawinan, bagaimana membina keluarga yang sehat lahir dan bathin, dan berbagai informasi penting dan menarik.

Bila program yang dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada kaum wanita ini dianggap cukup, maka mereka-mereka itu nantinya akan dipanggil ke pusat (Jakarta) untuk diberi bekal tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah seperti tersebut di atas. ''Setelah itu mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Setelah itu mereka nantinya diharapkan menjadi motivator di daerahnya untuk keluarga sejahtera lahir dan bathin,'' kata Ny. Mien Sugandhi, Ketua Umum Kowani.

Sebagaimana diketahui, upaya untuk melaksanakan program Kadarkum ini merupakan realisasi dari hasil seminar Kowani beberapa bulan yang lalu mengenai Kadarkum, yang diikuti oleh sekitar 200 peserta dengan melibatkan 64 organisasi wanita yang terdapat diseluruh Indonesia. Selain itu juga merupakan realisasi dari naskah perjanjian kerjasama antara Departemen Kehakiman, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Ketua Umum Kowani.

Meskipun program Kadarkum merupakan yang paling menonjol, bukan berarti program lain diabaikan. Dalam waktu dekat ini, berbagai program juga segera dilaksanakan. Misalnya dengan memberikan kredit kepada pengusaha ekonomi lemah. Hal tersebut terkandung maksud untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dalam menjalankan program tersebut yang menurut rencana akan dilaksanakan tanggal 6,7,8 Oktober tahun ini, Kowani bekerjasama dengan Departemen Koperasi, dan sekaligus organisasi ini berkeinginan untuk memasyarakatkan koperasi. Sebab, kata Ny. Mien, dengan Koperasi lah kekeluargaan akan dapat dirasakan, akan lebih hemat dan keakraban akan lebih terasa.

Sedangkan dalam program tersebut, Kowani akan membentuk kelompok-kelompok koperasi dan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada koperasi dalam memperoleh pinjaman dari Bank. Diharapkan melalui salah satu program ini, Koperasi dapat tumbuh dan dapat memasyarakat, ujar Ny. Mien Sugandhi menandaskan.

Sedangkan program lainnya dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan, seperti memasyarakatkan makanan non beras kepada masyarakat. Program ini merupakan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam ikut melaksanakan GBHN tersebut, Kowani akan mencoba bekerja semaksimal mungkin, yaitu dengan memberikan informasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya makanan non beras. Misalnya makanan-makanan yang bergizi tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan beras, seperti sagu, singkong dan yang lainnya.

''Dalam melaksanakan program tersebut, para ibu-ibu ini tidak hanya mengadakan penyuluhan saja, melainkan juga harus menteladani.'' ujar Ny. Mien Sugandhi.

Dan sederetan program yang dalam waktu dekat akan segera direalisasikan, adalah menumbuhkembangkan kecintaan generasi muda akan budaya nasional. Misalnya Kowani akan menggelarkan dan mengadakan modi-

Digitized by Google

vikasi mengenai berbagai macam hasil cipta tradisional. Dalam acara tersebut akan dimeriahkan oleh pagelaran satu tari klasik karya Sultan Hamengkubuwono IX. Dan program-program lain yang juga akan segera direalisasikan antara lain; menyusun buku mengenai Keluarga yang harmonis.

Seperti diakui oleh Ny. Mien Sugandhi, bahwa karena keterbatasan dana, banyaknya anggota Kowani yang terdiri dari sekitar 25 juta anggota dengan 64 anggota organisasi wanita ini, maka dalam menjalankan programnya, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Soeharto, Kowani harus pandai-pandai bekerjasama dengan instansi yang lain. Maka dalam upaya untuk mensukseskan dan melaksanakan program tersebut, Kowani telah mengambil langkah-langkah mengadakan kerjasama dalam melakukan kegiatannya. Misalnya tentang Kadarkum dengan Departemen Kehakiman, Memasyarakatkan Koperasi dengan Departemen Koperasi.

Latar Belakang

Tidaklah sedikit wanita yang berhimpun dalam organsiasi. Dan telah banyak pula organisasi wanita yang telah muncul di permukaan. Misalnya PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Himpunan Wanita Karya dan yang lainnya. Namun, dari organisasi-organisasi yang ada itu barangkali Kowani merupakan organisasi wanita yang tertua di Indonesia.

Membina keluarga sehat

Tepatnya, tanggal 22 Desember 1928 organisasi ini didirikan. Kowani yang melaksanakan konggres pertamanya di Yogyakarta, tidak terlepas dari upaya keinginan segenap bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya untuk mencapai kemerdekaan.

Seperti diketahui, dalam kongresnya di kota Gudek itu antara lain Kowani bertekad untuk mempersatukan perjuangan organisasi-organisasi wanita yang ada pada waktu itu menjadi satu wadah dalam satu federasi.

Kowani yang kelahirannya diilhami oleh semangat Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 ini dalam kongresnya yang ke II, tahun 1935 di Jakarta, juga mencetuskan akan kewajiban utama wanita untuk menjadi "Ibu Bangsa". Ini berarti Kowani berusaha untuk menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya," ujar Ny. Mien Sugandhi.

Semangat dari hasil Kongres ke II, akhirnya dalam kongres berikutnya di kota Bandung, Jawa Barat telah menetapkan pada tanggal 22 Desember sebagai "Hari Ibu".☐ BM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

ALAMAT: KAMPUS UTAMA: JL. SUNTER PERMAI RAYA PPL SUNTER PODOMORO JAKARTA UTARA.
TLP. 687.301 - 687.302 - 687.303 - 687.304 - 687.305 - 685.666

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN
"YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 DAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA"

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI ULANG TAHUN GOLONGAN KARYA KE XXV PADA TANGGAL 20 OKTOBER 1989 DAN SERTA MENYAMPAIKAN GEMBIRA SUKSES YANG DICAPAI GOLKAR.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI
17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
KETUA,
ttd
PROF.DR.IR. R.ROOSSENO

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
JAKARTA
REKTOR,
ttd
SADJARWO, SH.

Ratno Timur Siap Sumbangkan Tenaga Untuk GOLKAR

Bagi GOLKAR, nama Ratno Timoer sudah tak asing lagi. Pemain film sekaligus sutradara yang namanya pernah mencuat setelah memerankan lakon Si Buta Dari Gua Hantu, partisipasinya dalam organisasi politik yang mendapat kepercayaan besar dari masyarakat ini tidaklah sedikit.

Dalam Pemilu 1987, Ratno yang kini juga sebagai Ketua Umum Persatuan Artis dan Film Indonesia (Parfi) ini mempunyai andil dalam pemenangan Pemilu untuk GOLKAR, di daerah Serang, Jawa Barat. Waktu itu, Ratno demikian panggilan akrabnya menggunakan pakaian serba hitam, bagai pendekar ini, termasuk salah satu di antara tokoh-tokoh GOLKAR di daerah tersebut yang ikut menarik massa pemilih untuk menggunakan haknya dalam memilih GOLKAR.

Seperti diketahui, dalam setiap kali pemilihan umum, GOLKAR selalu menempati urutan teratas. Dalam Pemilu 1982, GOLKAR mampu mengumpulkan suara sebanyak 1.100.371. Pemilu berikutnya, tepatnya tahun 1987, perolehan suara yang didapat GOLKAR juga mengalami peningkatan dan menjadi 1.275.938.

Menjelang Pemilu 1992, keinginan Ratno Timoer untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 1992 belum terasa pudar. "Saya siap untuk menyukseskan Pemilu 1992 bagi kemenangan GOLKAR. Selain itu, saya sebagai kader dalam memperjuangkan kemenangan GOLKAR ini juga tidak meminta imbalan", tegas Ratno Timoer.

Tentu, perjuangan Ratno Timoer dalam kemenangan GOLKAR ini terbatas di dunianya. Misalnya, dengan menyumbangkan tenaga-tenaga artis film dalam kampanye Pemilu yang akan datang. Selain itu, kami juga siap untuk menyumbangkan tenaga dari kader-kader persatuan pendekar persilatan Banten demi GOLKAR, lanjut Ratno.

Keinginan Ratno untuk mendukung kemenangan GOLKAR ini sebagaimana dikatakan bahwa, "GOLKAR sebagai organisasi politik jelas berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, GOLKAR harus didukung", tegasnya.

Ratno Timoer

Dalam waktu dekat, lanjut Ratno, kami akan mengadakan diskusi dengan para pendekar. Rencananya, diskusi itu akan dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan. Misalnya, untuk pertama kali dilakukan di Banten, kedua di Bandung dan seterusnya. Dalam diskusi yang menurut rencana selain akan membahas masalah-masalah seni dan budaya itu juga kalau bisa diisi mengenai masalah ke-GOLKAR-an. Dengan demikian diharapkan para artis dan pendekar itu bertambah pengetahuannya tentang GOLKAR. Selain itu, dalam menghadapi Pemilu 1992 nanti, GOLKAR dalam menggalang kekuatan, khususnya dari kalangan artis dan para pendekar tidak mengalami kesulitan.

Pembauran antar artis

Penganut aliran silat Banten ini merasa yakin bahwa perkumpulan pendekar yang dipimpinnya itu mempunyai dampak positif bagi GOLKAR dalam rangka mengakarkan organisasi sampai tingkat bawah sebagai upaya menghadapi Pemilu 1992, karena langkah yang sudah dilaksanakan ini merupakan suatu langkah pendekatan diri pada masyarakat dimana sangat menunjang dan mendukung program GOLKAR dalam mengerahkan massa. Oleh karenanya, anggota Timja (Tim Kerja) Seni Budaya DPP GOLKAR ini tidak segan-segan untuk melakukan pembinaan terhadap pendekar-pendekar persilatan Banten guna menyukseskan program Tri Sukses GOLKAR.

Sedangkan di kalangan artis-artis layar perak, Ratno Timoer kepada Ketua Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR H.M. Irsyad Sudiro mengharapkan, agar semua artis pendukung GOLKAR yang berada di bawah naungan wadah Safari, Lestari dan BKS-Kostrad dapat lebur menjadi satu wadah dalam setiap kegiatan GOLKAR. Kehadiran mereka ini adalah perwujudan daripada pembauran antar artis Indonesia di dalam mengoperasionalisasikan program GOLKAR di tengah masyarakat tanpa me-

Perlu dibekali tambahan materi tentang ke-Golkar-an

Digitized by Google

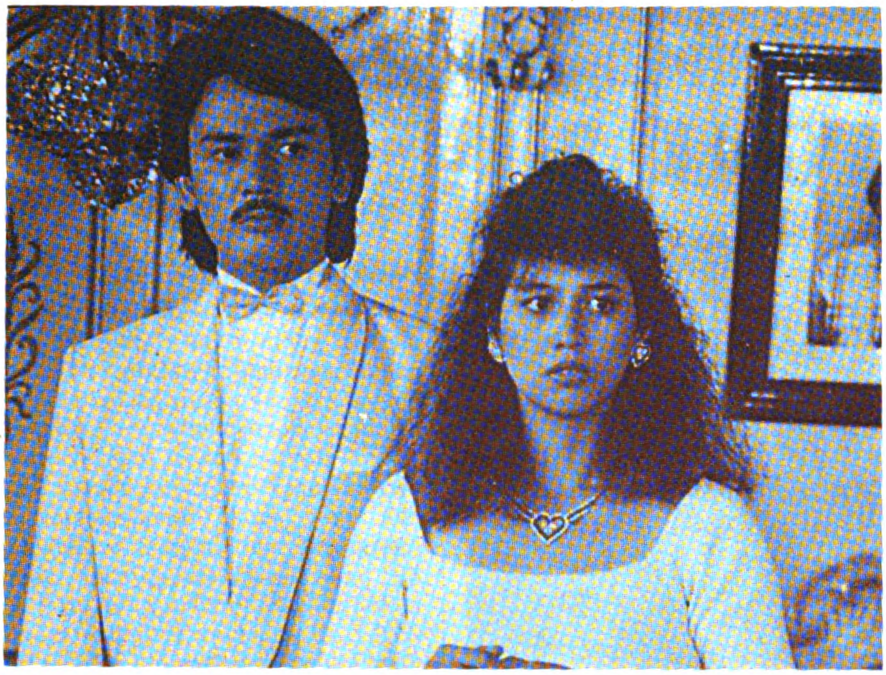

Agar semua artis pendukung Golkar ada dalam satu wadah

nimbulkan persaingan di wadah artis-artis ini. Dengan demikian setiap artis dapat menerima tugas dan tanggung-jawab yang sama untuk mendharma-baktikan dirinya kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui GOLKAR. Andaikata, di antara artis-artis ini terdapat dan mempunyai prestasi lebih baik maka artis ini perlu didukung supaya lebih meningkatkan prestasinya dan bukan sebaliknya.

"Setelah adanya pembauran ini, Pak Irsyad Sudiro harus tanggap dalam menghadapi kehadiran artis-artis pendukung GOLKAR dan tidak mengambil jarak dengan mengistilahkan si A anak emas dan si B anak tiri. Karena, semua artis ini pasti memberikan dukungan yang sama besar kepada program departemen yang dipimpin Pak Irsyad Sudiro. Yang pasti, semua artis berada di belakangnya," tutur Ratno Timoer.

Kemudian aktor ini memandang penting bila pembinaan ini tidak hanya dilaksanakan cuma di kalangan artis saja, bahkan GOLKAR pun katanya, perlu juga melakukan pembinaan yang lebih dalam terhadap pendekar-pendekar ini sekaligus membantu secara moril maupun materiil adanya gagasan untuk mendirikan sebuah padepokan pendekar-pendekar persilatan yang tidak hanya meliputi aliran Banten saja, tapi menyangkut semua aliran persilatan yang berkembang di Indonesia. Kalau nantinya padepokan ini terwujud, maka besar manfaatnya bagi kepentingan GOLKAR dalam memantapkan posisi GOLKAR sebagai organisasi kekuatan sosial politik di tanah air.

Sementara wadah perhimpunan pendekar-pendekar persilatan yang diketuai Ratno Timoer itu telah memiliki anggota sekitar 42 ribu orang dan terdiri dari kalangan atas sampai bawah. Keberadaannya sudah diakui oleh berbagai pihak terutama bagi mereka yang mengenal dunia persilatan. Apalagi ditunjang sang ketua yang sudah dikenal sebagai aktor khusus film-film cerita silat, tentunya perkumpulan pesilat-pesilat aliran Banten ini akan mendapat dukungan dari masyarakat luas, dikarenakan memang aliran bela diri ini merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, serta mengandung nilai seni yang pantas dipagelarkan untuk umum. Bagi GOLKAR pada umumnya dan bagi Departemen Seni Budaya DPP GOLKAR pada khususnya, keinginan Ratno Timoer untuk melakukan pendekatan terhadap massa melalui seni bela diri pencak silat sedikit banyak mendapat perhatian serta dibina sebagaimana seorang kader GOLKAR yang lain. "Saya telah menginformasikan perihal ini kepada Pak Irsyad Sudiro dan kapan Pak Irsyad Sudiro tertarik atas gagasan ini," tambahnya.☐ DT/BM

ASOSIASI INDUSTRI PERMEBELAN & KERAJINAN INDONESIA
INDONESIAN FURNITURE INDUSTRY & HANDICRAFT ASSOCIATION
BADAN PEMASARAN BERSAMA VI
VIth JOINT MARKETING BODY

ASMINDO BPB VI

Mengucapkan

DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE XXV

20 OKTOBER 1989

Digitized by Google

Peningkatan Kualitas Kader Untuk Jangkauan Ke Depan

Peningkatan kualitas kader GOLKAR tidak hanya untuk kepentingan pemenangan Pemilu 1992, tapi melihat jangkauan jauh ke depan, memantapkan kerangka landasan pembangunan yang memiliki pemikiran 25 tahun ke depan. Tanpa memiliki konsep kaderisasi yang berwawasan jauh ke depan, GOLKAR tidak akan tampil sebagai organisasi pembaharu yang patut diteladani organisasi politik lainnya.

Kader-kader muda GOLKAR diharapkan memiliki lingkup pengaruh atau lingkungan pengaruh di tengah-tengah masyarakat, atau mampu membentuk opini publik (publik opionion). Dan untuk bisa menjadi kader yang demikian itu, kader-kader muda tersebut harus mampu memberi nilai tambah atau menciptakan nilai tambah kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dikelola secara proporsional dan produktif.

Ketua Departemen Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPP GOLKAR, H Mohammad Hatta BBA, dalam percakapannya dengan Media Karya mengungkapkan, apa yang dilakukan OKK dalam kaitan peningkatan kualitas Kader-kader GOLKAR masih berkisar upaya memberi tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah organisasi, cara memimpin rapat, metode pemecahan masalah dan metode pendekatan.

Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi dalam upaya meningkatkan kualitas kadernya masih dalam upaya memperkuat, memperkokoh bangunan kaderisasi dalam periode sebelumnya, yang biasa disebut dengan penyegaran.

Namun yang jelas arah daripada kegiatan peningkatan kualitas kader tersebut, adalah pengembangkan kemampuan kader untuk mengenal keadaan masyarakat senyatanya sehingga nantinya mampu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan untuk menggerakkan masyarakat itu, baik dalam kegiatan pembangunan maupun kegiatan politik.

Tapi untuk mampu melibatkan diri dalam kegiatan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan atau kegiatan-kegiatan yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kader GOLKAR perlu memiliki basis yang memungkinkannya tumbuh dalam kemandirian, sehingga masyarakat lingkungannya menaruh kepercayaan kepada kader itu. Basis yang dimaksud harus memberikan kemanfaatan bagi kader tersebut maupun masyarakat. Pemilikan basis bagi seorang kader penting sekali dalam rangka mewujudkan kemandirian. Seorang kader yang diminta meningkatkan kesejahteraan, kenyataannya dia sendiri masih menganggur, belum sejahtera dan belum mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, bagaimana dia bisa mandiri?

Oleh karenanya meningkatkan kemampuan para kader dalam mengembangkan kemandirian dengan jangkauan kualitatif yang menyangkut pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang senyatanya dibutuhkan masyarakat, juga merupakan arah daripada kegiatan kaderisasi GOLKAR.

Mengenal Keadaan Masyarakat

Di bagian lain Mohammad Hatta menegaskan bahwa usaha peningkatan kualitas kader tidak semata-mata terkonsentrasi pada upaya peningkatan ilmunya saja, tetapi juga harus peka mengenai keadaan masyarakat yang senyatanya.

H. Mohammad Hatta

Contoh kongkret meningkatkan kualitas kader disebut misalnya bagaimana meningkatkan pengetahuan kader terhadap keadaan masyarakat senyatanya. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan kader dalam penanggulangan wabah penyakit, maka kader bersangkutan secepatnya mengadakan kontak atau komunikasi dengan Puskesmas dan bersama-sama petugas kesehatan dari Puskesmas turun ke daerah dimana masyarakatnya terkena wabah penyakit. Ini adalah contoh bagaimana memacu kader itu untuk tanggap dengan keadaan masyarakat senyatanya. Kegiatan lain yang bisa dilakukan kader GOLKAR, bagaimana menggerakkan para pemuda di lingkungannya misalnya kegiatan olahraga, bersih lingkungan,

Digitized by Google

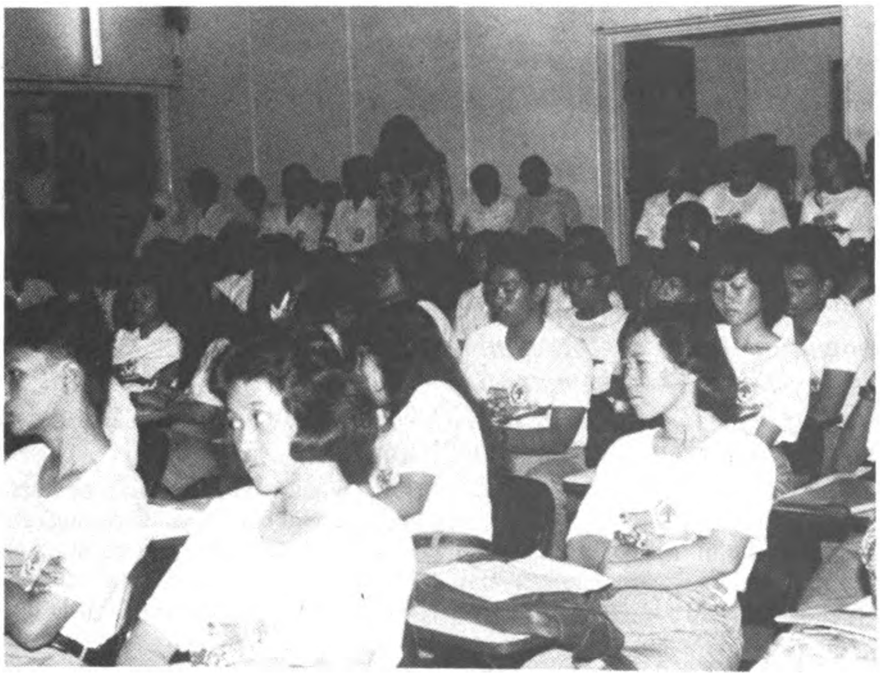

Diperlukan kader yang jadi panutan

kerohanian.

Lebih luas lagi bagaimana mendidik kader itu memahami dan melaksanakan pembangunan masyarakat atau menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebagai seorang kader, mereka harus mampu menumbuhkan atau menciptakan kondisi-kondisi pembangunan dalam masyarakat. Kader GOLKAR disini haruslah mampu menjadi teladan atau panutan dalam menggerakkan masyarakat untuk membangun. Dengan demikian kader GOLKAR bisa meringankan tugas pemerintah menggerakkan masyarakat secara keseluruhan.

Dari sekian juta kader GOLKAR yang ada, mereka harus ditingkatkan kualitasnya, dan kader harus pula mempunyai jangkauan pembangunan senyatanya yang dibutuhkan masyarakat. Kalau dia mau bicara sebagai juru penerangan (jupen), mereka harus ditatar mengenai juru penerangan. Begitu pula kalau mereka nantinya harus terjun dalam kontak tani, harus dibekali pengetahuan mengenai masalah pertanian. Demikian halnya dengan bidang kejuruan, kader GOLKAR harus melengkapi dirinya dengan terlebih dulu kursus ketrampilan. Ini yang dinamakan membangun dengan jangkauan kualitatif.

"Perlu digaris-bawahi bahwa kegiatan kader kita dalam masyarakat berarti keterlibatan kader kita dalam pembangunan. untuk itu ada dua sasaran yang kita harapkan, yang nantinya dapat dijangkau oleh para kader kita. Pertama, kader kita nantinya akan lebih profesional. Kedua, kader kita nantinya memiliki sosial kontrol dalam rangka membantu tugas pemerintah di daerah," ujarnya.☐ BM/NS

DIREKSI DAN KARYAWAN
RADIO RAMAKO GROUP

MENGUCAPKAN:

DIRGAHAYU GOLONGAN KARYA KE-XXV, 20 OKTOBER 1989

ramako
MEDIA PROMOSINDO

RADIO
ramako
FM 106.15 STEREO

RADIO
mustang
FM 100.55 STEREO

RADIO
aristiara
AM 738

RADIO
ramako Batam
FM 101 . 6 STEREO

Kantor Pemasaran:
Jl. Empu Sendok no. 12 Kebayoran Baru — Jakarta 12110
Telepon: 586219-588008-7391163-7391686, Fax: 588008-7396314, Telex: 47452 RAMAKO IA

Digitized by Google

MDI Di Pulau Dewata

Merupakan kehormatan tersendiri bagi Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) di Pulau Dewata dalam Musdanya kali ini dapat dihadiri Ketua Umum DPP GOLKAR secara langsung.

Mengingat Musda MDI sekarang ini sebagai langkah awal Musda tingkat I yang mempunyai arti dan strategis untuk menghadapi Muktamar/Munas. GOLKAR sangat berkepentingan dalam hal ini, karena GOLKAR merasa perlu memikirkan bagaimana kelanjutan pembinaan umat Islam yang besar itu, yang sejak Pemilu 1971 telah memberikan partisipasinya kepada GOLKAR, "Lebih dari 71 persen pemilih GOLKAR umat Islam," ujar Wahono. Karenanya ia sangat bergembira dapat hadir bertemu dengan kader fungsional pemuka Agama Islam yang berada di Pulau Dewata ini.

Dihadapan para peserta Musdamirin di Denpasar, Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono dalam pengarahannya menguraikan tentang sejarah kelahiran MDI, yang pada waktu itu sempat menjadi pertanyaan, mengapa MDI perlu dilahirkan, padahal telah ada GUPPI. Dijelaskannya bahwa "atas dasar kecintaan, keyakinan perjuangan GOLKAR untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, dalam menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan YME, serta tanggung jawab umat Islam yang berpartisipasi dalam tubuh organisasi GOLKAR, diperlukan dan dibutuhkan pembinaan umat Islam itu mempunyai suatu wadah, yang fungsi dan tugas pokoknya sesuai dengan profesinya".

Dilihat dari tugas pokok, serta fungsi antara GUPPI dan MDI memang agak berbeda. Perbedaan itu sematamata terletak pada tekanan atau konsentrasinya, namun satu dengan lainnya saling menunjang, bukan berjalan sendiri-sendiri, tegas Wahono. MDI berdakwah tentang agama Islam. GUPPI juga mempunyai kegiatan dakwah, tentunya mengenai dakwah Pendidikan. Sebab, lanjutnya, menghadapi sesuatu, tidaklah cukup sekedar berdakwah, sekedar menyampaikan atau sekedar menjelaskan, tetapi harus pula menanamkan unsur-unsur pendidikan. Dengan kata lain, dakwah baru menjangkau nilai-nilai kuantitas, sedang pendidikan jelas menjangkau nilai-nilai kualitas yang belum tentu menjangkau nilai-nilai kuantitas, ujarnya.

Berarti MDI dan GUPPI harus saling tunjang-menunjang dan saling mengisi, kata Ketua Umum GOLKAR, memang tidak ada perbedaan yang sangat prinsipiil antara MDI dan GUPPI. Keduanya mempunyai sasaran yang sama, terutama membina Keluarga Besar GOLKAR yang beragama Islam. Kita berdakwah untuk membangun dan berkarya (Dakwah bil khal).

Dibagian lain dalam sambutannya Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, mengemukakan pula bahwa kehadiran MDI bukan pula untuk memenangkan GOLKAR dalam Pemilu, walaupun secara historis, MDI memiliki hubungan moril dengan GOLKAR, "Namun tidak berarti MDI merupakan "onder bouw" GOLKAR sejak organisasi tersebut memisahkan diri beberapa tahun lalu, sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1985", ujar Dewan Pembina MDI ini.

Menyinggung tentang peran MDI masa mendatang, khususnya yang erat hubungan dengan kepentingan program Tri Sukses GOLKAR, terutama dalam menghadapi Pemilu 1992, Wahono dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina MDI mengharapkan para kader fungsional yang berada di MDI terus meningkatkan kekompakan yang lebih nyata dari segenap jajaran Keluarga Besar Golongan Karya, karena MDI dipandang mempunyai pengaruh mental/psikologis politis, agamais dan lingkungan. Oleh sebab itu Wahono minta keikhlasan, pengorbanan, kesadaran dan pengabdian yang tinggi untuk mampu menelusuri segala lapisan masyarakat dari berbagai tingkatan.

Pengabdian tokoh-tokohnya adalah pada organisasi "karena Allah", bukan kepada orang, kata Wahono. Oleh sebab itu, perlu dipelihara adanya ukhuwah yang nyata, menghindari sifat populis dan mengindahkan hierarki dan koordinasi dengan GOLKAR di segala tingkatan. Kesemuanya itu menurut Wahono mutlak diperlukan demi peningkatan kualitas para Da'i, muballigh dalam memperkaya wawasan sebagai kader fungsional GOLKAR.

Terkait dengan musda, Wahono mengharapkan, musda dapat menghasilkan program yang rasionil, mampu dilaksanakan dan mencerminkan koordinasi dengan program pembangunan daerah dan DPD GOLKAR Tingkat I Bali. Lain dari itu MDI Bali juga harus mampu menyesuaikan diri, baik yang menyangkut wawasan idiil, organisasi, maupun wawasan Agama.

Sejalan dengan harapan Ketua Umum DPP GOLKAR, Gubernur Bali Ida Bagus Oke mengemukakan agar MDI juga dapat mengantisipasi dengan perkembangan kemajuan bidang Ilmu dan Teknologi yang telah berkembang pesat akibat pesatnya pembangunan, yang menimbulkan pergeseran diberbagai sektor kehidupan masyarakat maupun berupa pergeseran nilai kehidupan masyarakat. Pada pergeseran nilai inilah yang perlu dijaga agar jangan sampai terjadi pergeseran prinsip-prinsip dasar kehidupan bangsa kita yang berfalsafah Pancasila.

Kita menyadari kemajuan ilmu dan teknologi tidak selamanya mampu memecahkan persoalan bangsa kita, tetapi pembangunan teknologi harus diimbangi dengan moral dan akhlak, yang tidak lain hanya didapat pada ajaran-ajaran Agama. Disini Oke melihat MDI mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan ketaqwaan pada TUHAN Yang Maha Esa. Sekaligus membangun moral dan akhlak keluarganya, dan mampu menangkal setiap ekses akibat kemajuan dan teknologi. Lain dari itu Oke juga mengharapkan MDI daerah Bali juga terus meningkatkan kemantapan perwujudan kerukunan hidup antara umat beragama, yang meliputi kerukunan umat beragama dengan pemerintah, kerukunan umat beragama dengan intern umat beragama.

Musda yang mengambil thema "Dengan dakwah pembangunan, MDI menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila" berlangsung selama dua hari, di Gedung BPG, Denpasar. Hadir dalam acara itu antara lain, Sekjen DPP MDI Muhammad Hatta, Ketua DPD GOLKAR Bali, serta rombongan Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, diantaranya Sekjen Rachmat Witoelar, Wakil Sekjen dr. R. Suhadi, Wakil Bendahara Ny. Tati S Darsoyo, Ketua Departemen Kerohanian Umar Mansyur dan Drs Imam Sudarwo, Ketua yang sekaligus merupakan Korwil Bali dan NTB.☐ (WT)

Digitized by Google

Serangkaian Kegiatan, Meriahkan HUT GOLKAR Ke-XXV

Dalam kunjungan bakti sosial di lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) Kramat Tunggak, Jakarta Utara, Ir. Tati Sumiarno kepada para WTS mengatakan, bahwa WTS tidak lagi membutuhkan bantuan material. Tapi, mereka sangat membutuhkan bantuan moril psikologis. Sehingga dalam hal ini terhadap mereka diperlukan adanya penanganan sosial yang terpadu. Karena kehadiran mereka di dunia hitam ini 90% disebabkan kesulitan ekonomi dan hatinya pernah disakiti kaum lelaki.

Menyinggung tentang penyakit AIDS dan PHS, Tati mengharapkan, agar para WTS ini jangan disudutkan dan sebaliknya perlu dicari akar permasalahannya. Untuk mencari jalan keluar diperlukan pembinaan terhadap mereka, misalnya mengajarkan keterampilan berupa asesori dan lain-lain. Sedangkan Ir. Tati Sumiarno dalam kesempatan temu muka dengan WTS itu berjanji siap menampung hasil keterampilan mereka tersebut.

Dalam bulan bakti sosial ini selain melakukan kegiatan tersebut, juga dilaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan seperti donor darah, donor mata, khitanan massal, pengobatan massal secara gratis, gerakan penghijauan, memberikan santunan kepada petugas kebersihan, memberikan penghargaan kepada pengasuh Panti Asuhan, meresmikan RS. Gigi dan Mulut, meresmikan Gedung DPD GOLKAR Tingkat II Jakarta Timur serta motivasi nasional tentang KB dan dukun.

Selain kegiatan-kegiatan bakti sosial ini, Panitia HUT GOLKAR ke-25 Bidang Olahraga yang dikoordinir oleh Drs. Didiet Haryadi dan Drs. Slamet Effendy Yusuf juga melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat pertandingan, seperti Sepakbola di Stadion Persija, Menteng. Kemudian Tenis, Gerak Jalan dan Rally Sepeda.

Dicabang olahraga Tenis misalnya, Tim DPP GOLKAR diperkuat Ketua Umum DPP GOLKAR Wahono, Sekjen Rachmat Witoelar, Sugeng Wijaya, Jacob Tobing, Ponco Sutowo, Ny. Vera, Subianto SP, Anang Adenansi, Alfian dan Djoko Sudjatmiko. Petenis-petenis DPP GOLKAR ini mampu melayani permainan petenis-petenis dari Mabes ABRI, Departemen Perdagangan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian, Pertamina, Bank Dagang Negara, Pemda DKI, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hankam, Bulog, Indosat, Departemen Kehutanan, Sekretariat Negara, Departemen Penerangan, Kejaksaan Agung, Departemen Perhubungan, DPD GOLKAR Tingkat I DKI dan Suara Pembaharuan.

Kegiatan dibidang Pen-

Reli sepeda meriahkan HUT GOLKAR

Serangkaian kegiatan bhakti sosial

Digitized by Google

didikan dan kegiatan Anak/Remaja bagi GOLKAR merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Oleh karenanya, kegiatan semacam ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Lomba Pidato, Lomba Karya Tulis, Lomba Cerdas Cermat P4 dan UUD 1945 serta Lomba Pembacaan Panca Bhakti GOLKAR dan Pembukaan UUD 1945.

Ketua DPP GOLKAR Wahono ketika membuka Lomba Pembacaan Pembukaan UUD 1945 di Aula DPP GOLKAR Slipi menjelaskan, bahwa sifat lomba ini adalah lebih memasyarakatkan UUD 1945 dan Pancasila kepada kalangan generasi muda supaya UUD 1945 dan Pancasila ini dapat dipahami, dihayati sekaligus diamalkan. Sedangkan menurut salah seorang panitia kegiatan lomba ini H. Basri Bermanda, tujuannya adalah untuk menggalakkan penghayatan dan pengamalan UUD 1945 termasuk pula didalamnya Pancasila di kalangan generasi muda. Ternyata ajakan Panitia Lomba Pembacaan Pembukaan UUD 1945 yang diketuai Basyuni Suriamihardja ini mendapat sambutan hangat dari kalangan remaja yang duduk di bangku sekolah tingkat SLTA dan yang mendaftar hampir mencapai sekitar 200 orang lebih. Namun, setelah diadakan penyaringan yang ketat dan setiap sekolah hanya diperbolehkan untuk mengirimkan dua utusan, maka yang mengikuti kegiatan ini praktis sekitar 112 orang peserta. Begitu pula dalam Lomba Pembacaan Panca Bhakti GOLKAR yang diselenggarakan di lima wilayah DKI, animo masyarakat pun besar sekali seperti halnya Lomba Pembacaan Pembukaan UUD 1945.

Kemudian, setelah peringatan HUT GOLKAR ke-25 ini diramaikan oleh berbagai ragam kegiatan yang bersifat lomba dan bakti sosial, maka Ketua Bidang Kesenian dan Hiburan Drs. Irsyad Sudiro memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat hiburan yang akan dipagelarkan di lima wilayah DKI Jakarta tanpa dipungut bayaran. Dalam hiburan tersebut akan ditampilkan artis-artis ibukota yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara persembahan malam kesenian dan hiburan ini dipagelarkan di setiap halaman Kantor DPD II wilayah masing-masing.

Sedangkan Drs. Jacob Tobing, MPA dalam mengisi bulan bakti GOLKAR ini menyelenggarakan seminar sehari tentang perjalanan GOLKAR selama 25 tahun dan perspektif ke depan. Selanjutnya sebagai tradisi GOLKAR dalam setiap memperingati hari jadinya, adalah melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan melaksanakan pengukuhan Pinisepuh GOLKAR di Aula DPP GOLKAR Slipi, menyelenggarakan Rapim dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah menjadi kebiasaan GOLKAR dalam memeriahkan HUT setiap tahun.☐ DT

Sepakbola, salah satu kegiatan HUT

Wahono Resmikan Klinik GOLKAR

Ketua Umum DPP Golkar Wahono, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Minggu 1 Oktober lalu, telah meresmikan penggunaan klinik GOLKAR yang terletak di kompleks DPP GOLKAR Jalan Anggrek Nelly Murni Slipi, Jakarta Barat.

Dalam pengantarnya Ketua Umum Golkar mengatakan bahwa pembinaan kesehatan bukan monopoli pemerintah semata, tapi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

"Tanggungjawab ini perlu dibina dan dikembangkan secara terus menerus," kata Wahono sambil menambahkan apa yang dilakukan para dokter kader Golkar didorong oleh semangat yang murni sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya selesai peresmian klinik GOLKAR tersebut diteruskan dengan pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma baik kepada para anggota maupun warga masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan menyongsong HUT GOLKAR ke-25 yang tepat tanggal 20 Oktober 1989.

Bantu Korban Kebakaran

Sekitar 204 kepala keluarga (KK) korban kebakaran di Kampung Cinamprak, Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang baru-baru ini telah menerima bantuan dari DPD GOLKAR Tangerang berupa uang sebesar Rp 50.000 per KK yang diterimakan langsung oleh ketuanya H Mumu Suherman.

Periksa tekanan darah

Digitized by Google

Bhakti Sosial GOLKAR Ke LP Wanita Tangerang

Bidang Bhakti Sosial HUT GOLKAR ke-25 dengan ketuanya Ny Tati Sumiarno, baru-baru ini telah mengunjungi LP Wanita Tangerang, Jawa Barat, untuk menyerahkan sumbangan berupa sebuah mesin jahit, kitab suci Al Qur'an, gelas GOLKAR, bibit pohon salam dan sarung guna diberikan kepada 103 penghuni LP Wanita tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ny Tati Sumiarno mengatakan apa yang dilakukan DPP GOLKAR itu merupakan perwujudan dari rasa kebersamaan antara sesama bangsa Indonesia. Disamping itu, kegiatan itu dimaksudkan untuk ikut mengisi kegiatan-kegiatan sehingga waktu yang ada bisa digunakan secara efisien, produktif dan ekonomis.

Kegiatan kunjungan ke LP Wanita Tangerang disertai istri Ketua umum GOLKAR Ny Wahono, Ny Oetoyo Oesman, Sekjen Depsos Sarwono, Dirjen Bansos Drs Muchrodji dan Dirjen Pemasyarakatan Depkeh, Baharudin Lopa, SH.

Sementara tim kesehatan dari Yayasan Karya Bhakti telah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma kepada para penghuni LP Wanita Tangerang.

Di LP Wanita Tangerang

GOLKAR Bantu Korban Kebakaran

DPP GOLKAR yang diwakili bidang Bhakti Sosial HUT GOLKAR ke 25, telah menyerahkan bingkisan kepada para korban kebakaran di Jl. Tambak, Jakarta Pusat. Bingkisan tersebut terdiri dari 2.000 bungkus super mie, 2.500 buah buku tulis, 500 buah pinsil, 300 sarung wanita dan 300 buah kaos GOLKAR, diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPP GOLKAR Ny Mien Sugandhi, kepada ketua DPD GOLKAR DatiI DKI, yang selanjutnya diserahkan kepada DPD GOLKAR Dati II Jakarta Pusat guna dibagikan kepada mereka yang berhak.

Ketua Bidang Bhakti Sosial, Ir Tati Sumiarno dalam kesempatan itu mengatakan, apa yang dilakukan GOLKAR itu, merupakan karya nyata dan dedikasi terhadap masyarakat yang juga dapat dijadikan tolok ukur sejauh mana perwujudan pengalaman Pancasila.

Menyinggung korban kebakaran itu, Ny Tati Sumiarno mengatakan bahwa sebagian besar yang menjadi korban kebakaran adalah para warakawuri (janda anggota TNI-AU) disamping masyarakat lainnya, khususnya para siswa sekolah yang merupakan tunas-tunas bangsa.

JAYA RAYA

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUSAHAAN AIR MINUM JAYA

Jalan Penjernihan II – Pejompongan

Telp.: 581943-582652-582938-582334-582256-587019

Telex: 44216 PAMJAYA

PAM JAYA

DENGAN SEMANGAT HUT GOLKAR KE XXV KITA MANTAPKAN KERANGKA LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL PELITA V UNTUK MENUJU TINGGAL LANDAS PEMBANGUNAN PADA PELITA VI.

MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MEMASYARAKATKAN HEMAT AIR BERSIH DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN.

Digitized by Google

ABRI tidak akan pernah mengenal kompromi

HUT ABRI Ke 44, Kesederhanaan Dalam Kemegahan

Kesederhanaan upacara HUT yang dipusatkan di Parkir Timur Senayan tidak mengurangi kekhidmatan peringatan serta kemegahan ABRI yang genap berusia 44 tahun.

Upacara yang ditandai dengan apel, defile personil kekuatan ABRI dengan puncak acara amanat Presiden tidak kurang maknanya bahkan lebih menunjukkan kedewasaan dan kematangan ABRI dari penyakit kekanak-kanakan yang suka pamer. Bahkan kehadiran pesawat-pesawat terbang tempur yang melintas di udara di atas tempat upacara yang terdiri dari A-4 Skyhawk, HS Hawk, dan F-5E Tiger sejumlah 12 buah bukan untuk unjuk kemahiran di udara, tetapi terkesan sebagai pengisi waktu saat persiapan defile dilakukan.

Dalam amanatnya pada upacara yang tidak saja dihadiri oleh jajaran ABRI peserta upacara dan undangan, tetapi juga ribuan warga masyarakat yang berada di pinggir lokasi upacara untuk mengelu-elukan ABRI, Presiden Soeharto mengingatkan bahwa tugas-tugas pembangunan yang akan datang tetap memerlukan stabilitas. Meskipun demikian, dinamika masyarakat dengan prakarsa dan kreativitas perlu terus dikembangkan agar bangsa Indonesia memiliki tenaga yang besar untuk tinggal landas. ''Sesungguhnya dinamika masyarakat itulah kekuatan utama pembangunan,'' kata Kepala Negara.

Proses pembangunan, demikian Presiden, telah melahirkan ketentuan-ketentuan dan aspirasi-aspirasi baru. Ini juga harus disalurkan dan diserasikan agar menjadi kekuatan positif untuk pembangunan. Stabilitas yang diperlukan bukanlah yang statis, melainkan stabilitas dinamis yang sehat, sesuai dengan tuntutan kemajuan pembangunan bangsa.

Mawas Diri

Selain mengingatkan masalah stabilitas, Presiden juga mengajak seluruh bangsa untuk bertekad bangkit dan tampil dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dengan penuh kemandirian sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia perlu menata diri agar sebagai bangsa mampu mengembangkan kemandirian di tengah-tengah kemajuan dunia yang sangat pesat. Mengembangkan kemandirian yang seluasluasnya merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat menyebut era tinggal landas sebagai momentum kebangkitan nasional kedua yang dilaksanakan dalam suasana hidup berkebangsaan yang kukuh, dan bersatu padu. ''Sudah menjadi tekad kita untuk menjadi bangsa modern yang tetap berkepribadian sendiri. Kita tidak mau terus berada pada peringkat bawah dalam jajaran bangsa-bangsa. Untuk itu kita harus mengembangkan kemampuan dan kemauan yang sebesar-besarnya. Kita juga harus terus menerus berani melakukan koreksi dan membenahi segala kekurangan dan kelemahan yang masih ada,'' kata Presiden.

Perintah Harian

Sehari sebelumnya, Panglima ABRI Jendral Try Sutrisno menyampaikan pidato melalui RRI/TVRI untuk menyambut hari ABRI serta memberikan perintah harian kepada jajarannya.

Ia menegaskan dalam pidatonya bahwa ABRI tidak akan pernah mengenal kompromi dan tidak akan ragu-ragu untuk bertindak tegas terhadap kelompok atau pihak manapun yang bertujuan mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional. ''Dalam menghadapi tindakan-tindakan yang sifatnya inkonstitusional, ABRI tak akan memandang tingkatan, status, atau atribut dari oknum pelakunya'', katanya. Menurut Pangab, ABRI perlu terus mengembangkan sikap peka,

Digitized by Google

tanggap dan waspada serta kreatif, inovatif, dan antisipatif di dalam pelaksanaan tugas baik dibidang hankam maupun dibidang sosial politik.

Di lain pihak Pangab juga mengingatkan jajarannya bahwa tanpa dukungan rakyat, tidak ada satu pun tugas ABRI yang dapat terlaksana dengan sempurna. Untuk pelaksanaan tugas yang sempurna, ABRI perlu terus memelihara dan memantapkan kemanunggalan dengan Rakyat. Dengan kecerdasan dalam menganalisa dan mengantisipasi keadaan masa depan dan dengan tetap waspada mengamati gelagat perkembangan lingkungan strategik di dalam dan luar negeri, tugas dan penampilan ABRI akan dapat lebih dititikberatkan pada upaya pemeliharaan keamanan dalam negeri dan penyelenggaraan fungsi sosial politik ABRI.

Perintah harian yang disampaikan Pangab meliputi tujuh hal, pertama, mantapkan kemampuan sosial politik ABRI serta peranan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan bangsa dengan terus mengembangkan kepekaan dan daya tanggap serta kemampuan antisipasi menghadapi tantangan masa depan.

Kedua, tingkatkan terus peran serta ABRI dalam menumbuhkembangkan sistem politik demokrasi Pancasila dan senantiasa berupaya mendorong pendidikan politik masyarakat yang positif, mengajak semua lapisan masyarakat lebih menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta membantu pemerintah dalam mewujudkan aparatur yang berkemampuan, berdisiplin tinggi, bersih dan berwibawa.

Ketiga, mantapkan kemanunggalan ABRI-Rakyat dengan cara lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas kepemimpinan dan komunikasi sosial ABRI serta mewujudkannya dalam upaya-upaya nyata di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Keempat, tunjukkan semangat juang dan semangat pengabdian yang tinggi sebagai insan prajurit Sapta Marga dalam wujud kerja keras, kerelaan berkorban, ketabahan, rasa tanggung jawab, serta sikap tidak kenal menyerah dalam menghadapi tantangan dan ujian perjuangan yang semakin berat dimasa mendatang.

Kelima, kembangkan terus kemampuan oleh pikir sesuai dengan tingkatan dan lingkungan penugasan masing-masing, baik yang menyangkut bidang hankam negara maupun bidang kenegaraan, dan kemasyarakatan pada umumnya, serta bidang-bidang lainnya agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi kepentingan bangsa dan negara.

Keenam, pelihara dan mantapkan terus kekompakan dan keutuhan ABRI serta tunjukkan sikap keteladanan untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan kesalahan apapun sebagai jaminan bagi tetap terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis serta berhasilnya pelaksanaan tugas pokok ABRI.

Ketujuh, pelihara dan tingkatkan terus kualitas profesionalisme keprajuritan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ditopang oleh semangat juang dan disiplin tinggi sehingga terwujud tingkat kesiapsiagaan yang tinggi diseluruh jajaran ABRI untuk dapat melaksanakan tugas apapun, pada saat kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas dan perkembangan situasi yang dapat terjadi setiap saat.

Gerakan senam lapangan

Mempesona

Meskipun memberikan kesan sederhana, atraksi yang ditampilkan oleh peserta upacara pada HUT ABRI dirasakan mempesona. Seperti biasa, sebelum menyampaikan amanat, Presiden, selaku Inspektur Upacara mengadakan pemeriksaan barisan dengan kendaraan jeep terbuka bernomor Indonesia 1. Di dalam kendaraan itu Presiden yang didampinggi oleh komandan upacara Kolonel (Mar) Soegiharto, berdiri mengitari barisan yang berjajar rapi membentang luas parkir timur Senayan.

Begitu Presiden duduk sejenak setelah menyampaikan amanat, di udara menderu bunyi pesawat jet mengadakan terbang lintas dua kali. Sementara pesawat-pesawat tempur mempergelarkan atraksi di udara, di bawah berlangsung persiapan defile, dan unjuk kemampuan.

Dengan iringan drum band yang dimainkan oleh Korp Musik Akabri Magelang, sepasukan Paskhas dan Brigif Jaya Sakti memperagakan gerakan bela diri dan duel dengan tangan kosong.

Pasukan marinir dengan menggunakan senapan M-16 melakukan gerakan senam lapangan secara lincah. Sedangkan pasukan Brimob dengan tongkat kuning — merah — kuning di tangan memperagakan gerakan khas polisi, semacam peragaan menanggulangi huru hara.

Acara senam massal itu kemudian ditutup dalam bentuk formasi gabungan yang melambangkan bunga "Wijayakusuma", bunga yang melambangkan kesatriaan.

Upacara peringatan HUT ABRI itu ditutup dengan defile yang diikuti oleh seluruh peserta upacara yang terdiri atas pasukan drum band Akabri, pasukan pembawa panji-panji ABRI, batalyon (Yon) Akabri, Yon Kowabri, Yon Polisi Militer, Yon Kopassus, Yonif 335, Yonif 201, Yonif 327, Yon Pelaut, Yon Marinir, Yon Paskhas, Yon Polantas yang mengenakan seragam baru berwarna cokelat tua dengan kombinasi topi putih, Yon Samapta, Yob Brimob, Yon Menwa, dan terakhir Yon Hansip yang menggambarkan kemanunggalan ABRI dan Rakyat. ☐ MK/Sgt

Digitized by Google

Sumpah Pemuda Tonggak Sejarah Kebangsaan

Perjalanan sejarah bangsa ini cukup panjang. Tiga setengah abad lebih, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan nasionalnya. Pengorbanan sepanjang jalan menuju kemerdekaan itu cukup banyak. Tak hanya harta benda tetapi juga jiwa manusia. Sejak abad ke-XVI, diseluruh negeri ini berkobar perang melawan penjajahan. Perang melawan penindasan dan perbudakan yang dijalankan penjajah.

Ketika itu, memang zamannya penjajahan; zaman penindasan manusia atas manusia, perbudakan, kolonialisme, yang lahir sebagai konsekuensi logis daripada perubahan-perubahan struktur sosial serta perkembangan ilmu dan teknologi. Semua ini menyebabkan timbulnya perubahan sikap manusia.

Persaingan dagang, menimbulkan nafsu ekspansionis dalam upaya memperluas pasar bagi hasil-hasil produksi. Juga nafsu untuk menguasai daerah-daerah penghasil komoditas perdagangan dunia. Sebut saja rempah-rempah dari Indonesia, emas dari Afrika dan hasil lainnya yang kebanyakan berasal dari belahan bumi sebelah Timur.

Nafsu menguasai tidak hanya pasar tetapi sekaligus juga daerah penghasil, menyebabkan tekad untuk melakukan ekspansi semakin kuat. Lalu mulailah usaha perampokan dan perampasan daerah-daerah penghasil barang dagangan secara kekerasan. Terjadilah perang antara negeri-negeri penghasil komoditas perdagangan melawan negara-negara pedagang yang memang punya cukup kekuatan untuk melakukan perang. Hasil dari perang itu ialah munculnya daerah-daerah jajahan, yang kaya akan hasil bumi.

Muncul daerah-daerah jajahan hampir diseluruh dunia. Sebagian negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Belanda, Portugal, Spanyol, berhasil memperluas kawasan kekuasaannya tidak hanya didaratan Eropa tetapi diseberang lautan Atlantik dan Pasifik.

Asia, Afrika dan daerah Timur Jauh, merupakan daerah jajahan dari negara-negara Eropa di atas. Karena daerah-daerah itulah yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Inggris menjajah hampir sebagian besar daerah Asia dan Timur Jauh. Perancis menguasai hampir seluruh kawasan Afrika. Belanda justru menyeberangi lautan untuk menguasai Indonesia dan beberapa negara kecil di lautan Pasifik; antaranya Kaledonia, Suriname dan beberapa lainnya.

Spanyol dan Portugal menyeberangi lautan Atlantik untuk menjajah Amerika Latin, Amerika Utara. Belgia menguasai beberapa daerah Afrika yang kaya akan hasil tambang seperti Konggo (sekarang Zaire).

Begitu hebatnya perang kolonial sehingga hampir diseluruh dunia terjadi peperangan. Penduduk pribumi yang tidak memiliki kekuatan militer, dipaksa harus menghadapi penjajah yang datang dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi semangat kebangsaan kaum pribumi mendorong mereka melakukan perlawanan yang cukup keras terhadap serangan penjajah.

Tetapi keterbatasan kemampuan militer membuat kaum pribumi terpaksa harus bertekuk lutut kepada penjajah. Mulai penjajahan merajalela diseluruh muka bumi. Dari ujung paling Timur, menuju ke Utara lalu menusuk sampai jauh ke sebelah barat.

Pertengahan abad ke-XVIII nasionalisme mulai bangkit. Timbul perang kemerdekaan dimana-mana; Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, merupakan dua peristiwa penting yang mengawali lahirnya nasionalisme baru.

Hingga permulaan abad ke-XX perang kemerdekaan yang muncul sebagai akibat semakin tumbuhnya nasionalisme telah memaksa beberapa negara melepaskan daerah jajahannya. Spanyol misalnya, mulai memberi kemerdekaan kepada beberapa negara Latin Amerika. Inggris memberi kemerdekaan kepada Canada. Di Asia, terjadi perang Rusia — Jepang (1905-1911), memperebut kepulauan Kurilen sebelah utara Jepang, yang diduduki Rusia.

Perang Rusia — Jepang ini telah mendorong timbulnya nasionalisme di Indonesia. Mulailah bangkit perasaan kebangsaan dikalangan kaum intelektual muda, yang telah lama mendambakan sebuah negara kebangsaan yang bebas dari penindasan bangsa asing.

Dr. Soetomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawannya yang masih menjadi mahasiswa STOVIA (School Tot opleiding vor Indische Arts) mulai membentuk organisasi dengan nama BOEDI OETOMO. Sebelumnya organisasi ini memang telah ada dengan nama TRI KORO DHAR-

Sumpah Pemuda selalu menggema di kalangan pemuda

Digitized by Google

MO yaitu organisasi yang hanya terdiri dari orang-orang Jawa. Boedi Oetomo memperluas diri dengan menerima suku-suku lain diluar suku Jawa.

Tetapi sasaran perjuangan mereka masih tetap melalui pendidikan. Mengusahakan pendidikan bagi kaum pribumi yang karena status sosialnya tidak bisa memperoleh pendidikan layak. Tanggal 20 Mei 1908 lahirlah organisasi modern pertama di Indonesia, Boedi Oetomo. Kelahiran organisasi ini sekaligus menandai kebangkitan nasionalisme, rasa kebangsaan orang Indonesia.

Para intelektual muda dibawah pimpinan Dr. Soetomo itu, memulai kegiatan politiknya melalui pendidikan. Memang sasaran utamanya adalah meningkatkan taraf pendidikan kaum pribumi. Semua kegiatan diarahkan pada upaya-upaya pendidikan, sekaligus menggalang rasa kebangsaan dikalangan kaum pribumi. Kelahiran Boedi Oetomo, lalu mendorong kelahiran organisasi-organisasi kepemudaan lainnya seperti: Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon dan berbagai organisasi pemuda lainnya.

Rasa kebangsaan itu lalu membangkitkan keinginan untuk mendirikan sebuah negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat, bebas dari penindasan dan penjajahan bangsa lain. Cukup lama organisasi-organisasi itu berusaha menyatukan diri untuk membentuk satu kekuatan yang solid menghadapi penjajah. Tahun 1911 lahir organisasi baru Serikat Dagang Islam yang dipimpin Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Yang kemudian pada tahun 1913 berubah nama menjadi Sarekat Islam saja.

Semua organisasi ini mulai melancarkan perlawanan-perlawanan politik terhadap kebijaksanaan pemerintah Belanda. Mereka lalu menjadi musuh pemerintah Hindia Belanda; dikejar, dipenjarakan, disiksa dan ditekan baik secara pisik maupun secara mental. Tetapi tekad mereka untuk mendirikan sebuah negara kebangsaan, tetap menyala-nyala.

Untuk menggalang kekuatan agar dapat menghadapi tekanan Belanda, maka diadakan Konggres Pemuda Indonesia. Sebuah Kongres yang dimaksudkan sebagai penggalangan kekuatan kebangsaan, untuk memperjuangkan berdirinya sebuah negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat.

Tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 1928, berkumpullah organisasi-organisasi itu dalam sebuah Kongres di Jakarta. Di Jl. Kramat Raya no.106 (sekarang Gedung Museum Pemuda), para pemuda itu berkumpul dan membicarakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan berdirinya Negara Kebangsaan Indonesia.

Sumpah Pemuda, tekad sebuah bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan

Kongres itu diakhiri dengan sebuah keputusan yang hingga kita tetap menjadi monumen sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda yang isinya:

1. Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengaku berbangsa yang satoe jaitoe bangsa Indonesia.

2. Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengaku bertoempah darah yang satoe jaitoe tanah air Indonesia.

3. Kami Poetra dan Poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean jaitoe bahasa Indonesia.

Ketiga butir Sumpah Pemuda itu merupakan ungkapan tekad mereka untuk memperjuangkan suatu negara kebangsaan yang merdeka bebas dari penjajahan. Dan inilah dasar daripada bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap berdiri tegak hingga sekarang. Kendati terus diterjang berbagai ancaman dan bahaya sejak lahirnya rasa nasionalisme diawal abad XX ini.

Tahun 1989, untuk kesekian kalinya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sudah enam puluh satu tahun silam, para pemuda mencanangkan tekad untuk membangun sebuah negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat bebas dari penjajahan bangsa lain. Tekad yang terus diperbaharui sampai tiba saatnya negeri ini mulai melakukan perang kemerdekaan.

Perang Kemerdekaan di tahun 1945, merupakan realisasi daripada Sumpah Pemuda tujuh belas tahun sebelumnya. Cukup banyak korban yang berjatuhan dalam perang kemerdekaan. Mereka adalah para pejuang muda, orang-orang muda yang meneruskan perjuangan para pendahulunya, orang-orang muda yang mengangkat sumpah untuk bersatu melawan penjajahan.

Hasilnya adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Negara yang dibangun di atas janji setia para pemuda sejak tahun 1908, 1928 hingga mereka yang datang kemudian di tahun 1945 itu.

Sumpah Pemuda telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Tidak mulus jalan yang ditempuhnya, tidak ringan penderitaan yang harus ditanggung. Untuk bisa mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pemuda bangsa ini harus membayar dengan harga yang terlalu mahal. Karena kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tetapi dia direbut dengan tebusan puluhan ribu liter darah dan ribu sosok tubuh yang terkapar diterjang peluru. Tetapi hasil perjuangan mereka tidak sia-sia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak walau terus diterpa badai dan taufan. Lalu apa yang para pemuda sekarang lakukan untuk bangsa ini? Sebuah pertanyaan yang wajar.☐ Tb

Digitized by Google

Profil Budaya Politik Indonesia

Cosmas Batubara

Masalah keterbukaan masih tetap menjadi perhatian masyarakat kita, kendati sudah banyak dibahas dan telah memancing banyak pendapat dari berbagai kalangan. Tokoh-tokoh pemerintah maupun tokoh masyarakat, politisi dan cendekiawan sudah banyak yang angkat bicara sejak isyu keterbukaan itu dilontarkan yang konon pertama kalinya oleh mantan duta besar Amerika Serikat Paul Wolfowitz pada saat akhir masa tugasnya di Jakarta.

Sebuah seminar bertema "Profil Budaya Politik Indonesia" yang awal September lalu diselenggarakan di Yogyakarta oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) telah membahas pula masalah keterbukaan ini.

Melekat pada Sistem Politik

Drs. Cosmas Batubara sebagai salah satu pembicara dalam Seminar itu mengatakan, budaya politik pada hakikatnya telah melekat di dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti budaya politik harus mendasarkan diri pada norma-norma, nilai-nilai serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem politik itu, yang tidak lain adalah sistem politik berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu budaya politik di Indonesia tidak lain adalah pengejawantahan atau pelaksanaan sistem politik yang dianut oleh bangsa Indonesia yakni Demokrasi Pancasila.

Keterbukaan dalam budaya politik Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari sistem politik yang berlaku dan berkembang di Indonesia, yang berarti akan selalu terkait dengan sistem Demokrasi Pancasila. Oleh Menteri Tenaga Kerja di depan seminar itu ditegaskan lebih lanjut bahwa keterbukaan bukan suatu ideologi dalam negara RI. Keterbukaan hanyalah wahana yang diperlukan agar demokrasi dapat berfungsi semestinya. Keterbukaan adalah salah satu unsur demokrasi.

Karena demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka keterbukaan dalam budaya politik Indonesia diabdikan untuk kepentingan rakyat. Keterbukaan dilakukan agar rakyat semakin mengetahui hak dan kewajibannya. Menurut Cosmas Batubara, Demokrasi Pancasila bertitik tolak pada Sila keempat Pancasila, suatu demokrasi yang norma-norma pokoknya, hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam UUD 1945. Karena Pancasila merupakan suatu kebulatan utuh, maka Sila keempat itu akan selalu dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya dalam suatu kesatuan yang integralistik. Sistem politik itu sendiri tidak mungkin melepaskan diri dari konstitusi RI. Dan UUD 1945 itu sendiri selain merupakan penjabaran dari Pancasila, ia pun sekaligus dijiwai oleh semangat Pancasila sebagai dasar negara maupun ideologi Bangsa. Oleh sebab itu keterbukaan yang kita anut juga keterbukaan yang mendasarkan diri pada Konstitusi dan Pancasila.

Formula politik yang diterima oleh orang banyak serta secara ikhlas akan dilaksanakannya dalam kehidupan bukanlah hal yang sekali jadi. Dibutuhkan kesabaran dan kesediaan untuk memberi dan menerima serta melihat perkembangan secara inkremental.

Siapa yang terbuka?

Atas dasar Konstitusi itu, lalu siapa saja yang harus terbuka? Terhadap pertanyaan ini Cosmas Batubara menjelaskan bahwa selain rakyat maka lembaga-lembaga yang tercantum dalam UUD 1945 itu bersifat terbuka. Pada hakikatnya suprastruktur dan infrastruktur politik harus mempunyai sifat keterbukaan. Akan tetapi keterbukaan tidak identik dengan kebebasan mutlak yang tanpa tatanan. Dengan menganut sistem Demokrasi Pancasila pada dasarnya kita telah menentukan pilihan mengenai demokrasi apakah yang semestinya kita jalankan.

Tokoh eksponen 66 itu lebih lanjut mengemukakan bahwa di dalam Demokrasi Pancasila dianut sistem perwakilan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan disebutkannya sebagai salah satu lembaga negara yang kuat kedudukannya. Mengapa? Karena DPR antara lain membuat Undang-undang bersama-sama dengan Pemerintah, serta mempunyai hak-hak lain seperti hak kontrol dan hak budget. Rakyat terbuka untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga tinggi atau lembaga tertinggi negara yang ada dalam Konstitusi, sebagai pengejawantahan kedaulatan di tangan rakyat. Demikian Cosmas Batubara.

Seni Berpolitik

Dalam forum yang sama, Menteri Sekretaris Negara Drs. Moerdiono dalam makalahnya yang dibacakan oleh staf ahli Mensesneg Drs. Saafrudin Bahar mengemukakan bahwa dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila, pemerintah harus mampu melihat gerak dinamik yang positif dalam masyarakat, memberinya peluang, jika perlu dorongan, dan memberinya bentuk serta fungsi yang tepat dalam keseluruhan sistem politik. Pemerintah juga harus dapat menjadi penengah jika terjadi konflik aspirasi dan kepentingan di antara berbagai golongan yang ada, setelah sejauh mungkin mendorong penyelesaian secara dewasa oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri.

Seluruh rekayasa budaya politik harus diacukan pada nilai-nilai dasar yang sudah disepakati para pendiri negara, yang kemudian dikembangkan dengan nilai-nilai instrumental dan nilai praktis yang mengacu kepada nilai dasar itu. Penjabaran nilai-nilai dasar itu menurut Mensesneg bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mekanistik, tetapi suatu kiprah yang bersifat kreatif dan menghendaki kemampuan bermusyawarah serta kearifan untuk mencari pemecahan masalah yang diterima oleh segala pihak.

Digitized by Google

Formula politik yang diterima oleh orang banyak serta secara ikhlas akan dilaksanakannya dalam kehidupan bukanlah hal yang sekali jadi. Dibutuhkan kesabaran dan kesediaan untuk memberi dan menerima serta melihat perkembangan secara inkremental. Mengenai hal ini, Mensesneg memberikan contoh bagaimana terjadinya keputusan atau kesepakatan politik tentang P4 pada tahun 1978. Pokok-pokok pikirannya dibangun secara bagian demi bagian dalam waktu yang panjang sejak tahun 1966. Masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk mengkajinya sesuai dengan kondisinya sendiri, sehingga jika sudah saatnya mereka dapat menerimanya secara sadar dan ikhlas. Kesabaran menunggu waktunya datang adalah suatu seni berpolitik yang dikembangkan selama Orde Baru. Kesabaran menunggu *timing* yang tepat itu berakar pada dua hal pula, yakni keteguhan memelihara arah dalam jangka panjang serta realisme melihat kondisi riil yang ada,kata Mensesneg.

Makin Membudaya

Sementara itu Dr. Alfian, Ketua Umum Pengurus Pusat AIPI, kepada para peserta Seminar Nasional II AIPI itu mengatakan bahwa Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang berarti mewujudkan sistem politik Demokrasi Pancasila dalam arti yang sesungguhnya. Untuk itu perlu dikembangkan suasana keterbukaan yang wajar dan sehat sebagai bagian integral dari budaya politik Demokrasi Pancasila.

Pengamat politik ini menilai bahwa semenjak Orde Baru nilai-nilai persatuan dan kesatuan tampak semakin membudaya serta diamalkan. Jika semua pihak dapat memahami perkembangan baru itu serta sama-sama meliaht keperluan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan yang ada, maka prospek yang lebih baik berada di hadapan bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu proses pembudayaan dan pengamalan nilai-nilai Demokrasi Pancasila akan bergerak maju ke tahap berikutnya.

Sehubungan dengan keterbukaan, Ketua Departemen PPLHE dan Sumber Alam DPP Golkar itu mengingatkan bahwa keterbukaan tidak terkendali yang menjurus ke arah anarkisme, ataupun keterbukaan ketat yang menjurus ke arah otoriterisme, sama-sama berbahaya bagi kehidupan bersama bangsa Indonesia. Kedua keterbukaan itu sama-sama menyimpang dari budaya politik Demokrasi Pancasila.

Menurut Alfian, budaya politik Demokrasi Pancasila yang dulu secara mikro dan sederhana membudaya dalam masyarakat desa, kini terus disempurnakan perwujudannya. Suasana keterbukaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa itu adalah keberhasilan mereka memelihara serta mengembangkan keterbukaan yang wajar dan sehat melalui pengendalian diri, yang bersumber pada rasa tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap kepentingan kehidupan bersama. Demikian Dr. Alfian.

Seminar yang diikuti sekitar 200 peserta dari kalangan pejabat Pemerintah, pengamat politik, mahasiswa dan peminat lainnya itu juga menampilkan pembicara tokoh muda Golkar yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan makalahnya berjudul "Budaya Politik dalam Kehidupan Jawa".☐ (TAP)

P.T.WOTRACO
(WORLD TRADING CORPORATION)
BERDIKARI GROUP

MENGUCAPKAN

Dirgahayu
Golongan Karya Ke 25

Tanggal 20 Oktober 1989

Jalan Hayam Wuruk 103—104 Jakarta
Telp. 6295185, 6297432, 6292508, 6297539, 6391337
Telex: 41147, PO. Box 3355/Jkt.

Digitized by Google

Lancar Pembahasan RUU Peradilan Agama Oleh DPR dan Pemerintah

Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, pembahasan RUU Peradilan Agama (RUU-PA) oleh Panitia Khusus DPR (Pansus) bersama Pemerintah yang diwakili Menteri Agama berlangsung lancar. Rupanya melalui dengar pendapat secara intensif yang dilakukan oleh pihak DPR dengan berbagai pihak di masyarakat berhasil diketahui berbagai sikap dan aspirasi masyarakat mengenai RUU sehingga tercipta rambu-rambu untuk menghindari pembicaraan yang bersifat peka dan "crucial" atau pelik. Hal ini terlihat, selama pembahasan oleh Pansus DPR bersama Pemerintah berlangsung lugas, dan pembicaraan yang bisa mengarah ke hal-hal yang peka terhindarkan.

Pembahasan Pansus atas materi RUU yang dimulai 25 September 1989 yang lalu berhasil diselesaikan pada 4 Oktober 1989, atau lebih cepat sehari daripada jadwal yang ditentukan.

Pada 25 September 1989 di bawah pimpinan Ketua H Bambang Sutisna, Pansus memulai sidangnya. Pihak pemerintah sebagai "counterpart" atau mitra kerja diwakili oleh Menteri Agama H Munawir Sjadzali MA. Sidang pertama itu mulai membahas materi yang masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, dan memberikan keputusan atas materi yang tidak masuk dalam DIM.

Jurubicara Fraksi ABRI DP Soenardi ketika memberikan pengantar atas pendapat fraksinya mengemukakan bahwa judul RUU sudah tepat, tetapi terdapat masalah yaitu kesenjangan antara judul dan isi. Judulnya adalah Peradilan Agama, tetapi isinya ternyata hanya mengenai Peradilan Agama Islam. Fraksi itu juga menghargai adanya rumusan pasal 49 yang menyangkut pilihan hukum.

Jurubicara Fraksi PDI Djupri mengusulkan agar pasal 29 UUD 1945 dimasukkan dalam konsiderans sehingga kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya tetap terjamin. Pencantuman ini dimaksudkan untuk menangkal pendapat pihak-pihak bahwa RUU ini bersumber pada Djakarta Charter. Dengan pencantuman pasal 29 UUD 1945 itu, landasannya menjadi mantap dan konstitusional. Tentang judul, jubir Fraksi PDI itu mengharapkan agar dirumuskan sesuai dengan isinya.

Jubir FKP Soetjipto mengatakan kehadiran RUU Peradilan Agama ini diharapkan dapat memberikan kepuasan batin kepada umat Islam. Senada dengan FKP, jubir FPP Sukardi Effendy menyatakan bahwa RUU Peradilan Agama ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi umat Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

Perbedaan muncul ketika sebanyak 44 materi yang tidak dimasukkan dalam DIM akan ditetapkan sebagai kesepakatan. FPDI belum dapat menyetujui bila masalah judul dijadikan kesepakatan, karena meskipun tidak masuk dalam DIM, masih perlu dibahas. "Kalaupun masalah judul tidak dipersoalkan dalam DIM, bukan berarti F-PDI langsung menerima atau menolak judul dari pemerintah," kata jubir F-PDI, Djupri.

Karena F-PDI belum dapat menerima masalah judul, sidang diskors dan dilanjutkan keesokan harinya.

Pasal-pasal yang berhasil disepakati secara bulat, pasal-pasal yang sebagian ayatnya disepakati dan sebagian lainnya yang masih akan dibahas, sebagai keputusan pada sidang hari pertama itu menyangkut 44 pasal. Dalam sidang pada keesokan harinya, ke 44 pasal itu disahkan sebagai keputusan, dan di tambah dengan kesepakatan mengenai judul setelah PDI akhirnya menerima judul yang diajukan oleh pemerintah.

Konsiderans

Setelah materi yang tidak masuk dalam DIM disahkan sebagai kesepakatan bulat, Pansus memulai dengan pembahasan atas materi yang masuk dalam DIM dan dimulai dengan materi yang dinilai "ringan". Sidang pada hari kedua Pansus, 26 September 1989 mencatat di samping mengesahkan 44 pasal, juga membahas pasal 4 tentang yurisdiksi pengadilan agama, pasal 10 mengenai susunan pengadilan, pembinaan dan pengawasan umum (12, ayat 1), larangan rangkapan jabatan (17, ayat 1), dan usulan pemberhentian hakim (21 ayat 1).

Tentang yurisdiksi menjelaskan, rumusan yurisdiksi, susunan pengadilan, pembinaan, pengawasan dan pemberhentian hakim agama tetap mengacu pada undang-undang yang sudah ada yaitu UU Peradilan Umum, UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU Mahkamah Agung.

Setelah melalui pembicaraan, materi-materi itu kemudian disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam panitia kerja (Panja) yang akan dibentuk. Beberapa materi yang memerlukan penyempurnaan redaksional diusulkan untuk diserahkan dalam tim perumus (Timus) yang juga akan dibentuk.

Rapat kerja Pansus hari ketiga, 27 September 1989 yang juga dihadiri oleh Menteri Agama ternyata tidak selancar sebelumnya, ketika sampai pada pembahasan atas konsiderans "mengingat".

Fraksi ABRI mengusulkan agar dalam konsiderans "mengingat" ditambah pasal 29 UUD 1945 sedangkan Fraksi PDI mengusulkan tidak saja menambahkan pasal 29 UUD 1945, tetapi juga pasal 27 UUD 1945. Jurubicara FPDI Djupri menjelaskan, kedua pasal UUD 1945 itu perlu dimasukkan dalam konsiderans tidak lain agar kehadiran RUU tetap dalam kaitan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin persamaan warganegara di depan hukum dan kemerdekaan serta kebebasan beragama. Usul kedua fraksi itu ditolak oleh FKP, FPP dan pemerintah. Jubir FKP mengatakan bahwa RUU ini hanya merupakan pelaksanaan UU no. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Menurut FKP, pencantuman pasal 27 UUD dirasakan berlebihan, sedangkan pencantuman pasal 29 UUD dinilai menjadikan RUU ini menjadi bersifat agamis. Hal

Digitized by Google

ini tentu saja tidak disetujui oleh FPDI yang menyatakan bahwa kesan berlebihan itu tidak perlu, karena memang namanya undang-undang. Karena tidak terdapat persesuaian, masalah itu kemudian di "pending" atau ditunda pembahasannya.

Ketika masalah ini dibicarakan lagi pada minggu berikutnya, 3 Oktober, kesepakatan juga tidak diperoleh. Akhirnya Pansus menetapkan, masalah ini akan dibahas dalam tim kecil secara mendalam dan dalam suasana yang lebih akrab.

Sidang yang berlangsung pada 28 September Fraksi ABRI menegaskan sikapnya bahwa RUU PA merupakan peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan itu harus dicantumkan secara tegas pada pasal 1 agar tiap orang yang membaca UU ini nantinya sejak awal sudah tahu bahwa UU ini khusus untuk orang-orang Islam. Tentang peradilan khusus itu, fraksi-fraksi lain juga mengusulkan hal yang serupa. Atas usul Fraksi ABRI, sidang menyepakati bahwa pembahasan pasal 1 itu dijadikan satu paket dengan pasal 2 yang menyangkut yurisdiksi RUUPA.

Sampai hari itu, pansus telah berhasil membahas 63 pasal dari 108 pasal RUU. Dari 63 pasal yang dibahas itu sebagian besar (44 pasal) diterima secara utuh seperti rumusan dalam RUU. Sebagian lagi diterima secara bulat setelah ada penyempurnaan redaksional, dan sebagian lagi akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja) yang akan dibentuk oleh Pansus.

Cerai - Talak

Sidang Pansus pada hari Senin, 2 Oktober 1989 berlangsung alot ketika membahas masalah "cerai-talak". FKP, FABRI, dan FPDI pada dasarnya menerima draft pemerintah yang berbunyi "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".

Terhadap rumusan ini, FPP mengusulkan perubahan sehingga berbunyi "seorang suami yang akan atau telah menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan dan atau mengukuhkan ikrar talak".

Usul FPP itu tidak mendapat persetujuan, dan akhirnya permasalahan akan dibahas dalam panitia kerja.

Pada hari Rabu 4 Oktober, Pansus berhasil menyelesaikan pembahasan seluruh pasal. Hari itu berhasil disepakati antara lain ketentuan tentang pilihan hukum bagi umat Islam.

Pada penutupan pembahasan RUU yang dilakukan oleh pansus itu, Ketua Pansus Bambang Sutisna mengemukakan, ada 29 pasal dan 40 butir permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja, 23 masalah akan dibahas dalam Tim Perumus, serta sejumlah masalah akan dibahas dalam tim kecil. Dengan selesainya pembahasan itu, Pansus mencatat bahwa pembahasan lebih cepat sehari dari jadwal yang ditetapkan. Meskipun demikian belum berarti pembahasan telah selesai, pembahasan akan dilanjutkan dalam panitia kerja, tim perumus dan tim kecil yang akan dibentuk.

Berdasarkan suasana yang berlangsung selama pembahasan RUU diperkirakan pembahasan masalah-masalah yang belum terselesaikan akan tetap berlangsung lancar.

Pansus dipimpin oleh Bambang Sutisna SH dari FKP, dan Wakil-wakil Ketua, Ir H Mustahid Astari (FKP), H Abubakar SH (FPP), Ir H Anjar Siswoyo (FPDI), dan H Suryo Mardjiyo (FABRI).☐ (Mk/Sgt)

DIRGAHAYU
GOLONGAN KARYA
KE-XXV
20 OKTOBER 1989
PP
P.T. PEMBANGUNAN PERUMAHAN
ARCHITECTS, ENGINEERS & CONTRACTORS
KANTOR PUSAT : JL M H THAMRIN No 57 JAKARTA 10350 TELP (021) 322609 336970
TELEX 44215 NHDCO IA CABLE NHDCO IA TELEFACS (021) 330120

Digitized by Google

Kearifan Sejarah, Perlu Dikembangkan

Sebuah ajakan datang dari Presiden Soeharto kepada para sejarawan Indonesia agar lebih mengembangkan kearifan sejarah disamping mengkaji dan merekam sejarah. Sebab sejarah itu dibuat untuk generasi muda. Merekalah pewaris sejarah, yang akan memanfaatkan sejarah, pemetik kearifan sejarah.

Memetik gambaran dan makna sejarah

Menurut Presiden dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mensesneg Moerdiono pada pembukaan Seminar sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) baru-baru ini di Jakarta, kearifan sejarah memberikan kepada suatu generasi pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal, tanpa dia harus melalui dan mengalami sendiri peristiwa itu. "Semua pengalaman dan pahit derita yang telah dilewati tidak perlu dialami sendiri, dan terulang kembali, jika kita semua mempunyai kearifan sejarah," ujar Presiden.

Lalu, Presiden bertanya. Apakah kearifan sejarah dan hikmah apa yang dapat ditarik dari sejarah perjuangan kemerdekaan selama masa Pemerintah Darurat? Presiden mengingatkan hendaknya pertanyaan itu merupakan dasar pemikiran dari semua peserta seminar.

Kehadiran para pelaku zaman Pemerintah Darurat itu, menurut Presiden, patut disyukuri karena mereka dapat melengkapi bahan sejarah PDRI yang selama ini kurang terekam dengan baik. Mereka mempunyai peranan penting dalam pengkajian sejarah ini, karena merekalah yang dapat memberikan darah dan daging dari tulang kerangka sejarah, pandangan dan visi yang menjiwai perjuangan gerilya kita pada waktu itu.

Sementara kehadiran sejarawan sendiri, menurut Presiden, mutlak diperlukan. Karena mereka tidak terlibat secara emosional dalam kejadian waktu itu, sehingga dapat mengadakan analisa yang lebih tajam. "Dari mereka kita dapat memetik gambaran dan makna yang lebih menyeluruh dari potongan-potongan sejarah yang diketahui pelaku perorangan," kata Presiden.

Makna Penting

Presiden menilai, kendati perjuangan semasa Pemerintah Darurat merupakan kurun waktu yang relatif singkat, 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, namun masa yang hanya tujuh bulan itu mempunyai makna yang penting karena berlangsung ketika Presiden dan Wakil Presiden RI beserta anggota kabinet lainnya ditangkap Belanda. Dalam keadaan darurat seperti ini, Pemerintah Republik Indonesia beserta Angkatan Bersenjatanya tetap tegak dan terus berjuang.

Perjuangan singkat waktu itu, menurut Presiden, menanamkan kearifan sejarah mengenai arti penting perjuangan dan kekuatan rakyat dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Kurun waktu yang singkat itu, merupakan bukti sejarah bahwa Kemerdekaan nasional kita yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia mendapat dukungan, dipertahankan dan ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia. "Rakyatlah yang memungkinkan suatu pemerintahan darurat berjalan seperti suatu pemerintahan yang layak. Merekalah yang melindungi para pemimpin sipil dan militer, termasuk Panglima Besar Soedirman, dari pengejaran musuh, sehingga pada akhirnya Tentara Nasional Indonesia mampu menyusun kekuatan dan membuat serangan-serangan balik," ujar Presiden.

Sejarah perjuangan semasa PDRI ini menyangkut perjuangan rakyat bersama TNI dan aparatur sipil di hampir semua daerah di Indonesia. Ia menyangkut perjuangan di bagian-bagian wilayah Repulik Indonesia yang tidak pernah jatuh ke tangan Belanda dalam Perang Kemerdekaan; seperti Aceh, Tapanuli serta daerah pedesaan di berbagai propinsi di sebagian besar Jawa, Sumatera dan daerah-daerah lainnya. Namun belum dikenal secara luas.

Presiden berpendapat, menjelang masa akhir tugas historisnya, Angkatan '45 dan generasi muda masa kini perlu pula menuntaskan sejarahnya, yaitu melengkapi perekaman sejarah perjuangan kemerdekaan. Sebab, menurut Presiden masih banyak bagian-bagian penting dari sejarah belum direkam, dikenal atau dipahami secara memadai. Salah satunya yang paling dirasakan adalah yang menyangkut Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini.

Digitized by Google

Pewaris Sejarah

Menyinggung arti penting sejarah bagi generasi muda, Presiden berpendapat pengenalan dan pengakuan perjuangan rakyat di berbagai daerah akan memberi kebanggaan bagi generasi depan mengenai peranan pendahulu-pendahulu mereka, orang-orang tua mereka, nenek-moyang mereka. Disamping itu memberi makna arti kemerdekaan sekaligus memperkuat rasa kesatuan dan persatuan antara semua daerah, semua golongan dan kalangan masyarakat yang sangat majemuk ini.

Presiden melihat generasi muda sekarang banyak yang kurang merasakan relevansi perjuangan, karena terasa jauh dari segi ruang dan waktu. Oleh karenanya, seminar semacam ini dirasakan mempunyai arti penting agar generasi depan mendapatkan gambaran yang obyektif dan perspektif yang lengkap mengenai keseluruhan, sehingga dapat menghayati sejarah dan makna kemerdekaan ini dengan baik.

Kehadiran wakil-wakil generasi muda dalam seminar itu tidak kalah pentingnya. Kalau pelaku sejarah hanya menjalani perjuangan untuk menjadi bahan sejarah, sedang ilmuwan hanya merangkum, mengadakan rekonstruksi. Sejarah baru punya arti kalau dipahami dan dicamkan maknanya oleh genersi muda sekarang dan yang akan datang. Serajah dibuat untuk generasi muda. Merekalah pewaris sejarah, yang akan memanfaatkan sejarah, pemetik kearifan sejarah.

"Karena itu saya menganjurkan agar semua pihak membantu upaya melengkapi sejarah, agar kita jangan sampai melupakan sejarah dan menjadi bangsa yang kerdil," ujar Presiden.☐ NS

SIER

SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT

JL. RUNGKUT INDUSTRI RAYA 10. KOTAK POS 4 SURABAYA · INDONESIA

LOKASI PABRIK YANG TEPAT

MENYEDIAKAN KAPLING INDUSTRI, BANGUNAN PABRIK SIAP PAKAI
BANGUNAN GUDANG, SARANA USAHA INDUSTRI KECIL (SUIK)
SERTA RUANGAN PERKANTORAN

Mengucapkan :

Selamat Hari Ulang Tahun Golkar Th 1989
dan
Seperempat Abad Golongan Karya

KANTOR : WISMA SIER LT. 5, JL. RUNGKUT INDUSTRI RAYA 10; SURABAYA
TELEPON : (031) 812981; 817681j FAX : (031) 811813; TELEX : 33138 SIER IA

Digitized by Google

Indonesia Naik ke Golongan Lebih Tinggi

Ada berita yang menggembirakan buat Indonesia pada pertengahan bulan September ini. World Bank (Bank Dunia) mengumumkan beberapa negara, ekonominya mengalami kenaikan. Indonesia termasuk salah satu didalamnya.

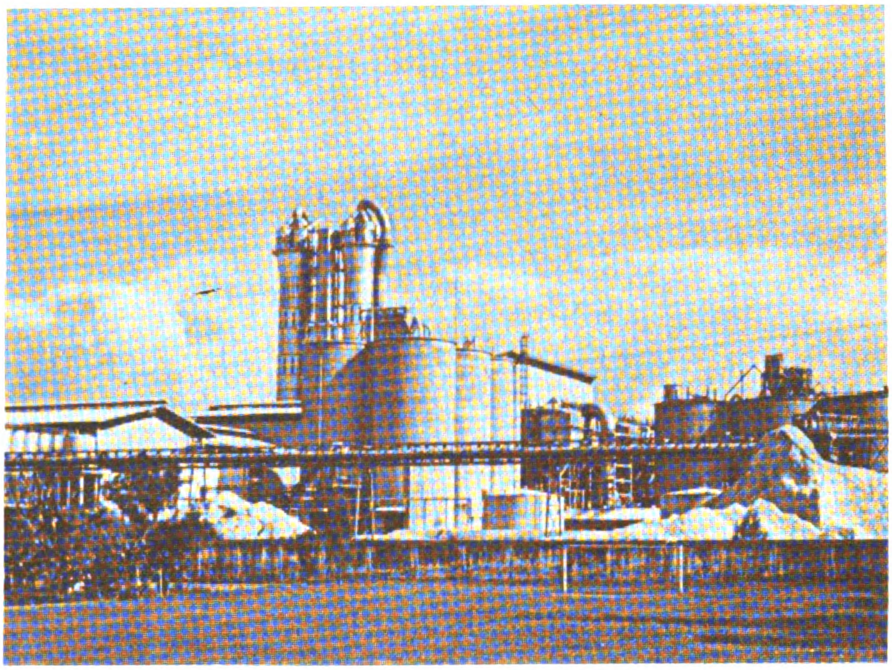

Masih banyak proyek terpusat di Jawa

Mengapa Indonesia ekonominya dapat tumbuh dan mengalami kenaikan. Ini tidak terlepas dari upaya-upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mengejar ketinggalannya dengan negara lain yang memang sudah maju. Untuk mengetahui lebih dalam hal ini perlu kita menengok sejenak ke belakang.

Semenjak era Orde Baru, pemerintah bertekad melaksanakan pembangunan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Tepatnya pada tahun 1967. Rencana ini kemudian dikenal dengan nama Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Rencana pembangunan yang dilakukan di segala sektor ini, lebih menitikberatkan pada bidang ekonomi, khususnya sektor pertanian. Dalam perjalanannya, bidang pertanian telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Kalau dulu negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini untuk memenuhi kebutuhan akan beras masih impor dari negara lain. Gambaran kelabu, dimana Indonesia yang pernah memperoleh sebutan negara agraris pernah hilang, setelah tahun 1987 lalu pulih kembali. Kebutuhan akan beras dapat dipenuhi di dalam negeri. Bahkan Indonesia telah dapat berswasembada.

Dengan tumbuhnya sektor pertanian yang kuat dan didukung sektor industri yang tangguh, mendorong perkembangan sektor industri tumbuh dan berkembang dimana-mana. Di Jakarta, sektor industri tumbuh bak jamur dimusim hujan. Begitu pula dengan kota Surabaya, Medan, Semarang dan kota-kota lainnya. Memang, perkembangan industri di Indonesia tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk membuka pintu bagi penanaman modal asing (PMA).

Dengan meningkatnya penanaman modal asing inilah, World Bank dalam laporannya pertengahan September lalu menunjuk sebagai salah satu sebab kenaikan ekonomi Indonesia.

Penanaman Modal

Seperti diketahui, semenjak pemerintah membuka pintu bagi penanaman modal asing pada tahun 1968, keadaan ekonomi nasional terasa semakin bertambah meningkat. Bahkan jumlah tenaga kerja yang terserap juga tidak sedikit. Biro Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya menyebutkan hingga Juni 1989 perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia berjumlah 1.113 proyek dengan modal yang tertanam US $ 25.517,1 juta.

Laporan BPS itu juga menyebutkan, kebanyakan dari proyek-proyek yang ada masih banyak tertumpu di Pulau Jawa. Dari jumlah proyek yang ada sebanyak 876 berada di pulau yang paling padat penduduknya ini. Modal yang tertanam mencapai US $ 16.355,4 juta. Proyek dan modal sebanyak itu, DKI Jakarta menempati urutan paling atas yaitu dengan 397 proyek dan modal yang tertanam US $ 4.470,0 juta. Kemudian disusul Jawa Barat 345 proyek dengan modal yang ditanam mencapai US $ 8.328,3 juta. Jawa Timur 103 proyek dengan modal yang tertanam US $ 1.517,2 juta. Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan 31 proyek, sedang modal yang tertanam US $ 2.039,9 juta.

Urutan berikutnya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah Sumatera dengan 111 proyek, sedangkan modal yang tertanam US $ 5.316,2 juta. Kalimantan 51 proyek dengan modal yang tertanam US $ 572,2 juta. Sulawesi 27 proyek dengan modal tertanam US $ 1.547,2 juta. Bali dan Nusa Tenggara 26 proyek dengan modal yang tertanam US $ 588,4 juta. Maluku, Irian Jaya dan Timor-Timur US $ 1.098,3 juta.

Kalau dilihat lebih teliti, maka dari jumlah proyek dan modal yang tertanam sebanyak itu, Jepang menduduki peringkat atas dengan jumlah proyek sebanyak 269 buah dan modal yang tertanam US $ 6.087 juta. Kemudian disusul Hongkong 141 proyek dengan modal yang tertanam US $ 233,8 juta. Disusul Amerika Serikat 120 proyek dengan modal yang tertanam US $ 1.593 juta. Dan banyak lagi negara-negara lain dari Eropa maupun Asia yang juga menanamkan modalnya di Indonesia. Dari laporan tersebut negara yang paling kecil menanamkan modalnya adalah Italia dengan 2 proyek dengan modal yang tertanam US $ 23,2 juta.

Digitized by Google

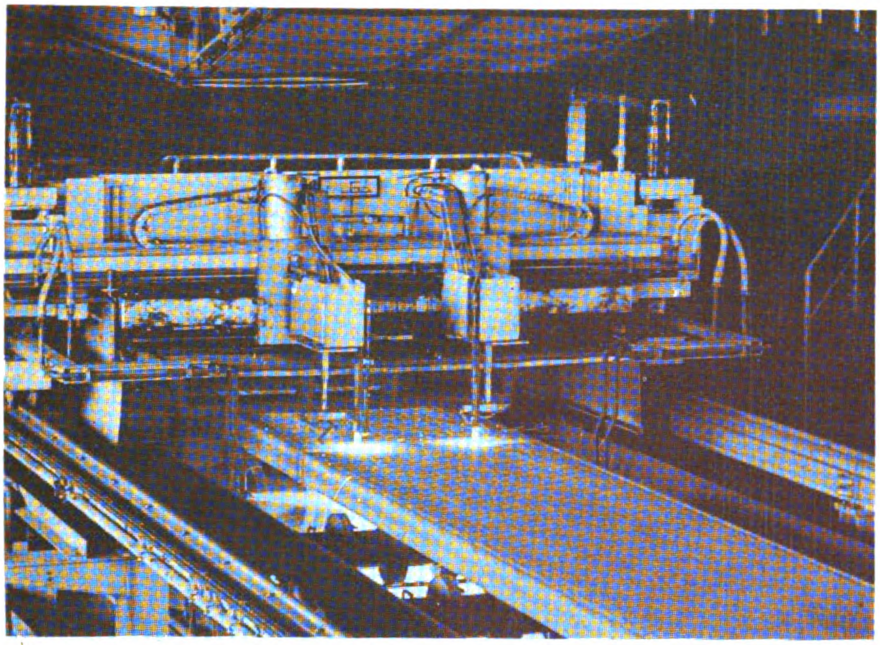

Industri tumbuh di mana-mana

Angkatan Kerja

Begitu pula dengan tenaga kerja yang terserap. Dengan masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, pengangguran dapat ditekan. Seperti yang dikatakan Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa tenaga kerja yang bakal terserap berdasarkan persetujuan penanaman modal asing untuk periode April sampai dengan Agustus 1989, diperkirakan akan mencapai lebih kurang 51.554 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga yang telah beroperasi beberapa tahun silam dimana jumlahnya tidak sedikit.

Upaya BKPM untuk menggaet investasi asing masuk ke Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, yaitu baik berupa kemudahan-kemudahan maupun yang lainnya. Belum lama ini, misalnya, Sanyoto dalam menggaet masuknya investasi asing ke Indonesia melakukan lawatan ke berbagai negara di antaranya; Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Singapura dan negara-negara lain. Seperti dikatakan Sanyoto, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, BKPM tidak berjalan sendirian melainkan bekerjasama dengan instansi terkait. Misalnya Perindustrian dan Kadin Indonesia.

Dalam kesempatan kunjungannya di berbagai negara itu, Sanyoto dengan gencar mempromosikan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk itu. Selain sumber kekayaan alamnya yang sangat mendukung, faktor tenaga kerja relatif murah dan iklimnya pun mendukung. Selain itu upaya menarik para investor asing itu juga dilakukan misalnya dengan mengadakan seminar, diskusi dan bentuk penerangan-penerangan lainnya.

Dan dari lawatannya ke Hongkong belum lama ini, Sanyoto telah berhasil menarik para pengusaha negara tersebut untuk berkunjung ke Indonesia. Seperti dikatakan, keinginan pengusaha Hongkong yang berjumlah 40 orang ke Indonesia ini ingin melihat dan membuktikan keadaan yang sebenarnya apa yang pernah dikemukakan Ketua BKPM tersebut. Setelah para pengusaha itu melihat sendiri tentang berbagai industri di Jakarta, mereka merasa tertarik untuk menanamkan modalnya.

Dikatakan oleh ketua rombongan pengusaha tersebut, bahwa apa yang pernah dikatakan Ketua BKPM sewaktu mengadakan kunjungan di Hongkong itu benar. Namun, pimpinan rombongan tersebut akan mengadakan pembahasan lagi setelah mereka nanti kembali ke negaranya.

"Kami datang ke Indonesia yang pertama kali ini, bukan untuk yang terakhir," katanya diplomatis.

Sebagaimana dikatakan Sanyoto, para pengusaha dari Hongkong tersebut bidang usaha yang diminati adalah plastik, komponen alat-alat listrik, bidang pariwisata, sepatu, produk dari kulit. ☐ BM

KOTA MANDIRI
BUMI SERPONG DAMAI

● Kota Mandiri yang lengkap dan terpadu ●

Sebuah angan-angan besar kini jadi kenyataan ... BUMI SERPONG DAMAI. Kota masa depan, yang mudah dicapai dari Jakarta. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan abad 21 yang dapat Anda nikmati, sekarang!

Sebuah kota yang penuh dinamika namun dibangun terpadu dan ditata serasi dengan alam. Seluruh kawasan di dalamnya akan tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan yang memenuhi kepentingan seluruh warganya untuk bermukim, berkarya dan berkrida. Sarana dan prasarananya lengkap, ditata secara profesional. Perumahan tipe Griya (tipe 21/60 hingga 45/160), Graha (tipe 54/180 hingga 256/600), Puri, pertokoan, perkantoran, kawasan olahraga dan rekreasi maupun industri ... menjamin kenyamanan warganya.

Di BUMI SERPONG DAMAI Anda akan membuktikan bahwa ini bukan sekadar angan-angan.

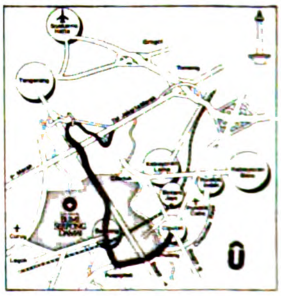

GEDUNG JAYA Lantai X, Jl. M.H. Thamrin, No. 12 Jakarta Phone 327508 ext. 314, 315 Direct 324528 - 323889
Bag Pemasaran 326653. Telex 61244 PT JAYA JKT atau Kantor Pemasaran Proyek
Anggota REI No 00.00195

Digitized by Google

Korupsi Perlu Penanganan Serius

Masalah korupsi kembali mencuat ke permukaan setelah adanya penegasan Presiden Soeharto. Dalam penegasannya Presiden mengatakan, perbuatan korupsi yang dilakukan aparat negara, pejabat negara maupun para pegawai negara bisa mengotori pemerintahan dan menghilangkan kewibawaan pemerintah.

Lebih lanjut Presiden mengatakan di depan peserta rapat koordinasi penanggulangan korupsi di Istana Negara, upaya pemberantasan tindak korupsi di republik ini, tidak boleh setengah-setengah. Sebab, pemerintahan yang kehilangan kewibawaan jelas tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Presiden wanti-wanti agar dalam upaya pemberantasan korupsi semua aparat yang berwenang supaya bekerjasama seerat-eratnya. Dilihat dari sudut mana pun, kata Presiden, tindak korupsi harus diberantas, karena bukan saja merupakan tindak pidana yang melawan hukum, tapi juga merupakan perbuatan yang melawan rasa keadilan, melawan moral, melawan kepantasan dan merusak mental bangsa. Lebih tegas lagi, Presiden mengatakan perbuatan korupsi merupakan tindak subversif.

"Secara keseluruhan, korupsi dapat menggagalkan pembangunan. Karena itu saya tidak ragu-ragu menyatakan korupsi merupakan tindak pidana subversif," tegas Prsiden.

Begitu seriusnya upaya penanggulangan bahaya korupsi, maka barubaru ini telah diselenggarakan rapat koordinasi penanggulangan korupsi yang meliputi unsur-unsur kejaksaan, Itwilprop, BPKP dan Kantor Menpan, dimana telah berakhir dengan berbagai kesimpulan diantaranya tentang mekanisme keterpaduan dalam upaya pengawasan dan pemberantasan korupsi. Bahkan Jaksa Agung, Sukarton Marmosudjono telah memerintahkan agar 264 kasus korupsi yang kini ditangani pihak kejaksaan bisa diselesaikan akhir Maret 1980.

"Ini merupakan program jangka pendek yang harus mendapatkan penanganan segera," ujarnya. Untuk itu, semua instansi terkait diharapkan memberikan bantuan dan kerjasama, sebagaimana ditegaskan Presiden.

Sebagai kelanjutan dari rapat koordinasi itu, diperlukan pula suatu keterpaduan aparat, baik aparat pengawasan maupun penegak hukum dalam memantau proyek-proyek yang rawan korupsi. Pemberantasan korupsi melalui hukum merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan agar penindakan terhadap perbuatan korupsi berakhir dengan tuntas. Tapi yang penting lagi adalah upaya pencegahan melalui langkah pengawasan dan perbaikan administrasi pemerintahan secara menyeluruh. Dengan perbaikan secara terus-menerus dilakukan di bidang organisasi, tatalaksana dan personalia, diusahakan agar perbuatan korupsi dapat dicegah secara dini.

Upaya Pemberantasan

Ada sementara pendapat mengatakan bahwa kita ini bukan bangsa maling. Tapi karena ingin berbuat baik untuk kepentingan keluarga, seseorang memilih lebih baik melakukan korupsi daripada dikutuk keluarga. Sebab, dalam jaringan keluarga seseorang yang telah mapan dan menempati posisi penting tidak boleh mengabaikan anggota keluarga lainnya.

Dalam situasi dimana korupsi itu merajalela dan dilakukan secar sistematik, akan menyebabkan masyarakat menjadi sinis dan putus asa. Perbuatan korupsi yang dilakukan aparat membuat masyarakat melihat tidak adanya sistem hukum yang memayungi mereka.

Diharapkan dengan sistem keterbukaan yang semakin berkembang akhir-akhir ini, dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan pembicaraan soal korupsi dan melakukan kontrol dengan semakin efektif.

Muncul pula pandangan dari Christianto Wibisono, seorang pengamat masalah sosial, dimana dikatakan dalam upaya pemberantasan korupsi pemerintah perlu menetapkan ketentuan baik ditujukan kepada seorang pejabat maupun calon pejabat.

Setiap calon pejabat atau pejabat, kata Chris di DPR-RI, diwajibkan mengumumkan daftar kekayaan sebelum menjabat. Menurut dia, ini penting sebagai langkah awal dari perwujudan tekad pemerintah memberantas korupsi.

Melalui mekanisme pembeberan daftar kekayaan, seperti pemilikan saham, berapa jumlahnya, akan dapat dideteksi apakah seseorang pejabat negara menerima upeti atau tidak selama menjalankan tugasnya. Wajib melapor daftar tersebut ternyata cukup efektif untuk memantau apakah seseorang itu menyeleweng atau tidak, dan cara ini sudah dipraktekkan di Jepang.

Tidak Mentok

Masih dalam kaitan upaya pemberantasan korupsi, kader GOLKAR di Fraksi Karya DPR-RI, BP Messakh mengemukakan pendapatnya sekitar penanganan korupsi sebagaimana dikutip media harian di Jakarta. Tindak korupsi menurut dia tidak dapat diberantas bila dalam penanganannya masih menggunakan cara-cara lama.

Dengan adanya pencanangan perang terhadap tindak korupsi, baik yang datangnya dari Presiden, Wakil Presiden maupun Jaksa Agung, perlu adanya tindakan tegas dan tidak sekedar gertak kosong atau slogan kosong. Tindakan itu perlu segera diwujudkan karena dia sependapat bahwa korupsi bisa mengotori dan menghilangkan wibawa pemerintah.

Namun dia mengingatkan tindakan terhadap koruptor tidak sekedar diberhentikan atau diperintahkan mengembalikan uang hasil manipulasi kepada negara. Sebab, katanya, kalau hanya sekedar disuruh mengembalikan uang hasil korupsinya, pada saatnya dia akan mengulangi perbuatannya. "Kalau ketahuan toh hanya disuruh mengembalikan hasil korupsinya," ujarnya.

Messakh cenderung sependapat kalau dilakukan pembuktian terbalik, seperti dimungkinkan oleh Undang-undang Anti Korupsi. Disamping itu, tidak hanya tersangka koruptor yang ditindak tapi juga orang-orang lain yang ikut membantu atau memberi kesempatan orang lain untuk korupsi.

Pernyataan tegas dilontarkan oleh Mendagri Rudini, khususnya menyangkut upaya pemberantasan tindak korupsi. Dalam upaya memberantas penyelewengan di lingkungan Depdagri, tidak pernah mengenal istilah mentok.

Digitized by Google

Apa yang dikemukakan Mendagri disertai bukti tindakan nyata berupa tindakan pemberhentian dan keharusan mengembalikan uang hasil manipulasi kepada negara, dipercepat pensiun tidak atas permintaan sendiri, dipecat atau dibawa ke pengadilan.

Sementara itu, Menko Polkam Sudomo di depan peserta Sespa Depdikbud, di Sawangan Bogor, mengemukakan bahwa korupsi salah satu unsur yang dapat menghambat adanya disiplin nasional. Bahkan disebutkan, masalah mendasar yang merupakan petunjuk adanya erosi disiplin nasional adalah menyangkut birokrasi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan dan korupsi.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Sudomo mengemukakan tujuh langkah pemecahan, yaitu mengisi kebutuhan fisik minimum; melaksanakan sistem manajemen yang efisien dan efektif; mengadakan peraturan yang comprehensif integrated; tindakan tegas represif; pembinaan motivasi, mental ideologis; menerapkan open management dalam pengertian terbuka dalam kebijaksanaan dan pelayanan masyarakat serta menerapkan kepemimpinan tatap muka.

Masalah tersebut, menurut Sudomo, perlu mendapat perhatian yang serius dan harus ditanggulangi agar tidak dimanfaatkan sebagai isu politik nasional untuk menjatuhkan pemerintah. Selain itu, bentuk penyelewengan itu dapat menurunkan citra dan wibawa pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri serta dapat mengurangi minat luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Faktor lain, penyelewengan itu dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menyebabkan masyarakat resah dan pada gilirannya dapat mengganggu, mengancam serta menghambat pembangunan.□ NS

KOMENTAR

Kebebasan Beragama dan Perdamaian

Kebebasan adalah sebuah sikap tindak dalam menentukan dan mengambil keputusan. Kebebasan sesungguhnya merupakan hakekat hidup dan kehidupan. Sebuah elemen penting yang selalu mempengaruhi sikap tindak manusia. Dia adalah sebuah pirasa yang selalu muncul pada saat orang harus mengambil keputusan. Jauh sebelumnya, kebebasan itu turut mempengaruhi kehendak untuk menentukan pilihan.

Ketika orang dihadapkan pada pilihan-pilihan, apapun bentuknya, pirasa bebas itu muncul. Dialah yang mendorong orang untuk menentukan pilihan yang terlontar keluar sebagai sebuah keputusan. Penetapan pilihan yang dipaksakan terkadang menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan. Karena keputusan untuk memilih terpaksa dilakukan walau bertentangan dengan kata hatinya.

Tak ada kedamaian dalam diri karena keputusan bertentangan dengan kata hati. Orang lalu melihat sekelilingnya penuh curiga, karena takut akan dipaksa. Tetapi lambat laun ia lalu jadi apatis terhadap kehidupan. Orang lalu melihat kehidupan sebagai sebuah penjara, yang dilingkari terali-terali besi dan jaringan kawat berduri.

Apatisme kemudian berkembang menjadi kepasrahan yang fatalistis. Dalam situasi apatis fatalistis ini, muncul kesewenang-wenangan yang berasal dari pemilik kekuasaan. Jadilah hidup ini tertindas. Disini berawal penindasan, penjajahan serta eksploitasi manusia atas manusia.

Ketika itu kebebasan hanya sebuah kenangan monumental yang justru menimbulkan trauma bagi kehidupan orang. Kebebasan hanya sekedar sebuah mitos yang tak punya arti apa-apa lagi. Barangkali muncul bentuk lain dari kebebasan setelah ada penyesuaian dengan situasi dan kondisi nyata dalam masyarakat.

Ketiadaan kebebasan pada gilirannya menimbulkan ketidak damaian, sekalipun pada diri sendiri. Muncul ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan bahkan secara ekstrim mengakibatkan munculnya pemberontakan. Orang berontak menuntut kebebasan, kemerdekaan dari ketertindasan jasmani maupun rohani.

Sri Paus Johanes Paulus II dalam khotbahnya pada pelayanan Misa Ekaristi di Stadion Senayan tanggal 9 Oktober 1989 lalu, mengatakan, "kebebasan beragama menjamin perdamaian dan memungkinkan semua orang untuk melayani dan berbuat baik bagi sesamanya. Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip itu kedalam etos nasional yaitu Pancasila". Paus juga secara khusus kepada umat Islam di Indonesia mengatakan, "Kepada semua saudara dan saudari kita yang beragama Islam, yang amat besar jumlahnya di negeri ini, saya mengulurkan tangan persahabatan yang tulus dan sepenuh hati dalam kepercayaan kita bersama akan Allah Yang Maha Esa".

Dua hal penting yang secara eksplisit terungkap dari ucapan Paus itu adalah: Pengakuannya terhadap Pancasila sekaligus pengakuannya terhadap kemajemukan bangsa Indonesia. Pengakuan Paus itu dijabarkan secara lebih dalam dengan mengutip ucapan Kristus: "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah".

"Dalam arti tertentu, kata Paus, sikap resmi Indonesia menghormati agama mencerminkan kebenaran ucapan Kristus dalam Injil itu. Indonesia telah berusaha memajukan kesejahteraan sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tumpuan pembangunannya dengan memberi kepada masyarakat barang apa yang wajib diberikan.

Serentak pula semua orang didorong supaya memberi kepada Allah barang apa yang wajib diberikan kepadaNya dengan mengakui bahwa hak menghayati dan mengamalkan agama seseorang, bersumber asal langsung dari martabat pribadi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.

Pengertian ini menjamin perdamaian serta kerjasama diantara para penganut berbagai tradisi keagamaan dan memungkinkan semua orang melibatkan diri secara aktif dalam melayani kebaikan bersama," kata Sri Paus Yohanes Paulus II dalam khotbahnya itu.

Khotbah ini menunjukkan bahwa Paus sesungguhnya mengakui serta memahami betul arti dan makna Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Dia tidak melihat adanya pengekangan kebebasan beragama serta tidak pula adanya dominasi golongan tertentu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya dengan penuh keyakinan, Paus percaya kebebasan beragama di Indonesia memang dijamin. Karenanya ada kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.□

Digitized by Google

Akhir Sebuah Kepedihan

Seandainya jenazah mantan Presiden Filipina Ferdinand Edralin Marcos diperkenankan dibawa pulang ke negaranya, apa yang bakal terjadi? Sulit memang untuk menjawab. Bisa jadi peristiwa empat tahun lalu terulang kembali, di mana negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ini terjadi gejolak. Tapi bisa juga tidak terjadi apa-apa.

Seandainya, jenazah mantan Presiden Filipina Ferdinand Edralin Marcos diperkenankan dibawa pulang ke negaranya, apa yang bakal terjadi?. Sulit memang untuk menjawab. Bisa jadi peristiwa empat tahun lalu terulang kembali, dimana negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ini terjadi gejolak. Tapi bisa juga tidak terjadi apa-apa.

Jauh-jauh hari, saat sang diktator ini dalam keadaan sakit dipengasingan, Presiden penggantinya, Ny Corazon Aquino (Cory) pagi-pagi telah memberi isyarat tidak akan memperbolehkan mantan Presiden yang juga telah menjadi seteru itu dibawa pulang dan dikubur di negaranya. Pekan terakhir September lalu, Presiden wanita yang suka memakai baju kuning sebagai lambang perdamaian itu kembali mempertegas ucapannya setelah diketahui Marcos meninggal dunia.

Menyedihkan memang nasib mantan Presiden Marcos yang pernah duduk di kursi kepresidenan Filipina selama 20 tahun. Setelah hengkang dari kursi kepresidenan akibat revolusi damai yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, kemudian melarikan diri ke Honolulu, sakit yang sudah lama diidapnya semakin bertambah parah.

Dalam keadaan demikian, tudingan memperkaya diri sendiri semasa Marcos mengendalikan pemerintah selama 20 tahun tidak henti-hentinya menimpanya. Pemerintah Filipina yang presidennya dijabat oleh Cory ini, menuduh Marcos melakukan korupsi dan membawa uang rakyat. Pemerintah Cory menuntut agar Marcos mengembalikan uang dari hasil korupsi pada negara.

Tampaknya, tudingan terhadap kesalahan Marcos tidak berhenti di situ saja. Pemerintah Amerika Serikat, yang dulunya erat bergandengan tangan dengan mantan presiden ini, setelah Marcos terguling juga ikut-ikutan menambah beban penderitaan Marcos. Belakangan, Marcos - Imelda oleh pemerintah AS diajukan ke pengadilan atas dakwaan melakukan korupsi. Seperti diketahui, lewat pengadilan itu, dikabarkan pasangan itu terbukti mempunyai harta kekayaan di negara Paman Sam berupa perumahan di New York City, rumah mewah di Beverly Hill dan lukisan para master dunia seperti Picasso dan Van Gogh.

Marcos semasa menjadi Presiden

Mantan Presiden Filipina dan istrinya Imelda, di muka pengadilan membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya — Dalam sidang tersebut Marcos tidak hadir karena alasan kesehatannya. Dalam sidang yang mendapat perhatian kalangan masyarakat Amerika sendiri, menjadikan Imelda gusar, karena hampir saja tidak dapat kembali ke Honolulu. Namun, berkat jasa baik raja tembakau yang bernama Doris, dengan memberikan uang jaminan US$ 5 juta, akhirnya Imelda dapat pulang kembali ke tempat pengasingannya, yaitu Honolulu.

Kisah sedih yang panjang di pengasingan, berlanjut pula sampai Marcos meninggal dunia. Jenazahnya tidak diperkenankan dibawa pulang Presiden Cory. Namun, belakangan keputusan ini mulai melunak. Cory akhirnya menyerahkan masalah itu kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian, Cory tetap berusaha agar jenazah mantan Presiden ini tidak dibawa pulang ke negaranya. Alasan yang dikemukakan Cory, bila jenazah itu dibawa pulang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Keputusan yang diambil Cory, mendapat tanggapan luas di kalangan masyarakat Filipina, terutama para pendukung Marcos dan tokoh-tokoh oposisi seperti Artura Tolentino, calon wakil Presiden bersama Marcos yang dalam kampanye pemilihan Presiden tahun 1986, berhadapan dengan pasangan Ny Corazon Aquiono dan Salvador Laurel. Terhadap sikap Cory, Toletino menawarkan alternatif agar jenasah mantan presiden Filipina itu dapat dibawa pulang dan didaratkan di bandara Internasional Laoag, Ibukota propinsi Ilocos Norte, dimana Marcos berasal.

Selain itu, para pendukung Marcos juga mengancam akan menggerakkan massa sebanyak 5 juta orang, bila

Digitized by Google

Jenazah Marcos dalam pengasingan

petisi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung agar jenazah Mantan Presiden Filipina itu bisa dibawa pulang ke negaranya, ditolak.

Selain itu desakan juga datang dari tokoh oposisi lainnya. Misalnya Wakil Presiden Salvador Laurel, dan Juan Ponce Enrile. Seperti diketahui, meskipun Salvador kini menjadi wakil Presiden, namun perbedaan pendapat di antara dua tokoh ini banyak. Perselisihan antara Ny Corazon Aquino dan Laurel terlihat ketika sedang menghadapi Pemilihan Presiden untuk menandingi Marcos dan Arturo Tolentino.

Pada waktu itu, kedua tokoh ini sempat terpecah dalam menghadapi lawan saingannya, yaitu Marcos dan Tolentino. Namun, berkat peranan Kardinal Sin, tokoh agama yang berpengaruh di negara tersebut, menjadikan dua tokoh tersebut dapat bersatu kembali. Namun, dalam perjalanannya perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut sering terjadi. Laurel, yang juga mempunyai ambisi menduduki tempat paling terhormat kemudian menyeberang menjadi tokoh oposisi bersama Juan Ponce Enrile yang juga bekas Menteri Pertahanan. Bersama-sama Fidel Ramos, Juan Ponce Enrile ikut menyumbangkan dan ikut mempunyai peranan besar dalam proses penumbangan Ferdinand Endralin Marcos, sebagai tokoh oposisi.

Sementara Imelda Marcos, istri mantan Presiden ini mengecam keputusan yang diambil Presiden Ny Corazon Aquino, dianggap sangat kejam.

Walaupun demikian, langkah yang diambil Cory ini telah mendapat dukungan dari Departemen Penerbangan Federal AS. Dukungan itu diberikan dalam bentuk tidak memperbolehkan semua pesawat AS mengangkut peti jenazah Marcos.□ BM

Direksi & Segenap Karyawan

DMK **P.T. DHISA MANUNGGAL KARYA**

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

U S A H A :

PERDAGANGAN JASA

1. Jasa Biro Tehnik Umum, Perencana, Pelaksana Pembangunan, Real Estate, Pengangkutan Barang, Instalatir.

PERDAGANGAN UMUM

2. Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Bahan Bangunan, Alat Tehnik, Listrik elektronika, Mebelair.

Mengucapkan :

Selamat Hari Ulang Tahun
Golongan Karya Ke-25
Tanggal 20 Oktober 1989

Soendoro
Direktur Utama

Digitized by Google

Oleh: Suwachman

Eksodus Warga Jertim, Akibat Kekakuan Politik

Ketika puluhan ribu tentara Jerman Timur dan Soviet membangun pagar Berlin (waktu itu belum tembok) tahun 1961, tak pernah terpikirkan oleh para petinggi negeri sosialis itu bahwa gelombang pelarian warganya tak hanya dari Berlin Timur ke Berlin Barat atau dari wilayah Jertim ke Jerbar.

Kini apa yang dulu tak pernah terpikirkan, ternyata menjadi kenyataan. Sejak awal September, ribuan warga Jerman Timur, menyeberang ke Jerman Barat melalui negara ke tiga yang juga negara-negara sosialis, yaitu Cekoslovakia dan Hongaria. Hijrah besar-besaran yang semula sangat menampar pemerintah Erich Honecker itu, akhirnya dibenarkan Pemerintah Berlin. Hal ini merupakan hasil lobby tingkat tinggi antara para petinggi kedua Jerman plus desakan Moskow kepada pemerintah Jertim. Hanya, syarat-syaratnya: perjalanan ke Jerbar dari negara ke tiga itu harus melewati kawasan Jertim. Tujuannya, memberikan cap bahwa mereka yang hijrah itu adalah warga yang diusir pemerintahnya, sekaligus menyelamatkan muka negara ke tiga tempat mereka pertama kali berdatangan.

Sejak itu, hanya dalam waktu sebulan gelombang eksodus yang melibatkan puluhan ribu warga Jertim terus terjadi. Apakah sebenarnya yang mereka cari, dan kenapa terjadi penyeberangan hingga eksodus besar-besaran belakangan ini? Yang jelas mereka tidak mendambakan pendapatan yang lebih besar. Karena pendapatan per kapita mereka tak banyak selisihnya dengan penduduk Jerbar, bahkan negeri itu GNP-nya tercatat paling tinggi di antara negara-negara sosialis Eropa Timur. Yang mereka cari adalah kebebasan, hak yang paling mendasar bagi warga sebuah negara berdaulat.

Era Keterbukaan

Pelarian dari Timur ke Barat dari warga bangsa yang terpecah karena ideologi ini, sebenarnya memang bukan hal baru. Karena telah terjadi sejak sebelum tembok pembatas kota Berlin didirikan dan sebelum penga-

Menyeberang ke Jerman Barat

wasan di perbatasan diperketat. Tepatnya, mulai terjadi sejak bangsa itu terpisah ke dalam dua negara pada tahun 1949.

Perpecahan politis berkelanjutan dari bangsa yang merasa paling unggul dan nyaris menguasai seluruh Eropa ini ternyata tak mampu meluntukan perasaan mereka yang merasa masih sebangsa. Dorongan perasaan bahwa Jerman Timur hanyalah sebuah negara, tetapi bukan suatu bangsa, menyebabkan mereka merasa pindah ke Jerman tak ubahnya pulang kampung sendiri.

Motivasi ini serasa mendapat angin segar ketika gelombang kebebasan mulai melanda negara-negara sosialis. Tengoklah misalnya, liberalisasi ekonomi yang sudah lama mewarnai negara-negara Eropa Timur menular ke RRC di bawah Deng Xiao Ping. *Glasnost* dan *perestroika* dikumandangkan dedengkotnya negara sosialis, Uni Soviet, di bawah Mikhail Gorbachev.

Lebih nyata lagi adalah yang terjadi di Polandia, usai kemenangan organisasi buruh merdeka Solidaritas melalui perjuangan panjang. Jenderal Jaruzelski bisa menerima kenyataan dengan terbentuknya pemerintahan nonkomunis di negara anggota Pakta Warsawa itu. Kemudian disusul Hongaria, negara sekutunya yang selama ini perekonomian dan gaya hidup rakyatnya sudah tak beda dengan negara Eropa Barat. Bangsa ini dengan berani membubarkan Partai Komunis yang berkuasa (di sini disebut Partai Buruh Sosialis). Para fungsionaris partai ini kemudian membentuk partai baru. Partai Sosialis gaya barat. Baik di Uni Soviet, Polandia maupun Hongaria, semakin ada pilihan. Karena rakyat tak lagi dihadapkan pada partai tunggal yang menguasai negara.

Yang nampak belum tergoyahkan oleh gelombang pembaharuan ini adalah Bulgaria, Cekoslovakia, Rumania dan Jerman Timur. Di kedua negara pertama sudah banyak kelompok independen yang sangat berani menyuarakan keterbukaan. Rumania dan Jertim termasuk paling konservatif. Rumania yang dulu dianggap agak jauh dari sekutu-sekutunya di Pakta Warsawa dan lebih dekat ke Beijing, agaknya menjalankan garis keras a la Deng. Sedang Jertim lebih melihat pada para petinggi konservatif di Moskow yang kebanyakan juga menentang langkah-langkah Gorby.

Era keterbukaan di mana-mana, plus kekolotan yang menyelimuti pemerintahan Berlin dengan kekuasaan sentral dan Stalinismenya, semakin mendorong generasi muda Jerman Timur untuk mengupayakan kebebasan atau *Freiheit*. Kebebasan bersikap, kebebasan memilih dan kebebasan berbicara. Dorongan inilah yang melebihi segalanya.

Kehidupan Sosial

Agar diperoleh gambaran, betapa tuntutan kebebasan lebih dominan ketimbang yang lain, marilah kita simak kehidupan sosial warga Jerman Timur. Pendapatan per kapita mencatat 6.500 dollar AS per tahun, suatu jumlah yang tak beda jauh dengan Jerman Ba-

Digitized by Google

rat. Untuk ukuran Eropa Timur jumlah itu memang besar, meski dibanding negara-negara Blok Barat jumlah itu yang sedang saja.

Dengan GNP yang cukup besar, warga Jertim bisa menikmati kehidupan sosial yang tak jauh dari saudara-saudaranya di Barat. Hanya kelebihan pendapatan mereka itu tak bisa dinikmati secara materi seperti warga Jerbar. Pasalnya, sistim sosialis yang tidak memungkinkan investasi swasta dan modal asing membuat perkembangan industri negeri itu relatif lamban.

Barang-barang impor maupun produk-produk terbaru di negara Barat tak mungkin didatangkan, apalagi dibuat di dalam negeri. Baru belakangan dengan lisensi khusus sederet produk mulai diproduksi oleh perusahaan *joint venture* asing dan BUMN. Namun langkah-langkah ini nampaknya sudah ketinggalan kereta" karena dari kubu negara sekutu mereka sendiri sudah bertiup angin keterbukaan.

Bagi golongan muda, mungkin gaya hidup di negara Barat sedikit banyak juga menggelitik keinginan mereka untuk bereksodus. Kalau kita ke Berlin Barat, misalnya, akan terasa kekakuan hidup mereka. Meski mereka tidak miskin, unggul di bidang olahraga dan mampu berwisata ke luar negeri, namun itu pun sebatas negara-negara sosialis. Turis asing boleh masuk ke Berlin Timur, tetapi warga Jerbar tidak. Demikian pula sebaliknya, hanya mereka yang berkunjung ke sanak familinya diperbolehkan, namun dengan pengawasan yang cukup ketat. Penerbitan-penerbitan Barat, terutama media massa, tidak boleh dibawa wisatawan asing yang berkunjung ke Berlin Timur. Suatu larangan yang sebenarnya tak perlu, sebab warga Berlin Timur dengan mudah bisa menangkap siaran televisi stasiun-stasiun di Berlin Barat.

Mata uang ke dua negara adalah Mark Jerman (DM). Meski sama, namun Mark buatan Jerman Barat di mata warga Jertim mempunyai nilai lebih. Terbukti misalnya, kita makan di restoran habis 20 Mark. Kalau kita tanya pelayan restoran, pilih mana dibayar dengan Mark Jertim atau Jerbar, maka mereka akan memilih yang terakhir. Kendati sama-sama bertuliskan nominal 20 Mark, tetapi di mata mereka buatan Jerbar ada nilai lebih.

Kehidupan warga kota Berlin Timur dan kawasan Jertim sekeliling Berlin sangat ditunjang oleh perdagangan dengan Berlin Barat. Barang-barang konsumsi, seperti gula pasir, hasil-hasil bumi dan bahan pangan lainnya tak sedikit dipasok oleh Jertim. Sangat besar devisa yang mereka peroleh, meski Berlin Barat sendiri harus disubsidi Bonn untuk itu semua. Barangkali ini terus dilakukan, agar ada keselarasan dengan lingkungan, disamping tentunya untuk mempertahankan *gemebyarnya* pola kehidupan Barat yang berada di tengah-tengah kawasan Timur itu.

Pemerintah Bonn sendiri melalui berbagai program keringanan dan subsidi, setiap tahunnya membantu lebih dari 1,5 milyar dollar AS. Jumlah yang tidak kecil, yang hanya mungkin diberikan pemerintah Boon karena warga Jertim masih sebangsa.

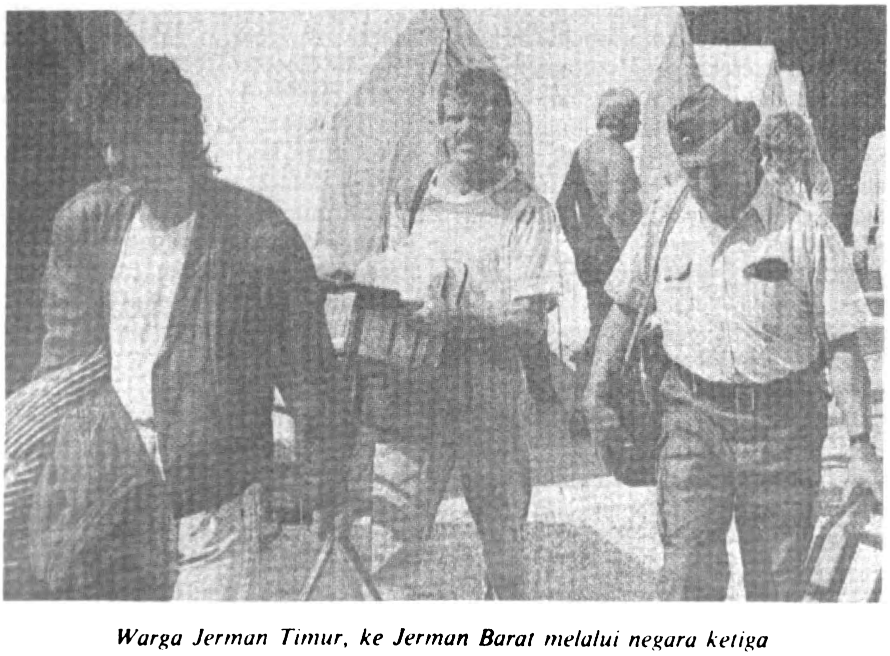

Warga Jerman Timur, ke Jerman Barat melalui negara ketiga

Tak Bergeming

Semua itu menyebabkan Jertim paling menonjol perkembangan perekonomiannya dibanding negara-negara Blok Timur lainnya. Tapi di bidang politik sebaliknya, mereka terlalu jauh ketinggalan. Penyebabnya tak lain adalah kekakuan kebijakan yang dijalankan Honecker.

Gema *glasnost* dan *perestroika* maupun perkembangan di negara-negara tetangganya tak membuatnya bergeming untuk lebih menyesuaikan dengan situasi. Apa pun yang terjadi diusahakan untuk dibungkam, agar tidak bergaung ke luar dan menular di dalam negeri. Tetapi segala langkah yang melawan arus keterbukaan agaknya bakal sia-sia saja untuk dipertahankan. Dan hasilnya mulai terbilang, ribuan warganya *hengkang* ke Jerbar. Lebih menyakitkan, mereka lari melewati negara ke tiga yang juga negara sosialis anggota Pakta Warsawa!

Untung pemimpin Jerbar Kanselir Helmut Kohl, cepat tanggap. Tak tanggung-tanggung ia melobi Mikhail Gorbachev. Dan melalui Menlu Soviet Eduard Shevardnadze, Berlin dibujuk untuk memperlunak sikapnya. Dari langkah inilah akhirnya terjadi "eksodus resmi" hingga dalam tempo sebulan saja hampir 30 ribu warga Jertim menyeberang ke Barat.

Kendati apa pun cap yang mereka terima dari pemerintahnya, upaya mereka tidaklah sia-sia. Kebebasan dalam arti kata seluas-luasnya akan segera mereka rasakan jika mereka telah diterima menjadi warga Jerbar. Namun apakah terpikirkan di benak mereka, bahwa hidup di negara yang teramat bebas justru tantangannya mungkin lebih berat ketimbang yang mereka hadapi di negerinya dulu? Karena tak seorang pun kini mengatur mereka. Jika ingin tetap *survive*, mereka harus berjuang lebih keras untuk hidup. Kalau tidak, maka hanya kemelaratan yang akan mereka hadapi. Sebab di negara Barat, tingkat pengangguran dan kriminalitas cenderung naik terus, suatu hal yang memusingkan para petinggi negara-negara Barat.

Namun bagaimanapun, mereka telah membukakan mata dunia. Bahwa benteng apapun yang memisahkan suatu bangsa yang bertekad mandiri, tak akan mampu mengekang keinginan mereka untuk bersatu dalam kebebasan dan keterbukaan! □

Digitized by Google

Oleh: Emil Salim

Kader Golkar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Emil Salim

Apabila semula lingkungan hidup merupakan masalah yang memprihatinkan terutama para ilmuwan, maka mulai sekarang para politisi dan pembuat kebijakan ikut bergelut dengan masalah lingkungan. Hal ini kentara dalam Konperensi Tingkat Tinggi negara maju, Juli 1989 di Paris dan Konperensi Tingkat Tinggi negara berkembang, September 1989 di Beograd, mengapa lingkungan masuk agenda politik dunia? :

Pertama, pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di banyak negara. Serentak dengan ini tumbuh semakin menonjol dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Dan kerusakan lingkungan seperti punahnya species dan jebolnya lapisan ozon menjadi permanen, tidak terrehabilitasi kembali. Dan ini mencemaskan orang.

Kedua, kesejahteraan masyarakat itu sendiri mencuarkan kegandrungan pada lingkungan hidup sebagai bagian dari hasrat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Orang tidak hidup dari pangan semata-mata. Orang mendambakan lingkungan hidup yang lebih asri.

Ketiga,lingkungan hidup juga tumbuh, sebagai issue moralitas sosial. Wawasan kehidupan mencakup solidaritas antar-generasi. Generasi muda masa kini menuntut agar generasi tua tidak mewariskan lingkungan yang rusak dan tidak menghabiskan sumber alam untuk kesejahteraan generasi masa sekarang tanpa meninggalkan sumber alam yang cukup bagi peningkatan kesejahteraan generasi masa depan.

Ke-empat, kerusakan lingkungan mencakup sumber alam yang tidak dimiliki negara nasional manapun tetapi berdampak besar terhadap kehidupan negara nasional, seperti halnya dengan udara, lautan, fauna ikan dan burung, dan yang serupa. Pemecahannya memerlukan kerjasama internasional dan pendekatan yang tidak mengenai batas-batas politik dan kedaulatan;

Kelima, masalah lingkungan menyentuh dan menjadi keprihatinan semua orang tanpa perbedaan politik, agama atau tingkat pendapatan. Lingkungan menjadi issue yang menarik terutama bagi kaum muda dan wanita yang langsung terkena dampaknya yang negatif. Karena itu maka penanggulangan lingkungan menjadi program yang menarik pendukung politik, terutama bagi Indonesia yang banyak kaum muda dan wanitanya.

Perkembangan lingkungan hidup sebagai issue politik di dunia juga bergema di tanah-air kita. Juga di Indonesia lambat tapi pasti masalah lingkungan hidup berkembang dari masalah dan keprihatinan kaum ilmuwan menjadi issue kaum politisi.

Faktor penduduk yang senantiasa meningkat dari 178 juta (1988) menuju 212 juta (2000) dan berhenti tumbuh ke 300 juta pada pertengahan abad ke 21 menjadi penyebab utama timbulnya tantangan lingkungan. Ini diperkuat oleh proses pembangunan itu sendiri yang mengolah sumber alam dan menaikkan pendapatan yang meningkatkan tingkat konsumsi dan mendorong penggunaan sumber alam yang lebih banyak.

Menyadari bahwa tantangan lingkungan bergandengan dengan faktor kependudukan dan ikhtiar peningkatan pendapatan, maka akhir-akhir ini tumbuh kebutuhan untuk mengembangkan pola pembangunan berkelanjutan atau "sustainable development". Pembangunan yang mengolah sumber daya alam bisa berlanjut, apabila berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memuat pokok-pokok:

(1) mengolah sumber daya alam yang bisa diperbaharui, seperti air, tanah dan hutan, dengan mengindahkan keberlanjutan fungsi sumber daya alam ini mengkonservasikan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui melalui penggunaannya yang efisien dan perencanaan yang cermat. Keanekaragaman hayati dipelihara melalui ikhtiar pengelolaan hutan secara bijaksana;

(2) mengelola pembangunan dengan memperkecil dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, berupa pelepasan bahan cemar ke lingkungan dan perobahan tatanan lingkungan yang mematikan fungsi lingkungan. Dalam kaitan ini sangat penting usaha pengendalian limbah, sampah dan buangan, terutama limbah berbahaya dan beracun, terutama dalam media lingkungan seperti sungai, air, tanah, lautan, udara dan yang serupa.

Dengan pola pembangunan ini maka pembangunan berlangsung tanpa mematahkan fungsi tatanan lingkungan. Dalam kaitan ini diperlukan pengembangan ilmu ekonomi lingkungan yang mendukung pola kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Kerusakan lingkungan harus dibayar oleh perusak lingkungan (polluters pay principle), maka biaya dan

Digitized by Google

manfaat ekonomi perlu menurut pertimbangan lingkungan ini. Dan berbagai rangsangan serta pungutan (incentive dan disincentive) dikembangkan untuk mendorong proses pembangunan ke jurusan wawasan lingkungan. Dalam ruang lingkup ini diharap tumbuh "teknologi yang bersih" (clean technology), yakni teknologi yang memberi dampak negatif sekecil-kecilnya dan dampak positif sebesar-besarnya terhadap lingkungan.

Dengan mengindahkan semua ini maka lahirlah skala prioritas masalah lingkungan dan arah penanggulangannya sebagai berikut:

A. Masalah Nasional

1. **Kependudukan** —dengan arahan mengusahakan keseimbangan antara penduduk dan kapasitas lingkungan untuk dapat menopang berkelanjutan pembangunan. Dalam kaitan ini pengembangan kualitas penduduk menjadi penting;

2. **Pangan dan Pertanian** — dengan arahan mengusahakan sekuriti pangan tanpa penciutan (depletion) sumber alam dan tanpa kerusakan lingkungan. Basis sumber alam yang rusak perlu dipulihkan;

3. **Energi** — dengan arahan mengembangkan energi dengan biaya yang efisien menanggapi kebutuhan energi yang rasional, melalui ikhtiar yang memperkecil degradasi lingkungan dan resiko, mengkonservasi sumber daya energi yang tak bisa diperbaharui dan mengembangkan pemanfaatan penuh dan sumber daya energi yang bisa diperbaharui;

4. **Industri** — dengan arahan meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan industri yang mengindahkan keberlanjutan fungsi tatanan lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positif pembangunan industri terhadap lingkungan;

5. **Kesehatan dan Pemukiman** — dengan arahan mengembangkan pemukiman sehat dengan fasilitas pokok yang memungkinkan lingkungan yang sehat dan bersih sehingga mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan yang kumuh

6. **Tata-ruang** — dengan arahan mengelola sumber daya alam dengan mengindahkan daya dukung lingkungan, sehingga zonasi lokasi kegiatan sektoral mengoftimalkan penggunaan sumber daya alam dengan dampak negatif sekecil-kecilnya dan dampak positif sebesar-besarnya dari pembangunan terhadap lingkungan.

B. Masalah Global

1. **Kerjasama Internasional** — dengan arahan mengembangkan hubungan ekonomi internasional atas dasar equity untuk mencapai pengembangan kesejahteraan secara berlanjut dengan dampak negatif yang sekecil-kecilnya dan dampak positif sebesar-besarnya pada kelangsungan berfungsinya sistem penunjang kehidupan (life supporting system) global. Kebersamaan tatanan lingkungan secara regional mendorong diusahakannya kerjasama regional dan sub regional;

2. **Lautan berikut isinya** — dengan arahan mengelola sumber daya alam lautan, termasuk pesisir, terumbu karang dan sumber alam hayati, agar memberi kesejahteraan bagi sebesar mungkin masyarakat secara berlanjut, tanpa kerusakan lingkungan. Untuk ini perlu dikembangkan kerjasama internasional, konversi dan kesepakatan antar negara;

3. **Udara dan angkasa** — dengan arahan mengembangkan penggunaan angkasa untuk kesejahteraan dan mengambil langkah-langkah bersama mengendalikan pencemaran udara dan proses naiknya suhu bumi: Dalam hubungan ini maka pengelolaan hutan tropis di tanah air dilaksanakan dengan mengindahkan peranan global yang terkandung dalam hutan tropis ini.

4. **Keaneka ragaman hayati** — dengan arahan agar dikonservasikan seluas mungkin, wilayah eco-system, jenis species dan bermacam-plasma-nutfah (genche Naoman) untuk bahan masukkan bagi obat-obatan, industri dan kosmetik. Kerjasama internasional perlu dikembangkan mengalihkan skill dan teknologi bagi pengembangan sumber dalam hayati.

Kesepuluh tantangan lingkungan ini perlu ditanggapi oleh semua orang mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan.

Kesepuluh tantangan ini memerlukan peraturan perundangan yang menunjang tatalaksana pola pembangunan berkelanjutan. Ia perlukan dukungan pendidikan, penyuluhan dan penerapan hasil-hasil penelitian.

Kesepuluh tantangan ini memerlukan gerakan masyarakat untuk menanggapinya. Karena itulah tumbuh secara spontan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang giat menanggulangi masalah lingkungan.

Dalam ikhtiar menggerakkan masyarakat, kader Golkar memegang peranan penting.

Para kader fungsional dapat menggunakan keahliannya untuk mengembangkan dimensi lingkungan di bidang keahliannya.

Para kader di lembaga perwakilan dapat mengusahakan kebijakan, peraturan dan anggaran yang mendorong kegiatan berwawasan lingkungan. Mereka bisa menjadi penyalur uneg-uneg pendapat masyarakat yang lingkungannya dirusak.

Para kader penggerak teritorial desa bisa mengamati keadaan lingkungan sebelum menjadi parah, dan mengusahakan aspirasi kepentingan masyarakat yang dirusak lingkungannya.

Masalah lingkungan sering ditimbulkan akibat perbenturan kepentingan dalam menggunakan sumber daya alam. Dalam memecahkan konflik ini, perlu dijaga agar kepentingan lingkungan jangka panjang yang dominan. Bukan kepentingan jangka pendek, tapi merusak lingkungan sehingga merugikan generasi masa depan.

Dalam hubungan ini pemahaman lingkungan menjadi penting agar bisa secara obyektif menilai masalah. Untuk ini kursus lingkungan bagi kader Golkar yang diselenggarakan secara berlanjut menjadi perlu.

Karena issue lingkungan melintasi batas-batas politik partai atau golongan, maka penting kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam program penanggulangan masalah lingkungan. Hubungan organisatoris tak perlu dijalin dengan lembaga swadaya masyarakat yang ingin mempertahankan kemandiriannya. Yang diperlukan adalah dukungan terhadap tumbuhan iklim yang memungkinkan semua orang, termasuk Golkar dan lembaga swadaya masyarakat, untuk turut berperan serta dalam menanggulangi tantangan lingkungan.

Tantangan lingkungan terlalu besar untuk ditanggapi hanya oleh satu atau beberapa kelompok. Tantangan ini menjangkau lintas generasi. Karena itu maka tantangan lingkungan harus dihadapi oleh semua, baik generasi kini maupun depan, dan mencakup semua pihak.

Kader Golkar dapat menjadi penggerak utama disini. Dan dengan begitu menjadi panutan bagi masyarakat dalam gerakan massal menanggulangi tantangan lingkungan menuju Indonesia dan dunia global ke peri-kehidupan yang asri, lestari dan manusiawi. □

Digitized by Google

Oleh: Umar Mansyur

Dengan Maulid Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Kedalaman Iman Dan Taqwa Modal Pengamalan Pancasila

Memperingati dan mengenang hari kelahiran Nabi Besar Muhammad saw - berarti kita diminta "ingat" pada diri sendiri dan ingat pada orang lain. Jarak peringatan antara diri sendiri dan orang lain —semakin tambah tahun, bukan semakin lupa— melainkan semakin dekat dan kuat dalam ingatan. Dan itulah suatu "renungan dan dialog dengan sejarah Nabi Muhammad saw."

Umar Mansyur

Dengan demikian, secara sadar dan segar kita akan melihat kembali darimana kita bisa ketemu dalam sejarah besar Nabi Muhamad saw — yang lahir di Kota Mekkah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi.

"Salam dan Shalawat kepada Nabi"

Dengan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad saw itu — kita mempunyai tekad nasional dan disiplin Nasional dalam sejarah sendiri — sejarah bangsanya.

Namun setiap kali kita mengadakan peringatan semacam ini berarti kita bangkit kembali mencari dan menemukan kesadaran baru — akan perlunya kesinambungan sejarah-sejarah kita dengan sejarah orang lain, tetapi sama-sama berada dalam panggung sejarah dunia.

Dengan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad saw itu kita temukan ajaran salam dan manfaatnya dalam hidup bersama. Wawasan salam dan shalawat — saat sekarang ini telah semakin bertambah kaya dan menambah banyak pengalaman hidup ke beragamaan kita.

Bukan saja semakin kaya dan banyak pengalaman penyampaian salam dan shalawat dalam hidup keberagamaan, melainkan kita pun semakin dituntut dalam perenungan dan berdialog dengan sejarah Nabi Besar Muhammad saw.

Suatu sikap kearifan, kreatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tetap setia kepada iman yang diyakininya serta tetap teguh memiliki wawasan sejarah — dalam pembangunan — dengan memelihara kesinambungan sejarah yang utuh antara masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang.

Tiga peristiwa penting

Dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw yang berbahagia ini, dicoba mengamati keterkaitan tiga peristiwa penting dalam sejarah Nabi Muhammad saw. Tiga peristiwa itu ialah:

Pertama: Hari lahirnya pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi.

Kedua: Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal (tanggal 24 September 622 Masehi).

Ketiga: Hari wafatnya Rasulullah saw pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriyah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi.

Dalam pada itu, dari sudut pendekatan puncak-puncak kenabian (kewahyuan) dapat juga diketemukan tiga peristiwa penting, yaitu:

Turunnya ayat pertama yang lazimnya dikatakan Nuzulul Qur'an pada tanggal 17 Ramadhan;

Peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad saw pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, dan peristiwa turunnya wahyu atau ayat terakhir pada hari kesempurnaan Islam sebagaimana Islam yang utuh, terjadi pada masa haji wada' — haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad saw.

Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw dengan mengambil acuan peristiwa-peristiwa sejarah Nabi Muhammad saw seperti yang kita lakukan sekarang ini dapat kiranya dapat kita letakkan hikmah peringatan Maulid dalam pemantapan kerangka landasan dalam kehidupan keagamaan seperti yang diamanatkan Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1989, sebagai berikut:

"Pemantapan kerangka landasan dalam kehidupan keagamaan juga memerlukan perhatian kita semua. Dibanyak negara yang sedang membangun kita lihat bahwa masalah keagamaan sering menjadi sumber bagi hambatan dan gangguan dalam pembangunan menuju tinggal landas.

Kita di Indonesia yang memiliki Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, menempatkan rasa keagamaan kita sebagai sumber kekuatan dalam upaya kita untuk menyukseskan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Dibidang Kehidupan keagamaan ini kerukunan hidup antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, ialah tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual bagi pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, seperti yang telah kita tegaskan dalam GBHN 1988. Untuk melaksanakan tanggungjawab bersama itu, di tahun-tahun yang akan datang, para pemikir dan pemuka dari semua golongan agama akan mengembangkan pemikiran yang kreatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tetap setia kepada iman yang mereka yakini masing-masing".

Kelahiran hingga kerasulannya

Nabi Besar Muhammad lahir sebagaimana anak manusia menurut

Digitized by Google

Memperingati hari kelahiran Nabi

kodratnya. Kodrat kelahiran anak manusia, secara ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu kedokteran, khususnya bidang reproduksi manusia, pernah diungkapkan oleh Prof. Dr.H.M. Yusuf Hanafiah Rektor Universitas Sumatera Utara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad saw di Istana Negara Jakarta tanggal 3 Nopember 1987 dengan suatu kesimpulan penemuan menguatkan kebenaran prinsip-prinsip faal reproduksi manusia yang terpadat dalam Al-Qur'an.

Faal reproduksi manusia dalam Al-Qur'an tersebut dalam beberapa ayat yang tersebar dengan konteksnya masing-masing dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kesimpulan:

Pertama, Manusia diciptakan dari nuthfah yang terpadu (pembuahan, fertilisasi, konsepsi); Kedua, hasil pembuahan melekat dalam rahim (nidasi, implantasi); Ketiga, Perkembangan janin di dalam kandungan adalah bertahap).

Sebagai gambaran Muhammad anak manusia yang lahir dari perkawinan yang diketemukan jodohnya Abdullah bin Abdul bin Abdul Motholib dengan seorang wanita bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra. Perkawinan Abdullah dengan Aminah sudah masuk umur ideal pasangan suami isteri. Menurut sejarah hidup Muhammad yang ditulis Muhammad Husain Haekal, umur Abdullah sudah lewat dua puluh empat tahun. Sesuai dengan adat kebiasan bangsa Arab, perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin Putri. Dan sesudah akad Nikah Abdullah dengan Aminah, Abdullah tinggal selama tiga hari di rumah Aminah.

Kemudian dari pada itu Hamillah Aminah isteri Abdullah. Ketika pada saatnya, lahirlah anak laki-laki oleh kakeknya Abdul Muthalib diberikan nama Muhammad.

Muhammad lahir di kota Mekkah pada tahun 571 Mil. Ayahnya bernama Abdullah sudah Meninggal dunia sebelum Muhammad Lahir.

Ibunya Aminah meninggal 6 tahun kemudian. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang meninggal pula dua tahun kemudian. Akhirnya Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dengan latar belakang kehidupan seperti itu, sungguh terharu dan mengagumkan, bahwa Muhammad anak yatim piatu pada usia 6 tahun, tumbuh berkembang menjadi remaja, menjadi pemuda yang berkepribadian, berwibawa, merupakan lambang kejujuran, lambang harga diri, dan tempat kepercayaan orang banyak.

Demikian pula sesudah masa kerasulannya, sejak beliau berusia 40 tahun, hidupnya penuh pengorbanan: untuk Allah s.w.t., untuk kebenaran; bahkan berkali-kali nyawanya dihadapkan pada maut. Bujukan dan rayuan masyarakat sekitarnya pada waktu itu, baik dengan harta, tahta dan godaan lainnya tidak mampu menggoyahkan imannya, tekadnya bulat memperjuangkan yang hak itu hak, dan yang bathil itu bathil.

Keluruhan hidup Muhammad saw adalah hidup manusia yang sudah begitu tinggi sejauh yang pernah dicapai ummat manusia. Hidup yang Penuh dengan teladan yang luhur dan indah bagi setiap insan yang mendapat bimbingan hati nurani, yang hendak mencapai kodrat manusia yang lebih sempurna dengan jalan iman dan taqwa dalam wujud perbuatan baik. Muhammad benar-benar teladan sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin ummat dimasa damai dan dimasa perang. Masih banyak lagi keteladanan dalam berbagai segi kehidupan. Memang Muhammad saw. diutus sebagai teladan untuk menyempurnakan akhlaq manusia sesuai firman Allah swt. dalam Surat Al-Ahzaab ayat 21: "Sungguh Rasul Allah itu menjadi teladan yang baik untuk kamu, untuk Orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari kemudian serta yang banyak mengingat Allah."

Etika Salam

Salam adalah ucapan tegur sapa bagi ummat Islam yang didalamnya mengandung do'a kesejahteraan. Mengucapkan "SALAM" kepada sesama orang Islam dan bukan Islam; hukumnya sunnat, sedang menjawabnya sangat disunatkan bahkan ada yang mengatakan wajib.

Bentuk ucapan "Salam" yang biasa

Digitized by Google

berlaku adalah: (AS SALAAMU 'ALAIKUM) yang artinya: Keselamatan semoga tetap atasmu. Namun ucapan "Salam yang sempurna adalah: (AS SALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WA BARAKAATUH) yang artinya: Keselamatan semoga tetap atas kamu dan rahmat Allah serta berkah-Nya.

Ucapan "Salam" bagi umat Islam mempunyai arti yang sangat penting. Bukan karena didalamnya mengandung do'a kesejahteraan, tetapi lebih dari itu. Dari ucapan "Salam" maka akan terlihat syi'ar Islam di mana-mana. Sedang rasa persaudaraan sesama umat Islam dimana-mana. Sedang rasa persaudaraan sesama umat Islam akan terlihat secara nyata. Itulah sebabnya mengapa ucapan "Salam" disunatkan bagi sesama umat Islam. Apalagi kalau dilihat bahwa "SALAM" adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Padahal menyebut nama-nama Allah adalah pekerjaan yang amat mulia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra, dari Nabi Muhammad saw. sesungguhnya beliau bersabda: AS SALAM adalah nama dari nama-nama Allah, maka ramaikanlah salam di antara kalian".

Mengucapkan "Salam" di kalangan Umat Islam Indonesia sudah tidak asing lagi.

"Salam "kepada sesama muslim dan bukan muslim berarti ia telah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad saw. dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Lagi pula dengan membiasakan memberi "Salam" kepada sesama, maka bertambah persaudaraannya serta dicintai oleh orang banyak dan terhindar dari permusuhan.

Faedah "Salam"

Mendapat kemuliaan dan rahmat dari Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya semulia-mulia manusia (dengan mendapat rahmat dan anugerah-Nya) disisi Allah, adalah orang yang memulai pada mereka dengan salam." (HR. Abu Dawud dari Abi Umamah).

Mendidik diri berlaku rendah hati (tawadhu'). Dalam sebuah hadis ada disebutkan: "Bersabda Rasulullah saw.: Pangkalnya rendah hati (tawadhu') ialah memulai dahulu dengan mengucap salam." (Lubaabul hal 30).

Mempererat tali persaudaraan, sebagaimana Nabi Muhammad saw. telah bersabda: "Salam itu merupakan penghormatan bagi agama kita (karena bisa menyebabkan kekalnya kasih sayang di antara sesama ahli salam) dan merupakan kesentausaan bagi kesetiaan kita (Lubaa'bul Hadist hal 31).

Firman Allah Ta'ala: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu". (S. An. Nisa 86).

Etika Shalawat Nabi

Shalawat Nabi ialah do'a sebagai penghormatan kepada Rasulullah saw. agar beliau selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah. Biasanya "Shalawat Nabi" ini dirangkai dengan salam sejahtera kepada beliau. Adapun bentuk bacaan bermacam-macam, ada yang pendek dan ada pula yang panjang. Bentuk bacaan yang sederhana namun biasa digunakan antara lain artinya demikian:

"Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad saw."

"Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada beliau dan salam sejahtera"

"Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad saw."

"Ya Allah, limpahkan rahmat kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga beliau dan berilah kesejahteraan."

"Ya Allah, limpahkan rahmat, kesejahteraan dan Berkah kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. dan Kepada segenap keluarganya."

Dan masih banyak lagi bacaan-bacaan shalawat nabi ada yang panjang, ada yang pendek, dengan kandungan etika masing-masing.

Bacaan "Shalawat" adalah bacaan yang sangat mulai. Dianjur bagi setiap orang Islam untuk selalu membacanya. Tidak perduli dalam keadaan bagaimanapun kalu memang ada kesempatan untuk membaca shalawat, maka sebaiknyalah kesempatan itu digunakan untuk membacanya. Sudah banyak dibuktikan bahwa bacaan shalawat itu betul-betul mempunyai keistimewaan tersendiri dari pada bacaan-bacaan mulia lainnya. Banyak sekali para aulia yaitu orang-orang yang mempunyai kharisma, kewibawaan dan kemuliaan derajat di sisi Allah, mereka semua itu selalu memperbanyak bacaan shalawat setiap hari. Apa yang mereka amalkan itu memang sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al Qur'an yang artinya demikian: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya semuanya membaca shalawat kepada nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu wahai orang-orang yang beriman, bacalah shalawat kepadanya dan ucapkan salam." (S. Al Ahzab 56).

Juga Rasulullah saw pun telah bersabda yang artinya demikian: "Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Orang yang paling

Umat Islam tidak henti-hentinya mengucapkan puji sukur

Digitized by Google

Sebuah hiburan memperingati Maulid Nabi

dekat kepadaku pada hari kiamat kelak ialah orang yang paling banyak membaca shalawat kepadaku." (HR. Turmudzi).

Orang yang banyak membaca shalawat kepada Rasulullah saw. berarti ia sangat mencintai beliau.

Demikian pula orang yang cinta Rasulullah saw. Ia selalu mengingatnya, sehingga setiap saat tak henti-hentinya ia ucapkan shalawat itu. Karena kecintaannya yang sangat mendalam itu, maka tak heran jika kelak pada hari kiamat ia mendapat derajat yang tinggi, dekat dengan Rasulullah saw. sebagaimana tersebut di dalam hadis di atas.

Juga di dalam hadis lain disebutkan yang artinya demikian: "Dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah ra. dia berkata: "Telah keluar kepada kami nabi Muhammad saw, maka kami berkata: "Waqhai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengerti bagaimana membaca salam kepadamu, tetapi bagaimanakah kami membaca shalawat kepadamu?"

Beliau bersabda: (Artinya: Ya Allah, limpahkan rahmat kepada nabi Muhammad dan keluarga nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada keluarga nabi Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang terpuji. Ya Allah, berilah berkah kepada nabi Muhammad dan kepada Keluarga nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada keluarga nabi Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang terpuji lagi Dzat yang Maha Agung). (Muttafaq 'alaih).

Setelah mengetahui bacaan-bacaan shalawat seperti disebutkan di atas, marilah kita amalkan sedapat mungkin. Bacalah shalawat sebanyak-banyaknya agar hidup kita ini diberkati oleh Allah, dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

Pesan-pesan dari peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad s.a.w.

Pertama, Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam senantiasa tidak henti-hentinya melalui peringatan hari-hari besar Islam memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa — dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan Pembangunan Nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila, wawasan sejarah kita dalam pembangunan semakin bertambah luas dan kaya pengalaman;

Kedua, Bangsa Indonesia, khususnya umat Islamnya sekalipun secara geografis jauh terpisah dari pusat dunia Islam menurut ukuran kenabian dan kewahyuan, namun dalam arus dan gelombang pengembangan pemikiran yang kreatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tetap setia kepada iman yang diyakininya masing-masing umat Islam di Indonesia dewasa ini hidup dalam jaman "Muslim Pancasila."

Ketiga, Bangsa Indonesia, khususnya umat Islamnya sebagai "Muslim Pancasila", setiap tiba peringatan hari besar Islam diisi dengan puji syukur serta penemuan kesadaran baru — untuk memanfaatkan suasana aman, tenteram, sejahtera dan penuh kegembiraan, untuk dapat meneguhkan kembali tekadnya dalam tekad nasional, disiplin dalam disiplin nasional, guna membawa serta masyarakat, bangsa dan negara ke arah "Indonesia Raya" mencapai tingkat kemajuan yang lebih besar menuju terwujudnya cita-cita nasional, cita-cita kemerdekaan bangsanya;

Keempat, Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, baik yang berada dalam kelompok pesantren tradisional maupun yang ada dalam kelompok modern cendekiawan, sama-sama "Muslim Pancasila" terpanggil dan akan terlibat dalam proses "aslama-yuslimu-tasliman", yaitu tiada lain kecuali sama-sama menyerahkan diri kepada Allah swt;

Kelima, Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, dengan hikmah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw. — kita sampaikan salam sejahtera dan shalawat Nabi — sebagai Etika Pembangunan moral, etik dan spiritual Islam di Indonesia.

Keenam, Bangsa Indonesia khususnya umat Islam Dalam GOLKAR, dengan mengambil hikmah Hadist Nabi Besar Muhammad saw, yang artinya demikian: "Tidak ada lagi hijrah sesudah kemenangan, tetapi yang ada ialah mempertahannya dengan teguh."

Dengan semangat Maulid Nabi Muhammad saw. kita tingkatkan iman dan taqwa kita sebagai modal rokhaniah pengalaman Pancasila.

Dan juga tidak ada lagi hijrah sesudah kemenangan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, justru yang datang ialah tugas mempertahankan dan mengkonsolidasikan kemenangan-kemenangan itu dalam arti yang lebih luas.

Ketujuh, Pujian kepada Nabi dalam bait-bait Kitab Berjanji, antara lain: Thala'al Badru 'alaina, Min Tsaniyatil Wadaa'i, Wajabsy Syukru 'alaina, Maa Da'i Lillahi Da'i, Ayyuhal Mab'utsu Fiina, Ji'ta bil Amril Mataa'i.

Artinya: "Telah terbit dihadapan kita bulan purnama, Dari lembah-lembah yang jauh nun disana, Kita diwajibkan syukur atasnya, Wahai Rasul yang berada di tengah-tengah kita, Engkau telah datang menyatu dalam semangat nyata."

*) Ceramah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Keluarga Besar GOLKAR Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Oktober 1989 di Gedung Pertemuan "TAMBUN BUNGAI", Jl. A. Yani Palangkaraya.

Digitized by Google

DEWAN PIMPINAN PUSAT
MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH
المجلس الأعلى
للدعوة الإسلامية الإندونيسية
Alamat Sekretariat : Jl. Taman Anggrek, Slipi Telp. 5484276 – 5484701 JAKARTA BARAT

Mengucapkan :

DIRGAHAYU
GOLONGAN KARYA
KE XXV

TANGGAL 20 OKTOBER 1989

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
Senantiasa Menyertai Perjuangan Golkar
Dalam Mencapai Cita-Cita Untuk mewujudkan
Pembangunan Yang Berkesinambungan

KHA. THOHIR WIDJAJA
Ketua Umum

H. MOHAMMAD HATTA
Sekretaris Jenderal

Digitized by Google

MENGUCAPKAN

Selamat Hari Ulang Tahun
Golongan Karya Ke-25
Tanggal 20 Oktober 1989

PT Enka Parahiyangan offset printing & publishing
Jl. Raya Cibubur No. 1 Telp. 870142 – 870985 Jakarta 13720

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 02070 5490
Digitized by Google

Digitized by Google